KB Bank

Laporan Tahunan

2024



Strategic Transformation for **Sustainable and Inclusive Growth**

PT Bank KB Bukopin Tbk


KB Bank

TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2024 KB BANK

Selamat datang pada Laporan Tahunan 2024 KB Bank dengan tema ***"Strategic Transformation for Sustainable and Inclusive Growth"***. Tema tersebut dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa di tahun 2024 salah satu foKus dari KB Bank adalah untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif serta untuk memastikan bahwa KB Bank terus tumbuh di masa mendatang.

Tujuan utama penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan kepada seluruh pemangku kepentingan. Laporan Tahunan KB Bank untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 ini diterbitkan sesuai dengan kondisi Perseroan sepanjang tahun 2024 dengan mengacu pada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Laporan Tahunan 2024 ini menjadi sumber dokumentasi komperehensif yang berisikan informasi kinerja Perusahaan dalam setahun. Informasi tersebut memuat dokumentasi lengkap yang menggambarkan profil Perusahaan; kinerja operasional, pemasaran dan keuangan; informasi tentang tugas, peran, serta fungsi struktural organisasi Perusahaan yang menerapkan konsep best practices dan prinsip-prinsip *corporate governance*.

Selain itu, Laporan Tahunan ini juga bertujuan untuk membangun pemahaman dan kepercayaan tentang KB Bank dengan menyediakan informasi yang tepat, seimbang, dan relevan. Para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai terkait kebijakan yang telah dan akan dilakukan serta kesuksesan pencapaian KB Bank pada 2024.

Sesuai ketentuan yang berlaku, Laporan Tahunan 2024 ini disajikan dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dengan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca dan dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan Tahunan KB Bank dapat dilihat dan diunduh di situs resmi Perseroan www.kbbank.co.id.

SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

Laporan tahunan ini memuat pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan KB Bank, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pelaksanaan Perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko, ketidakpastian, serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi KB Bank pada masa mendatang serta lingkungan bisnis di mana Perseroan menjalankan kegiatan usaha. Perseroan tidak menjamin bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya ini akan memberikan hasil yang diharapkan.

Laporan tahunan ini memuat kata "KB Bank", "Bank" dan "Perseroan" yang didefinisikan sebagai PT Bank KB Bukopin Tbk yang menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan. Penyebutan satuan mata uang "Rupiah", "Rp" atau IDR merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan "Dolar AS" atau USD merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntasi Keuangan Indonesia.



PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK

Tabel dan grafik pada Laporan Tahunan ini memaparkan data numerik dengan standar penulisan mengikuti kaidah Bahasa Indonesia. Pemaparan numerik dalam teks menggunakan standar kaidah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris sesuai konteks.



SEKAPUR SIRIH

Strategic Transformation for Sustainable and Inclusive Growth

KB Bank terus menjalankan transformasi strategis untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui strategi BISA, Bank mengoptimalkan kinerja dengan memperluas segmen bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat kualitas aset. Fokus pada digitalisasi juga semakin diperkuat dengan pengembangan infrastruktur teknologi dan ekosistem keuangan yang inovatif, memastikan layanan yang lebih cepat, aman, dan mudah diakses oleh nasabah. Keberhasilan dalam memperluas sumber pendanaan serta mempererat sinergi dengan mitra strategis menjadi bukti dari upaya penguatan fundamental yang dilakukan. Dengan langkah-langkah strategis ini, KB Bank terus memperkokoh perannya sebagai lembaga keuangan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan ekonomi secara luas.

KESINAMBUNGAN TEMA

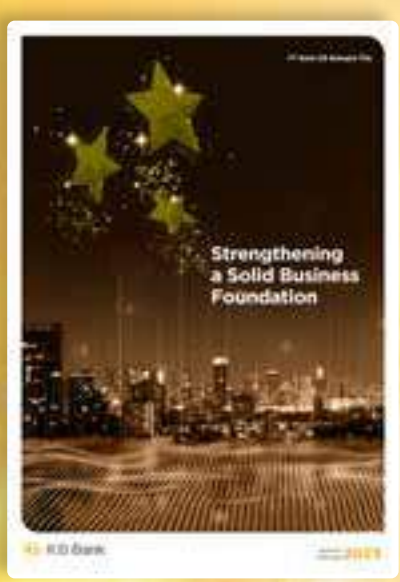

2023

"Strengthening A Solid Business Foundation"

Untuk mencapai target tahun 2023, Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 13 (tiga belas) strategi agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Adapun tajuk strategi agenda tahun 2023 adalah "BISA" cerminan motivasi insan Perseroan untuk terus melakukan perubahan dan perbaikan yang berkelanjutan dengan tujuan meraih kemenangan bersama melalui 4 pilar yaitu Boost Sales Performance, Innovation for Turnaround,Strengthening the quality of Assets, Advanced IT & Digital.

Fase transformasi KB Bank yang diagendakan terus berlanjut mengikuti dinamika perkembangan bisnis yang ada, dimana KB Bank membagi dalam 3 (tiga) tahap sesuai dengan proyeksi waktu. Fase pertama yaitu membangun kembali dasar bisnis melalui pertumbuhan aset yang berkualitas, Fase kedua KB Bank diharapkan berada pada tahap yang lebih stabil untuk fokus pada segmen bisnis utama yaitu (ritel dan UMKM), serta fase ketiga KB Bank diharapkan sudah berada dalam tahap yang siap sepenuhnya "Menjadi Bank Terkemuka dan Dicintai di Indonesia".

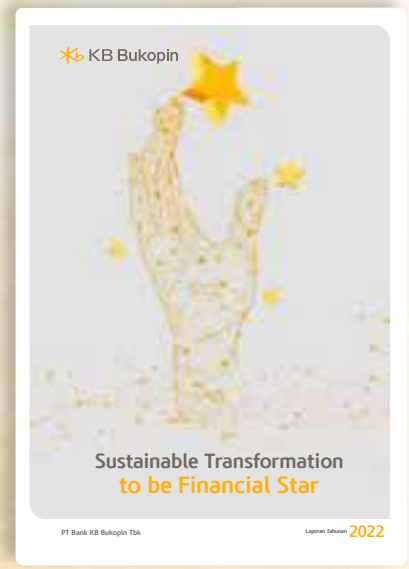

2022

"Sustainable Transformation To Be Financial Star"

Dalam menghadapi kondisi iklim usaha yang masih penuh ketidakpastian di sepanjang tahun 2022, Bank KB Bukopin lebih berhati-hati dalam merealisasikan peran strategisnya di industri perbankan Indonesia. Direksi bersama Insan Perseroan telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dibagi dalam 20 (dua puluh) stratejik agenda dengan tujuan "Menjadi Institusi Keuangan Pilihan Utama di Indonesia". Hal tersebut selaras dengan transformasi yang dilakukan Bank sejak tahun-tahun sebelumnya.

Bank KB Bukopin memulai perjalanan transformasinya yang dimulai sejak Agustus 2020 yang ditandai dengan masuknya KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali. Transformasi yang dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap dimana pada tahap 1 dan 2 fokus transformasi pada penyelesaian masalah fundamental. Hingga saat ini proses transformasi masih berjalan yang memasuki pada tahap 3 dan 4 dengan fokus membangun fundamental yang kuat sebagai persiapan untuk pertumbuhan good bank kedepannya. Bank akan terus melakukan transformasi yang berpusat pada perubahan dan inovasi dengan aktif melibatkan karyawan dalam prosesnya.



2021

“Memperkuat Transformasi, Kokohkan Sinergi”

Seiring dengan cita-cita Bank KB Bukopin untuk menjadi Lembaga Keuangan Utama di Indonesia pada tahun 2025, maka Bank KB Bukopin perlu melakukan peningkatan kinerja di semua lini. Salah satunya adalah dengan peningkatan kualitas pertumbuhan bisnis. Bank KB Bukopin meyakini bahwa peningkatan kualitas pertumbuhan bisnis menjadi pilar penting untuk memastikan keberlanjutan Bank KB Bukopin di masa mendatang.

Berbagai upaya yang dilakukan sepanjang tahun 2021 dituangkan dalam bentuk 12 (duabelas) Kebijakan Strategis yang kami lakukan dengan komitmen tinggi dan konsistensi. Keduabelas Kebijakan Strategis tersebut yakni fokus pada bisnis ritel, penguatan likuiditas, peningkatan kualitas kredit, rencana penambahan modal, ekspansi pada segmen unggulan, pengembangan fee based income, melakukan upaya efisiensi, penguatan point of sales, pengembangan teknologi informasi, penguatan SDM, penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang berkualitas serta penguatan peran sistem pengendalian internal.



2020

“Menempuh Babak Baru dengan Optimisme”

Wabah virus COVID-19 dengan cepat mengganggu sektor bisnis dan aktivitas konsumen secara global seiring dengan dampak kesehatannya. Dengan tantangan dan krisis global dan nasional ke depan, kami telah menyiapkan beberapa strategi baik yang sifatnya segera maupun jangka panjang. Kolaborasi strategis kami dengan KB Kookmin Bank di tahun ini telah memberikan kami optimisme dalam memulai babak baru dalam rangka memberikan kinerja yang lebih baik dan nilai tambah yang lebih banyak bagi para pemangku kepentingan.

Terlepas dari dampak COVID-19, pada tahun 2020, kami berfokus pada tiga hal utama sebagai bagian dari proses transformasi kami termasuk membangun fundamental yang kuat dengan memperkuat kapabilitas inti kami dan memperluas pasar, meperluas bisnis utama kami, dan menangkap pasar baru melalui penggunaan perbankan digital. Dengan proses transformasi yang sedang berlangsung, kami yakin dan optimis bahwa babak baru ini akan membawa kami ke arah dan peningkatan yang lebih baik lagi.

PENCAPAIAN **KUNCI 2024**

KINERJA SEGMEN KREDIT

UMKM

RP11,62

TRILIUN

KONSUMER

RP14,75

TRILIUN

WHOLESALE

RP21,15

TRILIUN

TOTAL KINERJA DANA PIHAK KETIGA

RP6,51

TRILIUN

KINERJA PRODUK DANA PIHAK KETIGA

GIRO

RP780,04

MILIAR

TABUNGAN

RP607,22

MILIAR

DEPOSITO

RP5,12

TRILIUN

TOTAL KINERJA DANA PIHAK KETIGA

RP6,51

TRILIUN

KINERJA KEUANGAN

KAS DAN SETARA KAS

RP6,24

TRILIUN

KREDIT YANG DIBERIKAN

14,60%

Pada akhir tahun buku 2024, kredit yang diberikan Bank tercatat sebesar Rp3,58 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp456 miliar atau 14,60% bila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yangtercatat sebesar Rp3,12 triliun

ASET

RP83,08

TRILIUN

PENDAPATAN BUNGA DAN SYARIAH

12,19%

Di akhir tahun buku periode 2024, jumlah pendapatan bunga dan syariah Bank tercatat sebesar Rp5,45 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp592 miliar dibandingkan capaian tahuan sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,86 triliun.

KINERJA KEUANGAN

PERINGKAT 2

“BAIK”

Di tahun 2024, penerapan *good corporate governance* di KB Bank secara keseluruhan KB Bank meraih peringkat 2 atau dikategorikan sebagai "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

RP30,22

MILIAR

Di tahun 2024, Bank telah merealisasikan biaya pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM sebesar Rp30,22 miliar yaitu 132% dari Budget Training 2024.

DAFTAR ISI

3 TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2024 KB BANK
3 SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB
4 PEMBERITAHUAN TABEL DAN GRAFIK
5 SEKAPUR SIRIH
6 KESINAMBUNGAN TEMA
8 PENCAPAIAN KUNCI 2024
10 DAFTAR ISI

01 Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional

14 IKHTISAR KEUANGAN
19 IKHTISAR OPERASIONAL
20 AKSI KORPORASI
21 INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM (*DELISTING*) IKHTISAR EFEK LAINNYA
21 INFORMASI MENGENAI SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI
21 INFORMASI SUMBER
21 PENDANAAN LAINNYA

02 Laporan Manajemen

36 LAPORAN DEWAN KOMISARIS
42 LAPORAN DIREKSI
52 PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

03 Profil Perusahaan

56 IDENTITAS BANK
58 RIWAYAT SINGKAT BANK
59 KETERANGAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM
60 JEJAK LANGKAH BANK
62 KEANGGOTAAN
63 INFORMASI MAKNA
63 LOGO BANK
64 BIDANG USAHA
69 JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI BANK
70 VISI, MISI, DAN
70 NILAI BUDAYA BANK
72 STRUKTUR ORGANISASI
79 PROFIL DEWAN DIREKSI
85 PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR
96 SUMBER DAYA MANUSIA
100 KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM
110 SUSPENSI SAHAM BANK
110 STRUKTUR GRUP BANK
111 INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI
113 INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI
114 LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
116 PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
118 INFORMASI PADA WEBSITE BANK

04 Analisis dan Pembahasan Manajemen

122 TINJAUAN UMUM
126 STRATEGI BANK 2024
130 TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA
149 PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN OPERASI
151 PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN GEOGRAFIS
153 TINJAUAN KEUANGAN
163 KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG
167 RASIO KEUANGAN
169 SUKU BUNGA DASAR KREDIT
170 STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL
174 IKATAN YANG MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL
175 REALISASI INVESTASI BARANG MODAL
175 INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL AKUNTAN
176 PROSPEK USAHA
178 PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN
180 ASPEK PEMASARAN
182 KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN
183 INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)
184 INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM
186 INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/ MODAL
187 INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

191 PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

194 PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

195 KOMITMEN DAN KONTIJENSI

197 DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

197 TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

198 INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

199 ASPEK PERPAJAKAN

200 DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

200 LARANGAN, BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

201 KINERJA ENTITAS ANAK

05 Manajemen Risiko

204 LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

220 STRUKTUR PERMODALAN BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

229 INFORMASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

268 RISIKO PASAR

271 RISIKO OPERASIONAL

272 RISIKO LIKUIDITAS

06 Tata Kelola Perusahaan

298 PERKEMBANGAN PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

314 KESESUAIAN PENERAPAN GCG TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

319 STRUKTUR DAN MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*

321 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

332 DEWAN KOMISARIS

342 KOMISARIS INDEPENDEN

344 DIREKSI

356 KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

365 RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

371 PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

372 ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

402 KOMITE DI BAWAH DIREKSI

412 SEKRETARIS PERUSAHAAN

419 SATUAN KERJA AUDIT INTERN

425 AKUNTAN PUBLIK

427 MANAJEMEN RISIKO

435 SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

438 FUNGSI KEPATUHAN

444 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

447 ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL (APU, PPT, DAN PPPSPM)

449 PERMASALAHAN HUKUM/LITIGASI PERUSAHAAN DAN ANAK PERUSAHAAN

450 PERKARA PENTING

451 AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

453 KODE ETIK

455 KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN SOSIALISASINYA

455 PENGENDALIAN GRATIFIKASI

456 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN PERUSAHAAN

456 PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM DAN OBLIGASI KB BANK

457 PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

457 PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT

458 PERLINDUNGAN NASABAH, *ANTI FRAUD* DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM

458 KEBIJAKAN CONFLICT MANAGEMENT (TERMASUK INSIDER TRADING)

459 PENERAPAN STRATEGI *ANTI FRAUD*

463 SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM)

467 TRANSPARANSI PRAKTIK *BAD GOVERNANCE*

07 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

470 TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

471 PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TJSL DI PERUSAHAAN

472 STRUKTUR ORGANISASI TJSL PERUSAHAAN

474 VISI DAN MISI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

476 REALISASI DANA DAN KEGIATAN TJSL TAHUN 2024

478 PERNYATAAN TERKAIT KEGIATAN TJSL DIUNGKAPKAN PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN

08 Laporan Keuangan



KB Bank



Ikhtisar Data Keuangan dan Operasional

IKHTISAR KEUANGAN

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Pendapatan bunga dan Syariah	5.454.099	4.861.636	4.128.670
Beban bunga dan Syariah	(4.301.374)	(4.052.754)	(3.079.167)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	1.152.725	808.882	1.049.503
Pendapatan operasional lainnya	350.046	456.527	499.509
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.452.900)	(5.537.792)	(3.948.482)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(798.341)	(269.055)	(81.325)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6.180	5.235	(1.919)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	5.385	1.999	(2.272)
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23.246)	155.384	(147.542)
Beban operasional lainnya	(2.026.036)	(2.280.382)	(2.424.240)
Laba (rugi) Operasional	(4.786.187)	(6.659.202)	(5.056.768)
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(118.033)	(128.185)	(88.888)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(4.904.220)	(6.787.387)	(5.145.656)
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(1.424.400)	731.684	113.152
Laba (rugi) Tahun Berjalan	(6.328.620)	(6.055.703)	(5.032.504)
• Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.329.138)	(6.034.077)	(5.027.460)
• Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	518	(21.626)	(5.044)
Penghasilan komprehensif lain– neto	180.243	9.922	43.205
Total penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	(6.148.377)	(6.045.781)	(4.989.299)
• Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.148.908)	(6.024.463)	(4.984.356)
• Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	531	(21.318)	(4.943)
Laba per saham Dasar/dilusian (nilai penuh)	(34)	(61)	(74)

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
Kas	369.083	289.184	524.320
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	3.205.619	4.140.431
Giro pada bank lain – neto	396.837	342.581	743.970
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.798.303	2.133.567	12.180.830
Surat-surat berharga – neto	21.766.831	17.536.140	12.009.878
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	2.572.152	-

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (Repo)	-	-	-
Tagihan derivatif	12.054	3.040	9.254
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	44.535.289	45.835.782	48.956.758
Tagihan akseptasi	83.079	130.964	17.135
Penyertaan saham	15	15	15
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.320.304	3.233.675	3.396.202
Aset pajak tangguhan – neto	1.258.561	2.670.543	1.942.151
Aset tak berwujud - neto	270.807	285.585	201.994
Aset lain-lain – neto	5.591.657	6.068.453	5.872.414
TOTAL ASET	**83.075.298**	**84.307.300**	**89.995.352**
	-	-	-
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas segera	401.263	431.402	388.522
Simpanan nasabah	46.593.158	44.789.143	51.962.370
Simpanan dari bank lain	2.881.186	7.886.721	10.381.375
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.739.878	219.631	-
Liabilitas derivatif	3.641	808	12.259
Liabilitas akseptasi	84.279	132.577	17.346
Pinjaman yang diterima	13.920.644	11.704.492	11.200.131
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	3.397.588	3.392.718
Utang pajak	60.903	64.635	56.496
Liabilitas lain-lain	1.638.402	1.570.140	1.367.530
TOTAL LIABILITAS	**75.113.512**	**70.197.137**	**78.778.747**
	-	-	-
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000	7.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	8.286.428
Uang muka setoran modal	-	-	3.000.000
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.603.893	1.605.649
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(14.149)	7.563	2.625
Saldo laba	(21.041.182)	(14.700.914)	(8.673.269)
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.987.401	14.136.309	11.221.433
Kepentingan non-pengendali	(25.615)	(26.146)	(4.828)
TOTAL EKUITAS	**7.961.786**	**14.110.163**	**11.216.605**
TOTAL LIABILITAS dan EKUITAS	**83.075.298**	**84.307.300**	**89.995.352**

Jumlah Aset
(Rp-juta)

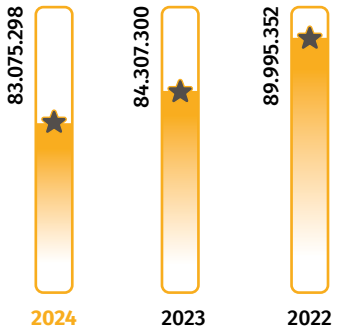

Jumlah Liabilitas
(Rp-juta)

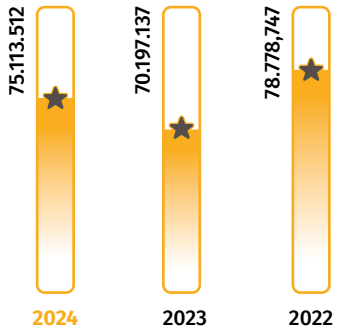

Jumlah Ekuitas
(Rp-juta)

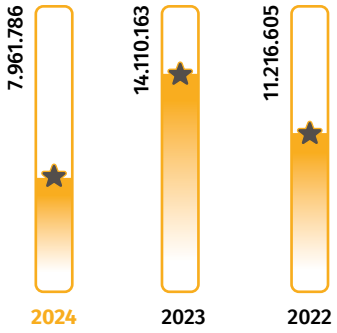

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam %)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Permodalan			
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit	17,22%	28,50%	20,13%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit Dan Risiko Pasar	17,11%	28,37%	20,01%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit Dan Risiko Operasional	16,49%	27,17%	19,19%
Rasio kecukupan modal (CAR) dengan Memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional	16,38%	27,05%	19,08%
Aset Tetap - Neto terhadap Modal Inti	91,39%	38,51%	55,45%
Aset Produktif			
Aset Produktif dan Aset Non Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif dan Aset Non Produktif	5,01%	6,27%	6,92%
Aset Produktif Bermasalah terhadap Total Aset Produktif	3,00%	6,37%	4,09%
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Keuangan terhadap Aset Produktif	4,47%	4,80%	1,93%

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam %)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Kotor	9,06%	9,56%	6,56%
Rasio Kredit Bermasalah terhadap Kredit yang Diberikan – Neto	4,38%	4,87%	4,84%
Rentabilitas			
Imbal Hasil Aset (ROA)	-7,55%	-7,71%	-6,27%
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	-154,60%	-61,38%	-82,58%
Marjin Pendapatan Bunga Bersih (NIM)	1,31%	0,78%	1,17%
Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	192,58%	223,24%	226,22%
Cost to Income Ratio (CIR) (Rasio Biaya terhadap Pendapatan)	146,31%	170,20%	193,05%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan Bunga	-116,03%	-124,56%	-121,89%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Aset	-7,62%	-7,18%	-5,59%
Rasio Laba (Rugi) terhadap Jumlah Ekuitas	-79,49%	-42,92%	-44,87%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	90,42%	83,26%	87,54%
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Ekuitas	943,43%	497,49%	702,34%
Likuiditas			
Rasio Jumlah Kredit yang Diberikan terhadap Jumlah Simpanan Nasabah (LDR)	103,26%	113,18%	98,48%
Kepatuhan (*Compliance*)			
Persentase Pelanggaran BMPK			
Pihak Terkait	-	-	-
Pihak Tidak Terkait	-	-	-
Persentase Pelampauan BMPK			
Pihak Terkait	-	-	-
Pihak Tidak Terkait*	7,64%	-	-
Giro Wajib Minimum (GWM):			
GWM Utama Rupiah			
GWM Harian	8,70%	7,05%	8,53%
GWM Rata-rata	8,74%	7,37%	8,53%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h GWM Sekunder	28,82%	35,08%	13,87%
GWM Konvensional Valuta Asing	4,02%	4,02%	4,02%
Posisi Devisa Neto (PDN)	2,46%	1,62%	1,59%
Pertumbuhan			
Rasio Pertumbuhan Aset	-1,46%	-6,32%	0,87%
Rasio Pertumbuhan Liabilitas	7,00%	-10,89%	3,64%
Rasio Pertumbuhan Ekuitas	-43,57%	25,80%	-15,06%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Bunga Dan Syariah – Bersih	42,51%	-22,93%	26,52%
Rasio Pertumbuhan Pendapatan Operasional Lainnya	-23,32%	-8,60%	230,44%
Rasio Pertumbuhan Beban Operasional Lainnya	-11,15%	-5,93%	-20,34%
Rasio Pertumbuhan Laba Bersih	4,51%	20,33%	118,59%

ROA
%

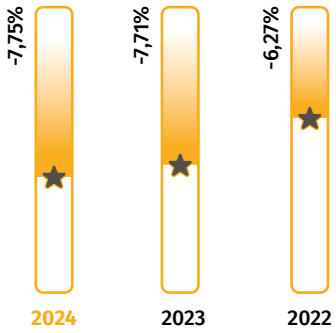

ROE
%

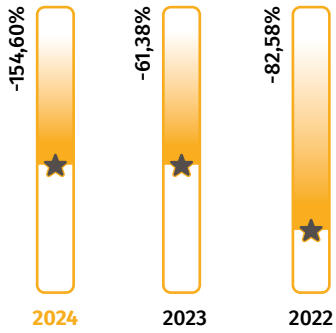

NIM
%

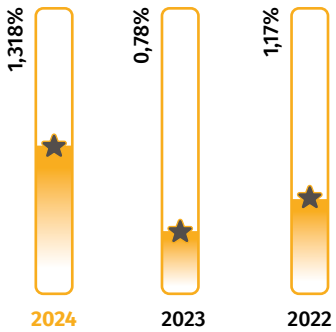

BOPO
%

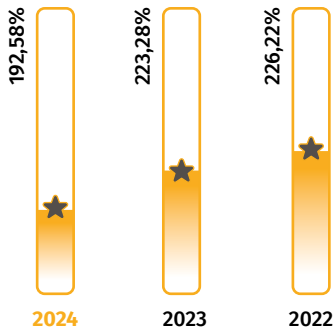



IKHTISAR OPERASIONAL

Segmen Kredit

(Disajikan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
UMKM	11.619	15.633	18.397
Konsumer	14.754	12.458	13.474
Wholesale	21.154	21.328	18.712
Total	**47.527**	**49.419**	**50.583**

Segmen Dana

(Disajikan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ritel	29.769	30.008	37.889
Wholesale	16.824	14.781	14.074
Total	**46.593**	**44.789**	**51.962**

Segmen *Feebased*

(Disajikan dalam Miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Public Service	69	83	137
E-Channel	17	20	20
Kartu kredit & *Merchant*	32	38	50
Trade Finance	6	8	7
Bank Garansi	2	8	16
Lainnya	182	280	225
Total	**308**	**436**	**455**



IKHTISAR SAHAM

Keterangan	Harga per Saham (Rp)			Beredar (dalam Lembar Saham)	Volume Transaksi (dalam Ribuan Unit)	Kapitalisasi Pasar Rata-Rata (Rp Juta)
	Tertinggi	Terendah	Penutupan			
2024						
Triwulan IV	64	51	54	187.887.539.870	122.109,03	10.700.525
Triwulan III	75	50	64	187.887.539.870	235.341,37	11.281.952
Triwulan II	77	50	50	187.887.539.870	94.255,67	11.302.186
Triwulan I	87	76	76	187.887.539.870	37.372,96	14.969.490
2023						
Triwulan IV	94	72	80	187.887.539.870	80.093,24	15.415.763
Triwulan III	115	92	93	187.887.539.870	91.718,59	18.910.018
Triwulan II	118	92	102	187.887.539.870	134.682,09	19.001.981
Triwulan I	140	100	110	67.887.540.178	143.075,62	7.899.044

2023

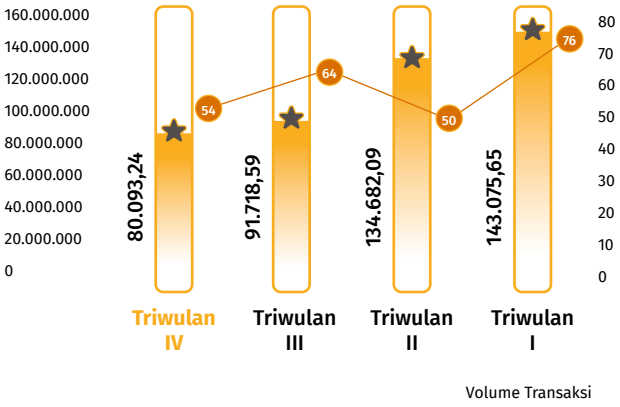

2024

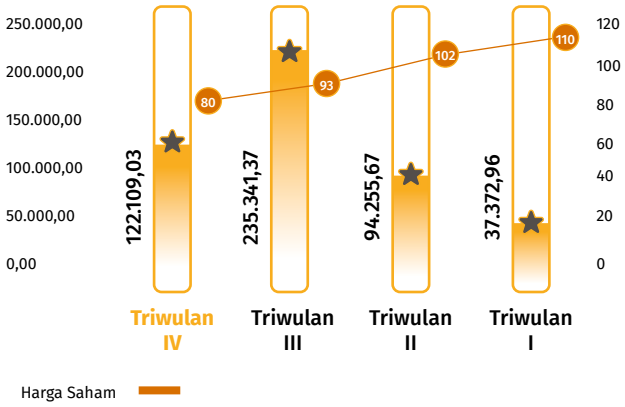

AKSI KORPORASI

Pada tanggal 23 Oktober tahun 2024, KB Bank telah sukses menyelesaikan penentuan harga (*pricing*) *Senior Unsecured Notes* ("Obligasi Global") perdananya yang dicatatkan pada Bursa Efek Singapura (SGX-ST) dengan nominal US$ 300 Juta dan Kupon 5.658% yang akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2027. Aksi korporasi, penerbitan obligasi global ini bertujuan untuk diversifikasi pendanaan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri jangka pendek.

INFORMASI PENGHENTIAN SEMENTARA PERDAGANGAN SAHAM (*SUSPENSION*) DAN/ATAU SANKSI PERDAGANGAN SAHAM (*DELISTING*) IKHTISAR EFEK LAINNYA

Sepanjang tahun 2024, KB Bank tidak pernah menerima sanksi yang berdampak pada aktivitas perdagangan saham di Bursa Efek tempat saham Bank tercatat dan diperdagangkan. Bank juga tidak mengalami penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) maupun pembatalan pencatatan saham (*delisting*). Oleh karena itu, dalam Laporan Tahunan ini tidak terdapat informasi mengenai dampak dari *suspension* atau *delisting*.

INFORMASI MENGENAI SUKUK ATAU OBLIGASI KONVERSI

Nama Efek	Nama Bursa	Tanggal Terbit	Tenor (bulan)	Mata Uang	Nilai (juta)	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Peringkat Efek Rating		Wali Amanat	Status sampai dengan 31 Desember 2024
								2024	2023		
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	Bursa Efek Indonesia	28 Februari 2017	84	Rp	1.405.000	28 Februari 2024	11%	*	idAA (PEFINDO)	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Lunas
Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	36	Rp	1.000.000	9 September 2024	6,25%	AAA(idn) Fitch Rating	AAA(idn) Fitch Rating	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Lunas
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	60	Rp	315.000	9 September 2026	8%	AA(idn) Fitch Rating	AA(idn) Fitch Rating	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	Bursa Efek Indonesia	09 September 2021	84	Rp	685.000	9 September 2028	8,9%	AA(idn) Fitch Rating	AA(idn) Fitch Rating.	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	*Outstanding*
Senior Unsecured Notes	Bursa Efek Singapore (SGX)	30 Oktober 2024	36	USD	300	30 Oktober 2027	5,658%	BBB (*stable*) *Fitch Ratings*	-	HSBC Hong Kong (Agen Pembayar)	*Outstanding*

INFORMASI SUMBER PENDANAAN LAINNYA

Pada tahun 2024, KB Bank telah menerbitkan Surat Utang *Senior Unsecured Notes* ("Obligasi Global") perdana dalam denominasi US Dollar senilai 300 juta USD yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura (SGX).

PERISTIWA PENTING



24 Januari

Gelar RUPSLB, PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi

KB Bank mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan susunan pengurus Bank. Dalam rapat tersebut, melalui keputusan aklamasi, RUPSLB menyetujui pengangkatan Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama dan Im Jang Hyuk sebagai Direktur PT Bank KB Bukopin Tbk.



16 Februari

PT Bank KB Bukopin Tbk dan Pemerintah Kota Batam Luncurkan Fuel Card 3.0, Inovasi untuk Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi yang Lebih Baik

KB Bank bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam meluncurkan dan meninjau penggunaan Fuel Card 3.0. Inisiatif ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan distribusi bahan bakar bersubsidi.

KB Bank

3 Maret

Lengkapi Perjalanan Transformasi, KB Bank Resmi Jadi Nama dan Logo Baru Perusahaan

PT Bank KB Bukopin Tbk resmi memperkenalkan perubahan merek dan logo menjadi KB Bank. Hal ini menandai langkah penting dalam perjalanan transformasi yang dimulai sejak 2021. Perubahan ini juga mencerminkan komitmen Bank untuk terus berkembang dan memperkuat posisinya sebagai institusi perbankan terkemuka dan tepercaya di Indonesia. Adapun perubahan tersebut tidak memengaruhi nama legal perusahaan, yang tetap menggunakan PT Bank KB Bukopin Tbk.



6 Maret

Dukung Penuh Pertumbuhan UMKM, KB Bank Berkolaborasi dengan OttoDigital melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)

KB Bank senantiasa memperkuat komitmennya sebagai bank tepercaya dengan mendukung pertumbuhan UMKM melalui penyaluran KUR. Sebagai wujud nyata, KB Bank bekerja sama dengan OttoDigital, grup usaha digital ekosistem Salim Group melalui PT Reksa Transaksi Sukses Makmur untuk mempermudah akses KUR bagi *merchant* terpilih dan mitra UMKM. Inisiatif ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis UMKM serta mempercepat inklusi keuangan di Indonesia.



15 Maret

Dukung Peningkatan Literasi Keuangan, KB Bank Berkolaborasi dengan ITB Ahmad Dahlan Melalui Program "Star Edu"

KB Bank menjalin kemitraan dengan ITB Ahmad Dahlan melalui Program "Star Edu" untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan. Kerja sama ini diwujudkan dalam program "*Beyond Excellent Trainers*," di mana manajemen KB Bank menjadi pengajar dalam pelatihan "Membimbing Banking Profesional Masa Depan" pada 18–20 Maret 2024, dengan 200 dosen dan praktisi sebagai peserta. Penandatanganan MoU antara Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, dan Rektor ITB Ahmad Dahlan, Dr. Yayat Sujatna, SE., MSi, dilakukan dalam *Kick-off Meeting* di Jakarta, yang juga dimeriahkan seminar "*ESG Awareness: Sustaining in VUCA World*."



22 Maret

Perluas Akses Nasabah, KBstar Kini Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Gerai Indomaret Seluruh Indonesia

KB Bank memperluas layanan digitalnya dengan menghadirkan fitur "*cardless withdrawal*" di 21.717 gerai Indomaret di seluruh Indonesia melalui aplikasi KBstar. Sejak diluncurkan akhir tahun lalu, KBstar telah mempermudah transaksi digital nasabah, termasuk tarik tunai tanpa kartu di ATM. Inovasi ini merupakan bagian dari komitmen KB Bank dalam menyediakan layanan perbankan yang aman dan mudah diakses di era digital. Wakil Direktur Utama KB Bank, Robby Mondong, menyatakan bahwa kolaborasi dengan Indomaret bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas layanan perbankan bagi masyarakat secara lebih luas dan terjangkau.



25 Maret

Gelar *Customer Gathering*, KB Bank Berkomitmen untuk Lebih Dekat dengan Nasabah

KB Bank menggelar *customer gathering* "Safari Ramadan KB Bank" di Jakarta, yang menutup rangkaian acara sejak 18 Maret di berbagai kota. Acara ini bertujuan mempererat hubungan dengan nasabah, memperkenalkan rebranding, serta membahas inovasi perbankan digital. Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee, menegaskan komitmen bank dalam mendukung sektor strategis dan menghadirkan produk kredit digital inovatif. Transformasi KB Bank diperkuat dengan adopsi teknologi *Next Generation Banking System* (NGBS) dari KB Financial Group (KBFG), pemegang saham pengendali sejak 2020, guna meningkatkan kepercayaan dan layanan perbankan di Indonesia.



1 April

KB Bank Perluas Akses Fuel Card Solar Bersubsidi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

KB Bank bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bintan meluncurkan *Fuel Card* Solar Subsidi di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, sebagai solusi untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan distribusi bahan bakar bersubsidi. Dengan teknologi chip dan hologram, Fuel Card memastikan solar bersubsidi tepat sasaran, mengurangi antrean di SPBU, serta mencegah penimbunan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Acara peluncuran dihadiri oleh Direktur Utama KB Bank Tom (Woo Yeul) Lee, Bupati Bintan Roby Kurniawan, serta perwakilan dari Pemprov Riau dan Pertamina. KB Bank berharap masyarakat memanfaatkan *Fuel Card* ini dengan optimal untuk mendukung transparansi dan keadilan dalam distribusi bahan bakar.



18 April

Fitch Ratings Pertahankan Peringkat Nasional KB Bank di Level AAA dengan *Outlook* Stabil

PT Fitch Ratings Indonesia telah mempertahankan peringkat nasional AAA untuk KB Bank, yang mencerminkan stabilitas keuangan dan risiko gagal bayar yang sangat rendah. Peringkat ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen KB Bank dalam memperkuat fundamental bisnis dan menjadi institusi perbankan tepercaya di Indonesia. Pengumuman ini disampaikan oleh Fitch setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KB Bank yang terus berupaya menerapkan praktik bisnis berkelanjutan. Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menyampaikan bahwa pencapaian ini mencerminkan kepercayaan publik terhadap Bank serta dedikasinya dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan yang sehat.



25 April

KB Bank Gelar Halalbihalal Bersama Nasabah, Wujudkan Sinergi yang Solid dalam Layanan Perbankan

Masih dalam suasana Idulfitri 1445 H, KB Bank menggelar acara Halalbihalal bersama nasabah setianya di masing-masing kantor cabang KB Bank di Jakarta dan 20 kota lainnya di Indonesia. Acara ini bertujuan untuk menjaga silaturahmi serta memberikan apresiasi kepada nasabah sebagai mitra utama. Selama acara, manajemen KB Bank, termasuk Wakil Direktur Utama Robby Mondong, berinteraksi langsung dengan nasabah, menyampaikan rasa terima kasih, serta memperkenalkan berbagai inovasi layanan perbankan digital. Melalui halalbihalal ini, KB Bank menegaskan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan finansial nasabah serta mendorong transformasi berkelanjutan di industri perbankan.



16 Mei

KB Bank dan Daimler Commercial Vehicles Indonesia Tandatangani Kerja Sama *Dealer Financing*

KB Bank menandatangani kerja sama *dealer financing* dengan PT Daimler Commercial Vehicles Indonesia (DCVI) di Banking Hall, Kantor Pusat KB Bank. Kemitraan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif, khususnya dalam penyediaan fasilitas pembiayaan bagi mitra dealer kendaraan komersial truk dan bus Mercedes-Benz. Acara ini dihadiri oleh jajaran direksi dari kedua perusahaan, termasuk Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong serta Presiden Direktur DCVI Naeem Hassim, yang menegaskan pentingnya kerja sama ini dalam memperkuat ekosistem bisnis otomotif yang berkelanjutan. Dengan pengalaman di sektor dealer financing, KB Bank optimistis dapat terus mendorong pertumbuhan kredit baru hingga 25%, khususnya bagi segmen UMKM dan ritel, sebagai bagian dari strategi bisnis jangka panjangnya.



16 Mei

Dukung Swasembada Pangan, KB Bank Salurkan Pembiayaan Kredit ke Petani Tebu

KB Bank menjalin kerja sama dengan PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan PT Mata Langit Solusindo (MATA) untuk membangun ekosistem keuangan bagi pertanian tebu di Indonesia melalui fasilitas pembiayaan kredit. Inisiatif ini merupakan bagian dari dukungan KB Bank terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Melalui kerja sama ini, KB Bank menyediakan dukungan keuangan produktif bagi lebih dari 5.000 kebun tebu yang tergabung dalam Rajawali II dengan memanfaatkan teknologi keuangan miliknya. Sementara itu, MATA menghadirkan solusi berbasis data yang memungkinkan pemantauan kondisi cuaca, kelembaban tanah, jumlah pupuk, dan kesehatan tebu melalui teknologi satelit, serta memberikan perkiraan produksi tebu hingga enam bulan sebelum panen.



27 Mei

Bangun Pertumbuhan Ekosistem Bisnis, KB Bank dan APP Indonesia Tandatangani Kerja Sama Pembiayaan Vendor

KB Bank dan PT APP Purinusa Ekapersada menandatangani kerja sama pembiayaan vendor (*vendor financing*) pada 27 Mei 2024 di Sinarmas Land Plaza, Tower 2. Kemitraan ini bertujuan untuk memberikan akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi mitra usaha APP Indonesia, mendukung pertumbuhan bisnis mereka secara efisien. Inisiatif ini sejalan dengan strategi KB Bank dalam memperkuat ekosistem bisnis dan meningkatkan pertumbuhan segmen korporasi. Dengan kerja sama ini, KB Bank dan APP Indonesia berkomitmen menciptakan ekosistem bisnis berkelanjutan serta berkontribusi pada ekonomi nasional.



27 Mei

Dorong Pertumbuhan di Ekosistem Industri Perkeretaapian, KB Bank Lanjutkan Sinergi Bersama PT INKA Multi Solusi

KB Bank kembali menjalin kerja sama dengan PT INKA Multi Solusi (PT IMS) dalam pengembangan ekosistem bisnis melalui skema pembiayaan vendor (*vendor financing*). Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kantor Pusat KB Bank ini menegaskan komitmen keduanya dalam mendukung akses pembiayaan bagi mitra usaha PT IMS, yang bergerak di bidang manufaktur perkeretaapian dan transportasi darat. Sebelumnya, KB Bank telah memberikan fasilitas pembiayaan untuk proyek pemesanan kereta, Pertashop, dan bus listrik, serta berbagai solusi pendanaan lainnya. Kolaborasi ini sejalan dengan dukungan KB Bank terhadap pertumbuhan sektor transportasi darat, seiring dengan agenda strategis pemerintah dalam pengembangan infrastruktur nasional.



30 Mei

KB Bank Salurkan Kredit Pembiayaan Kemitraan Rp 123 Miliar ke Bank Perekonomian Rakyat

KB Bank berkolaborasi dengan PT BPR Modern Express dalam skema Linkage Program untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM dan *consumer financing*. Melalui skema executing, KB Bank menyalurkan pembiayaan sebesar Rp123 miliar kepada BPR Modern Express, yang kemudian diteruskan kepada nasabah akhir, termasuk segmen PNS/ Pensiunan dan UMKM, guna memenuhi kebutuhan modal usaha dan kebutuhan lainnya. Kerja sama ini mencerminkan komitmen KB Bank dalam mendukung pertumbuhan UMKM secara inklusif serta meningkatkan penetrasi dan diversifikasi pembiayaannya di sektor produktif.



6 Juni

Fitch Rating Berikan KB Bank Peringkat Internasional Setara dengan Peringkat *Sovereign Credit Rating* Indonesia

Fitch Ratings Indonesia menetapkan peringkat internasional KB Bank di level 'BBB' dengan *outlook* stabil, setara dengan *Sovereign Credit Rating* Indonesia. Sebelumnya, Fitch juga mempertahankan peringkat nasional KB Bank di level tertinggi 'AAA'. Kinerja KB Bank terus membaik dengan pertumbuhan kredit baru 114,3% *year-on-year*, peningkatan *Net Interest Margin* (NIM) menjadi 0,9%, serta perbaikan rasio *loan at risk* (LAR) dari 50,3% menjadi 26,9% hingga April 2024. Dengan pencapaian ini, KB Bank optimis memperluas ekspansi kredit di segmen korporasi, UMKM, dan ritel.



20 Juni

Perluas Ekspansi Kredit, KB Bank Tandatangani Kerja Sama dengan Mayapada Healthcare

KB Bank menyalurkan pembiayaan lebih dari Rp700 miliar kepada PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk untuk pembangunan Mayapada Hospital di IKN dan Cakung, serta pengadaan peralatan medis. Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menegaskan dukungan KB Bank terhadap sektor kesehatan guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Di sisi lain, Chairman & Group CEO Mayapada Healthcare Jonathan Tahir menyatakan bahwa kerja sama ini akan mempercepat ekspansi layanan kesehatan. Adapun penandatanganan kerja sama berlangsung di Kantor Pusat KB Bank pada 20 Juni 2024.



28 Juni

Gelar RUPST, KB Bank Paparkan Pertumbuhan Kinerja Hingga Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

KB Bank sukses menggelar RUPST Tahun Buku 2023 di Jakarta yang membahas berbagai agenda penting, termasuk persetujuan laporan tahunan, penunjukan akuntan publik, serta perubahan susunan pengurus. KB Bank mencatat pertumbuhan kredit baru sebesar 20% menjadi Rp9 triliun, didukung oleh efisiensi operasional yang menurunkan beban biaya hingga 9%. Di RUPST juga menyetujui perubahan kepengurusan, termasuk pengunduran diri beberapa komisaris dan direktur, serta pengangkatan kembali Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama dan Henry Sawali sebagai Direktur.



19 Juli

KB Bank menjadi Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (Bank Administrator RDN) dan Bank Pembayaran

KB Bank resmi ditunjuk oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai salah satu Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (Bank Administrator RDN) dan Bank Pembayaran.



19 Juli

Lengkapi Perjalanan Transformasi, KB Bank Pelopori Penilaian Kredit Berbasis AI di Indonesia

KB Bank berkolaborasi dengan PFC Technologies dari Korea Selatan untuk menghadirkan model penyaluran kredit berbasis AI pertama di Indonesia, yang ditujukan bagi kredit pensiunan dan UMKM. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan MoU di Jakarta yang dihadiri oleh perwakilan kedua perusahaan. Implementasi AI ini diharapkan dapat mengoptimalkan penilaian risiko kredit, mengurangi debitur berisiko tinggi sebesar 2%-3%, serta meningkatkan efisiensi proses pinjaman melalui analitik data yang lebih canggih. KB Bank melihat langkah ini sebagai komitmen terhadap inovasi keuangan, sementara PFC Technologies berharap dapat berkontribusi pada penguatan teknologi manajemen risiko di Indonesia.



26 Juli

Tandai 20 Tahun Bersinergi, KB Bank Menerima Apresiasi Dari Jaringan PRIMA

KB Bank menerima penghargaan dari PT Rintis Sejahtera atas kerja sama dan kolaborasi selama 20 tahun dalam menyediakan layanan infrastruktur pembayaran bagi nasabah KB Bank melalui Jaringan PRIMA. Penghargaan ini diserahkan oleh Vice President Director PT Rintis Sejahtera Suryono Hidayat dan diterima oleh Direktur KB Bank Helmi Fahrudin di Kantor Pusat KB Bank, Jakarta. Kolaborasi ini telah menghasilkan berbagai inovasi layanan perbankan, termasuk pengembangan solusi transaksi lintas negara di Asia Tenggara melalui QRIS. Ke depan, KB Bank dan Jaringan PRIMA terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah dan efisien untuk memenuhi kebutuhan nasabah.



18 Agustus

KB Bank Dukung Festival Literasi dan Olahraga Dalam Rangka Memperingati Kemerdekaan RI ke-79

Dalam rangka merayakan HUT Kemerdekaan RI ke-79 serta sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali KB Bank mendukung penyelenggaraan Festival Literasi dan Olahraga di Desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi. Bekerja sama dengan Yayasan Gugah Nurani Indonesia, festival ini berlangsung dari 29 Juli hingga 18 Agustus 2024 dan melibatkan lebih dari 500 pelajar. Dengan mengusung konsep Perpustakaan Multikultural, acara ini memadukan lomba literasi dan aktivitas fisik guna meningkatkan minat baca serta mendukung kesehatan mental dan fisik anak-anak. KB Kookmin Bank juga telah berkontribusi dalam pembangunan Perpustakaan Multikultural sebagai bagian dari komitmen CSR untuk memajukan literasi dan pendidikan di Indonesia.



21 Agustus

KB Bank Adakan Petualangan Finansial Bersama Pelajar Sekolah Dasar Melalui Kegiatan "*Tour De Bank*"

KB Bank mendukung inklusi keuangan generasi muda melalui program "*Tour De Bank*" di Kantor Pusat KB Bank, melibatkan 49 pelajar Sampoerna Academy. Kegiatan ini mengenalkan pentingnya menabung sejak dini dan memperlihatkan secara langsung operasional perbankan melalui bank tour. Selain itu, terdapat sesi "*Learning Korean*" dan permainan bertema nasionalisme dalam rangka HUT RI ke-79. Program ini sejalan dengan upaya KB Bank dalam membangun literasi keuangan anak sejak dini, mendukung inisiatif inklusi keuangan OJK.



4 September

Rayakan Hari Pelanggan Nasional, KB Bank Gelar *'Customer Visit Day'* ke Kantor Tokopedia

Dalam perayaan Hari Pelanggan Nasional 2024, KB Bank menggelar acara *"Customer Visit Day"* dan "Saranghae Nasabah KB Bank" sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah setia. Direktur Utama KB Bank, Tom (Woo Yeul) Lee menegaskan komitmen Bank dalam memberikan layanan prima serta mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Kegiatan ini mencakup kunjungan ke Tokopedia dan pemberian penghargaan spesial kepada nasabah di kantor cabang KB Bank. Melalui momentum ini, KB Bank meneguhkan posisinya sebagai mitra finansial tepercaya yang terus berinovasi demi kepuasan dan loyalitas nasabah.



7 September

KB Bank Dukung UMKM Naik Kelas melalui Literasi Keuangan di Kabupaten Bekasi

KB Bank berkomitmen meningkatkan literasi keuangan bagi UMKM di Indonesia melalui program *"Community Development*, Meningkatkan Literasi Keuangan dan Pemberdayaan UMKM" yang digelar di Perpustakaan Multikultural, Desa Muktiwari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bekerja sama dengan PPM School of Management dan Yayasan Gugah Nurani Indonesia, KB Bank memberikan edukasi keuangan bagi UMKM agar lebih siap menghadapi tantangan bisnis. Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong menegaskan pentingnya literasi keuangan dalam pengambilan keputusan finansial yang tepat. Program ini juga mendukung inisiatif literasi keuangan OJK guna membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat dan berkelanjutan.



12 Oktober

KB Bank dan Perusahaan Afiliasi KBFG di Indonesia Berkolaborasi Tingkatkan Gizi Anak Kurang Mampu

KB Bank dan afiliasi KBFG di Indonesia meluncurkan program "Bersama KB Indonesia, Berbagi Kebaikan" untuk meningkatkan gizi anak kurang mampu. Berkolaborasi dengan *Hungry Happy Center*, program ini mendukung penurunan angka stunting melalui pemberian makanan bergizi dan edukasi gizi seimbang. Direktur Utama KB Bank Tom Lee, menegaskan komitmen Bank dalam membangun kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan anak. Ke depan, KB Bank akan terus mengintegrasikan nilai ESG dalam operasional dan program sosialnya untuk menciptakan dampak berkelanjutan bagi masyarakat.



25 Oktober

KB Bank Berhasil Menerbitkan Obligasi Global Perdana Senilai 300 Juta USD

KB Bank telah menyelesaikan penentuan harga (*pricing*) Surat Utang *Senior Unsecured Notes* (Obligasi Global) perdananya dalam denominasi US Dollar senilai 300 juta USD pada tanggal 23 Oktober 2024 di Singapura. Langkah ini bertujuan mendiversifikasi pendanaan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dengan tenor 3 tahun, penerbitan ini menandai langkah awal KB Bank di pasar modal internasional.



30 Oktober

Pemain Timnas Indonesia U20, Ji Da Bin Resmi Ditunjuk Menjadi *Brand Ambassador* KBstar

KB Bank telah menunjuk Ji Da Bin, pemain muda timnas Indonesia U-20, sebagai *brand ambassador* KBstar. Ji Da Bin, yang berdarah Indonesia-Korea Selatan dan dikenal atas prestasinya membawa timnas U-16 menjuarai Piala AFF U-16 2022, melambangkan nilai inovasi, dedikasi, dan kerja keras yang diusung KBstar. Penunjukan ini sejalan dengan visi KBstar untuk menginspirasi anak muda Indonesia, sementara aplikasi digital tersebut terus berkembang dengan fitur-fitur inovatif seperti penarikan tunai tanpa kartu di Indomaret dan pertumbuhan pengguna yang signifikan.



7 November

Pemegang Saham Pengendali KB Bank Fasilitasi Operasi Jantung Gratis di Korea untuk Anak-Anak Indonesia

Sebagai bagian dari komitmen CSR dan dukungan terhadap *Sustainable Development Goals* di sektor kesehatan, KB Kookmin Bank—pemegang saham pengendali KB Bank—telah memberikan bantuan medis berupa biaya operasi dan perawatan bagi anak-anak penyandang penyakit jantung yang kurang mampu di Indonesia. Sepuluh anak menjalani operasi jantung gratis di *Samsung Seoul Hospital*, Korea, melalui kerja sama dengan *Samsung Medical Center*, sementara KB Bank mendukung pemulihan pasca-operasi bersama Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Direktur Utama KB Bank, Tom Lee, menegaskan bahwa kesehatan anak adalah kunci pertumbuhan bangsa.



20 November

Konsisten Catat Pertumbuhan Bisnis, KB Bank Kembali Raih Peringkat AAA dari PEFINDO

KB Bank kembali mempertahankan peringkat idAAA dari PEFINDO, peringkat tertinggi yang menegaskan kapasitasnya dalam memenuhi komitmen keuangan jangka panjang. Pencapaian ini sejalan dengan perbaikan fundamental bisnis yang dilakukan secara berkelanjutan, dengan dukungan signifikan dari KB Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali sejak 2020.



18 Desember

Dukung Proyek Strategis Tripatra, KB Bank Perkuat Kemitraan melalui Pembiayaan Vendor

KB Bank memperkuat kemitraan dengan PT Tripatra Engineers and Constructors melalui program pembiayaan vendor untuk menyediakan modal kerja bagi vendor yang mendukung proyek strategis EPC. Wakil Direktur Utama KB Bank Robby Mondong, menekankan bahwa kemitraan strategis dengan Tripatra merupakan wujud nyata dukungan KB Bank terhadap ekosistem bisnis yang inklusif dan produktif.



12 Desember

KB Bank Cetak Pembiayaan *Pre-Order* Mobil Hyundai Hingga Lebih Dari Rp2,1 Triliun Sepanjang 2024

KB Bank mencatatkan pembiayaan *pre-order* mobil Hyundai senilai Rp2,1 triliun dari Januari hingga November 2024, mendanai 5.164 unit dengan plafon lebih dari Rp779 miliar untuk mobil konvensional dan listrik. Pencapaian ini menegaskan komitmen KB Bank yang didukung oleh KB Financial Group dan KB Kookmin Bank dalam menyediakan solusi pembiayaan inovatif dan berkelanjutan bagi dealer Hyundai, mendukung pengembangan industri otomotif nasional serta transformasi menuju era hijau. Langkah ini memperkuat operasional *dealer*, memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan berkualitas, dan sejalan dengan inisiatif pemerintah dalam mengurangi emisi karbon, sekaligus membuka peluang besar bagi perkembangan dealer di tahun 2025.




KB
PRIORITAS

KB Bank



Laporan Manajemen

LAPORAN DEWAN KOMISARIS



Jerry Marmen
Komisaris Utama

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) dapat melalui tahun 2024 yang penuh tantangan dengan capaian yang cukup baik. Dalam menjalankan fungsi strategisnya, Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dengan itikad baik, bertanggung jawab dan penuh kehati-hatian demi kepentingan Bank. Fokus pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dalam tahun 2024 meliputi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), hingga tindak lanjut dan rekomendasi atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, perkenankan Saya mewakili segenap Dewan Komisaris menyampaikan pokok pengawasan di sepanjang tahun 2024 melalui laporan ini.

Perspektif Makro Ekonomi

Sebagaimana dikutip dari Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menjelaskan bahwa Ketegangan politik global yang masih tinggi pada awal tahun 2024 akibat berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina, makin meningkat setelah serangan Israel ke Palestina. Menjelang akhir tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* kembali meningkatkan ketidakpastian global karena berpotensi mengubah lanskap geopolitik dan perekonomian dunia.

Dinamika geopolitik dunia yang cepat berubah telah memengaruhi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2024, dan diprakirakan akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diprakirakan melambat menjadi 3,2% dari 3,3% pada 2023 dan diproyeksikan tetap 3,2% pada 2025, serta melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026. Divergensi pola pertumbuhan antar negara juga berlanjut seiring dengan meningkatnya fragmentasi ekonomi dan perdagangan global. Ekonomi AS diprakirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi yang berasal dari pembengkakan defisit fiskal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa diprakirakan akan melanjutkan perlambatan seiring dengan lemahnya permintaan domestik dan dampak dari kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Pemerintah AS.

Sementara itu, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 juga tak lepas dari berbagai tantangan di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Namun demikian, ekonomi Indonesia tahun 2024 hanya tercatat tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Fungsi Pengawasan dan Hubungan Kerja dengan Direksi

Sepanjang 2024, Dewan Komisaris telah berupaya sebaik-baiknya untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi Bank berada di jalur yang benar tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku baik secara legal maupun norma yang ada. Secara khusus, Dewan Komisaris telah meningkatkan fungsi pengawasannya dengan melakukan pengawasan terhadap berbagai aspek operasional melalui komunikasi yang intensif dengan Direksi terutama dalam rapat gabungan maupun dalam sesi non-formal lainnya. Serta dengan meminta saran maupun rekomendasi kepada komite dibawah Dewan Komisaris atas kinerja Direksi.

Dewan Komisaris secara rutin mengadakan pertemuan dengan Direksi untuk membahas berbagai hal terkait pengelolaan Perusahaan yang dijalankan oleh Direksi dalam forum rapat gabungan. Dalam forum tersebut, Dewan Komisaris dapat meminta penjelasan dari Direksi mengenai pencapaian kinerja Perusahaan dan berbagai kendala yang dihadapi. Dewan Komisaris juga senantiasa menyampaikan pandangan dan memberikan nasihat kepada Direksi mengenai hal tersebut.

Sepanjang 2024 telah dilakukan 6 (enam) kali rapat dengan Direksi mendiskusikan berbagai hal sehubungan dengan bisnis operasional Bank. Dalam rapat tersebut ada kalanya melibatkan pejabat Bank yang terkait dengan materi rapat. Dewan Komisaris juga melakukan pengawasan langsung secara berkala demi memastikan kecukupan pengawasan serta meninjau kesesuaian proses dan hasil kerja dengan kualifikasi yang ditetapkan. Rapat-rapat maupun kunjungan tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk memantau kinerja dan pencapaian Bank sepanjang tahun 2024.

Pandangan Dewan Komisaris atas Kinerja Direksi

Dewan Komisaris memahami bahwa tahun 2024 merupakan tahun yang sangat menantang bagi KB Bank, namun Bank tetap melakukan upaya-upaya dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan kinerja tahun 2024, KB Bank tetap menunjukkan ketangguhannya dalam menghadapi tantangan yang ada. Hal ini terlihat dari capaian beberapa indikator pertumbuhan Bank yang relatif baik dibandingkan dengan target Rencana Bisnis Bank di tahun 2024 yang telah ditetapkan. Kinerja ini merupakan akselerasi semua unit Bank yang melakukan harmonisasi untuk mencapai kinerja terbaik di tengah ketidakpastian ekonomi global dan iklim usaha nasional yang bersifat dinamis.

Untuk mempercepat normalisasi, KB Bank perlu segera menangani berbagai isu strategis yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan kinerja penjualan agar dapat mencapai tingkat yang lebih optimal. Oleh karena itu, Bank telah merumuskan strategi komprehensif yang akan dijalankan sepanjang tahun 2024 guna mempercepat peningkatan kinerja penjualan. Strategi ini diwujudkan melalui empat agenda utama yang difokuskan pada penguatan fundamental bisnis, optimalisasi layanan dan produk, peningkatan kapabilitas digital, serta pengembangan jaringan dan kemitraan strategis. Dengan menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, KB Bank berupaya memastikan bahwa setiap inisiatif yang diambil dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing Bank di industri perbankan yang semakin dinamis.

Di sisi lain, KB Bank tidak hanya fokus pada penyelesaian isu strategis, tetapi juga berupaya menghadirkan inovasi sebagai pendorong utama transformasi bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Bank menetapkan agenda strategis "*Innovation for Turn Around*", yang dirancang untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan implementasi inisiatif efisiensi. Dewan Komisaris menilai kinerja Direksi pada tahun 2024 cukup baik. Dewan Komisaris meyakini bahwa langkah-langkah strategis yang dilaksanakan Direksi berhasil meningkatkan kinerja Bank. Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang sebesar-besarnya atas komitmen dan kerja keras Direksi dalam merealisasikan kinerja tersebut.

Dewan Komisaris, secara formal dan informal, terus menerus mengawasi dan memberikan masukan kepada Direksi dalam hal penerapan rencana dan strategi bisnis Bank. Dewan Komisaris yakin bahwa Direksi dapat memimpin dan membawa Bank untuk terus bertumbuh di tahun 2024 dan kedepannya. Kami berharap KB Bank bisa konsisten menjaga stabilitas rasio-rasio keuangan sebagai implikasi positif dari kinerja Bank dan selalu meningkatkan tingkat kehati-hatian Bank serta mengembangkan inovasi termasuk dalam meningkatkan digitalisasi dan penetrasi pada pasar perbankan di Indonesia.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Sebagaimana dikutip dari Laporan Bank Indonesia bertajuk "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional" menjelaskan bahwa, Dinamika dan arah perekonomian global pada tahun 2025-2026 dan lima tahun ke depan akan berimplikasi besar pada perekonomian Indonesia, dan karenanya perlu diantisipasi dengan respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Setidaknya ada 5 (lima) aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Pentingnya tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai pertahanan pertama dan utama dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian.
2. Perlunya terus meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri, khususnya konsumsi dan investasi, dengan tetap mendorong ekspor melalui kerja sama perdagangan antarnegara.
3. Perlunya akselerasi kebijakan transformasi sektor riil untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi. Perbaikan iklim investasi untuk mampu bersaing dalam menarik masuknya PMA, kemampuan mendorong pertumbuhan sektor padat modal maupun padat karya, serta peningkatan keterampilan dan sertifikasi profesi tenaga kerja semakin penting.
4. Perlunya meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk sumber pembiayaan perekonomian nasional dan tetap menariknya arus modal asing baik dalam bentuk investasi portofolio maupun PMA.
5. Perlunya akselerasi digitalisasi baik dari sisi sistem pembayaran, sektor keuangan, maupun inovasi di berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara nasional dan antarnegara. Digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan semakin berkembangnya sektor jasa keuangan dan perantaraan maupun dengan meningkatnya efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional.

Dewan Komisaris telah mengkaji Rencana Bisnis Bank 2025 yang telah disusun Direksi dan berpendapat bahwa asumsi-asumsi yang digunakan adalah realistis, dengan target yang mendorong pertumbuhan bisnis Bank dengan rencana strategis yang tepat untuk pencapaian target tersebut. Dewan Komisaris mengingatkan kembali bahwa salah satu kunci pencapaian rencana bisnis tersebut adalah sinergi dan tekad dari segenap insan Bank untuk mencapai tujuan yang terbaik dan berkomitmen untuk terus menjalankan tata kelola Bank yang baik dan berkelanjutan.

Dewan Komisaris juga senantiasa mendukung upaya Bank untuk terus mengembangkan berbagai produk dan layanan yang inovatif dan memenuhi kebutuhan nasabah secara kontekstual. Sesuai dengan perannya, Dewan Komisaris akan terus memberikan motivasi, arahan dan masukan sebagai bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan yang berkesinambungan di masa depan. Untuk itu, Dewan Komisaris sepenuhnya mendukung dan senantiasa akan memberikan dorongan agar target-target tersebut dapat tercapai dengan baik.

Pandangan atas Penerapan GCG

Sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab, KB Bank memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh penerapan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Oleh karena itu, KB Bank mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam seluruh lini organisasi. Hal ini mencakup manajemen senior hingga karyawan di semua tingkat, serta melibatkan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk memastikan implementasi GCG berjalan optimal, KB Bank menerapkan tiga pilar utama tata kelola perusahaan, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome*. *Governance Structure* berfokus pada penguatan kerangka kerja organisasi, *Governance Process* memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai standar, sedangkan *Governance Outcome* bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Untuk menjaga konsistensi, KB Bank secara rutin melakukan evaluasi kualitas GCG, baik melalui *self-assessment* maupun dengan melibatkan pihak ketiga untuk penilaian yang lebih independen. Adapun pemantauan GCG dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Monitoring* pelaksanaan rekomendasi SEOJK kepada seluruh unit kerja terkait.
2. Melakukan *reminder* penerapan GCG ke seluruh unit kerja terkait.
3. Meningkatkan sosialisasi dengan *Compliance Awareness* (kesadaran kepatuhan) yang dimaksud adalah kesadaran bahwa adanya peraturan oleh seluruh pihak berikut pemahaman akan peraturan.
4. Di sisi lain, Dewan Komisaris juga berperan dalam pengawasan serta *monitoring* terhadap implementasi *Whistleblowing System* yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud*. Dewan Komisaris memastikan kepedulian dan budaya anti *Fraud* pada seluruh jajaran organisasi, melalui deklarasi anti *Fraud* serta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan *Fraud*.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan maupun jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 24 Januari 2024, yang memberhentikan dengan hormat Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama, dan mengangkat Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada 28 Juni 2024, yang memberhentikan dengan hormat Eugene K. Galbraith selaku Komisaris Independen dan Sukriansyah S. Latief, sebagai Komisaris Independen Perseroan.
Dengan demikian, susunan dan komposisi Dewan Komisaris yang masih aktif hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Jerry Marmen	Komisaris Utama	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 24 Januari 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026
Nanang Supriyatno	Komisaris	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 22 Desember 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi di bidangnya masing-masing yang memadai serta mampu menyediakan waktu yang cukup dalam menjalankan tugasnya, serta tidak memiliki benturan kepentingan dan tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

Penutup

Melalui kesempatan ini, izinkan saya mewakili segenap Dewan Komisaris menyampaikan apresiasi kami kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga segala upaya yang telah dilakukan di tahun 2024 ini maupun tantangan yang menanti pada tahun 2025 dapat dilalui bersama dengan hasil yang positif dan berkelanjutan. Apresiasi dan penghargaan terdalam juga kami tujukan kepada segenap Direksi, jajaran Manajemen dan seluruh karyawan atas kerja keras serta dedikasi dalam upaya pengembangan Bank menjadi lebih baik lagi. Tak lupa kami juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para nasabah, mitra bisnis maupun pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kepercayaan kepada KB Bank.

Jakarta, 20 Maret 2025



Jerry Marmen
Komisaris Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.



LAPORAN DIREKSI



Woo Yeul Lee
Direktur Utama

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Di sepanjang tahun 2024, semua sektor usaha masih dihadapkan dengan tantangan ketidakpastian, tak terkecuali sektor perbankan. Namun demikian, PT Bank KB Bukopin Tbk (KB Bank) senantiasa berusaha secara optimal melalui berbagai kebijakan strategis dalam rangka menjawab tantangan usaha dan mencapai hasil yang maksimal. Laporan tahunan ini menjadi bagian dari pelaporan manajemen atas strategi dan kinerja Bank di sepanjang tahun 2024, sekaligus menjadi dokumentasi atas perjalanan Perseroan untuk mencapai visi dan misi yang telah dicanangkan. Selanjutnya perkenankanlah kami selaku Manajemen KB Bank untuk menyampaikan pengelolaan Bank di tahun buku 2024.

Analisa Makroekonomi

Dalam beberapa tahun terakhir, ketegangan geopolitik semakin meningkat, yang berdampak signifikan pada stabilitas ekonomi global. Ketegangan geopolitik global yang terjadi sepanjang tahun 2024 turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Beberapa faktor utama yang berdampak terhadap perekonomian nasional meliputi:

1. Perang dan Ketegangan Global: Konflik antara Rusia dan Ukraina yang berlarut-larut serta ketegangan di Timur Tengah menyebabkan ketidakstabilan harga energi dan pangan. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak dan beberapa bahan pangan, Indonesia menghadapi tekanan pada harga-harga komoditas, yang berkontribusi terhadap inflasi domestik.
2. Perlambatan Ekonomi China: Sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, perlambatan ekonomi China dapat berdampak pada ekspor komoditas utama Indonesia, seperti batu bara dan kelapa sawit. Penurunan permintaan dari China berpotensi mengurangi pendapatan ekspor Indonesia dan mempengaruhi sektor pertambangan serta perkebunan.

Di tengah tantangan geopolitik global, ekonomi Indonesia juga menghadapi berbagai dinamika domestik, seperti:

1. Stabilitas Inflasi dan Suku Bunga: Bank Indonesia (BI) terus menjaga keseimbangan antara stabilitas inflasi dan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan moneter yang hati-hati. Penyesuaian suku bunga acuan BI dilakukan untuk merespons inflasi global dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
2. Investasi dan Hilirisasi Industri: Pemerintah terus mendorong investasi di sektor hilirisasi, terutama di industri pertambangan dan manufaktur. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah ekspor dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah. Namun, tantangan regulasi dan kepastian hukum tetap menjadi perhatian bagi investor asing.
3. Transformasi Digital dan Keuangan Inklusif: Percepatan digitalisasi, khususnya di sektor perbankan, terus berkembang dengan meningkatnya penggunaan layanan perbankan digital dan fintech. KB Bank sebagai bagian dari ekosistem keuangan di Indonesia turut beradaptasi dengan menyediakan solusi digital yang inovatif untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Tinjauan Makro Industri

Industri perbankan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kebijakan moneter yang responsif dan kondisi ekonomi yang membaik. Menurut Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2024 dari Bank Indonesia, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 5,31% pada triwulan IV 2024, meningkat dari 5,04% pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimisme yang meningkat di kalangan pelaku pasar dan konsumen, yang berkontribusi pada peningkatan permintaan kredit di sektor perbankan.

Salah satu indikator penting dari kesehatan industri perbankan adalah rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL). Data menunjukkan bahwa rasio NPL berada pada level 2,5%, yang menunjukkan stabilitas dalam kualitas aset perbankan. Bank Indonesia mencatat bahwa meskipun ada tantangan global, industri perbankan tetap mampu menjaga rasio NPL di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu 5%. Ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia telah menerapkan manajemen risiko yang baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Dalam hal likuiditas, total dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang positif, mencapai Rp6.500 triliun pada akhir tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta inovasi produk yang ditawarkan oleh bank. Bank Indonesia melaporkan bahwa suku bunga simpanan rata-rata berada di kisaran 4,5%, yang menarik lebih banyak nasabah untuk menempatkan dananya di bank.

Kredit yang disalurkan oleh perbankan juga menunjukkan tren positif, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp5.800 triliun. Sektor yang paling banyak mendapatkan kredit adalah sektor perdagangan dan industri pengolahan, yang masing-masing menyerap 30% dan 25% dari total kredit. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil melalui berbagai insentif dan program stimulus.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital juga memberikan dampak positif terhadap industri perbankan. Volume transaksi uang elektronik dan perbankan digital meningkat pesat, dengan nilai transaksi perbankan digital mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2024. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan

ini didorong oleh adopsi teknologi yang semakin meluas di kalangan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur digital yang mendukung transaksi keuangan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakpastian global yang dapat memengaruhi aliran modal dan investasi. Indeks ketidakpastian global menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang berfluktuasi di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ini dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perbankan, Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan moneter yang akomodatif. Suku bunga kebijakan saat ini berada di level 5,75%, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, industri perbankan nasional pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang solid dengan prospek yang optimistis. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan adaptasi terhadap perubahan pasar, diharapkan industri perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Peranan Direksi dalam Penerapan Kebijakan Strategis Bank

Dalam menjalani perannya sebagai pengurus Bank, Direksi beserta jajaran senantiasa melakukan mitigasi usaha dalam rangka menghadapi ketidakpastian kondisi iklim usaha di sepanjang tahun 2024. KB Bank memahami bahwa dalam menghadapi dinamika ini, pendekatan yang responsif, adaptif, dan strategis sangat diperlukan agar tetap kompetitif serta dapat terus memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan. Untuk itu, KB Bank melakukan langkah strategis dalam memitigasi hal tersebut agar menjamin keberlangsungan bisnis bank tetap berjalan meliputi:

1. **Manajemen risiko yang memadai:** dengan memperkuat struktur organisasi unit kerja manajemen risiko, memperdalam analisis terhadap volatilitas makroekonomi, penguatan *stress testing*, serta mengoptimalkan pengawasan pengelolaan likuiditas dan modal agar tetap kuat dalam berbagai skenario ekonomi. Fokus menjaga likuiditas juga dilakukan dengan penyesuaian strategi *pricing* kredit dan pendanaan agar tetap kompetitif di tengah perubahan kebijakan moneter, sehingga tetap mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
2. **Transformasi Digital:** KB Bank mempercepat digitalisasi layanan perbankan melalui pengembangan *Project SHINE* yaitu transformasi untuk mendukung sistem serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam bisnis bank yang berdampak kepada peningkatan kepuasan nasabah. Di sisi operasional, otomatisasi dan optimalisasi proses dilakukan untuk meningkatkan efisiensi serta fleksibilitas operasional dalam merespons perubahan pasar.

Di sisi lain, KB Bank juga menjalankan berbagai kebijakan strategis lainnya, meliputi:

1. Strategi Diversifikasi
   Berdasarkan hasil pengukuran dan situasi ekonomi terkini, KB Bank menetapkan strategi diversifikasi yang terukur dengan memperkuat pembiayaan di segmen-segmen utama yang terbukti memiliki ketahanan di tengah tekanan ekonomi global diantaranya:
   a. ***Corporate Banking:*** Segmen *Corporate Banking* tetap menjadi pilar utama bagi KB Bank dalam strategi ekspansi bisnis, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap pertumbuhan portofolio dan profitabilitas. Namun, di tengah ketidakpastian ekonomi global serta dinamika industri yang terus berkembang, KB Bank menerapkan pendekatan yang lebih selektif dan berhati-hati dalam menentukan sektor bisnis yang akan dibiayai. Fokus utama pembiayaan diarahkan pada sektor-sektor dengan fundamental ekonomi yang kuat, prospek pertumbuhan yang berkelanjutan, serta risiko yang terukur, seperti infrastruktur, kesehatan, energi terbarukan dan industri pendukung lainnya. Saat ini KB Bank mulai mengurangi porsi pembiayaan pada sektor komoditas batu bara serta manufaktur berbasis ekspor dikarenakan adanya permintaan dan penawaran yang fluktuatif akibat adanya volatilitas harga. Pemilihan sektor ini dilakukan berdasarkan analisis menyeluruh terhadap daya tahan industri, kebijakan pemerintah, serta tren ekonomi makro yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelangsungan bisnis nasabah.
   b. ***Pension Loan:*** KB Bank juga dikenal sebagai Bank mitra penyalur kredit pensiun yang kredibel serta memiliki nasabah yang cukup banyak sehingga berdampak positif terhadap pendapatan bank yang mencapai Rp 12 Triliun pada tahun 2023. Bank berhasil memperluas kerja sama *channeling* dengan berbagai lembaga pensiun dan instansi pemerintah, memperkuat kepercayaan serta memperluas jangkauan layanan bagi nasabah pensiunan
   c. ***Mortgage:*** Bisnis *mortgage* memiliki prospek yang sangat menjanjikan, didukung oleh meningkatnya kebutuhan akan hunian serta pertumbuhan kelas menengah di Indonesia. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong kepemilikan rumah melalui berbagai insentif, seperti suku bunga yang kompetitif dan program subsidi perumahan, permintaan kredit pemilikan rumah (KPR) diproyeksikan terus meningkat. Selain itu, perkembangan infrastruktur di berbagai daerah dan ekspansi kawasan perkotaan menciptakan peluang baru bagi sektor properti, yang pada akhirnya memperkuat potensi bisnis *mortgage*. Melihat fenomena tersebut KB Bank terus ekspansi pada bisnis ini salah satunya dengan menghadirkan 20 *Mortgage Center* di Indonesia untuk memperluas pasar.
   d. ***SME:*** Bisnis SME di KB Bank terus menunjukkan pertumbuhan yang positif, didorong oleh komitmen dalam mendukung pelaku usaha kecil dan menengah sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Dengan strategi yang berfokus pada SME *upper size*, KB Bank menghadirkan solusi pembiayaan yang tepat

guna, termasuk skema kredit yang fleksibel, suku bunga kompetitif, serta akan dikembangkan layanan berbasis digital yang mempermudah akses permodalan bagi nasabah. Selain itu, KB Bank juga memperkuat sinergi dengan berbagai ekosistem bisnis, termasuk *supply chain financing*, untuk mendukung arus kas dan keberlanjutan usaha nasabah SME.

2. Strategi *Pricing*
   KB Bank menerapkan strategi *Asset & Liability Management* (ALMA) yang adaptif dan terukur. Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara profitabilitas, likuiditas, dan risiko dalam pengelolaan aset serta kewajiban bank:
   a. Penyesuaian Suku Bunga yang Kompetitif & Berbasis Risiko
   b. Optimalisasi *Cost of Fund* (CoF) untuk Menjaga Profitabilitas
3. Optimalisasi Perbankan Digital
   KB Bank memperkenalkan produk digital banking KB Star pada September 2023. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital nasabah dengan berbagai fitur unggulan dan dipersiapkan untuk dapat bersaing dengan aplikasi *super app* kompetitor.

Tantangan dan Solusi Penanganan Kendala

Sepanjang tahun 2024, iklim usaha global masih menghadapi tantangan signifikan akibat ketidakpastian geopolitik, perlambatan ekonomi, serta perubahan kebijakan moneter di berbagai negara. Konflik geopolitik yang berkepanjangan, seperti ketegangan di Timur Tengah dan Eropa Timur, berdampak pada stabilitas pasar keuangan, harga komoditas, dan rantai pasok global. Selain itu, kebijakan suku bunga tinggi yang diterapkan oleh bank sentral di berbagai negara sebagai respons terhadap inflasi juga mempengaruhi likuiditas dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Di Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi tetap positif, tekanan eksternal tetap menjadi faktor yang harus diwaspadai. Pelemahan permintaan global dapat berdampak pada ekspor, sementara ketidakpastian nilai tukar dapat mempengaruhi biaya impor dan inflasi domestik. Sektor keuangan juga menghadapi tantangan akibat persaingan ketat dalam penghimpunan dana, penyesuaian suku bunga kredit, serta perubahan preferensi nasabah terhadap produk keuangan.

Dalam kondisi ini, dunia usaha perlu mengadopsi strategi yang lebih adaptif dan prudent untuk menjaga stabilitas bisnis. Diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Di tengah ketidakpastian ekonomi dan dinamika geopolitik global, KB Bank menghadapi beberapa tantangan utama yang memengaruhi kinerja bisnis, terutama dalam aspek kredit, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Fee-Based Income*., dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyaluran Kredit
   Tantangan: Perlambatan ekonomi dapat berdampak pada menurunnya permintaan kredit, meningkatnya risiko kredit macet, serta selektivitas nasabah dalam mengambil pinjaman. Selain itu, kebijakan moneter yang lebih ketat juga berpotensi meningkatkan biaya kredit.
   Solusi:
   a. KB Bank menerapkan strategi ekspansi kredit yang selektif dengan fokus pada sektor-sektor yang memiliki fundamental ekonomi kuat dan resilien, seperti infrastruktur, kesehatan, energi terbarukan, dan SME.
   b. Selain itu, bank memperkuat mitigasi risiko melalui analisis kredit yang lebih ketat serta inovasi produk pembiayaan yang lebih fleksibel untuk menarik nasabah potensial.
   c. KB Bank juga menyesuaikan *pricing* kredit menjadi lebih konservatif namun tetap menguntungkan bagi bank.
   d. Mengembangkan *scoring* model untuk meningkatkan akurasi penilaian risiko kredit.
2. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)
   Tantangan: Persaingan dalam penghimpunan dana semakin ketat, terutama dengan meningkatnya suku bunga yang mendorong nasabah untuk mencari instrumen investasi yang lebih menguntungkan dibandingkan simpanan perbankan konvensional.
   Solusi:
   a. KB Bank memperkuat strategi penghimpunan dana dengan meningkatkan porsi dana murah (CASA) melalui digitalisasi layanan perbankan, optimalisasi produk tabungan dan giro yang kompetitif, serta sinergi dengan ekosistem bisnis untuk meningkatkan loyalitas nasabah.
   b. KB Bank juga melakukan penyesuaian *pricing* produk dana agar tetap stabil dan menguntungkan.
   c. KB Bank juga meningkatkan layanan digital banking dan program loyalitas nasabah Menjaga keseimbangan likuiditas dan profitabilitas dengan pengawasan *Asset Liability Committee* (ALCO) yang lebih dinamis
   d. Memperkuat integrasi serta *partnership* dengan *fintech* dan ekosistem digital lainnya.

Kinerja Tahun 2024 dan Perbandingannya terhadap Target

Sepanjang tahun 2024, Bank melakukan penyesuaian terhadap target Bank sebanyak 2 (dua) kali yakni target awal disusun November 2023, revisi pertama disusun Februari 2024. Lalu, revisi kedua disusun Juni 2024. Revisi target ini didasarkan beberapa pertimbangan, termasuk di dalamnya perubahan kondisi makro ekonomi sebagai dampak dari kondisi perekonomian global maupun kebijakan pemerintah, serta adanya beberapa *concern* dari regulator. Di tahun 2024, Bank merencanakan perolehan dari beberapa komponen substansial sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja Perusahaan. Perbandingan antara rencana dan realisasi adalah sebagai berikut:

Jumlah Aset

Per 31 Desember 2024, Jumlah Aset KB Bank tercatat sebesar 83,08 triliun atau 93,78% dari target sebesar Rp88,58 triliun. Pencapaian tersebut turun 1,46% dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar Rp84,31 triliun. Adapun ekuitas terbilang sebesar Rp7.96 triliun atau 64,19% dari target sebesar Rp12,40 triliun. Raihan itu turun 43,57% dibandingkan ekuitas tahun 2023 yang mencapai Rp14,11 triliun. Selanjutnya, total kredit yang diberikan KB Bank per 31 Desember 2024 terbilang sebesar Rp47.53 triliun atau 94,34% dari target sebesar Rp 50,38 triliun. Pencapaian tersebut turun 3,83% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp49.42 triliun. Sedangkan total simpanan nasabah pada tahun pelaporan terbilang Rp46.59 triliun, naik 4,03% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp44.79 triliun.

Pendapatan Bunga dan Syariah

Per 31 Desember 2024, total pendapatan bunga dan syariah tercatat sebesar Rp5.45 triliun, naik sebesar Rp592 miliar atau 12,19% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp4,86 triliun. Adapun total beban bunga dan syariah tercatat sebesar Rp4.30 triliun, naik sebesar Rp249 miliar atau 6.13% dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp4,05 triliun. Hal tersebut berdampak terhadap bertambah pendapatan bunga dan syariah neto dari Rp808,88 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp1.15 triliun pada tahun 2024 atau naik 42,51%. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh Peningkatan pada pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp456 miliar dan Peningkatan pendapatan bunga pada Surat-surat berharga sebesar Rp195 miliar.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Pada tahun 2024, KB Bank mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp6,33 triliun, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp272,92 miliar atau 4,51% dari tahun sebelumnya yang mencatat rugi sebesar Rp6,06 triliun. Penyebab utama kenaikan rugi bersih tahun berjalan tersebut karena bank melakukan assesment atas rugi fiskal 5 (tahun) kedepan yang tidak terealisasi dengan menggunakan asumsi data RBB periode 2024-2029.

Gambaran Tentang Prospek Usaha

Memasuki tahun 2025, KB Bank optimis terhadap prospek industri perbankan yang semakin terbuka seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, peningkatan investasi, serta akselerasi transformasi digital di berbagai sektor. Meskipun masih terdapat tantangan dari dinamika ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat serta berbagai kebijakan strategis pemerintah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil menjadi peluang bagi KB Bank untuk terus memperluas dan mengembangkan portofolio bisnisnya.

Dalam rangka memanfaatkan peluang ini, KB Bank akan menerapkan strategi pertumbuhan berkelanjutan dengan fokus pada beberapa segmen bisnis utama meliputi:

1. *Corporate Banking* akan menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan KB Bank di tahun 2025. Fokus pengembangan segmen ini diarahkan pada :
   a. Pembiayaan di Sektor Strategis: KB Bank akan memperkuat perannya dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, energi terbarukan, kesehatan, dan industri berbasis ekspor yang memiliki fundamental kuat dan prospek pertumbuhan yang positif.
   b. Sinergi dengan *Supply Chain Finance*: Dengan memperkuat layanan *Supply Chain Finance*, KB Bank dapat meningkatkan keterlibatan dalam ekosistem bisnis perusahaan besar dengan memberikan solusi pembiayaan yang lebih efisien bagi pemasok dan distributor mereka.
2. Penguatan Segmen SME *Upper Size*
   Segmen SME *Upper Size* merupakan salah satu area dengan potensi pertumbuhan tinggi seiring dengan berkembangnya sektor usaha menengah yang semakin membutuhkan akses ke pembiayaan dan layanan perbankan yang lebih kompleks.
3. Pertumbuhan Berkelanjutan di Segmen *Mortgage*
   Pasar *Mortgage* di Indonesia masih memiliki potensi yang besar, terutama dengan meningkatnya kebutuhan kepemilikan rumah bagi masyarakat. KB Bank akan menerapkan strategi berikut:
   a. Skema Pembiayaan yang Kompetitif: KB Bank akan menghadirkan produk *mortgage* dengan skema bunga yang lebih fleksibel dan program promosi yang menarik untuk menarik lebih banyak nasabah.
   b. Kemudahan Akses melalui Digitalisasi: Dengan memanfaatkan teknologi digital, KB Bank akan meningkatkan kemudahan dalam pengajuan kredit rumah, baik melalui *mobile banking* maupun kolaborasi dengan platform properti digital.
   c. Ekspansi ke Pasar yang Potensial: Fokus ekspansi akan diarahkan pada wilayah dengan pertumbuhan sektor properti yang tinggi, termasuk kota-kota berkembang dan kawasan industri.
4. Optimalisasi Kredit Pensiun
   Segmen kredit pensiun tetap menjadi salah satu lini bisnis yang stabil dengan risiko yang lebih terkendali. Untuk meningkatkan penetrasi di segmen ini, KB Bank akan meningkatkan jangkauan layanan melalui *Channeling*. KB Bank akan memperluas cakupan layanan pensiun dengan menjangkau lebih banyak ASN, pensiunan BUMN, dan institusi yang memiliki skema pensiun tetap.
5. Penguatan *Supply Chain Finance* sebagai Pendorong Pertumbuhan Bisnis
   KB Bank melihat *Supply Chain Finance* sebagai salah satu peluang besar untuk meningkatkan volume pembiayaan dengan risiko yang lebih terukur. Fokus pengembangannya meliputi:
   a. Ekspansi Kemitraan dengan Korporasi dan menambah *anchor company*: KB Bank akan memperluas jaringan mitra korporasi untuk menjangkau lebih banyak pemasok dan distributor yang membutuhkan dukungan pembiayaan modal kerja.
   b. Diversifikasi Produk: KB Bank akan mengembangkan berbagai skema pembiayaan termasuk *invoice financing* untuk meningkatkan fleksibilitas bagi pelaku usaha.
6. Akselerasi Digital Banking sebagai Pilar Transformasi
   Digitalisasi akan terus menjadi salah satu prioritas utama KB Bank dalam memperkuat daya saing dan meningkatkan inklusi keuangan. Digitalisasi diimplementasikan melalui *Project SHINE* yaitu inisiatif transformasi besar yang mencakup berbagai aspek sistem perbankan, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan pengalaman nasabah. Salah satu yang menjadi fokus dalam *SHINE* yaitu *Core Banking System Modernization* yaitu mengganti sistem inti perbankan

lama dengan sistem baru yang lebih fleksibel, cepat, dan efisien dalam menangani transaksi perbankan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, KB Bank telah menetapkan langkah strategis yang disebut *MOVE*, dimana dalam masing-masing langkah strategis terdapat inisiatif yang bertujuan mencapai target bisnis sesuai prospek usaha di tahun 2025. Langkah strategis *MOVE* terdiri dari:

a. *Maximize Growth*: Meningkatkan *Net Interest Margin* (NIM) dengan ekspansi portofolio pinjaman berkualitas, efisiensi biaya dana (COF), dan pengembangan bisnis *fee-based*. Dalam langkah strategis ini terdapat 3 inisiatif yaitu:
   i) Penguatan kompetensi utama pada segmen *wholesale*
   ii) Pengembangan kapabilitas bisnis SME dan Retail
   iii) Mengaktifkan Pendapatan Berbasis *Fee* melalui *Cross-Sell* & Dukungan Spesialis dari Kantor Pusat
b. *On the Market*: Memperkuat citra merek dan loyalitas pelanggan melalui inovasi layanan digital, personalisasi, dan komunikasi yang efektif. Dalam langkah strategis ini terdapat 3 inisiatif yaitu:
   i) Optimalisasi Pemulihan Aset Bermasalah
   ii) Meningkatkan Model Cabang agar Selaras dengan Potensi Bisnis dan Tren Teknologi 3) Mindset "*Customer First*" – Mewujudkan Pelayanan yang Berpusat pada Nasabah.
c. *Versatile Talent*: Mengembangkan keterampilan karyawan melalui pelatihan adaptif serta membangun budaya kerja yang produktif dan inovatif. Dalam langkah strategis ini terdapat 3 inisiatif yaitu:
   i) Menyiapkan *Human Capital* untuk Digitalisasi dan Selaras dengan Fokus Bisnis
   ii) Mengembangkan SDM Menjadi Talenta Unggul (*Top Talent*)
   iii) *Risk and Compliance* Culture.
d. *Empowered Biz through Digital & IT*: Mendorong transformasi digital dengan *platform SHINE* dan aplikasi KBStar untuk meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan nasabah. Dalam langkah strategis ini terdapat 2 inisiatif yaitu:
   i) Implementasi *NGBS* dengan Dukungan Proaktif dari Seluruh Karyawan
   ii) Memaksimalkan Kapabilitas IT & Digital untuk Menciptakan "*KB Ecosystem*"

Penerapan konsisten strategi ini akan mendukung penguatan posisi KB Bank di industri perbankan Indonesia.

Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, manajemen telah melaksanakan penerapan pada ruang lingkup tata kelola, antara lain:

1. Kelengkapan dan kecakapan struktur tata kelola yaitu Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Kebijakan dan Prosedur, Satuan Kerja.
2. *Revamping* Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan Peraturan OJK Nomor 17 tahun 2023.
3. Pembentukan Kebijakan Tinggi tentang Tata Kelola yang mengacu kepada Peraturan OJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
4. Pelaksanaan proses Tata Kelola yaitu rapat Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Komite di bawah Dewan Komisaris yang dilakukan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku
5. Pengambilan keputusan strategis secara musyawarah mufakat dan mengedepankan kepentingan Bank.
6. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dapat merugikan Bank.
7. Penerapan fungsi Kepatuhan, Manajemen risiko, Audit internal dan Audit eksternal berjalan dengan baik.
8. Penerapan transparansi sesuai ketentuan baik dari laporan keuangan publikasi, maupun informasi produk dan layanan yang didukung IT *system* yang memadai.
9. *Revamping* kebijakan/pembuatan Kebijakan Internal untuk menyesuaikan perubahan regulasi eksternal, perubahan struktur organisasi dan kebijakan strategis Bank, serta pengkinian kebijakan.

Selain itu, manajemen juga melakukan upaya peningkatan penerapan tata kelola pada seluruh karyawan dengan cara:
Human Capital Morning Quiz.

1. *AML Awareness.*
2. *Security Awareness.*
3. Monitoring pembaruan Kebijakan dan Prosedur.
4. Training dan sertifikasi pada seluruh jenjang karyawan.

Penilaian Terhadap Komite-Komite di Bawah Direksi

Untuk memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, KB Bank memiliki 4 (empat) komite di bawah Direksi yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebijakan dan strategi Perseroan. Komite-komite ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK, meliputi Komite Manajemen Risiko, Komite Kredit, *Assets And Liabilities Committee* (ALCO), dan Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi. Direksi menilai bahwa komite-komite yang dibentuk telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan efektif di sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kinerja komite-komite dalam mencapai tujuan mereka, serta efektivitas proses kerja dan kontribusinya terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan demikian, keberadaan komite-komite ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola perusahaan secara keseluruhan dan mendukung pencapaian tujuan bisnis yang strategis.

Perubahan Komposisi Direksi

Di tahun 2024, terjadi perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 24 Januari 2024, yang memberhentikan dengan hormat Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan, serta mengangkat Jang Hyuk Im sebagai Direktur Perseroan. Selain itu, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada 28 Juni 2024, yang memberhentikan dengan hormat Young Eun Moon sebagai Direktur Perseroan dan Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan.

Adapun komposisi dan susunan Direksi yang berlaku pada 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	RUPS Tahunan 25 Mei 2022	2022-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027
Helmi Fahrudin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Dodi Widjajanto	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Henry Sawali	Direktur	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027
Jung Ho Han	Direktur	RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023	2023-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025
Jang Hyuk Im	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Januari 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026

Struktur Organisasi Bank di 2024

Dalam rangka memperkuat daya saing dan meningkatkan efektivitas operasional, selama tahun 2024 KB Bank melakukan dua kali penyesuaian struktur organisasi. Penyesuaian ini dilakukan untuk merespons dinamika industri perbankan, perubahan regulasi, serta akselerasi transformasi digital yang terus berkembang. Penyesuaian pertama berlangsung pada bulan Februari 2024 sesuai dengan SK No. 007 Tahun 2024 dan di addendum pada bulan Maret 2024 sesuai dengan SK No. 041 Tahun 2024. Penyesuaian kedua berlangsung pada bulan September 2024 sesuai SK No.101 Tahun 2024. Adapun penyesuaian struktur organisasi adalah bertujuan sebagai berikut.

1. Percepatan proses kredit retail, khususnya optimalisasi pada pertumbuhan bisnis *mortgage*.
2. Percepatan adopsi teknologi baru melalui *SHINE Project*/ *NGBS* dan meningkatkan kemampuan TI.
3. Meningkatkan kinerja *collection* melalui koordinasi dengan *Special Purpose Company* (SPC)
4. Optimalisasi pengelolaan risiko kredit serta meningkatkan kualitas aset dan meningkatkan Fungsi *Early Warning System* (EWS).
5. Pembentukan Personal *Data Protection* and *IT Risk Management* untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Hal ini juga sebagai bentuk kepatuhan KB Bank terhadap regulasi dari regulator terhadap perlindungan data nasabah.

Aktivitas Utama Bank di 2024

Sepanjang tahun 2024, KB Bank terus memperkuat posisinya sebagai mitra finansial strategis dengan fokus pada pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan inovatif. Aktivitas utama KB Bank mencakup ekspansi pembiayaan di sektor-sektor potensial, peningkatan layanan digital, serta pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Sebagai bagian dari komitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, KB Bank meluncurkan dan mengembangkan beberapa produk utama, sebagai berikut:

1. KUR Tebu
   KB Bank menjalin kerja sama strategis dengan PT Pabrik Gula Rajawali II (PG Rajawali II) dan PT Mata Langit Solusindo (MATA) untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani tebu. Produk ini ditujukan bagi petani tebu untuk memastikan pembiayaan yang mudah dan terjangkau dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan skema pembiayaan yang fleksibel dan dukungan ekosistem industri gula, KB Bank berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
2. KB Star
   Untuk meningkatkan pengalaman perbankan digital, KB Bank memperkenalkan KB Star, sebuah platform digital banking yang menawarkan berbagai layanan finansial dalam satu aplikasi. Dengan fitur-fitur inovatif seperti *personal financial management*, investasi, dan transaksi lintas *platform*, KB Star dirancang untuk memberikan kenyamanan dan efisiensi bagi nasabah ritel dan bisnis.
3. *Supply Chain Financing*
   a. KB Bank memperkuat dukungannya terhadap sektor korporasi dan SME dengan memperluas layanan *Supply Chain Financing*. Produk ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi modal kerja bagi perusahaan dengan memberikan pembiayaan berbasis transaksi kepada pemasok dan distributor. Dengan solusi ini, KB Bank membantu meningkatkan daya saing bisnis nasabah serta mempercepat arus kas dalam rantai pasok industri.

   Selain itu, dalam skema *Dealer Financing*, KB Bank telah menjalin kerja sama dengan Hyundai Motor Indonesia. Melalui kolaborasi ini, KB Bank menyediakan fasilitas pembiayaan untuk pemesanan kendaraan kepada dealer-dealer resmi Hyundai, seperti yang telah dilakukan dengan cabang Palembang. Langkah ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok kendaraan dan mendukung pertumbuhan penjualan di jaringan dealer Hyundai.

   KB Bank menerapkan pendekatan berbasis *Anchor Company*, di mana pembiayaan diberikan kepada perusahaan utama (*anchor*) beserta ekosistem bisnisnya, termasuk pemasok dan distributor. Strategi ini memungkinkan KB Bank untuk membangun sinergi dalam ekosistem bisnis yang kuat, mengoptimalkan risiko kredit, serta memperluas penetrasi layanan ke segmen korporasi dan SME secara lebih terukur.

4. Rekening Dana Nasabah (RDN)
   Dalam mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia, KB Bank memperkenalkan layanan Rekening Dana Nasabah (RDN) sebagai bagian dari ekosistem investasi dengan bekerja sama dengan KB Valbury Sekuritas. Produk ini mempermudah investor dalam melakukan transaksi efek dengan akses yang lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus mendukung pertumbuhan inklusi keuangan di sektor pasar modal.
5. *Mortgage*
   Untuk memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah yang terus meningkat, KB Bank memperkuat produk *Mortgage* dengan skema pembiayaan yang lebih kompetitif dan fleksibel. Berbagai inovasi dalam fitur kredit pemilikan rumah (KPR), seperti suku bunga yang lebih kompetitif dan proses persetujuan yang lebih cepat melalui digitalisasi, semakin memudahkan masyarakat dalam memiliki hunian impian.

Dukungan Teknologi Informasi

Sistem teknologi informasi perbankan yang saat ini dimiliki oleh KB Bank saat ini dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis bank yang cepat, sehingga diperlukan inisiatif transformasi untuk mengembangkan *Core Banking, Digital, Accounting, Information* Sistem dan Infrastruktur baru. Menindaklanjuti hal tersebut, KB Bank telah menetapkan beberapa kebijakan strategis agar bank memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan bisnis yang cepat, yaitu:

1. Kebijakan Strategis TI 2024
   Strategi untuk pengembangan teknologi informasi yang yang dilakukan oleh KB Bank untuk tahun 2024 adalah:
   a. Fokus pada pengembangan dan penyelesaian Proyek *SHINE*.
   b. Selain hal-hal yang berkaitan dengan Proyek *SHINE*, pengembangan belum dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan hampir keseluruhan sistem informasi akan diremajakan dalam Proyek *SHINE*. Namun demikian, hal tersebut tidak berlaku untuk proyek dengan kategori regulasi, tindak lanjut atas *external audit findings* dan pengembangan yang dikategorikan dalam pengembangan strategis.
2. Kebijakan Strategis TI Kedepannya.
   Strategi untuk pengembangan teknologi informasi yang yang dilakukan oleh KB Bank kedepannya adalah:
   a. Implementasi dan pengoperasian sistem *SHINE*.
   b. Melakukan stabilisasi sistem *SHINE*.
   c. Memperkuat kemampuan pengoperasian sistem dengan memprioritaskan pelatihan reguler, program pendidikan kepada karyawan dan untuk memaksimalkan efisiensi dan kinerja.
   d. Otomatisasi dalam pengoperasian sistem untuk meningkatkan produktivitas.
   e. Mempercepat inovasi bisnis dengan memanfaatkan semua kemampuan teknologi yang sudah dikembangkan.
   f. Meningkatkan kolaborasi dengan mitra pihak ketiga melalui *open system*.
   g. Membangun ekosistem untuk memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai *stakeholder*.

Jenis Produk dan Jasa yang Ditawarkan

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan No.177 Tanggal 28 Juni 2024, pasal 3 ayat 1 Bank bergerak di industri jasa perbankan. Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Bank terbagi menjadi tiga (3) segmen yakni segmen Ritel, segmen UMKM dan segmen *Wholesale*. Segmen Ritel dan UMKM Bank ini didukung oleh segmen *Wholesale* sebagai penyeimbang. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh Perbankan Internasional, *Treasury*, dan layanan berbasis *fee*. Masing-masing bisnis tersebut terdiri dari aktivitas penyaluran kredit, penghimpunan dana, peningkatan *fee based income* dan aktivitas layanan lainnya yang semua dilakukan sesuai dengan *value* yang telah ada. Bisnis Bank ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, teknologi informasi yang terkini serta manajemen risiko dan kepatuhan yang handal.

Tingkat Suku Bunga Penghimpunan dan Penyediaan Dana

Sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, Bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) yang menjadi indikator atas besaran suku bunga kredit yang akan dikenakan kepada nasabah. Tingkat suku bunga penghimpunan dan penyediaan dana untuk mata uang Rupiah pada tahun 2024 dan perbandingannya dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Berdasarkan Segmen				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	KPR	Non KPR
2024					
Desember	8.52%	8.59%	11.20%	9.29%	9.74%
2023					
Desember	9.17%	9.31%	9.31%	9.31%	9.31%

Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Di tahun 2024, terdapat 6 Relokasi Kantor Cabang Pembantu yang berubah menjadi yaitu : KCP Soe Kupang, KCP Cilegon, KCP Trenggalek, KCP Purwokerto Sudirman, Surabaya Bratang Binangun dan KCP Tasikmalaya Sutisna Senjaya. KB Bank juga melakukan 2 Penutupan yaitu: KCP Samsat Graha Kepri Batam dan KCP Universitas Esa Unggul.

Di lain, Bank juga melakukan pembukaan Kantor Fungsional baru di Radio Dalam, Jakarta Selatan, dan pembukaan 11 unit ATM baru, meliputi: ATM KPO Banking Hall, ATM KPO Basement, ATM KCP S Parman, ATM KCP Sentraya , ATM KCU Mataram, ATM KCU Solo , ATM KCU Yogyakarta, ATM KCU Surabaya, ATM KCU Lampung, ATM KCP SAHARJO, ATM KCP Bekasi Barat, ATM KCP Cikarang, ATM KCP Kelapa Gading, ATM KCP Gunung Sahari, ATM KCU Bogor, ATM KCU Bandung, ATM KCP Kebon Jeruk, ATM KCU Malang, ATM KCP BSD CITY dan 1 unit relokasi ATM ATM KC Tanjung Pinang.

Kepemilikan Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham dalam Kelompok Usaha Bank

KB Bank (Perseroan) tidak tergabung dalam Kelompok Usaha Bank (KUB) sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.12/POJK.03/2020 sehingga tidak kebijakan terkait kepemilikan saham kelompok usaha bank. Adapun kebijakan terkait kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris dan Direksi diatur melalui Surat Keputusan Direksi No 0056 Tahun 2022. Uraian terkait bisa disimak pada bab Profil Perusahaan pada sub judul "Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi".

Perubahan-Perubahan Penting yang Terjadi Pada Bank dan Kelompok Usaha Bank di Tahun Berjalan

Pada tanggal 23 Oktober 2024, PT Bank KB Bukopin Tbk telah menyelesaikan penentuan harga (*pricing*) *Senior Unsecured Notes* ("obligasi global") perdananya senilai 300 juta USD dengan kupon 5,658%, tenor tiga tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2027. Penerbitan obligasi global tersebut pada tanggal 30 Oktober 2024. Penerbitan ini, yang *oversubscribed* hingga 4,5 kali, bertujuan untuk diversifikasi pendanaan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada pinjaman luar negeri jangka pendek. Setelah melaksanakan *non-deal roadshow* pada 16-18 Oktober 2024, KB Bank mendapat respon positif dari investor global. Obligasi ini dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX-ST) dengan dukungan *joint lead arranger Crédit Agricole*, HSBC, KB Securities Hong Kong, dan Morgan Stanley. KB Bank, yang merupakan anak usaha KB Kookmin Bank (Korea Selatan), mencapai peringkat kredit BBB dari Fitch Ratings, tertinggi untuk emiten Indonesia. Penerbitan ini menjadi langkah penting KB Bank dalam memperkuat posisi di pasar modal internasional.

Hal-Hal Penting yang Diperkirakan Terjadi Pada Masa Mendatang
Perkembangan usaha Bank terkait dengan dinamika perekonomian yang di masa mendatang tergantung pada dinamika yang terjadi di tahun berjalan. Secara material, Bank belum dapat menyampaikan hal-hal penting yang diperkirakan terjadi pada masa mendatang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Bank

Human Capital KB Bank secara berkelanjutan melakukan inisiatif dan program yang dibutuhkan oleh karyawan khususnya dalam mendukung keberlangsungan bisnis yang lebih baik serta transformasi digital. Adapun fokus program yang dijalankan adalah sebagai berikut :

1. Program pengembangan kompetensi yang mencakup *softskill* dan *hardskill*.
2. Tujuan pengembangan ini adalah untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan perilaku karyawan agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar minimum requirement serta meningkatkan produktivitas karyawan.
3. Contohnya : pembekalan *training NGBS*, *retail academy*, *credit culture, negotiation skill*, dll
4. Program pengembangan *leadership* bagi karyawan dan pimpinan yang menjadi area fokus Human Capital dan ditujukan untuk melatih dan mengembangkan karyawan sehingga dapat menciptakan pimpinan yang kompeten dan adaptif.
5. Menciptakan *talent pool* untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan mengelola karyawan yang memiliki potensi yang tinggi sehingga dapat membentuk *career path* karyawan. Sejauh ini *Human Capital* telah menjalankan promosi internal berdasarkan identifikasi dalam *talent pool*.
6. Menjalankan *Performance Improvement Program* (suatu program *coaching mentoring*) khususnya bagi karyawan dengan fungsi bisnis.
7. Mencanangkan *Anti Fraud Campaign* untuk mencegah risiko *fraud* dan penyalahgunaan wewenang di lingkungan kerja.
8. Memastikan karyawan baru merupakan *talent* terbaik dan melakukan proses *hiring* dengan lebih efisien.
9. Merancang dan mengimplementasikan pemberian kompensasi dan *benefit* sesuai dengan performa kinerja karyawan *(performance based)* untuk dapat meningkatkan engagement karyawan.
10. Memaksimalkan dan meningkatkan pelayanan karyawan melalui digital (ESS) agar proses layanan lebih cepat.
11. Melakukan KYE melalui ijazah, slik dan THP karyawan.
12. Melakukan *campaign* dan implementasi disiplin karyawan serta memonitor keterlambatan karyawan untuk meningkatkan disiplin kerja.

Apresiasi

Atas capaian kinerja yang diraih di tahun 2024, izinkan saya mewakili Direksi KB Bank menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Dewan Komisaris serta Pemegang Saham, para pemangku kepentingan, serta jajaran manajemen dan karyawan, atas seluruh kerjasama yang telah terjalin dengan baik. Semoga KB Bank terus dapat berkembang dan bertumbuh untuk mewujudkan visinya, yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi, membangun kapasitas, kapabilitas serta berinovasi untuk menjadi salah satu yang terdepan di Indonesia.

Jakarta, 20 Maret 2025



Woo Yeul Lee
Direktur Utama
PT Bank KB Bukopin Tbk.

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun Buku 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 April 2025

DEWAN KOMISARIS



Jerry Marmen
Komisaris Utama



Seng Hyup Shin
Wakil Komisaris Utama



Nanang Supriyatno
Komisaris



Tippy Joesoef
Komisaris Independen



Stephen Liestyo
Komisaris Independen

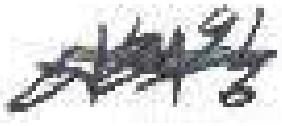

Hae Wang Lee
Komisaris Independen

PERTANGGUNGJAWABAN LAPORAN TAHUNAN

Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab atas Kebenaran Isi Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun Buku 2024

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Bank KB Bukopin Tbk ("Perseroan") tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perseroan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 21 April 2025

DIREKSI



Woo Yeul Lee
Direktur Utama



Robby Mondong
Wakil Direktur Utama



Helmi Fahrudin
Direktur



Henry Sawali
Direktur



Dodi Widjajanto
Direktur

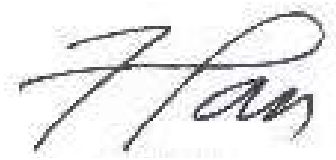

Jung Ho Han
Direktur



Jang Hyuk Im
Direktur



KB Bank



Profil Perusahaan

IDENTITAS BANK



Nama Perusahaan
PT Bank KB Bukopin Tbk

Nama Panggilan
KB Bank

Jenis/Badan Hukum Perusahaan
Perusahaan Terbuka

Bidang Usaha
Jasa Perbankan

Tanggal Pendirian
10 Juli 1970

Dasar Hukum Pendirian
Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama.

Informasi Perubahan Nama
PT Bank KB Bukopin Tbk - Disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Desember 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 12 No. AHU-0085571.AH.01.02 serta Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk.

Kepemilikan Saham

- KB Kookmin Bank 66,88%
- STIC Eugene Star Holdings 16,98%
- Publik / Masyarakat 16,14%

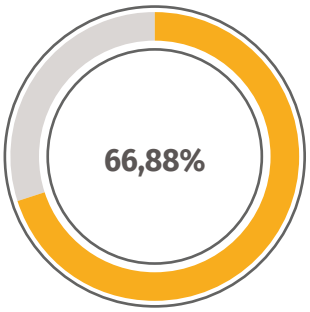

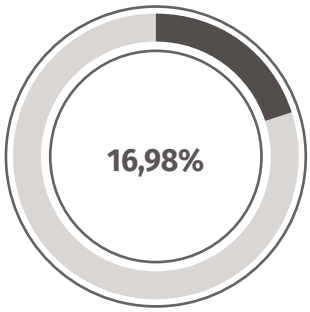

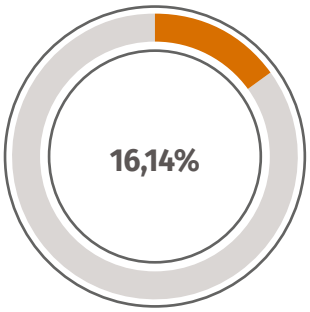

Modal Dasar
Rp21.000.000.000.000,-

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh
Rp18.999.999.969.200,-

Tanggal IPO
10 Juli 2006

Kode Saham & Obligasi
BBKP

Nama Bursa
Bursa Efek Indonesia

SWIFT Code
BBUKIDJA

Jumlah Karyawan per 31 Desember 2024
2.898 orang

Sekretaris Perusahaan
Ariz Dian Perkasa
per 31 Desember 2024

Entitas Anak

PT KB Bukopin Finance

Jl. Melawai Raya No. 66
Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12160
Telepon: (021) 2793 6558 -
Office(021) 2793 6513

PT Bank KB Bukopin Syariah

Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta 10440
Telepon: +6221-2300912
Fax: +6221 3148401

Alamat Kantor Pusat
Gedung KB Bank
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51
Jakarta Selatan 12770
Telepon: +6221-7988266, 7989837

Kontak Alamat
Sekretaris Perusahaan
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51
Jakarta Selatan 12770
Telepon: +6221 7988266, 7989837
Email: corsec@kbbank.co.id

Media Sosial
Youtube: KB Bank
Facebook: KB Bank
Instagram: kbbukopin
X : kbbank_id
TikTok : kbbank.id

RIWAYAT SINGKAT BANK

PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") didirikan di Republik lndonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Sejak awal pendiriannya, Bank memfokuskan diri pada segmen UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), saat ini telah tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah di Indonesia dari segi aset. Seiring dengan terbukanya kesempatan dan peningkatan kemampuan melayani kebutuhan masyarakat yang lebih luas, Bank telah mengembangkan usahanya ke segmen Ritel dan Konsumer sejak terbitnya izin Menteri Keuangan tanggal 16 Maret 1971. Bisnis Ritel Bank berkembang seiring dengan bisnis Komersial sebagai penyeimbang, dengan berbagai produk dan layanan jasa yang ditawarkan sebagaimana Anggaran Dasar terakhir. Anggaran Dasar Bank mengalami beberapa kali perubahan seiring waktu dan perubahan terakhir dinyatakan dengan Akta

Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 30 November 2022 No. 108 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 14 Desember 2022 No. AHU-0090647.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bank KB Bukopin Tbk. dan sesuai dengan susunan terakhir anggota Direksi dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 31 Januari 2023 No. 77, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 10 Februari 2023 No. AHUAH.01.09-0088669 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank Bukopin Tbk.

Bank juga beberapa kali mengubah status badan hukum hingga akhirnya menjadi Perusahan Terbuka pada tahun 2006. Dengan struktur permodalan yang semakin kokoh sebagai hasil pelaksanaan *Initial Public Offering* (IPO) pada 10 Juli 2006, Bank terus mengembangkan program operasionalnya dengan menerapkan skala prioritas sesuai strategi jangka pendek yang telah disusun dengan matang. Penerapan strategi tersebut ditujukan untuk menjamin dipenuhinya layanan Perbankan yang komprehensif pada nasabah melalui jaringan yang terhubung secara nasional maupun internasional, produk yang beragam serta mutu pelayanan dengan standar yang tinggi.

KB Bank juga merupakan pemegang saham pada PT Indo Trans Buana Multi Finance yang bergerak dalam bidang kegiatan pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja dan pembiayaan multiguna untuk kemudian mengubah nama perusahaan tersebut menjadi PT Bukopin Finance pada tahun 2008 sebagai pemegang saham pengendali dan utama. Pada tahun yang sama KB Bank melakukan upaya pengembangan bisnis perusahaan dengan melakukan akuisisi atas PT Bank Perserikatan Indonesia yang telah berada di bawah asistensi KB Bank selama 3 tahun. Dalam melihat peluang bisnis di perbankan syariah, PT Bank Persyarikatan Indonesia mengubah arah bisnisnya dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah dan mengubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin.

Di tahun 2018, KB Bank memulai sinergi dengan KB Kookmin Bank melalui aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV yang menjadikan KB Kookmin Bank memiliki 22% saham Bank. KB Kookmin Bank.co,Ltd. atau Kookmin Bank merupakan salah satu Bank di Korea Selatan yang tumbuh sebagai lembaga keuangan terkemuka yang menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan kepada masyarakat dan bisnis. KB Kookmin Bank merupakan bagian dari grup konglomerasi keuangan terbesar di Korea Selatan, KB Financial Group (KBFG). Grup ini didirikan pada tahun 2008 untuk melayani klien dengan lebih baik, memungkinkan pertumbuhan, dan memberikan nilai dalam lingkungan keuangan yang berubah dengan cepat. KB Financial Group memiliki 12 anak perusahaan yakni: KB Kookmin Bank, KB Securities, KB Insurance, KB Kookmin Card, KB Life Insurance, KB Asset Management, KB Capital, KB Real Estate Trust, KB Savings Bank, KB Investment, KB Data Systems dan KB Credit Information. Dengan produk dan layanan yang komprehensif, jaringan KBFG telah tersebar di berbagai negara di antaranya: Tiongkok, Jepang, Hongkong, Kamboja, Thailand, Vietnam, Myanmar, Singapura, Laos, India, Indonesia, New York, London, dan New Zealand.

Pada tahun 2021, KB Bank resmi merubah nama Perusahaan menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk atau biasa disebut KB Bank seiring dengan hadirnya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali KB Bank.

Sejalan dengan industri bisnis perbankan yang terus berkembang, KB Bank senantiasa melakukan inovasi dengan mengembangkan produk dan layanan berbasis digital yang tidak dimiliki oleh kompetitornya seperti Flexy Bill, Flexy Gas dan Flexy Health yang semakin memperkuat posisi KB Bank dalam persaingan bisnis Perbankan di Indonesia. Hingga akhir tahun 2024, KB Bank beroperasi di 21 provinsi, memiliki 1 kantor pusat operasi, 29 kantor cabang, 141 kantor cabang pembantu dan 2 kantor fungsional.

KETERANGAN PERUBAHAN NAMA DAN STATUS BADAN HUKUM

Bank Umum Koperasi Indonesia	Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970.
Bank Hukum Koperasi (Bukopin)	Disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jendral Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970
Bank Bukopin	Disahkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi No. 06/KPTS/BLK/III/1990 tanggal 8 Maret 1990
Perseroan Terbatas Tertutup (PT Bank Bukopin Tbk)	Akta Notaris No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta Notaris No. 118 tanggal 28 Mei 1993.
Perusahaan Terbuka PT Bank Bukopin, Tbk	Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 6 November KEP.DGS/2004 tanggal 19 April 2004.
PT Bank KB Bukopin, Tbk	Disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 22 Desember 2020, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 22 Desember 2020 No. 12 No. AHU-0085571. AH.01.02 serta Salinan Keputusan Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-11/PB.1/2021 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Bukopin Tbk menjadi Izin usaha atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk



JEJAK LANGKAH BANK

1970	Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) didirikan dengan badan hukum koperasi.
1989	• Perubahan nama Bukopin menjadi Bank Bukopin. • Menerbitkan Obligasi pertama kali.
1993	Perubahan status badan hukum menjadi Perseroan Terbatas dengan nama Bukopin Tbk.
2003	Penerbitan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah.
2006	• Menjadi perusahaan terbuka melalui IPO (***Initial Public Offering***). Sehingga nama perusahaan menjadi PT Bank Bukopin Tbk. • Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin (sebelumnya PT Bank Persyarikatan Indonesia) sebesar 24,73%. • Akuisisi saham PT Bukopin Finance (sebelumnya PT Indo Trans Buana Multifinance).
2008	• Akuisisi saham PT Bank Syariah Bukopin menjadi 65,44%. • Pelunasan Obligasi Seri A, Obligasi Subordinasi Seri B, dan Obligasi Syariah Mudharabah.
2009	• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) I. • ***Spin off*** unit usaha Syariah kepada Bank Syariah Bukopin sehingga Bank Bukopin memiliki 65,4%.
2010	Pertama kali diluncurkan dan disosialisasikan budaya PRIDE ***(Professionalism, Respect Other, Integrity, Dedicated to Customer***, dan ***Excellence***) di internal Perseroan.
2011	• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) II. • Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 77,57%.
2012	***Issuance of Continuous Subordinated Bonds I Phase I of*** Bank Bukopin 2012.
2013	Penawaran Umum Terbatas (PUT) III.

2014	Peningkatan kepemilikan di PT Bank Syariah Bukopin menjadi 86,82%.
2015	• PT Bosowa Corporindo menjadi pemegang saham pengendali. • Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015. • Peningkatan kepemilikan pada PT Bank Syariah Bukopin menjadi sebesar 89,07%.
2016	• Peningkatan kepemilikan pada PT Bank Syariah Bukopin menjadi sebesar 90,67%, dan Bukopin Finance menjadi 96,06%. • Penerbitan *Medium Term Notes* I Bank Bukopin tahun 2016 Seri B. • Penerbitan *Medium Term Notes* Bank Bukopin tahun 2016.
2017	• Menginisiasi pendirian BNV Labs sebagai inkubator startup di bidang fintech. • Meluncurkan tabungan digital Wokee untuk memperkuat bisnis Perseroan pada segmen perbankan digital. • Penerbitan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017.
2018	• Pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan. • KB Kookmin Bank menjadi salah satu pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 22%. • Bank Bukopin meluncurkan layanan Flexy Bill bekerja sama dengan PLN untuk memfasilitasi pembayaran listrik para pelaku usaha.
2019	• Peluncuran Visi Misi dan Budaya Perusahaan baru yaitu I CAN (***Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up***). • Peluncuran layanan ***Virtual Interactive Online Assistant*** atau VIOLA • Melengkapi lini produk fasilitas dana talangan Flexy Bill dengan Flexy Gas, Flexy Health dan Invoice Financing.
2020	• Perseroan melaksanakan aksi korporasi dalam rangka memperkuat permodalan, yaitu Penawaran Umum Terbatas V dan ***Private Placement***. • KB Kookmin Bank menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan dengan kepemilikan 67,00%. • Perubahan nama dan logo Perseroan sebagai bagian dari proses transformasi menjadi KB Bukopin.
2021	• Perseroan secara resmi mendapat hak dan ijin dari Regulator terkait dengan perubahan ***brand identity***. • Perseroan menggunakan ***brand identity*** terbaru dengan nama PT Bank KB Bukopin Tbk penggunaan logo KB Star. • Pelaksanaan Aksi Korporasi dalam rangka penguatan modal Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas VI (PUT VI) dan penerbitan Obligasi.
2022	Dimulainya proyek ***Next Generation Banking System*** (NGBS) dengan bekerja sama dengan Ernest and Young (EY) Indonesia sebagai PMO dan DXC sebagai master kontraktor
2023	• PT Bank KB Bukopin, Tbk (BBKP) telah menyelesaikan *rights issue* pada tanggal 31 Mei 2023, dengan perolehan dana Rp 11,9 triliun. Adapun pembeli *right issue* terbesar adalah Bank KB Kookmin senilai Rp 8,02 triliun atau 80,2 miliar saham. • KB Bank meluncurkan Mobile Banking 'KBstar' untuk memenuhi kebutuhan layanan perbankan digital nasabah.
2024	• KB Bank mempertahankan peringkat idAAA dengan prospek stabil dari PEFINDO. • Resmi ditunjuk menjadi partner KSEI untuk administrasi RDN dan ***payment banking***. • Fitch Rating memberikan KB Bank peringkat internasional yang setara dengan ***Sovereign Credit Rating*** Indonesia • Melakukan ***rebranding*** brand dan logo perusahaan menjadi KB Bank

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

Nama Organisasi	Status Anggota
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)	Anggota
PERBANAS	Anggota
Lembaga Penjamin Simpanan	Anggota
Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	Anggota
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI)	Anggota
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LASP)	Anggota
Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Anggota



INFORMASI MAKNA LOGO BANK

Logo sebagai sarana identitas yang mencerminkan karakter, produk dan jasa sebuah perusahaan sehingga dapat menyampaikan informasi mengenai perusahaan kepada publik, di mana sebuah logo memiliki banyak elemen berupa bentuk, warna, garis dan jenis yang keseluruhannya saling mendukung untuk mempengaruhi pemikiran, pandangan atau pendapat publik terhadap perusahaan serta mencerminkan nilai-nilai, visi, dan komitmen dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah.

SIMBOL

- Simbol KB mencerminkan ambisi perusahaan untuk menjadi *brand* finansial yang terkemuka di Industri Keuangan Tanah Air dengan memperkuat *branding* "Korea Best".
- Simbol Star-b yang mengandung makna bintang, menunjukkan perspektif orientasi masa depan KB Financial Group dan keinginan yang tinggi untuk melesat ke kelas dunia

VISUALISASI

- Warna kuning pada logo Bank melambangkan kesegaran baru yang dibawa oleh KB Kookmin Bank.
- Teknologi terbaru dan dukungan jaringan global menjadi modal Bank KB Bank menyediakan layanan finansial terbaik bagi Indonesia.

KB Bank

KB Bank



BIDANG USAHA

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan No.177 Tanggal 28 Juni 2024, pasal 3 ayat 1 Bank bergerak di industri jasa perbankan.

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir dan Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada tahun 2024

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir	Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun 2024	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.	√	-
Memberikan Kredit	√	-
Menerbitkan surat pengakuan utang	√	-
• Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya • Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud • Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud • Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan Pemerintah • Sertifikat Bank Indonesia (SBI) • Obligasi • Surat dagang berjangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√	-
Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah	√	-
Menempatkan dana pada, meminjam dana hari, atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya	√	-
Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga	√	-
Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga	√	-
Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak	√	-
Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di Bursa Efek	√	-
Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan - berdasarkan prinsip syariah	√	-

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Terakhir	Kegiatan Usaha yang Dijalankan pada Tahun 2024	
	Sudah Dijalankan	Belum Dijalankan
Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan Wali Amanat	√	-
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	-
Melakukan kegiatan dalam valuta asing	√	-
Melakukan kegiatan pernyataan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan	√	-
Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat - harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	√	-
Bertindak sebagai pendiri Dana Pensiun dan Pengurus Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan Dana Pensiun yang berlaku.	√	-
Melakukan kegiatan jasa keuangan, commercial banking dan investment banking. lainnya.	√	-
Membeli agunan baik seluruhnya maupun sebagian melalui pelelangan atau dengan cara lain dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.	√	-
Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	√	-

Fokus layanan perbankan yang ditawarkan Bank terbagi menjadi tiga (3) segmen yakni segmen Ritel, segmen UMKM dan segmen *Wholesale*. Segmen Ritel dan UMKM Bank ini didukung oleh segmen *Wholesale* sebagai penyeimbang. Keseluruhan segmen tersebut didukung oleh Perbankan Internasional, *Treasury*, dan layanan berbasis *fee*.

Masing-masing bisnis tersebut terdiri dari aktivitas penyaluran kredit, penghimpunan dana, peningkatan *fee based income* dan aktivitas layanan lainnya yang semua dilakukan sesuai dengan *value* yang telah ada. Bisnis Bank ini didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, teknologi informasi yang terkini serta manajemen risiko dan kepatuhan yang handal.

Produk dan Jasa Bank

Kegiatan usaha Bank meliputi produk segmen Ritel, UMKM dan *Wholesale*, yang terdiri dari berbagai produk dan layanan yakni produk simpanan, produk pinjaman, serta berbagai layanan yang dijelaskan sebagai berikut:

Simpanan

Produk simpanan terbagi dari produk Giro, Tabungan dan Deposito, antara lain:

1. Produk Giro yang disediakan Bank kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Giro KB Bank Rupiah;
   - Giro KB Bank Valas;
   - Giro Rekening Dana Nasabah (RDN); dan
   - Giro DHE SDA

2. Produk Tabungan yang disediakan Bank kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Tabungan Siaga KB Bank;
   - Tabungan Siaga KB Bank Kerjasama;
   - Tabungan Siaga KB Bank Rencana;
   - Tabungan Siaga KB Bank Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha);
   - Tabungan Siaga KB Bank Premium;
   - Tabungan KB Bank Siaga Valas;
   - Tabungan Siaga KB Bank Pensiunan;
   - Tabungan SIMPEL;
   - Tabungan Digital Wokee;
   - TabunganKu; dan
   - Planning Account.

3. Produk Deposito yang disediakan Bank kepada nasabah adalah sebagai berikut :
   - Deposito KB Bank Rupiah;
   - Deposito KB Bank Valas;
   - Deposito Merdeka;
   - Deposito *on Call*;
   - *Time Deposit Online*; dan
   - Deposito *DHE SDA*.

Pinjaman

Produk Pinjaman terbagi berdasarkan segmen, antara lain :

RITEL

Produk pinjaman Ritel yang disediakan Bank kepada Calon Debitur adalah sebagai berikut :

1. Kredit Pensiunan
2. Kredit Masa Pra Pensiun (MPP);
3. Kredit Pemilikan Mobil;
4. Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen;
5. Kredit Serba Guna (KSG);
6. *Back to Back Loan*;
7. Kartu Kredit; dan
8. Produk Kredit PNS Aktif Channeling BPR.

UMKM

Produk pinjaman UMKM yang disediakan Bank kepada Debitur atau Calon Debitur di antaranya:

A. Product Generik:
   1. Kredit Investasi (KI)
   2. Kredit Modal Kerja (KMK)

B. Produk Program:
   1. *Equipment Financing*
   2. SME *Mortgage*
   3. *Supply Chain Financing* yang terdiri dari *Dealer Financing*, *Vendor Financing, Distributor Financing*
   4. Pinjaman Rekening Koran (PRK)
   5. Pembiayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
   6. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   7. Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra
   8. Produk *Non Cash Loan* : Bank Garansi, L/C dan SKBDN

WHOLESALE

A. Produk Dasar :
   1. Kredit Investasi (KI)
   2. Kredit Modal Kerja (KMK) :
      a) Setting kredit *Reguler*
      b) Setting kredit PRK
   3. KI dan atau KMK dengan pola pembiayaan Sindikasi

B. Produk Program:
   1. Pinjaman Rekening Koran Intraday KPEI

C. Produk *Supply Chain Financing*:
   1. Produk Program *Vendor Financing*

D. Produk *Trade Finance*:
   1. *Letter of Credit*;
   2. SKBDN; dan
   3. Bank Garansi, SBLC atau *Demand Guarantee*.

JASA LAINNYA

Fee Based Income

Kegiatan *Fee Based Income* bersumber dari aktivitas jual beli (*trading*) produk *Treasury, Public Services, Trade Finance*, Bank Garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, Cash Management, Fee* Kartu Kredit, Jasa Kustodian, Jasa Manajemen Pengelolaan dan IT Swamitra dan *Public Utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *Wealth Management*. Rincian terkait layanan *Fee Based Income* diuraikan sebagai berikut.

Jasa *Trade Finance*

Layanan yang diberikan Bank dalam membantu nasabah guna mengatasi hambatan-hambatan transaksi dengan pihak luar negeri ataupun domestik/dalam negeri karena adanya perbedaan ketentuan pembayaran, transfer dana dan aturan perdagangan antar Negara. Berbagai produk layanan *trade finance* di antaranya adalah:

1. *Import Services*, berupa penerbitan *Letter of Credit* (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) Sight, LC/SKBDN Usance, LC/SKBDN butuh konfirmasi, *Usanse* atau *Usance Payable at Sight* dan LC/SKBDN butuh konfirmasi, *Usanse* atau *Usance Payable at Usance*;
2. *Documentary Collection*, berupa *Inward Collection Delivery Document Against Payment* dan *Outward Collection Delivery Documents Against Acceptance*;
3. *Export Services*, berupa *Assignment of Proceeds*, Diskonto Wesel LC/SKBDN dan Negosiasi Wesel LC/Diskonto;

Remittance

Layanan Bank yang disediakan untuk menerima dan/atau mengirim uang dari dan ke berbagai penjuru dunia dengan didukung Bank Koresponden yang tersebar di berbagai Negara.

***Trading Treasury* (Jual Beli Valuta Asing dan Surat Berharga)**

Bank melayani jual beli valuta asing baik dalam bentuk *Telegraphic Transfer* (TT) dan bank notes serta kontrak *swap* dan *forward*. Selain itu Bank juga melayani jual beli surat berharga baik surat

utang pemerintah ataupun obligasi korporasi dalam Rupiah dan Valas. Transaksi dilakukan sebagai bagian dari pelayanan, serta dilakukan dengan bank lain sebagai bagian penting dari optimalisasi pendapatan jual beli bagi bank dalam rangka *proprietary trading* (jual beli valas dan surat berharga dengan bank lain dan sekuritas) merupakan bagian penting dari optimalisasi pendapatan jual beli bagi bank.

Layanan Penerima Pembayaran Terkait *Public Service*
Layanan penerimaan pembayaran dari masyarakat antara lain untuk pembayaran tagihan listrik, tagihan air, tagihan telepon, tagihan lainnya yang didasari adanya kerjasama Bank dengan perusahaan lain.

***Electronic Banking* (ATM dan *Internet Banking*)**
Jasa pembayaran tagihan yang dapat dilakukan melalui berbagai jaringan distribusi yang meliputi ATM, *Internet Banking* dan *Phone Banking*, sehingga nasabah dapat melakukan transaksi perbankan kapanpun dan di mana nasabah berada.

Jasa Kustodi
Jasa yang diberikan berupa kegiatan penitipan surat berharga untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak. Jasa ini diberikan berdasarkan persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) tanggal 3 Juli 2006. Layanan yang diberikan melalui produk ini adalah layanan penyimpanan surat berharga, penyelesaian transaksi, *corporate action*, perwakilan dengan kuasa (*proxy*) dan layanan kustodian reksadana.

Wali Amanat
Jasa yang diberikan Bank untuk bertindak mewakili kepentingan investor pemegang efek bersifat utang. Jasa wali amanat Bank di antaranya jasa wali amanat, jasa agen jaminan, jasa agen pembayar dan jasa agen rekening penampung.

Jasa *Arranger* dan Keagenan Kredit Sindikasi
Jasa arranger dan keagenan kredit sindikasi diberikan kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar sehingga diperlukan pembiayaan secara bersama-sama (sindikasi) oleh beberapa bank. Adapun jasa keagenan memberikan layanan berupa:

a. Sebagai agen fasilitas yaitu menyelenggarakan administrasi Kredit sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit sindikasi beserta perjanjian-perjanjian terkait lainnya.
b. Sebagai agen jaminan yaitu mengelola dan mengadministrasikan dokumen agunan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi beserta perjanjian-perjanjian terkait lainnya.
c. Sebagai agen penampungan yaitu mengelola dan mengadministrasikan rekening-rekening penampungan (*escrow accounts*) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kredit Sindikasi beserta perjanjian-perjanjian terkait lainnya, termasuk didalamnya proses pencairan kredit sindikasi (*disbursement*) dan pemenuhan semua kewajiban nasabah kepada bank sampai kredit sindikasi tersebut dinyatakan selesai.

Modul Penerimaan Setoran Negara (MPN)
Bank telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran Negara (pajak dan non pajak) secara *online*. Bank tidak mengenakan biaya untuk jasa tersebut, namun memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

Layanan Melalui Sistem *Host to Host*
Bank telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan untuk menyediakan jasa penerimaan setoran Negara (pajak dan non pajak) secara *online*. Bank tidak mengenakan biaya untuk jasa tersebut, namun memperoleh manfaat dari akses atas dana yang dihimpun dari penerimaan pembayaran pajak dalam jangka waktu tertentu.

Penjualan Reksadana
Bank bertindak sebagai Agen Penjual Produk Reksadana (APERD) yang bertugas memasarkan produk reksadana melalui jaringan distribusi Bank sesuai dengan ketentuan OJK.

Penjualan *Bancassurance*
Bank bekerja sama dengan PT MSIG Life Insurance Indonesia dalam aktivitas *Bancassurance* dengan model bisnis referensi tidak dalam rangka produk Bank (*inbranch sales*) kepada seluruh nasabah Bank.

Penjualan Obligasi Negara
Bank sebagai Agen Penjual Obligasi Negara (SBN Retail) yang diterbitkan oleh Pemerintah yang diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) jenis, yaitu *Saving Bonds* Ritel (SBR), Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (SR) dan Sukuk Tabungan (ST) yang dilakukan sejak tahun 2006.

KB Bank Prioritas
KB Bank Prioritas ditujukan untuk nasabah dengan saldo simpanan diatas Rp500 juta. Untuk setiap nasabah KB Bank Prioritas dilayani oleh seorang *Relationship Officer* yang membantu nasabah dalam mengelola asetnya. Jasa yang ditawarkan KB Bank Prioritas meliputi pengelolaan nasabah yang dikemas dalam suatu perencanaan keuangan yang terarah serta dapat meningkatkan keuntungan dan rasa aman bagi nasabah.

Jasa Kerjasama Swamitra
Bank sebagai pengelola Swamitra yang merupakan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi, melalui penyediaan dukungan operasional berupa logo, sistem manajemen, sistem teknologi (Swasys dan SIKM), sistem operasional dan sebagainya. Atas pemberian dukungan tersebut, Bank memperoleh jasa pengelolaan, jasa kemitraan dan jasa manajemen.

Perbankan Internasional
Layanan Perbankan Internasional menjadi salah satu bisnis andalan Bank. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan bisnis Perbankan Internasional terus ditingkatkan guna memperoleh kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam bertransaksi ekspor, impor, dan transfer valas yang kian tahun semakin bertambah. Dengan semakin meningkatnya reputasi, Bank semakin dapat menggalang kerjasama dengan berbagai bank koresponden di

dalam maupun luar negeri dengan jumlah hampir mencapai 300 bank koresponden meliputi nostro bank,bank koresponden dan juga bank *counterparty* yang tersebar di berbagai kota besar maupun pusat perdagangan di berbagai belahan dunia di Asia, Amerika, Eropa dan Afrika.

Segmentasi bisnis Perbankan Internasional nasabah perorangan maupun badan usaha dengan kriteria sebagai berikut:

1. Eksportir dan importir;
2. BUMN dan afiliasinya;
3. Badan usaha non BUMN (BUMD, PMA, *Group* Swasta Nasional);
4. Individu/perorangan nasabah transfer valas.

Segmen ini memiliki skala usaha yang berorientasi transaksi perdagangan ekspor impor maupun dalam perdagangan dalam negeri.

Treasury

Tugas utama *Treasury* adalah mengelola likuiditas Bank. Pengelolaan likuiditas dilakukan dalam rangka penerapan regulasi perbankan sesuai aturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI) serta secara simultan melakukan optimalisasi profil likuiditas Bank. Divisi *Treasury* dalam menjalankan tugasnya senantiasa berkoordinasi dengan seluruh unit bisnis dan unit pendukungnya. Koordinasi yang dilakukan antara lain memonitor mutasi dana nasabah dan data keuangan internal Bank, sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan strategi pengelolaan likuiditas harian.

Peran sebagai pengelola likuiditas dijalankan secara simultan dengan peran sebagai profit center, yaitu optimalisasi pendapatan bunga dari transaksi pasar uang dan pasar modal, serta pendapatan non bunga (*fee based income*) dari transaksi jual beli valuta asing dan surat berharga. Transaksi dilakukan terutama dengan *counterparty* yang terdiri dari BI, bank umum lainnya, sekuritas, dan *money broker*. Transaksi dengan nasabah dilakukan sebagai bagian dari pelayanan Bank kepada masyarakat, terutama terkait dengan transaksi jual beli valuta asing, surat berharga, serta layanan jasa kustodian dan wali amanat.

Produk dan Jasa *Treasury* yang ditawarkan kepada nasabah antara lain:

1. Transaksi jual beli forex (*Value Today, Tom, Spot, Forward, Swap*);
2. *Deposit on Call* (DOC);
3. Transaksi jual beli Obligasi (pemerintah dan korporasi);
4. *Foreign Bank Notes*;
5. Penempatan pada Bank Indonesia & Bank Lain;
6. GMRA;
7. Repo & Reverse Repo;
8. Reksa Dana Pasar Uang;
9. Interest *Rate Swap*;
10. Jasa Kustodi (administrasi surat berharga nasabah);
11. Jasa Wali Amanat.

Inovasi Bisnis

1. **One KBFG**

   KB Bank memperkuat partnership dengan mitra strategis perusahaan afiliasi KB Financial *Group* di sektor keuangan diantaranya melalui kerjasama di bidang sekuritas pasar modal dengan KB Valbury, pembiayaan kendaraan bermotor dengan Sunindo Kookmin Best Finance, layanan multifinace dan *Co-Location* dengan KB Finansia Multi Finance di mana kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan layanan keuangan yang lengkap untuk nasabah. Melalui berbagai kerja sama dengan perusahaan afiliasi KBFG diharapkan dapat mendorong KB Bank untuk memberikan layanan yang terintegrasi ke depan dengan *one stop financial service*.

2. ***Social Bond***

   KB Bank menjadi pionir obligasi sosial Bank swasta di Indonesia di mana KB Bank mendapatkan kepercayaan sebagai bank pertama di Indonesia yang mendapatkan *social bond* senilai US$300 juta atau setara Rp4,41 triliun dari anggota Grup Bank Dunia, *International Finance Corporation* (IFC). Obligasi sosial tersebut didedikasikan untuk mendanai inisiatif sosial yang berfokus pada penanganan dampak sosial ekonomi akibat dari Covid-19 dan pembiayaan di segmen sosial, seperti UMKM, perumahan terjangkau, perawatan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Sebagai komitmen Bank untuk mendukung Sosial dan Lingkungan, KB Bank juga membentuk unit *Environmental, Social*, dan *Government* (ESG) untuk meningkatkan kerjasama dan mendukung implementasi ESG di KB Bank.

3. ***Supply Chain***

   Bank terus mengembangkan bisnis *Supply Chain Financing* (SCF) dengan menyesuaikan produk yang ada agar selaras dengan dinamika pasar serta meluncurkan produk dan layanan SCF baru sebagai bagian dari strategi pertumbuhan. Bank juga terus membangun dan memperkuat hubungan dengan perusahaan besar sebagai *Anchor* serta para Spokes yang terdiri dari distributor, *dealer*, dan *supplier*. Melalui produk *Dealer Financing, Distributor Financing*, dan *Vendor Financing*, Bank menyediakan solusi pembiayaan yang mendukung kelancaran arus kas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat daya saing mitra bisnis. Dengan inovasi produk dan layanan SCF, Bank berkomitmen untuk memberikan akses pembiayaan yang fleksibel dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan bisnis di berbagai sektor industri.

JARINGAN BISNIS DAN WILAYAH OPERASI BANK

Jaringan bisnis dan wilayah operasi Bank dalam 5 (lima) tahun terakhir

Jenis Kantor	2024	2023	2022	2021	2020
Kantor Pusat Operasional	**1**	1	1	1	1
Kantor Cabang	**29**	29	41	42	42
Kantor Cabang Pembantu	**141**	143	231	310	173
Kantor Fungsional	**2**	1	3	4	9
Kantor Kas *)	**-**	-	-	-	169
Payment Point *)	**-**	-	-	-	25
ATM	**30**	11	359	673	850

*) Penyesuaian POJK 12 bahwa per Oktober 2021 tidak terdapat status Kantor Kas dan *Payment Point*



VISI, MISI, DAN NILAI BUDAYA BANK

Bank telah menetapkan visi dan misi yang dijadikan acuan bagi arah pengembangan usaha. Visi dan Misi Bank tersebut ditetapkan melalui SK Dewan Komisaris No. SKEP/001/D.KOM/VII/2013 tentang Penyempurnaan Visi dan Misi PT Bank Bukopin Tbk, tertanggal 9 Juli 2013 dan SK Direksi No. SKEP/634/DIR/VII/2013 tanggal 10 Juli 2013 yang telah diubah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 1092 tanggal 24 Juni 2019 sebagai berikut:

Visi

Menjadi **Lembaga Keuangan Pilihan** Utama di Indonesia.

Misi

Memahami dan **Memberi Solusi** kepada Nasabah.

Review atas Visi dan Misi Bank

KB Bank senantiasa menetapkan Visi dan Misi yang ditinjau secara berkala dengan melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan bisnis Bank, kebutuhan pemangku kepentingan dan arah persaingan antar pelaku usaha jasa keuangan. Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa Visi dan Misi KB Bank masih relevan dengan arah perkembangan bisnis Bank saat ini.

Nilai Budaya Bank

KB Bank menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Perusahaan yang diterapkan dalam operasional internal maupun layanan kepada nasabah. KB Bank telah menetapkan ICCAN sebagai nilai dan falsafah yang diyakini dapat menjadi landasan dan acuan untuk mencapai tujuan. Adapun nilai-nilai Perusahaan ICCAN yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Direksi No. 1092 Tahun 2019 antara lain adalah sebagai berikut:

Integrity *(Integritas)*	Diartikan sebagai mengutamakan kejujuran, kedisiplinan dan komitmen untuk membangun kepercayaan Nasabah. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Jujur • Disiplin dan Berkomitmen
Competent *(Kompeten)*	Diartikan sebagai cakap dalam melaksanakan tugas dan melakukan perbaikan terus-menerus untuk selalu menjadi yang terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Cepat belajar • Peningkatan dan perbaikan berkesinambungan
Care *(Peduli)*	Diartikan sebagai peduli dan sinergi untuk kemajuan bersama. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Tulus/empati & peduli • Sinergi/kerjasama
Accountable *(Akuntabilitas)*	Diartikan sebagai bertanggung jawab penuh dan menguasai pekerjaan untuk mencapai hasil terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: • Bertanggung jawab • Menguasai tugas
Never Give Up *(Tidak Pernah Menyerah)*	Diartikan sebagai mampu berpikir "***out of the box***" dan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan dan hambatan untuk mencapai hasil terbaik. Perilaku utama yang sejalan dengan nilai ini: Pantang menyerah Berpikir "***out of the box***"

Nilai-nilai budaya Bank ICCAN tersebut diharapkan dapat diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari oleh seluruh jajaran manajemen dan karyawan di Bank untuk mewujudkan visi dan misi Bank.

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bank per 31 Desember 2024, telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 101 Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 sebagaimana terlampir di bawah ini :

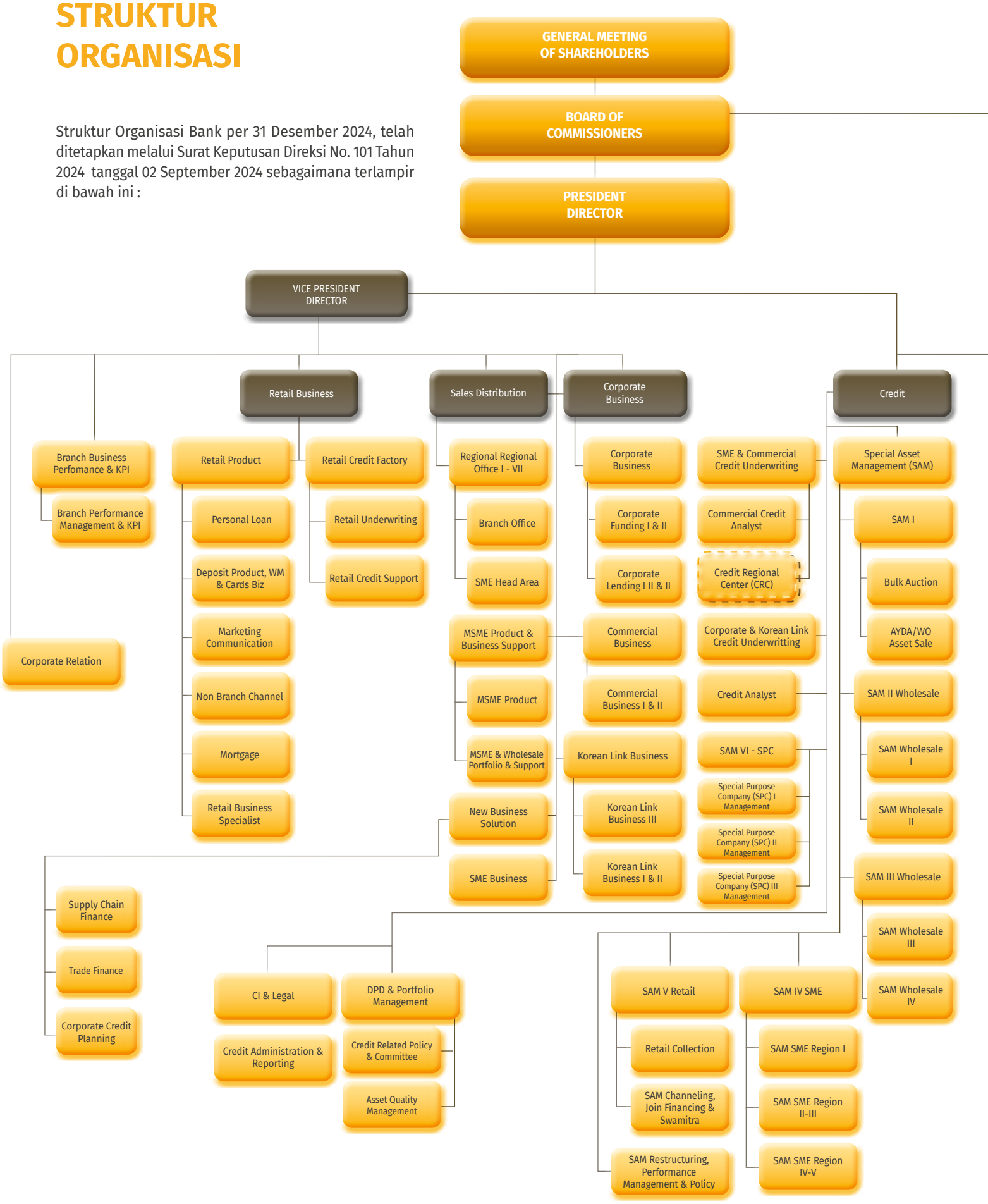

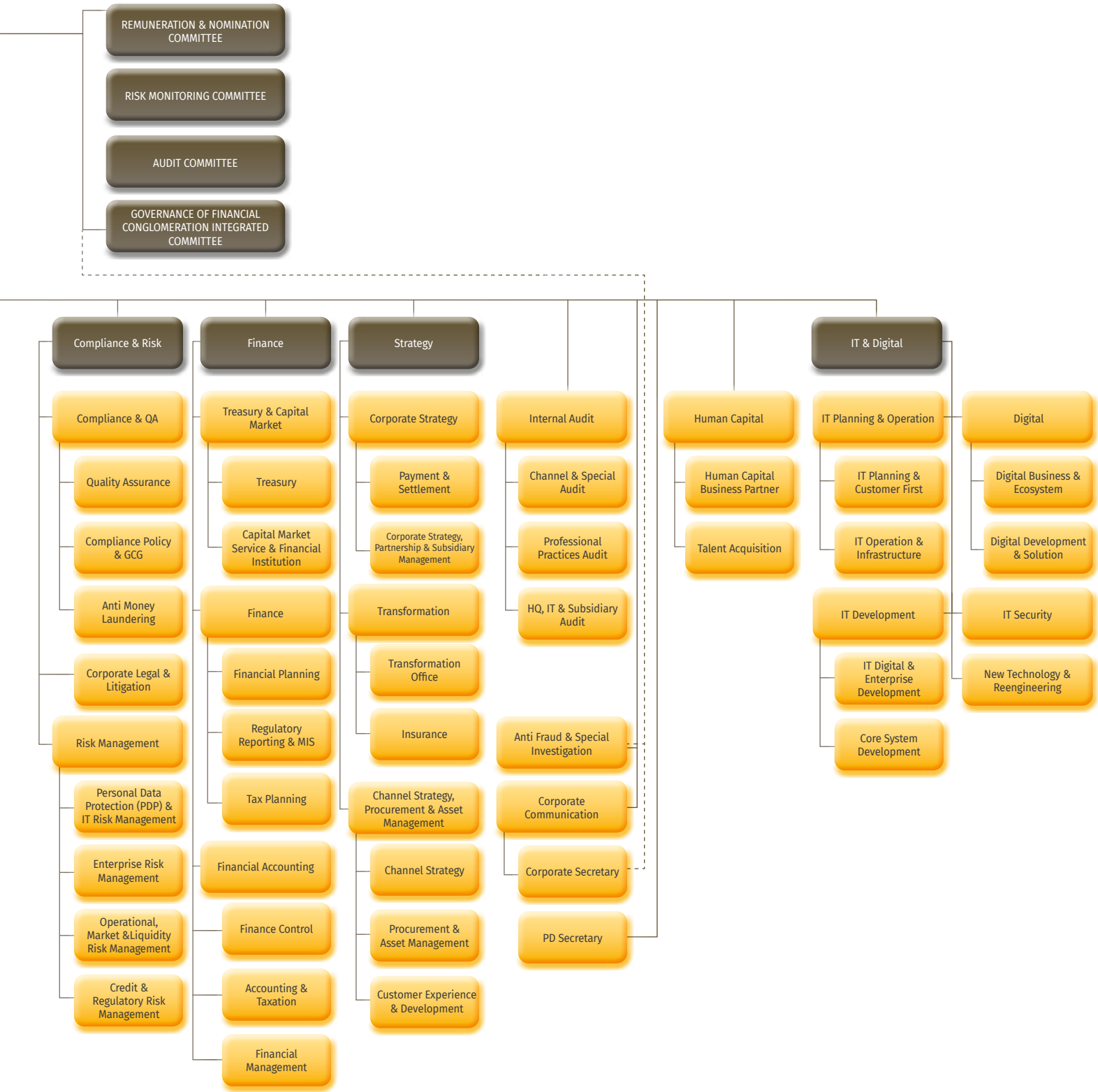
REMUNERATION & NOMINATION COMMITTEE
RISK MONITORING COMMITTEE
AUDIT COMMITTEE
GOVERNANCE OF FINANCIAL CONGLOMERATION INTEGRATED COMMITTEE
Compliance & Risk
Compliance & QA
Quality Assurance
Compliance Policy & GCG
Anti Money Laundering
Corporate Legal & Litigation
Risk Management
Personal Data Protection (PDP) & IT Risk Management
Enterprise Risk Management
Operational, Market &Liquidity Risk Management
Credit & Regulatory Risk Management
Finance
Treasury & Capital Market
Treasury
Capital Market Service & Financial Institution
Finance
Financial Planning
Regulatory Reporting & MIS
Tax Planning
Financial Accounting
Finance Control
Accounting & Taxation
Financial Management
Strategy
Corporate Strategy
Payment & Settlement
Corporate Strategy, Partnership & Subsidiary Management
Transformation
Transformation Office
Insurance
Channel Strategy, Procurement & Asset Management
Channel Strategy
Procurement & Asset Management
Customer Experience & Development
Internal Audit
Channel & Special Audit
Professional Practices Audit
HQ, IT & Subsidiary Audit
Anti Fraud & Special Investigation
Corporate Communication
Corporate Secretary
PD Secretary
Human Capital
Human Capital Business Partner
Talent Acquisition
IT & Digital
IT Planning & Operation
IT Planning & Customer First
IT Operation & Infrastructure
IT Development
IT Digital & Enterprise Development
Core System Development
Digital
Digital Business & Ecosystem
Digital Development & Solution
IT Security
New Technology & Reengineering

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Jerry Marmen
Komisaris Utama

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 116 tanggal 28 Juni 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027)
Riwayat Pendidikan	• Doctor of Philosophy at the Australian National University (2012) • Master of Management at the Australian National University (2006) • Bachelor of Agribusiness at the Institut Pertanian Bogor (1988)
Riwayat Pekerjaan	• Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi (2019-sekarang) • Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan(TRK) (2021-sekarang) • Komisioner Pengawas LSP-BSMR, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2021-2022) • Komite Kebijakan Risiko/Komite Pemantau Risiko, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2019-2021) • Chief & Senior Consultant PT. Strategic Development Group (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2012-2018) • Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PT Informasi Kredit Indonesia (2014-2019) • Direktur Utama PT Risk Frontier (2012-2021) • Vice Rector Perbanas School of Economics (PERBANAS Institute) (2000-2003)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Seng Hyup Shin
Wakil Komisaris Utama

Usia	54 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 57 tanggal 24 Januari 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor of Administration* di bidang Administration, Kyung Pook National University (1995) • *Master of Administration* di bidang *Administration*, KyungPook National University (1997)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Keuangan KB Bank (2020-2024) • Team Manager, KB Financial Group (2014-2016) • Senior Deputy General Manager, KB Financial Group (2017) • General Manager, KB Financial Group (2018-2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	• Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7 • Sertifikasi Treasury Lv. Advance
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	2.300.000 (0,0012241%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Nanang Supriyatno
Komisaris

Usia	55 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman (1993)
Riwayat Pekerjaan	• Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang) • Deputy Chief Executive Officer PT Bosowa Property Group (2017-2022) • Direktur Internal Audit Bosowa Group (2013-2022) • Direktur Utama PT Bosowa Beton Indonesia (2015-2018) • Direktur Risk Management PT Semen Bosowa Maros (2015-2017) • Recovery dan Restrukturisasi problem loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1994-2013)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 6
Rangkap Jabatan	Direktur Utama PT Satu Gen Indonesia (2020-Sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Tippy Joesoef
Komisaris Independen

Usia	60 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 13 tanggal 22 Desember 2020 (Periode 2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Sarjana di bidang Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Independent Audit Committee, American International Assurance (AIA) Financial (2019-Present) • Chief GRC, Fazz Financial Group (2019-2022) • Executive Director- Country Risk Management Head, UOB Indonesia (2013-2016) • SVP Global Consumer Group, Citibank NA (2013) • SVP Risk Management, Bank Danamon (2011-2012) • Head of Country Operational Risk Management, Basel 2 and Enterprise Risk Management – Maybank (2005- 2011) • Head of Compliance for Consumer & Commercial Banking, ABN AMRO Bank (1999-2005) • Credit Operations Manager, Standard Chartered Bank (1991-1999)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Hae Wang Lee
Komisaris Independen

Usia	56 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Hukum dari Yonsei University (1991) • Magister di bidang Hukum dari Yonsei University (1998)
Riwayat Pekerjaan	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) • Foreign Lawyer MR&Partners Law Firm at Jakarta (2015-2019) • Lawyer at APEX LLC Head of Jakarta Apex Office (2011-2014) • Lawyer at Law Firm C&K, LEX, APEX (2006-2011)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 6
Rangkap Jabatan	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Stephen Liestyo
Komisaris Independen

Usia	60 tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (Periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 116 tanggal 28 Juni 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027)
Riwayat Pendidikan	S2 International Marketing, IPMI International Business School, Jakarta (2002)
Riwayat Pekerjaan	• Presiden Komisaris PT Sol Mitra Fintec, (Januari 2016 - Juli 2021) • Presiden Komisaris PT Prismalink International, (Januari 2014 - Agustus 2021) • Komisaris Independen PT. KiosOn Komersial Indonesia, (Februari 2018 - April 2019) • Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), (April 2010 - April 2015) • Direktur Konsumer Banking PT. Bank Maybank Indonesia Tbk, (April 2009 - Januari 2013) • Komisaris BCA Finance (2000-2009)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 6
Rangkap Jabatan	Tidak ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Sukriansyah S. Latief *)
Komisaris Independen

Usia	55 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Doctor of Law, Universitas Hasanudin (2009)
Riwayat Pekerjaan	• Special Staff of Vice President Vice President's Palace (2019-sekarang) • Komisaris PT Pelindo Jasa Maritim (2021–2022) • Komisaris PT Media Fajar Holding Company (2015- 2022) • Pengajar di Fajar Educational Foundation of Ujungpandang (1998-sekarang) • Komisaris PT Pelindo IV Makassar (2021)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 2
Rangkap Jabatan	• Special Staff of Vice President Vice President's Palace (2019-sekarang) • Pengajar di Fajar Educational Foundation of Ujungpandang (1998-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 28 Juni 2024



Eugene K Galbraith *)
Komisaris Independen

Usia	72 Tahun
Kewarganegaraan	Amerika Serikat
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	Phd Anthropology Economics dari Johns Hopkins University (1983)
Riwayat Pekerjaan	• Director PT Sarana Menara Nusantara (2020-sekarang) • Senior Advisor Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapore (2019-2021) • Senior Advisor, McKinsey and Company (2019-2021) • Deputy President Director Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2011-2019) • President Commissioner Bank Central Asia [IDX: BBCA] (2002-2011) • Deputy President Commissioner Bank OCBC NISP (1998-2006)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Lv. 5
Rangkap Jabatan	Director PT Sarana Menara Nusantara (2020-sekarang)
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 28 Juni 2024

Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Selama menjabat, semua Komisaris Independen telah memenuhi kriteria independen sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku serta telah dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh masing-masing Komisaris Independen.

Komisaris Independen yang telah menjabat selama dua periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. Namun demikian, sejak berlakunya Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tidak terdapat Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut.

Kronologi Perubahan Dewan Komisaris Di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris Bank dengan kronologi sebagai berikut:

Komposisi per 1 Januari 2024	Komposisi per 28 Juni 2024	Komposisi per 31 Desember 2024	Keterangan
Jerry Marmen Komisaris Utama	Jerry Marmen Komisaris Utama	Jerry Marmen Komisaris Utama	-
Seng Hyup Shin Wakil Komisaris Utama	Seng Hyup Shin Wakil Komisaris Utama	Seng Hyup Shin Wakil Komisaris Utama	-
Nanang Supriyatno Komisaris	Nanang Supriyatno Komisaris	Nanang Supriyatno Komisaris	-
Tippy Joesoef Komisaris Independen	Tippy Joesoef Komisaris Independen	Tippy Joesoef Komisaris Independen	-
Hae Wang Lee Komisaris Independen	Hae Wang Lee Komisaris Independen	Hae Wang Lee Komisaris Independen	-
Stephen Liestyo Komisaris Independen	Stephen Liestyo Komisaris Independen	Stephen Liestyo Komisaris Independen	-
Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen			Sukriansyah S. Latief tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per 28 Juni 2024
Eugene K Galbraith Komisaris Independen			Eugene K Galbraith tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per 28 Juni 2024

PROFIL DEWAN DIREKSI



Woo Yeul Lee
Direktur Utama

Usia	60 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Tahunan No.37 Tanggal 25 Mei 2022 (Periode 2022-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Bachelor Degree in Agricultural Economics* dari Korea University (1998) • *Master of International Economics* dari Korea University (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Senior Executive Vice President & Chief Information Technology Officer KB Financial Group (2020) • Senior Executive Vice President & Chief Human Resource Officer KB Financial Group (2021) • Senior Executive Vice President & Chief Strategy Officer KB Financial Group (2022)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	11.800.000 (0,0062804%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Robby Mondong
Wakil Direktur Utama

Usia	56 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 116 tanggal 28 Juni 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027)
Riwayat Pendidikan	Degree in Finance and Banking, National University San Diego CA USA (1992) MBA Degree in Marketing, Woodbury University Burbank CA USA (1993)
Riwayat Pekerjaan	SEVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (Agustus 2019 – Juni 2021) EVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (Oktober 2015 - Agustus 2019) SVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (Juni 2013 - September 2015)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	5.107.000 (0,0027181%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Helmi Fahrudin
Direktur

Usia	49 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bekasi, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Diploma (D-3) di bidang Ekonomi Akuntansi, STIE Yogyakarta, (1997) • Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia, (2003)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk, (2018-2019) • Kepala SKAI (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk (2019-2020) • Anggota Dewan Pengawas, Dana Pensiun Bank Bukopin (2016-2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	2.483.951 (0,0013220%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Dodi Widjajanto
Direktur

Usia	58 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 67 tanggal 25 Agustus 2020 (Periode 2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret (1990) • Magister Manajemen di bidang Agribisnis, Institut Pertanian Bogor (2002)
Riwayat Pekerjaan	• General Manager Kantor Cabang Hongkong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Hongkong (2016-2018) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang (2018- 2020) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung (2020)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	2.000.088 (0,0010645%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Yohanes Suhardi *)
Direktur

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (Periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Ekonomi, Manajemen, Universitas Tarumanegara (1998) • MBA Degree in Finance, Oklahoma University, USA, (1990)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris, PT Sahabat Finansial Keluarga (2014-2021) • EVP National Head SME Banking, PT Bank Permata Tbk (2013-2021) • SVP National Head SME Credit, PT Bank Permata Tbk (2007-2013) • VP Commercial & Corporate Team Leader, PT Bank OCBC Indonesia (2004-2007)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	574.800 (0,0003059%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024



Henry Sawali
Direktur

Usia	56 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 29 tanggal 8 Juli 2021 (periode 2021-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	Akta Keputusan RUPS Tahunan No. 116 tanggal 28 Juni 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027)
Riwayat Pendidikan	• Bachelor Degree in Finance, California State University – Fresno (1986) • Masters Degree in Business Administration, National University of San Diego USA (1992)
Riwayat Pekerjaan	• Head of Commercial and MSME Banking Credit PT Bank CIMB Niaga Tbk (2017-2022) • Senior Manager – SCO for Indonesia PT Bank ANZ Indonesia (2016-2017) • Senior Vice President – Head of Corporate Credit Risk, PT Bank OCBC NISP Tbk (2010-2016)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	1.600.000 (0,0008516%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Young Eun Moon *)
Direktur

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Seoul, Korea Selatan
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS No. 27 tanggal 08 Desember 2021 (Periode 2022-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Bachelor in Public Administration, Yonsei University (1992) • Master of Public Administration, Yonsei University, Korea (1993)
Riwayat Pekerjaan	• General Manager (Digital Strategy Department KB Kookmin Bank (2018- 2019) • General Manager (Future IT Implementation Department KB Kookmin Bank (2019) • CISO / Managing Director (Information Security Division) KB Kookmin Bank (2020
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

*) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024



Jung Ho Han
Direktur

Usia	53 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 77 tanggal 31 Januari 2023 (Periode 2023-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• *Master of Science Management Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology* (2002) • Bachelor Degree in Business Administration, University of Korea (1999)
Riwayat Pekerjaan	• Chief Financial Officer / General Manager, KB Securities Co., Ltd. (2017-2022) • Team Leader / Associate/Senior Deputy General Manager, KB Financial Group Inc. (2008-2017) • Associate of Strategic Planning Department / Branch, KB Kookmin Bank (1999-2006)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	11.983.400 (0,0063780%)
Hubungan Afiliasi	Tidak ada



Jang Hyuk Im
Direktur

Usia	49 Tahun
Kewarganegaraan	Korea Selatan
Domisili	Jakarta, Indonesia
Dasar Hukum Pengangkatan Pertama	Akta Keputusan RUPS Luar Biasa No. 57 tanggal 24 Januari 2024 (Periode 2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026)
Dasar Hukum Pengangkatan Terakhir	-
Riwayat Pendidikan	• Master of Business Administration, Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002) • Bachelor Degree in Electrical & Computer Engineering, Inha University, Korea (2002)
Riwayat Pekerjaan	• Director, Investment Banking Group, KB Securities Co., Ltd (2021-2023) • Team Head, Financial Planning Department, KB Financial Group (2016-2021) • Senior Vice President, Strategic Planning Department, Hyundai Securities (2014-2016)
Sertifikasi yang Dimiliki	Sertifikasi Manajemen Risiko Kualifikasi 7 Sertifikasi Treasury Lv. 7
Rangkap Jabatan	Tidak Ada
Kepemilikan Saham KB Bank	Nihil
Hubungan Afiliasi	Tidak ada

Kronologi Perubahan Direksi Di Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan komposisi Direksi Bank dengan kronologi sebagai berikut:

Komposisi per 1 Januari 2024	Komposisi per 28 Juni 2024	Komposisi per 31 Desember 2024	Keterangan
Woo Yeul Lee Direktur Utama	Woo Yeul Lee Direktur Utama	Woo Yeul Lee Direktur Utama	-
Robby Mondong Wakil Direktur Utama	Robby Mondong Wakil Direktur Utama	Robby Mondong Wakil Direktur Utama	-
Helmi Fahrudin Direktur	Helmi Fahrudin Direktur	Helmi Fahrudin Direktur	-
Dodi Widjajanto Direktur	Dodi Widjajanto Direktur	Dodi Widjajanto Direktur	-
Yohanes Suhardi Direktur			Yohanes Suhardi tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024
Henry Sawali Direktur	Henry Sawali Direktur	Henry Sawali Direktur	-
Young Eun Moon Direktur			Young Eun Moon tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024
Jung Ho Han Direktur	Jung Ho Han Direktur	Jung Ho Han Direktur	-
Jang Hyuk Im Direktur	Jang Hyuk Im Direktur	Jang Hyuk Im Direktur	-

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF SENIOR



ZICO HERNAWAN
SEVP SALES DISTRIBUTION

Usia	**40 Tahun**
Domisili	**Jakarta Timur**
Menjabat Sejak	**2 September 2024**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S.2**
Jabatan Sebelumnya	**Consumer Product Div Head**



SUNGSOO LIM
SEVP SPECIAL ASSET MANAGEMENT

Usia	**51 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**2 September 2024**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**ADVISOR STRATEGIC TRANSFORMATION SAM/CRC IMPLEMENTATION**



HANDOJO WIDODO
SAM V RETAIL DIVISION HEAD

Usia	**59 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 November 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



DRS. RIDWAN W. JULIANTO
SAM IV SME DIVISION HEAD

Usia	**57 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**28 Agustus 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



IRAWAN BARNAS
SAM II WHOLESALE DIVISION HEAD

Usia	**51 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Oktober 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**SPECIAL ASSET MANAGEMENT I DIVISION HEAD**



AGUSTINUS IWAN CHRISTANTO
CORPORATE STRATEGY DIVISION HEAD

Usia	**54 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**16 September 2020**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**KEPALA DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS PERUSAHAAN**



HERY BUDI PRASETYO
RETAIL CREDIT FACTORY DIVISION HEAD

Usia	**63 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**26 Feb 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



JIN HO ROH
KOREAN LINK BUSINESS DIVISION HEAD

Usia	**54 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Maret 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



GI TAE PARK
NEW BUSINESS SOLUTION DIVISION HEAD

Usia	**52 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Maret 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



SEGON PARK
CORPORATE COMMUNICATION DIVISION HEAD

Usia	**47 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Maret 2024**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	-



JUNG HWAN KIM
TREASURY & CAPITAL MARKET DIVISION HEAD

Usia	**44 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Maret 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



TUTWURI ANGGARWANI. K
COMPLIANCE & QA DIVISION HEAD

Usia	**50 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**3 Oktober 2022**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**EVP INTERNAL CONTROL**



BUDHI DHARMA
SAM III WHOLESALE DIVISION HEAD

Usia	**52 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**01 Oktober 2023**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**SUPPORT TEAM FOR DPD & PORTFOLIO, CREDIT DIRECTORATE**



SEUNGCHUL YI
IT PLANNING & OPERATION DIVISION HEAD

Usia	**52 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Februari 2024**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**ADVISOR NGBS**



EKO BRAMANTYO
FINANCE DIVISION HEAD

Usia	**51 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**16 November 2022**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	-



SONG MOO HUR
TRANSFORMATION DIVISION HEAD

Usia	**51 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Februari 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**ADVISOR TRANSFORMATION - BUSINESS PROCESS RESTRUCTURING**



HUSNUL KHATIMAH
MSME PRODUCT & BUSINESS SUPPORT DIVISION HEAD

Usia	**45 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**23 Juni 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**SME PORTFOLIO & SUPPORT DEPARTMENT HEAD**



ROBY ENDRAMA PURBA
INTERNAL AUDIT DIVISION HEAD

Usia	**44 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**01 Februari 2022**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



KANGHYEON LEE
DIGITAL DIVISION HEAD

Usia	**44 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Februari 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**DIGITAL DEVELOPMENT & SOLUTION DEPARTMENT HEAD**



HAN MING
SME & COMMERCIAL CREDIT UNDERWRITING DIVISION HEAD

Usia	**40 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**15 Mei 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**CREDIT UNDERWRITING DIVISION HEAD**



HARIS BUDIMAN
IT DEVELOPMENT DIVISION HEAD

Usia	**42 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**3 Oktober 2022**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**NEW TECHNOLOGY DIVISION HEAD**



LILIK PANGESTU
SAM I DIVISION HEAD

Usia	**59 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 Oktober 2023**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**AYDA & PORTFOLIO BULK SALES DEPARTMENT HEAD**



FEISEL MARTHA
CORPORATE BUSINESS DIVISION HEAD

Usia	**58 tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**22 Maret 2024**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**WHOLESALE BUSINESS DIVISION HEAD**



GAMARIDHA AKHIRUL AR
HUMAN CAPITAL DIVISION HEAD

Usia	**43 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**27 Februari 2023**
Pendidikan Terakhir	**Pasca Sarjana S2**
Jabatan Sebelumnya	**HUMAN CAPITAL STRATEGY, POLICY & SERVICES DEPARTMENT HEAD**



DAVID SURYANADIPUTRA
REGIONAL HEAD VII

Usia	**53 Tahun**
Domisili	**Makassar**
Menjabat Sejak	**23 Februari 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**BRANCH MANAGER JAKARTA SAHARJO**



ELISABETH SUSILOWATI
REGIONAL HEAD V

Usia	**57 Tahun**
Domisili	**Surabaya**
Menjabat Sejak	**15 Agustus 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



ESTHER
REGIONAL HEAD IV

Usia	**50 Tahun**
Domisili	**Semarang**
Menjabat Sejak	**20 Mei 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



IRENE INDRAWATY KESUMA
REGIONAL HEAD III

Usia	**46 Tahun**
Domisili	**Bandung**
Menjabat Sejak	**9 Januari 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



ADI HARIANTO
REGIONAL HEAD VI

Usia	**45 Tahun**
Domisili	**Medan**
Menjabat Sejak	**24 Januari 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	-



DIDI SUDIRA
REGIONAL HEAD II

Usia	**50 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**27 Februari 2023**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**BRANCH MANAGER JAKARTA S.PARMAN**



ANDHY ZAKARIA
REGIONAL HEAD I

Usia	**36 Tahun**
Domisili	**Jakarta**
Menjabat Sejak	**1 September 2024**
Pendidikan Terakhir	**Sarjana S1**
Jabatan Sebelumnya	**BRANCH MANAGER JAKARTA SAHARJO**

SUMBER DAYA MANUSIA

KB Bank memandang bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki peran yang cukup krusial dalam menjalankan kegiatan usaha untuk meningkatkan kinerja Bank. Dalam rangka mewujudkan komitmen untuk menjaga efektivitas dan kualitas operasional, KB Bank melaksanakan pengelolaan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas seluruh karyawan. KB Bank berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Setiap individu dapat berkembang dan berkontribusi secara optimal demi mencapai tujuan bersama.

Demografi Karyawan

Per 31 Desember 2024, KB Bank memiliki karyawan sejumlah 2.898 orang, mengalami peningkatan sebesar 10,70% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2023 yang berjumlah sebanyak 2.618 orang karyawan. Adanya ini lebih disebabkan oleh kebutuhan dalam pertumbuhan bisnis dan operasional, akan tetapi seiring dengan target dan rencana pengelolaan SDM, Bank akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kinerja karyawan kedepannya. Sehingga tidak terjadi peningkatan terhadap SDM Bank.

Jumlah Karyawan Berdasarkan Level Organisasi

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Level Organisasi Periode 2024-2023
(dalam satuan orang)

Level Organisasi	2024				2023			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
Division Head EVP SVP	22	2	24	0,83	15	2	17	0.65%
Regional Head SVP REG BISNIS	4	3	7	0,24	3	1	4	0.15%
Dept Head VP	59	19	78	2,69	53	10	63	2.41%
Branch Manager	29	11	40	1,38	29	6	35	1.34%
Manager	331	141	472	16,29	296	122	418	1.34%
Coordinator	124	146	270	9,32	108	112	220	8.40%
Officer	583	620	1.203	41,51	430	317	747	28.53%
Clerical	454	350	804	27,74	570	544	1.114	42.55%
Non Staff	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	**1.606**	**1.292**	**2.898**	**100,00%**	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan Periode 2024-2023
(dalam satuan orang)

Tingkat Pendidikan	2024				2023			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
SMA	7	6	13	0,45	8	6	14	0.53%
Diploma - Sarjana	1.501	1.241	2.742	94,62	1.375	1.057	2.432	92.90%
Pasca Sarjana - Doktoral	98	45	143	4,93	121	51	172	6.57%
Total	**1.606**	**1.292**	**2.898**	**100,00%**	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian Periode 2024-2023
(dalam satuan orang)

Status Kepegawaian	2024				2023			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
Karyawan Tetap	1.363	1.007	2.370	81.78	1.247	917	2.164	82.66%
Karyawan Tidak Tetap (Kontrak)	243	285	528	18.22	257	197	454	17.34%
Total	**1.606**	**1.292**	**2.898**	**100,00%**	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Rentang Usia

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Rentang Usia Periode 2024-2023
(dalam satuan orang)

Rentang Usia	2024				2023			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
20-24 Tahun	120	209	329	11,35	73	100	173	6.61%
25-29 Tahun	294	339	633	21,84	258	322	580	22.15%
30-34 Tahun	344	274	618	21,33	386	264	650	24.83%
35-39 Tahun	380	215	595	20,53	341	188	529	20.21%
40-44 Tahun	246	152	398	13,73	238	142	380	14.51%
45-49 Tahun	132	78	210	7,25	123	79	202	7.72%
50-54 Tahun	70	20	90	3,11	75	18	93	0.04%
>55 Tahun	20	5	25	0,86	10	1	11	0.004%
Total	**1.606**	**1.292**	**2.898**	**100,00%**	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**

Jumlah Karyawan Berdasarkan Masa Kerja

Tabel Jumlah Karyawan berdasarkan Masa Kerja Periode 2024-2023
(dalam satuan orang)

Masa Kerja	2024				2023			
	Pria	Wanita	Jumlah	%	Pria	Wanita	Jumlah	%
<5 Tahun	756	740	1.496	51,62	576	508	1.084	41.41%
> 5-10 Tahun	254	177	431	14,87	370	241	611	23.34%
> 10-15 Tahun	344	186	530	18,29	299	161	460	17.57%
> 15-20 Tahun	127	93	220	7,59	133	106	239	9.13%
> 20-25 Tahun	74	74	148	5,11	77	66	143	5.46%
> 25-30 Tahun	41	19	60	2,07	35	23	58	2.22%
>30 Tahun	10	3	13	0,45	14	9	23	0.88%
Total	**1.606**	**1.292**	**2.898**	**100,00%**	**1.504**	**1.114**	**2.618**	**100,00%**

Pengembangan Kompetensi

Kebijakan Pengembangan Kompetensi

Bank memastikan kebutuhan sumber daya manusia dengan kompetensi yang memadai. Desain pelatihan dan pengembangan human capital diselaraskan dengan strategi Bank agar seluruh program/kegiatan dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, dan terintegrasi untuk mendukung peningkatan kinerja Bank.

Aktivitas yang mendukung implementasi strategi bisnis bank, terutama dalam konsep *Good Bank*, berbagai inisiatif telah disusun sebagai berikut:

a. Penajaman Program Pendidikan dan Pelatihan
   Penyelarasan konten pelatihan dengan arah kebijakan strategi bisnis bank, dengan fokus pada penerapan konsep *Good Bank*.
b. Penguatan pelatihan dasar bagi seluruh karyawan dengan menambahkan modul Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) serta *Anti-Fraud* yang wajib diikuti oleh seluruh tingkatan karyawan.
c. Sebagai bagian dari inisiatif pengalihan peran *supporting officer* menjadi *business officer*, bank juga menyediakan pelatihan yang mencakup pemahaman produk, peningkatan keterampilan penjualan, serta aspek kredit dan pendanaan. Pengembangan teknik-teknik pelaksanaan *Training.*
   - Pengembangan metode pembelajaran baik secara *online* melalui *e-learning* atau *platform online meeting* serta *training* secara *offline*.
   - Pengembangan *Trainer*/Fasilitator dari Internal KB Bank.
   - Digitalisasi metode evaluasi kegiatan pendidikan, dan pelatihan dengan mengembangkan *Learning Management System*.
d. Penyusunan Program Pengembangan *Talent* dan *Successor*
   - Identifikasi dan pengembangan kompetensi *successor*.
   - Melakukan identifikasi dan pelaksanaan *Next Generation Talent Program* (NGTP) yang lebih terstruktur dan strategis.

Adapun pelaksanaan pelatihan yang bersifat *mandatory* untuk masing-masing level jabatan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Jabatan Level	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta
Seluruh Level	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) *Certification* • *Risk Management Certification* Jenjang 4-7 • *Treasury Dealer Certification* • *Auditor Certification* • *Compliance Certification* • Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) *Certification* • Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) *Certifications* • APU PPT • *IT Awareness* • *Certified Office Channeling* • *Human Capital Certification*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**5.910**
Staff	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) *Certification* • *Risk Management Certification* Jenjang 4 • *Treasury Dealer Certification* • APU PPT • *IT Awareness* • *Certified Office Channeling*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**4.007**
Coordinator, Manager, Department Head, Division Head, Direksi, Komisaris	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) *Certification* • *Risk Management Certification* Jenjang 5-7 • *Treasury Dealer Certification* • *Auditor Certification* • *Compliance Certification* • Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) *Certification* • Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) *Certification* • APU PPT • *IT Awareness* • *Human Capital Certification*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**2.144**

Jabatan Level	Program Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta
Relationship Banking Officer, Priority Banking Officer	• Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) *Certification* • Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) *Certification* • APU PPT • *IT Awareness*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**413**
Karyawan fungsi Treasury	• *Risk Management Certification* Jenjang 4-7 • *Treasury Dealer Certification* • APU PPT • *IT Awareness*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**47**
Karyawan fungsi SDM	• *Risk Management Certification* Jenjang 4-6 • *Human Capital Certification* • APU PPT • *IT Awareness*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**144**
Karyawan fungsi Operasional	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) *Certification* • *Risk Management Certification* Jenjang 4-6 • APU PPT • *IT Awareness*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**591**
Seluruh Karyawan	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) *Certification* • *Risk Management Certification* Jenjang 4-7 • *Treasury Dealer Certification* • *Auditor Certification* • *Compliance Certification* • Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) *Certification* • Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) *Certification* • APU PPT • *IT Awareness* • *Certified Office Channeling* • *Human Capital Certification*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**2898**
Karyawan Fungsi Perkreditan	• *IT Awareness* • *Risk Management Certification* Jenjang 4-7 • APU PPT	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**871**
Karyawan Level Managerial	• Sistem Pengelolaan Pembayaran Rupiah (SPPUR) Certification • *Risk Management Certification* Jenjang 5-7 • *Treasury Dealer Certification* • *Auditor Certification* • *Compliance Certification* • Wakil Agen Penjual Reksadana (WAPERD) *Certification* • Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) *Certification* • APU PPT • *IT Awareness* • *Human Capital Certification*	**Peningkatan Kompetensi dan Pemenuhan Kebijakan Regulator**	**369**

Realisasi Biaya Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Sesuai Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/310/KEP/DIR/1999 tentang Penyediaan Dana Untuk Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Umum, bahwa Bank wajib menyediakan dana pendidikan (BPL) sekurang-kurangnya 3,5% dari anggaran pengeluaran SDM tahun berjalan/Biaya Tenaga Kerja (BTK).

Bank telah merealisasikan biaya pendidikan dan pelatihan pada tahun 2024 sebesar Rp30.216.501.131,- yaitu 132% dari *Budget Training* 2024.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Kepemilikan Saham KB Bank
per 1 Januari 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
PEMODAL NASIONAL			
Perorangan Indonesia	73.808	18.642.139.484	**9,92%**
Koperasi	30	905.628.839	**0,48%**
Yayasan	3	4.621.314	**0,00%**
Dana Pensiun	9	18.236.042	**0,01%**
Asuransi	4	11.702.999	**0,01%**
Bank	2	19.662.220	**0,01%**
Perseroan Terbatas	145	4.412.078.401	**2,35%**
Reksadana	4	35.541.900	**0,02%**
SUBTOTAL	74.005	24.049.611.199	**12,80%**
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	83	119.260.685	**0,06%**
Badan Usaha Asing	97	163.718.667.986	**87,14%**
SUBTOTAL	180	163.837.928.671	**87,20**
TOTAL	**74.185**	**187.887.539.870**	**100%**

Kepemilikan Saham KB Bank
per 31 Desember 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
PEMODAL NASIONAL			
Perorangan Indonesia	71.218	22.048.104.315	**11,73%**
Koperasi	30	905.628.839	**0,48%**
Yayasan	2	3.099.962	**0,00%**
Dana Pensiun	8	18.028.342	**0,01%**
Asuransi	5	16.830.900	**0,01%**
Bank	2	17.594.220	**0,01%**
Perseroan Terbatas	138	4.515.688.346	**2,40%**
Reksadana	1	13.570.000	**0,00%**
SUBTOTAL	71.404	27.538.544.924	**14,66%**
PEMODAL ASING			
Perorangan Asing	95	168.810.385	**0,90%**
Badan Usaha Asing	59	160.180.184.561	**85,25%**
SUBTOTAL	154	160.348.994.946	**84,34%**
TOTAL	**71.558**	**187.887.539.870**	**100%**

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank

per 1 Januari 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holding Inc	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing
PT Jasa Investindo	1.164.017.200	0,62%	Perseroan Terbatas
JPMCB NA RE - Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	1.049.160.910	0,56%	Badan Usaha Asing
Bank of Singapore Limited	947.805.600	0,50%	Badan Usaha Asing
JPMCB NA RE-Vanguard Total International Stock Index Fund	939.060.826	0,50%	Badan Usaha Asing
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	678.875.412	0,35%	Perseroan Terbatas
KB Finansia Multi Finance, PT	540.000.000	0,29%	Perseroan Terbatas
Koperasi Perkayuan APKINDO-MPI (KOPKAP INDO)	460.783.125	0,25%	Koperasi
JPMCB NA RE-Vanguard Fiduciary Trust Company Institutional Total International	443.073.760	0,24%	Badan Usaha Asing
General Resources Asia Limited	436.038.500	0,23%	Badan Usaha Asing
New Luck Holdings Limited	432.195.995	0,23%	Badan Usaha Asing
Heru Budihartono	370.440.900	0,20%	Perorangan Indonesia
PPA Investasi Efek (AFS)	360.093.219	0,19%	Perseroan Terbatas
KB Valbury Sekuritas, PT	360.000.000	0,19%	Perseroan Terbatas
Koperasi Simpan Pinjam Jasa	347.476.000	0,18%	Koperasi
JPMCB NA RE - Blackrock INST TR CO N A Investment FDS For Employee Benefit Trust	305.864.844	0,16%	Badan Usaha Asing
BNYM RE VANGUARD FTSE ALL-WRLD EX-US SML	279.239.673	0,15%	Badan Usaha Asing
Alex Lissan	217.500.000	0,12%	Perorangan Indonesia
DRH. Allen Marbun	200.338.986	0,11%	Perorangan Indonesia

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank

per 31 Desember 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holding Inc	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing
PT Jasa Investindo	1.164.017.200	0,62%	Perseroan Terbatas
Bank of Singapore Limited	947.805.600	0,50%	Badan Usaha Asing
PT Perusahaan Pengelola Aset (PERSERO)	678.875.412	0,36%	Perseroan Terbatas
KB Finansia Multi Finance, PT	540.000.000	0,29%	Perseroan Terbatas
Koperasi Perkayuan APKINDO-MPI (KOPKAP INDO)	460.783.125	0,25%	Koperasi

Komposisi 20 Pemegang Saham Terbesar KB Bank
per 31 Desember 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Status
General Resources Asia Limited	436.038.500	0,23%	Badan Usaha Asing
New Luck Holdings Limited	432.195.995	0,23%	Badan Usaha Asing
Heru Budihartono	370.440.900	0,20%	Perorangan Indonesia
PPA Investasi Efek (AFS)	360.093.219	0,19%	Perseroan Terbatas
KB Valbury Sekuritas, PT	360.000.000	0,19%	Perseroan Terbatas
Koperasi Simpan Pinjam Jasa	347.476.000	0,18%	Koperasi
Ki Sun Seo	244.455.300	0,13%	Perorangan Indonesia
Alex Lissan	218.510.000	0,12%	Perorangan Indonesia
PT Berlian Tambang Indonesia	201.329.300	0,11%	Perseroan Terbatas
DRH. Allen Marbun	200.338.986	0,11%	Perorangan Indonesia
Nurwati B.	195.590.600	0,10%	Perorangan Indonesia
Go Kiong Hwoo	193.576.200	0,10%	Perorangan Indonesia
BCSL Client A/C PB Cayman Clients	180.344.200	0,10%	Badan Usaha Asing

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Saham 5% atau Lebih

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Saham Bank
per 1 Januari 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holdings Inc.	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan 5% atau Lebih Saham Bank
per 31 Desember 2024

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Presentase Kepemilikan %	Status
Kookmin Bank Co., Ltd.	125.655.736.951	66,88%	Badan Usaha Asing
STIC Eugene Star Holdings Inc.	31.900.000.000	16,98%	Badan Usaha Asing

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5%

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Bank
per 1 Januari 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Perorangan Indonesia	73.808	18.642.139.484	9,92%
Koperasi	30	905.628.839	0,48%
Yayasan	3	4.621.314	0,00%
Dana Pensiun	9	18.236.042	0,01%

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Bank
per 1 Januari 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Asuransi	4	11.702.999	0,01%
Bank	2	19.662.220	0,01%
Perseroan Terbatas	145	4.412.078.401	2,35%
Reksadana	4	35.541.900	0,02%
Sub Total	**74.005**	**24.049.611.199**	**12,80%**
ASING			
Perorangan Asing	83	119.260.685	0,06%
Badan Usaha Asing	95	6.162.931.035	3,28%
Sub total	**178**	**6.282.191.720**	**3,34%**
Total	**74.183**	**30.331.802.919**	**16,14%**

Komposisi Pemegang Saham dengan Kepemilikan Kurang dari 5% Saham Bank
per 31 Desember 2024

Kepemilikan Saham	Jumlah Pemegang Saham	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Perorangan Indonesia	71.218	22.048.104.315	11,73%
Koperasi	30	905.628.839	0,48%
Yayasan	2	3.099.962	0,00%
Dana Pensiun	8	18.028.342	0,01%
Asuransi	5	16.830.900	0,01%
Bank	2	17.594.220	0,01%
Perseroan Terbatas	138	4.515.688.346	2,40%
Reksadana	1	13.570.000	0,00%
Sub Total	**71.404**	**27.538.544.924**	**14,64%**
ASING			
Perorangan Asing	95	168.810.385	0,90%
Badan Usaha Asing	57	2.624.447.610	1,39%
Sub total	**152**	**2.793.257.995**	**2,29%**
Total	**71.556**	**30.331.802.919**	**16,93%**

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank
per 1 Januari 2024

Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Dewan Komisaris			
Jerry Marmen	Komisaris Utama	-	-
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	2.300.000	0,0012241%
Nanang Supriyatno	Komisaris	-	-
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	-	-
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	-	-

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank
per 1 Januari 2024

Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	-	-
Sukriansyah S. Latief*	Komisaris Independen	-	-
Eugene K Galbraith**	Komisaris Independen	-	-
Direksi			
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	8.500.000	**0,0045240%**
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	1.107.000	**0,0005892%**
Helmi Fahrudin	Direktur	482.951	**0,0002570%**
Dodi Widjajanto	Direktur	1.000.088	**0,0005323%**
Yohanes Suhardi***	Direktur	574.800	**0,0003059%**
Henry Sawali	Direktur	200.000	**0,0001064%**
Young Eun Moon****	Direktur	-	-
Jung Ho Han	Direktur	-	-
Jang Hyuk Im	Direktur	-	-

*) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen Bank per 28 Juni 2024
**) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 28 Juni 2024
***) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024
****) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024

Kepemilikan Saham oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank
per 31 Desember 2024

Nama Pemegang Saham	Jabatan	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan %
Dewan Komisaris			
Jerry Marmen	Komisaris Utama	-	-
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	2.300.000	**0,0012241%**
Nanang Supriyatno	Komisaris	-	-
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	-	-
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	-	-
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	-	-
Direksi			
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	11.800.000	**0,0062804%**
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	5.107.000	**0,0027181%**
Helmi Fahrudin	Direktur	2.483.951	**0,0013220%**
Dodi Widjajanto	Direktur	2.000.088	**0,0010645%**
Henry Sawali	Direktur	1.600.000	**0,0008516%**
Jung Ho Han	Direktur	11.983.400	**0,0063780%**
Jang Hyuk Im	Direktur	-	-

Pembelian/Penjualan Saham Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk menyampaikan informasi kepada Bank mengenai kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank.

Adapun pada tahun 2024, Bank telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan transaksi pembelian dan/atau penjualan saham Bank yang dimiliki oleh Direksi, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Transaksi	Jumlah Saham Sebelum Transaksi (lembar)	Jumlah Pembelian/ Penjualan (lembar)	Harga Saham (Rp)	Jumlah Saham Setelah Transaksi (lembar)	Tanggal Transaksi	Pelaporan
1	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
2	Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	-	-	-	-	-	-	-
3	Helmi Fahrudin	Direktur	-	-	-	-	-	-	-
4	Dodi Widjajanto	Direktur	Pembelian	1.000.088	1.000.000	56	2.000.088	3 Juli 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 14620/SKPR/ VII/2024 tanggal 3 Juli 2025
5	Henry Sawali	Direktur	Pembelian	200.000	1.400.000	50	1.600.000	3 Juli 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 14675/SKPR/ VII/2024 tanggal 5 Juli 2025
6	Helmi Fahrudin	Direktur	Pembelian	482.951	2.000.000	54	2.482.951	5 Juli 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 14774/SKPR/ VII/2024 tanggal 5 Juli 2025
7	Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Pembelian	8.500.000	3.300.000	55	11.800.000	5 Juli 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 14970/SKPR/ VII/2024 tanggal 8 Juli 2025
8	Jung Ho Han	Direktur	Pembelian	0	2.000.000 1.633.100	55	3.633.100	5 Juli 2024 6 Juli 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 18944/SKPR/ VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2025
9	Jung Ho Han	Direktur	Pembelian	3.633.100	6.849.300 1.000	73 64	10.483.400	23 Agustus 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 21282/SKPR/ VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2025
10	Helmi Fahrudin	Direktur	Pembelian	2.482.951	1.000	54	2.483.951	26 Agustus 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 22687/SKPR/ IX/2024 tanggal 3 September 2025
11	Jung Ho Han	Direktur	Pembelian	10.483.400	1.500.000	65	11.983.400	9 September 2024	Telah Dilaporkan kepada OJK melalui surat No. 23806/SKPR/ IX/2024 tanggal 10 September 2025

Kronologi Penerbitan dan/Atau Pencatatan Saham

Daftar Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

No.	Tanggal	Aksi Korporasi	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		
						Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
1	30 Juni 2006	iInitial Public Offering	100	350	843.765.500	5.603.765.550	84.376.550.000	295.317925.000
2	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2007	MSOP	100	370	47.864.000	5.651.629.550	47.864.000.000	17.709.680.000
3	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2007	MSOP	100	370	39.370.500	5.691.000.050	39.370.500.000	14.567.085.000
4	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2008	MSOP	100	370	740.500	5.691.740.550	740.500.000	273.985.000
5	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2008	MSOP	100	370	780.500	5.692.521.050	780.500.000	288.785.000
6	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2009	MSOP	100	370	7.156.500	5.699.677550	7.156.500.000	2.647905.000
7	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2009	MSOP	100	370	1.092.000	5.700.769.550	1.092.000.000	404.040.000
8	26 November 2009	Penawaran Umum Terbatas I	100	415	286.050.768	5.986.820.318	28.605.076.800	118.711.068.720
9	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2010	MSOP	100	370	129.687500	6.116.507.818	129.687500.000	47.984.375.000
10	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010	MSOP	100	370	16.254.500	6.132.762.318	16.254.500.000	6.014.165.000
11	26 Januari 2011	Penawaran Umum Terbatas II (PUT II)	100	520	1.787.960.495	7.920.722.813	178.796.049.500	929.739.457.400
12	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011	MSOP	100	370	12.705.000	7.933.427.813	12.705.000.000	4.700.850.000
13	30 hari bursa sejak tanggal 01 November 2011	MSOP	100	370	269.000	7.933.696.813	269.000.000	99.530.000
14	30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2012	MSOP	100	370	14.346.000	7.948.042.813	14.346.000.000	5.308.020.000
15	30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2012	MSOP	100	370	680.500	7.948.723.313	680.500.000	251.785.000
16	30 hari bursa sejak tanggal 2 Januari 2013	MSOP	100	370	352.500	7.949.075.813	352.500.000	130.425.000
17	30 hari bursa sejak tanggal 25 Mei 2013	MSOP	100	370	9.954.500	7.959.030.313	9.954.500.000	3.683.165.000
18	07 Januari 2014	Penawaran Umum Terbatas III (PUT III)	100	660	1.106.252.141	9.065.282.454	110.625.214.100	730.126.413.000
19	27 Juli 2018	Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV	100	570	2.565.288.316	11.651.908.748	256.528.831.600	1.462.214.340.120
20	30 Juli 2020	Penawaran Umum Terbatas (PUT) V	100	180	4.660.763.499	16.312.672.247	466.076.349.900	838.937.429.820
21	21 September 2020	Private Placement	100	190	16.360.578.947	32.673.251.194	1.636.057.894.700	3.108.509.999.930

Daftar Kronologi Penerbitan dan/atau Pencatatan Saham

No.	Tanggal	Aksi Korporasi	Nilai Nominal (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Jumlah Saham yang Diterbitkan	Modal Ditempatkan dan Disetor		
						Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	Total Harga Penawaran (Rp)
22	8 November 2021	Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI	100	200	35.214.288.984	**67.887.540.178**	**7.000.000.000.000**	**7.042.857.796.800**
23	5 Mei 2023	Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII	100	100	119.999.999.692	**187.887.539.870**	**18.999.999.969.200**	**11.999.999.969.200**

Kronologi Penerbitan Saham

Pada bulan Juli 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga jual Rp350 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat melalui pasar modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran Umum Saham Perdana saham Seri B kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAMLK melalui surat No. S-825/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006. Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 dan pada saat yang bersamaan sebanyak 99% saham Bank juga dicatatkan. Seluruh saham kelas A sebesar 0,31% dan saham kelas B sebesar 0,69% yang dimiliki oleh Kopelindo dan Kopkapindo masing-masing secara proporsional tidak dicatatkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 7548/DIR/X/2009 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak 286.050.768 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp415 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAMLK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui surat No. S-10319/BL/2009 tanggal 26 November 2009. Pada tanggal 26 November 2009, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2009 sampai dengan 10 Desember 2009. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I sebesar Rp118,71 miliar (untuk 286.050.768 saham biasa kelas B), di mana sebesar Rp62,95 miliar (untuk 151.699.698 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp55,76 miliar (untuk 134.351.070 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) dengan proporsi masing-masing sebesar 89,83% dan 10,17%. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini telah diterima oleh Bank pada bulan Desember 2009.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 11754/ DIR/ XII/2010 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak 2.051.366.765 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham.

Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui surat No. S-771/ BL/2011 tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 26 Januari 2011, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2011-17 Februari 2011. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II sebesar Rp929,74 Miliar (untuk 1.787.960.495 saham biasa kelas B), di mana sebesar Rp921,10 miliar (untuk 1.771.342.921 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp8,6 miliar (untuk 16.617.574 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Karyawan Bank Bukopin Jakarta (KKBJ) dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini telah diterima oleh Bank pada bulan Februari 2011.

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.13308/DIR/X/2013 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 2.659.505.614 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp660 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui surat No. S-424/D.04/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pada tanggal 11-13 Desember 2013, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013-7 Januari 2014. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran

Umum Terbatas III sebesar Rp730,13 miliar (untuk 1.106.252.141 saham biasa kelas B), dari nilai tersebut sebesar Rp9.29 miliar (untuk 14.076.556 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat, sebesar Rp343.41 miliar (untuk 520.319.150 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan sebesar Rp377,42 miliar (untuk 571.856.435 saham biasa kelas B) dari PT Bosowa Corporindo. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas III ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp587,49 miliar dan hingga tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp730,13 miliar.

Pada tanggal 4 Mei 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 06529/DIR/V/2018 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.565.288.316 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No. S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018.

Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Penawaran Umum Terbatas IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018-25 Juli 2018. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas IV sebesar Rp1.462 miliar, dari nilai tersebut sebesar Rp1.460 miliar diperoleh dari KB Kookmin Bank sebagai *standby buyer*, sebesar Rp1,3 miliar diperoleh dari masyarakat. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas IV ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 25 Juli 2018 sebesar Rp1.462.214.340.120.

Pada tanggal 24 Oktober 2019, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas V dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 4.660.763.499 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan harga penawaran Rp180 (seratus delapan puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah Penawaran Umum Terbatas V sebesar Rp838.937.429.820 (delapan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI ("PUT V").

Pada tanggal 25 Agustus 2020, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD"). Selanjutnya pada tanggal 2 September 2020, Bank telah melakukan PMTHMETD sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dengan harga penawaran Rp190 (seratus sembilan puluh Rupiah) setiap sahamnya. Jumlah PMTHMETD sebesar Rp3.108.509.999.930 (tiga triliun seratus delapan miliar lima ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh Rupiah) dan telah dicatatkan di BEI.

Pada tanggal 8 November 2021 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 35.214.288.984 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (seratus) per saham.

Pada tanggal 30 November 2022 Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penambahan Modal dengan skema Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD), dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 (seratus dua puluh miliar) Saham Kelas B dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah) per saham. Kemudian di tahun 2023, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas VII (PUT VII) dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta dengan surat No. 02441/DIR/II/2023 tanggal 10 Februari 2023. Bank telah mendapatkan persetujuan sehubungan dengan rencana PUT VII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 109 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (Akta No. 109/2022), yang pada intinya menyetujui rencana Bank untuk melaksanakan PUT VII dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan saham kelas B sebanyak-banyaknya 120.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100,- per saham.

Bank melakukan PUT VII dalam rangka menerbitkan HMETD kepada para pemegang saham Bank atas sebanyak-banyaknya sebesar 119.999.999.692 saham kelas B dengan nilai nominal Rp100,- per saham yang ditawarkan melalui Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD). HMETD dibagikan kepada para pemegang saham Bank yang tercatat pada tanggal 17 Mei 2023 di mana setiap pemilik 100.000.000 saham lama Bank memperoleh 176.762.922 HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham kelas B dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- per saham. Dengan demikian, Bank memperoleh dana Rp11.999.999.969.200,-.

Kronologi Penerbitan Dan/Atau Pencatatan Efek Lainnya

Nama Obligasi dan Sukuk	Tanggal Penerbitan	Tanggal Jatuh Tempo	Tenor (Tahun)	Kupon	Mata Uang	Nominal (dalam Rp miliar)	Rating	
							2024	2023
Penerbitan Obligasi	31 Mei 1989	25 Mei 1994	6	-	Rupiah	30	-	-
Obligasi Seri A Bank Bukopin II Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	5	-	Rupiah	319	*	*
Obligasi Subordinasi Seri B Bank Bukopin Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	10	-	Rupiah	236	*	*
Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin Tahun 2003	30 Juni 2003	10 Juli 2008	6	-	Rupiah	45	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Bukopin Tahap I Tahun 2012	6 Maret 2012	6 Maret 2019	7	9,25% p.a	Rupiah	1.500	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015	30 Juni 2003	30 Juni 2022	7	12% p.a	Rupiah	400	*	*
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017	28 Februari 2017	28 Februari 2024	7	11% p.a	Rupiah	1.405	*	**idAA (Pefindo)**
OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021	9 September 2021	9 September 2024	3	6,25% p.a	Rupiah	1.000	**AAA(idn) Fitch Rating**	**idnAAA (Fitch Ratings)**
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 SERI A	9 September 2021	9 September 2026	5	8% p.a	Rupiah	315	**AA(idn) Fitch Rating**	**idnAA (Fitch Ratings)**
OBLIGASI SUBORDINASI BERKELANJUTAN III BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 SERI B	9 September 2021	9 September 2028	7	8,90% p.a	Rupiah	685	**AA(idn) Fitch Rating**	**idnAA (Fitch Ratings)**
Senior Unsecured Notes	30 Oktober 2024	30 Oktober 2027	3	5,658% p.a	USD	0.3	**BBB (stable) Fitch Ratings**	-

*) Sudah Lunas

SUSPENSI SAHAM BANK

Sepanjang tahun 2024, tidak ada saham Bank yang ditangguhkan, sehingga informasi terkait hal tersebut tidak dapat disajikan dalam laporan tahunan ini.

STRUKTUR GRUP BANK

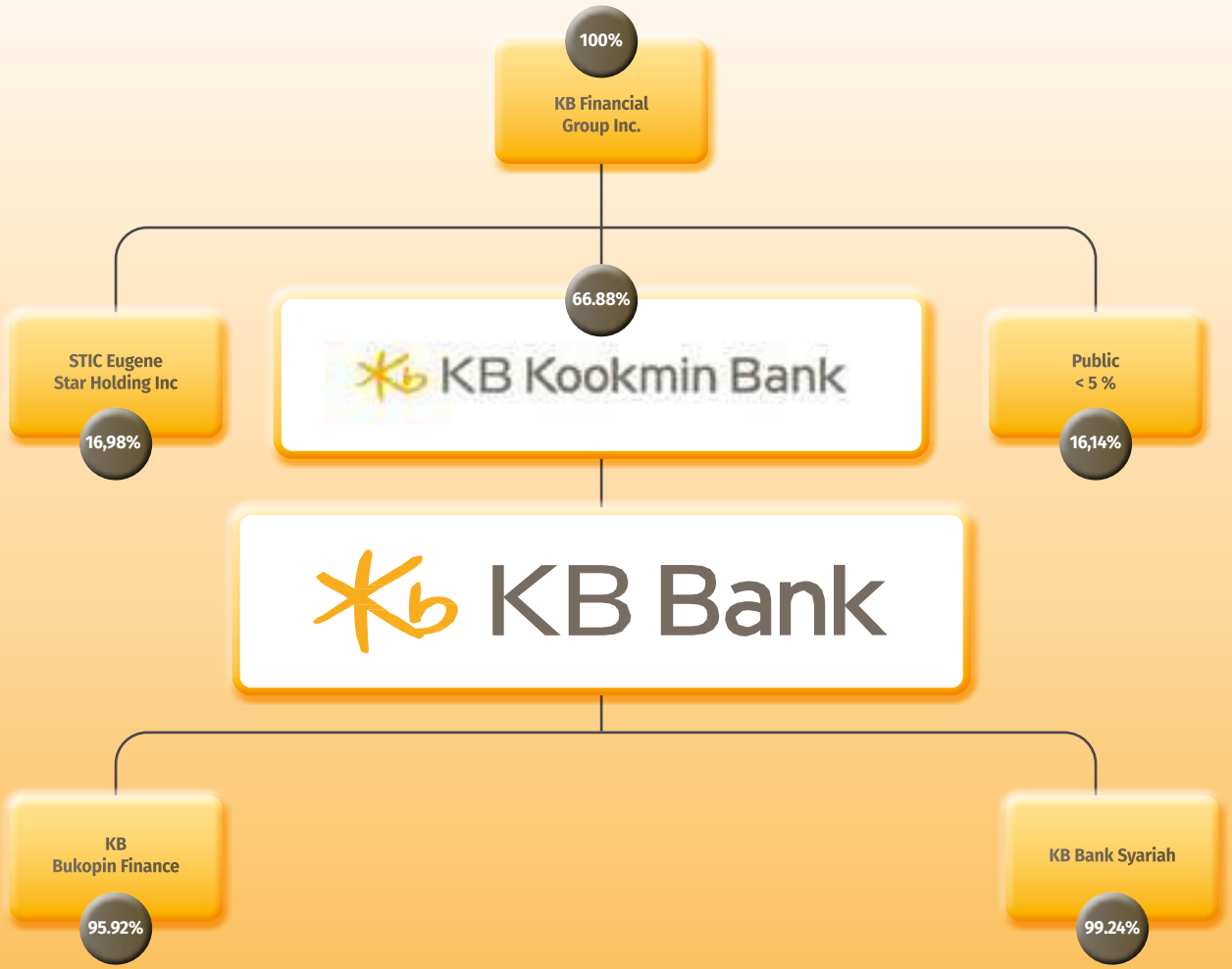

Komposisi Pemegang Saham KB Bank sampai dengan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	%
KB Kookmin Bank	125.655.736.951	Rp12.565.573.695.100	66,88%
STIC Eugene Star Holding Inc.	31.900.000.000	Rp3.190.000.000.000	16,98%
Public <5%*	30.331.802.919	Rp3.244.426.274.100	16,14%
Total Modal disetor dan Ditempatkan	187.887.539.870	Rp18.999.999.969.200	100%

*) Termasuk Saham Anggota Dewan Komisaris & Direksi Bank

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Pemegang saham utama dan pengendali KB Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd., perusahaan perbankan asal Korea Selatan, KB Kookmin Bank merupakan bagian dari KB Financial Group, salah satu grup keuangan terbesar di Korea Selatan. Bank yang berbasis di Korea tersebut tercatat sebagai bank dengan pencapaian net income terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. Saham KB Financial Group tercatat di Korea Exchange (KRX) sejak 10 Oktober 2008 dan di New York Stock Exchange (NYSE) sejak 29 September 2008. Total aset KB Financial Group per 31 Desember 2019 mencapai KRW789,6 triliun (atau sekitar Rp9.326 triliun). Perusahaan itu telah mengembangkan sayapnya ke pasar global dengan jaringan yang tersebar di Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, hingga Selandia Baru. Di Asia Tenggara, Kookmin melakukan ekspansi ke Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia.

Jajaran Kepengurusan Kookmin Bank

Nama	Jabatan
Lee Jae Keun	President Director
Kim Yeong Ki	Executive Audit Committee
Son Seog Ho	Director
An Gang Hyeon	Non-executive Director
Yoo Yong Keun	Non-executive Director
Seo Tae Jung	Non-executive Director
Moon Sue Bok	Non-executive Director
Kang Nam Che	Senior Managing Director
Kang Soon Bae	Senior Managing Director
Kwak San Up	Senior Managing Director
Kim Jin Sam	Senior Managing Director
Kim Jin Young	Senior Managing Director
Maeng Jin Gyu	Senior Managing Director
Park Ki Eun	Senior Managing Director

Jajaran Kepengurusan Kookmin Bank

Nama	Jabatan
Pak Byoung Gon	Senior Managing Director
Pak Young Sei	Senior Managing Director
Park Chan Yong	Senior Managing Director
Seo Young Ik	Senior Managing Director
Oh Sang Won	Senior Managing Director
Lew Chang Beom	Senior Managing Director
Yook Chang Hwa	Senior Managing Director
Lee Seong Hee	Senior Managing Director
Lee Youung Jig	Senior Managing Director
Lee Jong Min	Senior Managing Director
Lee Taek Yeon	Senior Managing Director
Lee Hyeok	Senior Managing Director
Jang Yeon Soo	Senior Managing Director
Jeong Mun Cheol	Senior Managing Director
Jeong Jin Ho	Senior Managing Director
Choi Seok Mun	Senior Managing Director

Kantor Pusat
Yeoido Office
#26, Gukjegeumyung-ro 8-gil
Yeongdeungpo-gu
Seoul. Tel ; 82-2-2073-7114

INFORMASI TENTANG ENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASI

No	Nama Entitas Anak	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Bidang Usaha	Kepemilikan Saham Bank (%)	Status	Alamat & Kontak
1	PT KB Bukopin Finance	1983	1994	Pembiayaan	99,24%	Beroperasi	Jl. Melawai No. 66, Kramat Pela, Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan – 12160 Telp: (021) 2793 6558 – Office (021) 2793 6513 Surel: bufincare@bukopinfinance.co.id
2	PT Bank KB Bukopin Syariah	1990	2008	Perbankan berbasis prinsip Islami	95,92%	Beroperasi	Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta Pusat 10440 Telp: +6221 2300912 Fax: +6221 3148401

Profil Entitas Anak

PT KB Bukopin Finance

PT KB Bukopin Finance adalah Entitas Anak KB Bank yang didirikan berdasarkan Akta No. 5 tanggal 11 Maret 1983 yang di buat di hadapan Tan A. Sioe, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5233.HT.01.01. TH83 tanggal 29 Juli 1983 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 26, beserta Tambahan No. 432 tanggal 1 April 1986. Perseroan memperoleh izin usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan No. 66/KMK.017/1994 tertanggal 5 Maret 1994.

Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, termasuk perubahan nama menjadi PT. Indo Trans Buana Multi Finance sesuai Akta No. 99 tanggal 3 Mei 1991 dan masuknya PT. Bank Bukopin sebagai Pemegang Saham sesuai Akta No. 181 tanggal 26 Desember 1994. Selanjutnya sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 7 Mei 2008 telah disetujui perubahan nama dari PT. Indo Trans Buana Multi Finance yang tercantum dalam Akta Notaris Amastasia Dau, SH dengan Akta No. 1 tanggal 9 Juni 2008. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan pada tanggal 7 Mei 2008 telah disetujui perubahan nama dari PT Indo Trans Buana Multi Finance menjadi PT Bukopin Finance, yang tercantum dalam Akta Notaris Amastasia Dau, SH dengan Akta Nomor: 1 tertanggal 9 Juni 2008.

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 6 Tanggal 27 Juli 2021 Perseroan PT Bukopin Finance berubah nama menjadi PT KB Bukopin Finance.

PT KB Bukopin Finance bergerak dalam bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Porsi kepemilikan KB Bank pada PT KB Bukopin Finance saat ini adalah sebesar 97,03%.

PT Bank KB Bukopin Syariah

PT Bank KB Bukopin Syariah (selanjutnya disebut Perseroan) sebagai bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang bermula masuknya konsorsium PT Bank Bukopin, Tbk diakuisisinya PT Bank Persyarikatan Indonesia (sebuah bank konvensional) oleh PT Bank Bukopin, Tbk., proses akuisisi tersebut berlangsung secara bertahap sejak 2005 hingga 2008, dimana PT Bank Persyarikatan Indonesia yang sebelumnya bernama PT Bank Swansarindo Internasional didirikan di Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan Akta Nomor 102 tanggal 29 Juli 1990 merupakan bank umum yang memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan nomor 1.659/ KMK.013/1990 tanggal 31 Desember 1990 tentang Pemberian Izin Peleburan Usaha 2 (dua) Bank Pasar dan Peningkatan Status Menjadi Bank Umum dengan nama PT Bank Swansarindo Internasional yang memperoleh kegiatan operasi berdasarkan surat Bank Indonesia (BI) nomor 24/1/UPBD/PBD2/Smr tanggal 1 Mei 1991 tentang Pemberian Izin Usaha Bank Umum dan Pemindahan Kantor Bank.

PT Bank KB Bukopin Syariah bergerak dalam bidang Perbankan berbasis prinsip Islami. Porsi kepemilikan KB Bank pada PT Bank KB Bukopin Syariah saat ini adalah sebesar 92,78%.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Kantor Akuntan Publik (KAP)	
Nama KAP	KAP Mirawati Sensi Idris (Firma anggota dari jaringan Moore Indonesia)
Alamat	EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A, Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet ,Jakarta Selatan 12870
Akuntan Publik	Denny Susanto
Periode Penugasan	2024
Jasa *Audit* yang Diberikan	*Audit* Laporan Keuangan Konsolidasi
Biaya Jasa *Audit*	Rp 2.400.000.000
Jasa Non-*Audit* yang Diberikan	-

Biro Administrasi Efek	
Nama Lembaga	PT Datindo Entrycom
Alamat	Jl. Hayam Wuruk No.28, Jakarta Pusat
Periode Penunjukan	Selama Tahun 2024
Jasa yang Diberikan	Pencatatan Administrasi Saham

Lembaga Pemeringkat	
Nama Lembaga	Fitch Ratings Indonesia
Alamat	DBS Bank Tower 24th Floor, Suite 2403, Jl. Prof. DR. Satrio No.Kav 3-5, RT.11/RW.4, Kuningan, Karet, Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940
Periode Penunjukan	2023 – 2026
Jasa yang Diberikan	Rating Perusahaan

Lembaga Pemeringkat	
Nama Lembaga	PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)
Alamat	Equity Tower 30th Floor Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia
Periode Penunjukan	Selama Tahun 2024
Jasa yang Diberikan	Rating Perusahaan

Wali Amanat	
Nama Lembaga	PT Bank KB Bukopin Tbk
Alamat	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan
Surat Penunjukan	Surat Izin sebagai Wali Amanat dari Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal melalui surat Nomor S-2356/PM/2025 tanggal 26 Agustus 2005
Periode Penunjukan	26 Agustus 2005 sd sekarang
Jasa yang Diberikan	Jasa Wali Amanat
Biaya Jasa	N/A

Informasi Perdagangan dan Pencatatan Saham	
Nama Lembaga	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat	Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, 5th Floor, Jakarta Selatan
Periode Penunjukan	Selama Tahun 2024
Jasa yang Diberikan	Jasa Perdagangan dan Pencatatan Saham

Konsultan Hukum	
Nama Lembaga	Gani Djemat & Partners
Alamat	Equity Tower, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190
Periode Penunjukan	2024 - 2025
Jasa yang Diberikan	Jasa Hukum

Konsultan Hukum	
Nama Lembaga	Soewito Suhardiman Eddy Murthy Kardono (SSEK Law Firm)
Alamat	Mayapada Tower I, 12th and 14th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta, 12920
Periode Penunjukan	2024 - 2025
Jasa yang Diberikan	Jasa Hukum

Konsultan Hukum	
Nama Lembaga	LSW & Barun
Alamat	Graha Surveyor Indonesia, Lt 19 Jl. Gatot Subroto.Kavling 56 Jakarta Selatan
Periode Penunjukan	2024 - 2025
Jasa yang Diberikan	Jasa Hukum

Notaris	
Nama Lembaga	Aulia Taufani S,H.
Alamat	Menara Sudirman Lantai 18 ABD, Jl. Jend. Sudirman, 5, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta City, Jakarta 12190
Periode Penunjukan	2022 – 2024
Jasa yang Diberikan	Jasa Hukum Pendampingan dan Pembuatan Akta RUPS maupun RUPSLB



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI



25 April 2024

Nama Penghargaan	Companies to Watch in 2024
Kategori	Top 20 Companies to Watch in 2025
Diberikan Oleh	Bloomberg Technoz



29 Mei 2024

Nama Penghargaan	Best Corporation in Transparent Emission Reduction Practices
Kategori	Transparency in Emission Reduction (Green Category)
Diberikan Oleh	Investortrust.id



29 Mei 2024

Nama Penghargaan	Best Corporation in Transparent Emission Reduction Practices
Kategori	Transparency in Emission Calculation (Silver Category)
Diberikan Oleh	Investortrust.id



30 Juli 2024

Nama Penghargaan	Anugerah Ekonomi Hijau
Kategori	Pendukung Pertumbuhan Ekosistem Kendaraan Listrik
Diberikan Oleh	Detik Network



20 November 2024

Nama Penghargaan	CNBC Indonesia Communication Strategists Awards
Kategori	The Strategic Communication Excellence
Diberikan Oleh	CNBC Indonesia



Nama sertifikat	ISO 27001
Kategori	IT Security Management Systems
Diberikan Oleh	Bureau Veritas Indonesia
Berlaku Sampai	Mei 2025

INFORMASI PADA *WEBSITE* BANK



KB Bank memiliki situs web resmi dengan alamat www.kbbank.co.id. Situs web ini merupakan portal resmi Bank yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Bank kepada khalayak luas. Situs web resmi Bank yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8/POJK.4/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik, yang mewajibkan menyampaikan informasi mengenai, antara lain:

1. Informasi Umum Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Informasi Bagi Pemodal atau Investor;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan;
4. Informasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Website KB Bank terdiri dari 6 (enam) kanal dengan konten sebagai berikut:

Nama Kanal	Konten	

Solusi untuk Anda	• Solusi Keseharian Anda
	  • Kartu Kredit
	  • Kartu Debit
	  • KB Bank Prioritas
	• Solusi Masa Depan Anda
	  • Simpanan
	  • Pinjaman
	  • Wealth Management
		• Solusi Untuk Bisnis Anda
		  • UMKM
		  • Komersial
		• Layanan Terbaik untuk Anda
		  • Layanan Individual
		  • Layanan Bisnis
		• Promosi

Nama Kanal	Konten

Tentang Kami	• Profil KB Bank
	  • Riwayat Kami
	  • Visi & Misi
	  • Segmen Bisnis
	  • Anak Perusahaan
	  • Budaya Perusahaan
	  • Penghargaan
	  • Bank Koresponden
	  • Lembaga Profesi Perusahaan
	  • Hubungi Kami
	• Struktur Manajemen
	  • Dewan Komisaris
	  • Direksi
	  • Komite
	  • Sekretaris Perusahaan
	  • Struktur Organisasi
	• Investor
	  • Hubungan Investor
	• Tanggung Jawab Sosial
	  • Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
	  • Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
	• Tata Kelola Perusahaan
	  • Tentang Tata Kelola Perusahaan
	  • Piagam
	  • Pedoman
	  • Laporan Tata Kelola
	  • Kode Etik
	  • Whistleblowing System
	  • Pemberitahuan Privasi

Info Terbaru	• KURS
	• Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)
	• Newsroom
	  • Siaran Pers
	  • Berita
	• Pengumuman

Jaringan	• Jaringan Kantor KB Bank • Jaringan ATM KB Bank
Karir	• Bekerja di KB Bank • Lowongan Pekerjaan
Layanan Nasabah	• Layanan Pengaduan • Layanan Transaksi

Bank senantiasa memperbarui informasi yang disajikan dalam *website* secara berkala untuk memberikan informasi ter-*update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. Bank juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, X/Twitter, Instagram, dan Youtube.


Rp. 50.000

KB Bank



Analisis dan Pembahasan Manajemen

TINJAUAN UMUM

Analisis Perekonomian Global

Sebagaimana dikutip dari Laporan Perekonomian Indonesia 2024 yang dirilis oleh Bank Indonesia, menjelaskan bahwa Ketegangan politik global yang masih tinggi pada awal tahun 2024 akibat berlanjutnya konflik Rusia-Ukraina, makin meningkat setelah serangan Israel ke Palestina. Menjelang akhir tahun 2024, terpilihnya kembali Presiden Trump di Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan *America First* kembali meningkatkan ketidakpastian global karena berpotensi mengubah lanskap geopolitik dan perekonomian dunia.

Berbagai perkembangan terkait hasil Pemilihan Umum di AS ini telah berisiko meningkatkan fragmentasi perdagangan dan investasi dunia, menurunkan pertumbuhan ekonomi dunia, dan kemudian makin meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Dinamika geopolitik dunia yang cepat berubah telah mempengaruhi perkembangan ekonomi global sepanjang tahun 2024, dan diperkirakan akan terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi global pada 2024 diperkirakan melambat menjadi 3,2% dari 3,3% pada 2023 dan diproyeksikan tetap 3,2% pada 2025, serta melambat lebih lanjut menjadi 3,1% pada 2026.

Divergensi pola pertumbuhan antar negara juga berlanjut seiring dengan meningkatnya fragmentasi ekonomi dan perdagangan global. Ekonomi AS diperkirakan tetap kuat pada 2024 dan 2025 disertai dengan risiko pemanasan ekonomi yang berasal dari pembengkakan defisit fiskal. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan Kawasan Eropa diperkirakan akan melanjutkan perlambatan seiring dengan melemahnya permintaan domestik dan dampak dari kebijakan tarif dagang yang diterapkan oleh Pemerintah AS. Di sisi lain, prospek pertumbuhan ekonomi India, Indonesia, serta sejumlah negara *Emerging Market Economies* (EMEs) diperkirakan masih tetap positif, didorong oleh permintaan domestik, meskipun menghadapi potensi perlambatan ekspor akibat penurunan pertumbuhan ekonomi global dan fragmentasi perdagangan dunia.

Analisis Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2024 juga tak lepas dari berbagai tantangan di tengah ketidakpastian global yang meningkat. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, Perekonomian Indonesia 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp 78,6 juta atau USD4.960,3.

Ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Namun demikian, ekonomi Indonesia tahun 2024 hanya tercatat tumbuh sebesar 5,03 persen, melambat dibanding capaian tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 9,80 persen. Sementara itu, pertumbuhan tertinggi dari sisi pengeluaran dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non profit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 12,48 persen.

Di sisi lain, ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,53 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,63 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 38,58 persen.

Selama tahun 2024 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 57,02 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 4,92 persen (c-to-c).

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia triwulan IV 2024

Q-TO-Q	Y-ON-Y	C-TO-C	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU	PDB PERKAPITA 2024
0,53%	**5,02%**	**5,03%**	**Rp22.139,0 Triliun**	**Rp78.617.420 (US$ 4.960,3)**

PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2015-2024
(Persen)

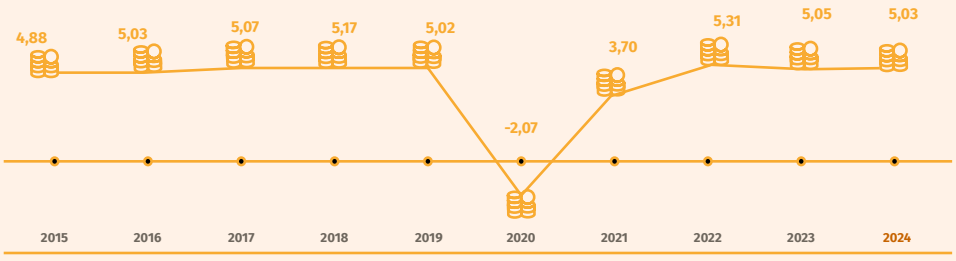

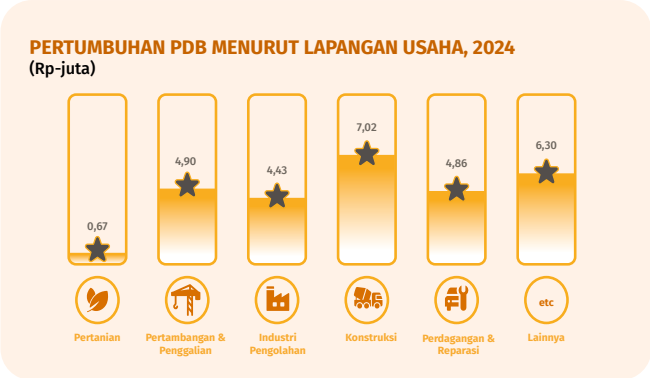

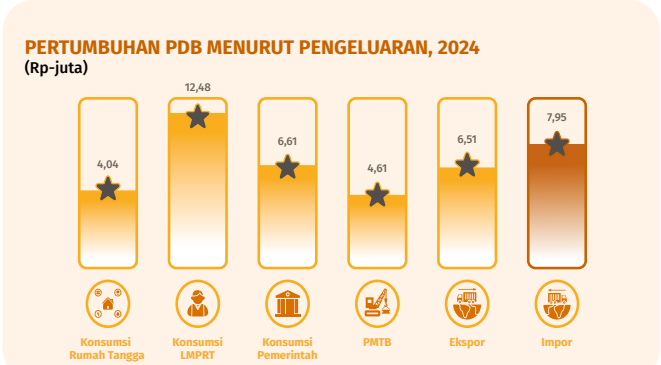

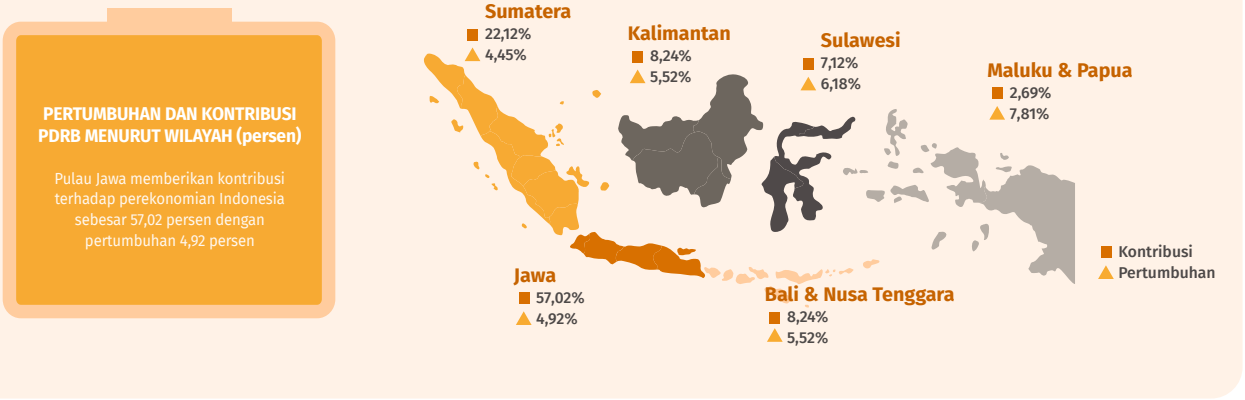

Sumber: Badan Pusat Statistik

Analisis Industri Perbankan

Industri perbankan di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, didorong oleh kebijakan moneter yang responsif dan kondisi ekonomi yang membaik. Menurut Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2024 dari Bank Indonesia, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diperkirakan mencapai 5,31% pada triwulan IV 2024, meningkat dari 5,04% pada tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan optimisme yang meningkat di kalangan pelaku pasar dan konsumen, yang berkontribusi pada peningkatan permintaan kredit di sektor perbankan.

Salah satu indikator penting dari kesehatan industri perbankan adalah rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan*/NPL). Data menunjukkan bahwa rasio NPL berada pada level 2,5%, yang menunjukkan stabilitas dalam kualitas aset perbankan. Bank Indonesia mencatat bahwa meskipun ada tantangan global, industri perbankan tetap mampu menjaga rasio NPL di bawah ambang batas yang ditetapkan, yaitu 5%. Ini menunjukkan bahwa bank-bank di Indonesia telah menerapkan manajemen risiko yang baik dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Rasio Kredit Bermasalah (NPL)

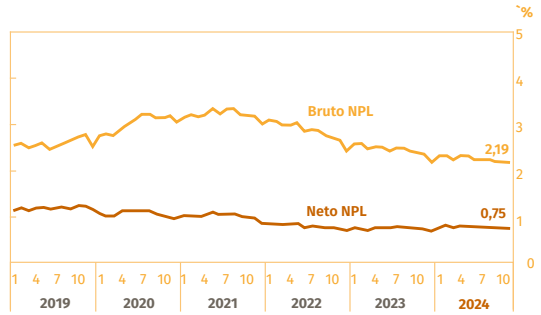

Submer: Bank Indonesia, OJK

Dalam hal likuiditas, total dana pihak ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan yang positif, mencapai Rp6.500 triliun pada akhir tahun 2024. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, serta inovasi produk yang ditawarkan oleh bank. Bank Indonesia melaporkan bahwa suku bunga simpanan rata-rata berada di kisaran 4,5%, yang menarik lebih banyak nasabah untuk menempatkan dananya di bank.

Kredit yang disalurkan oleh perbankan juga menunjukkan tren positif, dengan total penyaluran kredit mencapai Rp5.800 triliun. Sektor yang paling banyak mendapatkan kredit adalah sektor perdagangan dan industri pengolahan, yang masing-masing menyerap 30% dan 25% dari total kredit. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan sektor riil melalui berbagai insentif dan program stimulus.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi digital juga memberikan dampak positif terhadap industri perbankan. *Volume* transaksi uang elektronik dan perbankan digital meningkat pesat, dengan nilai transaksi perbankan digital mencapai Rp1.200 triliun pada tahun 2024. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ini didorong oleh adopsi teknologi yang semakin meluas di kalangan masyarakat, serta peningkatan infrastruktur digital yang mendukung transaksi keuangan.

Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait dengan ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi aliran modal dan investasi. Indeks ketidakpastian global menunjukkan fluktuasi yang signifikan, dengan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah yang berfluktuasi di kisaran Rp14.500 hingga Rp15.000. Bank Indonesia terus memantau perkembangan ini dan siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi.

Dalam rangka mendukung pertumbuhan industri perbankan, Bank Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan moneter yang akomodatif. Suku bunga kebijakan saat ini berada di level 5,75%, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan kredit dan investasi. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan stimulus yang diperlukan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang ada.

Secara keseluruhan, industri perbankan nasional pada tahun 2024 menunjukkan kinerja yang solid dengan prospek yang optimistis. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan adaptasi terhadap perubahan pasar, diharapkan industri perbankan dapat terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Posisi KB Bank di Industri Perbankan

Posisi KB Bank Berdasarkan Kinerja di Industri Perbankan Indonesia

(Dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

KETERANGAN	KB BANK	INDUSTRI
Indikator utama (*Growth*)		
Aset	83.075	12.460.955
Kredit	47.527	7.942.947
DPK	46.593	8.837.242
- Giro	6.289	2.751.373
- Tabungan	6.916	2.850.242
- Deposito	33.388	3.235.627
Ekuitas	7.962	1.852.494
Laba Sebelum Pajak	(4.904)	323.216
Laba Setelah Pajak	(6.329)	255.200
Pendapatan Bunga	5.454	1.084.816
Beban Bunga	(4.301)	535.059
Rasio Keuangan (Posisi)		
NIM	1,31%	4,62%
ROA	-7,55%	2,69%
CASA	29,54%	63,39%
CAR	16,38%	26,69%
LDR	103,26%	88,57%
BOPO	192,58%	81,30%
NPL *gross*	9,06%	2,03%

Posisi KB Bank Terhadap *Peers Group*

Peringkat	Aset			Kredit			DPK			Laba Setelah Pajak		
	Bank	Rp(Tn)	Rank	Bank	Rp(Tn)	Rank	Bank	Rp(Tn)	Rank	Bank	Rp(Tn)	Rank
1	Bank X	82,3	1	Bank X	46,8	1	Bank X	64,0	1	Bank X	1,5	1
2	KB Bank	75,4	2	Bank X	46,2	2	Bank X	48,8	2	Bank X	0,8	2
3	Bank X	66,2	3	Bank X	45,8	3	KB Bank	40,1	3	Bank X	0,5	3
4	Bank X	58,7	4	KB Bank	41,4	4	Bank X	35,1	4	Bank X	0,2	4
5	Bank X	44,4	5	Bank X	13,4	5	Bank X	31,9	5	KB Bank	(7,1)	5



STRATEGI BANK 2024

Untuk mempercepat normalisasi, KB Bank perlu segera menangani berbagai isu strategis yang menjadi faktor penghambat pertumbuhan kinerja penjualan agar dapat mencapai tingkat yang lebih optimal. Oleh karena itu, Bank telah merumuskan strategi komprehensif yang akan dijalankan sepanjang tahun 2024 guna mempercepat peningkatan kinerja penjualan. Strategi ini diwujudkan melalui empat agenda utama yang difokuskan pada penguatan fundamental bisnis, optimalisasi layanan dan produk, peningkatan kapabilitas digital, serta pengembangan jaringan dan kemitraan strategis. Dengan menerapkan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada hasil, KB Bank berupaya memastikan bahwa setiap inisiatif yang diambil dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan bisnis sekaligus meningkatkan daya saing Bank di industri perbankan yang semakin dinamis.

1. Memperdalam bisnis *wholesale* dan *anchor-linked* SME dan *Retail*.
   a. Mencari peluang pertumbuhan pada segmen komersial yaitu dengan mendefinisikan kembali segmen bisnis *wholesale* menjadi 2 yaitu segmen *corporate* dan segmen komersial. Inisiatif ini membutuhkan perluasan jaringan, sumber daya manusia, dan skema insentif untuk menggerakkan dan mengaktifasinya, dengan harapan bahwa segmen ini dapat memberikan margin yang relatif lebih tinggi dan peluang *cross selling* yang lebih besar dibandingkan segmen *corporate* yang saat ini menjadi andalan bank.
   b. Aktifasi kegiatan *cross selling* pada segmen *wholesale* untuk mendapatkan efek lanjutan pada segmen ritel baik *funding* dan *lending*
      - Menargetkan minimal akuisisi 2-5 perusahaan jangkar per cabang melalui hubungan kelembagaan dengan Perusahaan BUMN, debitur inti serta *local champions*.
      - Membuat promosi produk *bundling* dengan produk dan kapabilitas *transactional banking*
      - Mempromosikan insentif dan memantau secara dekat aktivitas penjualan dan *cross selling* pada segmen bisnis UKM & Ritel yang terhubung dengan Perusahaan jangkar
      - Melakukan transformasi pada seluruh staf penjualan untuk berorientasi pada aktivitas *cross selling* di seluruh segmen
   c. Membangun Ekosistem bisnis baru contohnya pada ekosistem *Electric Vehicle*, Pertanian, & Industri Kesehatan.
      - [EV *Business*] Kolaborasi dengan INDIKA Group, dan perusahaan terkait lainnya dalam *supply chain* dan *value chain*
      - [Industri Pertanian] Menangkap setiap peluang potensial melalui analisis segmentasi potensi (gula, beras, dll) dalam *supply chain* dan *value chain*
      - [Industri kesehatan] Secara proaktif berpartisipasi dalam ekosistem sebagai penyedia layanan perbankan di rumah sakit utamanya berkolaborasi dengan *captive market* dari KB Bank Syariah yaitu Rumah sakit milik Muhammadiyah, dan lain sebagainya.
   d. Menetapkan Manajemen Profitabilitas Pelanggan dan mengembangkan metode *return on risk adjusted capital* per produk atau nasabah untuk proses negosiasi yang lebih tepat waktu dan lebih baik.
2. Meningkatkan penjualan melalui restrukturisasi CPC.
   a. Melakukan segmentasi pada cabang
   b. Membangun bisnis yang terfokus di masing-masing cabang dengan pemilihan *people* dan *product* yang tepat sesuai dengan karakteristik dan industri pasar mikro sesuai dengan daerah masing-masing
   c. Produk yang mempunyai fokus yang spesifik
   d. Bank akan fokus menyasar bisnis yang telah menjadi andalan Bank dan menargetkan kredit ritel berbasis kerja sama.
      - *Auto Loan: Channeling* dengan SKBF telah berjalan.
      - *Personal Loan*: Menargetkan kerja sama *payroll loan* melalui *platform Paywatch*.
      - *Mortgage Loan*: Strategi *mortgage* dilakukan melalui *takeover*.
   e. Melakukan desain ulang pada semua proses yang bermasalah untuk meningkatkan *sales cadence* dan TAT
      - Mengenalkan konsep RM – AO.
      - *Sales Cadence*: Mengimplementasikan kembali alat *Sales Stimulation Program* yang telah diadopsi tetapi belum terpenuhi pada tingkat tertentu yang diinginkan.
      - Melakukan *benchmarking* secara regular dan mengurangi proses yang tidak perlu yang dibandingkan dengan *market practice*.
   f. Aktivasi bisnis yang dapat menghasilkan *fee income* yang didorong oleh kantor pusat melalui kemitraan B2B sehingga dapat menciptakan *trickle down effect* bagi cabang.
   g. Secara proaktif mempromosikan produk *fee income* yang berorientasi pada penjualan cabang seperti *Wealth Management, loan related fee income* seperti *trade finance* dan bank garansi, transaksional seperti PPOB dan Mini ATM, dll.
   h. Restrukturisasi *coverage* pada SME dan *Mortgage*
      - Mengurangi SME Center menjadi 24 dan *Mortgage Center* menjadi 19.

   Model operasi juga harus diubah sejalan dengan Model Cabang Baru
3. Melakukan *redesign* pada budaya perusahaan yang berorientasi kinerja.
   a. Pembentukan dan Internalisasi Budaya Perusahaan yang Berorientasi Kinerja
      - Penerapan sistem penghargaan yang berbeda, seperti bonus kinerja, berdasarkan kinerja individu.

- Menerapkan tabel gaji yang fleksibel dengan fokus pada kompensasi yang berorientasi pada kinerja.
- Mengoperasikan sistem insentif, seperti kepemilikan saham karyawan, yang dapat memotivasi karyawan berdasarkan peningkatan kinerja bisnis.

b. Menata karyawan *low-performers* secara teratur
- Anggaran dan distribusi target yang tepat waktu.
- Kepemilikan KPI melalui penandatanganan komitmen awal tahun.
- Implementasi Rencana Peningkatan Kinerja.

4. Melakukan promosi dan kolaborasi yang *profitable* dengan afiliasi KBFG dan *Subsidiary*
   a. Promosi Kolaborasi yang Menguntungkan Secara Substansial antara Afiliasi Grup Keuangan KB melalui *Channeling* (dengan KB FMF, SKBF, KBBF, KBBS) dan Pengenalan Bisnis dan Penjualan Reksa Dana (dengan KB Valbury, VCM).
   b. Perubahan Struktur Manajemen Asuransi
      - Mengurangi ketergantungan pada broker asuransi dengan memperluas kerja sama secara *direct* dan hanya bekerja sama dengan mitra asuransi bonafid.
      - Pembaharuan pada pola Asuransi Jiwa Kredit pada Pinjaman Pensiun untuk peningkatan pendapatan dan perbaikan manajemen risiko kredit.

   Pemanfaatan *sharing* informasi *customer* untuk tujuan Pemasaran.

KB Bank tidak hanya fokus pada penyelesaian isu strategis, tetapi juga berupaya menghadirkan inovasi sebagai pendorong utama transformasi bisnis. Sejalan dengan hal tersebut, Bank menetapkan agenda strategis "*Innovation for Turn Around*", yang dirancang untuk meningkatkan kinerja serta mengoptimalkan implementasi inisiatif efisiensi. Melalui strategi ini, KB Bank berkomitmen untuk menjalankan empat agenda utama pada tahun 2024, yaitu:

1. Melanjutkan inisiatif *cost hunt* dan menghentikan kontrak yang merugikan Bank.
   a. Mengidentifikasi dan melaksanakan inisiatif perburuan biaya baru
      - Negosiasi kontrak yang ada juga mencari vendor baru untuk mendapatkan harga pasar terbaik yang sebanding dengan keuntungan perusahaan
      - Mengatur proses restrukturisasi rutin setelah restrukturisasi ke-2: *regular layoff* dan penutupan cabang untuk menyempurnakan dan meningkatkan *footprint* cabang
      - Merencanakan untuk sentralisasi operasi sebelum/sesudah implementasi NGBS.
   b. Perbaikan berkelanjutan atas kontrak yang *unfair* dan penghentian transaksi dengan perusahaan yang terlibat dalam kontrak yang *unfair* dan memperbaiki prosedur kontrak untuk mencegah kontrak yang *unfair* di masa depan.
   c. Pembentukan Sistem Manajemen Kontrak & Sistem Manajemen Anggaran

Mengejar *cost efficiency* dari *idle real estate* melalui pengalihan hak sisa sewa untuk kantor yang memiliki sisa masa sewa yang panjang, penjualan *idle real estate* melalui Kerja sama agen properti dan Perusahaan lelang, Kerja sama sinergi dengan anak perusahaan dan afiliasi dalam penggunaan kantor, dan menerbitkan DIRE (Dana Investasi *Real Estate*) melalui kerja sama dengan perusahaan sekuritas VCM (*Valbury Capital Management*)

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas *Manpower*
   a. Peningkatan kemampuan RM
      - Menyiapkan silabus pembelajaran dan sertifikasi standar minimum – kemampuan per fungsi penjualan
      - Meningkatkan jumlah karyawan yang berkualitas dan memberikan pelatihan berkala untuk lebih memperbanyak karyawan yang berkualitas
      - Program pendidikan dan ujian harus tercermin pada promosi dan penilaian RM
   b. Pembentukan departemen *recruitment engine* yang terpisah untuk menangani dua fungsi secara terpisah (1) Evaluasi dan restrukturisasi SDM; (2) Rekrutmen dan realokasi talent.
   c. Membangun Sistem Operasi Sumber Daya Manusia yang Efisien melalui Peningkatan Sistem TI SDM
2. Perubahan Strategi *Outlet*
   a. Perubahan radikal dalam strategi *outlet*
      - Memecah model *Main Branch-Sub Branch* dan menjadi model *self-discretion* seperti bank lain.
      - Model cabang baru untuk mendukung *Business Center* (SME & Mortgage).
      - Memperluas penerapan dan pemanfaatan *co-location* untuk *idle real estate* oleh anak perusahaan atau perusahaan afiliasi.
      - Mengidentifikasi kemungkinan penggunaan AYDA sebagai kantor cabang untuk mengurangi faktor pengurang modal.
   b. Ekspansi ke wilayah berpotensi tinggi berbasis industri pasar mikro dan mempertimbangkan untuk melakukan ekspansi ke wilayah Jabodetabek untuk meningkatkan *footprint* cabang
3. Melakukan Inovasi sebelum Implementasi NGBS (SHINE)
   a. Simplifikasi proses melalui *Business Process Restructuring* – sebelum adopsi NGBS melalui *benchmark* pasar/pesaing.
   b. Tingkat sentralisasi operasi & dukungan kredit yang lebih tinggi
      - Sentralisasi *back office regional* dari 6 wilayah untuk dipusatkan di Jakarta.
      - Sentralisasi fungsi dukungan kredit (pencairan pinjaman) dari cabang utama menjadi terpusat di Jakarta. Namun fungsi penyimpanan dokumen dan agunan tetap di cabang.

c. Penghapusan fungsi yang tidak diperlukan
   - Melanjutkan *workload analysis* untuk mengidentifikasi fungsi yang tidak perlu dan *redundant*.

d. Melakukan penghapusan fungsi yang tidak perlu dan penggabungan tugas dan tanggung jawab.

Sebagai bagian dari upaya transformasi dan optimalisasi kinerja, KB Bank juga berkomitmen untuk memperbaiki kualitas aset serta memperkuat mekanisme pengawasan risiko. Dalam rangka memastikan keberlanjutan bisnis yang sehat dan berdaya saing, Bank telah merumuskan tiga agenda utama di tahun 2024 yang difokuskan pada peningkatan kualitas aset dan penguatan fungsi *monitoring* dari *second line defense*.

1. Memperkuat fungsi Risiko dan Kepatuhan
   a. Revamping Sistem Internal Pengelolaan Permodalan
      - *Risk Appetite* yang berfokus pada pengelolaan CAR melalui penerapan sistem manajemen limit pada masing-masing kelompok segmen.
      - Menerapkan *early warning indicator* untuk *respons* proaktif.
      - Mendorong peningkatan dan otomatisasi proses perhitungan indikator risiko.

   b. Memperkuat daya saing fundamental organisasi manajemen risiko
      - Membangun sistem manajemen risiko untuk memungkinkan pengelolaan limit yang beragam dan pemantauan implementasi sebelum/sesudah.
      - Memperkuat kapabilitas karyawan melalui rekrutmen karyawan yang bertalenta dan melakukan pengembangan internal yang melalui program pelatihan dan sertifikasi.

   c. Memperluas Cakupan Model Manajemen Risiko Kredit Tingkat Lanjut
      - Penerapan *Risk* Model yang canggih melalui penggunaan data internal dan eksternal untuk kebutuhan *modelling* pemeringkatan kredit untuk perluasan cakupan penerapan model pemeringkatan kredit.
      - Mengeksplorasi *Risk Model* eksisting untuk produk Kredit Tanpa Agunan.

   d. Penguatan Pra dan Pasca Pemantauan untuk Membangun Budaya Kepatuhan
      - Membangun Sistem Pemantauan Berkelanjutan Quality Assurance untuk Mencegah Insiden Keuangan & memperkuat kampanye "*ZERO DEFECT*".
      - Melakukan pra-penilaian dan pemantauan berkala terhadap tugas-tugas utama di departemen kantor pusat.
      - Menegakkan tindakan disipliner yang ketat dan mendorong pelatihan etika secara teratur.

2. Memperkuat *Special Asset Management* (SAM) dan *Day Past Due* (DPD)
   a. Meningkatkan jumlah AO SAM secara terukur, serta melakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan AO SAM.
   b. Melakukan pemetaan ulang pada *Man Power Planning Field Collection* yang dikombinasikan dengan mempekerjakan lebih banyak agen *collection* pada portofolio *mortgage & pension loan*.
   c. Mengimplementasikan Sistem Teknologi Informasi untuk kebutuhan pemantauan kinerja harian guna memantau efektifitas dari aktivitas AO SAM.
   d. Meningkatkan kolaborasi Kantor Pusat – Cabang untuk mengendalikan dan memitigasi Risiko Operasional pada *pension loan* : *Flagging*, Gaji Minus, klaim asuransi kematian, dll
   e. Mempercepat proses GO *Live* dari aplikasi *monitoring* ritel *collection*
   f. Menjalin Kerja sama dengan *Collection Agency* terbaik untuk meningkatkan kemampuan pihak luar pada *retail collection*.
   g. Perlu menyiapkan faktor disinsentif bagi pergeseran portofolio *good bank* ke *bad bank*. Kebijakan transfer portofolio harus dibarengi dengan *transfer knowledge* untuk pemahaman "kondisi" debitur yang lebih baik

3. Mempersiapkan tindakan preventif sehubungan dengan berakhirnya relaksasi Covid-19
   a. Kerja sama antara Manajemen Risiko dan SAM untuk melakukan *stress test* dan penilaian debitur secara berkala.
   b. Menyusun pedoman internal dan proses restrukturisasi berkala untuk mencegah NPL baru dan dampak pengurangan modal lebih lanjut.
   c. Penjualan Pinjaman Macet Perorangan: Fokus pada menggantungkan portofolio "*low hanging fruits*"
   d. Memetakan seluruh agunan Pinjaman yang baik di masing-masing cabang/kantor pusat dengan membuat daftar debitur yang mempunyai nilai likuidasi agunan yang tinggi, daya jual yang tinggi dan tidak mempunyai permasalahan hukum
   e. Membuat rencana aksi terperinci di setiap cabang dan memantau kemajuannya sesuai dengan tanggal target
   f. Menggunakan kemampuan eksternal: kerja sama dengan agen properti untuk agunan jenis *Good Mortgage*
   g. Tetap menggunakan strategi yang telah diterapkan: skema ABS 1 dan 2 (mencampur neraca dan *off balance sheet* untuk menghindari *discount factor* yang besar)

Pada tahun 2024, KB Bank menetapkan langkah strategis untuk meningkatkan *brand awareness* dan mengakselerasi proses digitalisasi, Bank telah merumuskan tiga agenda utama di tahun 2024 yang bertujuan untuk memperkuat daya saing di industri perbankan yang semakin dinamis.

1. Meningkatkan *brand awareness* melalui perubahan merek dan logo.
   a. Membentuk TFT Perubahan Merek dan Logo (perkiraan waktu 8 bulan)
      - Analisa proses perubahan merek dan logo melalui Survei Customer, Survei nama baru, Timeline aktivitas, dan analisa biaya.
      - Registrasi inisiatif perubahan merek dan logo Perseroan melalui RBB ke OJK.
      - Persetujuan OJK & Kemenkumham.
      - Pengumuman secara Publik

b. Implementasi Perubahan Merek dan Logo (perkiraan waktu 8 bulan)
   - *Physical touch point → rebranding outlet.*
   - Kartu Kredit/Kartu Debit.
   - *E-channel* → rebranding logo dan Desain UI.
   - Aktivitas Komunikasi Pemasaran → *Above the line* (TVC, *Billboard*, dll) dan *Below the line* (*Customer Gathering, souvenir*, dll).
   - *Corporate Communication.*
   - Buku & Alat Tulis (ID Card, Kartu Nama, dll).

2. Mengembangkan aplikasi-aplikasi yang mendukung ekosistem Digital melalui kerja sama B2B dan B2C.
   a. *Retail Digital Apps*: Meningkatkan KBStar sebagai salah satu aplikasi digital unggulan bagi nasabah dengan meningkatkan jumlah biller.
      - Mendapatkan *biller* baru baik secara langsung atau melalui kemitraan B2B dengan perusahaan agregator.
      - Mempercepat peluncuran aplikasi digital hingga memulai aktivitas penjualan (tahap registrasi Android dan iOS).
      - Aplikasi *Corporate Digital*: Memaksimalkan penjualan melalui *bundling* produk *cross-sell* dan peningkatan fitur sesuai kebutuhan pelanggan (fitur lengkap akan tersedia di M18)
      - Kolaborasi Kantor Pusat-Cabang untuk terlibat dalam kemitraan B2B & B2C baru:
      - Mendalami model bisnis baru dengan kemitraan B2B, seperti kemitraan Agen *Collection* Baru untuk PPOB dan Mini ATM, Korean *remittance* melalui POS, dll.
      - Membuat *delivery channel* baru sebagai alternatif *channel* transaksi (Indomaret/Alfamart, dll).
      - Secara selektif memperkaya fitur-fitur pada *delivery channel* melalui *direct* atau *aggregator* untuk meningkatkan pendapatan *fee* (BPJS, *e-money*, *e-commerce*, p2p *lending*, dll).
      - Mengoptimalkan *Open Banking* (*Open* API) selaras dengan kemitraan B2C.
   b. Implementasi QRIS TUNTAS sebagai solusi alternatif *channel* transaksi nasabah
   c. Memanfaatkan Aplikasi Digital untuk Kolaborasi Bisnis yang Terintegrasi dengan Afiliasi dan Anak Perusahaan.
3. Memastikan SHINE *Project* dapat selesai dan terimplementasi dengan baik.
   Implementasi SHINE *Project* bertujuan untuk mencapai aspirasi Bank yaitu:
   a. *[Customer]* "Menyediakan layanan perbankan yang lebih mudah dan nyaman"
      - Bahkan tanpa mengunjungi cabang, Dapat Menyediakan layanan perbankan lengkap yang sama.
      - Dengan mengintegrasikan terminal pemrosesan bisnis cabang, Sehingga dapat meningkatkan kecepatan proses layanan.
   b. [Karyawan] "Perbaikan dengan meningkatkan dukungan bisnis berbasis digital"
      - Dengan mengotomatisasi pemrosesan manual, Meningkatkan produktivitas kerja dan menghilangkan risiko operasional.
      - Pencarian/Analisis/Pemanfaatan Data terpadu yang mudah, cepat dan andal.
   c. [*Bank*] "Mengamankan infra dasar yang tepat untuk lompatan maju"
      - Untuk mengaktifkan *One-Stop Banking Service*, Terintegrasi & Terotomatisasi untuk *key process*.
      - Dengan internalisasi tugas-tugas yang selama ini bergantung pada *outsourcing*, Memperbaiki struktur biaya pemeliharaan
   d. Untuk merespon perubahan yang mungkin terjadi di masa depan, Membangun arsitektur sistem terbuka



TINJAUAN OPERASI PER SEGMEN USAHA

Segmen usaha merupakan kumpulan aset dan aktivitas operasional yang menyediakan produk atau layanan dengan karakteristik risiko serta tingkat pengembalian yang berbeda dibandingkan segmen lainnya. KB Bank mengklasifikasikan segmen usaha berdasarkan kebijakan akuntansi yang berlaku, yaitu menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis.

Dalam hal ini, Perseroan menerapkan PSAK No. 5 (Revisi 2009) untuk memastikan transparansi dalam pengungkapan informasi, sehingga pengguna laporan keuangan dapat menilai karakteristik dan dampak keuangan dari kegiatan bisnis serta kondisi ekonomi tempat KB Bank beroperasi.

Dalam menjalankan bisnisnya, KB Bank berfokus pada penghimpunan dana, penyaluran kredit, serta penyediaan layanan perbankan dengan mengembangkan produk yang berorientasi pada kebutuhan nasabah.

Pada sektor perbankan, produksi mengacu pada pencapaian yang diperoleh dari pemasaran produk dan jasa yang dilakukan oleh Bank. Dalam laporan ini, kinerja produksi KB Bank sebagai entitas utama akan diuraikan, sementara pencapaian Segmen Konvensional dan Segmen Syariah sebagai Entitas Anak akan dijelaskan lebih lanjut dalam analisis dan pembahasan manajemen di laporan tahunan ini.

Adapun secara keseluruhan, segmen usaha KB Bank terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Di mana Segmen Operasi mencakup kelompok Konvensional, Pembiayaan, dan Syariah. Segmen Geografis diklasifikasikan berdasarkan wilayah operasional, yakni Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan area lainnya.

Segmen Operasi

Segmen Perbankan Konvensional

Perbankan Konvensional terdiri dari produk Kredit, Produk Dana dan Jasa Lainnya.

Produk Kredit

KB Bank menawarkan berbagai produk kredit, termasuk Kredit Ritel, Kredit UMKM, dan Kredit *Wholesale*.

Kredit Ritel

1. Kredit Ritel
   a. Kredit Pensiunan
      KB Bank menawarkan Kredit Pensiunan sebagai solusi pinjaman modal usaha bagi pensiunan serta janda/duda pensiunan yang menerima uang pensiun bulanan. Produk ini dirancang untuk mendukung mereka tetap produktif dengan berbagai keunggulan, seperti proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, serta suku bunga kompetitif. Selain itu, Kredit Pensiunan juga dilengkapi dengan perlindungan optimal melalui asuransi.
      Fitur utama yang ditawarkan meliputi plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp300 juta, serta tenor fleksibel dari 1 hingga 15 tahun, dengan batas usia maksimal saat pelunasan mencapai 75 tahun.
   b. Kredit Masa Pra Pensiun (MPP)
      Kredit Masa Pra Pensiun (MPP) merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memasuki masa persiapan pensiun, yakni hingga dua tahun sebelum pensiun. Produk ini dirancang sebagai solusi finansial untuk mempersiapkan masa depan dengan perlindungan optimal melalui asuransi.
      Keunggulan Kredit MPP meliputi kemudahan proses pengajuan, persyaratan yang ringan, serta suku bunga kompetitif. Pembayaran angsuran dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah pensiun. Plafon pinjaman yang tersedia mulai dari Rp1 juta hingga Rp300 juta, dengan jangka waktu maksimal 15 tahun.
   c. Kredit Pemilikan Mobil
      Kredit Pemilikan Mobil merupakan fasilitas pinjaman yang ditujukan bagi nasabah untuk membeli kendaraan roda empat, baik mobil baru maupun bekas. Produk ini menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang ringan, serta skema pembayaran yang fleksibel, sehingga memudahkan nasabah dalam memiliki kendaraan impian.
   d. Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen
      Kredit Kepemilikan Rumah/Apartemen merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi berbagai kebutuhan, seperti pembelian, renovasi, atau peningkatan nilai guna rumah dan apartemen. Produk ini menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang ringan, serta skema pembayaran yang fleksibel, sehingga membantu nasabah mewujudkan hunian impian dengan lebih mudah.
   e. Kredit Serbaguna (KSG)
      Kredit Serbaguna (KSG) merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang berstatus karyawan di perusahaan dengan layanan payroll di KB Bank. Pinjaman ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti biaya pendidikan, pernikahan, perawatan medis, perjalanan wisata, pembelian peralatan rumah tangga, serta kebutuhan konsumtif lainnya.
   f. Kredit *Back to Back*
      Kredit *Back to Back* merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa tabungan, deposito, atau giro, sehingga menawarkan solusi pembiayaan yang aman dan fleksibel.

g. Kartu Kredit
KB Bank menyediakan berbagai pilihan Kartu Kredit, termasuk VISA, MASTERCARD, dan *private label* (KB Bank Card), yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belanja maupun transaksi tunai dengan mudah dan nyaman. Dengan suku bunga ringan serta kompetitif, kartu kredit KB Bank memberikan fleksibilitas tanpa perbedaan suku bunga antara transaksi belanja dan tarik tunai. Saat ini, KB Bank menawarkan beragam jenis kartu kredit yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, di antaranya:
i) Kartu Kredit *Infinite*;
ii) Kartu Kredit *World*;
iii) Kartu Kredit *Platinum*;
iv) Kartu Kredit *Business*;
v) Kartu Kredit *Customized*;
vi) Kartu Kredit *Gold*;
vii) Kartu Kredit *Classic*;
viii) *Private Label* KB Bank *Card*.

h. Kredit PNS Aktif *Channeling* BPR
Kredit PNS Aktif *Channeling* BPR merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif melalui kerja sama KB Bank dengan BPR milik Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota di seluruh Indonesia. Produk ini dirancang untuk membantu PNS dalam membuka usaha atau memenuhi berbagai kebutuhan lainnya, dengan keunggulan jangkauan yang luas hingga ke pelosok sesuai dengan lokasi BPR. Kredit ini menawarkan proses pengajuan yang cepat, persyaratan yang mudah, serta perlindungan optimal melalui jaminan asuransi. Fitur yang tersedia mencakup plafon pinjaman mulai dari Rp1 juta hingga Rp200 juta, dengan tenor maksimal 15 tahun atau hingga memasuki usia pensiun.

Kredit UMKM

KB Bank menyediakan produk UMKM dalam dua segmen, yaitu Kredit Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Kredit Mikro.

1. Kredit UKM
Kredit UKM merupakan fasilitas pembiayaan yang mencakup dua jenis produk, yaitu *Cash Loan* dan *Non-Cash Loan*. Produk *Cash Loan* terdiri dari Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, serta berbagai produk turunan atau program yang dikembangkan dari produk generik tersebut. Kredit ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan usaha kecil dan menengah dengan skema pembiayaan yang fleksibel dan sesuai kebutuhan bisnis.
   a. Produk *Cash Loan*
      i) Kredit Modal Kerja (KMK)
      Merupakan fasilitas kredit jangka pendek yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pengadaan aktiva lancar dan/atau mengganti hutang dagang, membiayai sementara kegiatan operasional rutin (sehari-hari) perusahaan, uang muka, cadangan kas, atau komponen modal kerja lainnya sesuai dengan karakter bisnis debitur dengan jangka waktu pengembalian maksimal 1 (satu) tahun.
      ii) Kredit Investasi (KI)
      Merupakan fasilitas kredit jangka menengah dan jangka panjang yang diberikan kepada debitur untuk membiayai pengadaan aktiva tetap dan/atau untuk membiayai kebutuhan barang modal antara lain dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, proyek baru, *take over* dan *refinancing* dengan jangka waktu pengembalian antara 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun yang memiliki *product* turunan.
   b. Produk *Non Cash Loan*
   Produk *Non Cash Loan* antara lain yaitu produk *Letter of Credit* (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dan Bank Garansi/SBLC/*Demand Guarantee*.
      i) *Letter of Credit* (L/C)
      Merupakan suatu instrumen atau janji tertulis yang diterbitkan oleh suatu Bank *(issuing Bank)* atas permintaan dan instruksi tertulis Debitur/nasabah *(applicant)*.
      ii) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
      Lazim dikenal sebagai *"Letter of Credit"* (SKBDN) Dalam Negeri adalah setiap janji tertulis berdasarkan permintaan tertulis pemohon *(applicant)* yang mengikat Bank pembuka.
      iii) Bank Garansi
      Merupakan suatu pemberian janji dengan persyaratan dan ketentuan tertentu yang diatur dan ditetapkan dalam perjanjian Bank garansi antara Bank dengan Debitur/ *Principal* yang menyatakan bahwa atas permintaan *Principal*, untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, Bank akan membayar kewajiban Principal kepada *Obligee*, apabila Principal melakukan wanprestasi (ingkar janji) terhadap *Obligee*.
2. Kredit Mikro
   a. Kredit Usaha Rakyat (KUR)
   Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan fasilitas pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang memiliki potensi usaha yang layak *(feasible)* namun belum sepenuhnya memenuhi persyaratan perbankan *(bankable)*. Kredit ini dapat digunakan untuk modal kerja maupun investasi, dengan skema pembiayaan langsung atau tidak langsung *(linkage)*, serta dilengkapi dengan jaminan dari Lembaga Penjamin Kredit.
   b. Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra
   Swamitra merupakan bentuk kerja sama antara KB Bank dan koperasi dalam mengembangkan serta memodernisasi Usaha Simpan Pinjam (USP) melalui pemanfaatan teknologi dan dukungan sistem manajemen. Kemitraan ini memungkinkan USP memberikan layanan transaksi

keuangan yang lebih luas, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kredit Modal Tidak Tetap (MTT) adalah fasilitas pinjaman yang diberikan KB Bank kepada koperasi sebagai modal kerja untuk mendukung operasional usaha simpan pinjam Swamitra..

Kredit *Wholesale*

Kredit *Wholesale* adalah fasilitas kredit yang diberikan dengan limitasi kredit di atas Rp200 miliar. Pada segmen ini, terdapat tiga jenis produk utama, yaitu Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Sindikasi.

1. Kredit Modal Kerja
   Kredit Modal Kerja adalah fasilitas pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja debitur, dengan jangka waktu pengembalian maksimal satu tahun. Kredit ini dirancang untuk membantu nasabah dalam meningkatkan likuiditas, memenuhi kebutuhan dana, serta menjalankan operasional harian perusahaan secara optimal.
2. Kredit Investasi
   Kredit Investasi adalah fasilitas pembiayaan jangka menengah dan panjang yang diberikan kepada debitur untuk mendukung pengadaan aset tetap, pengembangan sarana, atau pembangunan proyek yang menunjang kelancaran usaha. Kredit ini bertujuan untuk mendanai operasional bisnis, produksi barang atau jasa, dengan pengembalian dana yang bersumber dari hasil komersialisasi proyek tersebut. Jangka waktu pengembalian kredit ini berkisar antara 3 hingga 10 tahun.
3. Kredit Sindikasi
   Kredit Sindikasi adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada debitur melalui kerja sama antara beberapa bank untuk mendanai suatu proyek secara bersama-sama. Skema ini memungkinkan pendanaan dalam skala besar dengan risiko yang terdistribusi di antara para pemberi pinjaman.

Profitabilitas Produk Kredit

Per 31 Desember 2024, total kredit yang disalurkan oleh KB Bank tercatat sebesar Rp47,53 triliun, yaitu menunjukkan penurunan sebesar 3,83% atau turun sebesar Rp1,89 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh strategi Perusahaan untuk mengurangi portofolio berkualitas buruk, yaitu mengurangi LAR melalui berbagai skema, meliput penagihan secara intensif, penjualan portofolio dan hapus buku.

Kinerja Produk Kredit

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit UMKM	11.619	24,45%	15.633	31,63%	(4.014)	-25,68%
Kredit Konsumer	14.754	31,04%	12.458	25,21%	2.296	18,43%
Kredit *Wholesale*	21.154	44,51%	21.328	43,16%	(173)	-0,81%
Total	**47.527**	**100,00%**	**49.419**	**100,00%**	**(1.891)**	**-3,83%**

Kinerja Produk Kredit Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit UMKM	11.619	44,06%	15.633	55,65%	(4.014)	-25,68%
Kredit Konsumer	14.754	55,94%	12.458	44,35%	2.296	18,43%
TOTAL	**26.373**	**100,00%**	**28.091**	**100,00%**	**(1.718)**	**-6,12%**

Pada tahun 2024, kinerja kredit ritel mengalami penurunan sebesar 6,12% atau turun sebesar Rp1,72 triliun bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp28,10 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh strategi Perusahaan untuk mengurangi portofolio berkualitas buruk, yaitu mengurangi LAR melalui berbagai skema, meliput penagihan secara intensif, penjualan portofolio dan hapus buku.

Kartu Kredit

KB Bank telah mengembangkan bisnis Kartu Kredit sejak tahun 2003, menjadikannya salah satu segmen usaha yang telah matang. Bisnis ini tetap menjadi pilihan yang menjanjikan dengan prospek cerah dalam memberikan kemudahan layanan bagi nasabah.

Melalui Kartu Kredit KB Bank VISA, MASTERCARD, dan *private label* (KB Bank Card), nasabah dapat menikmati berbagai kemudahan, termasuk transaksi belanja dan penarikan tunai. Selain itu, kartu kredit ini menawarkan suku bunga yang ringan dan kompetitif untuk semua jenis transaksi.

Saat ini, Perseroan menyediakan berbagai jenis kartu kredit, di antaranya:
1. Kartu Kredit *Infinite*;
2. Kartu Kredit *World*;
3. Kartu Kredit *Platinum*;
4. Kartu Kredit *Business*;
5. Kartu Kredit *Customized*;
6. Kartu Kredit *Gold*;
7. Kartu Kredit *Classic*;
8. *Private label* KB Bank *Card*.

Kinerja Bisnis Kartu Kredit

Perseroan merupakan salah satu bank di Indonesia yang memiliki izin sebagai penerbit Kartu Kredit dan penerima pembayaran kartu melalui mesin EDC. Selain itu, Perseroan juga memiliki izin untuk menerbitkan kartu *private label* yang dikenal sebagai KB Bank *Card*. Dengan dukungan regulasi dan infrastruktur yang tersedia, bisnis kartu kredit Perseroan memiliki peluang besar untuk terus berkembang.

Sepanjang tahun 2024, KB Bank terus mengupayakan pertumbuhan bisnis kartu kredit dan penerimaan pembayaran dengan menerapkan strategi berikut:
1. Fokus akuisisi Kartu Kredit *Infinite & World Card* untuk nasabah Prioritas
2. Distribusi Kartu Kredit *Business Card* untuk Mitra Strategis Bank, terutama nasabah *corporate* serta anak perusahaan & afiliasi
3. Pemasaran mesin EDC lebih fokus untuk *Korean Merchant* diantaranya *Restaurant, Supermarket*, Klinik, Bioskop & *Dealer* Mobil sementara segmen lainnya fokus kepada *anchor merchant* dan *chain store*

Kinerja Bisnis Kartu Kredit Tahun 2023-2024

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan	
			Selisih	Persentase (%)
Jumlah pemegang kartu	538.783	553.842	(15.059)	-2,72%
Pengguna kartu (Rp miliar)	515	623	(108)	-17,34%
Kredit yang Diberikan (Rp miliar)	380	457	(77)	-16,78%
Feebase Kartu Kredit (Rp miliar)	29	38	(9)	-23,68%
Sales Volume Merchant (Rp miliar)	229	359	(130)	-36,21%
Feebase Merchant (Rp miliar)	4	4	-	0,00%

Kredit UMKM

Kinerja Produk Kredit UMKM

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit UKM	10.861	93,47%	14.609	93,45%	(3.749)	-25,66%
Kredit Mikro	759	6,53%	1.024	6,55%	(266)	-25,94%
Jumlah	11.619	100,00%	15.633	100,00%	(4.014)	-25,68%

KB Bank mencatatkan kinerja Kredit UMKM di tahun 2024 sebesar Rp11,62 triliun, menurun sebesar 25,68% atau setara dengan Rp4,01 triliun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp15,63 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengalihan portofolio kredit SME bermasalah ke departemen lain maupun yang dihapus buku.

Kredit UKM

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit Modal Kerja	4.708	43,35%	5.000	34,23%	(292)	-5,84%
Kredit Investasi	1.862	17,15%	2.762	18,91%	(900)	-32,58%
Equipment Financing	64	0,59%	125	0,85%	(61)	-48,88%
Dealer Financing	512	4,72%	640	4,38%	(127)	-19,89%
Lainnya	3.714	34,19%	6.082	41,63%	(2.369)	-38,94%
Jumlah	**10.861**	**100,00%**	**14.609**	**100,00%**	**(3.749)**	**-25,66%**

Hingga akhir 2024, total kredit UKM sebesar Rp10,86 triliun, yaitu mengalami penurunan sebesar 25,66% atau setara dengan Rp3,75 triliun bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023 yang mencapai Rp14,61 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh pengalihan debitur bermasalah maupun debitur SME yang dihapus buku.

Kredit Mikro

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
KUR	86	0,74%	110	0,71%	(24)	-21,78%
Kredit Modal Tidak Tetap Swamitra	672	5,79%	914	5,85%	(242)	-26,44%
Jumlah	**759**	**6,53%**	**1.024**	**6,55%**	**(266)**	**-25,94%**

Jumlah kredit mikro pada tahun 2024 mencapai Rp759 miliar, turun Rp266 miliar atau setara dengan 25,94% bila dibandingkan dengan posisi tahun 2023 yang tercatat Rp1,02 triliun. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan bank untuk tidak melakukan penambahan eksposur kredit Swamitra saat ini, sementara untuk produk KUR, penurunan dikarenakan adanya penghapusan KUR Center dan RM KUR pada tahun 2024, sehingga unit bisnis lebih banyak melakukan proses kredit non KUR.

Fee based Income Non Cash Loan

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Trade Finance	5,9	80,22%	7.070	62%	-1.170	-16,55%
Bank Garansi	1.455	19,78%	11.398	38%	-9.943	-87,23%
Jumlah	**7.355**	**100%**	**18.468**	**100%**	**-11.113**	**-60,17%**

KB Bank mencatatkan Jumlah *Fee Based income Non Cash Loan* Per 31 Desember 2024 sebesar Rp7,36 triliun, mengalami penurunan 60,17% atau setara dengan Rp11,11 triliun apabila dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp18,47 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya pembatasan penerbitan Bank Garansi (BG) tahun 2024 yaitu penerbitan BG hanya untuk proyek PLN yang dijamin dengan PT. Asuransi Perisai Listrik Nasional (APLN).

Kredit *Wholesale*

Adapun uraian kinerja masing-masing produk selama periode tahun buku adalah sebagai berikut.

Kinerja Produk *Wholesale*

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Kredit Modal Kerja	8.461	40,00%	10.361	48,58%	(1.900)	-18,34%
Kredit Investasi	5.873	27,76%	6.415	30,08%	(542)	-8,45%
Kredit Sindikasi	6.820	32,24%	4.551	21,34%	2.269	49,86%
Jumlah	**21.154**	**100,00%**	**21.328**	**100,00%**	**(173)**	**-0,81%**

Jumlah kredit *Wholesale* hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp21,15 triliun, yaitu menunjukkan penurunan Rp173 miliar karena terdapat include SAM atau setara -0,81% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat Rp21,33 triliun. Penurunan ini terjadi karena ekspansi *loan*.

Kredit *Wholesale*

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Koreanlink	6.312	29,87%	4.242	19,89%	2.069	48,77%
Non-Korea	14.843	70,16%	17.085	80,11%	(2.242)	-13,12%
Jumlah	**21.154**	**100,00%**	**21.328**	**100,00%**	**(173)**	**-0,81%**

Sepanjang tahun 2024, KB Bank mencatatkan jumlah kredit *wholesale* senilai Rp21,15 triliun, turun sebesar Rp173 miliar atau -0,81% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp21,33 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh *remittance/repayment*.

Produk Dana

Produk dana yang ditawarkan Perseroan terdiri dari produk dana Ritel dan *Wholesale*.

1. Ritel Segmen
   Segmen bisnis Ritel mencakup pendanaan untuk UMKM dan konsumer, yang digabungkan untuk menciptakan peluang lebih besar bagi tenaga pemasaran *(marketing funding)*. Perubahan ini memungkinkan KB Bank memperluas potensi pendanaan tidak hanya dari nasabah perorangan, tetapi juga dari badan usaha atau perusahaan.
   Fokus utama segmen ini adalah meningkatkan jumlah nasabah di kategori *mass affluent* (menengah), membangun struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, serta mendorong peningkatan jumlah transaksi. Strategi bisnis funding Ritel juga diperkuat dengan program pemasaran terpadu yang tidak hanya bertujuan untuk penjualan produk, tetapi juga memperkuat citra KB Bank.
   Berikut adalah produk dana yang ditawarkan dalam bisnis Ritel:
   a. Giro
   b. Simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan menggunakan kartu ATM (perorangan), cek, bilyet giro, atau surat perintah lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Jenis giro yang disediakan KB Bank kepada nasabah yaitu: ‘
      - Giro Umum
        Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
      - Giro Valas
        Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

   c. Tabungan
      KB Bank menawarkan berbagai jenis produk tabungan yang dirancang untuk memenuhi beragam kebutuhan nasabah, baik untuk transaksi sehari-hari, perencanaan keuangan masa depan, investasi guna mengoptimalkan pendapatan bunga, hingga persiapan dana untuk keperluan bisnis maupun ibadah. Berikut adalah jenis tabungan yang tersedia di KB Bank:
      - Tabungan Siaga KB Bank
        Tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, dan tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro atau setaranya.

- Tabungan Siaga KB Bank
  Kerja sama Tabungan yang dirancang khusus untuk kerja sama PT Bank KB Bukopin Tbk dan perusahaan dalam rangka payroll (penampungan pembayaran gaji karyawan) atau kerja sama lainnya yang mempunyai karakteristik berupa pembukaan tabungan secara kolektif.
- Tabungan Siaga KB Bank Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha)
  Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan dan badan usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Tabungan ini memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memantau transaksi-transaksi bisnisnya tercetak di dalam buku tabungan. Layanan yang diberikan kepada pemegang rekening tabungan bisnis sangat menarik, antara lain adalah tersedianya kartu ATM, *e-banking*, dan fasilitas pemindahan dana secara otomatis dari tabungan ke giro atau sebaliknya (SiAgamatic).
- Tabungan Siaga KB Bank Premium
  Tabungan berbunga setara deposito yang memiliki beragam layanan, kemudahan, dan keleluasaan.
- Tabungan Rencana KB Bank
  Tabungan yang diperuntukkan bagi perorangan guna memenuhi keperluan yang akan datang dengan jumlah setoran tetap setiap bulannya dan hanya dapat diambil pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian.
- Tabungan Siaga KB Bank Dollar
  Tabungan dalam bentuk valuta asing untuk kebutuhan transaksi nasabah.
- Tabunganku
  Tabungan yang merupakan program Pemerintah yang ditujukan untuk individu tanpa dikenakan biaya administrasi.
- Tabungan Siaga Pensiunan
  Tabungan yang ditujukan untuk menghimpun dana dari para pensiunan termasuk pembayaran uang pensiun.
- Tabungan SIMPEL (Simpanan Pelajar)
  Tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi untuk mendorong budaya menabung sejak dini.
- Tabungan SiAga Digital (KBstar)
  Tabungan perorangan berbasis digital dimana pembukaan rekening dapat dilakukan hanya melalui aplikasi yang di dalamnya terdapat beragam fitur yang dapat diakses untuk melakukan berbagai transaksi.

d. Deposito
   KB Bank menyediakan produk deposito sebagai solusi simpanan berjangka yang menawarkan tingkat bunga lebih kompetitif dibandingkan tabungan dan giro. Produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang menginginkan simpanan dengan jangka waktu tertentu serta imbal hasil yang lebih optimal. Dalam segmen bisnis Ritel, KB Bank menawarkan berbagai pilihan deposito sebagai berikut:
   - Deposito Umum
     Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dalam valuta rupiah.
   - Deposito Valas
     Simpanan berjangka dalam valuta asing bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.
   - Deposito Merdeka
     Simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan kapanpun menurut perjanjian antara nasabah dan pihak Perseroan, dengan nilai tambah bebas biaya penalti jika dicairkan sebelum jatuh tempo.
   - Deposito *Online*
     Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dalam valuta rupiah dan hanya dapat diakses secara *online* melalui aplikasi digital KB Bank.

2. *Wholesale*
   Bisnis dana *Wholesale* berperan sebagai segmen penyeimbang dalam pertumbuhan dana pihak ketiga serta kebutuhan likuiditas Perseroan. Segmen ini menargetkan perusahaan-perusahaan BUMN dan swasta nasional dengan menerapkan strategi *follow the money* serta meningkatkan loyalitas deposan melalui kerja sama operasional perbankan sebagai dasar penempatan dana.
   Produk dan layanan yang ditawarkan dikemas dalam sistem layanan terintegrasi, mencakup *cash management*, pembayaran *host to host* (H2H), *virtual account*, serta berbagai layanan transaksi lainnya. Sumber dana utama dalam bisnis *Wholesale* berasal dari produk giro dan deposito dengan suku bunga yang kompetitif. Berikut adalah rincian produk dana bisnis *Wholesale*:
   a. Giro
      - Giro Umum
        Simpanan dalam mata uang Rupiah guna memenuhi kebutuhan transaksi harian perusahaan.
      - Giro Valas
        Simpanan dalam mata uang asing guna memenuhi kebutuhan transaksi dalam mata uang asing harian perusahaan.

   b. Deposito
      - Deposito KB Bank Rupiah
        Simpanan berjangka bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian dalam valuta rupiah.
      - Deposito Valas
        Simpanan berjangka dalam valuta asing bagi nasabah perorangan dan badan usaha yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian.
      - Deposito *on Call*
        Simpanan berjangka yang penarikannya hanya bisa dilakukan melalui pemberitahuan terlebih dahulu sesuai kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.

Produktivitas Produk Dana

Jumlah total rekening yang dihimpun oleh KB Bank per 31 Desember 2024 tercatat sebesar 440.657 unit, menurun sebesar -103.783 unit atau setara -19,06% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 544.440 unit. Hal ini disebabkan oleh adanya penutupan rekening yang sudah dormant dan bersaldo 0.

Jumlah Rekening Produk Dana

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Ritel	438.531	99,52%	542.626	99,67%	(104.095)	-19,18%
Wholesale	2.126	0,48%	1.814	0,33%	312	17,20%
Jumlah	**440.657**	**100,00%**	**544.440**	**100,00%**	**(103.783)**	**-19,06%**

Sementara itu, pada tahun 2024, KB Bank tercatat menghimpun dana sebesar Rp46,59 triliun, mengalami kenaikan 4,03% atau setara dengan Rp1,8 triliun apabila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp44,79 triliun. Hal ini merupakan strategi Bank untuk meningkatkan dana murah dan menurunkan COF dari penempatan pihak ketiga.

Jumlah Dana Produk Dana

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Ritel	29.769	63,89%	30.008	67,00%	(240)	-0,80%
Wholesale	16.824	36,11%	14.781	33,00%	2.044	13,83%
Jumlah	**46.593**	**100,00%**	**44.789**	**100,00%**	**1.804**	**4,03%**

Dana Ritel

Segmen pendanaan bisnis Ritel diperoleh melalui berbagai produk tabungan, giro, dan deposito yang ditawarkan kepada perorangan maupun badan usaha. Berikut ini adalah ringkasan kinerja produk dana Ritel Perseroan:

Jumlah Rekening Dana Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Giro	13.089	2,98%	13.650	2,52%	(561)	-4,11%
Tabungan	409.311	93,34%	512.298	94,41%	(102.987)	-20,10%
Deposito	16.131	3,68%	16.678	3,07%	(547)	-3,28%
Jumlah	**438.531**	**100,00%**	**542.626**	**100,00%**	**(104.095)**	**-19,18%**

Jumlah rekening dana pihak ketiga di segmen dana Ritel KB Bank tercatat mengalami penurunan sebesar 104.095 unit dari tahun 2023 yang tercatat sebesar 542.626 unit menjadi 438.531 unit di tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena adanya penurunan rekening yang disebabkan rekening telah berstatus dormant dan saldo di rekening Rp 0.

Jumlah Dana Pihak Ketiga Segmen Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	3.358	11,28%	1.763	5,88%	1.594	90,42%
Tabungan	5.468	18,37%	5.056	16,85%	412	8,16%
Deposito	20.943	70,35%	23.189	77,28%	(2.246)	-9,69%
Jumlah	**29.769**	**100,00%**	**30.008**	**100,00%**	**(240)**	**-0,80%**

KB Bank mencatatkan Jumlah Dana Pihak Ketiga Segmen Ritel tahun 2024 sebesar Rp29,77 triliun, menurun sebesar 0,80% atau setara dengan Rp240 miliar apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp30,01 triliun. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penarikan dana yang berasal dari nasabah besar bank.

Giro

Per 31 Desember 2024, jumlah rekening produk giro pada segmen dana Ritel KB Bank mencapai 13.089 unit, menurun sebesar 4,11% atau setara dengan 561 unit apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 13.650 unit. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan aktivitas bisnis (transaksi perbankan) akibat dampak dari terbatasnya jumlah kantor cabang bank.

Jumlah Rekening Giro Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Giro Umum	12.625	96,46%	13.127	96,17%	(502)	-3,82%
Giro Valas	464	3,54%	523	3,83%	(59)	-11,28%
Jumlah	**13.089**	**100,00%**	**13.650**	**100,00%**	**(561)**	**-4,11%**

Jumlah Dana Giro Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro Umum	3.140	93,51%	1.722	97,63%	1.418	82,37%
Giro Valas	218	6,49%	42	2,37%	176	422,28%
Jumlah	**3.358**	**100,00%**	**1.763**	**100,00%**	**1.594**	**90,42%**

Hingga akhir tahun 2024, total dana dari produk giro pada segmen dana Ritel KB Bank mencapai Rp3,36 triliun, yaitu mengalami peningkatan sebesar 90,42% atau setara dengan Rp1,59 triliun bila dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023 yang mencapai Rp1,76 triliun.

Tabungan

Per 31 Desember 2024, jumlah rekening produk tabungan pada segmen dana Ritel mencapai 409.311 unit, menurun sebesar 20,10% atau turun sebesar 102.987 unit apabila dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar 512.298 unit. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya persaingan dengan kompetitor atas adanya layanan digital yang lebih memudahkan nasabah bertransaksi melalui aplikasi digital.

Jumlah Rekening Tabungan Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
SiAga KB Bank	57.266	13,99%	65.924	12,87%	(8.658)	-13,13%
SiAga KB Bank Kerja sama	56.713	13,86%	53.385	10,42%	3.328	6,23%
SiAga KB Bank Rencana	3.997	0,98%	5.187	1,01%	(1.190)	-22,94%
SiAga KB Bank Bisnis Perorangan	7.391	1,81%	8.463	1,65%	(1.072)	-12,67%
SiAga KB Bank Bisnis Badan Usaha	5.120	1,25%	7.194	1,40%	(2.074)	-28,83%
SiAga KB Bank Premium	1.436	0,35%	1.488	0,29%	(52)	-3,49%
SiAga KB Bank Valas	343	0,08%	283	0,06%	60	21,20%
SiAga KB Bank Pensiun	200.093	48,89%	190.276	37,14%	9.817	5,16%
SIMPEL	33.533	8,19%	32.705	6,38%	828	2,53%
Tabungan Rakyat	3.630	0,89%	3.632	0,71%	(2)	-0,06%
SiAga Digital (Kbstar)	152.681	37,30%	98.671	19,26%	54.010	54,74%
TabunganKu	43.389	10,60%	48.722	9,51%	(5.333)	-10,95%
Tabungan Lainnya	30	0,01%	-	0,00%	30	-
Jumlah	**409.311**	**100,00%**	**512.298**	**100,00%**	**(102.987)**	**-20,10%**

Jumlah Dana Produk Tabungan Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
SiAga KB Bank	1.144	20,92%	922	18,23%	222	24,09%
SiAga KB Bank Kerja sama	195	3,57%	207	4,09%	(12)	-5,66%
SiAga KB Bank Rencana	59	1,08%	85	1,68%	(26)	-30,46%
SiAga KB Bank Bisnis Perorangan	497	9,09%	487	9,63%	10	2,03%
SiAga KB Bank Bisnis Badan Usaha	1.027	18,78%	942	18,64%	85	8,99%
SiAga KB Bank Premium	1.254	22,93%	1.433	28,35%	(179)	-12,50%
SiAga KB Bank Valas	82	1,50%	54	1,06%	28	52,66%
SiAga KB Bank Pensiun	381	6,97%	344	6,80%	37	10,87%
SIMPEL	2	0,04%	3	0,05%	(1)	-20,14%
Tabungan Rakyat	184.301	3.370,42%	266.083	5.262,95%	(81.782)	-30,74%
SiAga Digital (KBstar)	24.983	456,88%	19.995	395,49%	4.988	24,95%
TabunganKu	75	1,37%	87	1,73%	(12)	-14,20%
Tabungan Lainnya	(208.532)	-3813,54%	(285.585)	-5648,70%	77.054	-26,98%
Jumlah	**5.468**	**100,00%**	**5.056**	**100,00%**	**412**	**8,16%**

Jumlah dana produk tabungan pada segmen dana Ritel sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp5,47 triliun, naik sebesar Rp412 miliar atau 8,16% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp5,06 triliun. Hal ini terutama didorong oleh campaign program CASA di tahun 2024.

Deposito

Hingga Desember 2024, jumlah rekening produk deposito pada segmen dana Ritel tercatat sebesar 16.131 unit, menurun sebesar 547 unit atau 3,28% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai 16.678 unit. Hal ini terutama dikarenakan oleh adanya penurunan penempatan dana nasabah pada produk deposito sehingga mempengaruhi rekening deposito.

Jumlah Rekening Produk Deposito Ritel

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Deposito Umum	12.766	79,14%	14.004	83,97%	(1.238)	-8,84%
Deposito Valas	243	1,51%	269	1,61%	(26)	-9,67%
Deposito Merdeka	3.106	19,25%	7.533	45,17%	(4.427)	-58,77%
Deposito Badan Usaha	-	0,00%	2.195	13,16%	(2.195)	-100,00%
Deposito *on Call* (DOC)	16	0,10%	10	0,06%	6	60,00%
Jumlah	**16.131**	**100,00%**	**16.678**	**100,00%**	**(547)**	**-3,28%**

Jumlah Dana Produk Deposito Ritel

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Deposito Umum	19.589	93,53%	14.447	62,30%	5.142	35,59%
Deposito Valas	1.122	5,36%	984	4,25%	138	13,97%
Deposito Merdeka	232	1,11%	348	1,50%	(116)	-33,31%
Deposito Badan Usaha	-	0,00%	6.771	29,20%	(6.771)	-100,00%
Deposito *on Call* (DOC)	-	0,00%	639	2,76%	(639)	-100,00%
Jumlah	**20.943**	**100,00%**	**23.189**	**100,00%**	**(2.246)**	**-9,69%**

KB Bank mencatatkan jumlah dana produk deposito pada segmen dana Ritel di tahun 2024 sebesar Rp20,94 triliun, menurun sebesar Rp2,25 triliun atau 9,69% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp23,19 triliun. Hal ini terutama didorong oleh strategi bank untuk meningkatkan dana murah dan menurunkan COF dari penempatan dana ketiga namun tetap menjaga total dana kelolaan tetap stabil.

Dana *Wholesale*

Dalam segmen bisnis *Wholesale*, Perseroan menyediakan tiga jenis produk simpanan bagi nasabah *Wholesale*, yaitu Giro, Deposito, dan Tabungan. Perseroan secara proaktif memanfaatkan jaringan perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia guna mendorong pertumbuhan dana *Wholesale*. Berikut adalah rincian kinerja produk dana *Wholesale* yang berhasil dihimpun oleh segmen bisnis ini:

Jumlah Rekening Dana *Wholesale*

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Giro	1.133	53,29%	1.135	62,57%	(2)	-0,18%
Giro Umum	941	44,26%	945	52,09%	(4)	-0,42%
Giro Valas	192	9,03%	190	10,47%	2	1,05%

Jumlah Rekening Dana *Wholesale*

(dalam unit rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Tabungan	270	12,70%	132	7,28%	138	104,55%
Deposito	723	34,01%	547	30,15%	176	32,18%
Deposito Rupiah	618	29,07%	510	28,11%	108	21,18%
Deposito Valas	84	3,95%	29	1,60%	55	189,66%
Deposito *on Call* (DOC)	21	0,99%	8	0,44%	13	162,50%
Jumlah	**2.126**	**100,00%**	**1.814**	**100,00%**	**312**	**17,20%**

Hingga akhir 2024, jumlah rekening produk pada segmen dana *Wholesale* tercatat sebesar 2.126 unit, mengalami kenaikan sebesar 312 unit atau 17,20% bila dibandingkan posisi tahun sebelumnya yang mencapai 1.814 unit. Kenaikan jumlah rekening terjadi karena NTB (*New To Bank*) meningkat, sejalan dengan pencapaian target bisnis yang telah ditetapkan. Kenaikan NTB (*New To Bank*) ini sendiri dipengaruhi oleh transaksi *new loan* yang menggunakan komponen DPK (Dana Pihak Ketiga), sehingga berdampak langsung pada peningkatan rekening.

Jumlah Dana *Wholesale*

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	2.931	17,42%	1.414	9,57%	1.517	107,27%
Giro Umum	2.324	13,82%	1.005	6,80%	1.320	131,39%
Giro Valas	607	3,61%	410	2,77%	197	48,14%
Tabungan	1.447	8,60%	1.817	12,30%	(370)	-20,36%
Deposito	12.446	73,97%	11.549	78,14%	897	7,76%
Deposito Rupiah	10.327	61,38%	8.787	59,45%	1.540	17,52%
Deposito Valas	1.782	10,59%	2.466	16,68%	(683)	-27,72%
Deposito *on Call* (DOC)	336	2,00%	296	2,00%	40	13,60%
Jumlah	**16.824**	**100,00%**	**14.781**	**100,00%**	**2.044**	**13,83%**

Perseroan mencatatkan jumlah dana pada segmen dana *Wholesale* sebesar Rp16,82 triliun, naik sebesar Rp2,04 triliun atau 13,83% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp14,78 triliun. Hal ini didorong oleh naiknya dana pihak ketiga.

Fee Based Income

Pendapatan *Fee Based Income* Perseroan berasal dari berbagai aktivitas, termasuk perdagangan *(trading)* produk *Treasury*, layanan *Public Services*, *Trade Finance*, Bank Garansi, dan jasa keagenan. Selain itu, peningkatan juga terjadi pada layanan *e-banking*, corporate *internet banking* - KBstarbiz, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, manajemen pengelolaan, IT Swamitra, serta *public utilities*. Sejalan dengan perkembangan layanan perbankan, Perseroan turut menghadirkan produk investasi dan layanan *wealth management* bagi nasabahnya.

Adapun rincian layanan *fee based income* dijelaskan sebagai berikut:

Layanan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Layanan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan salah satu lini bisnis utama Perseroan. Perseroan terus meningkatkan kualitas layanan serta mengembangkan berbagai inisiatif untuk memperkuat kepercayaan dan kepuasan nasabah dalam menggunakan jasa Wali Amanat dan Kustodian PT Bank KB Bukopin Tbk. Penyediaan layanan tersebut, termasuk jasa Wali Amanat dan Penjualan Kustodian, berkontribusi pada peningkatan *fee based income* Perseroan.

Fee Based Income Wali Amanat KB Bank			*Fee Based Income* Kustodian KB Bank		
No	Periode	Kumulatif *Fee Based Income*	No	Periode	Kumulatif *Fee Based Income*
1	Jan-24	456.042.500	1	Jan-24	395.175.515
2	Feb-24	1.275.549.500	2	Feb-24	581.631.722
3	Mar-24	2.997.602.500	3	Mar-24	1.025.935.020
4	Apr-24	3.580.067.540	4	Apr-24	1.286.213.406
5	May-24	4.989.297.200	5	May-24	1.690.707.438
6	Jun-24	5.797.113.150	6	Jun-24	1.784.451.024
7	Jul-24	7.954.248.600	7	Jul-24	2.086.152.090
8	Aug-24	9.616.650.750	8	Aug-24	2.366.871.857
9	Sep-24	10.415.365.700	9	Sep-24	2.566.131.057
10	Oct-24	12.867.121.150	10	Oct-24	2.800.356.948
11	Nov-24	14.335.201.850	11	Nov-24	2.910.832.320
12	Dec-24	15.663.916.800	12	Dec-24	3.009.386.801

Dengan dukungan dari Pemegang Saham Mayoritas, Kookmin Bank Seoul, Perseroan terus memperkuat reputasinya. Hal ini tercermin dari semakin luasnya kerja sama dengan hampir 600 bank koresponden, baik di dalam maupun luar negeri. Kemitraan ini mendukung ekspansi bisnis Perseroan, terutama dalam layanan pengiriman uang antar negara *(remittance)*, perdagangan ekspor-impor, serta berbagai transaksi lainnya yang berkontribusi pada peningkatan *fee based income*. Produk Lembaga Keuangan & Bank Koresponden Perseroan mencakup penerbitan *Demand Guarantee*, Rekening Vostro IDR KB Bank, transaksi Rediskonto Wesel, serta *Banker's Acceptance*.

KB Bank *Trade Finance*

KB Bank *Trade Finance* adalah layanan pembiayaan perdagangan yang ditawarkan oleh Perseroan untuk mendukung transaksi jual beli barang antara penjual *(seller)* dan pembeli *(buyer)*, baik di tingkat domestik maupun internasional. Produk ini mencakup berbagai layanan, termasuk Ekspor, Impor, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Bank Garansi, *Standby* L/C, dan *Flexy Bill*. Berikut adalah rincian kinerja produk KB Bank *Trade Finance*.

Jumlah Transaksi KB Bank *Trade Finance*

(dalam jumlah rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Export Service	45	0,26%	153	0,64%	(108)	(70,59)%
Import Service	49	0,28%	115	0,48%	(66)	(57,39)%
Remittance	17.227	99,46%	23.529	98,87%	(6.302)	(26,78)%
Jumlah	17.321	100%	23.797	100%	(6.476)	-27,21%

Note: Seluruh produk Flexy + *Invoice Financing* tidak ada transaksi penerbitan baru melainkan hanya perpanjangan sehingga tidak dimasukan kedalam jumlah transaksi

Kinerja Dana KB Bank *Trade Finance*

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Export Service	261	4,42%	2.026	24,00%	(1.765)	-87,12%
Import Service	1.239	20,96%	1.406	16,66%	(167)	-11,88%
Remittance	4.410	74,62%	5.009	59,34%	(599)	-11,96%
Jumlah	5.910	100%	8.441	100,00%	(2.531)	-29,98%

Treasury

Perseroan mengelola likuiditas sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), sambil tetap mengoptimalkan profitabilitas. *Treasury* berkoordinasi dengan unit bisnis dan pendukung untuk memantau *cash flow* harian, termasuk pergerakan dana nasabah besar serta tren harian, guna menyusun strategi pengelolaan likuiditas yang efektif.

Sebagai pengelola likuiditas, Perseroan berperan sebagai *profit center* dengan memaksimalkan pendapatan bunga serta *fee based income*. Transaksi dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, bank umum, sekuritas, dan *money broker*. Fokus utama terletak pada aktivitas jual beli valuta asing guna memperkuat peran *treasury* sebagai pusat profitabilitas. Berikut adalah produk dan layanan *treasury* yang ditawarkan kepada nasabah:

1. Transaksi jual beli forex (*value today*, tom, *spot, forward, swap*);
2. *Deposit on Call* (DOC);
3. Transaksi jual beli obligasi (pemerintah dan korporasi).

Volume Transaksi *Treasury*

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pasar Uang	247.952.441	61,96%	242.148.600	70.98%	5.803.841	2,40%
Valuta Asing	144.864.150	36,20%	88.405.596	25.91%	56.458.554	63,86%
Surat Berharga	7.359.000	1,84%	10.610.727	3.11%	(3.251.727)	-30,65%
Jumlah *Volume* Transaksi *Treasury*	**400.175.591**	**100,00%**	**341.164.923**	**100%**	**59.010.668**	**17,30%**

Pendapatan Bunga *Treasury*

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pendapatan Bunga dari Bank Indonesia	84.844	8,47%	213.933	22.01%	(129.089)	-60,34%
Pendapatan Bunga dari Bank Lain	124.383	12,41%	78.925	8.12%	45.458	57,60%
Pendapatan Bunga Obligasi	792.808	79,12%	679.262	69.87%	113.546	16,72%
Jumlah Pendapatan Bunga *Treasury*	**1.002.035**	**100%**	**972.120**	**100%**	**29.915**	**3,08%**

Pendapatan Non Bunga *Treasury*

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Transaksi Valas	22.656	55,85%	12.979	52.51%	9.677	74,56%
Transaksi Surat Berharga dan Reksadana	17.908	44,15%	11.740	47.49%	6168	52,54%
Jumlah Pendapatan Bunga *Treasury*	**40.564**	**100%**	**24.719**	**100%**	**15.845**	**64,10%**

Jasa dan Layanan Lainnya

Pada tahun 2024, Perseroan menawarkan berbagai jasa dan layanan, termasuk Bisnis Kartu, *E-Banking*, KB Bank Prioritas, *corporate internet banking* - Kbstarbiz, Modul Penerimaan Negara, serta berbagai layanan perbankan lainnya.

Bisnis Kartu

Kinerja Produk Bisnis Kartu

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal
Kartu Kredit KB Bank	816.571	516	907.838	623

Notes: jumlah transaksi kartu kredit dalam setahun

E-Banking

Kinerja Produk *E-Banking*

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023		Pertumbuhan	
	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal
ATM	213.767	132.781	1.470.465	1.043.231	(1.256.698)	(910.450)
Aplikasi Digital KBstar	537.114	487.483	8.076	7.313	529.038	480.170

KB Bank Prioritas

Kinerja KB Bank Prioritas

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah nasabah)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023		Pertumbuhan	
	DPK	Nasabah	DPK	Nasabah	DPK	Nasabah
KB Bank Prioritas	9.095	3.980	7.250	3.073	1.845	907

Corporate Internet Banking

Kinerja *Corporate Internet Banking* - KBstarbiz

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023		Pertumbuhan	
	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal
Corporate Internet Banking	51.282	13.281	3.791	800	47.491	12.481

Modul Penerimaan Negara (MPN)

Kinerja Modul Penerimaan Negara (MPN)

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023		Pertumbuhan	
	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal
Modul Penerimaan Negara (MPN)	8.958	1.408	11.297	1.565	(2.339)	(157)

Jasa Perbankan Lainnya

Kinerja Jasa Perbankan Lainnya

(dalam miliar Rupiah, kecuali jumlah transaksi)

Uraian	31 Desember 2024		31 Desember 2023		Pertumbuhan	
	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal	Jumlah Transaksi	Nominal
Listrik Prabayar (*Prepaid*)	102.925.137	9.803	33.057.890	3.289	69.867.247	6.514
Virtual Account Giro KB Bank	5.404	15	4.556	14	848	1
EDC	25.025.879	19.665	25.117	20	25.000.762	19.645

Segmen Pembiayaan

Dalam segmen Pembiayaan, produk dan layanan yang disediakan melalui KB Bukopin Finance meliputi Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, dan Pembiayaan Multiguna.

Produktivitas Segmen Pembiayaan

Produk pembiayaan *on balance sheet* tercatat sebesar Rp721,73 miliar di tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 165,13% atau Rp449,52 miliar bila dibandingkan dengan posisi tahun sebelumnya yang senilai Rp272.218 miliar. Sementara itu, produk pembiayaan *joint financing* mengalami penurunan sebesar Rp532,26 miliar dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp569,85 miliar menjadi Rp37,59 miliar di tahun 2024.

Rincian kinerja produk pembiayaan *on balance sheet* dan *joint financing* disajikan sebagai berikut:

Produk Pembiayaan *(On Balance Sheet)*

Kinerja Produk Pembiayaan (*On Balance Sheet*)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pembiayaan Investasi	685.675	95,00%	237.008	87,07%	448.667	189,30%
Pembiayaan Modal Kerja	25.000	3,46%	28.413	10,44%	(3.413)	-12,01%
Pembiayaan Multiguna	433	0,06%	1.503	0,55%	(1.070)	-71,16%
Pembiayaan Jual Beli (Syariah)	10.624	1,47%	5.294	1,94%	5.330	100,68%
Jumlah	**721.732**	**100,00%**	**272.218**	**100,00%**	**449.515**	**165,13%**

Produk Pembiayaan (*Joint Financing*)

Kinerja Produk Pembiayaan (*On Balance Sheet*)

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pembiayaan Investasi	18.589	49,46%	354.581	62,22%	(335.992)	-94,76%
Pembiayaan Modal Kerja	6	0,01%	294	0,05%	(288)	-98,11%
Pembiayaan Multiguna	18.751	49,89%	189.123	33,19%	(170.371)	-90,09%
Pembiayaan Jual Beli (Syariah)	242	0,64%	25.852	4,54%	(25.610)	-99,06%
Jumlah	**37.588**	**100,00%**	**569.849**	**100,00%**	**(532.261)**	**-93,40%**

Segmen Syariah

Produk dan layanan dalam segmen pembiayaan disediakan oleh KB Bank Syariah, anak perusahaan Perseroan. Produk yang ditawarkan mencakup berbagai jenis pembiayaan berbasis prinsip syariah, produk pendanaan yang sesuai dengan ketentuan syariah, serta beragam layanan lain yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial sesuai dengan prinsip syariah.

Produktivitas Segmen Syariah

Produktivitas segmen Syariah, yang mencakup produk pembiayaan, produk pendanaan dan *fee based income*, disajikan sebagai berikut:

Produk Pembiayaan

Pada tahun 2024, segmen pembiayaan syariah Bank mencatatkan total pembiayaan sebesar Rp6,00 triliun, meningkat Rp342,75 miliar atau sekitar 6,05% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp5,63 triliun. Berikut adalah rincian kinerja produk pembiayaan KB Bank Syariah:

Kinerja Produk Pembiayaan

(dalam miliar jutaan, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Pertanian	150.699	2,51%	157.705	2,79%	(7.006)	-4,44%
Pertambangan	10.951	0,18%	97.617	1,72%	(86.666)	-88,78%
Manufaktur	646.994	10,78%	409.679	7,24%	237.315	57,93%
Tenaga listrik	225.041	3,75%	289.156	5,11%	(64.115)	-22,17%
Konstruksi	216.182	3,60%	255.092	4,51%	(38.910)	-15,25%
Perdagangan	1.038.353	17,29%	1.256.280	22,19%	(217.927)	-17,35%
Transportasi	476.877	7,94%	510.052	9,01%	(33.175)	-6,50%
Jasa Dunia Usaha	561.731	9,36%	487.534	8,61%	74.197	15,22%
Jasa Sosial	2.136.329	35,58%	1.854.148	32,75%	282.181	15,22%
Lain-lain	541.382	9,02%	344.522	6,09%	196.860	57,14%
Jumlah	**6.004.539**	100,00%	**5.661.785**	**100,00%**	**342.754**	**6,05%**

Produk Pendanaan

Pada tahun 2024, jumlah rekening pendanaan syariah Bank mencapai 75.343 unit, meningkat sebanyak 170 unit atau sekitar 4,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat 22.496 unit rekening.

Jumlah Produk Dana Pihak Ketiga

(dalam jumlah rekening)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Jumlah (Unit)	Komposisi (%)	Nominal (Unit)	Persentase (%)
Giro	6.608	8,77%	6.249	2,72%	359	5,74%
Tabungan	65.136	86,45%	219.818	95,78%	(154.682)	-70,37%
Deposito	3.599	4,78%	3.429	1,49%	170	4,96%
Jumlah	**75.343**	**100,00%**	**229.496**	**100,00%**	**(154.153)**	**-67,17%**

Kinerja Produk Dana Pihak Ketiga

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Giro	780.039	11,98%	459.743	7,65%	320.296	69,67%
Tabungan	607.224	9,32%	477.692	7,95%	129.532	27,12%
Deposito	5.124.920	78,70%	5.068.360	84,39%	56.560	1,12%
Jumlah	**6.512.183**	**100,00%**	**6.005.795**	**100,00%**	**506.388**	**8,43%**

Fee Based Income

Sepanjang tahun 2024, *fee based income* Perseroan tercatat sebesar Rp23,85 miliar, turun Rp8,88 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp32,73 miliar.

Fee Based Income

(dalam jutaan Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Bank Garansi	2.570	10,78%	4.221	12,90%	(1.651)	-39,11%
Adm-Pembiayaan	11.671	48,94%	18.466	23,42%	(6.795)	-36,80%
Jasa Nasabah	-	0,00%	1.512	4,62%	(1.512)	100,00%
Adm-DPK	3.756	15,75%	2.573	7,86%	1.183	45,98%
PLN	1.681	7,05%	2.363	7,22%	(682)	-28,86%
Bancassurance	274	1,15%	514	1,57%	(240)	-46,69%
FBI-ATM	-	0,00%	308	0,94%	(308)	100,00%
Pengelolaan Aset *Sales*	-	0,00%	327	1,00%	(327)	100,00%
Gadai Emas	-	0,00%	11	0,03%	(11)	100,00%
Sindikasi	-	0,00%	1	0,00%	(1)	100,00%
Telekomunikasi	-	0,00%	12	0,04%	(12)	100,00%
FBI-Lainnya	3.897	16,34%	2.423	7,40%	1.474	60,83%
Total	**23.849**	**100,00%**	**32.731**	**100,00%**	**(8.882)**	**-27,14%**

Segmen Geografis

Segmen Geografis KB Bank dikategorikan berdasarkan wilayah ekonomi, meliputi Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan daerah lainnya. Setiap wilayah memiliki karakteristik risiko dan potensi imbal hasil yang berbeda dalam menyediakan layanan perbankan.

Produktivitas Segmen Geografi

Produktivitas segmen Geografis, yang mencakup penyaluran kredit dan penghimpunan simpanan nasabah, disajikan sebagai berikut:

Kredit yang Diberikan

Kinerja Operasional Segmen Geografis

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jawa	40.003	84,17%	40.813	82,59%	(810)	-1,98%
Sumatera	2.780	5,85%	3.130	6,33%	(350)	-11,17%
Kalimantan	653	1,37%	983	1,99%	(330)	-33,57%
Lain-Lain	4.092	8,61%	4.494	9,09%	(402)	-8,94%
Jumlah	**47.527**	**100,00%**	**49.419**	**100,00%**	**(1.891)**	**-3,83%**

Simpanan Nasabah

Kinerja Operasional Segmen Geografis

(dalam miliar Rupiah)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jawa	38.409	82,44%	37.960	84,75%	450	1,18%
Sumatera	2.499	5,36%	2.488	5,56%	11	0,44%
Kalimantan	3.946	8,47%	2.333	5,21%	1.613	69,13%
Lain-Lain	1.739	3,73%	2.008	4,48%	(270)	-13,43%
Jumlah	**46.593**	**100,00%**	**44.789**	**100,00%**	**1.804**	**4,03%**



PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN OPERASI

KB Bank mengklasifikasikan segmen usaha berdasarkan kebijakan akuntansi menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Berikut adalah informasi pendapatan, profitabilitas, dan posisi keuangan Bank dan Entitas Anak berdasarkan Segmen Operasi.

Pendapatan Bunga Konsolidasian

Pendapatan Bunga Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	4.902.013	89,80%	4.355.568	89,70%	546.445	12,55%
Pembiayaan	34.260	0,63%	12.935	0,27%	21.325	164,86%
Syariah	522.826	9,58%	486.942	10,03%	35.884	7,37%
Total sebelum Eliminasi	5.459.099	100,00%	4.855.445	100,00%	603.654	12,43%
Eliminasi	(5.000)		6.191		(11.191)	-180,76%
Pendapatan Bunga Konsolidasian	5.454.099		4.861.636		592.463	12,19%

Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	(4.816.462)	100,62%	(6.088.071)	91,41%	1.271.609	-20,89%
Pembiayaan	14.439	-0,30%	(17.443)	0,26%	31.882	-182,78%
Syariah	15.182	-0,32%	(554.401)	8,32%	569.583	-102,74%
Total sebelum Eliminasi	(4.786.841)	100,00%	(6.659.915)	100,00%	1.873.074	-28,12%
Eliminasi	654		713		(59)	-8,27%
Laba (Rugi) Operasional	(4.786.187)		(6.659.202)		1.873.015	-28,13%

Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	(7.378.803)	100,28%	(5.510.780)	90,99%	(1.868.023)	33,90%
Pembiayaan	9.478	-0,13%	(18.571)	0,31%	28.049	-151,04%
Syariah	11.242	-0,15%	(527.065)	8,70%	538.307	-102,13%
Total Sebelum Eliminasi	(7.358.083)	100,00%	(6.056.416)	100,00%	(1.301.667)	21,49%
Eliminasi	1.029.463		713		1.028.750	144284,71%
Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian	(6.328.620)		(6.055.703)		(272.917)	4,51%

Total Aset Konsolidasian

Total Aset Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	75.458.349	89,01%	78.842.594	90,39%	(3.384.245)	-4,29%
Pembiayaan	8.644.907	10,20%	459.661	0,53%	8.185.246	1780,71%
Syariah	667.749	0,79%	7.920.474	9,08%	(7.252.725)	-91,57%
Total Sebelum Eliminasi	84.771.005	100,00%	87.222.729	100,00%	(2.451.724)	-2,81%
Eliminasi	(1.695.707)		(2.915.429)		1.219.722	-41,84%
Total Aset Konsolidasian	**83.075.298**		**84.307.300**		**(1.232.002)**	**-1,46%**

Total Liabilitas Konsolidasian

Total Liabilitas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Perbankan Konvensional	67.894.901	89,37%	64.080.008	89,95%	3.814.893	5,95%
Pembiayaan	7.864.525	10,35%	10.277	0,01%	7.854.248	76425,49%
Syariah	208.927	0,28%	7.151.658	10,04%	(6.942.731)	-97,08%
Total Sebelum Eliminasi	75.968.353	100,00%	71.241.943	100,00%	4.726.410	6,63%
Eliminasi	(854.841)		(1.044.806)		189.965	-18,18%
Total Liabilitas Konsolidasian	**75.113.512**		**70.197.137**		**4.916.375**	**7,00%**

PENDAPATAN, PROFITABILITAS DAN POSISI KEUANGAN SEGMEN GEOGRAFIS

KB Bank mengklasifikasikan segmen usaha berdasarkan kebijakan akuntansi menjadi Segmen Operasi dan Segmen Geografis. Berikut adalah informasi terkait pendapatan, profitabilitas, dan posisi keuangan Bank serta Entitas Anak berdasarkan segmen geografis.

Pendapatan Bunga Konsolidasian

Pendapatan Bunga Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	4.229.067	77,47%	3.381.976	69,65%	847.091	25,05%
Jawa selain Jabodetabek	497.017	9,10%	654.485	13,48%	(157.468)	-24,06%
Sumatera	291.576	5,34%	324.025	6,67%	(32.449)	-10,01%
Kalimantan	76.354	1,40%	90.653	1,87%	(14.299)	-15,77%
Lain-Lain	365.085	6,69%	404.306	8,33%	(39.221)	-9,70%
Total sebelum eliminasi	5.459.099	100,00%	4.855.445	100,00%	603.654	12,43%
Eliminasi	(5.000)		6.191		(11.191)	-180,76%
Pendapatan Bunga Konsolidasian	5.454.099		4.861.636		592.463	12,19%

Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

Pendapatan Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	(2.656.256)	55,49%	(4.450.328)	66,82%	1.794.072	-40,31%
Jawa selain Jabodetabek	(1.070.081)	22,35%	(1.513.717)	22,73%	443.636	-29,31%
Sumatera	(340.145)	7,11%	(265.686)	3,99%	(74.459)	28,03%
Kalimantan	(211.334)	4,41%	(88.722)	1,33%	(122.612)	138,20%
Lain-Lain	(509.025)	10,63%	(341.468)	5,13%	(167.557)	49,07%
Total sebelum eliminasi	(4.786.841)	100,00%	(6.659.921)	100,00%	1.873.080	-28,12%
Eliminasi	654		713		(59)	-8,27%
Laba (Rugi) Operasional Konsolidasian	(4.786.187)		(6.659.208)		1.873.021	-28,13%

Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

Pendapatan Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	(5.433.505)	73,84%	(4.067.817)	67,17%	(1.365.688)	33,57%
Jawa selain Jabodetabek	(932.965)	12,68%	(1.349.764)	22,29%	416.799	-30,88%
Sumatera	(337.443)	4,59%	(269.318)	4,45%	(68.125)	25,30%
Kalimantan	(211.083)	2,87%	(88.786)	1,47%	(122.297)	137,74%
Lain-Lain	(443.088)	6,02%	(280.731)	4,64%	(162.357)	57,83%
Total sebelum eliminasi	(7.358.084)	100,00%	(6.056.416)	100,00%	(1.301.668)	21,49%
Eliminasi	1.029.464		713		1.028.751	144284,85%
Laba (Rugi) Bersih Konsolidasian	(6.328.620)		(6.055.703)		(272.917)	4,51%

Total Aset Konsolidasian

Total Aset Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	62.304.706	73,50%	61.507.271	70,52%	797.435	1,30%
Jawa selain Jabodetabek	9.488.028	11,19%	11.298.679	12,95%	(1.810.651)	-16,03%
Sumatera	5.371.607	6,34%	5.807.490	6,66%	(435.883)	-7,51%
Kalimantan	1.171.399	1,38%	1.492.026	1,71%	(320.627)	-21,49%
Lain-Lain	6.435.265	7,59%	7.117.263	8,16%	(681.998)	-9,58%
Total sebelum eliminasi	84.771.005	100,00%	87.222.729	100,00%	(2.451.724)	-2,81%
Eliminasi	(1.695.707)		(2.915.429)		1.219.722	-41,84%
Total Aset Konsolidasian	**83.075.298**		**84.307.300**		**(1.232.002)**	**-1,46%**

Total Liabilitas Konsolidasian

Total Liabilitas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Produk	2024		2023		Kenaikan (Penurunan)	
	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Jumlah (Rp)	Komposisi (%)	Nominal (Rp)	Persentase (%)
Jabodetabek	44.983.807	59,21%	39.617.023	55,61%	5.366.784	13,55%
Jawa selain Jabodetabek	12.065.299	15,88%	14.171.176	19,89%	(2.105.877)	-14,86%
Sumatera	6.302.577	8,30%	6.251.866	8,78%	50.711	0,81%
Kalimantan	4.643.401	6,11%	3.033.770	4,26%	1.609.631	53,06%
Lain-Lain	7.973.269	10,50%	8.168.108	11,47%	(194.839)	-2,39%
Total sebelum eliminasi	75.968.353	100,00%	71.241.943	100,00%	4.726.410	6,63%
Eliminasi	(854.841)		(1.044.806)		189.965	-18,18%
Total Liabilitas Konsolidasian	**75.113.512**		**70.197.137**		**4.916.375**	**7,00%**

Standar Penyajian Informasi dan Kesesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan

Analisis dan pembahasan kinerja keuangan dalam Laporan Tahunan ini didasarkan pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Global) dengan opini "Disajikan Secara Wajar (dahulu Wajar Tanpa Pengecualian)".

Penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia, termasuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI). Pembahasan kinerja keuangan disampaikan dengan mengacu pada catatan Laporan Keuangan Konsolidasian yang diaudit oleh auditor eksternal, yang merupakan bagian integral dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
Aset				
Kas	369	289	80	27,63%
Giro pada Bank Indonesia	2.672	3.206	(533)	-16,63%
Giro pada bank lain - neto	397	343	54	15,84%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.798	2.134	665	31,16%
Surat-surat berharga - neto	21.767	17.536	4.231	24,13%
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	2.572	(2.572)	-100,00%
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Repo*)	-	-	-	n.a
Tagihan derivatif	12	3	9	296,51%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	44.535	45.836	(1.300)	-2,84%
Tagihan akseptasi	83	131	(48)	-36,56%
Penyertaan saham	0	0	-	0,00%
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.320	3.234	87	2,68%
Aset pajak tangguhan - neto	1.259	2.671	(1.412)	-52,87%
Aset tak berwujud - neto	271	286	(15)	-5,17%
Aset lain-lain - neto	5.592	6.068	(477)	-7,86%
Total Aset	83.075	84.307	(1.232)	-1,46%
Liabilitas dan Ekuitas				
Liabilitas				
Liabilitas segera	401	431	(30)	-6,99%
Simpanan nasabah	46.593	44.789	1.804	4,03%
Giro	6.289	3.178	3.112	97,92%
Tabungan	6.916	6.873	42	0,62%
Deposito	33.388	34.738	(1.350)	-3,89%
Simpanan dari bank lain	2.881	7.887	(5.006)	-63,47%
Giro dan Tabungan	94	37	57	153,41%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
Deposito berjangka dan *Interbank call money*	2.787	7.850	(5.062)	-64,49%
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.740	220	3.520	1602,80%
Liabilitas derivatif	4	1	3	350,62%
Liabilitas akseptasi	84	133	(48)	-36,43%
Pinjaman yang diterima	13.921	11.704	2.216	18,93%
Surat berharga yang diterbitkan	5.790	3.398	2.393	70,42%
Utang pajak	61	65	(4)	-5,77%
Liabilitas lain-lain	1.638	1.570	68	4,35%
Total Liabilitas	**75.114**	**70.197**	**4.916**	**7,00%**
Ekuitas				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000	19.000	-	0,00%
Tambahan modal disetor	8.226	8.226	-	0,00%
Uang muka setoran modal	-	-	-	n.a
Surplus revaluasi aset	1.817	1.604	213	13,28%
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(14)	8	(22)	-287,08%
Saldo laba	(21.041)	(14.701)	(6.340)	43,13%
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.987	14.136	(6.149)	-43,50%
Kepentingan non-pengendali	(26)	(26)	1	-2,03%
Total Ekuitas	**7.962**	**14.110**	**(6.148)**	**-43,57%**
Total Liabilitas dan Ekuitas	**83.075**	**84.307**	**(1.232)**	**-1,46%**

Jumlah Aset
(dalam miliar rupiah)

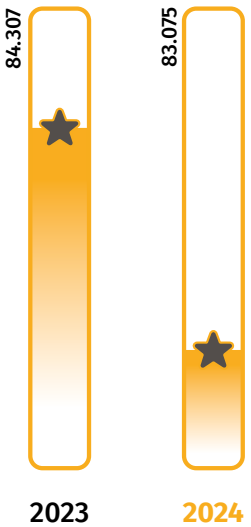

Jumlah Liabilitas
(dalam miliar rupiah)

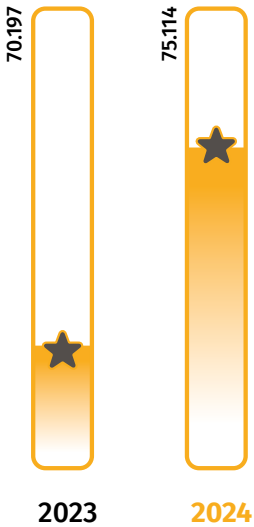

Jumlah Ekuitas
(dalam miliar rupiah)

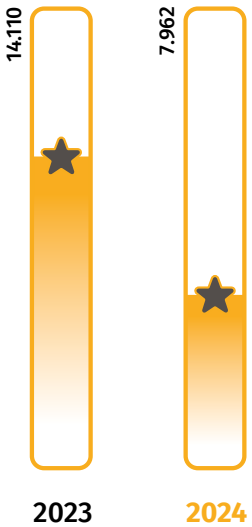

Aset Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kas	369	289	80	27,63%
Giro pada Bank Indonesia	2.672	3.206	(533)	-16,63%
Giro pada bank lain - neto	397	343	54	15,84%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.798	2.134	665	31,16%
Surat-surat berharga - neto	21.767	17.536	4.231	24,13%
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	2.572	(2.572)	-100,00%
Surat-surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali (*Repo*)	-	-	-	n.a
Tagihan derivatif	12	3	9	296,51%
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah - neto	44.535	45.836	(1.300)	-2,84%
Tagihan akseptasi	83	131	(48)	-36,56%
Penyertaan saham	0	0	-	0,00%
Total	**72.634**	**72.049**	**585**	**0,81%**

Per 31 Desember 2024, Jumlah Aset KB Bank tercatat sebesar Rp72,63 triliun, mengalami kenaikan 0,81% atau senilai Rp585 miliar bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp72,05 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada surat-surat berharga-neto sebesar Rp4,23 triliun atau 24,13% dan Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain-neto sebesar Rp665 miliar atau 31,16%. Selain itu terdapat penurunan Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali neto sebesar Rp2,57 triliun atau 100% dan Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah neto sebesar Rp1,30 triliun atau 2,84%.

Aset Non Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.320	3.234	87	2,68%
Aset pajak tangguhan – neto	1.259	2.671	(1.412)	-52,87%
Aset tak berwujud - neto	271	286	(15)	-5,17%
Aset lain-lain – neto	5.592	6.068	(477)	-7,86%
Jumlah Aset Non Keuangan	**10.441**	**12.258**	**(1.817)**	**-14,82%**

Perseroan mencatatkan aset non keuangan senilai Rp10,44 triliun di Desember 2024, turun 14,82% atau senilai Rp1,82 triliun bila dibandingkan akhir 2023 yang mencapai Rp12,26 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan pada aset pajak tangguhan neto sebesar Rp1,41 triliun atau 52,87%, aset lain-lain neto sebesar Rp477 miliar atau 7,86% dan aset tak berwujud neto sebesar Rp15 miliar atau 5,17%.

Liabilitas

Liabilitas Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Liabilitas segera	401	431	(30)	-6,99%
Simpanan nasabah	46.593	44.789	1.804	4,03%
Giro	6.289	3.178	3.112	97,92%
Tabungan	6.916	6.873	42	0,62%
Deposito	33.388	34.738	(1.350)	-3,89%
Simpanan dari bank lain	2.881	7.887	(5.006)	-63,47%
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.740	220	3.520	1602,80%
Liabilitas derivatif	4	1	3	350,62%
Liabilitas akseptasi	84	133	(48)	-36,43%
Pinjaman yang diterima	13.921	11.704	2.216	18,93%
Surat berharga yang diterbitkan	5.790	3.398	2.393	70,42%
Liabilitas lain-lain	1.638	1.570	68	4,35%
Jumlah Liabilitas Keuangan	**75.053**	**70.133**	**4.920**	**7,02%**

Hingga akhir 2024, Jumlah Liabilitas Keuangan tercatat sebesar Rp75,05 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp4,92 triliun atau 7,02% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp70,13 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh Peningkatan Surat-Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali neto sebesar Rp3,52 triliun atau 1602,80% dan Simpanan Nasabah sebesar Rp1,8 triliun atau 4,03%. Disisi lain terdapat penurunan Simpanan dari bank lain sebesar Rp5,01 triliun atau 63,47%.

Liabilitas Non Keuangan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Pertumbuhan	
			Rp	(%)
Utang pajak				
Pajak penghasilan - Pasal 29	-	-	-	-
Pajak penghasilan Lainnya:				
Pasal 23 dan 4(2)	46.685	38.148	8.537	22,38%
Pasal 21	2.150	7.670	(5.520)	-71,97%
Pajak Pertambahan Nilai	1.278	6.006	(4.728)	-78,72%
Lain-lain	10.790	12.811	(2.021)	-15,78%
Total	**60.903**	**64.635**	**(3.732)**	**-5,77%**

Per 31 Desember, jumlah liabilitas non-keuangan yang dicatatkan oleh KB Bank sebesar Rp 60,903 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp3.732 miliar atau -5,77% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp64,64 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan jumlah karyawan dan fee base pada tahun 2024.

Ekuitas

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000	19.000	-	0,00%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Tambahan modal disetor	8.226	8.226	-	0,00%
Uang muka setoran modal	-	-	-	n.a
Surplus revaluasi aset	1.817	1.604	213	13,28%
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(14)	8	(22)	-287,08%
Saldo rugi	(21.041)	(14.701)	(6.340)	43,13%
Total Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	7.987	14.136	(6.149)	-43,50%
Kepentingan non-pengendali	(26)	(26)	1	-2,03%
Jumlah Ekuitas	7.962	14.110	(6.148)	-43,57%

Jumlah Ekuitas Perseroan sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp7,96 triliun, turun sebesar Rp6,15 triliun atau turun 43,57% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp14,11 triliun. Hal ini disebabkan oleh kenaikan kerugian sebesar Rp6,34 triliun atau 43,13%.

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan Bunga dan Syariah	5.454	4.862	592	12,19%
Beban Bunga dan Syariah	(4.301)	(4.053)	(249)	6,13%
Pendapatan Bunga dan Syariah – Neto	1.153	809	344	42,51%
Pendapatan operasional lainnya	350	457	(106)	-23,32%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.453)	(5.538)	2.085	-37,65%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(798)	(269)	(529)	196,72%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6	5	1	18,05%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	5	2	3	169,38%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23)	155	(179)	-114,96%
Beban operasional lainnya	(2.026)	(2.280)	254	-11,15%
Rugi Operasional	(4.786)	(6.659)	1.873	-28,13%
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(118)	(128)	10	-7,92%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(4.904)	(6.787)	1.883	-27,75%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(1.424)	732	(2.156)	-294,67%
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(6.329)	(6.056)	(273)	4,51%
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.329)	(6.034)	(295)	4,89%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	1	(22)	22	-102,40%
Penghasilan komprehensif lain– neto	180	10	170	1716,60%
Jumlah penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan	(6.148)	(6.046)	(103)	1,70%
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.149)	(6.024)	(124)	2,07%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	1	(21)	22	-102,49%
Laba (Rugi) per saham Dasar/dilusian (nilai penuh)	(34)	(61)	27	-44,26%

Pendapatan Bunga dan Syariah

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan bunga dan Syariah	5.454	4.862	592	12,19%
Pendapatan bunga	4.931	4.375	557	12,72%
Kredit yang diberikan	3.576	3.120	456	14,60%
Surat-surat berharga	1.124	929	195	20,99%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	162	172	(10)	-5,96%
Giro pada Bank Indonesia	25	28	(3)	-10,09%
Giro pada bank lain	1	1	(1)	-41,44%
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	43	123	(81)	-65,37%
Pendapatan Tagihan lainnya	1	0	0	52,36%
Pendapatan Syariah	523	487	36	7,37%
Beban bunga dan Syariah	(4.301)	(4.053)	(249)	6,13%
Beban Bunga	(3.965)	(3.747)	(218)	5,83%
Giro	(76)	(37)	(38)	102,28%
Tabungan	(261)	(193)	(68)	35,24%
Deposito berjangka	(1.854)	(1.871)	16	-0,88%
Surat berharga yang diterbitkan	(210)	(308)	98	-31,77%
Simpanan dari bank lain	(409)	(442)	33	-7,46%
Pinjaman yang diterima	(1.104)	(891)	(213)	23,86%
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(51)	(5)	(47)	1036,53%
Beban Syariah	(336)	(306)	(30)	9,84%
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	1.153	809	344	42,51%

Pendapatan Bunga dan Syariah - Neto KB Bank sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp1,15 triliun, naik sebesar Rp344 miliar atau 42,51% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp809 miliar. Peningkatan tersebut berasal dari peningkatan pendapatan bunga kredit yang diberikan sebesar Rp456 miliar atau 14,60% dan Surat-Surat berharga sebesar Rp195 miliar atau 20,99%.

Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan Operasional Lainnya	350	457	(106)	-23,32%
Provisi dan komisi lainnya	230	334	(104)	-31,10%
Jasa administrasi	47	94	(48)	-50,59%
Imbalan jasa	126	152	(27)	-17,41%
Komisi *merchant*	5	6	(1)	-20,82%
Lain-lain	53	81	(28)	-34,84%
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	2	(9)	10	-117,82%
Keuntungan selisih kurs - neto	40	29	11	38,31%
Lain-lain	78	102	(24)	-23,81%
Beban Operasional Lainnya	(6.289)	(7.925)	1.636	-20,64%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.453)	(5.538)	2.085	-37,65%

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan –neto	(798)	(269)	(529)	196,72%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6	5	1	18,05%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	5	2	3	169,38%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23)	155	(179)	-114,96%
Umum dan administrasi	(1.120)	(1.372)	252	-18,37%
Gaji dan tunjangan karyawan	(824)	(810)	(14)	1,76%
Premi program penjaminan pemerintah	(82)	(99)	17	-16,86%
Pendapatan (beban) Operasional Lainnya - neto	(5.939)	(7.468)	1.529	-20,48%

Bank mencatatkan perbaikan Pendapatan (beban) Operasional Lainnya - neto senilai Rp1,53 triliun menjadi minus Rp5,94 triliun pada tahun 2024. Adapun tahun sebelumnya perbaikan Pendapatan (beban) Operasional Lainnya - neto senilai Rp1,53 triliun atau 20,48% dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar minus Rp7,47 triliun. Penurunan Perbaikan ini terjadi karena Bank melakukan serangkaian inisiatif efisiensi terutama dari sisi biaya operasional melanjutkan inisiatif optimisasi cabang yang dilakukan sejak pertengahan 2023.

Laba (Rugi) Operasional

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pendapatan bunga dan Syariah - neto	1.153	809	344	42,51%
Pendapatan operasional lainnya	350	457	(106)	-23,32%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.453)	(5.538)	2.085	-37,65%
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non- keuangan –neto	(798)	(269)	(529)	196,72%
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	6	5	1	18,05%
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi - neto	5	2	3	169,38%
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23)	155	(179)	-114,96%
Beban operasional lainnya	(2.026)	(2.280)	254	-11,15%
Laba (rugi) Operasional	(4.786)	(6.659)	1.873	-28,13%

Di tahun 2024, Rugi Operasional KB Bank tercatat sebesar minus Rp4,79 triliun, membaik sebesar Rp1,87 triliun atau turun sebesar 28,13% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat minus Rp6,66 triliun. Hal ini disebabkan oleh beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan-neto mengalami *improvement* sebesar Rp2.09 triliun atau 37,65% dibandingkan tahun 2023.

Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Keuntungan dari penjualan agunan yang diambil alih	(44)	(6)	(38)	668,73%
Keuntungan (Kerugian) dari penjualan aset tetap	(8)	(6)	(3)	47,02%
Lain-lain - neto	(66)	(117)	51	-43,47%
Pendapatan (beban) Non Operasional Lainnya - neto	(118)	(128)	10	-7,92%

Perseroan mencatatkan Pendapatan (beban) Non Operasional Lainnya - neto tahun 2024 sebesar minus Rp118 miliar atau naik sebesar 7,92% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat minus Rp128 miliar. Perbaikan ini terjadi karena berasal dari lain-lain neto sebesar Rp51 miliar.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Laba (Rugi) Operasional	(4.786)	(6.659)	(1.873)	(28.%)
Pendapatan (beban) non-operasional - neto	(118)	(128)	(10)	(8%)
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(4.904)	(6.787)	(1.833)	(28%)

Rugi sebelum pajak penghasilan sampai dengan 31 Desember 2024 tercatat sebesar minus Rp4,90 triliun, turun sebesar Rp1,83 triliun atau 28% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai minus Rp6,79 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh laba sebelum pajak membaik dari tahun lalu.

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

(dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kini	(3)	-	(3)	n.a
Tangguhan	(1.421)	732	(2.153)	-294,24%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan - neto	(1.424)	732	(2.156)	-294,67%

Bank mencatatkan penurunan Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan senilai minus Rp2,16 triliun menjadi minus Rp1,42 triliun pada tahun 2024. Adapun tahun sebelumnya Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan mencapai Rp732 miliar. Penurunan ini terjadi karena bank melakukan *assesment* atas rugi fiskal 5 (tahun) kedepan yang tidak terealisasi dengan menggunakan asumsi data RBB periode 2024-2029.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.329.138)	(6.034.077)	(295.061)	4,89%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non-pengendali	518	(21.626)	22.144	-102,40%
Rugi Tahun Berjalan	(6.328.620)	(6.055.703)	(272.917)	4,51%

Pada tahun 2024, KB Bank mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp6,33 triliun, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp272,92 miliar atau 4,51% dari tahun sebelumnya yang mencatat rugi sebesar Rp6,06 triliun. Penyebab utama kenaikan rugi bersih tahun berjalan tersebut adalah karena bank melakukan *assessment* atas rugi fiskal 5 (tahun) kedepan yang tidak terealisasi dengan menggunakan asumsi data RBB periode 2024-2029.

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(14.252)	8.640	(22.892)	-264,95%
Perubahan surplus revaluasi aset	213.072	(1.756)	214.828	-12233,94%
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.135	(1.900)	5.035	-265,00%

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(27.836)	6.330	(34.166)	-539,75%
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.124	(1.392)	7.516	-539,94%
Penghasilan komprehensif lain– neto	180.243	9.922	170.321	1716,60%

Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Yang dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk	(6.148.908)	(6.024.463)	(124.445)	2,07%
Yang dapat diatribusikan kepada Kepentingan non- pengendali	531	(21.318)	21.849	-102,49%
Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(6.148.377)	(6.045.781)	(102.596)	1,70%

Perseroan mencatatkan Jumlah Penghasilan (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan sebesar minus Rp6,15 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp102,60 miliar atau 1,70% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai minus Rp6,05 triliun. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp124 miliar.

Laba (Rugi) per Saham Dasar/Dilusian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(6.329.138)	(6.034.077)	(295.061)	4,89%
Rata-rata tertimbang jumlah saham dasar	-	98.277.584.070	(98.277.584.070)	-100,00%
Rugi per saham Dasar/dilusian (nilai penuh)	(34)	(61)	27	-44,26%

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(7.445.488)	(10.165.808)	2.720.320	-26,76%
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	276.851	(11.595.208)	11.872.059	-102,39%
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	7.778.066	9.663.331	(1.885.265)	-19,51%
Penurunan neto kas dan setara kas	609.429	(12.097.685)	12.707.114	-105,04%
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(326.679)	492.085	(818.764)	-166,39%
Kas dan setara kas awal tahun	5.953.951	17.559.551	(11.605.600)	-66,09%
Kas dan setara kas akhir tahun	6.236.701	5.953.951	282.750	4,75%

Pada akhir tahun buku 2024, saldo kas dan setara kas Bank tercatat sebesar Rp6,24 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp282,75 miliar atau 4,75% bila dibandingkan posisi awal tahun yang mencapai Rp5,95 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan dari Kas Neto dari aktivitas operasi dan investasi.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Perseroan per 31 Desember 2024 mencatatkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar minus Rp7,44 triliun, mengalami *improvement* sebesar Rp2,72 triliun atau turun 26,76% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar minus Rp10,17 triliun. Hal ini disebabkan oleh Penghimpunan dana pihak ketiga lebih baik dibandingkan periode 2023.

Arus Kas Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi hingga akhir tahun 2024 tercatat sebesar Rp276,85 miliar atau naik sebesar Rp11,87 triliun bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat minus Rp11,60 triliun. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan/pembayaran dari surat-surat berharga yang jatuh tempo pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.

Arus Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Sepanjang tahun 2024, KB Bank mencatatkan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan senilai Rp7,78 triliun, turun sebesar Rp1,89 triliun atau turun 19,51% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp9,66 triliun. Hal ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran dari surat berharga yang diterbitkan.



KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Kemampuan Membayar Utang

Kemampuan KB Bank dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang dinilai melalui sejumlah rasio keuangan, termasuk likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas. Dari sisi likuiditas, KB Bank mencatat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebesar 103,26% pada tahun 2024, menurun dibandingkan 113,18% pada tahun 2023. Sementara itu, dalam aspek solvabilitas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Bank mencapai 16,38%, melebihi batas minimum yang ditetapkan regulator sebesar 12,5%, yang mencerminkan ketahanan modal dalam menghadapi risiko kredit, pasar, dan operasional. Pada rasio rentabilitas, tercatat ROA -7,55%, ROE -154,60%, NIM 1,31%, dan BOPO 192,58%. ROA, NIM, dan BOPO mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara ROE justru mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Rentabilitas Bank pada tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	2024	2023	Pertumbuhan %
Imbal hasil aset (ROA)	-7,55%	-7,71%	0,16%
Imbal hasil ekuitas (ROE)	-154,60%	-61,38%	-93,22%
Marjin pendapatan bunga bersih (NIM)	1,31%	0,78%	0,53%
Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)	192,58%	223,28%	-30,66%

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-efek yang Diterbitkan

Kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi utangnya dapat diukur melalui peringkat surat utang atau obligasi yang diterbitkannya. Peringkat ini diberikan oleh lembaga pemeringkat seperti Pefindo untuk menilai tingkat kelayakan obligasi tersebut. Kualitas suatu obligasi sangat ditentukan oleh kapasitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang saat jatuh tempo serta membayarkan bunga atau kupon sesuai dengan perjanjian selama masa berlaku obligasi. Umumnya, obligasi yang diterbitkan tercatat di Bursa Efek Indonesia.

Kemampuan Membayar Utang dari Efek-efek yang Diterbitkan

Uraian	Peringkat		
	2024	2023	2022
Obligasi			
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2015	*	-	-
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017	*	idAA (Pefindo)	idA- (Pefindo)
Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	AAA(idn) Fitch Rating	AAA(idn) Fitch Rating	AAA(idn) Fitch Rating
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	AA(idn) Fitch Rating	AA(idn) Fitch Rating	idAA (Pefindo)
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	AA(idn) Fitch Rating	AA(idn) Fitch Rating	idAA (Pefindo)
Senior Unsecured Notes	BBB (stable) Fitch Ratings	-	-

Arti Peringkat

Lembaga Pemeringkat	Peringkat	Arti Peringkat
PEFINDO	idA+	Obligor dengan peringkat idA memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan dengan obligor Indonesia lainnya. Namun, Obligor agak lebih rentan terhadap pengaruh buruk dari perubahan keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan Obligor berperingkat lebih tinggi. Tanda Plus (+) menunjukkan bahwa peringkat tersebut relatif kuat di dalam kategori peringkat masing-masing.
	idA	Mengindikasikan bahwa kemampuan obligor untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjang atas efek utang tersebut, dibandingkan dengan Obligor lainnya di Indonesia, adalah kuat. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi, dibandingkan dengan efek utang yang peringkatnya lebih tinggi.
	idAA	Obligor dengan peringkat idAA berbeda dari obligor dengan peringkat tertinggi hanya pada tingkat yang kecil, dan memiliki kapasitas yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Jangka waktu komitmen keuangan relatif terhadap obligor Indonesia lainnya.
	idBBB	Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kapasitas yang memadai untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya dibandingkan dengan obligasi Indonesia lainnya. Namun, kondisi ekonomi yang merugikan atau keadaan yang berubah lebih mungkin menyebabkan melemahnya kapasitas Obligor untuk memenuhi komitmen keuangannya.
Fitch Rating	AAA	Peringkat Nasional jangka panjang 'AAA' merupakan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Fitch dalam skala peringkat Nasional. Peringkat ini diberikan kepada emiten dengan ekspektasi gagal bayar yang paling rendah dibandingkan emiten lainnya yang serupa.

Kolektibilitas Piutang

Kualitas kredit konsolidasian, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis, mata uang, dan kolektibilitas, disajikan dalam tabel berikut:

31 Desember 2024 (Konsolidasian)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah:						
Modal kerja	8.586.568	1.342.083	24.387	123.647	1.261.388	11.338.073
Investasi	8.951.563	649.760	107.337	95.849	790.115	10.594.624
Konsumsi	12.644.879	358.749	51.219	85.861	1.575.387	14.716.095
Program pemerintah	79.900	577	-	964	4.802	86.243
Sindikasi	3.534.954	-	-	-	-	3.534.954
Direksi dan karyawan	30.272	-	36	-	-	30.308
Bank lain	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Rupiah	33.828.136	2.351.169	182.979	306.321	3.631.692	40.300.297
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519.858)	(291.896)	(121.716)	(103.485)	(1.854.587)	(2.891.542)
Neto	33.308.278	2.059.273	61.263	202.836	1.777.105	37.408.755

31 Desember 2024 (Konsolidasian)

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Mata Uang Asing:						
Modal kerja	2.491.788	-	-	-	14.514	2.506.302
Investasi	688.171	130.584	-	-	-	818.755
Konsumsi	2.149	-	-	-	-	2.149
Sindikasi	3.899.983	-	-	-	-	3.899.983
Sub Jumlah Mata Uang Asing	7.082.091	130.584	-	-	14.514	7.227.189
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.040)	(32.873)	-	-	(3.742)	(100.655)
Neto	7.018.051	97.711	-	-	10.772	7.126.534
Jumlah	40.326.329	2.156.984	61.263	202.836	1.787.877	44.535.289
Komposisi	90,55%	4,84%	0,14%	0,46%	4,01%	100,00%

Kolektibilitas Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2023

31 Desember 2023 (Konsolidasian)

Keterangan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Rupiah:						
Modal kerja	12.700.942	2.778.896	86.298	27.551	1.385.015	16.978.702
Investasi	12.421.537	955.853	45.904	15.666	1.036.580	14.475.540
Konsumsi	10.407.855	444.975	76.048	117.965	1.699.974	12.746.817
Program pemerintah	98.757	1.035	-	1.306	4.044	105.142
Sindikasi	3.544	122	-	221	39	3.926
Direksi dan karyawan	76.516	-	-	-	2.152	78.668
Bank lain	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Rupiah	35.709.151	4.180.881	208.250	162.709	4.127.804	44.388.795
Cadangan kerugian penurunan nilai	(591.000)	(752.511)	(44.807)	(56.860)	(2.069.484)	(3.514.662)
Neto	35.118.151	3.428.370	163.443	105.849	2.058.320	40.874.133
Mata Uang Asing:						
Modal kerja	3.355.300	-	-	-	13.821	3.369.121
Investasi	1.658.515	-	-	-	-	1.658.515
Konsumsi	2.185	-	-	-	-	2.185
Sindikasi	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Mata Uang Asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)

Kolektibilitas Berdasarkan Mata Uang, Jenis dan Kolektibilitas Tahun 2023

31 Desember 2023 (Konsolidasian)

Keterangan	Lancar	Dalam Perhatian Khusus	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649
Jumlah	40.069.840	3.428.370	163.443	105.849	2.068.280	45.835.782
Komposisi	87,42%	7,48%	0,36%	0,23%	4,51%	100,00%



RASIO KEUANGAN

Berikut ini merupakan rasio keuangan KB Bank dan indikator penting lainnya untuk tahun buku 2023 hingga 2024.

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam Persentase, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Permodalan		
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit	17,22%	28,50%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko pasar	17,11%	28,37%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional	16,49%	27,17%
KPMM dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar, dan risiko operasional	16,38%	27,05%
Aset Tetap - neto terhadap Modal inti	91,39%	38,51%
Aset Produktif		
Aset produktif dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif	5,01%	6,27%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	3,00%	6,37%
Cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif	4,47%	4,80%
NPL *Gross*	9,06%	9,56%
NPL *Nett*	4,38%	4,87%
Profitabilitas		
ROA	-7,55%	-7,71%
ROE	-154,60%	-61,38%
NIM	1,31%	0,78%
BOPO	192,58%	223,28%
Cost to Income Ratio (CIR) (Rasio Biaya terhadap Pendapatan)	146,31%	170,20%
Rasio Laba (Rugi) terhadap pendapatan bunga	-116,03%	-124,56%
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah Aset	-7,62%	-7,18%
Rasio Laba (Rugi) terhadap jumlah Ekuitas	-79,49%	-42,92%
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Aset	90,42%	83,26%
Rasio Liabilitas terhadap jumlah Ekuitas	943,43%	497,49%
Likuiditas		
LDR	103,26%	113,18%
Kepatuhan		
Persentase pelanggaran BMPK		
Pihak terkait	-	-
Pihak tidak terkait	-	-
Persentase pelampauan BMPK		
Pihak terkait	-	-
Pihak tidak terkait*	7,64%	-
Giro Wajib Minimum (GWM):		
GWM Utama Rupiah		

Rasio-Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

(Dalam Persentase, Kecuali Dinyatakan Lain)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023
GWM Harian	8,70%	7,05%
GWM Rata-rata	8,74%	7,37%
Penyangga Likuiditas Makroprudensial d/h GWM Sekunder	28,82%	35,08%
GWM konvensional valuta asing	4,02%	4,02%
Posisi Devisa Neto (PDN)	2,46%	1,62%

*)Pada tanggal 31 Desember 2020 terdapat pelampauan BMPK terkait penjaminan kredit dalam rangka penerapan teknik Manajemen Risiko Kredit. Pelampauan BMPK ini merupakan dampak penurunan Modal Inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah diselesaikan sesuai Surat Bank No.04380/DIR/III/2021 tanggal 8 Maret 2022

*) Per 31 Desember 2019 terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dikarenakan adanya perubahan peraturan, dimana peraturan sebelumnya berdasarkan PBI No.7/3/PBI/2005 dan No.8/13/PBI/2008 telah diperbaharui dengan POJK NO.32/POJK.03/2018 tentang BMPK bagi Bank Umum. Pelampauan BMPK yang terjadi berkaitan dengan batas maksimum penjaminan kredit dalam rangka Teknik Manajemen Risiko Kredit (MRK). Per Maret 2020, pelampauan BMPK ini telah dapat diselesaikan.



SUKU BUNGA DASAR KREDIT

Sebagai bank umum yang beroperasi secara konvensional di Indonesia, KB Bank berkewajiban untuk melaporkan dan mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) dalam mata uang Rupiah. Kewajiban ini sesuai dengan Peraturan OJK (POJK) No. 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

Sementara pengungkapan SBDK merupakan langkah penting langkah penting untuk memperkuat implementasi GCG dan mendorong persaingan yang sehat, yang pada gilirannya menciptakan disiplin pasar yang lebih baik. Selain itu, pelaporan SBDK memberikan informasi yang jelas, memudahkan nasabah untuk memahami manfaat, biaya, dan risiko kredit yang ditawarkan, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan bijaksana dalam memilih produk kredit yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berikut adalah informasi perbandingan SBDK Bank untuk tahun 2024 dan 2023:

Uraian	Suku Bunga Dasar Kredit Rupiah Berdasarkan Segmen				
	Kredit Korporasi	Kredit Ritel	Kredit Mikro	KPR	Non KPR
2024					
Desember	8.52%	8.59%	11.20%	9.29%	9.74%
2023					
Desember	9.17%	9.31%	9.31%	9.31%	9.31%

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

KB Bank berkomitmen untuk menjaga keseimbangan struktur modal yang sehat guna mendukung kelangsungan usaha serta mengoptimalkan imbal hasil bagi pemegang saham. Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku sejak 16 Agustus 2007, KB Bank diwajibkan untuk mengalokasikan hingga 20% dari modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak dapat didistribusikan. Ketentuan eksternal terkait permodalan ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mendatang.

Dalam mengelola struktur permodalannya, KB Bank senantiasa menyesuaikan kebijakan berdasarkan dinamika kondisi ekonomi. Untuk menjaga keseimbangan modal, langkah-langkah yang dapat diambil antara lain menyesuaikan kebijakan dividen, memberikan imbalan modal kepada pemegang saham, atau menerbitkan saham baru.

Sepanjang periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, tidak terdapat perubahan dalam tujuan, kebijakan, maupun proses pengelolaan modal KB Bank. Kebijakan yang diterapkan tetap berfokus pada pemeliharaan struktur modal yang sehat agar dapat memastikan akses terhadap sumber pendanaan dengan biaya yang kompetitif.

Struktur Modal Perusahaan

KB Bank menetapkan komposisi struktur modal yang bertujuan untuk mencapai nilai optimal dan mendukung keberlanjutan usaha. Dalam upaya tersebut, KB Bank menerapkan struktur modal yang seimbang agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Berikut ini adalah komposisi struktur modal untuk tahun 2024 serta perbandingannya dengan tahun 2023:

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan KB Bank Tahun 2024-2023

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Komponen Modal	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
A. MODAL INTI (Tier 1)			7.847.606	9.813.056
1. Modal Inti Utama (CET 1)	3.410.320	5.401.050	7.847.606	9.813.056
1.1 Modal Disetor (Setelah dikurangi *Treasury Stock*)	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
1.2 Cadangan Tambahan Modal	(12.615.080)	(12.069.567)	(5.726.387)	(6.230.802)
1.2.1 Faktor Penambah	9.995.144	10.181.385	9.792.829	10.001.143
1.2.1.1 Pendapatan komprehensif lainnya	1.769.377	1.955.618	1.567.062	1.775.376
1.2.1.1.1 Selisih Lebih Penjabaran Laporan Keuangan	-	-		
1.2.1.1.2 Potensi keuntungan dari peningkatan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	-	138.653	9.696	171.483

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan KB Bank Tahun 2024-2023

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Komponen Modal				31 Desember 2024		31 Desember 2023	
				INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
		1.2.1.1.3	Saldo Surplus revaluasi aset tetap	1.769.377	1.816.965	1.557.366	1.603.893
	1.2.1.2	Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)		8.225.767	8.225.767	8.225.767	8.225.767
		1.2.1.2.1	Agio	8.225.767	8.225.767	8.225.767	8.225.767
		1.2.1.2.2	Cadangan umum	-	-		
.		1.2.1.2.3	Laba tahun - tahun lalu	-	-		
		1.2.1.2.4	Laba tahun berjalan	-	-		
		1.2.1.2.5	Dana setoran modal	-	-	-	-
		1.2.1.2.6	Lainnya	-	-		
1.2.2	Faktor Pengurang			(22.610.224)	(22.250.952)	(15.519.216)	(16.231.945)
	1.2.2.1	Pendapatan komprehensif lainnya		(28.478)	-		
		1.2.2.1.1	Selisih kurang penjabaran laporan keuangan	-	-		
		1.2.2.1.2	Potensi Kerugian dari penurunan nilai wajar aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual	(28.478)	-		
	1.2.2.2	Cadangan tambahan modal lainnya (*other disclosed reserves*)		(22.581.746)	(22.250.952)	(15.519.216)	(16.231.945)
		1.2.2.2.1	Disagio	-	-	-	-
		1.2.2.2.2	Rugi tahun - tahun lalu	(14.172.960)	(14.864.834)	(8.662.180)	(8.830.450)
		1.2.2.2.3	Rugi tahun berjalan	(7.378.803)	(6.329.151)	(5.510.779)	(6.034.384)
		1.2.2.2.4	Selisih kurang antara Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset produktif	(361.658)	(263.414)	(367.039)	(254.447)

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan KB Bank Tahun 2024-2023

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Komponen Modal					31 Desember 2024		31 Desember 2023	
					INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
			1.2.2.2.5	Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*	-	-		
			1.2.2.2.6	PPA aset non produktif yang wajib dibentuk	(668.325)	(793.553)	(979.218)	(1.112.664)
			1.2.2.2.7	Lainnya	-	-		
	1.3	Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan						
	1.4	Faktor Pengurang Modal Inti Utama 1)			(2.794.600)	(1.529.383)	(5.426.007)	(2.956.142)
		1.4.1	Perhitungan pajak tangguhan		(1.150.806)	(1.258.561)	(2.558.815)	(2.670.542)
		1.4.2	*Goodwill*		-	(189.482)	-	(189.482)
		1.4.3	Seluruh aset tidak berwujud lainnya		(80.652)	(81.325)	(95.241)	(96.103)
		1.4.4	Penyertaan yang diperhitungkan sebagai faktor pengurang		(1.178.142)	(15)	(2.206.951)	(15)
		1.4.5	Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi		-	-		
		1.4.6	Eksposur sekuritisasi		-	-		
		1.4.7	Faktor pengurang modal inti utama lainnya		(565.000)	-	(565.000)	-
			1.4.7.1	Penempatan dana pada instrumen AT I dan/atau *Tier* 2 pada bank lain	(565.000)	-	(565.000)	-
			1.4.7.2	Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat	-	-		
			1.4.7.3	Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) - *Non Delivery Versus Payment*	-	-		
			1.4.7.4	Eksposur di Perusahaan Anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (apabila ada)	-	-		
2.	Modal Inti Tambahan (AT - 1)							
	2.1	Instrumen yang memenuhi persyaratan AT-1						
	2.2	Agio/Disagio						
	2.3	Faktor Pengurang : Investasi pada instrumen AT1 dan *Tier* 2 pada bank lain						
		2.3.1	Penempatan dana pada instrumen AT I dan/atau *Tier* 2 pada bank lain					

Ringkasan Data Kuantitatif Pengelolaan Permodalan KB Bank Tahun 2024-2023

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Komponen Modal	31 Desember 2024		31 Desember 2023	
	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN	INDIVIDUAL	KONSOLIDASIAN
2.3.2 Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat				
B. MODAL PELENGKAP (*Tier* 2)	3.410.320	4.099.247	4.317.559	4.392.073
1. Instrumen modal dalam bentuk saham atau lainnya yang memenuhi persyaratan *Tier* 2	3.252.830	3.602.830	3.798.018	3.848.018
2. Agio/disagio	-	-		
3. Cadangan Umum PPA atas aset produktif yang wajib dibentuk (paling tinggi 1,25% ATMR Risiko Kredit)	157.490	496.417	519.541	544.055
4. Faktor pengurang modal pelengkap 1)				
4.1 *Sinking Fund*				
4.2 Investasi pada instrumen AT1 dan *Tier* 2 pada bank lain 2)				
4.3 Kepemilikan silang pada entitas lan yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah,atau hibah wasiat				
TOTAL MODAL	6.820.640	9.500.297	12.165.165	14.205.129
ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO				
ATMR RISIKO KREDIT 3)	39.598.647	45.189.096	42.683.771	48.289.880
ATMR RISIKO PASAR	268.195	168.195	197.195	197.195
ATMR RISIKO OPERASIONAL	1.771.508	1.987.358	2.098.314	2.344.395
TOTAL ATMR	41.638.350	47.444.649	44.979.280	50.831.470
RASIO KPMM SESUAI PROFIL RISIKO	9,00%	9,00%	10,00%	10,00%
RASIO KPMM				
Rasio CET 1 (%)	8,19%	11,38%	17,45%	19,31%
Rasio *Tier* 1 (%)	8,19%	11,38%	17,45%	19,31%
Rasio *Tier* 2 (%)	8,19%	8,64%	9,60%	8,64%
Rasio KPMM (%)	16,38%	20,02%	27,05%	27,95%
CET 1 UNTUK *BUFFER* (%)	2,19%	5,38%	11,45%	13,31%
PERSENTASE *BUFFER* YANG WAJIB DIPENUHI OLEH BANK (%)	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
Capital Conservation Buffer (%)	2,500%	2,500%	2,500%	2,500%
Countercyclical Buffer (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%
Capital Surcharge untuk bank sistemik (%)	0,000%	0,000%	0,000%	0,000%

Untuk memastikan keberlanjutan operasional, KB Bank memiliki tanggung jawab dalam mengelola permodalannya secara optimal. Pengelolaan ini tidak hanya didasarkan pada kewajiban Perseroan dalam memberikan imbal hasil bagi pemegang saham, tetapi juga untuk menciptakan nilai tambah serta manfaat bagi para pemangku kepentingan lainnya. Struktur permodalan yang diterapkan mencerminkan keseimbangan antara modal sendiri, yang terdiri dari ekuitas Perseroan, dengan modal eksternal yang meliputi liabilitas. Modal eksternal dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pinjaman perbankan, utang usaha, maupun bentuk pembiayaan lainnya, sedangkan ekuitas diperoleh melalui penempatan modal serta penghasilan komprehensif tahunan.

Dalam mengelola struktur permodalannya, Bank menerapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggunaan modal guna mendukung pertumbuhan bisnis, khususnya dalam pembiayaan baru dan investasi masa depan (*New Generation Banking System*, pengembangan outlet, dan lainnya).
2. Menyediakan pencadangan untuk kerugian kredit, yang bersumber dari pendapatan hasil upaya pemulihan (*turn-around*).
3. Mengelola ATMR dan *capital charges* melalui retaksasi jaminan, serta menyelesaikan kredit bermasalah dan aset yang diambil alih (AYDA).

IKATAN YANG MATERIAL TERKAIT INVESTASI BARANG MODAL

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 yang mengatur mengenai Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menetapkan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi tersebut mencapai atau melebihi 20% dari ekuitas Perusahaan Terbuka.

Sepanjang tahun 2024, Bank tidak memiliki ikatan yang material untuk investasi barang modal. Dengan demikian, informasi terkait hal tersebut tidak dapat disampaikan.



REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

Sepanjang tahun 2024, PT Bank KB Bukopin Tbk terus melaksanakan strategi investasi dalam barang modal guna meningkatkan kinerja serta menciptakan nilai tambah di masa mendatang. Berikut merupakan realisasi investasi barang modal Bank untuk tahun 2023 dan 2024:

Realisasi Investasi Barang Modal 2024-2023

(Dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Pertumbuhan	
			Rp	%
Tanah	-	8.175	(8.175)	-100,00%
Bangunan	2.054	5.561	(3.507)	-63,06%
Perabotan dan peralatan kantor	47.138	14.084	33.054	234,69%
Kendaraan bermotor	250	26.749	(26.499)	-99,07%
Prasarana bangunan	-	351	(351)	-100,00%
Aset dalam konstruksi	2.219	5.846	(3.627)	-62,04%
Jumlah Belanja Modal	51.661	60.766	(9.105)	-14,98%
Arus Kas Pembayaran untuk Belanja Modal	51.661	60.766	(9.105)	-14,98%

Hingga 31 Desember 2024, investasi barang modal yang direalisasikan oleh KB Bank menunjukkan penurunan, dari Rp60,77 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp51,66 miliar di tahun 2024.

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL AKUNTAN

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara akhir periode pelaporan 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal laporan akuntan pada 12 Maret 2025. Dengan demikian, informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

PROSPEK USAHA

Sebagaimana dikutip dari Laporan Bank Indonesia bertajuk "Sinergi Memperkuat Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional" menjelaskan bahwa, Dinamika dan arah perekonomian global pada tahun 2025-2026 dan lima tahun ke depan akan berimplikasi besar pada perekonomian Indonesia, dan karenanya perlu diantisipasi dengan respons bauran kebijakan ekonomi nasional yang optimal.

Setidaknya ada 5 (lima) aspek penting yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Pentingnya tetap menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan sebagai pertahanan pertama dan utama dalam menghadapi dinamika perekonomian dan keuangan global yang berubah cepat dan penuh ketidakpastian.
2. Perlunya terus meningkatkan sumber-sumber pertumbuhan dalam negeri, khususnya konsumsi dan investasi, dengan tetap mendorong ekspor melalui kerja sama perdagangan antarnegara.
3. Perlunya akselerasi kebijakan transformasi sektor riil untuk peningkatan daya saing dan produktivitas, baik modal, tenaga kerja, maupun inovasi dan efisiensi. Perbaikan iklim investasi untuk mampu bersaing dalam menarik masuknya PMA, kemampuan mendorong pertumbuhan sektor padat modal maupun padat karya, serta peningkatan keterampilan dan sertifikasi profesi tenaga kerja semakin penting.
4. Perlunya meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk sumber pembiayaan perekonomian nasional dan tetap menariknya arus modal asing baik dalam bentuk investasi portofolio maupun PMA.
5. Perlunya akselerasi digitalisasi baik dari sisi sistem pembayaran, sektor keuangan, maupun inovasi di berbagai transaksi ekonomi dan keuangan secara nasional dan antarnegara. Digitalisasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan semakin berkembangnya sektor jasa keuangan dan perantaraan maupun dengan meningkatnya efisiensi dan produktivitas ekonomi nasional.

Menyingkapi tantangan ke depan, KB Bank terus mendorong sinergi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak yang bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan tetap melakukan penguatan pada fungsi pengawasan melalui tata kelola yang terintegrasi. Peningkatan pengembangan bisnis dilakukan melalui konsep sinergi antara perusahaan induk dengan perusahaan anak dengan tema "Penguatan Sinergi dan Kolaborasi" yang diselaraskan dengan implementasi POJK 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah.

Terdapat 3 (tiga) area utama yang menjadi fokus penguatan Sinergi dan Kolaborasi antara lain *Delivery Channel, E-channel, IT* dan *Digital Ecosystem*, dengan konsep perspektif pengembangan sebagai berikut :

1. Sinergi *Delivery Channel*
   - Meningkatkan jumlah dan distribusi melalui penambahan titik Layanan Syariah Bank Umum (LSBU)
   - Peningkatan kompetensi SDM dalam menjalankan fungsi LSBU dan *cross selling* produk syariah oleh petugas Bank melalui skema refferal
   - Peningkatan kapasitas pelayanan di outlet LSBU
   - Kerjasama bisnis Mini ATM dengan bank
   - *Co-Location* melalui pola Type A : Relokasi penuh, Type B : Penempatan fungsi sales pada outlet bank dan Type C : LSBU konvensional
   - Melakukan kegiatan promosi dengan menempatkan tenaga marketing KB Bank Syariah pada outlet KB Bank untuk penjualan pembiayaan emas pada periode tertentu.
   - Penggunaan ex-*outlet* tutup dari KB Bank sebagai outlet baru dan relokasi dari KB Bank Syariah dalam konteks implementasi sinergi perbankan, sebagai contoh : penggunaan ex-KCU Banda Aceh dalam rangka implementasi qonun aceh, penggunaan ex-KCP Antapani dalam rangka relokasi KCU untuk efisiensi, dan rencana penggunaan ex-*outlet* tutup lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis anak Perusahaan disesuaikan dengan *cost benefit* analisisnya.
   - Pemanfaatan sebagian area Gedung KB Bank oleh Perusahaan Anak untuk dapat digunakan sebagai aktivitas penjualan produk-produk dan aktivitas bisnis lainnya.

2. Sinergi *E-Channel*
    - Pengkajian fitur pada *mobile* banking syariah yaitu M-BISA, atau pengembangan layanan perbankan digital syariah melalui sinergi dengan aplikasi Wokee / KB Star
    - Sinergi penggunaan jaringan pembayaran BI-FAST & QRIS melalui M-BISA
    - Menarik minat mahasiswa Muhammadiyah untuk menggunakan M-BISA
    - Kerja sama bisnis Mini ATM, PPOB dan pemanfaatan layanan *E-channel* Bank.
    - Penggunaan transaksi Tarik tunai KBBS pada ATM KB Bank dengan skema "on US"
3. Sinergi IT dan *Digital Ecosystem*
    - Pemanfaatan kapabilitas perusahaan induk terkait E-KYC untuk meningkatkan pengalaman nasabah
    - Penerapan prosedur *Know Your Customer* (KYC) untuk mendukung pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM melalui penggunaan aplikasi berlisensi Dow Jones
    - Mengkaji pemanfaatan KB Star untuk penjualan produk syariah.
4. Penguatan PT KB Bukopin Finance melalui konsolidasi Perusahaan
    - Saat ini, kapabilitas inti dari grup keuangan akan difokuskan pada pertumbuhan perusahaan induk, yaitu BBKP, sebagai prioritas utamanya.
    - Pada saat yang sama, KBBF diarahkan untuk melakukan perbaikan struktur keuangan perusahaan melalui *capital reduction*, hal ini diperlukan untuk menciptakan landasan strategis dan finansial guna menarik calon investor yang memiliki pengalaman dalam menjalankan bisnis perusahaan pembiayaan lebih baik.



PENCAPAIAN TARGET DENGAN REALISASI SERTA PROYEKSI SATU TAHUN KE DEPAN

Memasuki tahun 2024, Bank telah merumuskan serta menetapkan berbagai target yang ingin dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Penyusunan target tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika yang terjadi, baik dalam sektor perekonomian maupun industri perbankan di Indonesia. Berikut adalah pencapaian Perseroan atas target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 serta proyeksi untuk tahun 2025:

Pencapaian Realisasi terhadap Target 2024

(Dalam jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Realisasi 2024	RBB 2024	Pencapaian
Posisi Keuangan			
Total Aset	75.458.349	79.568.054	94,83%
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.594.828	3.329.691	47,90%
Surat Berharga	21.107.351	20.249.586	104,24%
Kredit yang diberikan	41.456.215	43.228.510	95,90%
Komponen Aset lainnya	11.299.955	12.760.267	88,56%
Total Liabilitas	57.894.471	68.376.894	84,67%
Total Simpanan Nasabah	40.147.845	43.511.886	92,27%
Surat Berharga yang diterbitkan	5.790.158	5.540.458	104,51%
Komponen Liabilitas lainnya	11.956.468	19.324.550	61,87%
Total Ekuitas	7.563.879	11.191.160	67,59%
Modal disetor dan Tambahan Modal Disetor	27.225.767	27.699.744	98,29%
Akumulasi Laba/Rugi	(21.417.116)	(18.165.306)	84,82%
Komponen Ekuitas lainnya	1.755.228	1.656.721	105,95%
Laba/Rugi			
Pendapatan dan Beban Bunga			
Pendapatan bunga	4.877.943	4.685.562	104,11%
Beban bunga	(3.969.035)	(3.750.398)	94,49%
Pendapatan bunga - neto	908.908	935.164	97,19%
Pendapatan dan Beban Operasional Selain Bunga			
Pendapatan Operasional Selain Bunga	318.964	643.881	49,54%
Beban Operasional Selain Bunga	(1.796.458)	(2.129.776)	118,55%
- Beban Umum dan Administrasi	(1.088.119)	(1.196.547)	109,96%
- Beban Tenaga Kerja	(708.339)	(933.229)	131,75%
Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga - neto	(1.477.494)	(1.485.895)	100,57%
(Beban) Pemulihan CKPN	(4.247.876)	(3.909.321)	92,03%
Laba (Rugi) Operasional	(4.816.462)	(4.460.052)	92,60%
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(1.145.292)	(658.341)	57,48%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	(5.961.753)	(5.118.393)	85,85%
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan	(1.417.050)	1.126.046	-79,46%
Laba Bersih	(7.378.803)	(3.992.346)	54,11%

Proyeksi 2025 terhadap Realisasi 2024

(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali persentase)

Uraian	Realisasi 2024	RBB 2025
Posisi Keuangan		
Total Aset	75.458.349	79.859.254
Kredit yang diberikan	41.456.215	46.531.650
Total Simpanan Nasabah	40.147.845	44.879.813
Total Ekuitas	7.563.879	8.066.295
Laba/Rugi		
Pendapatan bunga - neto	4.877.943	5.163.371
Pendapatan Operasional Selain Bunga	318.964	484.771
Beban Operasional Selain Bunga	(1.796.458)	(2.028.000)
(Beban) Pemulihan CKPN	(4.247.876)	(1.054.096)
Pendapatan (Beban) Non Operasional - Neto	(1.145.292)	1.282.950
Laba Bersih	(7.378.803)	205.695
Rasio Keuangan Pokok		
NIM	1,31%	2,19%
CAR	16,38%	20,46%
NPL-Net	4,38%	4,02%



ASPEK PEMASARAN

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan sangat bergantung pada aspek pemasaran sebagai faktor utama. Aspek ini bertujuan untuk memetakan pangsa pasar guna mendukung pertumbuhan bisnis, serta menganalisis kebutuhan pasar agar strategi pemasaran yang diterapkan selaras dengan permintaan yang ada. Berikut adalah strategi pemasaran yang dijalankan oleh KB Bank sepanjang tahun 2024:

Strategi Manajemen

Berdasarkan kondisi terkini baik dari sisi internal maupun eksternal, dan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, KB Bank telah mengidentifikasi tahapan dalam mencapai targetnya adalah melakukan perbaikan dan pembaharuan fundamental Bank, mempersiapkan *catch-up strategy* dengan menerapkan market best practice dan meningkatkan kompetensi bank melalui inovasi.

Untuk mendukung pertumbuhan yang telah ditargetkan tersebut, terdapat 4 (empat) pilar yang perlu dicapai, yaitu:

1. *Boost Sales Performance*
   Sinergi antar segmen bisnis sangat diperlukan untuk dapat menciptakan ekosistem bisnis yang baik bagi Bank. Dengan memperdalam bisnis *wholesale* untuk memperkuat *positioning* di pasar dan bertindak sebagai *anchor* yang memberikan peluang masuknya bisnis MSME & Retail. Selain itu Bank akan melakukan peningkatan pada produk, proses, dan *manpower* serta bekerja sama dengan afiliasi KBFG dan *subsidiary* sehingga bisnis bank dapat bertumbuh secara berkelanjutan.
2. *Innovation*
   Inovasi yang dilakukan bank harus sejalan dengan arah strategi bisnis sehingga dapat memberikan *value added* bagi nasabah namun juga sebagai langkah efisiensi bagi Bank sehingga proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Inovasi yang dilakukan juga bertujuan untuk efisiensi biaya dengan melakukan simplifikasi dan sentralisasi, mengurangi proses yang manual, strategi optimalisasi *manpower* dan outlet.
3. Penguatan Kualitas Aset
   Untuk mencegah penurunan kualitas kredit dilakukan melalui penguatan manajemen DPD, Bank juga terus meningkatkan kualitas aset melalui skema Sukuk dan ABS dalam penjualan AYDA serta terus mengoptimalkan aktivitas *collection* di semua segmen. Percepatan penjualan AYDA dilakukan dengan sosialisasi program incentive untuk penjualan AYDA dengan skema yang menarik bagi karyawan yang berhasil menjual AYDA yang telah disosialisasikan melalui saluran informasi internal KB Bank.
   Bank juga telah memperkuat fungsi *Special Asset Management* untuk pengoptimalan *collection* dan penyelesaian *bad bank* yang tentunya menghindari opsi penyelesaian yang menimbulkan beban bagi Bank. Selain itu, Bank akan melakukan restrukturisasi secara berkala untuk mencegah NPL baru dan dampaknya pada permodalan Bank.
   Masih dalam rangka penguatan kualitas aset, bank terus melakukan peningkatan proses kredit menjadi lebih tersentralisasi dan tersistem yang salah satunya diimplementasikan melalui LOAS (*Loan Origination Application System*).
4. *Advance IT and Digital*
   Penguatan *positioning* digital di pasar dilakukan dengan transformasi teknologi informasi dan digital melalui SHINE serta peluncuran *digital apps* yaitu KBStar. Bank akan memfokuskan pengembangan aplikasi guna membentuk ekosistem digital yang bertujuan untuk memperluas kerja sama, memaksimalkan penjualan dan dapat memenuhi kebutuhan nasabah. Selain itu Bank akan melakukan *rebranding* melalui perubahan merek dan logo yang bertujuan untuk meningkatkan reputasi bank dan sebagai upaya dalam memperkuat kepercayaan nasabah.

Pangsa Pasar

KB Bank terus berupaya untuk meningkatkan daya saing terhadap *peer group* dalam menghadapi persaingan di segala aspek terutama dari kompetensi. Perubahan dinamika bisnis bank di Industri Perbankan mempengaruhi *peer group* KB Bank, maka Bank melakukan evaluasi kembali terhadap peer group berdasarkan *ranking* perbankan pada aspek; kinerja keuangan (modal inti, Aset, DPK, KYD), persebaran jumlah kantor cabang di setiap provinsi, kesamaan kriteria bisnis bank, dan berdasarkan kedekatan matriks penetrasi pasar. Persaingan usaha tersebut antara lain dapat dilihat berdasarkan jumlah Aset yang dimiliki, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun, jumlah Kredit Yang Diberikan (KYD), Pendapatan Bersih Bank *(Net Income)* dan rasio NPL Bank.

Pangsa Pasar KB Bank di Industri Perbankan Indonesia

(dalam triliun Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan		31 Desember 2024	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jumlah Aset	Industri Perbankan	12.461	11.766	11.113
	KB Bank	83	84	90
	Pangsa Pasar	0,67%	0,72%	0,81%
Jumlah DPK	Industri Perbankan	8.837	8.458	8.154
	KB Bank	47	45	52
	Pangsa Pasar	0,53%	0,53%	0,64%
Jumlah KYD	Industri Perbankan	7.943	7.187	6.498
	KB Bank	48	49	51
	Pangsa Pasar	0,60%	0,69%	0,78%



KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Dasar Kebijakan Pembagian Dividen

Mengacu pada ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank terkait Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen, kebijakan dividen yang diterapkan disesuaikan dengan kemampuan Bank dan ditetapkan melalui keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kebijakan ini ditentukan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan, tingkat kesehatan keuangan, serta regulasi terkait permodalan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor perbankan. Pembagian dividen juga bergantung pada kinerja serta kondisi keuangan KB Bank.

Pembagian dan Pembayaran Dividen 3 Tahun Terakhir

Pembagian dan Pembayaran Dividen 3 Tahun Terakhir

Uraian	2024	2023	2022
Tahun Buku	2023	2022	2021
Tanggal Pengumuman	NIHIL		
Tanggal Pembayaran			
Kebijakan Pembagian Dividen (%)			
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp)			
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar)			
Rasio Pembagian Dividen (%)			

INFORMASI TENTANG PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada 20 April 2005, sebagaimana tercantum dalam akta No. 26 yang dibuat oleh Notaris Lindasari Bachroem, S.H., pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi yang akan dilakukan dalam tiga tahap. Opsi saham ini diberikan kepada direksi serta karyawan pada jabatan tertentu yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Jumlah saham yang diterbitkan dalam program opsi saham dari tahap pertama hingga tahap ketiga ditetapkan maksimal 5% dari modal disetor Bank dalam kurun waktu tiga tahun, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham lama. Pemberian opsi saham tahap pertama dilakukan bersamaan dengan penawaran umum perdana (IPO). Hingga 6 Juli 2013, yang merupakan batas akhir pelaksanaan eksekusi, terdapat opsi saham yang tidak dieksekusi karena melewati periode pelaksanaannya. Oleh karena itu, cadangan opsi saham yang telah gugur senilai Rp8.599 juta telah dicatat sebagai tambahan modal disetor.



INFORMASI TENTANG REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Laporan Realisasi Dana Hasil Penawaran Umum

Jenis Penawaran Terbatas	Tanggal Efektif	Jumlah Hasil Penawaran Terbatas	Biaya Penawaran Terbatas
Penawaran Umum Terbatas VI	8 November 2021	7.042.857.796.800	4.252.382.010
Penawaran Umum Terbatas VII	5 Mei 2023	11.999.999.969.200	60.661.014.127

Di tahun 2021 Bank melaksanakan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas VI ("PUT VI") yang memperoleh Surat Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 8 November 2021, dari aksi korporasi tersebut Bank berhasil menghimpun dana sebesar Rp7.042.857.796.800,- sebelum dikurangi biaya emisi PUT VI sebesar Rp4.252.382.010,- sehingga dana bersih yang diterima oleh Bank adalah sebesar Rp7.038.605.414.790,- yang digunakan 16% untuk investasi dalam kaitannya untuk pengembangan di bidang IT dan 84% untuk ekspansi kredit baru berkualitas baik yang akan difokuskan pada segmen ritel dan link bisnis UKM, Komersial, dan Indonesia-Korea Business Link. Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, total sisa dana hasil PUT VI masih tersisa sebanyak Rp69.838.222.207,-.

Kemudian di tahun 2023 Bank melaksanakan aksi korporasi berupa Penawaran Umum Terbatas VII ("PUT VII") yang memperoleh Surat Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 5 Mei 2023, dari aksi korporasi tersebut Bank berhasil menghimpun dana sebesar Rp11.999.999.969.200,- sebelum dikurangi biaya emisi PUT VII sebesar Rp60.661.014.127,- sehingga dana bersih yang diterima oleh Bank adalah sebesar Rp11.939.338.955.073,- yang digunakan untuk tambahan investasi pada Perusahaan Anak serta digunakan untuk melakukan ekspansi kredit baru berkualitas baik, yang akan difokuskan pada segmen ritel, UKM, *wholesale*, dan Indonesia-Korea *business* link. Sampai dengan posisi 31 Desember 2024, total sisa dana hasil PUT VII masih tersisa sebanyak Rp18.000.000.000,-.



Hasil Bersih	Modal Kerja Kegiatan Usaha Pembiayaan Bank	Total	Sisa Dana Hasil Penawaran Terbatas
7.038.605.414.790	7.038.605.414.790	7.038.605.414.790	69.838.222.207
11.939.338.955.073	11.939.338.955.073	11.939.338.955.073	18.000.000.000

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN USAHA, AKUISISI, DAN/ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Informasi Material Mengenai Investasi

Uraian	Tanggal Jatuh Tempo	Peringkat 31 Desember 2024
Obligasi II KB Finansia Multi Finance Tahun 2023 Seri B	27 Juni 2026	AAA
Sukuk Wakalah BI-Al Istitsmar Jk. Panjang yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022	28 September 2037	BBB-
KIK EBA Bank Bukopin Tahun 2019	4 September 2026	AAA
IDR-*Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond* IDMB United Pte Ltd	21 Juni 2027	A+
IDR-*Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond* SMMK United Pte Ltd	21 Juni 2030	A+
IDR-*Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond* TLDC United Pte Ltd	28 Maret 2029	A+
Obligasi Pemerintah – Rupiah	15 April 2040	Tanpa Peringkat
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	15 April 2043	Tanpa Peringkat

Informasi Material Mengenai Ekspansi

Di tahun 2024, Bank tidak melakukan ekspansi yang bersifat material, sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

Informasi Material Mengenai Divestasi

Di tahun 2024, Bank tidak melakukan divestasi yang bersifat material, sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

Informasi Material Mengenai Penggabungan/Peleburan Usaha

Di tahun 2024, Bank tidak melakukan penggabungan/peleburan usaha yang bersifat material, sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

Informasi Material Mengenai Akuisisi

Di tahun 2024, Bank tidak melakukan akuisisi yang bersifat material, sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

Investasi Material Mengenai Restrukturisasi Utang/Modal

Di tahun 2024, Bank tidak melakukan restrukturisasi utang/modal yang bersifat material, sehingga informasi tersebut tidak dapat disampaikan.

INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI/PIHAK BERELASI

Transaksi Benturan Kepentingan dan/ atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Benturan Kepentingan terjadi ketika terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama, yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Sementara itu, Transaksi Afiliasi merujuk pada transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan atau Entitas Anak dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi, baik dengan Perusahaan itu sendiri maupun dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama Perusahaan.

Transaksi Pihak Berelasi

Bank dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi. Dalam laporan keuangan konsolidasian ini, istilah pihak berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.
2. Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
   a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
   b. Suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d. Suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca-kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i); atau
   g. Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka (i) (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
   h. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Nama Pihak Bertransaksi, Sifat Hubungan Afiliasi, Sifat Transaksi, serta Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, di mana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak-pihak berelasi dan sifat hubungannya dengan Bank diuraikan sebagai berikut:

Sifat dari hubungan	Pihak berelasi
Pemegang saham pengendali	KB Kookmin Bank Co., Ltd.
Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu pemegang saham utama Bank	PT Haka Sarana Investama
	Kopelindo Infrastruktur Indonesia
	PT Bosowa Berlian Motor
	PT Bosowa Amal Taksi
	PT Mallomo
	PT Bosowa Utama
	PT Makassar Capital
	PT Bosowa Tambang Indonesia
	PT KB Finansial Multi Finance
	PT Sunindo KB Finance
	PT Kurnia Oryza Abadi
	PT Dalle Mineral Papua
	PT KB Valbury Sekuritas
Pihak berelasi	-
Manajemen kunci yang sama	Dinasti Batubara Indonesia
	PT Gerin Surya Gemilang
Dana pensiun Bank	Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Manajemen dan karyawan kunci	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2024-2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023
Aset		
Giro pada Bank lain		
KB Kookmin Bank	10.585	6.377
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah-bruto		
PT KB Finansia Multi Finance	249.989	499.791
PT Haka Sarana Investama	0	0
PT Sunindo KB Finance	59.850	119.988
PT Dalle Mineral Papua	0	0
Dinasti Batubara Indonesia	0	0
PT Bosowa Amal Taksi	0	0
PT Bosowa Utama	0	0
PT Mallomo	0	0
PT Bosowa Berlian Motor	0	0
Kopelindo Infrastruktur Indonesia	0	0
PT Makassar Capital	0	0
PT Kurnia Oryza Abadi	0	0
PT Gerin Surya Gemilang	0	0

Realisasi Transaksi Pihak Berelasi Tahun 2024-2023

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023
PT Bosowa Tambang Indonesia	0	0
PT Merpati Wahana Taksi	0	0
PT Karya Ratu Mulia	0	0
PT Legalino Lines	0	0
PT Oto Rental Nusantara	0	0
PT Anisbi Nunggal Bhakti	0	0
PT Bantimurung Indah	0	0
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	30.144	21.226
Total Aset untuk pihak berelasi	350.568	647.023
Persentase terhadap total aset	0,42%	0,77%
Liabilitas		
Simpanan dari Bank Lain	2.710.649	7.699.413
Pinjaman yang diterima	6.557.175	6.544.886
Deposito Berjangka	42.412	40.311
Giro	3.203	9.094
Tabungan	45.260	18.491
Surat berharga yang diterbitkan	0	0
Imbalan pascakerja	0	0
Dana Pensiun Bank KB Bukopin	0	61.700
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	28.211	0
Total Liabilitas untuk pihak berelasi	9.386.910	14.373.895
Persentase terhadap total Liabilitas	12,50%	20,48%
Pendapatan Bunga dan Syariah dari pihak berelasi	24.469	22.592
Persentase terhadap bunga dan Syariah	0,45%	0,46%
Pendapatan operasional lainnya		
Pendapatan dan komisi lainnya dari pihak berelasi	0	0
Persentase terhadap pendapatan operasional lainnya	0,00%	0,00%
Beban bunga dan Syariah dari pihak berelasi	664	899
Persentase terhadap beban bunga dan Syariah	0,02%	0,02%
Beban operasional lainnya		
Gaji dan tunjangan karyawan, pengurus dan pejabat eksekutif	58.740	67.460
Persentase terhadap operasional lainnya	2,90%	2,96%

Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

KB Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi secara substansial dengan persyaratan normal seperti yang dilakukan dengan pihak-pihak tidak berelasi dan diperlakukan sebagai transaksi yang sesuai dengan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi.

KB Bank melakukan transaksi dengan pihak berelasi berdasarkan harga pasar. Untuk transaksi antara Perseroan dengan BUMN diperlakukan sebagai transaksi dengan pihak yang berelasi sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi

Pernyataan Direksi Terkait Prinsip Transaksi yang Wajar

Direksi berkomitmen memegang prinsip *arm's length principle* (ALP) di mana merupakan prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa sama atau sebanding dengan kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding, maka harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harus sama dengan atau berada dalam rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang tidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadi pembanding. Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value*/FMV).

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Memenuhi Prinsip Transaksi yang Wajar

Dewan Komisaris bersama dengan Komite *Audit* berkomitmen memegang prinsip *arm's length principle* (ALP). Mekanisme reviu KB Bank atas transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi dilakukan melalui proses audit khususnya *audit* yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, dimana mekanisme ini tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Pada prinsipnya, berdasarkan pada norma bahwa harga atau laba atas transaksi yang dilakukan dengan pihak afiliasi ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut dapat mencerminkan harga pasar yang wajar (*Fair Market Value*/FMV).

Sepanjang tahun 2024, Bank tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi dengan pihak berelasi serta tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Mirawati Sensi Idris (Moore Global). Seluruh transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP PERUSAHAAN

KB Bank berkomitmen untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, KB Bank selalu memperhatikan setiap perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang dapat diimplementasikan dalam kegiatan usahanya. Berikut adalah perubahan-perubahan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perusahaan pada tahun 2024:

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan Perundang-undangan	Pokok Perubahan	Dampak Bagi Perusahaan	Upaya Mitigasi
1	POJK Nomor 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka	1. Penambahan kewajiban penyampaian laporan aktivitas menjaminkan saham kepada OJK. 2. Perubahan persentasi kewajiban penyampaian laporan perubahan kepemilikan hak suara atas saham. 3. Perubahan waktu Penyampaian laporan kepemilikan saham.	Berdampak kuantitatif bagi pemegang saham dan tidak berdampak signifikan bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi kepada *stakeholder*. 2. Melakukan penyesuaian Kebijakan Internal tentang pelaporan kepemilikan saham.
2	POJK Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum	1. Bank Umum non Sistemik wajib menyampaikan Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*).	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Membentuk TFT dalam perancangan Rencana Aksi Pemulihan. 2. Pembuatan Kebijakan 3. Penyampaian Rencana Aksi Pemulihan ke OJK dan LPS tepat waktu
3	PLPS Nomor 1 Tahun 2024 tentang Premi Program Restrukturisasi Perbankan	1. Kewajiban pembayaran Premi PRP (Program Restrukturisasi Perbankan) dibayarkan 2 (dua) kali dalam setahun.	Berdampak secara kuantitatif bagi perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait. 2. Melakukan Pembayaran Premi PRP (Program Restrukturisasi Perbankan) sesuai ketentuan.
4	PADG Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota tentang Pelaksanaan Kebijakan Insentif Makroprudensial	1. Penambahan sektor tertentu yang diberikan KLM dari Bank Indonesia kepada Bank. 2. Perubahan persentase KLM pada sektor tertentu.	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait. 2. Melakukan penerapan insentif KLM dalam perhitungan GWM
5	PLPS Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Resolusi bagi Bank Umum	1. Mewajibkan Bank non sistemik untuk menyusun dan menyampaikan Rencana Resolusi kepada LPS.	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Membentuk TFT dalam perancangan Rencana Resolusi. 2. Penyampaian Rencana Resolusi ke LPS tepat waktu

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan Perundang-undangan	Pokok Perubahan	Dampak Bagi Perusahaan	Upaya Mitigasi
6	POJK Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank	Mewajibkan perusahaan untuk: 1. Memiliki unit kerja proses pelaporan keuangan yang berintegritas untuk memastikan kebenaran, keakuratan, serta transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan. 2. Membentuk unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam informasi keuangan dan/atau laporan keuangan bank.	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi terhadap peraturan ini. 2. Menyesuaikan kembali ketentuan internal Bank terkait pengendalian internal atas pelaporan keuangan. 3. Pembuatan Unit fungsi ICOFR 4. Melakukan Pelaporan tepat waktu
7	POJK Nomor 19 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2015 Tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* bagi Bank Umum	Menetapkan aset yang masuk kedalam HQLA	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait. 2. Melakukan penyesuaian Perhitungan LCR sesuai dengan ketentuan terbaru.
8	POJK Nomor 20 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum	Seluruh Bank wajib untuk melakukan pemantauan pemenuhan NSFR, menyampaikan laporan perhitungan NSFR, dan mempublikasikan Laporan NSFR, baik secara individu maupun konsolidasi	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi kepada unit kerja terkait. 2. Melakukan penyesuaian Perhitungan NSFR sesuai dengan ketentuan terbaru
9	POJK Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan	1. Bank dapat melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan lain yang mendukung industri perbankan. 2. Bank Umum dapat Menerima pengalihan piutang. 3. Bank wajib menyesuaikan Kebijakan dan prosedur terkait melakukan dan/atau menerima pengalihan piutang. 4. Bank wajib memiliki Kebijakan dan prosedur terkait pengelolaan risiko layanan garansi/jaminan. Kewajiban untuk memiliki kebijakan dan prosedur dalam penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam hal Bank memanfaatkan penggunaan tanda tangan elektronik.	Berdampak secara kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi dan menetapkan *Department in Charge* yang akan menjalankan kewajiban POJK ini. 2. Melakukan penyesuaian beberapa kebijakan internal

Tabel Perubahan Peraturan Perundang-undangan

No	Peraturan Perundang-undangan	Pokok Perubahan	Dampak Bagi Perusahaan	Upaya Mitigasi
10	POJK Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Informasi Rekam Jejak Pelaku Melalui Sistem Informasi Pelaku di Sektor Jasa Keuangan	1. POJK ini mengatur mengenai Sistem Informasi "Si Pelaku" yang memuat Rekam Jejak pelaku (sebagaimana yang diatur dalam POJK ini), yang dapat di akses/digunakan oleh LJK dan pihak yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. 2. Sistem "Si Pelaku" tidak wajib bagi Bank, namun jika Bank akan menggunakan sistem ini maka Bank wajib untuk menunjuk pegawai / pejabatnya sebagai "Pemohon" dan "Verifikator" yang akan mewakili Bank dalam mengakses sistem dan Bank diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan kebijakan Prosedur terkait SIPELAKU.	Berdampak secara kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Melakukan sosialisasi dan menetapkan *Department in Charge* yang akan menjalankan kewajiban POJK ini. 2. Pembuatan Kebijakan internal 3. Mengajukan User Akses Ke OJK 4. Melakukan tata Kelola data SIPELAKU sesuai ketentuan.
11	POJK Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	PSP dan/atau PSPT yang memenuhi kriteria konglomerasi keuangan sebagaimana yang diatur dalam POJK ini, wajib membentuk PIKK (Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan), dan wajib menyampaikan kepada OJK paling lama 6 (enam) bulan setelah memenuhi kondisi sebagai konglomerasi keuangan.	Berdampak secara kualitatif dan kuantitatif bagi Perusahaan.	1. Berkoordinasi dengan PSP dan PSPT terhadap pembentuk PIKK. 2. Pembentukan PIK maksimal 6 (enam) bulan bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku.



PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Sebagai bentuk komitmen terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, KB Bank senantiasa memantau setiap perubahan regulasi untuk diterapkan dalam kegiatan usahanya. Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan kebijakan akuntansi dan pengungkapannya.

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS *Accounting Standards*, standar akuntansi lokal, dan standar akuntansi syariah;
- Amendemen PSAK 201: “Penyajian Laporan Keuangan” terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 116: “Sewa” terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 terkait “Pengaturan Pembiayaan Pemasok”; dan
- Amandemen PSAK 409: “Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah” dan PSAK 401: “Penyajian Laporan Keuangan Syariah”.

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Berikut disajikan proyeksi komitmen dan kontinjensi untuk tahun 2024-2026.

Proyeksi Komitmen dan Kontijensi Tahun 2024-2026

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pos-pos Keuangan Pokok	Realisasi	Proyeksi						
	Sep 2023	Des 2023	Mar 2024	Jun 2024	Sep 2024	Des 2024	Des 2025	Des 2026
Tagihan komitmen								
Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	419.133	595.901	1.999.330	2.006.779	2.014.228	625.696	656.981	689.830
Kewajiban komitmen								
Letter of Credit	226.552	88.205	21.810	22.913	24.015	92.615	97.246	102.108
Kelonggaran Tarik pada Debitur	5.240.160	4.822.935	4.128.899	4.189.185	4.249.472	5.068.546	5.321.750	5.587.614
Posisi penjualan spot dan derivatif	2.304.362	971.552	4.667.268	4.679.412	4.691.557	1.020.129	1.071.136	1.124.692
Kewajiban Kontinjensi								
Bank Garansi	831.843	751.120	684.119	693.508	702.897	788.676	828.110	869.515
Tagihan Kontinjen								
Pendapatan Bunga Tertunggak	4.453.830	4.038.667	4.707.702	4.556.252	4.404.802	3.432.867	3.226.895	2.904.205

Berdasarkan Pihak

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Komitmen		
Tagihan Komitmen		
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	808.182	595.903
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(4.282.285)	(4.822.935)

Berdasarkan Pihak

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
SKBDN yang masih berjalan	-	-
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(90.095)	(88.205)
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(1.621.857)	(971.552)
Jumlah Liabilitas Komitmen	**(5.994.237)**	**(5.882.692)**
Jumlah Komitmen - neto	**(5.186.055)**	**(5.286.789)**
Kontinjensi		
Tagihan Kontinjensi		
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.123.131	4.038.667
Liabilitas Kontinjensi		
Bank Garansi		
Pihak berelasi	-	-
Pihak ketiga	(582.778)	(1.337.709)
Lainnya	-	-
Jumlah Liabilitas Kontinjensi	**(582.778)**	**(1.337.709)**
Jumlah Kontinjensi - neto	**4.540.353**	**2.700.958**
Jumlah Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - neto	**(645.702)**	**(2.585.831)**



DERIVATIF DAN FASILITAS LINDUNG NILAI

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2024 terdapat tagihan dan liabilitas derivatif dengan rincian transaksi sebagai berikut:

Transaksi Derivatif atas *Swap* Mata Uang Asing

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pihak	31 Desember 2024				31 Desember 2023			
	Nilai Kontrak	Nilai wajar	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif	Nilai Kontrak	Nilai wajar	Tagihan Derivatif	Liabilitas Derivatif
Pihak Ketiga								
Transaksi *Swap* mata uang asing :								
Dolar Amerika Serikat	2.414.892	12.054	(3.641)	2.389	1.543.614	2.389	3.040	(808)
Yen Jepang	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	2.414.892	12.054	(3.641)	2.389	1.543.614	2.389	3.040	(808)

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

Pengukuran tingkat kesehatan perusahaan yang dilakukan PT Bank KB Bukopin Tbk berpedoman pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko *(Risk-based bank rating)* yang mencakup empat faktor yaitu:

1. Profil Risiko;
2. *Good Corporate Governance* (GCG);
3. Rentabilitas *(Earnings)*;
4. Permodalan *(Capital)*.

Dari hasil *self assessment* profil risiko triwulanan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Desember 2024, risiko Bank secara keseluruhan berada pada tingkat risiko PK-2.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Hal-hal yang Berpotensi Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Bank pada Tahun Buku Terakhir

Manajemen KB Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

Assessment Manajemen atas Hal-Hal yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha

Manajemen KB Bank telah melakukan penilaian atas kemampuan Bank untuk melanjutkan kelangsungan usahanya dan berkeyakinan bahwa Bank memiliki sumber daya untuk melanjutkan usahanya di masa mendatang. Selain itu, manajemen Bank tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat menimbulkan keraguan yang signifikan terhadap kemampuan Bank untuk melanjutkan usahanya.

Asumsi yang Digunakan Manajemen dalam Melakukan *Assessment*

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan manajemen dalam melakukan asesmen terhadap kelangsungan usaha meliputi, kinerja Keuangan, likuiditas, solvabilitas, masalah Internal, dan perkara Hukum. Terkait dampak geopolitik perang Rusia-Ukraina, situasi yang memanas di Timur Tengah, hingga perang dagang negara-negara besar, manajemen akan terus memantau hal ini dan mengatasi risiko dan ketidakpastian terkait hal ini di masa mendatang. Hal tersebut meliputi berbagai aspek sebagai berikut:

- Aspek keuangan
  - Membandingkan saldo-saldo realisasi tahun 2024 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
  - Menghitung kembali persentase fluktuasi yang dilaporkan oleh Manajemen antara saldo-saldo aktual tahun 2024 dengan target anggaran/RKAP tahun 2024 dan saldo-saldo aktual tahun 2023.
- Perkembangan usaha Perseroan
  - Membandingkan informasi keuangan tahun 2023 dan 2024 dengan Laporan Keuangan yang telah diaudit.
  - Melakukan perhitungan ulang dan membandingkan informasi rasio keuangan tahun 2023 dan 2024



Publikasi Pembayaran Pajak

Kepatuhan dalam pembayaran pajak serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik memiliki peran krusial dalam kontribusi bank terhadap negara. Dengan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan serta transparansi dalam pengelolaan manajemen, bank dapat memastikan bahwa kontribusinya tidak terbatas pada produk tertentu, tetapi tersebar secara lebih merata. Hal ini berpotensi meningkatkan pendapatan berbasis *fee* yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi bank, sekaligus turut mendukung pembangunan infrastruktur serta penyediaan layanan publik yang dibiayai oleh pemerintah. Dengan demikian, selain memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan, bank juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pembayaran Pajak

Total pembayaran pajak oleh bank untuk periode Januari hingga Desember 2023 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Pemenuhan Pembayaran Pajak

(dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
PPh Badan	-	-	-	-
PPh Perorangan	77.115.524.312	64.930.679.520	12.184.844.792	18,77%
PPN	16.851.268.534	18.404.235.074	(1.552.966.540)	-8,44%
Pajak Lainnya:				
PPh Pasal 23	11.669.450.943	15.584.706.000	(3.915.255.057)	-25,12%
PPh Pasal 26	100.380.021.542	124.005.791.747	(23.625.770.205)	-19,05%
PPh Pasal 4 ayat 2	379.076.094.747	404.045.662.323	(24.969.567.576)	-6,18%
Lainnya (Materai)	1.748.852.000	1.031.740.000	717.112.000	69,51%
Jumlah Pembayaran Pajak	**586.841.212.078**	**628.002.814.664**	**(41.161.602.586)**	**-6,55%**

DAMPAK PERUBAHAN SUKU BUNGA TERHADAP KINERJA BANK

KB Bank mencapai pertumbuhan yang solid dalam penyaluran kredit dan penghimpunan Dana Pihak Ketiga dengan terus mempertahankan profitabilitas yang berkelanjutan dan ekspansi kredit berkualitas baik dan sehat di tengah suku bunga tinggi. Pertumbuhan kredit dan Dana pihak ketiga dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang mencapai 6,25% pada semester pertama 2024, dan baru diturunkan sebesar 25 basis poin pada September 2024, diharapkan dengan penurunan tren suku bunga di tahun 2024 dapat meningkatkan ekspansi pembiayaan di tahun 2025 dan memperbaiki struktur pendanaan melalui strategi peluncuran beberapa program pendanaan khususnya yang meningkatkan komposisi CASA.

LARANGAN, BATASAN DAN/ATAU HAMBATAN SIGNIFIKAN UNTUK MELAKUKAN TRANSFER DANA ANTARA BANK DAN ENTITAS LAIN DALAM SUATU KELOMPOK USAHA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KB Bank telah menetapkan kebijakan yang jelas terkait dengan batasan dalam melakukan transfer dana, yang diuraikan sebagai berikut:

1. KB Bank tidak memiliki batasan di dalam prosedur operasional terkait transfer dana nasabah baik transfer masuk maupun transfer keluar antar bank dan entitas lain dalam satu kelompok usaha. Jumlah dan nilai transaksi mengacu pada ketentuan regulator mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. KB Bank mengacu pada regulasi BMPK terkait dengan transaksi untuk penempatan antar Bank dari KB Bank ke Bank Lain dan Entitas dalam satu kelompok usaha.

KINERJA ENTITAS ANAK

Dalam struktur bisnisnya, KB Bank memiliki dua Entitas Anak yang kinerjanya terkonsolidasi, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance. Penjelasan mengenai Entitas Anak disajikan pada bagian Profil dalam Laporan Tahunan ini.

PT Bank KB Bukopin Syariah

Kinerja Keuangan PT Bank KB Bukopin Syariah

(Dalam miliar rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset	8.644,9	7.920,5	724,4	9,15%
Liabilitas	7.864,5	7.151,7	712,9	9,97%
Ekuitas	780,4	768,8	11,6	1,50%
Laba bersih	11,2	(527,1)	538,3	102,13%

PT KB Bukopin Finance

Kinerja Keuangan PT KB Bukopin Finance

(Dalam miliar rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	2024	2023	Kenaikan (Penurunan)	
			Nominal	Persentase (%)
Aset	667,7	459,7	208,1	45,27%
Liabilitas	208,9	10,3	198,7	1933,03%
Ekuitas	458,8	449,4	9,4	-2,10%
Laba bersih	9,5	(18,6)	28,0	151,04%


KB
REVI

KB Bank



Manajemen Risiko

LAPORAN PUBLIKASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

Umum

Laporan Ukuran Utama (*Key Metrics*) Konsolidasi

PT. Bank KB Bukopin, Tbk
Tanggal Laporan : 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	a T (31 Desember 2024)	b T-1 (30 September 2024)	c T-2 (30 Juni 2024)	d T-3 (31 Maret 2024)	e T-4 (31 Desember 2023)
	Modal yang Tersedia (nilai)			**Konsolidasi**		
1	Modal Inti Utama (CET1)	5.401.051,57	6.308.592,30	5.946.164,00	8.187.244,00	9.813.056,00
2	Modal Inti (*Tier* 1)	5.401.051,57	6.308.592,30	5.946.164,00	8.187.244,00	9.813.056,00
3	Total Modal	9.500.298,20	10.444.309,96	10.125.508,00	12.480.600,00	14.205.129,00
	Aset Tertimbang Menurut Risiko (Nilai)					
4	Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	47.444.648,23	47.690.734,68	48.813.197,00	50.498.605,00	50.831.470,00
	Rasio Modal berbasis Risiko dalam bentuk persentase dari ATMR					
5	Rasio CET1 (%)	11,38%	13,23%	12,18%	16,21%	19,31%
6	Rasio *Tier* 1 (%)	11,38%	13,23%	12,18%	16,21%	19,31%
7	Rasio Total Modal (%)	20,02%	21,90%	20,74%	24,71%	27,95%
	Tambahan CET1 yang berfungsi sebagai *buffer* dalam bentuk persentase dari ATMR					
8	*Capital conservation buffer* (2.5% dari ATMR) (%)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
9	*Countercyclical Buffer* (0 - 2.5% dari ATMR) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
10	*Capital Surcharge* untuk Bank Sistemik (1% - 2.5%) (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
11	Total CET1 sebagai *buffer* (Baris 8 + Baris 9 + Baris 10)	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
12	Komponen CET1 untuk *buffer*	5,38%	7,23%	6,18%	10,21%	13,31%
	Rasio pengungkit sesuai Basel III					
13	Total Eksposur	81.790.804,80	80.936.715,00	80.469.176,00	80.721.305,54	82.244.071,64
14	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	6,60%	7,79%	7,39%	10,37%	12,20%
14b	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada)	6,60%	7,79%	7,39%	10,37%	12,20%

(dalam jutaan rupiah)

No.	Deskripsi	a T (31 Desember 2024)	b T-1 (30 September 2024)	c T-2 (30 Juni 2024)	d T-3 (31 Maret 2024)	e T-4 (31 Desember 2023)
14c	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset *Securities Financing Transaction* (SFT) secara *gross*	6,60%	7,79%	7,39%	10,37%	12,20%
14d	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan GWM (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*	6,60%	7,79%	7,39%	10,37%	12,20%
	Rasio Kecukupan Likuiditas (LCR)					
15	Total Aset Likuid Berkualitas Tinggi (HQLA)	15.402.876	17.295.674	16.845.797	14.825.530	15.043.596
16	Total Arus Kas Keluar Bersih (*net cash outflow*)	10.729.751	10.827.349	10.795.991	13.268.319	12.236.932
17	LCR (%)	143,55%	159,74%	156,04%	111,74%	122,94%
	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (NSFR)					
18	Total Pendanaan Stabil yang Tersedia (ASF)	77.233.312	75.491.085	76.839.952	73.833.785	74.367.444
19	Total Pendanaan Stabil yang Diperlukan (RSF)	76.321.023	73.938.692	74.826.119	73.820.372	71.426.243
20	NSFR (%)	101,20%	102,10%	102,69%	100,02%	104,12%
	Analisis Kualitatif					

Pada posisi Desember 2024, rasio Bank baik secara konsolidasi maupun individual diantaranya rasio total modal, rasio pengungkit, LCR, dan NSFR sudah memenuhi ketentuan regulator.

*T adalah periode triwulanan, T-1 adalah periode 1 triwulan sebelumnya

Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai Standar Akuntansi dengan Ketentuan Kehati-hatian

Tabel Perbedaan antara Cakupan Konsolidasi sesuai Standar Akuntansi dengan Ketentuan Kehati-hatian per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Desember 2024					
	a/b	c	d	e	f	g
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Nilai tercatat masing-masing risiko				
		Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
	neraca konsolidasi					
Aset						
Kas	369.082,94	369.082,94				
Penempatan pada Bank Indonesia	5.360.305,76	5.360.305,76				
Penempatan pada bank lain	507.612,16	507.612,16				
Tagihan spot dan derivatif	12.054,00	-	12.054,00			
Surat berharga yang dimiliki	21.767.111,38	21.422.354,69		119.600,00	225.156,69	
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	0,00					
Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-0,00	-0,00				
Tagihan akseptasi	84.278,57	84.278,57				
Kredit yang diberikan	41.522.947,05	41.522.947,05				
Pembiayaan syariah	6.004.539,21	6.004.539,21				
Penyertaan modal	14,77	14,77				
Aset keuangan lainnya	803.139,42	803.139,42				
Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-	-	-				
a. Surat berharga yang dimiliki	-279,94	-				
b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	-2.992.196,91	-384.228,48				
c. lainnya	-	-				
Aset tidak berwujud	636.119,22	636.119,22				
Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	-365.312,34	-365.312,34				
Aset tetap dan inventaris	4.776.998,23	4.776.998,23				
Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	-1.456.694,23	-1.456.694,23				
Aset non produktif	-					
a. Properti terbengkalai	21.679,64	21.679,64				
b. Agunan yang diambil alih	1.799.894,77	1.799.894,77				
c. Rekening tunda	-	-				

(dalam jutaan rupiah)

	Desember 2024					
	a/b	c	d	e	f	g
	Nilai tercatat masing-masing risiko					
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
d. Aset antar kantor	-	-				
Aset lainnya	4.224.003,53	3.073.197,77				
Total Aset	83.075.297,22	84.175.929,14	12.054,00	119.600,00	225.156,69	-
Kewajiban						
Giro	6.289.248,04					6.289.248,04
Tabungan	6.915.502,07					6.915.502,07
Deposito	33.388.408,24					33.388.408,24
Uang elektronik	-					-
Liabilitas kepada Bank Indonesia	-					-
Liabilitas kepada bank lain	2.881.185,56					2.881.185,56
Liabilitas *spot* dan derivatif / *forward*	3.641,40					3.641,40
Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	3.739.877,93					3.739.877,93
Liabilitas akseptasi	84.278,57					84.278,57
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158,36					5.790.158,36
Pinjaman / pembiayaan yang diterima	13.920.643,95					13.920.643,95
Setoran jaminan	20.965,38					20.965,38
Liabilitas antar kantor	-					-
Liabilitas lainnya	2.079.601,61					2.079.601,61
Kepentingan minoritas (*minority interest*)	-					-
Total liabilitas	75.113.511,11	-	-	-	-	75.113.511,11
Modal disetor						
a. Modal dasar	18.999.999,97					
b. Modal yang belum disetor -/-	-					
c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-	-					
Tambahan modal disetor	-					
a. Agio	8.225.767,12					
b. Disagio -/-	-					
c. Modal sumbangan	-					
d. Dana setoran modal	-					

(dalam jutaan rupiah)

	Desember 2024					
	a/b	c	d	e	f	g
		Nilai tercatat masing-masing risiko				
	Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan (dalam jutaan)	Sesuai kerangka risiko kredit	Sesuai kerangka *counterparty credit risk*	Sesuai kerangka sekuritisasi	Sesuai kerangka risiko pasar	Tidak mengacu pada persyaratan permodalan atau berdasarkan pengurangan modal
e. Lainnya	-					
Penghasilan komprehensif lain	-					
a. Keuntungan	1.982.639,50					
b. Kerugian	-52.635,97					
Cadangan	-					
a. Cadangan umum	-					
b. Cadangan tujuan	-					
Laba/rugi	-					
a. Tahun-tahun lalu	-14.864.834,20					
b. Tahun berjalan	-6.329.150,32					
c. Dividen yang dibayarkan -/-	-					
Total Ekuitas	**7.961.786,11**					

Analisis Kualitatif

Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada kerangka risiko kredit yang diperhitungkan hanya CKPN *Stage* II dan *Stage* III. Selain itu, dalam hal pos kredit perbedaan disebabkan karena adanya kredit yang diakui sebagai faktor pengurang modal inti yaitu penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada Bank Lain.

Sumber Perbedaan Utama antara Eksposur sesuai Ketentuan Kehati-hatian dengan *Carrying Values* sesuai Standar Akuntansi Keuangan

Tabel Sumber Perbedaan Utama antara Eksposur sesuai Ketentuan Kehati-hatian dengan *Carrying Values* sesuai Standar Akuntansi Keuangan per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

	Desember 2024				
	a	b	c	d	e
		Item sesuai:			
	Total	Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka *Counterparty credit risk*	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat aset sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada *template* LI1)	83.075.297	84.175.929	119.600	12.054	225.157

(dalam jutaan rupiah)

	Desember 2024				
	a	b	c	d	e
		Item sesuai:			
	Total	Kerangka risiko kredit	Kerangka sekuritisasi	Kerangka *Counterparty credit risk*	Kerangka risiko pasar
Nilai tercatat liabilitas sesuai lingkup sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian (sebagaimana dilaporkan pada *template* LI1)	75.113.511				
Total nilai bersih sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	7.961.786	84.175.929	119.600	12.054	225.157
Nilai rekening administratif	4.706.819	4.706.819			
Perbedaan valuasi	-				
Perbedaan antara *netting rules*, selain dari yang termasuk pada baris 2.	-				
Perbedaan provisi	-				
Perbedaan *prudential filters*	-				
Nilai eksposur yang dipertimbangkan, sesuai dengan cakupan konsolidasi ketentuan kehati-hatian	12.668.605	88.882.748	119.600	12.054	225.157

Analisis Kualitatif
Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada kerangka risiko kredit yang diperhitungkan hanya CKPN *Stage* II dan *Stage* III. Selain itu, dalam hal pos kredit perbedaan disebabkan karena adanya kredit yang diakui sebagai faktor pengurang modal inti yaitu penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada Bank Lain.

Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Perbedaan antara nilai aset yang tercatat dalam laporan keuangan publikasi dengan nilai aset berdasarkan kerangka kerja risiko (*risk framework*) adalah sebagai berikut:

Bank harus menjelaskan asal perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan, sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian, sebagaimana terdapat pada *template* LI1 dan LI2.	
(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.	Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada kerangka risiko kredit yang diperhitungkan hanya CKPN Stage II dan Stage III. Selain itu, dalam hal pos kredit perbedaan disebabkan karena adanya kredit yang diakui sebagai faktor pengurang modal inti yaitu penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada Bank Lain.

(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturan yang tercantum pada LI2.	Perbedaan antara nilai tercatat berdasarkan Laporan Publikasi Keuangan dengan kerangka risiko kredit adalah dalam hal Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada kerangka risiko kredit yang diperhitungkan hanya CKPN Stage II dan Stage III. Selain itu, dalam hal pos kredit perbedaan disebabkan karena adanya kredit yang diakui sebagai faktor pengurang modal inti yaitu penempatan dana pada instrumen Modal Inti Tambahan dan/atau Modal Pelengkap pada Bank Lain.
(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, bank harus menjelaskan sistem dan kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan:	
(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi *mark-to-market* dan *mark-to-model*.	1. Bank menggunakan metode Valuasi *Mark-to-market* untuk aset aset dengan kategori *Fair Value Level* 1, dimana terdapat harga di pasar. 2. Bank menggunakan metode *Mark-to-model* untuk aset keuangan dengan kategori *Fair Value Level* 2, dimana aset tidak terdapat di bursa akan tetapi terdapat aset serupa yang dapat dijadikan acuan penilaian. Atas penetapan *mark-to-model* tersebut Bank membuat pemodelan dengan mempertimbangkan saran dari konsultan yang memiliki kompetensi di bidang tersebut. 3. Untuk aset dengan kategori *Fair Value Level* 3, maka aset tidak terdapat di bursa dan memiliki karakter yang sangat spesifik, dalam hal berikut, bank menggunakan jasa penilai/konsultan untuk menentukan nilai wajar atas aset.
(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen.	Bank menggunakan konsultan dalam menentukan *Fair Value* Aset untuk Level 2 dan 3, serta menggunakan informasi yang tersedia di Pasar (misal: IBPA - *Indonesian Bond Price Agency*) sebagai perbandingan nilai yang akan digunakan sebagai bahan *mark-to-market*, dimana dalam proses operasionalnya Bank memiliki prosedur *maker checker approval* dalam hal pembukuan transaksi.
(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai posisi *trading* dengan tipe instrumen).	Kategori Aset FVPL: Bank melakukan penyesuaian antara selisih nilai tercatat dengan nilai pasar ke Laba Rugi. Kategori Aset FVOCI: Bank melakukan penyesuaian selisih nilai tercatat ke Ekuitas. Kategori Aset AC: Bank dapat menggunakan hasil penilaian ataupun harga yang ada di pasar sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai aset.

Komposisi Permodalan (*Audited*)

Tabel Komposisi Permodalan per 31 Desember 2024

Komponen	Desember 2024		Desember 2023	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1)]	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1)]
CET 1: Instrumen dan Tambahan Modal Disetor				
Saham biasa (termasuk *stock surplus*)	27.225.767	16, 17	27.225.767	16, 17
Laba ditahan	(21.193.985)	19, 20	(14.864.834)	19, 20
Akumulasi penghasilan komprehensif lain (dan cadangan lain)	1.955.618	18	1.775.376	18
Modal yang termasuk *phase out* dari CET1	-		-	
Kepentingan Non Pengendali yang dapat diperhitungkan	-	21	-	21
CET1 sebelum *regulatory adjustment*	7.987.401		14.136.309	
CET 1: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				

Komponen	Desember 2024		Desember 2023	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])
Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam *trading book*				
Goodwill	(189.482)	14	(189.482)	14
Aset tidak berwujud lainnya (selain *Mortgage-Servicing Rights*)	(81.325)	14	(96.103)	14
Aset pajak tangguhan yang berasal dari *future profitability*				
Cash-flow hedge reserve				
Shortfall on provisions to expected losses				
Keuntungan penjualan aset dalam transaksi sekuritisasi				
Peningkatan/ penurunan nilai wajar atas kewajiban keuangan (DVA)				
Aset pensiun manfaat pasti				
Investasi pada saham sendiri (jika belum di *net* dalam modal di Laporan Posisi Keuangan)				
Kepemilikan silang pada instrumen CET 1 pada entitas lain				
Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)				
Investasi signifikan pada saham biasa Bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan (jumlah di atas batasan 10%)				
Mortgage servicing rights				
Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (jumlah di atas batasan 10%, *net* dari kewajiban pajak)				
Jumlah melebihi batasan 15% dari:				
investasi signifikan pada saham biasa *financials*				
mortgage servicing rights				
pajak tangguhan dari perbedaan temporer				
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional				
Selisih PPKA dan CKPN	(263.414)		(254.447)	
PPKA non produktif	(793.553)		(1.112.664)	
Aset Pajak Tangguhan	(1.258.561)	17	(2.670.542)	17
Penyertaan	(15)	11	(15)	11
Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi				
Eksposur sekuritisasi				
Lainnya				
Penyesuaian pada CET 1 akibat AT 1 dan *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya				
Jumlah pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap CET 1	(2.586.349)		(4.323.252)	
Jumlah CET 1 setelah faktor pengurang	5.401.052		9.813.056	
Modal Inti Tambahan (AT 1): Instrumen				

Komponen	Desember 2024		Desember 2023	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])
Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)				
Yang diklasifikasikan sebagai ekuitas berdasarkan standar akuntansi				
Yang diklasifikasikan sebagai liabilitas berdasarkan standar akuntansi				
Modal yang yang termasuk *phase out* dari AT 1				
Instrumen AT 1 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi				
Instrumen yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*				
Jumlah AT 1 sebelum *regulatory adjustment*	-		-	
Modal Inti Tambahan: Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				
Investasi pada instrumen AT 1 sendiri				
Kepemilikan silang pada instrumen AT 1 pada entitas lain				
Investasi pada modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan (jumlah di atas batasan 10%)				
Investasi signifikan pada modal Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)				
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional				
Penempatan dana pada instrumen AT 1 pada Bank lain				
Penyesuaian pada AT 1 akibat *Tier* 2 lebih kecil daripada faktor pengurangnya				
Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) terhadap AT 1	-		-	
Jumlah AT 1 setelah faktor pengurang	-		-	
Jumlah Modal Inti (*Tier* 1) (CET 1 + AT 1)	5.401.052		9.813.056	
Modal Pelengkap (*Tier* 2): Instrumen dan cadangan				
Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Bank (termasuk *stock surplus*)				
Modal yang yang termasuk *phase out* dari *Tier* 2	3.602.830		3.848.018	
Instrumen *Tier* 2 yang diterbitkan oleh Entitas Anak yang diakui dalam perhitungan KPMM secara konsolidasi				
Modal yang diterbitkan Entitas Anak yang termasuk *phase out*				
Cadangan umum PPKA atas aset produktif yang wajib dihitung dengan jumlah paling tinggi sebesar 1,25% dari ATMR untuk Risiko Kredit	496.417		544.055	
Jumlah Modal Pelengkap (*Tier* 2) sebelum faktor pengurang	4.099.247		4.392.073	
Modal Pelengkap (*Tier* 2): Faktor Pengurang (*Regulatory Adjustment*)				
Investasi pada instrumen *Tier* 2 sendiri				

Komponen	Desember 2024		Desember 2023	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])
Kepemilikan silang pada instrumen *Tier* 2 pada entitas lain				
Investasi pada kewajiban *TLAC* modal bank, entitas keuangan dan asuransi diluar cakupan konsolidasi secara ketentuan, *net* posisi *short* yang diperkenankan, dimana Bank tidak memiliki lebih dari 10% modal saham yang diterbitkan; nilai sebelumnya ditetapkan dengan *threshold* 5% namun tidak lagi memenuhi kriteria (untuk bank Sistemik)				
Investasi pada kewajiban *TLAC* lainnya dari entitas perbankan, keuangan, dan asuransi yang berada di luar lingkup konsolidasi peraturan dan, yang mana bank tidak memiliki lebih dari 10% dari saham biasa entitas yang dikeluarkan: jumlah yang sebelumnya ditunjuk untuk batas 5% tetapi yang tidak lagi memenuhi syarat (hanya untuk Bank Sistemik G-SIBs)				
Investasi signifikan pada modal atau instrumen *TLAC* Bank, entitas keuangan dan asuransi di luar cakupan konsolidasi secara ketentuan (*net* posisi *short* yang diperkenankan)				
Penyesuaian berdasarkan ketentuan spesifik nasional				
Sinking fund				
Penempatan dana pada instrumen *Tier* 2 pada Bank lain				
Jumlah faktor pengurang (*regulatory adjustment*) Modal Pelengkap	-		-	
Jumlah Modal Pelengkap (*Tier* 2) setelah *regulatory adjustment*	4.099.247		4.392.073	
Total Modal (Modal Inti + Modal Pelengkap)	9.500.298		14.205.129	
Total Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)	47.444.648		50.831.470	
Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) dan Tambahan Modal (*Capital Buffer*)				
Rasio CET 1 (persentase terhadap ATMR)	11,38%		19,31%	
Rasio Modal Inti *Tier* 1 (persentase terhadap ATMR)	11,38%		19,31%	
Rasio Total Modal (persentase terhadap ATMR)	20,02%		27,95%	
Buffer (persentase terhadap ATMR)				
Capital Conservation Buffer				
Countercyclical Buffer				
higher loss absorbency requirement				
Untuk bank umum konvensional: CET 1 yang tersedia untuk memenuhi *Buffer* (persentase terhadap ATMR) Untuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri: Bagian Dana Usaha yang ditempatkan dalam CEMA (diungkapkan sebagai persentase dari ATMR) yang tersedia untuk memenuhi *Buffer*.				
National minima (jika berbeda dari Basel 3)				
Rasio terendah CET 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				
Rasio terendah *Tier* 1 nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				

Komponen	Desember 2024		Desember 2023	
	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])	Jumlah (Dalam Jutaan Rupiah)	No. Ref. yang berasal dari Neraca Konsolidasi [1])
Rasio terendah total modal nasional (jika berbeda dengan Basel 3)				
Jumlah di bawah batasan pengurangan (sebelum pembobotan risiko)				
Investasi non-signifikan pada modal atau kewajiban *TLAC* lainnya pada entitas keuangan lain				
Investasi signifikan pada saham biasa entitas keuangan				
Mortgage servicing rights (*net* dari kewajiban pajak)				
Aset pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer (*net* dari kewajiban pajak)				
Cap yang dikenakan untuk provisi pada *Tier* 2				
Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan standar (sebelum dikenakan *cap*)				
Cap atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan standar				
Provisi yang dapat diakui sebagai *Tier* 2 sesuai dengan eksposur berdasarkan pendekatan IRB (sebelum dikenakan *cap*)				
Cap atas provisi yang diakui sebagai *Tier* 2 berdasarkan pendekatan IRB				
Instrumen Modal yang termasuk *phase out* (hanya berlaku antara 1 Jan 2018 s.d. 1 Jan 2022)				
Cap pada CET 1 yang termasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari CET 1 karena adanya *cap* (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				
Cap pada AT 1 yang termasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari AT 1 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				
Cap pada *Tier* 2 yang termasuk *phase out*				
Jumlah yang dikecualikan dari *Tier* 2 karena adanya cap (kelebihan di atas *cap* setelah *redemptions* dan *maturities*)				

Rekonsiliasi Permodalan (*Audited*)

Tabel Rekonsiliasi Permodalan per 31 Desember 2024

No	Pos-pos	Neraca Publikasi 31 Desember 2024	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2024	Neraca Publikasi 31 Desember 2023	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2023
	ASET				
1	Kas	330.502	369.083	254.501	289.184
2	Penempatan pada Bank Indonesia	3.896.827	5.360.306	3.394.382	4.929.237
3	Penempatan pada bank lain	502.578	507.612	367.341	752.831
4	Tagihan *spot* dan derivatif	12.054	12.054	3.040	3.040

No	Pos-pos	Neraca Publikasi 31 Desember 2024	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2024	Neraca Publikasi 31 Desember 2023	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2023
5	Surat berharga yang dimiliki	21.107.351	21.767.111	17.608.965	17.536.248
6	Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	0	0	-	-
7	Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*)	-	-	2.572.152	2.572.152
8	Tagihan akseptasi	84.279	84.279	132.577	132.577
9	Kredit yang diberikan	41.456.215	41.522.947	44.183.228	43.786.019
10	Pembiayaan syariah 1)	-	6.004.539	-	5.632.597
11	Penyertaan modal	1.178.142	15	2.206.951	15
12	Aset Keuangan lainnya	856.612	803.139	809.362	833.692
13	Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/-				
	a. Surat berharga yang dimiliki	(280)	(280)	(109)	(109)
	b. Kredit yang diberikan dan pembiayaan syariah	(2.746.625)	(2.992.197)	(3.353.299)	(3.582.834)
	c. Lainnya	-	(300)	-	(300)
14	Aset tidak berwujud	338.304	636.119	338.304	635.815
	Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/-	(257.651)	(365.312)	(243.063)	(350.230)
15	Aset tetap dan inventaris	4.457.237	4.776.998	4.322.260	4.646.734
	Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/-	(1.340.634)	(1.456.694)	(1.300.473)	(1.413.059)
16	Aset non produktif				
	a. Properti terbengkalai	21.680	21.680	22.395	22.395
	b. Agunan yang diambil alih	1.674.666	1.799.895	2.370.014	2.503.459
	c. Rekening tunda	-	-	-	-
	d. Aset antar kantor	-	-	-	-
17	Aset lainnya	3.887.094	4.224.303	5.154.066	5.377.837
	TOTAL ASET	**75.458.349**	**83.075.297**	**78.842.593**	**84.307.299**
	LIABILITAS DAN EKUITAS				
1	Giro	5.526.910	6.289.248	2.733.688	3.177.648
2	Tabungan	6.333.647	6.915.502	6.395.495	6.873.184
3	Deposito	28.287.288	33.388.408	29.907.451	34.738.311
4	Uang Elektronik	-	-	-	-
5	Liabilitas kepada Bank Indonesia	-	-	-	-
6	Liabilitas kepada bank lain	2.826.678	2.881.186	7.761.176	7.886.721
7	Liabilitas *spot* dan derivatif / *forward*	3.641	3.641	808	808
8	Liabilitas atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (*repo*)	3.229.437	3.739.878	-	219.631

No	Pos-pos	Neraca Publikasi 31 Desember 2024	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2024	Neraca Publikasi 31 Desember 2023	Neraca Konsolidasi dengan cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan kehati-hatian 31 Desember 2023
9	Liabilitas akseptasi	84.279	84.279	132.577	132.577
10	Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	5.790.158	998.737	998.737
11	Pinjaman / pembiayaan yang diterima	13.775.967	13.920.644	11.654.712	11.704.492
12	Setoran jaminan	10.625	20.965	15.531	30.830
13	Liabilitas antar kantor 2)	-	-	-	-
14	Liabilitas lainnya	2.025.840	2.079.602	4.479.696	4.434.197
15	Kepentingan minoritas (*minority interest*)	-	-		
	TOTAL LIABILITAS	**67.894.471**	**75.113.511**	**64.079.872**	**70.197.137**
16	Modal disetor				
	a. Modal dasar	19.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000
	b. Modal yang belum disetor -/-				-
	c. Saham yang dibeli kembali (*treasury stock*) -/-				-
17	Tambahan modal disetor				
	a. Agio	8.225.767	8.225.767	8.225.767	8.225.767
	b. Disagio -/-				
	c. Modal sumbangan				-
	d. Dana setoran modal				-
	e. Lainnya				-
18	Penghasilan komprehensif lain				
	a. Keuntungan	1.942.000	2.008.254	1.743.730	1.809.192
	b. Kerugian	(52.126)	(52.636)	(33.816)	(33.816)
19	Cadangan				-
	a. Cadangan umum				-
	b. Cadangan tujuan				-
20	Laba/rugi				-
	a. Tahun-tahun lalu	(14.172.960)	(14.864.834)	(8.662.180)	(8.830.450)
	b. Tahun berjalan	(7.378.803)	(6.329.150)	(5.510.779)	(6.034.384)
	c. Dividen yang dibayarkan -/-				-
	TOTAL EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK	**7.563.879**	**7.987.401**	**14.762.722**	**14.136.309**
21	Kepentingan Non Pengendali	-	- 25.615		(26.146)
	TOTAL EKUITAS	**7.563.879**	**7.961.786**	**14.762.722**	**14.110.163**
	TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**75.458.349**	**83.075.297**	**78.842.593**	**84.307.299**

Fitur Utama Permodalan Bank

Tabel Fitur Utama Permodalan Bank per 31 Desember 2024

		Desember 24		
No		Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch
1	Penerbit	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk	PT Bank KB Bukopin Tbk
2	Nomor identifikasi	IDA0001176A9	IDA0001176B7	
3	Hukum yang digunakan	Hukum Indonesia	Hukum Indonesia	Hukum Inggris
3a	Sarana yang memungkinkan kewajiban pelaksanaan pada Bagian 13 dari Lembar Istilah *TLAC* tercapai (untuk instrumen *TLAC* sah lainnya yang diatur oleh hukum asing)			
	Perlakuan Instrumen berdasarkan ketentuan KPMM			
4	Pada saat masa transisi	N/A	N/A	N/A
5	setelah masa transisi	*Tier* 2	*Tier* 2	*Tier* 2
6	Apakah instrumen *eligible* untuk Individu/Konsolidasi atau Konsolidasi dan Individu	individu	individu	individu
7	Jenis Instrumen	Surat Berharga Subordinasi	Surat Berharga Subordinasi	Pinjaman Subordinasi
8	Jumlah yang diakui dalam perhitungan KPMM	231.000	685.000	3.000.000
9	Nilai par dari instrumen	315.000.000.000	685.000.000.000	3.000.000
10	Klasifikasi sesuai standar akuntansi keuangan	Liabilitas	Liabilitas	Liabilitas
11	Tanggal penerbitan	09/09/21	09/09/21	30/06/22
12	Tidak ada jatuh tempo (*perpetual*) atau dengan jatuh tempo	dengan jatuh tempo	dengan jatuh tempo	dengan jatuh tempo
13	Tanggal jatuh tempo	09/09/26	09/09/28	29/06/29
14	Eksekusi *call option* atas persetujuan Otoritas Jasa Keuangan	tidak	tidak	Tidak
15	Tanggal *call option*, jumlah penarikan dan persyaratan *call option* lainnya (bila ada)	N/A	N/A	N/A
16	*Subsequent call option*	N/A	N/A	N/A
	Kupon/dividen			
17	Dividen/kupon dengan bunga tetap atau *floating*	*fixed*	*fixed*	
18	Tingkat dari *coupon rate* atau index lain yang menjadi acuan	8%	8,90%	8,52%
19	Ada atau tidaknya *dividend stopper*	N/A	N/A	N/A
20	*Fully discretionary*; *partial* atau *mandatory*	*Mandatory*	*Mandatory*	N/A
21	Apakah terdapat fitur *step up* atau insentif lain	N/A	N/A	N/A
22	Non-kumulatif atau kumulatif	kumulatif	kumulatif	
23	Dapat dikonversi atau tidak dapat dikonversi	tidak dapat dikonversi	tidak dapat dikonversi	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa

Desember 24				
No		Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch
24	Jika dapat dikonversi, sebutkan *trigger point*-nya	N/A	N/A	Dapat melakukan konversi menjadi saham biasa dalam hal PT Bank KB Bukopin Tbk berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of non viability*) merujuk kepada Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.03/2016
25	Jika dapat dikonversi, apakah seluruh atau sebagian	N/A	N/A	(ii) kemungkinan dikonversi secara penuh atau sebagian
26	Jika dapat dikonversi, bagaimana *rate* konversinya	N/A	N/A	Formula Konversi: a. rata-rata harga penutupan di pasar reguler BEI dari saham biasa selama periode dua puluh lima (25) hari perdagangan BEI segera sebelum tanggal dimana permohonan pencatatan Saham Konversi diajukan ke BEI; atau, b. apabila konversi dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan sesuai dengan POJK 32/2015, harga pasar yang wajar dari saham biasa yang akan ditentukan oleh suatu penilai pihak ketiga yang terdaftar di OJK yang akan ditunjuk berdasarkan kesepakatan bersama antara PT Bank KB Bukopin Tbk & KBHK
27	Jika dapat dikonversi; apakah *mandatory* atau *optional*	N/A	N/A	*Mandatory*, apabila terjadi trigger event
28	Jika dapat dikonversi, sebutkan jenis instrumen konversinya	N/A	N/A	Dapat Dikonversi Menjadi Saham Biasa
29	Jika dapat dikonversi, sebutkan *issuer of instrument it converts into*	N/A	N/A	*It Converts into Common Shares*
30	Fitur *write-down*	Ya	Ya	Tidak
31	Jika terjadi *writedown*, sebutkan *trigger*-nya	Obligasi Subordinasi dapat di *write down* tanpa kompensasi apabila OJK me*net*apkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of viability*) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no.34/ POJK.03/2016	Obligasi Subordinasi dapat di *write down* tanpa kompensasi apabila OJK me*net*apkan bahwa perseroan berpotensi terganggu kelangsungan usahanya (*point of viability*) sesuai dengan ketentuan pasal 19 peraturan otoritas jasa keuangan no.34/ POJK.03/2016	N/A
32	Jika terjadi *writedown*, apakah penuh atau sebagian	N/A	N/A	N/A
33	Jika terjadi *write down*; permanen atau temporer	N/A	N/A	N/A

No		Desember 24		
		Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri A	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Tahap I 2021 Seri B	Pinjaman Subordinasi Kookmin Bank Hong Kong Branch
34	Jika terjadi *write down* temporer, jelaskan mekanisme *write-up*	N/A	N/A	N/A
34a	Tipe subordinasi	*Junior Bond*	*Junior Bond*	Pinjaman Subordinasi
35	Hierarki instrumen pada saat likuidasi	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Hak Pemegang Obligasi Subordinasi adalah paripassu tanpa hak preferen	Memiliki peringkat setidaknya pari passu dalam prioritas pembayaran dan dalam semua hal lainnya dengan semua hutang tanpa jaminan dan subordinasi lainnya dari PT Bank KB Bukopin Tbk kecuali yang didahulukan oleh hukum
36	Apakah terdapat fitur yang *non-compliant*	N/A	N/A	N/A
37	Jika Ya, jelaskan fitur yang *non-compliant*	N/A	N/A	N/A

STRUKTUR PERMODALAN BANK DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Permodalan

Kebijakan Manajemen dan Dasar Pemilihan Kebijakan atas Struktur Modal

Pelaksanaan rencana permodalan di antaranya:

1. Menjaga rasio kecukupan modal minimum diatas 16.5%, dan memastikan tingkat permodalan minimal sama dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mendukung pengembangan usaha perusahaan serta menjaga komposisi permodalan *Tier* 1 dan *Tier* 2 sesuai dengan ketetapan Basel III.
2. Kebijakan pengelolaan modal:
   a. Memanfaatkan modal secara efisien untuk pertumbuhan bisnis, khususnya pembiayaan baru dan investasi masa depan (*New Generation Banking System*, Pengembangan Outlet, dll)
   b. Pencadangan kerugian kredit untuk upaya penyelesaian kredit bermasalah akan berasal dari perolehan pendapatan dari upaya *Turn-around* (keuntungan sendiri)
   c. pengelolaan ATMR dan *capital charges* (pengelolaan faktor pengurang modal melalui retaksasi jaminan) serta penyelesaian kredit bermasalah serta AYDA

Komponen Struktur Modal

KB Bank berkomitmen untuk menjaga struktur modal yang kuat dan sehat sebagai landasan utama dalam mendorong pertumbuhan usaha yang berkelanjutan. Dalam upaya ini, KB Bank melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan ketentuan POJK No. 34/POJK.03/2016 tanggal 26 September 2016, yang merupakan perubahan atas POJK No. 11/POJK.03/2016 mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Pada tahun 2024, struktur modal Perseroan secara konsolidasi terdiri dari:

1. Modal Inti;
2. Modal Pelengkap;
3. Total Modal.

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Kebijakan manajemen risiko terkait struktur modal tercermin dalam rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), yang menjadi indikator utama kecukupan modal Bank. Perseroan memastikan tingkat permodalan yang memadai guna mendukung pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, baik bagi Perseroan maupun entitas anak, serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

Perseroan senantiasa menjaga rasio kecukupan modal di atas batas minimum yang ditetapkan oleh regulator guna memastikan ketahanan keuangan dan kemampuan dalam menghadapi berbagai risiko. Pada tahun 2024, rasio KPMM konsolidasi Perseroan mencapai 20,02%, yang mencerminkan komitmen dalam menjaga stabilitas keuangan dan daya saing di industri perbankan.

Selain itu, Perseroan secara berkala melaksanakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (ICAAP) untuk mengevaluasi kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dihadapi. Melalui proses ini, Perseroan dapat mengidentifikasi potensi risiko, menyesuaikan strategi permodalan, serta memastikan kesiapan dalam menghadapi dinamika pasar dan perubahan regulasi di masa depan.

Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen Risiko memegang peran penting dalam operasional perbankan serta pengambilan keputusan strategis guna mencapai target bisnis. Pelaksanaannya mencakup berbagai aspek, mulai dari identifikasi, penilaian, pengukuran, evaluasi, pemantauan, hingga pengendalian risiko. Selain itu, pengembangan teknologi dan sistem informasi manajemen di setiap kategori risiko serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan risiko juga menjadi bagian penting dalam proses ini.

Penerapan manajemen risiko dilakukan secara proaktif untuk menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola permodalan secara menyeluruh, serta menjaga profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. KB Bank menerapkan manajemen risiko berdasarkan regulasi nasional maupun standar internasional, seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), dokumen *Basel Committee on Banking Supervision* (BCBS), dan *International Financial Reporting Standards* (IFRS) 9.

Lebih jauh, seluruh karyawan di lingkungan Bank memiliki tanggung jawab dalam penerapan manajemen risiko. Bank terus memperkuat praktik manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja guna memastikan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, transparan, dan sehat. Dalam mendukung transformasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, Bank me*net*apkan empat tahapan utama dalam pengembangannya, yaitu:

1. Pe*net*apan dasar/fondasi;
2. Meningkatkan pemahaman;
3. Eksekusi yang tepat;
4. Pemantauan dan kontrol yang memadai.

Penentuan Model dan Interaksi Profil Risiko

Sejalan dengan penerapan manajemen risiko, model bisnis Bank dirancang sesuai dengan profil risikonya, yang mencerminkan berbagai risiko terkait aktivitas bisnis dan fungsi operasional Bank. Risiko utama yang menjadi pertimbangan mencakup proyeksi ekonomi, pertumbuhan bisnis, tingkat *risk appetite*, serta target yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB). Pe*net*apan model bisnis dan interaksi dengan profil risiko juga selaras dengan Visi dan Misi Bank.

Untuk memastikan pengelolaan risiko yang menyeluruh dan berkelanjutan, Bank secara berkala mengevaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko di setiap aktivitas usahanya. Jika ditemukan ketidakefektifan dalam penerapan manajemen risiko, Bank segera melakukan perbaikan terhadap mekanisme pengendalian yang telah ditetapkan agar tujuan perusahaan tetap dapat dicapai.

Dalam menjaga risiko pada tingkat yang dapat ditoleransi, Bank me*net*apkan serta melakukan kaji ulang terhadap *risk appetite* sesuai dengan kapasitasnya. *Risk appetite* adalah tingkat risiko yang dapat diterima untuk mencapai sasaran manajemen, mencerminkan sejauh mana bank bersedia mengambil, menahan, atau menghindari risiko untuk mencapai tujuan bisnis, strategi, dan perencanaan modalnya. Bank me*net*apkan *risk appetite* sejalan dengan pengelolaan ICAAP terkait dengan kecukupan permodalan. Untuk pengelolaan risiko lainnya besaran limit dan *warning trigger* diusulkan oleh Departemen terkait yang selanjutnya dilakukan *review* oleh Manajemen Risiko sebelum mendapatkan persetujuan Direksi.

Strategi manajemen risiko Bank disusun untuk jangka panjang guna memastikan keberlanjutan usaha serta kecukupan permodalan. Selain itu, strategi ini dirancang untuk mengendalikan risiko secara efektif dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia, infrastruktur, serta kondisi keuangan Bank.

Struktur Tata Kelola Risiko

Kerangka kerja dan tata kelola manajemen risiko di KB Bank tercermin dalam organisasi manajemen risiko yang selaras dengan tujuan bisnis, kebijakan usaha, skala, kompleksitas, serta kapabilitas Bank. Setiap unit kerja memiliki struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang spesifik, baik secara umum maupun dalam penerapan manajemen risiko.

KB Bank menerapkan praktik manajemen risiko yang efektif di seluruh satuan kerja melalui pendekatan Tiga Lini Pertahanan (*Three Lines of Defence*) sesuai dengan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk. Pengelolaan Risiko Kredit dibagi berdasarkan prinsip berikut:

1. *1st Line of Defence*: *Risk Taking Unit*, yang mencakup tim bisnis dan pendukung (termasuk tim kredit), bertanggung jawab atas pengelolaan risiko dalam aktivitas operasional.
2. *2nd Line of Defence*: *Risk Group* dan Kepatuhan, yang berperan dalam mengawasi dan memastikan penerapan kebijakan serta prosedur manajemen risiko sesuai dengan regulasi dan standar internal.
3. *3rd Line of Defence*: Internal *Audit*, yang melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas manajemen risiko dan kepatuhan di seluruh unit kerja.

Seluruh fungsi dalam lini pertahanan ini terstruktur dengan jelas dalam organisasi dan kewenangannya telah ditetapkan dalam deskripsi pekerjaan masing-masing unit kerja.

Media Komunikasi Manajemen Risiko

Sebagai bagian dari strategi penguatan kesadaran dan pengetahuan risiko, Perseroan merancang berbagai inisiatif pembelajaran yang komprehensif. Inisiatif ini mencakup program pelatihan untuk menyelaraskan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko, penyelenggaraan kuis terkait manajemen risiko untuk menguji pemahaman, serta dukungan terhadap sertifikasi yang relevan di bidang ini.

Selain itu, untuk memperluas pemahaman mengenai risiko, Perseroan mendistribusikan materi edukasi melalui saluran komunikasi internal, seperti Bukopin *Office Communication*. Dengan langkah-langkah ini, Perseroan memastikan bahwa karyawan terus meningkatkan wawasan mereka tentang risiko dan peran penting manajemen risiko dalam keberlangsungan operasional perusahaan.

Sistem Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko di Bank disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha yang dijalankan. Keakuratan dalam proses ini menjadi faktor penting untuk memastikan manajemen risiko yang efektif. Evaluasi risiko juga dilakukan secara berkala, mencakup produk, portofolio, dan seluruh aktivitas Bank, dengan tujuan menilai eksposur risiko secara komprehensif.

Adapun sistem pengukuran risiko berperan sebagai pedoman dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko, sekaligus menjadi dasar untuk penerapan pengendalian yang optimal. Penyesuaian dalam metode pengukuran dilakukan seiring dengan perubahan signifikan dalam kegiatan usaha, produk, transaksi, serta faktor risiko terkait.

Selain itu, prosedur pengukuran risiko dievaluasi dan diperbarui secara berkala, minimal sekali dalam setahun atau sesuai kebutuhan untuk memastikan akurasi, keadilan, serta integritas data tetap terjaga. Dengan demikian, metode pengukuran risiko yang digunakan tetap relevan dan selaras dengan perkembangan industri serta regulasi terbaru.

Stress Test

Bank secara rutin dan berkelanjutan melakukan uji ketahanan (*stress test*) guna mengantisipasi potensi perubahan kondisi ekonomi di masa depan yang dapat berdampak pada stabilitas keuangan Bank. Uji ketahanan ini bertujuan untuk menilai kesiapan modal Bank dalam menghadapi kemungkinan kerugian besar serta merumuskan langkah mitigasi guna menjaga tingkat permodalan yang sehat.

Secara umum, skenario dalam uji ketahanan mempertimbangkan berbagai variabel makroekonomi, seperti perubahan suku bunga, tingkat inflasi, Produk Domestik Bruto (PDB), nilai tukar, serta faktor lainnya. Bank menerapkan *stress test* untuk mengukur risiko kredit, pasar, dan likuiditas guna memastikan ketahanan terhadap berbagai skenario krisis.

1. Uji Ketahanan Risiko Kredit
   Uji ini bertujuan untuk menilai dampak krisis terhadap kualitas aset dan kecukupan modal. Penerapannya disesuaikan dengan dinamika sektor usaha dan kondisi ekonomi, termasuk kemungkinan penurunan kualitas kredit akibat guncangan eksternal.
2. Uji Ketahanan Risiko Likuiditas
   Evaluasi ini dilakukan untuk mengukur kemampuan Bank dalam mempertahankan stabilitas keuangan saat menghadapi tekanan likuiditas. Penilaian mencakup aspek seperti perubahan struktur, skala, dan kompleksitas usaha Bank, dinamika pasar, serta pengalaman historis Bank dalam menangani situasi krisis.
3. Uji Ketahanan Risiko Pasar
   Pengujian ini bertujuan untuk mengantisipasi skenario terburuk yang dapat memengaruhi eksposur risiko pasar, khususnya dalam fluktuasi nilai tukar dan suku bunga. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan batasan eksposur maksimum terhadap risiko pasar, termasuk Posisi Devisa *Net*to (PDN) dan surat berharga.

Dengan serangkaian uji ketahanan ini, Bank memastikan kesiapan modal dalam menghadapi berbagai tantangan, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mengurangi risiko dan menjaga stabilitas keuangan.

Proses Pelaporan Informasi Risiko

Proses pelaporan informasi risiko dilakukan secara rutin dan terstruktur, dengan penyampaian laporan bulanan dalam bentuk *Monthly Risk Management Report* kepada Direksi dan *Monthly Risk Oversight Report* kepada Komisaris, yang disusun oleh Divisi Manajemen Risiko. Laporan ini mencakup pemantauan terhadap *risk appetite* secara menyeluruh serta pengelolaan risiko utama yang dihadapi oleh Perseroan.

Selain itu, Divisi Manajemen Risiko juga menyusun Laporan Profil Risiko secara kuartalan, yang memberikan gambaran komprehensif mengenai seluruh risiko utama yang dikelola oleh Perseroan. Laporan ini dikaji oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Pemantau Risiko sebelum dilaporkan kepada regulator. Evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi akan ditindaklanjuti oleh unit-unit terkait, dengan pemantauan berkala terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan.

Bank senantiasa menjaga transparansi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan utama dalam setiap proses pelaporan. Selain itu, Bank secara berkala menyampaikan berbagai laporan yang diwajibkan oleh regulator, baik melalui portal pelaporan maupun secara langsung ke kantor regional terkait.

Sebagai tambahan, Bank juga menyediakan *Weekly Risk Report* kepada *President Director* guna memberikan pembaruan mingguan mengenai parameter risiko yang sedang dikelola, memastikan pengawasan risiko dilakukan secara proaktif dan terintegrasi.

Strategi Manajemen Risiko

Strategi manajemen risiko Bank dirancang untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, menjaga kecukupan permodalan, serta mengelola dan mengendalikan risiko secara menyeluruh. Dalam penyusunannya, strategi ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk dinamika ekonomi, kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur, kondisi keuangan Bank, diversifikasi portofolio, serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan.

Pendekatan ini selaras dengan strategi bisnis Perseroan secara keseluruhan, dengan tetap mengacu pada *Risk Appetite* yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas operasional, memastikan profitabilitas yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Total Eksposur Dalam Rasio Pengungkit

Nama Bank : PT. Bank KB Bukopin Tbk. (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2024 (*Audited*)

LR1: Ringkasan Perbandingan *Accounting Asset vs Leverage Ratio* Exposures

(dalam juta rupiah)

No	Item	Individu
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN)	78.276.525
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/ atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun di luar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.	(610.919)
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio *Leverage*.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	26.198
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT) sebagai contoh transaksi *Reverse Repo*.	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	829.611
11	Prudent *valuation adjustment* berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(5.792.775)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	**Total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage***	**72.728.639**

Analisis Kualitatif

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar Rp78,28 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara individu (*bank only*) menjadi sebesar Rp72,73 Triliun.

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesar Rp72.73 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp3.41 Triliun, maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2024 sebesar 4,69%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara individu (*bank only)* berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

LR2: Pengungkapan *Leverage Ratio*

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2024)	T–1 (30 September 2024)
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. *Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN	74.429.656	79.002.139
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait *cash variation* margin yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.	-2.818.175	-2.653.290
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (*Tier* 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	-2.974.600	-6.165.943
7	Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)	68.636.880	70.182.906
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai *Replacement Cost* (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	16.876	1603,756
9	Nilai penambahan yang merupakan *Potential Futures Exposures* (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	21.377	19313,489
10	(pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui *central counterparty* (CCP)).	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit.	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan kredit derivatif).	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12).	38.252	20.917
Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)			
14	Nilai *Gross* SFT	3.223.896	1.468.932
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan *Current Exposure* sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)	3.223.896	1.468.932
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi. *Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN	4.706.819	4.372.855
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK)kemudian dikurangi CKPN)	-3.877.209	-3.544.513
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku).	-	-

(dalam juta rupiah)

Item		Periode	
		T (31 Desember 2024)	T–1 (30 September 2024)
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)	829.611	828.341
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti (*Tier* 1)	3.410.320	4.338.090
24	Total eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22)	72.728.639	72.501.097
Rasio *Leverage*			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	4,69%	5,98%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	4,69%	5,98%
26	Nilai Minimum Rasio *Leverage*	3.00	3.00
27	*Buffer* terhadap nilai Rasio *Leverage*	0.00	0.00
Pengungkapan Niai Rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	3.223.896	1.468.932
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	3.223.896	1.468.932
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	72.728.639	72.501.097
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	72.728.639	72.501.097
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	4,69%	5,98%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	4,69%	5,98%
Analisis Kualitatif			

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar Rp78,28 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara individu (*bank only*) menjadi sebesar Rp72,73 Triliun.

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesarRp72,73 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp3,41 Triliun, maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2024 sebesar 4,69%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara individu (*bank only*) berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit

Tabel Laporan Perhitungan Rasio Pengungkit per 31 Desember 2024

Nama Bank : PT. Bank KB Bukopin Tbk. (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2024 (*Audited*)

(dalam juta rupiah)

No	Item	Konsolidasi
1	Total aset di neraca pada laporan keuangan publikasi (nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN)	86.069.274
2	Penyesuaian untuk nilai penyertaan pada bank, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, dan/ atau entitas lain yang berdasarkan standar akuntansi keuangan harus dikonsolidasikan namun diluar cakupan konsolidasi berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	-
3	Penyesuaian untuk nilai kumpulan aset keuangan yang mendasari (*underlying*) yang telah dialihkan dalam sekuritisasi aset yang memenuhi persyaratan jual putus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan OJK mengenai prinsip kehati-hatian dalam Aktivitas Sekuritisasi Aset bagi Bank Umum.	(610.919)
4	Penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada).	-
5	Penyesuaian untuk aset fidusia yang diakui sebagai komponen neraca berdasarkan standar akuntansi keuangan namun dikeluarkan dari perhitungan total eksposur dalam Rasio *Leverage*.	-
6	Penyesuaian untuk nilai pembelian atau penjualan aset keuangan secara regular dengan menggunakan metode akuntansi tanggal perdagangan.	-
7	Penyesuaian untuk nilai transaksi *cash pooling* yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-
8	Penyesuaian untuk nilai eksposur transaksi derivatif.	26.198
9	Penyesuaian untuk nilai eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT) sebagai contoh transaksi *Reverse Repo*.	-
10	Penyesuaian untuk nilai eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) yang telah dikalikan dengan Faktor Konversi Kredit (FKK).	829.611
11	*Prudent valuation adjustment* berupa faktor pengurang modal dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).	(4.523.359)
12	Penyesuaian lainnya.	-
13	**Total eksposur dalam perhitungan Rasio *Leverage***	**81.790.805**

Analisis Kualitatif

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar RpRp86,07 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara konsolidasi menjadi sebesar Rp81,79 Triliun.

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesar Rp81,79 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp5,40 Triliun, maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2024 sebesar 6,60%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara konsolidasi berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

LR2: Pengungkapan *Leverage* Ratio

(dalam juta rupiah)

Item		Periode T (31 Desember 2024)	Periode T–1 (30 September 2024)
Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca)			
1	Eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Neraca) termasuk aset jaminan, namun tidak termasuk eksposur transaksi derivatif dan eksposur SFT. *Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN	82.222.405	85.115.123

LR2: Pengungkapan *Leverage* Ratio

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2024)	T-1 (30 September 2024)
2	Nilai penambahan kembali untuk agunan derivatif yang diserahkan kepada pihak lawan dan penyediaan agunan tersebut mengakibatkan penurunan total eksposur aset dalam neraca karena adanya penerapan standar akuntansi.	-	-
3	(Pengurangan atas piutang terkait *cash variation* margin yang diberikan dalam transaksi derivatif)	-	-
4	(Penyesuaian untuk surat berharga yang diterima dalam eksposur SFT yang diakui sebagai aset)	-	-
5	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.	-2.993.977	-2.800.535
6	(Aset yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang Modal Inti (*tier* 1) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.)	-1.529.382	-3.696.064
7	Total eksposur Aset dalam Laporan Posisi Keuangan (Keuangan) (Penjumlahan dari baris 1 sampai dengan baris 6)	77.699.046	78.618.524
Eksposur Transaksi Derivatif			
8	Nilai *Replacement Cost* (RC) untuk seluruh transaksi derivatif baik dalam hal terdapat variation margin yang memenuhi syarat ataupun terdapat perjanjian saling hapus yang memenuhi persyaratan tertentu.	16.876	1604,0
9	Nilai penambahan yang merupakan *Potential Futures Exposures* (PFE) untuk seluruh transaksi derivatif.	21.377	19313,0
10	(pengecualian atas eksposur transaksi derivatif yang diselesaikan melalui central *counterparty* (CCP)).	-	-
11	Penyesuaian untuk nilai nosional efektif dari derivatif kredit.	-	-
12	(Penyesuaian untuk nilai nosional efektif yang dilakukan saling hapus dan pengurangan *add-on* untuk transaksi penjualan kredit derivatif).	-	-
13	Total Eksposur Transaksi Derivatif (Penjumlahan baris 8 sampai dengan baris 12).	38.253	20.917
Eksposur *Securities Financing Transaction* (SFT)			
14	Nilai *Gross* SFT	3223895,718	1468932,091
15	(Nilai bersih antara liabilitas kas dan tagihan kas)	-	-
16	Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan terkait aset SFT yang mengacu perhitungan Current Exposure sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.	-	-
17	Eksposur sebagai agen SFT	-	-
18	Total Eksposur SFT (Penjumlahan baris 14 sampai dengan baris 17)	3.223.896	1.468.932
Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA)			
19	Nilai seluruh kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi. *Nilai *gross* sebelum dikurangi CKPN	4706819,309	4372854,584
20	(Penyesuaian terhadap hasil perkalian antara nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontijensi dan Faktor Konversi Kredit (FKK)kemudian dikurangi CKPN)	(3.877.209)	(3544513,442)
21	(Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) atas TRA tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku).	-	-

LR2: Pengungkapan *Leverage* Ratio

(dalam juta rupiah)

	Item	Periode	
		T (31 Desember 2024)	T-1 (30 September 2024)
22	Total Eksposur Transaksi Rekening Administratif (TRA) (Penjumlahan dari baris 19 sampai dengan baris 21)	829.611	828.341
Modal dan Total Eksposur			
23	Modal Inti (*Tier* 1)	5.401.052	6.308.592
24	Total eksposur (Penjumlahan baris 7, 13, 18, dan 22)	81.790.805	80.936.715
Rasio *Leverage*			
25	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	6,60%	7,79%
25a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi giro wajib minimum (jika ada)	6,60%	7,79%
26	Nilai Minimum Rasio *Leverage*	3,00%	3,00%
27	Buffer terhadap nilai Rasio *Leverage*	0,00	0,00
Pengungkapan Niai Rata-rata			
28	Nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross*, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	3.223.896	1.468.932
29	Nilai akhir triwulan laporan dari nilai tercatat aset SFT secara gross, setelah penyesuaian untuk transaksi akuntansi penjualan (*sale accounting transaction*) yang dihitung secara bersih (*nett*) dengan liabilitas kas dalam SFT dan tagihan kas dalam SFT	3.223.896	1.468.932
30	Total Eksposur, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	81.790.805	80.936.715
30a	Total eksposur, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	81.790.805	80.936.715
31	Nilai Rasio Pengungkit, termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	6,60%	7,79%
31a	Nilai Rasio Pengungkit, tidak termasuk dampak dari penyesuaian terhadap pengecualian sementara atas penempatan giro pada Bank Indonesia dalam rangka memenuhi ketentuan giro wajib minimum (jika ada), yang telah memasukkan nilai rata-rata dari nilai tercatat aset SFT secara *gross* sebagaimana dimaksud dalam baris 28	6,60%	7,79%
Analisis Kualitatif			

Total aset di laporan posisi keuangan pada laporan keuangan publikasi (sebelum dikurangi CKPN) adalah sebesar Rp86,07 Triliun. Setelah ditambah dengan eksposur transaksi derivatif, TRA dan dilakukan penyesuaian penilaian prudensial maka Total Eksposur dalam perhitungan Rasio Pengungkit secara konsolidasi menjadi sebesar Rp81,79 Triliun.

Dengan Total Eksposur Rasio Pengungkit sebesar Rp81,79 Triliun dan Total Modal Inti sebesar Rp5,40 Triliun, maka didapatkan Rasio Pengungkit pada Triwulan IV 2024 sebesar 6,60%. Rasio Pengungkit PT. Bank KB Bukopin Tbk. secara konsolidasi berada di atas nilai minimum Rasio Pengungkit yang ditetapkan Regulator (3%).

INFORMASI EKSPOSUR RISIKO DAN PERMODALAN

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 32/POJK.03/2016 yang merupakan perubahan atas POJK Nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Pasal 13A mengatur bahwa Bank wajib mencantumkan informasi kuantitatif terkait eksposur risiko dalam Laporan Publikasi. Ketentuan ini juga diperkuat melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional, serta POJK Nomor 18/POJK.03/2016 mengenai Penerapan Manajemen Risiko.

Profil Risiko dan Pengelolaannya

KB Bank menerapkan manajemen risiko yang komprehensif untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasionalnya. Profil risiko bank mencakup berbagai aspek, termasuk risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, serta risiko strategis. Untuk mengelola risiko ini, KB Bank menerapkan pendekatan berbasis prinsip *Three Lines of Defense*, di mana unit bisnis bertindak sebagai garda terdepan dalam pengambilan risiko, diikuti oleh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan sebagai pengawas independen, serta *audit* internal yang memastikan efektivitas pengendalian risiko. Selain itu, KB Bank secara berkala meninjau kebijakan dan prosedur manajemen risikonya, menyesuaikan dengan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta dinamika pasar. Dengan sistem pemantauan yang ketat dan strategi mitigasi yang terarah, KB Bank berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan pengelolaan risiko yang sehat guna menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

Risiko Kredit

Risiko Kredit – Pengungkapan Kualitatif Umum

Berdasarkan Kebijakan Manajemen Risiko (internal), Risiko Kredit merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada Bank dan/atau Perusahaan Anak. Risiko ini mencakup kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, *settlement risk*, serta *country risk*.

Untuk meningkatkan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan Risiko Kredit, Bank telah me*net*apkan struktur organisasi yang secara jelas memisahkan fungsi dalam tiga lini pertahanan, yaitu lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua, dan lini pertahanan ketiga.

1. Cerminan Model Bisnis Dalam Komponen Profil Risiko Kredit Bank
   Strategi manajemen Risiko Kredit Bank dirancang untuk jangka panjang guna memastikan keberlanjutan usaha, kecukupan permodalan, serta pengelolaan risiko yang efektif. Penyusunan strategi ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk perkembangan ekonomi, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan kondisi keuangan.

Bank berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian *non-performing assets* secara tepat waktu guna memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan stabilitas keuangan (*soundness*). Upaya ini didukung dengan peningkatan produktivitas melalui penguatan kapabilitas organisasi serta pengembangan infrastruktur teknologi informasi (TI). Selain itu, Bank berfokus pada peningkatan profitabilitas, optimalisasi portofolio aset, dan penguatan struktur permodalan agar tercipta siklus pertumbuhan yang berkelanjutan. Arah Strategi Bank di Tahun 2024:

a. *Capital Structure Advancement*. Penguatan struktur permodalan dan memastikan kesesuaian dengan regulasi melalui peningkatan profitabilitas dan inisiatif penghematan faktor pengurang modal serta implementasi teknik mitigasi risiko kredit.
b. *Portfolio Improvement*. Penyelesaian *bad asset*, membangun model penjualan yang baru dengan berfokus pada bisnis yang telah dikuasai bank, pembentukan portofolio *good asset* melalui ekspansi bisnis dan rekomposisi DPK dan peningkatan CASA, memperkuat *credit management*
c. *Productivity Enhancement*. Efisiensi terus dilakukan baik dari sisi menekan biaya *overhead,* peningkatan infrastruktur dan sistem manajemen bank dan inovasi untuk menciptakan organisasi yang *capable*.

Transformasi Bank dirancang untuk berlangsung secara berkelanjutan, seiring dengan dinamika perkembangan bisnis. Proses ini dibagi menjadi tiga tahap berdasarkan proyeksi waktu:

- Fase pertama (2023-2024): Fokus pada pemulihan fundamental dasar guna memperkuat fondasi bisnis dan operasional Bank.
- Fase kedua (2025-2026): Mengadaptasi strategi dan praktik terbaik dari *market leader*, sekaligus membangun serta memperkuat daya saing Bank di industri perbankan.
- Fase ketiga (2027 dan seterusnya): Bertransisi menuju posisi sebagai pemimpin pasar dengan menonjolkan inovasi sebagai keunggulan kompetitif utama.

2. Kriteria dan Pendekatan untuk Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
   Penyusunan strategi, kebijakan, prosedur, dan pe*net*apan limit harus selaras dengan visi, misi, serta strategi bisnis Bank. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti jenis dan kompleksitas usaha, profil risiko, tingkat risiko yang dapat ditoleransi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Untuk mendukung penerapan manajemen Risiko Kredit, Bank telah me*net*apkan Kebijakan Manajemen Risiko, Kebijakan Manajemen Risiko Kredit, dan Piagam Komite Manajemen Risiko. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit berfungsi sebagai payung dalam pengelolaan Risiko Kredit, sementara kebijakan Produk Program menjadi standar bagi unit bisnis dalam pengembangan produk perbankan.

3. Struktur dan Organisasi Manajemen Risiko Kredit serta Fungsi Kontrol
   Pengawasan aktif oleh Direksi (BOD) dan Dewan Komisaris (BOC) terhadap Risiko Kredit dilakukan melalui berbagai komite yang berfungsi secara konsisten. Pembahasan umumnya mencakup evaluasi profil risiko kredit secara triwulanan serta pemantauan rasio-rasio kredit setiap bulan, dengan batasan yang telah ditetapkan sesuai kebijakan internal yang berlaku. Selain Komite Manajemen Risiko (RMC) dan Komite Pemantau Risiko (ROC), Bank juga memiliki Komite Kredit yang bertanggung jawab atas proses perkreditan. Komite ini mengadakan pertemuan rutin sesuai dengan piagam yang berlaku serta mengadakan kajian tambahan jika diperlukan berdasarkan kebutuhan internal.

   Struktur organisasi terbaru tercantum dalam Surat Keputusan No. 101 Tahun 2024 tanggal 02 September 2024 mengenai Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk. Manajemen Risiko Kredit diimplementasikan berdasarkan prinsip *Three Lines of Defence*, di mana *Risk Taking Unit* termasuk tim bisnis dan kredit, berperan sebagai *1st Line of Defence*. Sementara itu, Risi Group dan Kepatuhan bertindak sebagai *2nd Line of Defence*, dan Internal *Audit* berfungsi sebagai *3rd Line of Defence*. Struktur organisasi ini mencerminkan pembagian tugas serta kewenangan yang telah disesuaikan dengan deskripsi pekerjaan masing-masing fungsi.

   Untuk memperkuat sistem pengendalian risiko, Bank telah menambahkan posisi Risk Management *Division Head* dalam struktur organisasinya. Ke depan, Bank akan terus melakukan penyesuaian guna memastikan kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung efektivitas operasional.

4. Hubungan Fungsi Manajemen Risiko Kredit, Pengendalian Risiko, Kepatuhan, dan *Audit* Internal
   Sesuai dengan prinsip *Three Lines of Defence*, Grup Kepatuhan dan Manajemen Risiko berperan sebagai *2nd Line of Defence*, yang bertugas melakukan pemantauan secara independen. Grup Manajemen Risiko bertanggung jawab dalam merancang, meninjau, serta memperbarui kebijakan, batasan risiko, dan perangkat manajemen risiko secara berkala. Selain itu, grup ini juga mengawasi serta memberikan arahan kepada *1st Line of Defence* dalam penerapan manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Sementara itu, Divisi Kepatuhan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional Bank di setiap tingkatan organisasi telah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta otoritas terkait lainnya.

   Di sisi lain, *Audit* Internal berfungsi sebagai *3rd Line of Defence* dengan tugas utama melakukan evaluasi independen terhadap penerapan manajemen risiko di *1st* dan *2nd Line of Defence*. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas serta kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

   Pengendalian internal dijalankan melalui program kerja rutin Satuan Kerja *Audit* Intern (SKAI), yang melaksanakan *audit* menyeluruh sebagai bagian dari *3rd Line of Defence*. Pemantauan terhadap kualitas kredit Bank dilakukan oleh *Enterprise Risk Management Department* dan *Credit Risk Management Department* sebagai bagian dari *2nd Line of Defence*, yang bekerja sama dengan *Risk Taking Unit* di *1st Line of Defence* guna memastikan adanya pemisahan tugas (*segregation of duties*). Selain unit-unit tersebut, berbagai departemen lain juga turut mendukung penerapan manajemen Risiko Kredit yang efektif.

5. Informasi Utama Laporan Eksposur Risiko Kredit
   Risk Group secara rutin melaporkan perkembangan risiko kepada Direksi melalui Komite Manajemen Risiko serta kepada Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko. Selain itu, penyempurnaan tata kelola dalam proses perkreditan secara menyeluruh (*end-to-end process*) terus dilakukan, termasuk melalui pemantauan rasio kredit secara keseluruhan (*bankwide*) dan berbagai langkah strategis lainnya.

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Pengungkapan Tambahan terkait Kualitas Kredit atas Aset (CRB)

a) Kualitatif

1. Tagihan yang Telah Jatuh Tempo, mengacu pada kategori portofolio tagihan yang telah jatuh tempo sebagaimana Lampiran A Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. SEOJK 24/SEOJK.03/2021.
2. Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai, tagihan yang berada pada *stage* 2 (aset kurang baik) dan *stage* 3 (aset tidak baik)
3. Evaluasi penurunan nilai dilakukan terhadap kredit yang diberikan dalam klasifikasi dan pengukuran selain nilai wajar melalui laba rugi. Tujuan dari penurunan nilai adalah untuk mengakui kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*) sepanjang umurnya atas semua instrumen keuangan yang telah mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, baik dinilai secara individu atau kolektif dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan mendukung, termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*).

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.364.694	-	-	16.364.694	16.432.697	-	-	16.432.697
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	3.291.165	164	-	3.291.329	2.996.050	355	-	2.996.405
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	495.509	14.553	5	510.067	367.285	53	4	367.342
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	908.081	-	-	908.081	1.522.780	2.193	-	1.524.972
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	2.689.472	279.808	337.579	3.306.858	3.272.634	532.882	614.502	4.420.018
9	Kredit Beragun Properti Komersial	6.102.422	274.763	362.067	6.739.252	9.332.327	596.499	1.170.748	11.099.573
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	600	-	600
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	5.842.925	1.225.492	3.155.775	10.224.191	5.265.610	1.199.709	2.723.110	9.188.429

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.352.905	61.162	92.654	1.506.721	1.968.052	155.655	258.257	2.381.963
13	Tagihan kepada Korporasi	16.751.553	70.337	86.299	16.908.189	12.823.215	318.674	181.581	13.323.469
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	4.947.546	359.127	417.342	5.724.015	4.225.728	225.339	306.907	4.757.974
15	Aset Lainnya	7.528.535	-	-	7.528.535	7.435.101	-	-	7.435.101
	Total	**66.324.806**	**2.285.405**	**4.451.721**	**73.061.932**	**65.691.479**	**3.031.958**	**5.255.108**	**73.978.544**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
1	Tagihan kepada Pemerintah	16.364.694	-	-	16.364.694	17.656.442	-	-	17.656.442
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	3.387.612	164	-	3.387.776	2.996.050	355	217	2.996.622
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	495.509	14.553	5	510.067	401.412	57	7	401.476
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	908.081	-	-	908.081	1.522.780	2.193	-	1.524.972
7	Tagihan berupa Surat Berharga/Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	50.000	-	-	50.000	50.000	-	-	50.000
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	2.731.513	341.448	345.843	3.418.805	3.327.290	601.335	626.448	4.555.073
9	Kredit Beragun Properti Komersial	6.660.835	276.125	364.700	7.301.660	9.879.549	597.886	1.173.460	11.650.895

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak per 31 Desember 2024

(dalam jutaan rupiah)

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Tagihan Bersih Berdasarkan Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	f	i	j	m	n
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	600	-	600
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	5.908.625	1.249.012	3.167.833	10.325.470	5.309.659	1.221.607	2.734.552	9.265.818
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.823.037	162.601	142.595	2.128.233	2.432.902	278.027	321.641	3.032.569
13	Tagihan kepada Korporasi	20.415.318	802.310	387.100	21.604.728	15.787.726	1.080.900	595.460	17.464.086
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	5.255.637	409.660	460.404	6.125.701	4.349.540	252.481	376.532	4.978.553
15	Aset Lainnya	7.528.535	-	-	7.528.535	7.845.225	13.390	113.215	7.971.830
Total		**71.529.396**	**3.255.873**	**4.868.481**	**79.653.749**	**71.558.573**	**4.048.831**	**5.941.531**	**81.548.936**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank Secara Individu

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.499.200	792.111	2.311.657	3.761.725	-	16.364.694
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	390.476	1.176.601	11.053	1.713.199	-	3.291.329
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	476	-	81.318	-	428.273	510.067
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	503.718	364.363	40.000	-	-	908.081
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	50.000	-	-	-	50.000
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	975.927	114.709	847.787	1.368.434	-	3.306.858
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.830.775	1.592.290	1.451.337	864.850	-	6.739.252
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	124.617	447.910	641.732	9.009.933	-	10.224.191
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	974.011	258.835	138.488	135.387	-	1.506.721
13	Tagihan kepada Korporasi	4.276.881	3.390.721	3.570.910	5.669.677	-	16.908.189
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.287.772	1.221.536	1.685.531	1.529.176	-	5.724.015
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	7.528.535	7.528.535
Total		**20.863.853**	**9.409.077**	**10.779.813**	**24.052.381**	**7.956.808**	**73.061.932**

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023 (*Audited*)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	i	j	k	l	m	n
	6.959.641	1.236.459	2.034.420	6.036.312	165.865	16.432.697
	210.323	355	1.151.665	1.634.061	-	2.996.405
	-	-	-	-	-	-
	1	-	-	-	367.341	367.342
	-	-	-	-	-	-
	1.031.775	491.002	-	2.195	-	1.524.972
	-	-	50.000	-	-	50.000
	645.694	691.187	1.496.383	1.586.754	-	4.420.018
	3.310.880	1.444.408	1.966.623	4.377.662	-	11.099.573
	600	-	-	-	-	600
	94.664	373.268	624.755	8.095.742	-	9.188.429
	1.081.042	443.464	248.817	268.112	340.528	2.381.963
	4.857.337	669.673	3.290.327	4.490.271	15.861	13.323.469
	941.756	768.656	1.007.048	2.040.513	-	4.757.974
	-	-	-	-	7.435.101	7.435.101
	19.133.714	**6.118.473**	**11.870.037**	**28.531.623**	**8.324.697**	**73.978.544**

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sisa Jangka Waktu Kontrak - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Kategori Portofolio	31 Desember 2024 (*Audited*) Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
		< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Tagihan kepada Pemerintah	9.499.200	792.111	2.311.657	3.761.725	-	16.364.694
2	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	390.476	1.176.601	11.053	1.809.646	-	3.387.776
3	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	-	-	-	-	-	-
4	Tagihan kepada Bank	476	-	81.318	-	428.273	510.067
5	Tagihan berupa *Covered Bond*	-	-	-	-	-	-
6	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	503.718	364.363	40.000	-	-	908.081
7	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	-	50.000	-	-	-	50.000
8	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	994.971	129.242	860.371	1.434.221	-	3.418.805
9	Kredit Beragun Properti Komersial	2.849.837	1.632.147	1.510.381	1.309.294	-	7.301.660
10	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	-	-	-	-	-	-
11	Kredit Pegawai atau Pensiunan	141.214	472.703	661.935	9.049.615	3	10.325.470
12	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	1.279.469	351.754	191.510	305.500	-	2.128.233
13	Tagihan kepada Korporasi	5.102.772	4.746.241	4.356.409	7.398.921	385	21.604.728
14	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	1.326.490	1.346.122	1.754.113	1.593.076	105.900	6.125.701
15	Aset Lainnya	-	-	-	-	7.528.535	7.528.535
Total		**22.088.622**	**11.061.286**	**11.778.747**	**26.661.997**	**8.063.097**	**79.653.749**

(dalam jutaan rupiah)

	31 Desember 2023 (*Audited*)					
	Tagihan bersih berdasarkan sisa jangka waktu kontrak					
	< 1 tahun	> 1 thn s.d. 3 thn	> 3 thn s.d. 5 thn	> 5 thn	Non Kontraktual	Total
	i	j	k	l	m	n
	7.244.528	1.236.459	2.034.420	6.036.312	1.104.723	17.656.442
	210.323	376	1.151.665	1.634.061	196	2.996.622
	-	-	-	-	-	-
	34.135	-	-	-	367.341	401.476
	-	-	-	-	-	-
	1.031.775	491.002	-	2.195	-	1.524.972
	-	-	50.000	-	-	50.000
	645.739	692.047	1.499.188	1.586.754	131.345	4.555.073
	3.314.608	1.450.615	1.991.320	4.377.662	516.690	11.650.895
	600	-	-	-	-	600
	94.681	374.566	632.113	8.095.742	68.715	9.265.818
	1.205.685	614.452	380.625	268.112	555.149	3.024.023
	5.105.517	1.178.221	3.764.467	4.490.271	2.936.391	17.474.866
	970.215	820.460	1.081.244	2.041.615	65.085	4.978.620
	-	-	-	-	7.971.831	7.971.831
	19.857.807	**6.858.199**	**12.585.040**	**28.532.725**	**13.717.467**	**81.551.238**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	31 Desember 2024 (*Audited*)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	668.066	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	490.059	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/ Air Panas dan Udara Dingin	-	508.076	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	199.998	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	0	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	11.053	-	81.318	-	746.085	50.000	
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	12.129	119.447	-	-	75.170	0	152.952	-
	9.756	1.779	-	-	2.149	2	148.243	-
	50.219	2.488.893	-	1	3.130	3	239.107	-
	262	13.216	-	-	-	1	208.636	-
	-	1.522	-	-	-	0	1.502	-
	316.981	597.457	-	-	13.713	0	1.082.538	-
	699.366	1.157.114	-	196	35.572	0	622.147	-
	50.506	114.130	-	-	1.581	1	183.749	-
	37.155	562.052	-	-	8.395	0	1.067.633	-
	532.933	9.380	0	0	748	0	6.771	-
	257	76.287	-	-	68.553	1	354.627	-
	169.651	346.828	-	-	2.627	0	830.730	-
	422	657.907	-	-	9.102	0	19.661	-

1) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	475	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	164	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	1	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	16.364.694	1.413.912	-	428.273	-	161.996	-	
Total		**16.364.694**	**3.291.329**	**-**	**510.067**	**-**	**908.081**	**50.000**	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	40.521	27.650	-	-	8.034	0	21.597	-
	-	-	-	-	-	0	-	-
	9.752	353.494	-	-	5.746	0	28.293	-
	1.492	149.433	-	-	1.499	0	14.162	-
	9.920	6.423	-	130	6.945	0	3.772	-
	340	502	-	-	5.809	0	7.327	-
	659	-	-	-	-	0	445	-
	-	-	-	-	-	0	-	-
	1.360.983	55.738	-	10.223.662	728.379	0	728.681	-
	3.552	-	-	202	2.170	0	1.444	-
	-	-	-	-	527.400	7	-	7.528.535
	3.306.858	**6.739.252**	**-**	**10.224.191**	**1.506.721**	**17**	**5.724.015**	**7.528.535**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	31 Desember 2023 (*Audited*)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	895.422	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	446.566	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	300.000	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	2.193	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	20.000	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	1.110.784	50.000	
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	40.564	234.392	-	4.674	71.125	387.063	146.901	-
	17.450	20.961	-	-	7.904	554.552	577.256	-
	253.455	1.685.717	-	11	173.455	2.823.209	63.596	-
	112.205	97.864	-	86	-	1.123.981	184.576	-
	4.742	2.832	-	-	-	43.096	-	-
	770.133	1.107.412	600	-	55.672	192.932	1.132.071	-
	755.027	2.388.242	-	558	134.183	524.250	608.378	-
	190.326	939.850	-	1.232	246.083	309.797	501.357	-
	413.615	2.670.778	-	36	9.517	60.920	282.765	-
	561.121	31.178	-	-	100	120.802	2.939	-
	19.176	28.556	-	-	363.668	528.366	206.442	-
	361.928	804.276	-	111	1.903	19.700	198.959	-
	20.196	176.604	-	-	5.654	7.980	21.495	-
	75.149	38.642	-	241	15.481	485.934	6.687	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	355	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	1	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	16.432.697	1.334.061	-	367.341	-	411.996	-	
Total		**16.432.697**	**2.996.405**	**-**	**367.342**	**-**	**1.524.972**	**50.000**	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.797	511.335	-	-	14.986	41.520	22.657	-
	16.308	106.597	-	34	1.960	4.000	7.162	-
	12.850	137.566	-	301	12.365	-	3.392	-
	10.110	20.458	-	111	8.650	13.848	6.334	-
	809	583	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	715.106	95.729	-	9.180.807	729.689	-	782.581	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	524.834	6.081.521	-	7.435.101
	4.374.066	**11.099.573**	**600**	**9.188.202**	**2.377.230**	**13.323.469**	**4.755.548**	**7.435.101**

Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Tabel Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak per 31 Desember 2024

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	31 Desember 2024 (*Audited*)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	668.066	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	586.506	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	508.076	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	-	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	199.998	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	11.053	-	81.318	-	746.085	50.000	
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	12.129	119.447	-	-	77.240	477.375	156.615	-
	9.756	1.779	-	-	2.149	2.106.536	148.621	-
	50.219	2.488.931	-	1	32.118	3.830.389	244.320	-
	262	13.216	-	-	7.419	1.062.119	248.592	-
	-	1.522	-	-	13	182.528	1.502	-
	317.224	657.142	-	-	77.693	118.185	1.113.161	-
	713.385	1.187.891	-	196	221.783	910.896	750.759	-
	50.506	119.733	-	-	32.861	1.623.951	188.624	-
	37.155	625.580	-	476	70.252	147.296	1.085.946	-
	532.933	9.380	-	-	1.139	462.858	6.771	-
	257	76.287	-	-	107.328	831.500	358.940	-
	169.651	346.828	-	-	22.164	197.727	835.685	-
	772	657.907	-	-	9.957	9.175	23.028	-

2) Pengungkapan Tagihan Bersih Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	475	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	164	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	-	-	1	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	16.364.694	1.413.912	-	428.273	-	161.996	-	
Total		**16.364.694**	**3.387.776**	**-**	**510.067**	**-**	**908.081**	**50.000**	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	40.521	30.283	-	-	22.713	536.552	40.866	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.482	537.257	-	-	123.753	817.093	28.470	-
	1.492	365.813	-	-	24.391	740.547	74.745	-
	9.920	6.423	-	130	6.945	858	3.772	-
	10.095	502	-	-	9.607	70.170	7.809	-
	659	-	-	-	-	48.645	445	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1.447.786	55.738	-	10.316.024	747.537	17.657	805.587	-
	3.552	-	-	8.642	3.771	532	1.444	-
	-	-	-	-	527.402	7.412.141	-	7.528.535
	3.418.756	**7.301.660**	**-**	**10.325.470**	**2.128.233**	**21.604.728**	**6.125.701**	**7.528.535**

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
	31 Desember 2023 (*Audited*)								
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pertambangan dan Penggalian	-	895.422	-	-	-	-	-	
3	Industri pengolahan	-	446.566	-	-	-	-	-	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	-	300.000	-	-	-	-	-	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	-	-	-	-	-	-	-	
6	Konstruksi	-	-	-	-	-	-	-	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	-	-	-	-	-	2.193	-	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	-	20.000	-	-	-	-	-	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	-	-	-	-	-	-	-	
10	Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	-	-	-	-	-	1.110.784	50.000	
12	Real Estate	-	-	-	-	-	-	-	
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	40.564	234.392	-	4.674	74.344	541.543	146.987	-
	17.450	20.961	-	-	7.904	651.982	577.618	-
	253.455	1.686.185	-	11	203.046	3.202.093	64.636	-
	112.205	97.864	-	86	4.332	1.409.177	184.576	-
	4.742	2.832	-	-	-	43.096	-	-
	776.076	1.181.719	600	-	114.006	251.470	1.157.579	-
	769.720	2.424.048	-	558	330.882	1.201.763	638.836	-
	190.326	946.215	-	1.232	275.080	763.341	504.087	-
	413.615	2.736.113	-	36	109.727	139.482	285.635	-
	561.121	31.178	-	-	100	120.802	2.939	-
	19.176	28.556	-	-	408.332	644.780	207.864	-
	362.432	811.691	-	111	33.303	314.805	209.540	-
	20.196	176.604	-	-	5.654	7.980	21.495	-

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan kepada Pemerintah	Tagihan kepada Entitas Sektor Publik	Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional	Tagihan kepada Bank	Tagihan berupa *Covered Bond*	Tagihan kepada Perusahaan Efek dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	Tagihan berupa Surat Berharga/ Piutang Subordinasi, Ekuitas, dan Instrumen Modal Lainnya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	-	355	-	-	-	-	-	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	-	-	-	-	-	-	-	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja: Aktivitas yang Menghasilkan Barang dan Jasa oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuh Sendiri	-	-	-	-	-	-	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	-	196	-	1	-	-	-	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	21	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	17.656.442	1.334.061	-	401.476	-	411.996	-	
Total		**17.656.442**	**2.996.622**	**-**	**401.476**	**-**	**1.524.972**	**50.000**	

(dalam jutaan rupiah)

	Kredit Beragun Properti Rumah Tinggal	Kredit Beragun Properti Komersial	Kredit untuk Pengadaan Tanah, Pengolahan Tanah, dan Konstruksi	Kredit Pegawai atau Pensiunan	Tagihan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Portofolio Ritel	Tagihan kepada Korporasi	Tagihan yang Telah Jatuh Tempo	Aset Lainnya
	j	k	l	m	n	o	p	q
	75.149	38.642	-	241	15.481	485.934	6.687	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	24.284	693.689	-	-	78.376	777.312	30.828	-
	16.380	285.870	-	34	11.562	423.822	36.345	-
	14.114	137.566	-	301	16.743	174.288	3.392	-
	10.110	20.458	-	111	8.650	13.848	6.334	-
	809	583	-	-	-	49.483	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	818.952	95.729	-	9.242.600	747.629	24.670	816.326	-
	8.244	-	-	15.596	842	54.059	473	-
	-	-	-	-	524.834	6.081.521	-	7.971.831
4.509.121	**4.509.121**	**11.650.895**	**600**	**9.265.591**	**2.970.828**	**17.377.250**	**4.902.177**	**7.971.831**

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

1) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank Secara Individu (dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024 (*Audited*) Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n
1	Tagihan	68.049.057	2.549.151	4.810.513	75.408.721	62.469.306	3.275.166	5.591.413	71.335.885
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	7.784.248	728.929	941.845	9.455.022	8.573.894	412.375	670.399	9.656.668
	a. Belum jatuh tempo	1.250.208	118.371	179.675	1.548.253	2.261.363	50.415	90.738	2.402.516
	b. Telah jatuh tempo	6.534.041	610.558	762.171	7.906.769	6.312.530	361.960	579.661	7.254.152
3	CKPN - *Stage* 1	369.466	31.142	70.778	471.386	384.774	32.677	55.647	473.098
4	CKPN - *Stage* 2	351.491	17.521	15.392	384.403	784.033	5.168	7.042	796.244
5	CKPN - *Stage* 3	1.372.760	246.226	343.400	1.962.386	1.741.708	125.237	271.356	2.138.301
6	Tagihan yang dihapus buku				15.035.697				12.523.033

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak per 31 Desember 2024

2) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Wilayah - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2024 (*Audited*) Wilayah				31 Desember 2023 (*Audited*) Wilayah			
		Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total	Jawa	Sumatera	Lain-lain	Total
a	b	c	d	e	h	i	j	k	n
1	Tagihan	73.280.173	3.521.580	5.228.659	82.030.412	68.345.464	4.307.231	6.253.584	78.906.278
2	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai	8.380.648	882.692	1.009.723	10.273.063	8.586.416	443.536	711.242	9.741.194
	a. Belum jatuh tempo	1.519.121	219.640	203.134	1.941.895	2.633.965	110.173	150.211	2.894.348
	b. Telah jatuh tempo	6.861.527	663.052	806.589	8.331.168	6.481.087	408.621	655.690	7.545.398
3	CKPN - *Stage* 1	419.121	39.874	74.207	533.202	440.700	41.905	317.388	799.993
4	CKPN - *Stage* 2	383.495	19.267	15.604	418.367	805.880	5.933	8.124	819.937
5	CKPN - *Stage* 3	1.504.222	259.033	357.426	2.120.681	1.822.385	142.407	319.660	2.284.452
6	Tagihan yang dihapus buku				15.323.020				13.111.741

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Individual per 31 Desember 2024

1) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2024 (*Audited*)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	755.807	7.867	216.267	5.941	448	63.267	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.643.599	-	157.587	30.643	1.862	7.482	
3	Industri pengolahan	6.684.449	217.625	364.803	48.235	56.812	89.975	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.635.790	2.263	281.979	16.731	26.249	47.438	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	185.608	-	1.558	2.213	56	-	
6	Konstruksi	2.189.907	103.871	1.218.904	10.818	44.639	97.105	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	3.175.851	138.027	868.260	27.521	56.205	195.647	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	1.706.930	18.492	265.070	17.344	3.074	79.084	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1.849.611	151.935	1.233.676	5.859	39.966	132.784	
10	Informasi dan Komunikasi	919.398	5.269	8.140	11.100	341	1.201	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.177.172	47.499	570.742	20.950	32.642	200.421	
12	Real Estate	1.453.410	200.867	912.033	4.190	70.486	14.088	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	700.598	5.615	25.575	8.228	244	5.782	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	520.598	26.344	30.050	5.908	1.564	7.809	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	410.756	319.464	31.594	830	10.868	2.603	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	362.506	18.406	17.503	4.042	855	3.143	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	28.582	359	5.115	340	48	1.344	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	31.097	6.053	23.964	12	368	16.751	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.296	696	600	-	37	155	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	

1) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank Secara Individu

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
22	Rumah Tangga	14.084.934	275.624	1.671.601	224.938	37.326	950.118	
23	Bukan Lapangan Usaha	7.814	1.978	1.750	49	139	307	
24	Lainnya	33.883.007	-	-	25.494	175	45.881	
Total		**75.408.721**	**1.548.253**	**7.906.769**	**471.386**	**384.403**	**1.962.386**	**15.035.697**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2023 (*Audited*)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	924.532	968	186.681	10.038	29.913	9.953	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.355.983	3.407	3.407	18.980	130	282.307	
3	Industri pengolahan	5.557.796	108.910	108.910	68.876	38.442	70.782	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.837.904	-	-	20.781	9.554	8.859	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	50.799	1.828	1.828	617	137	43	
6	Konstruksi	3.633.799	486.028	486.028	25.235	301.130	90.043	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.929.221	230.421	230.421	49.441	117.602	267.298	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.341.064	20.612	20.612	21.642	23.160	154.331	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.625.104	1.113.269	1.113.269	29.243	180.175	7.016	
10	Informasi dan Komunikasi	718.492	-	-	9.017	-	1.326	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.926.984	30.651	30.651	31.939	3.023	80.453	
12	Real Estate	1.430.061	4.893	4.893	15.114	11.962	31.188	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	243.984	6.969	6.969	2.601	-	10.318	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	632.048	5.736	5.736	8.087	511	14.857	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
16	Pendidikan	620.510	-	-	7.900	403	5.333	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	150.070	4.609	4.609	1.819	-	13.875	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	229.681	189.380	189.380	439	59.999	774	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	61.393	-	-	685	-	1.636	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	1.478	878	878	8	86	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	12.569.498	191.479	191.479	107.780	19.747	1.075.953	
23	Bukan Lapangan Usaha	-	-	-	-	-	-	
24	Lainnya	22.329.722	-	-	42.639	239	11.466	
Total		**67.170.123**	**2.400.037**	**2.585.749**	**472.882**	**796.212**	**2.137.811**	**12.523.033**

Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

Tabel Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak per 31 Desember 2024

2) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2024 (*Audited*)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	907.180	7.867	220.566	7.420	448	63.953	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.951.541	8.637	160.638	36.478	2.285	10.028	
3	Industri pengolahan	7.381.458	222.016	371.617	55.213	56.903	91.754	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	1.913.388	2.263	321.952	19.107	26.249	47.854	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	186.402	-	2.339	2.213	56	781	
6	Konstruksi	2.425.520	128.069	1.250.171	12.687	44.961	101.162	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4.041.716	289.802	1.001.508	33.538	64.707	251.524	

2) Pengungkapan Tagihan dan Pencadangan Berdasarkan Sektor Ekonomi - Bank secara Konsolidasi dengan Entitas Anak (dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2024 (*Audited*)							
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.301.525	18.492	272.198	23.497	3.074	85.693	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.140.263	218.923	1.251.989	8.056	40.640	137.675	
10	Informasi dan Komunikasi	1.015.123	5.269	8.416	12.030	341	1.477	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	2.495.939	82.214	575.158	23.748	51.800	202.555	
12	Real Estate	1.656.731	200.867	917.090	5.736	70.486	16.933	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	706.866	5.615	28.942	8.257	244	5.935	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	683.390	53.980	51.480	7.119	1.841	11.346	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	90	-	90	-	-	90	
16	Pendidikan	1.530.765	332.893	32.009	11.813	11.018	2.904	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	1.211.296	67.917	78.233	11.496	4.611	17.036	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	29.439	359	5.115	349	48	1.344	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	122.043	8.727	30.231	1.031	434	22.728	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	50.049	696	709	486	37	264	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	42	-	42	-	-	42	
22	Rumah Tangga	14.377.809	283.979	1.748.536	227.374	39.045	999.281	
23	Bukan Lapangan Usaha	18.393	3.308	1.756	438	152	313	
24	Lainnya	33.883.390	-	381	25.494	175	46.262	
Total		**82.030.360**	**1.941.895**	**8.331.167**	**533.578**	**419.557**	**2.118.933**	**15.323.020**

(dalam jutaan rupiah)

No.	Sektor Ekonomi	Tagihan	Tagihan yang Mengalami Penurunan Nilai		CKPN *Stage* 1	CKPN *Stage* 2	CKPN *Stage* 3	Tagihan yang dihapus buku
			Belum Jatuh Tempo	Telah Jatuh Tempo				
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	31 Desember 2023 (*Audited*)							
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.082.237	158.586	186.768	11.562	29.966	9.953	
2	Pertambangan dan Penggalian	2.456.787	100.653	6.804	19.953	465	285.094	
3	Industri pengolahan	5.988.110	517.090	110.300	72.388	38.892	71.079	
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	2.127.060	289.156	-	23.650	9.557	8.859	
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah	50.799	1.828	1.828	617	137	43	
6	Konstruksi	3.860.327	683.241	514.795	26.902	301.597	93.295	
7	Perdagangan besar dan eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	5.941.039	1.125.783	346.886	56.807	120.114	276.630	
8	Pengangkutan dan Pergudangan	2.862.916	440.216	40.639	26.218	24.095	168.982	
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.873.627	1.357.092	1.117.970	31.679	180.175	7.803	
10	Informasi dan Komunikasi	790.011	71.519	-	9.733	-	1.326	
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	3.089.305	191.417	32.206	33.190	3.384	80.586	
12	Real Estate	1.594.703	165.316	9.112	16.609	11.971	31.415	
13	Aktivitas Profesi, Ilmiah, dan Teknis	263.370	20.777	12.546	2.737	-	10.496	
14	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan, dan Penunjang Usaha Lainnya	792.707	161.780	10.350	9.482	661	14.976	
15	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-	-	-	-	-	
16	Pendidikan	1.607.499	986.812	177	17.464	519	5.339	
17	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	792.818	611.390	35.182	7.301	792	14.434	
18	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	255.387	190.086	189.380	1.068	59.999	774	
19	Aktivitas Jasa Lainnya	241.812	178.782	1.639	2.439	26	3.193	
20	Aktivitas Rumah Tangga sebagai Pemberi Kerja	50.792	50.192	878	502	86	-	
21	Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	-	-	-	-	
22	Rumah Tangga	12.835.876	397.361	251.976	109.560	20.011	1.100.247	
23	Bukan Lapangan Usaha	78.952	78.157	795	329	15	123	
24	Lainnya	22.384.411	3.393	52.199	42.650	239	66.952	
Total		**73.020.545**	**7.780.625**	**2.922.428**	**522.837**	**802.702**	**2.251.600**	**12.523.033**

Pengungkapan *Counterparty Credit Risk*

Indonesia Banks harus menyediakan:	
(a)Tujuan manajemen risiko dan kebijakan terkait risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), termasuk:	Baik Transaksi *Repo* maupun *Reverse Repo*, KB Bank mengacu kepada Surat Edaran OJK No.24/SEOJK.03/2021 tentang Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang menurut risiko untuk risiko Kredit dengan menggunakan pendekatan standar.
(b)Metode yang digunakan untuk menerapkan limit operasi yang didefinisikan pada *internal capital* untuk *counterparty credit exposures* dan untuk eksposur CCP;	
(c)Kebijakan yang berkaitan dengan garansi dan mitigasi risiko dan penilaian terkait *counterparty risk*, termasuk eksposur *towards* CCP;	
(d)Kebijakan terkait eksposur *wrong-way risk*;	
(e)Dampak pada nilai jaminan yang dibutuhkan untuk menyediakan penurunan peringkat kredit.	

Analisis Tagihan Bersih Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan berdasarkan pendekatan yang digunakan

No		*Replacement Cost* (RC)	*Potential Future Exposure* (PFE)	EEPE	Alpha digunakan untuk perhitungan *regulatory* EAD	Tagihan Bersih	ATMR
1	SA-CCR (untuk derivatif)	12.054	15.269		1,4	38.252	7.650
2	Metode Internal Model (untuk derivatif dan SFT)					N/A	N/A
3	Pendekatan sederhana untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
4	Pendekatan komprehensif untuk mitigasi risiko kredit (untuk SFT)					N/A	N/A
5	VaR untuk SFT					N/A	N/A
	Total						**7.650**

Analisis Kualitatif

Sesuai dengan SEOJK Nomor 48/SEOJK.03/2017, Perhitungan ATMR Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan dengan Metode Pendekatan Standar atas Transaksi Derivatif Bank menggunakan metode analisis perhitungan *Replacement Cost* transaksi derivatif tanpa margin.

Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko

Tabel Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko per 31 Desember 2024

Bobot Risiko	a 0%	b 10%	c 20%	d 50%	e 75%	f 100%	g 150%	h Lainnya	i Total Tagihan Bersih
Kategori Portofolio									-
Tagihan kepada Pemerintah dan Bank Sentral	-								-
Tagihan kepada Entitas Sektor Publik									-
Tagihan kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional									-

Tabel Eksposur CCR berdasarkan Kategori Portofolio dan Bobot Risiko per 31 Desember 2024

Bobot Risiko	a 0%	b 10%	c 20%	d 50%	e 75%	f 100%	g 150%	h Lainnya	i Total Tagihan Bersih
Tagihan kepada Bank Lain									-
Tagihan kepada perusahaan sekuritas									-
Tagihan kepada Korporasi									-
Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel									-
Aset lainnya									-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Analisis Kualitatif

Eksposur *Counterparty Credit Risk* pada Desember 2024 berasal dari instrumen *repo* dan *reverse repo*, tergolong pada kategori portofolio Tagihan pada Pemerintah dengan bobot risiko 0%. Pada Desember 2024, PT Bank KB Bukopin, Tbk tidak memiliki instrumen *repo* dan *reverse repo*.

Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR 6)

Tabel Tagihan Bersih Derivatif Kredit (CCR 6) per 31 Desember 2024

	a Proteksi yang dibeli (*Protection bought*)	b Proteksi yang dijual (*Protection sold*)
Nilai Notional		
Single-name credit default swaps		
Index credit default swaps		
Total *return swaps*		
Credit options		
Derivatif kredit lainnya		
Total Nilai Notional		
Nilai wajar		
Nilai wajar positif (aset)		
Nilai wajar negatif (kewajiban)		

Analisis Kualitatif

Pada posisi 31 Desember 2024, PT Bank KB Bukopin, Tbk tidak memiliki tagihan bersih derivatif kredit (*counterparty credit risk*).

Pengungkapan Kualitatif Mengenai Eksposur Sekuritisasi (SECA)

Pengungkapan Kualitatif	
A) Bank harus mendeskripsikan tujuan manajemen risiko dan kebijakan untuk aktivitas sekuritisasi dan fitur utama dari aktivitas ini berdasarkan kerangka di bawah ini. Jika bank mempunyai posisi sekuritisasi pada laporan posisi keuangan dan transaksi rekening administratif, bank harus menjelaskan poin-poin dibawah ini dengan aktivitas berbeda pada setiap *regulatory books*.	
Tujuan bank terkait sekuritisasi dan aktivitas re-sekuritisasi, termasuk aktivitas pemindahan risiko kredit dari eksposur sekuritisasi yang mendasari dari bank kepada entitas lain, tipe risiko yang diasumsikan dan tipe risiko yang dipertahankan.	Sebagai upaya diversifikasi risiko, Perseroan menempatkan sejumlah portofolio dalam bentuk sekuritisasi atau Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA). Perseroan telah melakukan sekuritisasi pertama atas kumpulan tagihan kredit pensiunan yang selanjutnya dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Bahana PT Bank KB Bukopin Tbk – Kumpulan Tagihan Kredit Pensiunan yang Dialihkan (KIK EBA BB). Selanjutnya, KIK-EBA BB menerbitkan Efek Beragun Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan.

Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book*

Tabel Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* per 31 Desember 2024

No		a	b	c	e	f	g	i	j	k
		Bank sebagai *originator*			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total	Traditional	Sintetis	Sub-total
1	*Retail* (total) –antara lain	-	-	-	-	-	-	119.600	-	119.600
2	Kredit perumahan									
3	Kartu kredit									
4	Eksposur ritel lainnya							119.600		119.600
5	Re-sekuritisasi									
6	*Non-retail* (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Kredit korporasi									
8	Kredit komersil									
9	Sewa dan piutang									
10	*Non-retail* lainnya									
11	Re-sekuritisasi									

Analisis Kualitatif
Pada Desember 2024, seluruh eksposur sekuritisasi Bank hanya terdapat pada *Banking Book* dimana Bank sebagai investor

Eksposur Sekuritisasi pada *Trading Book*

Tabel Eksposur Sekuritisasi pada *Trading Book* per 31 Desember 2024

No		Bank sebagai *originator*			Bank sebagai sponsor			Bank sebagai investor		
		Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Subtotal	Tradisional	Sintetis	Sub-total
1	*Retail* (total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	pinjaman perumahan									
3	kartu kredit									
4	eksposur ritel lainnya									
5	re-sekuritisasi									
6	*Non-retail*(total) – antara lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	kredit korporasi									
8	kredit komersil									
9	sewa dan piutang									
10	*non-retail* lainnya									
11	re-sekuritisasi									

Analisis Kualitatif
Pada Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *Trading Book*

Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* dan terkait Persyaratan Modalnya - Bank yang Bertindak sebagai *Originator* atau *Sponsor*

Tabel Eksposur Sekuritisasi pada *Banking Book* dan terkait Persyaratan Modalnya - Bank yang Bertindak sebagai *Originator* atau *Sponsor* per 31 Desember 2024

No		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					Nilai eksposur (berdasarkan *regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1	Total eksposur	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Sekuritisasi tradisional									
3	Dimana *underlying* sekuritisasi									
4	ritel									
5	non-ritel									
6	Dimana re-sekuritisasi									
7	Senior									
8	Non-senior									
9	Sekuritisasi sintetis									
10	Dimana *underlying* sekuritisasi									
11	ritel									
12	non-ritel									
13	Dimana re-sekuritisasi									
14	Senior									
15	Non-senior									

Analisis Kualitatif

Pada Desember 2024, Bank tidak memiliki eksposur sekuritisasi pada *banking book* ketika bank sebagai *originator* atau *sponsor* dan persyaratan permodalannnya

	j	k	l	m	n	o	p	q
	ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*			
	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA (termasuk IAA)	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
		-	-	-		-	-	-

No		a	b	c	d	e	f	g	h	i
		Nilai eksposur (berdasarkan Bobot Risiko)					*Exposure Values* (berdasarkan *regulatory approach*)			
		≤20% Bobot Risiko	>20% to 50% Bobot Risiko	>50% to 100% Bobot Risiko	>100% to <1250% Bobot Risiko	1250% Bobot Risiko	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
1	Total eksposur	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Sekuritisasi tradisional									
3	Dimana *underlying* sekuritisasi									
4	ritel					119.600				119.600
5	*non-retail*									
6	Dimana re-sekuritisasi									
7	Senior									
8	Non-senior									
9	Sekuritisasi sintetis									
10	Dimana *underlying* sekuritisasi									
11	ritel									
12	*non-retail*									
13	Dimana re-sekuritisasi									
14	Senior									
15	Non-senior									

Analisis Kualitatif
Pada Desember 2024, seluruh eksposur sekuritisasi Bank memiliki bobot 1250% dengan perhitungan ATMR menggunakan metode standar

	j	k	l	m	n	o	p	q
	ATMR (berdasarkan *regulatory approach*)				*Capital charge after cap*			
	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%	IRB RBA	IRB SFA	SA/SSFA	1250%
		-	-	-		-	-	-
				59.800				5.980

Risiko Pasar

Risiko Pasar – Pengungkapan Kualitatif Umum

Struktur manajemen risiko pasar sebagai *Second Line of Defense* berada di bawah Departemen Manajemen Risiko Operasional, Pasar dan Likuiditas dalam Direktorat Kepatuhan dan Risiko, yang bekerja sama dengan *Compliance*, serta berkoordinasi dengan *Audit* Internal sebagai *Third Line of Defense*. Peran utama unit ini adalah mendukung *First Line of Defense* dalam mengelola eksposur Bank terhadap risiko pasar.

Identifikasi dan pengukuran eksposur risiko pasar Bank, yang mencakup risiko nilai tukar dan risiko suku bunga, dilakukan melalui berbagai metode, seperti laporan *sensitivity to market risk*, perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar (ATMR), serta pemantauan *Mark to Market* Surat Berharga *Trading* dan *Available for Sale* (AFS) menggunakan perhitungan DV01. Selain itu, Bank secara berkala memantau potensi keuntungan atau kerugian (*Potential Gain/Loss*), mengawasi komposisi Surat Berharga berdasarkan klasifikasi dan tenor, serta melaporkan posisi devisa *net*o harian kepada Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan melalui Departemen Pelaporan Regulator dan Sistem Informasi Manajemen.

Adapun dalam menghadapi dinamika pasar global dan domestik, KB Bank menerapkan strategi pengelolaan eksposur *trading book* dan Posisi Devisa *Net*o secara *prudent*, memastikan bahwa eksposur tetap berada dalam batas yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan volatilitas harga pasar. Selain itu, untuk memperkuat pengelolaan risiko, Bank melakukan uji ketahanan (*stress test*) dengan skenario perubahan tingkat suku bunga dan nilai tukar guna mengevaluasi dampaknya terhadap ATMR Pasar dan modal Bank.

Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Suku Bunga dalam *Banking Book*

Analisis Kualitatif

Penerapan Manajemen Risiko untuk IRRBB, selain mengacu pada pedoman penerapan Manajemen Risiko secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, Bank menambahkan aspek pengelolaan risiko untuk IRRBB.

Proses identifikasi risiko yang disesuaikan dengan IRRBB melekat pada produk dan aktivitas Bank. Bank memastikan bahwa proses tersebut telah memiliki prosedur dan pemantauan yang memadai. Proses identifikasi IRRBB mencakup identifikasi terhadap sumber IRRBB seperti *gap risk*, *basis risk* dan *option risk* yang dapat mempengaruhi pendapatan bunga Bank dan nilai ekonomis (*economic value*) posisi keuangan Bank, serta modal yang tersedia untuk mengantisipasi dampak IRRBB.

Dalam melakukan pengukuran IRRBB, Bank menggunakan 2 (dua) metode yang saling melengkapi, yaitu *Economic Value of Equity* (EVE) dan *Net Interest Income* (NII) yang mencakup skenario *shock* suku bunga dan skenario stres dengan rentang yang luas dan tepat. Pengukuran berdasarkan perubahan pada EVE adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap nilai ekonomis dari ekuitas Bank. Pengukuran berdasarkan EVE merupakan pengelolaan Risiko suku bunga dalam jangka panjang berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo. Sedangkan pengukuran berdasarkan perubahan pada Nll adalah metode yang mengukur dampak perubahan suku bunga terhadap rentabilitas (*earnings*) Bank, perubahan suku bunga tersebut dapat terjadi secara bertahap atau dalam satu waktu dengan nominal *shock* yang besar. Pengukuran berdasarkan Nll merupakan pengelolaan risiko suku bunga dengan periode estimasi jangka pendek hingga jangka menengah dengan asumsi bahwa Bank mampu melanjutkan bisnis operasional (perspektif *going concern*).

Dalam rangka pengendalian risiko IRRBB, Bank melakukan pemantauan terhadap rasio IRRBB (terutama dalam metode EVE) sesuai dengan ketentuan regulator (Batasan penilaian risiko sebagaimana SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2018). Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi pencapaian maksimum limit, dalam rangka mencegah terjadinya pelampauan batasan yang ditetapkan oleh regulator.

Bank melakukan simulasi *shock* dalam perhitungan IRRBB. Pengukuran eksposur IRRBB dilakukan berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* suku bunga sebagai berikut:

1. S*hock* suku bunga yang paralel ke atas (*parallel shock up*);
2. *Shock* suku bunga yang paralel ke bawah (*parallel shock down*);
3. *Shock* suku bunga yang melandai (*steepener shock*) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek menurun dan suku bunga jangka panjang meningkat (*short rates down and long rates up*);
4. *Shock* suku bunga yang mendatar (*flattener shock*) dengan perpaduan suku bunga jangka pendek meningkat dan suku bunga jangka panjang menurun (*short rates up and long rates down*);
5. *Shock* suku bunga jangka pendek yang meningkat (*short rates shock up*); dan
6. *Shock* suku bunga jangka pendek yang menurun (*short rates shock down*).

Simulasi *shock* dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode EVE adalah berdasarkan 6 (enam) skenario *shock* tersebut. Sedangkan untuk simulasi *shock* dalam perhitungan IRRBB dengan menggunakan metode Nll adalah berdasarkan 2 (dua) skenario *shock*, yaitu *shock* suku bunga yang paralel ke atas (*parallel shock up*) dan *shock* suku bunga yang paralel ke bawah (*parallel shock down*).

Bank menggunakan metode internal untuk menghitung rata-rata jatuh tempo NMD dengan mempertimbangkan *behaviour* dari *Non-Maturity Deposits* (NMD). Bank menggunakan pendekatan statistik sederhana untuk mengetahui besarnya *run of rate*, *volatility* dan *sensitivity* NMD terhadap perubahan suku bunga.

Laporan Perhitungan IRRBB

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2024
Mata Uang : Rupiah

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	Dec-24	Jun-24	Dec-24	Jun-24
Parallel up	-98.585	28.607	-453.824	-463.635
Parallel down	-145.215	-132.279	453.824	463.635
Steepener	864.368	734.671		
Flattener	-397.491	-383.313		
Short rate up	-392.689	-343.170		
Short rate down	373.048	485.928		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	397.491	383.313	453.824	463.635
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	3.674.512	3.867.165	2.109.398	3.276.908
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	10,82%	9,91%	21,51%	14,15%

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2024
Mata Uang : US Dollar

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	Dec-24	Jun-24	Dec-24	Jun-24
Parallel up	-168.163	-7.272	93.140	-121.457
Parallel down	124.331	494.402	-93.140	121.457
Steepener	-84.646	-763		
Flattener	-9.507	-33.573		
Short rate up	-73.466	-28.461		
Short rate down	22.538	-14.417		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	168.163	33.573	93.140	121.457

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	Dec-24	Jun-24	Dec-24	Jun-24
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	3.674.512	3.867.165	1.033.640	437.175
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	4,58%	0,87%	9,01%	27,78%

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2024
Mata Uang : Rupiah

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	Dec-24	Jun-24	Dec-24	Jun-24
Parallel up	-156.748	80.341	-586.313	-565.340
Parallel down	-27.656	-170.738	586.313	565.340
Steepener	565.289	815.246		
Flattener	-377.056	-382.908		
Short rate up	-428.769	-333.090		
Short rate down	410.175	514.949		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	428.769	382.908	586.313	565.340
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	5.401.052	5.946.311	2.530.918	3.835.887
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	7.49%	6,44%	23,17%	14,74%

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2024
Mata Uang : US Dollar

Dalam Juta Rupiah	Δ EVE		Δ NII	
Periode	Dec-24	Jun-24	Dec-24	Jun-24
Parallel up	-334.758	-7.272	93.140	-144.067
Parallel down	118.289	494.402	-93.140	144.067
Steepener	-81.679	-763		
Flattener	-10.967	-33.573		
Short rate up	-72.221	-28.461		
Short rate down	21.123	-14.417		
Nilai Maksimum Negatif (absolut)	334.758	33.573	93.140	144.067
Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	5.401.052	5.946.311	1.033.640	478.498
Nilai Maksimum dibagi Modal *Tier* 1 (untuk ΔEVE) atau *Projected Income* (untuk Δ NII)	6,20%	0,56%	9,01%	27,78%

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang timbul akibat ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, kesalahan manusia, gangguan sistem, serta faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional perusahaan. Pengelolaan risiko operasional dilakukan melalui struktur organisasi yang mencakup Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja *Quality Assurance*, serta Satuan Kerja *Audit* Internal. Masing-masing unit ini beroperasi secara independen dari unit bisnis dan operasional guna memastikan efektivitas pengendalian risiko serta kepatuhan terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Individual

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Indikator Bisnis (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	141.720,60	141.720,60	1.771.507,50	167.865,14	167.865,14	2.098.314,20
	Total	**141.720,60**	**141.720,60**	**1.771.507,50**	**167.865,14**	**167.865,14**	**2.098.314,20**

Pengungkapan Risiko Operasional - Bank secara Konsolidasi dengan Perusahaan Anak

(dalam jutaan rupiah)

No.	Pendekatan yang Digunakan	31 Desember 2024			31 Desember 2023		
		Indikator Bisnis (Rata-rata 3 tahun terakhir)	Beban Modal	ATMR	Pendapatan Bruto (Rata-rata 3 tahun terakhir	Beban Modal	ATMR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pendekatan Indikator Dasar	158.988,65	158.988,65	1.987.358,13	187.551,61	187.551,61	2.344.395,10
	Total	**158.988,65**	**158.988,65**	**1.987.358,13**	**187.551,61**	**187.551,61**	**2.344.395,10**

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan Bank dalam memenuhi kewajiban jatuh tempo melalui sumber pendanaan arus kas atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu stabilitas keuangan dan operasional. Untuk memastikan ketahanan likuiditas, Bank menerapkan kebijakan pengelolaan likuiditas yang secara berkala ditinjau dan disesuaikan dengan kondisi internal serta regulasi terkini.

Pengelolaan likuiditas mencakup pemantauan terhadap berbagai batasan, seperti Giro Wajib Minimum (GWM), Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*/LCR), serta Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*/NSFR). Bank juga memiliki Rencana Pendanaan Darurat yang me*net*apkan langkah-langkah mitigasi dalam menghadapi perubahan kondisi likuiditas harian agar tetap dapat memenuhi kewajiban finansial secara tepat waktu dan menjaga kelangsungan bisnis.

Pengukuran risiko likuiditas dilakukan melalui Proyeksi Arus Kas, sementara pengelolaan likuiditas harian menjadi tanggung jawab Unit Treasury. Perubahan kondisi eksternal dan makroekonomi dipantau secara aktif, dengan strategi dan kebijakan internal ditetapkan melalui mekanisme *Asset and Liabilities Committee* (ALCO). Lebih jauh, evaluasi dan pemantauan limit likuiditas dilakukan secara berkala, menyesuaikan dengan kondisi Bank dan ketentuan regulator. Selain itu, Bank juga melakukan uji ketahanan (*stress test*) dengan skenario penarikan dana berdasarkan data historis untuk mengukur kemampuan dalam menghadapi situasi krisis dan menjaga stabilitas likuiditas.



Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*)

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV - 2024

Tabel Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) per 31 Desember 2024

No	Komponen	INDIVIDUAL				
		Posisi Triwulan IV - 2024		Posisi Triwulan III - 2024		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	
1.	Jumlah data Poin yang digunakan dalam perhitungan LCR		64 hari	0	65 hari	
***HIGH QUALITY LIQUID ASSET* (HQLA)**						
2.	Total *High Quality Liquid Asset* (HQLA)		14.687.549	0	15.615.507	
ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOWS*)						
3.	Simpanan nasabah perorangan dan Pendanaan yang berasal dari nasabah Usaha Mikro dan Usaha Kecil, terdiri dari:	10.185.593	843.845	10.606.468	876.599	
	a. Simpanan/Pendanaan Stabil	3.494.296	174.715	3.680.950	184.048	
	b. Simpanan/Pendanaan Kurang Stabil	6.691.298	669.130	6.925.518	692.552	
4.	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi, terdiri dari:	11.738.783	4.344.322	10.561.007	3.605.500	
	a. Simpanan Operasional	5.922.608	1.346.999	6.058.084	1.291.430	
	b. Simpanan non-Operasional dan/atau kewajiban lainnya yang bersifat non-operasional	5.816.175	2.997.323	4.502.923	2.314.071	
	c. surat berharga berupa surat utang yang diterbitkan oleh bank (*unsecured debt*)	-	-	-	-	
5.	Pendanaan dengan agunan (*secured funding*)		-		-	
6.	Arus kas keluar lainnya (*additional requirement*), terdiri dari:	12.746.327	8.306.830	12.725.758	7.959.638	
	a. arus kas keluar atas transaksi derivatif	824.439	824.439	446.219	446.219	
	b. arus kas keluar atas peningkatan kebutuhan likuiditas	-	-	-	-	
	c. arus kas keluar atas kehilangan pendanaan	-	-	-	-	
	d. arus kas keluar atas penarikan komitmen fasilitas kredit dan fasilitas likuiditas	709.719	70.972	578.860	57.886	

	KONSOLIDASIAN			
	Posisi Triwulan IV - 2024		Posisi Triwulan III - 2024	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
		64 hari	0	65 hari
		16.206.230	0	17.032.528
	12.850.891	1.038.202	13.251.855	1.073.218
	4.937.739	246.887	5.039.353	251.968
	7.913.152	791.315	8.212.502	821.250
	13.671.455	5.497.252	11.958.487	4.396.372
	6.635.949	1.459.287	6.597.215	1.367.326
	7.035.506	4.037.964	5.361.271	3.029.046
	-	-	-	-
		-		-
	12.754.563	8.315.066	12.725.761	7.959.641
	824.439	824.439	446.219	446.219
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	709.719	70.972	578.860	57.886

Tabel Laporan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) per 31 Desember 2024

No	Komponen	INDIVIDUAL				
		Posisi Triwulan IV - 2024		Posisi Triwulan III - 2024		
		Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	
	e. arus kas keluar atas kewajiban kontraktual lainnya terkait penyaluran dana	-	-	-	-	
	f. arus kas keluar atas kewajiban kontijensi pendanaan lainnya	3.822.127	21.377	4.273.626	28.480	
	g. arus kas keluar kontraktual lainnya	7.390.043	7.390.043	7.427.053	7.427.053	
7.	TOTAL ARUS KAS KELUAR (*CASH OUTFLOWS*)		13.494.997		12.441.738	
ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOWS*)						
8.	Pinjaman dengan agunan secured lending	-	-	-	-	
9.	Tagihan berasal dari pihak lawan (*counterparty*) yang bersifat lancar (*inflows from fully performing exposures*)	3.707.164	2.770.118	4.442.201	3.440.385	
10.	Arus kas masuk Lainnya	2.368.661	2.368.661	528.319	528.319	
11.	**TOTAL ARUS KAS MASUK (*CASH INFLOWS*)**	**6.075.825**	**5.138.779**	**4.970.521**	**3.968.704**	
			TOTAL *ADJUSTED VALUE*[1]		**TOTAL *ADJUSTED VALUE*[1]**	
12.	**TOTAL HQLA**		**14.687.549**		**15.615.507**	
13.	**TOTAL ARUS KAS KELUAR BERSIH (*NET CASH OUTFLOWS*)**		**8.356.218**		**8.473.033**	
14.	LCR (%)		175,77%		184,30%	

Keterangan: [1]*Adjusted value* dihitung setelah pengenaan pengurangan nilai (*haircut*), tingkat penarikan (*run-off rate*), dan tingkat penerimaan (*inflow rate*) serta batas maksimum komponen HQLA, misalnya batas maksimum HQLA Level 2B dan HQLA Level 2 serta batas maksimum arus kas masuk yang dapat diperhitungkan dalam LCR.
Nilai *outstanding* Posisi Triwulan IV 2024 merupakan rata-rata LCR selama hari kerja bulan Oktober s.d Desember 2024 (64 titik data).
Nilai *outstanding* Posisi Triwulan III 2024 merupakan rata-rata LCR selama hari kerja bulan Juli s.d September 2024 (65 titik data).
Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* di atas dibuat berdasarkan POJK No. 42/POJK.03/2015 serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan disajikan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional.

	KONSOLIDASIAN			
	Posisi Triwulan IV - 2024		Posisi Triwulan III - 2024	
	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)	Nilai *outstanding* kewajiban dan komitmen / nilai tagihan kontraktual	Nilai HQLA setelah pengurangan nilai (*haircut*) atau *Outstanding* kewajiban dan komitmen dikalikan tingkat penarikan (*run-off rate*) atau Nilai tagihan kontraktual dikalikan tingkat penerimaan (*inflow rate*)
	-	-	-	-
	3.822.127	21.377	4.273.626	28.480
	7.398.279	7.398.279	7.427.056	7.427.056
		14.850.520		13.429.230
	-	-	-	-
	3.770.154	2.801.612	4.498.092	3.468.330
	2.368.661	2.368.661	528.319	528.319
	6.138.814	**5.170.273**	**5.026.411**	**3.996.650**
		TOTAL *ADJUSTED VALUE*[1]		**TOTAL *ADJUSTED VALUE*[1]**
		16.206.230		**17.032.528**
		9.680.246		**9.432.581**
		167,42%		180,57%

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV - 2024

Analisis secara Individu

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) PT Bank KB Bukopin Tbk. (Individu) periode Triwulan IV - 2024 menggunakan data rata-rata posisi harian selama bulan Oktober s.d Desember 2024. LCR PT Bank KB Bukopin Tbk. secara individu untuk Triwulan IV - 2024 adalah sebesar 175,77%, menurun 8,53% apabila dibandingkan dengan LCR pada Triwulan III - 2024 yang sebesar 184,30%. Rasio tersebut berada diatas ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/POJK.03/2015 serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum yaitu sebesar 100%.

Komposisi *High Quality Liquid Asset*s (HQLA) yang dimiliki Bank secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2024 didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (BI) sebesar 23,67% dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia sebesar 74,47%. Dibandingkan dengan Triwulan III - 2024, total HQLA mengalami penurunan sebesar Rp. 927,95 miliar (5,94%) dari Rp. 15,61 triliun pada Triwulan III - 2024 menjadi Rp. 14,68 triliun pada Triwulan IV - 2024, terutama disebabkan oleh penurunan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 1,32 triliun (10,80%) namun juga dipengaruhi peningkatan Penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp. 401,20 miliar (13,05%).

Net Cash Outflow secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2024 sebesar Rp. 8,35 triliun, menurun sebesar Rp. 116,81 miliar (1,38%) dibandingkan dengan Triwulan III - 2024. Penurunan *Net Cash Outflow* terutama disebabkan oleh peningkatan pada *Cash Inflow*. *Cash Inflow* meningkat sebesar Rp. 1,17 triliun (29,48%), yang disebabkan oleh peningkatan pada Transaksi Derivatif sebesar Rp. 1,84 triliun (348,34%) (nilai setelah *run-off rate*), dan penurunan Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*) Penempatan pada Bank Lain sebesar Rp. 605,49 miliar (24,83%). Sementara itu *Cash Outflow* mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,05 triliun (8,47%), yang disebabkan oleh meningkatnya Simpanan Korporasi sebesar Rp. 738,82 miliar (20,49%) (nilai setelah *run-off rate*).

Komposisi Dana Pihak Ketiga (DPK) berdasarkan kertas kerja LCR yang dimiliki oleh Bank terdiversifikasi pada pendanaan segmen *wholesale*, *retail*, dan SME *customer* secara hampir merata. Bank secara internal melakukan pemantauan atas rasio konsentrasi pendanaan dan terus melakukan upaya diversifikasi pendanaan sebagai langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas DPK, terutama untuk meningkatkan pendanaan jangka menengah ke jangka panjang serta dengan mengurangi jenis DPK yang memiliki suku bunga tinggi (seperti misalnya Deposito berjangka dan Tabungan / Giro bersuku bunga premium). Program diversifikasi ini telah dilakukan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk. sejak tahun lalu serta berkelanjutan di tahun 2024 sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.

Dalam mengelola likuiditas, Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas secara berkala, dengan melibatkan unit-unit kerja terkait lainnya, seperti Treasury, Bisnis *Wholesale*, *Retail*, dan SME. Sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko likuiditas dalam berbagai kondisi, PT Bank KB Bukopin Tbk. juga telah memiliki kebijakan Rencana Pendanaan Darurat (*Contingency Funding Plan*) yang berisi langkah yang harus dilakukan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk. dalam mengantisipasi dan menghadapi perubahan kondisi likuiditas serta pemantauan yang dilakukan secara harian.

Secara umum, berdasarkan perhitungan dan komparasi tersebut di atas, risiko likuiditas jangka pendek relatif kecil (rasio LCR cukup jauh berada di atas 100% sesuai ketentuan regulator). Namun demikian kami melihat potensi risiko tetap ada dimana tren pergerakan DPK Bank menjadi komponen penting dalam LCR.

Oleh karena itu, Bank perlu tetap menjaga keseimbangan struktur neraca terutama pada komposisi tenor jangka pendek serta melakukan diversifikasi Dana Pihak Ketiga pada segmentasi bisnis yang memiliki *run-off rate* yang lebih kecil (untuk meningkatkan LCR melalui penurunan *Cash Outflow*).

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk.
Posisi Laporan : Triwulan IV - 2024

Analisis secara Konsolidasi

Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) PT Bank KB Bukopin Tbk. (Konsolidasi) periode Triwulan IV - 2024 menggunakan data rata-rata posisi harian selama bulan Oktober s.d Desember 2024. LCR PT Bank KB Bukopin Tbk. secara konsolidasi untuk Triwulan IV - 2024 adalah sebesar 167,42%, menurun 13,15% apabila dibandingkan dengan LCR pada Triwulan III - 2024 yang sebesar 180,57%. Rasio tersebut berada diatas ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/ POJK.03/2015 serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum yaitu sebesar 100%.

Komposisi *High Quality Liquid Asset*s (HQLA) yang dimiliki Bank secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2024 didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia (BI) sebesar 26,53% dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia sebesar 71,33%. Dibandingkan dengan Triwulan III - 2024, total HQLA mengalami penurunan sebesar Rp. 826,29 miliar (4,85%) dari Rp. 17,03 triliun pada Triwulan III - 2024 menjadi Rp. 16,20 triliun pada Triwulan IV - 2024, terutama disebabkan oleh penurunan kepemilikan Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia menurun sebesar Rp. 1,40 triliun (10,85%), namun juga dipengaruhi peningkatan Penempatan Pada Bank Indonesia sebesar Rp. 661,11 miliar (18,17%).

Net Cash Outflow secara rata-rata sepanjang Triwulan IV - 2024 sebesar Rp. 9,68 triliun, meningkat sebesar Rp. 247,66 miliar (2,63%) dibandingkan dengan Triwulan III - 2024. Peningkatan *Net Cash Outflow* terutama disebabkan oleh peningkatan pada *Cash Outflow*. *Cash Outflow* meningkat sebesar Rp. 1,42 triliun (10,58%), yang disebabkan oleh peningkatan pada Simpanan Korporasi sebesar Rp. 1,10 triliun (25,04%) (nilai setelah *run-off rate*), peningkatan Arus Kas Keluar lainnya terkait Transaksi Derivatif sebesar Rp. 378,22 miliar (84,76%), dan penurunan pada Arus Kas Keluar Kontraktual Lainnya sebesar Rp. 28,77 miliar (nilai setelah *run-off rate*). Sementara itu *Cash Inflow* mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,17 triliun (29,37%), yang disebabkan oleh meningkatnya Transaksi Derivatif sebesar Rp. 1,84 triliun (348,34%) (nilai setelah *run-off rate*), dan penurunan Tagihan Berdasarkan Pihak Lawan (*Counterparty*) Penempatan pada Bank Lain sebesar Rp. 605,49 miliar (24.83%) (nilai setelah *run-off rate*).

LCR Konsolidasi di dominasi oleh HQLA dan *Net Cash Outflow* PT Bank KB Bukopin Tbk. sebagai pemegang saham pengendali. Rata-rata HQLA dan *Net Cash Outflow* PT Bank KB Bukopin Tbk. berada pada rentang 80% sampai dengan 90%. Oleh karena itu pergerakan pada komponen LCR PT Bank KB Bukopin Tbk. adalah penentu utama dalam kenaikan atau penurunan LCR Konsolidasi. Dengan demikian, ke depan sebagaimana yang telah disampaikan dalam analisa LCR Individu, diversifikasi DPK PT Bank KB Bukopin Tbk. tetap merupakan rencana tindak yang direkomendasikan dalam rangka perbaikan LCR.

Secara umum, analisa per anak perusahaan, secara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:
- PT Bank KB Bukopin Syariah dari sisi HQLA didominasi oleh Penempatan pada Bank Indonesia dan Surat Berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia (Sukuk), sementara itu dari sisi *Net Cash Outflow* ditentukan lebih banyak oleh *Cash Outflow* pada komponen Simpanan nasabah UKM dan Korporasi.
- PT KB Bukopin Finance dari sisi HQLA didominasi oleh Kas dan Setara Kas, sementara itu dari sisi *Net Cash Outflow* ditentukan lebih banyak oleh *Cash Outflow* pada komponen Arus kas keluar kontraktual lainnya.

Dalam mengelola likuiditas, Bank telah mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko likuiditas secara berkala, dengan melibatkan unit-unit kerja terkait lainnya serta melalui koordinasi dengan anak perusahaan (PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance).

Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*)

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Individu)
Posisi Laporan : Desember 2024

Tabel Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) per 31 Desember 2024

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
1	Modal :	28.836.822	-	-	4.058.182	32.895.004	28.995.144	-	-	3.410.320	32.405.463
2	Modal sesuai POJK KPMM	28.836.822	-	-	4.058.182	32.895.004	28.995.144	-	-	3.410.320	32.405.463
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	5.679.121	13.632.480	661.460	419.832	18.615.720	6.008.428	12.854.878	1.112.889	410.446	18.624.175
5	Simpanan dan pendanaan stabil	2.868.620	1.473.048	60.992	34.581	4.217.108	3.394.483	1.195.034	113.539	675	4.468.578
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	2.810.500	12.159.432	600.468	385.252	14.398.612	2.613.946	11.659.844	999.351	409.771	14.155.597
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	4.798.833	15.103.060	416.372	309.500	8.639.843	5.852.129	13.146.774	579.801	182.500	7.801.849
8	Simpanan operasional	2.293.189	322.570	20.056	-	1.317.907	2.375.539	133.158	71.249	-	1.289.973
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	2.505.644	14.780.490	396.316	309.500	7.321.935	3.476.590	13.013.617	508.551	182.500	6.511.876
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	96.027	5.340.193	11.363.930	4.545.441	10.227.406	0	0	0	0	0
12	NSFR liabilitas derivatif										

Tabel Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) per 31 Desember 2024

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	96.027	5.340.193	11.363.930	4.545.441	10.227.406	97.408	6.901.822	7.118.331	9.624.568	13.183.733
14	**Total ASF**					**70.377.972**					**72.015.221**
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					601.817					529.377
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	57.466	-	-	-	28.733	56.600	-	-	-	28.300
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	203.697	7.652.592	3.369.426	35.359.971	34.339.815	371.674	5.825.355	5.813.123	35.994.709	35.623.833
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	103.178	103.178	-	-	-	98.443	98.443
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	203.697	659.085	192.140	941.725	1.167.212	371.674	353.862	515.340	934.350	1.300.851
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah *retail* dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	5.450.718	2.661.693	23.268.212	22.859.186	-	4.501.045	4.182.624	23.967.902	23.857.955

Tabel Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) per 31 Desember 2024

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
21	" memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit"	-	621.226	385.490	461.641	803.425	-	313.268	718.074	51.484	549.135
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	10.116	2.409	514.199	443.331	-	47.413	198.019	1.161.502	1.109.992
23	" memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit"	-	404.445	127.694	1.617.733	1.317.596	-	416.277	199.065	1.114.602	1.032.163
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (*performing*) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	507.001	-	8.453.283	7.645.887	-	193.490	-	8.666.426	7.675.294
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	31.726.180	74.105	1.561.747	33.362.032	-	32.853.770	54.849	1.292.192	34.200.820
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-

Tabel Laporan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) per 31 Desember 2024

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024) Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai *default fund* pada *central counterparty* (CCP)							-			-
29	NSFR aset derivatif							-			-
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan *variation margin*							-			-
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	31.726.180	74.105	1.561.747	33.362.032	-	32.853.778	54.849	1.292.192	34.200.820
32	Rekening Administratif									4.706.819	47.114
33	**Total RSF**					**68.380.297**					**70.429.444**
34	**Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio* (%))**					**102,92%**					**102,25%**

Analisis Secara Individu

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT. Bank KB Bukopin, Tbk secara Individu per Desember 2024 sebesar 102,25%, menurun sebesar 0,67% dibandingkan dengan posisi akhir September 2024 dengan nilai NSFR sebesar 102,92%. Pada posisi Desember 2024 NSFR Individu PT. Bank KB Bukopin, Tbk berada diatas ketentuan regulator (100%) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017, serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*).

Total *Available Stable Funding* (ASF) pada akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp72,02 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp18,62 triliun (25,86%) (nilai tertimbang) serta Modal sebesar Rp32,41 triliun (45,00%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2024, total ASF mengalami peningkatan sebesar Rp1,64 triliun (2,33%) yang terutama disebabkan oleh:
• Peningkatan pada ekuitas dan liabilitas lainnya sebesar Rp2,96 triliun (nilai tertimbang)
• Penurunan pada pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp. 810,05 miliar (nilai tertimbang).
• Penurunan pada modal sebesar 489,54 miliar (nilai tertimbang)

Total *Required Stable Funding* (RSF) pada akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp70,43 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (performing) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (default) sebesar Rp35,62 triliun (50,58%) (nilai tertimbang) serta Aset lainnya sebesar Rp34,20 triliun (48,56%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2024, total RSF mengalami peningkatan sebesar Rp2,05 triliun (3,00%) yang terutama disebabkan oleh:
• Peningkatan pada komponen Aset lainnya sebesar Rp838,79 miliar (nilai tertimbang).
• Peningkatan pada komponen Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (*default*) sebesar Rp1,28 triliun (nilai tertimbang).

Pada periode ini Bank tidak memiliki komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (*interdependent*) dan keterkaitan antar transaksi.

Bank tetap perlu menjaga keseimbangan struktur neraca terutama pada komposisi sumber pendanaan tenor jangka menengah-panjang, serta melakukan diversifikasi Dana Pihak Ketiga pada segmentasi bisnis yang memiliki bobot Faktor ASF lebih besar (untuk meningkatkan NSFR). Sementara itu, dari sisi RSF, pengelolaan kualitas kredit juga diharapkan dapat meningkatkan rasio NSFR melalui peningkatan Kredit Kualitas Lancar.

KEWAJIBAN PEMENUHAN RASIO PENDANAAN STABIL BERSIH (*NET STABLE FUNDING RATIO*)

Nama Bank : PT Bank KB Bukopin Tbk (Konsolidasi)
Posisi Laporan : Desember 2024

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
1	Modal :	30.438.411	-	-	4.138.300	34.576.710	30.533.662	-	-	3.485.617	34.019.278
2	Modal sesuai POJK KPMM	30.438.411	-	-	4.138.300	34.576.710	30.533.662	-	-	3.485.617	34.019.278
3	Instrumen modal lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
4	Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan pendanaan yang berasal dari nasabah usaha mikro dan usaha kecil:	6.285.022	15.798.021	829.516	419.832	21.341.297	6.671.999	14.879.840	1.346.664	410.446	21.333.720
5	Simpanan dan pendanaan stabil	3.213.177	2.618.199	171.829	34.581	5.737.625	3.764.285	2.196.924	331.212	674,5	5.978.474
6	Simpanan dan pendanaan kurang stabil	3.071.845	13.179.822	657.688	385.252	15.603.671	2.907.715	12.682.916	1.015.452	409.771	15.355.246
7	Pendanaan yang berasal dari nasabah korporasi:	5.163.801	17.748.651	666.372	309.500	9.283.846	6.624.886	15.510.412	1.225.439	182.500	8.633.132
8	Simpanan operasional	2.567.949	490.765	22.056	-	1.540.385	2.777.115	440.651	79.249	-	1.648.508
9	Pendanaan lainnya yang berasal dari nasabah korporasi	2.595.852	17.257.887	644.316	309.500	7.743.461	3.847.771	15.069.762	1.146.190	182.500	6.984.624
10	Liabilitas yang memiliki pasangan aset yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Liabilitas dan ekuitas lainnya :	-	6.337.314	11.388.021	4.595.221	10.289.232	-	8.178.528	7.145.668	9.674.348	13.247.182
12	NSFR liabilitas derivatif										
13	ekuitas dan liabilitas lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	6.337.314	11.388.021	4.595.221	10.289.232		8.178.528	7.145.668	9.674.348	13.247.182
14	**Total ASF**					**75.491.085**					**77.233.312**

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
15	Total HQLA dalam rangka perhitungan NSFR					636,773					567.941
16	Simpanan pada lembaga keuangan lain untuk tujuan operasional	80,642	-	-	-	40,321	73.567	-	-	-	36.784
17	Pinjaman dengan kategori Lancar dan Dalam Perhatian Khusus (*performing*)	203,697	8,324,350	3,661,739	40,371,942	39,032,588	371.674	6.194.018	6.238.452	41.398.008	40.601.104
18	kepada lembaga keuangan yang dijamin dengan HQLA Level 1	-	-	-	113,471	113,471	-	-	-	111.132	111.132
19	kepada lembaga keuangan yang dijamin bukan dengan HQLA Level 1 dan pinjaman kepada lembaga keuangan tanpa jaminan	203,697	774,306	193,751	1,056,437	1,300,013	371.674	355.129	631.505	1.037.641	1.462.414
20	kepada korporasi non-keuangan, nasabah retail dan nasabah usaha mikro dan kecil, pemerintah pusat, pemerintah negara lain, Bank Indonesia, bank sentral negara lain dan entitas sektor publik, yang diantaranya:	-	5,946,140	2,837,206	28,015,869	27,230,161	-	4.835.727	4.469.605	29.107.809	28.537.707

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
21	"memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit"	-	676,737	499,093	492,796	908,233	-	343.057	739.873	90.259	600.133
22	Kredit beragun rumah tinggal yang tidak sedang dijaminkan, yang diantaranya :	-	10,116	2,409	514,199	443,331	-	47.413	198.019	1.161.502	1.109.992
23	"memenuhi kualifikasi untuk mendapat bobot risiko 35% atau kurang, sesuai SE OJK ATMR untuk Risiko Kredit"	-	410,05	129,28	1,725,887	1,391,492	-	419.202	199.449	1.223.240	1.104.432
24	Surat Berharga dengan kategori Lancar dan Kurang Lancar (performing) yang tidak sedang dijaminkan, tidak gagal bayar , dan tidak masuk sebagai HQLA, termasuk saham yang diperdagangkan di bursa	-	507,001	-	8,453,283	7,645,887	-	193.490	-	8.666.426	7.675.294
25	Aset yang memiliki pasangan liabilitas yang saling bergantung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Aset lainnya :	-	32,232,228	79,148	1,794,379	34,105,755	-	33.342.782	66.067	1.585.203	34.994.052
27	Komoditas fisik yang yang diperdagangkan, termasuk emas	-				-	-				-

Komponen ASF		Posisi Tanggal Laporan (Triwulan III - 2024)					Posisi Tanggal Laporan (Triwulan IV - 2024)				
		Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)				Total Nilai Tertimbang	"Nilai Tercatat Berdasarkan Sisa Jangka Waktu (Dalam Juta Rupiah)"				Total Nilai Tertimbang
		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	≥ 6 bulan - < 1 tahun	≥ 1 tahun		Tanpa Jangka Waktu[1]	< 6 bulan	"≥ 6 bulan - < 1 tahun"	≥ 1 tahun	
28	Kas, surat berharga dan aset lainnya yang dicatat sebagai initial margin untuk kontrak derivatif dan kas atau aset lain yang diserahkan sebagai default fund pada central counterparty (CCP)										
29	NSFR aset derivatif										
30	NSFR liabilitas derivatif sebelum dikurangi dengan variation margin										
31	Seluruh aset lainnya yang tidak masuk dalam kategori diatas	-	32.232.228	79.148	1.794.379	34,105,755	-	33.342.782	66.067	1.585.203	34.994.052
32	Rekening Administratif				5.879.976	123.255				6.187.356	121.141
33	**Total RSF**					**73,938,692**					**76.321.023**
34	Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio (%))					102.10%					101,20%

Analisis Secara Konsolidasi

Net Stable Funding Ratio (NSFR) PT Bank KB Bukopin, Tbk secara Konsolidasi per akhir Desember 2024 sebesar 101,20%, menurun sebesar 0,90% dibandingkan dengan posisi akhir September 2024 dengan nilai NSFR Konsolidasi sebesar 102,10%. Pada posisi Desember 2024 NSFR Bank secara konsolidasi berada diatas ketentuan regulator (100%) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 50/POJK.03/2017, serta perubahannya pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20 Tahun 2024 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*www*).

Total Available Stable Funding (ASF) pada akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp77,23 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Modal sebesar Rp34,01 triliun (44,05%) (nilai tertimbang) dan Simpanan yang berasal dari nasabah perorangan dan usaha mikro dan kecil sebesar Rp21,33 triliun (27,62%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir bulan September 2024, total ASF mengalami peningkatan sebesar Rp1,74 triliun terutama disebabkan oleh :
• Peningkatan pada komponen Liabilitas dan ekuitas lainnya sebesar Rp2,95 triliun (nilai tertimbang);
• Penurunan pada komponen Modal sebesar Rp557,43 miliar (nilai tertimbang)
• Penurunan pada komponen Simpanan yang berasal dari nasabah korporasi sebesar Rp650,71 miliar (nilai tertimbang)

Total Required Stable Funding (RSF) pada akhir bulan Desember 2024 adalah sebesar Rp76,32 triliun (nilai tertimbang) dengan komponen terbesar berasal dari Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (*default*) sebesar Rp40,60 triliun (53,20%) (nilai tertimbang) dan Aset lainnya sebesar Rp34,99 triliun (45,85%) (nilai tertimbang).

Dibandingkan dengan posisi akhir September 2024, total RSF mengalami peningkatan sebesar Rp2,38 triliun terutama disebabkan oleh :
• Peningkatan pada komponen Pinjaman kategori lancar dan dalam perhatian khusus (*performing*) dan surat berharga yang tidak gagal bayar (*default*) sebesar Rp1,56 triliun (nilai tertimbang).
• Peningkatan pada komponen Aset lainnya sebesar Rp888,29 miliar (nilai tertimbang).

Pada periode ini Bank tidak memiliki komposisi aset dan liabilitas yang saling bergantung (interdependent) dan keterkaitan antar transaksi.

Secara konsolidasi, NSFR di dominasi oleh ASF dan RSF PT. Bank KB Bukopin, Tbk sebagai pemegang saham pengendali. Komposisi rata-rata ASF dan RSF PT. Bank KB Bukopin, Tbk terhadap *figure* konsolidasi sebesar lebih dari 90%. Oleh karena itu pergerakan pada komponen NSFR PT. Bank KB Bukopin, Tbk adalah penentu utama dalam kenaikan / penurunan NSFR Konsolidasi. Dengan demikian, ke depan sebagaimana yang telah disampaikan dalam analisa NSFR Individu, diversifikasi DPK PT. Bank KB Bukopin, Tbk secara tenor jangka menengah dan secara segmentasi tertentu, merupakan rencana tindak yang direkomendasikan dalam rangka mempertahankan NSFR ke depan. Meskipun demikian, PT Bank KB Bukopin Syariah sebagai anak perusahaan yang memiliki potensi Dana Pihak Ketiga yang cukup baik, diharapkan dapat mendukung peningkatan NSFR Konsolidasi melalui peningkatan sumber pendanaan stabil yang berbasis Syariah.

Aset Terikat (*Encumbrance*)

Tabel Aset Terikat (*Encumbrance*) per 31 Desember 2024

dalam jutaan rupiah

	a Aset Terikat (*Encumbered*)	b aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan bank sentral namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas	c Aset tidak terikat (*unencumbered*)	d Total
Aset-aset dalam laporan posisi keuangan	-	15.750.672	3.167.386	18.918.058

Analisis Kualitatif

Aset terikat (*encumbered assets*) adalah aset bank yang terbatas untuk kebutuhan likuiditas, secara *legal* dan kontraktual oleh Bank pada saat terjadi kondisi stres. *Encumbered Asset* tidak termasuk aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas. Bank tidak memiliki aset terikat pada posisi Triwulan IV - 2024.

Mengacu pada penjelasan atas POJK No 42/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*) Bagi Bank Umum, pasal 9 ayat (3) huruf a, contoh aset yang disimpan atau diperjanjikan dengan Bank Indonesia namun belum digunakan untuk menghasilkan likuiditas adalah giro wajib minimum sekunder (sekarang Penyangga Likuiditas Makroprudensial). Pada posisi Desember 2024 Bank (Konsolidasi) memiliki Giro Wajib Minimum Primer sebesar Rp 2,67 triliun dan Giro Wajib Sekunder atau Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar Rp 13,08 triliun yang merupakan seluruh surat berharga pemerintah yang dimiliki Bank.

Aset tidak terikat merupakan aset yang memenuhi kualifikasi sebagai HQLA sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang kewajiban pemenuhan rasio kecukupan likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*). Saat ini Bank (konsolidasi) memiliki aset tidak terikat berupa Kas, Penempatan pada Bank Indonesia selain GWM dan Surat Berharga sebesar Rp. 3,17 triliun.

LIQA - Manajemen Risiko Likuiditas

Tabel Pengungkapan Kualitatif

LIQA - Manajemen Risiko Likuiditas	
Pengungkapan kualitatif	
1	**Tata kelola pengelolaan risiko likuiditas, termasuk: toleransi risiko; struktur dan tanggung jawab pengelolaan risiko likuiditas; pelaporan likuiditas internal; dan komunikasi strategi, kebijakan dan praktik risiko likuiditas di seluruh lini bisnis dan dengan dewan direksi.**
a.	**Toleransi Risiko**
	Perumusan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* Risiko Likuiditas PT. Bank KB Bukopin, Tbk disesuaikan dengan sasaran strategis dan komplektisitas kegiatan usaha Bank. Pe*net*apan limit *Risk Appetite* dan Risk Tolerance dilakukan agar Bank dapat mengelola likuiditas pada kondisi normal maupun krisis. Pe*net*apan besaran limit *Risk Appetite* dan Risk Tolerance diajukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan disetujui oleh Dewan Direksi dan Komisaris melalui Komite Manajemen Risiko (KMR). Selanjutnya apabila terjadi pelampauan limit, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) akan berkoordinasi dengan Unit Bisnis terkait untuk menyusun *action plan*.
b.	**Struktur dan Tanggung Jawab Pengelolaan Risiko Likuiditas**
	Bank me*net*apkan struktur organisasi, kecukupan perangkat dan kelengkapan fungsi/unit terkait dengan penerapan manajemen risiko likuiditas sesuai dengan karakterisasi dan komplektisitas kegiatan usaha Bank. Perangkat atau unit yang terlibat atas manajemen risiko likuiditas baik bisnis dan supporting tergambar dalam struktur organisasi dan kewenangan masing-masing fungsi tersebut telah tercantum dalam job description atas setiap fungsi. Penanggung jawab dari pengelolaan Risiko Likuiditas adalah Unit Bisnis yang memiliki aktivitas terekspos langsung oleh Risiko Likuiditas. Selanjutnya Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan Risiko Likuiditas secara independen. Dewan Direksi dan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko Likuiditas telah sesuai dengan sasaran strategis, karakteristik dan komplektisitas bisnis, serta Profil Risiko Likuiditas.

LIQA - Manajemen Risiko Likuiditas	
Pengungkapan kualitatif	
c.	**Pelaporan Likuiditas Internal dan Komunikasi Strategi**
	Secara umum, Bank telah menyampaikan dan melaporkan informasi terkait manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas yang terdiri dari: rasio-rasio likuiditas, arus kas dan profil maturitas, *stress testing* Likuiditas, Profil Risiko Likuiditas, serta informasi lainnya yang terkait dengan posisi Likuiditas Bank dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur Risiko Likuiditas. Seluruh informasi disampaikan ke Unit Bisnis terkait serta Dewan Direksi dan Komisaris melalui kanal sistem informasi internal Bank dan rapat Komite Manajemen Risiko (KMR) secara bulanan. Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) selanjutnya akan berkoordinasi secara periodik dengan Unit Bisnis terkait yang mengelola Risiko Likuiditas jika terjadi pelampauan terhadap kebijakan maupun limit untuk Risiko Likuiditas dan menyusun rencana aksi (*action plan*).
d.	**Kebijakan dan Praktik Risiko Likuiditas di Seluruh Lini Bisnis dan dengan Dewan Direksi**
	Kebijakan strategi manajemen risiko likuiditas telah terdapat dalam Kebijakan Tingkat Tinggi Manajemen Risiko Bank, Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas Bank, serta Kebijakan/Pedoman terkait pengelolaan risiko likuiditas pada tingkat *risk taking unit*. Unit Bisnis yang terekspos oleh Risiko Likuiditas akan menyampaikan informasi mengenai kondisi indikator makroekonomi dan proyeksi bisnis melalui rapat Asset and Liability Committee (ALCO), selanjutnya strategi risiko likuiditas akan ditetapkan melalui mekanisme rapat ALCO dan Kebijakan pengelolaan risiko likuiditas berupa Keputusan ALCO akan disampaikan kepada Departemen terkait dan Cabang. Dewan Direksi melakukan pengawasan aktif secara harian dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko untuk Risiko Likuiditas telah berjalan sesuai dengan tujuan dengan dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pemantauan dilakukan secara harian maupun secara bulanan atas kondisi likuiditas meliputi pemantauan rasio-rasio yang terkait risiko likuiditas melalui laporan yang disampaikan oleh divisi-divisi terkait, serta mengevaluasi kecukupan informasi yang disajikan untuk penilaian kondisi likuiditas.
2	**Strategi pendanaan, termasuk kebijakan sumber diversifikasi dan tenor pendanaan, dan apakah strategi pendanaannya terpusat atau terdesentralisasi.**
	Secara umum, akses pada sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh Bank antara lain pinjaman antar Bank, *Repo* surat berharga, FX SWAP, penjualan surat berharga, penjualan *Banker's Acceptance* dan pinjaman dari pihak lain. Sejak pertengahan Desember 2013 PT. Bank KB Bukopin, Tbk menjadi salah satu Bank yang turut serta menandatangani *Mini Master Repo Agreement* (MRA) akan semakin memperluas alternatif akses pada sumber-sumber pendanaan non DPK untuk memperkuat pengelolaan likuiditas. Selain itu, dengan adanya penandatanganan *Global Master Repurchase Agreement* (GMRA) Indonesia dengan beberapa Bank juga akan semakin memperluas alternatif akses pada sumber-sumber pendanaan non DPK.
3	**Teknik Mitigasi Risiko Likuiditas**
	Bank melakukan mitigasi risiko likuiditas dengan cara memantau limit-limit risiko likuiditas yang telah ditetapkan dalam kebijakan secara periodik. Apabila limit tersebut mengalami pelampauan, maka Satuan Kerja Manajemen Risiko akan berkoordinasi dengan Unit Bisnis terkait *action plan* yang akan dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut sehingga kembali sesuai dengan ketentuan limit. Selain itu Bank melakukan *review* atau pembaharuan terhadap limit, kebijakan dan prosedur menyesuaikan dengan pembaharuan peraturan regulator atau strategi dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.
4	**Penjelasan Tentang Bagaimana *Stress-test* Digunakan**
	Stress Testing Likuiditas digunakan untuk mengukur ketahanan dan kemampuan Bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis dengan menggunakan skenario *stress test* secara spesifik (*Bank specific scenario*) maupun *stress* pada pasar (*general market stress scenario*). Telah terdapat Petunjuk Teknis tentang pelaksanaan *stress test* Risiko Likuiditas serta arahan dari Direksi atas pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas yang diwujudkan dalam pemberian persetujuan dan tanggapan terhadap Laporan *Stress Test* Risiko Likuiditas.
5	**Garis Besar Rencana Pendanaan Mendesak Bank**
	Dalam rangka pengendalian likuiditas dalam kondisi krisis, Bank memantau secara *continue* mengenai kondisi likuiditas Bank yang dilakukan oleh Departemen yang membawahi fungsi *market & liquidity risk management*. Apabila kondisi likuiditas Bank berada dalam kondisi krisis, maka Bank akan mengaktifkan Rencana Pendanaan Darurat. Rencana Pendanaan Darurat berisikan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Bank dalam rangka mengantisipasi dan menghadapai perubahan kondisi likuiditas sehingga Bank dapat tetap memenuhi setiap kewajiban finansial yang sudah diperjanjikan secara tepat waku dan menjaga kelangsungan proses bisnis Bank.

Risiko Operasional – Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank. Bank memiliki organisasi manajemen risiko operasional terdiri dari fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja *Quality Assurance* dan Satuan Kerja *Audit* Internal yang independen terhadap unit bisnis maupun unit operasional.
Pengelolaan Manajemen Risiko Operasional dilakukan melalui 4 (empat) tahapan sebagai berikut:

1. Identifikasi risiko yang secara inheren ada pada suatu produk dan/atau layanan serta proses yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk mengidentifikasi kontrol yang akan digunakan untuk mitigasi.
2. Pengukuran risiko operasional dilakukan berdasarkan data hasil identifikasi risiko, antara lain:
   a. Kejadian kerugian (*Loss Event*) dengan memperhitungkan frekuensi dan dampak dari aktivitas yang dapat mempengaruhi pendapatan pada Bank
   b. Penilaian risiko atas rencana produk dan/atau layanan baru dan/atau pengembangan ataupun evaluasi atas produk dan/atau layanan baru yang telah diluncurkan.
   c. *Self-Assessment* terhadap tingkat kesehatan Bank dengan membuat laporan Profil Risiko Bank.
   d. Perhitungan kecukupan modal untuk risiko operasional (*regulatory* capital charge) menggunakan *Standard Approach*(SA) dalam rangka menghitung Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional.
3. Pemantauan atas risiko yang telah diidentifikasi dan diukur terhadap potensi terjadinya dilakukan setiap waktu dalam unit kerja masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku. Termasuk juga pemantauan atas indikator-indikator atau *early warning system* atau perangkat/pelaporan yang ada. Pemantauan risiko operasional antara lain sebagai berikut:
   a. Fungsi pemantauan beberapa *Risk Indicators* untuk mengetahui potensi peningkatan risiko yang mungkin terjadi
   b. Melakukan analisis risiko operasional mengenai: *Human Capital*, IT Sistem error, Kasus *Fraud*, Akun *Dorman*, *Operational Loss Data*, Kompleksitas proses bisnis dan keragaman produk Bank, *Corporate Action*, Pengembangan bisnis Bank baru, dan Kejadian external yang mempengaruhi kegiatan operasional Bank.
4. Pengendalian risiko operasional maupun mitigasi risiko berdasarkan besaran potensi risiko atas aktivitas operasional, akan dilakukan antara lain atas hal-hal sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan Manajemen Risiko terkait rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan.
   b. Pengendalian risiko operasional dengan menerbitkan suatu kajian/opini setelah melakukan *review* terkait kebijakan, prosedur, perjanjian kerjasama, isu terkait operasional, rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan, dan Teknologi Informasi.
   c. Observasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja *Quality Assurance*.
   d. Memiliki beberapa ketentuan (prosedur) yang berfungsi untuk memitigasi risiko operasional termasuk *Business Continuity Management* (BCM).
   e. Laporan Bank Umum (LBU) khususnya terkait agunan.
   f. Kualitas laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).
   g. Pelaksanaan Komite *Support* Manajemen Risiko terkait produk dan aktivitas baru.
   h. Pengendalian risiko operasional dengan menerbitkan suatu kajian/opini setelah melakukan *review* terkait kebijakan, prosedur, aktivitas baru, perjanjian kerjasama, produk, dan Teknologi Informasi.
   i. Pengendalian risiko operasional termasuk risiko hukum, kepatuhan, stratejik, dan risiko reputasi berdasarkan data profil risiko bank.
   j. Kontrol setiap aktivitas operasional dengan penerapan *Control Self-Assessment* oleh RTU pada aplikasi RCSA. *Review* dan *update* kebijakan/pedoman manajemen risiko operasional termasuk risiko hukum, kepatuhan, stratejik, dan risiko reputasi sesuai dengan kebutuhan internal maupun perkembangan eksternal.
   k. Peningkatan *risk awareness* kepada seluruh lapisan organisasi perusahaan.
   l. Hasil evaluasi dari Forum Pengendalian Internal.
   m. Menerapkan prinsip *three lines of defense*, dimana *risk taking unit* merupakan fungsi *first line* yang melakukan pengelolaan risiko secara langsung, fungsi *second line* dilakukan oleh satuan kerja manajemen risiko, sedangkan fungsi *third line* dilakukan oleh satuan kerja *audit* internal untuk melakukan *assurance* atas penerapan kebijakan manajemen risiko secara menyeluruh yang dilaksanakan pada Perusahaan.

Risiko Hukum – Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan

suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

Identifikasi risiko hukum dilakukan pada seluruh aktivitas fungsional Bank termasuk identifikasi kemungkinan adanya risiko hukum yang ditimbulkan oleh rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan, perjanjian Bank dengan debitor/pihak ketiga lainnya, strategi penanganan kasus hukum, dan kegiatan operasional dan bisnis Bank lainnya.

Pada organisasi manajemen risiko hukum terdapat fungsi legal yang ada di Kantor Pusat dan Cabang untuk memitigasi potensi atau Risiko Hukum yang melekat pada aktivitas Bank serta melakukan koordinasi dengan Departemen Hukum Perusahaan dan pihak eksternal dalam penyelesaian permasalahan hukum khususnya atas gugatan dan somasi, serta memonitor dan menganalisis perkara yang dihadapi oleh Perusahaan yang sedang dalam proses pengadilan.

Pengukuran dan pemantauan risiko hukum dilakukan melalui perhitungan risiko berdasarkan nominal *potential loss* setiap kasus yang dihadapi Bank, pemantauan biaya penanganan kasus hukum, kerugian yang dihadapi Bank atas sebuah putusan yang *Inkracht, monitoring update* penanganan kasus hukum, dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko hukum. Pengendalian risiko hukum dilakukan dengan menerbitkan suatu kajian dan/atau opini setelah melakukan *review* terkait kebijakan, prosedur, perjanjian kerjasama, isu operasional serta isu hukum yang terjadi karena kegiatan bisnis dan operasional Bank.

Risiko Reputasi – Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang dapat merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media masa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, serta hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, seperti kelemahan tata kelola, budaya perusahaan, dan praktik bisnis Bank. Risiko reputasi dikelola melalui mekanisme *monitoring*, pengawasan, penanganan, dan penyelesaian yang dikoordinasikan serta didukung oleh bagian terkait dengan mengacu pada ketentuan internal dan perundang-undangan yang berlaku.

Identifikasi risiko reputasi dilakukan secara berkala sesuai dengan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko reputasi. Penilaian risiko reputasi dilakukan secara kualitatif antara lain bersumber dari pemberitaan negatif yang muncul dari masyarakat/nasabah dan keluhan nasabah. Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain sebagai berikut:

1. Pemantauan terhadap penanganan frekuensi dan materialitas berita dan komentar negatif terhadap Bank pada media massa, media sosial dan media online lainnya.
2. Pemantauan terhadap kredibilitas dan kejadian lain yang mempengaruhi reputasi Bank.
3. Pemantauan secara berkala terkait frekuensi dan materialitas penanganan dan penyelesaian keluhan nasabah.
4. Penggunaan *Complaint Tracking System* (CTS) untuk mengelola penyelesaian keluhan nasabah
5. Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) untuk memastikan standar waktu penyelesaian keluhan nasabah.
6. Secara berkelanjutan melaksanakan pelatihan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Dalam rangka *monitoring* dan pengendalian risiko reputasi, Bank melakukan evaluasi atas pelaksanaan manajemen risiko terkait risiko reputasi meliputi kajian terhadap *root cause* timbulnya risiko reputasi, evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan/handling keluhan, pengaduan nasabah dan pemberitaan negatif di media masa.

Evaluasi terhadap penilaian kepuasan nasabah secara bulanan dilakukan oleh departemen yang membidangi Pengembangan Kualitas Nasabah (CEXD) unit Kualitas Layanan dan disampaikan melalui memo internal Bukopin *Office Communication* (BOC) atau *Outlook Email* kepada seluruh karyawan Bank. Bank juga mengelola dan pengelolaan Risiko Reputasi seperti pemberitaan negatif terkait perusahaan yang merupakan salah satu peran dari Departemen Pengembangan dan Pengalaman Nasabah, Sekretaris Perusahaan dan Departemen Komunikasi Pemasaran serta Departement terkait.

Sebagai lembaga jasa keuangan, Perusahaan membutuhkan citra dan publikasi yang baik mengenai kegiatan usaha dan kinerja. Perusahaan selalu menjaga reputasinya pada level yang terbaik untuk memberikan produk dan layanan kepada nasabahnya. Kegagalan Perusahaan dalam menjaga reputasinya dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Perusahaan. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan akan berdampak langsung terhadap penurunan jumlah nasabah yang akhirnya memberikan dampak pada penurunan pendapatan dan volume aktivitas Perusahaan.

Risiko Stratejik – Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko Stratejik merupakan risiko akibat dari ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengendalian risiko stratejik diantaranya dilakukan melalui *monitoring* posisi Bank baik di antara industri perbankan maupun

di antara *peers group*, pemantauan pencapaian realisasi atas Target (rencana bisnis) dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko stratejik, dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor penyebab kegagalan serta pelaksanaan *monitoring* atas perkembangan kondisi makro ekonomi yang kemungkinan dapat berdampak pada bisnis Bank. Kemudian *monitoring* pencapaian realisasi atas anggaran (rencana bisnis) dan dilanjutkan dengan mitigasi atas faktor penyebab kegagalan, serta pelaksanaan *monitoring* atas perkembangan kondisi makro ekonomi yang kemungkinan dapat berdampak pada bisnis Bank.

Organisasi manajemen risiko stratejik tertera dalam Surat Keputusan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi PT. Bank Bukopin Tbk tanggal 02 September 2024, hal tersebut dalam rangka bentuk peningkatan fungsi *Human Capital* Grup melalui pembentukan Departemen *Talent Acquisition* guna mendukung proses *sustainable* transformasi Bank.

Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko Stratejik dilakukan oleh Departemen yang memiliki fungsi Stratejik serta bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Departmen yang membawahi fungsi Perencanaan Keuangan. Selain itu dalam rangka peningkatan fungsi *Human Capital*, Bank telah memiliki Departemen yang membawahi fungsi *Talent Acquisition* guna mendukung proses *sustainable* transformasi Bank.

Perusahaan mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap permodalan bank. Selain itu bank melakukan analisis risiko stratejik terhadap strategi yang membutuhkan sumber daya dan/atau yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa.

Perusahaan saat ini memiliki dua entitas anak, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah (dahulu PT. Bank Persyarikatan Indonesia) dan PT KB Bukopin Finance (dahulu PT Indo Trans Buana Multi Finance). Terdapat risiko dalam pelaksanaan penyertaan saham, diantaranya risiko atas kewajiban yang tak terduga yang terkait dengan kegiatan usaha yang mungkin baru diketahui setelah melakukan penggabungan dan pengambilalihan usaha, risiko kewajiban penyediaan dana di masa depan termasuk pendanaan yang diharuskan oleh pemegang saham Perusahaan untuk mempertahankan kecukupan modal Perusahaan, risiko kegagalan koordinasi upaya pemasaran dan penjualan, risiko tidak fokus pada bisnis utama, dan risiko terjadinya penghapusbukuan investasi.

Pengukuran risiko stratejik dapat menggunakan indikator berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis Perusahaan, posisi bisnis Perusahaan di industri perbankan, dan pencapaian rencana bisnis. Selain itu Perusahaan melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka identifikasi setiap peristiwa dan perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana stratejik dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis Perusahaan, baik secara keuangan maupun non keuangan.

Selain itu, dilakukan juga identifikasi dan analisa risiko secara memadai atas setiap aksi korporasi yang dijalankan (seperti misalnya penjualan asset, penerbitan *sub-loan,* penyertaan modal kepada perusahaan anak, dan lainnya). Hal ini untuk memastikan dampak risiko yang terjadi akibat aksi korporasi telah diterima dan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*).

Risiko Kepatuhan – Pengungkapan Kualitatif Umum

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak memenuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku lainnya. Organisasi manajemen risiko kepatuhan terdiri dari Departemen Kebijakan Kepatuhan & Tata Kelola, Departemen *Quality Assurance*, dan Departemen *Anti Money Laundering*. Selain itu dalam rangka memperkuat fungsi kepatuhan telah dibentuk Unit Pengembangan Kepatuhan. Setiap fungsi memiliki kebijakan dan prosedur yang mengatur batasan kewenangan atas aktivitas. Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan cukup memadai tercermin dalam kejelasan wewenang dan tanggung jawab dan didukung dengan fungsi Satuan Kerja Manajemen Risiko. Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundangundangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Risiko kredit terkait dengan ketentuan Kualitas Aset, NPL *net*, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
2. Risiko pasar terkait dengan ketentuan Posisi Devisa *Neto* (PDN).
3. Risiko likuiditas terkait dengan ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM), *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR).
4. Risiko operasional terkait pemenuhan ketentuan terkait penerapan prinsip *Know Your Customer* (KYC) serta Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).
5. Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) bagi Bank.

Identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan secara berkala yang antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan melalui perhitungan risiko berdasarkan *accounting loss* data dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko kepatuhan.
Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan antara lain melakukan:

1. Pengumpulan pos-pos kerugian operasional secara berkala (harian, bulanan, triwulan, dan tahunan);
2. Analisis dan *review* secara berkala terhadapa faktor-faktor penyebab timbulnya risiko operasional dan risiko-risiko lainnya serta kerugin yang dapat ditimbulkan;

Pemantauan dan pengendalian atas eksposur risiko kepatuhan dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja pelaksana lainnya secara berkala dan berkesinambungan dengan parameter-parameter dan limitasi yang telah ditetapkan. Unit kerja yang membidangi manajemen risiko kepatuhan menyusun Laporan Profil Risiko Kepatuhan secara berkala untuk keperluan pemantauan dan pengendalian eksposur risiko kepatuhan, termasuk identifikasi faktor-faktor penyebabnya untuk disampaikan kepada komite manajemen risiko dan direksi sebagai bahan evaluasi bersama.

Sistem dan prosedur *back-up* untuk mengantisipasi terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko merujuk pada *Procedure Disaster Recovery Plan* (DRP) terhadap sistem dan prosedur akan dilakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala. Pemantauan dan pengendalian risiko kepatuhan dengan menggunakan model internal mencakup penggunaan tools, identifikasi secara dini atas perubahan profil risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari risiko kepatuhan, serta laporan yang dihasilkan disampaikan secara berkala kepada Direksi.

Apabila terjadi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka risiko yang mungkin terjadi adalah sanksi bagi Perusahaan yang dapat berupa sanksi finansial berbentuk denda material maupun sanksi non finansial berbentuk teguran tertulis, sanksi ketidaklayakan dan ketidakmampuan bagi manajemen Perusahaan ataupun pembekuan kegiatan usaha Perusahaan.



KB Bank

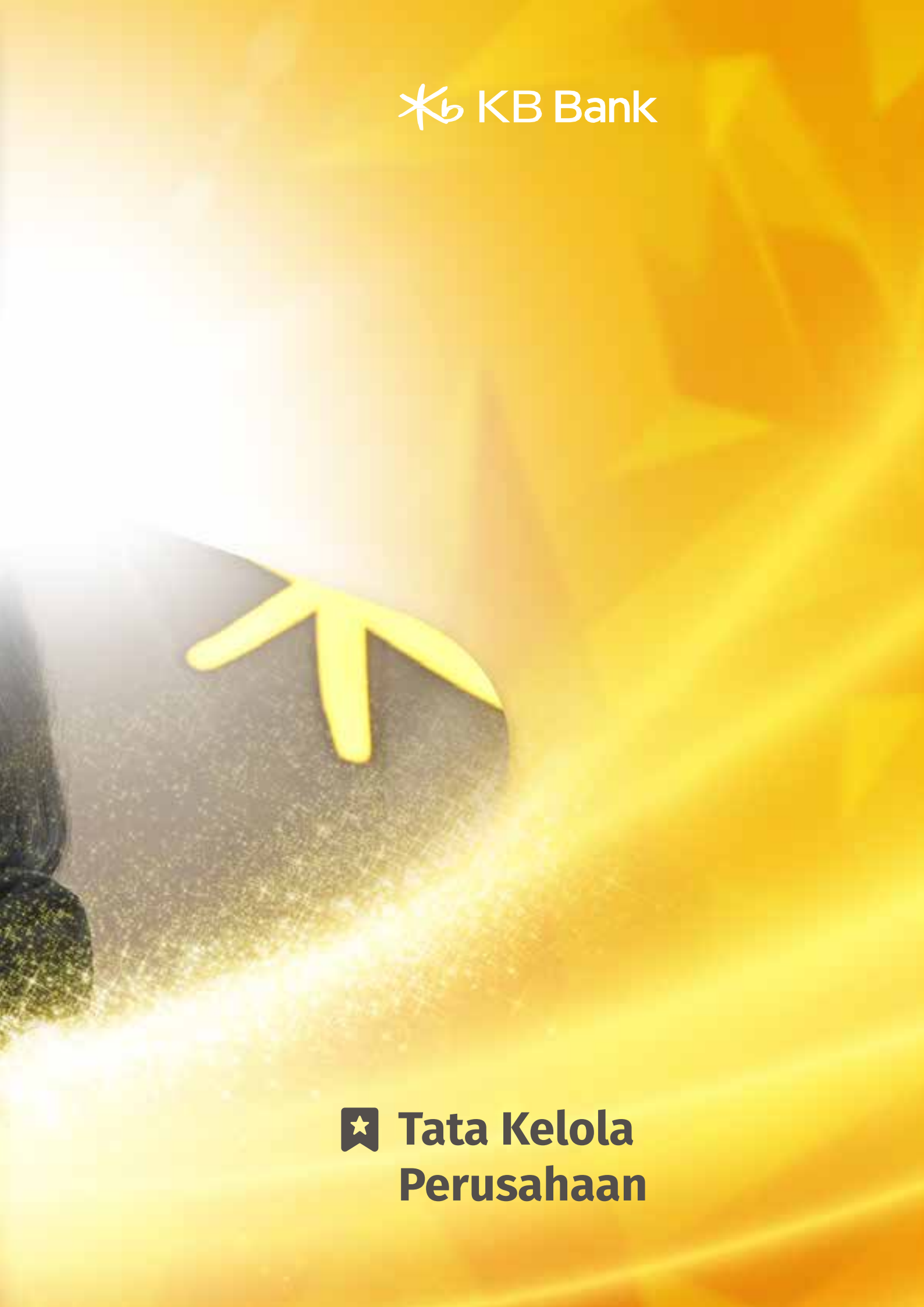

Tata Kelola Perusahaan

Perkembangan Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dalam industri perbankan yang semakin dinamis, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*/ GCG) menjadi aspek fundamental. GCG tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik dan pemangku kepentingan. KB Bank berkomitmen untuk terus memperkuat sistem tata kelola dengan menanamkan budaya perusahaan yang kondusif. Langkah ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan bisnis serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak terkait.

Sebagai institusi keuangan yang bertanggung jawab, KB Bank memahami bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh kinerja finansial, tetapi juga oleh penerapan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan berkeadilan. Oleh karena itu, KB Bank mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam seluruh lini organisasi. Hal ini mencakup manajemen senior hingga karyawan di semua tingkat, serta melibatkan pemegang saham, Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan dalam pengambilan keputusan strategis.

Untuk memastikan implementasi GCG berjalan optimal, KB Bank menerapkan tiga pilar utama tata kelola perusahaan, yaitu *Governance Structure*, *Governance Process,* dan *Governance Outcome. Governance Structure* berfokus pada penguatan kerangka kerja organisasi, *Governance Process* memastikan seluruh prosedur operasional berjalan sesuai standar, sedangkan *Governance Outcome* bertujuan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

Sebagai bagian dari strategi penguatan budaya perusahaan, KB Bank menginternalisasi nilai-nilai ICCAN – *Integrity, Competent, Care, Accountable*, dan Never *Give Up*. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi seluruh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab Bank. Tidak hanya sekadar slogan, prinsip ICCAN diterapkan dalam kebijakan, prosedur kerja, serta sistem pengelolaan sumber daya manusia. Dengan demikian, nilai-nilai ini membentuk pola pikir dan perilaku karyawan agar selalu selaras dengan norma etika bisnis serta regulasi yang berlaku.

Melalui upaya berkelanjutan dalam meningkatkan tata kelola perusahaan, KB Bank berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di setiap aspek operasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan di industri perbankan, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dengan prinsip tata kelola yang kuat, KB Bank terus berupaya menjadi mitra keuangan yang terpercaya bagi masyarakat.

Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Penerapan GCG di KB Bank didasarkan pada berbagai peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah dan regulator, di antaranya:

Undang Undang:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan OJK:

1. POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
2. POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
3. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik
4. POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik
5. POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik
6. POJK No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
7. POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik
8. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
9. POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan & Pedoman Piagam Unit Audit Internal
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum
11. POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
12. POJK No. 29/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
13. POJK No. 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum
14. POJK No.37/POJK.03/2019 tanggal 20 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank
15. POJK N0. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka
16. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum
17. POJK No. 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum
18. POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan

Surat Edaran OJK:

1. SEOJK No. 15/SEOJK.03/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan
2. SEOJK No. 32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka
3. SEOJK No. 30/SEOJK.04/2016 tanggal 3 Agustus 2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik
4. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
5. SEOJK No 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum
6. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2020 tanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Konvensional berikut perubahannya

Lainnya:

1. Ketentuan lainnya yang terkait dengan Pasar Modal dan lainnya
2. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional Kebijakan *Governance*
3. Anggaran Dasar KB Bank

Penerapan GCG sebagai bagian dari budaya perusahaan dilakukan melalui mekanisme internal yang melibatkan seluruh jajaran, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, hingga karyawan. Sinergi ini mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat daya saing Bank.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan

KB Bank memperkuat komitmennya terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan dalam setiap aspek kegiatan harian. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku serta keterbukaan terhadap perbaikan sesuai dengan praktik terbaik. Tujuannya adalah agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan KB Bank, serta mampu tumbuh secara sehat dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

GCG ditempatkan sebagai fondasi penting dalam mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan, dengan memperkuat struktur dan mekanisme GCG serta menerapkan nilai-nilai budaya KB Bank, yaitu ICCAN (*Integrity, Competent, Care, Accountable, Never Give Up*) yang menjadi panduan bagi manajemen dan karyawan dalam bekerja dan berperilaku.

Komitmennya tercermin dalam penandatanganan Pakta Integritas dan Deklarasi Gratifikasi serta Anti Suap. Dalam Pakta Integritas berisi pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen dalam melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Tindakan Fraud, Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan KB Bank.

PAKTA INTEGRITAS
PT. BANK KB BUKOPIN TBK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,
Dengan ini menyatakan bahwa saya telah membaca Kode Etik KB Bank dan memahami kewajiban sebagai Komisaris untuk mematuhi kebijakan dan peraturan yang tertuang di dalamnya, termasuk segala bentuk perubahan yang dibuat oleh KB Bank.
Maka saya berjanji dan menyatakan bersedia untuk :

1. Mengawali setiap pekerjaan dengan niat baik dan semata–mata bekerja untuk kepentingan Perusahaan serta tidak merugikan orang lain dan *Stakeholders*, yang dilandasi keikhlasan dan tulus.
2. Memelihara dan meningkatkan Integritas diri dalam melaksanakan tugas dengan tidak menyalahgunakan kewenangan dan tanggung jawab kerja.
3. Mematuhi dan menjalankan peraturan dan/atau ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik, Budaya Perusahaan, Peraturan Disiplin Karyawan, Perjanjian Kerja Bersama dan peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Perusahaan.
4. Tidak akan melakukan segala bentuk tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, berperan aktif dalam upaya pencegahan, pemberantasan serta melaporkan/menyampaikan informasi tindakan *Fraud*, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Perusahaan.
5. Berkomitmen untuk memberantas aktivitas ilegal dan tidak akan terlibat aktivitas ilegal termasuk perjudian konvensional dan perjudian *online* melalui *website*, aplikasi maupun *platform* lainnya. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penggunaan sistem pembayaran perbankan dalam transaksi ilegal termasuk judi *online*.
6. Tidak meminta dan/atau menerima segala bentuk pemberian baik secara langsung maupun tidak langsung berupa Uang dan/atau Hadiah dan/atau Cinderamata dan/atau Gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan Jabatan dan Pekerjaan, sehingga menimbulkan konflik kepentingan.
7. Menyampaikan informasi kepada *whistleblowing* yaitu tentang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Perusahaan.
8. Memahami dan berperan aktif dalam menjalankan Strategi Perusahaan.
9. Menerima konsekuensi berupa sanksi sesuai ketentuan Perusahaan, mengganti kerugian yang ditimbulkan atas tindakan *Fraud* atau pelanggaran ketentuan lainnya yang terjadi, maupun konsekuensi hukum baik dari Pihak Kepolisian dan/atau Pihak Otoritas lainnya.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan pemahaman tanpa paksaan dari pihak manapun.

(tempat),(tanggal/bulan/tahun)
Yang membuat pernyataan,

Nama
(Jabatan)

Komitmen dan Kebijakan Perusahaan dalam Menerapkan *Corporate Governance* dan *Governance Outcome*

KB Bank juga menempatkan tata kelola perusahaan sebagai fondasi utama dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dengan memberikan layanan terbaik kepada nasabah dan mengedepankan prinsip governansi yang kuat, bank berkomitmen untuk menciptakan operasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Sebagai wujud kepatuhan terhadap standar governansi, KB Bank mengacu pada Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) 2021, yang merupakan penyempurnaan dari PUGKI 2019, yang dikenal sebagai TARIF. Prinsip ini diterapkan secara menyeluruh dalam budaya Bank, proses pengambilan keputusan, serta keterbukaan informasi.

Dengan tata kelola yang baik, KB Bank berupaya memperkuat stabilitas usaha, membangun hubungan yang solid dengan pemangku kepentingan, serta mempertahankan reputasi sebagai lembaga keuangan yang terpercaya.

Dalam menjalankan operasionalnya, KB Bank mengacu pada empat pilar utama governansi korporat berikut:

Perilaku Beretika
Definisi: Dalam melaksanakan kegiatannya, Korporasi senantiasa mengedepankan kejujuran, memperlakukan semua pihak dengan hormat (*respect*), memenuhi komitmen, membangun serta menjaga nilai-nilai moral dan kepercayaan secara konsisten. Korporasi memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) dan dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Segenap jajaran di KB Bank , mulai dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan menjunjung tinggi komitmen terhadap Kode Etik. Perwujudan dari komitmen tersebut adalah menjunjung tinggi kepatuhan dan ketaatan pada peraturan , perundang-undangan yang berlaku. Selain itu mengikuti budaya perusahaan yaitu *Integrity, Competence, are, Accountable, Never Give Up* dalam pelaksanaan pekerjaan.
Akuntabilitas
Definisi: Korporasi dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu Korporasi harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan korporat dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkelanjutan. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Segenap jajaran di KB Bank, mulai dari Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan karyawan dalam melaksanakan tugas wajib untuk mempertanggungjawabkan tindakan sesuai dengan garis kewenangan yang ditetapkan perseroan, dengan meningkatkan aspek tata kelola melalui partisipasi pemangku kepentingan dengan mencakup semua aspek penting dalam perusahaan.
Transparansi
Definisi: Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, korporasi menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Korporasi mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Berkomunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor melalui komunikasi yang efektif dan berkesinambungan. Serta pelaksanaan keterbukaan informasi secara akurat dan tepat waktu.
Keberlanjutan
Definisi: Korporasi mematuhi peraturan perundang-undangan serta berkomitmen melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan agar berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan melalui kerja sama dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan cara yang selaras dengan kepentingan bisnis dan agenda pembangunan berkelanjutan. Penerapan di Lingkup Perusahaan: KB Bank memiliki komitmen yang kuat untuk membangun komunikasi secara jujur dan terbuka dengan pemegang saham dan masyarakat, antara lain dengan menghormati budaya masyarakat, melibatkan diri dalam aktivitas sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan yang merupakan tanggung jawab bersama.

KB Bank tidak hanya mengimplementasikan 4 (empat) pilar utama governansi korporat, tetapi juga mengadopsi 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang komprehensif. Prinsip-prinsip ini mencakup hak-hak pemegang saham, pemangku kepentingan, aturan pokok tentang pengelolaan, dan pengawasan atas pengelolaan korporasi di Indonesia. Selain itu, prinsip-prinsip tersebut juga mengedepankan etika, manajemen risiko, pengungkapan. Delapan prinsip governansi korporat tersebut terbagi dalam tiga kelompok utama sebagai berikut:

1. Fungsi Pengurusan dan Pengawasan Korporasi
   Prinsip-prinsip ini mengatur peran dan tanggung jawab dari Direksi dan Dewan Komisaris. Fokus utamanya adalah pada mekanisme pengambilan keputusan, pemantauan, dan pengawasan atas kegiatan korporasi.
2. Proses dan Keluaran dari Direksi dan Dewan Komisaris
   Kelompok prinsip ini mengatur proses-proses yang digunakan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengambil keputusan serta hasil yang dihasilkan dari proses tersebut. Ini termasuk kriteria evaluasi kinerja, perencanaan strategis, dan pelaporan keuangan yang transparan.
3. Pemilik Sumber daya
   Prinsip-prinsip ini mengatur bagaimana pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya akan menerima manfaat dari penerapan governansi korporat. Ini melibatkan hak-hak pemegang saham, perlindungan kepentingan pemangku kepentingan, dan alokasi dividen yang adil.

Sebagai bagian dari komitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, KB Bank berupaya memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan korporasi dilaksanakan dengan prinsip-prinsip yang kuat dan sesuai dengan standar yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil, serta menjaga kredibilitas dan reputasi Bank di hadapan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan masyarakat luas. Berikut adalah 8 (delapan) prinsip governansi korporat yang diterapkan di lingkungan KB Bank:

Prinsip 1: Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris
Definisi: Direksi dan Dewan Komisaris menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara independen untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan untuk kepentingan terbaik jangka panjang korporasi dan pemegang saham, dengan mempertimbangkan kepentingan para pemangku kepentingan. Penjelasan: Prinsip 1 berkaitan dengan peran dan tanggung jawab Direksi dalam melakukan pengelolaan korporasi serta peran dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan korporasi oleh Direksi. Di samping itu Prinsip ini mengatur penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris dan anggotanya masing-masing, penanganan benturan kepentingan yang terjadi pada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta peningkatan kompetensi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
Prinsip 2: Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris
Definisi: Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dipilih dan ditetapkan sedemikian rupa sehingga komposisi Direksi sebagai organ pengelolaan dan komposisi Dewan Komisaris sebagai organ pengawasan adalah beragam dan masing-masing terdiri dari para Direktur dan Komisaris yang memiliki komitmen, pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran pengelolaan Direksi dan peran pengawasan Dewan Komisaris. Remunerasi dirancang untuk secara efektif menyelaraskan kepentingan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan kepentingan jangka panjang korporasi dan penciptaan nilai yang berkelanjutan. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 2 mengharuskan pemilihan dan penetapan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dilakukan sedemikian rupa sehingga Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing sebagai organ pengelolaan dan pengawasan memiliki komposisi anggota dengan pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan perannya masing-masing. Di samping itu, Prinsip ini menekankan pentingnya kebijakan remunerasi untuk mendorong anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mengutamakan kepentingan jangka panjang korporasi berdasarkan prinsip keberlanjutan, serta mengharuskan pengungkapan kebijakan dan informasi remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara transparan dan akuntabel.
Prinsip 3: Hubungan Kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris
Definisi: Direksi dan Dewan Komisaris memiliki hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional dan saling percaya untuk kepentingan terbaik korporasi. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 3 menekankan pentingnya hubungan kerja yang erat, terbuka, konstruktif, profesional, saling percaya antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam mencapai kepentingan terbaik korporasi. Prinsip 3 ini juga mengatur perlunya Dewan Komisaris mengakses informasi yang lengkap serta pentingnya anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami implikasi struktur kepemilikan korporasi terhadap pelaksanaan perannya.

Prinsip 4: Perilaku Etis
Definisi: Korporasi memiliki komitmen untuk bertindak secara etis dan bertanggung jawab, menegakkan nilai-nilai dan budaya organisasi. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 4 mengharuskan korporasi untuk membuat pernyataan secara berkala tentang komitmen korporasi tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga komitmen untuk bertindak etis dan bertanggung jawab.
Prinsip 5: Manajemen Risiko, Pengendalian Intern dan Kepatuhan
Definisi: Korporasi menjalankan praktik governansi korporat yang terintegrasi dengan penerapan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, serta sistem manajemen kepatuhan yang efektif dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, visi, misi, tujuan, maupun target kinerja korporat dalam menjalankan bisnis secara berintegritas. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 5 mengharuskan Direksi untuk mengimplementasikan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan secara terintegrasi sebagai bagian dari strategi, perangkat manajemen, dan praktik yang dijalankan korporasi dalam berbisnis secara bertanggung jawab (*responsible business*) sebagai warga korporat yang baik (*good corporate citizen*). Dewan Komisaris memantau dan menyampaikan masukan terhadap efektivitas penerapan governansi, sistem pengendalian internal dan manajemen risiko, dan sistem manajemen kepatuhan korporat yang dilaksanakan secara terintegrasi oleh Direksi.
Prinsip 6: Pengungkapan dan Transparansi
Definisi: Korporasi membuat pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 6 mengharuskan korporasi untuk memiliki kerangka governansi yang mampu memberikan keyakinan yang dapat menghasilkan pengungkapan yang akurat dan tepat waktu mengenai semua hal yang material tentang korporasi, yang meliputi kondisi dan kinerja keuangan, kepemilikan atas korporasi, dan governansi korporat.
Prinsip 7: Hak-hak Pemegang Saham
Definisi: Korporasi melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham dan memastikan perlakukan yang adil terhadap pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Semua pemegang saham memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 7 menjelaskan mengenai pemenuhan hak pemegang saham dan perlakuan adil bagi pemegang saham, bagaimana cara kerja sama aktif antara korporasi dengan pemegang sahamnya dilaksanakan serta pelaksanaan sebagian hak pemegang saham secara efektif melalui RUPS.
Prinsip 8: Hak-hak Pemangku Kepentingan
Definisi: Korporasi mengakui hak-hak pemangku kepentingan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau suatu perjanjian yang disepakati oleh korporasi dan mendorong kerja sama aktif dengan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan keberlanjutan usaha yang sehat secara finansial. Penerapan di Lingkup Perusahaan: Prinsip 8 menjelaskan peran Direksi dan Dewan Komisaris mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam model bisnis korporasi, melaksanakan pelibatan pemangku kepentingan, serta memastikan perlindungan terhadap hak-hak para pemangku kepentingan. Dewan Komisaris memantau pengintegrasian semua aspek tersebut di atas yang dilakukan oleh Direksi.

Governance Framework

Bank mengimplementasikan 4 (empat) pilar governansi korporat secara menyeluruh dan terstruktur, mencakup ketiga aspek Governance, yaitu:

1. Struktur tata kelola (*governance structure*) *Governance structure* menunjukkan kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses penerapan prinsip tata kelola yang baik menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.
2. Proses Tata Kelola (*governance process*) *Governance process* mencerminkan efektivitas proses penerapan prinsip tata kelola yang baik yang didukung oleh kecukupan, struktur dan infrastruktur tata Kelola Bank, sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.
3. Hasil Tata Kelola (*governance outcome*) *Governance outcome* ditunjukkan dengan kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank yang merupakan hasil proses penerapan prinsip tata kelola yang baik serta didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.

Governance Outcome

Sebagai dampak positif dari manifestasi penerapan dan penegakan tata kelola terhadap penciptaan budaya kerja dan keberlangsungan usaha, Bank senantiasa menjaga kepercayaan dari pemegang saham pengendali dan pihak eksternal. Hal tersebut diwujudkan dengan hasil penerapan GCG di KB Bank secara umum adalah Baik sebagaimana tercermin dalam pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Di tahun 2024, peringkat GCG KB Bank berdasarkan penilaian sendiri adalah Peringkat 2 (Baik).

Standar Kualitas Penerapan *Corporate Governance*

KB Bank menerapkan standar GCG dengan cara mengintegrasikan visi dan misi perusahaan yang dituangkan dalam Nilai-nilai Budaya Perusahaan, yang dikenal dengan istilah ICCAN (*Integrity, Competent, Care, Accountable, & Never Give Up*). Nilai ICCAN ini menjadi pedoman bagi seluruh manajemen dan karyawan di setiap level untuk melaksanakan tugas dan berperilaku dengan baik.

Penerapan GCG dipandang sebagai proses jangka panjang yang bertujuan menciptakan nilai yang berkelanjutan. Oleh karena itu, GCG telah menjadi bagian dari budaya perusahaan yang ditanamkan melalui proses internal yang melibatkan Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan.

Dalam standar penerapan GCG, diatur peran Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan, memastikan bahwa pengelolaan perusahaan oleh Direksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Direksi bertanggung jawab menjalankan fungsi kepengurusan dengan penuh amanah dan profesional, serta menghindari potensi konflik kepentingan. Seluruh organ GCG bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa setiap aktivitas operasional Bank mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KB Bank juga mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan POJK No. 17 Tahun 2023 mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Untuk terus meningkatkan kualitas penerapan GCG, KB Bank juga melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap praktik terbaik yang berlaku secara global, meliputi:

1. Prinsip-prinsip *Corporate Governance* untuk *Stated Owned Company* yang dikembangkan oleh Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), yaitu ASEAN *Corporate Governance Scorecard*;
2. *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang diselenggarakan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG). CGPI merupakan program riset dan pemeringkatan penerapan GCG pada perusahaan-perusahaan di Indonesia;
3. *Principles for Enhancing Corporate Governance* yang diterbitkan oleh Basel Committee on Banking Supervision; dan
4. ESG atau *Environment, Social, and Governance*.

Internalisasi peraturan perundang-undangan serta pedoman yang mengikuti standar nasional dan internasional ke dalam kebijakan internal KB Bank merupakan komitmen yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan KB Bank. Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan visi, misi, dan nilai-nilai Perseroan, yang diharapkan dapat menjadi bagian integral dari perilaku sehari-hari setiap insan KB Bank.

Penilaian Penerapan GCG

KB Bank terus meningkatkan penerapan GCG, yang tercermin dalam peningkatan hasil *governance outcome* setiap tahunnya. Peningkatan ini juga terlihat pada kinerja operasional dan keuangan yang terus berkembang secara berkelanjutan.

Untuk menjaga konsistensi, KB Bank secara rutin melakukan evaluasi kualitas GCG, baik melalui *self-assessment* maupun dengan melibatkan pihak ketiga untuk penilaian yang lebih independen. Adapun pemantauan GCG dilakukan dengan cara-cara berikut:

1. *Monitoring* pelaksanaan rekomendasi SEOJK kepada seluruh unit kerja terkait.
2. Melakukan *reminder* penerapan GCG ke seluruh unit kerja terkait.
3. Meningkatkan sosialisasi dengan *Compliance Awareness* (kesadaran kepatuhan) yang dimaksud adalah kesadaran bahwa adanya peraturan oleh seluruh pihak berikut pemahaman akan peraturan.

Self Assessment GCG

Bank menerapkan standar kualitas dalam implementasi GCG, yang mencakup hal-hal berikut:

1. Memastikan pelaksanaan prinsip dasar tata Kelola diimplementasikan dengan komprehensif.
2. Melakukan monitoring atas kelemahan-kelemahan dalam proses pelaksanaan GCG.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi kepada departemen/unit terkait untuk berperan aktif dalam mengimplementasikan GCG.
4. Meningkatkan kualitas dan peran organ dalam organisasi GCG untuk menerapkan Budaya pelaksanaan GGC ke seluruh jenjang organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG, serta berdasarkan pada Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) secara menyeluruh setiap semester. Tujuan penilaian ini adalah untuk merumuskan rencana tindak lanjut, yang mencakup langkah-langkah korektif (jika diperlukan), dengan memperhatikan 11 (sebelas) faktor penilaian, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;

7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern;
9. Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*);
10. Transparansi kondisi keuangan dan non Keuangan Bank, Laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal;
11. Rencana strategis Bank.

Berikut ini adalah hasil penilaian pelaksanaan GCG di KB Bank berdasarkan posisi per Desember 2024:

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

	Peringkat	Definisi Peringkat (Berdasarkan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum)
Individual	2	KB Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum adalah Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank. Dengan demikian, peringkat GCG KB Bank adalah Peringkat 2.
Konsolidasi	2	Penerapan *good corporate governance* KB Bank secara konsolidasi adalah Baik, penilaian GCG PT KB Bank Syariah Bukopin dan PT KB Bukopin Finance sebagai Perusahaan Anak belum memiliki dampak atau pengaruh signifikan yang dapat menyebabkan penurunan terhadap penilaian GCG KB Bank.

Analisis

Kekuatan Penerapan Tata Kelola

1. *Governance Structure*
   a. Pelaksanaan RUPS Tahunan telah sesuai ketentuan POJK 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham dan telah disetujui oleh RUPS sebagai bentuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
   b. Salah satu agenda RUPS adalah Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, hal ini sebagai bentuk penerapan tata kelola yang baik serta kepatuhan Bank terhadap POJK 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.
   c. Jumlah dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan telah mempertimbangkan skala dan kompleksitas usaha serta memperhatikan latar belakang pengalaman, pendidikan serta pelatihan untuk memenuhi persyaratan, integritas, kompetensi, independensi dan reputasi keuangan yang memadai untuk mendukung realisasi *corporate plan* KB Bank.
   d. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
   e. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pemenuhan prinsip-prinsip GCG telah memadai. Hal ini tercermin dari kelengkapan struktur berupa perangkat Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja *Quality Assurance*, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Masing-masing satuan kerja tersebut memiliki komposisi, kompetensi, dan kriteria yang memadai sehingga mampu bekerja secara independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional serta melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   f. Memiliki komite–komite untuk mendukung kinerja Direksi, yaitu antara lain: Komite Manajemen Risiko, Komite *Asset* dan *Liabilities*, Komite Kredit, Komite Remedial, Komite Pengarah TI, Komite *Support* TI, Komite Manajemen Risiko Terintegrasi, Komite Pengendalian Internal dan *Anti Fraud*, Komite Disiplin Karyawan (KDK), Komite *Human Capital* dan Komite Pengadaan Barang dan Jasa.
   g. Memiliki komite-komite yang dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.Terdiri dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi & Nominasi, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi. Pembentukan Komite-komite tersebut telah sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan Bank serta pelaksanaan tugas komite dilengkapi dengan kebijakan dan pedoman tata tertib kerja (*charter*).
   h. KB Bank telah Menyusun Pedoman *Recovery Plan*, telah mengirim Laporan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* untuk memenuhi ketentuan Regulator khususnya POJK 5 tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan Dan Penanganan Permasalahan Bank Umum dan PLPS 2 tahun 2024 tentang Rencana Resolusi Bagi Bank Umum.

i. KB Bank telah menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan Integritas Pelaporan Keuangan Bank, sebagai bentuk pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank

j. Direksi dan Dewan Komisaris telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan Dana kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar dengan cukup baik. Penyampaian Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memastikan realisasi pencapaian terhadap Rencana Strategis Bank dan melaporkannya kepada OJK melalui realisasi *action plan* bulanan.

k. Bank memiliki sistem informasi penunjang aktivitas bisnis dan kegiatan operasional serta untuk mendukung proses pelaksanaan pengendalian internal. Bank berkomitmen untuk selalu melakukan pengembangan sistem informasi yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan dan tantangan bisnis. Sistem informasi yang sudah berjalan antara lain adalah Sistem *E-Flow*, Sistem Informasi Keuangan Mikro (SIKM), *BukiSys* (AS400), go-AML, *Silverlake*, SME *Credit Tools* (SCT), dan *Loan Origination System* (LOS), *Sanction Screening, Anti Money Laundering* (AML) *Monitoring System*, dan *Enysis*.

l. Mengembangkan dan memperkuat struktur organisasi yang selaras dengan strategi perusahaan antara lain untuk percepatan kinerja bisnis di cabang dalam satu lini komando yang fokus pada aktivitas penjualan, penguatan *regulatory reporting*, penguatan fungsi DPD, peningkatan SLA dalam proses kredit, maka telah disempurnakan struktur organisasi melalui surat Keputusan 101 tahun 2024.

m. Telah dilakukan Inisiatif pengkinian kebijakan atas kebijakan-kebijakan yang ada, identifikasi pemilik kebijakan, pemisahan kebijakan yang masih berlaku dan tidak berlaku dan pada akhir semester II tahun 2024 terdapat 145 (Seratus Empat Puluh Lima) ketentuan internal baru dan/atau revamp sebagai berikut:

Judul	Nomor Kebijakan
Standar Operasional Prosedur Proses Asuransi Produk Retail Menggunakan Portal / *Insurance Process SOP For Retail Products Using The Insurance Portal*	102
Pedoman Mekanisme Tentang Proses Peralihan / *Take Over* Kredit Pensiun melalui Kerjasama *Channeling* Kopnus / *Mechanism Guidelines on Pension Credit Switching / Take Over Process through Kopnus Channeling Cooperation*	103
Produk Program Kredit Pensiun, Pra Pensiun & *Payroll Loan* Mitra *Channeling* / *Channeling Partner Pension, Pre-Retirement & Payroll Loan Program Products*	104
Petunjuk Teknis Tentang Standarisasi Dokumen *Mandatory* dan *Covenant* untuk Kredit Segmen SME / *Technical Instructions regarding Standardization of Mandatory Documents and Covenants for SME Segment Credit*	105
Petunjuk Teknis Tentang Sentralisasi Pengajuan Bank Garansi dengan Jaminan Kontra Bank Garansi (KBG) Khusus untuk Debitur / *Principal Segment* SME melalui SME *Partnership* Departemen	106
Product Program tentang RDN / *Program Product Regarding Customer Fund Account* (RDN) KB Bank	107
Kebijakan Tentang Kode Etik Perlindungan Konsumen PT. Bank KB Bukopin, Tbk. / *Policy on Consumer Protection Code of Ethics* PT Bank KB Bukopin, Tbk	108
Standar Operasional Prosedur *Auto Loan Channeling* Kerja Sama Perusahaan Multi Finance / *Standard Operational Procedures Regarding Auto Loan Channeling in Collaboration with Multi Finance Companies*	109
Standar Operasional Prosedur Tentang Produk Program Rekening Dana Nasabah (RDN) KB Bank / *Standar Operation Procedures on Customer Fund Account* (RDN) KB Bank	110
Kebijakan tentang Pengangkatan Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Employee Appointment* of PT Bank KB Bukopin Tbk	111
Pedoman Tentang Pengelolaan *Limit Dealer Treasury* PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Guidelines Concerning Treasury Dealer Limit Management* PT Bank KB Bukopin Tbk	112
Kebijakan *Global Treasury* PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Concerning Global Treasury* PT Bank KB Bukopin Tbk	113
Kebijakan Tentang Perjalanan Dinas / *Policy on Business Travel*	114
Pedoman tentang Pengelolaan Jaminan Kredit pada PT. Multifiling Mitra Indonesia / *Guidelines of Credit Collateral Management at PT Multifilling Mitra Indonesia*	115
Standar Operasional Prosedur Tentang Program VIP *Referal & Reward Priority* / *Standard Operating Procedure on VIP Referral & Reward Priority Program*	116
Pedoman tentang Mekanisme Pembukaan Rekening Siaga Pensiun Tanpa Kehadiran pada Pensiunan Mitra Dapen / *Guidance Mechanism on Opening a Pension Standby Account Without Attendance for etirees of Dapen Partners*	117
Kebijakan Tentang Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi PT Bank KB Bukopin tbk / *Organization Roles and Responsibilities Policy* PT. Bank KB Bukopin Tbk	118
Petunjuk Teknis Pengelolaan *Patch* / *Technical Instructions on Patch Management*	119

Judul	Nomor Kebijakan
Petunjuk Teknis Teleworking / *Technical Instructions for Teleworking*	120
Petunjuk Teknis Pengelolaan Akses *User* / *Technical Instructions for User Access Management*	121
Pedoman tentang Hapus Buku dan Penjualan Inventaris Kantor PT Bank KB Bukopin Tbk / *Guideline of Office Inventory Write Off & Sale in* PT Bank KB Bukopin Tbk	122
Kebijakan Tingkat Tinggi Tentang Tata Kelola KB Bank / *High-level Policy of KB Bank Governance*	123
Produk Program Tentang Pinjaman Rekening Koran Intraday KPEI / *INTRADAY KPEI Current Account Loan Program Product*	124
Standar Operasional Prosedur Tentang Pinjaman Rekening Koran Intraday KPEI / *Standard Operating Procedures of Intraday KPEI Current Account Loan*	125
Pedoman tentang Keamanan Gedung / *Guidelines on Building Safety*	126
Kebijakan Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi / *Information Security Management System Policy*	127
Standar Operasional Prosedur Tentang *Airport Executive Lounge & Airport Handling / Standard Operational Procedure Regarding Airport Executive Lounge & Airport Handling*	128
Pedoman tentang Pemotongan Manfaat Pensiun untuk Angsuran Kredit Pensiun pada Mitra Bantuan Potong (Mitra Banpot) serta Pemotongan Melalui KOPNUS / *Guideline on Withholding of Retirement Benefits for Pension Credit Installments with Withholding Assistance Partners (Banpot Partners) and Withholding Through* KOPNUS	129
Pedoman tentang Mekanisme Peralihan Top *Up / Take Over* Credit Pensiun melalui Kerjasama *Channeling*	130
Kebijakan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Consumer Protection and Society* PT Bank KB Bukopin Tbk	131
Pedoman tentang Transaksi Tanpa Kehadiran Nasabah / *Guidance on Transaction Without Customer Presence*	132
Pedoman tentang Pengelolaan Kode AO & Pengalihan Portofolio / *Guidelines of Management of AO Code and Transfer of Portfolio*	133
Kebijakan tentang Skala Gaji Pokok Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Basic Salary Scale for Employees of* PT Bank KB Bukopin Tbk	134
Kebijakan tentang Remunerasi Tenaga Kerja Asing / *Policy on Remuneration of Foreign Workers*	135
Kebijakan tentang Peraturan Fasilitas Perjalanan Spiritual karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Regulation of Spiritual Travel Facilities for Employees of* PT Bank KB Bukopin Tbk	136
Standar Operasional Prosedur Speciment dan Foto pada Penanganan Pengaduan Nasabah dan transaksi Tabungan / *Standard Operational Procedure on Application Of Speciment And Photos In Handling Customer Complaints & Savings Transactions*	137
Standar Operasional Prosedur tentang *Cash in Transit / Standard Operational Procedure on Procedure cash in Transit*	138
Standar Operasional Prosedur tentang Aplikasi Stok Kartu Debit / *Standard Operating Procedure on Debit Card Stock App*	139
Standar Operasional Prosedur tentang Nasabah Pensiun / *Standard Operational Procedure on Pension Customer Authentication*	140
Kebijakan Tentang Cuti Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Employee Leave* PT Bank KB Bukopin Tbk	141
Kebijakan tentang Bantuan Pendidikan / *Policy on Education Support*	142
Pedoman Tentang Pelaksanaan Unit Bisnis dan Kontrol di Departemen Pengendalian Mutu PT Bank KB Bukopin Tbk / *Guidelines on the Implementation of Business and Control Units in the Quality Control Department of* PT Bank KB Bukopin Tbk	143
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank KB Bukopin / *Pension Fund Regulation of KB Bukopin Bank Pension Fund*	144
Standar Operasional Prosedur tentang Global Bonds / *Standard Operating Procedure on Global Bonds*	145
Standar Operasional Prosedur tentang Pasar Uang / *Standard Operating Procedure on Money Market*	146
Pedoman Halo KB Bank 14005 / Halo KB Bank 14005 *Guidelines*	147
Pedoman tentang Form Khusus / *Guidelines on Special Forms*	148

Judul	Nomor Kebijakan
Kebijakan Penanganan Portofolio Loan at Risk KB Bank / *KB Bank's Loan at Risk Portfolio Management Policy*	149
Pedoman Take Over Kredit SME / *SME Loan Take Over Guidelines*	150
Pedoman Tentang Penggunaan *Approval List Supplier dan Buyer* / *Guidelines for the Use of Approved List of Suppliers and Buyers*	151
Pedoman Tentang Analisa Rekening Koran / *Guidelines on Current Account Analysis*	152
Standar Operasional Tentang *Fuel Card* / *Standart Operating Procedure on Fuel Card*	153
Kebijakan Pengelolaan Alih Daya PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Regarding Outsource Management of PT Bank KB Bukopin Tbk*	154
Kebijakan tentang Penjualan Kredit Bermasalah Secara Kolektif PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Collective Loan at Risk PT Bank KB Bukopin Tbk*	155
Petunjuk Teknis Tentang Penghapusan Data dan *Reset Factory* OS Windows / *Technical Instruction of Data Deletion and Factory Reset Windows OS*	156
Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Personal / *Standard Operating Procedure on the Implementation of Personal Loan Restructuring*	157
Standar Operasional Prosedur Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Konsumer / Standard *Operating Procedures On The Implementation of Consumer Credit Restructuring*	158
Pedoman Tentang Surat Berharga / *Marketable Securities Guidelines*	159
Pedoman Tentang Pembatalan Kredit Bisnis Pensiun	160
Kebijakan Pembuatan Perjanjian dan Surat Kuasa Perjanjian	161
Pedoman tentang Proses Kredit SME melalui Credit Regional Center (CRC) / *Guidelines on SME Credit Process through Credit Regional Center* (CRC)	162
Petunjuk Teknis Tentang Manajemen Keamanan Siber / *Technical Guidance on Cybersecurity Management*	163
Petunjuk Teknis Tentang *Statement Of Applicability* Sistem Manajemen Informasi ISO/IEC 27001:2013 / *Technical Guidance on Statement of Applicability of Information Management System ISO*/IEC 27001:2013	164
Petunjuk Teknis Tentang Formulir Business Impact Analysis / *Technical Guidance on the Business Impact Analysis Form*	165
Petunjuk Teknis Tentang Manajemen Kelangsungan Layanan Teknologi Informasi / *Technical Guidelines on Information Technology Service Continuity Management*	166
Petunjuk Teknis Tentang Pemetaan Peran & Fungsi Organisasi ITSCM / *Technical Guidelines on ITSCM Organization Role & Function Mapping*	167
Pedoman Tentang Kredit Dengan Agunan Tunai (*Back to Back Loan*) / *Guidelines on Cash Collateralized Loans (Back to Back Loan*)	168
Standar Operasional Prosedur Rekening Koran / *Standard Operating Procedure for Current Account*	169
Pedoman Layanan Syariah Bank / *Bank Syariah Service Guidelines*	170
Pedoman tentang Penerapan *Know Your Employee* PT Bank KB Bukopin Tbk / *Guidelines on the Implementation of Know Your Employee PT Bank KB Bukopin Tbk*	171
Petunjuk Teknis Tentang Sistem Keamanan OS Win 2016 *Member Server* / *Technical Guidance About Win 2016 Member Server OS Security System*	172
Petunjuk Teknis Tentang Konfigurasi Sistem Operasi Linux / *Technical Guide to Linux Operating System Configuration*	173
Petunjuk Teknis Tentang Konfigurasi Keamanan Sistem Operasi Windows 10 / *Technical Instructions on Windows 10 Operating System Security Configuration*	174
Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Pengguna dan Pengelolaan Password / *Technical Guidelines on User Management and Password Management*	175
Petunjuk Teknis Tentang Pemetaan Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Pengelolaan ISMS / *Technical Guidance on Mapping the Tasks and Responsibilities of the ISMS Management Organization*	176
Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi / *Technical Guidelines on Information Security Incident Management*	177
Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi / *Technical Guidelines on Information Security Incident Management*	178

Judul	Nomor Kebijakan
Petunjuk Teknis Tentang *Software Desktop*/ Laptop / *Technical Guidelines on Desktop/ Laptop Software*	179
Standar Operasional Prosedur Tentang Kode Transaksi Tanpa Kehadiran Nasabah / *Standar Operating Procedure on Transaction Codes without Customer Presence*	180
Petunjuk Teknis Tentang Pemilihan *Vendor Fronting* Untuk Kredit Pensiun / *Technical Guidance on Selection of Fronting Vendors for Pension Credit*	181
Petunjuk Teknis Tentang Pembayaran Imbal Jasa *(fee) Fronting* / *Technical Guidelines on Payment of Fronting Fees*	182
Pedoman tentang Proses Perpanjangan Waktu Kredit Sementara (PPWKS) / *Guidelines regarding Loan Temporary Extension Process (TE)*	183
Petunjuk Teknis Tentang DPD Management Portofolio Kredit *Retail* / *Technical Guidelines Regarding DPD Retail Credit Portfolio Management*	184
Kebijakan Tentang Penerapan APU, PPT, dan PPPPSPM	185
Pedoman Tentang Hapus Buku PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Guideline on Write Off PT Bank KB Bukopin, Tbk*	186
Petunjuk Teknis Tentang Retensi Dokumen, Rekaman dan Log Data DTI / *Technical Instruction of DTI Document, Recording and Data Log Retention*	187
Standar Operasional Prosedur tentang Pengelolaan QRIS PT Bank KB Bukopin,Tbk / *Standard Operating Procedure About QRIS Management PT Bank KB Bukopin, Tbk*	188
Kebijakan Tentang Klasifikasi Jaringan Kantor / *Policy on Office Network Classification*	189
Pedoman Tentang Perkreditan SME, *Commercial, Corporate*, dan Korean Link PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Guidelines Regarding Credit SME, Commercial, Corporate, and Korean Link PT. Bank KB Bukopin, Tbk*	190
Standar Operasional Prosedur Tentang *Collection* Kartu Kredit / *Standard Operating Procedures On Credit Card Collection*	191
Standar Operasional Prosedur tentang Rekening Pasif / *Standard Operating Procedure regarding Dormant Account*	192
Standar Operasional Prosedur *Fraud Detection System* / *Standard Operating Procedure of Fraud Detection System*	193
Aplikasi KBStar	194
Kebijakan tentang Persetujuan Penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Policy concerning Approval of Allowance for Impairment Losses Determination*	195
Standar Operasional Prosedur Tentang Kartu Debit KB Bank / *Standard Operating Procedure on KB Bank Debit Card*	196
Standar Operasional Prosedur Tentang Kartu Kredit KB Bank / *Standard Operating Procedure on KB Bank Credit Card*	197
Kebijakan Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk	198
Kebijakan Pelaksanaan *Training, Workshop*, dan Sosialisasi untuk Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy of Training, Workshop and Socialization Implementation for Employees PT Bank KB Bukopin Tbk*	199
Standar Operasional Prosedur Tentang Kompensasi Keterlambatan Transfer Dana / *Standard Operating Procedure on Compensation for Delayed Fund Transfers*	200
Pedoman tentang EDC dan Layanan *merchant*	201
Pedoman tentang Pengelolaan Asuransi Dalam Rangka Dukungan Kredit & *Asset* Bank PT Bank KB Bukopin, Tbk	202
Petunjuk Teknis Tentang *Fraud Control* Kartu ATM / *Debit dan Electronic Channel* / *Technical Guidelines on ATM/ Debit Card and Electronic Channel Fraud Control*	203
Petunjuk Teknis Tentang *Fraud Control* Kartu Kredit / *Technical Guidelines on Credit Card and Fraud Control*	204
Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan *High Privilege User* / *Technical Guidelines on High Privilege User Management*	205
Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Akses *Finger Print* / *Technical Guidelines on Finger Print Access Management*	206

Judul	Nomor Kebijakan
Petunjuk Teknis Tentang Akses *Data Center* / *Technical Guidelines on Data Center Access*	207
Kebijakan Strategi *Anti Fraud*	208
Pedoman tentang Aktivitas KB Bank sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)	209
Pedoman tentang Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) PT Bank KB Bukopin Tbk / *Guidelines on Foreclosed Collateral PT Bank KB Bukopin Tbk*	210
Produk Program tentang Pinjaman Rekening Koran Debitur MSME, *Wholesale* & Korean Link PT. Bank KB Bukopin, Tbk	211
Produk Program tentang *Payroll Loan*	212
Pedoman tentang Proses Peninjauan Pinjaman Berjangka PT Bank KB Bukopin Tbk / *Guidance regarding Term Loan Review Process PT Bank KB Bukopin Tbk*	213
Pedoman Tentang Pelaksanaan Unit Thematik di Departemen Pengendalian Mutu PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Guidelines on the Implementation of Thematic Unit in the Quality Assurance Department PT Bank KB Bukopin, Tbk*	214
Petunjuk Teknis Tentang Pengendalian *Source Code* / *Technical Instructions of Source Code Control*	215
Pedoman Tentang Pelaksanaan untuk *Budget PIC* / *Guidance on Implementation for Budget* PIC	216
Pedoman Tentang Aktivitas Bancassurance Model Bisnis Referensi Tidak dalam Rangka produk Bank (*Telemarketing*)	218
Pedoman tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	219
Pedoman Tentang Penilaian Profil Risiko Individu dan Konsolidasi	220
Pedoman Akuntansi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) PT Bank KB Bukopin Tbk	221
Kebijakan tentang Manajemen Risiko Operasional PT Bank KB Bukopin Tbk	222
Kebijakan *Risk Appetite* PT Bank KB Bukopin, Tbk	223
Kebijakan Tingkat Tinggi Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin, Tbk / *High Level Policy Regarding Risk Management PT Bank KB Bukopin, Tbk*	224
Kebijakan Tentang Rencana Aksi Pemulihan PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Policy Regarding Recovery Action Plan of PT Bank KB Bukopin, Tbk*	225
Standar Operasional Prosedur Mekanisme Transaksi Forex dan *Money Market* pada Aplikasi Opics	226
Standar Operasional Prosedur Obligasi Senior	227
Standar Operasional Prosedur Tentang Pengembangan Kantor / *Standard Operational Procedure Regarding Branch Development*	228
Standar Operasional Prosedur Swamitra / *Swamitra Standard Operating Procedure*	229
Standar Operasional Prosedur Pinjaman Swamitra / *Swamitra Loan Standard Operating Procedure*	230
Petunjuk Teknis Tentang Kerjasama dan Penagihan Kredit *Retail* Oleh Pihak Ketiga / *Technical Guidelines on Cooperation and Collection of Retail Loans by Third Parties*	231
Petunjuk Teknis Tentang Pelaksanaan *Stress Test* Manajemen Risiko / *Technical Guidelines Regarding Stress Test Implementation for Risk Management*	232
Kebijakan Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing, Program Alih Pengetahuan dan Kunjungan Bisnis / *Policy on Utilization of Expatriates, Knowledge Transfer Program and Business Visits*	5
Pedoman tentang Transaksi Bisnis SME di Akhir Bulan / *Guidelines for SME Business Transaction at the End of the Month*	29
Standar Operasional Prosedur Tentang Giro KB Bank / *Standard Operational Procedure for KB Bank Current Account*	30
Kebijakan Tentang Kelembagaan Dan Kewenangan Komite Kredit PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Regarding Credit Committee Institution And Authority* PT Bank KB Bukopin Tbk	32
Pedoman Tentang Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* / *Guidelines About Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) System*	34
Petunjuk Teknis Tentang Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit PT Bank KB Bukopin Tbk / *Technical Instructions Regarding Calculating Allowance of Impairment Credit PT Bank KB Bukopin Tbk*	37
Petunjuk Teknis tentang AYDA / *Technical Instructions regarding Foreclosed Assets* (AYDA)	38

Judul	Nomor Kebijakan
Pedoman Tentang Kredit *Rating* SME PT. Bank KB Bukopin Tbk / *SME Credit Rating Guidelines* PT. Bank KB Bukopin, Tbk.	46
Pedoman Tentang Kredit *Rating Wholesale* & Komersial PT. Bank KB Bukopin, Tbk. / *Guidelines for Wholesale & Commercial Credit Rating* PT Bank KB Bukopin, Tbk.	47
Standar Operasional Prosedur tentang Aplikasi *Complaint Tracking System* (CTS) / *Standard Operating Procedure on Complain Tracking System* (CTS) *Application*	49
Pedoman tentang Aplikasi *Complaint Tracking System* (CTS) / *Complaint Tracking System* (CTS) *Application Guidelines*	50
Produk Program KPR Ekspress *Take Over* dan *Top Up* dari *Take Over* (Perpanjangan 2) / *Product Program About Mortgage Express Take Over and Top Up From Take Over (Second Extension)*	63
Pedoman Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah / *Service Guidelines and Customer Complaint Resolution*	69
Pedoman tentang Jaminan dan Agunan Kredit KB Bank / *Guidelines regarding The Guarantee and Credit Collateral of* KB Bank	94
Pedoman Tentang Tabungan KB Bank / *Guidelines Regarding KB Bank Savings*	100

2. *Governance Process*
   a. Direksi melaksanakan proses tata kelola sesuai dengan prinsip GCG dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya, yaitu diantaranya:
      i) Menerapkan prinsip GCG berupa *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency* dan *Fairness.*
      ii) Mengambil keputusan yang bersifat strategis berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang dituangkan dalam notulen rapat dan terdokumentasi dengan baik.
      iii) Menyelenggarakan beberapa rapat baik bersama-sama dengan Dewan Komisaris, Komite – Komite di bawah Direksi, maupun dengan unit kerja terkait untuk membahas isu – isu strategis dan mencari solusi langkah perbaikan.
      iv) Telah menyusun *action plan* Bank yang diminta oleh OJK dan telah dibuat laporan atas realisasi action plan ke OJK dengan tepat waktu.
      v) Menyusun Laporan Realisasi Bisnis Bank Triwulan secara komprehensif.
      vi) Melakukan serangkaian *stress test* sebagai langkah antisipatif Bank terhadap kondisi ke depan antara lain: akan berakhirnya restrukturisasi Covid dan dampaknya terhadap rasio- rasio likuiditas dan permodalan Bank, kenaikan GWM dan simulasi penarikan DPK, melakukan perhitungan NSFR maupun LCR secara berkala.
      vii) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari hasil pemeriksaan SKAI, Audit Eksternal, dan pengawasan otoritas yang berwenang, termasuk dengan menyusun *action plan* untuk pencegahan dan penyelesaian permasalahan *non compliance event.*
      viii) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya berdasarkan rekomendasi dari Regulator dan arahan/ nasehat Dewan Komisaris dengan tetap mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
   b. KB Bank sedang dalam proses pembentukan unit kerja khusus yang bertanggung jawab terhadap pencegahan, kecurangan, dan manipulasi dalam informasi keuangan.
   c. KB Bank melakukan beberapa program dalam rangka penguatan budaya perusahaan, Kepatuhan, APU PPT, dan *Anti-Fraud* antara lain pelaksanaan *E-Learning Human Capital Morning Quiz*, Sosialisasi cabang yang dilakukan secara berkala, dan training APU PPT yang diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif.
   d. Telah dilakukan pemantauan atas rasio-rasio makroprudensial dan pemenuhannya.
   e. Melakukan penguatan fungsi kepatuhan Bank dengan melakukan berbagai upaya antara lain penurunan denda regulator, pemenuhan komitmen ke regulator, sosialisasi regulasi baru melalui *Bukopin Office Communication* (BOC), IGRC, *Focus Group Discussion* (*FGD)*, pembahasan dalam forum rapat Direksi, pembahasan dalam forum Komite Pemantau Risiko (ROC/ Komite Audit , serta melakukan monitoring pemenuhan komitmen, monitoring laporan dan denda oleh Departemen Kepatuhan.
   f. Melakukan pelaksanaan aktivitas *credit examination* baik secara *regular* di beberapa cabang maupun atas special *credit examination.*
   g. Dewan Komisaris telah melaksanakan proses pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, yaitu diantaranya:
      i) Melakukan evaluasi dan monitoring kinerja keuangan secara berkala.
      ii) Melakukan pembahasan kebijakan strategis Bank.
      iii) Memastikan tindak lanjut atas temuan SKAI, tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan audit eksternal, hasil pengawasan otoritas yang berwenang dan hal-hal yang berkaitan dengan komitmen Direksi dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
   h. Seluruh Komite yang menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya dengan baik dan bertindak secara independen, yaitu dengan:
      i) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan analisa yang memadai.
      ii) Koordinasi antara Komite dibawah Dewan Komisaris dengan SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan

Satuan Kerja Kepatuhan berjalan baik, hal ini tercermin dengan adanya pembahasan yang dilakukan dalam rangka mengevaluasi hasil temuan SKAI, penerapan Manajemen Risiko dan monitoring pelaksanaan Fungsi Kepatuhan terhadap pemenuhan komitmen atas hasil pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia.

iii) Telah berjalan ketegasan sanksi atas pelanggaran untuk menciptakan Budaya kepatuhan

3. *Governance Outcome*
   a. Terdapatnya Anggaran Dasar Perusahaan yang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Pengungkapan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 yang didalamnya terdapat keterbukaan informasi terkait laporan keuangan, non keuangan, dan pelaksanaan tata kelola yang telah disetujui oleh RUPS pada 28 Juni 2024.
   c. Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah melaksanakan tugasnya dan mengadakan Rapat baik secara tersendiri maupun gabungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengadministrasikan setiap dokumen notulen Rapat tersebut.
   d. Bank melaporkan Laporan Hasil Penggunaan Dana PUT VI dan PUT VII periode Juni 2024 tepat waktu pada Juli 2024.
   e. Sampai dengan Desember 2024, Bank telah merealisasikan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas VI sebesar Rp6.968.767.192.583 dengan rincian sebagai berikut:
      i) Investasi dalam kaitannya untuk pengembangan IT Rp1.056.338.644.159;
      ii) Ekspansi kredit baru berkualitas baik Rp5.912.428.548.424
   f. Sampai dengan Desember 2024, Bank telah merealisasikan penggunaan dana Penawaran Umum Terbatas VII sebesar Rp11.921.338.955.073 dengan rincian sebagai berikut:
      i) Tambahan investasi kepada KB Bukopin Finance Rp592.000.000.000;
      ii) Tambahan investasi kepada KB Bank Syariah Rp698.000.000.000;
      iii) Ekspansi kredit baru berkualitas baik Rp10.649.338.955.073;
   g. Rasio fundamental keuangan bank masih terjaga dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sebagai berikut:

NO	Uraian	Parameter	Desember 2024
1	Penguatan Permodalan	CAR	16.87%
2	Penguatan likuiditas	LCR	146.84%
3	Kestabilan likuiditas	NSFR	102.44%
4	Kualitas Kredit	NPL Net	4.38%

   h. Bank memperoleh peringkat idAAA dengan outlook stabil dari lembaga pemeringkat kredit Pefindo dan AAA(idn) dari *Fitch Rating*. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Bank memiliki kehandalan dari sisi kekuatan finansial, stabilitas, dan berbagai keunggulan lainnya.
   i. KB Bank mendapat Anugerah Ekonomi Hijau dari Detik *Network* atas perannya mendukung Pendukung Pertumbuhan Ekosistem Kendaraan Listrik.
   j. KB Bank mendapat penghargaan CNBC Indonesia *Communication Strategists Awards* kategori *The Strategic Communication Excellence*.
   k. Bank secara berkelanjutan terus membangun *compliance culture*, *risk culture* melalui penguatan Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko, Fungsi Audit Internal dan *Quality Assurance* pada semua tingkatan organisasi termasuk pemenuhan dan tindak lanjut temuan pemeriksa intern maupun ekstern serta otoritas pengawas lainnya.
   l. Bank telah melaksanakan transparansi Laporan Keuangan dan Non Keuangan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku serta menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, dan jelas baik melalui situs *website* KB Bank dan/atau media cetak.
   m. Satuan Kerja Audit Internal dan Unit Kerja *Anti Fraud* telah melaksanakan pemeriksaan dan pemantauan yang dilaksanakan secara independen dan berkesinambungan sesuai dengan rencana kerja *audit* tahunan / *risk based audit* dan rencana strategi *Anti Fraud* yang ditetapkan.
   n. *Audit* Eksternal telah bertindak objektif dalam melakukan *audit* sehingga hasil *audit* yang disampaikan kepada Manajemen telah menggambarkan permasalahan KB Bank yang akan ditindaklanjuti oleh Manajemen KB Bank. Penyampaian hasil audit eksternal tersebut disampaikan secara tepat waktu kepada OJK.
   o. Melakukan perbaikan bisnis proses yang berkelanjutan yaitu salah satunya dengan mengatur proses persetujuan kredit melalui keputusan Komite. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi yang terlibat pada aktivitas perkreditan Bank dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang atau tindakan *fraud* yang dilakukan oleh Karyawan.
   p. Bank menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK dan Bank Indonesia sesuai dengan komitmen untuk posisi Desember 2024, dengan pencapaian sesuai *assessment* Bank adalah sebagai berikut:
      i) Pemeriksaan oleh OJK tahun 2024, Total pencapaian Tindak Lanjut Pemeriksaan posisi Desember 2024 adalah 100%.
      ii) Pemeriksaan oleh Bank Indonesia tahun 2024, Total pencapaian Tindak Lanjut Pemeriksaan posisi Desember 2024 adalah 100%.
   q. Bank memenuhi permintaan data dari OJK dalam rangka pengawasan yang dilakukan secara harian.
   r. Bank melakukan tindak lanjut atas penyelesaian pengaduan konsumen serta melaporkan secara berkala mengenai pengaduan konsumen kepada OJK.

Kelemahan Penerapan Tata Kelola

1. *Governance Structure*
   a. Masih terdapat PKO/SOP yang masih memerlukan pengkinian sehubungan dengan regulasi baru, perubahan proses bisnis dan secara masa ketentuan mewajibkan dikinikan.

b. Terdapat beberapa posisi jabatan yang masih dijabat oleh alternate, serta belum pemenuhan sertifikasi.

Identifikasi permasalahan/ *Root cause* adalah:
a. Adanya perubahan sistem dan organisasi serta kebijakan yang jumlahnya sangat banyak untuk dikinikan diperlukan prioritas dan sumber daya manusia.
b. Adanya perubahan struktur organisasi dan karyawan yang memasuki masa purna bakti.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank telah melakukan:
a. Memastikan SOP sesuai dengan regulasi terkini dengan senantiasa melakukan *monitoring* dan *mapping* PIC pemilik kebijakan dan penyampaian untuk dilakukan pengkinian dengan target waktu.
b. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui internal *talent* maupun dari *external hire.*

2. *Governance Process*
a. Perlu ditingkatkan pemenuhan komitmen Bank kepada Regulator antara lain ketepatan dan kecepatan yang memerlukan Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris.
b. Realisasi RBB yang masih kurang maksimal untuk memenuhi komitmen regulator.
c. Masih terdapat kesalahan/dilakukannya koreksi dalam pengisian laporan kepada OJK antara lain pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) dan APOLO. Serta keterlambatan dalam merespon secara cepat surat mengenai *action plan* dari OJK.

Identifikasi permasalahan / *Root cause* adalah:
a. kurangnya budaya kepatuhan dari karyawan dan pemberian sanksi yang belum optimal.
b. kurangnya strategi monitoring untuk pencapaian realisasi RBB.

c. Adanya *human error,* proses yang masih manual, kurangnya pengawasan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank telah melakukan:
a. Sosialisasi Pedoman pemenuhan permintaan data dan informasi dalam rangka pengawasan dan pemeriksaan dan disosialisasikan kepada karyawan untuk dipahami, serta Direksi melalui rapat Direksi memantau pemenuhan seluruh komitmen Bank kepada Regulator agar terpenuhi tepat waktu.
b. *Monitoring* ketat, perbaikan KPI, serta peningkatan *reward and punishment* kepada karyawan
c. Peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit dengan melakukan fokus grup diskusi serta monitoring yang baik.

3. *Governance Outcome*
a. Terdapat beberapa target strategis Bank yang masih belum tercapai, antara lain:
   i) Penyelesaian *Bad Asset*
   ii) Peningkatan *Good Bank*
   iii) Pengembangan infrastruktur teknologi jaringan kantor dan SDM
   iv) Peningkatan permodalan Bank
b. Masih terdapat denda sebagai akibat dari pelaporan yang kurang tepat dan akurat kepada regulator.
c. Terdapat pelampauan BMPK sampai dengan Desember 2024.
d. Adanya keterlambatan Laporan Keuangan *Audited* tahun buku 2023
e. Adanya keterlambatan proyek NGBS (SHINE)

Identifikasi permasalahannya / *Root Cause* adalah:
a. Kurangnya evaluasi terhadap pelaksanaan dan penyempurnaan strategi dan proses bisnis untuk memastikan kinerja Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank.
b. Perlu peningkatan kualitas manajemen sistem informasi Bank serta pemantauan melalui pengawasan supervisi.
c. Penurunan Modal Inti
d. Pergantian Kantor Akuntan Publik
e. Kontraktor lama tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai *timeline* yang telah disepakati di awal, sehingga sebagai langkah penyelesaianya melakukan penggantian kontraktor

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perbaikan Bank telah melakukan:
a. Rencana Bisnis Bank terkini untuk tahun 2024 telah disusun dan disampaikan ke OJK, diantaranya menyiapkan rencana aksi untuk penyelesaian kredit kualitas rendah ke OJK
b. Penginputan data dan pelaporan telah disarankan dalam proyek SHINE, sehingga seluruh data terintegrasi satu dengan yang lainnya.
c. Menetapkan strategi untuk pemulihan modal inti dan penurunan BMPK melalui rencana tindak yang telah disampaikan kepada OJK pada Mei 2024, komitmen penyelesaian pelampauan BMPK selesai pada Desember 2024, namun sampai dengan batas waktu penyelesaian (Desember 2024) belum dapat terpenuhi. Bank telah membuat permohonan perpanjangan waktu pemenuhan hingga Juni 2025 melalui surat No. 32963/PDI/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan membuat *action plan* lebih detail dan rinci.

Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Penerapan Tata Kelola

Di tahun 2024, berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, penerapan *good corporate governance* di KB Bank secara keseluruhan dapat dikategorikan sebagai "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan prinsip-prinsip GCG yang cukup memadai. Adapun kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam penerapannya, secara umum, bersifat tidak signifikan dan dapat diatasi dengan langkah-langkah yang wajar oleh manajemen Bank. Oleh karena itu, peringkat GCG KB Bank adalah Peringkat 2 (Baik).

Rating Tingkat Kesehatan Bank

Tingkat kesehatan Bank menggambarkan hasil penilaian terhadap kondisi Perseroan, yang mencakup evaluasi terhadap risiko dan kinerja Bank. Hasil penilaian ini tercermin dalam peringkat akhir yang diperoleh, sesuai dengan Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko (*Risk-based Bank Rating*), yang mencakup empat faktor utama, yaitu:

1. Profil Risiko;
2. *Good Corporate Governance*;
3. Rentabilitas;
4. Permodalan.

Laporan profil risiko adalah salah satu faktor penting dalam menilai tingkat kesehatan Bank. Setiap bank diwajibkan untuk mengirimkan laporan profil risiko triwulanan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada Otoritas Jasa Keuangan. Laporan ini disusun dengan pendekatan *self-assessment* menggunakan pendekatan risiko (*risk-based Bank rating*), sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 14/SEOJK.03/2017 yang diterbitkan pada 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Berdasarkan hasil *self-assessment* profil risiko triwulanan yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, untuk posisi Desember 2024, peringkat risiko komposit Bank secara keseluruhan berada pada tingkat P2.



KESESUAIAN PENERAPAN GCG TERHADAP PEDOMAN TATA KELOLA PERUSAHAAN TERBUKA

Mengacu pada Peraturan OJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No. 32/SEOJK.04/2015, terdapat 5 (lima) aspek, 8 (delapan) prinsip dan 25 (dua puluh lima) rekomendasi untuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Rekomendasi tersebut berfungsi sebagai standar yang wajib diterapkan oleh Perseroan dalam mengimplementasikan aspek dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola.

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
I	**Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham dalam menjamin hak-hak Pemegang Saham**			
	Prinsip 1 Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan RUPS	• Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (*voting*) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi, dan kepentingan pemegang saham	Bank mengatur mekanisme atau prosedur pengumpulan suara pada Anggaran Dasar Perseroan yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sesuai dengan POJK Rapat Umum Pemegang Saham	Terpenuhi
		• Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Seluruh Direksi dan Dewan Komisaris hadir dalam RUPS Tahunan, maupun tatap muka dan/ atau melalui *video conference*	Terpenuhi
		• Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Bank telah menyediakan risalah RUPS pada situs *web* di bagian Hubungan Investor	Terpenuhi
	Prinsip 2 Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor	• Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Bank mempunyai sarana komunikasi khusus untuk pemegang saham dan pemangku kepentingan lain berupa *e-mail* sekretaris perusahaan dan hubungan investor	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam Situs *Web*	Bank telah mencantumkan *e-mail* sekretaris perusahaan dan hubungan investor pada situs *web* sebagai sarana komunikasi antara perusahaan dan pemangku kepentingan.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
	Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris			
II	**Prinsip 3 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris**	• Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Perusahaan menentukan jumlah Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan POJK Tata Kelola dan Peraturan lain yang berlaku	Terpenuhi
		• Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Perusahaan menentukan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan sesuai POJK Tata Kelola dan Peraturan lain yang berlaku.	Terpenuhi
	Prinsip 4 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	• Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Sesuai dengan Surat Keputusan No. 005 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT. Bank KB Bukopin Tbk tanggal 29 Juni 2021 bahwa Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*) yang telah diuraikan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		• Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan pada bagian penilaian kinerja Dewan Komisaris Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		• Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Setiap usulan pengangkatan dan atau pergantian anggota Dewan Komisaris/Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan mendapatkan persetujuan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 Februari 2017. Dijelaskan di dalam ketentuan bahwa anggota Komisaris/Direksi tidak boleh pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau sektor keuangan.	Terpenuhi
		• Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi.	Pengangkatan dan pemberhentian Direksi Perseroan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan GCG. Perseroan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Umum. Uraian tentang kebijakan suksesi dalam proses Nominasi anggota Direksi Perseroan telah diungkapkan sebagaimana pada bagian Suksesi Direksi Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
	Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi			
III	**Prinsip 5 Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi**	• Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektifitas dalam pengambilan keputusan.	Seluruh anggota direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan observasi terhadap *curriculum vitae* anggota direksi, terlihat bahwa direksi memiliki integritas dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai direksi bank. Hal tersebut salah satunya terungkap dengan adanya rekam jejak jenjang karir yang jelas di Bank dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan maupun sertifikasi.	Terpenuhi
		• Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Laporan keuangan perseroan disusun dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum di indonesia dan telah ditandatangani oleh direksi Perseroan.	Terpenuhi
		• Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Seluruh anggota direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan observasi terhadap *curriculum vitae* anggota direksi, terlihat bahwa direksi memiliki integritas dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai direksi bank. Hal tersebut salah satunya terungkap dengan adanya rekam jejak jenjang karir yang jelas di bank dan keikutsertaan dalam berbagai pelatihan maupun sertifikasi.	Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
IV	**Prinsip 6 Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**	• Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi.	Merujuk Surat Keputusan No.0404 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 bahwa Direksi wajib melakukan Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) melalui sistem penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana yang diuraikan pada bagian penilaian kinerja Direksi Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi
		• Kebijakan penilaian sendiri (*Self Assessment*) untuk menilai kinerja Direksi diungkapkan melalui laporan tahunan Perusahaan Terbuka.	*Self Assessment* atas kinerja direksi telah diungkapkan pada bagian penilaian kinerja direksi laporan tahunan ini	Terpenuhi
		• Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi diatur dalam Surat Keputusan 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 10 Februari 2017. (*akan diperbaharui sesuai POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.	Terpenuhi
	Prinsip 7 Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan	• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya *insider trading*.	Kebijakan terkait *Insider Trading* diatur dalam Surat Keputusan 0056 Tahun 2022 tentang Kebijakan Kepemilikan Saham Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk.	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan anti *fraud*.	KB Bank telah memiliki kebijakan anti fraud dan kebijakan lainnya terkait dengan anti korupsi diantaranya yaitu Surat Keputusan No.0165 Tahun 2021 tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi tanggal 3 Desember 2021.	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Perseroan telah memiliki kebijakan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan vendor melalui Pedoman Kegiatan Operasi. Pedoman tersebut Surat Edaran No.164/DIR/VI/2020 tentang Pedoman Kegiatan Operasi – Pengadaan Barang dan Jasa.	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur.	Perusahaan telah memiliki Pedoman *Whistleblowing* melalui Surat Keputusan Nomor 1291 Tahun 2018.	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan sistem *whistleblowing*.	Surat Keputusan No.0205 Tahun 2023 tentang Kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) tanggal 9 November 2023.	Terpenuhi
		• Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Tidak Ada	Tidak Terpenuhi

No.	Prinsip	Rekomendasi	Penjelasan Penerapan di KB Bank	Keterangan
	Aspek 5: Keterbukaan Informasi			
		• Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Perusahaan memiliki akun media sosial yaitu Surat Kabar dan Situs Web Bursa Efek Indonesia.	Terpenuhi
V	**Prinsip 8 Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi**	• Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	KB Bank setiap bulan melaporkan kepemilikan saham di atas 5% kepada Otoritas Bursa dan telah diungkapkan pada Laporan Tahunan ini.	Terpenuhi



Struktur dan Mekanisme *Corporate Governance*

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), struktur tata kelola Perseroan terdiri dari 3 (tiga) organ utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Sistem ini menganut *two-tier system*, di mana Dewan Komisaris dan Direksi memiliki kewenangan serta tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan anggaran dasar dan regulasi yang berlaku.

Setiap organ memiliki peran strategis dalam penerapan GCG guna mendukung keberlanjutan dan kepentingan Perseroan. Untuk mendukung efektivitasnya, struktur tata kelola KB Bank diperkuat oleh organ pendukung seperti Komite di bawah Dewan Komisaris, Sekretaris Perseroan, Audit Internal (SKAI), dan Komite Direksi di bawah Direksi.

Untuk memperkuat dan meningkatkan efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris didukung oleh komite yang terdiri dari:
1. Komite Audit;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Remunerasi & Nominasi;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Sedangkan Direksi dan jajaran Manajemen Bank bertanggung jawab atas pengelolaan pengawasan, serta penerapan tata kelola di KB Bank. Dalam melaksanakan tugasnya, keduanya didukung oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), serta Komite Direksi yang terdiri dari:
1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Aset dan Liabilitas (ALCO);
3. Komite Pengarah Teknologi Informasi;
4. Komite Restrukturisasi Kredit;
5. Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah;
6. Komite Kredit;
7. Komite *Foreign Exchange*;
8. Komite *Support* TI;
9. Komite Pengendalian Internal dan Anti *Fraud*.

Struktur Tata Kelola KB Bank

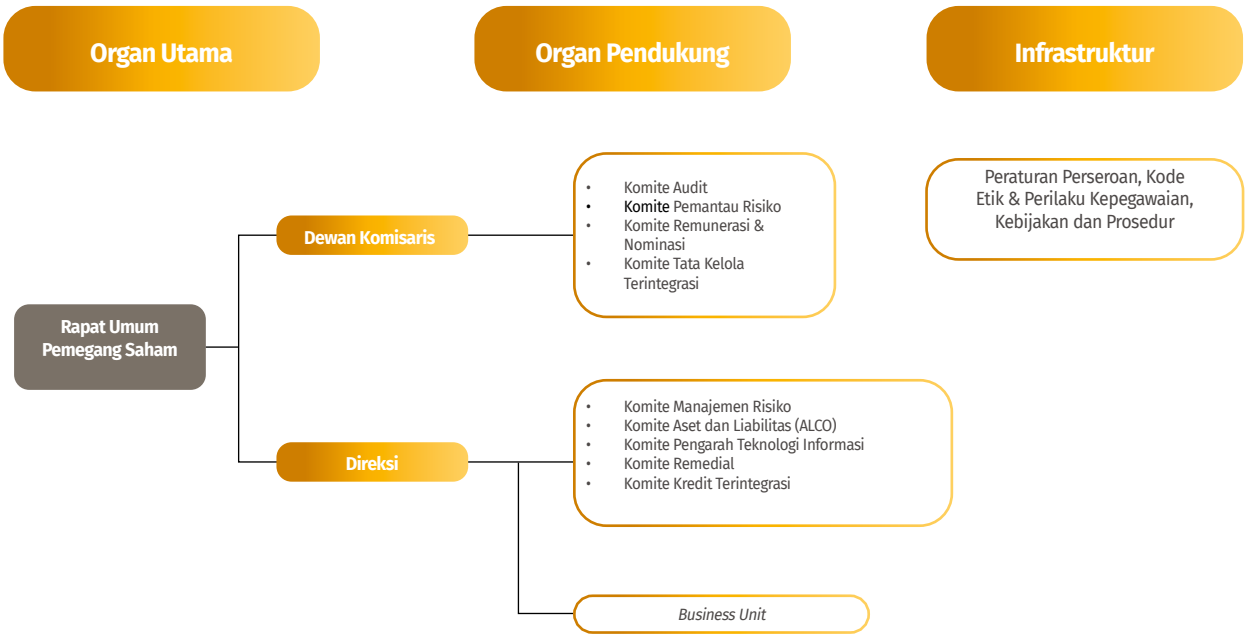

Berikut ini adalah kebijakan dan SOP yang dimiliki oleh KB Bank:

Kebijakan/SOP	Keterangan
Pedoman Kode Etik	• Kebijakan Nomor 108 tahun 2024 tentang Kode Etik Perlindungan Konsumen PT Bank KB Bukopin Tbk • Surat Keputusan Direksi No. 004 tahun 2023 tentang Kode Etik PT Bank KB Bukopin Tbk • Surat Keputusan Direksi No 0158 tahun 2022 tentang Kode Etik Treasury PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Pemberian Kredit	Pedoman Nomor 190 tahun 2024 tentang Perkreditan SME, *Commercial, Corporate*, dan Korean Link PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Kerja Dewan Komisaris & Komite Pendukung	• Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 005 tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 004 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit PT Bank Bukopin Tbk • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank Bukopin Tbk • Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin Tbk
Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi	• Surat Edaran Direksi Nomor SE/196/DIR/XII/2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk • Kebijakan Nomor 032 tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit • Surat Edaran Direksi nomor SE/183/DIR/IX/2018 tentang Komite Kebijakan Perkreditan Bank Bukopin • Surat Keputusan Direksi Nomor 0128 tahun 2023 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk • Kebijakan Nomor 102/K-ITGV/DTI tahun 2023 tentang Komite Pengarah Teknologi Informasi
Piagam Audit Intern	Surat Keputusan Direksi No. 0146 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Manajemen Risiko	Kebijakan Tingkat Tinggi Nomor 224 tahun 2024 tentang Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Pengelolaan Gratifikasi	Surat Keputusan Direksi No. 0165 tahun 2020 tentang Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi
Pedoman sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)	Pedoman Nomor 095 tahun 2024 tentang *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank KB Bukopin Tbk
Pedoman Lainnya	• Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk • Kebijakan No. 001 Tahun 2023 tentang Hierarki & Tata Kelola Ketentuan Internal PT Bank KB Bukopin Tbk

Mekanisme Tata Kelola Perusahaan

KB Bank berkomitmen untuk menjalankan prinsip GCG sebagai bagian dari landasan operasionalnya. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan serta prosedur yang diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek operasional Perseroan.

Penerapan GCG bukan sekadar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi telah menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh tingkat organisasi. Mulai dari manajemen hingga karyawan, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap keputusan dan aktivitas mereka.

Untuk menjaga efektivitas kebijakan tersebut, KB Bank secara rutin melakukan evaluasi serta penyesuaian agar tetap selaras dengan dinamika industri, regulasi terbaru, dan praktik terbaik di sektor perbankan. Proses evaluasi ini melibatkan berbagai pihak di dalam perusahaan guna memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan memberikan manfaat optimal.

Lebih dari sekadar implementasi, KB Bank juga menekankan pentingnya komunikasi dan sosialisasi kebijakan GCG kepada seluruh karyawan. Berbagai inisiatif seperti pelatihan, diskusi internal, dan penggunaan media komunikasi perusahaan dilakukan untuk memperkuat pemahaman serta penerapan prinsip GCG dalam setiap lini bisnis. Dengan demikian, KB Bank dapat terus menjaga transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan para pemangku kepentingan.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berperan sebagai forum utama bagi pemegang saham dalam menjalankan haknya untuk menentukan arah kebijakan Perseroan. Sebagai bagian dari tata kelola perusahaan, RUPS memiliki kewenangan tertinggi yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris.

Melalui RUPS, pemegang saham dapat berpartisipasi langsung dalam pengambilan keputusan strategis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Bank. Forum ini juga menjadi wadah komunikasi antara pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris guna membahas berbagai aspek operasional dan kebijakan perusahaan.

Dalam setiap penyelenggaraannya, RUPS memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk memperoleh klarifikasi terkait kinerja, kebijakan, serta strategi bisnis Bank. Transparansi yang dihadirkan dalam forum ini memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil Direksi dan Dewan Komisaris tetap selaras dengan kepentingan pemegang saham serta prinsip akuntabilitas yang baik.

Pelaksanaan RUPS merupakan wujud nyata komitmen Bank dalam menegakkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik. Melalui proses ini, setiap keputusan strategis dibuat secara transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, RUPS juga memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab serta menjamin kepentingan para pemegang saham tetap terlindungi.

Pelaksanaan RUPS Perseroan diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mencakup berbagai ketentuan, antara lain:
1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka;
3. Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbuka Secara Elektronik; dan
4. Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Pemegang Saham

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum yang secara resmi memiliki saham di Bank. Mereka tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, dan wewenang Dewan Komisaris maupun Direksi. Per 31 Desember 2024, komposisi Pemegang Saham KB Bank adalah sebagai berikut:



Jenis RUPS

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa terdapat 2 (dua) jenis RUPS dalam Perseroan:

1. RUPS Tahunan
   RUPS ini dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku. Agenda utama RUPS Tahunan terdiri dari pengajuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan dari Direksi untuk disahkan dan disetujui oleh Pemegang Saham, melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun depan, memutuskan penggunaan laba, mengangkat atau memberhentikan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris dan memutuskan hal-hal lain yang diperlukan.
2. RUPS Luar Biasa
   Pelaksanaan RUPS Luar biasa dapat diselenggarakan kapan saja sesuai keperluan Perseroan oleh Direksi ataupun Dewan Komisaris, atas permintaan dari Pemegang Saham.

Wewenang RUPS

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar Perseroan. Wewenang RUPS antara lain adalah:

1. Mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi.
2. Mengesahkan perubahan Anggaran Dasar.
3. Memberikan persetujuan atas Laporan Direksi, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta Laporan Keuangan Perseroan.
4. Menetapkan alokasi penggunaan laba.
5. Menunjuk dan menetapkan biaya jasa akuntan publik.
6. Menetapkan jumlah dan jenis kompensasi serta fasilitas pengurus.
7. Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et decharge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukannya masing-masing.
8. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk menentukan dan membayar dividen final.
9. Mengambil keputusan-keputusan menyangkut struktur organisasi misalnya perubahan Anggaran Dasar, penggabungan, peleburan, pemisahan, pembubaran dan likuidasi Perseroan.
10. Mengangkat dan/atau mengubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
11. Memutuskan remunerasi yakni: penetapan gaji, tunjangan lain serta honorarium Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
12. Memberi persetujuan terhadap transaksi yang mengandung benturan kepentingan.
13. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit.

Hak Pemegang Saham

Hak pemegang saham sesuai dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

1. Menerima dividen saham dengan syarat dan ketentuan sesuai dengan keputusan RUPS;
2. Ikut berpartisipasi dalam mengambil Keputusan di dalam RUPS berdasarkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan Tata Tertib RUPS;
3. Menerima informasi mengenai Tata Tertib RUPS dan prosedur voting di dalam RUPS.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;
2. Sesuai ketentuan pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat akan dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan;
3. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan;
4. Setelah selesai membicarakan setiap acara Rapat, Pemimpin Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan;
5. Yang berhak mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sehari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
6. Pertanyaan Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan dan mengisi formulir pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas akan mengumpulkan formulir yang sudah diisi oleh penanya, yang mencantumkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili dan pertanyaan yang diajukan. Setelah penanya mengajukan pertanyaan melalui formulir, Pemimpin Rapat akan menjawab atau menanggapinya. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.
7. Hak Suara
   a. Hanya para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan satu hari sebelum tanggal Panggilan atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara;
   b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Ketentuan Kuorum

Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud tidak tercapai maka diadakan panggilan RUPS kedua. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pelaksanaan RUPS Tahun 2024

KB Bank telah mengirimkan pemberitahuan terkait RUPS kepada OJK, sebagaimana terlampir berikut ini:

1. Surat No. 19416/DIR/XII/2022 tanggal 11 Desember 2022 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank KB Bukopin Tbk dan Surat No. 00014/DIR/I/2024 tanggal 02 Januari 2024 perihal Pemberitahuan Perubahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank KB Bukopin Tbk
2. Surat No. 08931/DIR/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 perihal Pemberitahuan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk

RUPS Tahunan Tahun 2024

Di tahun 2024, KB Bank menyelenggarakan RUPS Tahunan pada tanggal 28 Juni 2024 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

Keputusan RUPS Tahunan 2024

Pokok keputusan RUPS Tahunan KB Bank tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
KB Bank telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS Tahunan kepada OJK pada 15 Mei 2024 sebagaimana dalam surat No. 08931/DIR/V/2024	KB Bank telah mengumumkan RUPS Tahunan pada tanggal 22 Mei 2024 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS	KB Bank telah melakukan pemanggilan untuk RUPS Tahunan pada tanggal 6 Juni 2024 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS	KB Bank melangsungkan RUPS Tahunan pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024 bertempat di Hotel Best Western Premier The Hive Dorsata 1-2 *Meeting Room* Lantai 3 Jalan DI. Panjaitan Kav. 3-4, Jakarta Timur	Ringkasan Risalah RUPS Tahunan telah diumumkan pada tanggal 02 Juli 2024 di website Perseroan, *Web* Bursa Efek dan web penyedia e-*RUPS*

Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku 2023, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku 2023.		
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.		
Pengambilan Keputusan		Jumlah (lembar saham)	Persentase
	Suara yang hadir	160.973.246.476	100,0000000%
	Suara tidak setuju	300	0,0000002%
	Suara Abstain	8.423	0,0000052%
	Suara Setuju	160.973.237.753	99,9999946%
	Total suara setuju	160.973.246.176	99,9999998%

Keputusan Rapat	• Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris, sesuai Laporan No. 00388/3.0478/AU.1/07/1671-3/1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin, Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. • Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Kedua	Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan pada Tahun Buku 2024 beserta penetapan honorariumnya.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	160.973.246.476	100,0000000%
Suara tidak setuju	2.059.978	0,0012797%
Suara Abstain	8.623	0,0000054%
Suara Setuju	160.971.117.875	99,9987149%
Total suara setuju	160.973.186.498	99,9987203%

Keputusan Rapat	• Menyetujui untuk melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan *Audit* terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 dan/atau periode lainnya pada Tahun Buku 2024 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. • Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya imbalan jasa audit, tambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lain yang wajar bagi Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik. • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2024, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Ketiga	Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun Buku 2024.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	160.973.246.476	100,0000000%
Suara tidak setuju	318.300	0,0001977%
Suara Abstain	8.423	0,0000052%
Suara Setuju	160.972.919.753	99,9997970%
Total suara setuju	160.972.928.176	99,9998023%

Keputusan Rapat	Menyetujui untuk melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket Remunerasi bagi Anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Dewan Komisaris dan dengan jumlah maksimum keseluruhan sebesar Rp89.000.000.000 (delapan puluh sembilan miliar rupiah) per tahun buku untuk seluruh anggota Direksi yang pengalokasiannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Keempat	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Mengingat Mata Acara Rapat Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.
Keputusan Rapat	-
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan

Mata Acara Rapat Kelima	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	160.973.246.476	100,0000000%
Suara tidak setuju	3.323.103.224	2,0643823%
Suara Abstain	8.823	0,0000055%
Suara Setuju	157.650.134.429	97,9356122%
Total suara setuju	157.650.143.252	97,9356177%

Keputusan Rapat	• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penetapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan berdasarkan usulan dari Pemegang Saham. • Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan melakukan segala tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan Anggaran Dasar dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menyatakan keputusan Rapat dalam akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan No.177 Tanggal 28 Juni 2024

Mata Acara Rapat Keenam	Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	160.973.246.476	100,0000000%
Suara tidak setuju	2.059.978	0,0012797%
Suara Abstain	8.423	0,0000052%
Suara Setuju	160.971.178.075	99,9987151%
Total suara setuju	160.971.186.498	99,9987203%

Keputusan Rapat	• Menerima dengan hormat pengunduran diri saudara Eugene K. Galbraith selaku Komisaris Independen dan mengakhiri masa jabatan saudara Sukriansyah S. Latief, sebagai Komisaris Independen efektif sejak Penutupan Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. • Menyetujui pengangkatan kembali saudara Jerry Marmen sebagai Komisaris Utama dan saudara Stephen Liestyo sebagai Komisaris Independen Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027. • Menerima dengan hormat pengunduran diri Bapak Young Eun Moon sebagai Direktur Perseroan dan Bapak Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. • Menyetujui pengangkatan kembali saudara Robby Mondong sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan dan Bapak Henry Sawali sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2027. • Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Jerry Marmen Wakil Komisaris Utama : Seng Hyup Shin* Komisaris : Nanang Supriyatno Komisaris Independen : Stephen Liestyo Komisaris Independen : Tippy Joesoef Komisaris Independen : Hae Wang Lee Direksi Direktur Utama : Woo Yeul Lee Wakil Direktur Utama : Robby Mondong Direktur : Dodi Widjajanto
Keputusan Rapat	Direktur : Henry Sawali Direktur : Jung Ho Han Direktur : Jang Hyuk Im* Direktur : Helmi Fahrudin *) Dengan ketentuan bahwa Saudara Seng Hyup Shin dan Saudara Jang Hyuk Im terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, POJK Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. • Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sdr. Seng Hyup Shin dan Sdr. Jang Hyuk Im telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (***fit and proper***) dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEPR-111/D.03/2024 dan Nomor KEPR-125/D.03/2024

RUPS Luar Biasa

Di tahun 2024, KB Bank menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2024 dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

Pemberitahuan	Pengumuman	Pemanggilan	Pelaksanaan	Hasil dan Keputusan
KB Bank telah menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPSLB kepada OJK pada 11 Desember 2022 sebagaimana dalam surat No. 19416/DIR/XII/2022	KB Bank telah mengumumkan RUPSLB pada tanggal 18 Desember 2023 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan web penyedia e-RUPS	KB Bank telah melakukan pemanggilan untuk RUPSLB pada tanggal 2 Januari 2024 di *website* Perseroan, *Web* Bursa Efek dan web penyedia e-RUPS	KB Bank melangsungkan RUPSLB pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2024 bertempat di Auditorium Gedung KB Bank Lantai 3, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770	Ringkasan Risalah RUPSLB telah diumumkan pada tanggal 26 Januari 2024 di *website* Perseroan, Web Bursa Efek dan *web* penyedia e-RUPS

Mata Acara Rapat RUPSLB	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Jumlah Pemegang Saham yang Bertanya	Sepanjang Mata Acara Rapat, tidak terdapat pertanyaan dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa/Wakil Pemegang Saham.
Pengambilan Keputusan	Dengan Pemungutan Suara

	Jumlah (lembar saham)	Persentase
Suara yang hadir	161.343.119.244	100,0000%
Suara tidak setuju	32.912	0,00002%
Suara Abstain	2.736.200	0,00170%
Suara Setuju	161.340.350.132	99,99828%
Total suara setuju	161.343.086.332	99,99998%

Keputusan Rapat

- Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan dan Saudara Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat ini, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan.
- Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Saudara Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan dan Saudara Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat masing-masing sebagai Direktur Perseroan dan Wakil Komisaris Utama, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan bukan merupakan tindak pidana.
- Memberikan apresiasi kepada Saudara Seng Hyup Shin dan Saudara Nam Hoon Cho atas semua



Keputusan Rapat	hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perseroan yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. • Mengangkat Saudara Jang Hyuk Im sebagai Direktur Perseroan dan Saudara Seng Hyup Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2026. • Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama : Jerry Marmen Wakil Komisaris Utama : Seng Hyup Shin*) Komisaris : Nanang Supriyatno Komisaris Independen : Tippy Joesoef Komisaris Independen : Hae Wang Lee Komisaris Independen : Stephen Liestyo Komisaris Independen : Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen : Eugene K. Galbraith Direksi Direktur Utama : Woo Yeul Lee Wakil Direktur Utama : Robby Mondong Direktur : Helmi Fahrudin Direktur : Dodi Widjajanto Direktur : Yohanes Suhardi Direktur : Henry Sawali Direktur : Young Eun Moon*) Direktur : Jung Ho Han Direktur : Jang Hyuk Im*) *) Dengan ketentuan bahwa Saudara Young Eun Moon, Saudara Jang Hyuk Im dan Saudara Seng Hyup Shin terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. • Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.
Tindak Lanjut/Realisasi	Sudah direalisasikan

Keputusan RUPS Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023, Bank telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPS Tahunan pada tanggal 30 Juni 2023 dan 1 (satu) kali RUPS Luar Biasa pada tanggal 31 Januari 2023, dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

RUPS Tahunan 2023

RUPS Tahunan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Juni 2023, bertempat di Auditorium Gedung KB Bank lantai 3, Jalan MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
1	Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	• Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahyo, dan Rekan, sesuai Laporan No. 00328/2.1051/ AU.1/07/1671-2/1/ III/2023 tanggal 31 Maret 2023 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material, posisi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2022 serta kinerja Keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. • Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Sudah direalisasikan
2	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 beserta penetapan honorariumnya.	• Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota dari jaringan global PwC) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2023. • Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 jika diperlukan untuk tujuan dan kepentingan Perseroan. • Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut. • Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut.	Sudah direalisasikan

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
3	Persetujuan penetapan honorarium, gaji dan/atau tunjangan bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.	• Menyetujui dan menetapkan jumlah gaji, honorarium dan/atau tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada Tahun Buku 2023 yaitu tetap sesuai dengan jumlah maksimum nominal paket remunerasi yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 22 Desember 2020. • Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasi besaran gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Direksi dengan mempertimbangkan kinerja dan kondisi keuangan Perseroan serta memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.	Sudah direalisasikan
4	Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan Penawaran Umum Terbatas VI Tahun 2021.	Mengingat Mata Acara Rapat Keempat sifatnya laporan, maka tidak diambil keputusan.	Sudah direalisasikan

RUPS Luar Biasa 2023

Pada tahun 2023, KB Bank menyelenggarakan RUPS Luar Biasa sebanyak 1 (satu) kali yang dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2023, dan proses pelaksanaannya telah sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. serta ketentuan Anggaran Dasar KB Bank.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
1	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	• Menerima pengunduran diri dengan hormat Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat, disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan kepada Perseroan. • Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Saudara Jin Bum Kim sebagai Direktur Perseroan atas Tindakan pengurusan yang telah dilakukan selama menjabat sebagai Direktur Perseroan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan bukan merupakan tindak pidana. • Memberikan apresiasi kepada Saudara Jin Bum Kim atas semua hasil kerja yang dicapai berdasarkan ketentuan dan kemampuan Perseroan yang kewenangan penetapan besarannya dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. • Mengangkat Saudara Jung Ho Han sebagai Direktur Perseroan, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025. • Selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris Komisaris Utama — Jerry Marmen Wakil Komisaris Utama — Nam Hoon Cho Komisaris — Nanang Supriyatno Komisaris Independen — Tippy Joesoef Komisaris Independen — Hae Wang Lee Komisaris Independen — Stephen Liestyo Komisaris Independen — Sukriansyah S. Latief Komisaris Independen — Eugene K. Galbraith Direksi Direktur Utama — Woo Yeul Lee	Sdr. Jung Ho Han, Sdr. Wong Eung Moon telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

No.	Mata Acara Rapat	Keputusan	Realisasi
2	Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Wakil Direktur Utama Robby Mondong Direktur Helmi Fahrudin Direktur Dodi Widjajanto Direktur Seng Hyup Shin Direktur Yohanes Suhardi Direktur Henry Sawali Direktur Young Eun Moon**) Direktur Jung Ho Han**) **) Dengan ketentuan bahwa Saudara Young Eun Moon, dan Saudara Jung Ho Han terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/ POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. • Memberi kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan susunan Direksi Perseroan, dengan akta resmi tersendiri di hadapan seorang Notaris termasuk namun tidak terbatas untuk memberitahukan hasil keputusan Rapat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. • Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi berdasarkan Pasal 15 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan.	Sdr. Jung Ho Han, Sdr. Wong Eung Moon telah mendapatkan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and Proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.



Dewan Komisaris

Sebagai bagian integral dari struktur organisasi Bank, Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya operasional perusahaan. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa kebijakan pengelolaan Bank selaras dengan Anggaran Dasar serta visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, Dewan Komisaris juga bertugas memberikan arahan dan masukan kepada Direksi guna mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris KB Bank menitikberatkan pada transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip GCG. Pengawasan yang efektif dan independen yang dilakukan oleh Dewan Komisaris berkontribusi pada peningkatan kepercayaan para pemangku kepentingan. Dengan demikian, selain memperkuat daya saing Bank, hal ini juga menjaga reputasi dan kredibilitas perusahaan dalam jangka panjang.

Dasar Hukum

Dasar hukum yang mengatur pengangkatan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Pedoman Kerja Dewan Komisaris KB Bank.

Pedoman Kerja/Piagam Dewan Komisaris

KB Bank menetapkan pedoman kerja bagi Dewan Komisaris sebagai panduan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pedoman ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 015 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk, yang ditetapkan pada 5 Agustus 2019.

Penyusunan pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan, anggaran dasar, serta prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pedoman ini mencakup:
1. Pendahuluan berisikan tentang Landasan Hukum;
2. Struktur Dewan Komisaris;
3. Persyaratan Anggota Dewan Komisaris;
4. Komisaris Independen;
5. Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris;
6. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab;
7. Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi;
8. Pembagian Kerja dan Waktu Kerja Dewan Komisaris;
9. Kesekretariatan Dewan Komisaris dan Sekretaris Dewan Komisaris;
10. Etika Kerja Dewan Komisaris dan Larangan;
11. Transparansi;
12. Penutup.

Kriteria Dewan Komisaris

Kriteria anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
   a. Tidak pernah dinyatakan pailit;
   b. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
   c. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
   d. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      i) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      ii) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS;
      iii) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
6. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan.
7. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
8. Anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.
9. Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

Ketentuan Masa Jabatan

Ketentuan masa jabatan di dalam pasal 111 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 diatur bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Hal tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 17 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang menetapkan bahwa anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS sampai dengan penutupan RUPS tahun kelima setelah tahun pengangkatan, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk menghentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Anggota Dewan Komisaris juga dapat dihentikan sewaktu-waktu dalam suatu keputusan RUPS berdasarkan kenyataan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan antara lain:

1. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
2. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
3. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Direksi;
5. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan dan/atau negara;
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Mengundurkan diri;
8. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024

Dalam menentukan komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris, RUPS mempertimbangkan visi, misi, serta rencana strategis Perseroan guna memastikan proses pengambilan keputusan yang efisien, cepat, dan independen.

Sepanjang tahun 2024, terdapat perubahan dalam susunan maupun jumlah anggota Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 24 Januari 2024, yang memberhentikan dengan hormat Nam Hoon Cho sebagai Wakil Komisaris Utama, dan mengangkat Seng Hyu Shin sebagai Wakil Komisaris Utama Perseroan. Selain itu, berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada 28 Juni 2024, yang memberhentikan dengan hormat Eugene K. Galbraith selaku Komisaris Independen dan Sukriansyah S. Latief, sebagai Komisaris Independen Perseroan.

Susunan dan komposisi Dewan Komisaris yang masih aktif hingga 31 Desember 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Jerry Marmen	Komisaris Utama	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	**2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027**
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	RUPS Luar Biasa 24 Januari 2024	**2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026**
Nanang Supriyatno	Komisaris	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	**2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024**
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 22 Desember 2020	**2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024**
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	**2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024**
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	**2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027**

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan menyebutkan bahwa calon anggota Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya sebagai Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang telah lulus fit and proper tanpa catatan dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, mengindikasikan bahwa setiap anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola Bank, seluruh anggota Dewan Komisaris KB Bank menyatakan bahwa tidak ada satupun anggota yang memiliki saham, baik di Perseroan maupun di bank atau perusahaan lainnya. Pernyataan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar saham)			
		KB Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Jerry Marmen	Komisaris Utama	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	2.300.000 (0,0012241%)	Nihil	Nihil	Nihil
Nanang Supriyatno	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Kebijakan Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif:
   a. Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;
   b. Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.
2. Tidak termasuk rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
   a. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;
   b. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada kelompok usaha Bank; dan/atau
   c. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.
3. Tugas dalam jabatan dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
Jerry Marmen	Komisaris Utama	-
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	Global Growth Supporting Division Head (Managing Director)
Nanang Supriyatno	Komisaris	-
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	-
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	-
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	-

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Terkait hubungan afiliasi, Dewan Komisaris Bank telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Jerry Marmen	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√		√
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama		√		√	√			√		√		√	√	
Nanang Supriyatno	Komisaris		√		√		√		√		√		√		√
Tippy Joesoef	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Hae Wang Lee	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√		√
Stephen Liestyo	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√	√	

Tugas, Hak, dan Kewajiban

Tugas, hak, dan kewajiban Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai tugas, hak, dan kewajiban tersebut:

Tugas

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan secara keseluruhan. Dewan Komisaris memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan tujuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris juga memastikan bahwa semua keputusan Direksi sesuai dengan nilai-nilai perusahaan serta mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

Dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan pada umumnya, serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab serta kehati-hatian;
2. Memastikan penerapan Tata Kelola yang Baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perseroan;
5. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada butir 3 (tiga), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan, kecuali:
   a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit Perseroan umum;
   b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pengambilan keputusan kegiatan operasional Perseroan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 5 (lima) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
7. Melakukan penilaian sendiri *(self assessment)* untuk menilai kinerja Dewan Komisaris sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
8. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Perseroan, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
9. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:
   a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan;
   b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perseroan.
10. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal;
11. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar;
12. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Dewan Komisaris wajib membentuk paling sedikit:
    a. Komite Audit;
    b. Komite Pemantau Risiko;
    c. Komite Remunerasi dan Nominasi;

d. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
e. Komite Lainnya jika yang diwajibkan oleh peraturan perundangan Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas), wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

13. Memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada butir 12 (dua belas) menjalankan tugas secara efektif;
14. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya;
15. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada butir 15 (lima belas) apabila dapat membuktikan:
    a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian.
16. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Hak dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang untuk:

1. Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi;
2. Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan. Meminta keterangan/penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
3. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris;
4. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
6. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
7. Melakukan tindakan pengurus Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan;
8. Menghadiri rapat Dewan Komisaris dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
9. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau keputusan RUPS.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris dirancang untuk memastikan fokus yang optimal dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan perusahaan. Setiap anggota memiliki tanggung jawab atas area tertentu, yang menjamin kelancaran dan efisiensi pelaksanaan tugas. Hal ini juga menciptakan kejelasan mengenai peran masing-masing, baik secara kolektif maupun individu.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Jerry Marmen	Komisaris Utama	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Nanang Supriyatno	Komisaris	Anggota Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Anggota Komite Audit Ketua Komite Pemantau Risiko Anggota Komite Remunerasi & Nominasi
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Ketua Komite Remunerasi & Nominasi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Ketua Komite Audit Ketua Komite Tata Kelola Terintegrasi Anggota Komite Pemantau Risiko

Independensi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris KB Bank senantiasa menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan mengedepankan prinsip independensi dan menjunjung tinggi kepentingan Bank di atas kepentingan pribadi mereka sendiri. Dewan Komisaris memastikan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

Prinsip independensi ini menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertindak secara netral dan objektif, tanpa adanya pengaruh dari pihak eksternal ataupun internal yang dapat mengganggu integritas dan kredibilitas keputusan yang diambil.

Dengan mengutamakan kepentingan Bank, Dewan Komisaris memastikan bahwa semua keputusan yang diambil memiliki dampak positif bagi pertumbuhan dan kesinambungan bisnis KB Bank. Dewan Komisaris berkomitmen untuk bertindak secara adil dan transparan dalam setiap aspek pengelolaan perusahaan, sehingga dapat memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan menjaga reputasi yang baik dari Bank.

Keputusan yang Perlu Mendapat Persetujuan Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagai berikut:

1. Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan kebijakan strategis Bank, antara lain *Corporate Strategy* dan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun Periode 2024-2026.
2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank tahun 2024, pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) serta Kinerja Keuangan bulanan tahun 2024.
3. Persetujuan penetapan Kantor Akuntan Publik sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024.
4. Memberikan persetujuan atas pemberian fasilitas kredit, restrukturisasi kredit dan investasi di atas limit tertentu serta pemberian fasilitas kredit kepada pihak terkait, yang merupakan kewenangan Dewan Komisaris.
5. Memberikan persetujuan terhadap kebijakan serta perubahan kebijakan yang merupakan bagian dari kewenangan Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris KB Bank tidak hanya berperan dalam pengawasan, tetapi juga secara aktif memberikan nasihat kepada Direksi. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris secara rutin berinteraksi dengan Direksi melalui rapat formal maupun dialog informal, baik dengan seluruh Direksi maupun anggota tertentu. Melalui nasihat yang berkelanjutan, Dewan Komisaris mendukung Direksi dalam merumuskan strategi bisnis yang efektif, mengidentifikasi risiko, serta memastikan operasional Bank berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta menyampaikan rekomendasi melalui berbagai forum, di antaranya:

1. Rapat Dewan Komisaris yang diantaranya dapat pula mengundang Direksi
2. Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi
3. Rapat Komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris, yang terdiri dari Rapat Komite Audit, Rapat Komite Pemantau Risiko, Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi. Pada Rapat Komite tersebut dapat pula mengundang Direksi atau anggota Direksi

Pengelolaan Benturan Kepentingan Dewan Komisaris

Benturan kepentingan dalam Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris didefinisikan sebagai kondisi di mana kepentingan pribadi anggota Dewan Komisaris dapat bertentangan dengan kepentingan Perseroan dalam mencapai tujuan perusahaan. Ini termasuk meningkatkan laba, nilai perusahaan, mencapai visi, menjalankan misi, dan melaksanakan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pedoman ini menetapkan aturan ketat dalam pengelolaan benturan kepentingan. Anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk menghindari situasi tersebut melalui berbagai cara, antara lain:

1. Pihak lain atau inisiatif pribadi yang dapat dikategorikan sebagai upaya memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank;
2. Pihak lain atau inisiatif pribadi yang dapat berpotensi dikategorikan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Pengambilan keputusan di mana secara pribadi atau dengan cara apapun baik secara langsung maupun secara tidak langsung para anggota Direksi mempunyai kepentingan pribadi di dalamnya.

Sertifikasi Manajemen Risiko

Beradaptasi dengan dinamika industri perbankan yang terus berkembang menuntut kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni, terutama dalam mengelola risiko. Untuk memastikan efektivitas pengelolaan risiko, Bank perlu didukung oleh pengurus dan pejabat yang memiliki pemahaman mendalam terkait manajemen risiko. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009, Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan memiliki Sertifikat Manajemen Risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset 1 hingga 10 T	4	2 tahun

Jika masa berlaku sertifikasi telah berakhir, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala. Program ini harus dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Dewan KB Bank tahun 2024.

Nama	Jabatan	Kualifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Jerry Marmen	Komisaris Utama	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Nanang Supriyatno	Komisaris	6	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	6	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	6	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	6	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Program Pengenalan Perusahaan Bagi Komisaris Baru

Program Pengenalan bagi Dewan Komisaris yang baru diangkat bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang Perseroan. Hal ini mencakup pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta proses bisnis yang dijalankan oleh Direksi. Tujuan utamanya adalah agar Dewan Komisaris dapat bekerja sejalan dengan organ-organ Perseroan lainnya.

Dalam program ini, Dewan Komisaris yang baru akan diperkenalkan dengan operasional Perseroan, visi, dan strategi yang dipimpin oleh Direksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga akan mempelajari kerangka kerja regulasi, kebijakan internal, serta praktik terbaik yang diterapkan oleh Perseroan.

Program Pengenalan ini juga bertujuan untuk memfasilitasi interaksi antara Dewan Komisaris dan organ-organ Perseroan lainnya. Dengan pemahaman yang menyeluruh tentang Perseroan, Dewan Komisaris diharapkan dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam pengambilan keputusan strategis, pengawasan, serta menjaga keselarasan antara berbagai organ dalam mencapai tujuan bersama.

Program pengenalan Perseroan meliputi:
1. Pengenalan bisnis dan divisi-divisi yang ada di Perseroan;
2. Pengenalan budaya Perseroan;
3. Perseroan mengikutsertakan dalam program training pada bidang yang sesuai dengan pengawasan yang bersangkutan;
4. Penyampaian dokumen Perseroan, diantaranya; Laporan Tahunan, Rencana Bisnis Bank (RBB).

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan komposisi Dewan Komisaris, KB Bank melaksanakan program pengenalan kepada anggota Dewan Komisaris baru yakni Seng Hyup Shin pada tanggal 24 Januari 2024, bertempat di Jakarta.

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi di Tahun 2024

KB Bank berkomitmen untuk melaksanakan program pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Hal ini bertujuan untuk memperkuat peran dan efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Komisaris, serta memastikan keberlanjutan tata kelola yang baik di seluruh aspek operasional Bank. Adapun pelatihan dan pengembangan kompetensi Dewan Komisaris selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Jerry Marmen (Komisaris Utama)	*Training* dan *Workshop*	• Kick Off RKA SKAI • Workshop Refresher RKA SKAI • Konvensi Nasional Rancangan RSKKNI BID SMR • Training Bahasa Korea • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Surabaya, 08/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • OJK • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Seng Hyup Shin (Wakil Komisaris Utama)	*Training*	• Online APU PPT For Executive	• Jakarta / 05/11/2024	• Rinto Teguh
Nanang Supriyatno (Komisaris)	*Training*	• Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Resertifikasi SMR Komisaris • Training Bahasa Korea • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Tippy Joesoef (Komisaris Independen)	*Training* dan *Workshop*	• Kick Off RKA SKAI • Workshop Refresher RKA SKAI • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Ujian SMR J6 (Komisaris) • Training Bahasa Korea • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 27/09/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • LSPP • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Hae Wang Lee (Komisaris Independen)	*Training*	• Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Resertifikasi SMR Komisaris • Online APU PPT For Executive • Webinar FKDKP	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • Rinto Teguh • Webinar FKDKP
Stephen Liestyo (Komisaris Independen)	*Training* dan *Workshop*	• Kick Off RKA SKAI • Workshop Refresher RKA SKAI • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Resertifikasi Smr Komisaris • Training Bahasa Korea • Online APU PPT For Executive • Webinar FKDKP	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • IRPA & BSMR • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh • FKDKP

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Dewan Komisaris

Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal pengunduran dirinya dan Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya Surat Pengunduran Diri, untuk menindaklanjuti masalah tersebut atau bila tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, Dewan Komisaris yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Terdapat berbagai prosedur penilaian yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris, dua di antaranya adalah sebagai berikut:

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris oleh RUPS

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahunnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Penilaian ini didasarkan pada tugas dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan serta Anggaran Dasar, termasuk amanat dari Pemegang Saham.

Kriteria evaluasi disampaikan secara terbuka kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil evaluasi, baik secara keseluruhan maupun individu, menjadi bagian integral dalam skema kompensasi dan insentif Dewan Komisaris. Evaluasi kinerja individu menjadi pertimbangan penting bagi Pemegang Saham dalam mempertimbangkan pemberhentian atau penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris digunakan sebagai alat untuk menilai dan peningkatan efektivitas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS berdasarkan *Board Manual* serta target-target kinerja Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada;
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan;
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu;
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan;
5. Pencapaian realisasi program kerja tahunan;
6. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pihak yang melakukan *assessment* atas kinerja Dewan Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS.

Hasil Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk memastikan efektivitas pengawasan, Dewan Komisaris terlebih dahulu menyusun Rencana Kerja Tahunan yang menjadi pedoman bagi setiap anggotanya. Rencana kerja ini disusun dengan mempertimbangkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diemban Dewan Komisaris. Dengan berpegang pada pedoman tersebut, Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sepanjang tahun 2024.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan Metode *Self-Assessment* GCG

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan secara rutin 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui *Self Assessment* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.03/2017 yang mewajibkan Bank Umum untuk melakukan penilaian terhadap penerapan tata kelola Bank.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian *Self Assessment* Kinerja Dewan Komisaris

Pelaksanaan *Self-Assessment* GCG untuk kinerja Dewan Komisaris dimulai dari penilaian sendiri kinerja masing-masing anggota dengan pengisian template lembar kinerja dan hasilnya akan diberikan kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan untuk dievaluasi dan dijadikan dasar dalam menentukan pemberhentian dan/atau penunjukan kembali keanggotaan Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan komisaris

Self Assessment GCG yang dilakukan menggunakan kriteria SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris mencakup hal-hal sebagaimana berikut:

1. Evaluasi Pribadi;
2. Evaluasi Kompetensi;
3. Kinerja Komite-Komite Dewan Komisaris dan rekomendasi perbaikan yang diperlukan (bila ada);
4. Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab dan Proses Kerja Dewan Komisaris;
5. Efektivitas Rapat Dewan Komisaris.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris dilakukan oleh *Compliance Group*, yaitu satuan kerja yang bertanggung jawab dalam menilai faktor pelaksanaan GCG di Bank.

Penilaian Kinerja Komite-komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menjalankan peran penting dalam mengawasi dan memastikan kelancaran operasional Bank. Untuk mendukung tugas tersebut, Dewan Komisaris memiliki beberapa Komite yang memiliki peran strategis. Setiap Komite memiliki pedoman kerja yang jelas, yang memastikan tugas-tugas yang diemban dapat dilaksanakan secara efektif dan terarah. Komite-komite yang berada di bawah pengawasan Dewan Komisaris antara lain adalah Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi dan Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Komite Audit

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko, audit internal, serta proses pelaporan keuangan. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:

1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berperan penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam hal pengawasan risiko. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:
1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menjalankan fungsi serta tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan penentuan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi serta anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:
1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi mendukung Dewan Komisaris dalam mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, setidaknya melalui penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.

Kriteria Penilaian yang digunakan Dewan Komisaris antara lain:
1. Kehadiran dan keaktifan dalam rapat;
2. Rekomendasi yang diberikan kepada Dewan Komisaris;
3. Pelaporan yang tepat waktu.



Komisaris Independen

Keberadaan Komisaris Independen dalam sebuah perusahaan merupakan elemen penting untuk memastikan proses pengambilan keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Sebagai bagian dari Dewan Komisaris, Komisaris Independen berfungsi untuk menjaga agar kegiatan operasional perusahaan tetap berada dalam jalur yang benar, dengan mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Dengan tidak terlibat dalam hubungan finansial, manajerial, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan Direksi atau pemegang saham pengendali, Komisaris Independen memastikan keputusan yang diambil benar-benar bebas dari pengaruh pihak tertentu.

Di tahun 2024, KB Bank memiliki 3 (tiga) Komisaris Independen yang berperan aktif dalam mengawasi jalannya Bank. Sesuai dengan ketentuan dalam POJK, Komisaris Independen berperan dalam menjaga agar setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan pemangku kepentingan dan mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan. Dengan keberadaan Komisaris Independen, KB Bank semakin memperkuat komitmennya terhadap praktik tata kelola perusahaan yang baik demi memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Persyaratan untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris Independen sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan yang berlaku untuk pengangkatan anggota Dewan Komisaris non-Independen, dengan tambahan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014, sebagai berikut:

Kriteria	Komisaris Independen		
	Tippy Joesoef	Hae Wang Lee	Stephen Liestyo
Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya.	√	√	√
Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√
Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.	√	√	√

Pernyataan tentang Independensi Masing-Masing Komisaris Independen

Pernyataan independensi dari anggota Dewan Komisaris Independen menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan pihak Perseroan, yang kemudian akan disampaikan kepada OJK.

Berikut ini adalah bukti pernyataan independensi Dewan Komisaris Independen KB Bank :



SURAT PERNYATAAN



SURAT PERNYATAAN

STATEMENT LETTER



SURAT PERNYATAAN

Direksi

Direksi memiliki peranan penting dalam struktur manajerial Perseroan, bertanggung jawab penuh terhadap operasional dan strategi Bank. Tugas utama Direksi adalah memastikan bahwa kebijakan yang diambil selaras dengan visi dan misi Bank. Sebagai pihak yang mewakili Bank, Direksi memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Bank, baik dalam urusan hukum maupun bisnis, sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Keberadaan Direksi sangat menentukan pencapaian tujuan Bank, yang meliputi pencapaian finansial serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
4. Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk.

Pedoman Kerja/Piagam Direksi

Piagam Direksi disusun sebagai acuan utama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengutamakan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, kompetensi, independensi, dan akuntabilitas. Tujuan dari piagam ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dapat dipertanggungjawabkan dan diterima dengan baik oleh seluruh pihak yang berkepentingan, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan Piagam Direksi tetap relevan dan sesuai dengan perkembangan terkini, peninjauan terhadap Piagam Direksi dilakukan secara berkala. Adapun Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi (*Charter*) yang berlaku saat ini berdasarkan Surat Keputusan No. 28 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi KB Bank, yang mencakup berbagai aspek terkait pengelolaan Direksi, antara lain:

1. Pendahuluan;
2. Susunan Direksi;
3. Etika Kerja;
4. Waktu Kerja;
5. Rapat Direksi
6. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan GCG;
7. Cuti/Berhalangan Sementara;
8. Sanksi;
9. Lain-lain;
10. Penutup.

Kriteria Direksi

Kriteria untuk Direksi Perseroan disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, Perseroan juga menetapkan kriteria tambahan sebagai berikut:

1. Memiliki pengalaman di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank minimal 5 tahun;
2. Disusun oleh Komite Remunerasi dan Nominasi yang disahkan oleh Dewan Komisaris.

Ketentuan Masa Jabatan

Selain ditentukan dalam RUPS, Pedoman kerja Direksi juga menentukan masa jabatan Direksi yang diangkat untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penutupan RUPS sewaktu diangkat, dan apabila ada anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Komposisi dan Dasar Pengangkatan Anggota Direksi di Tahun 2024

Di tahun 2024, terjadi perubahan susunan dan komposisi Direksi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan pada 24 Januari 2024, yang memberhentikan dengan hormat Seng Hyup Shin sebagai Direktur Perseroan, serta mengangkat Jang Hyuk Im sebagai Direktur Perseroan. Selain itu, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada 28 Juni 2024, yang memberhentikan dengan hormat Young Eun Moon sebagai Direktur Perseroan dan Yohanes Suhardi sebagai Direktur Perseroan.

Adapun komposisi dan susunan Direksi yang berlaku pada 31 Desember 2024 dapat dilihat sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Dasar Pengangkatan	Periode
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	RUPS Tahunan 25 Mei 2022	2022-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027
Helmi Fahrudin	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Dodi Widjajanto	Direktur	RUPS Luar Biasa 25 Agustus 2020	2020-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2024
Henry Sawali	Direktur	RUPS Tahunan 28 Juni 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun 2027
Jung Ho Han	Direktur	RUPS Luar Biasa 31 Januari 2023	2023-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2025
Jang Hyuk Im	Direktur	RUPS Luar Biasa 24 Januari 2024	2024-Penutupan RUPS Tahunan Tahun Buku 2026

Penilaian Kemampuan dan Kepatutan

Peraturan OJK No. 27/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan merinci bahwa pengelola atau pengurus lembaga keuangan harus memenuhi kriteria kemampuan dan kepatutan untuk menjabat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu integritas, kelayakan atau reputasi keuangan, serta kompetensi calon pengurus bank. Dalam hal ini, integritas berhubungan dengan kejujuran dan kepercayaan, sementara kelayakan atau reputasi keuangan merujuk pada rekam jejak finansial dan profesional. Adapun kompetensi mencakup kemampuan teknis dan manajerial yang diperlukan untuk menjalankan tugas serta fungsi yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Penilaian ini sangat penting untuk memastikan bahwa para pengelola atau pengurus lembaga keuangan memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan tanggung jawab mereka dengan efektif dan penuh tanggung jawab.

Nama	Jabatan	Persetujuan OJK	Tanggal Efektif
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	KEP-4/D.03/2023	5 Januari 2023
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	KEP-65/D.03/2022	28 April 2022
Helmi Fahrudin	Direktur	KEP-35/D.03/2021	22 April 2021
Dodi Widjajanto	Direktur	KEP-120/D.03/2021	19 Agustus 2021
Henry Sawali	Direktur	KEP-26/D.03/2022	3 Agustus 2022
Jung Ho Han	Direktur	KEPR-150/D.03/2023	10 Januari 2024
Jang Hyuk Im	Direktur	KEPR-125/D.03/2024	16 Desember 2024

Kepemilikan Saham Direksi

Anggota Direksi diwajibkan untuk mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lainnya, baik yang berlokasi di dalam negeri maupun di luar negeri. Berikut ini adalah rincian kepemilikan saham anggota Direksi KB Bank hingga akhir tahun 2024:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham (lembar saham)			
		KB Bank	Bank Lain	Lembaga Keuangan Non-Bank	Perusahaan Lain
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	11.800.000 (0,0062804%)	Nihil	Nihil	Nihil
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	5.107.000 (0,0027181%)	Nihil	Nihil	Nihil
Helmi Fahrudin	Direktur	2.483.951 (0,0013220%)	Nihil	Nihil	Nihil
Dodi Widjajanto	Direktur	2.000.088 (0,0010645%)	Nihil	Nihil	Nihil
Henry Sawali	Direktur	1.600.000 (0,0008516%)	Nihil	Nihil	Nihil
Jung Ho Han	Direktur	11.983.400 (0,0063780%)	Nihil	Nihil	Nihil
Jang Hyuk Im	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Rangkap Jabatan Direksi

Pedoman dan tata kerja Direksi Perseroan KB Bank melarang para anggota Direksi untuk menjabat rangkap sebagai:
1. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain;
2. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Kepala daerah;
3. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Nama	Jabatan	Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain	Nama Perusahaan/ Instansi Lain
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Tidak Ada	Tidak Ada
Helmi Fahrudin	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Dodi Widjajanto	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Henry Sawali	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Jung Ho Han	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada
Jang Hyuk Im	Direktur	Tidak Ada	Tidak Ada

Hubungan Afiliasi Direksi

Anggaran Dasar menyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki kewenangan untuk memberhentikan anggota Direksi jika terdapat hubungan keluarga hingga derajat ketiga antara anggota Direksi atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris. Hubungan keluarga ini mencakup hubungan garis lurus dan garis ke samping, termasuk yang timbul akibat perkawinan.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Kepengurusan	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham			
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Woo Yeul Lee	Direktur Utama		x		x		x		x		x		x		x
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama		x		x		x		x		x		x		x
Helmi Fahrudin	Direktur		x		x		x		x		x		x		x
Dodi Widjajanto	Direktur		x		x		x		x		x		x		x
Henry Sawali	Direktur		x		x		x		x		x		x		x
Jung Ho Han	Direktur		x		x		x		x		x		x		x
Jang Hyuk Im	Direktur		x		x		x		x		x		x		x

Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Direksi, Direksi memegang tugas dan tanggung jawab penuh yang meliputi hal-hal berikut:
1. Pelaksanaan kepengurusan Perseroan;
2. Mengelola Perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
4. Menindaklanjuti temuan *audit* dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Perseroan, auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip GCG, Direksi paling kurang wajib membentuk:
   a. Satuan Kerja Audit Internal;
   b. Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko; dan
   c. Satuan Kerja Kepatuhan.
6. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;
7. Melaksanakan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
8. Mengungkapkan kepada karyawan mengenai kebijakan Perseroan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
9. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Proyek bersifat khusus;
b. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang-kurangnya mencakup lingkup kerja, tanggung jawab dan jangka waktu pekerjaan serta biaya;
c. Konsultan adalah Pihak Independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya.

10. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
11. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
12. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
13. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Hak dan Wewenang Direksi

Berdasarkan Anggaran Dasar, hak dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian mengikat Perseroan, dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan;
2. Direktur Utama atau 2 (dua) orang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
3. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa;
4. Direksi dapat mengangkat baik perorangan maupun 1 (satu) kelompok orang dalam bentuk komite untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha tertentu Perseroan.

Tugas dan Tanggung Jawab Masing-Masing Direksi

Setiap anggota Direksi memperoleh tugas dan wewenang yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan dituangkan dalam pedoman tata kerja Direksi. Pedoman ini berfungsi untuk memberikan panduan yang rinci mengenai tanggung jawab setiap anggota Direksi, yang disesuaikan dengan keahlian, pengalaman, dan tujuan perusahaan. Adapun pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Mengkoordinasi seluruh fungsi dan grup/divisi meliputi Internal Audit, Anti *Fraud*, *Corporate Communication*, dan Sumber Daya Manusia.
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	• Perencanaan dan manajemen penjualan segmen Ritel, Mikro dan UKM. • Fungsi penjualan produk segmen Ritel, Mikro dan UKM. • Pengembangan produk segmen Ritel, Mikro dan UKM. • Kemitraan segmen Ritel, Mikro dan UKM. • Mengelola portofolio dan mendukung penjualan untuk segmen mikro dan UKM. • Fungsi bisnis, Pengembangan dan dukungan penjualan serta operasional produk *trade finance*. • Pengelolaan risiko operasional kredit UKM. • Perencanaan dan manajemen penjualan segmen komersial, korporat, dan Korean-link. • Fungsi penjualan dan kemitraan segmen komersial, korporat, dan Korean-link. • Pengembangan produk dan solusi transaksional pada segmen komersial, korporat, dan Korean-link. • Berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi global, pinjaman perbankan internasional ke perusahaan besar, dan juga layanan pembiayaan dan *cross selling*. • Pengembangan solusi bisnis baru dan *supply chain*. • Fungsi pengembangan kebijakan dan restrukturisasi proses bisnis terkait perkreditan. • Mengelola KPI bisnis segmen komersial, korporat, dan Korean-link. • Menangani manajemen kinerja bisnis dan KPI Cabang. • Merencanakan dan mengimplementasikan insentif dan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan cabang. • Menangani relasi media dan komunikasi pemasaran perusahaan. • Menangani relasi investor.

Nama	Jabatan	Bidang Tugas
Helmi Fahrudin	Direktur Operasi	• Perencanaan dan manajemen penjualan segmen ritel. • Layanan nasabah Cabang. • Fungsi penjualan segmen ritel. • Pengembangan produk dan pengelolaan portofolio untuk segmen ritel yang terdiri dari Kredit Pensiunan, Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikan Kendaraan Bermotor (KPM), Kartu Kredit, *Wealth Management*, Produk Dana, dan produk lainnya. • Mitra strategis dan strategi penjualan produk ritel. • Komunikasi pemasaran. • Mengelola *retail credit factory* pada segmen ritel terkait analisa kredit untuk segmen ritel dan operasi terkait proses kesesuaian dokumen kredit, investigasi kredit dan pencairan pada segmen ritel serta pengelolaan pihak ketiga. • Operasi pada kanal elektronik kartu kredit, sistem pembayaran, *trade finance* dan *treasury*. • Pengembangan layanan dan operasional untuk peningkatan layanan nasabah. • *Business Process Restructuring*. • Memperkuat *insurance partnership*.
Dodi Widjajanto	Direktur Kepatuhan dan Risiko	• Regulasi dan kebijakan kepatuhan. • Monitoring tata kelola perusahaan. • *Single point of contact* dengan regulator. • Pengenalan nasabah. • Anti pencucian uang dan monitoring transaksi. • Fungsi hukum Perusahaan dan litigasi. • Pemantauan, analisis, dan penilaian portofolio kredit dan kolektibilitas kredit, memberikan model penilaian/pemeringkatan. • Pengendalian risiko kredit. • *Enterprise Risk Management*. • Manajemen Risiko Pasar & Likuiditas. • Manajemen Risiko Operasional dan lainnya. • Manajemen Risiko Teknologi lnformasi. • *Personal data protection*. • *Customer Protection*. • *Reporting* dan monitoring *daily activities* serta menyiapkan semua kebijakan dan SOP Treasury Middle Office. • Melakukan *Credit Stress Test* untuk memastikan dan mengelola kecukupan modal.
Henry Sawali	Direktur Kredit	• Analisa kredit untuk *segmen corporate*, *commercial* dan Korean Link. • Mengelola *Credit Regional Center* untuk segmen UMKM. • Mengelola bad bank, kredit restruktur untuk segmen MSME, korporat, komersial dan Korean Link. • Mengelola Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan melakukan *bulk sale*. • Mengelola aset dan/atau portofolio Bank yang telah dijual, serta mengelola ABS dan Sukuk. • Penagihan kredit segmen ritel. • Operasi proses kredit kredit legal, investigasi kredit dan pencairan pada segmen MSME, korporat, komersial dan Korean Link. • Mengelola seluruh kualitas aset di Bank dan sebagai menara kontrol untuk meningkatkan kualitas aset. • Penagihan, penyehatan, dan penyelesaian untuk Swamitra.
Jung Ho Han	Direktur Strategi	• Perencanaan dan pengelolaan strategi perusahaan. • Manajemen anak perusahaan. • Mendorong pertumbuhan bisnis melalui Kemitraan strategis. • Strategi dan optimalisasi kanal penjualan fisik/outlet kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas, dan ATM. • Mendorong transformasi dan sebagai *project management office*. • Pengadaan dan manajemen aset tetap. • Mendorong implementasi dan memonitoring strategi efisiensi melalui *cost hunt*.
Jung Ho Han	Alt Direktur Teknologi Informasi & Digital	• Pengembangan TI Digital dan pengembangan layanan berbasis TI untuk nasabah. • Kebijakan dan strategi Teknologi Informasi (TI). • Kehandalan dan ketersediaan infrastruktur TI. • Pengembangan aplikasi TI. • *IT security* untuk ketahanan dan keamanan siber Bank. • *New Generation Banking System* (NGBS). • Inkubasi dan pengembangan solusi digital. • Pengembangan bisnis dan ekosistem digital. • Perbaikan pada proses dan peningkatan kompetensi TI dan Digital.
Jang Hyuk Im	Direktur Keuangan	• Treasury dan manajemen likuiditas. • Bisnis kustodi dan wali amanat. • Strategi dan perencanaan keuangan perusahaan dan anggaran. • *Management Information System* dan manajemen kinerja. • Akuntansi, pajak dan *Internal Control Over Financial Report*. • Transaksi keuangan dalam proses pengadaan. • Mengelola ALCO. • Mengelola KPI pada *level corporate*, *group* sampai dengan departemen.

Pengelolaan Benturan Kepentingan Direksi

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusannya, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi tersebut diperlukan persetujuan RUPS berdasar suara terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

Keputusan dan Pelaksanaan Tugas Direksi

Di tahun 2024, Direksi Bank secara efektif menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mengarahkan kebijakan yang strategis dan operasional. Tugas utama Direksi adalah memastikan kebijakan yang diterapkan mendukung perkembangan Bank, terutama dalam mengimplementasikan visi jangka panjang. Salah satu pencapaian yang menonjol adalah fokus Bank yang semakin kuat pada segmen Ritel, seiring dengan langkah-langkah yang mendukung program pemerintah. Selain itu, Direksi juga melakukan pembaruan identitas Bank dengan meluncurkan rebranding yang mencakup pembaruan logo dan merek.

Sepanjang tahun 2024, beberapa kebijakan dan keputusan strategis yang diterbitkan oleh Direksi, antara lain:

Nomor Kebijakan/ Nomor Surat	Perihal	Tanggal ditetapkan
7	Kebijakan Umum Pengendalian Mutu PT. Bank KB Bukopin, Tbk / *General Policy Quality Assurance* PT. Bank KB Bukopin, Tbk	20 Desember 2023
26	Kebijakan Tentang Uraian Jabatan, Task & Signature List / *Policy on Position Description, Task & Signature List*	5 Maret 2024
32 (V2)	Kebijakan Tentang Kelembagaan Dan Kewenangan Komite Kredit PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Regarding Credit Committee Institution And Authority* PT Bank KB Bukopin Tbk	16 April 2024
71	Kebijakan tentang Hapus Buku dan Hapus Tagih / *Policy regarding Write Off and Claims Write Off* PT. Bank KB Bukopin, Tbk.	17 Mei 2024
81	Kebijakan Tentang Risiko Lingkungan Dan Sosial / *Policy regarding Environment And Social Risk Policy*	3 Juni 2024
85	Kebijakan tentang Ketentuan Pelaksanaan Transaksi Human Capital Regional / *Policy on Provisions for the Implementation of Regional Human Capital Transactions*	4 Juni 2024
108	Kebijakan Tentang Kode Etik Perlindungan Konsumen PT. Bank KB Bukopin, Tbk. / *Policy on Consumer Protection Code of Ethics* PT Bank KB Bukopin, Tbk	15 Juli 2024
111	Kebijakan tentang Pengangkatan Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Employee Appointment of* PT Bank KB Bukopin Tbk	24 Juli 2024
113 (V2)	Kebijakan Global Treasury PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Concerning Global Treasury* PT Bank KB Bukopin Tbk	5 Desember 2024
114	Kebijakan Tentang Perjalanan Dinas / *Policy on Business Travel*	31 Juli 2024
123	Kebijakan Tingkat Tinggi Tentang Tata Kelola KB Bank / *High-level Policy of* KB Bank *Governance*	23 Agustus 2024
127	Kebijakan Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi / *Information Security Management System Policy*	2 September 2024
131	Kebijakan tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Consumer Protection and Society* PT Bank KB Bukopin Tbk	26 September 2024
134	Kebijakan tentang Skala Gaji Pokok Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Basic Salary Scale for Employees of* PT Bank KB Bukopin Tbk	30 September 2024
135	Kebijakan tentang Remunerasi Tenaga Kerja Asing / *Policy on Remuneration of Foreign Workers*	30 September 2024
136	Kebijakan tentang Peraturan Fasilitas Perjalanan Spiritual karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Regulation of Spiritual Travel Facilities for Employees of* PT Bank KB Bukopin Tbk	9 Oktober 2024
141	Kebijakan Tentang Cuti Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Employee Leave* PT Bank KB Bukopin Tbk	10 Oktober 2024
142	Kebijakan tentang Bantuan Pendidikan / *Policy on Education Support*	10 Oktober 2024

Nomor Kebijakan/ Nomor Surat	Perihal	Tanggal ditetapkan
149	Kebijakan Penanganan Portofolio *Loan at Risk* KB Bank / *KB Bank's Loan at Risk Portfolio Management Policy*	17 Oktober 2024
154	Kebijakan Pengelolaan Alih Daya PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy Regarding Outsource Management* of PT Bank KB Bukopin Tbk	24 Oktober 2024
155	Kebijakan tentang Penjualan Kredit Bermasalah Secara Kolektif PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy on Collective Loan at* Risk PT Bank KB Bukopin Tbk	25 Oktober 2024
161	Kebijakan Pembuatan Perjanjian dan Surat Kuasa Perjanjian	31 Oktober 2024
185	Kebijakan Tentang Penerapan APU, PPT, dan PPPPSPM	6 Desember 2024
189	Kebijakan Tentang Klasifikasi Jaringan Kantor / *Policy on Office Network Classification*	28 November 2024
195	Kebijakan tentang Persetujuan Penentuan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai / *Policy concerning Approval of Allowance for Impairment Losses Determination*	29 November 2024
198	Kebijakan Tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk	4 Desember 2024
199	Kebijakan Pelaksanaan Training, Workshop, dan Sosialisasi untuk Karyawan PT Bank KB Bukopin Tbk / *Policy of Training, Workshop and Socialization Implementation for Employees* PT Bank KB Bukopin Tbk	29 November 2024
208	Kebijakan Strategi Anti *Fraud*	12 Desember 2024
222	Kebijakan tentang Manajemen Risiko Operasional PT Bank KB Bukopin Tbk	31 Desember 2024
223	Kebijakan *Risk Appetite* PT Bank KB Bukopin, Tbk	30 Desember 2024
224	Kebijakan Tingkat Tinggi Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin, Tbk / *High Level Policy Regarding Risk Management* PT Bank KB Bukopin, Tbk	30 Desember 2024
225	Kebijakan Tentang Rencana Aksi Pemulihan PT Bank KB Bukopin, Tbk / *Policy Regarding Recovery Action Plan of* PT Bank KB Bukopin, Tbk	31 Desember 2024

Sertifikasi Manajemen Risiko

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/19/PBI/2009, tentang Sertifikasi Manajemen Risiko bagi Pengurus dan Pejabat Bank Umum, setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi diwajibkan untuk memiliki Sertifikat Manajemen Risiko. Sertifikat ini harus diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, dengan klasifikasi sebagai berikut:

Jabatan	Level	Masa Berlaku
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 1	4 Tahun
Dewan Komisaris	Minimal tingkat 2	4 tahun
Direktur Utama dan Direktur dengan aset 1 hingga 10 T	4	2 tahun

Jika masa berlaku sertifikasi telah berakhir, maka wajib dilakukan Program Pemeliharaan (*Refreshment*) secara berkala. Program ini harus dilaksanakan setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk tingkat 1 dan 2; atau 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk tingkat 3, 4 dan 5.

Tabel berikut menjabarkan mengenai sertifikasi manajemen risiko yang dimiliki oleh Direksi KB Bank tahun 2024.

Nama	Jabatan	Kualifikasi	Lembaga yang Mengeluarkan Sertifikasi
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Helmi Fahrudin	Direktur	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Dodi Widjajanto	Direktur	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Henry Sawali	Direktur	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Jung Ho Han	Direktur	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
Jang Hyuk Im	Direktur	7	Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)

Program Pengenalan Perusahaan bagi Direksi Baru

Program Pengenalan untuk Direktur yang baru diangkat memiliki tujuan utama untuk memperkenalkan struktur dan dinamika Perseroan secara menyeluruh. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pemahaman Direksi mengenai berbagai aspek penting dalam organisasi, termasuk peran dan tanggung jawab yang akan diemban, serta alur dan proses bisnis yang dijalankan. Sebagai bagian dari upaya ini, Sekretaris Perusahaan bertugas merancang dan menyusun materi yang relevan untuk program pengenalan tersebut. Materi ini mencakup berbagai informasi tentang Perseroan, antara lain:

1. Penjelasan mengenai tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi
2. Pengenalan dan penjelasan mengenai Budaya Perseroan dan Struktur Organisasi;
3. Penjelasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Bisnis Bank (RBB), Pedoman Tata Tertib Kerja Direksi, dan Anggaran Dasar Perseroan;
4. Mengikutsertakan dalam program training pada bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang bersangkutan. Serta hal-hal penting lainnya yang dapat diberikan berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya.

Sehubungan dengan adanya perubahan susunan dan komposisi Direksi, KB Bank melaksanakan program pengenalan kepada anggota Direksi baru yakni Jang Hyuk Im pada tanggal 24 Januari 2024, bertempat di Jakarta

Program Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi di Tahun 2024

Seluruh anggota Direksi KB Bank berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan kapasitas profesional guna mendukung pelaksanaan tugas serta tanggung jawab secara optimal. Adapun pelatihan dan pengembangan kompetensi Direksi selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Woo Yeul Lee (Direktur Utama)	*Training dan Workshop*	• Workshop SME Plan • Workshop Kick Off Marathon • Kick Off RKA SKAI • Workshop Anti Fraud • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Kick Off SND • Sertifikasi SMR J7 • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 01/02/2024 • Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 27/06/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 29/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • Internal Diklat • IRPA & BSMR • Rinto Teguh
Robby Mondong (Wakil Direktur Utama)	*Training dan Workshop*	• Workshop SME Plan • Workshop Kick Off Marathon • Workshop and Senior Leader Talk • Kick Off SND • Workshop VPD • Sertifikasi SMR J7 • Sertifikasi SMR J7 • Online APU PPT For Executive • Workshop Product Business	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 01/02/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 16/10/2024 • Jakarta, 01/10/2024 • Jakarta, 23/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • IRPA & BSMR • IRPA & BSMR • Rinto Teguh • Internal Diklat
Helmi Fahrudin (Direktur)	*Training dan Workshop*	• Workshop SME Plan • Workshop Kick Off Marathon • Perpanjang Keanggotaan IAI • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Workshop SND Senior Leader Talk • Kick Off SND • Workshop VPD • Sertifikasi SMR J7 • Online APU PPT For Executive • Workshop Product Business	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 01/02/2024 • Jakarta, 02/02/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 16/10/2024 • Jakarta, 23/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • IAI • AAFM • Internal Diklat • Internal Diklat • Internal Diklat • IRPA & BSMR • Rinto Teguh • Internal Diklat
Dodi Widjajanto (Direktur)	*Training*	• Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Kick Off SND • Sertifikasi SMR J7 • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 23/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• AAFM • Internal Diklat • IRPA & BSMR • Rinto Teguh

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan Dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Henry Sawali (Direktur)	*Training dan Workshop*	• Workshop SME Plan • Penyelarasan BOD J7 • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Kick Off SND • Online APU PPT For Executive • Workshop Mitigasi & Evaluasi SAM IV SME	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 27/03/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 05/12/2024	• Internal Diklat • IRPA • AAFM • Internal Diklat • Rinto Teguh • Internal Diklat
Jung Ho Han (Direktur)	*Training dan Workshop*	• Workshop Sme Plan • Training Anti Korupsi & Anti Fraud • Kick Off SND • Sertifikasi SMR J7 • Online APU PPT For Executive	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 29/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • AAFM • Internal Diklat • IRPA & BSMR • Rinto Teguh
Jang Hyuk Im (Direktur)	*Training*	• Sertifikasi SMR J7 • Sertifikasi Treasury J7	• Jakarta, 01/08/2024 • Jakarta, 30/10/2024	• IRPA & BSMR • APUVINDO

Mekanisme Pengunduran Diri dan Pemberhentian Direksi

Seorang anggota Direksi dapat mengundurkan diri dengan memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada Bank, dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Direksi, dan anggota Dewan Komisaris lainnya sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri anggota Direksi untuk menindaklanjuti masalah tersebut. Jika tidak, pengunduran diri akan dianggap sah tanpa persetujuan RUPS. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar. Mekanismenya adalah sebagai berikut:

1. Usulan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Direksi akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi;
2. Keputusan untuk memberhentikan anggota Direksi diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh RUPS tersebut. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan apabila anggota Direksi tersebut mengundurkan diri secara sukarela dari jabatannya dan/atau tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut;
3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan;
4. Seorang anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya;
5. Anggota Direksi yang mengundurkan diri hanya akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, jika RUPS membebaskannya dari tanggung jawab selama masa jabatannya;
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah menerima surat pengunduran diri tersebut untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut;
7. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi;
8. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
   a. Mengundurkan diri;
   b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
   c. Meninggal dunia;
   d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Penilaian Kinerja Direksi

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) atau lebih anggota, maka tanggung jawab mereka bersifat tanggung renteng. Penilaian kinerja Direksi dilakukan melalui 2 (dua) prosedur utama, yaitu sebagai berikut:

Penilaian Kinerja oleh RUPS

Evaluasi Direksi dan masing-masing Anggota Direksi dilakukan setiap tahunnya oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari akuntabilitas. Evaluasi ini mencakup hasil kinerja keseluruhan Direksi, baik secara kolegial maupun individual. Hasil evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Evaluasi ini menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi pemegang saham dalam keputusan untuk memberhentikan dan/atau menunjuk kembali anggota Direksi.

Prosedur Pelaksanaan *Assessment* Kinerja Direksi

Setiap tahun, anggota Direksi melakukan *self-assessment* untuk mengevaluasi kinerja Direksi secara kolegial. Hal ini bertujuan untuk mendorong kontribusi positif dari setiap anggota Direksi dalam memperbaiki kinerja secara berkesinambungan. Usulan pencapaian kinerja Direksi disampaikan oleh Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS

memberikan pembebasan tanggung jawab kepada anggota Direksi atas pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya, kecuali jika ada perbuatan penggelapan, penipuan, atau tindakan pidana lainnya yang tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

Kriteria Evaluasi Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi diukur berdasarkan *key performance indicator* yang telah ditetapkan untuk masing-masing Direksi, yaitu

Direktur Utama

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi kredit yang sehat serta menjaga kualitas aset;
3. Meningkatkan perolehan dana murah untuk memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
4. Memastikan kecukupan modal dalam mendukung ekspansi bisnis dan menjaga stabilitas keuangan bank;
5. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing perusahaan;
6. Mengelola dan meningkatkan nilai saham perusahaan;
7. Meningkatkan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

Wakil Direktur Utama

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi pangsa pasar dengan meningkatkan jumlah nasabah aktif dan pertumbuhan kredit baru;
3. Mengoptimalkan penghimpunan dana murah untuk memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan efisiensi biaya operasional serta menekan *Cost of Fund* untuk mendukung profitabilitas.
5. Meningkatkan kualitas aset melalui pertumbuhan kredit yang sehat dan penurunan *Loan at Risk* (LAR);
6. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing Perusahaan;
7. Meningkatkan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

Direktur Bisnis Ritel

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi pangsa pasar dengan meningkatkan jumlah nasabah aktif dan pertumbuhan kredit baru;
3. Mengoptimalkan penghimpunan dana murah untuk memperkuat struktur pendanaan dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan efisiensi biaya operasional untuk mendukung profitabilitas.
5. Meningkatkan kualitas aset melalui pertumbuhan kredit yang sehat dan penurunan *Loan at Risk* (LAR);
6. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing Perusahaan;
7. Meningkatkan pengelolaan risiko dan kepatuhan terhadap regulasi.

Direktur Kredit

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Meningkatkan pertumbuhan kredit melalui ekspansi debitur baru;
3. Meningkatkan kualitas aset dan efektivitas pengelolaan kredit – Mengelola rasio kredit bermasalah serta meningkatkan efektivitas penagihan;
4. Melakukan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi *asset*;
5. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing Perusahaan.

Direktur Kepatuhan dan Risiko

1. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan meminimalkan sanksi dari regulator;
2. Melakukan efisiensi biaya hukum dan meningkatkan keberhasilan penyelesaian kasus;
3. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing perusahaan;
4. Meningkatkan efektivitas pengendalian dan pencegahan *fraud*;
5. Meningkatkan kelengkapan kebijakan dan prosedur dalam mendukung tata kelola risiko yang baik.

Direktur Strategi

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi pangsa pasar dengan meningkatkan jumlah nasabah aktif dan pertumbuhan kredit baru;
3. Melakukan ekspansi kredit yang sehat serta menjaga kualitas aset;
4. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.
5. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing perusahaan;

Direktur Keuangan

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasional dan optimalisasi asset;
3. Memastikan kecukupan modal dalam mendukung ekspansi bisnis dan menjaga stabilitas keuangan bank;
4. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing Perusahaan.

Direktur IT & Digital

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan ekspansi pangsa pasar dengan meningkatkan jumlah nasabah digital;
3. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas asset;
4. Meningkatkan dukungan Teknologi Informasi dalam pelayanan dan operasi untuk mendukung bisnis.
5. Mengimplementasikan inisiatif strategis untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing Perusahaan.

Direktur Operasi

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
3. Meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Meningkatkan efektivitas produk sesuai dengan kebutuhan customer;
5. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan *Engagement* karyawan.

Direktur SME Bisnis

1. Mencapai kinerja keuangan yang telah ditargetkan;
2. Melakukan efisiensi biaya operasi dan meningkatkan kualitas aset;
3. Melakukan ekspansi pangsa pasar dan meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap produk Perseroan;
4. Mengoptimalkan produktivitas penjualan untuk mendapatkan kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Penilaian kinerja Direksi dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perusahaan. Proses penilaian ini juga mengikuti amanat yang diberikan oleh Pemegang Saham, yang dapat termanifestasikan dalam keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa penilaian kinerja Direksi dilakukan secara objektif dan transparan, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Sementara itu, Pemegang Saham memiliki peran penting dalam menentukan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk mengevaluasi kinerja Direksi dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan demikian, proses penilaian kinerja Direksi menjadi bagian integral dari tata kelola perusahaan yang baik, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban di tingkat kepemimpinan tertinggi.

Penilaian Sendiri Tugas dan Tanggung Jawab serta Kecukupan Penerapan Tata Kelola Direksi

Penilaian kinerja Direksi juga dilakukan dengan menggunakan metode penilaian sendiri *(self assessment)* sesuai SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Prosedur Pelaksanaan Penilaian Sendiri

Self assessment dilakukan pada periode Bulan Juni dan Desember setiap tahunnya. Bank melakukan penilaian berdasarkan kertas kerja sesuai lampiran III SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 Tahun 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum indikator Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.

Kriteria Kecukupan Penerapan Tata Kelola

Kriteria Self Assessment Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu *Governance Structure, Governance Process* dan *Governance Outcome. Governance Structure* terdiri dari 16 (enam belas) indikator, *Governance Process* terdiri dari 14 (empat belas) indikator sedangkan *Governance Outcome* terdiri dari 10 (sepuluh) indikator.

Pihak yang Melakukan *Assessment*

Pelaksanaan *assessment* dilaksanakan oleh *Compliance, Policy & Good Corporate Governance* Department sebagai satuan kerja yang melaksanakan penilaian terhadap faktor pelaksanaan GCG di Perseroan.

Penilaian Kinerja Komite dan Unit Kerja yang Berada di Bawah Direksi

Direksi menyadari bahwa pembentukan komite-komite di bawahnya berperan penting dalam mendukung tata kelola perusahaan. Komite-komite ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan regulasi yang berlaku, dengan tujuan utama meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional.

Komite-komite tersebut mencakup berbagai bidang, seperti *audit*, risiko, remunerasi, nominasi, dan lainnya, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Perseroan. Setiap Komite memiliki tanggung jawab spesifik, mulai dari mengawasi kebijakan dan praktik operasional, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, hingga memberikan rekomendasi terkait kebijakan remunerasi dan penunjukan anggota Direksi.

Di tahun 2024, Direksi mengevaluasi kinerja komite-komite yang telah dibentuk dan menyimpulkan bahwa Komite-komite ini menjalankan tugas serta tanggung jawabnya secara efektif. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap pencapaian tujuan, efektivitas proses kerja, serta kontribusi komite terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Dengan adanya komite-komite ini, diharapkan tata kelola perusahaan semakin baik dan mendukung pencapaian tujuan bisnis yang strategis.

Komite Manajemen Risiko

Manajemen risiko yang optimal menjadi salah satu elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan operasional Perseroan. Untuk mendukung hal ini, KB Bank telah memiliki Komite Manajemen Risiko sebagai bagian dari upaya memastikan bahwa setiap risiko yang muncul dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan baik.

Komite Manajemen Risiko berperan dalam mengembangkan dan mengawasi penerapan sistem manajemen risiko yang selaras dengan strategi bisnis perusahaan. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terintegrasi, Komite Manajemen Risiko berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan perusahaan terhadap potensi risiko yang dapat mempengaruhi kinerja dan pencapaian tujuan bisnis.

Sepanjang tahun 2024, evaluasi terhadap kinerja Komite Manajemen Risiko menunjukkan bahwa komite telah menjalankan tugasnya secara efektif. Direksi menilai bahwa langkah-langkah yang diambil komite, mulai dari pemetaan hingga mitigasi risiko, telah memberikan dampak positif dalam menjaga kelangsungan bisnis. Selain itu, Komite Manajemen Risiko juga memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungan usaha.

Komite ALCO

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan bisnis dan profitabilitas Bank. Dalam hal ini, Komite ALCO berperan sebagai pengambil keputusan strategis yang mempertimbangkan pertumbuhan usaha serta keberlanjutan operasional. Sepanjang tahun 2024, rapat dan kebijakan yang ditetapkan oleh ALCO dinilai efektif oleh Direksi. Hal ini mencerminkan pengawasan yang ketat terhadap portofolio keuangan serta respons yang adaptif terhadap perubahan kondisi pasar. Keputusan-keputusan ALCO berkontribusi secara signifikan dalam manajemen risiko serta pencapaian target keuangan jangka panjang. Dengan demikian, peran ALCO menjadi kunci dalam memastikan stabilitas dan pertumbuhan bisnis Bank secara berkelanjutan.

Komite Pengarah Teknologi Informasi

Dalam ekosistem Perseroan yang semakin bergantung pada teknologi, pengelolaan teknologi informasi harus dilakukan secara terarah dan strategis. Untuk itu, Komite Pengarah Teknologi Informasi berperan sebagai entitas utama yang memberikan arahan serta rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi serta kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Komite Pengarah Teknologi Informasi memiliki tanggung jawab untuk meninjau kebutuhan teknologi informasi, merumuskan strategi yang selaras dengan kepentingan perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan standar keamanan IT. Selama tahun 2024, Komite Pengarah Teknologi Informasi menjalankan tugasnya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Keberhasilannya dalam mendukung penerapan teknologi informasi di perusahaan mencerminkan komitmen terhadap efisiensi, keamanan, dan relevansi infrastruktur IT dengan kebutuhan bisnis.

Dengan demikian, keberadaan Komite ini memainkan peran krusial dalam memastikan teknologi informasi menjadi motor penggerak utama bagi pencapaian visi dan tujuan Perseroan.

Komite Restrukturisasi Kredit

Restrukturisasi kredit merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk menyehatkan portofolio kredit Perseroan dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Dalam proses ini, Komite Restrukturisasi Kredit memiliki peran utama dalam menilai, merekomendasikan, serta memutuskan restrukturisasi kredit sesuai dengan kewenangannya.

Komite Restrukturisasi Kredit bertanggung jawab atas restrukturisasi kredit dengan kualitas 1 dan 2 bagi debitur yang masuk dalam kategori pemantauan (*watch list*). Selain itu, Komite Restrukturisasi Kredit juga menangani restrukturisasi dan upaya pemulihan kredit berkualitas 3, 4, dan 5 pasca restrukturisasi. Keputusan yang diambil oleh Komite Restrukturisasi Kredit didasarkan pada analisis mendalam terhadap kondisi keuangan debitur dan potensi dampaknya terhadap Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai bahwa Komite Restrukturisasi Kredit telah menjalankan tugasnya secara optimal. Setiap keputusan yang dihasilkan telah berkontribusi secara signifikan dalam mengurangi risiko kredit serta menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan perannya yang strategis, komite ini berperan penting dalam memastikan manajemen kredit yang sehat dan berkelanjutan.

Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah

Dalam pengelolaan kredit bermasalah, diperlukan mekanisme yang efektif untuk memastikan setiap keputusan yang diambil dapat meminimalkan risiko bagi Bank. Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah berperan dalam menangani kredit dengan status kurang lancar hingga macet, termasuk melalui langkah-langkah seperti pengambilalihan agunan (AYDA), penghapusan buku, dan penghapusan tagihan.

Sebagai bagian dari proses penyelesaian, Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah bertanggung jawab untuk menganalisis kondisi keuangan debitur, menilai agunan, serta mempertimbangkan risiko yang ada sebelum merekomendasikan atau menetapkan keputusan akhir. Sepanjang tahun 2024, Direksi menilai bahwa Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah telah menjalankan tugasnya dengan baik, berdasarkan laporan dan rekomendasi yang diberikan. Evaluasi ini memastikan bahwa kebijakan penyelesaian kredit berdampak positif bagi stabilitas keuangan Bank. Dengan perannya yang strategis, Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah menjadi elemen kunci dalam menjaga kualitas portofolio kredit dan mendukung kesehatan keuangan bank.

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka, menekankan pentingnya keberagaman dalam komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Keberagaman dalam organisasi tidak hanya mencakup perbedaan individu, tetapi juga mencakup pengelolaan struktur yang mendukung kinerja yang optimal. Dalam hal ini, penunjukan anggota Dewan Komisaris dan Direksi harus dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian dan pengalaman yang relevan. Pemilihan yang tepat akan memastikan bahwa setiap anggota dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan Perseroan secara menyeluruh.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Dewan Komisaris						
Jerry Marmen	Komisaris Utama	Laki-laki	59	Doctor of Philosophy at the Australian National University (2012)	• Asisten Staf Khusus Presiden Republik Indonesia Bidang Ekonomi (2019-sekarang) • Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Tata Kelola, Risiko, dan Kepatuhan(TRK) (2021-sekarang) • Komisioner Pengawas LSP-BSMR, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) (2021-2022) • Komite Kebijakan Risiko/Komite Pemantau Risiko, PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2019-2021) • Chief & Senior Consultant PT. Strategic Development Group (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2018-2021) • Komisaris Utama PT Proteksi Antar Nusa (Insurance Brokerage) (2012-2018) • Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko PT Informasi Kredit Indonesia (2014-2019) • Direktur Utama PT Risk Frontier (2012-2021) • Vice Rector Perbanas School of Economics (PERBANAS Institute) (2000-2003)	GRC Specialist for Banking & Financial Institutions
Seng Hyup Shin	Wakil Komisaris Utama	Laki-laki	54	Master of Administration di bidang Administration, KyungPook National University (1997)	• Global Growth Supporting Division Head (Managing Director) (2024-sekarang) • General Manager, KB Financial Group (2018- 2020) • Senior Deputy General Manager, KB Financial Group (2017) • Team Manager, KB Financial Group (2014-2016)	Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Nanang Supriyatno	Komisaris	Laki-laki	55	Master of Business Administration di bidang Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada (2023)	• Deputy Chief Executive Officer PT Bosowa Property Group (2017-2022) • Direktur Internal Audit Bosowa Group (2013-2022) • Direktur Utama PT Bosowa Beton Indonesia (2015-2018) • Direktur Risk Management PT Semen Bosowa Maros (2015-2017) • Recovery dan Restrukturisasi problem loan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (1994-2013)	Keuangan
Tippy Joesoef	Komisaris Independen	Laki-laki	60	Sarjana di bidang Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bandung (STIEB) (1990)	• Anggota Dewan Audit, Otoritas Jasa Keuangan (2023) • Independent Audit Committee, American International Assurance (AIA) Financial (2019-Present) • Chief GRC, Fazz Financial Group (2019-2022) • Executive Director- Country Risk Management Head, UOB Indonesia (2013-2016) • SVP Global Consumer Group, Citibank NA (2013) • SVP Risk Management, Bank Danamon (2011-2012) • Head of Country Operational Risk Management, Basel 2 and Enterprise Risk Management – Maybank (2005- 2011) • Head of Compliance for Consumer & Commercial Banking, ABN AMRO Bank (1999-2005) • Credit Operations Manager, Standard Chartered Bank (1991-1999)	Risk Management
Hae Wang Lee	Komisaris Independen	Laki-laki	56	Magister di bidang Hukum dari Yonsei University (1998)	• Member of Board of Directors Korean Association of Indonesia (2020-sekarang) • President Director LEENOH Consulting Indonesia (2019-sekarang) • Foreign Lawyer MR&Partners Law Firm at Jakarta (2015-2019) • Lawyer at APEX LLC Head of Jakarta Apex Office (2011-2014) • Lawyer at Law Firm C&K, LEX, APEX (2006-2011)	Hukum
Stephen Liestyo	Komisaris Independen	Laki-laki	60	S2 International Marketing, IPMI International Business School, Jakarta (2002)	• Presiden Komisaris, PT Sol Mitra Fintec (2016-2021) • Presiden Komisaris, PT Prismalink International (2014-2021) • Komisaris Independen PT. KiosOn Komersial Indonesia, Februari (2018 - 2019) • Presiden Komisaris PT Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance), (2010 - 2015) • Direktur Konsumer Banking, PT Bank Maybank Indonesia Tbk (2009-2013) • Komisaris BCA Finance (2000-2009)	Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Direksi						
Woo Yeul Lee	Direktur Utama	Laki-laki	60	• Master of International Economics dari Korea University (1990) • Bachelor Degree in Agricultural Economics dari Korea University (1998)	• Senior Executive Vice President & Chief Strategy Officer KB Financial Group (2022) • Senior Executive Vice President & Chief Human Resource Officer KB Financial Group (2021) • Senior Executive Vice President & Chief Information Technology Officer KB Financial Group (2020)	Keuangan
Robby Mondong	Wakil Direktur Utama	Laki-laki	56	• MBA Degree in Marketing, Woodbury University Burbank CA USA (1993) • Degree in Finance and Banking, National University San Diego CA USA (1992)	• SEVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2019 – 2021) • EVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2015 – 2019) • SVP Head of Sales and Distribution PT Bank CIMB Niaga Tbk (2013 – 2015)	Keuangan
Helmi Fahrudin	Direktur	Laki-laki	49	• Sarjana di bidang Ekonomi Akuntansi, Universitas Kristen Indonesia, (2003) • Diploma (D-3) di bidang Ekonomi Akuntansi, STIE Yogyakarta, (1997)	• Kepala SKAI (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk (2019- 2020) • Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan (Pejabat Eksekutif) PT Bank Bukopin Tbk, (2018-2019) • Anggota Dewan Pengawas, Dana Pensiun Bank Bukopin (2016-2020)	Keuangan
Dodi Widjajanto	Direktur	Laki-laki	58	• Magister Manajemen di bidang Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, (2002) • Sarjana di bidang Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Sebelas Maret, (1990)	• Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Bandung (2020) • Pemimpin Kantor Wilayah, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Wilayah Palembang (2018-2020) • General Manager Kantor Cabang Hong Kong PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Hong Kong (2016-2018)	Keuangan
Henry Sawali	Direktur	Laki-laki	56	• Masters Degree in Business Administration, National University of San Diego USA (1992) • Bachelor Degree in Finance, California State University – Fresno (1986)	• Head of Commercial and MSME Banking Credit PT Bank CIMB Niaga Tbk (2017-2022) • Senior Manager – SCO for Indonesia PT Bank ANZ Indonesia (2016-2017) • Senior Vice President – Head of Corporate Credit Risk, PT Bank OCBC NISP Tbk (2010-2016)	Keuangan

Nama	Jabatan	Jenis Kelamin	Usia (tahun)	Pendidikan	Pengalaman Kerja	Keahlian
Jung Ho Han	Direktur	Laki-laki	53	• Master of Science Management Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002) • Bachelor Degree in Business Administration, University of Korea (1999)	• Chief Financial Officer/General Manager, KB Securities Co., Ltd. (2017-2022) • Associate/Team Manager/Senior Deputy General Manager, KB Financial Group Inc. (2008-2017) • Associate of Strategic Planning Department / Branch, KB Kookmin Bank (1999-2006)	Manajemen
Jang Hyuk Im	Direktur	Laki-laki	49	• Master of Business Administration, Korea Advanced Institute of Science and Technology (2002) • Bachelor Degree in Electrical & Computer Engineering, Inha University, Korea (2002)	• Director, Investment Banking Group, KB Securities Co., Ltd (2021-2023) • Financial Planning Team Manager, KB Finansial Holdings (2019-2021) • Financial Planning Associate, KB Financial Holdings (2017-2019) • Senior Vice President, Strategic Planning Department, Hyundai Securities (2014-2016) • Senior Vice President, Strategic Planning Office, Hyundai Group HQ, (2011-2014) • Vice President, Strategic Planning Department, Hyundai Securities (2001-2011)	Keuangan



KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan disesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bank Umum. Keputusan terkait remunerasi juga dibahas dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahunnya. Selain itu, sistem remunerasi dan kesejahteraan pekerja dievaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam evaluasi ini antara lain adalah:
1. Kinerja Keuangan Bank;
2. Kompetensi dan kinerja pekerja;
3. Praktik remunerasi yang berlaku di pasar.

KB Bank menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem remunerasi yang adil, kompetitif, dan seimbang bagi seluruh karyawan. Bank ini menjamin bahwa tidak ada karyawan yang menerima kompensasi di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Selain itu, KB Bank secara rutin meninjau dan memperbarui kebijakan remunerasi agar sesuai dengan perkembangan industri serta strategi bisnis perusahaan. Langkah ini diambil untuk memastikan sistem remunerasi tetap relevan dan sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Remunerasi Dewan Komisaris

Besaran remunerasi serta fasilitas lain yang diberikan bagi Dewan Komisaris akan ditetapkan di dalam RUPS Tahunan oleh Pemegang Saham dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada RUPS;
2. RUPS memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran remunerasi;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan kajian dan evaluasi untuk menentukan remunerasi bagi Dewan Komisaris;
4. Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
5. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas usulan Komite Remunerasi dan Nominasi untuk kemudian diusulkan melalui surat kepada Pemegang Saham Pengendali;
6. Surat Penetapan oleh Pemegang Saham Pengendali kepada Dewan Komisaris;
7. Surat Dewan Komisaris kepada Direksi tentang Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.

Indikator Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:
1. Remunerasi yang berlaku pada industri perbankan dan skala usaha dari KB Bank dalam industri perbankan;
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja KB Bank;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
4. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
1	Honorarium	Sesuai dengan ketentuan Skala Honorarium Dewan Komisaris setelah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dana atau ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

No.	Jenis Remunerasi/Fasilitas	Keterangan
2	Tunjangan Tunjangan Rumah & Utilities Tunjangan Kendaraan Tunjangan Hari Raya Tunjangan Kesehatan Tunjangan Kacamata Bantuan Pendidikan	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/016- DKOM/XI/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan Benefit lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan Benefit lainnya bagi Direksi.
3	Fasilitas Fasilitas Pulsa Fasilitas Telepon Genggam Uang Saku Perjalanan Dinas Asuransi Jiwa Asuransi Purna Jabatan Bantuan Hukum	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001- DKOM/II/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan Benefit lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan Benefit lainnya bagi Direksi.
4	Tantiem/Bonus/Insentif	Sesuai dengan Keputusan RUPS
5	Apresiasi Selesai Masa Kerja	Diberikan sesuai ketentuan internal sebagai berikut: • Bagi Dewan Komisaris merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001- DKOM/II/2021 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium dan Benefit lainnya bagi Dewan Komisaris. • Bagi Direksi merujuk kepada SK Dewan Komisaris No. SKEP/001-DKOM/II/2023 tentang Penyempurnaan Kebijakan Remunerasi Berupa Honorarium, Remunerasi Variabel dan Benefit lainnya bagi Direksi.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi per masing-masing Dewan Komisaris

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Nominal (dalam Rp)
Honorarium	7	7,575,468,728
Tunjangan		
Tunjangan Rumah & Utilities	7	1,515,093,750
Tunjangan Kendaraan	7	1,136,320,298
Tunjangan Hari Raya	6	861,904,730
Tunjangan Kesehatan	6	225,786,958
Tunjangan Kacamata	2	5,000,000
Bantuan Pendidikan	7	731,299,188
Fasilitas		
Fasilitas Pulsa	7	97,988,188
Fasilitas Telepon Genggam	2	24,000,000
Uang Saku Perjalanan Dinas	4	43,565,300
Asuransi Jiwa	0	0
Asuransi Purna Jabatan	2	1,152,000,000
Bantuan Hukum	0	0
Tantiem/Bonus/Insentif	0	0
Apresiasi Selesai Masa Kerja	0	0
Jumlah		13,368,427,140

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Dewan Komisaris

Total Remunerasi	Jumlah Dewan Komisaris
Di atas Rp2 Miliar	1
Di atas Rp1 Miliar-Rp2 Miliar	5
Di atas Rp500 juta-Rp1 Miliar	1
Rp500 juta ke bawah	0

Opsi Saham bagi Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan pada 20 April 2005, para pemegang saham menyetujui penerbitan saham opsi untuk anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Perseroan yang memenuhi persyaratan. Namun demikian, di tahun 2024, Perseroan tidak memiliki program opsi saham.

Remunerasi Direksi

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Besaran remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan keputusan RUPS dan ketentuan yang berlaku, Perseroan akan memperhatikan target pencapaian profit, kemampuan menjaga keberlangsungan dan pengembangan usaha yang dilakukan sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi kemudian mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian diusulkan pada RUPS.

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator yang digunakan dalam menentukan Remunerasi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. *Key Performance Indicator* (KPI) atau hasil penilaian kinerja dan prestasi Dewan Komisaris;
2. Kinerja dan kemampuan keuangan Perseroan;
3. Perkembangan bisnis Bank;
4. Hasil perbandingan remunerasi industri Perbankan;
5. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perseroan.

Jumlah Nominal/Komponen Remunerasi per masing-masing Direksi

Peraturan OJK No. 45/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 40/SEOJK.03/2016 menetapkan pedoman mengenai pemberian remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi Bank Umum. Pengungkapan mengenai komponen remunerasi ini menjadi elemen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola perusahaan.

Komponen remunerasi untuk Dewan Komisaris dapat terdiri dari berbagai elemen, termasuk gaji pokok, insentif, tunjangan, dan fasilitas lainnya. Jumlah nominal atau besaran komponen remunerasi ini biasanya disesuaikan dengan tanggung jawab dan kontribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris, serta kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

Informasi terkait detail komponen remunerasi tersebut biasanya disampaikan dalam laporan tahunan atau laporan keberlanjutan Perseroan. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada pemangku kepentingan mengenai pengelolaan remunerasi perusahaan, serta memastikan bahwa pemberian remunerasi dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip tata kelola yang baik.

Jumlah nominal/komponen remunerasi Direksi adalah sebagai berikut:

Jumlah Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Orang	Nominal (dalam Rp)
Honorarium	8	19,188,666,667
Tunjangan	0	0
Tunjangan Utilities	8	3,837,733,333
Tunjangan Hari Raya	7	2,028,300,000
Tunjangan Kesehatan	7	541,384,975
Tunjangan Kacamata	5	15,000,000
Bantuan Pendidikan	8	1,900,250,000
Tunjangan Cuti	7	1,695,250,000
Tunjangan Pendapatan Hari Tua	8	5,372,826,667
Tunjangan Jaminan Asuransi Jiwa	0	0
Fasilitas		
Fasilitas Pulsa	0	0
Fasilitas Telepon Genggam	2	24,000,000
Fasilitas *Housing Loan*	0	0
Fasilitas *Car Loan*	3	1,091,296,190
Fasilitas Perjalanan Dinas	-	-
Fasilitas Kendaraan	-	-
Fasilitas *Membership*	-	-
Asuransi Purna Jabatan	2	1,152,000,000
Tantiem/Bonus/Insentif	6	8,997,787,608
Apresiasi Selesai Masa Kerja	2	2,615,000,000
Jumlah		**48,459,495,440**

Tabel Kelompok Jumlah Remunerasi Direksi

Total Remunerasi	Jumlah Direksi
Di atas Rp2 Miliar	7
Di atas Rp1 Miliar-Rp2 Miliar	1
Di atas Rp500 juta-Rp1 Miliar	0
Rp500 juta ke bawah	0

Kebijakan Suksesi Direksi

KB Bank telah menerapkan program pengembangan karyawan secara berkelanjutan untuk mempersiapkan regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Program ini menyasar para pegawai potensial yang termasuk dalam *Talent Pool*, memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau aktivitas terkait manajemen, strategi bisnis, perencanaan strategis, analisis risiko dan potensi bisnis, analisis kinerja operasional dan keuangan, serta program sejenis lainnya.

Dengan adanya program ini, Bank memiliki cadangan internal yang dapat dipertimbangkan sebagai calon anggota Direksi jika dibutuhkan, sesuai dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi. Proses nominasi dilakukan secara transparan dan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan Bank, serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain kandidat internal, Bank juga dapat mempertimbangkan kandidat eksternal yang memenuhi syarat, seperti yang diperoleh melalui referensi dari Pemegang Saham atau Pengurus Bank, atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga lainnya. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2019 tentang Pedoman Nominasi, sehingga memungkinkan Bank untuk memiliki beragam opsi dalam memilih calon anggota Direksi yang terbaik.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Uraian	2024	2023
Gaji karyawan tertinggi dan terendah	**77:1**	68:1
Gaji Direksi tertinggi dan terendah	**1.68:1**	1,69:1
Gaji Komisaris tertinggi dan terendah	**1,39:1**	1,39:1
Gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi	**1,46:1**	1,46:1

Remunerasi yang Bersifat Variabel Bagi Karyawan

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun oleh Karyawan			
	2024		2023	
	Orang	Rp (juta)	Orang	Rp (juta)
Jumlah	2.436	26,135,613,636	2.340	11,680,412,056

Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan

Total remunerasi variabel yang ditangguhkan, yang terdiri dari pembayaran dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen berbasis saham yang diterbitkan oleh KB Bank, dan akan diterapkan untuk pembayaran tahun 2024, adalah sebagai berikut:

Jenis Remunerasi	Jumlah (dalam IDR atau % dari Remunerasi Variabel)	Skema Pembayaran
Tunai yang Ditangguhkan	1,328,581,760(10% dari Remunerasi Variabel)	Dibayarkan dalam 3 tahap selama 3 tahun (2025 – 2027)
Saham KB Bank	33,758,906 lembar saham (20% dari Remunerasi Variabel)	Dibayarkan dalam 3 tahap selama 3 tahun (2025 – 2027)

Total Pesangon yang Diberikan untuk Karyawan yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal yang Dibayarkan

Jumlah nominal Kompensasi yang dibayarkan	2024	2023
Rp Miliar	**12,61**	22,62
Jumlah Orang	**55**	490



Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Pelaksanaan rapat Dewan Komisaris didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Anggaran Dasar Perseroan. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Direksi.

Rapat Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris No. 015 Tahun 2019, mengatur ketentuan rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi antara lain sebagai berikut:

1. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, atau rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang atau lebih anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Direksi;
3. Selain hal tersebut Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala wajib mengadakan rapat bersama paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
4. Rapat Dewan Komisaris tersebut wajib dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun;
5. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau salah seorang anggota Dewan Komisaris melalui Sekretaris Dewan Komisaris dengan mencantumkan agenda, tanggal, waktu dan tempat rapat;
6. Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir;
7. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
8. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam notulen rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
9. Risalah rapat Dewan Komisaris dicatat dan didokumentasikan oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan/atau Sekretaris Perusahaan.

Rapat Internal Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris KB Bank telah mengadakan rapat internal sebanyak 15 (lima belas) kali. Rata-rata tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut mencapai 90%. Adapun rincian agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	15/01/2024	• Persetujuan atas Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi terkait Kandidat Wakil Komisaris Utama • Persetujuan Paket Purna Jabatan Direktur Keuangan	12 Peserta
2	22/01/2024	• Persetujuan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi untuk Paket Purna Jabatan Direktur Keuangan	14 Peserta
3	01/02/2024	• Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit PT KB Finansia Multifinance • Persetujuan Perpanjangan Fasilitas Kredit PT KB Valbury Sekuritas.	20 Peserta
4	22/02/2024	• Pembahasan Persetujuan Penyesuaian RBB 2024-2026	20 Peserta
5	01/04/2024	• Pembahasan Rencana Pemutusan Kontrak Jasa Audit KAP PWC dan Penunjukkan KAP yang Baru	16 Peserta
6	12/04/2024	• Persetujuan Atas Penunjukkan KAP Baru	20 Peserta
7	17/05/2024	• Persetujuan Perubahan Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih PT Bank KB Bukopin Tbk. • Pembahasan Perlindungan Konsumen Bank KB • Pembahasan Layanan Pengaduan Nasabah Bank KB	24 Peserta

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
8	20/06/2024	• Pembahasan Evaluasi Kontrak BOD dan BOC • Pembahasan Paket Purna Jabatan BOD dan BOC • Pembahasan Anggaran Remunerasi BOD dan BOC 2024 • Pembahasan Perubahan Remunerasi Tenaga Kerja Asing • Persetujuan Revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2024-2026 • Pembahasan Realisasi Kinerja Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk bulan Mei 2024 • Pembahasan *Update* Penyelesaian Project NGBS • Pembahasan *Update* Penyelesaian Kasus Pembobolan Rekening Antar Kantor (RAK)	24 Peserta
9	22/08/2024	Persetujuan Perpanjangan Pinjaman PT Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF)	17 Peserta
10	19/09/2024	Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit Baru ke PT KB Bukopin Finance	18 Peserta
11	24/10/2024	Persetujuan Perubahan Kebijakan Pengelolaan Alih Daya PT Bank KB Bukopin Tbk	14 Peserta
12	19/11/2024	• Permohonan Persetujuan untuk Pembaruan Kebijakan AML, PPT, dan CPF • Pembahasan Laporan Kegiatan Penerapan AML, CFT, dan CPF	16 Peserta
13	21/11/2024	• Permohonan Persetujuan Secara Prinsip dan Tambahan Biaya Untuk Melanjutkan Proyek SHINE • Pembahasan *Update* Kemajuan Proyek SHINE dan Rencana Pelaksanaan	37 Peserta
14	28/11/2024	• Pembahasan Penyesuaian Peran dan Tanggung Jawab Direksi Berdasarkan Pengembangan Struktur Organisasi yang Baru	40 Peserta
15	12/12/2024	Persetujuan atas Penyesuaian Tugas dan Tanggung Jawab Direktur sehubungan dengan Pengembangan Struktur Organisasi Baru	18 Peserta

Rapat Gabungan

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris KB Bank telah mengadakan rapat dengan mengundang Direksi sebanyak 6 (enam) kali. Adapun rincian agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	22/01/2024	Laporan Pelaksanaan RUPSLB Persetujuan Pimpinan Rapat	26 Peserta
2	24/01/2024	• Laporan dan Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan 4 Tahun 2023 • Laporan dan Pembahasan *Risk Base Bank Rating* (RBBR) Semester II 2023 • Laporan dan Diskusi Proyek *Rebranding*	23 Peserta
3	25/04/2024	Pembahasan Realisasi Kinerja Perusahaan Triwulan I tahun 2024	32 Peserta
4	24/06/2024	Persetujuan Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2024	25 Peserta
5	31/07/2024	• Penetapan *Setting* Target KPI Perusahaan • Persetujuan Penggantian *Master Contractor* dan Perpanjangan Waktu Proyek SHINE • Realisasi Kinerja Perusahaan Juni 2024 & RBBR Semester I 2024	33 Peserta
6	28/11/2024	• Permohonan Persetujuan RBB PT Bank KB Bukopin Tbk 2025-2027 • Permohonan Persetujuan atas Rencana *Recovery* dan Rencana Resolusi KB Bank	40 Peserta

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris Tahun 2024

Rapat Dewan Komisaris selama 2024 dilaksanakan sebanyak 15 (lima belas kali) kali. Sedangkan, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi selama 2024 dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali. Adapun frekuensi Kehadiran Rapat Dewan dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi sebagai berikut:

No.	Nama	Rapat Dewan Komisaris			Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi		
		Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Tingkat Kehadiran
1.	**Jerry Marmen**	15	15	100%	6	6	100%
2.	**Seng Hyup Shin***	13	9	69%	6	5	83%
3.	**Nanang Supriyatno**	15	15	100%	6	6	100%
4.	**Tippy Joesoef**	15	15	100%	6	6	100%
5.	**Hae Wang Lee**	15	12	92%	6	6	100%
6.	**Stephen Liestyo**	15	14	93%	6	6	100%
7.	**Sukriansyah S. Latief****	8	8	100%	4	4	100%
8.	**Eugene K. Galbraith****	8	5	62%	4	3	75%

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK. 03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Tidak lagi menjabat sebagai Komisaris Independen per 28 Juni 2024

Rapat Direksi

Rapat Direksi merupakan pertemuan yang diadakan oleh Direksi untuk mengambil keputusan bisnis, menilai kinerja Perusahaan, serta menetapkan kebijakan dalam pengelolaan Perseroan. Pelaksanaan Rapat Direksi berlandaskan pada prinsip-prinsip berikut:

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dipimpin oleh Direktur Utama;
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
   a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;
   b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Anggaran Dasar;
5. Pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dan/atau pengambilan suara, akan dianggap sah apabila rapat dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Direksi;
6. Risalah rapat dibuat oleh Sekretaris Perusahaan dan ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir untuk disimpan dan tersedia sewaktu-waktu diminta oleh Dewan Komisaris;
7. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat harus dicantumkan di dalam risalah rapat beserta alasannya.

Rapat Internal Direksi

Sepanjang tahun 2024, Direksi KB Bank telah mengadakan rapat internal sebanyak 51 (lima puluh satu) kali. Adapun rincian agenda rapat adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	8 Januari 2024	Laporan *Update* Data Pending Audit PWC	49 Peserta
2	15 Januari 2024	• Persetujuan Bulk sale ABS III • Persetujuan Komplain Nasabah • Hasil *Review* Penetapan Restrukturisasi Covid 19 Debitur PT. Bintang Gasing Lestari (Tindak Lanjut Temuan OJK)	45 Peserta
3	22 Januari 2024	• Persetujuan dan Laporan RUPSLB (Radirkom) • Persetujuan RBBR 2023 • Laporan Kinerja Keuangan Desember 2023 • Laporan Progres Audit Januari 2024	49 Peserta
4	29 Januari 2024	• Persetujuan Laporan ICAAP berdasarkan *Profile* Risiko Term II 2023 • Laporan Progres Audit Januari 2024 (Lanjutan BOD *Meeting* 22 Januari 2024)	19 Peserta
5	5 Februari 2024	• Persetujuan Skema Insentif SPC *Management* Aset • Laporan dan Persetujuan Program Insentif Swamitra	28 Peserta
6	12 Februari 2024	• Persetujuan Proposal Proses Rekrutmen • Laporan Progres *Bad Loan Campaign*	36 Peserta

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
7	19 Februari 2024	• Persetujuan Revisi RBB 2024-2026 • Laporan Kinerja Keuangan Januari 2024 • Laporan Progres NGBS dan Cleansing Data	54 Peserta
8	20 Februari 2024	Persetujuan Revisi RBB 2024-2026 (Persetujuan Ulang)	22 Peserta
9	26 Februari 2024	• Persetujuan Fasilitas Pinjaman US$ 300 Juta dari Korea Development Bank ("KDB") Cabang Singapura. • Persetujuan Proses Rekrutmen • Laporan Progres Audit Februari 2024	34 Peserta
10	4 Maret 2024	Update Progres Shine kepada BOD	29 Peserta
11	18 Maret 2024	• Langkah Pengurangan LAR akibat berakhirnya Restrukturisasi Covid 19 • Kerjasama *Cardless withdrawal* via Indomaret • *Kick off resourcing audit* • Laporan Progres Audit Maret 2024	53 Peserta
12	25 Maret 2024	Laporan Kinerja Keuangan Februari 2024	43 Peserta
13	22 April 2024	• Performa Finansial Kuartal 1 2024 • *Activity* dan Pembentukan TFT Data *Cleansing* • Serah Terima Debitur NPL Kredit Retail • Progress Audit April 2024	42 Peserta
14	29 April 2024	• Laporan *Budget* Marcomm Kuartal 1 2024 dan *Sponsorship* Konser YG K-Pop • Laporan Sistem Administrasi & Pembayaran Kredit	49 Peserta
15	06 Mei 2024	• Pedoman Penanganan LAR • Report Progres Isu *Loan Administration*: Mortgage & Perpanjangan Kredit Modal Kerja *Wholesale* & SME.	49 Peserta
16	13 Mei 2024	Persetujuan Rencana RUPST Tahun Buku 2023	11 Peserta
17	15 Mei 2024	Laporan Perkembangan Aktivitas Financial Audit 2023 oleh KAP Moore	36 Peserta
18	20 Mei 2024	• Analisa Penurunan SME Normal Loan • Laporan Kinerja Keuangan April 2024	54 Peserta
19	27 Mei 2024	Laporan *Legal Case* Balikpapan	22 Peserta
20	03 Juni 2024	• Persetujuan & Laporan Status terkini dari perbedaan *Major account* antara GL dan *product ledger* serta *arrangement* plan • Persetujuan Program Diskon LAR, NPL dan Hapus Buku • Laporan perkembangan *Paywatch* • Laporan Rencana penyampaian Panggilan RUPST Tahun 2024 • Laporan Progres Audit Mei 2024	49 Peserta
21	05 Juni 2024	• Persetujuan Hasil KPI 2H23 &KPI *Policy & Scorecard* 2024 • Laporan *Legal Case* Balikpapan	20 Peserta
22	10 Juni 2024	• Laporan Marcom *Budget* April 2024 • Laporan *Update Digital Channel* (KB Star & PPOB)	35 Peserta
23	12 Juni 2024	• Persetujuan Kebijakan & *Scorecard* KPI 2024 • Persetujuan Revisi RBB 2024-2026	20 Peserta
24	19 Juni 2024	• Persetujuan dan Laporan Portofolio AYDA & Skema Insentif • Persetujuan Revisi RBB 2024-2026	33 Peserta
25	24 Juni 2024	• Persetujuan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (Radirkom) • Laporan Kinerja Keuangan Mei 2024	51 Peserta
26	26 Juni 2024	• Persetujuan Terkait Pembalikan Cadangan Biaya • Persetujuan Metodologi Normalisasi Data Pinjaman Eksisting untuk Tujuan Migrasi NGBS • Laporan Latihan Budaya Kredit *Level Intermediate* • Laporan Progres Audit Mei 2024	27 Peserta
27	1 Juli 2024	• Persetujuan Penerbitan KB Bank Global Bank US$ 300 Juta tahun 2024 • Laporan Update Progress Serah Terima Debitur NPL Kredit Retail	40 Peserta
28	3 Juli 2024	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi	10 Peserta

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
29	8 Juli 2024	• Persetujuan Draft Tanggapan atas *Management Letter* KAP Moore tahun 2023 • Laporan Status Terkini dari Laporan Informasi Penting • Laporan Rekening Dana Nasabah (RDN) • Laporan Hasil Audit BI 2024	84 Peserta
30	12 Juli 2024	Persetujuan Pelunasan Pinjaman Via Cessie PT Mandiri Madura Barat	12 Peserta
31	15 Juli 2024	Laporan Eksekusi Gugatan Waryono Karno (terkait Penyelesaian Aset Kembang 88) dan Permohonan Persetujuan Pengajuan AJB dan Pengajuan Upaya Hukum untuk Peninjauan Kembali	10 Peserta
32	22 Juli 2024	• Persetujuan RBBR Semester 1 2024 • Laporan Kepatuhan • Laporan PPOB Update: KB Bank x PLN • Laporan Progres Bulanan SKAI	32 Peserta
33	5 Agustus 2024	• Implementasi Perlindungan Data Personal (PDP) • *Treasury Borrowing Status*	36 Peserta
34	12 Agustus 2024	• Laporan *Kick Off Meeting* KAP Moore 2024 • Pembahasan Prosedur dan Alur Rapat Dewan Komisaris & Komite • Laporan Bulanan Anggaran Marcom & Insentif Mei-Juli 2024	113 Peserta
35	19 Agustus 2024	Laporan Kinerja Keuangan Juli 2024	39 Peserta
36	26 Agustus 2024	• Laporan Progres Bulanan Audit Juli 2024 • Laporan KBees, *Video company profile* • Laporan Strategi Penanganan Perkara Balikpapan (Deposito Fiktif) dan Pelaksanaan Isi Putusan	22 Peserta
37	28 Agustus 2024	Persetujuan Hasil Audit Interim Juni 2024	41 Peserta
38	18 September 2024	Laporan Pelaksanaan Penyusunan RBB 2025 - 2027	21 Peserta
39	23 September 2024	• Laporan Kinerja Keuangan Agustus 2024 • Persetujuan Perubahan Kebijakan Tentang Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit Persetujuan *Rebranding*: Perubahan Nama Entitas • Laporan Progres Audit Agustus 2024	73 Peserta
40	30 September 2024	Persetujuan Development Local Currency Transaction Indonesia - Korea Selatan	23 Peserta
41	21 Oktober 2024	Laporan Kinerja Keuangan September 2024	43 Peserta
42	28 Oktober 2024	• Laporan Progres Bulanan Audit Juli 2024 • Laporan Progres Shine	23 Peserta
43	11 November 2024	• Persetujuan RBB 2025-2027 • Persetujuan Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun Buku 2021 • Persetujuan Sanksi Denda Pelaporan	35 Peserta
44	18 November 2024	• Laporan RBB 2025-2027 • Laporan Kinerja Keuangan Oktober 2024 • Persetujuan Penyesuaian Struktur Organisasi Unit Bisnis • Persetujuan *Recovery Plan* dan *Resolution Plan* • Persetujuan Prinsip dan Biaya Tambahan untuk Melanjutkan Proyek Shine	68 Peserta
45	25 November 2024	• Persetujuan RBB 2025-2027 • Persetujuan Recovery Plan dan Resolution Plan Laporan Progres Audit Oktober 2024 & Rencana Audit 2025	29 Peserta
46	2 Desember 2024	• Persetujuan *Revamp* Visi dan Misi KB Bank • Laporan *Update* Kepatuhan • Laporan Kegiatan Implementasi AML, CFT dan CPF	21 Peserta
47	9 Desember 2024	• Persetujuan Rencana Paparan Publik dan Materi Presentasi • Laporan Sosialisasi Rancangan Peraturan OJK terkait Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan	20 Peserta
48	16 Desember 2024	• Laporan Kinerja Keuangan November 2024 • Laporan Progres Audit	46 Peserta
49	18 Desember 2024	Persetujuan Pencegahan dan Penanggulangan Denda Regulator	15 Peserta

No.	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
50	23 Desember 2024	• Persetujuan SME Banking Deep Change • Laporan Bulanan Marcom dan *Incentive Budget* September- November 2024	41 Peserta
51	30 Desember 2024	Persetujuan Kebijakan *Internal Control Over Financial Report* PT Bank KB Bukopin, Tbk	20 Peserta

Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Direksi Tahun 2024

No.	Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Persentase Kehadiran (%)
1.	**Woo Yeul Lee**	51	46	90.2%
2.	**Robby Mondong**	51	42	82.4%
3.	**Helmi Fahrudin**	51	46	90.2%
4.	**Dodi Widjajanto**	51	45	88.2%
5.	**Yohanes Suhardi****	26	19	73.1%
6.	**Henry Sawali**	51	47	92.2%
7.	**Young Eun Moon****	26	16	61.5%
8.	**Jung Ho Han**	51	43	84.3%
9.	**Jang Hyuk Im***	48	43	89.6%

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
**) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur per 28 Juni 2024



Pemegang Saham Utama Dan Pengendali

Pemegang saham utama dan pengendali KB Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd., sebuah perusahaan perbankan asal Korea Selatan. Kookmin Bank sendiri merupakan bagian dari KB Financial Group, salah satu grup keuangan terbesar di negara tersebut.

Sebagai bank berbasis di Korea Selatan, Kookmin Bank mencatatkan pencapaian *net income* terbesar di Korea sepanjang tahun 2019. Saham KB Financial Group telah terdaftar di Korea Exchange (KRX) sejak 10 Oktober 2008 dan di *New York Stock Exchange* (NYSE) sejak 29 September 2008. Hingga 31 Desember 2019, total aset KB Financial Group mencapai KRW 789,6 triliun (sekitar Rp9.326 triliun).

Perusahaan itu terus memperluas jangkauan globalnya dengan jaringan yang tersebar di berbagai negara, termasuk Inggris, Amerika Serikat, India, Tiongkok, Hong Kong, Jepang, dan Selandia Baru. Di kawasan Asia Tenggara, ekspansi Kookmin mencakup Kamboja, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Indonesia.

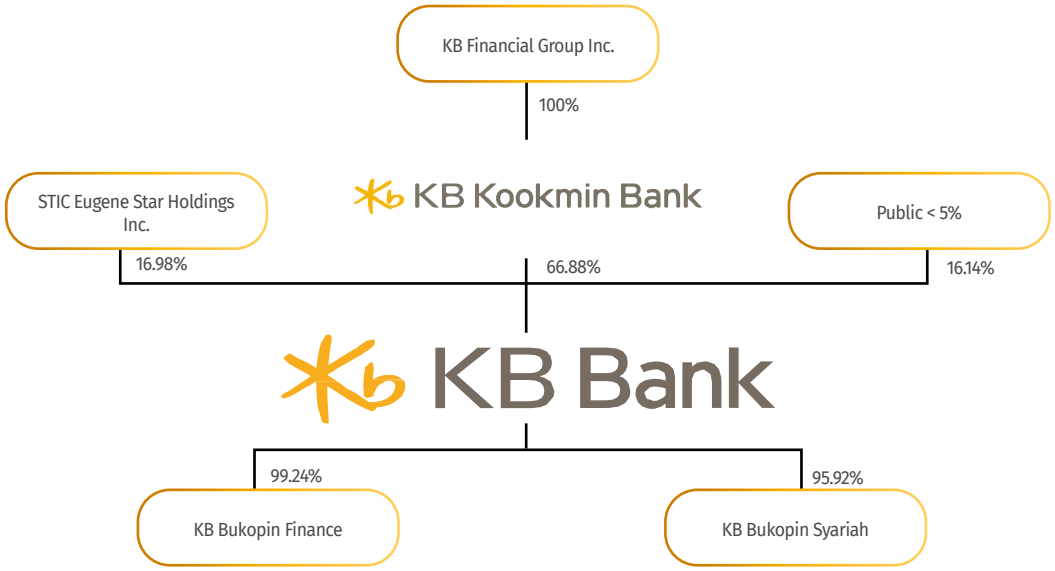

ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris KB Bank memiliki organ pendukung yakni Komite-komite yang berada di bawahnya, meliputi:
1. Komite Audit;
2. Komite Remunerasi dan Nominasi;
3. Komite Pemantau Risiko;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Setiap komite tersebut diketuai oleh Komisaris Independen guna menjamin objektivitas dan independensi dalam pengambilan keputusan. Pelaksanaan tugasnya didasarkan pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite yang selaras dengan regulasi di Indonesia serta praktik terbaik yang terus diperbarui secara berkala.

Komite Audit

Komite Audit dibentuk untuk mendukung Dewan Komisaris dalam mengawasi efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal serta berperan aktif dalam memastikan adanya tindakan perbaikan terhadap permasalahan Bank yang berpotensi mengurangi efektivitas sistem tersebut.

Pembentukan Komite Audit didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia, antara lain:
1. Ketentuan Bursa Efek Jakarta Nomor-Kep-305/BEJ/07 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-A Tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat;
2. Peraturan Bapepam No.IX.I.5 tanggal 24 September 2004 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
3. POJK No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
4. POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
5. POJK No. 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bank Umum;
6. POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan;
7. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
8. SEOJK No. 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan;
9. POJK No. 01/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab para anggota Komite. Piagam ini telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002 Tahun 2024 tentang Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) PT Bank KB Bukopin Tbk.

Piagam tersebut mencakup aturan terkait keanggotaan, tugas dan tanggung jawab, kewenangan, pelaporan, serta pelaksanaan rapat-rapat Komite Audit. Semua hal tersebut dijelaskan lebih rinci dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit.

Kriteria Anggota Komite Audit

Anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:
1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
2. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir kecuali Komisaris Independen;
3. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa assurance, jasa *nonassurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
4. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis Perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
6. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Struktur Keanggotaan dan Keahlian Komite Audit

1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Perseroan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
2. Jumlah anggota dan komposisi keanggotaan Komite Audit PT Bank KB Bukopin Tbk adalah sebagai berikut:
   a. Komite Audit paling sedikit terdiri dari 1 (satu) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan 2 (dua) orang dari pihak independen dari luar Perseroan, dimana 1 (satu) orang memiliki keahlian di bidang keuangan dan akuntansi minimal 5 (lima) tahun dan 1 (satu) orang yang memiliki keahlian di bidang hukum dan atau perbankan paling kurang 5 (lima) tahun;
   b. Komite audit diketuai oleh Komisaris Independen merangkap sebagai anggota;
   c. Ketua Komite Audit hanya dapat merangkap jabatan menjadi Ketua Komite lain paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;
   d. Salah seorang anggota Komite Audit ditunjuk sebagai Sekretaris Komite;
   e. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilaporkan kepada OJK dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian;
   f. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud diatas dimuat dalam halaman (*website*) bursa dan halaman Perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Mengacu kepada Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit dijelaskan mengenai masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) Periode berikutnya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Audit

Keanggotaan Komite Audit yang telah disahkan melalui Surat Keputusan SK No. 107 tahun 2024 tanggal 12 September 2024 , memiliki susunan dan jumlah anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di KB Bank	Keahlian	Periode
Stephen Liestyo	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2024-2027
Tippy Joesoef	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG, Manajemen Risiko dan Audit Keuangan	2023-2024
Dewi Anggesty Sah Bandar	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Audit Keuangan	2022-2025
Jacobus Sindu Adisuwono	Anggota	Pihak Independen	Perbankan dan Audit Keuangan	2022-2025

Profil Anggota Komite Audit

Profil Stephen Liestyo dan Tippy Joesoef dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil anggota yang merupakan pihak independen adalah sebagai berikut:

Dewi Anggesty Sah Bandar
Anggota Komite *Audit* (Pihak Independen)

Usia	59 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bekasi
Riwayat Pendidikan	• Sarjana (Ir) Ekonomi Pertanian (Agribisnis), Institut Pertanian Bogor (1988) • Master Management (MM) in Finance, Universitas Gadjah Mada (1993)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Manajemen Kualitas Biz Retail Banking - BTPN (2012-2017); • Komisaris Independen PT DMS Modal Ventura (2019-sekarang); • Mitra Senior PT INOFIN Consulting (2018-sekarang).
Jabatan Lainnya	• Komisaris Independen PT DMS Modal Ventura (2019-sekarang) • Senior Partner PT INOFIN Consulting (2018- sekarang)

Dewi Anggesty Sah Bandar
Anggota Komite *Audit* (Pihak Independen)

Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023
Kualifikasi	Perbankan dan Audit Keuangan

Jacobus Sindu Adisuwono
Anggota Komite Audit (Pihak Independen)

Usia	62 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan
Riwayat Pekerjaan	• Sekretaris Jenderal Ikatan Auditor Intern Bank sebagai asosiasi profesi (2011-2014) • Ketua Umum Ikatan Auditor Intern Bank (2014-2017); • Anggota Dewan Pengawas - Ikatan Auditor Intern Bank (2017- 2020); • Ketua Komite Audit The Institute of Internal Auditors Indonesia (2018-saat ini).
Jabatan Lainnya	• Komisaris PT Asuransi Umum BCA (Agustus 2021-sekarang) • Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Bank Ina Perdana, Tbk. (2021-sekarang) • Anggota Komite Audit PT Bank BCA Syariah (2017-sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0040 Tahun 2023 Tanggal 30 Maret 2023
Kualifikasi	Perbankan dan Audit Keuangan

Sertifikasi yang Dimiliki Anggota Komite

Komite Audit terus berupaya meningkatkan standar profesionalisme anggotanya melalui berbagai program sertifikasi dan pelatihan. Dengan mengikuti sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional, anggota Komite Audit dapat memastikan kompetensinya selalu terjaga. Berikut adalah daftar sertifikasi yang telah diperoleh hingga tahun 2024.

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Audit
Stephen Liestyo	Ketua	Risk Management - Qualification VI
Tippy Joesoef	Anggota	Risk Management - Qualification VI
Dewi Anggesty Sah Bandar	Anggota	Risk Management - Qualification VII Qualification VI KKNI Audit Manager
Jacobus Sindu Adisuwono	Anggota	Risk Management - Qualification VI Certification in Audit Committee Practices

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Stephen Liestyo (Ketua)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive* • *Webinar* FKDKP	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • IRPA & BSMR • Oppa Academy • Rinto Teguh • FKDKP

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Tippy Joesoef (Anggota)	*Training dan Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Ujian SMR J6 (Komisaris) • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 27/09/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • LSPP • Oppa Academy • Rinto Teguh
Dewi Anggesty Sah Bandar (Anggota)	*Training dan Workshop*	• SKAI *Workshop Refresher* RKA • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Rinto Teguh
Jacobus Sindu Adisuwono (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • SKAI *Workshop Refresher* RKA • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • Rinto Teguh

Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, atau kepentingan dengan Perseroan, Dewan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham. Komite Audit juga tidak diperbolehkan merangkap sebagai anggota komite lainnya. Independensi ini diatur dalam Peraturan OJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum untuk memastikan bahwa anggota Komite Audit dapat memberikan pendapatnya secara bebas tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau eksternal dalam menjalankan tugasnya.

Aspek Independensi	Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI);
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
8. Melakukan penelaahan pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
9. Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan;
10. Menilai kecukupan pengendalian intern;
11. Melakukan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit

Komite Audit memiliki kewenangan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, meliputi:
1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Bank tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Perusahaan yang diperlukan;
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Tanggung Jawab Komite Audit dalam Pemberian Rekomendasi atas Penunjukan dan Pemberhentian Auditor Eksternal

Komite Audit senantiasa memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya. Selain itu, Komite Audit juga mendukung tugas Dewan Komisaris dengan memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa audit.

Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite Audit dan dihadiri oleh seluruh anggotanya. Tata cara pelaksanaan rapat mengacu pada Pedoman Kerja Komite Audit. Rapat diselenggarakan setidaknya sekali dalam sebulan, dengan keputusan yang diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau pemungutan suara mayoritas. Setiap keputusan didokumentasikan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit sebelum disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit KB Bank telah menyelenggarakan rapat sebagaimana berikut (komposisi Komite Audit sesuai SK No. 107 tahun 2024 tanggal 12 September 2024) :

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith*	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
26/01/2024	• Pembahasan Laporan Rekonsiliasi Selisih ATM. • Pembahasan Program Kerja Divisi HC Berdasarkan Hasil *Audit Rating Unsatisfactory* • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023	√	√	√	√	√
23/02/2024	• Pembahasan *Update* Laporan Tindak Lanjut atas *Management Letter* KAP Crowe 2022 • Pembahasan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2023 • Pembahasan Rencana Kerja *Quality Assurance* Tahun 2024 • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 12 Februari 2024	√	√	x	√	√
20/03/2024	Pembahasan Update Progress Audit oleh KAP PWC Report	√	√	√	√	√
22/03/2024	• Pembahasan Status, Konsep dan Progress Data Migrasi Terhadap NGBS *Project.* • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 15 Maret 2024	√	√	√	√	√
28/03/2024	• Pembahasan *Audit Delay* Pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. • Diskusi Audit Progress 2023 dan *Next Plan*	√	√	√	√	√
12/04/2024	Pembahasan Penunjukkan KAP Baru	√	√	x	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith*	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
26/04/2024	• Pembahasan dan Penyelesaian *Suspend Account/ Open Item/* • Pembahasan *Progress Business* Model Pinjaman Pensiun Sebagai Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Audit SKAI • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Triwulan I Tahun 2024	√	√	x	√	√
31/05/2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Bulan April 2024	√	√	√	√	√
27/06/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai dengan posisi 14 Juni 2024 • Pembahasan *Update Progress* Penyelesaian *Suspend Account/ Open Items*	√	√	√	√	√
25/07/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Semester I tahun 2024 • Pembahasan Laporan Kinerja Anti *Fraud* Semester I tahun 2024 • Pembahasan Laporan Fungsi Kepatuhan Semester I tahun 2024 • Pembahasan *Update Progress Real Open Items* yang Bersifat Rutin dan *Open Items* yang memiliki *Potential Loss/* yang memiliki outstanding untuk dijadikan Aset	√	x	-	√	√
29/08/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Juli 2024. • Pembahasan *Update* atas pengelolaan aset-aset pasca penutupan Cabang • Pembahasan *Update* perkembangan penyelesaian *Open Items*. • Pembahasan Audit Interim Laporan Keuangan per Juni 2024.	√	√	-	√	√
26/09/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Agustus 2024 / *Discussion of Audit Work Program Realization until* Agustus 2024 • Pembahasan status tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK • Pembahasan *update* status tindak lanjut *management letter* 2023 KAP Moore	√	√	-	√	√
31/10/2024	• Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan September 2024 • Menindaklanjuti pendekatan dan peninjauan terkait Audit NGBS sesuai *concern* OJK • Pembaruan Proses Bisnis Kredit Pensiun Termasuk Harga & Profitabilitas dan Rekomendasi SKAI atas Bisnis Kredit Pensiun Berdasarkan Hasil Audit SKAI	√	√	-	√	√
28/11/2024	• Pembahasan Rekomendasi Rencana Audit 2025 • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Oktober 2024	√	√	-	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith*	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
19/12/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan November 2024 • Progress Perbaikan dan Bisnis Model Segmen Kredit Non-Retail (Korean Link, Corporate, Commercial dan SME) berdasarkan Hasil Audit Internal	√	x	-	√	√

*) Tidak lagi menjabat sejak bulan Juli 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit KB Bank juga telah mengikuti Rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja lain untuk membahas materi yang terkait dengan penugasan kepada Komite Audit. Adapun rapat tersebut adalah sebagaimana berikut (komposisi Komite Audit sesuai SK No. 107 tahun 2024 tanggal 12 September 2024):

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith*	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
26/01/2024	• Pembahasan Laporan Rekonsiliasi Selisih ATM. • Pembahasan Program Kerja Divisi HC Berdasarkan Hasil *Audit Rating Unsatisfactory* • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2023	√	√	√	√	√
23/02/2024	• Pembahasan *Update* Laporan Tindak Lanjut atas *Management Letter* KAP Crowe 2022 • Pembahasan Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Triwulan IV Tahun 2023 • Pembahasan Rencana Kerja *Quality Assurance* Tahun 2024 • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 12 Februari 2024	√	√	x	√	√
20/03/2024	Pembahasan *Update Progress* Audit oleh KAP PWC Report	√	√	√	√	√
22/03/2024	• Pembahasan Status, Konsep dan *Progress* Data Migrasi Terhadap NGBS Project. • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan 15 Maret 2024	√	√	√	√	√
28/03/2024	• Pembahasan *Audit Delay* Pada Laporan Keuangan Tahun Buku 2023. • Diskusi *Audit Progress* 2023 dan *Next Plan*	√	√	√	√	√
12/04/2024	Pembahasan Penunjukkan KAP Baru	√	√	x	√	√
26/04/2024	• Pembahasan dan Penyelesaian *Suspend Account/Open Item/* • Pembahasan *Progress Business* Model Pinjaman Pensiun Sebagai Tindak Lanjut Perbaikan Hasil Audit SKAI • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Triwulan I Tahun 2024	√	√	x	√	√
31/05/2024	Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Bulan April 2024	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran				
		Stephen Liestyo	Tippy Joesoef	Eugene K. Galbraith*	Dewi Anggesty Sah Bandar	Jacobus Sindu Adisuwono
27/06/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit Internal sampai dengan posisi 14 Juni 2024 • Pembahasan *Update Progress* Penyelesaian *Suspend Account/ Open Items*	√	√	√	√	√
25/07/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Semester I tahun 2024 • Pembahasan Laporan Kinerja Anti Fraud Semester I tahun 2024 • Pembahasan Laporan Fungsi Kepatuhan Semester I tahun 2024 • Pembahasan *Update* Progress Real *Open Items* yang Bersifat Rutin dan *Open Items* yang memiliki *Potential Loss*/ yang memiliki *outstanding* untuk dijadikan Aset	√	x	-	√	√
29/08/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Juli 2024. • Pembahasan *Update* atas pengelolaan aset-aset pasca penutupan Cabang • Pembahasan *Update* perkembangan penyelesaian *Open Items*. • Pembahasan Audit Interim Laporan Keuangan per Juni 2024.	√	√	-	√	√
26/09/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Agustus 2024 / *Discussion of Audit Work Program Realization until* Agustus 2024 • Pembahasan status tindak lanjut atas hasil pemeriksaan OJK • Pembahasan *update* status tindak lanjut *management letter* 2023 KAP Moore	√	√	-	√	√
31/10/2024	• Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan September 2024 • Menindaklanjuti pendekatan dan peninjauan terkait Audit NGBS sesuai *concern* OJK • Pembaruan Proses Bisnis Kredit Pensiun Termasuk Harga & Profitabilitas dan Rekomendasi SKAI atas Bisnis Kredit Pensiun Berdasarkan Hasil Audit SKAI	√	√	-	√	√
28/11/2024	• Pembahasan Rekomendasi Rencana Audit 2025 • Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan Oktober 2024	√	√	-	√	√
19/12/2024	• Pembahasan Realisasi Program Kerja Audit sampai dengan November 2024 • Progress Perbaikan dan Bisnis Model Segmen Kredit Non-Retail (Korean Link, Corporate, Commercial dan SME) berdasarkan Hasil Audit Internal	√	x	-	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**15**	**15**	**9**	**15**	**15**
	Jumlah Kehadiran	**15**	**13**	**6**	**15**	**15**
	Tingkat Kehadiran	**100%**	**87%**	**67%**	**100%**	**100%**

*) Tidak lagi menjabat sejak bulan Juli 2024

Pelaksanaan Tugas Komite Audit

Komite Audit telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Program Kerja yang disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan berpedoman pada Piagam Komite Audit serta Pedoman dan Tata Tertib Kerja.

Realisasi Kegiatan Komite Audit

Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Program Kerja Komite Audit Tahun 2024:
1. Melakukan penelaahan atas laporan keuangan yang akan dipublikasikan;
2. Melakukan penelaahan atas Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan yang disampaikan secara triwulanan oleh Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan dan secara semesteran kepada OJK yang memuat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Bank;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan perkembangan tindak lanjut hasil Audit SKAI selama tahun 2023 serta evaluasi terhadap pencapaian kinerja SKAI secara berkala melalui rapat bersama SKAI;
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan melalui rapat-rapat dengan Divisi Kepatuhan.

Kebijakan dan Besaran Remunerasi Bagi Komite Audit Non Komisaris

No.	Uraian	Catatan
1.	Gaji/Honorarium	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
2.	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3.	Bantuan Pendidikan	1 (satu) kali gaji pokok/honorarium pokok
4.	Tunjangan Utilities	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
5.	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
6.	Tunjangan Kesehatan	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
6.	Bonus/Tantiem	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018 dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemampuan Perusahaan

Komite Remunerasi dan Nominasi

Untuk memastikan pelaksanaan tugas terkait remunerasi dan nominasi anggota Direksi serta Dewan Komisaris, Perseroan memiliki Komite Remunerasi dan Nominasi. Komite Remunerasi dan Nominasi bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Kewajiban Bank dalam membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi didasarkan pada berbagai peraturan, di antaranya:
1. PBI No. 8 April PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum, sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan disempurnakan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
2. POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
3. POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum;
4. POJK No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
5. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Serta kebijakan lain yang telah dimiliki oleh Perusahaan terkait akan Komite Remunerasi dan Nominasi:
1. Surat Keputusan No. 0272 tahun 2017 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) KB Bank;
2. Surat Keputusan No. 1805 Tahun 2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Kebijakan Remunerasi PT Bank Bukopin Tbk;
3. Keputusan No. 001 Tahun 2019 tanggal 28 Januari 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Bukopin Tbk.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan fungsinya secara optimal, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan. Pedoman ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2019 dan mencakup berbagai aspek penting, seperti peran dan wewenang, struktur organisasi, kode etik, jadwal kerja, mekanisme rapat, pelaporan, serta ketentuan mengenai remunerasi dan fasilitas kerja.

Setiap anggota Komite diwajibkan untuk menaati ketentuan dalam pedoman tersebut guna mendukung efektivitas kerja Dewan Komisaris. Penerapan aturan ini selaras dengan prinsip GCG yang menjadi landasan utama KB Bank. Dengan regulasi yang jelas dan sistematis, diharapkan Komite Remunerasi dan Nominasi dapat menjalankan tugasnya secara profesional, transparan, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Perseroan.

Kriteria Anggota Komite Remunerasi Dan Nominasi

Dalam POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, dijelaskan bahwa terdapat persyaratan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komite, yaitu:

1. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perseroan;
2. Memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi;
3. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Emiten atau Perseroan;
4. Memiliki keahlian di bidang Perbankan;
5. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan pasar modal dan peraturan lainnya serta memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi.

Selain itu kriteria anggota Komite Remunerasi dan Nominasi menurut pedoman kerja sebagai berikut:

1. Komite Remunerasi dan Nominasi sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu:
   a. 1 (satu) orang Komisaris Independen;
   b. 1 (satu) orang Komisaris;
   c. 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahkan Sumber Daya Manusia atau satu orang perwakilan pegawai.
2. Pengangkatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 (satu) wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
3. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen;
4. Ketua dari Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam poin 3 (tiga) dilarang merangkap jabatan sebagai ketua komite lebih dari 1 (satu) pada komite lain;
5. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi;
6. Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang, maka anggota Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang;
7. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan operasional perseroan;
8. Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai harus memiliki pengetahuan mengenal sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi (*succession plan*) perseroan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan di dalam SK pengangkatan, sesuai dengan POJK No. 34/ POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Remunerasi Dan Nominasi

Susunan dan jumlah keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2024, yang telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 108 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di KB Bank	Keahlian	Periode
Hae Wang Lee	Ketua	Komisaris Independen	Hukum	2021-2024
Jerry Marmen	Anggota	Komisaris Utama	Manajemen Risiko, dan GCG	2024-2027
Tippy Joesoef	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG, Manajemen Risiko dan Audit Keuangan	2021-2024
Nanang Supriyatno	Anggota	Komisaris	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2021-2024
Gamaridha Akhirul AR	Anggota	Alt. Divisi Sumber Daya Manusia	Perbankan, Manajemen	2022-2025

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Hae Wang Lee, Jerry Marmen, Tippy Joesoef, dan Nanang Supriyatno, dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil Gamaridha Akhirul AR adalah sebagai berikut:

Gamaridha Akhirul AR Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi	
Usia	44 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bandung
Riwayat Pendidikan	Magister Manajemen (S2) Universitas Katolik Parahyangan Bandung
Riwayat Pekerjaan	• Konsultan Senior HR pada SEVERAL COMPANY • General Manager HR pada PT SHINHAN BANK INDONESIA • Kepala Departemen Remunerasi pada BANK WOORI SAUDARA • Accounting Officer di BANK BTPN • Equipment Control Data pada PT. ZHONGHAI INDO SHIPPING
Jabatan Lainnya	HC Strategy, Policy, Development & Service Department Head perseroan
Dasar Hukum Pengangkatan	SK No. 0088 tanggal 15 Juli 2022
Kualifikasi	Perbankan dan Manajemen

Sertifikasi yang Dimiliki Anggota Komite

Komite Remunerasi dan Nominasi berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keahlian anggotanya melalui pengembangan kompetensi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong partisipasi dalam program sertifikasi dan pelatihan profesional. Dengan memperoleh sertifikasi yang diakui di tingkat nasional maupun internasional, anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dapat memastikan bahwa kompetensinya tetap relevan dan sesuai dengan standar terkini. Berikut adalah sertifikasi yang telah diraih hingga tahun 2024.

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Remunerasi dan Nominasi
Hae Wang Lee	Ketua	Risk Management - Qualification VI
Jerry Marmen	Anggota	Risk Management - Qualification VII
Tippy Joesoef	Anggota	Risk Management - Qualification VII
Nanang Supriyatno	Anggota	Risk Management - Qualification VI
Gamaridha Akhirul AR	Anggota	Risk Management - Qualification VI

Pelatihan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Hae Wang Lee (Ketua)	*Training*	• *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • *Online* APU PPT *For Executive* • *Webinar* FKDKP	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • Rinto Teguh • Webinar FKDKP
Jerry Marmen (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • Konvensi Nasional Rancangan RSKKNI BID SMR • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Surabaya, 08/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • OJK • Oppa Academy • Rinto Teguh
Tippy Joesoef (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • Training Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Ujian SMR J6 (Komisaris) • *Training* Bahasa Korea • *Online* Apu PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 27/09/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • LSPP • Oppa Academy • Rinto Teguh
Nanang Supriyatno (Anggota)	*Training*	• *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT For *Executive*	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • Oppa Academy • Rinto Teguh

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Gamaridha Akhirul AR (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Workshop* SME *Plan* 2024 • Konvensi Nasional Rancangan RSKKNI BID.SMR • *Kick Off* SND • Resertifikasi SMR Jenjang 6 (Pembekalan) • *Online* APU PPT *For Executive* • *E-Learning* APU PPT Th 2024 (Aug)	• Jakarta, 25/01/2024 • Jakarta, 08/07/2024 • Jakarta, 02/08/2024 • Jakarta, 27/08/2024 • Jakarta, 13/09/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 05/08/2024	• INTERNAL HOUSE (DIKLAT) • OJK • Internal House (Diklat) • BSMR • Rinto Teguh • Internal House (Diklat)

Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Gamaridha Akhirul AR
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Terkait dengan Fungsi Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, serta pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank di masa yang akan datang.
2. Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
   b. Kebijakan Remunerasi bagi pekerja secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
3. Memastikan bahwa kebijakan Remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Melakukan evaluasi secara berkala (tahunan) terhadap penerapan kebijakan Remunerasi.
5. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Struktur Remunerasi;
   b. Kebijakan Remunerasi; dan
   c. Besaran Remunerasi.
6. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Terkait dengan Fungsi Nominasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
   a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
   b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
   c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

4. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
5. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
6. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang ada di bawah koordinasi Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi

Adapun wewenang Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:
1. Memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
2. Wajib bekerja sama dengan Direktorat yang membidangi Sumber Daya Manusia dan Unit-unit lainnya yang dipandang perlu;
3. Menjalankan tugas dengan cermat dan baik;
4. Menyusun rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
5. Menyusun laporan kegiatan selama setahun yang disampaikan kepada Dewan Komisaris;
6. Melakukan koordinasi dengan Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku, untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas antar komite-komite di bawah Dewan Komisaris;
7. Terkait dengan Remunerasi yang bersifat tetap, Komite Remunerasi dan Nominasi menyusun Kebijakan yang paling sedikit memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Terkait Remunerasi yang bersifat variabel, selain memperhatikan poin 7, kebijakan yang disusun juga harus mendorong dilakukannya *prudent taking risk*.

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi diadakan secara berkala, setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan, dengan dihadiri oleh ketua dan mayoritas anggota. Keputusan rapat ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara terbanyak sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah untuk disimpan dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank telah menyelenggarakan rapat sebagaimana berikut (komposisi Komite Audit sesuai SK No. 068 Tahun 2024 Tanggal 15 Mei 2024):

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho*	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
11/01/2024	• Wawancara calon Wakil Komisaris Utama • Pembahasan Paket Pensiun CFO	√	√	-	√	√	√	√
19/01/2024	Paket Purna Jabatan untuk Direktur Keuangan	√	√	-	√	√	√	√
03/04/2024	• Pembahasan perubahan keanggotaan komite di bawah Dewan Komisaris • Pembahasan Perubahan Remunerasi Tenaga Kerja Asing • Pembahasan Hasil KPI BOD 2023 dan Kebijakan KPI & Scorecard 2024	√	√	-	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho*	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
14/06/2024	• Hasil Pembahasan KPI BOD dan Scorecard KPI BOD Tahun 2024 • Evaluasi Kinerja BOD • Pembahasan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	-	√	√	√	√
12/09/2024	Pembahasan Kenaikan Gaji Pokok Karyawan dengan Gaji Pokok Upah Minimum 2024	√	√	-	√	√	√	√
12/12/2024	Evaluasi Kontrak Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris	√	√	-	√	√	√	√
		x= absen/v = hadir						
*) Tidak lagi menjabat sejak Januari 2024								

Sepanjang tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi KB Bank juga telah mengikuti Rapat yang diselenggarakan oleh unit kerja lain untuk membahas materi yang terkait dengan penugasan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi. Adapun rapat tersebut adalah sebagaimana berikut (komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai SK No. 108 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024):

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho*	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
11/01/2024	• Wawancara calon Wakil Komisaris Utama • Pembahasan Paket Pensiun CFO	√	√	-	√	√	√	√
19/01/2024	Paket Purna Jabatan untuk Direktur Keuangan	√	√	-	√	√	√	√
03/04/2024	• Pembahasan perubahan keanggotaan komite di bawah Dewan Komisaris • Pembahasan Perubahan Remunerasi Tenaga Kerja Asing • Pembahasan Hasil KPI BOD 2023 dan Kebijakan KPI & Scorecard 2024	√	√	-	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Hae Wang Lee	Jerry Marmen	Nam Hoon Cho*	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Sukriansyah S. Latief	Gamaridha Akhirul AR
14/06/2024	• Hasil Pembahasan KPI BOD dan Scorecard KPI BOD Tahun 2024 • Evaluasi Kinerja BOD • Pembahasan Remunerasi Tenaga Kerja Asing	√	√	-	√	√	√	√
12/09/2024	Pembahasan Kenaikan Gaji Pokok Karyawan dengan Gaji Pokok Upah Minimum 2024	√	√	-	√	√	√	√
12/12/2024	Evaluasi Kontrak Anggota Komite di Bawah Dewan Komisaris	√	√	-	√	√	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**6**	**6**	**2**	**6**	**6**	**6**	**6**
	Jumlah Kehadiran	**6**	**6**	**0**	**6**	**6**	**6**	**6**
	Tingkat Kehadiran	**100%**	**100%**	**0**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

*) Tidak lagi menjabat sejak Januari 2024

Pelaksanaan Tugas Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan perannya dalam mendukung keberlangsungan tata kelola perusahaan yang baik. Salah satu tugas utamanya adalah menyusun dan memberikan rekomendasi terkait calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris sebelum diajukan ke RUPS. Rekomendasi ini dibuat berdasarkan kebijakan dan kriteria yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan strategis perusahaan. Proses ini mencakup seleksi kandidat, analisis kualifikasi, serta evaluasi kesesuaian dengan visi dan misi Perseroan.

Di samping itu, Komite Remunerasi dan Nominasi juga memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024. Sistem remunerasi yang ditetapkan meliputi gaji, tunjangan, serta insentif lainnya, yang disusun untuk memastikan keseimbangan antara kompetitifnya paket remunerasi dan kepatuhan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko berperan dalam memastikan bahwa manajemen risiko di Bank berjalan secara optimal. Dalam menjalankan tugasnya, Komite Pemantau Risiko bertanggung jawab untuk meninjau efektivitas proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan mitigasi risiko. Saat ini, Komite Pemantau Risiko terus berkoordinasi dengan Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja Manajemen Risiko guna menjaga keseimbangan dan keberlanjutan pengelolaan risiko di lingkungan Bank.

Dasar Hukum

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk mendukung efektivitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 13/ SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Pemantau Risiko

Sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesesuaian dengan peraturan dan kondisi terkini, Bank secara rutin memperbaharui dan menyempurnakan Pedoman Kerja Komite Pemantau Risiko. Pembaruan terakhir dilakukan pada tahun 2019, yang ditandai dengan penerbitan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 005 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada tanggal 28 Maret 2019. Pedoman tersebut mengatur hal-hal terkait:

1. Tugas dan Tanggung jawab;
2. Wewenang;
3. Struktur Keanggotaan;
4. Struktur Keanggotaan;
5. Waktu Kerja;
6. Rapat;
7. Pelaporan;
8. Rangkap Jabatan ketua Komite;
9. Remunerasi dan Fasilitas Kerja;
10. Penilaian Kinerja.

Kriteria Anggota Komite Pemantau Risiko

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, persyaratan untuk menjadi anggota Komite Pemantau Risiko adalah harus berasal dari pihak independen. Hal ini bertujuan agar anggota tersebut dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan obyektif.

Selain itu, Pedoman Komite Pemantau Risiko juga mengatur mengenai kode etik keanggotaan, yang mencakup beberapa hal berikut:

1. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen;
2. Bersikap professional, jujur, dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
3. Bersikap professional, jujur, dan objektif dalam setiap pengambilan keputusan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian;
4. Menjunjung tinggi dan menjaga citra (visi dan misi perseroan), kehormatan dan martabat perseroan serta kehormatan dan martabat diri pribadi;
5. Bersikap *prudent* dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh;
6. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik;
7. Tidak menggunakan informasi untuk kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya kecuali terdapat kewajiban hukum atau kewajiban profesi;
8. Menjaga dan menyimpan kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan yang dimilikinya.

Susunan, Jumlah, Komposisi dan Dasar Pengangkatan Komite Pemantau Risiko

Berikut adalah susunan dan jumlah anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2024, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan No. 069 Tahun 2024 tertanggal 15 Mei 2024:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di KB Bank	Keahlian	Periode
Tippy Joesoef	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2021-2024
Jerry Marmen	Anggota	Komisaris Utama	Manajemen Risiko dan GCG	2024-2027
Nanang Supriyatno	Anggota	Komisaris	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2023-2024
Stephen Liestyo	Anggota	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan	2024-2027
Togar Natigor Siregar	Anggota	Pihak Independen	Akuntansi dan Manajemen Risiko	2022-2025
Rahardja Alimhamzah	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, GCG, dan Manajemen Risiko	2022-2025

Profil Komite Pemantau Risiko

Profil Tippy Joesoef, Jerry Marmen, Nanang Supriyatno, dan Stephen Liestyo dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil anggota yang merupakan pihak independen adalah sebagai berikut:

Togar Natigor Siregar
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	60 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• Sarjana Hukum, Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (1988) • S2 Hukum Bisnis, Universitas Indonesia (2008)
Riwayat Pekerjaan	• Kepala Departemen Administrasi Hukum Kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Bank Exim Indonesia (2020-2022) • Kepala Unit Pengendalian Kredit, PT.Bank DBS Indonesia (4 Juni 2010 – 31 Agustus 2019) • Kepala Unit Pengendalian Risiko Bank Barclays Indonesia (16 Juli 2009-31 Mei 2010) • Kepala Divisi Administrasi & Pengendalian Kredit Bank Internasional Indonesia (BII) (29 Oktober 2007- 15 Juli 2009) • Kepala Risiko & Kredit Kontrol - Bank Standard Chartered (Desember 2005 – 23 Oktober 2007) • Manajer Senior Manajemen Risiko & Kepatuhan - Bank Standard Chartered (Maret 2002 – November 2005)
Jabatan Lainnya	Dosen Fakultas Hukum dan Kepala Laboratorium Hukum di Universitas Juanda (2022-sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0003 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022
Kualifikasi	Akuntansi dan Manajemen Risiko

Rahardja Alimhamzah
Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Usia	58 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Jakarta
Riwayat Pendidikan	• S1 Teknik Mesin & Industri di University of New South Wales, Sydney-Australia (1986-1989) • S2 Magister Manajemen Keuangan & Akuntansi di Universitas Indonesia (1992-1994)
Riwayat Pekerjaan	• Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2021-Present); • Penasihat Teknis PT ABI Komoditi Berjangka (2020-Present); • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sompo Insurance Indonesia (2020-Present); • Komisaris Utama PT CIMB Niaga Sekuritas (Maret 2018 - Agustus 2020); • Direktur Bisnis Non-Ritel PT Bank Cimb Niaga (Maret 2016 – April 2020); • Direktur corporate Banking PT Bank DBS Indonesia (Mei 2014- Agustus 2014); • Direktur corporate Banking PT Bank DBS Indonesia (April 2009- April 2014); • Direktur corporate Banking PT Bank Rabobank International (April 2003 -April 2009)
Jabatan Lainnya	• Komisaris Independen sekaligus Ketua Komite Audit dan Ketua Manajemen Risiko PT Radana Bhaskara Finance Tbk (2021-Present); • Penasihat Teknis PT ABI Komoditi Berjangka (2020-Present); • Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Sompo Insurance Indonesia (2020-Present).
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 0003 Tahun 2022 Tanggal 20 Januari 2022
Kualifikasi	Perbankan, GCG, dan Manajemen Risiko

Sertifikasi yang Dimiliki Anggota Komite

Komite Pemantau Risiko selalu berfokus pada pengembangan kualitas dan kemampuan anggotanya melalui berbagai program pelatihan yang relevan. Dalam upaya ini, Komite Pemantau Risiko menyediakan berbagai peluang pendidikan yang mendukung peningkatan profesionalisme anggota, termasuk pelatihan sertifikasi yang diakui baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut ini adalah daftar sertifikasi profesi yang telah diraih oleh anggota Komite Pemantau Risiko hingga tahun 2024.

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Pemantau Risiko
Tippy Joesoef	Ketua	Risk Management - Qualification VII
Jerry Marmen	Anggota	Risk Management - Qualification VII
Nanang Supriyatno	Anggota	Risk Management - Qualification VI
Stephen Liestyo	Anggota	Risk Management - Qualification VI
Togar Natigor Siregar	Anggota	Risk Management - Qualification VII
Rahardja Alimhamzah	Anggota	Risk Management - Qualification VII

Pelatihan Anggota Komite Pemantau Risiko

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Tippy Joesoef (Ketua)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Ujian SMR J6 (Komisaris) • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 27/09/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • LSPP • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Jerry Marmen (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • Konvensi Nasional Rancangan RSKKNI BID SMR • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Surabaya, 08/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • OJK • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Nanang Supriyatno (Anggota)	*Training*	• *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh
Stephen Liestyo (Anggota)	*Training* dan *Workshop*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR KOMISARIS • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive* • *Webinar* FKDKP	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • IRPA & BSMR • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh • FKDKP
Togar Natigor Siregar (Anggota)	*Training*	• Sertifikasi SMR Jenjang 6 (Pembekalan) • *Online* APU PPT *For Executive* • Sertifikasi SMR J7 (Pembekalan)	• Jakarta, 14/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 19/11/2024	• MAISA EDUKASI & LSPP • Rinto Teguh • MAISA EDUKASI & LSPP
Rahardja Alimhamzah (Anggota)	*Training*	• *Online* APU PPT *For Executive* • Sertifikasi SMR J7 (Pembekalan)	• Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 19/11/2024	• Rinto Teguh • MAISA EDUKASI & LSPP

Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko harus diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Komite Pemantau Risiko KB Bank tahun 2019. Berikut adalah rincian rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 (komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK No. 069 Tahun 2024, yang Tanggal 15 Mei 2024):

Aspek Independensi	Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√	√	√	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√	√	√	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√	√	√	√	√

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Pemantau Risiko memiliki tanggung jawab utama dalam mendukung Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan yang efektif terhadap Direksi dalam mengelola perseroan. Mereka bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, terutama yang berkaitan dengan manajemen risiko.

Tugas utama komite ini adalah memberikan pendapat profesional terhadap laporan atau masalah yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris. Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen risiko yang diterapkan oleh Direksi.

Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga bertugas untuk mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus dari Dewan Komisaris, terutama terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh perseroan. Dengan demikian, Komite Pemantau Risiko berperan penting dalam memastikan bahwa manajemen risiko di perusahaan berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat mengidentifikasi serta menangani risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja dan kelangsungan bisnis perseroan secara efektif.

Selain Tugas dan tanggung jawab tersebut, Komite Pemantau Risiko wajib:
1. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
4. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama dengan Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi atas Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola;
7. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara Periodik;
8. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Wewenang Komite Pemantau Risiko

Berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Komite Pemantau Risiko memiliki wewenang untuk:
1. Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Pemantau Risiko berwenang untuk:
   a. Pihak Perseroan (termasuk pekerja Perseroan);
   b. Pihak berkepentingan lainnya.
2. Mendapatkan masukan dan atau saran dari pihak luar Perseroan yang berkaitan dengan tugasnya.

Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko harus diselenggarakan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pedoman Komite Pemantau Risiko KB Bank tahun 2019. Berikut adalah rincian rapat Komite Pemantau Risiko sepanjang tahun 2024 (komposisi Komite Pemantau Risiko berdasarkan SK No. 069 Tahun 2024, yang Tanggal 15 Mei 2024):

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Seng Hyup Shin	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
05/01/2024	• *Update* on SAM *Progress Collection*; • Pembahasan Progress *Follow Up Findings* OJK; • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank KB Bukopin November 2023.	√	√	-	x	√	√	√
25/01/2024	• Pembahasan *Update* CIF dan *Cleansing Data*; • Pembahasan Tindak Lanjut -Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 5 Januari 2024; • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank KB Bukopin Q4 2023.	√	√	-	√	√	√	√
29/02/2024	• Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Januari 2024 • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan Januari 2024.	√	x	-	√	√	√	√
28/03/2024	• Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Februari 2024. • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan Februari 2024.	√	x	-	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Seng Hyup Shin	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
25/04/2024	• Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 28 Maret 2024, yaitu: a. *Update* Perkembangan Regulasi Baru (OJK/BI). b. Pembahasan Kualitas Kredit dan Kecukupan CKPN Pasca Berakhirnya Relaksasi Covid-19. Presentation by: Financial Planning Department Head c. Pembahasan Monitoring DPD Kredit. d. Update Pemenuhan Critical Position posisi bulan April 2024. e. Mitigasi Risiko Kredit untuk Penurunan RWA Kredit khusus untuk Debitur Group dan Pembahasan Penyebab Perbedaan Pencatatan Kredit Channeling pada KB Bukopin Finance. • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Triwulan I Tahun 2024	√	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Seng Hyup Shin	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
30/05/2024	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan April 2024 • Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 25 April 2024, yaitu: a. *Update* Realisasi pembentukan CKPN posisi April 2024. b. Pembahasan *Action Plan Collection* & Penyelesaian Debitur Restruktur Covid 19. PIC: SAM *Restructuring, Performance Management & Policy Department Head* c. *Update Progress* Rekonsiliasi Data *Mirroring* KB Bank Dan KB Bukopin Finance. d. *Update* Rencana Perubahan Struktur Khususnya terkait Departemen Operasional. e. Pembahasan Rencana penambahan mesin ATM. f. Pembahasan Monitoring AYDA dan pembentukan CKPN atas AYDA.	√	√	√	√	√	√	√
27/06/2024	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan Mei 2024 • Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 30 Mei 2024 a. Pembahasan *blueprint* pengelolaan dokumen jaminan kredit dan/atau *security document* b. Pembahasan evaluasi alur proses *underwriting* pengajuan kredit c. Pembahasan Strategi untuk Perbaikan Berkelanjutan Proses Bisnis Asuransi	√	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Seng Hyup Shin	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
25/07/2024	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Semester I Tahun 2024 • Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 27 Juni 2024, yaitu: a. Pembahasan *Update* Progres *Capital Management Mandatory To Do List* b. Pembahasan Penambahan RWA (*Risk-Weighted Assets*) pada *Dashboard* Bisnis untuk Mengatasi Tantangan Permodalan dan Eksekusi c. Pembahasan *Action Plan* atas Kekurangan Dokumen dan *List Pending Document* Jaminan Kredit dari Setiap Unit Bisnis	√	√	x	√	√	√	√
29/08/2024	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan Juli 2024. • Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 25 Juli 2024, yaitu: a. Pembahasan Peningkatan *Risk Awareness* dan Pengendalian Internal dalam Mitigasi Denda serta Analisis *Root Cause* 2021-2024. b. Pembahasan *revamp* kebijakan diskrepansi dokumen kredit.	√	√	√	√	√	√	√

Tanggal	Agenda	Kehadiran						
		Tippy Joesoef	Jerry Marmen	Seng Hyup Shin	Nanang Supriyatno	Stephen Liestyo	Togar Natigor Siregar	Rahardja Alimhamzah
26/09/2024	• Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bulan Agustus 2024. • Pembahasan Tindaklanjut Permintaan dari Komite Pemantau Risiko tanggal 29 Agustus 2024, yaitu: a. Pembahasan Proses *Post Approval Review Mortgage* dan Evaluasi Kecukupan Karyawan di *Risk Team*. b. Pembahasan Dampak dan Mitigasi Nilai Tukar terhadap Risiko Pasar dan Credit.	√	√	X	√	X	√	√
31/10/2024	• Permohonan Rekomendasi Perubahan Kebijakan *Risk Appetite*, Kebijakan Manajemen Risiko dan Kebijakan Pengelolaan Modal • Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank Triwulan III Tahun 2024	√	√	√	√	√	√	x
28/11/2024	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko Bank KB pada bulan Oktober 2024	√	√	X	√	√	√	√
19/12/2024	Pembahasan Laporan Penilaian Profil Risiko KB Bank pada bulan November 2024	X	√	X	√	√	√	√
Jumlah	**Jumlah Rapat**	**13**	**13**	**9**	**13**	**13**	**13**	**13**
	Jumlah Kehadiran	**12**	**11**	**5**	**12**	**12**	**13**	**13**
	Tingkat Kehadiran	**92%**	**85%**	**55%**	**92%**	**92%**	**100%**	**100%**

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko memiliki peran yang tak terpisahkan dalam mendukung Dewan Komisaris untuk memastikan manajemen risiko Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Tugas utama Komite Pemantau Risiko adalah memberikan keyakinan bahwa pengelolaan risiko dilakukan dengan hati-hati dan mengacu pada standar yang jelas, sehingga setiap kegiatan perusahaan tetap berada dalam kerangka risiko yang dapat diterima. Komite Pemantau Risiko juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan risiko di tingkat operasional.

Dalam menjalankan perannya, Komite Pemantau Risiko secara rutin mengevaluasi sistem manajemen risiko Perseroan, memastikan bahwa pendekatan yang digunakan dalam identifikasi, pengukuran, pengelolaan, dan pemantauan risiko selaras dengan praktik terbaik industri. Hal ini bertujuan agar Perseroan tetap dapat mengidentifikasi potensi ancaman sejak dini dan mengelolanya secara efektif, meminimalisir dampak yang mungkin terjadi. Selain itu, Komite Pemantau Risiko juga berfungsi untuk memastikan bahwa langkah-langkah pengendalian yang diterapkan oleh Direksi berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang optimal dalam mengurangi risiko. Dengan pemantauan yang berkelanjutan, Komite Pemantau Risiko memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Perseroan dalam mengelola risiko tetap dalam koridor yang aman. Melalui peran penting ini, Komite Pemantau Risiko turut menjaga kestabilan serta keberlanjutan operasional Perseroan, memastikan bahwa tantangan yang dihadapi dapat diatasi dengan bijaksana.

Sepanjang tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk menjalankan Program Kerja Tahun 2024, antara lain:

1. Pemantauan Risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas berbagai laporan risiko dari Direktoran Kepatuhan dan Risiko yang dilakukan secara Bulanan
2. Rapat Pemantauan Laporan Profil Risiko yang diterima dari Direktoran Kepatuhan dan Risiko dilakukan secara Triwulanan
3. Mengikuti kegiatan Seminar/Workshop ataupun Training/Pendidikan Pelatihan yang diselenggarakan untuk masing-masing anggota Komite Pemantau Risiko

Kebijakan dan Besaran Remunerasi Bagi Komite Pemantau Risiko

No.	Uraian	Catatan
1.	Gaji/Honorarium	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
2.	Tunjangan Hari Raya	1 (satu) kali Upah
3.	Bantuan Pendidikan	1 (satu) kali gaji pokok/honorarium pokok
4.	Tunjangan Utilities	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
5.	Fasilitas Perjalanan Dinas	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
6.	Tunjangan Kesehatan	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018
7.	Bonus/Tantiem	Diberikan sesuai dengan ketentuan pada SK Dewan Komisaris No. SKEP/0005-DKOM/05/2018 dengan tetap memperhatikan kewajaran dan kemampuan Perusahaan

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan, hadir untuk memperkuat peran Dewan Komisaris dalam memastikan implementasi tata kelola yang efektif di Perseroan. Fokus utama komite ini adalah menilai kesesuaian dan efektivitas pengendalian internal serta pelaksanaan fungsi kepatuhan yang terintegrasi di seluruh Perseroan.

Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, Komite ini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan Perseroan terhadap peraturan dan standar yang berlaku, serta memastikan bahwa pengendalian internal dijalankan dengan tepat dan sesuai. Komite ini juga bertugas untuk memastikan bahwa fungsi kepatuhan diintegrasikan secara menyeluruh dalam berbagai aspek operasional Perseroan .

Dengan pendekatan yang komprehensif, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan, memainkan peran vital dalam memastikan Perseroan tetap mematuhi regulasi yang berlaku dan bahwa pengendalian internal berfungsi sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko yang berkaitan dengan kepatuhan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam operasional Perseroan secara keseluruhan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ SEOJK.03/2015 tanggal 20 Mei 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan;
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Bukopin Tbk No. SKEP/016-KOM/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 tentang Penyempurnaan Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan PT Bank Bukopin Tbk.

Pedoman Kerja/Piagam Komite Tata Kelola Terintegrasi

Untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang efektif, Konglomerasi Keuangan telah menetapkan pedoman yang terstruktur dan rinci, mengikuti ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18/POJK.03/2014. Pedoman ini bukan hanya sekadar aturan, namun juga menjadi acuan penting bagi Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam menjalankan peran dan fungsinya dengan baik.

Dokumen ini menjelaskan secara mendalam tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi, serta kewenangan yang diberikan dalam mengelola dan memantau praktik tata kelola di seluruh entitas konglomerasi keuangan. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dapat terwujud mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel dalam penerapan tata kelola yang baik. Lebih lanjut, pedoman ini juga memberikan panduan praktis dalam hal identifikasi, penilaian, dan pengelolaan berbagai risiko yang berpotensi mempengaruhi kelancaran implementasi Tata Kelola Terintegrasi. Prosedur terkait pelaporan, diskusi, dan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi juga menjadi bagian integral dari pedoman ini, memastikan adanya langkah konkret dalam menangani temuan atau rekomendasi yang muncul.

Secara keseluruhan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tata kelola, sekaligus memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan yang diambil berada dalam koridor yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, pedoman tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan arahan yang jelas dan tepat bagi seluruh anggota komite.

Berikut ini adalah pokok-pokok yang tercakup dalam Pedoman Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan:
1. Keanggotaan Komite;
2. Masa Jabatan Komite;
3. Wewenang dan Tanggung Jawab Komite;
4. Rapat Komite;
5. Pelaporan;
6. Self Assessment.

Kriteria Anggota Komite

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Tata Kelola Terintegrasi juga mencantumkan persyaratan keanggotaan, di antaranya:
1. Komite paling sedikit terdiri dari:
   a. Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama;
   b. Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan;
   c. Pihak Independen dari Anggota Komite Entitas Utama dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite Entitas Utama.
3. Penetapan Anggota Komite dari masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan diatur dalam surat keputusan tersendiri yang dibuat dan ditetapkan oleh masing-masing LJK Konglomerasi Keuangan.
4. Anggota Komite wajib memiliki integritas, akhlak, moral yang baik dan memiliki kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidangnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
5. Anggota Komite bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan/atau pelatihan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar masing-masing Entitas dan dapat dipilih kembali.

Struktur Keanggotaan dan Keahlian

Susunan dan jumlah anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi per 31 Desember 2024, yang telah disetujui melalui Surat Keputusan Direksi No. 109 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024, adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan di Komite	Jabatan di KB Bank	Keahlian
Stephen Liestyo	Ketua	Komisaris Independen	Perbankan, GCG dan Audit Keuangan
Hae Wang Lee	Anggota	Komisaris Independen	Hukum
Dinan Sufendi Rae	Anggota	Pihak Independen	Perbankan, GCG

Pelatihan Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Stephen Liestyo (Ketua)	*Training*	• *Kick Off* RKA SKAI • *Workshop Refresher* RKA SKAI • *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • *Training* Bahasa Korea • *Online* APU PPT *For Executive* • *Webinar* FKDKP	• Jakarta, 21/03/2024 • Jakarta, 26/07/2024 • Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 04/10/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• Internal Diklat • Internal Diklat • AAFM • IRPA & BSMR • OPPA ACADEMY • Rinto Teguh • FKDKP

Nama dan Jabatan	Jenis Pendidikan dan Pelatihan	Materi Pendidikan dan Pelatihan	Tempat/Tanggal	Penyelenggara
Hae Wang Lee (Anggota)	*Training*	• *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • Resertifikasi SMR Komisaris • Online APU PPT *For Executive* • Webinar FKDKP	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 09/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024 • Jakarta, 11/12/2024	• AAFM • IRPA & BSMR • Rinto Teguh • Webinar FKDKP
Dinan Sufendi Rae (Anggota)	*Training*	• *Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud* • *Online* APU PPT *For Executive*	• Jakarta, 19/07/2024 • Jakarta, 05/11/2024	• AAFM • Rinto Teguh

Independensi Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Seluruh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

Aspek Independensi	Hae Wang Lee	Dinan Sufendi
Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan, anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi	√	√
Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi, dan/ atau sesama anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG	√	√
Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat dan pemerintah	√	√

Profil Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi

Profil Hae Wang Lee dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris yang terdapat dalam buku Laporan Tahunan ini. Adapun profil Dinan Sufendi Rae adalah sebagai berikut:

Dinan Sufendi Rae Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi	
Usia	58 Tahun
Kewarganegaraan	Indonesia
Domisili	Bandung, Jawa Barat
Riwayat Pendidikan	• Master of Laws - LLM . International Trade and Banking Law, Sekolah Tinggi Hukum Bandung (2017) • Bachelor of Laws - LLB . International Trade and Banking Law Universitas Padjadjaran (1990) • Bachelor of International Relations . International Politics, Universitas Padjadjaran (1988)
Riwayat Pekerjaan	• Vice President, Legal and Compliance PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (2007-2013) • Legal Counsel PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2007) • Assistant Vice President, Legal Commercial Division Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1999-2004) • Credit Manager PT Bank Subentra (BBO) (1992-1997) • Legal Officer, Credit Support Department PT IBJ Indonesia Bank (1990-1991)
Jabatan Lainnya	• Sr Vice President/Risk Management Division Head Bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (2018-sekarang) • Assistant Vice President PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (2013-sekarang)
Dasar Hukum Pengangkatan	Surat Keputusan Direksi No. 109 Tahun 2024 Tanggal 12 September 2024
Kualifikasi	Perbankan, GCG

Sertifikasi yang Dimiliki Anggota Komite

Komite Tata Kelola Terintegrasi berkomitmen untuk terus meningkatkan kapabilitas dan kompetensi anggotanya dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Untuk itu, berbagai inisiatif edukasi dan pelatihan disusun dengan tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Salah satu bentuk upaya konkret adalah penyediaan program sertifikasi yang dapat meningkatkan profesionalisme anggota, dengan pengakuan yang luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berikut adalah daftar sertifikasi profesi yang telah berhasil diraih oleh anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi hingga tahun 2024.

Nama	Jabatan	Jenis Sertifikasi Profesi Komite Tata Kelola Terintegrasi
Stephen Liestyo	Ketua	Risk Management - Qualification VI
Hae Wang Lee	Anggota	Risk Management - Qualification VI
Dinan Sufendi Rae	Anggota	Risk Management - Qualification VII

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

Komite Tata Kelola Terintegrasi Keuangan memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi;
2. Dalam melakukan evaluasi, Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Lembaga Jasa Keuangan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Lembaga Jasa Keuangan yang menjadi anggota pada Komite Tata Kelola Terintegrasi, Konglomerasi Keuangan;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Wewenang Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berikut adalah kewenangan yang dimiliki oleh Komite Tata Kelola Terintegrasi:

1. Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat meminta penjelasan atau informasi yang diperlukan mengenai karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya kepada Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk, dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris Entitas Utama;
2. Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi berwenang melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi;
3. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Tata Kelola Terintegrasi dapat bekerjasama atau berkoordinasi dengan Komite di bawah Dewan Komisaris Entitas Utama lainnya, serta divisi-divisi/satuan/unit-unit kerja yang relevan pada Entitas Utama atau pada Lembaga Jasa Keuangan lainnya dalam Konglomerasi Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk

Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berikut adalah rincian rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sepanjang tahun 2024 (komposisi Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan SK No. 109 Tahun 2024, yang Tanggal 12 September 2024):

Tanggal	Agenda	Kehadiran					
		Sukriansyah S. Latief	Tippy Joesoef	Stephen Liestyo	Eugene K. Galbraith	Hae Wang Lee	Dinan Sufendi Rae
30/05/2024	• Pembahasan hal-hal yang timbul pada pertemuan sebelumnya yaitu tanggal 22 November 2023 a. *Update progress follow up* dari KBBS dan KBBF atas temuan Audit Internal dan Hasil Pemeriksaan OJK utk Tahun 2023. b. *Update progress* terkait perubahan/ penyesuaian kebijakan AML pada KBBS dan KBBF. c. *Update progress* terkait rencana penjualan KBBF ke KB Capital. d. *Update* penggunaan kantor eks. KCP Antapani oleh KBBS. e. *Update progress* penggunaan dana atas Setoran Modal kepada KBBS. • Pembahasan Laporan *Financial Group* dan Implementasi GRC Semester II 2023 • Pembahasan Strategic *Financial Group Issue* KB Bank Tahun 2023 dan *Action Plan* Tahun 2024.	√	√	-	√	√	√
22/08/2024	• Pembahasan Laporan *Financial Group* dan Implementasi GRC Semester I 2024 • Pembahasan *Strategic Financial Group Issue* KB Bank dan *Action Plan* Semester I tahun 2024	-	-	√	-	√	√
21/11/2024	Pembahasan Laporan *Stress Test* PT Bank KB Bukopin Tbk secara Konsolidasi	-	-	-	√	√	√

x= absen/v = hadir

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Di tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi, telah menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan komposisi anggota yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap menjaga independensi, komite ini telah melaksanakan berbagai kegiatan yang mendukung implementasi tata kelola yang baik dan berkelanjutan. Adapun tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dengan melakukan penilaian atas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam Konglomerasi Keuangan dan memastikan kecukupan pengendalian intern yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi
3. Melakukan koordinasi dengan organ Konglomerasi Keuangan yaitu Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (SKKT), Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi

Penilaian Kinerja Komite Dewan Komisaris Tahun 2024

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengarahkan kebijakan Perseroan dengan melibatkan komite-komite penunjang yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam operasional Perseroan . Setiap komite memiliki pedoman kerja yang jelas, yang memungkinkan pelaksanaan tugas berjalan dengan fokus dan terukur. Adapun komite-komite yang berada di bawah Dewan Komisaris meliputi Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.

Dewan Komisaris telah menilai bahwa komite-komite ini berhasil menjalankan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya dengan baik, yang tercermin dalam dua hal utama:

1. Tercapainya seluruh Rencana/Program Kerja Komite-komite yang ditetapkan pada awal tahun 2024;
2. Pelaksanaan Rapat Komite dan tingkat kehadiran anggota Komite.

Pelaksanaan rencana dan program kerja komite-komite dilakukan melalui serangkaian rapat yang melibatkan Direktorat terkait, diikuti dengan evaluasi yang mendalam di luar rapat. Hasil dari setiap rapat kemudian disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris untuk ditindaklanjuti.

Komite Audit menjalankan fungsinya dengan memberikan pendapat profesional mengenai laporan keuangan, memeriksa kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta mengevaluasi kinerja auditor eksternal. Sementara itu, Komite Nominasi dan Remunerasi fokus pada kebijakan terkait nominasi dan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko bertugas untuk memastikan perbaikan terus-menerus dalam manajemen risiko Perseroan, sedangkan Komite Tata Kelola Terintegrasi berfokus pada evaluasi penerapan prinsip tata kelola yang baik di seluruh tingkat Perseroan.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja komite-komite ini, dan pada tahun 2024, kinerja komite-komite terlihat berjalan dengan baik, berdasarkan frekuensi rapat, kehadiran, dan laporan yang disampaikan.

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Untuk memastikan kelancaran operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, KB Bank memiliki 4 (empat) komite di bawah Direksi yang memiliki peran penting dalam mendukung berbagai kebijakan dan strategi Perseroan. Komite-komite ini dibentuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK yang mencakup:

1. Komite Manajemen Risiko;
2. Komite Kredit;
3. *Assets And Liabilities Committee* (ALCO);
4. Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi;

Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko di Perseroan, memiliki peran penting dalam pengelolaan risiko yang mencakup berbagai aspek seperti Kredit, Operasional, Pasar, Likuiditas, Kepatuhan, Stratejik, Hukum, dan Reputasi. Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam manajemen risiko, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui pengawasan yang sistematis, Komite Manajemen Risiko berkontribusi untuk menjaga bank agar tetap dapat mengelola risiko dengan efektif dan memastikan praktik tata kelola yang baik terus berjalan dengan optimal.

Pedoman Komite

Komite Manajemen Risiko Perseroan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 0156 Tahun 2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Piagam Komite Manajemen Risiko. Selain itu, pembentukan Komite Manajemen Risiko ini juga berlandaskan pada:

1. POJK No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. SEOJK No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. POJK No. No. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum;
4. SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
5. Kebijakan Manajemen Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk;
6. Surat Keputusan No. 0110 Tahun 2022 tanggal 30 September 2022 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk;
7. Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk.

Struktur Keanggotaan Komite

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kompetensi, seperti *Division Head, Department Head, Regional Head*, dan/atau pihak lain yang relevan dengan topik rapat. Rapat komite dapat diselenggarakan dengan kehadiran Ketua Komite atau Pengganti Ketua, dan minimal 51% anggota tetap untuk mencapai kuorum. Rapat dapat diadakan secara langsung maupun daring, memberikan fleksibilitas dalam komunikasi dan memastikan manajemen risiko tetap berjalan dengan efektif dan efisien.

Susunan Komite Manajemen Risiko

Ketua (merangkap anggota)	Presiden Direktur
Pengganti Ketua (merangkap anggota)	Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko
Sekretaris	Enterprise Risk Management Department Head
Anggota Tetap	Direksi
Undangan	Division Head, Department Head, Regional Head dan/atau pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan rapat

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko mencakup hal-hal berikut:

1. Merekomendasikan dan/atau menyetujui penyusunan kerangka kerja, kebijakan, dan prosedur manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko, penentuan limit beserta penetapan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko Bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.

3. Penetapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis Bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.
4. Melakukan pembahasan atas laporan profil risiko Bank secara berkala sebelum laporan profil risiko disampaikan ke Regulator.
5. Mengembangkan budaya sadar risiko dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko secara *Bankwide*.
6. Melakukan pembahasan terkait *risk appetite*, serta memantau dan mengelola risiko Bank agar berada dalam batasan risiko yang telah ditentukan.
7. Melakukan kajian terhadap *Stress Test* termasuk diantaranya skenario, asumsi, metodologi, hasil dan tindak lanjut mitigasi risiko yang akan dilakukan, serta rencana kontinjensi apabila diperlukan.
8. Memastikan tata kelola perusahaan yang baik dalam penerapan manajemen risiko, dengan kerangka kerja yang sesuai untuk identifikasi, pengukuran dan eskalasi risiko secara tepat waktu, dan persetujuan eksposur kepada pihak terkait serta deviasi kebijakan dan/atau keputusan bisnis.
9. Memastikan semua aktivitas bisnis dan operasional sejalan dengan peraturan, kebijakan dan prosedur risiko yang berlaku, dengan persetujuan dan pemantauan atas pengecualian, deviasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.
10. Pengkajian berbagai risiko yang ada dan timbul yang dihadapi oleh Bank, meliputi (namun tidak terbatas pada):
    a. Risiko Kredit,
    b. Risiko Pasar dan Likuiditas;
    c. Risiko Operasional termasuk Fraud;
    d. Risiko Reputasi;
    e. Risiko Keamanan Informasi dan Teknologi Informasi;
    f. Risiko Hukum dan Litigasi;
    g. Risiko Kepatuhan;
    h. Risiko Stratejik;
    i. Isu risiko signifikan lainnya (diluar yang telah disebutkan di atas) secara berkala.
11. Pelaksanaan proses manajemen risiko dan perbaikan yang sejalan dengan perubahan eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi rasio kecukupan modal dengan menilai dan mengevaluasi kecukupan modal internal Bank, untuk memastikan Bank memiliki kecukupan modal berdasarkan profil risiko yang dimiliki.
12. Memantau dan mengevaluasi kinerja Divisi Manajemen RIsiko.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite

Komite Manajemen Risiko memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi secara berkala terhadap profil risiko dan permasalahan terkait pengelolaannya. Oleh karena itu, diselenggarakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan agenda pembahasan antara lain mengenai laporan profil risiko, serta isu-isu terkait aktivitas penerapan manajemen risiko yaitu identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian. Rapat Komite Manajemen Risiko dapat diselenggarakan secara luring atau langsung maupun daring dan/atau *hybrid*, dilaksanakan apabila dihadiri oleh Ketua Komite / Pengganti Ketua (jika Ketua Komite berhalangan hadir) dan sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) kuorum dari seluruh jumlah anggota tetap (Direksi termasuk Ketua Komite dan Pengganti Ketua) baik secara tatap muka dan/atau daring. Pendekatan ini menjamin adanya evaluasi yang konsisten dan pengambilan keputusan yang tepat.

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat sebanyak sebelas kali secara *offline* juga daring dengan agenda-agenda berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	17 Januari 2024	• *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (informasi). • Laporan Profil Risiko Q4-2023 (persetujuan). • Penguatan Manajemen NSFR (informasi).
2	21 Februari 2024	• *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (informasi). • *Stress Test Credit, Market & Liquidity* Triwulanan (Triwulan 4 2023) (persetujuan). • Pemantauan RWA *Limit Pilot Project* (persetujuan). • Rencana untuk *update* kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) (persetujuan). • Manajemen Penguatan Likuiditas (informasi). • Laporan Risiko Bulanan Januari 2024 (informasi).
3	24 April 2024	• Laporan Profil Risiko Q1 2024 (persetujuan). • Penguatan Manajemen NSFR (informasi).
4	29 Mei 2024	• *Bottom Up Stress Test* Periode Maret 2024 (persetujuan). • *Stress Test* Triwulan 1 2024 (persetujuan). • Manajemen Penguatan Likuiditas April 2024 (informasi). • Laporan Risiko Bulanan April 2024 (informasi).
5	25 Juni 2024	• ICAAP (*Capital Management*) – (persetujuan). • *Credit Examination* (laporan). • Laporan Risiko Bulanan Mei 2024 (informasi).
6	17 Juli 2024	• Laporan Profil Risiko Individu Triwulan II 2024 (persetujuan). • Laporan KPMM berdasarkan Profil Risiko Q2-2024 (persetujuan). • Tindak Lanjut Optimalisasi RWA Kredit (informasi). • Penguatan Manajemen Likuiditas (informasi)

No.	Tanggal	Agenda
7	21 Agustus 2024	• *Stress Test* Pasar & Likuiditas Triwulan II 2024 (persetujuan). • *Credit Examination* Semester I 2024 (informasi). • Manajemen Penguatan Likuiditas Agustus 2024 (informasi). • Laporan Risiko Bulanan Juli 2024 (informasi).
8	24 September 2024	• *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (informasi). • Perubahan Kebijakan (persetujuan). • Manajemen Permodalan (informasi). • Manajemen Penguatan Likuiditas September 2024 (informasi).
9	14 Oktober 2024	• Laporan Profil Risiko Q3 2024 (persetujuan). • Manajemen Penguatan Likuiditas Oktober 2024 (informasi). • *Matter Arising* Terkait Penyimpanan Berkas Agunan & Dokumen Kredit (informasi)
10	22 November 2024	• *Stress Test* Pasar & Likuiditas Triwulan III 2024 (persetujuan). • Manajemen Permodalan (informasi). • Manajemen Penguatan Likuiditas November 2024 (informasi). • Laporan Risiko Bulan Oktober 2024 (informasi)
11	18 Desember 2024	• *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (informasi). • *Risk Appetite Limit* – ICAAP *Management* (persetujuan)

Selama tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali. Berikut adalah daftar kehadiran anggota Komite Manajemen Risiko dalam rapat tersebut:

Nama Direktur/Peserta/Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran
Lee Woo Yeul/President Director	11	4
Robby Mondong/Deputy President Director	11	6
Jung Ho Han/Finance Director*	11	9
JangHyuk Im / Finance Director**	1	0
Yohanes Suhardi/Wholesale & SME Banking Director***	6	3
Dodi Widjajanto/Compliance & Risk Director	11	10
Helmi Fahrudin/Retail & Operations Director	11	8
Henry Sawali/Credit Group Director	11	10
Jung Ho Han/Strategic Director	11	9
Jung Ho Han/ IT & Digital Director****	6	1
Young Eun Moon***	4	1

*) Menjabat sebagai alternate Direktur Keuangan Bank per 17 Januari 2024
**) Menjabat sebagai Direktur Keuangan Bank per 16 Desember 2024
***) Tidak lagi menjabat sebagai Direktur Bank per 28 Juni 2024
****) Menjabat sebagai alternate Direktur IT & Digital Bank per 1 Juli 2024

Penilaian Kinerja Komite Manajemen Risiko oleh Direksi

Sepanjang tahun 2024, Komite Manajemen Risiko telah menunjukkan kinerja yang solid dalam mendukung pengelolaan risiko Perseroan. Direksi mengapresiasi upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas materi yang disajikan serta respons cepat terhadap berbagai perhatian dan masukan dari anggota komite. Hal ini mencerminkan komitmen kuat untuk terus menyempurnakan sistem manajemen risiko demi mendukung pencapaian tujuan Perseroan.

Komite Kredit

Lembaga Komite Kredit adalah suatu lembaga yang mempunyai tugas mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memberikan keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan Kredit yang diajukan oleh (calon) Debitur kepada Bank, dengan memperhatikan perkembangan Bisnis Bank tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian. Komite Kredit dapat dilakukan secara:

1. *Meeting*
2. *Circulate*

Dalam hal pelaksanaan proses persetujuan/penolakan pemberian Kredit KB Bank dilaksanakan dalam Lembaga Komite Kredit sesuai segmennya yang terdiri dari:

1. Kredit *Corporate* & *Korean Link*
2. Kredit Komersial,

3. Kredit SME,
4. Kredit *Retail*
5. *Financial Institution* (FI),
6. *Limit Supply Chain Finance*,
7. Kredit yang dikelola *Special Asset Management* (SAM)
8. Perkreditan Lainnya

Pedoman Komite

Pedoman Komite Kredit Perseroan disahkan melalui Kebijakan No. SK 032 Versi 3.0 Tahun 2024 Tentang Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit PT. Bank KB Bukopin, Tbk untuk segmen *Corporate, Commercial* dan SME dan Kebijakan No. 257 Tentang Kelembagaan dan Kewenangan Komite Kredit Retail PT. Bank KB Bukopin, Tbk Kewenangan dan Tanggung Jawab

1. Lembaga komite Kredit memiliki tugas antara lain :
   a. Memutus pemberian Kredit (baru, tambahan, penurunan, perubahan syarat dan atau perpanjangan) yang dikelola oleh *Business Unit* sesuai limit kewenangan, termasuk penetapan/perubahan struktur Kredit dalam kategori Non-Restruktur, Struktur Kredit termasuk namun tidak terbatas pada limit Kredit, tujuan/obyek pembiayaan, jenis Kredit, sifat Kredit, jangka waktu Kredit, porsi pembiayaan, syarat Kredit/covenant, dan agunan.
   b. Memutus tindakan yang diambil Bank dalam rangka Perbaikan, Penyehatan, dan penyelesaian Kredit baik itu Perbaikan, Penyehatan dan Penyelesaian Kredit yang masih dalam pengelolaan Bisnis Unit maupun Perbaikan, Penyehatan atau penyelesaian Kredit yang dikelola oleh Bisnis Unit atau *Special Asset Management* (SAM).

   Dalam hal pemberian keputusan Kredit, lembaga komite Kredit paling sedikit harus memenuhi hal-hal sebagai berikut :
   a. Memberikan persetujuan atau penolakan Kredit atau Pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi; dan
   b. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan. Dalam hal ALCO belum ada, Komite Kredit harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada Direksi.
   c. Bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan unit/fungsi di dalam Bank yang terkait dengan kompetensinya.

2. Tanggung jawab Lembaga Komite Kredit paling sedikit meliputi:
   a. Melaksanakan tugas terutama dalam proses pemberian persetujuan Kredit berdasarkan kompetensinya secara jujur, objektif, cermat, serta seksama; dan
   b. Menolak permintaan dan/atau pengaruh pihak yang berkepentingan dengan pemohon Kredit untuk memberikan persetujuan Kredit atau Pembiayaan yang hanya bersifat formalitas.
   c. Memastikan bahwa setiap Kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat;
   d. Anggota Komite Kredit bertanggung jawab atas kualitas kelayakan Kredit pada saat permohonan Kredit tersebut diputuskan.
   e. Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian Kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit atau Pembiayaan;

   Dalam mengambil keputusan terhadap kelayakan Kredit harus didasari oleh prinsip :
   a. Integritas & Kejujuran
   b. Profesionalisme
   c. Kompetensi
   d. Independensi
   e. Obyektifitas
   f. Asas kehati-hatian Bank (*prudential Banking*)
   g. Ketentuan Persyaratan Kredit yang sehat dan ketentuan Operasional Bank.

Keanggotaan Lembaga Komite Kredit

Keanggotaan lembaga Komite Kredit dapat ditunjuk, diangkat atau diubah oleh Direksi berdasarkan surat Keputusan Direksi, termasuk jika melalui Surat Keputusan Direksi ini. Pejabat/Jabatan yang disebutkan dalam Surat Keputusan Direksi ini, tidak perlu mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Komite Kredit dengan atau tanpa kewenangan memutus Kredit.

1. Peserta lembaga komite kredit terdiri dari :
   a. *Chairman* / Ketua Komite Kredit
      Peserta komite Kredit yang berperan memimpin jalannya rapat komite Kredit berdasarkan kelas Komite juga termasuk sebagai Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit.
   b. Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus kredit
      Peserta komite Kredit yang memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan persetujuan, penolakan atau sikap abstain atas permohonan Kredit yang dikomitekan.
   c. Anggota Komite Kredit tanpa kewenangan memutus kredit (*non-voting members*)
      Peserta komite Kredit yang tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan persetujuan maupun penolakan atas permohonan Kredit yang diajukan.
   d. Manajemen Komite Kredit
      Peserta komite Kredit yang berperan atau berfungsi sebagai sekretaris Komite Kredit dimana dalam pelaksanaan Komite Kredit fungsi manajemen Komite Kredit termasuk sebagai Anggota Komite tanpa kewenangan memutus.
   e. Minutes taker/Notulis
      Anggota komite Kredit tanpa kewenangan memutus Kredit yang ditunjuk dan bertugas untuk mendokumentasi/membuat notulen pada rapat Komite Kredit *meeting*. Notulen pada rapat komite *meeting* dibuat oleh pejabat setingkat Manajer dari Grup Kredit. Selanjutnya terkait hal ini mengacu kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Kredit Grup.
   f. Presenter
      Adalah unit kerja/individu peserta komite Kredit yang berfungsi membawakan hasil Analisa Kredit kepada komite Kredit.

g. Peserta Komite Kredit Undangan
Peserta komite Kredit yang bukan termasuk Anggota Komite Kredit, dapat hadir atau turut berpartisipasi dalam Komite Kredit, jika diundang dan diperlukan kehadirannya oleh *Chairman* melalui Sekretaris Komite Kredit, peserta tersebut berperan untuk memberikan opini, informasi tambahan, dan penjelasan – penjelasan sesuai kapasitas dan kompetensinya sebagai bahan pertimbangan pemutus Kredit atas Kredit yang dikomitekan.

h. Rekomendator Komite Kredit
Rekomendator adalah anggota komite Kredit tanpa kewenangan memutus/hak suara yang merekomendasikan pemberian Kredit kepada anggota Komite Kredit atas hasil analisa proposal bisnis dan *Credit Analyst Memorandum* (CAM). Rekomendator bertanggung jawab atas rekomendasi pemberian Kredit dan kebenaran informasi yang disampaikan. Proposal bisnis, Proposal SAM (bagi Kredit yang dikelola SAM) dan *Credit Analyst Memorandum* (CAM) atau Dokumen yang berlaku di Group Credit, harus mendapatkan rekomendasi dan ditandatangani oleh pemberi rekomendasi baik dari fungsi bisnis maupun fungsi Kredit sebagai bagian dari prinsip *first line of defense*.

2. Peran dan Fungsi Pejabat PT Bank KB Bukopin Tbk dalam Komite Kredit :
   a. *Chairman* / Ketua Kelas Komite Kredit
      i) Direktur Kredit
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit di tingkat Direktur atau pada Komite Dewan Direksi, dan turut sebagai anggota Komite dengan kewenangan memutus Kredit ditingkat Direktur dan Dewan Direksi.
      ii) SAM SEVP
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua pada Komite Restrukturisasi Kredit, Komite Penyelesaian Kredit, Komite Penjualan AYDA, WO Collection Committee, Auction Limit Committee dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      iii) *Division Head Corporate & Korean Link Credit Underwriting*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Kredit baru / *top up*/ perpanjangan / Perubahaan, R&R dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      iv) *Division Head Commercial Credit Underwriting*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Kredit baru / *top up*/ perpanjangan / Perubahaan, R&R dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      v) *Division Head SME Credit Underwriting*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Kredit baru / *top up*/ perpanjangan / Perubahaan, R&R dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      vi) *Division Head Special Asset Management*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Kredit Restruktur yang dikelola di SAM, Komite Penyelesaian Kredit yang dikelola di SAM, AYDA *sales committee*, WO *collection committee* dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      vii) *Department Head Corporate & Korean Link Credit Analyst*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Baru / *Top Up* / Perpanjangan / Perubahan Restrukturisasi dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      viii) *Department Head Commercial Credit Analyst*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Baru / *Top Up* / Perpanjangan / Perubahan Restrukturisasi dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      ix) *Department Head* CRC
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Kredit baru / *top up* / perpanjangan / Perubahaan dan Rapat Komite R&R serta turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Kebijakan.
      x) *Department Head SAM Restructuring, Performance Management & Policy*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada komite Restrukturisasi Kredit dan Komite Penyelesaian Kredit serta turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran Kebijakan.
      xi) *Department Head* SAM SME Region
      Berperan sebagai *Chairman* Komite Kredit pada komite Restrukturisasi Kredit dan turut sebagai anggota komite dengan kewenangan memutus untuk Kredit sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur pada lampiran kebijakan.
      xii) *Department Head AYDA/Write-off Assets Sales*
      Berperan sebagai *Chairman* / Ketua Komite Kredit pada AYDA Sales Committee serta menjabat sebagai anggota komite dengan kewenangan untuk memutuskan sesuai dengan tingkat batasan dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran kebijakan.
   b. Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus secara kelembagaan / Forum / kelompok / komite Kredit berdasarkan tingkatan limit kewenangan yang ditentukan dan diatur Direksi.

i) Dewan Direksi
   - Wakil Direktur Utama;
   - *Retail Business Director;*
   - *Credit Director;*
   - *Finance Director;*
   - *Strategy Director;*
   - *IT& Digital Director*

   Jumlah Direktur yang diperhitungkan sebagai anggota Komite Kredit adalah Direktur yang telah memiliki izin OJK.

ii) Fungsi Credit
   - SEVP SAM;
   - *Division Head Corporate & Korean Link Credit Underwriting;*
   - *Division Head SME & Commercial Credit Underwriting;*
   - *Division Head SAM;*
   - *Department Head Corporate & Korean Link Credit Analyst;*
   - *Department Head Commercial Credit Analyst*
   - *CRC Department Head;*
   - *Department Head SAM Restructuring, Performance Management & Policy;*
   - *Department Head SAM SME Region;*
   - *Department Head SAM Wholesale;*
   - *Department Head SAM Channeling , Join Financing, & Swamitra;*
   - *Department Head AYDA/Write-off Assets Sale;*
   - *Department Head Bulk Auction;*
   - *Department Head Retail Collection;*
   - *Manager Regional SME Credit Analyst (CRC Manager);*
   - *Manager SAM.*

iii) Fungsi Bisnis
   - *SEVP Sales Distribution;*
   - *Division Head Corporate Business;*
   - *Division Head Korean Link Business;*
   - *Division Head Commercial Business;*
   - *Division Head Treasury and International Banking;*
   - *Division Head Finance;*
   - *Division Head SME Business;*
   - *Department Head Corporate Business;*
   - *Department Head Korean Link Business;*
   - *Department Head Commercial Business*
   - *SME Area Head;*
   - BSSM.

c. Anggota Komite Kredit dengan kewenangan memutus Kredit Retail dan/atau Kredit Lainnya dengan kewenangan Individu dan/atau Jabatan.
   i) Untuk jenis Kredit *Retail* atau Kredit tertentu yang bersifat *mass product*, dimana untuk pengambilan keputusan kredit dilakukan dengan kewenangan pemutus individual dan atau jabatan, maka yang dapat menjadi Anggota komite Kredit *Retail* antara lain:*Division Head Retail Credit Factory*;
   ii) *Division Head Retail Product;*
   iii) *Department Head Retail Credit Underwriting;*
   iv) *Manager Retail Credit Underwriting*;
   v) Koordinator *Retail Credit Underwriting*.

d. Anggota Komite Kredit tanpa kewenangan memutus Kredit
   i) Direktur Utama;
   ii) Direktur Risk & Kepatuhan;
   iii) Sekretaris Komite Kredit;
   iv) Peserta Komite Kredit Undangan;
   v) Fungsi Rekomendator.

Jenis Lembaga Komite Kredit

Dalam lembaga komite Kredit terdiri atas beberapa jenis komite sesuai dengan fungsinya, yaitu :

1. Komite Kredit untuk Kredit Baru atau Eksisting
   Berfungsi mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan Kredit serta persyaratan Kredit yang diajukan pada saat Komite Kredit atas Proposal Kredit atau permohonan Kredit atau Aplikasi permohonan Kredit baru, tambahan dan atau perpanjangan antara lain seperti (penetapan, pengaturan, perubahan, penghapusan, pembebasan).
2. Komite *Rescheduling* & Restruktur (R&R) dan Komite Restrukturisasi Kredit:
   a. Komite *Reschedule and Restructure* (R&R) memiliki fungsi dalam rangka upaya yang dilakukan bank untuk melakukan perbaikan dalam kegiatan perkreditan atau membantu Debitur yang performanya baik namun berpotensi terekspos Kredit bermasalah dengan tujuan debitur tersebut dapat mempertahankan performa baiknya.
   b. Komite Restrukturisasi Kredit Memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyehatan Kredit untuk semua segmen dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan Restrukturisasi Kredit yang diajukan atas Portofolio Debitur yang dikelola oleh Unit Bisnis atau portofolio yang dikelola oleh fungsi SAM yang akan diatur lebih lanjut di dalam lampiran kebijakan.
3. Komite Restrukturisasi & *Settlement* (R&S) dan Komite Penyelesaian Kredit Bermasalah :
   a. Komite Restrukturisasi & *Settlement* (R&S)
      Memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka Restrukturisasi / Penyelesaian Kredit dengan DPD ≤ 90 hari (belum dilakukan BAST kepada SAM) atau pengambilan keputusan atas Debitur yang sudah tidak lagi memiliki prospek usaha untuk selanjutnya diputuskan dikelola oleh SAM dan nantinya SAM akan mengambil langkah-langkah penanganan Kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   b. Komite Penyelesaian Kredit
      Berfungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelesaian Kredit bermasalah dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan penyelesaian Kredit bermasalah yang diajukan atas portofolio yang dikelola oleh SAM atau portofolio yang dikelola oleh fungsi SAM Retail yang akan diatur lebih lanjut di dalam lampiran kebijakan.
   c. Pengambilan keputusan Komite *Restructure & Settlement* (R&S) dan Komite Penyelesaian Kredit tersebut antara lain:
      i) Penetapan eksekusi atau likuidasi agunan Kredit;
      ii) Penetapan agunan Kredit menjadi AYDA;
      iii) Persetujuan penebusan / penjualan agunan;
      iv) Pemutusan Subrogasi Kredit bermasalah;

v) Penetapan *cessie*;
vi) penyelesaian Kredit melalui jalur hukum;
vii) Persetujuan penggunaan jasa pihak ketiga;
viii) Hapus Buku Kredit bermasalah;
ix) Hapus Tagih Kredit bermasalah;
x) Keputusan lainnya terkait penyelesaian Kredit bermasalah.

4. Komite Penjualan AYDA
Memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka penjualan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam hal mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan penjualan AYDA yang dikelola oleh fungsi SAM AYDA/ *Write-off assets Sales* yang akan diatur pada lampiran kebijakan.
5. Komite Penyelesaian Hapus Buku
Memiliki fungsi untuk pengambilan Keputusan penyelesaian dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan Hapus Buku atas portofolio yang telah / dalam pengelolaan fungsi *Special Asset Management* dengan status Hapus Buku sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang akan diatur pada lampiran kebijakan.
6. Komite Hapus Buku
Memiliki fungsi untuk pengambilan Keputusan melakukan penyelesaian kredit bermasalah melalui Hapus Buku tanpa menghapus Hak Tagih Bank kepada debitur atas portofolio yang telah / dalam pengelolaan fungsi *Special Asset Management* dengan status Hapus Buku sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang akan diatur pada lampiran kebijakan
7. Komite Limit Lelang SAM
Memiliki fungsi untuk pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan lelang dalam hal mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan penetapan limit lelang, penetapan persetujuan harga lelang/ lelang ulang agunan Kredit atas aset yang telah/dalam pengelolaan fungsi *Special Asset Management* sesuai dengan kebijakan yang berlaku yang akan diatur pada lampiran kebijakan.
8. Komite *Financial Institutions*
Komite *Financial Institutions* (FI) adalah Lembaga komite berfungsi untuk pengambilan keputusan terkait fasilitas *Money Market* (MM), *Foreign Exchange* (FX), *Trade Finance* (TF), *Securities* (Sec) serta perubahan-perubahannya kepada *counterparties/Correspondent Bank/Financial Institutions/ Corporate*. Mempertimbangkan dan berwenang memutuskan kelayakan permohonan yang diajukan presenter komite *Financial Institutions* atas :
a. Penetapan *Line Money Market*;
b. Persetujuan *Depository Correspondent/ Non-Depository Correspondent*;
c. Penetapan *Line Foreign Exchange* (FX);
d. Penetapan *Line Trade Finance*;
e. Penetapan *Line Trade Securities*;
f. Penetapan Line perusahaan Asuransi/Penjaminan;
g. Penetapan Line Korporasi;
h. Keputusan lainnya terkait *International Banking, Treasury* dan *Counterparty Risk*.
9. Komite *Limit Supply Chain Finance*
Komite *Supply Chain Finance* (SCF) adalah Lembaga komite yang berfungsi untuk pengambilan keputusan terkait penetapan Limit Payung dan limit Kredit atas fasilitas SCF, antara lain namun tidak terbatas pada produk *Dealer Financing, Distributor Financing* dan *Vendor Financing* serta perubahan-perubahannya kepada (calon) *Principal/Anchor* ataupun (calon) Debitur. Komite ini bertugas untuk mengevaluasi, mempertimbangkan dan berwenang memberikan keputusan (persetujuan atau penolakan) atas permohonan penetapan atau peninjauan kembali limit payung yang diajukan oleh (calon) *Principal/Anchor* atau limit kredit yang diajukan (calon) Debitur dari *Corporate, Korean Link, Commercial* & SME, dengan memperhatikan perkembangan Bisnis Bank tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian.

Struktur Keanggotaan Komite

Berdasarkan Kebijakan Kelembagaan Komite Kredit, berikut disampaikan struktur Komite Kredit untuk Kredit *Corporate & Korean Link, Commercial, SME, Retail, Financial Institution* (FI) & *Supply Chain Finance* sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris berfungsi khusus untuk memberikan persetujuan atas seluruh pengajuan Kredit termasuk restrukturisasi dan penyelesaian Kredit bermasalah atas fasilitas milik pihak terkait PT Bank KB Bukopin Tbk.
2. Komite *Executive Credit* adalah komite Kredit tingkatan tertinggi yang menyertakan Dewan Direksi dan pejabat di *executive level*, dimana komite tersebut umumnya diadakan untuk pelaksanaan Komite Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah untuk Kredit yang sebelumnya diputus oleh komite tingkat A.
3. Komite Tingkat Kategori A1 berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk Komersial, termasuk komite restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah, dimana komite tingkat A1 berperan untuk memberikan keputusan Kredit untuk limit diatas Komite tingkat A
4. Komite Tingkat Kategori A berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen *Corporate & Korean Link*, Komersial, *SME* & *Retail*, termasuk komite restrukturisasi, Penyelesaian Kredit Bermasalah & WO dan Penjualan AYDA, dimana komite tingkat A berperan untuk memberikan keputusan Kredit untuk limit diatas Komite tingkat B.
5. Komite Tingkat Kategori B berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen *Corporate & Korean Link*, Komersial, SME & *Retail*, termasuk komite restrukturisasi, Penyelesaian Kredit Bermasalah & WO dan Penjualan AYDA, dimana komite tingkat A berperan untuk memberikan keputusan Kredit untuk limit diatas Komite tingkat C.
6. Komite Tingkat Kategori C berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen *Corporate & Korean Link*, Komersial, SME & *Retail*, termasuk komite restrukturisasi, Penyelesaian Kredit Bermasalah & WO dan Penjualan AYDA sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur dalam pedoman ini.

7. Komite Tingkat Kategori D berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen *Retail*, termasuk komite restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah & WO dimana komite tingkat D berperan untuk memberikan keputusan Kredit untuk limit diatas Komite tingkat E.
8. Komite Tingkat Kategori E berfungsi sebagai pengambilan keputusan Kredit untuk segmen *Retail*, termasuk komite restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit Bermasalah & WO sesuai dengan tingkatan limitasi dan kewenangan yang diatur dalam pedoman ini.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite

Sepanjang tahun 2024, Komite Kredit secara tatap muka dilakukan dengan jadwal 2 (dua) minggu sekali setiap hari Senin dan Kamis, sedangkan untuk komite secara sirkulasi dilakukan setiap hari kerja dan pada jam kerja komite terlaksana yang meliputi komite baru/perpanjangan/modifikasi/Top Up serta restruktur dan penyelesaian kredit.

Assets and Liabilities Committee (ALCO)

Komite *Assets* dan *Liabilities Management* (ALCO) dibentuk oleh Direksi Perseroan berdasarkan Surat Edaran Direksi No. SE/197/DIR/X/2018 tanggal 16 Oktober 2018 mengenai Kebijakan *Assets and Liabilities Management Committee*. ALCO bertanggung jawab dalam membahas dan menetapkan keputusan strategis terkait pengelolaan produk aset dan liabilitas, dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan, keberlanjutan bisnis, serta profitabilitas. Setiap keputusan yang dibuat oleh ALCO hanya dapat diubah melalui rapat resmi komite.

ALCO dibentuk sebagai respons terhadap dinamika pasar uang, perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, serta perkembangan di sektor perbankan, terutama dalam aspek penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana ke aset produktif.

Pedoman Komite

Pedoman ALCO disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 070 tanggal 26/Nov/2024 tentang Kebijakan Asset dan Liabilities Management Committee Selain itu, pembentukan ALCO ini juga didasarkan pada:
1. Surat Keputusan Direksi No. 0030 Tahun 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas PT Bank KB Bukopin, Tbk
2. Surat Edaran Direksi No. SE/189/IR/XII/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Likuiditas PT Bank KB Bukopin, Tbk
3. Surat Keputusan Direksi No. 101 tahun 2024 tentang Struktur Organisasi PT. Bank KB Bukopin, TBK
4. Surat Keputusan Direksi No.0052 tahun 2023 tentang Kebijakan Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi PT. Bank KB Bukopin, TBK
5. Surat Keputusan Dewan komisaris No.003 tahun 2024 tentang Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab dan Alternate Direksi PT. Bank KB Bukopin, Tbk

Struktur Keanggotaan Komite

Ketua	**Direktur Utama**
Wakil Ketua	**Direktur yang membidangi keuangan**
Sekretaris	**Unit kerja yang membidangi fungsi perencanaan keuangan**
Anggota	• **Direktur yang membidangi fungsi bisnis yaitu Konsumer,UMKM dan Komersial dan Wakil Presiden Direktur** • **Direktur yang membidangi fungsi resiko** • **Direktur yang membidangi fungsi strategi** • **Direktur membidangi fungsi kredit**

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Assets and Liabilities Committee (ALCO) memiliki wewenang dan tanggung jawab atas hal-hal berikut:
1. Melakukan evaluasi dan pengendalian risiko atas posisi risiko likuiditas dan risiko pasar, serta menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan *Asset* dan *Liabilities Management* (ALMA) perseroan yang diantaranya meliputi manajemen liabilitas, manajemen likuiditas, manajemen aset likuid, manajemen kredit yang diberikan (KYD), manajemen pos *administrative*, dan strategi lindung nilai;
2. Melakukan kaji ulang terhadap deviasi antara hasil aktual dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis bank;
3. Melakukan kaji ulang terhadap kebijakan penetapan harga (*pricing*) atas aset dan liabilitas maupun *fee based income* serta memastikan kebijakan harga tersebut dapat mendukung strategi Asset dan Liabilities Management (ALMA) dan pengelolaan likuiditas Bank;
4. Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai setiap perkembangan kondisi terkini serta perkembangan ketentuan dan peraturan terkait yang mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA;
5. Melakukan evaluasi atas rencana pendanaan darurat;
6. Meneruskan kebijakan yang telah ditetapkan kepada unit kerja terkait agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
7. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan serta keputusan ALCO yang telah diambil.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite

Selama tahun 2024, ALCO telah melaksanakan tugasnya dengan memberikan rekomendasi kepada Direksi dan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda-agenda berikut:

No.	Tanggal	Agenda
1	07/Feb/2024	1. ALM 2.*Funding* 3.*Lending* 4.NSFR 5.*Proposal Business*
2	28/Feb/2024	1. ALM 2.*Funding* 3.*Lending* 4.NSFR 5.*Dealer Financing*
3	03/April/2024	1. ALM 2.*Funding* 3.*Lending* 4.NSFR 5.*Star Program*
4	08/Mei/2024	1. ALM 2.*Funding* 3.*Lending* 4.NSFR 5.Star *Pension Program*
5	29/Mei/2024	1. ALM 2.*Funding* 3.*Lending* 4.NSFR 5.*Channeling Program*

Selama tahun 2024, ALCO telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali. Berikut adalah daftar kehadiran anggota ALCO dalam rapat tersebut:

Nama Direktur/Peserta/Jabatan	Jumlah Wajib Rapat	Jumlah Kehadiran
Woo Yeul Lee/Chairman/President Direktur	12	9
Jung Ho Han/Vice Chairman/Alt.Direktur Keuangan	12	11
Robby Mondong/Anggota/Vice President Direktur	12	11
Helmi Fahruding/Anggota/Direktur Bisnis Ritel	12	11
Henri Sawali/Anggota/Direktur Kredit	12	11
Dodi Widjajanto/Anggota/Direktur Risk	12	9

Komite Pengarah Sistem Teknologi Informasi

Komite Pengarah Teknologi Informasi merupakan komite utama dalam pengelolaan teknologi informasi. Tugas utamanya adalah memberikan rekomendasi dan mendukung Direksi serta Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan kegiatan dan kesiapan infrastruktur teknologi informasi.

Pedoman Komite

KB Bank telah menyusun pedoman kerja untuk Komite Pengarah Teknologi Informasi dalam Pedoman Teknologi Informasi No. 102/K-ITGV/DTI tentang Kebijakan Komite Pengarah Teknologi Informasi tahun 2023. Pedoman ini berisi tentang:

1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup Pembahasan Komite Pengarah TI;
3. *IT Steering Committee Charter*;
4. Keanggotaan Komite Pengarah TI;
5. Penyelenggaraan Komite Pengarah TI;

Struktur Keanggotaan Komite

Keanggotaan Komite Pengarah TI ditunjuk dan diangkat oleh Direksi. Struktur organisasi Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut.

1. Ketua Komite Pengarah TI adalah Direktur yang membawahi Teknologi informasi.
2. Anggota Komite Pengarah TI:
   a. Direktur yang membawahi Satuan Kerja Manajemen Risiko;
   b. Pejabat tertinggi di bawah Direktur yang membawahi Teknologi informasi setingkat Kepala Divisi;
   c. Pejabat tertinggi di bawah Direktur yang membawahi Layanan selaku pengguna utama TI setingkat Kepala Divisi;
   d. Kepala Divisi Perencanaan Strategis Perusahaan yang bertugas sebagai penyelaras strategi dan inisiatif Korporat dengan strategi dan inisiatif TI;
   e. Kepala Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi yang bertugas melakukan evaluasi anggaran Bank, khususnya atas investasi atau biaya operasional TI;

f. Departemen terkait lainnya dapat menjadi peserta dalam Komite Pengarah TI dengan mempertimbangkan kelayakannya seperti keterkaitan dengan materi pembahasan, sebagai narasumber dan sebagainya;
g. Kepala Departemen yang membawahi Strategis dan Perencanaan TI yang bertugas melakukan evaluasi pengelolaan proyek TI dan Sekretaris Komite Pengarah TI.

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab

Secara garis besar, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Komite Pengarah TI adalah sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi kepada Direksi sebagai berikut:
   a. Rencana strategis TI *(IT Strategic Plan)* yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan bisnis Perseroan (*Business Plan*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam memberikan rekomendasi dimaksud adalah sebagai berikut:
      i) Rencana pelaksanaan (*roadmap*) untuk mencapai kebutuhan TI yang mendukung strategi bisnis Perseroan. *Roadmap* terdiri dari kondisi saat ini (*current state*), kondisi yang ingin dicapai (*future state*) serta langkah-langkah yang akan dilakukan dalam *mencapai future state;*
      ii) Sumber daya yang dibutuhkan;
      iii) Keuntungan/manfaat yang akan diperoleh saat rencana diterapkan.
   b. Perumusan kebijakan dan prosedur TI yang utama seperti kebijakan pengamanan TI dan manajemen risiko terkait penggunaan TI;
   c. Kesesuaian proyek-proyek TI yang disetujui dengan rencana strategis TI dan *corporate plan* yang berlaku;
   d. Komite pengarah juga dapat menetapkan status prioritas proyek TI yang bersifat kritikal (berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan);
   e. Kesesuaian TI dengan kebutuhan sistem informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Perseroan;
   f. Efektivitas langkah-langkah minimalisasi risiko atas investasi Perseroan pada sektor TI dan bahwa investasi tersebut memberikan kontribusi terhadap tercapainya tujuan bisnis Perseroan;
   g. Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatannya misalnya dengan mendeteksi keuangan TI dan mengukur efektivitas dan efisiensi penerapan kebijakan pengamanan TI.
2. Melaksanakan *Management Review* (Tinjauan Manajemen) terhadap penyelenggaraan sistem manajemen layanan minimal satu tahun sekali pada setiap bulan Maret serta terhadap hal-hal lain yang bersifat strategis, kritikal, dan mendesak terkait kegiatan penyelenggaraan dan infrastruktur TI yang tidak dapat diselesaikan melalui Komite *Support TI.*
3. Komite Pengarah TI dapat memerintahkan Komite Support TI untuk melakukan rapat komite apabila terdapat hal-hal teknis yang harus segera diselesaikan dan/atau menjadi bahan masukan bagi Komite Pengarah TI dalam membuat rekomendasi kepada Direksi.

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite

Pelaksanaan Tugas dan Frekuensi Rapat Komite

Pelaksanaan tugas Komite Pengarah Teknologi Informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dilakukan sekurang kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau apabila terdapat sesuatu hal yang mendesak dan harus segera diputuskan dalam Komite Pengarah TI. Komite pengarah TI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait implementasi rencana strategis, penyesuaian kebijakan TI, proyek strategis TI dan evaluasi kinerja TI dalam agenda Manajemen *Review*. Berdasarkan hal tersebut, peran serta Komite Pengarah Teknologi Informasi adalah memastikan bahwa implementasi TI sesuai dengan tujuan perseroan dalam pencapaian tujuan bisnis.

Komite Pengarah Teknologi Informasi telah melaksanakan tugasnya lebih dari 2 kali dalam 1 tahun dengan beberapa rekomendasi mengenai dukungan TI di Perseroan, diantaranya:

1. Merekomendasikan untuk menjalankan proyek peremajaan infrastruktur TI dengan tetap berprinsip pada kehati-hatian, namun juga tetap memperhatikan kesesuaian dengan target waktu implementasi dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sehubungan dengan adanya rencana peremajaan infrastruktur TI, maka komite pengarah merekomendasikan untuk menjalankan *Freeze Period Development* dengan pengecualian untuk proyek yang bersifat strategis, *regulatory* dan *compliance*.

Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan memegang peranan strategis dalam menjaga hubungan yang harmonis antara KB Bank dan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perseroan. Dalam kapasitasnya, Sekretaris Perusahaan tidak hanya bertugas sebagai penghubung antara Perseroan, Pemegang Saham, dan Pemangku Kepentingan lainnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap aktivitas Perseroan berjalan sesuai dengan regulasi pasar modal yang berlaku. Tanggung jawab lainnya termasuk penyelenggaraan pertemuan dengan Pemegang Saham serta fasilitasi komunikasi yang transparan antara seluruh pihak terkait. Lebih dari itu, Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam memastikan implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta mematuhi setiap ketentuan hukum yang relevan.

Pembentukan, pengangkatan, dan pelaksanaan fungsi serta tugas Sekretaris Perusahaan, antara lain mengacu pada:
1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep00001/BEI/01-2014 Perihal Perubahan Peraturan No. I-A: Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.

Profil Pejabat Sekretaris Perusahaan



Yocky Eko Wicaksono*

Usia	**41 Tahun**
Kewarganegaraan	**Indonesia**
Domisili	**Jakarta**
Riwayat Pendidikan	**Sarjana Hukum, Universitas Brawijaya, Malang**
Riwayat Pekerjaan	• **Sekretaris Dewan Komisaris** • **Regulasi Manajer dan Kebijakan PT Bank KB Bukopin Tbk** • **Staf Senior Hukum Perusahaan dan Kebijakan PT Bank KB Bukopin Tbk**
Jabatan Lainnya	**-**
Dasar Hukum Pengangkatan	**SKEP /0118-DIR/VIII/2023**

*) Menjabat sejak 8 Agustus 2023 – 1 September 2024



Ariz Dian Perkasa

Usia	**35 Tahun**
Kewarganegaraan	**Indonesia**
Domisili	**Jakarta**
Riwayat Pendidikan	**Sarjana Hukum, Universitas Nasional (2012)**

Riwayat Pekerjaan	• Management Trainee (Management Development Program), PT Bank Kb Bukopin Tbk (2012) • Auditor Internal (2013-2017) • Operations Risk Management (2017-2019) • Branch Operation Manager (2020-2022) • Business Strategic Partnership (2023-2024)
Jabatan Lainnya	-
Dasar Hukum Pengangkatan	SKEP/131-DIR/XI/2024

Tugas dan Tanggung Jawab

Sekretaris Perusahaan memegang peran yang sangat penting dalam menjaga citra KB Bank. Tugas utamanya mencakup pembangunan citra Perseroan melalui fungsi hubungan masyarakat, hubungan dengan investor, dan kesekretariatan. Dia bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil rapat didokumentasikan dengan baik dan disampaikan kepada pihak-pihak yang relevan. Selain itu, Sekretaris Perusahaan harus memastikan adanya komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan, serta memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai kinerja Perseroan.

Sekretaris Perusahaan juga berperan sebagai penghubung antara Perseroan dengan berbagai pihak eksternal, termasuk otoritas pasar modal, pemegang saham, investor, dan media. Informasi mengenai kinerja Perseroan disampaikan melalui beberapa saluran, seperti RUPS, laporan keuangan, siaran pers, pertemuan dengan analis, serta situs web Perseroan di www.kbbank.co.id.

Selain itu, Sekretaris Perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan pasar modal yang berlaku. Mengingat sifat strategis dari tugas dan tanggung jawab ini, Sekretaris Perusahaan melapor langsung kepada Direktur Utama dan memberikan laporan terkait pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Fungsi Sekretaris Perusahaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK/.04/2014 melaksanakan tugas paling kurang:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan publik untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perusahaan yang meliputi:
   a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;
   b. Penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
   c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
   d. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
   e. Pelaksanaan program orientasi terhadap Perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru.
4. Sebagai penghubung antara Emiten atau Perusahaan Publik dengan Pemegang Saham Emiten atau Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Struktur Organisasi Sekretaris Perusahaan

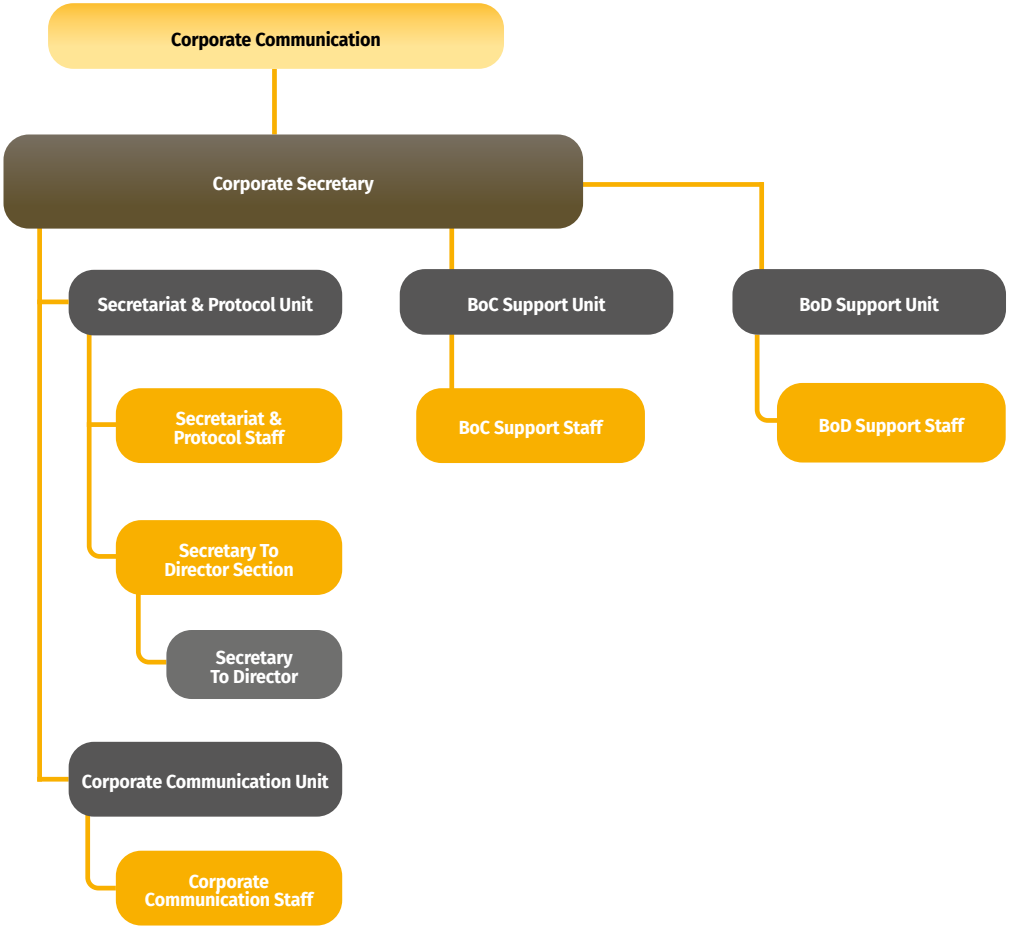

Pelaksanaan Tugas Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan Perseroan telah melaksanakan sejumlah tugas, antara lain:
1. Menyelenggarakan Rapat Direksi, Komisaris, dan Rapat Gabungan antara Direksi dan Komisaris;
2. Melakukan Penyusunan Notulensi dari setiap Rapat;
3. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan Luar Biasa;
4. Mengelola keterbukaan informasi kepada publik dan regulator;
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya terkait dengan regulasi pasar modal dan menyampaikan informasi perkembangan tersebut kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Pemangku kepentingan;
6. Melaksanakan berbagai kegiatan berkaitan dengan pembentukan image Perseroan.

Pengembangan Kompetensi

Peningkatan kemampuan melalui pendidikan dan pelatihan bagi Sekretaris Perusahaan merupakan langkah penting untuk mendukung perannya sebagai penghubung utama antara Perseroan dan pihak eksternal. Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelatihan, *workshop*, dan seminar yang relevan dengan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain:

Nama *Training*	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Training Anti Korupsi & Anti Fraud	19/07/2024	AAFM	Jakarta
Training Finance Budget	04/07/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta
Resertifikasi SMR Jenjang 4 & 5	01/08/2024	BSMR	Jakarta
Induction	17/10/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta
E Learning APU PPT Th 2024 (Aug)	05/08/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta

Keterbukaan Informasi Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, komunikasi Perseroan dengan publik telah dilakukan secara teratur dan transparan. Sekretaris Perusahaan memastikan bahwa informasi yang relevan disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai saluran, termasuk media massa, situs web BEI, dan situs web KB Bank, dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Indonesia dan Inggris. Selain itu, laporan berkala dan insidentil juga telah disampaikan kepada BEI dan OJK, sebagai berikut:

Jenis Laporan	Tujuan	Periode Laporan
Laporan Bulanan Registrasi Pemegang Efek	OJK & BEI	Bulanan
Laporan Keuangan Konsolidasian Bank dan Entitas Anak (*Unaudited*)	OJK & BEI	Triwulanan
Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*)	OJK & BEI	Tahunan
Laporan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan
Laporan Keberlanjutan	OJK & BEI	Tahunan
Laporan Hasil Pemeringkatan Tahunan	OJK & BEI	Tahunan

Laporan Insidentil

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
16-Jan-24	OJK	Laporan Pengangkatan Efektif Sebagai Direktur Strategi PT Bank KB Bukopin Tbk Jung Ho Han
26-Jan-24	OJK & BEI	Penyampaian Ringkasan Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
26-Jan-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Iklan Ringkasan Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
29-Jan-24	OJK	Penyampaian laporan Insidental
31-Jan-24	OJK	Laporan Efektif Beroperasional Kembali Kantor Cabang Medan PT Bank KB Bukopin Tbk
6-Feb-24	OJK	Rencana Perubahan Merek dan Logo PT Bank KB Bukopin Tbk
7-Feb-24	OJK	Penyampaian Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
7-Feb-24	OJK & BEI	Perubahan Struktur Pemegang Saham
16-Feb-24	OJK	Penyampaian Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2024 (RUPSLB)
19-Feb-24	OJK	Rencana Pengurangan Modal PT KB Bukopin Finance Dalam Rangka Konsolidasi Perusahaan
22-Feb-24	OJK	Laporan Evaluasi Produk *Planning Account*-KBstar
22-Feb-24	OJK	Laporan Realisasi Produk *Planning Account*-KBstar
28-Feb-24	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai Pelunasan Obligasi Subordinasi berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II tahun 2017
28-Feb-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Pelunasan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017
29-Feb-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Pelunasan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap II Tahun 2017
1-Mar-24	OJK & BEI	Pengumuman Perubahan Merek dan Logo Bank
5-Mar-24	OJK	Laporan Pengangkatan Efektif sebagai Direktur Teknologi Informasi & Digital PT Bank KB Bukopin Tbk
5-Mar-24	OJK	Penyampaian atas Realisasi Implementasi Perubahan Merek dan Logo PT Bank KB Bukopin Tbk
8-Mar-24	OJK	Penyampaian Perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris KB Kookmin Bank Co.Ltd selaku Pemegang Saham Pengendali PT Bank KB Bukopin Tbk

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
13-Mar-24	OJK	Pelaporan Perubahan Merek dan Logo PT Bank KB Bukopin Tbk
15-Mar-24	OJK	Informasi Rencana pemindahan Alamat Kantor Cabang pembantu (KCP) NTT
21-Mar-24	OJK & BEI	Permohonan Audiensi Berkaitan dengan Rencana atas Transaksi material dan keterbukaan Informasi
28-Mar-24	OJK	Informasi Rencana Pemindahan Alamat KCP Ciceri/Cijawa
28-Mar-24	OJK	Informasi Rencana Pemindahan Alamat KCP Trenggalek
1-Apr-24	OJK & BEI	Pemberitahuan Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Konsolidasian yang Telah Diaudit PT Bank KB Bukopin Tbk ("BBKP") dan Entitas Anak untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2023
3-Apr-24	OJK	Laporan Transaksi Material PT Bank KB Bukopin Tbk
3-Apr-24	OJK	Laporan Informasi atau Fakta Material Terkait Kejadian Yang Menyebabkan Bertambahnya Kewajiban Keuangan
3-Apr-24	OJK & BEI	Pengumuman Perubahan Merek dan Logo Bank
3-Apr-24	OJK	Penyampaian Bukti Iklan
4-Apr-24	OJK	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah (RUPSu) Sukuk Mudharabah IV Tahun 2019 PT HK Realtindo
4-Apr-24	OJK	Pemberitahuan Rapat Umum Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) (RUPMTN) MTN I Tahun 2019 PT HK Realtindo
5-Apr-24	OJK	Laporan atas Kegiatan yang Dilakukan untuk Kepentingan Bank Sendiri
16-Apr-24	OJK	Pemberitahuan Rapat Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang *Medium Term Notes* (MTN) I HK Realtindo Tahun 2019
16-Apr-24	OJK	Pemberitahuan Rapat Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Sukuk MUDHARABAH IV HK REALTINDO TAHUN 2019
16-Apr-24	OJK	keterbukaan informasi atas penggantian Akuntan yang sedang diberikan tugas mengaudit Emiten atau Perusahaan Publik
16-Apr-24	OJK	Laporan Informasi atau Fakta material Pengunduran Komisaris Independen Perseroan
17-Apr-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Iklan
25-Apr-24	OJK & BEI	Tanggapan atas surat OJK perihal Permintaan data dan Informasi terkait penyitaan/ pemblokiran rekening Efek Reksa Dana dalam Penanganan Perkara Hukum
26-Apr-24	OJK	Penjelasan Penggantian Akuntan Publik sesuai S-434/PM.211/2024 22-04-2024
26-Apr-24	OJK	Laporan Penunjukan Akuntan Publik Pengganti dalam rangka Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan pada PT Bank KB Bukopin Tbk Tahun Buku 2023
26-Apr-24	OJK	Permohonan Perubahan Username Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen
14-May-24	OJK & BEI	Pemberitahuan Mata Acara RUPST Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk
15-May-24	OJK	Laporan Notifikasi Awal Insiden TI PT Bank KB Bukopin Tbk
21-May-24	OJK	Laporan Realisasi Penyelenggaraan Kerjasama Bancassurance Model Bisnis Referensi dalam Rangka Produk Bank
21-May-24	OJK	Laporan Insiden TI PT Bank KB Bukopin Tbk
04-Jun-24	OJK & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direksi Perseroan
06-Jun-24	OJK & BEI	Penyampaian Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk
06-Jun-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk
06-Jun-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Pengunduran Diri Direktur PT Bank KB Bukopin Tbk
07-Jun-24	OJK	Permohonan Persetujuan Penilaian Kemampuan Kepatutan Calon Wakil Komisaris Utama PT. Bank KB Bukopin Tbk
14-Jun-24	OJK	Informasi atas Rencana perubahan pengurus
19-Jun-24	OJK & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material Pengunduran Diri Direktur Perseroan
19-Jun-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Keterbukaan Informasi Pengunduran Diri Direktur PT Bank KB Bukopin Tbk

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
2-Jul-24	OJK & BEI	Penyampaian Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk
2-Jul-24	OJK & BEI	Penyampaian Bukti Publikasi Ringkasan Risalah RUPST Tahun 2024 PT Bank KB Bukopin Tbk
2-Jul-24	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pengangkatan Wakil Komisaris Utama PT Bank KB Bukopin Tbk
2-Jul-24	OJK & BEI	Penyampaian Laporan Insidental
3 Juli 2024	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Dodi Widjajanto
3-Jul-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Robby Mondong
3-Jul-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Henry Sawali
3-Jul-24	OJK	Laporan Kepengurusan Perusahaan anak PT Bank KB Bukopin TBk
5-Jul-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Helmi Fahrudin
5-Jul-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Woo Yeul Lee
8-Jul-24	OJK & BEI	Koreksi Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk an Helmi Fahrudin
8-Jul-24	OJK & BEI	Fakta Material Informasi Lainnya - Siaran Pers "Kinerja Perusahaan Terus Membaik, Jajaran Direksi KB Bank Tambah Kepemilikan Saham"
17-Jul-24	OJK & BEI	Permintaan informasi ke OJK Pasar Modal terkait Rencana Penerbitan Global Bond
23-Jul-24	OJK	Penyampaian Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.116 Tanggal 28 Juni 2024
23-Jul-24	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pengangkatan Wakil Komisaris Utama PT Bank KB Bukopin Tbk – Penyelarasan Sertifikasi Manajemen Risiko
26-Jul-24	OJK & BEI	Penyampaian Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST)
26-Jul-24	OJK & BEI	Penyampaian Risalah Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 (RUPST)
30-Jul-24	OJK	Kesiapan Dana Untuk Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021
01-Agu-24	OJK & BEI	Fakta Material Informasi Lainnya - Siaran Pers "KB Bank Optimis Raih Kinerja Positif dengan Sejumlah Perbaikan Signifikan Sepanjang Semester I 2024"
07-Agu-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan saham PT Bank KB Bukopin Tbk
08-Agu-24	OJK	Laporan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dalam rangka Audit atas laporan keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk tahun Buku 2024
22-Aug-24	OJK & BEI	Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham PT Bank KB Bukopin Tbk (Jung Ho Han)
23-Aug-24	OJK & BEI	Permohonan Penjelasan terkait Volatilitas Efek BBKP
29-Aug-24	OJK	Permohonan Persetujuan Penilaian Kemampuan & Kepatutan Calon Direktur Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk - Seng Hyup Shin (Wakil Komisaris Utama)
2-Sep-24	OJK & BEI	Pemberitahuan Pengunduran diri Sekretaris Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk - Yocky E Wicaksono
2-Sep-24	OJK	Peningkatan Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM sebagai Mitigasi Tindak Kejahatan Ekonomi Terutama Transaksi Perjudian Daring
3-Sep-24	OJK	Informasi Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (“KCP”) - KCP Dolog ke KCP Bratang
4-Sep-24	OJK	Informasi Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (“KCP”) - Purbalingga ke Purwokerto
9-Sep-24	OJK & BEI	Laporan Informasi atau Fakta Material mengenai Pelunasan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021

Tanggal	Perihal Laporan	Perihal
9-Sep-24	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk
17-Sep-24	OJK & BEI	Perubahan Anggota Komite Audit PT Bank KB Bukopin Tbk
24-Sep-24	OJK	Informasi Rencana Penutupan Kantor Cabang Pembantu (KCP) - Univ Esa Unggul Tomang
14-Oct-24	OJK	Penyampaian Kelengkapan Dokumen Permohonan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) atas Pengangkatan Direktur Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk (Jang Hyuk Im)
14-Oct-24	OJK & BEI	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* "Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang, KB Bank Terbitkan Obligasi Global"
22-Oct-24	OJK	Laporan Kepengurusan Perusahaan Anak PT Bank KB Bukopin Tbk
25-Oct-24	OJK & BEI	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* "Investor Global Respon Positif
1-Nov-24	OJK & BEI	Terhadap Rencana Penerbitan Perdana Obligasi Global KB Bank"
4-Nov-24	OJK & BEI	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* Hingga Kuartal III 2024, KB Bank Catat Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih Sebesar 84,15 Persen
7-Nov-24	OJK	Laporan Penggantian Sementara Jabatan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
6-Nov-24	OJK	Penyampaian Laporan Sinergi Penambahan LSBU KB Bank
20-Nov-24	SPE OJK	Informasi Rencana Pemindahan Alamat Kantor Cabang Pembantu (KCP) Purbalingga ke KCP Tasikmalaya Sutisna
2-Dec-24	OJK & BEI	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* Konsisten Catat Pertumbuhan Bisnis, KB Bank Kembali Raih Peringkat AAA dari PEFINDO
2-Dec-24	OJK & BEI	Pemberitahuan Penunjukan Sekretaris Perusahaan PT Bank KB Bukopin Tbk
2-Dec-24	OJK & BEI	Bukti iklan Laporan Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material PT Bank KB Bukopin Tbk
10 Des 24	OJK & BEI	Bukti Iklan Perubahan *Corporate Secretary*
12-Dec-24	OJK	Penyampaian Dokumen Pendukung Laporan Publikasi Tahunan KB Bank Tahun 2023
12-Dec-24	OJK	Pemberitahuan hasil RUPO Obligasi IV waskita Karya Tahun 2022
13 Des 24	OJK	Pemberitahuan hasil RUPSU Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022
16 Des 24	OJK	Laporan atas Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk
19-Dec-24	SPE IDX	Penyesuaian Kebijakan tentang strategi anti fraud PT Bank KB Bukopin Tbk
19-Dec-24	OJK	Penyampaian Informasi Fakta Material Press Release "Dukung Proyek Strategis Tripatra, KB Bank Perkuat Kemitraan Melalui Pembiayaan Vendor"
20-Dec-24	SPE IDX	Laporan Pengangkatan Efektif sebagai Direktur Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk (jang Hyuk Im)
20-Dec-24	OJK	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* "Paparkan Kinerja Perseroan, BBKP Targetkan Turnaround di 2025"
24-Dec-24	SPE IDX	Laporan Transaksi Afiliasi PT Bank KB Bukopin Tbk KBBF
17-Dec-24	OJK	Penyampaian Informasi Fakta Material *Press Release* "Dukung Industri Strategis Nasional, KB Bank Perkuat Modal Kerja PT Inka"

Satuan Kerja Audit Intern

SKAI merupakan satuan kerja independen yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjalankan fungsi audit intern. Hal ini terlihat dalam SK Direksi No. 101 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi PT Bank KB Bukopin Tbk, dimana Satuan Kerja Auditor Internal (SKAI) secara struktural bertanggung jawab dan memiliki jalur pelaporan administratif langsung kepada Direktur Utama dan jalur pelaporan fungsional kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.

SKAI berperan memberikan fungsi *assurance* dengan menganalisis secara mendalam atas akar permasalahan temuan *audit* dan fungsi *consulting/advisory* secara proaktif dengan cara memberikan saran perbaikan yang membangun kepada para pemangku kepentingan yang independen serta objektif yang dapat memberi *added value* dalam rangka membantu Bank mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan pelaksanaan *audit* yaitu untuk memastikan aktivitas perusahaan telah sesuai dengan rencana stratejik yang telah ditetapkan dan pelaksanaannya telah disertai dengan tata kelola yang baik, manajemen risiko, dan proses pengendalian intern yang memadai.

Piagam Audit Intern

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Audit Internal, SKAI berpegang teguh pada Piagam Audit Intern tanggal 14 Desember 2022 yang ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit. Piagam Audit Intern merupakan pedoman/landasan kerja SKAI yang berisikan struktur dan kedudukan SKAI, tugas dan tanggung jawab, wewenang, visi, misi, fungsi, tujuan, dan ruang lingkup pekerjaan.

Profil Kepala Satuan Kerja Audit Intern



Roby Endrama Purba
Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Usia	**45 Tahun**
Kewarganegaraan	**Indonesia**
Domisili	**Jakarta**
Riwayat Pendidikan	**S1 Akuntansi, Universitas Airlangga Surabaya**
Riwayat Pekerjaan	• **Head of Internal Audit PT AXA Mandiri Financial Service (2019-2022)** • **Head of Internal Audit IPC Investment Company (2018- 2019)** • **Head Office Audit Group Head PT Bank CIMB Niaga Tbk (2016- 2018)**
Jabatan Lainnya	-
Dasar Hukum Pengangkatan	**SKEP/0015-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022**

Pihak yang Mengangkat dan Memberhentikan Kepala Satuan Kerja Audit Intern

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 1/POJK.03/2019, POJK No. 56/POJK.04/2015, dan *Internal Audit Charter* PT Bank KB Bukopin Tbk, Kepala Satuan Kerja Audit Internal diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit. Pemberhentian Kepala Satuan Kerja Audit Intern dapat dilakukan oleh Direktur Utama setelah persetujuan Dewan Komisaris, jika tidak memenuhi persyaratan auditor atau tidak menjalankan tugas dengan baik.

Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam Struktur Pengendalian Intern Perseroan, Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) memiliki peran utama untuk mendukung Dewan Komisaris dan Direktur Utama dalam mencapai tujuan Perseroan. SKAI melakukan penilaian independen terhadap manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola. Penilaian ini dilakukan melalui analisis dan penelitian di berbagai bidang seperti keuangan, akuntansi, dan operasional, yang dilakukan melalui pemeriksaan langsung di lokasi (*on-site*) maupun pemantauan jarak jauh (*off-site*). SKAI juga memberikan rekomendasi perbaikan serta informasi objektif kepada manajemen. Selain itu, tanggung jawab SKAI mencakup memastikan bahwa fungsi audit internal berjalan sesuai dengan Standar Profesional Audit Internal dan Kode Etik Audit Internal.

Kewenangan Satuan Kerja Audit Internal

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Bank terkait dengan tugas dan fungsi SKAI;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
3. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit;
4. Melakukan koordinasi kegiatan terkait pengawasan dengan auditor ekstern;
5. Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara;
6. Mengusulkan perubahan Piagam Audit Internal sesuai perkembangan lingkungan yang terkait dengan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
7. Mengalokasikan sumber daya auditor intern;
8. Mengusulkan mutasi, mengikuti pendidikan & pelatihan dan program sertifikasi profesi bagi auditor intern;
9. Menggunakan tenaga ahli/spesialis dari luar Perseroan jika diperlukan.

Ruang Lingkup Audit Intern

Ruang lingkup pekerjaan SKAI meliputi pemeriksaan dan evaluasi terhadap aktivitas-aktivitas Perseroan yang mencakup:

1. Efektivitas, efisiensi, dan kecukupan sistem pengendalian intern, manajemen risiko dan tata kelola secara kesinambungan.
2. Keandalan, efektivitas, integritas dari proses dan, sistem manajemen informasi, termasuk relevansi, akurasi, kelengkapan, ketersediaan, serta kerahasiaan data.
3. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kualitas kinerja organisasi.
5. Kegiatan SKAI sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku bagi Perseroan secara keseluruhan termasuk Perusahaan Anak, Kantor Cabang dan kegiatan Perseroan yang diserahkan kepada pihak ekstern.

Struktur Organisasi Audit Internal dan Jumlah Pegawai

Satuan Kerja Audit Intern dalam Perseroan terbagi atas 3 (tiga) Departemen, yaitu:

1. *Channel & Special Audit*
   a. *Region I-V Audit Unit*;
   b. *Region I-V Auditor*;
   c. *Special Audit Unit*;
   d. *Special Auditor*.
2. *Professional Practices Audit*
   a. *Quality Assurance, Development & Data Analytics Unit;*
   b. *Quality Assurance, Development & Data Analytics Specialist;*
   c. *Audit Methodology, Reporting & Support Unit;*
   d. *Audit Methodology, Reporting & Support Specialist*
3. *HQ, IT & Subsidiary Audit*
   a. *HQ Business Audit Unit;*
   b. *HQ Business Auditor;*
   c. *Enablers & Risk Management Audit Unit;*
   d. *Enablers & Risk Management Audit Auditor;*
   e. *Finance & Subsidiary Audit Unit;*
   f. *Finance & Subsidiary Auditor;*
   g. *IT Assurance Audit Unit;*
   h. *IT Assurance Auditor;*
   i. *IT Development Audit Unit;*
   j. *IT Development Auditor.*

Setiap Departemen dipimpin oleh seorang Kepala Departemen yang bertempat di Kantor Pusat, dengan jumlah staf yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan.

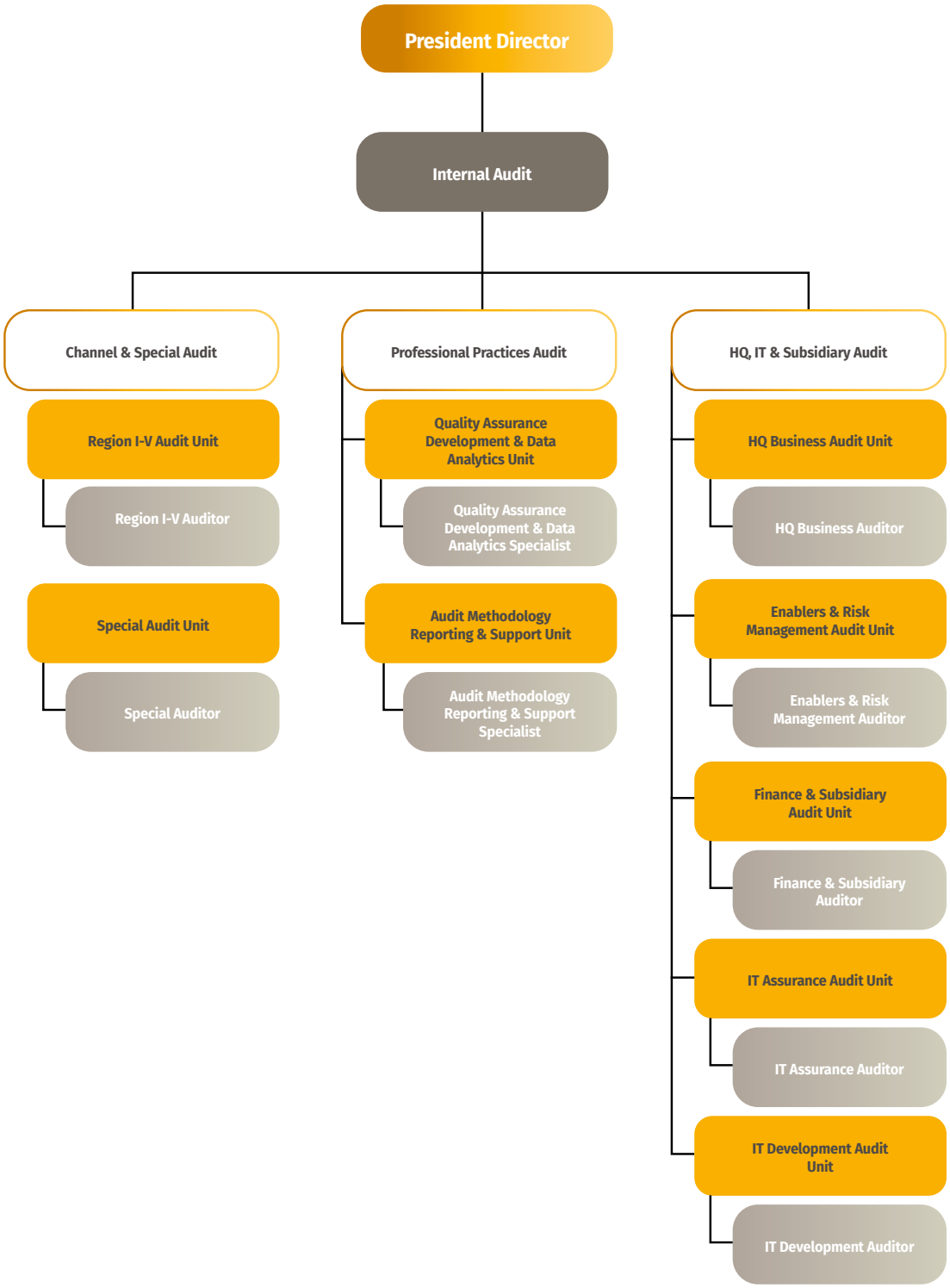

Kedudukan Satuan Kerja Audit Intern dalam Struktur Organisasi

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) adalah fungsi independen yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit. SKAI merupakan salah satu unsur dari Sistem Pengendalian Internal yang berada pada *layer* ketiga dalam *Three Line of Defense* yang memiliki fungsi membantu Manajemen dalam mencapai tujuan Perseroan melalui penilaian yang independen atas pengendalian internal, penilaian risiko dan tata kelola perusahaan.

Komposisi Personel SKAI

Satuan Kerja Audit Internal memiliki 43 (empat puluh tiga) karyawan sebagai berikut:

Jabatan	Jumlah Personel
Kepala SKAI	1
Kepala Departemen	3
Manajer	12
Auditor	24
Professional Practices Audit Specialist	3
Jumlah	**43**

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Intern

	Sertifikasi	Jumlah Orang
Nasional	Sertifikasi Internal Audit	
	Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan	2
	Qualified Internal Auditor Tingkat *Managerial*	4
	Certified Banking Internal Audit Level *Auditor*	13
	Certified Banking Internal Audit Level *Supervisor*	4
	Sertifikasi Manajemen Risiko	
	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4	17
	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5	14
	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6	1
	Sertifikasi Audit Forensik	
	Certified Forensic Auditor (CFrA)	3
Internasional	Sertifikasi Sistem Informasi Audit	
	Certified Information System Auditor (CISA)	2
	Sertifikasi Keamanan Siber	
	Certified Ethical Hacker (CEH)	1

Kode Etik Auditor

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, SKAI juga mengikuti Kode Etik Auditor yang tercantum dalam *Internal Audit Charter*. Kode Etik Auditor Internal ini berisi norma dan asas terkait dengan kepatutan dan kepantasan yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh auditor intern, yang paling sedikit mencakup kode etik pelaksanaan audit intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern.

1. Independen
   Auditor intern memiliki independensi dalam melakukan aktivitas audit dan aktivitas investigasi, mengemukakan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar yang berlaku.
2. Integritas
   Auditor Intern harus melaksanakan pekerjaannya secara jujur, hati-hati dan bertanggung jawab.
3. Objektivitas
   Auditor Intern bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) atas objek atau aktivitas yang diperiksa.
4. Kerahasiaan
   Auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkap informasi tersebut tanpa kewenangan yang sah, kecuali diharuskan oleh hukum atau profesi.
5. Kompetensi
   Auditor intern menerapkan pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang diperlukan dalam memberikan jasa audit intern.
6. Profesionalisme
   Profesionalisme menjadi acuan dalam aktivitas audit, untuk itu auditor intern memiliki integritas, sikap mental yang independen, dapat diandalkan, tegas, jujur dan terpercaya.

Pengembangan Kompetensi Audit Intern

Seiring dengan tantangan baru yang dihadapi Perseroan, kebutuhan untuk memperkuat kompetensi tim Internal *Audit* menjadi semakin penting. SKAI Perseroan menyusun program peningkatan kompetensi melalui pelatihan, *workshop*, dan sertifikasi profesi, baik nasional maupun internasional, guna memastikan kualitas audit yang lebih baik.

No.	Nama Training	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	*MS Excel LV. Advance*	Februari 2024	*Learning Center* KB Bank	Menara Sentraya Jakarta
2	*Negotiating with Confidence: Building Assertiveness Skill for Auditors*	Maret 2024	Ikatan Auditor Intern Bank	Webinar
3	*Fussion Essence Functional Training Swamitra, Fusion Trade Finance Innovation, Fusion Essence Functional Training Opics*	Maret 2024	DXC	Menara Sentraya Jakarta
4	*Basel III Reform for Credit & Market Risk*	April 2024	Ikatan Auditor Intern Bank	Webinar
5	Penilaian Tingkat Maturitas Digital Bank	Mei 2024	Intellectualbiz	Kuningan Jakarta
6	*Finance Budget*	Juli 2024	Learning Center KB Bank	Menara Sentraya Jakarta
7	*Elevating Internal Audit as a Value Driver: Achieving Business Resilience in the Era of Digitalization*	Juli 2024	YPIA	Yogyakarta
8	*ITIL V4 Fundamental*	Juli 2024	PT. Andalan Teknologi Inovasi	Jakarta
9	APU PPT	September 2024	Learning Center KB Bank	Menara Sentraya Jakarta
10	Perlindungan Data Pribadi (PDP)	Oktober 2024	Learning Center KB Bank	Teams
11	*Audit Report Writing*	Oktober 2024	Ikatan Auditor Intern Bank	Menara Sentraya Jakarta
12	*Risk & Governance Summit* 2024	November 2024	OJK	Webinar
13	Prospek Ekonomi Tahun 2025 Mencapai Indonesia Emas 2045	Desember 2024	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Webinar

Pelaksanaan Tugas dan Hasil Temuan *Audit* Tahun 2024

Metode *Audit*

SKAI menjalankan fungsi pengawasan internal sesuai dengan Rencana *Audit* Tahun 2024 yang telah disusun dengan pendekatan *Audit* Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Fokus utama dari audit ini adalah pada proses bisnis dan risiko inheren, dengan pelaksanaan *audit* yang difokuskan pada area-area dengan risiko tinggi yang berpotensi menghambat pencapaian target bisnis atau kegiatan operasional.

Pelaksanaan Kegiatan *Audit* Tahun 2024

Berikut adalah uraian mengenai pelaksanaan *audit* tahun 2024:

Audit Area	*Plan*	*Realization*	*%*
Planned Audit:			
Branch Regional	97	97	100%
Group/Department	25	27	108%
IT	5	5	100%
Subsidiary	1	1	100%
Total Planned Audit	128	130	102%
Unplanned Audit:			
IT		2	
Total	**128**	**132**	**103%**

Audit Type	Plan	Realization	%
Planned Audit:			
Audit Umum	112	112	100%
Audit Tematik	4	4	100%
Audit Khusus	12	14	117%
Total Planned Audit	128	130	102%
Unplanned Audit:			
Audit Tematik		2	
Total	**128**	**132**	**103%**

Temuan dan Tindak Lanjut Hasil *Audit*

KB Bank telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan *Audit Intern* yang dilakukan sepanjang tahun 2024, dengan tingkat persentase tindak lanjut mencapai 90%.

Evaluasi Kinerja Satuan Kerja *Audit* Internal

Evaluasi dan *review* telah dilakukan oleh Kantor Akuntan Parker Russell Internasional , yang terdaftar sebagai Akuntan Publik. Proses *review* ini mencakup periode 01/07/20 hingga 30/06/23, dengan tujuan untuk memastikan dan meyakinkan bahwa kegiatan audit internal SKAI mematuhi Ketentuan POJK No. 1/POJK.03/2019, *International Professional Practices Framework* (IPPF).

Hasil penilaian terhadap kesesuaian dengan POJK serta IPPF bahwa Kesimpulan pelaksanaan fungsi Audit Intern PT Bank KB Bukopin, Tbk dari 15 (lima belas) sub area yang dikaji ulang, 11 (sebelas) diantaranya disimpulkan *Generally Conform* (GC), 3 (tiga) diantaranya disimpulkan *Partially Conform* (PC), dan 1 (satu) disimpulkan *Not Applicable* (N/A) karena *sub area* tersebut tidak diterapkan. Kaji ulang periode berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2026.



Akuntan Publik

Sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan, Bank menerapkan sistem pengawasan independen melalui pemeriksaan oleh Auditor Eksternal. Audit ini dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Proses pemilihan Auditor Eksternal dilakukan secara ketat sesuai dengan prosedur pengadaan yang berlaku, guna memastikan independensi serta kualitas audit yang optimal. Untuk tahun buku 2024, KB Bank menunjuk Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Global), yang telah terdaftar di Bank Indonesia dan OJK, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan laporan keuangan Perseroan.

Kebijakan Penunjukan Akuntan Publik

Dalam rangka menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan mengenai audit laporan keuangan oleh Akuntan Publik. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 6/POJK.03/2015, laporan keuangan per 31 Desember yang dipublikasikan secara triwulanan dan tahunan harus melalui proses audit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.

Selain itu, guna memastikan independensi dan kualitas audit, OJK membatasi penggunaan jasa Akuntan Publik yang sama untuk audit laporan keuangan tahunan maksimal selama tiga tahun berturut-turut. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan OJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, yang mulai berlaku sejak 27 Maret 2017.

Nama dan Tahun Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik (Partner Penanggung Jawab)	Periode	*Fee* (Rp)	Opini	Izin KAP
2024	Mirawati Sensi Idris	Denny Susanto	1 Tahun	2.400.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No.327/KM.1/2023
2023	Mirawati Sensi Idris	Denny Susanto	1 Tahun	2.430.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No.327/KM.1/2023
2022	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Denny Susanto	1 Tahun	1.700.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/KM.1/2015
2021	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Denny Susanto	1 Tahun	1.600.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/KM.1/2015
2020	Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan	Mulyadi	1 Tahun	1.600.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/KM.1/2015
			30 September 2020 (*Limited Review*)	1.100.000.000	Wajar dalam semua hal yang material	No. 854/KM.1/2015

Jasa Lain yang Diberikan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik Selain Jasa Audit Laporan Keuangan Tahunan pada Tahun Buku Terakhir

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, tidak terdapat jasa lain yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Moore Global) selain jasa audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2024.

Koordinasi Auditor Eksternal dan Komite Audit

Selama periode pemeriksaan, Bank menerapkan komunikasi yang transparan dengan auditor eksternal dengan menyediakan informasi serta data pemeriksaan secara lengkap. Kolaborasi yang erat dijalin untuk membahas kebijakan akuntansi terkini serta perkembangan kebijakan perpajakan, sehingga Laporan Keuangan Bank dapat disusun dengan wajar dan akurat. Dengan pendekatan ini, terbentuk kerangka kerja yang efektif antara Bank dan auditor eksternal guna memastikan integritas serta transparansi dalam proses pemeriksaan. Langkah ini sejalan dengan Piagam Komite Audit serta Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yang diantaranya menyatakan:
Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*;
2. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal (Satuan Kerja *Audit* Internal), auditor eksternal (Kantor Akuntan Publik) dan lembaga pengawas Bank (BI, OJK atau Lembaga Otoritas Lainnya) dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan tersebut.



Manajemen Risiko

Keberlanjutan bisnis sangat bergantung pada kemampuan Perseroan dalam mengelola berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek krusial dalam strategi Perseroan guna menjaga stabilitas operasional dan menghadapi ketidakpastian di masa depan. Dengan pendekatan yang sistematis, Perseroan dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi risiko, sehingga mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan serta memberikan nilai lebih bagi para pemangku kepentingan.

Dalam menghadapi tantangan ekonomi yang semakin kompleks, baik di skala nasional maupun global, Perseroan perlu menerapkan sistem pengelolaan risiko yang terintegrasi dan efektif. Proses ini mencakup tahapan identifikasi, analisis, pemantauan, dan mitigasi risiko di setiap aspek bisnis. Selain itu, Perseroan juga terus memperkuat infrastruktur teknologi serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar penerapan manajemen risiko semakin optimal.

Dengan menjalankan manajemen risiko secara konsisten, Perseroan dapat memastikan bahwa setiap aktivitas bisnisnya berjalan sesuai dengan standar pengelolaan risiko yang telah ditetapkan. Hal ini tidak hanya menjaga stabilitas Perseroan, tetapi juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Dalam mengelola risiko, Perseroan mengacu pada berbagai regulasi eksternal, di antaranya:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 18/POJK.03/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum;
2. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak;
5. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 27/SEOJK.03/2016, tanggal 14 Juli 2016 tentang Kegiatan Usaha Bank Umum Berdasarkan Modal Inti;
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Prinsip Kehati-hatian dalam Kegiatan Penyertaan Modal;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Bank Umum.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

Dalam menjalankan setiap aktivitas bisnis, Perseroan senantiasa memperhatikan potensi risiko yang mungkin timbul. Untuk mengelola risiko tersebut, Perseroan berpedoman pada:

1. Kebijakan Manajemen Risiko KB Bank merupakan aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis KB Bank. (Surat Keputusan No. 0149 Tahun 2022 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Bank KB Bukopin).
2. Kebijakan maupun pedoman internal yang berkaitan dengan manajemen risiko di antaranya:
   a. Kebijakan Manajemen Risiko Kredit KB Bank;
   b. Kebijakan Manajemen Risiko Pasar dan Likuiditas KB Bank;
   c. Kebijakan Manajemen Risiko Operasional KB Bank;
   d. Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan KB Bank;
   e. Pedoman Manajemen Risiko Hukum KB Bank;
   f. Pedoman Manajemen Risiko Reputasi KB Bank;
   g. Pedoman Manajemen Risiko Stratejik KB Bank;
   h. Pedoman Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Kredit;
   i. Pedoman Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Pasar;
   j. Pedoman Pelaksanaan *Stress Test* Risiko Likuiditas;
   k. Pedoman Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas (*Liquidity Coverage Ratio*);
   l. Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio);*
   m. Kebijakan *Risk Appetite* KB Bank;
   n. Mekanisme Pengukuran Risiko Atas Penyelenggaran Produk Bank;
   o. Kebijakan Produk Program KB Bank;
   p. Piagam Komite Manajemen Risiko KB Bank;
   q. Kebijakan Pengelolaan Permodalan KB Bank;

Struktur Organisasi Manajemen Risiko

Struktur organisasi serta peran Manajemen Risiko di KB Bank dirancang untuk memastikan pengelolaan risiko yang efektif dan terintegrasi. Berikut adalah susunan organisasi dan fungsi utama dalam Manajemen Risiko KB Bank:

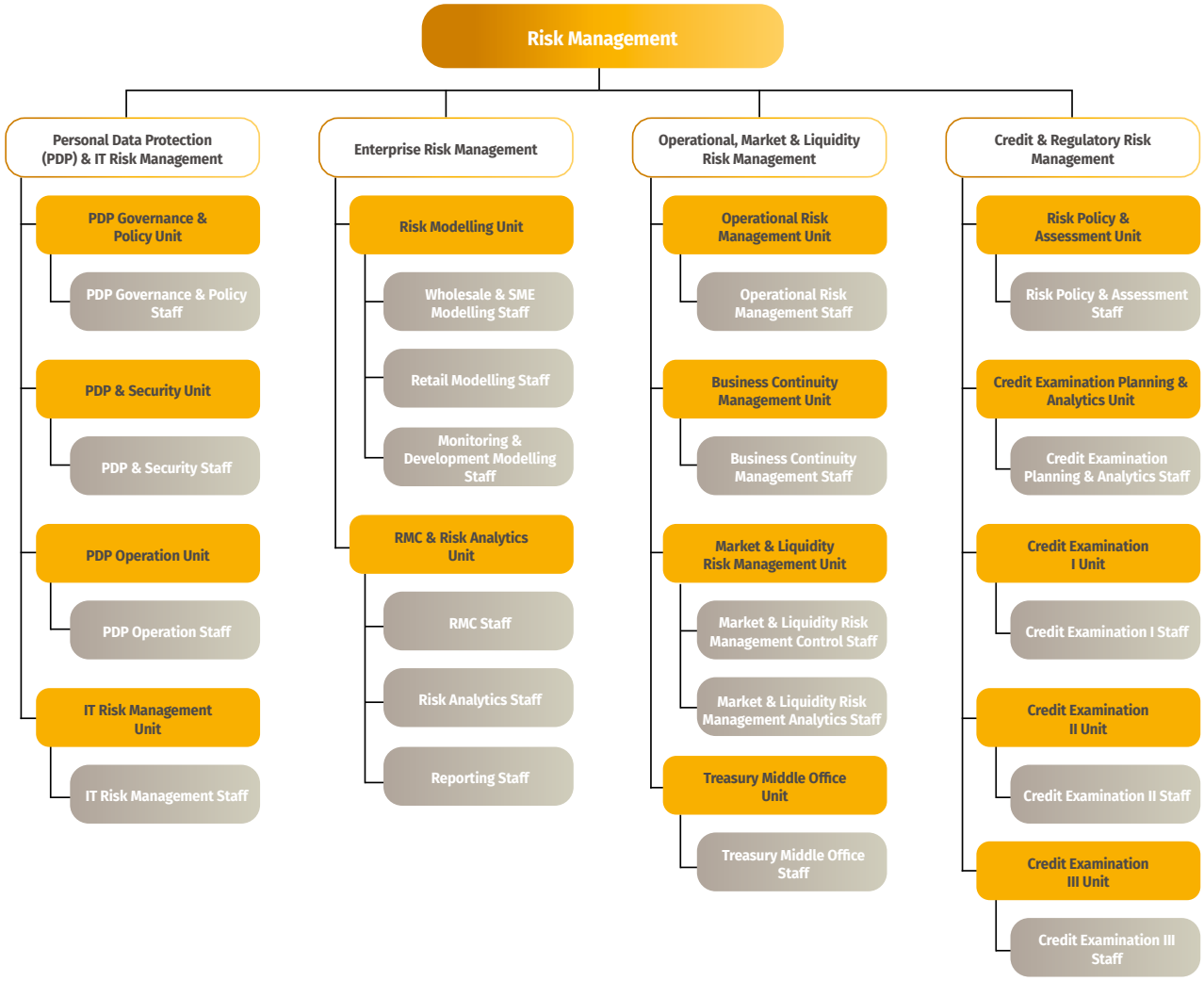

Untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif, Perseroan telah merancang struktur organisasi yang terperinci dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas di setiap bagian. Struktur ini disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, serta skala dan kompleksitas kegiatan bisnis Perseroan.

Perseroan memahami bahwa manajemen risiko harus diterapkan di seluruh level dan unit kerja. Oleh karena itu, struktur organisasi yang dibangun bersifat inklusif, mencakup berbagai entitas, seperti Komite Pemantau Risiko, Komite Manajemen Risiko, Satuan Kerja Manajemen Risiko, *Risk Taking Unit*, dan Satuan Kerja Audit Internal.

Dalam struktur organisasi Bank, terdapat Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Kepatuhan yang beroperasi secara independen dari grup bisnis, operasional, serta divisi atau departemen pendukung lainnya (*Risk Taking Unit*). Kedua satuan kerja ini memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang muncul dari aktivitas bisnis.

Selain itu, Satuan Kerja Audit Internal bertanggung jawab atas pengendalian internal. Unit ini memastikan bahwa standar dan prosedur pengendalian internal diterapkan secara konsisten di seluruh organisasi serta melakukan evaluasi independen terhadap efektivitas sistem pengendalian tersebut.

Dengan struktur organisasi yang kuat dan terintegrasi, Perseroan dapat mengelola risiko secara lebih efektif di berbagai aspek kegiatan bisnis serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Divisi Manajemen Risiko berfungsi sebagai Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam Perseroan dan dipimpin oleh Kepala Divisi (*Division Head*), yang melapor kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Divisi ini terdiri dari beberapa Departemen/ Unit, sebagai berikut:

1. *Personal Data Protection (PDP) & IT Risk Management*
   a. *PDP Governance & Policy Unit*
   b. *PDP & Security Unit*
   c. *PDP Operation Unit*
   d. *IT Risk Management Unit*
2. *Enterprise Risk Management Department*
   a. *Risk Modelling Unit*
   b. *RMC & Risk Analytics Unit*
3. *Operational, Market & Liquidity Risk Management Department*
   a. *Operational Risk Management Unit*
   b. *Business Continuity Management Unit*
   c. *Market & Liquidity Risk Management Unit*
   d. *Treasury Middle Office Unit*

4. *Credit & Regulatory Risk Management Department*
   a. *Risk Policy & Assessment Unit*
   b. *Credit Examination Planning & Analytics Unit*
   c. *Credit Examination I Unit*
   d. *Credit Examination II Unit*
   e. *Credit Examination III Unit*

Satuan Kerja Manajemen Risiko memiliki tugas utama dalam menetapkan kebijakan serta prosedur manajemen risiko. Selain itu, satuan kerja ini juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan, menguji, dan melaporkan pengukuran risiko yang disampaikan oleh para pemilik risiko. Proses penetapan kebijakan dalam penerapan manajemen risiko dilakukan melalui persetujuan Direksi.

Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko

Wewenang dan tanggung jawab yang dimiliki oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko mencakup:
1. Mengembangkan dan meninjau ulang secara berkala strategi dan kerangka manajemen risiko secara keseluruhan termasuk kebijakan, prosedur dan proses manajemen risiko;
2. Memantau pelaksanaan strategi, kerangka dan kebijakan manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi;
3. Merekomendasikan *limit* portofolio dan memastikan kepatuhannya terhadap *limit* tersebut;
4. Memantau eksposur risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko;
5. Melakukan *stress testing* untuk mengetahui dampak perubahan kondisi makro yang signifikan terhadap portofolio atau kinerja Bank secara keseluruhan;
6. Mengkaji risiko atas usulan produk bank;
7. Evaluasi terhadap akurasi internal model dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko;
8. Memberikan rekomendasi kepada grup bisnis, grup operasional dan grup/divisi/departemen pendukung lainnya (*Risk Taking Unit*) dan/atau kepada Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki;
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko kepada Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko, Direktur Utama dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

Pengembangan Kompetensi Bidang Manajemen Risiko

Berikut adalah pengembangan kompetensi yang telah diikuti oleh anggota Satuan Kerja Manajemen Risiko sepanjang tahun 2024:

No.	Nama *Training*	Periode	Penyelenggara	Tempat
1	*Training Key User Training (KUT) Loas*	05/02/2024	DXC	JAKARTA
2	*Legal Sharing*	07/03/2024	AULIA TAUFANI	JAKARTA
3	*Maturitas Digital Bank*	07/05/2024	IBC	JAKARTA
4	*IFRS & CIT FE System NGBS*	08/07/2024	INTERNAL HOUSE (DIKLAT)	JAKARTA
5	*Online APU PPT For Executive*	05/11/2024	RINTO TEGUH	JAKARTA

Sertifikasi Manajemen Risiko

Level Sertifikasi	Jabatan	Jumlah Pegawai
Risk Management - Qualification IV	*Staff* dan *Manager*	19
Risk Management - Qualification V	*Manager* dan *Department Head*	9

Sistem Manajemen Risiko

Sistem manajemen risiko diterapkan secara terintegrasi dengan menggunakan 4 (empat) pilar, yaitu:

Pilar I Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Penerapan manajemen risiko di Bank, baik secara terpisah maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, memerlukan pengawasan dan supervisi aktif dari Direksi dan Dewan Komisaris. Untuk memastikan manajemen risiko diterapkan dengan efektif, Direksi dan Dewan Komisaris harus memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko, mengembangkan budaya manajemen risiko, dan memastikan bahwa penerapan manajemen risiko sesuai dengan karakteristik serta kompleksitas operasional Bank dan Perusahaan Anak.

Menurut Surat Keputusan Direksi No. 005 Tahun 2019 mengenai Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko PT Bank KB Bukopin Tbk, salah satu tugas Komite Pemantau Risiko adalah:

1. Membuat program kerja atau rencana tahunan Komite Pemantau Risiko dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
2. Melakukan Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan perseroan;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
4. Melakukan evaluasi kebijakan manajemen perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun bersama Dewan Komisaris;
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko perseroan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan bersama dengan Dewan Komisaris;
6. Melakukan evaluasi atas Laporan *Self Assessment* Penerapan Tata Kelola;
7. Membuat, mengkaji dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Kerja Pemantau Risiko secara *periodic*;
8. Melakukan tugas-tugas lain selain disebutkan diatas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai dengan tugas dan fungsinya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Komisaris dilakukan melalui forum Rapat Gabungan Direksi dan Komisaris, maupun dalam rapat Komite Pemantau Risiko, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Audit.

Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Pemantau Risiko secara berkala mengadakan pertemuan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang disampaikan dalam notulen. Adapun rapat Komite Pemantau Risiko dengan pembahasan Laporan Profil Risiko telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali untuk profil risiko individu dan 4 (empat) kali untuk profil risiko konsolidasi sepanjang tahun 2024. Selain pembahasan Profil Risiko, dilakukan juga pembahasan isu-isu terkait aktivitas penerapan manajemen Risiko termasuk menyetujui kebijakan, strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi risiko (*Risk Tolerance*) serta melakukan evaluasi secara berkala atas aktivitas manajemen Risiko.

Untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko terlaksana dengan efektif, Perseroan mengacu pada Tata Kelola Risiko yang telah ditetapkan. Tata Kelola Risiko ini berfungsi sebagai dasar yang jelas dalam menetapkan peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, serta hubungan antara berbagai fungsi pengelolaan Risiko di seluruh Perseroan.

Dalam kerangka Tata Kelola Risiko, setiap fungsi memiliki peran yang terdefinisi dengan jelas dalam pengelolaan Risiko. Ini mencakup tahap identifikasi, penilaian, pemantauan, dan pengendalian Risiko di berbagai level dan unit kerja. Selain itu, Tata Kelola Risiko juga mengatur prosedur pengambilan keputusan yang terstruktur dan terkoordinasi guna memastikan pengelolaan Risiko yang efektif.

Keterkaitan antara berbagai fungsi pengelolaan Risiko diatur secara rinci dalam Tata Kelola Risiko. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap keputusan terkait Risiko dipertimbangkan secara menyeluruh, dengan memperhatikan dampaknya terhadap seluruh Perseroan. Tak kalah penting, kebijakan yang diperlukan untuk pengelolaan Risiko yang efektif juga ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Tata Kelola Risiko yang sudah ditentukan.

Pengawasan Direksi

Fungsi pengawasan Direksi dilaksanakan melalui forum Rapat Direksi (Radir) dan Rapat Komite Manajemen Risiko (KMR), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. KMR 17 Januari 2024 dengan agenda:
   a. *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (sebagai informasi).
   b. Laporan Profil Risiko Q4-2023 (sebagai persetujuan).
   c. Penguatan Manajemen NSFR (sebagai informasi).
2. KMR 21 Februari 2024 dengan agenda:
   a. *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (sebagai informasi)
   b. *Stress Test Credit, Market, Liquidity* Triwulanan (Triwulan 4 2023) (sebagai persetujuan)
   c. Pemantauan RWA *Limit Pilot Project* (sebagai persetujuan)
   d. Rencana untuk *Update* Kebijakan *Business Continuity Management* (BCM) (sebagai persetujuan).
   e. Manajemen Penguatan Likuiditas (sebagai informasi).
   f. Laporan Risiko Bulanan Januari 2024 (sebagai informasi)
3. KMR 24 April 2024 dengan agenda:
   a. Laporan Profil Risiko Q1 2024 (sebagai persetujuan).
   b. Penguatan Manajemen NSFR (sebagai informasi).
4. KMR 29 Mei 2024 dengan agenda:
   a. *Bottom Up Stress Test* Periode Maret 2024 (persetujuan).
   b. Stress Test Triwulan 1 2024 (persetujuan).
   c. Manajemen Penguatan Likuiditas April 2024 (informasi).
   d. Laporan Risiko Bulanan April 2024 (informasi).
5. KMR 25 Juni 2024 dengan agenda:
   a. ICAAP (*Capital Management*) (sebagai persetujuan)
   b. *Credit Examination* (sebagai laporan)
   c. Laporan Risiko Bulanan Mei 2024 (sebagai informasi)
6. KMR 17 Juli 2024 dengan agenda:
   a. Laporan Profil Risiko Individu Triwulan II 2024 (sebagai persetujuan).
   b. Laporan KPMM berdasarkan Profil Risiko Q2-2024 (sebagai persetujuan).
   c. Tindak Lanjut Optimalisasi RWA Kredit (sebagai informasi).
   d. Penguatan Manajemen Likuiditas (sebagai informasi)
7. KMR 21 Agustus 2024 dengan agenda:
   a. *Stress Test* Pasar & Likuiditas Triwulan II 2024 (sebagai persetujuan).
   b. *Credit Examination* Semester I 2024 (sebagai informasi).
   c. Manajemen Penguatan Likuiditas Agustus 2024 (sebagai informasi).
   d. Laporan Risiko Bulanan Juli 2024 (sebagai informasi).
8. KMR 24 September 2024 dengan agenda:
   a. *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (sebagai informasi).
   b. Perubahan Kebijakan (sebagai persetujuan).
   c. Manajemen Permodalan (sebagai informasi).
   d. Manajemen Penguatan Likuiditas September 2024 (sebagai informasi).

9. KMR 14 Oktober 2024 dengan agenda:
   a. Laporan Profil Risiko Q3 2024 (sebagai persetujuan).
   b. Manajemen Penguatan Likuiditas Oktober 2024 (sebagai informasi).
   c. *Matter Arising* Terkait Penyimpanan Berkas Agunan & Dokumen Kredit (sebagai informasi).
10. KMR 22 November 2024 dengan agenda:
   a. *Stress Test* Pasar & Likuiditas Triwulan III 2024 (sebagai persetujuan).
   b. Manajemen Permodalan (sebagai informasi).
   c. Manajemen Penguatan Likuiditas November 2024 (sebagai informasi).
   d. Laporan Risiko Bulan Oktober 2024 (sebagai informasi).
11. KMR 18 Desember 2024 dengan agenda:
   a. *Matters Arising* dari RMC sebelumnya (sebagai informasi).
   b. *Risk Appetite Limit* – ICAAP Management (sebagai persetujuan)

Pilar II Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

PILAR II Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit Perumusan Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit telah tersedia dan sejalan dengan visi, misi dan strategi bisnis Bank, dan dilakukan dengan memperhatikan antara lain jenis dan kompleksitas usaha, profil risiko, tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko serta peraturan perundang–undangan dan ketentuan lainnya yang tidak bertentang dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, dimana telah ditetapkan dalam Surat Keputusan tentang Kebijakan Manajemen Risiko KB Bank.

1. Strategi Manajemen Risiko Bank
   Strategi manajemen risiko Bank, baik secara individu maupun secara konsolidasi, disusun untuk tujuan jangka panjang guna memastikan kelangsungan usaha, mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan serta secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola risiko Bank.

   Strategi manajemen risiko Bank disusun dengan mempertimbangkan faktor perkembangan ekonomi, kecukupan sumber daya manusia & infrastruktur, kondisi keuangan Bank, diversifikasi portofolio Bank, serta penerapan prinsip keuangan berkelanjutan. Bank melakukan kaji ulang strategi manajemen risiko secara berkala.

2. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
   Kebijakan Manajemen Risiko Bank dibentuk untuk memastikan bahwa Bank memelihara eksposur risiko yang konsisten dengan kebijakan dan prosedur internal serta peraturan eksternal, hukum, regulasi dan ketentuan lainnya yang terkait, serta dikelola oleh pejabat yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan keahlian di dalam manajemen risiko, sejalan dengan tingkat kompleksitas bisnis.

   Kebijakan manajemen risiko untuk masing-masing jenis risiko dibuat dengan mengacu pada dokumen Kebijakan Manajemen Risiko Bank, peraturan OJK dan ketentuan lainnya. Divisi Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk mengkoordinasikannya secara terpusat. Sedangkan Prosedur dan pedoman manajemen risiko harus dibuat oleh unit kerja di Bank dan disusun sesuai dengan kebijakan manajemen risiko Bank, prinsip kehati-hatian dan peraturan terkait yang berlaku.

3. Penetapan Limit Risiko
   a. *Risk Appetite Statement*
      Bank memiliki limit yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bisnis dalam bentuk *Risk Appetite Statement* dan telah mendapat persetujuan sampai dengan Dewan Komisaris.
   b. Limit
      Penetapan limit risiko mencakup antara lain:
      i) Limit secara keseluruhan;
      ii) Limit per jenis risiko; dan
      iii) Limit per aktivitas fungsional tertentu yang memiliki eksposur risiko.

4. Pelaksanaan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit
   Kesadaran risiko dan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, dan limit risiko harus merupakan cara pikir dari semua semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kerangka kerja manajemen risiko.

Pilar III Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko,serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Proses tersebut harus didukung oleh sistem informasi manajemen yang tepat waktu dan laporan yang akurat dan informatif mengenai eksposur risiko bank, kinerja aktivitas fungsional dan kondisi keuangan.

1. Identifikasi Risiko Langkah-langkah dalam identifikasi risiko meliputi:
   a. Memahami bisnis dan melakukan analisa berbagai risiko yang melekat.
   b. Mengidentifikasi sumber-sumber risiko yang potensial pada produk dan aktivitas Bank secara berkala.
   c. Mengevaluasi kemungkinan dan dampak dari kerugian.
   d. Memastikan ketersediaan metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko.
2. Pengukuran Risiko Risiko harus dapat diukur sehingga dapat ditentukan kecukupan pencadangan dan kemampuan modal untuk menyerap risiko yang diakibatkannya. Langkah-langkah penting untuk membentuk suatu proses pengukuran risiko adalah:
   a. Menempatkan pejabat yang ahli dan berpengalaman dalam menentukan bagaimana risiko diukur.
   b. Membuat metodologi atau model yang tepat untuk masing-masing jenis risiko tersebut. Metodologi atau model harus didokumentasikan.
   c. Memiliki aplikasi pengukuran risiko yang memadai dan juga mengetahui keterbatasan teknologi tersebut.
   d. Menguji hasil aktual dibandingkan dengan hasil yang diperkirakan untuk memvalidasi metodologi atau model tersebut.
   e. Melakukan kaji ulang secara berkala mengenai kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
   f. Melakukan penyempurnaan terhadap metodologi pengukuran apabila terdapat perubahan secara signifikan atas faktor-faktor material yang mempengaruhi risiko.

g. Melakukan *Stress Testing* secara berkala, yaitu suatu proses estimasi potensi kerugian ekonomis pada kondisi pasar yang tidak normal, yang memungkinkan Bank untuk menilai dampak terhadap pendapatan dan modal Bank.
h. Melakukan *Backtesting* secara berkala untuk menguji model internal Bank.
i. Memiliki mekanisme pengukuran atau penilaian atas materialitas peningkatan eksposur risiko dari pengembangan Produk Bank.

3. Pemantauan Risiko Dalam memantau risiko, setiap unit kerja di Bank harus melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a. Memiliki suatu prosedur yang jelas untuk memantau eksposur risiko, toleransi risiko, limit, hasil *Stress Testing* dan konsistensi pelaksanaan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
   b. Memiliki sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi perubahan profil risiko atau pelampauan limit sehingga tindakan korektif dapat segera diambil untuk meminimalkan potensi kerugian.
   c. Melaporkan hasil pemantauan termasuk tinjauan atas portfolio kepada manajemen Bank secara berkala dalam rangka mitigasi risiko.
   d. Menyempurnakan proses pelaporan jika terdapat perubahan yang material atas kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen risiko Bank.
   e. Memiliki sistem back-up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko. Sistem *back-up* dan prosedur dikaji secara berkala.

4. Pengendalian Risiko Dalam mengendalikan risiko, setiap unit kerja di Bank harus melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:
   a. Memiliki proses pengendalian untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.
   b. Proses pengendalian risiko yang diterapkan harus disesuaikan dengan eksposur risiko, *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*.
   c. Memastikan ketersediaan kebijakan dan prosedur untuk mengelola dan mengendalikan risiko.
   d. Memastikan bahwa semua produk baru dan/atau pengembangan hanya akan pasarkan setelah melalui tinjauan yang memadai atas semua bagian risiko serta terdokumentasikan dalam Produk program dan hanya jika persetujuan regulator telah didapat (khusus produk yang dipersyaratkan mendapat persetujuan dari regulator).
   e. Memiliki sistem *back-up* dan prosedur untuk menangani dan memantau risiko jika terjadi kegagalan sistem.
   f. *Assets and Liabilities Management* (ALMA) diterapkan Bank dalam mengendalikan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, dan risiko likuiditas.
   g. Pengendalian risiko lainnya dapat dilakukan melalui mekanisme rapat dewan direksi melalui Komite Manajemen Risiko (KMR), ataupun melalui rapat pembahasan lainnya.

5. Sistem Informasi Manajemen Risiko
   Bank secara individu maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak harus memiliki sistem informasi manajemen risiko yang memadai untuk melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan eksposur risiko, baik secara agregat/komposit maupun eksposur risiko berdasarkan jenis risiko yang melekat pada kegiatan bisnis dan operasional Bank. Sistem ini harus didokumentasikan dan dikaji secara berkala.

Pilar IV Sistem Pengendalian Intern

Penerapan pengendalian intern dalam pengelolaan risiko mencakup:
1. Kesesuaian sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank.
2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko.
3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian.
4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank.
5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu.
6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan.
7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan objektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank.
8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen risiko.
9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap prosedur operasional, cakupan, dan temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit.
10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Pelaksanaan Implementasi Basel

Pilar 2 Basel II

Sebagai bagian implementasi Pilar 2 Basel II, KB Bank telah melakukan proses penilaian kecukupan modal secara internal (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ICAAP) yang disampaikan setiap semester, yaitu berupa Laporan Perhitungan KPMM sesuai Profil Risiko. Selain itu KB Bank telah melakukan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank dengan menggunakan pendekatan Risiko (*Risk-based Bank Rating*/RBBR) dengan cakupan penilaian meliputi faktor-faktor sebagai berikut: Profil Risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*) untuk menghasilkan Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank.

Dalam implementasi Pilar 2 Basel II, adanya kesesuaian pengukuran yang dilakukan oleh Bank (dengan kerangka *Internal Capital Adequacy Assessment Process*/ICAAP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (dengan kerangka *Supervisory Review and Evaluation Process*/SREP) menjadi hal yang perlu diperhatikan untuk meminimalkan *gap* penilaian dan semakin meningkatkan proses manajemen risiko.

KB Bank senantiasa melakukan penyempurnaan antara lain melalui review atas penetapan kategorisasi peringkat dalam setiap penilaian parameter/indikator dari setiap jenis risiko, memastikan sumber data yang digunakan untuk setiap penilaian parameter/indikator dari setiap jenis risiko dan *review* tingkat signifikansi dari suatu kejadian maupun hasil temuan/pemeriksaan dan pengaruhnya terhadap Peringkat Profil Risiko secara keseluruhan. Secara umum tingkat KPMM Bank KB Bank selalu dikelola secara hati-hati untuk dapat mitigasi tingkat risiko yang dihadapi dalam segala kondisi, melalui penerapan manajemen risiko yang efektif sesuai perkembangan bisnis dan kompleksitas usaha serta memastikan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan KB Bank yang memadai dalam rangka mendukung kesinambungan usaha, pengembangan bisnis dan pertumbuhan tingkat keuntungan.

Pilar 3 Basel II

Dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, terdapat beberapa konten laporan khususnya yang terkait dengan manajemen risiko, antara lain yaitu pengungkapan setiap jenis risiko, potensi kerugian (*risk exposures*) yang dihadapi Bank, praktik manajemen risiko yang diterapkan Bank, dan pengungkapan laporan rasio kecukupan likuiditas. Secara umum KB Bank telah mengungkapkan hal tersebut dalam laporan tahunan KB Bank dan publikasi pada situs web KB Bank. Perseroan akan terus meningkatkan pengembangan database, sistem informasi dan manajemen risiko sehingga dapat menghasilkan meningkatkan pengungkapan dan sesuai dengan pilar 3 Basel II.

Basel III-*Liquidity Coverage Ratio dan Net Stable Funding Ratio*

Sehubungan dengan penerapan *Basel* III, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2016 perihal Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 6/POJK.03/2015 perihal Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Perseroan telah melakukan *review* terhadap Pedoman Perhitungan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE/004/ DIR/I/2019 tentang Pedoman Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas *(Liquidity Coverage Ratio)* tanggal 14 Januari 2019 dan Pedoman Perhitungan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) yang tertuang dalam Surat Edaran Direksi No. SE/241/DIR/XII/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Perhitungan Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih *(Net Stable Funding Ratio)* tanggal 21 Desember 2018.

Adapun Kewajiban pemenuhan LCR dilakukan secara bertahap, di mana tahapan bagi Bank yang termasuk dalam kelompok BUKU 3 adalah 70% (tujuh puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2016; 80% (delapan puluh persen) sejak tanggal 30 Juni 2017; 90% (sembilan puluh persen) sejak tanggal 31 Desember 2017; dan 100% (seratus persen) sejak tanggal 31 Desember 2018.

KB Bank telah menyampaikan laporan LCR (individual dan konsolidasi) secara bulanan ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan LCR triwulanan (individual dan konsolidasi) pada situs *web* KB Bank. Selain itu KB Bank telah melakukan pengelolaan dan pemantauan tingkat aset likuid dan *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) secara harian dengan memperhatikan limit sebagai bagian dari penerapan manajemen risiko likuiditas.

Hal yang menjadi perhatian dalam penerapan pengukuran sesuai kerangka *Basel* III tersebut, antara lain terkait kesiapan sistem informasi dan ketersediaan *database*, *review* berkala atas kebijakan dan prosedur di Bank dalam pelaksanaan pengukuran dan monitoring rasio likuiditas berdasarkan kerangka *Basel* III.

Sesuai dengan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*), terhitung mulai bulan Januari 2018 KB Bank telah melakukan pemantauan terhadap pemenuhan rasio pendanaan stabil bersih.

Implementasi kerangka NSFR ini tidak terlepas dari kerangka LCR dan bersifat saling melengkapi sebagai alat untuk mengukur risiko likuiditas Bank, di mana pemenuhan standar LCR bertujuan untuk meningkatkan ketahanan jangka pendek dari profil risiko likuiditas KB Bank dengan memastikan bahwa KB Bank memiliki *High Quality Liquid Asset* (HQLA) yang memadai untuk bertahan selama periode *scenario stress* yang signifikan dalam 30 hari ke depan, sedangkan pemenuhan standar NSFR bertujuan untuk mengurangi risiko pendanaan untuk jangka waktu yang lebih panjang dengan mensyaratkan bank mendanai aktivitasnya dengan sumber dana stabil yang memadai dalam rangka memitigasi risiko tekanan pada pendanaan di masa depan.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas permodalan sesuai dengan implementasi Basel III khususnya aspek *common equity tier I, conservation buffer, countercyclical buffer dan leverage ratio*, KB Bank menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka penguatan permodalan untuk mendukung pencapaian rencana bisnis.

Basel III – *Interest Rate Risk in The Banking Book* (IRRBB)

Dalam rangka meningkatkan kemampuan KB Bank dalam pengelolaan risiko pasar, khususnya risiko suku bunga, yaitu risiko yang bersumber dari pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan posisi *banking book* yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan pendapatan Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang *(Interest Rate Risk in The Banking Book/IRRBB*), KB Bank saat ini telah melakukan perhitungan dan penerapan IRRBB, yang dilaporkan secara triwulanan kepada OJK.

Upaya Peningkatan Budaya Risiko

KB Bank berkomitmen untuk memperkuat tata kelola perusahaan melalui penguatan manajemen risiko. Dalam upaya ini, peran Komite Pemantau Risiko terus dioptimalkan guna meningkatkan efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris. Selain itu, Perseroan juga memastikan bahwa Komite Manajemen Risiko di tingkat Direksi, beserta komite pendukungnya, berfungsi secara optimal dalam mengelola dan memitigasi berbagai risiko yang dihadapi.

Inisiatif Strategi Pelaksanaan Manajemen Risiko Tahun 2024

Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan penerapan manajemen risiko di seluruh aspek operasional guna memastikan risiko tetap terkendali sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank tahun 2024. Untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam rencana tersebut, Perseroan akan melaksanakan sejumlah strategi manajemen risiko yang selaras dengan upaya pencapaian target anggaran 2024, antara lain:

1. Penguatan kecukupan kerangka manajemen risiko.
2. Memperkuat implementasi manajemen risiko dengan pembentukan sistem pengelolaan yang sesuai dengan kondisi bank.
3. Meningkatkan kesadaran risiko dengan menyebarluaskan pengetahuan mengenai manajemen risiko (konsep RWA, ICAAP, dll)
4. Mendorong budaya risiko sejalan dengan upaya pencapaian strategi bisnis Bank tahun 2025-2027.

Tinjauan atas Efektivitas Pelaksanaan Sistem Manajemen Risiko

Perseroan terus berupaya meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko melalui evaluasi berkala. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa setiap kebijakan dan strategi yang diterapkan sejalan dengan tujuan jangka panjang Perseroan. Dalam mendukung implementasi rencana strategis, Perseroan mengambil langkah-langkah berikut:

1. Melakukan *review* kebijakan Risk Appetite terkait kecukupan modal dengan pembentukan sistem ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) dan limit internal menyesuaikan dengan kondisi bank terkini.
2. Melakukan *review* kebijakan tingkat tinggi manajemen risiko.
3. Melakukan *review* kebijakan pengelolaan permodalan PT Bank KB Bukopin Tbk.
4. Melakukan *review* kebijakan terkait Produk Program PT Bank Bukopin Tbk.
5. Membentuk petunjuk teknis mengenai *Stress Test* manajemen risiko.
6. Melakukan *review* kebijakan terkait profil risiko.
7. Membentuk kebijakan terkait *Recovery Plan*.
8. Membentuk petunjuk teknis RWA *Limit Monitoring*.
9. Melakukan *review* kebijakan terkait manajemen risiko operasional.
10. Melakukan *review* kebijakan dan limit manajemen risiko pasar dan likuiditas.
11. Membentuk kebijakan global *treasury*.
12. Memperbarui pedoman limit *dealer*.
13. Melakukan *review* kebijakan rencana pendanaan darurat.
14. Membentuk *limit appetite* untuk LCR dan NSFR.
15. Membentuk petunjuk teknis terkait *Credit Rating* SME, *Wholesale*, *Retail* dan *Knock out*.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

KB Bank telah melakukan tinjauan terhadap efektivitas sistem manajemen risiko sepanjang tahun 2024. Evaluasi ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

1. Direksi melakukan evaluasi terhadap kecukupan manajemen risiko melalui peninjauan secara rutin terhadap kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang sedang berlaku, kecukupan sistem manajemen risiko, laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko KB Bank.
2. Direksi melakukan evaluasi terhadap kecukupan manajemen risiko melalui peninjauan secara rutin terhadap kebijakan serta prosedur manajemen risiko yang sedang berlaku, kecukupan sistem manajemen risiko, laporan eksposur risiko dan penilaian profil risiko KB Bank.

Sistem Pengendalian Internal

Sebagai bagian dari komitmennya untuk mengelola risiko dan memastikan keberlanjutan operasional yang optimal, KB Bank menekankan pentingnya penerapan Sistem Pengendalian Intern yang efektif. Sistem ini menjadi pondasi utama dalam menjaga integritas dan transparansi di setiap aspek kegiatan operasional Bank.

Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan oleh KB Bank dirancang untuk tidak hanya mencapai tujuan jangka panjang bank, tetapi juga untuk memastikan pemenuhan standar tata kelola yang baik, serta mengurangi potensi kerugian yang timbul dari ketidakpatuhan atau risiko operasional. Dalam hal ini, sistem pengendalian internal berfungsi sebagai alat untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta untuk meningkatkan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

KB Bank mengadopsi kerangka kerja COSO (Com*mittee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) - *Internal Control Integrated Framework* sebagai landasan dalam menyusun dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern. Kerangka kerja ini menyediakan pedoman yang komprehensif dalam mengelola aspek-aspek yang berhubungan dengan pengendalian operasional, pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang relevan.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip dalam kerangka kerja COSO, KB Bank memastikan bahwa pengendalian internal yang diterapkan mencakup seluruh elemen penting yang diperlukan untuk memitigasi risiko secara menyeluruh, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan tercapainya standar kepatuhan yang tinggi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tujuan Pengendalian

1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan (Tujuan Kepatuhan);
2. Dimaksudkan untuk menjamin bahwa semua kegiatan usaha KB Bank telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, baik ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan maupun kebijakan, ketentuan, dan prosedur intern yang ditetapkan oleh KB Bank;
3. Tersedianya Informasi Keuangan dan Manajemen yang Lengkap, Akurat, Tepat Guna, dan Tepat Waktu atau Tujuan Informasi (Tujuan Informasi);
4. Dimaksudkan untuk menjamin tersedianya laporan yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu yang diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Efektivitas dan Efisiensi dalam Kegiatan Usaha KB Bank (Tujuan Operasional);
6. Dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi terhadap penggunaan aset dan sumber daya lainnya dalam rangka melindungi KB Bank dari Risiko kerugian;
7. Meningkatkan Efektivitas Budaya Risiko (*Risk Culture*) pada Organisasi KB Bank Secara Menyeluruh (Tujuan Budaya Risiko);
8. Dimaksudkan untuk mengidentifikasi kelemahan dan menilai penyimpangan secara dini serta menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada di KB Bank secara berkesinambungan.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah landasan bagi pengelolaan operasional yang efektif. Komitmen dan perhatian Direksi serta Dewan Komisaris sangat berpengaruh dalam memastikan pengendalian berjalan dengan baik. Beberapa elemen penting dalam lingkungan pengendalian di KB Bank meliputi:

1. Struktur organisasi yang memadai;
2. Gaya kepemimpinan dan filosofi manajemen KB Bank;
3. Integritas dan nilai-nilai etika serta kompetensi seluruh pegawai;
4. Kebijakan dan prosedur sumber daya manusia KB Bank;
5. Atensi dan arahan manajemen KB Bank dan komite lainnya, seperti Komite Manajemen Risiko; dan
6. Faktor-faktor ekstern yang mempengaruhi operasional KB Bank dan penerapan Manajemen Risiko.

Penilaian Pengendalian

Penilaian risiko di KB Bank adalah proses yang melibatkan Direksi untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi risiko yang dihadapi, dengan tujuan mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Bank ini secara berkelanjutan melakukan identifikasi serta evaluasi terhadap risiko-risiko yang berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan tersebut.

Selain Direksi, auditor internal juga turut serta dalam proses penilaian risiko untuk memastikan cakupan audit mencakup semua aspek risiko secara menyeluruh. Proses penilaian risiko ini meliputi identifikasi jenis risiko, penentuan batasan risiko, dan penerapan teknik pengendalian risiko yang sesuai. Metodologi penilaian risiko digunakan sebagai acuan dalam penyusunan profil risiko, yang didokumentasikan secara berkala untuk memastikan bahwa data relevan dan mutakhir tersedia guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Aktivitas Pengendalian

Kegiatan pengendalian di KB Bank melibatkan seluruh pegawai, termasuk Direksi, guna memastikan efektivitas dalam mengelola risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian yang dirancang secara sistematis dan diterapkan dengan baik memberikan keyakinan kepada pejabat dan pegawai bahwa arahan dari Direksi serta Dewan Komisaris telah dijalankan secara optimal.

Pengendalian ini mencakup kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap instruksi serta keputusan dari pimpinan tertinggi diimplementasikan dengan baik. Penerapan kegiatan pengendalian dilakukan di seluruh tingkatan fungsional dalam struktur organisasi KB Bank, sehingga setiap bagian memiliki peran dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh, yang setidaknya mencakup:

1. Kaji Ulang Manajemen (*Top Level Reviews*);
2. Kaji Ulang Kinerja Operasional (*Functional Review*);
3. Pengendalian Sistem Informasi;
4. Pengendalian Aset Fisik;
5. Dokumentasi.

Informasi dan Komunikasi

Sistem Informasi wajib menyediakan laporan yang mencakup aktivitas usaha, kondisi keuangan, penerapan Manajemen Risiko, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut meliputi:

1. Informasi internal dan eksternal yang cukup dan menyeluruh yang diperlukan rangka pengambilan keputusan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Informasi dapat dipercaya mengenai seluruh aktivitas fungsional KB Bank;
3. Sistem yang digunakan baik sistem penyimpanan dan penggunaan data elektronik harus dijamin keamanannya, dipantau oleh pihak yang independen (*auditor intern*), dan didukung oleh program kontinjensi yang memadai;
4. Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit.

Aktivitas Pemonitoran

Pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian intern dilakukan secara terus-menerus melalui pendekatan *Three Lines of Defense*. Fokus utama pemantauan adalah risiko-risiko utama yang dihadapi Bank, yang harus menjadi prioritas dan terintegrasi dalam aktivitas operasional sehari-hari. Evaluasi dilakukan secara berkala, baik oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*) maupun oleh SKAI.

Hasil penilaian audit intern oleh SKAI disampaikan langsung kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, Komite Audit, serta Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Jika ditemukan kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional, SKAI, maupun pihak lain, laporan segera disampaikan kepada pejabat dan/atau Direksi yang berwenang untuk ditindaklanjuti dengan perbaikan yang diperlukan. Apabila kelemahan pengendalian intern bersifat material, laporan harus disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Kesesuaian dengan COSO-*Internal Control Framework*

Perseroan telah menerapkan standar acuan kerja yang berlaku bagi seluruh divisi dan fungsi sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal aktivitas operasional harian. Saat ini, sistem pengendalian internal Bank telah disesuaikan dengan COSO *Framework*, di mana seluruh pihak dalam Perseroan, mulai dari karyawan, pejabat, hingga Direksi dan Dewan Komisaris, turut terlibat dalam pelaksanaannya.

Pengendalian internal yang diterapkan bertujuan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan operasional, memastikan keandalan, ketepatan waktu, serta transparansi dalam pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan regulator, serta menjamin kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pengendalian internal Perseroan didukung oleh 5 (lima) komponen utama yang menjadi dasar penerapannya, meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian yang merupakan seperangkat standar, proses dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian internal di seluruh organisasi;
2. Penilaian Risiko yaitu suatu proses yang dinamis dan interaktif untuk mengidentifikasikan dan menilai risiko terhadap pencapaian tujuan;
3. Aktivitas Pengendalian yang dilakukan pada semua tingkatan entitas yang mencakup penetapan;
4. Kebijakan, ketentuan, prosedur serta kepatuhan dalam implementasi dalam seluruh kegiatan operasional;
5. Informasi dan Komunikasi yaitu suatu mekanisme komunikasi yang melibatkan semua pihak yang dilakukan secara kontinu dalam berbagi informasi yang relevan dan berkualitas baik yang bersumber dari internal maupun eksternal untuk mendukung pengendalian internal;
6. Pemantauan, merupakan kegiatan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memberikan keyakinan atas kecukupan pengendalian internal.

Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka memastikan efektivitas sistem pengendalian internal, KB Bank secara berkelanjutan melakukan evaluasi terhadap mekanisme yang diterapkan. Evaluasi ini dijalankan oleh unit pengawasan di tingkat kedua dan ketiga, yang mencakup Satuan Kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Divisi *Quality Assurance*, dan Satuan Kerja Audit Internal. Setiap unit memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi dan menilai potensi risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas operasional Bank.

Sepanjang tahun 2024, KB Bank telah menerapkan berbagai langkah perbaikan guna memperkuat sistem pengendalian internal. Upaya tersebut meliputi pembaruan kebijakan, penyesuaian prosedur, serta pengembangan sistem untuk meningkatkan mitigasi risiko dan efektivitas pengawasan. Evaluasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal juga menjadi masukan penting bagi Dewan Komisaris, khususnya melalui Komite Audit, dalam menentukan langkah strategis ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi, sistem pengendalian internal di KB Bank dinilai telah memenuhi standar yang ditetapkan, mencerminkan keseriusan Bank dalam menjaga tata kelola yang baik. Hal ini menegaskan komitmen KB Bank dalam menciptakan lingkungan operasional yang aman, terkendali, dan efisien guna mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.



Fungsi Kepatuhan

Kedudukan Fungsi Kepatuhan dalam Organisasi

Fungsi Kepatuhan KB Bank berperan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku sesuai dengan POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Sebagai bagian dari tata kelola yang baik, fungsi ini bertanggung jawab atas penerapan langkah preventif guna memastikan kebijakan, sistem, dan prosedur Bank sejalan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulator.

Dalam menjalankan tugasnya, Fungsi Kepatuhan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap komitmen KB Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan serta otoritas terkait lainnya. Selain itu, fungsi ini juga memberikan arahan kepada unit bisnis dan operasional agar kegiatan usaha Bank tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui peran ini, KB Bank tidak hanya menjaga kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga melindungi reputasi dan integritasnya di mata regulator serta masyarakat.

Pedoman Operasional Kepatuhan

Sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan yang baik, KB Bank menetapkan berbagai pedoman operasional yang menjadi landasan dalam menjalankan Fungsi Kepatuhan. Ketentuan internal ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan selaras dengan prinsip kepatuhan dan peraturan yang berlaku, termasuk:

1. SEDIR No. SE/086/DKH/IX/2023 Tentang Pedoman Pemenuhan Permintaan Data dan Informasi dalam Rangka Pengawasan dan Pemeriksaan PT Bank KB Bukopin Tbk;
2. Surat Keputusan No. SK 0125 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan PT Bank KB Bukopin Tbk;
3. Surat Edaran No. SE/281/DIR/XI/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan Dalam Memastikan Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen Hasil Pemeriksaan Kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Pihak Regulator dan/atau Pihak Otoritas Yang Berwenang;
4. Surat Edaran Direksi No. SE/155/DIR/VIII/2018 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Satuan Kerja Kepatuhan dalam Perkreditan.
5. Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 001 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di PT Bank KB Bukopin Tbk;
6. Surat Edaran Direksi No. SE/054/DIR/V/2017 tentang Pedoman Manajemen Risiko Kepatuhan Bank KB Bukopin;
7. Surat Edaran Direksi No. SE/009/DIR/IV/2013 tentang Pelaksanaan Fungsi Satuan Kerja Kepatuhan dalam *Compliance Checklist (Cleansing)*.

Struktur Organisasi Kepatuhan

Satuan Kerja Kepatuhan memiliki sifat independen dan tidak terpengaruh oleh unit kerja lainnya. Tujuan pembentukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan, yang merupakan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan di KB Bank. Satuan Kerja Kepatuhan memiliki kedudukan setingkat Departemen.

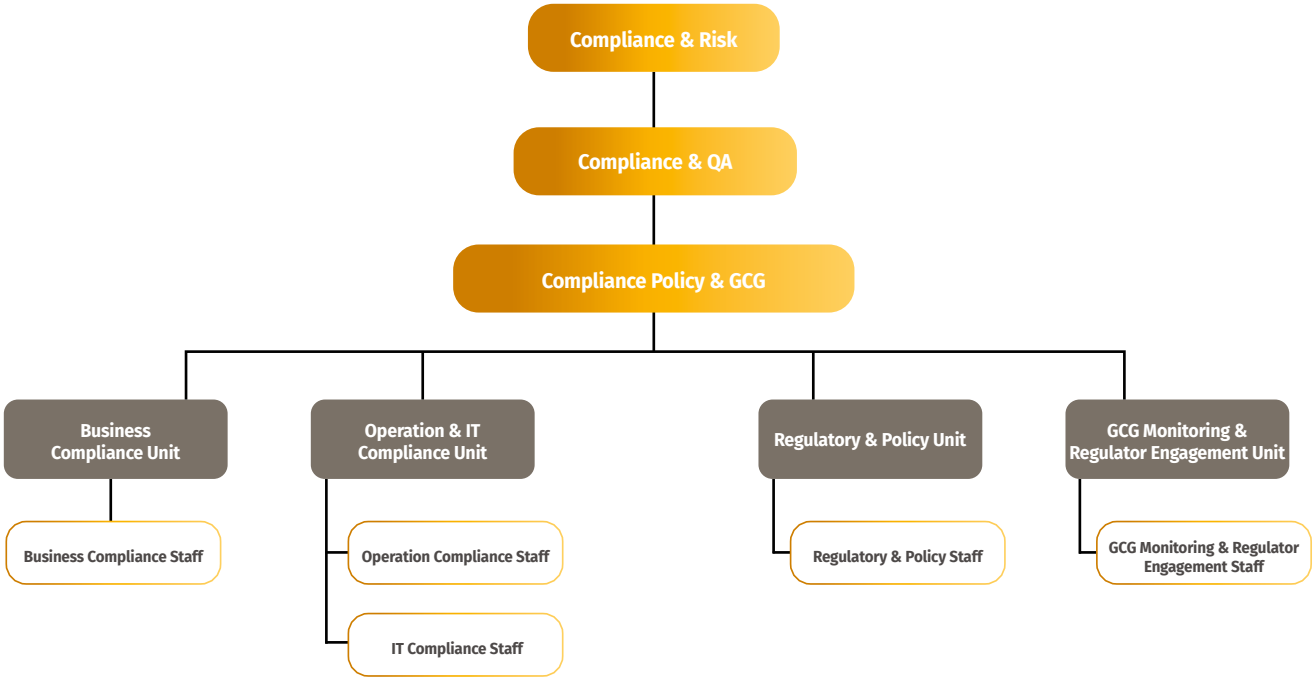

Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah Bapak Dodi Widjajanto selaku Direktur Kepatuhan Profil ringkas dapat dilihat pada bagian Profil Direksi. Pengangkatan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan telah melalui proses *fit and proper test* sesuai dengan ketentuan Regulator.

Profil Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Satuan Kerja Kepatuhan mengacu pada Kebijakan Kepatuhan KB Bank, yang juga dilaporkan kepada Regulator. Proses ini dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan rekomendasi dari Direksi, dan Kepala Satuan Kerja Kepatuhan akan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan.



Kimin
Compliance , Policy & GCG Department Head

Usia	**55 Tahun**
Kewarganegaraan	**Indonesia**
Domisili	**Jakarta Selatan**
Riwayat Pendidikan	**S1 Ekonomi dari Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang**
Riwayat Pekerjaan	• **Koordinator Operasi KC Semarang (Agustus 2010-Juli 2013)** • **Koordinator Pelayanan KC Magelang (Agustus 2013-Januari 2014)** • **Manager Pelayanan & Operasi KC Magelang (Januari 2014-November 2014)** • **Manager Pelayanan & Operasi KC Sidoarjo (November 2014-Desember 2016)** • **Manager Pelayanan & Operasi KC Yogyakarta (Januari 2017-Desember 2017)** • **Manager Pelayanan & Operasi KC Makassar (Januari 2018- Februari 2019)** • **Kepala Departemen Kepatuhan, Kebijakan & Tata Kelola Kantor Pusat (Februari 2019-sekarang)**
Jabatan Lainnya	-
Dasar Pengangkatan	**Surat Keputusan No. SKEP/0161-DIR/II/2019 tanggal 11 Februari 2019**
Kualifikasi	• **BSMR Jenjang VI** • **Sertifikasi Kepatuhan Level II**

Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Satuan Kerja Kepatuhan

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2017 mengenai Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada Bank Umum, dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab dari Satuan Kerja Kepatuhan adalah sebagai berikut:
Membuat langkah untuk mendukung terciptanya Budaya Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi;

1. Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum;
2. Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Pengembangan Kompetensi Fungsi Kepatuhan

No.	Nama *Training*	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Pelatihan Perlindungan Konsumer	06/03/2024	Surya Indonesia Training	Jakarta
2	*Training* Anti Korupsi & Anti *Fraud*	19/07/2024	AAFM	Jakarta
3	*Training Finance Budget*	04/07/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta
4	*Workshop* Anti *Fraud*	22/08/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta
5	*Governance Risk Compliance*	06/12/2024	Internal House (Diklat)	Jakarta

Prinsip Kepatuhan

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank mengacu pada pada POJK No. 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi Kepatuhan Bank Umum yaitu mengelola langkah-langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Regulator dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Kepatuhan

Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi

1. Melakukan program sosialisasi melalui *Compliance Campaign. Departemen* Kepatuhan berkoordinasi dengan Departemen *Anti Fraud*, *Anti Money Laundering*, *Risk Management*, serta Departemen Keamanan Informasi (IT), dalam melakukan program peningkatan budaya kepatuhan yaitu *blast postmaster* melalui media *email*, antara lain:
   a. *Anti Money Laundering* (AML) *Awareness*- Transaksi Tunai Yang Dikecualikan
   b. *Anti Money Laundering* (AML) *Awareness*- Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)
   c. *Anti Money Laundering* (AML) *Awareness*- Hati-Hati Terjebak Judi Online
   d. *Security Awareness: Ransomware* Ancaman Nyata, Cegah Sekarang Juga!
   e. *Security Awareness*: Jagalah Keamanan Data di Lingkungan Kerja!
   f. *Anti Money Laundering* (AML) *Awareness-Business Email Compromise* (BEC)
   g. *Security Awareness*: Kenali Ciri-Ciri *Email Phishing*!
   h. *Operational Risk Awareness* : Waspada Pinjol Ilegal
   i. *Anti Money Laundering* (AML) *Awareness- Sanction/ Prohibited Country*
   j. Waspada Seni Menipu Mata dengan teknik Homograph

   Sosialisasi disampaikan kepada seluruh karyawan terkait pengetahuan mengenai scam serta masukan mengenai bagaimana menghindari dan memitigasi risiko penipuan yang terjadi melalui teknologi informasi. Selain dari sisi teknologi, juga berfokus mengkampanyekan mekanisme *whistleblower*, dengan harapan agar karyawan dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan di lingkungan kerja.

2. Melakukan sosialisasi atas regulasi yang dikeluarkan oleh regulator dan ketentuan internal kepada seluruh Cabang/ Divisi dan unit-unit terkait baik dalam rapat secara langsung maupun melalui media antara lain IGRC.
3. Diskusi secara langsung/*Focus Group Discussion* dengan/ Divisi/Unit kerja terkait peraturan, komitmen atau ketentuan tertentu, beberapa kebijakan penting yang menjadi pembahasan antara lain namun tidak terbatas adalah :
   a. Pembahasan Progress Pemenuhan Dokumen perizinan *Project* SHINE PG 1 ke Bank Indonesia
   b. Undangan Rapat Pembahasan Komitmen Kaji Ulang Kebijakan/ *Invitation to Discussion Meeting on Policy Review Commitment*
   c. Undangan Rapat Pembahasan Komitmen Kaji Ulang Kebijakan/ *Invitation to Discussion Meeting on Policy Review Commitment*
   d. *Lesson Learn* & Mitigasi Risiko Kepatuhan atas denda pelaporan
   e. *Lesson Learn* & Mitigasi Risiko Kepatuhan atas denda pelaporan
   f. Undangan Rapat Pembahasan Denda Laporan
   g. Undangan *Meeting Online* Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan OJK Tahun 2024
   h. Undangan *Meeting* dan Sosialisasi ke-2 *Compliance Obligation Checklist* Peraturan Bank Indonesia Nomor 5 Tahun 2024
   i. Undangan *Zoom Meeting* Tindak Lanjut Pemenuhan Komitmen LHP OJK Tahun 2024 KC Batam.

   Selain itu Departemen Kepatuhan juga aktif terlibat dalam pembahasan SHINE Project/NGBS.

4. Bertindak sebagai *Liaison Officer* atau penghubung, mengkoordinasikan antara Regulator dengan bagian-bagian terkait di PT Bank KB Bukopin Tbk dalam rangka pengawasan Bank antara lain permintaan data serta *monitoring* pemenuhannya dan hal-hal yang perlu untuk dikoordinasikan /dikonsultasikan serta memerlukan diskusi dengan Regulator.

Melakukan pengelolaan Risiko Kepatuhan yaitu antara lain dengan:

1. Sebagai upaya pengelolaan Risiko Kepatuhan Bank yang berdampak denda Departemen Kepatuhan telah membuat beberapa Langkah:
   a. Membuat matrik atas laporan–laporan yang wajib dikirim ke regulator, dan selalu melakukan *reminder* setiap bulannya atas pelaporan yang wajib dilakukan pengiriman oleh setiap Departemen.
   b. Jika terdapat denda Departemen Kepatuhan berkoordinasi dengan risk taking unit untuk melakukan investigasi root cause terjadinya denda tersebut.
   c. Menyampaikan hasil investigasi agar *risk taking unit* melakukan *action plan* langkah - langkah mitigasi risiko agar kedepannya kejadian denda tidak terulang kembali.
   d. Memperhitungkan denda dalam penilaian indeks kepatuhan melalui penilaian *Key Performance Indicator* (KPI) masing-masing Departemen.
2. Melakukan Pengelolaan kebijakan internal dalam Portal IGRC dengan serta melakukan *monitoring* pengkiniannya.
3. Melakukan pengukuran risiko kepatuhan (*compliance risk assessment*) atas produk baru dan/terjadinya peningkatan eksposur terhadap tingkat risiko kepatuhan yang dikembangkan, antara lain:
   a. *Risk Composite* Untuk *Project Contactless* Kartu Kredit & EDC Kartu Kredit
   b. *Risk Assessment Enhancement Core Banking System* dan *Surrounding System* Pembayaran (*Shine Project*)
   c. *Risk Assessment* Produk Program Tentang *Payroll* Loan
   d. RSA Layanan Transaksi Reksa Dana secara Elektronik melalui KB Star
4. Pemeriksaan *assessment* atas kesiapan dokumen permohonan persetujuan ke OJK (*Compliance Checklist*), diantaranya:
   a. *Compliance Checklist* persetujuan Produk Aktivitas Baru
   b. *Compliance Checklist Fit and Proper Test* BOD dan BOC
5. Penyusunan pelaporan dalam rangka membantu memastikan pelaksanaan pengelolaan risiko kepatuhan diantaranya pelaporan:
   a. Laporan Fungsi Kepatuhan Triwulan
   b. Laporan Fungsi Kepatuhan Semester
   c. Laporan Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola
   d. Penyampaian Laporan Realisasi *Action Plan*
6. Menyampaikan dan berkoordinasi dengan Departemen serta bagian terkait atas tindak lanjut Surat Teguran dan/denda dari Instansi Berwenang.

Memastikan Kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha telah sesuai dengan ketentuan Organisasi Jasa Keuangan

Untuk memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan PT Bank KB Bukopin Tbk telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa hal yang telah dilakukan antara lain:

1. Departemen Kepatuhan telah melakukan inisiasi sebagai PIC yang melakukan koordinasi dan *monitoring* atas pengkinian kebijakan yang telah lewat waktu pengkinian, dengan tujuan agar kebijakan–kebijakan tersebut selalu dikinikan sesuai dengan regulasi terbaru serta dapat mensupport bisnis dan operasional Bank. Pada saat ini telah dilakukan *mapping* dan komunikasi ke masing–masing Departemen dan selanjutnya dalam proses *monitoring*, termasuk membuat *action plan* pengkinian kebijakan di internal Departemen Kepatuhan.
2. Pemberian opini atas *draft* ketentuan/kebijakan bisnis dan/atau non bisnis, *draft* Pedoman Kegiatan Operasi (PKO), rencana kegiatan usaha Bank dan rencana atau *draft* Perjanjian Kerjasama (PKS) melalui proses pengujian/evaluasi terhadap kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menyampaikan *reminder* atas kewajiban pelaporan, pelaksanaan penerbitan produk, kegiatan usaha bank, operasional bank, *review* kebijakan dan peringatan denda sebagai bentuk pengelolaan risiko kepatuhan.

Memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas yang berlaku

1. *Monitoring follow up* Komitmen terhadap regulator (Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan otoritas yang berwenang lainnya), dengan salah satunya menyampaikan *reminder* kepada Divisi/Cabang terkait atas pemenuhan Tindak Lanjut Komitmen Hasil Temuan Pemeriksaan.
2. Menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Komitmen Hasil Pemeriksaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia.

Dari hasil *monitoring* dan laporan tindak lanjut di atas, hasil pemenuhan komitmen OJK dan BI pada Kantor Pusat & Kantor Cabang sesuai *assessment* internal Bank telah mencapai 100% sampai dengan jatuh tempo komitmen 31 Desember 2024.

Pelaksanaan Tugas Fungsi Kepatuhan Terhadap Penerapan Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)

1. Memastikan IT dan Sistem dapat men*support* kewajiban pelaporan ke PPATK dan *Monitoring* Transaksi serta data nasabah, hal ini dilakukan dengan:
   a. Pengembangan AML Transaksi Monitoring System
      i) Pengembangan sistem AML yang dapat mendeteksi transaksi mencurigakan, transaksi keuangan tunai, transaksi dari dan ke luar negeri, dan fungsi lain yang mendukung penerapan program APU dan PPT, telah *go-live* per 10 Agustus 2023.
      ii) Untuk saat ini, sistem AML masih terus dilakukan penyempurnaan terkait fungsi pada semua modul oleh pihak internal Bank dan *vendor*, adapun modul monitoring transaksi nasabah sudah dapat digunakan dan berjalan dengan baik.
      iii) Dengan menggunakan sistem AML diharapkan dapat lebih memperkuat aktivitas monitoring transaksi nasabah dengan menghasilkan *alert* yang memadai untuk memenuhi kebutuhan laporan transaksi keuangan mencurigakan dan laporan lainnya sesuai kriteria pelaporan yang akan dikirimkan ke Regulator.
   b. Memantau Pengkinian Profil Nasabah dan Profil Transaksi Nasabah :
      i) Menentukan kriteria rencana pengkinian data Nasabah dengan mengukur urgensi berdasarkan profil nasabah menggunakan metode pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*).
      ii) Berkoordinasi dengan Departemen Pengembangan dan Layanan Nasabah (DPNS) untuk melakukan distribusi data dan monitoring atas proses pelaksanaan rencana pengkinian data yang dilakukan oleh cabang.
      iii) Melakukan reminder kepada cabang untuk memastikan atas penerapan profil risiko Nasabah berdasarkan *Risk Based Approach* (RBA) sesuai dengan ketentuan.
      iv) Secara berkesinambungan melakukan pemantauan transaksi dan aktivitas nasabah serta melakukan pemenuhan pelaporan kepada regulator terkait laporan STR, CTR, IFTI dan laporan lainnya.
   c. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan program APU PPT dan PPPSPM dengan unit kerja terkait :
      i) Membina hubungan kerja dengan pihak internal, dalam melakukan pemantauan sekaligus berkoordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan program APU PPT dan PPPSPM.
      ii) Berkoordinasi dengan unit-unit terkait, korespondensi pihak ketiga dan Regulator, mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM, antara lain diantaranya:
         - Permintaan data pengkinian data Nasabah untuk penyusunan laporan rencana dan realisasi pengkinian data ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
         - Permohonan perbaikan pengisian kelengkapan data Nasabah untuk pelaporan SIPESAT ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada unit kerja operasional seluruh Indonesia.
         - Menindaklanjuti permohonan pemblokiran, pembukaan blokir, penghentian dan penundaan transaksi atas permintaan penyidik atau Regulator pada Kantor Cabang dan Kantor Pusat.
         - Pelaporan Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) dan Daftar Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPSPM) kepada Detasemen Khusus 88 (Densus 88) dan OJK serta pemeliharaan DTTOT dan DPSPM ke dalam Sistem AML.
         - Melakukan pelaporan atas dasar permintaan KPK dengan isi data profil Nasabah yang cocok sesuai permintaan ke aplikasi PEDAL.
         - Membuat materi dan tes soal untuk pelatihan terkait dengan APU PPT dan PPPSPM baik yang dilakukan secara online, *offline* maupun *e-learning* yang diselenggarakan oleh Departemen APU, Divisi Pengembangan SDM, dan/Departemen lainnya.
         - Permintaan data ke Departemen terkait berkaitan dengan penyusunan pelaporan APU PPT Bank Umum dan laporan *ad hoc* lainnya.
         - Menindaklanjuti permintaan informasi dan dokumen terhadap korespondensi pihak ketiga terkait APU PPT dan PPPSPM.
      iii) Melakukan pemeliharaan Data Nasabah PEP pada Bank.
      iv) Bertindak sebagai *helpdesk* bagi Cabang dan Area Jakarta dalam hal pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM, baik melalui voice call maupun grup whatsapp, *email*, dan BOC.
      v) Pembuatan penilaian risiko TPPU/TPPT/PPSPM pada Kantor Cabang untuk tahun 2024.
      vi) Pembaharuan terhadap petunjuk teknis penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.
      vii) Pembuatan campaign terkait dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM melalui *e-mail postmaster* dan BOC (media komunikasi internal bank) yang dikirimkan setiap awal bulan.
      viii) Pemberian opini terkait dengan produk dan aktivitas baru Bank berkaitan dengan implementasi program APU, PPT dan PPPSPM.
   d. Melakukan analisa dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) / *Cash Transaction Report* (CTR) secara online paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan menggunakan aplikasi GoAML :

i) Bulan Januari sebanyak 111 kali.
ii) Bulan Februari sebanyak 100 kali.
iii) Bulan Maret sebanyak 73 kali.
iv) Bulan April sebanyak 83 kali.
v) Bulan Mei sebanyak 76 kali.
vi) Bulan Juni sebanyak 94 kali.
vii) Bulan Juli sebanyak 95 Laporan.
viii) Bulan Agustus sebanyak 79 Laporan.
ix) Bulan September sebanyak 111 Laporan.
x) Bulan Oktober sebanyak 93 Laporan.
xi) Bulan November sebanyak 86 Laporan.
xii) Bulan Desember sebanyak 171 Laporan.

e. Melakukan analisa dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan terindikasi Mencurigakan (LTKM)/ *Suspicious Transaction Report* (STR) secara *online* paling lambat 3 (tiga) hari kerja dengan menggunakan aplikasi GoAML :
i) Bulan Januari sebanyak 1 Laporan.
ii) Bulan Februari sebanyak 0 Laporan.
iii) Bulan Maret sebanyak 1 Laporan.
iv) Bulan April sebanyak 1 Laporan.
v) Bulan Mei sebanyak 1 Laporan.
vi) Bulan Juni sebanyak 2 Laporan.
vii) Bulan Juli sebanyak 6 Laporan.
viii) Bulan Agustus sebanyak 4 Laporan.
ix) Bulan September sebanyak 3 Laporan.
x) Bulan Oktober sebanyak 1 Laporan.
xi) Bulan November sebanyak 2 Laporan.
xii) Bulan Desember sebanyak 8 Laporan.

f. Melakukan analisa dan menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri (LTKL) / *International Funds Transfer Instruction* (IFTI) secara *online* paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan menggunakan aplikasi GoAML :
i) Bulan Januari sebanyak 1436 Laporan.
ii) Bulan Februari sebanyak 1205 Laporan.
iii) Bulan Maret sebanyak 887 Laporan.
iv) Bulan April sebanyak 847 Laporan.
v) Bulan Mei sebanyak 1042 Laporan.
vi) Bulan Juni sebanyak 1.381 Laporan.
vii) Bulan Juli sebanyak 1.339 Laporan.
viii) Bulan Agustus sebanyak 1.421 Laporan.
ix) Bulan September sebanyak 1.320 Laporan.
x) Bulan Oktober sebanyak 1.581 Laporan.
xi) Bulan November sebanyak 1.636 Laporan.
xii) Bulan Desember sebanyak 1.518 Laporan.

g. Melakukan pelaporan terkait penerapan program APU dan PPT secara bulanan ke KB Kookmin (*Headquarter*).
h. Melakukan pelaporan SIPESAT terkait data Nasabah baru.
i. Melakukan pelaporan SIGAP atas dasar permintaan OJK.
j. Melakukan pelaporan SIPENDAR atas dasar permintaan PPATK.
k. Melakukan pelaporan PEDAL atas dasar permintaan KPK dengan isi data profil Nasabah yang cocok sesuai permintaan.
l. Melakukan pelaporan Rencana Pengkinian Data tahun 2025 ke OJK.
m. Melakukan pelaporan APU PPT Bank Umum melalui APOLO OJK.
n. Melakukan pelaporan CAT (*Collaborative Analysis Team*) Pemilu Pilkada ke PPATK secara rutin harian dan bulanan.
o. Memantau bahwa terdapat mekanisme komunikasi yang baik dari setiap unit kerja terkait kepada unit kerja khusus atau kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU PPT dan PPPSPM dengan menjaga kerahasiaan informasi :
p. Kebutuhan pelatihan program APU dan PPT bagi pegawai Bank :
i) Melakukan *review* terhadap materi pelatihan dan sosialisasi serta pertanyaan untuk *pre & post test*.
ii) Melakukan pelatihan dan sosialisasi terkait penerapan program APU PPT dan PPPSPM baik yang dilakukan di kantor pusat, kantor cabang, atau unit terkait lainnya, karyawan baru maupun karyawan *existing* dengan materi yang memuat mengenai identifikasi & verifikasi Nasabah, CDD, EDD, *screening*, pelaporan regulator, dan hal lain yang berkaitan dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
iii) Menjalankan program *e-learning training* kepada setiap karyawan mengenai penerapan program APU PPT dan PPPSPM.
iv) Pelaksanaan *executive training* yang diikuti oleh Direktur, Komisaris, dan semua Kepala Divisi.
v) Mengikuti seminar, sosialisasi, dan atau pertemuan koordinasi, yang diadakan oleh OJK, PPATK dan institusi lain yang berkaitan dengan program APU PPT dan PPPSPM.

Tata Kelola Teknologi Informasi

Dalam era digital yang terus berkembang, teknologi informasi memainkan peran krusial dalam industri perbankan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas layanan bagi nasabah. Transformasi digital kini menjadi strategi utama bagi perbankan dalam menghadapi dinamika pasar dan persaingan di sektor keuangan.

Melalui inisiatif penguatan teknologi, perbankan berupaya membangun kembali *core banking*, sistem informasi, serta infrastruktur teknologi guna menciptakan layanan yang lebih modern, aman, dan efisien. Langkah ini juga selaras dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta standar tata kelola teknologi informasi yang berlaku.

Selain berfokus pada inovasi teknologi, penguatan sistem juga mencakup peningkatan arsitektur aplikasi dan penguatan sistem keamanan. Implementasi tata kelola teknologi informasi yang baik diharapkan dapat memperbesar pangsa pasar, memperluas cakupan nasabah, serta meningkatkan profitabilitas melalui efisiensi biaya operasional.

Di tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam menstabilkan dan mengoptimalkan sistem baru yang telah dikembangkan. Dengan sistem yang lebih tangguh dan organisasi yang semakin siap, sektor perbankan diharapkan mampu menghadapi tantangan industri keuangan yang semakin kompleks serta memperkuat posisinya di pasar nasional.

Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Teknologi Informasi

KB Bank menerapkan berbagai kebijakan dalam strategi pengelolaan teknologi informasi untuk mendukung operasional yang efisien dan inovatif. Beberapa di antaranya meliputi:

1. Fokus pada pengembangan dan penyelesaian Proyek SHINE.
2. Selain hal-hal yang berkaitan dengan Proyek SHINE, pengembangan tetap dilakukan untuk proyek dengan kategori regulasi, tindak lanjut atas *external audit findings* dan pengembangan yang dikategorikan dalam pengembangan strategis.

IT Disruption

Teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting dalam industri perbankan, terutama dalam meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional. Seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, Perseroan terus berinovasi untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, Perseroan dapat tetap relevan dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pasar. Beberapa langkah pengembangan yang dilakukan oleh bank meliputi hal-hal berikut:

1. *Core Banking*
   Masalah terkait G/L dan masalah manajemen akun yang terjadi pada sistem lama dengan cepat diselesaikan dengan memperkenalkan paket *core banking* yang modern.
2. *Transportation Layer*
   Memodernisasi arsitektur lapisan transportasi yang terfragmentasi saat ini melalui peningkatan *middleware* dan pemfaktoran ulang arsitektur.
3. *Management Information System* (MIS)
   EDW ditingkatkan secara signifikan melalui memperkenalkan fungsi-fungsi baru seperti RDM, CRM, audit, profitabilitas dan KPI dan respons kepatuhan.
4. *New Loan Origination* dan Admin
   Dapat berkontribusi pada mitigasi risiko kredit dan peningkatan tingkat pemulihan dengan mekanisasi proses skrining manual, evaluasi dan pasca manajemen.
5. *Payment Gateway*
   Untuk peluncuran produk konvergensi digital yang tepat waktu, pembayaran, persetujuan, respons peraturan, fungsi rekonsiliasi untuk setiap jaringan pembayaran diintegrasikan ke dalam satu sistem.
6. *Digital First*
   Infrastruktur digital all-in-one digunakan untuk meminimalkan dampak pada sistem lama untuk mewujudkan strategi transformasi digital bank secara lebih aman dan efisien.
7. *General Affairs*
   Mendapatkan visibilitas ke dalam operasi internal melalui komputerisasi proses eksekusi Target dan pengeluaran, manajemen inventaris akta, dan manajemen aset tetap.
8. *IT Operation*
   Mampu secara signifikan meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan dengan memperkenalkan ITSM modern.
9. *Banking Terminal*
   Mampu memecahkan masalah produktivitas saat ini dengan memperkenalkan sistem terminal terintegrasi dengan UI/UX yang ditingkatkan dan kegunaan yang memiliki fitur *single sign on*.
10. *Credit Card*
    Mampu menarik nasabah kaya dengan meningkatkan fungsi kartu usang melalui peningkatan lisensi, integrasi dengan *core banking* baru dan menyediakan layanan kartu kredit digital baru.
11. *Anti Money Laundering* (AML)/ *Fraud Detection System* (FDS)
    Secara signifikan mengurangi risiko penalti dan reputasi besar dengan memperkenalkan sistem respons kepatuhan yang gesit dan implementasi sistem pemantauan penipuan.
12. *Software*
    Meningkatkan ketersediaan dan kualitas layanan perbankan melalui modernisasi perangkat lunak infrastruktur.
13. *Enterprise Authentication*
    Sistem otentikasi baru berdasarkan berbagai biometrik seperti sidik jari, iris mata atau pengenalan wajah disediakan.

14. *Device Refreshment*
    Penggantian dan peremajaan perangkat di seluruh Kantor Cabang agar dapat mendukung implementasi sistem SHINE di lini perbankan.

Cyber Security

1. Keamanan Administrasi
   a. Organisasi Keamanan yang sistematis dan pendefinisian peran serta distribusi tenaga ahli.
   b. Pelatihan *Security Incident and Response* untuk tenaga ahli secara reguler.
   c. Meningkatkan kesadaran keamanan informasi (*IT Security Awareness*) bagi eksekutif dan karyawan dan melakukan pelatihan reguler.
   d. Penerapan/Implementasi pedoman keamanan sistem informasi yang sistematis
2. Keamanan Fisik
   a. Implementasi sistem kontrol media penyimpanan di kantor dan fasilitas pemeliharaan keamanan.
   b. Pembuatan keamanan dokumen PC untuk mencegah kebocoran rahasia.
   c. Membuat manajemen patch keamanan PC, untuk patch dan pembaruan keamanan terbaru.
   d. Implementasi sistem pemblokiran *Software* ilegal untuk mengidentifikasi aset perangkat lunak (*Software Maintenance*).
3. Keamanan Teknologi
   a. Sistem deteksi untuk memantau aktivitas mencurigakan dalam traffic jaringan.
   b. Sistem pemblokiran situs berbahaya untuk memblokir akses ke situs yang mendistribusikan kode dan situs berbahaya yang dapat membocorkan informasi internal
   c. Sistem kontrol akses untuk mengontrol akses jaringan dengan memeriksa *Security Policy* sebelum mengakses jaringan internal.
   d. Menerapkan *web firewall* untuk melindungi aplikasi web.
   e. Sistem DDoS untuk merespons serangan DDoS.
   f. *Implementasi Threat Management System* (TMS) untuk melindungi aset informasi internal dari berbagai *threats*.
   g. *Source Code and Repository Management* yang terintegrasi untuk mengelola *change point* seperti dokumen, *blueprint*, dan *source code*.
   h. Sistem manajemen otentikasi terintegrasi untuk *Single Sign On* (SSO).
   i. Sistem deteksi pemalsuan aplikasi mobile untuk memblokir perubahan ilegal pada aplikasi *mobile*.
   j. Sistem analisis *weblog* untuk peningkatan kesalahan sistem dan keamanan.
   k. Log audit terintegrasi untuk merekam jenis akses seperti pengguna dan objek.
   l. Sistem kontrol akses basis data untuk mengontrol akses basis data pengguna berdasarkan otoritas.
   m. Sistem enkripsi basis data untuk melindungi dari intrusi eksternal basis data, kesalahan *authorize* pengguna internal, dan akses berbahaya.

Disaster Recovery

Kebijakan Manajemen Kelangsungan Teknologi Informasi bertujuan untuk memastikan kelangsungan operasional layanan TI dalam situasi yang tidak terduga. Kebijakan ini menjadi bagian integral dalam penerapan Rencana Strategis TI KB Bank, yang mendukung keberlanjutan dan stabilitas sistem teknologi informasi. Adapun ruang lingkup kebijakan ini mencakup:

1. Kebijakan Umum.
2. Kebijakan *Business Impact Analysis*.
3. Kebijakan *Risk Assessment*.
4. Kebijakan *Disaster Recovery*.
5. Kebijakan Sarana *Disaster Recovery Center* .
6. Kebijakan Uji Coba.
7. Kebijakan Pelatihan dan *Awareness*.
8. Kebijakan *Review* dan Audit.
9. Kebijakan Penyedia Jasa DRC Pihak Ketiga.

Identifikasi dan Pengelolaan Risiko Utama yang Telah Dilaporkan pada Direksi

Identifikasi dan pengelolaan risiko utama yang telah dilaporkan pada Direksi dilakukan dengan proses yang sistematis dan berkelanjutan. Setiap kejadian atau indikasi risiko atau kelemahan yang terdeteksi oleh alat-alat risiko akan langsung ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan. Proses pelaporan dan eskalasi dimulai dari setiap unit bisnis dan unit pendukung hingga mencapai Komite Manajemen Risiko.

Sertifikasi yang Dimiliki Personil TI Perusahaan

Grup Teknologi Informasi KB Bank berkomitmen untuk menjaga kualitas dan keamanan sistem melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan. Untuk mendukung upaya tersebut, berbagai pelatihan dan sertifikasi dijalankan guna memastikan infrastruktur yang handal serta perlindungan data yang maksimal. Berikut adalah daftar personel Grup Teknologi Informasi yang telah mengikuti program sertifikasi:

No.	Sertifikasi	Penyelenggara	Peserta
1	Oracle & Linux	INIXINDO	It Operation & Infrastructure
2	Sertifikasi SMR Jenjang 4, 5 & 6	BSMR	It Planning & Customer First, Digital Development & Solution, Retail Collection, Core System Development, It Operation & Infrastructure, It Digital & Enterprise Development, It Operation & Infrastructure, Core System Development

Rencana Pengembangan TI ke depan

Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi digital, sektor perbankan kini semakin bergantung pada sistem teknologi informasi untuk mendukung keberlanjutan dan efisiensi operasional. Teknologi Informasi tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat bantu, melainkan sebagai komponen strategis yang mendukung pencapaian tujuan bisnis yang lebih besar. Menyadari hal ini, KB Bank telah merumuskan rencana pengembangan Teknologi Informasi yang terintegrasi dengan visi bisnis bank, dengan fokus pada penerapan inovasi serta digitalisasi. Berikut adalah rencana pengembangan Teknologi Informasi yang akan dijalankan ke depan:
Roadmap TI

2025	2026	2027
Penyelesaian SHINE Project	Memperkuat Kemampuan Pengoperasian Sistem Secara Mandiri	Memaksimalkan Pengembangan *In-house*
• Implementasi Sistem SHINE • Stabilisasi sistem SHINE • Melakukan program *training* dan pelatihan secara reguler untuk meningkatkan kemampuan pengoperasian sistem.	• Meningkatkan proses-proses pengoperasian sistem agar dapat meningkatkan efisiensi dan kinerja. • Otomatisasi pengoperasian sistem untuk meningkatkan produktivitas.	• Mempercepat inovasi bisnis dengan memanfaatkan kemampuan teknologi yang telah dilakukan. • Meningkatkan kolaborasi dengan pihak ketiga melalui *Open System*. • Membangun ekosistem untuk memfasilitasi kolaborasi dengan berbagai *Stakeholder*.

Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, Dan PPPSPM)

Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di KB Bank didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu POJK No. 8 Tahun 2023, yang mengatur hal ini dalam sektor jasa keuangan, khususnya perbankan.

KB Bank telah membentuk Departemen *Anti Money Laundering* (AML) di kantor pusat. Departemen AML bertanggung jawab atas implementasi Program APU, PPT, dan PPPSPM di seluruh entitas KB Bank. Fungsi analisis dan pelaporan di Departemen AML bertugas untuk memantau transaksi dan aktivitas keuangan Bank guna mendeteksi adanya potensi pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Pada tahun 2024, KB Bank telah melakukan *self assessment* terhadap paparan risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal secara Bank Wide dengan penilaian risiko akhir adalah Medium, hasil tersebut mempertimbangkan dari paparan risiko terhadap nasabah, negara atau area geografis, produk dan jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) dengan juga mempertimbangkan perhitungan dari *National Risk Assessment* (NRA) dan *Sectoral Risk Assessment* (SRA).

KB Bank sebagai Bank Umum juga berperan sebagai Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal karena dalam praktiknya KB Bank juga menjalankan fungsi Kustodian dan Wali Amanat, oleh karena itu dirasa perlu untuk melakukan kajian dan penilaian tersendiri terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal pada Bank Kustodian dan Wali Amanat. KB Bank sebagai Bank Kustodian dan Wali Amanat juga telah melakukan *self assessment* terhadap risiko pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan melakukan metode pendekatan yang tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan pada bank umum secara *Bank Wide* dengan penilaian risiko akhir yaitu untuk Bank Kustodian adalah *Medium* dan untuk Wali Amanat adalah *Low*.

KB Bank terus berupaya mengoptimalkan program APU, PPT, dan PPPSPM dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas penerapannya. Meskipun demikian, Bank menyadari bahwa praktik pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal masih menjadi ancaman, terlebih dengan kemajuan teknologi dan perkembangan dunia usaha yang mendorong munculnya modus baru. Oleh karena itu, KB Bank berfokus pada peningkatan upaya mitigasi risiko yang mungkin timbul di masa depan, salah satunya melalui pengembangan teknologi informasi, peningkatan sistem pemantauan transaksi, penyaringan sanksi, serta pembaruan kebijakan internal agar tetap efektif dan sesuai dengan perkembangan regulasi yang ada.

Program APU, PPT, dan PPPSPM di KB Bank dilaksanakan oleh Departemen AML, yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan memastikan pemenuhan kewajiban terkait Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM). Beberapa aktivitas yang dilakukan oleh departemen ini antara lain:

1. Memastikan kebijakan dan prosedur APU PPT dan PPPSPM KB Bank telah memadai dan meningkatkan penerapan program APU PPT dan PPPSPM sesuai dengan perubahan dan perkembangan ketentuan yang berlaku serta kebijakan teknis lainnya yang berfungsi untuk membantu pelaksanaan pemantauan APU PPT dan PPPSPM.
2. Memastikan struktur dan organisasi departemen yang melakukan pemantauan dan program APU PPT dan PPPSPM telah memadai.
3. Mengidentifikasi, menilai dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan nasabah, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*) melalui Bank *Wide Risk Assessment* (*Individual Risk Assessment*) APU PPT dan PPPSPM.
4. *Monitoring* atas implementasi penerapan program APU PPT dan PPPSPM dalam setiap aktivitas kegiatan unit kerja yang dilakukan oleh cabang dan kantor pusat.
5. Melakukan analisa dan menyusun laporan terkait transaksi nasabah (LTKT, LTKL, dan LTKM) serta pelaporan regulator lainnya telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6. Melakukan *monitoring* dan pelaporan Rencana dan Realisasi Pengkinian Data Nasabah yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Memberikan pelatihan dalam bentuk sosialisasi yang berkaitan dengan penerapan program APU PPT dan PPPSPM secara periodik kepada seluruh karyawan Bank guna meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman karyawan mengenai program APU PPT dan PPPSPM serta mengimplementasi di seluruh unit kerja.
8. Memastikan sistem aplikasi AML KB Bank dapat melakukan identifikasi transaksi diluar profil dan menyediakan pemantauan serta pelaporan secara efektif dalam upaya penguatan fungsi APU PPT dan PPPSPM.
9. Memastikan adanya proses *screening* terhadap Calon Nasabah, Nasabah, WIC dan terhadap transaksi dari dan ke Bank dalam upaya memastikan Bank tidak digunakan untuk pelaku kejahatan *cross border* dan sanksi nasional maupun internasional.
10. Secara berkesinambungan memberikan pelatihan APU PPT dan PPPSPM yang memadai untuk karyawan sesuai dengan prioritas/ *risk based approach*.



Permasalahan Hukum/Litigasi Perusahaan dan Anak Perusahaan

Sepanjang tahun 2024, permasalahan hukum perdata dan pidana yang sudah selesai (memiliki kekuatan hukum tetap) maupun yang masih dalam proses penyelesaian dapat disajikan dalam tabel berikut:

Permasalahan Hukum Perdata KB Bank Sampai dengan Desember 2024

No.	Keterangan	Data Umum	Perkara Debitur PKPU/Pailit
1	Perkara Hukum yang telah Selesai sampai dengan Desember 2024	109	24
2	Dalam Proses Penyelesaian	68	57
3	2a. Perkara yang masih proses di Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)	34	-
4	2b. Perkara yang masih proses di Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi)	10	-
5	2c. Perkara yang masih proses di Tingkat Kasasi (Mahkamah Agung)	20	-
6	2d. Perkara yang masih proses di Tingkat Peninjauan Kembali (Mahkamah Agung)	3	-
7	2e. Arbitrase	1	-
Jumlah		**177**	**81**

Permasalahan Hukum Pidana KB Bank Sampai dengan Desember 2024

No.	Keterangan	Dalam Proses	Selesai
1	PELAPOR	3	-
2	TERLAPOR	4	2
3	SAKSI	58	4
Jumlah		**65**	**6**

Perkara Penting

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan

Berikut adalah perkara penting (Perkara gugatan perdata) di tahun 2024 yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak secara material terhadap Bank:

1. PT. Nur Kencana Lestari Inti
2. PT. Mitra Usaha Sarana
3. DXC
4. PT. Cipta Diamond Property
5. PT. Patibrata

Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Entitas Anak

Selama tahun 2024 tidak ada permasalahan hukum yang dihadapi Entitas Anak Perseroan.

Permasalahan Hukum yang Sedang Dihadapi Oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Bank yang Sedang Menjabat

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) Gugatan dari Debitur an. PT Digital Network Aestetik kepada Mr Woo Yeul Lee (President Director) - selaku Tergugat II dan PT Bank KB Bukopin Tbk - selaku Tergugat I dalam perkara No. 209/Pdt.G/2024/PN Jkt.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Gugatan diajukan sehubungan dengan rencana Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank KB Bukopin Tbk terhadap jaminan fasilitas Debitur. Adapun terhadap Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 7 Januari 2025 telah memberikan Putusan yang pada intinya Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. Sampai dengan laporan ini dibuat, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga perkaranya telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Sanksi Administratif dari Otoritas Terkait

Selama tahun 2024 tidak terdapat sanksi administratif yang material yang berpengaruh terhadap kelangsungan usaha Bank maupun sanksi administratif kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Bank yang diberikan oleh regulator.

Akses Informasi Dan Data Perusahaan

KB Bank terus berupaya untuk menanamkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatannya. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah dengan menjaga keterbukaan informasi yang transparan, baik untuk pihak internal maupun eksternal. Bank menyadari bahwa pengelolaan informasi yang efektif sangat penting dalam menciptakan citra positif di mata publik, termasuk para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bentuk komitmen dalam memastikan penyampaian informasi yang jelas dan akurat, KB Bank secara rutin menyediakan berbagai informasi yang relevan kepada pihak yang berkepentingan melalui berbagai saluran komunikasi. Informasi ini dapat diakses melalui siaran pers, media cetak, media sosial, serta kanal elektronik lainnya. Bank juga memastikan bahwa setiap informasi yang disampaikan tetap memperhatikan aspek kerahasiaan data Perseroan, sehingga tetap sesuai dengan regulasi yang berlaku dan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Untuk informasi lebih lanjut, Bank menyediakan berbagai *platform* yang dapat diakses dengan mudah, antara lain:

Siaran Pers

Sepanjang tahun 2024, KB Bank telah merilis sejumlah siaran pers, sebagai berikut:

1. Lengkapi Perjalanan Transformasi, KB Bank Resmi Jadi Nama dan Logo Baru Perusahaan
2. KB Bank Gandeng United Tractors Salurkan Kredit Untuk Pembelian Alat Berat
3. Perkuat Struktur Pendanaan, KB Bank Terima Fasilitas Pinjaman Jangka Panjang Dari Korea Development Bank
4. Bangun Pertumbuhan Ekosistem Bisnis, KB Bank dan APP Indonesia Tandatangani Kerja Sama Pembiayaan Vendor
5. KB Bank Salurkan Kredit Pembiayaan Kemitraan Rp 123 Miliar ke Bank Perekonomian Rakyat
6. KB Bank Catatkan Pertumbuhan Dua Kali Lipat Untuk Kredit Baru Sepanjang Kuartal I Tahun 2024
7. Fitch Rating Berikan KB Bank Peringkat Internasional Setara dengan Peringkat *Sovereign Credit Rating* Indonesia
8. Berikan Kemudahan dan Fleksibilitas Bagi Nasabah, KB Bank Luncurkan Kartu Debit KBstar
9. Gelar RUPST, KB Bank Paparkan Pertumbuhan Kinerja Hingga Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
10. Rayakan HUT Ke-54, KB Bank Tebar Diskon hingga 54%, Belanja, Makan dan Liburan Jadi Makin Hemat
11. Kinerja Perusahaan Terus Membaik, Jajaran Direksi KB Bank Tambah Kepemilikan Saham
12. Lengkapi Perjalanan Transformasi, KB Bank Pelopori Penilaian Kredit Berbasis AI di Indonesia
13. KB Bank Optimis Raih Kinerja Positif dengan Sejumlah Perbaikan Signifikan Sepanjang Semester I 2024
14. Perkuat Struktur Pendanaan Jangka Panjang, KB Bank Terbitkan Obligasi Global
15. Hingga Kuartal III 2024, KB Bank Catat Pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih Sebesar 84,15 Persen
16. Konsisten Catat Pertumbuhan Bisnis, KB Bank Kembali Raih Peringkat AAA dari PEFINDO
17. KB Bank Cetak Pembiayaan *Pre-Order* Mobil Hyundai Hingga Lebih Dari Rp2,1 Triliun Sepanjang 2024
18. Dukung Proyek Strategis Tripatra, KB Bank Perkuat Kemitraan melalui Pembiayaan Vendor
19. Paparkan Kinerja Perseroan, BBKP Targetkan Turnaround di Tahun 2025
20. Gelar RUPSLB, Bank KB Bukopin (BBKP) Umumkan Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi
21. Dukung Swasembada Pangan, KB Bank Salurkan Pembiayaan Kredit ke Petani Tebu

Buletin Digital

Transformasi digital telah membawa perubahan signifikan dalam cara Bank KB mengelola komunikasi internal. KB Bank memiliki majalah bulanan sebagai sarana komunikasi dengan sebuah platform digital terintegrasi yang dinamakan *Bukopin Office Communication* (BOC). Dengan adanya BOC, karyawan KB Bank kini dapat mengakses informasi terbaru, berita terkini, dan berbagai materi penting yang berkaitan dengan Perseroan serta industri. *Platform* digital ini memberikan kemudahan dan kecepatan bagi para karyawan untuk terhubung dengan informasi terbaru tentang kegiatan Perseroan, inisiatif, perkembangan, serta peluang dan acara yang diadakan di lingkungan internal.

Lebih dari itu, BOC juga menawarkan ruang bagi karyawan untuk berinteraksi secara lebih aktif. Fitur komentar dan umpan balik yang tersedia memungkinkan mereka untuk turut serta dalam diskusi, memberikan masukan, dan berbagi pengalaman serta ide yang berguna.

Media Elektronik

Berdasarkan ketentuan OJK No. 8/POJK.04/2015 tentang situs web emiten atau perusahaan publik, situs web Perseroan wajib menyediakan berbagai informasi penting. Informasi tersebut mencakup data mengenai pemegang saham, informasi terkait RUPS, struktur grup perusahaan, analisis kinerja keuangan, laporan keuangan selama lima tahun terakhir, serta profil Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, situs *web* juga memuat Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal.

Situs resmi Perseroan, yaitu www.kbbank.co.id dapat diakses 24 jam sehari dan selalu diperbarui secara berkala untuk memastikan masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh informasi terbaru dari KB Bank. Selain itu, informasi terkait KB Bank juga dapat ditemukan di situs OJK dan Pasar Modal melalui www.ojk.go.id dan www.idx.co.id.

Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut Perseroan untuk terus beradaptasi agar tidak ketinggalan. Salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai hal ini adalah melalui pemanfaatan media sosial, yang kini menjadi alat komunikasi utama yang mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sebagai respons terhadap kebutuhan ini, KB Bank hadir dengan menyediakan berbagai informasi melalui aplikasi-aplikasi teknologi yang tersedia, seperti:

Facebook @KB Bank
X @kbbank_id
Instagram @kbbukopin
YouTube KB Bank
TikTok kbbank.id

Media Cetak

Di era digital yang semakin berkembang, akses informasi semakin mudah dengan berbagai *platform online*. Namun, di tengah kemajuan tersebut, media cetak masih memegang peranan penting dalam menyebarkan informasi kepada publik, terutama bagi masyarakat yang belum sepenuhnya terhubung dengan teknologi digital. KB Bank tetap memanfaatkan media cetak sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada nasabah dan masyarakat luas. KB Bank bekerjasama dengan sejumlah media cetak seperti Bisnis Indonesia, Investor Daily, dan Kontan untuk mempublikasikan sejumlah berita.

Untuk memperoleh informasi lebih lengkap, nasabah dapat menghubungi *call center* KB Bank di nomor 14005 yang beroperasi 24 jam setiap hari. Selain itu, informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh dengan mengunjungi kantor cabang terdekat. Bagi investor dan calon investor, informasi lebih rinci tersedia melalui *Investor Relations* yang dapat dihubungi melalui *e-mail* di investor.relations@kbbank.co.id.

Kode Etik

Kode Etik Perseroan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas dan konsistensi setiap aspek operasional Perseroan. Sebagai pedoman yang mengarahkan perilaku, Kode Etik tidak hanya sekadar peraturan tertulis, tetapi juga merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi dalam budaya kerja Perseroan. Setiap keputusan yang diambil, baik dalam skala kecil maupun besar, harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip yang termuat dalam Kode Etik ini.

Lebih dari sekadar referensi untuk tindakan sehari-hari, Kode Etik Perseroan juga berfungsi sebagai panduan dalam membangun hubungan profesional yang sehat dan saling menghormati. Dengan adanya Kode Etik, diharapkan setiap individu dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, di mana keputusan dan perilaku yang diambil selalu sejalan dengan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab sosial yang diusung oleh Perseroan.

Komitmen terhadap Kode Etik ini juga diwujudkan oleh setiap elemen dalam Perseroan, mulai dari Dewan Komisaris hingga karyawan operasional, menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti transparansi dan akuntabilitas diutamakan dalam setiap lini bisnis Perseroan.

Pedoman Kode Etik

Pedoman Kode Etik disusun sebagai acuan penerapan yang berlaku untuk seluruh jajaran Perseroan, termasuk Dewan Komisaris, Organ Pendukung Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, dan seluruh karyawan, tanpa memperhatikan fungsi, pangkat, atau posisi jabatan. Pedoman ini wajib diikuti oleh semua pihak dan akan terus dievaluasi secara berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan Perseroan.

Pedoman Perilaku (Kode Etik) KB Bank terbagi dalam 7 (tujuh) bagian, yaitu:

Bagian I	Kepatuhan
Bagian II	Melindungi Aset Perseroan
Bagian III	Konflik Kepentingan
Bagian IV	Pemimpin sebagai Panutan
Bagian V	Hubungan dengan Nasabah, Rekanan dan Pesaing
Bagian VI	Hubungan dengan Perusahaan dan Sesama Karyawan
Bagian VII	Hubungan dengan Pemegang Saham dan Masyarakat

Pokok/Inti Kode Etik KB Bank

Pokok-pokok isi kode etik Bank adalah:

1. Patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Menghindari persaingan yang tidak sehat;
4. Tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok;
5. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang mengandung benturan kepentingan;
6. Menjaga kerahasiaan nasabah dan Perseroan;
7. Memperhitungkan dampak kerugian dari setiap kebijakan yang ditetapkan Perusahaan terhadap situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan;
8. Tidak menerima hadiah atau imbalan, baik langsung maupun tidak langsung, terkait dengan tugas dan wewenang yang diemban;
9. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesi dan citra Perseroan;
10. Tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan Perseroan;
11. Tidak memiliki kredit macet.

Pengungkapan Kepatuhan Bahwa Kode Etik Berlaku Bagi Seluruh Level Organisasi

Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite, serta pekerja tetap dan kontrak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, diwajibkan untuk mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Bank. Hal ini diwujudkan dengan pembubuhan tanda tangan pada Surat Pernyataan Kepatuhan terhadap Kode Etik Insan KB Bank, sebagai bentuk komitmen nyata dalam melaksanakan Kode Etik tersebut.

Sosialisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Untuk memastikan penyebaran Kode Etik KB Bank, Direksi dan Dewan Komisaris telah memastikan bahwa sosialisasi kepada seluruh karyawan Perseroan dilakukan melalui berbagai cara, antara lain:

1. Situs web Perseroan;
2. Memorandum Internal;
3. Media Internal;
4. Meminta Pimpinan unit untuk selalu mengingatkan personilnya agar berkegiatan dengan mengindahkan kode etik.

Upaya Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Penerapan Kode Etik di seluruh lapisan Perseroan menegaskan bahwa setiap individu memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan bertanggung jawab. Kesadaran akan pentingnya Kode Etik tidak hanya bergantung pada pemahaman kolektif, tetapi juga pada tanggung jawab pribadi setiap karyawan untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai serta prinsip yang terkandung dalam Kode Etik.

Keberhasilan implementasi Kode Etik bukan hanya menjadi tanggung jawab tim manajemen, melainkan merupakan kewajiban bersama seluruh jajaran Perseroan , mulai dari individu hingga unit kerja. Dengan menginternalisasi nilai-nilai Kode Etik, setiap insan KB Bank diharapkan dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan operasional. Dengan demikian, Perseroan dapat mencapai visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu bentuk tanggung jawab individu dalam penerapan Kode Etik adalah melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi. Perseroan menekankan pentingnya keterbukaan serta kewajiban untuk melaporkan dugaan pelanggaran, baik yang dilakukan oleh rekan kerja maupun pegawai lainnya. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, Perseroan memberikan dukungan serta perlindungan bagi pelapor agar mereka dapat menyampaikan laporan terkait penyimpangan yang diketahui tanpa rasa takut. Konsistensi dan ketegasan dalam menegakkan aturan juga menjadi aspek penting dalam penerapan Kode Etik. Perseroan menunjukkan komitmennya dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran, sehingga nilai-nilai etika dapat terus dijaga dalam seluruh aspek operasional.

Jumlah Pelanggaran pada Tahun 2024

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan dalam Pedoman Kode Etik Perseroan dianggap sebagai pelanggaran dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sanksi tersebut merupakan tindakan korektif yang diterapkan oleh Perseroan. Berikut ini adalah tabel yang merinci jenis pelanggaran beserta sanksi yang diberikan:

Jenis Surat Sanksi	Jumlah Sanksi
Surat Peringatan 1 (SP 1)	7
Surat Peringatan 2 (SP 2)	1
Surat Peringatan 3 (SP 3)	30
Surat Teguran	3
Total	**41**

Kebijakan Anti Korupsi dan Sosialisasinya

Korupsi merupakan tindakan yang berdampak negatif terhadap perekonomian, baik di sektor publik maupun swasta. Praktik ini menghambat investasi, memperlambat pertumbuhan ekonomi, serta memperbesar kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan. Salah satu penyebab utama korupsi adalah lemahnya integritas individu serta kurangnya sistem pengawasan yang efektif.

Sebagai institusi keuangan yang menjunjung tinggi prinsip tata kelola yang baik, KB Bank berkomitmen untuk menjalankan bisnis secara jujur, beretika, serta bebas dari praktik suap dan korupsi. Kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas Perseroan.

Dalam upaya memperkuat komitmen ini, KB Bank telah menetapkan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan No. 0165 Tahun 2021. Kebijakan ini dirancang sebagai pedoman bagi seluruh karyawan dalam mencegah, mengidentifikasi, dan menolak segala bentuk suap dan korupsi yang dapat merugikan Perseroan maupun pihak terkait.

Untuk memastikan implementasi yang efektif, kebijakan ini telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan melalui berbagai media internal, seperti Bukopin *Office Communication* (BOC) dan *email* postmaster. Dengan langkah ini, KB Bank menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas, transparan, dan bebas dari korupsi.

Pengendalian Gratifikasi

KB Bank menegaskan komitmennya terhadap prinsip *Zero Tolerance* terhadap segala bentuk praktik suap, korupsi, dan gratifikasi. Dalam menjalankan bisnisnya, Bank berusaha bertindak secara profesional, adil, dan berintegritas. Kesadaran akan pentingnya pengendalian gratifikasi mendorong Bank untuk merumuskan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. 0165 Tahun 2021.

Kebijakan ini tidak hanya dirancang tetapi juga disosialisasikan secara luas melalui berbagai media komunikasi internal. Selain itu, Bank secara rutin mengadakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran setiap karyawan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap kebijakan tersebut. Upaya ini dilakukan untuk menjaga integritas serta kepercayaan terhadap KB Bank, sekaligus memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat mematuhi standar etika yang tinggi dalam praktik bisnis.

Dalam hal gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas, seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta karyawan diwajibkan untuk menolaknya. Bank KB Bank juga mengawasi pelaksanaan Kebijakan Anti Penyuapan dan Korupsi, termasuk memastikan kepatuhan terhadap kode etik serta Pedoman Disiplin Karyawan. Setiap pelanggaran terhadap kebijakan ini akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan tersebut, KB Bank telah menerapkan berbagai kebijakan pendukung, antara lain:

1. Surat Keputusan No. 0382 Tahun 2020 Terkait Kode Etik PT Bank KB Bukopin Tbk.
2. Pedoman No. 095 Tahun 2024 tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank KB Bukopin Tbk tanggal 24 Juni 2024.
3. Kebijakan No. 208 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Strategi *Anti Fraud* PT Bank KB Bukopin Tbk. Tanggal 12 Desember 2024.

Melalui kebijakan-kebijakan ini, KB Bank berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas dan transparan, serta terus berupaya mencegah segala bentuk penyimpangan dalam operasional bisnisnya.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non-keuangan Perusahaan

KB Bank telah melaksanakan kewajiban transparansi dan mempublikasikan informasi terkait kondisi keuangan serta non-keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyampaian dan publikasi informasi tersebut dilakukan melalui berbagai media, termasuk media cetak dan situs web Bank, sebagaimana dijelaskan berikut ini:

1. Laporan Keuangan Triwulan kepada regulator, yang juga dipublikasikan melalui media cetak dan situs web Bank;
2. Laporan Tahunan KB Bank yang disusun dan disajikan sesuai ketentuan dan disampaikan kepada regulator, *rating agency*, lembaga pengembangan perbankan, lembaga/institusi riset dan majalah keuangan dan dipublikasikan melalui situs web Bank;
3. Informasi Tata Kelola Perusahaan, yang di antaranya adalah Laporan Tahunan Tata Kelola Perusahaan, Visi, Misi, Nilai Perusahaan, Komposisi dan Profil Dewan Komisaris dan Direksi, serta ketentuan internal terkait tata kelola mulai dari Anggaran Dasar hingga Piagam Komite-Komite yang juga dipublikasikan melalui situs *web* Bank;
4. Informasi Produk dan Layanan Perusahaan, termasuk jaringan kantor, dipublikasikan melalui Laporan Tahunan dan situs *web* Bank, agar nasabah, investor dan masyarakat luas dapat dengan mudah mengakses informasi atas produk dan layanan Bank;
5. Informasi Prosedur Penyampaian Pengaduan, Kebijakan Keamanan Informasi dan Tips bagi Nasabah dalam menggunakan layanan perbankan yang dipublikasikan melalui situs *web* Bank untuk pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen;
6. Informasi lainnya yang bertujuan untuk mendukung keterbukaan informasi, edukasi keuangan dan layanan kepada masyarakat.

Pembelian Kembali (*Buyback*) Saham dan Obligasi KB Bank

Selama tahun 2024, tidak terdapat *buyback* saham maupun *buyback* obligasi.



Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik

KB Bank memiliki kebijakan internal yang secara tegas melarang keterlibatan Perseroan, termasuk seluruh karyawannya, dalam aktivitas politik. Larangan ini mencakup pemberian dana untuk kepentingan politik. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga independensi dan profesionalisme Bank serta karyawannya, sehingga Bank dapat tetap fokus pada bisnisnya tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik yang berpotensi mempengaruhi kinerja dan integritasnya.

Di sisi lain, KB Bank percaya bahwa kegiatan sosial memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, KB Bank secara aktif berpartisipasi dalam berbagai program sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan kegiatan sosial ini diatur dengan jelas dan dilaporkan secara terperinci dalam bagian Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang terdapat dalam Laporan Tahunan ini.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait

Kebijakan

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait, Bank mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan dana besar bagi Bank Umum. Sebagaimana sebagaimana telah diubah sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan dana besar bagi Bank Umum. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan tata cara proses persetujuan dan pelaksanaannya diatur pada Surat Edaran Direksi No. SE/106/DIR/V/2019 tentang Addendum 1 Kebijakan dan Prosedur BMPK.

Sepanjang tahun 2024, penyediaan dan kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*large exposure*), dapat disampaikan sebagai berikut:

Provision of Fund for Related Party	2024 (Rp billion)	2023 (Rp billion)	*Nature of Relationship*
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah-bruto	40	275	Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu Pemegang Saham Utama
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif	24	20	Manajemen dan Karyawan kunci
Lainnya	0	0	Dikendalikan/di bawah pengaruh signifikan salah satu Pemegang Saham Utama, dan/ atau Manajemen dan Karyawan kunci

Perlindungan Nasabah, *Anti Fraud* dan *Whistleblowing System*

Kebijakan Perlindungan Nasabah

KB Bank meningkatkan layanan bagi nasabah dengan menerapkan kebijakan penanganan pengaduan yang terintegrasi, berbasis *online*, dan andal. Setiap pengaduan ditangani dengan cepat guna memastikan perlindungan hak-hak nasabah. Jika penyelesaian tidak tercapai, nasabah memiliki opsi untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui LAPSPI, sesuai dengan regulasi OJK No. 1/POJK.07/2014.

Perlindungan Hak Kreditur

KB Bank menerapkan kebijakan keterbukaan informasi yang jujur dan transparan guna melindungi hak-hak kreditur. Setiap kreditur diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Melalui keterbukaan informasi, kreditur dan mitra usaha berhak memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak-hak kreditur ditetapkan dalam perjanjian yang telah disepakati, sementara Bank memiliki kewajiban untuk memenuhinya secara tepat waktu. Selain itu, Bank berupaya mencegah keterlambatan atau kelalaian yang berpotensi merugikan kedua belah pihak.

Kebijakan *Conflict Management* (Termasuk *Insider Trading*)

KB Bank belum memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Namun dalam mempersiapkan dokumen publikasi selama ini, informasi telah dilokalisir dengan ketat di Departemen-departemen terkait.

Penerapan Strategi *Anti Fraud*

KB Bank menerapkan Kebijakan Strategi Anti-*Fraud* sebagai wujud komitmen dalam mengendalikan *fraud* melalui sistem pengendalian yang efektif dan berkelanjutan. Untuk memastikan implementasi yang optimal, strategi ini didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai. Tujuan utama kebijakan ini adalah mencegah risiko penyimpangan, khususnya *fraud*, yang dapat merugikan nasabah dan Bank. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Selain berfokus pada pencegahan, kebijakan ini mencakup aspek pendeteksian, investigasi, serta perbaikan sistem sebagai bagian dari pengendalian *fraud* yang terintegrasi. Ketentuan terkait strategi ini telah diatur dalam Kebijakan No. 208 Tahun 2024. Diharapkan, penerapan Kebijakan Strategi Anti-*Fraud* dapat memperkuat pengendalian internal Bank, sehingga meningkatkan kinerja bisnis dan operasional KB Bank serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pencegahan

Pilar Pencegahan mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang setidaknya meliputi:

Anti fraud Awareness

Anti fraud Awareness adalah upaya KB Bank untuk menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya pencegahan *Fraud* bagi seluruh jajaran organisasi dan berbagi pihak yang berhubungan dengan melalui seluruh fungsi pengendalian internal yang terkait secara berkesinambungan melakukan sosialisasi kepedulian dan budaya anti *Fraud* dengan berbagai cara, yaitu:

1. Penyusunan dan Sosialisasi *Anti Fraud Statement*
   Salah satu upaya edukasi KB Bank yang ditujukan kepada seluruh karyawan untuk memberikan arahan dalam internalisasi budaya anti *Fraud* dan agar dapat meningkatkan kewaspadaan maupun meningkatkan kesadaran atas potensi risiko *Fraud* pada setiap aktivitas kegiatan Bank serta kebijakan dan komitmen KB Bank untuk tidak memberikan toleransi pada tindakan *Fraud* (*zero tolerance*).
2. *Program Employee Awareness;*
   Program ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan publikasi/kampanye pencegahan *Fraud* secara internal yang berkelanjutan melalui media yang ada di Bank, misalnya:
   a. Menjalankan aktivitas pelatihan, baik secara *offline* (tatap muka), *online* maupun melalui *E-Learning* terkait materi Anti *Fraud Awareness* yang diselenggarakan bekerjasama dengan *Human Capital* dan /atau dengan unit kerja terkait.
   b. Pengenalan budaya perusahaan dan kode etik melalui *E-Learning* Induction.
   c. Kampanye Anti *Fraud Awareness* melalui media komunikasi perusahaan (*e-mail*, poster, brosur atau media elektronik) yang berisikan pesan tentang anti *Fraud*.
   d. Publikasi atas kejadian *Fraud* beserta sanksi yang diberikan kepada pelaku *Fraud*.
3. *Customer Awareness.*
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan nasabah, deposan, serta vendor dan *stakeholder* lainnya, terhadap kemungkinan terjadinya *Fraud* serta untuk mendukung upaya Bank dalam rangka menegakkan budaya anti *Fraud*. Program ini diselenggarakan dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan poster/brosur anti *Fraud*, penjelasan tertulis, media elektronik, dan penggunaan sarana lainnya.

Komitmen Pencegahan *Fraud*

1. Setiap karyawan, Direksi, Komisaris, dan anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris wajib memahami dan mematuhi Kode Etik dan Budaya Perusahaan serta semua peraturan yang relevan dengan pekerjaan yang bersangkutan.
2. Setiap karyawan wajib memahami dan mematuhi Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama.
3. Setiap karyawan, Direksi, Komisaris, dan anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan pedoman kerja yang sudah ditentukan.
4. Mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif berdasarkan moralitas, integritas, dan loyalitas terhadap perusahaan.
5. Menyediakan sarana/media untuk menyampaikan saran perbaikan terkait pencegahan *Fraud*.
6. Membangun komunikasi aktif antara manajemen dan fungsi audit internal, kepatuhan, manajemen risiko, serta pengendalian internal terkait dalam upaya pencegahan *Fraud*.

Kegiatan Pengendalian

Mekanisme pengendalian *fraud* diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi KB Bank yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Kaji Ulang Direksi dan Dewan Komisaris
   Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala mengkaji ulang realisasi rencana kerja dan anggaran guna mendeteksi permasalahan seperti kelemahan pengendalian, kesalahan penyajian laporan keuangan, dan lain-lain.
2. Kaji Ulang Operasional
   a. Kaji ulang dilaksanakan oleh fungsi audit internal secara berkala.
   b. Mekanisme kaji ulang operasional diatur dalam pedoman tersendiri.

3. Pengendalian Sistem Informasi
   a. Pengendalian umum meliputi pengendalian terhadap operasional pusat data, sistem pengadaan dan pemeliharaan *software*, pengamanan akses, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi yang ada. Pengendalian umum ini diterapkan terhadap *mainframe*, *server*, dan *user workstation*, serta jaringan internal-eksternal.
   b. Pengendalian aplikasi diterapkan terhadap program yang digunakan KB Bank dalam mengolah transaksi adalah benar, akurat, dan telah diotorisasi secara benar. Selain itu, pengendalian aplikasi harus dapat memastikan tersedianya *audit trail* sehingga proses *audit* dapat berjalan dengan efektif dan untuk mengecek kebenaran proses *audit* dimaksud.
4. Pengendalian Aset (Fisik);
   a. Pengendalian *asset* dilaksanakan untuk menjamin terselenggaranya pengaman fisik terhadap *asset* KB Bank.
   b. Kegiatan ini meliputi pengamanan *asset*, catatan, dan akses terbatas terhadap program komputer dan file data, serta membandingkan nilai aktiva dan pasiva KB Bank dengan nilai yang tercantum pada catatan pengendali, khususnya pengecekan nilai aktiva secara berkala.
5. Dokumentasi.
   a. Seluruh ketentuan, kebijakan dan prosedur didokumentasikan secara memadai.
   b. Dokumen dikaji ulang dan diperbaharui secara berkala guna menggambarkan kegiatan Operasional KB Bank secara aktual dan diinformasikan kepada Karyawan, Direksi, dan Komisaris serta anggota komite yang dibentuk Dewan Komisaris.

Pemisahan Fungsi untuk Menghindari Benturan Kepentingan

Penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) bertujuan agar setiap orang dalam jabatan tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh Langkah kegiatan Operasional.

Menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*). Langkah-langkah pemisahan fungsi antara lain:
1. Menetapkan fungsi atau tugas tertentu yang harus dipisahkan atau dialokasikan kepada beberapa orang dan atau pemisahan fungsi pengadministrasian dan penyimpanan barang dalam rangka mengurangi risiko terjadinya manipulasi data keuangan/kekayaan atau penyalahgunaan aset KB Bank.
2. Pemisahan fungsi tidak terbatas pada kegiatan *front office* dan *back office*, tetapi juga dalam rangka pengendalian terhadap:
   a. Persetujuan atas pembelian dan atau penjualan suatu barang atau jasa.
   b. Persetujuan atas pengeluaran dana dan realisasi pengeluaran.
   c. Rekening nasabah dan rekening pemilik Bank.
   d. Transaksi dalam pembukuan Bank.
   e. Pemberian informasi kepada nasabah Bank.
   f. Penilaian terhadap kecukupan dokumentasi perkreditan dan pemantauan debitur setelah pencairan kredit.
   g. Kegiatan usaha lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan yang signifikan.
   h. Independensi Fungsi Kepatuhan, Manajemen Risiko dan Audit Internal KB Bank.

Ketentuan mengenai rotasi, mutasi, dan cuti diterapkan dalam rangka sistem pengendalian internal termasuk di dalamnya untuk mencegah dan mendeteksi *Fraud*. Untuk ketentuan mengenai mutasi, rotasi dan cuti diatur dalam ketentuan tersendiri

Sistem Akuntansi, Informasi, dan Komunikasi

1. Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi yang memadai bertujuan untuk meminimalisir terjadinya *fraud*.
2. Sistem akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi mengelompokkan, menganalisa, mengklasifikasi mencatat/membukukan, dan melaporkan transaksi Bank.
3. Sistem Informasi Bank menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.
4. Hal-hal ini yang menjadi perhatian dalam menerapkan pengendalian *Fraud* terkait penyelenggaraan sistem dan teknologi informasi:
   a. Ketersediaan pencatatan yang akurat dan terkini dari setiap transaksi dan kekayaan KB Bank.
   b. Ketersediaan bukti dan dokumen yang memadai dalam rangka mendukung proses jejak audit (*audit trail*).
   c. Pelaksanaan pengendalian terhadap sistem komputer dan pengamanannya (*general control*) maupun pengendalian terhadap aplikasi *software* dan prosedur manual lainnya (*application controls*).
   d. Relevansi akurasi, ketepatan waktu, ketersediaan akses bagi pihak yang berkepentingan serta konsistensi format penyajian.
   e. Prosedur dan jadwal retensi pencatatan transaksi.
5. Ketersediaan saluran komunikasi yang efektif antara supervisi dengan *subordinate* begitu pula sebaliknya, maupun lintas satuan kerja bertujuan agar seluruh pejabat/karyawan memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku termasuk kebijakan dalam rangka pencegahan *Fraud*.

Know Your Employee (KYE)

1. Seluruh elemen organisasi KB Bank menerapkan prinsip "*Know Your Employee*", yaitu setiap supervisi harus mengenali secara utuh setiap bawahannya.
2. *Recruitment* karyawan dilakukan dengan sistem dan prosedur *recruitment* yang efektif (*pre recruitment screening*), yang dapat memberikan gambaran mengenai rekam jejak calon pegawai secara lengkap dan akurat.
3. Melakukan kontrol pasca *recruitment* termasuk sistem rotasi, mutasi, cuti wajib, promosi dengan mempertimbangkan rekam jejak karyawan.

4. Metode *pre employment screening* disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas kegiatan usaha KB Bank dengan menggunakan sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara objektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki keahlian khusus.
5. Supervisi wajib mengenali karyawannya antara lain karakter, integritas, relasi, perilaku, gaya hidup, permasalahan yang sedang dihadapi dan penempatan pada posisi yang sesuai dengan keinginan serta kemampuan.
6. Supervisi secara berkala melakukan *coaching* dan konseling terhadap *subordinate*nya dengan tujuan untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang terjadi sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan kondusif serta motivasi kerja yang tinggi.
7. Dokumentasi dan pengkinian data karyawan, termasuk membuat database yang berisi negative list karyawan terkait kasus *Fraud*.
8. Ketentuan dan mekanisme *Know Your Employee* diatur dalam ketentuan tersendiri.

Identifikasi Kerawanan

Identifikasi kerawanan bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai risiko terjadinya *fraud* yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan KB Bank dengan cara Sebagai berikut:

1. Identifikasi kerawanan melalui kajian Risiko Operasional dan *Fraud* meliputi proses identifikasi, analisis dan menilai potensi risiko pada setiap aktivitas/produk Bank serta memberikan rekomendasi cara mitigasinya.
2. Identifikasi dilakukan melalui kajian terhadap dokumen Produk program dan layanan atau media formal lainnya yang setingkat. Dalam hal informasi yang belum mencukupi untuk memberikan kajian, maka Departemen *Anti Fraud* & Investigasi Khusus dapat meminta dokumen pendukung lainnya atau penjelasan melalui diskusi/rapat.
3. Ketentuan tentang Identifikasi Kerawanan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Deteksi

Pilar Deteksi memuat langkah untuk mengidentifikasi dan menemukan *Fraud* dalam kegiatan usaha Bank yang meliputi:

1. *Whistleblowing System* (WBS)
   a. Sebagai sarana bagi seluruh *stakeholders* untuk melaporkan tindakan pelanggaran kode etik, pedoman disiplin karyawan, dan benturan kepentingan yang dilakukan baik oleh pegawai maupun Direksi KB Bank.
   b. Saluran *Whistleblowing System* (WBS) terdiri dari; Email, Whatsapp, SMS, Surat, Tatap Muka & E-Form Website.
   c. Bank memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan.
   d. Kebijakan dan mekanisme pelaksanaan *Whistleblowing System* (WBS) diatur dalam ketentuan tersendiri.
2. *Surprise Audit*
   a. *Surprise audit* merupakan kegiatan audit yang dilakukan secara mendadak pada unit bisnis tertentu yang berisiko tinggi atau rawan terjadinya *Fraud*.
   b. *Surprise audit* dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI).
3. *Surveillance System*
   a. *Surveillance System* bertujuan memantau dan menguji efektivitas kebijakan anti *Fraud*.
   b. Pelaksanaan *Surveillance System* dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank KB tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa.
   c. Dilakukan dalam situasi dan kondisi dimana tujuan pengujian dan pemeriksaan hanya dapat dicapai jika pemeriksa/penguji mengetahui secara langsung/mendapatkan gambaran/informasi yang sebenarnya dan apa adanya mengenai subjek dan/atau objek audit.
   d. Adapun 3 (tiga) komponen/piranti utama pengujian dalam kegiatan *Surveillance System* adalah:
      i) Sistem Pengendalian Internal;
      ii) Manajemen Risiko;
      iii) Kepatuhan.
4. *Fraud Detection System*
   Sistem yang digunakan oleh Bank untuk memonitor transaksi, Akun, dan Jaringan yang terdapat di sistem pembayaran Bank. Monitoring dilakukan dalam rangka untuk mendeteksi suatu anomali transaksi, *channel* yang dimonitor adalah Sebagai berikut:
   a. *E-Channel*,
   b. Kartu Kredit,
   c. Kartu Debit.
   d. ATM.

Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Pilar Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *Fraud* yang mencakup:

Investigasi

Pelaksanaan investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *fraud*. Investigasi bertujuan untuk mengungkapkan jumlah kerugian, tempat kejadian, pelaku, modus, serta penyebab terjadinya *fraud* dalam rangka Penerapan Strategi *Anti Fraud*.

Pelaporan Hasil Investigasi

Hasil investigasi akan dilaporkan kepada Direktur Utama dan ditembuskan kepada Direktur Kepatuhan, *Anti Fraud & Special Investigation Department*, Komisaris Utama, Ketua Komite *Audit* dan Direktur Terkait.

Pelaporan ke Pihak Otoritas

1. Laporan Terhadap Perubahan Strategi Anti *Fraud*
2. Dalam hal terdapat perubahan terhadap strategi anti *Fraud* yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank wajib menyampaikan perubahan strategi anti *Fraud* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan.
3. Bank melaporkan penerapan Strategi Anti *Fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
4. Bank menyampaikan Laporan *Fraud* yang berdampak signifikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank mengetahui terjadinya *Fraud* yang diputuskan dalam Komite Disiplin Karyawan.
5. Adapun yang dimaksud dengan *Fraud* yang berdampak signifikan adalah sebagai berikut:
6. Memiliki dampak kerugian aktual ≥ Rp. 1 miliar.
7. Menjadi perhatian publik dalam media massa dengan skala nasional.
8. Terdapat ≥ 5 (lima) kejadian serupa dengan total ≥ Rp. 1 miliar.
9. Pelaporan Hasil investigasi akan dilaporkan kepada *President Director* dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, Direktur terkait, dan SKAI dan/atau Departemen *Anti Fraud* & Investigasi Khusus.

Sanksi

KB Bank memiliki kebijakan pemberian sanksi kepada pelaku yang terbukti melakukan *Fraud* yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mengurangi kerugian yang ditimbulkan.

Keputusan pemberian sanksi terhadap pelaku *Fraud* akan diputuskan melalui Komite Disiplin Karyawan. Ketentuan terkait pemberian sanksi secara rinci diatur dalam ketentuan Peraturan Disiplin Karyawan.

Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pilar Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut memuat Langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *Fraud*, yang mencakup:

Pemantauan

Pemantauan terhadap tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian fraud dilakukan oleh Departemen Anti Fraud & Investigasi Khusus atas hasil rekomendasi penilaian/pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

Evaluasi

KB Bank memelihara data kejadian *fraud* (*fraud profiling*) guna mendukung pelaksanaan evaluasi yang mencakup data dan informasi mengenai jenis fraud, tanggal terjadinya fraud, unit kerja terjadinya *fraud*, pihak yang terlibat, jabatan, kerugian dalam rupiah, tindakan KB Bank, kelemahan/penyebab terjadinya *fraud*, tindak lanjut/perbaikan, dan kronologis kejadian *fraud*.

Berdasarkan data kejadian *Fraud* dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya *Fraud* serta ditentukan langkah penanganan dan perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern.

Adapun evaluasi juga dilakukan terhadap aktivitas pilar pencegahan, pilar deteksi, pilar investigasi, pelaporan dan sanksi, evaluasi atas ketiga pilar tersebut dilakukan melalui *fraud overview* setiap 6 bulan sekali untuk menilai efektifitas pelaksanaannya. Hasil dari *fraud overview* akan disampaikan kepada President Director untuk perbaikan pelaksanaan strategi anti *Fraud*.

Tindak Lanjut

Untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern sehingga dapat mencegah terulangnya kembali *fraud* karena kelemahan yang serupa maka KB Bank memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian *fraud*.

Pelanggaran (*Fraud*) Internal

Data Pelanggaran Internal *Fraud* Melebihi Rp100 Juta

Penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap (*honorer* dan *outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional perseroan yang berdampak terhadap timbulnya kerugian secara finansial maupun yang tidak menimbulkan kerugian finansial secara langsung, tercermin dalam tabel berikut:

Internal *Fraud* dalam Periode 1	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Jumlah *Fraud*	**0**	0	**6**	9	**0**	0
Telah Diselesaikan	**0**	0	**5**	8	**0**	0
Dalam Proses Penyelesaian di Internal Bank	**0**	0	**1**	0	**0**	0
Belum Diupayakan Penyelesaian	**0**	0	**0**	0	**0**	0
Telah Ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	**0**	0	**0**	1	**0**	0

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Kepercayaan dan kredibilitas merupakan fondasi utama dalam menjaga keberlangsungan bisnis perbankan. KB Bank menyadari bahwa keandalan sistem pengawasan internal menjadi faktor kunci dalam memastikan praktik bisnis yang bersih dan berintegritas. Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip GCG dan strategi *Anti Fraud*, KB Bank mengembangkan *Whistleblowing System* (WBS). Sistem ini memungkinkan pelaporan pelanggaran melalui jalur komunikasi yang aman, independen, dan bersifat rahasia, dengan perlindungan penuh bagi pelapor (*Whistleblower*).

Kebijakan WBS dirancang untuk memastikan pengelolaan laporan pelanggaran berjalan secara efektif, mencakup seluruh karyawan, Direksi, Komisaris, serta anggota komite di bawah Dewan Komisaris. Implementasi sistem ini memperkuat budaya transparansi serta membangun lingkungan kerja yang profesional dan beretika. Kebijakan terkait WBS telah diatur dalam Pedoman No 095 Tahun 2024 tentang Pedoman *Whistleblowing System* (WBS) PT Bank KB Bukopin Tbk, yang menjadi panduan dalam menjaga tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab.

Pengelolaan *Whistleblowing System*

Mekanisme

1. Mekanisme penyampaian pengaduan oleh Pelapor dapat melalui media WBS. Pengaduan yang dilaporkan oleh Pelapor harus dapat dipertanggungjawabkan, harus didasari dengan asas itikad, bukan untuk kepentingan pribadi atau balas dendam dan bukan merupakan fitnah.
2. *Anti Fraud & Special Investigation Department* menerima laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh Karyawan, Direksi, Komisaris serta anggota komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris;
3. Proses pelaporan pengaduan *Whistleblowing System* KB Bank dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:
   a. Apabila laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh seluruh karyawan *Level Staff* s.d *Division Head* atau jabatan lainnya di bawah Direksi), Direksi, Dewan Komisaris, dan Anggota Komite maka laporan pengaduan akan disampaikan kepada *President Director*;
   b. Apabila laporan pengaduan berkaitan dengan penyimpangan yang dilakukan oleh *President Director*, maka laporan pengaduan akan disampaikan kepada Komisaris Utama;
4. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, maka pelapor dapat melaporkan indikasi kecurangan/*fraud* melalui saluran penyingkapan/pengaduan yang telah tersedia dalam waktu 2x24 jam sejak diketahuinya indikasi kecurangan/*fraud*.
5. Memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk memudahkan komunikasi dengan pelapor yang sekurang-kurangnya memuat informasi antara lain:
   a. Nama pelapor atau informasi anonim;
   b. Nomor telepon dan alamat *email* yang dapat dihubungi.
6. Penyampaian laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pelapor harus memberikan informasi, bukti, atau dugaan yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan dan sekurang-kurangnya memenuhi unsur-unsur 4W1H antara lain:
   a. *What*: Apa dugaan pelanggaran yang diketahui;
   b. *Where*: Di mana perbuatan pelanggaran tersebut terjadi/dilakukan;
   c. *When*: Kapan perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan;
   d. *Who*: Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan pelanggaran hukum tersebut;
   e. *How*: Bagaimana perbuatan pelanggaran tersebut dilakukan.
7. Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan:
   a. *Fraud*,
   b. Pelanggaran selain *fraud*,
   c. Usulan perbaikan,
   d. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku,
   e. Keluhan nasabah,
   f. Hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu.
8. *Anti Fraud & Special Investigation Department* sebagai pengelola WBS secara periodik atau minimal 6 bulan sekali membuat laporan kepada President Director atas tindak lanjut pelaksanaan WBS, antara lain meliputi:
   a. Jumlah pengaduan;
   b. Kategori pengaduan;
   c. Saluran yang digunakan oleh pelapor;
   d. Penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti maupun yang tidak dapat ditindaklanjuti.
9. Komisaris dan *Board of Directors* memiliki wewenang untuk melakukan pengecekan terhadap seluruh laporan WBS yang masuk.

Penanganan Pengaduan

1. Pelapor membuat pengaduan dan mengirimkannya kepada KB Bank melalui sarana/media sebagai berikut:

Email	pedulikbbank@kbbank.co.id
Tatap muka	Menyampaikan pengaduan kepada Anti Fraud & Special Investigation Department
Aplikasi Whatsapp	08119714005
SMS	08119714005
Surat	Ditujukan kepada Anti Fraud & Special Investigation, Gedung KB Bank Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta 12770
E-Form Website	http://bit.ly/PortalWBSKBBank

2. Pengelola WBS menerima pengaduan, mencatat, dan mendokumentasikan seluruh informasi tersebut. Adapun dokumen yang harus dibuat adalah sebagai berikut:
   a. Berita acara pengaduan *Whistleblowing System* (WBS);
   b. Catatan/rekap pengaduan yang masuk sesuai kategori lingkup pengaduan.
3. Pengelola WBS segera melaporkan pengaduan kepada *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dan diikuti dengan analisa terhadap pengaduan berdasarkan bukti dan dokumen pendukung serta memberikan rekomendasi apakah pengaduan tersebut perlu ditindaklanjuti atau tidak.
4. Pengaduan yang masuk melalui media WBS wajib disampaikan kepada *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dan diputuskan untuk dilakukan pemeriksaan (investigasi)/ diteruskan kepada unit kerja terkait atau tidak dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
5. *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* memutuskan untuk memproses laporan pengaduan berdasarkan pertimbangan melalui informasi yang masuk melalui media WBS. Adapun rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut:
   a. Dihentikan, karena informasi dan dokumen pendukung yang tidak lengkap;
   b. Ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi *Anti Fraud & Special Investigation Department Head* dengan menginformasikan kepada:
      i) Unit Kerja Terkait (Jika laporan WBS termasuk dalam kategori pelanggaran selain *fraud*, usulan perbaikan, pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku, dan hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu).
      ii) Pengaduan yang masuk terkait informasi serta keluhan nasabah atas layanan produk dan jasa (termasuk jaringan kantor dan ATM) diarahkan untuk menyampaikan pengaduan kepada *Email Customer Care* dan *Call Center* KB Bank.
      iii) Tim Investigasi untuk melakukan investigasi (Jika laporan WBS termasuk dalam kategori *fraud*).
6. Hasil investigasi dituangkan dalam bentuk laporan investigasi dan disampaikan kepada President Director dan ditembuskan kepada Direktur Terkait dan Dewan Komisaris.
7. Hasil pemeriksaan dan seluruh dokumen WBS didokumentasikan oleh *Anti Fraud & Special Investigation Department* dan dikategorikan sebagai dokumen rahasia.
8. Pengelolaan sarana/media WBS menerapkan prinsip dual control dengan mekanisme penunjukan langsung oleh *Anti Fraud & Special Investigation Department Head*.
9. Pemeliharaan Dokumen
   a. *Anti Fraud & Special Investigation Department* bertindak sebagai pemelihara dokumen dan bertanggung jawab atas penyimpanan dokumen sesuai dengan Kebijakan/ Prosedur terkait arsip.
   b. Kaji ulang atas Kebijakan ini dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan cakupan risiko, kebutuhan, dan perkembangan Bank.

BAGAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

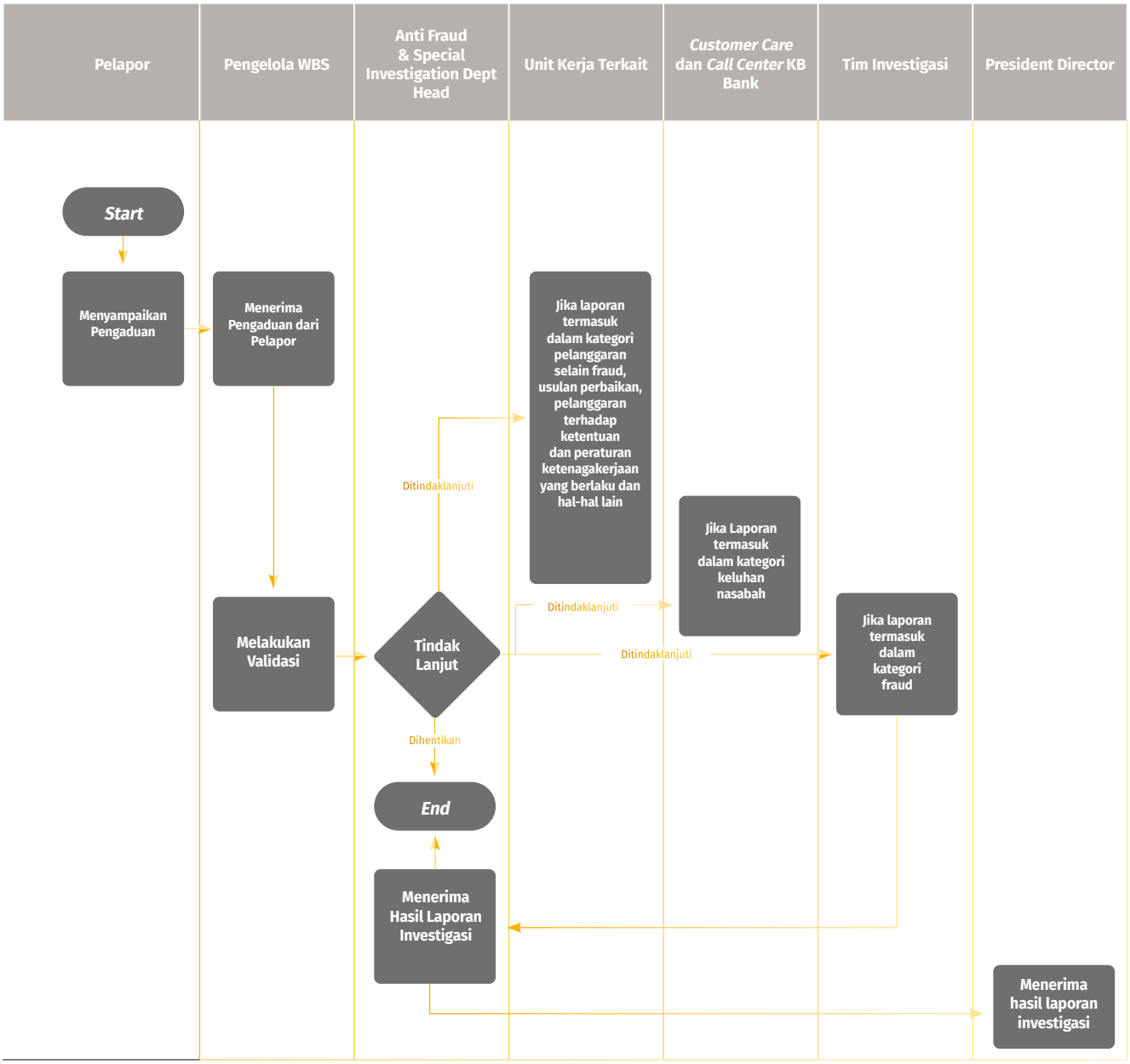

Perlindungan bagi Pelapor

1. KB Bank akan memberikan jaminan dan perlindungan kepada pelapor atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya dari pihak manapun selama pelapor menjaga kerahasiaan pengaduan yang disampaikan kepada pihak manapun serta laporan yang disampaikan bukan berupa fitnah.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud di atas meliputi segala perlindungan hukum, fisik dan kejiwaan apabila pelapor mengalami ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan manapun.
3. Perlindungan sebagaimana dimaksud di atas juga berlaku bagi tim investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait pengaduan.

Jenis Laporan yang Dapat Dilaporkan

Lingkup pengaduan yang akan ditindaklanjuti melalui WBS meliputi:

1. Perbuatan *Fraud* Tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *Fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Segala bentuk pelanggaran selain *fraud* dengan contoh tindakan antara lain:
   a. Membuka rahasia Bank untuk kepentingan pribadi,
   b. Pelecehan seksual dan perbuatan asusila di dalam dan di luar Bank,

c. Terlibat dalam kegiatan masyarakat yang dilarang,
d. Benturan kepentingan,
e. Norma dan Etika (*Code of Conduct*),
f. Pelanggaran terhadap ketentuan internal Bank dan ketentuan eksternal yang berlaku,
g. Tindakan melanggar hukum pidana maupun perdata ataupun peraturan perundang-undangan lainnya,
h. Tindakan membahayakan keselamatan dan lingkungan kerja, membahayakan keamanan bank, termasuk membahayakan aset pihak ketiga/nasabah.

3. Usulan Perbaikan
   Memberikan usulan kepada Bank atas celah yang terdapat pada prosedur, usulan atas perbaikan sistem ataupun usulan lainnya.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
5. Keluhan Nasabah Keluhan nasabah atas layanan produk, jasa (termasuk jaringan kantor dan ATM) ataupun keluhan lainnya.
6. Hal-hal lain diluar yang telah disebutkan di atas yang dapat disamakan dengan itu.

Sosialisasi *Whistleblowing System*

Kesadaran terhadap risiko *fraud* menjadi aspek krusial dalam menjaga integritas operasional di KB Bank. Oleh karena itu, *Anti Fraud & Special Investigation Department* bersama Unit Kerja Terkait terus mengedukasi karyawan mengenai pencegahan *fraud* dan mekanisme *Whistleblowing System*.

Sebagai langkah preventif, berbagai program sosialisasi rutin digelar untuk meningkatkan pemahaman karyawan terkait potensi kejahatan finansial. Materi edukasi mencakup berbagai modus *fraud* serta langkah mitigasi yang perlu dilakukan. Penyebaran informasi ini diperkuat melalui media internal seperti *Bukopin Office Communication* (BOC) dan *email* postmaster, sehingga seluruh karyawan dapat lebih waspada terhadap ancaman *fraud* di lingkungan kerja.

Dengan pendekatan ini, KB Bank memastikan bahwa setiap karyawan memiliki kesiapan dalam mengenali dan mencegah risiko *fraud*, guna mendukung terciptanya lingkungan kerja yang lebih aman dan terpercaya.

Jumlah Pengaduan

Pelaksanaan kebijakan *Whistleblower* sebagai salah satu cara pengungkapan/penyingkapan kecurangan yang terjadi. Sepanjang tahun 2024, terdapat 24 (Dua Puluh Empat) informasi yang dilaporkan melalui *Whistleblowing System*, dengan rincian dalam tabel berikut:

	EMAIL	FAX	SMS	WHATSAPP	KOTAK SURAT	LAINNYA (TELEPON/ INFORMASI LAIN)
Jumlah WBS yang masuk sepanjang Tahun 2024	4	0	0	6	1	13

Adapun proses tindak lanjutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Laporan Internal WBS	2024
Total Laporan	**24**
Telah Diselesaikan	**23**
Terbukti	**0**
Tidak Terbukti	**8**
Bersifat Informasi/Keluhan	**13**
Data Tidak Lengkap dan Pelapor tidak Memberikan Informasi/Data Tambahan yang Diminta	**2**
Dalam Proses Penyelesaian	**1**

Transparansi Praktik *Bad Governance*

KB Bank terus berupaya memperkuat GCG yang sehat guna menjaga keberlanjutan bisnis dan kepercayaan pemangku kepentingan. Setiap tahun, kebijakan dan mekanisme penerapan GCG dievaluasi serta disempurnakan agar tetap selaras dengan perkembangan regulasi dan praktik terbaik.

Kesadaran akan dampak negatif dari tata kelola yang lemah mendorong KB Bank untuk senantiasa mematuhi prinsip-prinsip utama GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan keadilan. Dengan komitmen yang kuat terhadap standar tata kelola yang baik, KB Bank memastikan bahwa seluruh aktivitas operasionalnya berjalan sesuai aturan yang berlaku. Berikut ini adalah implementasi prinsip GCG yang diterapkan:

No.	Keterangan	Praktik
1	Laporan atas Kegiatan Perusahaan yang Mencemari Lingkungan	Nihil
2	Perkara penting yang sedang dihadapi oleh Bank, entitas anak, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan	Nihil
3	Ketidakpatuhan dalam pengungkapan pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
4	Ketidaksesuaian penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan SAK	Nihil
5	Kasus Terkait Buruh dan Karyawan	Nihil
6	Tidak terdapat pengungkapan segmen operasi pada Laporan Keuangan	Nihil
7	Terdapat ketidaksesuaian antara Buku Laporan Tahunan dengan Laporan Tahunan Digital	Nihil





KB Bank



Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

KB Bank senantiasa berkomitmen dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dengan pendekatan yang terstruktur, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Komitmen ini selaras dengan misi perusahaan dalam memberikan manfaat optimal bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, serta masyarakat luas, dengan tetap mengedepankan kepedulian terhadap lingkungan. KB Bank juga mendukung resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang pada 21 Oktober 2015 yang telah menetapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) sebagai agenda global.

Secara fundamental, komitmen dan implementasi TJSL Bank mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dan Tanggung Jawab Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Responsibility*). Kepatuhan terhadap regulasi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menjadi indikator utama dalam mengukur efektivitas program TJSL.

Dalam pelaksanaannya, program TJSL KB Bank juga merupakan wujud dukungan terhadap berbagai inisiatif strategis, antara lain:
1. Pemerintah Indonesia yang telah menandatangani Paris *Agreement*, yakni perjanjian dalam Konvensi Kerangka Kerja;
2. Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa atau *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), mengenai mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK), adaptasi dan keuangan. Melalui *Paris Agreement*, Indonesia berkomitmen untuk mendukung pengurangan laju perubahan iklim dan mencegah pemanasan global. Implementasi ini harus dilakukan bersama-sama di seluruh dunia dengan memastikan pelaksanaan pembangunan yang rendah emisi gas rumah kaca (GRK) dan memberikan pembiayaan yang berwawasan lingkungan, sosial dan tata kelola (LST);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Surat Edaran OJK terkait literasi dan edukasi serta inklusi keuangan bagi masyarakat;
4. Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diresmikan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 18 November 2016;
5. Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 mengenai implementasi Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Komitmen untuk menjalankan kegiatan TJSL yang mendukung implementasi keuangan berkelanjutan.

KB Bank memahami bahwa institusi keuangan memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk memperluas akses terhadap layanan keuangan guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sosial, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, Bank berkomitmen untuk terus menjalankan program TJSL secara konsisten, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan bisnis dan kontribusi sosial demi menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

KB Bank telah menetapkan *Sustainability Banking Principles* sebagai pedoman utama dalam mengelola seluruh aktivitas Bank, yang mencakup aspek *customer,* business strategy, *banking operations, risk management, human capital*, dan *community development.*



PRINSIP DAN LANDASAN HUKUM TJSL DI PERUSAHAAN

Secara keseluruhan, implementasi program TJSL KB Bank berlandaskan pada regulasi dan ketentuan hukum yang berlaku, di antaranya:

1. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 1 ayat 3;
2. Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal;
3. Undang-Undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Sosial RI No. 9 tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha.
6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik.



STRUKTUR ORGANISASI TJSL PERUSAHAAN

Pelaksanaan program TJSL dikoordinasikan oleh Unit Kerja Komunikasi, dengan tanggung jawab utama berada di Departemen Sekretaris Perusahaan di bawah pengawasan langsung Direktur Utama. Dalam implementasinya, kegiatan TJSL kerap dijalankan melalui kolaborasi dengan berbagai departemen, kantor cabang, KB Kookmin Bank, KB Financial Group, perusahaan anak, Baitul Maal KB Bank, KB Bank Club, Yayasan Kesejahteraan Karyawan KB Bank, Koperasi Karyawan KB Bank, Dewan Kemakmuran Masjid, serta institusi lainnya.

Per 31 Desember 2024, Struktur Organisasi TJSL KB Bank adalah sebagai berikut:

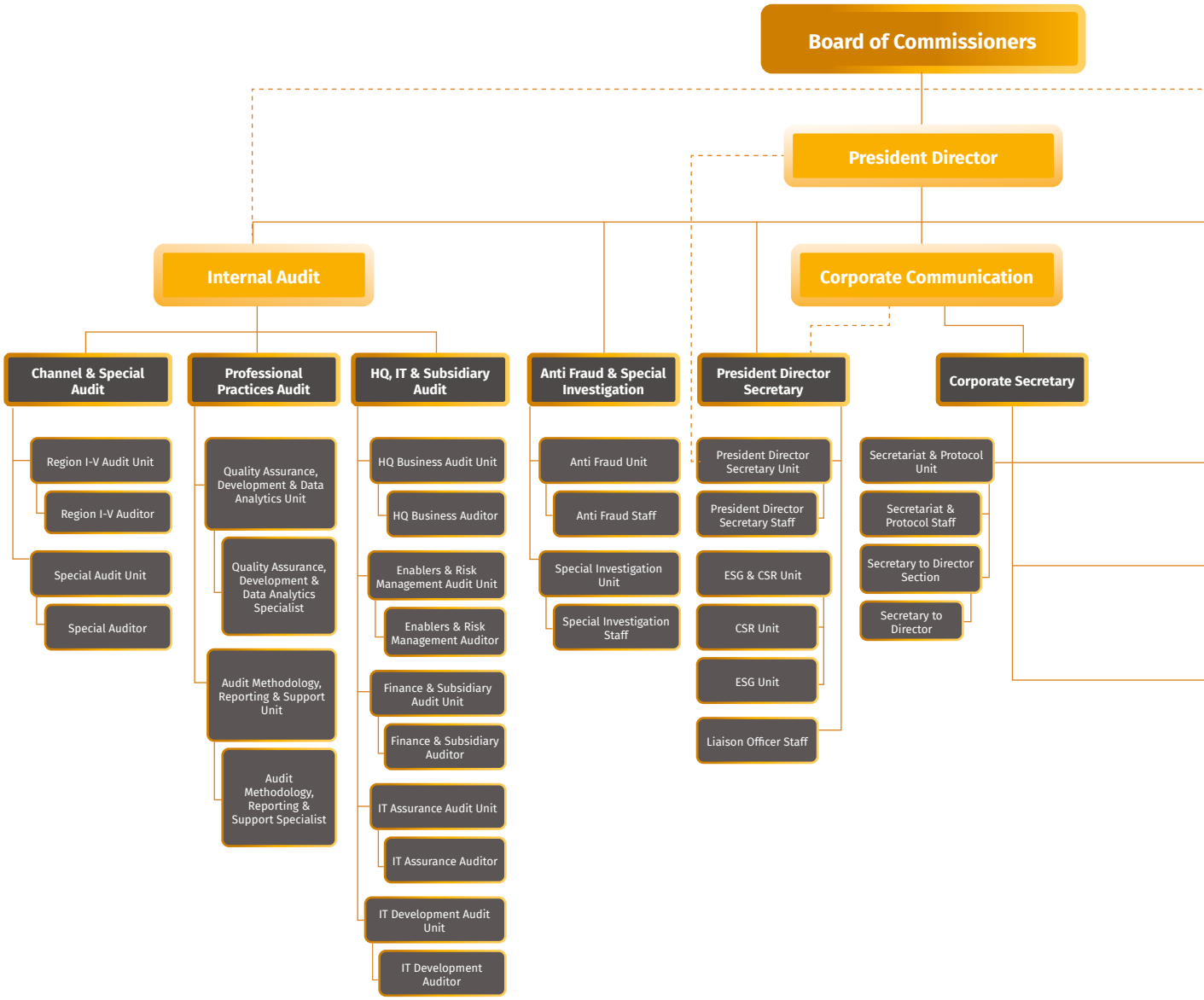

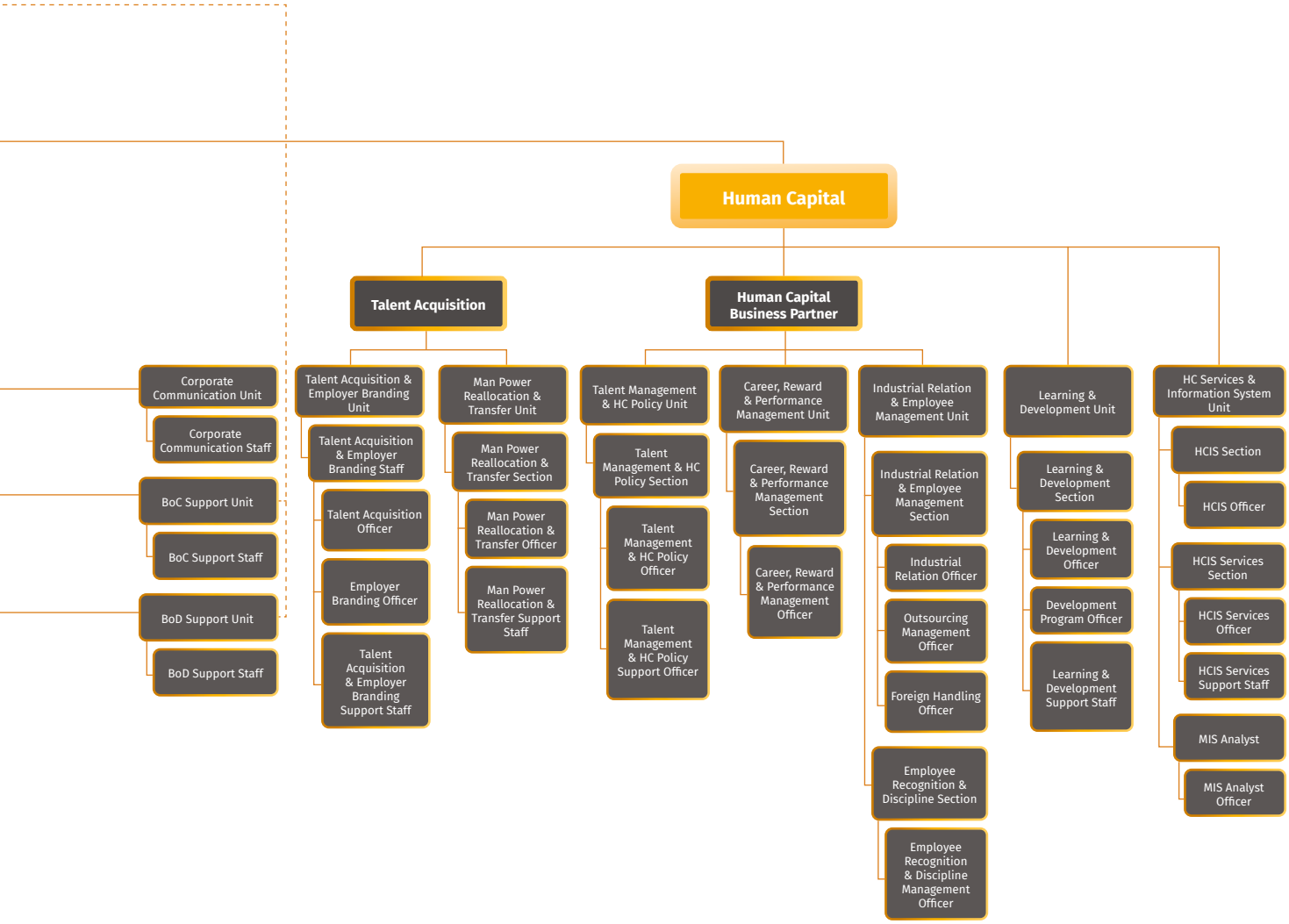
Human Capital
Talent Acquisition
Human Capital Business Partner
Corporate Communication Unit
Corporate Communication Staff
BoC Support Unit
BoC Support Staff
BoD Support Unit
BoD Support Staff
Talent Acquisition & Employer Branding Unit
Talent Acquisition & Employer Branding Staff
Talent Acquisition Officer
Employer Branding Officer
Talent Acquisition & Employer Branding Support Staff
Man Power Reallocation & Transfer Unit
Man Power Reallocation & Transfer Section
Man Power Reallocation & Transfer Officer
Man Power Reallocation & Transfer Support Staff
Talent Management & HC Policy Unit
Talent Management & HC Policy Section
Talent Management & HC Policy Officer
Talent Management & HC Policy Support Officer
Career, Reward & Performance Management Unit
Career, Reward & Performance Management Section
Career, Reward & Performance Management Officer
Industrial Relation & Employee Management Unit
Industrial Relation & Employee Management Section
Industrial Relation Officer
Outsourcing Management Officer
Foreign Handling Officer
Employee Recognition & Discipline Section
Employee Recognition & Discipline Management Officer
Learning & Development Unit
Learning & Development Section
Learning & Development Officer
Development Program Officer
Learning & Development Support Staff
HC Services & Information System Unit
HCIS Section
HCIS Officer
HCIS Services Section
HCIS Services Officer
HCIS Services Support Staff
MIS Analyst
MIS Analyst Officer

VISI DAN MISI TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Di sisi lain, KB Bank telah menyusun *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap I sebagai bagian dari upaya mendukung program TJSL Bank. *Roadmap* ini telah melahirkan berbagai inisiatif yang berperan sebagai dasar dalam mendorong perubahan pola pikir para pelaku usaha. Sebagai langkah awal, mengacu pada panduan dari OJK, telah diperkenalkan delapan prinsip Keuangan Berkelanjutan yang menjadi pedoman bagi lembaga jasa keuangan dalam menerapkan Rencana Keuangan Berkelanjutan, yaitu:



Mengacu pada *guideline* tersebut, Bank telah merumuskan empat pilar utama dalam Rencana Keuangan Berkelanjutan dengan tujuan sebagai berikut:

1. KB Bank Untuk Negeri bertujuan untuk mendukung penyaluran kredit program pemerintah, inklusi keuangan, dan peningkatan kualitas SDM anak-anak Indonesia.
2. KB Bank *Care* bertujuan untuk meningkatkan kepedulian insan KB Bank terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam dalam setiap langkah kegiatan bisnis dan operasional Bank.
3. KB Bank Dari Kita Untuk Kita bertujuan untuk mendukung pengembangan SDM internal KB Bank yang berkualitas dan berdaya saing.
4. KB Bank Satu bertujuan untuk meningkatkan penyesuaian organisasi dengan mempertimbangkan aspek berkelanjutan terkait sosial dan lingkungan hidup.

Untuk mendukung implementasi *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan selanjutnya, Bank tetap berpegang pada pilar utama yang telah ditetapkan dengan menyesuaikan berbagai inisiatif pendukung. *Roadmap* Keuangan Berkelanjutan Tahap II berfokus pada pembentukan ekosistem keuangan berkelanjutan yang lebih menyeluruh, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, serta mendorong penguatan kerja sama dengan pihak eksternal.

Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) diharapkan dapat menjadi pedoman bagi sektor jasa keuangan serta referensi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) terkait dalam mengembangkan skema pembiayaan inovatif. Berdasarkan *Sustainable Finance Roadmap Phase* II (2021-2025), berikut adalah prioritas utama dalam pengembangannya:

1. Pengembangan taksonomi hijau yang bertujuan mengklasifikasikan aktivitas pembiayaan dan investasi berkelanjutan di Indonesia 16 (enam belas) klasifikasi ini menjadi dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di Indonesia dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
2. Implementasi aspek LST (Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola) ke dalam manajemen risiko dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan *key performance indicators* serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
3. Pengembangan program riil dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui

kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.

4. Inovasi produk dan layanan keuangan berkelanjutan dalam rangka mempercepat industri keuangan bertransisi ke arah berkelanjutan dilakukan dengan mengembangkan skema inovatif pembiayaan/pendanaan proyek berkelanjutan. Aspek yang perlu dipertimbangkan dalam skema inovatif meliputi keterbukaan informasi, inklusivitas, dukungan ahli, bertujuan jangka panjang, dan kredibel.
5. Kampanye nasional keuangan berkelanjutan yang bertujuan membangun pemahaman terhadap pentingnya kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Upaya ini dilakukan melalui pembentukan strategi komunikasi serta berbagai kegiatan edukasi dan sosialisasi.



REALISASI DANA DAN KEGIATAN TJSL TAHUN 2024

Pelaksanaan program TJSL/CSR (*Corporate Social Responsbility*) di KB Bank dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan, mencakup tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Adapun setiap program dirancang berdasarkan pemetaan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan operasional dan bisnis Bank. Analisis ini menjadi dasar dalam menyusun rencana dengan tetap mempertimbangkan kapasitas dan keberlanjutan Bank.

Sebagai wujud komitmen terhadap TJSL, pada tahun 2024 Bank mengalokasikan anggaran sebesar Rp900.000.000,untuk mendukung berbagai inisiatif TJSL. Dana tersebut difokuskan pada empat bidang utama, yaitu pendidikan, pemberdayaan masyarakat, sosial , dan keagamaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Bank juga menganggarkan dana sebesar 3,5% dari Biaya Ketenagakerjaan (BTK), Bank telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp30.216.501.131 untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang lebih berkualitas dan berdaya saing. Anggaran ini terbagi ke dalam beberapa kategori, yakni *Mandatory Training, Non-Mandatory Training*, dan anggaran operasional pelatihan.

Pada kategori *Mandatory Training*, anggaran dialokasikan untuk *Certification Competencies* sebesar Rp4.233.416.269 dan *Core Competencies* sebesar Rp228.553.778, dengan total mencapai Rp4.461.970.047. Sementara itu, pada *Non-Mandatory Training*, alokasi terbesar diberikan untuk *Technical Competencies* sebesar Rp24.141.681.796, diikuti oleh *Soft Competencies* sebesar Rp180.003.770 dan *Managerial Competencies* sebesar Rp31.474.895, dengan total keseluruhan Rp24.353.160.461. Selain itu, Bank juga menganggarkan Rp1.411.370.623 untuk operasional pelatihan. Dengan alokasi ini, Bank berkomitmen untuk meningkatkan kompetensi SDM melalui berbagai program pelatihan yang mencakup keterampilan teknis, manajerial, dan sertifikasi guna menciptakan tenaga kerja yang kompetitif dan profesional, tetapi juga berkontribusi secara nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.

Secara lebih terperinci, berikut adalah alokasi dana yang telah dianggarkan oleh KB Bank untuk mendukung pelaksanaan program TJSL di sepanjang tahun 2024.

No.	Ruang Lingkup	Nominal
1	Pendidikan	Rp130.000.000
2	Pemberdayaan Masyarakat	Rp50.000.000
3	Sosial	Rp 94.786.700
4	Keagamaan	Rp432.000.000

Selaras dengan visi keberlanjutan yang dicanangkan oleh pemerintah, program TJSL KB Bank pada tahun 2024 diarahkan untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi tersebut. Pelaksanaan program tetap mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional serta kondisi internal perusahaan agar implementasinya berjalan efektif dan berkelanjutan.

Dalam upaya memberikan dampak positif yang lebih luas, KB Bank menghadirkan berbagai inisiatif unggulan dalam program TJSL sepanjang tahun 2024. Program-program ini dirancang untuk menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang relevan dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat peran Bank dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun beberapa program utama yang menjadi fokus di tahun 2024 meliputi:

No.	Jenis Kegiatan TJSL/CSR	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Capaian
1	Penyaluran Dukungan Kegiatan Ramadan (Buka Bersama) melalui masjid Ar Ridho & Al Ikhlas.	TPB No.2 – Tanpa Kelaparan	Alokasi Dana Rp147.000.000 Periode pelaksanaan: 13 Maret – 05 April 2024	Penyaluran Takjil & makan malam bagi warga dan pengendara yang melintasi area masjid Ar Ridho & Al Ikhlas
2	Penyaluran Hewan Qurban kepada warga yang berhak menerima di sekitar Cikoko, Tebet, S.Parman, yayasan Darus Saadah Sentul dan proposal yang diajukan.	TPB No.2 – Tanpa Kelaparan	Alokasi Dana Rp275.000.000 Periode pelaksanaan: 17 Juni 2024	Jumlah hewan qurban yang disalurkan 10 ekor

No.	Jenis Kegiatan TJSL/CSR	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penjelasan	Capaian
3	Dukungan Kegiatan Bakti Sosial "Donor Darah dan Sunatan Massal"yang dilakukan oleh Alumni SMP XIII Jakarta.	TPB No. 3- Kehidupan sehat dan Sejahtera.	Alokasi Dana Rp20.000.000 Periode Pelaksanaan: 22 Juni 2024	Tujuan Bakti Sosial ini berfokus pada memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia
4	Kegiatan CSR "Bersama KB Bank Indonesia Berbagi Kebaikan".	TPB No. 2 – Tanpa Kelaparan	Alokasi Dana Rp7.000.000 Periode Pelaksanaan: 12 Oktober 2024	Program ini bertujuan membantu program pemerintah untuk menekan angka stunting di Indonesia sekaligus memperkuat budaya peduli di lingkungan karyawan KB Bank dan afiliasi KBFG di Indonesia.. Kegiatan dilakukan di daerah marginal di Rawa Indah, Jakarta Utara.
5	Dukungan Beasiswa pendidikan kepada Ji Da Bin, atlet muda sepak bola berbakat berdarah Indonesia-Korea Selatan.	TPB No. 4 – Pendidikan Berkualitas	Alokasi Dana Rp100.000.000,- Periode Pelaksanaan: 18 Oktober 2024	Merepresentasikan nilai-nilai inovasi, kerja keras, dan inklusivitas yang selaras dengan komitmen KB Bank untuk menginspirasi generasi muda Indonesia.

PERNYATAAN TERKAIT KEGIATAN TJSL DIUNGKAPKAN PADA LAPORAN KEBERLANJUTAN

Informasi mengenai program TJSL KB Bank di tahun 2024, secara komprehensif telah diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan Bank Tahun Buku 2024 yang disajikan secara terpisah. Namun, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Tahunan ini sebagaimana arahan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021.

Adapun isi Laporan Keberlanjutan KB Bank Tahun Buku 2024, mencakup poin-poin sebagaimana arahan SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, yakni sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup);
3. Profil Singkat Perusahaan;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerja Keberlanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup);
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik (*feedback*) untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Perusahaan terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

Program TJSL Bank dirancang agar selaras dengan visi dan misi Bank sebagaimana tertuang dalam RAKB, serta dijalankan secara strategis, sistematis, dan berkelanjutan. Selain berkontribusi dalam memperkuat citra KB Bank, program ini juga bertujuan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan, guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.





KB Bank



Laporan Keuangan

PT Bank KB Bukopin Tbk
Dan Entitas Anak/*And Subsidiaries*

Laporan Keuangan Konsolidasian/
Consolidated Financial Statements
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023/
For theYears Ended as at
December 31, 2024 and 2023

PT BANK KB BUKOPIN TBK DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARIES*
DAFTAR ISI/*TABLE OF CONTENTS*

	Halaman/ *Page*
Laporan Auditor Independen/*Independent Auditors' Report*	
Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan Entitas Anak untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/ *The Directors' Statement on the Responsibility for Consolidated Financial Statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and Subsidiaries for the Years Ended December 31, 2024 and 2023*	
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN - Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 2023/ ***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS -*** *For the Years Ended December 31, 2024 and 2023*	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian/*Consolidated Statements of Financial Position*……	1-2
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian/*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income*……..	3-4
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Changes in Equity*……	5-6
Laporan Arus Kas Konsolidasian/*Consolidated Statements of Cash Flows*……	7-8
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian/*Notes to Consolidated Financial Statements*……..	9-224
Informasi Tambahan/*Additional Information*……..	225-233
	Lampiran/ *Attachment*
Laporan Posisi Keuangan Entitas Induk/*Statements of Financial Position of Parent Entity*…….	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Induk/*Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income of Parent Entity*……..	2
Laporan Perubahaan Ekuitas Entitas Induk/*Statements of Changes in Equity of Parent Entity*……..	3
Laporan Arus Kas Entitas Induk/*Statements of Cash Flows of Parent Entity*……	4
Pengungkapan Lainnya/*Other Disclosures*……	5

MIRAWATI SENSI IDRIS

Registered Public Accountants
Branch Business License No. 327/KM.1/2023

Branch Office:
EightyEight@Kasablanka Office, 20th Floor Unit A
Jl. Casablanca, Kav. 88, Menteng Dalam, Tebet
Jakarta Selatan - 12870
INDONESIA

T +62-21-2283 6086
F +62-21-2283 6096

MOORE

Laporan Auditor Independen

No. 00052/3.0478/AU.1/07/1671-4/1/III/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi
PT Bank KB Bukopin Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal-hal Audit Utama

Hal-hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditors' Report

No. 00052/3.0478/AU.1/07/1671-4/1/III/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors
PT Bank KB Bukopin Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

Hal-hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

Penilaian atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai untuk Kredit yang Diberikan

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengklasifikasikan kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan menjadi 3 tahap/*stage* sesuai dengan peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awalnya. Salah satu input yang relevan dalam penentuan stage adalah kualitas kredit yang ditentukan dengan mempertimbangkan faktor kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tentang penilaian kualitas aset.

Untuk kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai *Stage* 1, *Stage* 2 dan *Stage* 3 yang tidak dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE") menggunakan pendekatan kolektif dengan model parameter risiko yang menggunakan beberapa parameter utama, antara lain *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD"), *Exposure at Default* ("EAD"), dan tingkat diskonto setelah memperhitungkan informasi perkiraan masa depan, termasuk faktor makroekonomi.

Untuk kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan diklasifikasikan sebagai Stage 3 yang dianggap signifikan secara individual, manajemen menghitung KKE dengan mengestimasi arus kas ekspektasian dari kredit yang diberikan.

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 9 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengakui cadangan kerugian penurunan nilai menggunakan metode KKE untuk kredit yang diberikan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.992.197 juta.

Cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang diberikan dianggap penting karena memerlukan penerapan pertimbangan kritikal manajemen dan penggunaan estimasi subjektif dalam menentukan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai yang harus diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Pertimbangan dan estimasi ini diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian.

Untuk merespon hal audit utama ini, kami melakukan prosedur-prosedur berikut:

- Kami menguji desain dan efektivitas pengoperasian pengendalian utama di seluruh proses siklus kredit yang diberikan, dibantu oleh spesialis teknologi informasi kami, dan menilai metodologi pengukuran penurunan nilai, validasi model penyisihan kerugian penurunan nilai, input, dasar dan asumsi yang digunakan oleh Grup dalam menghitung penyisihan kerugian penurunan nilai.

The key audit matters identified in our audit is outlined as follows:

Assessment of the Allowances for Impairment Losses for Loans

As discussed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group classifies loans measured at amortized cost into 3 stages in accordance with its significant increase in credit risk since their initial recognition. One of the relevant inputs for determining the stages is the credit rating which is defined by considering qualitative and quantitative factors based on Financial Services Authority ("FSA") regulation on determining asset quality.

For loans measured at amortized cost and classified as Stage 1, Stage 2 and Stage 3 which are not considered individually significant, management calculates Expected Credit Loss ("ECL") using collective approach with the risk parameter modelling that incorporates a number of key parameters, including the Probability of Default ("PD"), Loss Given Default ("LGD"), Exposure at Default ("EAD"), and discount rate after taking into consideration forward-looking information, including macroeconomic factors.

For loans measured at amortized cost and classified as Stage 3 which are considered individually significant, management assesses ECL by estimating the expected future cash flow from the loans.

As discussed in Note 9 to the consolidated financial statements, the Group recognized an allowance for impairment losses using ECL impairment model for loans as at December 31, 2024 amounting to Rp2,992,197 million.

The allowance for impairment losses for loans is considered as a matter of significance as it requires the application of critical management judgment and use of subjective estimates in determining how much allowance for impairment loss is required to be recognized in the consolidated financial statements. These judgments and estimates are disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

To address this key audit matter, we performed the following procedures:

- We tested the design and operating effectiveness of key controls across the loan cycle processes, as assisted by our information technology specialist, and assessed the impairment measurement methodologies, validation of allowance for impairment losses models, inputs, basis and assumptions used by the Group in calculating the allowance for impairment losses.

- Kami menilai estimasi arus kas masa depan pada sampel pinjaman yang dinilai secara individual dengan membandingkan asumsi yang dibuat dengan informasi yang diperoleh dari sumber internal dan eksternal dan menilai keandalan informasi yang digunakan dalam estimasi, berdasarkan informasi pasar yang tersedia atau penilaian yang disiapkan oleh penilai independen.
- Kami melibatkan profesional di bidang risiko kredit dan teknologi informasi dengan keterampilan khusus, pengetahuan industri, dan pengalaman relevan yang membantu dalam mengevaluasi metodologi dan penilaian utama yang digunakan dalam menentukan parameter PD dan LGD, mengevaluasi bagaimana faktor-faktor forward-looking digabungkan dalam model ECL kolektif dan menghitung ulang penilaian penurunan nilai secara kolektif berdasarkan sampel.
- Kami melakukan prosedur loan review, berdasarkan sampel minimal 70% dari total pinjaman dan menyertakan setidaknya 25 debitur terbesar dalam portofolio, untuk mengevaluasi apakah kualitas kredit telah dinilai dengan baik oleh Grup.

- We assessed the estimates of future cash flows on a sample of individually assessed loans by comparing assumptions made with information obtained from internal and external sources and assessing the reliability of information used in the estimates, based on available market information or valuation prepared by independent valuer.
- We involved credit risk and information technology professionals with specialized skills, industry knowledge and relevant experience who assisted in evaluating the methodology and key judgments used in determining the PD and LGD parameters, evaluating how forward-looking factors was incorporated in the collective ECL model and recalculating the collective impairment assessment on a sample basis.
- We performed loan review procedures, on a sample basis of minimum 70% of the total loans and include at least the top 25 of the biggest debtors in the portfolio, to evaluate whether the credit rating has been properly assessed by the Group.

Pengukuran Nilai Wajar Instrumen Keuangan Level 2

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 2 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian dimana nilai diperoleh dari harga yang dapat diobservasi (atau input untuk model penilaian) selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam level 1. Oleh karena itu, penilaian atas instrumen keuangan level 2 memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi. Nilai wajar atas instrumen keuangan ini diukur dengan model penilaian yang dikembangkan secara internal.

Untuk mengukur nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut, Grup menggunakan model arus kas yang didiskontokan. Model ini menggunakan berbagai masukan dan asumsi, bergantung pada sifat instrumen keuangan.

Seperti yang telah disebutkan di Catatan 46 atas laporan keuangan konsolidasian, nilai wajar instrumen tersebut pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp7.192.497 juta.

Penilaian wajar instrumen keuangan Grup dianggap sebagai hal audit utama karena penggunaan masukan dari sumber eksternal dalam menghitung nilai pasar dari instrumen keuangan tersebut.

Untuk merespon hal audit utama ini, kami melakukan prosedur-prosedur berikut:

- Kami menguji desain dan efektivitas pengoperasian pengendalian utama di seluruh proses penilaian instrumen keuangan Grup yang diukur pada nilai wajar.
- Kami mengevaluasi apakah harga nilai wajar sudah sesuai dengan menilai teknik penilaian dan masukan signifikan yang tidak dapat diobservasi secara langsung di pasar aktif, yang digunakan dalam penilaian instrumen.
- Kami mereviu formula yang digunakan dalam penilaian nilai wajar.

Measurement of Level 2 Financial Instruments

As discussed in Note 2 to the consolidated financial statements, the Group classifies financial instrument measured at fair value using valuation techniques where values are derived from observable prices (or inputs to valuation models) other than quoted prices included within Level 1. The valuation of the Level 2 financial instruments therefore requires a higher degree of judgment. The fair value of this financial instrument is measured by the internally developed valuation models.

In order to measure the fair value of these financial instruments, the Group uses discounted cash flow model. This model use various inputs and assumptions, depending on the nature of the financial instrument.

As discussed in Note 46 to the consolidated financial statements, the fair value of such instrument as at December 31, 2024 amounted to Rp7,192,497 million.

The fair valuation of financial instruments of the Group is considered a key audit matter due to the use of inputs from external sources in computing the market values of these financial instruments.

To address this key audit matter, we performed the following procedures:

- We tested the design and operating effectiveness of key controls across the valuation process of the Group's financial instruments measured at fair value.
- We evaluated whether the fair value prices were appropriate by assessing the valuation technique and significant unobservable inputs which are not directly observable in the market, that are used on the valuation of the instrument.
- We reviewed the formula used in the fair value valuation.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan pada tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi diatas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the Annual Report as at December 31, 2024 and for the year then ended, but does not include the consolidated financial statements and our auditors' report thereon. The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this auditors' report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

Auditors' Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal-hal audit utama. Kami menguraikan hal-hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menemukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditors' report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

MIRAWATI SENSI IDRIS

00052

Denny Susanto
Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1671/
Public Accountant Registration No. AP. 1671

12 Maret 2025/*March 12, 2025*

KB Bank
PT. Bank KB Bukopin, Tbk.
KB Bank Head Office, Jl. MT. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan - Indonesia 12770
P. (+62)21 7988266, 7989837 F. (+62)21 7980625, 7986244
www.kbbank.co.id

SURAT PERNYATAAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT PT BANK KB BUKOPIN TBK DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1	Nama	:	Woo Yeul Lee
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan - 12770
	Alamat rumah	:	Apartement – The Capital Residence Tower 2 / Unit 2AB, Sudirman Central Business District, Lot 24., Jl. Jend. Sudirman KAV 52-53, Jakarta Selatan
	Nomor telepon	:	021 – 7989837
	Jabatan	:	Direktur Utama
2	Nama	:	Jang Hyuk Im
	Alamat Kantor	:	Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan - 12770
	Alamat domisili	:	Ashta Residence District 8 Sudirman Central Business District, No 12EF, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
	Nomor telepon	:	021 – 7988266
	Jabatan	:	Direktur

menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak telah diungkapkan secara lengkap dan benar;
   b. Laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT Bank KB Bukopin Tbk dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS AT DECEMBER 31, 2024 AND FOR THE YEAR THEN ENDED PT BANK KB BUKOPIN TBK AND ITS SUBSIDIARIES

We, the undersigned:

1	*Name*	:	*Woo Yeul Lee*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan - 12770*
	Domicile Address	:	*Apartement – The Capital Residence Tower 2 / Unit 2AB Sudirman Central Business District, Lot 24., Jl. Jend. Sudirman KAV 52-53, Jakarta Selatan*
	Phone Number	:	*021 – 7989837*
	Title	:	*Direktur Utama*
2	*Name*	:	*Jang Hyuk Im*
	Office Address	:	*Jalan MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Selatan - 12770*
	Domicile Address	:	*Ashta Residence District 8 Sudirman Central Business District, No 12EF, Jl. Jend Sudirman Kav 52-53 Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan*
	Phone Number	:	*021 - 7988266*
	Title	:	*Director*

declare that:

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries;*
2. *The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *a. All information in the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner;*
   b. The consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit any information or material facts;
4. *We are responsible for PT Bank KB Bukopin Tbk and its subsidiaries internal control systems.*

This statement has been made truthfully

Atas nama dan mewakili Direksi/*For and on behalf of the Board of Directors*

Jakarta, 12 Maret 2025/*March 12, 2025*



Woo Yeul Lee
Direktur Utama/
President Director

Jang Hyuk Im
Direktur/
Director

PT BANK KB BUKOPIN TBK
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Financial Position
As at December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ASET				**ASSETS**
Kas	369.083	3,46,51	289.184	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	4,46,51	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain:		5,46,38		Current accounts with other banks:
Pihak berelasi	10.585		6.377	Related party
Pihak ketiga	386.552		336.504	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)		(300)	Less: Allowance for impairment losses
Giro pada bank lain - neto	396.837		342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:		6,46,51		Placements with Bank Indonesia and other banks:
Pihak ketiga	2.798.303		2.133.567	Third parties
Surat-surat berharga:		7,46,51		Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.467.153		5.322.930	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.345.452		3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.954.506		9.145.932	Measured at amortized cost
	21.767.111		17.536.249	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(280)		(109)	Less: Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga - neto	21.766.831		17.536.140	Marketable securities - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	8,46,51	2.572.152	Marketable securities purchased with agreements to resell - net
Tagihan derivatif	12.054	11,46,51	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah:		9,40,46,51		Loans and sharia financing/receivables:
Pihak berelasi	339.983	38	641.005	Related parties
Pihak ketiga	47.187.503		48.777.611	Third parties
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)		(3.582.834)	Less: Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	44.535.289		45.835.782	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi	84.279	10,40,46	132.577	Acceptance receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)		(1.613)	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan akseptasi - neto	83.079		130.964	Acceptance receivables - net
Penyertaan saham	15	12,46	15	Investments in shares
Aset tetap dan aset hak guna	4.776.998	13	4.646.734	Fixed assets and right of use assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.456.694)		(1.413.059)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap dan aset hak guna - neto	3.320.304		3.233.675	Fixed assets and right of use assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	1.258.561	21	2.670.543	Deferred tax assets - net
Aset takberwujud	636.119	14	635.815	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(365.312)		(350.230)	Less: Accumulated amortization and impairment losses
Aset tak berwujud - neto	270.807		285.585	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	5.591.657	15,46,51	6.068.453	Other assets - net
TOTAL ASET	**83.075.298**		**84.307.300**	**TOTAL ASSETS**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS				**LIABILITIES**
Liabilitas segera	401.263	16,46,51	431.402	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah:		17,18,19,46,51		Deposits from customers:
Giro:		17		Demand deposits:
Pihak berelasi	3.203	38	9.094	Related parties
Pihak ketiga	6.286.045		3.168.554	Third parties
Tabungan :		18		Saving deposits:
Pihak berelasi	45.260	38	18.491	Related parties
Pihak ketiga	6.870.242		6.854.693	Third parties
Deposito berjangka:		19		Time deposits:
Pihak berelasi	42.412	38	40.311	Related parties
Pihak ketiga	33.345.996		34.698.000	Third parties
Simpanan dari bank lain:		20,46		Deposits from other banks:
Pihak berelasi	2.710.649	38	7.699.413	Related parties
Pihak ketiga	170.537		187.308	Third parties
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.739.878	22,46	219.631	Marketable securities sold with agreements to repurchase - net
Liabilitas derivatif	3.641	11,51,46	808	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	84.279	10,46,51	132.577	Acceptance payables
Pinjaman yang diterima:		23,46,51		Borrowings:
Pihak berelasi	6.557.175	38	6.544.886	Related parties
Pihak ketiga	7.363.469		5.159.606	Third parties
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	24,46	3.397.588	Marketable securities issued
Utang pajak	60.903	21a	64.635	Tax payables
Liabilitas lain-lain	1.638.402	26,51	1.570.140	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**75.113.512**		**70.197.137**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				**EQUITY ATTRIBUTABLE TO HOLDERS OF THE PARENT ENTITY**
Modal saham				Share capital
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)				Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)				Common B shares - Rp100 (full amount) par value
Modal dasar				Authorized capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 207.866.202.200				Common B shares - 207,866,202,200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh				Issued and fully paid capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham				Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 187.866.201.892 saham per 31 Desember 2024 dan 2023	19.000.000	27a	19.000.000	Common B shares - 187,866,201,892 shares as at December 31, 2024 and 2023
Tambahan modal disetor	8.225.767	27b	8.225.767	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset	1.816.965	13	1.603.893	Asset revaluation surplus
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan	(14.149)		7.563	Unrealized gain (loss) on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Akumulasi defisit	(21.041.182)		(14.700.914)	Accumulated deficit
	7.987.401		14.136.309	
Kepentingan non-pengendali	(25.615)	28	(26.146)	Non-controlling interest
TOTAL EKUITAS	**7.961.786**		**14.110.163**	**TOTAL EQUITY**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**83.075.298**		**84.307.300**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the Years Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL				**INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS**
Pendapatan bunga dan syariah		29		Interest and sharia income
Pendapatan bunga	4.931.273		4.374.694	Interest income
Pendapatan syariah	522.826		486.942	Sharia income
Total pendapatan bunga dan syariah	5.454.099		4.861.636	Total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah		30		Interest expense and sharia charges
Beban bunga	(3.965.208)		(3.746.710)	Interest expense
Beban syariah	(336.166)		(306.044)	Sharia charges
Total beban bunga dan syariah	(4.301.374)		(4.052.754)	Total interest expense and sharia charges
Pendapatan bunga dan syariah - neto	1.152.725		808.882	Interest and sharia income - net
Pendapatan operasional lainnya				Other operating income
Provisi dan komisi lainnya	229.948	31	333.732	Other fees and commissions
Keuntungan selisih kurs - neto	40.476		29.265	Gain on foreign exchange - net
Keuntungan (kerugian) atas penjualan surat-surat berharga - neto	1.586		(8.899)	Gain (loss) on sale of marketable securities - net
Lain-lain	78.036		102.429	Others
Total pendapatan operasional lainnya	350.046		456.527	Total other operating income
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan - neto	(3.452.900)	32	(5.537.792)	Provision of allowance for impairment losses on financial assets - net
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	6.180		5.235	Gain from foreign exchange transactions - net
Penyisihan estimasi keuntungan atas komitmen dan kontinjensi - neto	5.385	25	1.999	Provision for gain on commitments and contingencies - net
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(798.341)		(269.055)	Provision of allowance for impairment losses on non-financial assets - net
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23.246)		155.384	Gain (loss) from changes in fair value of financial assets
Beban operasional lainnya:				Other operating expenses:
Umum dan administrasi	(1.119.658)	33	(1.371.594)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(824.226)	34	(809.976)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(82.152)	30	(98.812)	Premium on government guarantee program
Total beban operasional lainnya	(2.026.036)		(2.280.382)	Total other operating expenses
RUGI OPERASIONAL	**(4.786.187)**		**(6.659.202)**	**LOSS FROM OPERATIONS**
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(118.033)**	35	**(128.185)**	**NON-OPERATING EXPENSE - NET**
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(4.904.220)**		**(6.787.387)**	**LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN				**TAX BENEFIT (EXPENSE)**
Kini	(3.159)	21b	-	Current
Tangguhan	(1.421.241)	21b	731.684	Deferred
(Beban) Manfaat pajak penghasilan - neto	(1.424.400)		731.684	(Expense) Income tax benefit - net
RUGI TAHUN BERJALAN	**(6.328.620)**		**(6.055.703)**	**LOSS FOR THE YEAR**
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN:				**OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS):**
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				Item that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(14.252)	37	8.640	Remeasurement of gain (loss) on defined benefit plans
Perubahan surplus (defisit) revaluasi aset	213.072	13	(1.756)	Revaluation surplus (deficit)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.135	21c	(1.900)	Income tax related to item that will not be reclassified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(27.836)		6.330	Changes in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.124	21c	(1.392)	Income tax related to item that will be reclassified to profit or loss
Penghasilan (Beban) komprehensif lain - neto	180.243		9.922	Other comprehensive income (loss) - net
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(6.148.377)		(6.045.781)	Total comprehensive loss for the year
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(6.329.138)		(6.034.077)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	518		(21.626)	Non-controlling interest
	(6.328.620)		(6.055.703)	
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive loss for the year attributable to:
Pemilik entitas induk	(6.148.908)		(6.024.463)	Equity holders of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	531	28	(21.318)	Non-controlling interest
	(6.148.377)		(6.045.781)	
RUGI PER SAHAM				**LOSS PER SHARE**
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(34)	48	(61)	Basic/diluted (full amount)

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
DAN ENTITAS ANAK
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian
Untuk Tahun yang Berakhir Untuk tanggal-tanggal pada 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
AND SUBSIDIARIES
Consolidated Statements of Changes In Equity
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023
(Figures are presented in million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains (loss) on and Fair Value through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Akumulasi defisit/ *Accumulated deficit*	Total	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2023		**7.000.000**	**8.286.428**	**3.000.000**	**1.605.649**	**2.625**	**(8.673.269)**	**11.221.433**	**(4.828)**	**11.216.605**	**Balance as at January 1, 2023**
Realisasi uang muka setoran modal	27	3.000.000	-	(3.000.000)	-	-	-	-	-	-	Realization of advance for future shares
Penerimaan dana PUT VII	27	9.000.000	(60.661)	-	-	-	-	8.939.339	-	8.939.339	Receipt of LPO VII funds
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	4.938	-	4.938	-	4.938	Unrealized income on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Penghentian revaluasi aset tetap	13	-	-	-	(1.756)	-	-	(1.756)	-	(1.756)	Derecognition of fixed asset revaluation
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	-	6.432	6.432	308	6.740	Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(6.034.077)	(6.034.077)	(21.626)	(6.055.703)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2023		**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.603.893**	**7.563**	**(14.700.914)**	**14.136.309**	**(26.146)**	**14.110.163**	**Balance as at December 31, 2023**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	Catatan/ *Notes*	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan (kerugian) yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains (loss) on and Fair Value through Other Comprehensive Income Marketable Securities Net - of Deferred Tax*	Akumulasi defisit/ *Accumulated deficit*	Total	Kepentingan Non-Pengendali/ *Non-Controlling Interest*	Total Ekuitas/ *Total Equity*	
Saldo per 1 Januari 2024		**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.603.893**	**7.563**	**(14.700.914)**	**14.136.309**	**(26.146)**	**14.110.163**	**Balance as at January 1, 2024**
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar diukur melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	(21.712)	-	(21.712)	-	(21.712)	Unrealized loss on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax
Revaluasi aset tetap	13	-	-	-	213.072	-	-	213.072	-	213.072	Fixed asset revaluation
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan		-	-	-	-	-	(11.130)	(11.130)	13	(11.117)	Remeasurement on defined benefit plans - net of deferred tax
Rugi tahun berjalan		-	-	-	-	-	(6.329.138)	(6.329.138)	518	(6.328.620)	Loss for the year
Saldo per 31 Desember 2024		**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.816.965**	**(14.149)**	**(21.041.182)**	**7.987.401**	**(25.615)**	**7.961.786**	**Balance as at December 31, 2024**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga	4.703.334		4.445.205	Receipts from interest
Penerimaan pendapatan syariah	522.826		486.942	Receipts from sharia income
Pembayaran bunga	(3.534.442)		(4.109.898)	Payment of interest
Pembayaran beban syariah	(336.166)		(306.044)	Payments of sharia charges
Pendapatan (beban) operasional lainnya	326.801		351.755	Other operating income (expense)
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	111.243	9p	177.584	Recoveries from written-off loans
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(821.006)		(937.763)	Payments of salaries and employee benefits
Beban operasional lainnya	(2.046.652)		(1.237.851)	Other operating expense
Beban (pendapatan) non operasional	(109.653)		(123.249)	Non - operating expenses (income)
Pembayaran pajak penghasilan badan	(3.159)		-	Payments of corporate income taxes
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(1.186.874)		(1.253.319)	Cash payments before changes in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:				Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:				Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	-		(17.000)	Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of more than 3 months from acquisition date
Surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	1.367.969		2.929.462	Marketable securities - at fair value through profit or loss
Surat-surat berharga - diukur pada biaya perolehan diamortisasi	187.066		495.880	Marketable securities - amortized cost
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	(2.263.650)		(3.134.725)	Loans and sharia financing/receivables
Tagihan akseptasi	(47.885)		113.829	Acceptances receivable
Aset lain-lain	(2.200.695)		(492.929)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:				Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(30.140)		42.880	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah:				Deposits from customers:
Giro	3.111.600		(400.279)	Current accounts
Tabungan	42.318		(82.600)	Savings deposits
Deposito berjangka	(1.349.903)		(6.690.348)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(5.005.535)		(2.494.654)	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(48.298)		115.231	Acceptances payable
Utang pajak	(3.732)		8.139	Tax payables
Liabilitas lain-lain	(17.729)		694.625	Other liabilities
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(7.445.488)		(10.165.808)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.422.243		260.000	Receipts from sale of marketable securities - fair value through other comprehensive income
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo	63.346.749		11.725.517	Receipts from matured marketable securities
Pembelian surat-surat berharga - diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi	(68.040.087)		(20.804.241)	Purchase of marketable securities - fair value through other comprehensive income and amortized cost

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

	2024	Catatan/ *Notes*	2023	
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo	27.260.447		57.780.679	Receipts from matured marketable securities purchased with agreements to resell
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(24.688.295)		(60.352.831)	Payments of marketable securities purchased with agreements to resell
Pembelian aset tetap	(51.661)	13	(60.766)	Purchase of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	27.759	13	7.200	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian piranti lunak	(304)	14	(150.766)	Purchase of software
Kas neto diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas investasi	276.851		(11.595.208)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	64.573.590		9.127.534	Receipts from marketable securities sold with agreements to repurchase
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali yang jatuh tempo	(61.385.463)		(8.907.903)	Payments of matured marketable securities sold with agreements to repurchase
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	6.406.032		1.246.416	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	(4.205.755)		(742.055)	Payment of borrowings
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VII	-	27	8.939.339	Receipt from Limited Public Offering VII
Penerimaan atas global obligasi senior	4.794.662		-	Receipts of global bonds issuance
Pembayaran atas penerbitan Surat berharga yang diterbitkan	(2.405.000)		-	Payment of marketable securities issued
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	7.778.066		9.663.331	Net cash provided by financing activities
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**609.429**		**(12.097.685)**	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(326.679)		492.085	Effects of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN/PERIODE	**5.953.951**		**17.559.551**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF THE YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**6.236.701**		**5.953.951**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF THE YEAR**
Kas dan setara kas terdiri dari:				Cash and cash equivalents consist of:
Kas	369.083	3	289.184	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	4	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	396.837	5	342.581	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	2.798.303	6	2.116.567	Placement with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date
Total	**6.236.701**		**5.953.951**	**Total**

Lihat Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the consolidated financial statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. Umum

a. Pendirian Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bank") didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin) yang disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Koperasi No. 13/Dirjen/Kop/70 dan didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 pada tanggal yang sama. Bank mulai melakukan usaha komersial sebagai Bank umum koperasi di Indonesia sejak tanggal 16 Maret 1971 dengan izin Menteri Keuangan dalam Surat Keputusan No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971.

Menurut Anggaran Dasar, usaha Bank mencakup segala kegiatan Bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan dengan tujuan utama memperhatikan dan melayani kepentingan gerakan koperasi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian yang berlaku. Dalam perkembangannya, Bank telah melakukan penggabungan usaha dengan beberapa Bank umum koperasi. Perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) menjadi Bank Bukopin disahkan dalam Rapat Anggota Bank Umum Koperasi Indonesia yang dituangkan dalam surat No. 03/RA/XII/89 tanggal 2 Januari 1990.

Dalam Rapat Khusus Anggota Bank, yang dinyatakan dengan akta notaris No. 4 tanggal 2 Desember 1992 dari Notaris Muhani Salim, S.H., para anggota menyetujui untuk mengubah status badan hukum Bank dari koperasi menjadi perseroan terbatas. Akta pendirian yang berkaitan dengan perubahan status badan hukum Bank dinyatakan dengan akta notaris No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dari Notaris Muhani Salim, S.H., beserta pembetulannya, dengan akta notaris No. 118 tanggal 28 Mei 1993 dari notaris yang sama.

Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3633 tambahan No. 64 tanggal 10 Agustus 1993. Perubahan ini juga telah disetujui oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993. Bank memulai kegiatan usaha dalam bentuk perseroan terbatas pada tanggal 1 Juli 1993.

1. General

a. Establishment of the Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk (the "Bank") was established in the Republic of Indonesia on July 10, 1970 as Bank Umum Koperasi Indonesia (abbreviated to Bukopin) based on Decision Letter No. 13/Dirjen/Kop/70 of the Directorate General for Cooperatives and was registered in the General List of the Directorate General for Cooperatives No. 8251 on the same date. The Bank started its commercial operations as a cooperative Bank in Indonesia on March 16, 1971 upon the approval of the Ministry of Finance in its Decision Letter No. Kep-078/DDK/II/3/1971 dated March 16, 1971.

According to its Articles of Association, the Bank's scope of activities includes all commercial Banking activities as defined in the Banking Law, with the main objective of providing services to cooperatives in Indonesia in accordance with the Law on Cooperatives. During its growth, the Bank merged with certain cooperative Banks. The change in the name from Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) to Bank Bukopin was approved during the Cooperative Members' Meeting of Bank Umum Koperasi Indonesia as stated in letter No. 03/RA/XII/89 dated January 2, 1990.

During the Special Meeting of the Members of Bank, the minutes of which were covered by notarial deed No. 4 dated December 2, 1992 of Notary Muhani Salim, S.H., the cooperative members agreed to change the Bank's legal entity from a cooperative to a limited liability company. The Bank's deed of establishment and the amendment relating to the change in legal entity were covered by notarial deed No. 126 dated February 25, 1993 of Notary Muhani Salim, S.H., and notarial deed No. 118 dated May 28, 1993 of the same notary, respectively.

These changes were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 dated June 29, 1993 and were published in Supplement No. 64 of State Gazette No. 3633 dated August 10, 1993. The changes were also approved by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. S-1382/MK.17/1993 dated August 28, 1993. The Bank started commercial operations as a limited liability company on July 1, 1993.

1. Umum (lanjutan)

a. Pendirian Bank (lanjutan)

Berdasarkan anggaran dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 28 Juni 2024 dengan No. 117 sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juli 2024 dengan No. AHU-AH.01.03-0171361 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank KB Bukopin Tbk, dan susunan terakhir Dewan Komisaris beserta Anggota Direksi. Akta Pernyataan Keputusan Rapat tertanggal 28 Juni 2024 dengan No. 116, sebagaimana telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI tertanggal 12 Juli 2024 dengan No. AHU-AH.01.09-0225584 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Bank KB Bukopin Tbk oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank KB Bukopin Tbk

Entitas induk sekaligus pemegang saham pengendali Bank adalah Kookmin Bank Co., Ltd.

Kantor pusat Bank beralamat di Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank memiliki kantor pusat operasi, kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor fungsional dan ATM sebagai berikut:

1. General (continued)

a. Establishment of the Bank (continued)

Based on the articles of association of PT Bank KB Bukopin Tbk, Deed of Statement of Meeting Resolution on the Amendments to the Articles of Association dated on June 28, 2024 No. 117 as received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated July 12, 2024 No. AHU-AH.01.03-0171361 Concerning: the Receipt of Notification of Amendments to the Articles of Association of PT Bank KB Bukopin Tbk, and the latest composition of the Board of Commissioners and Board of Directors. Deed of Statement of Meeting Resolutions dated June 28, 2024, No. 116, as received and recorded in the Legal Entity Administration System database of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on July 12, 2024, with No. AHU-AH.01.09-0225584 concerning: the Receipt of Notification of Corporate Data Changes of PT Bank KB Bukopin Tbk, are therefore valid and authorized to act for and on behalf of PT Bank KB Bukopin Tbk.

The parent entity as well as the controlling shareholder of the Bank is Kookmin Bank Co., Ltd.

The Bank's head office is located at Jalan M.T. Haryono Kav. 50-51, Jakarta 12770, Indonesia.

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has operations headquarter, branches, sub-branches, functional office and ATM's as follow:

2024	2023	
1	1	Kantor pusat operasi / Operations headquarter
29	29	Kantor cabang / Branches
141	143	Kantor cabang pembantu / Sub-branches
2	1	Kantor fungsional / Functional offices
30	11	ATM

b. Susunan Pengurus Bank

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, jumlah karyawan Bank, termasuk karyawan tidak tetap, masing-masing adalah sebesar 2.898 dan 2.618, (tidak diaudit).

Personil manajemen kunci mencakup Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat eksekutif yaitu pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada Direksi.

b. Composition of the Bank's Management

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has total employees, including non-permanent, of 2,898 and 2,618, respectively (unaudited).

Key management personnel consists of the Board of Commissioners, Directors, and key executives who have direct responsibility to the Directors.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31, 2024*	
Dewan Komisaris:		**Board of Commissioners:**
Komisaris Utama	Jerry Marmen	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Seng Hyup Shin*	Deputy President Commissioner
Komisaris	Nanang Supriyanto	Commissioner
Komisaris Independen	Stephen Liestyo	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Tippy Joesoef	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hae Wang Lee	Independent Commissioner
Direksi:		**Board of Directors:**
Direktur Utama	Woo Yeul Lee	President Director
Wakil Direktur Utama	Robby Mondong	Deputy President Director
Direktur Bisnis *Retail & Service*	Helmi Fahrudin	Retail Business & Services Director
Direktur Kepatuhan dan Risiko	Dodi Widjajanto	Compliance and Risk Director
Direktur Keuangan	Jang Hyuk Im	Finance Director
Direktur Kredit	Henry Sawali	Credit Director
Direktur Strategi	Jung Ho Han	Strategic Director

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Juni 2024 yang dituangkan dalam akta notaris No. 116 tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP/162-DKOM/VII/2024 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Alternate Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ *December 31, 2023*	
Dewan Komisaris:		**Board of Commissioners:**
Komisaris Utama	Jerry Marmen	President Commissioner
Wakil Komisaris Utama	Nam Hoon Cho ***)	Deputy President Commissioner
Komisaris	Nanang Supriyatno	Commissioner
Komisaris Independen	Tippy Joesoef	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Hae Wang Lee	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Stephen Liestyo	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Sukriansyah S. Latief	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Eugene Keith Galbraith	Independent Commissioner

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

The members of the Bank's Board of Commissioners and Directors as at December 31, 2024, are as follows:

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/ POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

The members of the Bank's Board of Commissioners and Directors as at December 31, 2024 is based on Extraordinary General Meeting of Shareholders dated June 28, 2024 as stated in notarial deed No. 116 dated July 12, 2024 and Decree of the Board of Commissioners No. SKEP/162-DKOM/VII/2024 concerning Distribution of Roles, Responsibilities and Alternate the Board of Directors PT Bank KB Bukopin Tbk.

The members of the Bank's Boards of Commissioners and Board of Directors as at December 31, 2023, are as follows:

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Direksi:		**Board of Directors:**
Direktur Utama	Woo Yeul Lee	President Director
Wakil Direktur Utama	Robby Mondong	Deputy President Director
Direktur Kepatuhan dan Risiko	Dodi Widjajanto	Compliance and Risk Director
Direktur Bisnis *Retail & Service*	Helmi Fahrudin	Retail Business & Services Director
Direktur Keuangan	Seng Hyup Shin **)	Finance Director
Direktur Bisnis UKM & *Wholesale*	Yohanes Suhardi	SME & Wholesale Business Director
Direktur Kredit	Henry Sawali	Credit Director
Direktur Teknologi Informasi & Digital	Young Eun Moon *)	Information Technology & Digital Director
Direktur Strategi	Jung Ho Han *)	Strategic Director

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

**) Bank menerima surat pengunduran diri pada tanggal 8 Desember 2023.

***) Bank menerima surat pengunduran diri pada tanggal 29 Desember 2023.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 31 Januari 2023 yang dituangkan dalam akta notaris No. 77 tanggal 31 Januari 2023 dan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SKEP/002-DKOM/II/2023 tentang Pembagian Fungsi Direktorat dalam Struktur Organisasi serta Pembagian Tugas dan Wewenang Anggota Direksi PT Bank KB Bukopin Tbk.

Susunan Komite Audit Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Stephen Liestyo	Stephen Liestyo	Chairman
Anggota	Tippy Joesoef	Tippy Joesoef **)	Member
Anggota	Dewi Anggesty Sah Bandar	Eugene Keith Galbraith	Member
Anggota	Jacobus Sindu Adisuwono	Dewi Anggesty Sah Bandar	Member
Anggota	-	Jacobus Sindu Adisuwono	Member

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

*) Shall be effective as stipulation specified by Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

**) The Bank received a letter of resignation on December 8, 2023.

***) The Bank received a letter of resignation on December 29, 2023.

The composition of the Bank's Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2023 was based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders on January 31, 2023 as set forth in notarial deed No. 77 dated January 31, 2023 and Decree of the Board of Commissioners No. SKEP/002-DKOM/II/2023 concerning Distribution of Directorate Functions in the Organizational Structure and the Distribution of Duties and Authorities for Members of the Board of Directors of PT Bank KB Bukopin Tbk.

The composition of the Bank's Audit Committee as at December 31, 2024 and 2023, were as follows:

**) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Susunan Komite Pemantau Risiko pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Tippy Joesoef	Tippy Joesoef	Chairman
Anggota	Jerry Marmen	Jerry Marmen *)	Member
Anggota	Seng Hyup Shin *)	Stephen Liestyo	Member
Anggota	Stephen Liestyo	Nanang Supriyatno	Member
Anggota	Togar Natigor Siregar	Togar Natigor Siregar	Member
Anggota	Rahardja Alimhamzah	Rahardja Alim Hamzah	Member
Anngota	Nanang Supriyatno	-	Member

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Hae Wang Lee	Hae Wang Lee	Chairman
Anggota	Jerry Marmen	Jerry Marmen	Member
Anggota	Seng Hyup Shin *)	Nam Hoon Cho	Member
Anggota	Tippy Joesoef	Nanang Supriyatno	Member
Anggota	Nanang Supriyatno	Tippy Joesoef	Member
Anggota	Gamaridha Akhirul A.R	Sukriansyah S Latief	Member
Anngota	-	Gamaridha Akhirul A.R	Member

*) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Susunan Komite Tata Kelola dan Terintegrasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Ketua	Stephen Liestyo	Sukriansyah S. Latief **)	Chairman
Anggota	Hae Wang Lee	Eugene Keith Galbraith	Member
Anggota	Dinan Sufendi Rae	Hae Wang Lee	Member
Anggota	-	Dinan Sufendi Rae	Member

**) Terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Bank setelah diperolehnya persetujuan Kemampuan dan Kepatutan *(fit and proper)* dari Otoritas Jasa Keuangan.

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

The composition of the Bank's Risk Monitoring Committee as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

*) Shall be effective as stipulation specified by the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017, and/or other applicable laws and regulations.

The composition of the Bank's Remuneration and Nomination Committee as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

*) Shall be effective as stipulation specified by the Bank after fulfilling all requirements governed by POJK No. 27/POJK.03/2016, No. 37/POJK.03/2017 and/or other applicable laws and regulations.

The composition of the Bank's Integrated governance committee as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

**) Shall be effective as stipulation specified by Bank after obtaining approval for fit and proper by OJK.

1. Umum (lanjutan)

b. Susunan Pengurus Bank (lanjutan)

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/131-DIR/XI/2024 tanggal 29 November 2024, Sekretaris Perusahaan Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Ariz Dian Perkasa.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKEP/0015-DIR/II/2022 tanggal 2 Februari 2022, Kepala Satuan Kerja Audit Internal (Kepala SKAI) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Roby Endrama Purba.

c. Entitas anak

Entitas anak yang tercakup dalam laporan keuangan konsolidasian tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah:

1. General (continued)

b. Composition of the Bank's Management (continued)

Based on the Company's Directors Decision Letter No. SKEP/131-DIR/XI/2024 dated November 29, 2024, the Corporate Secretary of the Bank as at December 31, 2024 is Ariz Dian Perkasa.

Based on the Company's Directors Decision Letter No. SKEP/0015-DIR/II/2022 dated February 2, 2022, the Internal Audit Task Force Head (Chief of IATF) as at December 31, 2024 and 2023 is Roby Endrama Purba.

c. Subsidiaries

The subsidiaries included in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Nama Perusahaan/ *Company Name*	Kegiatan Usaha/ *Business Activity*	Tahun Beroperasi Komersial/ *Year of Commercial Operation*	Domisili/ *Domicile*	Persentase Kepemilikan/ *Percetage of Ownership*		Jumlah Aset/ *Total Assets*	
				2024	2023	2024	2023
PT KB Bukopin Finance	Pembiayaan/ *Financing*	1983	Jakarta	99.24%	99.24%	667.748	459.661
PT Bank KB Bukopin Syariah	Perbankan/ *Banking*	1990	Jakarta	95.92%	95.92%	8.644.906	7.920.474

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

PT KB Bukopin Finance ("KBBF") didirikan pada tanggal 11 Maret 1983 berdasarkan akta notaris No. 5 dari Notaris Tan A Sioe, S.H., dan bergerak dalam bidang *leasing* (perusahaan pembiayaan). Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris Linsia, S.H., M.Kn., No. 1092 tanggal 25 Oktober 2023, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari PT Bukopin Finance menjadi PT KB Bukopin Finance ("KBBF") yang dituangkan ke dalam Akta No. 06 tanggal 28 Juni 2021 dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI melalui Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021.

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

PT KB Bukopin Finance ("KBBF") was established on March 11, 1983 by notarial deed No. 5 of Notary Tan A Sioe, S.H., and is engaged in leasing activities. The Company's Articles of Association have been amended several times, the last of which was made by Notarial Deed No. 1092 of Linsia, S.H., M.Kn., dated October 25, 2023, in connection with increase in the Company's issued and paid-up capital.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) agreed to change the name of the Company from PT Bukopin Finance to PT KB Bukopin Finance ("KBBF") which was stated in the Deed No. 06 dated June 28, 2021 and has received approval from the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through the decision of the Minister of Law And Human Rights number AHU-0041490.AH.01.02.TAHUN 2021.

1. Umum (lanjutan)

c. Entitas anak (lanjutan)

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

Berdasarkan akta No. 1092 tanggal 25 Oktober 2023 dari Notaris Linsia, S.H., M.Kn., Perusahaan menambah setoran modal pada KBBF sebesar 118.580 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp592.900.000.000 sehingga meningkatkan persentase kepemilihan perusahaan pada KBBF dari 97,03% menjadi 99,24%.

PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") didirikan pada tanggal 29 Juli 1990 berdasarkan akta notaris No. 102 dari Notaris Dr. Widjojo Wilami, S.H., yang bergerak dalam bidang perbankan. Berdasarkan akta notaris No. 28 dari Notaris Adrian Djunaini, S.H., tanggal 31 Maret 2008, BPI telah berubah nama menjadi PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). Status BSB berubah dari Bank Konvensional menjadi Bank Syariah sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan Bank Indonesia (BI) No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) menyetujui untuk melakukan perubahan nama Perseroan dari BSB menjadi PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") yang dituangkan ke dalam Akta No. 02 tanggal 6 Juli 2021 dan telah mendapat persetujuan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Bank dengan Nama Baru dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan surat nomor SR-27/PB.101/2021 tanggal 12 Agustus 2021 dan KEP-53/PB.1/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

Berdasarkan akta No. 04 tanggal 16 Oktober 2023 dari Notaris Hasnah, S.H., Modal Dasar yang dimiliki KBBS saat ini adalah Rp3.000.000.000.000 yang terbagi atas 56.690.737.000 saham dan terdiri dari saham Seri A, Seri B, dan Seri C. Terdapat penambahan kepemilikan Perusahaan pada Seri C Sebesar 13.600.000.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp638.000.000.000. Hal ini memengaruhi persentase kepemilikan Perusahaan pada KBBS dari 92,78% menjadi 95,92%.

1. General (continued)

c. Subsidiaries (continued)

PT KB Bukopin Finance ("KBBF")

Based on deed No. 1092 dated October 25, 2023 from Notary Linsia S.H., M.Kn., the Company increased its capital deposit in KBBF by 118,580 shares with a total nominal value of Rp592,900,000,000 thus increasing the Company's ownership percentage in KBBF from 97.03% to 99.24%.

PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS")

PT Bank Persyarikatan Indonesia ("BPI") was established on July 29, 1990 by notarial deed No. 102 of Notary Dr. Widjojo Wilami, S.H., and is engaged in Banking activities. Based on notarial deed No. 28 of Notary Adrian Djunaini, S.H., dated March 31, 2008, BPI has changed its name to PT Bank Syariah Bukopin ("BSB"). The status of BSB changed from Conventional Bank to Sharia Bank as stated in Bank Indonesia (BI) decision letter No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 dated October 27, 2008.

On the June 30, 2021 Extraordinary General Meeting Shareholders (EGMS) agreed to change the company name from BSB into PT Bank KB Bukopin Syariah ("KBBS") which set forth into the Deed No. 02 dated July 6, 2021 and has been approved for keeping the use of Bank License under new name from Authority Financial Services based on SR-27/PB.101/2021 dated August 12, 2021 and KEP-53/PB.1/2021 dated August 10, 2021.

Based on deed No. 04 dated October 16, 2023 from Notary Hasnah, S.H., the current authorized capital of KBBS is Rp3,000,000,000,000 divided into 56,690,737,000 shares and consists of Series A, Series B, and Series C shares. There is an increase in the Company's ownership in Series C of 13,600,000,000 shares with a total nominal value of Rp638,000,000,000. This affected the Company's ownership percentage in KBBS from 92.78% to 95.92%.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank

Penawaran umum obligasi

Pada tanggal 21 April 2015, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") melalui surat No. 05630/DIR/IV/2015 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2015 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp400.000.

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2022.

Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-26/D.04/ 2015 tanggal 23 Juni 2015 dilaksanakan pada 24 - 25 Juni 2015. Dana Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada 30 Juni 2015 yang diperoleh dari Penawaran Umum Juni 2015.

Pada 11 Januari 2017, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 00455/DIR/I/2017 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp2.000.000, dimana pada tahap kedua Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.405.000.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares

Public offering of bonds

On April 21, 2015, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche I Year 2015 (Shelf Public Offering) through letter No. 05630/DIR/IV/2015 to Financial Services Authority ("OJK") in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at first tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche I Year 2015 (Subordinated Bonds) amounted to Rp400,000.

The Subordinated Bonds issued were scripless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 12.00% per annum and will be paid quarterly and mature on June 30, 2022.

The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-26/D.04/2015 dated June 23, 2015. The Shelf Public Offering was held on June 24 - 25, 2015. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on June 30, 2015 from Public Offering in June 2015.

On January 11, 2017, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 (Shelf Public Offering) through letter No. 00455/DIR/I/2017 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin amounting to Rp2,000,000, whereby at second tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 (Subordinated Bonds) amounted to Rp1,405,000.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Obligasi Subordinasi tersebut diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari nilai nominal, berjangka waktu 7 (tujuh) tahun dengan tingkat bunga tetap sebesar 11,00% per tahun dan dibayarkan setiap triwulan dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2024. Bank memperoleh pernyataan efektif dari OJK untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan melalui suratnya No. S-161/ PB.313/2016 tanggal 23 Desember 2016. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan pada tanggal 20 - 23 Februari 2017. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Berkelanjutan ini telah diterima oleh Bank pada tanggal 28 Februari 2017.

Pada 10 September 2021, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 08550/DIR/V/2021 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin dengan jumlah sebesar Rp1.000.000, dimana pada tahap pertama Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 (Obligasi Subordinasi) dengan jumlah pokok sebesar Rp1.000.000.

Pada 10 September 2021, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri A dan seri B (Penawaran Umum Berkelanjutan) kepada OJK melalui surat No. 08550/DIR/V/2017 dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin dengan jumlah masing-masing sebesar Rp315.000 dan Rp685.000, dimana pada tahap ketiga Bank menerbitkan dan menawarkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri A (Obligasi Subordinasi No. ISIN IDA0001176A9) dan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 seri B (Obligasi Subordinasi No. ISIN IDA0001176B7) dengan jumlah pokok masing-masing sebesar Rp315.000 dan Rp685.000.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

The Subordinated Bonds issued were scripless, offered at 100% of nominal value, with 7 (seven) years tenor and fixed interest rate of 11.00% per annum and will be paid quarterly and mature on February 28, 2024. The Bank received the effective statement from OJK to conduct Shelf Public Offering through its letter No. S-161/PB.313/2016 dated December 23, 2016. The Shelf Public Offering was held on February 20 - 23, 2017. The proceeds from the Shelf Public Offering were received by the Bank on February 28, 2017.

On September 10, 2021, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 (Shelf Public Offering) through letter No. 08550/DIR/V/2021 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin amounting to Rp1,000,000, whereby at first tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 (Subordinated Bonds) amounted to Rp1,000,000.

On September 10, 2021, the Bank submitted a Statement of Registration in connection with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 serie A and serie B (Shelf Public Offering) through letter No. 08550/ DIR/V/2017 to Financial Services Authority ("OJK"), in relation with the Shelf Public Offering of Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin amounting to Rp315,000 and Rp685,000 respectively, whereby at third tranche the Bank issued and offered the Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 serie A (Subordinated Bonds ISIN No. IDA0001176A9) and Shelf-registered Subordinated Bonds III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 series B (Subordinated Bonds ISIN No. IDA0001176B7) amounted to Rp315,000 and Rp685,000, respectively.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum obligasi (lanjutan)

Pada 14 Oktober 2024, Bank menerbitkan Obligasi Global PT Bank KB Bukopin Tbk, Obligasi Senior Tanpa Jaminan. Jumlah obligasi sebesar USD300.000.000 (angka penuh) (Rp4.828.500) dengan jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 5,658% per tahun dan akan jatuh tempo pada 30 Oktober 2027. Penerbitan ini dimaksudkan untuk membiayai kembali utang jangka pendek yang ada dan tujuan umum perusahaan lainnya. Surat Utang ini telah diberi kode keamanan ISIN: XS2904540692 dan tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX-ST).

Penawaran umum saham

Pada bulan Juni 2006, Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga jual Rp350 (nilai penuh) per saham kepada masyarakat, melalui pasar modal di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penawaran Umum Saham Perdana saham Seri B kepada masyarakat ini telah memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK melalui suratnya No. S-825/BL/2006 tanggal 30 Juni 2006.

Saham yang ditawarkan tersebut mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 10 Juli 2006 dan pada saat yang bersamaan sebanyak 99% saham Bank juga dicatatkan. Seluruh saham kelas A sebesar 0,31% dan saham kelas B sebesar 0,69% yang dimiliki oleh Kopelindo dan Kopkapindo masing-masing secara proporsional tidak dicatatkan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan pemerintah.

Pada tanggal 26 Oktober 2009, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas I kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 7548/DIR/X/2009 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 27b). Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 286.050.768 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp415 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I melalui suratnya No. S-10319/BL/2009 tanggal 26 November 2009.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of bonds (continued)

On October 14, 2024, the Bank issued Global Bond PT Bank KB Bukopin Tbk, a Senior Unsecured Bond. The Bond amounts to USD 300,000,000 (full amount) (Rp4,828,500) with a tenor of 3 years with a coupon rate of 5.658% per annum, maturing on October 30, 2027. The issuance is intended for refinancing existing short-term debt and other general corporate purposes. The bond has been assigned the security code ISIN: XS2904540692 and is listed on the Singapore Exchange (SGX-ST).

Public offering of shares

In June 2006, the Bank undertook an Initial Public Offering of Shares of 843,765,500 Series B shares with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp350 (full amount) per share to the public, through the capital market in Indonesia, in accordance with the prevailing capital market law. The Bank received the effectivity statement from the BAPEPAM-LK through its letter No. S-825/BL/2006 dated June 30, 2006 for the sale of Series B shares to the public.

The Initial Public Offering (IPO) shares were onotially traded on the Indonesia Stock Exchange on July 10, 2006 and at the same time, 99% of the Bank's shares were listed. All Series A shares amounting to 0.31% and Series B shares amounting to 0.69% which were owned by Kopelindo and Kopkapindo proportionally, were not listed to comply with the government regulation.

On October 26, 2009, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering I through letter No. 7548/ DIR/X/2009 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 27b). Total shares offered were 286,050,768 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp415 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering I through its letter No. S-10319/BL/2009 dated November 26, 2009.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 26 November 2009, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas I dilaksanakan pada tanggal 4 - 10 Desember 2009. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas I adalah sebesar Rp118.711 (untuk 286.050.768 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp62.955 (untuk 151.699.698 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp55.756 (untuk 134.351.070 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog yang bertindak sebagai pembeli siaga (*standby buyer*) dengan proporsi masing-masing sebesar 89,83% dan 10,17%.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas I ini telah diterima oleh Bank pada bulan Desember 2009.

Pada tanggal 20 Desember 2010, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II kepada BAPEPAM-LK melalui surat No. 11754/DIR/XII/2010 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham (Catatan 27b).

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak 2.051.366.765 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp520 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari BAPEPAM-LK untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II melalui suratnya No. S-771/BL/2011 tanggal 26 Januari 2011. Pada tanggal 26 Januari 2011, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan HMETD.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On November 26, 2009, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering I with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering I was held on December 4 - 10, 2009. The total proceeds from Limited Public Offering I amounting to Rp118,711 (for 286,050,768 common B shares), of which Rp62,955 (for 151,699,698 common B shares) was raised from the public and Rp55,756 (for 134,351,070 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Yayasan Bina Sejahtera Warga (Yabinstra) Bulog, who acted as the standby buyers with proportional share of 89.83% and 10.17%, respectively.

The proceeds from the Limited Public Offering I were received by the Bank in December 2009.

On December 20, 2010, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering II through letter No. 11754/ DIR/XII/2010 to BAPEPAM-LK, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders (Note 27b).

Total shares offered were 2,051,366,765 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp520 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from BAPEPAM-LK to conduct Limited Public Offering II through its letter No. S-771/BL/2011 dated January 26, 2011. On January 26, 2011, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering II with pre-emptive rights.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas II dilaksanakan pada tanggal 10 - 17 Februari 2011. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas II adalah sebesar Rp929.739 (untuk 1.787.960.495 saham biasa kelas B), dimana sebesar Rp921.098 (untuk 1.771.342.921 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat dan sebesar Rp8.641 (untuk 16.617.574 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Karyawan Bank KB Bukopin Jakarta (KKBJ) dan Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas II ini telah diterima oleh Bank pada bulan Februari 2011.

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 13308/DIR/X/2013 dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham.

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.659.505.614 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp660 (nilai penuh) per saham. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas III melalui surat No. S-424/D.04/2013 tanggal 12 Desember 2013. Pada 11 - 13 Desember 2013, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan HMETD.

Penawaran Umum Terbatas III dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2013 sampai 7 Januari 2014. Jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Terbatas III sebesar Rp730.126 (untuk 1.106.252.141 saham biasa kelas B), dari nilai tersebut sebesar Rp9.291 (untuk 14.076.556 saham biasa kelas B) diperoleh dari masyarakat, sebesar Rp343.410 (untuk 520.319.150 saham biasa kelas B) diperoleh dari Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) dan sebesar Rp377.425 (untuk 571.856.435 saham biasa kelas B) dari PT Bosowa Corporindo. Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Terbatas III ini telah diterima oleh Bank hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp587.490 dan hingga tanggal 9 Januari 2014 sebesar Rp730.126.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

The Limited Public Offering II was held on February 10 - 17, 2011. The total proceeds from Limited Public Offering II amounted to Rp929,739 (for 1,787,960,495 common B shares), of which Rp921,098 (for 1,771,342,921 common B shares) was raised from the public and Rp8,641 (for 16,617,574 common B shares) was raised from Koperasi Karyawan Bank KB Bukopin Jakarta (KKBJ) and Induk Koperasi Perikanan Indonesia (IKPI). The proceeds from the Limited Public Offering II were received by the Bank in February 2011.

On October 28, 2013, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering III through letter No. 13308/DIR/X/2013 to the Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders.

Total shares offered were 2,659,505,614 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp660 (full amount) per share. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering III through its letter No. S-424/D.04/2013 dated December 12, 2013. On December 11 - 13, 2013, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering III with pre-emptive rights.

The Limited Public Offering III was held on December 30, 2013 to January 7, 2014. The total proceeds from Limited Public Offering III amounted to Rp730,126 (for 1,106,252,141 common B shares), of which Rp9,291 (for 14,076,556 common B shares) was raised from the public, Rp343,410 (for 520,319,150 common B shares) was raised from Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (Kopelindo) and Rp377,425 (for 571,856,435 common B shares) was raised from PT Bosowa Corporindo. The proceeds from the Limited Public Offering III received by the Bank until December 31, 2013 amounted to Rp587,490 and until January 9, 2014 amounted to Rp730,126.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 22 Mei 2018, Bank melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk menyetujui pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan HMETD. Bank memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas IV melalui surat No. S-92/D.04/2018 tanggal 29 Juni 2018. Pada tanggal 2 Juli 2018, Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas IV kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No. 10400/SKPR/ X/2018 dalam rangka Penyampaian penerbitan Saham melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham.

Saham yang ditawarkan adalah sebanyak-banyaknya 2.725.986.130 saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dengan harga penawaran Rp570 (nilai penuh) per saham.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2018 - 25 Juli 2018. Hingga tanggal 27 Juli 2018, Bank telah menerima dana dari PUT IV sebesar Rp1.462.214 yaitu dari Kookmin Bank sebesar Rp1.460.910 dan dari Publik sebesar Rp1.304. Berdasarkan surat dari PT Datindo Entrycom mengenai komposisi pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2018, dana dari Kookmin Bank telah dicatatkan sebagai peningkatan modal disetor sebesar 2.565.288.316 saham biasa kelas B.

Pada tanggal 29 Juni 2020 Bank telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) V kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui aplikasi Sprint OJK. PUT V akan menerbitkan 4.660.763.499 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham dan nilai penawaran Rp180 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 2 September 2020 Bank telah melakukan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) dan menerbitkan saham baru sebanyak 16.360.578.947 (enam belas miliar tiga ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham yang diambil bagian oleh KB Kookmin Bank Co., Ltd.

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On May 22, 2018, the Bank held an Extraordinary General Meeting of Shareholders to approve the execution of the Limited Public Offering IV with pre-emptive rights. The Bank received the effectivity statement from the Financial Services Authority to conduct Limited Public Offering IV through its letter No. S-92/D.04/2018 dated June 29, 2018. On July 2, 2018, the Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering IV through letter No. 10400/SKPR/ X/2018 to The Financial Services Authority, in relation with the issuance of pre-emptive rights to the shareholders.

Total shares offered were 2,725,986,130 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp570 (full amount) per share.

The Limited Public Offering (LPO) IV was held on July 13, 2018 to July 25, 2018. Until July 27, 2018, the Bank has received proceed from LPO IV amounting to Rp1,462,214, consist of Kookmin Bank amounting to Rp1,460,910 and from Public of Rp1,304. Based on letter from PT Datindo Entrycom regarding the composition of shareholders as at July 30, 2018, the proceed from Kookmin Bank has been registered as increase in paid-up capital amounting to 2,565,288,316 common B shares.

On June 29, 2020 Bank submitted a Statement of Registration regarding Limited Public Offering (LPO) V to The Financial Services Authority (FSA) through Sprint OJK. LPO V will issue 4,660,763,499 common B shares ("New Shares") with a par value of Rp100 (full amount) per share and offering price of Rp180 (full amount) per share.

On September 2, 2020, the Bank held Pre-emptive Rights (PMTHMETD) and issued 16,360,578,947 new shares (sixteen billion three hundred sixty million five hundred seventy eight thousand nine hundred and forty seven) class B shares with a nominal value of Rp100 (full amount) per share subscribed by KB Kookmin Bank Co., Ltd.

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

Pada tanggal 8 November 2021 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 35.214.288.984 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

Pada tanggal 9 Juni 2023 Bank telah mendapatkan Pernyataan Efektif sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PUT VI sendiri telah menerbitkan 119.999.999.692 lembar saham biasa kelas B baru ("Saham Baru") dengan nominal Rp100 (nilai penuh) per saham.

Tindakan Bank yang memengaruhi modal ditempatkan dan disetor penuh dalam saham biasa kelas B sejak Penawaran Umum Saham Perdana sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

On November 8, 2021, the Bank has obtained an Effective Statement related to the Limited Public Offering (PUT) VI from the Financial Services Authority (OJK). PUT VI itself has issued 35,214,288,984 new class B ordinary shares ("New Shares") with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

On June 9, 2023, the Bank has obtained an Effective Statement related to the Limited Public Offering (PUT) VI from the Financial Services Authority (OJK). PUT VI itself has issued 119,999,999,692 new class B ordinary shares ("New Shares") with a nominal value of Rp100 (full amount) per share.

The Bank's action which affects issued and fully paid capital in common B shares from Initial Public Offering of shares up to December 31, 2024 are as follows:

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
31 Desember 2005/ *December 31, 2005*	Total saham sebelum Penawaran Umum Saham Perdana/ *Total shares before Initial Public Offering*	4.760.000.050
30 Juni 2006/ *June 30, 2006*	Penawaran Umum Saham Perdana sejumlah 843.765.500 lembar saham/ *Initial Public Offering of shares of 843,765,500 shares*	5.603.765.550
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2007/*30 trading days starting July 10, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 47.864.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 47,864,000 shares*	5.651.629.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2007/*30 trading days starting November 1, 2007*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 39.370.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 39,370,500 shares*	5.691.000.050
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2008/ *30 trading days starting July 10, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 740.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 740,500 shares*	5.691.740.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2008/*30 trading days starting November 1, 2008*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 780.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 780,500 shares*	5.692.521.050

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2009/ *30 trading days starting July 10, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 7.156.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 7,156,500 shares*	5.699.677.550
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2009/*30 trading days starting November 1, 2009*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 1.092.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 1,092,000 shares*	5.700.769.550
26 November 2009/ *November 26, 2009*	Penawaran Umum Terbatas I dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 286.050.768 lembar saham/ *Limited Public Offering I with the Issuance of Pre-emptive Rights of 286,050,768 shares*	5.986.820.318
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2010/ *30 trading days starting July 10, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 129.687.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 129,687,500 shares*	6.116.507.818
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2010/*30 trading days starting November 1, 2010*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 16.254.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 16,254,500 shares*	6.132.762.318
26 Januari 2011/ *January 26, 2011*	Penawaran Umum Terbatas II dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 1.787.960.495 lembar saham/ *Limited Public Offering II with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,787,960,495 shares*	7.920.722.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2011/ *30 trading days starting July 10, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 12.705.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 12,705,000 shares*	7.933.427.813
30 hari bursa sejak tanggal 1 November 2011/*30 trading days starting November 1, 2011*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 269.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 269,000 shares*	7.933.696.813
30 hari bursa sejak tanggal 10 Juli 2012/ *30 trading days starting July 10, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 14.346.000 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 14,346,000 shares*	7.948.042.813
30 hari bursa sejak tangga/ 1 November 2012/*30 trading days starting November 1, 2012*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 680.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 680,500 shares*	7.948.723.313
30 hari bursa sejak tanggal 2 Januari 2013/*30 trading days starting January 2, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 352.500 lembar saham/ *Exercise of management stock option program of 352,500 shares*	7.949.075.813

1. Umum (lanjutan)

d. Penawaran umum obligasi dan penawaran umum saham Bank (lanjutan)

Penawaran umum saham (lanjutan)

1. General (continued)

d. Public offering of the Bank's bonds and shares (continued)

Public offering of shares (continued)

Tanggal/*Date*	Tindakan Perusahaan/*Corporate Action*	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares*
30 hari bursa sejak tanggal 25 Mei 2013/ *30 trading days starting May 25, 2013*	Eksekusi saham dari program kompensasi manajemen berbasis saham sejumlah 9.954.500 embar saham/ *Exercise of management stock option program of 9,954,500 shares*	7.959.030.313
7 Januari 2014/ *January 7, 2014*	Penawaran Umum Terbatas III dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah1.106.252.141 lembar saham/ *Limited Public Offering III with the Issuance of Pre-emptive Rights of 1,106,252,141 shares*	9.065.282.454
27 Juli 2018/ *July 27, 2018*	Penawaran Umum Terbatas IV dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 2.565.288.316 lembar saham/ *Limited Public Offering IV with the Issuance of Pre-emptive Rights of 2,565,288,316 shares*	11.630.570.770
29 Juni 2020/ *June 29, 2020*	Penawaran Umum Terbatas V dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 4.660.763.499 lembar saham/ *Limited Public Offering V with the Issuance of Pre-emptive Rights of 4,660,763,499 shares*	16.291.334.269
2 September 2020/ *September 2, 2020*	Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sejumlah 16.360.578.974 lembar saham/ *Non Pre-Preemptive Private Placement with the Issuances of 16,360,578,974 shares*	32.651.913.243
2 Desember 2021/ *December 2, 2021*	Penawaran Umum Terbatas VI dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 35.214.288.984 lembar saham/ *Limited Public Offering VI with the Issuance of Pre-emptive Rights of 35,214,288,984 shares*	67.866.202.200
9 Juni 2023/ *June 9, 2023*	Penawaran Umum Terbatas VII dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sejumlah 119.999.999.692 lembar saham/ *Limited Public Offering VI with the Issuance of Pre-emptive Rights of 119,999,999,692 shares*	187.866.201.892

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Bank dan Entitas anak ("Grup") adalah seperti dijabarkan di bawah ini:

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan

2. Material Accounting Policy Information

The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Bank and it's Subsidiaries (the "Group") are set out below:

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Akuntansi Perbankan bagi Bank Umum Kovensional (BPAK), Panduan Akuntansi Perbankan Syariah (PAPSI) dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Laporan keuangan entitas anak yang bergerak di bidang perbankan Syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") 401 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 (Amendemen 2013) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK 403 tentang "Akuntansi Salam", PSAK 404 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Istishna", PSAK 405 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406 tentang "Akuntansi Musyarakah", PSAK 407 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia ("PAPSI") yang diterbitkan atas kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia dengan Bank Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan nilai historis kecuali untuk beberapa akun yang dinilai menggunakan dasar pengukuran lain sebagaimana dijelaskan pada kebijakan akuntansi dari akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi akrual kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung yang menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi jutaan Rupiah yang terdekat.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, The Banking Accounting Handbook for Conventional Commercial Banks (BPAK) the Islamic Banking Accounting Guide (PAPSI) and Regulation No. VIII.G.7 regarding "Presentation and Disclosures of issuers or Public Companies' Financial Statements".

The subsidiary's financial statements which operates under Sharia banking have been presented in accordance with Implementation of Financial Accounting Standards ("SFAS") 401 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS 402 (Amendment 2013) regarding "Murabahah Accounting", SFAS 403 regarding "Salam Accounting", SFAS 404 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", SFAS 405 regarding "Mudharabah Accounting", SFAS 406 regarding "Musyarakah Accounting", SFAS 407 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", SFAS 410 (Revised 2015) regarding "Accounting for Sukuk", and Indonesian Sharia Banking Accounting Guidelines ("PAPSI") as issued under the cooperation between Indonesian Institute of Accountants and Bank Indonesia.

The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention except for certain accounts which are valued on other measurement basis as described in the accounting policies for such accounts. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statement of cash flows.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The consolidated statement of cash flows is prepared using the direct method which presents receipts and payments of cash and cash equivalents which are classified into operating, investing and financing activities.

All figures in the consolidated financial statements are rounded to and stated in millions of Rupiah, unless otherwise stated.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Pos-pos dalam Penghasilan Komprehensif Lainnya disajikan terpisah antara akun-akun yang akan direklasifikasikan ke laba rugi dan akun-akun yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dibutuhkan estimasi dan asumsi yang memengaruhi:
- nilai aset dan liabilitas dilaporkan, dan pengungkapan atas aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian;
- jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

Pertimbangan profesional dan estimasi signifikan dalam menentukan jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

Perhitungan cadangan kerugian

Saat mengukur Cadangan Kerugian Ekspektasian (ECL), Grup menggunakan informasi masa depan yang wajar dan dapat didukung, yang didasarkan pada asumsi untuk pergerakan masa depan dari berbagai pendorong ekonomi dan bagaimana penggerak ini akan saling memengaruhi.

Loss given default adalah estimasi kerugian yang timbul karena gagal bayar. Perhitungan didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual terutang dan yang diharapkan akan diterima, dengan mempertimbangkan arus kas dari agunan dan peningkatan kredit integral.

Probability of default merupakan input utama dalam mengukur ECL. *Probability of default* adalah perkiraan kemungkinan gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang penghitungannya mencakup data historis, asumsi, dan ekspektasi kondisi masa depan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

The items under Other Comprehensive Income (OCI) are presented separately between items to be reclassified to profit or loss and those items not to be reclassified to profit or loss.

The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of estimates and assumptions that affects:
- the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements;
- the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Although these estimates are based on management's best knowledge of current events and activities, actual results may differ from those estimates.

The most significant uses of the judgment and estimates in determining the amounts recognized in the consolidated financial statements are as follows:

Calculation of loss allowance

When measuring Expected Credit Losses (ECL), the Group uses reasonable and supportable forward-looking information, which is based on assumptions for the future movement of different economic drivers and how these drivers will affect each other.

Loss given default is an estimate of the loss arising on default. It is based on the difference between the contractual cash flows due and those that the lender would expect to receive, taking into account cash flows from collateral and integral credit increase.

Probability of default constitutes a key input in measuring ECL. Probability of default is an estimate of the likelihood of default over a given time horizon, the calculation of which includes historical data, assumptions and expectations of future conditions.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Penilaian model bisnis

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan bergantung pada hasil 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' ("SPPI") dan uji model bisnis (lihat bagian aset keuangan pada Catatan 2d). Grup menentukan model bisnis pada tingkat yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Penilaian ini mencakup penilaian yang mencerminkan semua bukti yang relevan termasuk bagaimana kinerja aset dievaluasi dan kinerjanya diukur, risiko yang memengaruhi kinerja aset dan bagaimana hal ini dikelola dan bagaimana manajer aset diberi kompensasi. Grup memantau aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dihentikan pengakuannya sebelum jatuh tempo untuk memahami alasan pelepasannya dan apakah alasan tersebut konsisten dengan tujuan bisnis di mana aset tersebut dimiliki. Pemantauan adalah bagian dari penilaian berkelanjutan Grup atas apakah model bisnis di mana aset keuangan yang tersisa dimiliki tetap sesuai dan jika tidak sesuai apakah telah terjadi perubahan dalam model bisnis dan dengan demikian terdapat perubahan prospektif terhadap klasifikasi aset keuangan tersebut. Tidak ada perubahan yang diperlukan selama periode yang disajikan.

Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK 109. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2d atas laporan keuangan konsolidasian.

Nilai wajar atas instrumen keuangan (Catatan 46)

Bila nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tercatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian tidak tersedia di pasar aktif, nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian termasuk penggunaan

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Business model assessment

Classification and measurement of financial assets depend on the results of the Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) and the business model test (please see financial assets section of Note 2d). The Group determines the business model at a level that reflects how group of financial assets are managed together to achieve a particular business objective. This assessment includes judgement reflecting all relevant evidence including how the performance of the assets is evaluated and their performance measured, the risks that affect the performance of the assets and how these are managed and how the managers of the assets are compensated. The Group monitors financial assets measured at amortized cost or fair value through other comprehensive income that are derecognized prior to their maturity to understand the reason for their disposal and whether the reasons are consistent with the objective of the business for which the asset was held. Monitoring is part of the Group's continuous assessment of whether the business model for which the remaining financial assets are held continues to be appropriate and if it is not appropriate whether there has been a change in business model and so a prospective change to the classification of those assets. No such changes were required during the periods presented.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by considering the definition set forth in SFAS 109. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies as disclosed in Note 2d to the consolidated financial statements.

Fair value of financial instruments (Note 46)

Where the fair values of financial assets and financial liabilities recorded on the consolidated statement of financial position cannot be derived from active markets, the fair value of financial assets and liabilities is determined using various valuation techniques including the

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Nilai wajar atas instrumen keuangan (Catatan 46) (lanjutan)

model matematika. Masukan untuk model ini berasal dari data pasar yang bisa diamati selama data tersebut tersedia. Bila data pasar yang bisa diamati tersebut tidak tersedia, pertimbangan manajemen diperlukan untuk menentukan nilai wajar. Pertimbangan tersebut mencakup pertimbangan likuiditas dan masukan model seperti volatilitas untuk transaksi derivatif yang berjangka waktu panjang dan tingkat diskonto, tingkat pelunasan dipercepat, dan asumsi tingkat gagal bayar.

Grup meninjau efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, dan diukur dengan biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian untuk menilai apakah telah terjadi penurunan nilai. Penilaian tersebut memerlukan pertimbangan yang sama seperti yang diterapkan pada penilaian individual pada kredit yang diberikan.

Penurunan nilai aset non-keuangan (Catatan 13, 14, dan 15)

Grup mengevaluasi penurunan nilai aset non-keuangan apabila terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset non-keuangan tidak dapat dipulihkan kembali.

Penurunan nilai timbul saat nilai tercatat aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") melebihi nilai terpulihnya, yaitu mana yang lebih besar antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada ketersediaan data dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Aset pajak tangguhan (Catatan 21c)

Aset pajak tangguhan diakui atas jumlah pajak penghasilan terpulihkan (*recoverable*) pada periode mendatang sebagai akibat perbedaan temporer yang boleh dikurangkan. Justifikasi manajemen diperlukan untuk menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, sesuai dengan waktu yang tepat dan tingkat laba fiskal di masa mendatang sejalan dengan strategi rencana perpajakan ke depan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Fair value of financial instruments (Note 46) (continued)

use of mathematical models. The inputs for these models are derived from observable market data when such data is available, if observable market data are not available, management judgment is required to determine the fair values. The judgments include considerations of liquidity and model inputs such as volatility for long term derivatives and discount rates, prepayment rates, and default rate assumptions.

The Group reviews their debt securities classified as measured at fair value through profit or loss, measured at fair value through other comprehensive income, and measured at amortized costs at each consolidated statement of financial position date to assess whether they are impaired. This requires similar judgment as applied to the individual assessment of loans.

Impairment of non-financial assets (Notes 13, 14, and 15)

The Group evaluates impairment of non-financial assets if there is event or change in circumstance that may indicate that the carrying amount of the non-financial assets may not be recovered.

An impairment exists when the carrying value of an asset or Cash Generating Unit ("CGU") exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Deferred tax assets (Note 21c)

Deferred tax assets are recognized for the amount of income tax recoverable in future future periods as a result of deductible temporary difference. Management judgment is required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing on level of future taxable profits, together with future tax planning strategy.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

a. Pernyataan kepatuhan dan dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup (lanjutan)

Liabilitas kesejahteraan karyawan (Catatan 37)

Program-program pensiun ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial. Perhitungan aktuarial menggunakan asumsi-asumsi seperti tingkat diskonto, tingkat pengembalian aset, tingkat kenaikan penghasilan, tingkat kematian, tingkat pengunduran diri, dan lain-lain.

Penyusutan aset tetap

Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap Grup antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini merupakan masa manfaat ekonomis yang secara umum diharapkan dalam industri perbankan. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 2p dan 13.

Revaluasi atas tanah (Catatan 13)

Grup menggunakan penilai independen untuk menilai nilai wajar atas tanah. Tanah dinilai dengan mengacu kepada bukti berdasarkan pasar, menggunakan harga yang sebanding setelah disesuaikan dengan faktor pasar spesifik seperti lokasi dan kondisi dari tanah.

Estimasi masa sewa

Dalam mengestimasi masa sewa dari masing-masing perjanjian sewa, manajemen mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang memberikan insentif ekonomik untuk mengeksekusi opsi perpanjangan, atau untuk tidak mengeksekusi opsi penghentian, termasuk perubahan fakta atau keadaan yang diekspektasi dari tanggal permulaan hingga tanggal eksekusi opsi. Opsi perpanjangan (atau periode setelah opsi penghentian) hanya diperhitungkan dalam masa sewa jika sewa cukup pasti akan diperpanjang (atau tidak dihentikan).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

a. Statement of compliance and basis of preparation of the Group's consolidated financial statements (continued)

Liability for employee service entitlements (Note 37)

Pension programs are determined based on actuarial valuation. The actuarial valuation involves assumptions such as discount rate, expected rate of returns on plan assets, salary increase rate, mortality rate, resignation rate, and others.

Depreciation of fixed assets

Management properly estimates the economic useful life of the Group's fixed assets as ranging from 4 to 20 years. These are the economic useful life generally expected in the banking industries. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 2p and 13.

Revaluation of land (Note 13)

The Group uses an independent appraiser to assess the fair value of the lands. Lands are valued by referencing to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific markets factors such as the location and condition of the land.

Estimation of lease term

When estimating the lease term of the respective lease arrangement, management considers all facts and circumstances that create an economic incentive to exercise an extension option, or to not exercise a termination option, including any expected changes in facts and circumstances from the commencement date until the exercise date of the option. Extension options (or periods after termination options) are only included in the lease term if the lease is reasonably certain to be extended (or not terminated).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

b. Prinsip-prinsip konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Bank dan laporan keuangan entitas anak.

Pengendalian diperoleh ketika Bank terekspos, atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaan yang dimiliki.

Dalam hal pengendalian terhadap entitas dimulai atau diakhiri dalam suatu tahun berjalan, maka hasil usaha entitas yang diperhitungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebatas hasil pada saat pengendalian tersebut mulai diperoleh atau hingga saat pengendalian atas entitas tersebut berakhir.

Dalam mencatat akuisisi entitas anak digunakan metode pembelian. Biaya akuisisi diukur sebesar nilai wajar aset yang diserahkan, saham yang diterbitkan atau liabilitas yang diambil alih pada tanggal akuisisi. Biaya transaksi, selain biaya yang berhubungan dengan penerbitan instrumen utang atau ekuitas yang ditanggung oleh Bank sehubungan dengan kombinasi bisnis, dibebankan pada saat terjadinya. Kelebihan biaya akuisisi atas nilai wajar aset neto entitas anak dicatat sebagai *goodwill* (Catatan 2q.i untuk kebijakan akuntansi atas *goodwill*).

Seluruh saldo dan transaksi yang signifikan termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi antar entitas dieliminasi untuk mencerminkan posisi keuangan dan hasil usaha Grup sebagai satu kesatuan usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk peristiwa dan transaksi sejenis dalam kondisi yang sama. Kebijakan akuntansi utama yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, telah diterapkan secara konsisten oleh entitas anak, kecuali dinyatakan lain.

Laba atau rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali. Seluruh penghasilan komprehensif diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan non-pengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan non-pengendali mempunyai saldo defisit.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

b. Principles of consolidation

The consolidated financial statements include the financial statements of the Bank and financial statements of its subsidiaries.

Control is achieved when the Bank is exposed, or has rights to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through the power it holds.

Where an entity either began or ceased to be controlled during the year, the results of operations of that entity included into the consolidated financial statements at limited to the period from when control is first obtained or up when control is lost.

The purchase method of accounting is used to account for the acquisition of subsidiary. The cost of an acquisition is measured at the fair value of the given up assets, shares issued or liabilities assumed at the date of acquisition. Transaction cost, excluding debt or equity instrument issuance cost which is borne by the Bank in relation with business combination, is charged to expense when incurred. The excess of the cost of acquisition over the fair value of the net assets of the subsidiary acquired is recorded as goodwill (Note 2q.i for the accounting policy on goodwill).

All significant intercompany balances and transactions, including unrealized gain/loss, are eliminated to reflect the financial position and results of operations of the Group as one business entity.

The consolidated financial statements are prepared using uniformed accounting policy for transactions and events in similar circumstances. The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the subsidiaries, unless otherwise stated.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest. Total comprehensive income is attributed to the equity holders of the parent entity and to the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

c. Penjabaran mata uang asing

i. Mata uang penyajian

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

ii. Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal-tanggal transaksi tersebut. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan kurs *spot* Reuters pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat ("WIB") yang berlaku pada tanggal tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi, kecuali apabila ditangguhkan pada bagian ekuitas sebagai lindung nilai arus kas yang memenuhi syarat.

Selisih penjabaran mata uang asing atas efek utang dan aset moneter keuangan lain yang diukur berdasarkan nilai wajar dicatat sebagai bagian dari keuntungan dan kerugian selisih kurs.

Berikut ini adalah kurs mata uang asing utama yang digunakan untuk penjabaran jumlah dalam mata uang asing ke dalam Rupiah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

2. Material Accounting Policy Information (continued)

c. Foreign currency translations

i. Presentation currency

The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Group.

ii. Transactions and balances

Transactions denominated in a foreign currency are converted into Rupiah using the spot rate at those transaction dates. At the reporting date, monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated using the reporting rate (closing) determined by Bank Indonesia based on the Reuters spot rate at 16.00 Western Indonesia Time ("WIB") prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currency and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognized in the profit or loss, except when deferred in equity as qualifying cash flow hedges.

Translation differences on debt marketable securities and other monetary financial assets measured at fair value are included in foreign exchange gains and losses.

Below are the major exchange rates used for translation of foreign currency amounts into Rupiah as at December 31, 2024 and 2023:

	2024	2023	
Poundsterling Inggris	20.219	19.626	Great Britain Poundsterling
Euro Eropa	16.758	17.038	European Euro
Dolar Amerika	16.095	15.397	United States Dollar
Dolar Singapura	11.845	11.676	Singapore Dollar
Dolar Australia	10.014	10.521	Australian Dollar
Yuan Cina	2.205	2.170	Chinese Yuan
Dolar Hong Kong	2.073	1.970	Hong Kong Dollar
Yen Jepang	103	109	Japanese Yen
Won Korea Selatan	11	12	South Korean Won

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan

Aset keuangan Grup terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, tagihan derivatif, surat-surat berharga, surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali, wesel ekspor dan tagihan lainnya, kredit yang diberikan dan pembiayaan piutang syariah, tagihan akseptasi, penyertaan saham, bunga yang masih akan diterima, dan aset lain-lain (setoran jaminan).

Liabilitas keuangan Grup terdiri dari liabilitas segera, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, liabilitas derivatif, surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, bunga yang masih harus dibayar, dan liabilitas lain-lain.

(i) Klasifikasi

Aset keuangan diklasifikasikan berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL);
- Diukur pada biaya diamortisasi; dan
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVTOCI).

Aset keuangan diklasifikasikan menjadi kategori tersebut di atas berdasarkan model bisnis dimana aset keuangan tersebut dimiliki, dan karakteristik arus kas kontraktualnya. Model bisnis merefleksikan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities

The Group's financial assets consist of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other banks, placements with Bank Indonesia and other banks, derivative receivables, marketable securities, marketable securities receivables purchased with agreements to resell, bills and other receivables, loans and sharia receivables financing, acceptances receivable, investments in shares, interest receivables, and other assets (guarantee deposit).

The Group's financial liabilities consist of liabilities immediately payable, deposits from customers, deposits from other banks, derivative payable, marketable securities sold with agreement to repurchase, acceptances payables, marketable securities issued, borrowings, interest payable, and other liabilities.

(i) Classification

Financial assets are classified into the following categories on initial recognition:

- Financial assets held at fair value through profit or loss (FVTPL);
- Amortized cost; and
- Financial assets held at fair value through other comprehensive income (FVTOCI).

Financial assets are classified into these categories based on the business model within which they are held, and their contractual cash flow characteristics. The business model reflects how groups of financial assets are managed to achieve a particular business objective.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan hanya dapat dikategorikan sebagai biaya perolehan diamortisasi jika instrumen dimiliki dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual *("hold to collect")*, dan dimana arus kas kontraktual tersebut semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI). Pokok merupakan nilai wajar dari instrumen pada saat pengakuan awal. Bunga dalam hal ini merupakan kompensasi untuk nilai waktu uang dan risiko kredit terkait beserta kompensasi untuk risiko lain dan biaya yang konsisten dengan persyaratan dalam peminjaman standar dan marjin laba. Kategori aset ini membutuhkan penilaian persyaratan kontraktual pada saat pengakuan awal untuk menentukan apakah kontrak mengandung persyaratan yang dapat mengubah waktu atau jumlah dari arus kas yang tidak konsisten dengan persyaratan SPPI.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual memiliki karakteristik SPPI, Grup mempertimbangkan persyaratan kontraktual atas instrumen tersebut. Hal ini termasuk dalam hal menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak dapat memenuhi kondisi SPPI. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*; dan
- Persyaratan pelunasan dipercepat atau perpanjangan fasilitas.

Aset dapat dijual dari *portofolio hold to collect* ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial assets can only be categorized at amortized cost if the instruments are held in order to collect the contractual cash flows ("hold to collect"), and where those contractual cash flows are solely payments of principal and interest (SPPI). Principal represents the fair value of the instrument at the time of initial recognition. Interest in this context represents compensation for the time value of money and associated credit risks together with compensation for other risks and costs consistent with a basic lending arrangement and a profit margin. This requires an assessment at initial recognition of the contractual terms to determine whether it contains a term that could change the timing or amount of cash flows in a way that is inconsistent with the SPPI criteria.

In assessing whether the contractual cash flows have SPPI characteristics, the Group considers the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet the SPPI condition. In making the assessment, the Group considers:

- Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;
- Leverage features; and
- Prepayment and extension terms.

Assets may be sold out of hold to collect portfolios when there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(i) Klasifikasi (lanjutan)

Aset keuangan berupa instrumen utang dimana tujuan model bisnis dicapai dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset ("*hold to collect and sell*") dan memiliki arus kas SPPI, diklasifikasikan sebagai FVTOCI, dengan laba rugi yang belum direalisasi ditangguhkan di pendapatan komprehensif lain sampai aset tersebut diberhentikan.

Seluruh aset keuangan lainnya akan dipersyaratkan diklasifikasikan sebagai FVTPL. Aset keuangan dapat ditetapkan sebagai FVTPL hanya jika ini dapat mengeliminasi atau mengurangi *accounting mismatch.*

Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

(ii) Pengukuran awal

a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal penyelesaian, seperti tanggal perusahaan berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu liabilitas keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk liabilitas keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(i) Classification (continued)

Financial asset debt instruments where the business model objectives are achieved by collecting the contractual cash flows and by selling the assets ("hold to collect and sell") and that have SPPI cash flows are held at FVTOCI, with unrealized gains or losses deferred in other comprehensive income until the asset is derecognized.

All other financial assets will mandatorily be classified as FVTPL. Financial assets may be designated as FVTPL only if it can eliminates or reduces an accounting mismatch.

Management determines the classification of its financial assets and liabilities at initial recognition.

(ii) Initial recognition

a. Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way purchases) are recognized on the settlement date, such as, the date that the companies commit to purchase or sell the assets.

b. Financial assets and liabilities are initially recognized at fair value. For the cases where financial assets and liabilities are not measured at fair value through profit or loss, the fair value is increased by transaction costs that can be directly attributed. The subsequent measurement of financial assets and liabilities depends on their classification.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional charge that would not occur if the financial instrument is not acquired or issued. For financial assets, transaction costs are added to the amount recognized in the initial recognition of the asset, while for financial liabilities, transaction costs are deducted from the amount of debt recognized on initial

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ii) Pengukuran awal (lanjutan)

jumlah utang yang diakui pada pengakuan awal liabilitas. Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan atau sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan liabilitas keuangan.

Grup, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

(iii) Pengukuran setelah pengakuan awal

a. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diukur pada nilai wajarnya.
b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

(iv) Penghentian pengakuan

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:

- Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ii) Initial recognition (continued)

recognition of a liability. The transaction costs are amortized over the terms of the instrument based on the effective interest rate method and recorded as part of interest income for transaction costs related to the financial asset or as part of interest expense for transaction costs related to financial liabilities.

The Group, upon initial recognition, may designate certain financial assets and liabilities, at fair value through profit or loss (fair value option). The fair value option is only applied when the following conditions are met:

- the application of the fair value option reduces or eliminates an accounting mismatch that would otherwise arise; or
- the financial assets and liabilities are part of a portfolio of financial instruments, the risks of which are managed and reported to key management on a fair value basis; or
- the financial assets and liabilities consist of a host contract and an embedded derivative that must be bifurcated, but unable to measure the embedded derivative separately.

(iii) Subsequent measurement

a. Fair value through other comprehensive income financial assets and financial liabilities measured at fair value through profit or loss are subsequently measured at fair value.
b. Financial assets and other financial liabilities which are measured at amortized cost, are measured at amortized cost using the effective interest method.

(iv) Derecognition

a. Financial assets are derecognized when:

- The contractual rights to receive cashflows from the financial assets have expired; or

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

a. Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika: (lanjutan)

- Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan pelepasan; dan
- antara (a) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau
- (b) Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, namun telah mentransfer kendali atas aset.

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau di bawah kesepakatan pelepasan, dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset dan masih memiliki pengendalian atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Grup yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Kredit yang diberikan atau aset keuangan lain dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit dalam waktu dekat atau hubungan normal dengan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

b. Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

a. Financial assets are derecognized when: (continued)

- The Group has transferred its rights to receive cash flows from the financial assets or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a pass through arrangement; and
- either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or
- (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all risks and rewards of the asset nor transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.

Loans or other financial assets are written off when there is no realistic prospect of collection in the near future or the normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When a loan is deemed uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses.

b. Financial liabilities are derecognized when they are extinguished, i.e. liabilities stated in the contract are released or cancelled or have expired.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(iv) Penghentian pengakuan (lanjutan)

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, seperti pertukaran atau modifikasi yang diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(v) Pengakuan pendapatan dan beban

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(iv) Derecognition (continued)

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income.

(v) Income and expense recognition

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest method.

The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(v) Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurun nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

(vi) Reklasifikasi aset keuangan

Grup mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi komprehensif.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(v) Income and expense recognition (continued)

For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income are recognized directly in the statement of comprehensive income (as part of equity) until the financial assets are derecognized or impaired, except for the gain or loss resulting from the change in exchange rates for debt instruments.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

(vi) Reclassification of financial assets

The Group reclassifies financial assets if and only if, the business model for managing financial assets changes.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value through profit or loss are recorded at fair value. The difference between the recorded value and fair value is recognized in profit or loss on the statement of profit or loss and other comprehensive income.

Reclassifications of financial assets from amortized cost classifications to fair value classifications through other comprehensive income are recorded at their fair values.

Reclassification of financial assets from fair value classification through other comprehensive income to fair value classification through profit or loss is recorded at fair value. Unrealized gains or losses are reclassified to profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(vi) Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dihapus dari ekuitas dan disesuaikan terhadap nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada wajar.

(vii) Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan dilakukan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontinjen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh Standar Akuntansi Keuangan.

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(vi) Reclassification of financial assets (continued)

Reclassifications of financial assets from fair value through other comprehensive income to the amortized cost is recorded at fair value at the date of reclassification. Unrealized gain or losses are removed from equity and are adjusted againts the fair value.

Reclassifications of financial assets from fair value through profit or loss to amortized cost classification is recorded at fair value.

(vii) Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is presented in the consolidated statement of financial position when, and only when, the Group has a legal right to offset the amounts and intends either to settle on a net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

The legal enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the company or the counterparty.

Income and expenses are presented on a net basis only when permitted by the Financial Accounting Standards.

(viii) Amortized cost measurement

The amortized cost of a financial asset or liability is the amount at which the financial asset or liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cummulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(viii) Pengukuran biaya diamortisasi (lanjutan)

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

(ix) Pengukuran nilai wajar

Nilai wajar suatu aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset dan liabilitas tersebut dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Nilai wajar atas pinjaman yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hierarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

- Level 1: harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- Level 2: input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- Level 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Metode dan asumsi signifikan yang digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan adalah sebagai berikut: (i) jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut, atau (ii) jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Grup menentukan nilai wajar dengan menggunakan model penilaian

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(viii) Amortized cost measurement (continued)

Fair value measurement assumes that transaction to sell assets or transfer a liability take place:

- in the principal market for the assets and liabilities; or
- in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

(ix) Fair value measurement

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when determining the price of the asset and liability assuming that market participants act in their own economic best interest.

The fair value for loans and receivables as well as liabilities to banks and customers are determined using a present value model on the basis of contractually agreed cash flows, taking into account credit quality, liquidity and costs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are classified within fair value hierarchy, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- Level 1: quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities accessible at the measurement date.
- Level 2: inputs other than quoted prices included in level 1 for the asset and liability, which is directly or indirectly observable.
- Level 3: unobservable inputs for the asset and liability.

The methods and significant assumptions used to determine the fair value of financial instruments are as follows: (i) where available, the Group measures the fair value of financial instruments using quoted prices in an active market for that instrument, or (ii) if the market is for a financial instrument is inactive, the Group determines fair value using valuation model that most appropriately reflects the nature,

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(ix) Pengukuran nilai wajar (lanjutan)

yang paling tepat mencerminkan sifat, karakteristik dan risiko dari masing-masing instrumen keuangan. Selain itu, ketika menggunakan harga kuotasian yang diperoleh dari pihak ketiga, Grup memverifikasi apakah harga tersebut valid dengan menggunakan metode yang tepat, seperti konfirmasi teknik penilaian dan input yang digunakan dan membandingkannya dengan nilai wajar instrumen keuangan serupa.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hierarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

(x) Investasi pada sukuk

Grup menerapkan PSAK 410 (Revisi 2020) "Akuntansi Sukuk". PSAK 410 ini mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi sukuk Ijarah dan sukuk mudharabah.

Pengakuan dan Pengukuran

Sebelum pengakuan awal, Grup menentukan klasifikasi investasi pada sukuk berdasarkan tujuan investasi Grup. Klasifikasi dalam investasi pada sukuk terdiri dari:

- Biaya perolehan

Apabila investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan terdapat persyaratan kontraktual dalam menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengukuran awal, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, investasi pada sukuk ini diukur pada nilai perolehan yang diamortisasi. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(ix) Fair value measurement (continued)

characteristics and risks of each financial instrument. In addition, when using quoted prices obtained from third parties, the Group verifies whether the prices are valid using appropriate methods, such as confirming the valuation techniques and inputs used and comparing them with the fair value of similar financial instruments.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, Group determines whether transfers have occured between levels in the hierarchy by re-assessing categorisation (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

(x) Investment in sukuk

The Group has applied SFAS 410 (Revised 2020) "Accounting for Sukuk". SFAS 410 establishes the recognition, measurement, presentation, and disclosures of sukuk Ijarah and sukuk mudharabah transactions.

Recognition and Measurement

Before the initial recognition, the Group determines the classification of investment in sukuk based on the purpose of the Groups' investment. The classification of investment in sukuk comprises of:

- Acquisition cost

If the investment is held within a business entity that aims to acquire assets in order to collect contractual cash flows and there is a contractual requirement to determine the specific date of principal payments and/or the result.

At the initial measurement, the investment is recorded at acquisition cost which includes the transaction cost. After the initial recognition, the investment in sukuk is measured at amortized cost. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the term of the sukuk instrument.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk (lanjutan)

- Nilai wajar melalui laba rugi

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan, namun harga perolehan tersebut tidak termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

- Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk dalam klasifikasi ini dicatat sebesar harga perolehan dan biaya perolehan ini termasuk biaya transaksi.

Setelah pengakuan awal, investasi diakui pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu instrumen sukuk dan diakui dalam laba rugi.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan mengacu pada hierarki sebagai berikut:

i. harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau
ii. input selain harga kuotasi yang termasuk dalam huruf (i).

Untuk investasi pada sukuk yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Penyajian

Pendapatan investasi dan beban amortisasi disajikan secara neto dalam laba rugi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk (continued)

- Fair value through profit or loss

At the initial recognition, the investment in sukuk in this classification is recorded at acquisition cost which does not include transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in profit or loss.

- Fair value through other comprehensive income

At initial recognition, the investment in sukuk in this classification is recorded at acquisition cost which includes transaction cost.

After initial recognition, the investment is recognized at fair value. The difference between fair value and recorded amount is recognized in other comprehensive income. The difference between acquisition cost and nominal value is amortized using straight line method during the term of the sukuk instrument and recognized in profit or loss.

Fair value on investment is determined according to following hierarchy:

i. quoted price (excluding any adjustment) in active market, or
ii. input other than quoted price included in letter (i).

For investment in sukuk classified as at acquistion cost and at fair value through other comprehensive income, if there is an indication of impairment, the Group measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than recorded amount, the Group recognizes the impairment losses. Recoverable amount represents the amount which will be recoverable from the principal repayment regardless of its present value.

Presentation

Investment income and amortization expense are presented in net amount in the profit or loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

d. Aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

(x) Investasi pada sukuk (lanjutan)

Reklasifikasi

Grup tidak dapat mengubah klasifikasi investasi, kecuali terdapat perubahan tujuan model usaha. Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Grup. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk mudharabah atau arus kas imbalan (ujrah) dari sukuk Ijarah. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Grup menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

e. Kas dan setara kas

Untuk tujuan penyajian laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri atas kas, giro pada Bank Indonesia, giro pada Bank lain, dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal perolehan yang tidak dijaminkan atau dibatasi penggunaannya.

f. Giro pada Bank Indonesia dan bank lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

g. Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

2. Material Accounting Policy Information (continued)

d. Financial assets and liabilities (continued)

(x) Investment in sukuk (continued)

Reclassification

The Group cannot change investment classification unless there is a change in the business model purpose. Business model that is intended to collect contractual cash flow is based on the investment purpose set by the Group. The underlying contractual cash flow is the cash flow from revenue sharing and principal of sukuk mudharabah or benefit cash flow (ujrah) from sukuk Ijarah. After initial recognition, if the actual differs from established investment objectives, the Group reassesses the consistency of its investment objectives.

e. Cash and cash equivalents

For consolidated statement of cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents consists of cash, current accounts with Bank Indonesia, current accounts with other Banks, and placements with Bank Indonesia and other Banks with original maturities of 3 (three) months or less from the acquisition date, which are not pledged as collateral or restricted for use.

f. Current accounts with Bank Indonesia and other banks

Current accounts with Bank Indonesia and other banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

g. Placements with Bank Indonesia and other banks

Placements with Bank Indonesia and other Banks are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

h. Surat-surat berharga

Surat-surat berharga terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), wesel ekspor, obligasi pemerintah, obligasi korporasi, dan efek utang lainnya.

Surat berharga syariah diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat berharga pada awalnya disajikan sebesar nilai wajar. Setelah pengakuan awal, surat berharga dicatat sesuai kategorinya, yaitu nilai wajar melalui laba rugi, pada biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran surat-surat berharga dinyatakan berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut:

1. Surat-surat berharga diukur pada nilai perolehan dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

   Aset dapat dijual dari portofolio diukur pada nilai perolehan ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak signifikan jumlahnya atau tidak sering.

2. Surat-surat berharga yang diklasifikasikan sebagai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dinyatakan pada nilai wajar. Pendapatan bunga diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif. Laba atau rugi selisih kurs atas surat-surat berharga diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

   Perubahan nilai wajar lainnya diakui langsung dalam ekuitas sampai surat-surat berharga dijual atau mengalami penurunan nilai, dimana akumulasi keuntungan dan kerugian yang sebelumnya diakui dalam ekuitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

h. Marketable securities

Marketable securities consist of Bank Indonesia Certificates (SBI), export bills, government bonds, corporate bonds, and other debt marketable securities.

Sharia marketable securities are classified as measured at amortized cost.

Marketable securities are initially measured at fair value. Subsequently, marketable securities are accounted according to their classification as fair value through profit or loss, measured at amortized cost and fair value through other comprehensive income.

Measurement of securities is stated based on the classification of the securities as follows:

1. Marketable securities measured at amortized cost are carried at amortized cost using the effective interest rate method.

   Assets may be sold out of amortized cost portfolios when there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be insignificant in value or infrequent in nature.

2. Marketable securities which are classified under fair value through other comprehensive income are stated at fair value. Interest income is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income using the effective interest method. Foreign exchange gains or losses on securities are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

   Other fair value changes are recognized directly in equity until the securities is sold or impaired, whereby the cumulative gains and losses previously recognized in the equity are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

h. Surat-surat berharga (lanjutan)

3. Surat-surat berharga dalam kategori nilai wajar melalui laba rugi dinyatakan pada nilai wajar.

   Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Pendapatan bunga dari surat-surat berharga dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sesuai dengan persyaratan dalam kontrak.

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (*reverse repo*) diakui sebesar harga jual kembali surat berharga yang bersangkutan dikurangi pendapatan bunga yang belum diamortisasi. Selisih antara harga beli dengan harga jual diperlakukan sebagai pendapatan bunga yang belum diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga sesuai dengan jangka waktu surat berharga dibeli hingga dijual kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Surat berharga yang dibeli tidak dibukukan sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena kepemilikan surat berharga tetap berada pada pihak penjual. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji untuk dijual kembali diklasifikasikan sebagai biaya perolehan yang diamortisasi.

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diakui sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi beban bunga yang belum diamortisasi. Beban bunga yang belum diamortisasi merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli kembali yang disepakati dan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak surat berharga dijual hingga dibeli kembali dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR). Surat berharga yang dijual tetap dicatat sebagai aset dalam laporan posisi keuangan konsolidasian karena secara substansi kepemilikan surat berharga tetap berada pada pihak Bank sebagai penjual.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

h. Marketable securities (continued)

3. Fair value through profit or loss marketable securities are carried at fair value.

   Unrealized gains or losses resulting from changes in fair values are recognized in the current year consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The interest income from marketable securities is recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income according to the terms of the contract.

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase

Securities purchased under agreements to resell (reverse repo) are recognized as a repo receivable in the amount of the resale price of the related securities, less unamortized interest. The difference between purchase price and the selling price is treated as unamortized interest and is recognized as interest income in accordance with the period since the securities are purchased until they are resold by using effective interest rate (EIR) method. The securities received are not recorded as assets on the consolidated statements of financial position because the ownership of the securities remains with the seller. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Marketables securities purchased under agreements to resell are classified as amortized cost.

Securities sold under repurchase (repo) agreements are recognized at the agreed repurchase price less unamortized interest. The unamortized interest represents the difference between the selling price and the agreed repurchase price and is recognized as interest expense during the period from the sale of securities to the date of repurchase by using Effective Interest Rate (EIR) method. The securities sold are recorded as assets on the consolidated statements of financial position because in substantially the ownership of the securities remains with the Bank as the seller.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

i. Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali dan surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (lanjutan)

Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

j. Instrumen derivatif

Instrumen keuangan derivatif (termasuk transaksi mata uang asing untuk tujuan pendanaan dan perdagangan) diakui sebesar nilai wajar pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Nilai wajar ditentukan berdasarkan harga pasar, model penentuan harga atau harga pasar instrumen lain yang memiliki karakteristik serupa. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Keuntungan atau kerugian yang terjadi dari perubahan nilai wajar kontrak derivatif yang tidak ditujukan untuk lindung nilai (atau tidak memenuhi kriteria untuk dapat diklasifikasikan sebagai lindung nilai) diakui dalam laba rugi tahun berjalan.

k. Kredit yang diberikan

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan diskonto atau premi pada saat akuisisi dan biaya transaksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif. Amortisasi diakui pada laba rugi. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Kredit yang diberikan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Kredit yang diberikan dalam pinjaman sindikasi ataupun penerusan kredit dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Grup.

Kredit sindikasi, kredit dalam rangka pembiayaan bersama, dan kredit penerusan dinyatakan sebesar pokok kredit sesuai dengan porsi risiko yang ditanggung oleh Bank.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

i. Marketable securities purchased with agreements to resell and marketable securities sold with agreements to repurchase (continued)

Marketable securities sold under repurchased agreement are classified as financial liabilities measured at amortized cost.

j. Derivative instruments

Derivative financial instruments (including foreign currency transactions for funding and trading) are recognized in the consolidated statement of financial position at their fair value. Fair value is determined based on quoted prices, pricing models or quoted prices of other instruments with similar characteristics. Derivatives are recorded as assets when the fair value is positive and liabilities when the fair value is negative.

Gain or loss as a result of fair value changes on a derivative contract not designated as a hedging instrument (or derivative contract that does not qualify as a hedging instrument) is recognized in the current year's profit or loss.

k. Loans

Loans are measured at amortized cost using the effective interest rate method, less allowance for impairment losses. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and transaction costs that are an integral part of effective interest rate. The amortization is recognized in the profit or loss. Allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

Loans are classified as amortized costs. Loans under syndication or channelling are stated at the principal amount equal to the risk portion assumed by the Group.

Syndicated, joint financing, and channeling loans are stated at the loan principal amount based on the risk participation by the Bank.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

k. Kredit yang diberikan (lanjutan)

Restrukturisasi kredit

Setelah syarat dan ketentuan kredit direnegosiasi, penurunan nilai diukur dengan menggunakan suku bunga efektif awal yang dihitung sebelum persyaratan dimodifikasi dan kredit tersebut tidak lagi dianggap "*past due*". Manajemen akan melakukan penelaahan ulang atas kredit yang direnegosiasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua kriteria terpenuhi dan pembayaran di masa yang datang akan terjadi. Evaluasi penurunan nilai individual atau kolektif akan terus dilakukan untuk kredit tersebut, mengikuti evaluasi penurunan nilai atas kredit.

Kerugian dari restrukturisasi kredit dengan cara konversi sebagian kredit yang diberikan menjadi saham atau instrumen keuangan lainnya, diakui hanya apabila nilai wajar penyertaan saham atau instrumen keuangan yang diterima dikurangi estimasi beban untuk menjualnya adalah kurang dari nilai tercatat kredit yang diberikan.

Kredit yang dihapusbuku

Kredit yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistis mengenai pengembalian kredit atau hubungan normal antara Grup dan debitur telah berakhir. Kredit yang tidak dapat dilunasi dihapusbukukan dengan mendebet cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas kredit yang telah dihapusbukukan sebelumnya dikreditkan ke cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

l. Pembiayaan/Piutang syariah

Termasuk dalam pembiayaan/piutang syariah adalah pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan piutang syariah.

Entitas anak Bank menerapkan PSAK 401 (Revisi 2016) tentang "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", PSAK 402 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Murabahah", PSAK 403 tentang "Akuntansi Salam", PSAK 404 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Istishna", PSAK 405 tentang "Akuntansi Mudharabah", PSAK 406 tentang "Akuntansi

2. Material Accounting Policy Information (continued)

k. Loans (continued)

Loan restructuring

After the terms of loans have been renegotiated, any impairment is measured using the original effective interest rate as calculated before the modification of terms and the loan is no longer considered "past due". Management continuously reviews renegotiated loans to ensure that all criteria are met and that future payments are likely to occur. The loans continue to be subject to an individual or collective impairment assessment, following the impairment assessment of loans.

Loss on loan restructuring which involves a conversion of loans into equity or other financial instruments in partial satisfaction of loans, is recognized only if the fair value of the equity or financial instruments received, reduced by estimated expenses to sell the equity or other financial instruments, is less than the carrying value of the loan.

Written-off loans

Loans are written-off when there is no realistic prospect of collection or when the Group's normal relationship with the borrowers has ceased to exist. When loans are deemed uncollectible, they are written-off against the related allowance for impairment losses. Subsequent recoveries are credited to the allowance for impairment losses in the consolidated statement of financial position.

l. Sharia financing/Receivables

Sharia financing/receivables include mudharabah financing, musyarakah financing, and sharia receivables.

The Bank's subsidiary implements SFAS 401 (Revised 2016) regarding "Sharia Financial Statements Presentation", SFAS 402 (Amendment 2016) regarding "Murabahah Accounting", SFAS 403 regarding "Salam Accounting", SFAS 404 (Amendment 2016) regarding "Istishna Accounting", SFAS 405 regarding "Mudharabah Accounting", SFAS 406

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

l. Pembiayaan/Piutang syariah (lanjutan)

Musyarakah", PSAK 407 (Amendemen 2016) tentang "Akuntansi Ijarah", PSAK 410 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk", Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI Revisi 2013) dan Standar Akuntansi Keuangan lain yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan untuk topik tersebut.

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan kerjasama antara entitas anak Bank sebagai pemilik dana dengan nasabah sebagai pelaksana usaha. Pembagian hasil keuntungan dari proyek tersebut dilakukan sesuai dengan nisbah (*pre-determined ratio*) yang telah disepakati bersama. Pembiayaan mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik modal (mitra musyarakah) untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan dengan nisbah pembagian hasil atau kerugian sesuai dengan kesepakatan atau secara proporsional sesuai kontribusi modal. Pembiayaan musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Piutang syariah adalah tagihan yang timbul dari transaksi berdasarkan akad-akad murabahah, istishna, qardh dan ijarah.

Piutang murabahah merupakan akad jual beli antara nasabah dan entitas anak Bank. Entitas anak Bank membiayai kebutuhan investasi nasabah yang dinilai dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Pembayaran atas piutang ini dilakukan dengan cara mengangsur dalam jangka waktu yang ditentukan. Piutang murabahah dinyatakan sebesar saldo piutang dikurangi dengan pendapatan marjin yang ditangguhkan dan cadangan kerugian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

l. Sharia financing/Receivables (continued)

regarding "Musyarakah Accounting", SFAS 407 (Amendment 2016) regarding "Ijarah Accounting", SFAS 410 (Revised 2015) "Accounting for Sukuk", Accounting Guidelines for Indonesian Sharia Banking (PAPSI Revised 2013) and other statement of Financial Accounting Standards established by the Indonesia Institute of Accountants relating to recognition, measurement, presentation, and disclosure for those topics.

Mudharabah financing represents joint financing between the Bank's subsidiary as a fund owner and customer as a business executor. Revenue sharing on the project or business is conducted in accordance with the agreed nisbah (pre-determined ratio). Mudharabah financing are stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Musyarakah financing is an agreement between the investors (musyarakah partners) to have a joint venture in a partnership with profit or loss sharing based on an agreement or proportionate capital contribution. Musyarakah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

Sharia receivables resulted from transactions based on murabahah, istishna, qardh and ijarah.

Murabahah receivables represent sale and purchase agreements between the borrowers and the Bank's subsidiary. The borrowers' investments are funded by the Bank's subsidiary valued at the main price increased with profit agreed by both parties. The financing facilities are repaid in installments over a certain period of time. Murabahah receivables are stated at their outstanding balance, net of deferred margin and allowance for losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

l. Pembiayaan/Piutang syariah (lanjutan)

Istishna merupakan akad penjualan antara nasabah dan produsen yang bertindak sebagai penjual. Berdasarkan akad tersebut, nasabah menugaskan produsen untuk membuat atau mengadakan barang sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan nasabah dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Entitas anak Bank membiayai nasabah untuk membeli barang dari produsen (penjual). Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Piutang istishna disajikan sebesar tagihan termin kepada pembeli dikurangi cadangan kerugian.

Qardh merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara nasabah dan entitas anak Bank, dengan ketentuan wajib untuk melunasi setelah jangka waktu tertentu. Pinjaman qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman qardh yang dilunasi, diakui sebagai pendapatan pada saat terjadinya. Pinjaman qardh dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

Pembiayaan Ijarah adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. Pembiayaan Ijarah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian.

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan

Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o).

Piutang pembiayaan konsumen entitas anak merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan cadangan kerugian penurunan nilai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

l. Sharia financing/Receivables (continued)

Istishna is a sales transaction between the customer and producer who acts as seller. Based on the contract, the customer orders the manufacturer to make or to supply goods ordered to the specifications required by the customer and to sell to the customer at an agreed price. The Bank's subsidiary finances the customer to buy from the producer (seller). The payment method may be in advance, installment or deferred until a certain period. Istishna receivables are presented based on the outstanding billing less allowance for losses.

Qardh is a fund supply or receivables which can be equalized based on the approval or agreement between the customer and the Bank's subsidiary, with the requirement for repayment after a certain period. Qardh is recognized at the amount of funds granted when incurred. The excess of qardh settlement is recognized as income when incurred. Qardh is stated at its outstanding balance net of allowance for losses.

Ijarah financing is an agreement between the lessor and lessee to receive income on leased item. Ijarah financing is stated at their outstanding balance net of allowance for losses.

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables

Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. Allowance for impairment loss is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o).

The subsidiary's consumer financing receivables are presented net of unearned consumer financing income and allowance for impairment losses.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Piutang Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan konsumen. Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dicatat sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif.

Selisih neto antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian pembiayaan konsumen ditandatangani dan beban-beban yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan tagihan pembiayaan konsumen ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil pembiayaan konsumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari pendapatan bunga pada laba rugi tahun berjalan.

Pelunasan sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diperlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan atau kerugian yang timbul diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Piutang Sewa Pembiayaan

Penentuan apakah suatu perjanjian merupakan perjanjian sewa atau perjanjian yang mengandung sewa didasarkan atas substansi perjanjian pada tanggal awal sewa dan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada penggunaan suatu aset dan perjanjian tersebut memberikan suatu hak untuk menggunakan aset tersebut. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables (continued)

Consumer Financing Receivables (continued)

Unearned consumer financing income is the excess of the aggregate installment payments to be received from the consumer over the principal amount financed. The unearned consumer financing income is recognized as income over the term of the respective agreement using effective interest rate method.

The net difference between the administration income earned from the consumer at the first time the consumer financing agreement is signed and the initial incremental costs directly related to consumer financing facility is deferred and recognized as an adjustment to the yield received throughout the consumer financing period using effective interest rate method and presented as part of interest income in the current year's profit or loss.

Termination before consumer financing period end is treated as a cancellation of an existing contract and the resulting gain or loss is recognized in the current year's profit or loss.

Leases Financing Receivables

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date and whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset and the arrangement conveys a right to use the asset. Leases are classified as finance leases if the leases transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Leases are classified as operating leases if the leases do not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

m. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan (lanjutan)

Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Entitas anak mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah yang sama dengan investasi sewa neto. Penerimaan piutang sewa diperlakukan sebagai pembayaran pokok dan penghasilan sewa pembiayaan. Pengakuan penghasilan sewa pembiayaan didasarkan pada suatu pola yang mencerminkan suatu tingkat pengembalian periodik yang konstan atas investasi neto. Entitas anak bertindak sebagai lessor dalam sewa pembiayaan.

n. Tagihan dan liabilitas akseptasi

Tagihan akseptasi konsumen pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk jika terdapat bukti objektif penurunan nilai (Catatan 2o). Liabilitas akseptasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai.

Cadangan atas kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan atas kerugian ekspektasian sepanjang umur aset (*the lifetime expected credit loss*), kecuali tidak terdapat kenaikan yang signifikan dalam risiko kredit sejak awal, di mana dalam hal ini, cadangan adalah berdasarkan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan.

Kerugian yang diharapkan sepanjang umur aset dan kerugian kredit ekspektasian dalam jangka waktu 12 bulan dihitung baik secara individual maupun kolektif, tergantung kepada sifat portofolio instrumen keuangan yang mendasarinya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

m. Consumer financing receivables and leases financing receivables (continued)

Leases Financing Receivables (continued)

The subsidiary recognizes assets held under a financing lease in its statement of financial position and presented them as a receivable at an amount equal to the net investment in the lease. Payment of the lease receivable is treated as repayment of principal and financing lease income. The recognition of financing lease income is based on a pattern reflecting a constant periodic rate of return on the subsidiary's net investment in the financing lease. The subsidiary acts as a lessor in finance leases.

n. Acceptances receivable and payable

Acceptances receivable are initially measured at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at their amortized cost using the effective interest rate method. The allowance for impairment losses is provided if there is an objective evidence of impairment (Note 2o). Acceptances payable are measured at amortized cost using effective interest rate method.

o. Impairment of financial and non-financial assets

Impairment of Financial Assets

The Group assess whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired at each consolidated statement of financial position date.

The expected credit loss allowance is based on the credit losses expected to arise over the life of the asset (the lifetime expected credit loss), unless there has been no significant increase in credit risk since origination, in which case, the allowance is based on the 12 months expected credit loss.

Both the lifetime expected credit loss and 12 months expected credit loss are calculated on either an individual basis or a collective basis, depending on the nature of the underlying portfolio of financial instruments.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup menghitung kerugian kredit ekspektasian berdasarkan tiga skenario yang tertimbang menurut kemungkinan terjadinya untuk mengukur kekurangan kas yang diharapkan, didiskontokan pada suatu estimasi terhadap suku bunga efektif. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang harus dibayar kepada suatu entitas berdasarkan kontrak dan arus kas dari entitas bersangkutan yang diharapkan untuk diperoleh.

Grup telah menyusun suatu kebijakan untuk melakukan suatu penilaian, pada akhir setiap periode pelaporan, mengenai apakah risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan, dengan mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur manfaat instrumen keuangan.

Grup menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup);
- Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Grup;
- Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Impairment of Financial Assets (continued)

The Group calculates expected credit loss based on three probability-weighted scenarios to measure the expected cash shortfalls, discounted at an approximation to the effective interest rate. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to an entity in accordance with the contract and the cash flows that the entity expects to receive.

The Group has established a policy to perform an assessment, at the end of each reporting period, of whether a financial instruments credit risk has increased significantly since initial recognition, by considering the change in the risk of default occurring over the remaining life of the financial instrument.

The Group considers debt instruments to have low credit risk when the credit risk rating is at par with the globally understood definition of investment grade.

Measurement of expected credit losses

Expected Credit Loss is an estimate of the weighted probability of a credit loss measured as follows:

- Financial assets that do not deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the present value of all cash shortages (i.e. the difference between the cash flows owed to the Group in accordance with the contract and the cash flows expected to be received by the Group);
- Financial assets that deteriorate at the reporting date, the expected credit loss is measured at the difference between the gross carrying amount and the present value of estimated future cash flows;
- For undisbursed loan commitments, expected credit losses are measured at the difference between the present value of the amount of cash flow if the commitments is withdrawn and the cash flow expected to be received by the Group;
- For financial guarantee contracts, expected credit losses are measured at the difference between the estimated payments to replace the holder for the credit losses incurred less the amount estimated to be recoverable.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang direstrukturisasi

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuannya. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

Aset keuangan yang memburuk

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk).

Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:
- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Restructured financial assets

If the terms of the financial assets are renegotiated or modified or the existing financial assets are replaced with new ones due to the borrower's financial difficulties, an assessment is made whether recognition of existing financial assets must be derecognized and expected credit losses measured as follows:
- If the restructuring does not result in the termination of recognition of existing assets, then the estimated cash flows arising from the modified financial assets are included in the calculation of cash shortages of existing assets.

- If the restructuring will result in a derecognition of the existing assets, the fair value of the new asset is treated as the final cash flow of the existing financial assets at the time of derecognition. This amount is included in the calculation of cash shortages from existing financial assets which are discounted from the date of derecognition to the reporting date using the initial effective interest rate of the existing financial assets.

Credit-impaired financial assets

At each reporting date, the Group assess whether the financial assets recorded at amortized cost and the financial assets of debt instruments which are recorded at fair value through other comprehensive income are credit- impaired (worsening).

Financial assets deteriorate when one or more events that have an adverse effect on the estimated future cash flows of the financial assets have occurred.

Evidence that financial assets become credit impaired (worsening) including observable data regarding the following events:

- Significant financial difficulties experienced by the issuer or the borrower;
- Breach of contract, such as a default or arrears;
- The lender, for economic or contractual reasons in relation to the financial difficulties experienced by the borrower, has given concessions to the borrower which is not possible if the borrower does not experience such difficulties;

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Aset keuangan yang memburuk (lanjutan)

- Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
- Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau
- Pembelian atau penerbitan aset keuangan dengan diskon sangat besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Aset Keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (*Purchased or originated credit- impaired financial assets - POCI*)

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada cadangan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai bagian dari cadangan kerugian penurunan nilai.

Penyajian cadangan kerugian kredit ekspektasian dalam laporan posisi keuangan

Cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, cadangan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian cadangan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Credit-impaired financial assets (continued)

- It is probable that the borrower will enter bankruptcy or the other financial reorganization;
- Loss of an active market for financial assets due to financial difficulties; or
- Purchase or issuance financial asset at significant discount which reflect the credit loss that occurs.

Purchased or originated credit - impaired financial assets - (POCI)

Financial assets are catergorized as POCI if there is objective evidence of impairment at initial recognition. At initial recognition, no allowance for credit losses is recognized because the purchase price or value has included lifetime estimated credit losses. Furthermore, changes in lifetime credit losses, whether positive or negative, are recognized in the consolidated statement of profit or loss as part of the allowance for impairment losses.

Presentation of allowance for expected credit losses in statements of financial position

Allowance for expected credit losses is presented in the consolidated statement of financial positions as follows:

- Financial assets measured at amortized cost, allowance for expected credit losses is presented as a deduction from the gross carrying amount of the asset;
- Loan commitments and financial guarantee contracts, allowance for expected credit losses is presented as a provision;
- Debt instruments measured at fair value through other comprehensive income, allowance for expected credit losses are not recognized in the statement of financial position because the carrying amounts of these assets are at their fair values. However, allowance for expected credit losses is disclosed and recognized in other comprehensive income.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Perhitungan penurunan nilai secara individual

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

Perhitungan penurunan nilai secara kolektif

Bank menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:
- Pinjaman yang diberikan yang secara Individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan

Ketika pinjaman yang diberikan tidak tertagih, pinjaman yang diberikan tersebut dihapusbuku dengan menjurnal balik cadangan kerugian penurunan nilai. Pinjaman yang diberikan tersebut dapat dihapusbuku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun berjalan dikreditkan dengan menyesuaikan akun cadangan kerugian penurunan nilai. Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan pada tahun sebelumnya dicatat sebagai pendapatan operasional selain pendapatan bunga.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank menerapkan Peraturan OJK No. 40/POJK.03/ 2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

Untuk aset keuangan entitas anak berdasarkan prinsip Perbankan Syariah, entitas anak Bank menerapkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah" yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2015.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Individual impairment calculation

The Bank determines that loans should be evaluated for impairment through individual evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have significant value; or
- Restructured loans which individually have significant value.

Collective impairment calculation

The Bank determines loans to be evaluated for impairment through collective evaluation if one of the following criterias is met:

- Loans which individually have insignificant value; or

- Restructured loans which individually have insignificant value.

Recoveries of written-off financial assets

When a loan is uncollectible, it is written-off against the related allowance for impairment loss. Such loans are written-off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

The recoveries of written-off financial assets in the current year are credited by adjusting the allowance for impairment losses accounts. Recoveries of written-off financial assets from previous years are recorded as operational income other than interest income.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Bank implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

For the financial assets of subsidiary under Sharia Banking principles, the Bank's subsidiary applies Financial Services Authority regulation ("POJK") No. 16/POJK.03/2014 dated November 18, 2014 regarding "Asset Quality Assessment of Sharia Bank and Sharia Business Unit" effective starting January 1, 2015.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Berdasarkan peraturan tersebut, entitas anak Bank wajib membentuk cadangan kerugian sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Khusus untuk piutang murabahah yang merupakan pembiayaan, entitas anak Bank mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai dan mengakui kerugian penurunan nilai sesuai dengan PSAK 402 (Revisi 2013) yang mengacu pada PSAK 239 (Revisi 2014), sedangkan cadangan kerugian aset produktif lainnya dibentuk sebagai berikut:

Klasifikasi	Persentase minimum cadangan kerugian/ *Minimum percentage of allowance for losses*	Classification
Lancar	1%	Current
Dalam perhatian khusus	5%	Special mention
Kurang lancar	15%	Sub-standard
Diragukan	50%	Doubtful
Macet	100%	Loss

Cadangan khusus dibentuk atas aset produktif yang di klasifikasikan sebagai dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet, dihitung atas nilai aset produktif setelah dikurangi dengan nilai agunan.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Nilai tercatat dari aset yang bukan aset keuangan Grup, kecuali aset pajak tangguhan, ditelaah setiap tanggal pelaporan untuk menentukan apakah terdapat indikasi penurunan nilai. Jika indikasi tersebut ada, maka nilai yang dapat dipulihkan dari aset tersebut akan diestimasi.

Jumlah yang dapat dipulihkan dari suatu aset atau Unit Penghasil Kas (UPK) adalah sebesar jumlah yang lebih tinggi antara nilai pakainya dan nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual. Dalam menentukan nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini terhadap nilai kas kini dan risiko spesifik terhadap aset tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets (continued)

Based on the regulation, the Bank's subsidiary is required to provide an allowance for losses based on prevailing financial accounting standards. Specifically for murabahah receivables that represents financing, the Bank's subsidiary evaluates whether there is objective evidence of impairment and recognizes the impairment losess based on SFAS 402 (Revised 2013) which referring to SFAS 239 (Revised 2014), while the allowance for losses for other earning assets is provided as follows:

Specific allowance for earning assets on earning assets classified as special mention, sub-standard, doubtful, and loss, is calculated based on principal of the earning assets after deducting the value of collateral.

Impairment of Non-financial assets

The carrying amounts of the Group's non-financial assets, other than deferred tax assets, are reviewed at each reporting date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication exists then the asset's recoverable amount will be estimated.

The recoverable amount of an asset or Cash Generating Unit (CGU) is greater of its value in use and its fair value less cost to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessment of the time value of money and the risk specific to the assets.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

o. Penurunan nilai aset keuangan dan non-keuangan (lanjutan)

Penerimaan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan (lanjutan)

Penyisihan penurunan nilai diakui jika nilai tercatat dari suatu aset atau UPK melebihi nilai yang dapat diperoleh kembali. Penyisihan penurunan nilai diakui pada laba rugi tahun berjalan. Penyisihan penurunan nilai yang diakui sehubungan dengan UPK akan dialokasikan pertama kali untuk mengurangi nilai tercatat dari *goodwill* yang dialokasikan ke UPK dan kemudian mengurangi nilai tercatat dari aset lainnya di dalam unit tersebut (kelompok unit) secara pro rata.

Penyisihan penurunan nilai sehubungan dengan *goodwill* tidak dapat dijurnal balik. Sehubungan dengan aset lainnya, penyisihan penurunan nilai yang diakui pada tahun sebelumnya dinilai pada setiap tanggal pelaporan untuk melihat adanya indikasi bahwa kerugian telah menurun atau tidak ada lagi. Kerugian penurunan nilai dijurnal balik jika terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan nilai yang dapat dipulihkan.

Sehubungan dengan kepatuhan terhadap Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Grup menerapkan Peraturan OJK No. 40/ POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang "Penilaian Kualitas Aset Bank Umum".

p. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa

Grup menerapkan kebijakan akuntansi model revaluasi untuk aset tetap berupa tanah. Untuk aset tetap selain tanah menggunakan model biaya. Sebelum 1 Maret 2016, tanah disajikan sebesar biaya perolehan.

Tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian terhadap tanah dilakukan oleh penilai independen eksternal yang memiliki sertifikasi. Penilaian dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

o. Impairment of financial and non-financial assets (continued)

Recoveries of written-off financial assets (continued)

An impairment loss is recognized if the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount. Impairment losses are recognized in the current year's profit or loss. Impairment losses in respect of CGUs are allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the CGU and then to reduce the carrying amount of the other assets in the units (group of units) on a pro rate basis.

An impairment losses in respect of goodwill can not be reversed. In respect of other assets, impairment losses recognized in prior period are assessed at each reporting date for any indications that the losses has decreased or no longer exists. An impairment loss is reversed if there has been change in the estimates used to determine the recoverable amount.

In compliance with Financial Service Authority (OJK), the Group implements OJK Regulation No. 40/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 about "Assessment of Commercial Banks' Asset Quality".

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities

The Group applies revaluation model as accounting policy for land. For fixed assets other than land, cost model is applied. Prior to March 1, 2016, land is stated at cost.

Lands are stated at fair value. Valuation of lands is performed by external independent valuers with certain qualification. Valuation is performed with sufficient regularity to ensure that the fair value of a revalued asset does not differ materially from its carrying amount.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu direvaluasi secara tahunan, sedangkan jika nilai wajar dari aset yang direvaluasi tidak mengalami perubahan yang signifikan dan fluktuatif, maka perlu dilakukan revaluasi sekurang-kurangnya 3 tahun sekali.

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi tanah dicatat sebagai "Surplus revaluasi aset" dan disajikan sebagai "penghasilan komprehensif lain". Penurunan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi dicatat sebagai beban pada tahun berjalan. Apabila aset tersebut memiliki saldo "Surplus revaluasi aset", maka selisih penurunan nilai tercatat tersebut dibebankan terhadap "Surplus revaluasi aset" dan sisanya diakui sebagai beban tahun berjalan.

Grup melakukan revaluasi untuk tujuan akuntansi dan pajak. Jumlah pajak yang telah dibayar diakui di penghasilan komprehensif lain dan surplus revaluasi aset di ekuitas.

Aset tetap, kecuali tanah yang tidak disusutkan, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line*) selama estimasi manfaat aset tersebut sebagai berikut:

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

If the fair value of the revalued asset change significantly and fluctuates, it is necessary to revaluate on an annual basis, whereas if the fair value of the revaluated asset does not change significantly and fluctuates, it is necessary to revaluate at a minimum of every 3 years.

Increase in the carrying amount arising from revaluation of land is recorded in "Asset revaluation surplus" and presented as "other comprehensive income". Decrease in carrying amount as the result of revaluation is recorded as expense in the current year. If the asset has "Asset revaluation surplus", loss from revaluation of asset is charged to "Asset revaluation surplus" balance and the remaining balance is charged to current year's expenses.

The Group conducts revaluation for accounting and tax purposes. The related tax paid is recognized in other comprehensive income and asset revaluation surplus in equity.

Fixed assets, except land which is not depreciated, are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses. Depreciation is computed using the straight line method over the expected useful lives as follows:

	Tahun/*Years*	
Bangunan	20	Buildings
Perabot dan peralatan kantor	4 - 8	Furniture, fixtures, and office equipment
Kendaraan bermotor	4 - 8	Motor vehicles
Prasarana bangunan	sesuai masa sewa mana yang lebih rendah dibandingkan umur ekonomis/ *based on the lease period whichever is shorter of economic life*	Leasehold improvement

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya, pemugaran dan penambahan dalam jumlah signifikan dikapitalisasi apabila kemungkinan besar Grup akan mendapatkan manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut yang melebihi standar kinerja yang diperkirakan sebelumnya. Biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aset tetap yang

The cost of repairs and maintenance is charged to profit or loss as incurred. Significant renewals and betterments are capitalized when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing assets will flow to the Group. When assets are retired or otherwise disposed of, their costs and the related accumulated depreciations are removed from the accounts and any resulting gain or loss

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

bersangkutan dan laba atau rugi yang terjadi dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan.

Biaya-biaya sehubungan dengan pengurusan perpanjangan hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi sepanjang umur hak atas tanah.

Aset dalam konstruksi merupakan aset yang masih dalam proses penyelesaian dan belum siap untuk digunakan, serta dimaksudkan untuk dipergunakan dalam kegiatan usaha. Aset ini dicatat sebesar biaya yang telah terjadi.

Estimasi masa manfaat ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu dikaji ulang pada setiap akhir periode pelaporan dan disesuaikan secara prospektif.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) diperhitungkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Grup melakukan penelaahan pada akhir tahun untuk menentukan adanya indikasi terjadinya penurunan nilai aset. Grup menghitung taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali atas nilai semua aset yang dimiliki apabila terdapat situasi atau keadaan yang memberikan indikasi terjadinya penurunan nilai aset dan mengakuinya sebagai rugi penurunan nilai dalam laba rugi tahun berjalan.

Bila nilai tercatat suatu aset melebihi taksiran jumlah yang dapat diperoleh kembali maka nilai tercatat tersebut diturunkan ke jumlah yang dapat diperoleh kembali tersebut, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual neto dan nilai pakai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

is reflected in the current year's consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

The expenses incurred in relation with the extension of land right are deferred and amortized over the term of the land rights.

Assets under construction represents assets in progress of construction and not yet ready for use, and intended to be used in business activity. The assets are recorded based on the incurred cost.

Estimated useful lives, depreciation method, and residual value are reviewed at end of each reporting period and adjusted prospectively, if appropriate.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the consolidated statements of profit and other comprehensive income in the period such asset is derecognized.

The Group conducts a review at the end of the year to determine whether there are indications of asset impairment. The Group calculates the estimated recoverable amount of all their assets and determines if there is a decrease in the value of the assets and recognize an impairment loss on such assets to the current year's profit or loss.

When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written-down to its estimated recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa

Pada tanggal permulaan kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Grup dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- sewa dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan dan tidak terdapat opsi beli; dan
- sewa atas aset dengan nilai rendah.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Grup harus menilai apakah:

- Grup memiliki hak untuk mengoperasikan aset; dan
- Grup telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Grup mengakui liabilitas sewa sebesar jumlah pembayaran sewa yang masih harus dibayar hingga akhir masa sewa yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Sedangkan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dibayarkan, biaya pemulihan dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Pembayaran sewa juga termasuk harga eksekusi opsi pembelian yang wajar jika dipastikan akan dilakukan oleh Grup dan pembayaran penalti untuk mengakhiri sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup mengeksekusi opsi penghentian sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga diakui sebagai beban pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran terjadi.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities

At the inception of the contract, the Group assess whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Group can choose not to recognized the right-use-passets and lease liabilities for:

- leases with a term of less or equal to 12 months and there is no purchase option; and
- leases of low value assets.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Group shall assess whether:

- The Group has the right to operate the assets; and
- The Group has designed the assets in a way that predetermine how and for what purpose it will be used during their period of use.

The Group recognizes lease liabilities at the amount of lease payments accrued to the end of the lease term which discounted using the incremental borrowing rate. Meanwhile, the right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs paid, restoration costs and lease payments on or before the start date of the lease, less lease incentives received.

Lease payments also include the reasonable exercise price for the purchase option if it is determined to be made by the Group and the payment of a penalty to terminate the lease, if the lease term reflects the Group exercising the lease termination option. Variable lease payments that are not depedent on an index or interest rate are recognized as an expense in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

p. Aset tetap, aset hak guna, dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna dan liabilitas sewa (lanjutan)

Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama jangka waktu yang lebih pendek antara masa sewa dengan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa dialihkan ke Grup pada akhir masa sewa atau pembayaran sewa mencerminkan pelaksanaan opsi pembelian, penyusutan dihitung menggunakan estimasi masa manfaat ekonomis aset. Aset hak guna diuji penurunan nilainya sesuai dengan PSAK 236 "Penurunan Nilai Aset".

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya sewa, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan pertambahan bunga dan dikurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, jumlah tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa, atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Sewa jangka pendek (dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 12 bulan) dan sewa aset bernilai rendah, serta elemen-elemen sewa tersebut, sebagian atau seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip pengecualian pengakuan yang ditentukan oleh PSAK 116. Grup akan mengakui pembayaran sewa tersebut dengan dasar garis lurus selama masa sewa dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Beban ini dicatat pada beban umum dan administrasi dalam laporan laba rugi.

q. Aset takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari *goodwill* dan piranti lunak.

Aset takberwujud diakui jika, dan hanya jika, biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara andal dan kemungkinan besar Grup akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

p. Fixed assets, right-of-use and lease liabilities (continued)

Right-of-use assets and lease liabilities (continued)

Right-of-use asset are depreciated using the straight-line method over the shorter period between the lease term and the estimated useful life of the asset.

If the ownership of lease asset is transferred to the Group at the end of the lease term or the lease payments reflect the exercise of the purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets. Right-of-use assets are tested for impairment in accordance with SFAS 236 "Impairment of Asset".

In calculating the present value of lease payments, the Group uses the lessee's incremental borrowing rate at the inception date of the lease since the interest rate implicit in the lease cannot be determined. After the inception date of the lease, the amount of the lease liability is increased to reflect the increase in interest and reduce the lease payments made. Furthermore, the lease liabilities carrying amount is remeasured if there are modifications, changes in term of the lease, lease payments, or the valuation of the option to purchase the underlying asset.

Short-term leases (with term of less or equal to 12 months) and leases of low-value assets, and elements of those leases, partially or entirely applying the recognition principles will follow the recognition exemption stipulated by SFAS 116. The Group will recognize these lease payments on a straight-line basis during the lease period on the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. This expense is recorded under general and administrative expenses in profit or loss.

q. Intangible assets

Intangible assets consist of goodwill and softwares.

Intangible assets are recognized if, and only if when its cost of the asset can be measured reliably and it is probable that expected future benefits that are attributable to such assets will flow to the Group.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

q. Aset takberwujud (lanjutan)

i. *Goodwill*

Goodwill merupakan selisih lebih antara harga perolehan investasi dan bagian Bank atas nilai wajar aset neto entitas anak pada tanggal akuisisi. Kerugian yang menjadi bagian dari kepentingan non-pengendali pada suatu entitas anak yang melebihi bagiannya dalam modal disetor pada tanggal akuisisi, diperhitungkan sebagai bagian dari *goodwill.*

Goodwill diukur sebesar nilai tercatat dikurangi dengan akumulasi penurunan nilai seperti diungkapkan pada Catatan 2o.

ii. Piranti Lunak

Piranti lunak yang bukan merupakan bagian integral dari perangkat keras yang terkait dicatat sebagai aset takberwujud dan dinyatakan sebesar nilai tercatat, yaitu sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi.

Pengeluaran selanjutnya untuk piranti lunak akan dikapitalisasi hanya jika pengeluaran tersebut menambah manfaat ekonomis aset yang bersangkutan dimasa datang. Semua pengeluaran lainnya dibebankan saat terjadinya.

Piranti lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama estimasi masa manfaat ekonomis aset yaitu 4 (empat) tahun. Amortisasi dimulai ketika aset tersedia untuk digunakan.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebagai selisih antara hasil neto pelepasan, jika ada, dan jumlah tercatat aset.

Keuntungan atau kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

q. Intangible assets (continued)

i. Goodwill

Goodwill represents the difference between the acquisition cost of an investment and the Bank's share of the fair value of the net assets of the subsidiary as at the date of acquisition. The losses applicable to the non-controlling interest in a subsidiary that exceed its interests in the equity of the subsidiary at the acquisition date, is calculated as part of goodwill.

Goodwill is measured at carrying value less accumulated impairment losses as disclosed in Note 2o.

ii. Softwares

Software that is not an integral part of a related hardware is recorded as intangible asset and stated at carrying amount, which is cost less accumulated amortization.

Subsequent expenditure on software is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the specific asset to which it relates. All other expenditure is expensed as inccured.

Software is amortized using straight-line method over the estimated useful life of software, which is 4 (four) years. Amortization is recognized from the date when the asset is available for use.

An intangible asset shall be derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. The gain or loss arising from the derecognition of an intangible asset shall be determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the asset.

The gain or loss shall be recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the asset is derecognized.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

r. Aset lain-lain

Aset lain-lain antara lain terdiri dari uang muka, biaya dibayar dimuka, bunga masih akan diterima, agunan yang diambil alih, dan lain-lain.

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai terendah antara nilai tercatat kredit yang diberikan atau nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih. Nilai realisasi neto adalah nilai wajar agunan yang diambil alih dikurangi dengan estimasi biaya untuk menjual agunan tersebut. Selisih lebih saldo kredit di atas nilai realisasi neto dari agunan yang diambil alih dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan.

Beban-beban yang berkaitan dengan pemeliharaan agunan yang diambil alih dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatat agunan yang diambil alih dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi tahun berjalan.

s. Liabilitas segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Grup yang harus segera dibayarkan kepada pihak lain berdasarkan kontrak atau perintah dari pihak yang mempunyai kewenangan untuk itu. Liabilitas segera diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

t. Simpanan nasabah

Giro, tabungan dan deposito berjangka diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan nasabah dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

r. Other assets

Other assets consist of advance payments, prepaid expenses, interests receivable, foreclosed assets, and others.

Foreclosed assets are stated at net realizable value or at loan outstanding amount, whichever is lower. Net realizable value is the fair value of the foreclosed assets less estimated costs of liquidating the assets. The excess of loan receivable over the net realizable value of the foreclosed assets is charged to the allowance for impairment losses.

The difference between the value of the foreclosed assets and the proceeds from the sale of such properties is recorded as gain or loss at the time of sale.

Expenses for maintaining foreclosed assets are charged in the profit or loss as incurred.

The carrying amount of the foreclosed assets is written-down to recognize a permanent decline in value of the foreclosed assets. Any such write-down is charged to the current year's profit or loss.

s. Liabilities immediately payable

Liabilities immediately payable represent obligations to third parties based on contract or order by those having authority that have to be settled immediately. Liabilities immediately payable are measured at their amortized cost using effective interest rate method.

t. Deposits from customers

Demand deposits, savings deposits and time deposits are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from customers and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

u. Simpanan syariah

Simpanan syariah terdiri dari giro wadiah, tabungan wadiah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA), tabungan dan deposito berjangka mudharabah.

Giro wadiah merupakan titipan dana pihak ketiga yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Giro wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di entitas anak Bank.

Tabungan wadiah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan bonus berdasarkan kebijakan entitas anak Bank. Tabungan wadiah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di entitas anak Bank.

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh bank syariah atau Unit Usaha Syariah yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dengan akad mudharabah.

Tabungan mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang mendapatkan imbal bagi hasil atas penggunaan dana sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan dan disetujui sebelumnya.

Deposito berjangka mudharabah merupakan simpanan pihak lain yang hanya dapat ditarik pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito dengan entitas anak Bank. Deposito berjangka mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal.

v. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik dalam maupun luar negeri, dalam bentuk tabungan, giro, *interbank call money* yang jatuh tempo menurut perjanjian tidak lebih dari 90 hari, dan deposito berjangka.

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang diakui pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, pada pengakuan awal dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal simpanan dari bank lain dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

u. Sharia deposits

Sharia deposits consist of wadiah demand deposits, wadiah savings deposits, Certificate of Inter Bank Mudharabah Investment (SIMA), mudharabah savings and time deposits.

Wadiah demand deposits represent entrusted third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah demand deposits are stated at the amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

Wadiah savings deposits represent third party funds which earn bonus based on the subsidiary of the Bank's policy. Wadiah savings deposits are stated at the investment amounts due to the depositors in Bank's subsidiary.

The Interbank Mudharabah Investment Certificate (IMA certificate) is defined as a certificate issued by a sharia bank or Sharia Business Unit which is used as a means of short-term investment in Interbank Money Market Based on Sharia Principles. (PUAS) with a mudharabah contract.

Mudharabah savings deposits represent third party funds which earn profit sharing in return for utilization of funds in accordance with pre-determined and pre-approved revenue sharing (nisbah).

Mudharabah time deposits represent deposits from third parties which can be withdrawn only at specified dates based on the agreement between the depositors and the Bank's subsidiary. Mudharabah time deposits are stated at nominal amounts.

v. Deposits from other banks

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of saving deposits, demand deposits, interbank call money with original maturities of 90 days or less, and time deposits.

Deposits from other banks are classified as liabilities measured at amortized cost, which are initially recognized at fair value plus directly attributable transaction costs, if any, and subsequently are measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of deposits from other Banks and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

v. Simpanan dari bank lain (lanjutan)

Simpanan dari bank lain termasuk simpanan syariah dalam bentuk giro wadiah, tabungan mudharabah, dan investasi tidak terikat yang terdiri dari deposito berjangka mudharabah.

w. Pinjaman yang diterima

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Republik Indonesia, Bank Indonesia, bank lain atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman.

Pinjaman yang diterima diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, jika ada, dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal pinjaman diterima dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

x. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada pengakuan awal dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan kemudian dinyatakan sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan memperhitungkan adanya diskonto atau premi terkait dengan pengakuan awal surat berharga yang diterbitkan dan biaya transaksi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

y. Pendapatan dan beban bunga

Untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

v. Deposits from other banks (continued)

Deposits from other banks include Sharia deposits in the form of wadiah demand deposits, mudharabah savings deposits, and unrestricted investments which consist of mudharabah time deposits.

w. Borrowings

Borrowings are funds received from the Government of the Republic of Indonesia, Bank Indonesia, other banks, or other parties with payment obligation based on borrowing agreements.

Borrowings are classified as liabilities measured at amortized cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs, if any, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of borrowings and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

x. Marketable securities issued

Marketable securities issued are classified as liabilities measured at amortized cost which are initially recognized at fair value less directly attributable transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method. Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium related to the initial recognition of securities issued and transaction costs that are an integral part of the effective interest rate.

y. Interest income and expense

For all financial instruments measured at amortized cost, financial assets with interest income classified as available for sale, and financial instruments designated at fair value through profit or loss, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Untuk seluruh instrumen keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan dengan pendapatan bunga yang diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual, dan instrumen keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi, pendapatan maupun beban bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang akan mendiskonto secara tepat estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan tersebut atau, jika lebih tepat untuk masa yang lebih singkat untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Perhitungan dilakukan dengan memperhitungkan seluruh syarat dan ketentuan kontraktual dari instrumen keuangan dan biaya tambahan yang timbul secara langsung untuk instrumen tersebut dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Pendapatan dan beban bunga yang disajikan di dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain meliputi:

a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi konsolidasian dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

   Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

   Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

   Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

For all financial instruments measured at amortized cost, financial assets with interest income classified as available for sale, and financial instruments designated at fair value through profit or loss, interest income or expense is recorded using the effective interest rate method, which is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

The calculation takes into account all contractual terms of the financial instrument and includes any fees or incremental costs that are directly attributable to the instrument and are an integral part of the effective interest rate.

Interest income and expenses presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income include:

a. Interest income and expense on financial assets measured at fair value through other comprehensive income as well as financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost are recognized in the consolidated statement of profit or loss using the effective interest method.

   The gross carrying amount of a financial asset is the amortized cost of a financial asset before adjusting for allowance for impairment.

   In calculating interest income and expenses, the effective interest rate is applied to the gross carrying amount of an asset (when the asset is not a deteriorated financial asset) or to the amortized cost of a liability.

   For financial assets that deteriorated after initial recognition, interest income is calculated by applying an effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will be calculated by applying an effective interest rate to the gross carrying amount of the financial asset.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar atas aset keuangan yang diklasifikasikan dalam kelompok diakui secara langsung dalam laporan laba rugi komprehensif (merupakan bagian dari ekuitas) sampai aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau adanya penurunan nilai, kecuali keuntungan atau kerugian akibat perubahan nilai tukar untuk instrumen utang.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

- Pendapatan dan beban bunga atas aset diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.
- Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Jika aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa telah diturunkan nilainya sebagai akibat kerugian penurunan nilai, maka pendapatan bunga yang diperoleh setelahnya diakui atas bagian aset keuangan yang tidak mengalami penurunan nilai dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai, berdasarkan suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam menghitung kerugian penurunan nilai.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

For financial assets that have deteriorated at initial recognition, interest income is calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial assets. If the asset no longer deteriorates, the calculation of interest income will still be calculated by applying the effective interest rate to the amortized cost of the financial asset.

b. Gains and losses arising from changes in the fair value of financial assets classified in this category are recognized directly in other comprehensive income (as part of equity), until the financial asset is derecognized or impaired, except gain or loss arising from changes in exchanges rate for debt instrument.

When a financial asset is derecognized or impaired, the cumulative gains or losses previously recognized in equity are recognized in profit or loss.

- Interest income and expense on fair value through other comprehensive income assets and financial assets and liabilities measured at amortized cost, are recognized in the profit or loss using the effective interest rate method.
- Gains and losses arising from changes in the fair value of the financial assets and liabilities classified as fair value through profit or loss are included in the profit or loss.

If a financial asset or a group of similar financial assets' has been impaired due to an impairment loss, then interest income earned afterward is recognized on the portion of the financial asset that has not suffered an impairment, based on the interest rate used to discount future cash flows when calculating the impairment loss.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

Kredit yang pembayaran angsuran pokok atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo atau yang pembayarannya secara tepat waktu diragukan, secara umum diklasifikasikan sebagai kredit yang mengalami penurunan nilai.

Beban diakui pada saat terjadinya.

Nilai tercatat aset atau liabilitas keuangan disesuaikan jika Grup merevisi estimasinya untuk pembayaran maupun penerimaan. Nilai tercatat yang disesuaikan tersebut dihitung dengan menggunakan suku bunga efektif awal dan perubahannya dicatat pada laba rugi. Tetapi untuk aset keuangan yang telah direklasifikasi, dimana pada periode berikutnya Grup meningkatkan estimasi penerimaan kas sebagai hasil dari peningkatan pengembalian penerimaan kas, dampak peningkatan pemulihan tersebut diakui sebagai penyesuaian pada suku bunga efektif sejak tanggal perubahan estimasi.

Pendapatan dan beban bunga termasuk pendapatan marjin dan bagi hasil serta beban hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer dari Entitas Anak Syariah.

Pendapatan Entitas Anak Syariah terdiri dari pendapatan marjin murabahah, bagi hasil dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

Pendapatan dari murabahah diakui dengan menggunakan metode akrual.

Pendapatan dari transaksi pembiayaan atas dasar bagi hasil diakui pada saat angsuran diterima secara tunai.

Pendapatan Ijarah diakui selama masa akad secara proporsional.

Pendapatan atas piutang murabahah menggunakan metode setara tingkat imbal hasil efektif (marjin efektif). Marjin efektif adalah marjin yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari piutang murabahah. Pada saat menghitung margin efektif, Bank mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

Loans with principal and interest payment that have been past due for 90 days or more, or where reasonable doubts regarding the timely collection exist, are generally classified as impaired loans.

Expenses are recognized when incurred.

The carrying amount of the financial asset or liability is adjusted if the Group revise their estimates of payments or receipts. The adjusted carrying amount is calculated based on the original effective interest rate and the change in carrying amount is recorded in the profit or loss. However, for a reclassified financial asset for which the Group subsequently increase their estimates of future cash receipts as a result of increased recoverability of those cash receipts, the effect of that increase is recognized as an adjustment to the effective interest rate from the date of the change in estimate.

Income and interest expense include margin and profit sharing revenue and expenses for the rights of any third party for the temporary syirkah fund of Sharia Subsidiary.

Revenues of Sharia Subsidiary consist of murabahah margin, profit sharing mudharabah and musyarakah financing.

Revenue from murabahah is recognized using the accrual method.

Revenue incurred from financing transactions for profit and loss sharing are recognized when received in cash installments.

Ijarah income is recognized proportionately over the contract period.

Income from murabahah receivables using the effective rate of return method (effective margin). Effective margin is the margin that precisely discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the murabahah receivables. When calculating the effective margin, Bank estimates the future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider the loss of receivables in the future.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

y. Pendapatan dan beban bunga (lanjutan)

instrumen keuangan tersebut, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian piutang di masa mendatang. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi, provisi dan bentuk lain yang diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari marjin efektif, biaya transaksi, dan seluruh premi atau diskon lainnya.

Pendapatan bagi hasil pembiayaan mudharabah dan musyarakah diakui pada saat diterima atau dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati.

Beban Unit Usaha Syariah merupakan beban bagi hasil dan bonus giro dan tabungan wadiah, yang diakui pada saat timbulnya kewajiban untuk melakukan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati.

z. Pendapatan dan beban provisi dan komisi

Pendapatan dan beban provisi dan komisi atas aset dan liabilitas keuangan yang merupakan bagian dari suku bunga efektif, dimasukkan dalam perhitungan suku bunga efektif. Pendapatan dan beban ini diamortisasi sepanjang umur aset atau liabilitas keuangan.

Provisi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan perkreditan dan pinjaman yang diterima atau jangka waktu perkreditan dan pinjaman yang diterima, atau jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

aa. Perpajakan

Aset dan liabilitas pajak penghasilan kini diakui sebesar jumlah yang diperkirakan dapat diperoleh dari atau dibayar kepada otoritas perpajakan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substantif diberlakukan pada tanggal pelaporan.

Pajak penghasilan tangguhan dihitung dengan menggunakan metode liabilitas, terhadap semua perbedaan temporer pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian antara aset dan liabilitas menurut pajak dan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansif diberlakukan pada tahun dimana aset tersebut direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

y. Interest income and expense (continued)

This calculation includes all commissions, provision fees and other forms accepted by the parties in the contract that are an inseparable part of the effective margin, transaction costs and all other premiums or discounts.

Mudharabah and musyarakah income are recognized when cash is received or in a period where the right of revenue sharing is due based on agreed portion (nisbah).

Sharia Business Unit expenses represent a profit or loss sharing expense and current accounts and wadiah saving account, which are recognized when the obligation occurred in accordance with the pre-agreed ratio.

z. Fees and commission income and expense

Fees and commissions income and expense of financial assets and liabilities, which are an integral part of the effective interest rate are being taken into account in calculating the effective interest rate. These income and expense are amortized during the life of financial assets or liabilities.

Commissions and fees not related to lending and borrowing activities or loan and borrowing periods, or those that are not material are recognized as revenues and expenses at the time the transactions occur.

aa. Taxation

Current income tax assets and liabilities are provided at the amount expected to be recovered from or paid to the tax authority which are computed using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the reporting date.

Deferred income tax is calculated using the liability method, on all temporary differences at the consolidated statement of financial position date between the tax base of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted to the year when the asset is realized or the liability is settled.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

aa. Perpajakan (lanjutan)

Liabilitas pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

a. pengakuan awal *goodwill*; atau
b. pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak).

Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi, sepanjang besar kemungkinan terdapat laba kena pajak pada masa datang yang dapat dimanfaatkan atas perbedaan temporer yang dapat dikurangkan untuk keperluan pajak dan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama, baik atas entitas kena pajak yang sama ataupun berbeda dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto.

Aset dan liabilitas pajak kini dapat saling hapus apabila memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, apabila diajukan keberatan dan atau banding, diakui pada saat hasil dari keberatan dan atau banding diterima.

Taksiran pajak penghasilan Grup dihitung untuk masing-masing perusahaan sebagai badan hukum terpisah. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini untuk badan hukum yang berbeda tidak disalinghapuskan dalam laporan keuangan konsolidasian.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

aa. Taxation (continued)

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

a. the initial recognition of goodwill; or
b. the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is nor a business combination and at the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss).

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and unused tax losses can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets against current tax liabilities and when the deferred tax assets and liabilities relate to income taxes levied by the same tax authority on either the same taxable entity or different taxable entities and where there is an intention to settle those balances on a net basis.

Current tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts, and intends either to settle on a net basis or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment is received or, if objected or appealed against, when the result of the objection or appeal is determined.

The income tax of the Group is computed for each company as a separate legal entity. Current tax assets and current tax liabilities for different legal entities are not offset in the consolidated financial statements.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ab. Laba (rugi) per saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Rugi per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk dengan rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan yang disesuaikan dengan mengasumsikan konversi surat berharga berpotensi saham yang sifatnya dilutif.

ac. Imbalan kerja

Kewajiban Pensiun

Grup mempunyai program pensiun sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 tentang Cipta Kerja ("Undang-Undang Cipta Kerja") atau Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") atau Peraturan Perusahaan ("PP"). Karena UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP menentukan rumus tertentu untuk menghitung jumlah minimal imbalan pensiun, pada dasarnya, program pensiun berdasarkan UU Cipta Kerja atau UU Ketenagakerjaan atau PKB atau PP adalah program iuran pasti.

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menentukan jumlah iuran pensiun yang akan dibayarkan, yang pemberiannya biasanya didasarkan pada satu faktor atau lebih seperti masa kerja atau kompensasi.

Kewajiban program iuran pasti yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian dihitung sebesar nilai kini dari estimasi kewajiban imbalan pascakerja di masa depan yang timbul dari jasa yang telah diberikan oleh karyawan pada masa kini dan masa lalu. Perhitungan dilakukan oleh aktuaris independen dengan metode *projected unit credit*.

Biaya pemutusan kontrak kerja dan keuntungan/kerugian kurtailmen diakui pada periode dimana Bank menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ab. Earnings (loss) per share

Basic earnings (loss) per share is computed by dividing income (loss) for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted loss per share is computed by dividing earnings (loss) for the year attributable to ordinary equity holders of the parent entity by the weighted average number of shares outstanding during the year adjusted for the assumed conversion of all dilutive potential ordinary shares.

ac. Employee benefits

Pension Obligations

The Group has pension schemes in accordance with Law No. 11/2020 on Job Creation (the "Job Creation Law") or the Group's Collective Labour Agreement (the "CLA") or Company Regulation ("CR"). Since the Job Creation Law or Labour Law or the CLA or the CR sets the formula for determining the minimum amount of benefits, in substance pension plans under the Job Creation Law or Labour Law or the CLA or the CR represent defined contribution plans.

A defined contribution plan is a pension plan that defines an amount of pension contribution to be paid, usually as a function of one or more factors such as years of service or compensation.

The liability recognized in the consolidated statements of financial position in respect of defined contribution plans is calculated at present value of estimated future benefits that the employees have earned in return for their services in the current and prior period. The calculation is performed by an independent actuary using the projected unit credit method.

Termination costs and curtailment gain or loss are recognized in the period when Bank is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ac. Imbalan kerja (lanjutan)

Kewajiban Pensiun (lanjutan)

Sejak tahun 2008, Bank juga memberikan penghargaan masa dinas untuk karyawan yang telah menyelesaikan masa kerja selama 10 tahun atau lebih. Untuk manfaat tersebut, PSAK 219 (Revisi 2013) mengharuskan perlakuan akuntansi yang hampir sama dengan akuntansi untuk program manfaat pasti (sebagaimana disajikan pada paragraf sebelum ini), kecuali bahwa semua keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul harus diakui sekaligus laba rugi tahun berjalan.

Sejak tahun 2014, Bank memberikan imbalan masa persiapan pensiun yaitu imbalan kepada karyawan sebelum usia pensiun dimana karyawan dibebaskan dari tugas-tugas rutin dan tidak perlu masuk kerja, tetapi tetap memperoleh fasilitas kepegawaian tertentu dan sejak tahun 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Estimasi kewajiban untuk imbalan ini dihitung dengan menggunakan perlakuan akuntansi yang sama dengan perhitungan untuk program pensiun imbalan pasti.

ad. Segmen operasi

Segmen operasi adalah komponen Grup yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban, yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya serta tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan. Segmen operasi terbagi dalam kelompok konvensional, pembiayaan, dan syariah.

Segmen geografis adalah komponen Grup yang dapat dibedakan dalam menghasilkan jasa pada lingkungan (wilayah) ekonomi tertentu dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan pada komponen yang beroperasi pada lingkungan (wilayah) ekonomi lain. Grup melaporkan segmen geografis berdasarkan daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Jawa selain Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, dan lain-lain.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ac. Employee benefits (continued)

Pension Obligations (continued)

Starting 2008, the Bank provides long service awards for employees whose work periods reach 10 years or above. For such benefits, SFAS 219 (Revised 2013) requires an accounting treatment similar to that for defined benefit plans (as described in the previous paragraph), except that the actuarial gains and losses should all be recognized immediately in the current year's profit or loss.

Starting 2014, the Bank provides benefit of pension preparation period, i.e. benefit for employees before retirement age whereby the employee is freed from routine tasks and is not required to present at work, but still receives certain employment facilities and starting 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 years after the employees' pension date. Estimated liability for these benefits is calculated using same accounting treatment with the calculation for defined benefit pension plan.

ad. Operating segment

The operating segment is a Group's component that involves in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segment and assess its performance and for which discrete financial information is available. The operating segment has been determined to be conventional, multi-finance, and sharia.

The geographical segment is a distinguishable component of the Group that is engaged in providing services within a particular economic environment and that is subject to risks and returns that are different from those operating in other economic environments. The Group reports geographical segment information based on Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabotabek), Java excluding Jabotabek, Sumatera, Kalimantan, and others.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ae. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (entitas pelapor). Pihak berelasi adalah sebagai berikut:

i) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
   c) Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

ii) Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika entitas tersebut:
   a) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
   b) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
   c) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
   d) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
   e) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
   f) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i);
   g) Orang yang diidentifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka i) a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ae. Transactions and balances with related parties

A related party is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (reporting entity). Related parties are:

i) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
   a) Has control or joint control of the reporting entity;
   b) Has control or joint control of the reporting entity; or
   c) Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

ii) An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
   a) The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to others);
   b) One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
   c) Both entities are joint ventures of the same third party;
   d) One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
   e) The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
   f) The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in i);
   g) A person identified in i) a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ae. Transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Semua transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan syarat normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, maupun tidak, telah diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

af. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham.

ag. Beban emisi saham

Beban yang terjadi sehubungan dengan penawaran saham kepada masyarakat (termasuk penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu) dikurangkan langsung dari hasil emisi dan disajikan sebagai pengurang tambahan modal disetor.

ah. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2024

Berikut adalah revisi, amandemen dan penyesuaian atas Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, yaitu:

- Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia ("KSPKI") dan perubahan nomor PSAK dan ISAK dalam Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (sebelumnya Standar Akuntansi Keuangan), berlaku efektif tanggal 1 Januari 2024. KSPKI mengatur pilar SAK yang berlaku di Indonesia, kriteria, dan perpindahan antar pilar SAK, sedangkan perubahan nomor mengatur ketentuan penomoran PSAK dan ISAK yang mengacu pada IFRS *Accounting Standards*, standar akuntansi lokal, dan standar akuntasi syariah;

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ae. Transactions and balances with related parties (continued)

h) Entities, or members of the group to which the entity is part of the group, providing services to the entity's key management personnel or to the parent's entity of the reporting entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, whereby such terms may not be the same as those transactions with non-related parties.

All significant transactions and balances with related parties, whether or not conducted under terms and conditions similar to those granted to third parties, are disclosed in the notes to the consolidated financial statements.

af. Dividends

Dividend distribution to the shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the shareholders.

ag. Shares issuance cost

Costs related to the public offering (including limited public offering with pre-emptive rights) are deducted from the proceeds and presented as a deduction to additional paid-in capital.

ah. Changes in accounting policies and disclosures in 2024

The following are revision, amendments and adjustments to Financial Accounting Standard (FAS) that are effective for the financial year that starting or after January 1, 2024, are as follows:

- Indonesia Financial Reporting Standard Framework ("KSPKI") and amendments to SFAS and IFAS number, are effective on 1 January 2024. KSPKI regulate the SFAS pillars, criteria and shifting between pillars that apply in Indonesia, while amendments to SFAS and IFAS number determine the number for SFAS and IFAS which refering to IFRS Accounting Standards, local accounting standards, and sharia accounting standards;

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material (lanjutan)

ah. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dan pengungkapan pada tahun 2024 (lanjutan)

- Amendemen PSAK 201: "Penyajian Laporan Keuangan" terkait klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang;
- Amendemen PSAK 116: "Sewa" terkait liabilitas sewa pada transaksi jual dan sewa-balik;
- Amendemen PSAK 207 dan PSAK 107 terkait "Pengaturan Pembiayaan Pemasok"; dan
- Amandemen PSAK 409: "Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah" dan PSAK 401: "Penyajian Laporan Keuangan Syariah".

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2. Material Accounting Policy Information (continued)

ah. Changes in accounting policies and disclosures in 2024 (continued)

- Amendments of SFAS 201 "Presentation of Financial Statements" regarding classification of liabilities as current or non-current;
- Amendments of SFAS 116 "Leases" regarding lease liabilities in sale-and-lease back transactions;
- Amendments of SFAS 207 and SFAS 107 "Supplier Finance Arrangements"; and
- Amendments of SFAS 409 "Accounting of Zakat, Infak, and Sedekah" and SFAS 401 "Sharia Financial Statement".

The implementation of the above standards had no significant effect on the amounts reported for the current period or prior financial years.

3. Kas

Kas terdiri dari :

	2024	2023	
Rupiah	344.622	276.340	Rupiah
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	21.845	8.627	United States Dollar
Dolar Singapura	1.260	540	Singapore Dollar
Euro Eropa	280	1.901	European Euro
Dolar Australia	20	201	Australian Dollar
Lain-lain	1.056	1.575	Others
	24.461	12.844	
Total	**369.083**	**289.184**	**Total**

Saldo dalam mata uang Rupiah termasuk uang pada ATM (Anjungan Tunai Mandiri) masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp11.849 dan Rp7.154.

Kas dalam mata uang asing lain-lain terdiri dari Yen Jepang, Poundsterling Inggris, Dolar Hong Kong dan Won Korea Selatan.

3. Cash

Cash consists of the following :

The Rupiah balance includes cash in ATMs (Automated Teller Machines) amounting to Rp11,849 and Rp7,154, December 31, 2024 and 2023, respectively.

Cash in other foreign currencies is denominated in Japanese Yen, Great Britain Poundsterling, Hong Kong Dollar and South Korean Won.

4. Giro Pada Bank Indonesia

Giro pada Bank Indonesia terdiri dari:

	2024	2023	
Rupiah	2.531.732	3.089.179	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	140.746	116.440	United States Dollar
Total	**2.672.478**	**3.205.619**	**Total**

4. Current Accounts With Bank Indonesia

Current Accounts with Bank Indonesia consists of the following:

4. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo giro pada Bank Indonesia termasuk giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp370.479 dan Rp540.926.

Giro Wajib Minimum (GWM) Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) diungkapkan pada Catatan 55a.

4. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, current accounts with Bank Indonesia include amounts under sharia banking principles amounting to each Rp370,479 and Rp540,926, respectively.

Minimum Statutory Reserves (GWM) Bank in accordance with Bank Indonesia (BI) Regulation of Members of The Board of Governors (PADG) are disclosed in Note 55a.

5. Giro Pada Bank Lain / 5. Current Accounts With Other Banks

a. Berdasarkan mata uang / a. By currency

	2024	2023	
Pihak Berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	9.149	4.166	United States Dollar
Won Korea Selatan	1.436	2.211	South Korean Won
	10.585	6.377	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	25.463	102.466	Rupiah
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	217.703	149.065	United States Dollar
Dolar Singapura	60.655	44.801	Singapore Dollar
Yen Jepang	41.171	1.804	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	15.667	7.018	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	9.164	7.689	Australian Dollar
Yuan Cina	8.157	5.694	Chinese Yuan
Euro Eropa	7.760	8.193	European Euro
Dolar Hong Kong	812	9.774	Hong Kong Dollar
	386.552	336.504	
Total	397.137	342.881	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	Allowance for impairment losses
Neto	**396.837**	**342.581**	**Net**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, saldo giro pada bank lain termasuk saldo yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp824 dan Rp1.405.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat giro pada bank lain yang dijaminkan.

As at December 31, 2024 and 2023, current accounts with other banks include amounts under sharia banking principles amounting to Rp824 and Rp1.405, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, there is no current account with other banks pledged as collateral.

b. Berdasarkan bank / b. By banks

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related party (Note 38)**
Mata uang asing :			Foreign currency :
KB Kookmin Bank Co., Ltd	10.585	6.377	KB Kookmin Bank Co., Ltd

5. Giro Pada Bank Lain (lanjutan)

5. Current Accounts With Other Banks (continued)

b. Berdasarkan bank (lanjutan)

b. By banks (continued)

	2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	9.548	9.548	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	7.539	7.431	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Standard Chartered Bank, Jakarta	3.535	2.374	Standard Chartered Bank, Jakarta
PT Bank Central Asia Tbk	3.501	81.106	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank BCA Syariah	525	113	PT Bank BCA Syariah
PT Bank MNC Internasional Tbk	308	2	PT Bank MNC International Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	299	1.292	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	54	54	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39	452	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	28	-	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	3	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna	-	2	PT Bank Sahabat Sampoerna
Lain-lain	87	89	Others
Sub-total	25.463	102.466	Sub-total
Mata uang asing:			Foreign currencies:
Citibank N.A., New York	172.359	44.988	Citibank N.A., New York
United Overseas Bank Ltd, Singapura	60.509	37.159	United Overseas Bank Ltd, Singapore
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo	41.171	1.804	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo
Standard Chartered Bank, London	15.667	7.018	Standard Chartered Bank, London
PT Bank Central Asia Tbk	15.163	12.437	PT Bank Central Asia Tbk
Standard Chartered Bank, New York	12.869	57.956	Standard Chartered Bank, New York
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.555	20.894	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Australia and New Zealand Banking Group Limited	9.164	7.689	Australia and New Zealand Banking Group Limited
PT Bank ICBC Indonesia	8.157	5.694	PT Bank ICBC Indonesia
Societe Generale, Perancis	7.760	8.193	Societe Generale, France
Citibank N.A., Jakarta	6.082	3.578	Citibank N.A., Jakarta
Standard Chartered Bank, Hong Kong	812	9.774	Standard Chartered Bank, Hong Kong
Habib American Bank, New York	676	9.212	Habib American Bank, New York
Standard Chartered Bank, Singapura	145	7.642	Standard Chartered Bank, Singapore
Sub-total	361.089	234.038	Sub-total
Total	397.137	342.881	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)	Allowance for impairment losses
Neto	**396.837**	**342.581**	**Net**

c. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas giro pada bank lain sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55b.

c. By collectibility

Collectability current account with other banks in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55b.

5. Giro Pada Bank Lain (lanjutan)

d. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2024	2023	
Rupiah:			Rupiah:
Saldo awal	300	89	Beginning balance
Penyisihan (pembalikan cadangan) kerugian penurunan nilai	-	211	Provision (reversal of allowance) for impairment losses
Saldo akhir	**300**	**300**	**Ending balance**

Cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara kolektif.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai telah memadai.

e. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Giro pada bank lain dalam mata uang Rupiah, Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Dolar Australia, Euro Eropa, Dolar Singapura, Yuan Cina, Dolar Hong Kong, Won Korea Selatan dan Poundsterling Inggris. Tingkat suku bunga rata-rata setahun untuk giro pada bank lain dalam Rupiah dan mata uang asing lainnya adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Rupiah	0,48%	0,81%	Rupiah
Mata uang asing	0,06%	0,00%	Foreign currencies

5. Current Accounts With Other Banks (continued)

d. Movements in allowance for impairment losses

Allowance for impairment losses is calculated using collective assessment.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

e. Average annual interest rates

Current accounts with other banks in Rupiah, United States Dollar, Japanese Yen, Australian Dollar, European Euro, Singapore Dollar, Chinese Yuan, Hong Kong Dollar, South Korean Won and Great Britain Poundsterling currencies. The average interest rates per annum for current accounts with other banks in Rupiah and other foreign currencies are as follows:

6. Penempatan Pada Bank Indonesia dan Bank Lain

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan bank

	2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
Penempatan pada Bank Indonesia, setelah dikurangi bunga yang ditangguhkan	2.317.643	1.384.883	Placements with Bank Indonesia, net of unearned interest
Deposito Berjangka			**Time deposits**
PT Bank Sahabat Sampoerna	11.475	38.000	PT Bank Sahabat Sampoerna
PT Bank Nagari	11.000	40.000	PT Bank Nagari
PT Bank Victoria International Tbk	11.000	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	11.000	34.000	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat

6. Placements With Bank Indonesia and Other Banks

a. By type, currency, and banks

6. Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis, mata uang, dan bank (lanjutan)

6. Placements With Bank Indonesia And Other Banks (continued)

a. By type, currency, and banks (continued)

	2024	2023	
Deposito Berjangka			**Time deposits**
PT BPD Lampung	11.000	-	PT BPD Lampung
PT BPD Sumatera Utara	11.000	34.000	PT BPD Sumatera Utara
PT BPD Sulawesi Tengah	11.000	33.000	PT BPD Sulawesi Tengah
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	10.000	41.000	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank Sulawesi Tenggara	10.000	37.000	PT Bank Sulawesi Tenggara
PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo	10.000	7.000	PT BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo
PT Bank Mega Tbk	1.000	6.000	PT Bank Mega Tbk
PT Bank Oke Indonesia Tbk	1.000	7.000	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT BPD Jawa Tengah	1.000	-	PT BPD Jawa Tengah
PT BPD Sulawesi Utara	-	34.000	PT BPD Sulawesi Utara
PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	-	30.000	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
PT BPD Riau Kepri Syariah	-	16.000	PT BPD Riau Kepri Syariah
PT Bank DKI	-	10.000	PT Bank DKI
PT Bank Victoria Syariah Tbk	-	10.000	PT Bank Victoria Syariah Tbk
PT BPD Sulawesi Selatan	-	7.000	PT BPD Sulawesi Selatan
PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk	-	7.000	PT Bank Tabungan Negara Syariah Tbk
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	-	7.000	PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	4.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT BPD Bengkulu	-	3.000	PT BPD Bengkulu
PT BPD Kalimantan Barat	-	3.000	PT BPD Kalimantan Barat
PT Bank Raya Indonesia Tbk	-	1.000	PT Bank Raya Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	-	950	PT Bank Sinarmas Tbk
	110.475	409.950	
Subtotal	2.428.118	1.794.833	Subtotal
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Penempatan pada Bank Indonesia	370.185	338.734	Placements with Bank Indonesia
Subtotal	370.185	338.734	Subtotal
Total	**2.798.303**	**2.133.567**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain yang berdasarkan prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp1.093.000 dan Rp985.000.

As at December 31, 2024 and 2023, there are placement with Bank Indonesia and other Banks under sharia banking principles amounting to Rp1,093,000 and Rp985,000, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang dijaminkan.

As at December 31, 2024 and 2023, there is no placement with Bank Indonesia and other banks pledged as collateral.

6. Penempatan Pada Bank Indonesia Dan Bank Lain (lanjutan)

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 bulan	2.428.118	1.733.833	Less than a month
1 - 3 bulan	-	44.000	1 - 3 months
3 - 6 bulan	-	17.000	3 - 6 months
	2.428.118	1.794.833	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Kurang dari 1 bulan	370.185	338.734	Less than a month
	370.185	338.734	
Total	**2.798.303**	**2.133.567**	**Total**

6. Placements With Bank Indonesia And Other Banks (continued)

b. By remaining period to maturity

c. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55c.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, sehingga cadangan kerugian penurunan nilai tidak dibentuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

c. By collectibility

Collectibility placement with Bank Indonesia and other banks in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55c.

Management believes that there is no impaired placements with Bank Indonesia and other banks, therefore no allowance for impairment losses were provided as at December 31, 2024 and 2023.

d. Tingkat bunga rata-rata per tahun

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Penempatan pada Bank Indonesia	5,08%	5,06%	Placement with Bank Indonesia
Interbank call money	3,97%	4,38%	Interbank call money
Deposito berjangka	1,50%	3,84%	Time deposits
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Penempatan pada Bank Indonesia	3,91%	4,17%	Placement with Bank Indonesia
Interbank call money	1,19%	1,19%	Interbank call money

d. Average annual interest rates

7. Surat-Surat Berharga

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit/loss
Obligasi pemerintah	275.000	13	Government bonds
Premi yang belum diamortisasi	4.932	1	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	(5.276)	(1)	Unrealized loss
	274.656	13	

7. Marketable Securities

a. By purpose, type, and currency

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

a. By purpose, type, and currency (continued)

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Obligasi pemerintah	5.818.876	4.796.017	Government bonds
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	109.520	83.438	Unamortized premium (discount)
	5.928.396	4.879.455	
Obligasi korporasi	224.600	224.600	Corporate bonds
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	2.321.661	1.994.135	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Premi yang belum diamortisasi	34.444	40.605	Unamortized premium
	2.356.105	2.034.740	
Wesel SKBDN	28.893	12.756	Domestic letters of Credit (SKBDN)
Diskonto yang belum diamortisasi	(298)	(467)	Unamortized discount
	28.595	12.289	
Sukuk Korporasi	2.432.000	2.432.000	Corporate Sukuk
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.018.089)	(1.097.939)	Unamortized discount
	1.413.911	1.334.061	
Wesel Ekspor	740	-	Export Bill of Exchange (Export Wesel)
Diskonto yang belum diamortisasi	(17)	-	Unamortized discount
	723	-	
	9.952.330	8.485.145	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Obligasi pemerintah	4.220.476	2.656.870	Government Bonds
Premi yang belum diamortisasi	(4.754)	16.198	Unamortized premium
Keuntungan yang belum direalisasi	(17.309)	10.373	Unrealized gain
	4.198.413	2.683.441	
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	150.000	390.000	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.112)	(4.855)	Unamortized discount
Keuntungan yang belum direalisasi	(1.849)	(1.199)	Unrealized gain
	147.039	383.946	
	4.345.452	3.067.387	
Subtotal	14.572.438	11.552.545	Subtotal

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan) / 7. Marketable Securities (continued)

a. Berdasarkan tujuan, jenis, dan mata uang (lanjutan) / a. By purpose, type, and currency (continued)

	2024	2023	
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit/loss
Obligasi korporasi	7.192.497	5.250.377	Corporate bonds
Keuntungan yang belum direalisasi	-	72.540	Unrealized gain
	7.192.497	5.322.917	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Obligasi pemerintah	-	657.452	Government bonds
Premi yang belum diamortisasi	-	532	Unamortized premium
	-	657.984	
Subtotal	7.192.497	5.980.901	Subtotal
Yuan China			**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Wesel SKBDN	2.240	2.876	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Diskonto yang belum diamortisasi	(64)	(73)	Unamortized discount
Subtotal	2.176	2.803	Subtotal
Total	21.767.111	17.536.249	Total
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)	Less: allowance for impairment losses
Neto	**21.766.831**	**17.536.140**	**Net**

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang / b. By purpose, issuer, and currency

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
Negara Republik Indonesia	275.000	13	Republic of Indonesia Government
Premi yang belum diamortisasi	4.932	1	Unamortized premium
Kerugian yang belum direalisasi	(5.276)	(1)	Unrealized loss
	274.656	13	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Negara Republik Indonesia	8.140.537	6.790.152	Republic of Indonesia Government
Premi yang belum diamortisasi	143.964	124.043	Unamortized premium
	8.284.501	6.914.195	

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

b. By purpose, issuer, and currency (continued)

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	2.432.000	2.432.000	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Bahana TCW Investment Management	119.600	119.600	PT Bahana TCW Investment Management
PT KB Finansia Multifinance	105.000	105.000	PT KB Finansia Multifinance
PT Bank Central Asia Tbk	23.944	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.690	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Lekang Jaya Konstruksi	-	6.484	PT Lekang Jaya Konstruksi
PT Inka Multi Solusi	-	3.539	PT Inka Multi Solusi
PT Rizki Asa Buana	-	2.733	PT Rizki Asa Buana
	2.686.234	2.669.356	
Diskonto yang belum diamortisasi	(1.018.405)	(1.098.406)	Unamortized discount
	1.667.829	1.570.950	
	9.952.330	8.485.145	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain			Fair value through other comprehensive income
Negara Republik Indonesia	4.370.476	3.046.870	Republic of Indonesia Government
Diskonto yang belum diamortisasi	(5.866)	11.343	Unamortized discount
Keuntungan yang belum direalisasi	(19.158)	9.174	Unrealized gain
	4.345.452	3.067.387	
Subtotal	14.572.438	11.552.545	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi			Fair value through profit or loss
IDMB United Pte., Ltd	2.762.639	2.771.460	IDMB United Pte., Ltd
Kerugian yang belum direalisasi	-	(81.595)	Unrealized loss
	2.762.639	2.689.865	
SMMK Pte Ltd	2.664.067	2.478.917	SMMK Pte Ltd
Kerugian yang belum direalisasi	-	154.135	Unrealized loss
	2.664.067	2.633.052	
TLDC Pte Ltd	1.765.791	-	TLDC Pte Ltd
	7.192.497	5.322.917	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
Negara Republik Indonesia	-	657.452	Republic of Indonesia Government
Premi (diskonto) yang belum diamortisasi	-	532	Unamortized premium (discount)
	-	657.984	
Subtotal	7.192.497	5.980.901	Subtotal

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

b. Berdasarkan tujuan, penerbit, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

b. By purpose, issuer, and currency (continued)

	2024	2023	
Yuan China			**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi			Amortized cost
PT Anugrah Putra Fajar	2.240	2.876	PT Anugrah Putra Fajar
Diskonto yang belum diamortisasi	(64)	(73)	Unamortized discount
Subtotal	2.176	2.803	Subtotal
Total	21.767.111	17.536.249	Total
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)	Less: allowance for impairment losses
Neto	**21.766.831**	**17.536.140**	**Net**

c. Berdasarkan tujuan, peringkat, dan mata uang

c. By purpose, rating, and currency

	Lembaga pemeringkat/ *Rating company*	2024	2023	
Peringkat				Rating
Rupiah				**Rupiah**
Nilai wajar melalui laba rugi				Fair value through profit or loss
Tanpa peringkat *)		274.656	13	Not rated *)
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				Amortized Cost
idAAA	Pefindo	119.600	119.600	idAAA
idAA	Pefindo	1.413.912	1.334.061	idAA
AAA-	Fitch	105.000	105.000	AAA-
Tanpa peringkat *)		8.313.818	6.926.484	Not rated *)
		9.952.330	8.485.145	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Tanpa peringkat *)		4.345.452	3.067.387	Not rated *)
		4.345.452	3.067.387	
Subtotal		14.572.438	11.552.545	Subtotal
Dolar Amerika Serikat				**United States Dollar**
Nilai wajar melalui laba rugi				Fair value through profit or loss
A+	Standard & Poor's	7.192.497	5.322.917	A+
		7.192.497	5.322.917	
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				Amortized Cost
Tanpa peringkat *)		-	657.984	Not rated *)
Subtotal		7.192.497	5.980.901	Subtotal

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

c. Berdasarkan tujuan, peringkat, dan mata uang (lanjutan)

7. Marketable Securities (continued)

c. By purpose, rating, and currency (continued)

	Lembaga pemeringkat/ *Rating company*	2024	2023	
Yuan China				**China Yuan**
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi				Amortized Cost
Tanpa peringkat *)		2.176	2.803	Not rated *)
Subtotal		2.176	2.803	Subtotal
Total		21.767.111	17.536.249	Total
Dikurangi: cadangan kerugian penurunan nilai		(280)	(109)	Less: allowance for impairment losses
Neto		**21.766.831**	**17.536.140**	**Net**

*) Terdiri dari Wesel SKBDN, Obligasi Pemerintah, Obligasi Ritel Indonesia, Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia, Surat Utang Negara, dan Sertifikat Deposito Bank Indonesia.

*) Consists of Domestic Letter of Credit (SKBDN), Government Bonds, Indonesia Retail Bond, Indonesia Sukuk Ijarah Bonds, State Promissory Notes, and Bank Indonesia Certificates of Deposits.

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Kurang dari 1 bulan	1.001.613	3.430	Less than a month
1 - 3 bulan	1.134.519	333.363	1 - 3 months
3 bulan - 1 tahun	919.664	352.428	3 months - 1 year
1 - 5 tahun	3.738.785	3.399.602	1 - 5 years
5 - 10 tahun	5.710.340	4.685.286	5 - 10 years
Lebih dari 10 tahun	2.067.517	2.778.436	More than 10 years
Subtotal	14.572.438	11.552.545	Subtotal
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Kurang dari 1 bulan	-	657.983	Less than a month
1 - 5 tahun	4.528.430	2.689.864	1 - 5 years
5 - 10 tahun	2.664.067	2.633.054	5 - 10 years
Subtotal	7.192.497	5.980.901	Subtotal
Yuan China			**Chinese Yuan**
Kurang dari 1 bulan	167	-	Less than a month
1 - 3 bulan	704	1.277	1 - 3 months
3 bulan - 1 tahun	1.305	1.526	3 months - 1 year
Subtotal	2.176	2.803	Subtotal
Total	21.767.111	17.536.249	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)	Allowance for impairment losses
Neto	**21.766.831**	**17.536.140**	**Net**

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan) / 7. Marketable Securities (continued)

e. Berdasarkan golongan penerbit / e. By classification of issuers

	2024	2023	
Pemerintah dan Bank Indonesia:			Government and Bank Indonesia:
Obligasi Pemerintah	10.401.465	8.220.893	Government Bonds
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	2.503.144	2.418.686	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds
Subtotal	**12.904.609**	**10.639.579**	**Subtotal**
IDMB United Pte., Ltd	2.762.639	2.689.865	IDMB United Pte., Ltd
SMMK Pte., Ltd	2.664.067	2.633.052	SMMK Pte., Ltd
TLDC Pte., Ltd	1.765.791	-	TLDC Pte., Ltd
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.413.911	1.334.062	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
PT Bahana TCW Investment Management	119.600	119.600	PT Bahana TCW Investment Management
PT KB Finansia Multifinance	105.000	105.000	PT KB Finansia Multifinance
PT Bank Central Asia Tbk	23.795	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	5.523	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Anugrah Putra Fajar	2.176	2.803	PT Anugrah Putra Fajar
PT Rizki Asa Buana	-	2.670	PT Rizki Asa Buana
PT Lekang Jaya Konstruksi	-	6.188	PT Lekang Jaya Konstruksi
PT Inka Multi Solusi	-	3.430	PT Inka Multi Solusi
Subtotal	**8.862.502**	**6.896.670**	**Subtotal**
Total	**21.767.111**	**17.536.249**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)	Allowance for impairment losses
Neto	**21.766.831**	**17.536.140**	**Net**

f. Berdasarkan tanggal jatuh tempo dan peringkat / f. By maturity date and rating

	Tanggal Jatuh tempo/ *Maturity Date*	2024	2023	
KIK EBA Bahana Bukopin Tahun 2019	4 September 2026/ *September 4, 2026*	idAAA	idAAA	KIK EBA Bahana Bukopin Year 2019
IDR-Linked Step-Up Fixed Rate Guaranteed Bond IDMB United Pte Ltd	21 Juni 2027/ *June 21, 2027*	A+	A+	IDR-Linked Step-Up Fixed Guaranteed Bond IDMB United Pte Ltd
SMMK Pte Ltd	28 September 2037/ *September 28, 2037*	A+	A+	SMMK Pte Ltd
TLDC Pte Ltd	28 Maret 2029/ *March 28, 2029*	A+	-	TLDC Pte Ltd
Sukuk Korporasi	28 September 2037/ *September 28, 2037*	idAA(sy)	idAA(sy)	Corporate Sharia Bonds
Obligasi Pemerintah - Rupiah	15 April 2040/ *April 15, 2040*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Tanpa peringkat/ *Not rated*	Government Bonds - Rupiah
Obligasi Sukuk Ijarah Negara Indonesia	15 April 2043/ *April 15, 2043*	idA	idA-	Indonesia Sukuk Ijarah Bonds

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

f. Berdasarkan tanggal jatuh tempo dan peringkat (lanjutan)

Peringkat untuk obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat yang dilaporkan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), sedangkan peringkat untuk obligasi lain yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan peringkat obligasi yang dilaporkan oleh Standard & Poor's.

g. Berdasarkan kolektibilitas

Kolektibilitas surat-surat berharga sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55d.

h. Tingkat bunga rata-rata per tahun

	2024	2023	
Rupiah			**Rupiah**
Obligasi korporasi	7,30%	7,30%	Corporate bonds
Wesel SKBDN	8,43%	9,17%	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Wesel Ekspor	8,92%	-	Export Wesel
Obligasi pemerintah	7,56%	10,07%	Goverment bonds
Obligasi ritel indonesia - tingkat bunga tetap	5,17%	4,90%	Indonesia retail bond - fixed rate
Sukuk korporasi	0,75%	0,75%	Corporate sukuk
Dolar Amerika Serikat			**United States Dollar**
Obligasi pemerintah - tingkat bunga tetap	-	5,88%	Indonesia government bond - fixed rate
Obligasi korporasi	2,00%	2,00%	Corporate bonds
Wesel SKBDN		-	Domestic Letters of Credit (SKBDN)
Yuan China			**Chinese Yuan**
Wesel SKBDN	5,90%	6,41%	Domestic Letters of Credit (SKBDN)

i. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

	2024	2023	
Saldo awal	109	76	Beginning balance
Penyisihan (pemulihan) selama tahun berjalan	171	33	Provision (reversal) during the year
Saldo akhir	**280**	**109**	**Ending balance**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

7. Marketable Securities (continued)

f. By maturity date and rating (continued)

The ratings of the bonds which are registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), meanwhile the ratings of the bonds which are not registered in the Indonesia Stock Exchange are determined by Standard & Poor's.

g. By collectibility

Collectibility marketable securities in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55d.

h. Average annual interest rates

i. Movements in allowance for impairment losses

As at December 31, 2024 and 2023, management believes that the allowance for impairment losses on is adequate.

7. Surat-Surat Berharga (lanjutan)

j. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan surat-surat berharga

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank menjaminkan sebagian surat berharga berupa obligasi pemerintah dengan nilai tercatat Rp3.223.896 dan Rp219.745, untuk transaksi surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali.

7. Marketable Securities (continued)

j. Other significant information regarding marketable securities

As at December 31, 2024 and 2023, the Bank has pledged part of marketable securities in form of government bonds with carrying amount of Rp3,223,896 and Rp219,745, respectively, for marketable securities sold with agreement to repurchase transactions.

k. Perubahan efek-efek berdasarkan klasifikasinya / k. Changes in marketables securities based on classification

	31 Desember/*December 31, 2024*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Nilai wajar melalui penghasilan laba rugi				Fair value through other profit and loss
Saldo awal tahun	5.322.930	-	5.322.930	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	2.225.941	-	2.225.941	New financial assets purchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(8.834)	-	(8.834)	Maturities or disposal
Kerugian dari perubahan nilai wajar	(77.815)	-	(77.815)	Loss on changes in fair value
Lainnya	4.931	-	4.931	Others
Saldo, akhir tahun	**7.467.153**	**-**	**7.467.153**	**Balance, end of year**

	31 Desember/*December 31, 2024*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain				Fair value through other comprehensive income
Saldo awal tahun	3.067.387	-	3.067.387	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	2.931.000	-	2.931.000	New financial assets purchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(1.607.395)	-	(1.607.395)	Maturities or disposal
Kerugian dari perubahan nilai wajar	(28.332)	-	(28.332)	Loss on changes in fair value
Lainnya	(17.208)	-	(17.208)	Others
Saldo, akhir tahun	**4.345.452**	**-**	**4.345.452**	**Balance, end of year**

	31 Desember/*December 31, 2024*			
	Nilai Tercatat Bruto/*Gross Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/*Net Carrying Amount***	
Biaya perolehan diamortisasi				Amortized cost
Saldo awal tahun	9.145.932	(109)	9.145.823	Beginning balance of the year
Aset keuangan yang baru dibeli	2.037.185	(171)	2.037.014	New financial assets purchased
Aset keuangan yang jatuh tempo atau dijual	(1.328.011)	-	(1.328.011)	Maturities or disposal
Lainnya	99.400	-	99.400	Others
Saldo, akhir tahun	**9.954.506**	**(280)**	**9.954.226**	**Balance, end of year**

8. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tanggal 31 Desember 2023 terdiri dari:

8. Marketable Securities Purchased with Agreement to Resell

Marketable securities purchased with agreements to resell as at December 31, 2023 are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Jangka Waktu/ *Period*	**Tanggal Dimulai/ *Start Date***	**Tanggal Jatuh Tempo/ *Due Date***	**Suku Bunga/ *Interest Rate***	**Harga Beli Kembali/ *Repurchase Price***	**Bunga Belum Diamortisasi/ *Unamortized Interest***	**Nilai Neto/ *Net Value***
Pihak ketiga/*Third party*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ Government Bonds							
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	27 Des. 2023/ *Dec. 27, 2023*	3 Jan. 2024/ *Jan. 3, 2024*	6,00%	95.875	(48)	95.827
Seri/*Series* VR0054	7 hari/ *7 days*	28 Des. 2023/ *Dec 28. 2023/*	4 Jan. 2024/ *Jan. 4, 2024*	6,00%	287.356	(191)	287.165
Seri/*Series* VR0054	7 hari/ *7 days*	28 Des 2023/ *Dec. 28, 2023/*	4 Jan. 2024/ *Jan. 4, 2024*	6,00%	143.678	(96)	143.582
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,00%	383.685	(319)	383.366
Seri/*Series* VR0034	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,00%	671.448	(559)	670.889
Seri/*Series* VR0062	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,00%	665.046	(554)	664.492
Seri/*Series* VR0042	7 hari/ *7 days*	29 Des. 2023/ *Dec. 29, 2023*	5 Jan. 2024/ *Jan. 5, 2024*	6,00%	142.915	(119)	142.796
Seri/*Series* VR0034	92 hari/ *92 days*	15 Nov. 2023/ *Nov. 15, 2023*	15 Feb. 2024/ *Feb. 15, 2024*	6,55%	48.806	(402)	48.404
Seri/*Series* VR0065	273 hari/ *273 days*	16 Jun. 2023/ *Jun. 16. 2023/*	15 Mar. 2024/ *Mar. 15, 2024*	6,40%	24.221	(308)	23.913
Seri/*Series* VR0065	273 hari/ *273 days*	16 Jun. 2023/ *Jun. 16. 2023/*	15 Mar. 2024/ *Mar. 15, 2024*	6,41%	24.223	(308)	23.915
Seri/*Series* VR 0045	273 hari/ *273 days*	23 Jun. 2023/ *Jun. 23, 2023*	22 Mar. 2024/ *Mar. 22, 2024*	6,41%	49.270	(686)	48.584
Seri/*Series* VR 0037	364 hari/ *364 days*	16 Jun. 2023/ *Jun. 16, 2023*	14 Jun. 2024/ *Jun. 14, 2024*	6,41%	19.820	(551)	19.269
Seri/*Series* VR 0043	364 hari/ *364 days*	23 Jun. 2023/ *Jun. 23, 2023*	21 Jun. 2024/ *Jun. 21, 2024*	6,41%	20.545	(595)	19.950
Total					**2.576.888**	**(4.736)**	**2.572.152**

Kolektibilitas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual Kembali sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55e.

Collectibility marketable securities purchased with agreement to resell in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55e.

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah

a. Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas

Kolektabilitas kredit yang diberikan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55f.

9. Loans and Sharia Financing/Receivables

a. By currency, type, and collectability

Collectibility loans in accordance with the Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55f.

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi

b. By economic sector

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Perdagangan	3.746.676	923.284	4.536	20.085	616.735	5.311.316	Trading
Jasa	6.463.321	389.232	20.103	25.885	510.040	7.408.581	Business service
Konstruksi	1.854.628	254.561	9.974	7.141	236.498	2.362.802	Construction
Pertanian	602.358	856	-	149.316	42.234	794.764	Agriculture
Manufaktur	3.960.362	190.448	2.792	13.034	148.577	4.315.213	Manufacturing
Transportasi	2.444.206	5.645	514	22	221.622	2.672.009	Transportation
Tenaga listrik	670.129	83.780	-	-	116.682	870.591	Power supply
Pertambangan	826.879	8.637	-	-	15.894	851.410	Mining
Lain-lain	13.259.577	494.726	145.060	90.838	1.723.410	15.713.611	Others
Total Rupiah	33.828.136	2.351.169	182.979	306.321	3.631.692	40.300.297	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519.858)	(291.896)	(121.716)	(103.485)	(1.854.587)	(2.891.542)	Allowance for impairment losses
Neto	33.308.278	2.059.273	61.263	202.836	1.777.105	37.408.755	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Perdagangan	54.500	-	-	-	-	54.500	Trading
Jasa	1.323.424	-	-	-	14.514	1.337.938	Business service
Konstruksi	6.980	-	-	-	-	6.980	Contructions
Pertanian	80.473	-	-	-	-	80.473	Agriculture
Manufaktur	2.762.403	130.584	-	-	-	2.892.987	Manufacturing
Transportasi	9.226	-	-	-	-	9.226	Transportation
Tenaga listrik	1.040.702	-	-	-	-	1.040.702	Power supply
Pertambangan	1.802.235	-	-	-	-	1.802.235	Mining
Lain-lain	2.148	-	-	-	-	2.148	Others
Total mata uang asing	7.082.091	130.584	-	-	14.514	7.227.189	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.040)	(32.873)	-	-	(3.742)	(100.655)	Allowance for impairment losses
Neto	7.018.051	97.711	-	-	10.772	7.126.534	Net
Total	**40.326.329**	**2.156.984**	**61.263**	**202.836**	**1.787.877**	**44.535.289**	**Total**

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Perdagangan	5.378.383	807.232	39.712	4.105	723.071	6.952.503	Trading
Jasa	6.940.638	280.624	47.432	28.296	285.501	7.582.491	Business service
Konstruksi	2.050.686	1.518.719	10.644	4.021	202.738	3.786.808	Construction
Pertanian	691.185	154.769	20.909	-	3.634	870.497	Agriculture
Manufaktur	3.735.125	107.470	-	265	73.514	3.916.374	Manufacturing
Transportasi	2.526.841	110.831	410	5.103	304.414	2.947.599	Transportation
Tenaga listrik	861.453	231	-	-	13.801	875.485	Power supply
Pertambangan	538.163	-	-	2.158	855.708	1.396.029	Mining
Lain-lain	12.986.247	1.201.695	89.142	118.540	1.665.385	16.061.009	Others
Total Rupiah	35.708.721	4.181.571	208.249	162.488	4.127.766	44.388.795	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(540.160)	(770.505)	(68.858)	(60.255)	(2.074.884)	(3.514.662)	Allowance for impairment losses
Neto	35.168.561	3.411.066	139.391	102.233	2.052.882	40.874.133	Net

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

b. Berdasarkan sektor ekonomi (lanjutan)

b. By economic sector (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Perdagangan	140.370	-	-	-	-	140.370	Trading
Jasa	691.970	-	-	-	13.821	705.791	Business service
Konstruksi	6.937	-	-	-	-	6.937	Contructions
Pertanian	76.966	-	-	-	-	76.966	Agriculture
Manufaktur	1.929.078	-	-	-	-	1.929.078	Manufacturing
Transportasi	-	-	-	-	-	-	Transportation
Tenaga listrik	1.196.702					1.196.702	Power supply
Pertambangan	971.791	-	-	-	-	971.791	Mining
Lain-lain	2.186					2.186	Others
Total mata uang asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)	Allowance for impairment losses
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649	Net
Total	**40.120.250**	**3.411.066**	**139.391**	**102.233**	**2.062.842**	**45.835.782**	**Total**

c. Berdasarkan jangka waktu

c. By maturity

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 tahun	5.824.491	4.160.796	Less than a year
1 - 2 tahun	1.454.328	4.488.182	1 - 2 years
2 - 5 tahun	5.547.055	6.700.058	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	27.474.423	29.039.759	More than 5 years
	40.300.297	44.388.795	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kurang dari 1 tahun	1.926.471	515.517	Less than a year
1 - 2 tahun	497.063	1.346.108	1 - 2 years
2 - 5 tahun	1.840.955	852.041	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	2.962.700	2.316.155	More than 5 years
	7.227.189	5.029.821	
Total	**47.527.486**	**49.418.616**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)	(3.582.834)	Allowance for impairment losses
Neto	**44.535.289**	**45.835.782**	**Net**

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo

d. By remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 tahun	9.156.520	10.336.478	Less than a year
1 - 2 tahun	1.753.825	2.300.396	1 - 2 years
2 - 5 tahun	11.135.851	10.561.987	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	18.254.101	21.189.934	More than 5 years
	40.300.297	44.388.795	

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

d. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo (lanjutan)

	2024	2023	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kurang dari 1 tahun	2.423.855	2.017.857	Less than a year
1 - 2 tahun	931.778	170.491	1 - 2 years
2 - 5 tahun	2.196.813	1.798.169	2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	1.674.743	1.043.304	More than 5 years
	7.227.189	5.029.821	
Total	**47.527.486**	**49.418.616**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)	(3.582.834)	Allowance for impairment losses
Neto	**44.535.289**	**45.835.782**	**Net**

e. Berdasarkan mata uang

	2024	2023	
Rupiah	40.300.297	44.388.795	Rupiah
Mata uang asing :			Foreign currencies:
Dolar Amerika Serikat	7.225.040	5.027.636	United States Dollar
Euro Eropa	2.149	2.185	Euro European
	7.227.189	5.029.821	
Total	**47.527.486**	**49.418.616**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)	(3.582.834)	Allowance for impairment losses
Neto	**44.535.289**	**45.835.782**	**Net**

f. Berdasarkan *stage*

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	40.416.916	4.348.331	4.653.369	49.418.616	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*Stage 2*)	(3.664.610)	3.686.479	(21.868)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(1.705.621)	(442.455)	2.148.076	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	675.435	(657.001)	(18.434)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	2.390.033	(421.803)	(1.289.141)	679.089	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(867.943)	(236.891)	(1.465.385)	(2.570.219)	Written-off
Saldo akhir tahun	**37.244.210**	**6.276.660**	**4.006.616**	**47.527.486**	**Balance end of year**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

f. Berdasarkan *stage* (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

f. By stages (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	45.503.113	1.634.341	3.445.980	50.583.434	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*Stage 2*)	(3.742.152)	3.784.011	(41.859)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(3.194.563)	(268.668)	3.463.231	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	453.115	(421.442)	(31.673)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	4.326.744	(323.671)	(939.223)	3.063.850	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(2.929.341)	(56.240)	(1.243.087)	(4.228.668)	Written-off
Saldo akhir tahun	**40.416.916**	**4.348.331**	**4.653.369**	**49.418.616**	**Balance end of year**

g. Kredit konsumsi

Kredit konsumsi terdiri dari:

g. Consumer loans

The consumer loans consists of:

2024	**2023**	
11.392.329	10.154.077	Personal loans
1.626.401	1.362.701	Housing loans
380.258	456.910	Credit card
125.672	185.150	Motor vehicle loans
1.193.584	647.608	Other consumer loans
14.718.244	**12.806.446**	**Total**

h. Kredit yang bermasalah

Kredit yang bermasalah berdasarkan sektor ekonomi. Rasio kredit bermasalah Bank sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55f.

h. Non-performing loans

Non-performing loans based on economic sector. The non-performing loans ratio of The Bank's in accordance with the Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55f.

i. Pembiayaan Syariah

Rincian pembiayaan/piutang syariah pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

i. Sharia financing

As at December 31, 2024 and 2023, the details of sharia financing/receivables are as follows:

2024	**2023**	
5.118.001	4.782.664	Musyarakah financing
531.551	494.889	Murabahah receivables
286.643	296.402	Mudharabah financing
67.245	58.040	Ijarah receivables
877	184	Qardh receivables
222	418	Istishna receivables
6.004.539	**5.632.597**	**Total**
(224.194)	(161.967)	Allowance for impairment losses
5.780.345	**5.470.630**	**Net**

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah (lanjutan)

j. Kredit sindikasi

Kredit sindikasi merupakan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah kepada nasabah berdasarkan perjanjian pembiayaan bersama dengan bank-bank lain. Keikutsertaan Bank sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan masing-masing berkisar antara 22% sampai dengan 78%, (31 Desember 2023: 22% sampai dengan 70%) dari total kredit sindikasi. Risiko atas kredit sindikasi ditanggung secara proporsional oleh bank-bank peserta.

k. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Tingkat bunga rata-rata per tahun untuk kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Rupiah	10,10%	10,90%	Rupiah
Mata uang asing	7,06%	6,96%	Foreign currencies

l. Kredit kepada pihak berelasi

	2024	2023	
Modal kerja	309.839	619.779	Working capital
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	30.144	21.226	Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers
Total (Catatan 38)	**339.983**	**641.005**	**Total (Note 38)**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(354)	(7.941)	Allowance for impairment losses
Neto	**339.629**	**633.064**	**Net**

m. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai

Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah adalah sebagai berikut:

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Stage 1	Stage 2	Stage 3	Total	
Saldo awal tahun	858.219	459.100	2.265.515	3.582.834	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*Stage 2*)	(65.589)	73.005	(7.416)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(25.005)	(48.518)	73.523	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	33.080	(27.608)	(5.472)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	564.251	289.989	1.125.342	1.979.582	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(867.943)	(236.891)	(1.465.385)	(2.570.219)	Written-off
Saldo akhir tahun	**497.013**	**509.077**	**1.986.107**	**2.992.197**	**Ending balance of the year**

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

j. Syndicated loans

Syndicated loans represent loans and sharia financing/receivables provided to customers under syndication agreements with other banks. The Bank's shares as a member in syndicated loans were 22% to 78%, (31 December 2023: 22% to 70%) of the total syndicated loans. Risks from syndicated loans are shared proportionately by the participating banks.

k. Average annual interest rates

The average interest rates per annum on loans are as follows:

l. Loans to related parties

m. Movements in allowance for impairment losses

The movements in allowance for impairment losses of loans and Sharia financing/receivables are as follows:

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

m. Perubahan cadangan kerugian penurunan nilai (lanjutan)

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

m. Movements in allowance for impairment losses (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Stage 1	**Stage 2**	**Stage 3**	**Total**	
Saldo awal tahun	535.853	104.609	986.214	1.626.676	Beginning balance of the year
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*Stage 2*)	(45.790)	58.847	(13.057)	-	Transferred to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (*Stage 3*)	(49.287)	(18.336)	67.623	-	Transferred to credit impaired (Stage 3)
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*)	27.051	(18.891)	(8.160)	-	Transferred to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	3.319.733	389.111	2.475.982	6.184.826	Net change in exposure and remeasurement
Penghapusan	(2.929.341)	(56.240)	(1.243.087)	(4.228.668)	Written-off
Saldo akhir tahun	**858.219**	**459.100**	**2.265.515**	**3.582.834**	**Ending balance of the year**

Di dalam saldo cadangan kerugian penurunan nilai termasuk cadangan kerugian penurunan nilai pembiayaan/piutang syariah masing-masing sebesar Rp224.194 dan Rp161.967, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

Total kredit yang diberikan dan total cadangan kerugian penurunan nilai yang evaluasi penurunan nilainya dilakukan secara individual dan kolektif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Allowance for impairment losses includes allowance for impairment losses for sharia financing/receivables amounted to Rp224,194 and Rp161,967, December 31, 2024 and 2023, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

The total loans and allowance for impairment losses which impairment evaluation is individually and collectively assessed as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	2024		2023		
	Individual/ *Individual*	**Kolektif/ *Collective***	**Individual/ *Individual***	**Kolektif/ *Collective***	
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah	1.220.776	46.306.710	1.826.782	47.591.834	Loans and sharia financing/receivables
Cadangan kerugian penurunan nilai	(281.292)	(2.710.905)	(760.232)	(2.822.602)	Allowance for impairment loss
Neto	**939.484**	**43.595.805**	**1.066.550**	**44.769.232**	**Net**

n. Kredit yang direstrukturisasi

Kredit yang direstrukturisasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55f.

n. Restructured loans

Restructured loans in accordance with the Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55f.

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

o. Piutang pembiayaan entitas anak

Piutang pembiayaan entitas anak adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Piutang pembiayaan - bruto	721.732	272.218	Financing receivables - gross
Dikurangi:			Less:
Pendapatan pembiayaan yang belum diakui	(105.702)	(54.424)	Unearned financing receivables
Total	616.030	217.794	**Total**
Dikurangi:			Less:
Cadangan kerugian penurunan nilai	(29.692)	(75.940)	Allowance for impairment losses
Total	**586.338**	**141.854**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, piutang pembiayaan masing-masing sebesar Rp616.030 dan Rp217.794, digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima (Catatan 23).

Tingkat suku bunga per tahun:

	2024	2023	
Produk			Products
Mobil	10,40% - 52,74%	10,88% - 47,14%	Automobiles

p. Kredit yang dihapus buku

Ikhtisar mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Saldo awal	15.414.424	11.363.340	Beginning balance
Penghapusbukuan	2.570.218	4.228.668	Write-off
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	(111.243)	(177.584)	Recoveries from written-off loans
Saldo akhir	**17.873.399**	**15.414.424**	**Ending balance**

q. Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA)

Bank telah melakukan sekuritisasi pertama atas kumpulan tagihan kredit pensiunan (”Kumpulan Tagihan”) yang dimilikinya dengan menunjuk PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi. Selanjutnya atas kumpulan tagihan yang memenuhi kriteria pemilihan, oleh Bank, sebagai Kreditur Awal, telah dijual dan dialihkan ke Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Bahana Bukopin -

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

o. The subsidiary’s financing receivables

The subsidiary’s financing receivables balance is as follows:

As at December 31, 2024 and 2023, the financing receivables balances pledged as collateral for borrowings amounted to Rp616,030 and Rp217,794, respectively (Note 23).

Annual interest rate:

p. Written-off loans

A summary of written-off loans is as follows:

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK-EBA)

The Bank conducted the first securitization on its pension loans (“pool of receivables”), by appointing PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager. The pool of receivables which met the criteria for selection by the Bank, as the Initial Creditor, was sold and transferred to Collective Investment Contract Asset-Backed Securities of Bahana Bukopin - Pool of Transferred Pension

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

q. Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) (lanjutan)

Kumpulan tagihan Kredit Pensiunan yang Dialihkan (KIK-EBA BB) yang tertuang dalam Perjanjian Induk Jual Beli Tagihan tanggal 29 Agustus 2019. KIK-EBA BB dibentuk berdasarkan Akta Kontrak Investasi Kolektif antara PT Bahana TCW Investment Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Maybank Indonesia Tbk sebagai Bank Kustodian berdasarkan Akta No. 33 tanggal 22 Mei 2019 dan diamendemen dengan akta No. 80 tanggal 29 Agustus 2019. Nilai pokok kumpulan tagihan yang dijual dan dialihkan tersebut merupakan kumpulan tagihan terseleksi dengan nilai pokok sebesar-besarnya Rp1.001.000 yang terdiri dari 16.783 debitur dengan harga sebesar nilai pokok Kumpulan Tagihan pada tanggal *cut-off* final (29 Agustus 2019). Tingkat suku bunga yang dikenakan pada debitur kumpulan tagihan tersebut pada tanggal penjualan adalah sebesar 12% sampai dengan 23,13% dengan jangka waktu 7 tahun.

Setelah terjadinya penjualan dan pengalihan kumpulan tagihan tersebut, risiko kredit atas kumpulan tagihan telah beralih dari Bank kepada pembeli.

Selanjutnya, KIK-EBA BB menerbitkan Efek Beragunan Aset (EBA) yang merupakan bentuk partisipasi dalam kepemilikan bersama atas Kumpulan Tagihan. EBA diterbitkan dalam tiga kelas yaitu:

(i) EBA Kelas A1 senilai Rp1 (nominal penuh) yang dicatat pada Bursa Efek Indonesia dan ditawarkan kepada publik dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A1 dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,25% per tahun dengan tanggal jatuh tempo 4 September 2022. EBA Kelas A1 mendapatkan hasil pemeringkatan atas efek beragun dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA (*triple* A; *Stable Outlook*). Surat Pernyataan Pendaftaran dari KIK-EBA BB telah mendapatkan pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) melalui surat No. S-1026/PM.21/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK-EBA) (continued)

loans (KIK-EBA BB) based on sale-purchase deed dated August 29, 2019. KIK-EBA BB was established based on Collective Investment Contract between PT Bahana TCW Investment Management as the investment manager and PT Bank Maybank Indonesia Tbk as the Custodian Bank based on deed No. 33 dated May 22, 2019, and amended by deed No. 80 dated August 29, 2019. Nominal par value of sold and transferred receivables which represents selected receivables with maximum nominal value amounting to Rp1,001,000 consists of 16,783 debtors, was sold and transferred at their nominal value at final cut-off date (August 29, 2019). The interest rate charged to the debtors of the pool of receivables on the date of sale amounted to 12% up to 23.13% with maturity of 7 years.

Subsequent to the sale and transfer of the pool of receivables, credit risks on the pool of receivables were transferred from the Bank to the buyer.

Further, KIK-EBA BB issued Asset-Backed Securities (ABS) which represent an instrument of joint ownership on the pool of receivables. ABS were issued in three types or classes as follows:

(i) Class A1 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are registered in the Indonesia Stock Exchange, and offered to the public at 91.1% of the nominal value of class A1 ABS with interest at the annual fixed rate of 9.25% per annum and due on September 4, 2022. The Class A1 ABS was rated idAAA (triple A; Stable Outlook) by PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). The Registration Statement Letter from KIK-EBA-BB received effective statement based on Letter No. S-1026/PM.21/2019 dated August 28, 2019 of the Chairman of BAPEPAM-LK.

9. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

q. Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK-EBA) (lanjutan)

(ii) EBA Kelas A2 senilai Rp1 (nominal penuh) yang ditawarkan dengan nilai 91,1% dari nilai pokok EBA Kelas A2. EBA Kelas A2 tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA kelas A2 mempunyai hak untuk dibayar terlebih dahulu dari Pemegang EBA Kelas B.

(iii) EBA Kelas B dengan nilai pokok sebesar Rp119.600 memiliki jangka waktu 7 tahun dan mewakili sebesar-besarnya 9,2% dari aset keuangan KIK-EBA BB. EBA Kelas B tidak dicatat pada Bursa Efek Indonesia namun ditawarkan kepada calon pembeli dengan ketentuan bahwa pemegang EBA Kelas B berhak atas semua arus kas tersisa sesuai dengan urutan prioritas pembayaran. Pada tanggal 31 Desember 2019, Bank telah mencatat EBA Kelas B sebagai efek yang diukur pada biaya perolehan pada neraca Bank (Catatan 7).

Transaksi penjualan Kumpulan Tagihan telah memperoleh opini penjualan putus (*true sale*) dari pihak independen yang terdiri dari pendapat dari segi akuntansi oleh Akuntan Independen dan pendapat dari segi hukum oleh kantor konsultan hukum independen. Atas dasar opini kedua pihak independen tersebut, Bank telah mengeluarkan Kumpulan Tagihan sebesar Rp1.300.000 dari neraca Bank (penghentian pengakuan).

Berdasarkan perjanjian penyedia jasa tanggal 29 Agustus 2019, Bank juga bertindak sebagai penyedia jasa penagihan dalam transaksi sekuritisasi Kumpulan piutang diatas. Peran utama Bank sebagai penyedia jasa pengumpul antara lain mengumpulkan pembayaran pokok dan bunga dari para debitur untuk setiap periode penagihan, mentransfer secara bulanan hasil penagihan kepada KIK-EBA BB dan mengadministrasikannya dengan baik, aman dan teratur serta profesional untuk kepentingan KIK-EBA BB yang merupakan representasi dari para pemegang EBA.

9. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

q. Collective Investment Contract Asset-Backed Securities (KIK-EBA) (continued)

(ii) Class A2 ABS amounting to Rp1 (full amount) which are offered at 91.1% of the nominal value of class A2 ABS. Class A2 ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that the holder of Class A2 ABS has the first priority to be paid than the holder of Class B ABS.

(iii) Class B ABS with nominal value of Rp119,600 with due date of 7 years and represent maximum 9.2% of financial asset of KIK-EBA BB. The Class B ABS are not registered in the Indonesia Stock Exchange but are offered to prospective buyer with the condition that class B ABS holders have the right on the residual cash flow based on the payment priorities. On December 31, 2019, the Bank recorded Class B ABS as measured at amortized cost securities on the Bank's balance sheets (Note 7).

A true sale opinion was obtained on the sale of the pool of receivables from independent parties which consists of accounting opinion from an independent accountant and legal opinion from an independent legal consulting firm. Based on the opinions of the above two independent parties, the Bank has excluded the pool of receivables amounting to Rp1,300,000 from its balance sheets (derecognition).

Based on the Service Provider Agreement dated August 29, 2019, the Bank also acts as a collecting service provider in the above securitization transaction of the pool of receivables. The Bank's primary role as a collective service provider, among others, is to collect the principal and interest payments from debtors on each collection period, to transfer monthly the proceeds from collection to the KIK-EBA BB and to maintain the good, safe, orderly and professional administration of the debtors' accounts for the interest of KIK-EBA BB, which represents the ABS holders.

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

r. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah

i. Pada tanggal 15 Desember 2009, Bank melakukan perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dimana Bank akan menyediakan dana investasi sebesar Rp100.000 dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Pada tanggal 29 Desember 2020, Bank melakukan perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dimana Bank akan menyediakan dana investasi sebesar Rp275.000 dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Pada tanggal 29 Desember 2021, Bank melakukan perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi dengan PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) dimana Bank akan menyediakan dana investasi sebesar Rp350.000 dengan jangka waktu 72 (tujuh puluh dua) bulan.

Beberapa ketentuan terkait perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:
- Nisbah bagi hasil adalah sebesar 70% untuk Bank dan 30% untuk KBBS dan dapat direviu setiap 6 (enam) bulan sekali;
- Pembayaran nisbah bagi hasil berasal dari pendapatan operasional KBBS;
- Pembayaran pokok Investasi Mudharabah Subordinasi selambat-lambatnya dilaksanakan pada saat jatuh tempo.

Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi antara Bank dengan KBBS telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 11/1594/DPbS tanggal 24 November 2009.

Pada tanggal 28 Desember 2009, KBBS telah melakukan pencairan pertama sebesar Rp50.000 berdasarkan perjanjian tersebut. Pada tahun 2021 pinjaman ini telah diperpanjang sampai dengan 26 Agustus 2027.

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

r. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables

i. On December 15, 2009, the Bank entered into an agreement of Subordinated Mudharabah Investment financing with PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) whereby the Bank will provide investment fund of Rp100,000 for 72 (seventy two) months period.

On December 29, 2020, the Bank entered into an agreement of Subordinated Mudharabah Investment with PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) where the Bank provided investment fund of Rp275,000 for 72 (seventy two) months.

On December 29, 2021, the Bank entered into an agreement of Subordinated Mudharabah Investment with PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) where the Bank provided investment fund of Rp350,000 for 72 (seventy two) months

Some relevant provisions of the agreement are as follows:
- Revenue sharing (nisbah) is 70% for the Bank and 30% for KBBS and can be reviewed every six-month;
- Payment of revenue sharing (nisbah) comes from KBBS's operating income;
- Principal amount of Subordinated Mudharabah Investment will be paid at maturity date, at the latest.

The Subordinated Mudharabah Investment agreement between the Bank and KBBS has been approved by Bank Indonesia with letter No. 11/1594/DPbS dated November 24, 2009.

On December 28, 2009, KBBS made its first withdrawal in the amount of Rp50,000 under the prevailing agreement. In 2021, this facility was extended until August 26, 2027.

9. Kredit Yang Diberikan Dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

r. Informasi signifikan lainnya sehubungan dengan kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah (lanjutan)

Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi antara Bank dengan KBBS telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 195/KDM-KPS/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021. KBBS telah melakukan pencairan pertama sebesar Rp290.000.

Perjanjian Investasi Mudharabah Subordinasi antara Bank dengan KBBS telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dengan surat No. 083/DRUT-PKS/KP-JKT/XII/2020 tanggal 29 Desember 2020. KBBS telah melakukan pencairan pertama sebesar Rp2.750.000.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh portofolio kredit ini dieliminasi untuk laporan keuangan konsolidasian.

ii. Kredit yang diberikan dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa membebankan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual, atau jaminan lain yang umumnya diterima oleh Bank. Jumlah kredit yang diberikan yang dijamin dengan giro, tabungan, dan deposito berjangka pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp1.410.803 dan Rp2.982.893.

iii. Kredit modal kerja merupakan fasilitas kredit rekening koran, cerukan dan kredit reguler.

iv. Kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit pemilikan mobil, kartu kredit, dan kredit perorangan termasuk kredit yang dijamin dengan agunan tunai.

v. Kredit program Pemerintah terdiri dari kredit usaha rakyat, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit program kepada sektor koperasi, dan kredit pemilikan rumah.

vi. Pinjaman karyawan Bank terdiri dari kredit yang dibebani bunga khusus dengan jangka waktu berkisar antara 1 (satu) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang dilunasi melalui pemotongan gaji setiap bulannya. Perbedaan antara tingkat bunga pinjaman karyawan dan suku bunga pasar dibebankan dan dicatat sebagai beban tenaga kerja.

9. Loans And Sharia Financing/Receivables (continued)

r. Other significant information relating to loans and Sharia financing/receivables (continued)

The Subordinated Mudharabah Investment Agreement between the Bank and KBBS was approved by Bank Indonesia through letter No. 195/KDS-KPS/XII/2021 dated November 29, 2021. KBBS made its first withdrawal in the amount of Rp290,000.

The Subordinated Mudharabah Investment Agreement between the Bank and KBBS was approved by Bank Indonesia through letter No. 083/DRUT-PKS/KP-JKT/XII/2020 dated December 29, 2020. KBBS made its first withdrawal in the amount of Rp 2,750,000.

As at December 31, 2024 and 2023, the loan portfolio is eliminated for the consolidated financial statements.

ii. Certain loans are secured by pledge of registered mortgages, powers of attorney to sell, or by other guarantees acceptable to the Bank. The loans secured by demand deposits, savings deposits, and time deposits as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp1,410,803 and Rp2,982,893, respectively.

iii. Working capital loans consist of demand loans, overdraft and regular loan facilities.

iv. Consumer loans consist of housing loan, car loan, credit card receivables, and personal loans including loans secured by cash collateral.

v. Government program loans consist of people's business credit, investment loans, working capital loans, cooperative loans, and housing loans.

vi. Loans to the Bank's employees consist of loans granted with special interest rates and with terms between 1 (one) to 15 (fifteen) years, and are collected through monthly salary deductions. The difference between the employee loan's interest rates and market interest rate is expensed and recorded as personnel expenses.

10. Tagihan Dan Liabilitas Akseptasi / 10. Acceptances Receivable And Payable

a. Berdasarkan pihak dan mata uang / a. By counterparties and currency

	2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	4.804	21.404	Rupiah
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Yuan Cina	75.041	8.875	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	4.434	102.298	United States Dollar
Total	**84.279**	**132.577**	**Total**
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)	(1.613)	Allowance for impairment losses
Neto	**83.079**	**130.964**	**Net**

b. Berdasarkan sisa umur jatuh tempo / b. By remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 bulan	1.626	9.076	Less than a month
1 - 3 bulan	3.178	11.700	1 - 3 months
3 - 6 bulan	-	628	3 - 6 months
Total	4.804	21.404	Total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kurang dari 1 bulan	10.149	20.572	Less than a month
1 - 3 bulan	68.016	59.300	1 - 3 months
3 - 6 bulan	1.310	31.301	3 - 6 months
Total	79.475	111.173	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)	(1.613)	Allowance for impairment losses
Neto	**83.079**	**130.964**	**Net**

Jumlah saldo liabilitas akseptasi adalah sama seperti yang tercatat dalam saldo akun tagihan akseptasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Acceptances payable represent the same amount as acceptances receivable as at December 31, 2024 and 2023.

c. Berdasarkan kolektibilitas / c. By collectibility

Kolektibilitas tagihan dan liabilitas akseptasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55g.

Collectibility acceptance receivables and payable in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55g.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk telah memadai.

As at December 31, 2024 and 2023, management believes that the allowance for impairment losses is adequate.

11. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Rincian transaksi derivatif atas *swap* mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

11. Derivative Receivable and Payable

Details of foreign currency swaps as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Nilai kontrak/ *Contract amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable***	**Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable***	
Pihak ketiga					**Third parties**
Transaksi swap mata uang asing :					Foreign currency swap transaction :
Dolar Amerika Serikat:					**United States Dollar:**
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	965.975	(272)	1.621	(1.893)	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	563.454	5.132	5.132	-	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Permata Tbk	338.077	3.849	3.916	(67)	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	241.556	1.066	1.385	(319)	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Sinarmas Tbk	96.578	(418)	-	(418)	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank BNP Paribas	96.578	(443)	-	(443)	PT Bank BNP Paribas
PT Bank Mega Tbk	48.289	(221)	-	(221)	PT Bank Mega Tbk
Bank of America N.A - Jakarta Branch	32.193	(132)	-	(132)	Bank of America N.A - Jakarta Branch
PT Bank OCBC NISP Tbk	16.096	(74)	-	(74)	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank CTBC Indonesia	16.096	(74)	-	(74)	PT Bank CTBC Indonesia
Total		**8.413**	**12.054**	**(3.641)**	**Total**

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Nilai kontrak/ *Contract amount*	**Nilai wajar/ *Fair value***	**Tagihan derivatif/ *Derivatives receivable***	**Liabilitas derivatif/ *Derivatives payable***	
Pihak ketiga					**Third parties**
Transaksi swap mata uang asing :					Foreign currency swap transaction :
Dolar Amerika Serikat:					**United States Dollar:**
PT Bank Permata Tbk	477.321	1.569	1.869	(300)	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	461.932	15	304	(289)	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	184.768	184	207	(23)	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	153.995	1	115	(114)	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	92.384	(75)	-	(75)	PT Bank Sinarmas Tbk
The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd	76.987	89	89	-	The Bank of Tokyo - Mitsubishi Ltd
PT Bank Victoria International Tbk	46.192	417	417	-	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank HSBC Indonesia	30.795	21	21	-	PT Bank HSBC Indonesia
PT Bank ANZ Indonesia	15.397	18	18	-	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas	3.843	(7)	-	(7)	PT Bank BNP Paribas
Total		**2.232**	**3.040**	**(808)**	**Total**

Kolektibilitas tagihan derivatif sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55h.

Collectibility derivatives receivables in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55h.

Manajemen Bank berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak diperlukan.

The Bank's management believed that allowance for impairment losses as of December 31, 2024 and 2023 were not required.

12. Penyertaan Saham / 12. Investments in Shares

Rincian penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Investments in shares as at December 31, 2024 and 2023, consist of the following:

Nama perusahaan/*Name of company*	Jenis usaha/ *Nature of business*	Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership*	Biaya perolehan/ *Cost*	Nilai tercatat/ *Carrying value*
Simpanan keanggotaan/*Membership deposits:*				
PT Aplikanusa Lintasarta	Jasa Komunikasi/ *Communication Services*	0%	15	15
Total				**15**

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelaahan manajemen Bank, penyertaan saham pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, diklasifikasikan lancar.

Based on management's evaluation and review, investments in shares as at December 31, 2024 and 2023, are classified as current.

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna / 13. Fixed Assets and Right of Use Assets

31 Desember/*December 31,* 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan							**Cost**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Tanah	2.405.244	-	8.692	4.426	213.072	2.614.050	Land
Bangunan	1.088.656	2.054	21.808	3.279		1.072.181	Building
Perabotan dan peralatan kantor	731.862	47.138	2.765	1.226	-	777.461	Furniture, fixture and office equipment
Prasarana bangunan	74.126	-		-	-	74.126	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	50.420	250	15.547	-	-	35.123	Motor vehicles
Aset dalam konstruksi	47.068	2.219	17.864	(8.931)	-	22.492	Asset under construction
Total	4.397.376	51.661	66.676	-	213.072	4.595.433	Total
Aset hak guna sewa	249.358	9.391	77.184	-	-	181.565	Right of use of assets
Total	4.646.734	61.052	143.860	-	213.072	4.776.998	Total
Akumulasi penyusutan							**Accumulated depreciations**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Perabotan dan peralata kantor	640.180	49.182	2.397	-	-	686.965	Furniture, fixture and office equipment
Bangunan	549.079	49.343	14.424	-	-	583.998	Building
Prasarana bangunan	60.535	5.636	-	-	-	66.171	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	23.651	5.170	13.716	-	-	15.105	Motor vehicles
Total	1.273.445	109.331	30.537	-	-	1.352.239	Total
Aset hak guna sewa	139.614	42.025	77.184	-	-	104.455	Right of use of assets
Total	1.413.059	151.356	107.721	-	-	1.456.694	Total
Nilai buku neto	**3.233.675**					**3.320.304**	**Net book value**

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan							**Cost**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Tanah	2.433.852	8.175	36.783	-	-	2.405.244	Land
Bangunan	1.089.319	5.561	6.224	-	-	1.088.656	Building
Perabotan dan peralatan kantor	722.539	14.084	4.761	-	-	731.862	Furniture, fixture and office equipment
Prasarana bangunan	73.775	351	-	-	-	74.126	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	26.820	26.749	3.149	-	-	50.420	Motor vehicles
Aset dalam konstruksi	41.222	5.846	-	-	-	47.068	Asset under construction
Total	4.387.527	60.766	50.917	-	-	4.397.376	Total
Aset hak guna sewa	299.428	10.136	60.206	-	-	249.358	Right of use of assets
Total	4.686.955	70.902	111.123	-	-	4.646.734	Total

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan) / 13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Revaluasi/ *Revaluations*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Akumulasi penyusutan							**Accumulated depreciations**
Pemilikan langsung:							Direct ownership:
Perabotan dan peralatan kantor	591.381	52.927	4.128	-	-	640.180	Furniture, fixture and office equipment
Bangunan	498.670	56.633	6.224	-	-	549.079	Building
Prasarana bangunan	51.880	8.655	-	-	-	60.535	Leasehold improvements
Kendaraan bermotor	21.866	5.299	3.514	-	-	23.651	Motor vehicles
Total	1.163.797	123.514	13.866	-	-	1.273.445	Total
Aset hak guna sewa	126.956	69.901	57.243	-	-	139.614	Right of use of assets
Total	1.290.753	193.415	71.109	-	-	1.413.059	Total
Nilai buku neto	**3.396.202**					**3.233.675**	**Net book value**

Kerugian bersih dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

Loss on sale of fixed assets is as follows:

	2024	2023	
Hasil penjualan	27.759	7.200	Proceeds from sale
Nilai buku	(36.139)	(12.900)	Net book value
Kerugian bersih dari aset tetap (Catatan 35)	**(8.380)**	**(5.700)**	**Net loss on sale of fixed asset (Note 35)**

Rincian aset dalam konstruksi per 31 Desember 2024 and 2023, adalah sebagai berikut:

Detail assets under construction as at December 31, 2024 and 2023, are as follow:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Jumlah/ *Total*	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion*	
Tanah dan bangunan	22.492	25% - 90%	2025 - 2026	Land and buildings

31 Desember/*December 31,* 2023

	Jumlah/ *Total*	Persentase Penyelesaian/ *Percentage of Completion*	Estimasi Penyelesaian/ *Estimated Completion*	
Tanah dan bangunan	47.068	25% - 90%	2024 - 2025	Land and buildings

Pada tanggal 1 Maret 2016, Grup mengubah kebijakan akuntansi terkait pengukuran setelah pengakuan awal untuk tanah dari model biaya ke model revaluasi. Pada tahun 2024, Bank melakukan kembali revaluasi atas aset tanahnya.

On March 1, 2016, the Group change their accounting policy related to subsequent measurement of land from the cost model to the revaluation model. In 2024, the Bank performed revaluation for its land of asset.

Nilai wajar dari tanah yang dimiliki Bank pada 31 Desember 2024 dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asnawi & Rekan penilai properti independen dengan tanggal penilaian 12 Desember 2024.

The fair values of land owned by the Bank as at December 31, 2024 are determined by Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Asnawi & Rekan, an independent property appraiser, with appraisal date of December 12, 2024.

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Penilaian dilakukan berdasarkan Standar Penilaian Indonesia dan telah sesuai dengan POJK No. 28/POJK.04/2021 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal untuk tujuan pelaporan keuangan. Nilai wajar tanah adalah berdasarkan pendekatan data pasar dengan membandingkan harga-harga aset yang serupa yang dapat diobservasi.

Harga pasar yang paling mendekati disesuaikan dengan perbedaan atribut-atribut utama, seperti: ukuran tanah, lokasi dan biaya penggantian. Pengukuran nilai wajar juga mempertimbangkan penggunaan tertinggi dan terbaik (*highest and best use*) dari aset yang dinilai. Nilai wajar dari tanah diklasifikasikan sebagai tingkat 2 berdasarkan hierarki nilai wajar.

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai revaluasi tanah pada tanggal revaluasi:

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Valuation is performed based on Indonesian Valuation Standards and in accordance with POJK No. 28/POJK.04/2021 regarding Valuation and Presentation of Property Appraisal Report in Capital Market for the purposes of financial reporting. The fair value of land is based on market data approach by comparing observable market prices of similar assets.

Market prices in close proximity are adjusted for differences in key attributes such as: land size, location, and replacement costs. The fair value measurements also consider highest and best use of the asset being valued. The fair value of lands is classified as level 2 based on hierarchy of fair value.

The following table presents the information on the revaluation of the land on the date of revaluation:

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Nilai buku bersih sebelum revaluasi/ ***Net book value before revaluation***	**Nilai wajar pada tanggal revaluasi/** ***Fair value on the date of revaluation***	**Surplus revaluasi/** ***Revaluation surplus***	
Tanah	2.275.061	2.061.989	213.072	Land

Pada tahun 2024 terdapat bagunan dan tanah yang di jual dengan nilai perolehan sebesar Rp1.036 dan nilai revaluasi yang dihapuskan sebesar Rp645. Mutasi surplus revaluasi telah tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. Saldo surplus revaluasi per 1 Januari 2024 sebesar Rp1.603.893 dengan penurunan surplus selama 2024 sebesar Rp645 dan penambahan surplus selama 2024 sebesar Rp213.072 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2024 menjadi sebesar Rp1.816.965.

In 2024, a building and land were sold with an acquisition value of Rp1,036 and a write-off revaluation value of Rp645. The revaluation surplus movement has been reflected in the Consolidated Statement of Changes in Equity. The revaluation surplus balance as of January 1, 2024, was Rp1,603,893, with a decrease of Rp645 and an increase of Rp213,072 during 2024, resulting in a final balance of Rp1,816,965 as of December 31, 2024.

Pada tahun 2023 terdapat tanah yang di reklasifikasi menjadi aset terbengkalai dengan nilai perolehan sebesar Rp22.395 dan nilai revaluasi yang dihapuskan sebesar Rp1.756. Mutasi surplus revaluasi telah tercermin dalam Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian. Saldo surplus revaluasi per 1 Januari 2023 sebesar Rp1.605.649 dengan penurunan surplus selama 2023 sebesar Rp1.756 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp1.603.893.

On 2023, there was land reclassified as abandoned assets with an acquisition value of Rp22,395 and eliminated revaluation amounting to Rp1,756. Movements in the revaluation surplus have been reflected in the Consolidated Statement of Changes in Equity. The revaluation surplus balance as at January 1, 2023 was Rp1,605,649 with the deduction of a surplus for 2023 amounting to Rp1,756 therefore the balance as at December 31, 2023 was Rp1,603,893.

Cadangan revaluasi tidak boleh didistribusikan kepada pemegang saham Bank.

The revaluation reserves are not available for distribution to the Bank's shareholders.

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

Aset tetap, kecuali tanah, diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan beberapa perusahaan asuransi diantaranya adalah PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT AJB Bumiputera 1912, PT Syarikat Takaful Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida dan PT KB Insurance yang merupakan pihak ketiga dari Bank. Nilai pertanggungan seluruhnya pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp3.332.716 dan Rp2.978.770. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul dari risiko-risiko tersebut.

Harga perolehan aset tetap telah terdepresiasi penuh namun masih digunakan oleh Grup sebesar Rp288.980 dan Rp574.439, masing-masing pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, antara lain berupa bangunan, perlengkapan kantor dan kendaraan bermotor.

Manajemen berpendapat tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas aset tetap yang dimiliki oleh Grup.

Aset hak guna per 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

Fixed assets, except land, are insured against losses by fire and other risks under blanket policies with several insurance companies including PT Asuransi Central Asia, PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967, PT BRI Asuransi Indonesia, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Zurich Asuransi Indonesia, PT AJB Bumiputera 1912, PT Syarikat Takaful Indonesia, PT Asuransi Bangun Askrida and PT KB Insurance which are third parties of the Bank. The total insurance coverage as at December 31, 2024 and 2023, are amounted to Rp3,332,716 and Rp2,978,770, respectively. Management believes that the insurance coverage is adequate to cover losses arising from such risks.

The cost of fixed assets that have been fully depreciated but still in use by the Group amounting to Rp288,980 and Rp574,439, as at December 31, 2024 and 2023, respectively, included among others, building, office equipment and motor vehicles.

Management believes that there is no indication of impairment in the value of fixed assets of the Group.

Right of use of assets as at December 31, 2024 and 2023, are follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						**Cost**
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	192.039	6.280	45.727	-	152.592	Building
Kendaraan	41.611	1.380	20.238	-	22.753	Vehicle
Perlengkapan kantor	12.622	-	8.202	-	4.420	Office equipment
Rumah	3.086	1.731	3.017	-	1.800	House
Total	249.358	9.391	77.184	-	181.565	Total
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	95.290	31.883	45.727	-	81.446	Building
Kendaraan	31.367	6.765	20.238	-	17.894	Vehicle
Perlengkapan kantor	11.490	1.133	8.202	-	4.421	Office equipment
Rumah	1.467	2.244	3.017	-	694	House
Total	139.614	42.025	77.184	-	104.455	Total
Nilai buku neto	**109.744**				**77.110**	**Net book value**

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Reklasifikasi/ *Reclassifications*	Saldo Akhir/ *Ending Balance*	
Biaya perolehan						**Cost**
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	222.500	5.874	36.335	-	192.039	Building
Kendaraan	44.023	1.105	3.517	-	41.611	Vehicle
Perlengkapan kantor	13.163	-	541	-	12.622	Office equipment
ATM	10.304	42	10.346	-	-	ATM
Rumah	9.438	3.115	9.467	-	3.086	House
Total	299.428	10.136	60.206	-	249.358	Total

13. Aset Tetap dan Aset Hak Guna (lanjutan)

13. Fixed Assets and Right of Use Assets (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Reklasifikasi/ *Reclassifications***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Akumulasi penyusutan						**Accumulated depreciation**
Kepemilikan langsung:						Direct ownership:
Gedung	82.320	46.342	33.372	-	95.290	Building
Kendaraan	25.107	9.777	3.517	-	31.367	Vehicle
Perlengkapan kantor	7.994	4.037	541	-	11.490	Office equipment
Rumah	6.522	4.412	9.467	-	1.467	House
ATM	5.013	5.333	10.346	-	-	ATM
Total	126.956	69.901	57.243	-	139.614	Total
Nilai buku neto	**172.472**				**109.744**	**Net book value**

Bank menyewa beberapa aset termasuk rumah dinas, gedung kantor, ruang ATM, kendaraan dan lain-lain. Rata-rata masa sewa adalah 5 (lima) tahun.

Bank had rent a number of assets which include official houses, offices, ATM space, vehicle and others. The average of lease term is 5 (five) years.

14. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari piranti lunak dan *goodwill*.

14. Intangible Assets

Intangible assets consist of computer softwares and goodwill.

	2024	**2023**	
Piranti lunak	340.408	340.104	Software
Goodwill	295.711	295.711	Goodwill
Sub-total	636.119	635.815	Sub-total
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(365.312)	(350.230)	Accumulated amortization and impairment losses
Neto	**270.807**	**285.585**	**Net**

a. Piranti lunak

a. Softwares

	31 Desember/*December 31,* 2024				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	340.104	304	-	340.408	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(244.001)	(15.082)	-	(259.083)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**96.103**			**81.325**	**Net book value**

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	189.338	150.766	-	340.104	Cost
Akumulasi amortisasi (Catatan 33)	(176.826)	(67.175)	-	(244.001)	Accumulated amortization (Note 33)
Nilai buku neto	**12.512**			**96.103**	**Net book value**

14. Aset Takberwujud (lanjutan)

b. *Goodwill*

Goodwill timbul dari akuisisi entitas anak (Catatan 1c). Perubahan atas saldo *goodwill* pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	295.711	-	-	295.711	Cost
Akumulasi amortisasi *)	(39.748)	-	-	(39.748)	Accumulated amortization *)
Akumulasi penurunan nilai	(66.481)	-	-	(66.481)	Accumulated impairment
Nilai buku neto	**189.482**			**189.482**	**Net book value**

31 Desember/*December 31,* 2023

	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Additions***	**Pengurangan/ *Deductions***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***	
Biaya perolehan	295.711	-	-	295.711	Cost
Akumulasi amortisasi *)	(39.748)	-	-	(39.748)	Accumulated amortization *)
Akumulasi penurunan nilai	(66.481)	-	-	(66.481)	Accumulated impairment
Nilai buku neto	**189.482**			**189.482**	**Net book value**

Penurunan nilai sebesar Rp66.481 telah diakui karena jumlah tercatat lebih besar dari jumlah terpulihkannya. Jumlah terpulihkan atas PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) telah dihitung berdasarkan nilai pakai *(value in use)* yang ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa depan berdasarkan anggaran keuangan yang disetujui oleh manajemen untuk periode 5 (lima) tahun.

Bank telah melakukan uji penurunan nilai atas *goodwill* yang terbentuk dari akuisisi KBBS dengan asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	2024	**2023**	
Tingkat diskonto	6,88%	6,88%	Discount rate
Proyeksi tingkat pertumbuhan	4,50%	4,50%	Projected growth rate
Produk Domestik Bruto	5,17%	5,17%	Gross Domestic Product
Tingkat inflasi	2,28%	2,28%	Inflation rate
Tingkat pertumbuhan *terminal value*	1,60%	1,60%	Terminal value growth

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas aset tak berwujud pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

14. Intangible Assets (continued)

b. Goodwill

Goodwill arise from the acquisition of subsidiaries (Note 1c). Movements in goodwill balance as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

Impairment losses amounting to Rp66,481 has been recognized as the carrying amount exceeds its recoverable amount. Recoverable amount of PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS) has been calculated based on value in use that is determined by discounting the future cash flows resulting from financial budget approved by management covering a 5 (five) year period.

The Bank has performed impairment testing on goodwill resulting from acquisition of KBBS with the following key assumptions used by the Bank:

Management believes that there is no impairment on intangible assets as at December 31, 2024 and 2023.

15. Aset Lain-lain / 15. Other Assets

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Agunan yang diambil alih - neto	1.799.895	2.503.459	Foreclosed assets - net
Uang muka	1.059.363	772.143	Advance payments
Biaya dibayar dimuka	486.954	504.548	Prepaid expenses
Bunga masih akan diterima	364.123	264.748	Accrued interest
Setoran jaminan	99.835	98.972	Guarantee deposit
Tagihan terkait dengan transaksi kartu kredit dan ATM - neto	76.117	66.328	Receivables relating to credit card and ATM transactions - net
Pendapatan masih akan diterima	33.405	8.128	Accrued revenue
Piranti lunak dalam pengembangan	8.069	33.267	Softwares in development
Pembiayaan transaksi perdagangan	-	141.159	Trade financing
Lain-lain - neto	1.611.353	1.655.982	Others - net
Sub-total	5.539.114	6.048.734	Sub-total
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Bunga masih akan diterima	52.432	19.613	Accrued interest
Biaya dibayar di muka	111	106	Prepaid expenses
Sub-total	52.543	19.719	Sub-total
Total	**5.591.657**	**6.068.453**	**Total**

Pembiayaan transaksi perdagangan terdiri dari tagihan perdagangan UPAS, tagihan *flexy gas*, *flexy bill* dan *flexy health*, serta tagihan *invoice financing*. Dengan fasilitas ini debitur dapat memperoleh pembiayaan jangka pendek dari Grup dengan menjaminkan tagihan pelanggan kepada Bank, dan debitur dapat memilih untuk melunasi pinjaman tersebut sendiri atau Grup yang akan menagih kepada pelanggan. Fasilitas pembiayaan ini mulai dilaksanakan Grup pada tahun 2019.

Trade financing consists of trade UPAS, flexy gas, flexy bill, flexy health, and trade invoice financing. With these facilities, debtors can receive short term financing from the Group by using its invoices to customer as collateral to Bank, and debtors have the options to repay the financing by themselves or the Group can collect the amount required from the customers. The Group has only started these financing facilities in 2019.

Biaya dibayar di muka sebagian besar terdiri atas biaya-biaya sewa gedung, rumah, kendaraan, peralatan kantor dan asuransi.

Prepaid expenses consist mainly of prepaid building rent, housing rent, car rent, office equipment rent and insurance.

Agunan yang diambil alih merupakan agunan yang diambil alih oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian kredit yang terdiri atas tanah, bangunan, kendaraan, dan lain-lain.

Foreclosed assets consist of collaterals which were acquired by the Group in the settlement of loans in form of lands, buildings, vehicles, and others.

Nilai wajar agunan yang diambil alih masing-masing sebesar Rp1.799.895 dan Rp2.503.459, per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Fair value of foreclosed assets amounting to Rp1,799,895 and Rp2,503,459, as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

Kolektibilitas agunan yang diambil alih sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55i.

Collectibility of foreclosed collaterals in accordance with Financial Services Authority Regulations are disclosed in Note 55i.

Perubahan cadangan kerugian untuk agunan yang diambil alih adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for losses on foreclosed assets were as follows:

15. Aset Lain-lain (lanjutan) / 15. Other Assets (continued)

	2024	2023	
Saldo awal	231.669	34.158	Begining balance
Beban selama tahun berjalan	669.866	197.511	Provision during the year
Saldo akhir	**901.535**	**231.669**	**Ending balance**

Uang muka terdiri dari uang muka yang dikeluarkan sehubungan dengan pembukaan cabang-cabang baru, relokasi cabang, renovasi gedung kantor, dan uang muka biaya lain-lain.

Advance payments consist of payments which relate to the opening of new branch offices, branch relocation, office building renovation, and other advance payments.

Pendapatan masih akan diterima merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan dari pihak ketiga atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, dan lain-lain melalui Grup.

Accrued revenue represents fees from third parties for electricity, water, telephone, tax, and other payments made through the Group.

Setoran jaminan terdiri dari setoran yang diberikan Grup kepada pihak ketiga sebagai jaminan atas pemakaian jasa atau perizinan yang diberikan oleh pihak ketiga.

Guarantee deposits consist of Group's payment to third parties as collateral on services or license that is delivered by third parties.

16. Liabilitas Segera / 16. Liabilities Immediately Payable

	2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
Titipan pembayaran dari nasabah	206.931	193.272	Payments from customers
Titipan pajak sebagai bank persepsi	58.957	40.116	Tax collection received as collecting bank
Kiriman uang yang belum direalisasi	38.444	58.017	Unsettled money transfer
Deposit pembukaan rekening	31	3	Deposit for opening accounts
Lain-lain	66.635	136.965	Others
Sub-total	370.998	428.373	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kiriman uang yang belum direalisasi	30.059	2.542	Unsettled money transfer
Lain-lain	206	487	Others
Sub-total	30.265	3.029	Sub-total
Total	**401.263**	**431.402**	**Total**

Titipan pembayaran dari nasabah terdiri dari pembayaran kepada beberapa rekanan *payment point*.

Payments from customers consist of payments to several payment points partners.

Lain-lain terdiri dari deposito berjangka yang telah jatuh tempo, setoran jaminan jatuh tempo dan lain-lain.

Others consist of matured time deposits, matured guarantee deposits and others.

17. Giro

a. Berdasarkan pihak

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah	2.552	3.080	Rupiah
Mata uang asing	651	6.014	Foreign currencies
Sub-total	3.203	9.094	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	5.460.158	2.723.031	Rupiah
Mata uang asing	825.887	445.523	Foreign currencies
Sub-total	6.286.045	3.168.554	Sub-total
Total	**6.289.248**	**3.177.648**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp780.039 dan Rp459.743.

Giro yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp4.231.494 dan Rp753.970.

Giro yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp114.521 dan Rp58.280.

b. Berdasarkan mata uang

	2024	2023	
Rupiah	5.462.710	2.726.111	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	795.206	417.845	United States Dollar
Yen Jepang	30.434	32.241	Japanese Yen
Dolar Australia	405	432	Australian Dollar
Euro Eropa	246	262	European Euro
Dolar Singapura	216	722	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	31	35	Great Britain Poundsterling
	826.538	451.537	
Total	**6.289.248**	**3.177.648**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Giro dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Yen Jepang, Dolar Australia, Euro Eropa, Dolar Singapura dan Poundsterling Inggris.

17. Demand Deposits

a. By counterparties

As at December 31, 2024 and 2023, demand deposits under sharia banking principles amounted to Rp780,039 and Rp459,743, respectively.

Demand deposits amounting to Rp4,231,494 and Rp753,970, are pledged as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2024 and 2023, respectively.

Demand deposits under sharia banking principles which used as collateral for sharia financing/receivables granted to debtors as at December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp114,521 and Rp58,280, respectively.

b. By currency

c. Average annual interest rates

Demand deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Japanese Yen, Australian Dollar, European Euro, Singapore Dollar and Great Britain Poundsterling.

17. Giro (lanjutan)

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun (lanjutan)

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk Giro adalah sebagai berikut:

17. Demand Deposits (continued)

c. Average annual interest rates (continued)

The weighted average of interest rate per annum for Demand deposits are as follows:

	2024	2023	
	%	%	
Rupiah	0,12	0,12	Rupiah
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Singapura	1,00	0,85	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	0,25	0,25	Great Britain Poundsterling
Dolar Amerika Serikat	0,10	0,10	United States Dollar
Euro Eropa	0,10	0,09	European Euro
Dolar Australia	0,01	0,03	Australian Dollar
Yen Jepang	0,01	0,03	Japanese Yen

18. Tabungan

a. Berdasarkan pihak

18. Savings Deposits

a. By counterparties

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah:			Rupiah:
SiAga	44.958	18.130	SiAga
Mata uang asing:			Foreign currencies:
SiAga	302	361	SiAga
	45.260	18.491	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
SiAga	5.883.512	6.012.162	SiAga
Mudharabah	356.915	228.658	Mudharabah
Wadiah	248.387	249.284	Wadiah
Kerjasama	196.050	206.692	Kerjasama
Lain-lain	103.788	104.545	Others
Mata uang asing:			Foreign currencies:
SiAga	81.590	53.352	SiAga
	6.870.242	6.854.693	
Total	**6.915.502**	**6.873.184**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah adalah sebesar Rp607.224 dan Rp477.942.

As at December 31, 2024 and 2023, savings deposits under sharia banking principles amounted to Rp607,224 and Rp477,942, respectively.

Adapun pos tabungan lain-lain terdiri atas produk Tabungan Simple, Tabungan Wokee, Tabungan Haji dan Tabunganku.

Savings-Others consist of some products such as *Tabungan* Simple, *Tabungan Wokee*, *Tabungan Haji* and *Tabunganku*.

Tabungan yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp2.727.260 dan Rp2.119.864.

Savings deposits which used as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp2,727,260 and Rp2,119,864, respectively.

18. Tabungan (lanjutan)

a. Berdasarkan pihak (lanjutan)

Tabungan yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp10.638 dan Rp17.305.

b. Berdasarkan mata uang

	2024	2023	
Rupiah	6.833.610	6.819.471	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	80.993	51.876	United States Dollar
Dolar Australia	322	319	Australian Dollar
Euro Eropa	237	1.087	European Euro
Dolar Singapura	234	210	Singapore Dollar
Yen Jepang	99	214	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	7	7	Great Britain Poundsterling
Sub-total	81.892	53.713	Sub-total
Total	**6.915.502**	**6.873.184**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun

Tabungan dalam mata uang asing terdiri dari Dolar Amerika Serikat, Dolar Australia, Poundsterling Inggris, Euro Eropa, Dolar Singapura dan Yen Jepang.

Suku bunga rata-rata tertimbang setahun untuk tabungan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
	%	%	
Rupiah	0,28	0,16	Rupiah
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Singapura	1,00	1,00	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	0,25	0,25	Great Britain Poundsterling
Dolar Amerika Serikat	0,06	0,06	United States Dollar
Euro Eropa	0,10	0,08	European Euro
Dolar Australia	0,01	0,26	Australian Dollar
Yen Jepang	0,01	0,01	Japanese Yen

18. Savings Deposits (continued)

a. By counterparties (continued)

Savings deposits under sharia banking principles which used as collateral to sharia financing/receivables granted to debtors as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp10,638 and Rp17,305, respectively.

b. By currency

c. Average annual interest rates

Saving deposits in foreign currencies consist of United States Dollar, Australian Dollar, Great Britain Poundsterling, European Euro, Singapore Dollar and Japanese Yen.

The weighted average of interest rate per annum for saving deposits are as follows:

19. Deposito Berjangka

a. Berdasarkan pihak

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah	42.412	38.129	Rupiah
Mata uang asing	-	2.182	Foreign currencies
	42.412	40.311	

19. Time Deposits

a. By counterparties

19. Deposito Berjangka (lanjutan) / 19. Time Deposits (continued)

a. Berdasarkan pihak (lanjutan) / a. By counterparties (continued)

	2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah	30.441.972	31.206.482	Rupiah
Mata uang asing	2.904.024	3.491.518	Foreign currencies
	33.345.996	34.698.000	
Total	**33.388.408**	**34.738.311**	**Total**

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp5.124.920 dan Rp5.068.360.

As at December 31, 2024 and 2023, time deposits under sharia banking principles amounted to Rp5,124,920 and Rp5,068,360, respectively.

Deposito berjangka yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp746.766 dan Rp1.035.272.

Time deposits which used as collateral or blocked by the Bank as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp746,766 and Rp1,035,272, respectively.

Deposito berjangka yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah yang dijadikan sebagai jaminan atas pembiayaan/piutang syariah kepada beberapa debitur pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp213.364 dan Rp125.717.

Time deposits under sharia banking principles which used as collateral to sharia financing/ receivables granted to debtors as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp213.364 and Rp125,717, respectively.

b. Berdasarkan mata uang / b. By currency

	2024	2023	
Rupiah	30.484.384	31.244.611	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	2.900.193	3.489.847	United States Dollar
Euro Eropa	2.337	2.376	European Euro
Dolar Australia	801	842	Australian Dollar
Dolar Singapura	693	635	Singapore Dollar
Sub-total	2.904.024	3.493.700	Sub-total
Total	**33.388.408**	**34.738.311**	**Total**

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan / c. Average annual interest rate by contract period

	Tingkat bunga rata-rata per tahun (%)/ *Average interest rates per annum (%)*		Nilai nominal/*Nominal value*		
	2024	2023	2024	2023	
	%	%			
Rupiah:					**Rupiah:**
1 bulan	3,43	3,34	8.459.305	8.641.175	1 month
3 bulan	4,22	3,76	11.236.850	8.964.456	3 months
6 bulan	4,59	3,97	6.509.348	7.750.899	6 months
12 bulan	4,61	4,00	4.278.881	5.888.081	12 months
			30.484.384	31.244.611	

19. Deposito Berjangka (lanjutan) / 19. Time Deposits (continued)

c. Tingkat bunga rata-rata per tahun berdasarkan periode penempatan / c. Average annual interest rate by contract period

Mata uang asing:					**Foreign currencies:**
1 bulan	2,69	0,02	1.167.366	990.041	1 month
3 bulan	2,92	0,03	604.989	1.592.250	3 months
6 bulan	3,03	0,04	146.668	120.453	6 months
12 bulan	3,18	0,05	985.001	790.956	12 months
			2.904.024	3.493.700	
Total			**33.388.408**	**34.738.311**	**Total**

d. Berdasarkan sisa umur sampai dengan jatuh tempo / d. By remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 bulan	12.905.002	12.969.924	Less than a month
1 - 3 bulan	10.965.599	9.384.799	1 - 3 months
3 - 6 bulan	4.826.746	6.829.733	3 - 6 months
6 - 12 bulan	1.787.037	2.060.155	6 - 12 months
	30.484.384	31.244.611	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kurang dari 1 bulan	1.730.983	1.022.486	Less than a month
1 - 3 bulan	418.402	1.653.199	1 - 3 months
3 - 6 bulan	37.665	157.656	3 - 6 months
6 - 12 bulan	716.974	660.359	6 - 12 months
	2.904.024	3.493.700	
Total	**33.388.408**	**34.738.311**	**Total**

20. Simpanan Dari Bank Lain / 20. Deposits From Other Banks

a. Berdasarkan mata uang dan jenis / a. By currency and type

	2024	2023	
Pihak berelasi (Catatan 38)			**Related parties (Note 38)**
Rupiah:			Rupiah:
Giro	38.879	913	Demand deposits
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
Interbank call money	2.671.770	7.698.500	Interbank call money
Sub-total	2.710.649	7.699.413	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
Interbank call money	90.000	130.000	Interbank call money
Giro	32.724	14.048	Demand deposits
Deposito berjangka	25.600	21.200	Time deposits
Tabungan	22.213	22.060	Savings deposits
Sub-total	170.537	187.308	Sub-total
Total	**2.881.186**	**7.886.721**	**Total**

20. Simpanan Dari Bank Lain (lanjutan)

a. Berdasarkan mata uang dan jenis (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, terdapat simpanan dari bank lain yang berdasarkan pada prinsip perbankan syariah masing-masing sebesar Rp107.166 dan Rp180.553.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat simpanan dari Bank lain yang dijadikan sebagai jaminan atau diblokir oleh Bank.

20. Deposits From Other Banks (continued)

a. By currency and type (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, deposits from other banks under sharia banking principles amounted to Rp107,166 and Rp180,553, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, there were no deposits from other Banks which used collateral or blocked by the Bank.

b. Tingkat bunga rata-rata per tahun

b. Average annual interest rates

	2024	2023	
	%	%	
Rupiah:			**Rupiah:**
Deposito berjangka	3,75	3,55	Time deposits
Interbank call money	6,59	0,48	Interbank call money
Tabungan	1,20	1,19	Savings deposits
Giro	0,90	0,80	Demand deposits
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Interbank call money	4,91	5,36	Interbank call money
Deposito berjangka	0,00	0,00	Time deposits
Giro	0,00	0,00	Demand deposits

c. Berdasarkan sisa umur sampai dengan saat jatuh tempo

c. Based on their remaining period to maturity

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kurang dari 1 bulan	199.416	179.221	Less than a month
1 bulan - 3 bulan	-	8.000	1 month - 3 months
3 bulan - 12 bulan	10.000	1.000	3 months - 12 months
	209.416	188.221	
Dolar Amerika Serikat:			**United States Dollar:**
Kurang dari 1 bulan	2.671.770	4.465.130	Less than a month
1 bulan - 3 bulan	-	3.233.370	1 month - 3 months
	2.671.770	7.698.500	
Total	**2.881.816**	**7.886.721**	**Total**

21. Pajak Penghasilan

a. Utang pajak

21. Income Tax

a. Taxes payable

	2024	2023	
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 23 dan 4(2)	46.685	38.148	Articles 23 and 4(2)
Pasal 26	10.781	12.786	Article 26
Pasal 21	2.150	7.670	Article 21
Pajak pertambahan nilai	1.278	6.006	Value added tax
Lain-lain	9	25	Other
Total	**60.903**	**64.635**	**Total**

21. Pajak Penghasilan / 21. Income Tax

b. Beban pajak penghasilan / b. Income tax expense

2024	2023	
-	-	Beban pajak kini - Bank / Current tax expense - Bank
(3.159)	-	Beban pajak kini - entitas anak / Current tax expense - subsidiaries
(3.159)	-	Total beban pajak kini / Total current tax expense
(1.417.050)	702.789	Manfaat pajak tangguhan - bank / Deferred tax benefit - bank
(4.191)	28.895	Manfaat pajak tangguhan - entitas anak / Deferred tax benefit - subsidiaries
(1.421.241)	731.684	Total manfaat pajak tangguhan / Total deferred tax benefit
(1.424.400)	**731.684**	**Total Manfaat (beban) Pajak Tahun Berjalan / Total Current Year Tax Benefit (expense)**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian rugi akuntansi sebelum pajak penghasilan menggunakan tarif yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the loss before income tax multiplied by the enacted tax rate is as follows:

2024	2023	
(4.904.220)	(6.787.387)	Rugi sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian / Loss before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
(1.057.532)	573.817	Bagian laba (rugi) bersih entitas anak / Net income (loss) of subsidaries
(5.961.752)	(6.213.570)	Rugi sebelum pajak penghasilan - bank / Loss before income tax - bank
(1.311.586)	(1.366.985)	Manfaat pajak sesuai tarif pajak yang berlaku / Tax benefit based on applicable tax rate
236.917	11.976	Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan / Non-deductible expenses
(1.136)	(566)	Pendapatan dari investasi reksadana yang tidak dikenakan pajak / Income from mutual fund investment exempted from tax
14.644	34.666	Penyesuaian atas manfaat pajak tangguhan / Adjustment in deferred tax benefit
2.478.211	618.121	Perubahan pajak tangguhan yang tidak diakui / Change in unrecognized deffered tax
1.417.050	(702.789)	
		Beban (manfaat) pajak entitas anak / Tax expense (benefits) of subsidiaries
3.159	-	Kini / Current
4.191	(28.895)	Tangguhan / Deferred
7.350	(28.895)	
1.424.400	**(731.684)**	**Manfaat (beban) pajak Penghasilan - neto / Income (expense) tax benefit - net**

Rekonsiliasi antara rugi sebelum beban pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran rugi fiskal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before income tax expense, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated fiscal loss as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

21. Pajak Penghasilan (lanjutan) / 21. Income Tax (continued)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan) / b. Income tax expense (continued)

	2024	2023	
Rugi sebelum beban pajak penghasilan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(4.904.220)	(6.787.387)	Loss before income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Bagian laba (rugi) bersih entitas anak	(1.057.532)	573.817	Net income (expense) of subsidaries
Rugi sebelum pajak penghasilan - bank	(5.961.752)	(6.213.570)	Loss before income tax - bank
Perbedaan tetap:			Permanent differences:
Representasi	5.102	3.707	Representations
Sumbangan dan hadiah	1.146	3.500	Donations and gifts
Aktivitas karyawan	-	250	Employee activities
Reksadana yang tidak dikenakan pajak	(5.167)	(2.576)	Investment exempted from tax
Lain-lain	1.070.646	46.978	Others
Total perbedaan tetap	1.071.727	51.859	Total permanent differences
Perbedaan waktu:			Timing differences:
Cadangan kerugian (pembalikan cadangan):			Provision (reversal of allowance) for impairment losses on:
Kredit yang diberikan dan piutang	(1.551.811)	2.528.696	Loans and receivables
Penyusutan aset tetap	24.220	11.221	Depreciation of fixed assets
Beban untuk kesejahteraan karyawan	(10.655)	(15.103)	Employee service entitlements expense
Cadangan bonus	21.240	19.326	Bonus allowance
Cadangan kerugian penurunan nilai asset yang diambil alih	668.786	204.873	Allowance for impairment losses - foreclosed asset
Cadangan kerugian penurunan nilai flexy pay	-	51.597	Allowance for Impairment losses of flexy pay
Lain-lain	1.979	(23.771)	Others
Total perbedaan waktu	(846.241)	2.776.839	Total timing differences
Rugi fiskal	**(5.736.266)**	**(3.384.872)**	**Fiscal loss**

Kompensasi rugi fiskal yang kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi penghasilan kena pajak pada masa mendatang adalah sebagai berikut:

The fiscal loss compensation that may potentially be utilized to reduce taxable income in the future is as follows:

	2024	2023	
Kompensasi rugi fiskal			Fiscal loss compensation carry forward
2020	369.207	601.702	2022
2021	473.934	1.969.238	2022
2022	581.934	3.313.868	2022
2023	943.056	3.929.538	2023
2024	1.917.883	-	2024
Total	**4.286.014**	**9.814.346**	**Total**

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

b. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank tidak mengakui aset pajak tangguhan masing-masing sebesar Rp3.034.040 dan Rp618.121 yang berasal dari rugi fiskal Perusahaan sebesar Rp13.791.092 dan Rp2.809.640 karena manajemen Perusahaan berkeyakinan aset pajak tangguhan tersebut tidak akan dapat digunakan. Rugi fiskal Perusahaan akan kadaluwarsa di tahun 2029 dan 2028.

Rugi fiskal Bank hasil rekonsiliasi di atas telah sesuai dengan SPT Tahunan PPh Badan untuk pelaporan SPT tahun buku 2024 dan 2023.

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan

21. Income Tax (continued)

b. Income tax expense (continued)

As at December 31, 2024, and 2023, the Bank did not provide deferred tax asset amounted to Rp3,034,040 and Rp618,121, respectively, originating from the Company's fiscal loss of Rp13,791,092 and Rp2,809,640. The Company’s management believes that these deferred tax assets will not be realizable. The Company's fiscal loss will expire in 2029 and 2028.

The Bank’s fiscal loss, after reconciliation, has been agreed upon in the Bank’s Corporate Annual Tax Return for the fiscal years 2024 and 2023.

The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

c. Deferred tax assets (liabilities)

	Saldo Awal 1 Januari/ *Beginning Balance January 1, 2024*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credit to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Ekuitas/ *Credited to equity*	Penyesuaian saldo aset pajak tangguhan/ *Deferred tax asset adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember/ *Ending Balance December 31, 2024*	
Aset pajak tangguhan						**Deferred tax assets**
Liabilitas Imbalan kerja	21.136	(2.344)	2.916	-	21.708	Post-employee benefit liability
Cadangan kerugian Kartu kredit	4.749	(1.444)	-	-	3.305	Allowance for credit card
Rugi fiskal	2.159.154	(1.216.232)	-	-	942.922	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai asset yang diambil alih	45.072	147.133	-	-	192.205	Allowance for impairment losses of foreclosed asset
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	341.398	(341.398)	-	-	-	Allowance for impairment losses on loans financial assets and sharia financing/receivable
Keuntungan dari perubahan nilai atas instrumen pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(2.133)	-	6.124	-	3.991	Unrealizd on change in fair value of debt instrument through comprehensive income
Lain-lain	20.903	10.610	-	3.125	34.638	Other
Aset pajak tangguhan	2.590.279	(1.403.675)	9.040	3.125	1.198.769	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan						**Deferred tax liabilities**
Penyusutan aset tetap	6.269	5.328	-	(17.769)	(6.172)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi goodwill	(37.732)	(4.059)	-	-	(41.791)	Goodwill amortization
Liabilitas pajak tangguhan	(31.463)	1.269	-	(17.769)	(47.963)	Deferred tax liabilities
Aset pajak tangguhan - Bank - neto	**2.558.816**	**(1.402.406)**	**9.040**	**(14.644)**	**1.150.806**	**Deferred tax assets - Bank - net**
Aset pajak tangguhan - entitas anak - neto	**111.727**	**(4.191)**	**219**	**-**	**107.755**	**Deferred tax assets - subsidiaries - net**
Total	**2.670.543**	**(1.406.597)**	**9.259**	**(14.644)**	**1.258.561**	**Total**

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

c. Aset (liabilitas) pajak tangguhan (lanjutan)

Pengaruh pajak tangguhan atas beda waktu yang signifikan antara pelaporan komersial dan perpajakan adalah sebagai berikut:

21. Income Tax (continued)

c. Deferred tax assets (liabilities) (continued)

The tax effects of significant temporary differences between commercial reporting and tax purposes are as follows:

	Saldo Awal 1 Januari/ *Beginning Balance January 1, 2023*	(Dibebankan) Dikreditkan ke Laporan Laba Rugi/ *(Charged) Credit to Profit or Loss*	Dikreditkan ke Ekuitas/ *Credited to equity*	Penyesuaian saldo aset pajak tangguhan/ *Deferred tax asset adjustment*	Saldo Akhir 31 Desember/ *Ending Balance December 31, 2023*	
Aset pajak tangguhan						**Deferred tax assets**
Liabilitas Imbalan kerja	46.805	(3.323)	(1.415)	(20.931)	21.136	Post-employee benefit liability
Cadangan kerugian Kartu kredit	5.791	(1.042)	-	-	4.749	Allowance for credit card
Penyusutan aset tetap	17.535	2.469		(13.735)	6.269	Depreciation of fixed assets
Rugi fiskal	2.032.604	126.550	-	-	2.159.154	Fiscal loss
Cadangan kerugian penurunan nilai asset yang diambil alih	-	45.072	-	-	45.072	Allowance for impairment losses of foreclosed asset
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah	(214.915)	556.313	-	-	341.398	Allowance for impairment losses on loans financial assets and sharia financing/receivable
Lain-lain	5.428	15.475	-	-	20.903	Other
Aset pajak tangguhan	1.893.248	741.514	(1.415)	(34.666)	2.598.681	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan						**Deferred tax liabilities**
Amortisasi goodwill	(33.673)	(4.059)	-	-	(37.732)	Goodwill amortization
Keuntungan dari perubahan nilai atas instrumen pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(741)	-	(1.392)	-	(2.133)	Unrealizd on change in fair value of debt instrument through comprehensive income
Liabilitas pajak tangguhan	(34.414)	(4.059)	(1.392)	-	(39.865)	Deferred tax liabilities
Aset pajak tangguhan - Bank - neto	**1.858.834**	**737.455**	**(2.807)**	**(34.666)**	**2.558.816**	**Deferred tax assets - Bank - net**
Aset pajak tangguhan - entitas anak - neto	**83.317**	**28.895**	**(485)**	**-**	**111.727**	**Deferred tax assets - subsidiaries - net**
Total	**1.942.151**	**766.350**	**(3.292)**	**(34.666)**	**2.670.543**	**Total**

d. Administrasi

Undang-undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur bahwa masing-masing entitas dalam Grup menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang secara individu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak (DJP) dapat menetapkan atau mengubah jumlah pajak terutang dalam jangka waktu tertentu. Jangka waktu tersebut adalah lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

d. Administrative

The taxation laws of Indonesia require that each company in the Group within Indonesia submits individual tax returns on the basis of self-assessment. Under prevailing regulations the Director General of Tax (DGT) may assess or amend taxes within a certain period. This period is within five years of the time the tax becomes due.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak

2018

Pada tanggal 24 Agustus 2023 Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) atas PPh Badan sebesar Rp27.518, PPh 21 sebesar Rp1.629, PPh 21 Final sebesar Rp314, PPh 23 sebesar Rp169, PPh 26 sebesar Rp67, PPh 4 ayat 2 sebesar Rp932, PPN sebesar Rp9.071, Surat Tagihan Pajak (STP) PPN sebesar Rp596.

Pada tanggal 27 Oktober 2023 Bank mengajukan Keberatan pajak ke Kanwil Wajib Pajak Besar Satu Jakarta atas PPN AYDA sebesar Rp8.000.

Pada tanggal 11 Juli 2024 permohonan Keberatan Pajak Bank ditolak oleh Kanwil Wajib Pajak Besar Satu Jakarta, Bank akan mengajukan Banding Pajak di Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 4 Oktober 2024 Bank mengajukan Banding pajak ke Pengadilan Pajak atas PPN AYDA sebesar Rp8.000. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses keberatan masih berlangsung.

2019

Pada bulan April 2021, Bank telah menerima SKP dan STP atas hasil pemeriksaan seluruh jenis pajak (PPh Badan, *Withholding Tax* dan PPN) untuk tahun pajak 2019.

Pada tanggal 28 April 2021, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas lebih bayar PPN Dalam Negeri masa Pajak 2019 sebesar Rp58.927. Pemberian kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak dan/atau pajak yang akan terutang sebesar Rp23.843. Pada tanggal 23 Agustus 2021 Bank telah menerima Lebih Bayar PPN Dalam Negeri sebesar Rp35.084.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments

2018

On August 24, 2023 the Bank received Tax Assessment Letter for Underpayment (SKPKB) on Corporate Income Tax of Rp27,518, Withholding Tax art 21 of Rp1,629, Withholding Tax art 21 Final of Rp314, Withholding Tax art 23 of Rp169, Withholding Tax art 26 of Rp67, Withholding Tax art 4(2) of Rp932, VAT of Rp9,071, Tax Assessment Letter (STP) VAT of Rp596.

On October 27, 2023, the Bank filed a tax objection to the Regional Office of Large Taxpayers One Jakarta on VAT of AYDA for Rp8,000.

On July 11, 2024, the Bank's Tax Objection request was rejected by the Regional Taxpayer Office of Jakarta, the Bank will file a Tax Appeal at the Tax Court.

On October 4, 2024, the Bank filed a tax appeal to the Tax Court on the VAT of AYDA amounting to Rp8,000. As of the date the consolidated financial statements were published, the objection process was still ongoing.

2019

On April 2021, the Bank has received SKP and STP for the results of the examination of all types of taxes (Corporate Income Tax, *Withholding Tax* and VAT) for the 2019 fiscal year.

On April 28, 2021, the Directorate General of Taxes issued an Overpayment Tax Assessment Letter (SKPLB) on the overpayment of Domesctic VAT for the 2019 fiscal year amounting to Rp58,927. The tax overpayment is calculated with the tax payable and/or taxes that will be payable amounting to Rp23,843. On August 23, 2021 the Bank has received the Domestic VAT Overpayment amounted to Rp35,084.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2019 (lanjutan)

Bank menerima Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atas Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat 2, dan PPN untuk tahun pajak 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp75.270. Bank tidak menyetujui dan sedang mengajukan keberatan SKPKB atas PPN sebesar Rp45.558. Seluruh SKPKB dan STP, baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui telah dilunasi oleh Bank. Pembayaran atas SKPKB yang diajukan Keberatan dicatat sebagai Uang Muka. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian diterbitkan, proses keberatan masih berlangsung.

Pada tanggal 30 Juni 2022 permohonan Keberatan PPN bank ditolak.

Pada tanggal 26 Agustus 2022 bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 8 Agustus 2023 permohonan Banding PPN Bank dikabulkan majelis hakim, pada tanggal 12 September 2023 Bank telah menerima pengembalian PPN AYDA sebesar Rp45.818 dan dilakukan pemotongan atas utang Pemeriksaan Pajak Tahun Pajak 2018 sebesar Rp13.519.

Pada tanggal 9 November 2023 DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Pada tanggal 14 Juni 2024 Mahkamah Agung menolak pengajuan Peninjauan Kembali DJP untuk Masa Pajak Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember, sedangkan untuk masa pajak Juni Bank masih belum menerima putusan tersebut. Bank telah menyelesaikan Uang Muka Pajak untuk sengketa tersebut pada 23 Desember 2024.

2020

Pada tanggal 22 April 2022 bank menerima SKPLB PPh Badan sebesar Rp15.160, SKPKB PPh 21 sebesar Rp545, SKPKB PPh 21 Final sebesar Rp428, SKPKB PPh 23 sebesar Rp2.127, SKPKB PPh 26 sebesar Rp680, SKPKB PPh Pasal 4(2) sebesar Rp734, SKPKB PPN Dalam Negeri sebesar Rp22.031, SKPKB PPN Luar Negeri sebesar Rp48, dan STP PPN Dalam Negeri sebesar Rp1.558.

Pada 21 November 2023 Bank menerima pengembalian pajak sebesar Rp15.159 dikompensasikan untuk SKPKB dan STP sebesar Rp13.453, sehingga pengembalian pajak yang diterima bank sebesar Rp1.706.

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2019 (continued)

The Bank receives an Underpaid Tax Assessment Letter (SKPKB) and a Tax Collection Letter (STP) on Income Tax (PPh) Article 21, Article 23, Article 26, Article 4 paragraph 2, and VAT for the 2019 fiscal year with a total of Rp75,270. The Bank did not approve and submitted an objection to the SKPKB on VAT amounted to Rp45,558. All SKPKB and STP, both approved and disapproved, have been paid by the Bank. Payments for it, was recorded as Advanced payment. Until the date of these consolidated financial statements' released, the objection is still ongoing.

On June 30, 2022, the Bank VAT Objection application is rejected.

On August 26, 2022 the bank filed an appeal to the Tax Court. On August 8, 2023 the Bank's VAT appeal was granted by the panel of judges, on September 12, 2023 the Bank received a refund of VAT on AYDA amounting to Rp45,818 and deductions were made from the 2018 Tax Audit debt of Rp13,519.

On November 9, 2023 the DGT filed a Judicial Review to the Supreme Court. On June 14, 2024 the Supreme Court rejected the DGT's reconsideration for the January, February, March, April, May, July, August, September, October, November and December tax periods, while for the June tax period the Bank has not yet received the decision. The Bank has settled the tax advance payment for the dispute on December 23, 2024.

2020

On April 22, 2022 the Bank received SKPLB for a corporate income tax amounted to Rp15,160, SKPKB Art 21 amounted to Rp545, SKPKB Art 21 Final amounted to Rp428, SKPKB Art 23 amounted to Rp2,127, SKPKB Art 26 amounted to Rp680, SKPKB Art 4(2) amounted to Rp734, SKPKB VAT amounted to Rp22,031, SKPKB foreign VAT amounted to Rp48, and VAT STP amounted to Rp1,558.

On November 21, 2023 the Bank received a tax refund amounting to Rp15,159, which was deducted for SKPKB and STP amounted to Rp13,453, so that the tax refund received by the bank amounted to Rp1,706.

21. Pajak Penghasilan (lanjutan)

e. Pemeriksaan pajak (lanjutan)

2020 (lanjutan)

Atas SKPKB PPN AYDA Bank mengajukan keberatan sebesar Rp18.042, tanggal 21 Juni 2022. Pada tanggal 30 Desember 2022 permohonan Keberatan PPN Bank ditolak. Pada tanggal 06 April 2023, Bank mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 17 Oktober 2023, permohonan Banding Bank dikabulkan majelis hakim, pada tanggal 23, 24 dan 27 November 2023. Bank telah menerima pengembalian PPN AYDA sebesar Rp16.712 dan tanggal 1 Maret 2024 sebesar Rp1.328 dan dikompensasikan atas utang Pajak Cabang sebesar Rp1,4.

Pada tanggal 23 Januari 2024 DJP mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, pada tanggal 24 Juli 2024, 02 Oktober 2024, 29 Oktober 2024, dan 12 Desember 2024 permohonan DJP ditolak oleh Mahkamah Agung (putusan Mahkamah Agung untuk masa pajak Januari, Maret, April, Mei, Juni, September, dan Desember) untuk sisa masa pajak lainnya masih belum ada putusan.

2021

Pada tanggal 18 Desember 2023 Bank menerima Surat Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan nomor surat: S-1576/KPP.1901/2023.

Pada tanggal 11 November 2024 Bank menerima surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan pajak (STP) atas SKPKB PPh pasal 21 sebesar Rp156,-, SKPKB PPh pasal 23 sebesar Rp576,-, SKPKB PPh pasal 26 sebesar Rp668,-, SKPKB PPh pasal 4 ayat 2 sebesar Rp164,-, SKPKB PPN yang disetujui sebesar Rp846,-, dan SKPKB PPN yang tidak disetujui sebesar Rp13.473,- STP PPN sebesar Rp1.005,-, dan SKPKB PPN JLN sebesar Rp145.

Pada tanggal 13 Desember 2024 Bank telah menyampaikan surat Keberatan ke Kanwil Wajib Pajak Besar Satu atas sengketa PPN AYDA sebesar Rp13.473.

2022

Pada tanggal 11 Desember 2024 Bank menerima Surat Pemeriksaan Pajak untuk seluruh jenis pajak dari KPP Wajib Pajak Besar Satu dengan nomor surat: S-775/RIKSIS/KPP.1901/2024. Pada tanggal 31 Desember 2024 telah dilakukan kick-off Pemeriksaan Pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu Jakarta

21. Income Tax (continued)

e. Tax assessments (continued)

2020 (continued)

On the SKPKB VAT AYDA the Bank submitted to tax objection amounting to Rp18,042, on June 21, 2022. On December 30, 2022, the Bank VAT Objection application is rejected. On April 06, 2023 the Bank submit it to appeal to Tax Court.

On October 17, 2023, the Bank's appeal request was granted by the panel of judges, on November 23, 24 and 27, 2023. The Bank received a refund of AYDA VAT amounting to Rp16,712 and on March 1, 2024 amounting to Rp1,328 and compensation for the Branch Tax debt amounting to Rp1.4.

On January 23, 2024 the DGT filed a Judicial Review to the Supreme Court, On July 24, 2024 October 02, 2024, October 29, 2024, December 12, 2024 the DGT's application was rejected by the Supreme Court (the Supreme Court's decision for the January, March, April, May, June, September, and December tax periods) there has been no decision for the remaining tax periods.

2021

On December 18, 2023, the Bank received a Tax Audit Letter for all taxes from the Tax Office of Large Taxpayer One with letter number: S-1576/KPP.1901/2023.

On November 11, 2024 the Bank received a tax assessment letter (SKP) and tax invoice letter (STP) for SKPKB of Income Tax Article 21 amounting to Rp156, SKPKB of Income Tax Article 23 amounting to Rp576, SKPKB of Income Tax Article 26 amounting to Rp.668, SKPKB Income Tax Article 4 paragraph 2 amounting to Rp164, approved SKPKB VAT amounting to Rp846, and unapproved SKPKB VAT amounting to Rp13,473, STP VAT amounting to Rp1,005, and SKPKB VAT JLN amounting to Rp145.

On December 13, 2024 the Bank has submitted an objection letter to the Regional Office of Large Taxpayers One on the dispute of VAT AYDA amounting to Rp13,473.

2022

On December 11, 2024, the Bank received a Tax Audit Letter for all taxes from the Tax Office of Large Taxpayer One with letter number: S-775/RIKSIS/KPP.1901/2024. On December 31, 2024, a tax audit kick-off was conducted at the Jakarta Large Taxpayer One Tax Office.

22. Surat Berharga yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

22. Marketable Securities Sold with Agreements to Repurchase

Marketable securities sold with agreements to repurchase as at December 31, 2024 and 2023 are as follow:

	31 Desember/*December 31*, 2024						
	Jangka waktu/ *Period*	**Tanggal dimulai/ *Start date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Due date***	**Suku bunga/ *Interest rate***	**Harga beli kembali/ *Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest***	**Nilai neto/ Net *Value***
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
FR0085	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	680.996	(709)	680.287
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
FR0068	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	516.949	(538)	516.411
-Seri/*Series*	21 hari/	20 Des. 2024/	10 Jan. 2025/				
FR0071	*21 days*	*Dec. 20, 2024*	*Jan. 10, 2025*	6,60%	262.391	(479)	261.912
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
FR0073	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	204.115	(212)	203.903
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
FR0064	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	186.267	(194)	186.073
-Seri/*Series*	14 hari/	19 Des. 2024/	2 Jan. 2025/				
IDSR210325364S	*14 days*	*Dec. 19, 2024*	*Jan. 2, 2025*	6,45%	49.258	(18)	49.240
-Seri/*Series*	14 hari/	20 Des. 2024/	3 Jan. 2025/				
FR0058	*14 days*	*Dec. 20, 2024*	*Jan. 3, 2025*	6,45%	24.841	(13)	24.828
-Seri/*Series*	14 hari/	24 Des. 2024/	7 Jan. 2025/				
FR0073	*14 days*	*Dec. 24, 2024*	*Jan. 7, 2025*	6,45%	10.242	(13)	10.229
-Seri/*Series*	14 hari/	19 Des. 2024/	2 Jan. 2025/				
FR0073	*14 days*	*Dec. 19, 2024*	*Jan. 2, 2025*	6,45%	10.238	(4)	10.234
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
PBS012	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	627.301	(653)	626.648
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
PBS022	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	427.987	(445)	427.542
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
PBS005	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	232.373	(242)	232.131
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
SUKBI260225090	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	152.084	(185)	151.899
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
SUKBI260225090A	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	152.084	(185)	151.899
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
SUKBI040725364	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	103.845	(126)	103.719
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
SUKBI070325273	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	52.162	(63)	52.099
-Seri/*Series*	7 hari/	30 Des. 2024/	6 Jan. 2025/				
SUKBI031025364	*7 days*	*Dec. 30, 2024*	*Jan. 6, 2025*	6,25%	50.886	(62)	50.824
Total					**3.744.019**	**(4.141)**	**3.739.878**

	31 Desember/*December 31*, 2023						
	Jangka waktu/ *Period*	**Tanggal dimulai/ *Start date***	**Tanggal jatuh tempo/ *Due date***	**Suku bunga/ *Interest rate***	**Harga beli kembali/ *Repurchase price***	**Bunga belum diamortisasi/ *Unamortized interest***	**Nilai neto/ Net *Value***
Pihak ketiga/*Third parties*							
Rupiah:							
Bank Indonesia							
Obligasi Pemerintah/ *Government Bonds*							
-Seri/*Series*	7 hari/	29 Des. 2023/	5 Jan. 2024/				
SUKBI280224091	*7 days*	*Dec. 29, 2023*	*Jan. 5, 2024*	6,25%	103.680	(126)	103.554
-Seri/*Series*	7 hari/	29 Des. 2023/	5 Jan. 2024/				
SUKBI150224092	*7 days*	*Dec. 29, 2023*	*Jan. 5, 2024*	6,25%	52.475	(64)	52.411
-Seri/*Series*	7 hari/	29 Des. 2023/	5 Jan. 2024/				
SUKBI030524182	*7 days*	*Dec. 29, 2023*	*Jan. 5, 2024*	6,25%	63.743	(77)	63.666
Total					**219.898**	**(267)**	**219.631**

23. Pinjaman yang Diterima / 23. Borrowings

	2024	2023	
Pihak berelasi			**Related parties**
Rupiah:			Rupiah:
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapura	3.557.175	3.544.886	KB Kookmin Bank Co., Ltd, Singapore
KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong	3.000.000	3.000.000	KB Kookmin Bank Co., Ltd, Hong Kong
Sub-total	6.557.175	6.544.886	Sub-total
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	1.500.000	720.000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
International Finance Corporation	888.886	885.301	International Finance Corporation
PT Bank Oke Indonesia Tbk	94.895	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	49.780	49.780	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan	13.486	18.681	Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan
BPJS Ketenagakerjaan	5.284	6.538	BPJS Ketenagakerjaan
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	-	228.301	PT Sarana Multigriya Financial (Persero)
PT Bank Central Asia Tbk	-	2.000.000	PT Bank Central Asia Tbk
	2.552.331	3.908.601	
Dolar Amerika Serikat:			United States Dollar:
The Korea Development Bank Singapura	4.811.138	-	The Korea Development Bank Singapore
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	1.231.760	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Agence Francaise de Developpement	-	19.245	Agence Francaise de Developpement
	4.811.138	1.251.005	
Sub-total	7.363.469	5.159.606	Sub-total
Total	**13.920.644**	**11.704.492**	**Total**

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Akun ini merupakan fasilitas Rekening Dana Investasi (RDI). Dana atas fasilitas ini diterima oleh Bank dari Pemerintah melalui PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selaku koordinator Bank yang digunakan untuk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah-Rumah Sangat Sederhana (KPR-RSS) dan Kredit Pemilikan Rumah Sederhana (KPR-RS). Penyaluran pembiayaan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk terbagi menjadi 3 tahun anggaran, 1999, 2000 dan 2001.

i. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 1999/2000, No. 07/PKS/DIR/2000 tanggal 8 Februari 2000, maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp16.960.481.512.

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

This account represents investment funds account (Rekening Dana Investasi or RDI). This fund facility was received by the Bank from the Government through PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk as the coordinator bank was used to finance Very Simple Housing Loans (KPR-RSS) and Simple Housing Loan (KPR-RS). Fund disbursements provided by PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk are divided into 3 fiscal years, 1999, 2000 and 2001.

i. Based on agreement for Fiscal Year 1999/2000, No. 07/PKS/DIR/2000 dated February 8, 2000, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp16,960,481,512.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (lanjutan)

ii. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 2000, No. 21/PKS/DIR/2001 tanggal 22 Februari 2001 maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp20.703.980.143.

iii. Berdasarkan perjanjian tahun anggaran 2001, No. 51/PKS/DIR/2001 tanggal 2 November 2001 maksimum jumlah pinjaman yang diterima sebesar Rp19.575.642.000.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp49.780 dan belum ada pembayaran kembali sejak tahun 2004.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Berdasarkan akta No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 tanggal 29 Agustus 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 29 Agustus 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,6% per tahun.

Pada tanggal 19 Agustus 2024, fasilitas ini telah dilunasi dan tidak diperpanjang.

Berdasarkan akta No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 tanggal 27 September 2019, Bank mendapatkan penambahan fasilitas pinjaman *refinancing* Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 27 September 2024 dan dikenakan tingkat bunga 8,5% per tahun.

Bank memberikan jaminan berupa fidusia aset atas keuangan KPR, yaitu tagihan/piutang yang akan ada saat ini dan/atau akan ada di kemudian hari yang diperoleh dari penerbitan KPR, termasuk hak agunan yang melekat padanya.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada SMF masing-masing sebesar Rp228.301 dan Rp198.299.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga kepada SMF masing-masing sebesar Rp17.857 dan Rp25.858.

23. Borrowings (continued)

a. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (continued)

ii. Based on agreement for fiscal year 2000, No. 21/PKS/DIR/2001 dated February 22, 2001, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp20,703,980,143.

iii. Based on agreement for fiscal year 2001 No. 51 PKS/DIR/2001 dated November 02, 2001, the maximum amount of fund borrowing amounted to Rp19,575,642,000.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the outstanding balance of this borrowing amounted to Rp49,780, whereas no payments have been made since 2004.

b. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)

Based on deed No. 127/PP/SMF-BKP/VIII/2019 dated August 29, 2019, the Bank received additional borrowing facility for refinancing Housing Loan Facilities with a loan term until August 29, 2024 and bears an interest rate of 8.6% per annum.

On August 19, 2024, this facility has been paid and not extended.

Based on deed No. 141/PP/SMF-BKP/IX/2019 dated September 27, 2019, the Bank received an additional borrowing facility for refinancing Housing Loan Facilities with a loan term until September 27, 2024 and bears an interest rate of 8.5% per annum.

The Bank provides collateral in form of fiduciary of Housing Loan Facilities, that is bills/receivables that will exist at this time and/or will be available later obtained from the issuance of the Housing Loan Facilities, including the collateral rights attached to them.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to SMF amounted to Rp228,301 and Rp198,299, respectively.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest to SMF amounted to Rp17,857 and Rp25,858, respectively.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

c. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Berdasarkan akta No. 106/SK.9/HK.02.04/ 12/2012 dan PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012, fasilitas pinjaman yang diberikan dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan kepada Bank yang sasarannya untuk menurunkan tingkat suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi kelompok berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028.

Tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 0,5% per tahun. Pembayaran angsuran dilakukan setiap bulan selama 20 tahun sejak tanggal pencairan.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP3).

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada BLUP3 masing-masing sebesar Rp5.195 dan Rp5.620.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, pembayaran yang dilakukan atas masing-masing bunga kepada BLUP3 masing-masing sebesar Rp91 dan Rp120.

d. BPJS Ketenagakerjaan

Bank memperoleh fasilitas pinjaman terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdasarkan perjanjian No. PER/47/022011 dan PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 tanggal 16 Februari 2011. Fasilitas pinjaman ini diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan (dahulu PT Jamsostek (Persero)) terkait pemberian fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi peserta Jamsostek melalui Bank yang digunakan untuk membantu pembelian rumah dengan dukungan fasilitas Pinjaman Uang Muka Perumahan-Kerja Sama Bank (PUMP-KB).

23. Borrowings (continued)

c. Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan

Based on deed No. 106/SK.9/HK.02.04/12/2012 and PKO. 1846/DIR-GMBM/XII/2012 dated December 26, 2012, this borrowing facility is intended to re-lend and distribute Housing Financing Liquidity Facility for the Bank whose target is to reduce housing loan interest rate for low income and lower middle income community. Term of the facility is until December 31, 2028.

The interest rate of the borrowing is 0.5% per annum. Installment shall be made every month in 20 years after drawdown date.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Perumahan (BLUP3).

For the year ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to BLUP3 amounted to Rp5,195 and Rp5,620, respectively.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest to BLUP3 amounted to Rp91 and Rp120, respectively.

d. BPJS Ketenagakerjaan

The Bank received borrowing facility in relation with Housing Loan Facilities based on deed No. PER/47/022011 and PKS. 109/DIR-GMBM/11/2011 dated February 16, 2011. The borrowing facility obtained from BPJS Ketenagakerjaan (formerly PT Jamsostek (Persero)) in relation with Housing Loan Facilities for Jamsostek members through the Bank to assist them in purchasing houses with support from Housing Advance Loan-Cooperation with (PUMP-KB) Bank facility.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

d. BPJS Ketenagakerjaan (lanjutan)

Penyaluran dana akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan penyaluran kredit. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 31 Desember 2028 dengan tingkat bunga 2% per tahun. Pembayaran pokok dilakukan setiap bulan selama 10 tahun sejak tanggal pencairan.

Selama periode perjanjian kredit, tidak ada hal-hal yang dipersyaratkan atau tidak boleh dilakukan oleh Bank terkait dengan perjanjian pinjaman yang diterima dari BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada BPJS Ketenagakerjaan masing-masing sebesar Rp1.254 dan Rp1.182.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga kepada BPJS Ketenagakerjaan adalah sebesar Rp130 dan Rp154.

e. Agence Francaise de Developpement

Fasilitas pinjaman yang diberikan ini adalah dalam rangka menyalurkan dan mendistribusikan pinjaman untuk membiayai proyek-proyek energi terbarukan dengan fokus utama pada proyek-proyek tenaga air, proyek energi panas bumi dan proyek biomasa, berdasarkan perjanjian NºCID 1036 OI E pada tanggal 11 Februari 2014. Jangka waktu fasilitas ini adalah sampai dengan 11 Februari 2024 dengan tingkat bunga pinjaman adalah sebesar 4,78% per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Februari 2015. Sedangkan, pembayaran pokok dilakukan setiap 6 (enam) bulanan yang dimulai pada tanggal 11 Agustus 2018.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada AFD masing-masing sebesar USD1.250.000 (angka penuh) (Rp19.245) dan USD2.500.000 (angka penuh) (Rp39.133).

23. Borrowings (continued)

d. BPJS Ketenagakerjaan (continued)

Fund distribution will be done in phases based on loan granting needs. The term of this facility is up to December 31, 2028 with interest rate of 2% per annum. The principal shall be made every month in 10 years after drawdown date.

During the period of the credit agreement, there is no requirement or prohibitions that should be fulfilled by the Bank in relation to the loan agreement received from BPJS Ketenagakerjaan.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to BPJS Ketenagakerjaan amounted to Rp1,254 and Rp1,182, respectively.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest to BPJS Ketenagakerjaan amounted to Rp130 and Rp154, respectively.

e. Agence Francaise de Developpement

This borrowing facility is intended to re-lent and distributed fund to finance renewable energy projects, with a specific focus on hydropower projects, geothermal energy projects and biomass projects, based on agreement NºCID 1036 OI E dated February 11, 2014. This facility has a maximum period until February 11, 2024 with interest rate at 4.78% per annum. Interest payment is made every 6 (six) months starting from February 11, 2015. Meanwhile, principal made every 6 (six) months starting from August 11, 2018.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to AFD were USD1,250,000 (full amount) (Rp19,245) and USD2,500,000 (full amount) (Rp39,133), respectively.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

e. Agence Francaise de Developpement (lanjutan)

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada AFD masing-masing sebesar USD30.539 (angka penuh) (Rp493) dan USD151.699 (angka penuh) (Rp2.342).

Pada tanggal 2 Februari 2024 Bank telah melakukan pelunasan atas fasilitas ini dan tidak melakukan perpanjangan.

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Pada tanggal 9 Desember 2021, berdasarkan Akta No. 01 oleh Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Bank telah memeroleh fasilitas kredit berupa fasilitas *Term Loan Revolving 1* (TLR-1) sebesar Rp1.000.000, dengan suku bunga sebesar 4,95% dan berlaku hingga 9 Desember 2022. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap bulan.

Pada tanggal 12 Agustus 2022, berdasarkan Akta No. 08, Perubahan Pertama Atas Perjanjian Kredit oleh Notaris Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., Bank memperoleh fasilitas kredit tambahan yaitu fasilitas *Term Loan Revolving 2* (TLR-2) sebesar Rp1.000.000, dengan suku bunga sebesar JIBOR + Marjin 0,85% dan berlaku hingga 12 Agustus 2023. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pada tanggal 8 Desember 2022, perjanjian kredit tersebut kemudian diubah berdasarkan Perubahan Kedua Atas Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit TLR-1 berlaku hingga 9 Desember 2023;
- mengubah suku bunga menjadi suku bunga JIBOR + marjin 0,75% per tahun untuk TLR-1 dari jumlah fasilitas yang belum dibayar kembali; dan
- mengubah pembayaran bunga TLR-1 menjadi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

23. Borrowings (continued)

e. Agence Francaise de Developpement (continued)

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for interest to AFD were USD30,539 (full amount) (Rp493) and USD151,599 (full amount) (Rp2,342), respectively.

On February 2, 2024, the Bank has settled this facility and opted to not renew.

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

On December 9, 2021, based on Notarial Deed No. 01 by Notary Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., the Bank has obtained a credit facility in the form of a Term Loan Revolving (TLR-1) facility amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of 4.95% and is valid until December 9, 2022. This facility is used to finance the Bank's working capital. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every month.

On August 12, 2022, based on Notarial Deed No. 08, First Amendment to the Credit Agreement by Notary Veronica Sandra Irawaty Purnadi, S.H., the Bank obtained an additional credit facility, namely the Term Loan Revolving 2 (TLR-2) facility amounting to Rp1,000,000, with an interest rate of JIBOR + Margin 0.85% and is valid until August 12, 2023. The principal will be paid at maturity while the interest payments will be paid every 3 (three) months.

On December 8, 2022, the credit agreement was then amended based on the Second Amendment to the Credit Agreement as follows:

- extending the term of the TLR-1 credit facility valid until December 9, 2023;
- change the interest rate to JIBOR interest rate + 0.75% margin per year for TLR-1 of the outstanding facility amount; and
- change the TLR-1 interest payment to be paid every 3 (three) months.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (lanjutan)

Pada tanggal 7 Agustus 2023, perjanjian kredit tersebut diubah berdasarkan Perubahan Ketiga atas Perjanjian Kredit sebagai berikut:

- memperpanjang jangka waktu fasilitas TLR-2 berlaku hingga 12 Agustus 2025; dan
- mengubah suku bunga TLR-2, menjadi suku bunga JIBOR + marjin 0,85% per tahun dengan jangka waktu pembayaran kembali sampai dengan 12 bulan dan JIBOR + marjin 0,95% per tahun dengan jangka waktu pembayaran kembali lebih dari 12 bulan.

Pada tanggal 4 Desember 2023, perjanjian kredit tersebut diubah kembali berdasarkan Perubahan Keempat Atas Perjanjian Kredit untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas kredit TLR-1 berlaku hingga 9 Desember 2025.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada BCA masing-masing sebesar Rp2.000.000 dan Rp1.000.000.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga kepada PT Bank Central Asia Tbk masing-masing sebesar Rp140.491 dan Rp74.661.

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020, Bank telah memperoleh Fasilitas Kredit Berjangka (Fasilitas KB) dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) sebesar Rp500.000 dengan suku bunga yang ditentukan oleh konfirmasi dari Danamon. Jangka waktu fasilitas 12 (dua belas) bulan dan bersifat berulang (*revolving*). Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank.

Bank dan Danamon telah menandatangani Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit No. 508/PP/EB/0821 tanggal 27 Agustus 2021 sebagai pengganti Perjanjian Kredit No. 886/PK/FI/1020 tanggal 22 Oktober 2020. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2021 sampai 22 Oktober 2022 (*revolving*); dan

23. Borrowings (continued)

f. PT Bank Central Asia Tbk (BCA) (continued)

On August 7, 2023, the credit agreement was amended based on the Third Amendment to the Credit Agreement as follows:

- extending the validity period of the TLR-2 facility until August 12, 2025; and
- change the TLR-2 interest rate to a JIBOR + 0.85% margin per year interest rate with a repayment period of up to 12 months and JIBOR + 0.95% margin per year with a repayment period of more than 12 months.

On December 4, 2023, the credit agreement was amended again based on the Fourth Amendment to the Credit Agreement to extend the term of the TLR-1 credit facility until December 9, 2025.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to BCA amounted to Rp2,000,000 and Rp1,000,000, respectively.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest to PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp140,491 and Rp74,661, respectively.

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Based on Credit Agreement No. 886/PK/FI/1020 dated October 22, 2020, the Bank has obtained a Term Credit Facility (KB Facility) from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) in the amount of Rp500,000 with an interest rate determined by Danamon confirmation. The term of the facility is 12 (twelve) months and revolving. This facility is used to finance the Bank's working capital.

The Bank and Danamon signed an Amendment Agreement to Credit Agreement No. 508/PP/EB/0821 dated August 27, 2021 in lieu of Credit Agreement No. 886/PK/FI/1020 dated October 22, 2020. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2021 to October 22, 2022 (revolving); and

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

2. Menambah plafon Fasilitas KB yang semula sebesar Rp500.000 menjadi sebesar Rp1.000.000.

Bank dan Danamon telah menandatangani beberapa kali perubahan terhadap perjanjian kredit melalui surat permohonan perpanjangan jangka waktu kredit No. B.B.587/ARO/EB/1022 tanggal 18 Oktober 2022, dan mengalami perubahan kembali pada perjanjian kredit No. 189/PP/EB/0623 tanggal 22 Juni 2023. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2022 sampai 22 Oktober 2023 *(revolving)*; dan
2. Menambah plafon Fasilitas KB yang semula sebesar Rp1.000.000 menjadi sebesar Rp2.000.000.

Bank dan Danamon telah menandatangani Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 433/PP/EB/1223 tanggal 22 Desember 2023. Perubahan Perjanjian Kredit tersebut sebagai berikut:

1. Memperpanjang jangka waktu Fasilitas KB untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak 22 Oktober 2023 sampai 22 Oktober 2024 (*revolving*); dan
2. Mendapatkan fasilitas kredit berjangka 2 (Fasilitas KB 2) sebesar Rp1.000.000.

Selama periode perjanjian kredit, Bank harus memberitahukan secara tertulis dan/atau tidak tertulis kepada Danamon untuk melakukan hal-hal antara lain sebagai berikut:

i. Denda atas keterlambatan pembayaran dan percepatan pembayaran masing-masing sebesar 3%;
ii. Memberikan laporan keuangan yang telah diaudit/*in-house*;
iii. Menginformasikan kepada Danamon apabila terjadi perubahan usaha/sesuatu yang dapat mengubah usaha atau kekayaan Bank, anggaran dasar dan perubahannya, perubahan kepemilikan dan modal disetor serta perubahan Dewan Komisaris & Direksi Bank;
iv. Tunduk pada BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit);

23. Borrowings (continued)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

2. Increase the plafond of KB Facilities from Rp500,000 to Rp1,000,000.

The Bank and Danamon have signed several amendments to the credit agreement, including through the letter of credit term extension request No. B.B.587/ARO/EB/1022 dated October 18, 2022, and further amendments under credit agreement No. 189/PP/EB/0623 dated June 22, 2023. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2022 to October 22, 2023 (revolving); and
2. Increase the plafond of KB Facilities from Rp1,000,000 to Rp2,000,000.

The Bank and Danamon signed an Amendment Agreement to Credit Agreement No. 433/PP/EB/1223 dated December 22, 2023. Changes to the Credit Agreement are as follows:

1. Extending the term of the KB Facility for a period of 12 (twelve) months from October 22, 2023 to October 22, 2024 (revolving); and
2. Obtained term credit facility 2 (KB Facility 2) amounting to Rp1,000,000.

During the period of the Loan, the Bank should notify in writing and/or not in writing to Danamon to carry out the following activities, among others:

i. Penalty for late payment and accelerated payment of 3%, respectively;
ii. Provide audited/in-house financial statement;
iii. Inform Danamon if there is a change in business/something that may change the business or assets of the Bank, the articles of association and amendments, changes in ownership and paid-up capital as well as changes in the Board of Commisioners and Directors of Bank;
iv. Comply to Legal Lending Limit;

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (lanjutan)

v. Memastikan kolektibilitas Bank pada masing-masing Kreditur tetap pada kolektibilitas 1; dan
vi. Menginformasikan jika Bank melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.

Pada tanggal 14 Juni 2023, Bank telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Danamon sehubungan dengan perubahan peningkatan modal ditempatkan/disetor PT Bank KB Bukopin Tbk.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Selama tahun 2023, Bank melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp720.000 dan USD80.000.000 (angka penuh) (Rp1.231.760).

Pada tanggal 12 Februari 2024 dan 2 April 2024, Bank telah melunasi pinjaman dalam bentuk USD dengan total sebesar USD80.000.000 (angka penuh) (Rp1.231.760).

Selama tahun 2024, Bank melakukan penarikan pinjaman sebesar Rp1.500.000.

Pada tanggal 18 Desember 2024, Bank memperpanjang fasilitas kredit dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp3.000.000 dengan suku bunga mengambang sebesar 7,23%. Jangka waktu fasilitas ini berlangsung sampai 22 Oktober 2025 dan bersifat berulang *(revolving)*. Fasilitas ini digunakan untuk membiayai modal kerja Bank. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap quartal.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas pokok kepada Danamon Indonesia masing-masing sebesar Rp720.000, USD80.000.000 (Rp1.231.760) dan RpRp1.000.000.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga kepada Danamon Indonesia masing-masing sebesar Rp57.040 dan Rp65.993.

23. Borrowings (continued)

g. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (continued)

v. Ensure that the collectability of Bank on each Creditor remains at Collectability 1; and
vi. Inform if Bank conducts consolidation, merger, acquisitions or dissolution.

On June 14, 2023, the Bank has submitted a written notification to Danamon regarding the amendment to increase the issued/paid-up capital of PT Bank KB Bukopin Tbk.

Management believes that all compliance requirements have been met as at the date of the consolidated statement of financial position.

During 2023, the Bank drew down the loan amounting to Rp720,000 and USD80,000,000 (full amount) (Rp1,231,760).

On February 12, 2024, and April 2, 2024, the Bank settled a loan in USD totaling USD80,000,000 (full amount) (Rp1,231,760).

During 2024, the Bank drew down the loan amounting to Rp1,500,00.

On December 18 2024, the Bank extended a credit facility from PT Bank Danamon Indonesia Tbk amounting to Rp3,000,000 with a floating interest rate of 7.23%. The term of this facility lasts until October 22, 2025 and is revolving. This facility is used to finance the Bank's working capital. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every quarter.

or the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the principal to Danamon Indonesia amounted to Rp720.000, USD80.000.000 (Rp1.231.760) and Rp1,000,000, respectively.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest to Danamon Indonesia amounted to Rp57,040 and Rp65,993, respectively.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

h. International Finance Corporation

Pada tanggal 31 Mei 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman Obligasi Bank dari International Finance Corporation (IFC) untuk mendukung Operasi Pembiayaan yang Relevan. Pinjaman ini terdiri dari tiga fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche* 1 senilai Rp178.680 dengan suku bunga 7,54% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 25 Agustus 2022.
- Fasilitas *Tranche* 2 senilai Rp148.200 dengan suku bunga 7,54% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 31 Agustus 2022.
- Fasilitas *Tranche* 3 senilai Rp564.550 dengan suku bunga 7,66% pertahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 2 September 2022.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Agustus - 2 September 2025. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada pembayaran pokok kepada IFC.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada IFC adalah sebesar Rp68.757 dan Rp72.098.

Pada tanggal 13 Februari 2025 Bank telah melakukan pelunasan atas fasilitas ini.

i. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch

Pada tanggal 10 Juni 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas peminjaman kembali dari Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch untuk mendukung Operasi Pembiayaan yang Relevan. Pinjaman ini terdiri dari tiga fasilitas, yaitu:

- Fasilitas *Tranche* 1 senilai Rp714.720 dengan suku bunga 7,54% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 29 Agustus 2022.

23. Borrowings (continued)

h. International Finance Corporation

On May 31, 2022, the Bank has signed a Bank Bond loan facility agreement from the International Finance Corporation (IFC) to support the Relevant Financing Operations. This loan consists of three facilities, namely:

- Tranche 1 facility amounting Rp178,680 with an interest rate of 7.54% per annum. The bank has made all loan withdrawals on August 25, 2022.
- Tranche 2 facility amounting Rp148,200 with an interest rate of 7.54% per annum. The bank has made all loan withdrawals on August 31, 2022.
- Tranche 3 facility amounting Rp564,550 with an interest rate of 7.66% per annum. The bank has made all loan withdrawals on September 2, 2022.

This loan facility has a tenor of 3 (three) years and will mature on August 25 - September 2, 2025. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 6 months.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there has been no payment of principal IFC.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest payment to IFC were Rp68,757 and Rp72,098, respectively.

On February 13, 2025 the Bank has settled this facility.

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch

On June 10, 2022, the Bank has signed a loan facility agreement from the Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch to support the Relevant Financing Operations. This loan consists of three facilities, namely:

- Tranche 1 facility amounting Rp714,720 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on August 29, 2022.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch (lanjutan)

- Fasilitas *Tranche* 2 senilai Rp592.800 dengan suku bunga 7,54% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 2 September 2022.
- Fasilitas *Tranche* 3 senilai Rp2.258.200 dengan suku bunga 7,66% per tahun. Bank telah melakukan seluruh penarikan pinjaman pada tanggal 6 September 2022.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 3 (tiga) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Agustus - 6 September 2025. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 6 bulan.

Bank tidak memberikan jaminan dan komitmen apapun atas pinjaman ini.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada pembayaran pokok kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch masing-masing sebesar Rp276.138 dan Rp286.154.

k. Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch

Pada tanggal 29 Juni 2022, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum dan memperkuat struktur permodalan jangka panjang. Jumlah plafon keseluruhan dari fasilitas sebesar Rp3.000.000.

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 7 (tujuh) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2029. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan.

Bank tidak memberikan jaminan dan komitmen apapun atas pinjaman ini.

Untuk dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, tidak ada pembayaran pokok kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch.

Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023, total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch masing-masing sebesar Rp288.733 dan Rp287.952.

23. Borrowings (continued)

j. Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch continued)

- Tranche 2 facility amounting Rp592,800 with an interest rate of 7.54% per year. The bank has made all loan withdrawals on September 2, 2022.
- Tranche 3 facility amounting Rp2,258,200 with an interest rate of 7.66% per year. The bank has made all loan withdrawals on September 6, 2022.

This loan facility has a tenor of 3 (three) years and will mature on August 29 - September 6, 2025. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 6 months.

The Bank does not provide any collateral and commitment for this loan.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there has been no payment of principal to Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest payment to Kookmin Bank Co. Ltd., Singapore Branch Indonesia were Rp276,138 and Rp286,154, respectively.

k. Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch

On June 29, 2022, the Bank has signed a loan facility agreement from Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch to finance general working capital needs and strengthen the long-term capital structure. The total plafond for the facility amounting Rp3,000,000.

This loan facility has a tenor of 7 (seven) years and will mature on June 30, 2029. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 3 months.

The Bank does not provide any collateral and commitment for this loan.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there has been no payment of principal to Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the total payments made for the interest payment to Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch Indonesia were Rp288,733 and Rp287,952, respectively.

23. Pinjaman yang Diterima (lanjutan)

l. The Korea Development Bank, Singapore Branch

Pada tanggal 1 April 2024, Bank telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dari The Korea Development Bank, Singapore Branch untuk membiayai kebutuhan modal kerja umum jumlah plafon keseluruhan dari fasilitas sebesar USD300.000.000 (angka penuh).

Fasilitas pinjaman ini memiliki tenor 5 (lima) tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 1 April 2029. Pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo sedangkan pembayaran bunga akan dibayarkan setiap 3 bulan.

Fasilitas pinjaman telah dijamin dengan *Standby Letter of Credit (SBLC)* yang diterbitkan oleh KB Kookmin Bank, Singapore Branch, yang menyediakan perlindungan menyeluruh hingga USD300.000.000 (angka penuh). SBLC ini memberikan jaminan pembayaran kepada pihak pemberi kredit, memastikan bahwa kewajiban kredit akan terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 tidak ada pembayaran pokok kepada The Korea Development Bank, Singapore Branch.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 total pembayaran yang dilakukan atas bunga pinjaman kepada The Korea Development Bank, Singapore Branch adalah sebesar USD9.049.648 (angka penuh) (Rp145.654).

m. Lain-lain

Pinjaman lain-lain adalah pinjaman yang diterima oleh PT KB Bukopin Finance (entitas anak) dalam Rupiah yang berasal dari:

	2024	2023	
Pihak ketiga:			**Third parties:**
PT Bank Oke Indonesia Tbk	94.895	-	PT Bank Oke Indonesia Tbk
Total	94.895	**-**	**Total**

PT Bank Oke Indonesia Tbk

Pada tanggal 8 Oktober 2024, entitas anak memperoleh fasilitas Pinjaman Modal Kerja - *Installment* dengan sifat kredit *Non-Revolving*, dari Bank Oke, dengan maksimum pinjaman sebesar Rp100.000.000.000. (angka penuh) Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja untuk penyaluran pembiayaan pada Pembiayaan *Corporate*, Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) atau Koperasi Usaha Mikro, Keci Menengah atau Penduduk Berpenghasilan Rendah (PBR). Fasilitas pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,75% per tahun. Jangka waktu perjanjian kredit 36 bulan.

23. Borrowings (continued)

l. The Korea Development Bank, Singapore Branch

On April 1, 2024, the Bank has signed a loan facility agreement from The Korea Development Bank, Singapore Branch to finance general working capital needs The total plafond for the facility amounting USD300,000,000 (full amount).

This loan facility has a tenor of 5 (five) years and will mature on April 1, 2029. The principal will be paid at maturity while interest payments will be paid every 3 months.

The loan facility has been secured by a Standby Letter of Credit (SBLC) issued by KB Kookmin Bank, Singapore Branch, providing the aggregate coverage up to USD300,000,000 (full amount). This SBLC provides a payment guarantee to the lender, ensuring that the credit obligations will be fulfilled in accordance with the applicable terms.

For the year ended December 31, 2024 there has been no payment made for the principal payment to The Korea Development Bank, Singapore Branch.

For the year ended December 31, 2024 the total payment made for the interest payment to The Korea Development Bank, Singapore Branch were USD9,049,648 (full amount) (Rp145,654).

m. Others

Other borrowings represent borrowings received by PT KB Bukopin Finance (a subsidiary) in Rupiah from:

PT Bank Oke Indonesia Tbk

On October 8 2024, the subsidiary obtained a Working Capital - Installment Loan facility with Non-Revolving credit characteristics, from Bank Oke, with a maximum loan of Rp100,000,000,000 (full amount). This facility is used for additional working capital for distribution of financing to Corporate Financing, Financing for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) or Cooperatives for Micro, Small and Medium Enterprises or Low Income Residents (PBR). This loan facility bears interest of 8.75% per year. The term of the credit agreement is 36 months.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan

a. Berdasarkan jenis

24. Marketable Securities Issued

a. By type

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate period*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2026/ *September 9, 2026*	60	8	315.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 A Series
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2028/ *September 9, 2028*	84	8,9	685.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 B Series
Obligas Senior Global Bonds Tahun 2024	Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	BBB (Fitch)	30 Oktober 2027/ *October 30, 2027*	36	5.658	4.828.500	Shelf-registered Global Bonds Year 2024
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(38.342)	Less: Unamortized issuance cost
						5.790.158	

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Wali amanat/ *Arranger*	Peringkat/ *Rating*	Jatuh tempo/ *Maturity*	Jangka waktu suku bunga/ *Interest rate period*	Tingkat bunga per tahun/ *Interest rate per annum*	Nilai tercatat/ *Carrying amount*	
Rupiah:							**Rupiah:**
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II Tahun 2017	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idA- (Pefindo)	28 Februari 2024/ *February 28, 2024*	84	11	1.405.000	Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017
Obligasi Senior Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idnAAA (Fitch)	9 September 2024/ *September 9, 2024*	36	6,25	1.000.000	Shelf-registered Senior Bond I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri A	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2026/ *September 9, 2026*	60	8	315.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 A Series
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I Tahun 2021 Seri B	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	idAA (Pefindo)	9 September 2028/ *September 9, 2028*	84	8,9	685.000	Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 B Series
Dikurangi: Biaya emisi yang belum diamortisasi						(7.412)	Less: Unamortized issuance cost
						3.397.588	

Pada tanggal 28 Februari 2017, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank KB Bukopin Tahap II tahun 2017 sebesar Rp1.405.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

On February 28, 2017, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond II Bank KB Bukopin Tranche II Year 2017 amounting to Rp1,405,000 with 11% fixed interest per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 29 Mei 2017, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 28 Februari 2024 (pada tanggal 27 Februari 2024 Bank telah melunasi Obligasi tersebut).

The first interest payment was made on May 29, 2017, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on February 28, 2024 (on February 27, 2024, the Bank has repaid the Bonds).

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Berkelanjutan I Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Bond I Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 amounting to Rp1,000,000 with 6.25% fixed interest per annum and has 3 (three) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2024. (pada tanggal 6 September 2024 Bank telah melunasi Obligasi tersebut).

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri A sebesar Rp315.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun dan berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2026.

Pada tanggal 9 September 2021, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III Bank KB Bukopin Tahap I tahun 2021 Seri B sebesar Rp685.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,9% per tahun dan berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Indonesia. Bunga obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama telah dilakukan pada tanggal 9 Desember 2021, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 9 September 2028.

Pada tanggal 30 Oktober 2024, Bank menerbitkan dan mencatatkan Obligasi Senior *Unsecured Notes* sebesar USD 300.000.000 (angka penuh) (Rp4.828.500) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,658% per tahun dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi. Obligasi ini dicatat di Bursa Efek Singapura. Bunga obligasi dibayarkan setiap 6 (enam) bulan.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 30 April 2025, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo pokok obligasi akan dilakukan pada tanggal 30 Oktober 2027.

Bank menerbitkan obligasi senior dan obligasi subordinasi untuk mengembangkan pembiayaan dan memperkuat struktur pendanaan jangka panjang Bank.

24. Marketable Securities Issued (continued)

a. By type (continued)

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2024. (on September 6, 2024, the Bank has repaid the Bonds).

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 Series A amounting to Rp315,000 with 8% fixed interest per annum and has 5 (five) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2026.

On September 9, 2021, the Bank issued Shelf-registered Subordinated Bond III Bank KB Bukopin Tranche I Year 2021 Series B amounting to Rp685,000 with 8.9% fixed interest per annum and has 7 (seven) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Indonesia Stock Exchange. The bond's interest will be paid on quarterly basis.

The first interest payment was made on December 9, 2021, while the last interest payment and due date of the bond's principal will be made on September 9, 2028.

On October 30, 2024, the Bank issued Shelf registered Senior Unsecured Notes (Global Bonds) amounting to USD 300.000.000 (full amount) (Rp4,828,500) which bears fixed interest rate of 5.658% per annum and has 3 (three) years tenor since issuance date. The bond is listed on the Singapore Stock Exchange. The bond's interest will be paid on semi annual basis.

The first bond interest payment will be made on April 30, 2025, while the last interest payment and due date of bond's principal will be made on October 30, 2027.

The Bank issued senior bond and subordinated bond to expand its financing and to strengthen long term funding structure of the Bank.

24. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

a. Berdasarkan jenis (lanjutan)

Obligasi subordinasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, akan tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Bank, yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian obligasi subordinasi mencakup beberapa pembatasan, antara lain mengenai larangan pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor, penggabungan dan atau peleburan usaha, transaksi dengan pihak berelasi, pinjaman dan penerbitan obligasi.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Bank telah memenuhi ketentuan tentang pembatasan kewajiban sebagaimana disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024, Bank telah melakukan pembayaran bunga obligasi secara tepat waktu.

24. Marketable Securities Issued (continued)

a. By type (continued)

The subordinated bond is not guaranteed with specific collateral, but guaranteed with all assets of the Bank, that exist in the present or in the future, whether fixed or non-fixed assets in accordance with the provisions of article 1131 and 1132 of the Civil Laws.

The subordinated bond agreement includes several covenants, such as, the prohibition of reduction of authorized capital, issued and paid-up capital, merger, related party transactions, borrowings and bonds issuance.

For the year ended December 31, 2024, the Bank has fulfilled the clauses related to the covenant and obligations according to the Bonds Trustee Agreements.

For the year ended December 31, 2024, the Bank has paid the interest of the bond on a timely basis.

b. Berdasarkan mata uang / b. By currency

	2024	2023	
Rupiah	1.000.000	3.405.000	**Rupiah**
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Dolar Amerika Serikat	4.828.500	-	United States Dollar
	5.828.500	3.405.000	
Dikurangi : Biaya emisi yang belum diamortisasi	(38.342)	(7.412)	Less : Unamortized issuance cost
	5.790.158	**3.397.588**	

25. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi / 25. Estimated Losses On Commitments and Contingencies

a. Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi / a. Estimated losses on commitments and contingencies

	2024	2023	
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	15.567	19.672	Unused loans and sharia financing/receivables facilities
Bank Garansi yang diterbitkan	1.379	2.712	Bank Guarantees issued
L/C tidak dapat dibatalkan	371	318	Irrevocable L/C
	17.317	**22.702**	

25. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi (lanjutan)

25. Estimated Losses On Commitments and Contingencies (continued)

b. Perubahan estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi

b. Movements in the estimated losses on commitments and contingencies

2024	2023	
Saldo Awal	22.702	24.701	Beginning balance
Penyisihan pembentukan (pembalikan) cadangan selama tahun berjalan	(5.385)	(1.999)	Provision of additional (reversal) of allowance during the years
Saldo akhir	**17.317**	**22.702**	**Ending Balance**

26. Liabilitas Lain-Lain

26. Other Liabilities

2024	2023	
Pihak ketiga			**Third parties**
Rupiah:			Rupiah:
Titipan debitur	316.037	380.088	Debtor's deposits
Utang kesejahteraan karyawan	190.519	206.372	Employee benefits payable
Bunga masih harus dibayar	131.655	151.367	Interest payables
Liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan (Catatan 37)	103.564	100.344	Estimated liability for employee service entitlements (Note 37)
Setoran jaminan	20.965	30.700	Guarantee deposits
Lain-lain	726.245	669.941	Others
	1.488.985	1.538.812	
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Bunga masih harus dibayar	144.579	26.221	Interest payables
Setoran jaminan	-	130	Guarantee deposits
Lain-lain	4.838	4.977	Others
	149.417	31.328	
Total	**1.638.402**	**1.570.140**	**Total**

Utang kesejahteraan karyawan meliputi pencadangan tunjangan, bonus dan tantiem.

Employee benefits payable represents accrual for allowances, bonus and tantiem.

Bunga masih harus dibayar merupakan beban bunga simpanan nasabah, simpanan dari bank lain, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan.

Interests payable represent interest expense for customer deposits, deposits from other banks, borrowings, and securities issued.

Titipan debitur merupakan dana dari debitur untuk administrasi kredit, seperti biaya notaris dan asuransi, yang akan dibayarkan kepada pihak ketiga.

Debtor's deposit represents fund from debtors for loan administration, such as notary and insurance expenses, which will be paid to third parties.

Setoran jaminan merupakan titipan debitur terkait dengan penerbitan Bank garansi, *Letters of Credit*, Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), dan *safe deposit box*.

Guarantee deposits represent debtor's funds for issuance of Bank guarantee, Letters of Credit, Domestic Letters of Credit (SKBDN), and safe deposit box.

Lain-lain terdiri dari pendapatan provisi *Letters of Credit* yang diamortisasi sesuai dengan jangka waktu dan lain-lain.

Others consist of fees and commission from Letters of Credit which are amortized during the period and others.

27. Ekuitas

a. Modal saham

Dana Setoran Modal

Pada 19 Desember 2022, Bank mengirimkan Surat Permohonan kepada Otoritas Jasa keuangan dengan perihal Permohonan Persetujuan Pengakuan Dana Setoran Modal PUT VII sebagai Modal Inti (*Tier 1*), dan pada 20 Desember 2022 OJK menyetujui permohonan Bank untuk Dana Setoran Modal PUT VII sebagai Modal Inti (*Tier 1*).

Total Dana Setoran Modal yang disetujui OJK pada Modal Inti *(Tier 1)* adalah sebesar Rp3.000.000 yang akan dicatatkan pada Modal Inti *(Tier 1)* Bank. Dana Setoran Modal sebesar Rp3.000.000 tersebut telah disetorkan pada tanggal 19 Desember 2022 dan telah dicatat sebagai uang muka setoran modal. Pada tahun 2023 uang muka modal tersebut telah direalisasikan menjadi modal ditempatkan dan disetor.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII

Berdasarkan surat OJK No. S-113/D.04/2023 tanggal 5 Mei 2023, Bank telah mendapat Pernyataan Efektif pelaksanaan PUT VII dari OJK.

Bank menerbitkan 119.999.999.692 (nilai penuh) lembar saham kelas B dengan nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per lembar saham dengan Harga Pelaksanaan Rp100 (nilai penuh) per lembar saham sehingga seluruhnya berjumlah Rp11.999.999.969.200 (nilai penuh).

Dana yang berhasil dihimpun dalam PUT VII sebesar Rp11.999.999.969.200 (nilai penuh) yang dicatat dalam Modal Disetor di posisi ekuitas yang sudah termasuk uang muka setoran modal yang telah dikonversi menjadi modal disetor sebesar Rp3.000.000 pada tanggal 5 Mei 2023.

Berdasarkan hasil keputusan rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan dalam akta notaris No. 33 tanggal 9 Juni 2023 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh terdiri dari 21.337.978 saham kelas A dengan total sebesar Rp213.379.780.000 (nilai penuh) dan 187.866.201.892 saham kelas B dengan total sebesar Rp18.786.620.189.200 (nilai penuh). Perubahan ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0075748 tanggal 12 Juni 2023.

27. Equity

a. Share capital

Capital Deposit Fund

On December 19, 2022, the Bank sent a Request for Approval Letter to the Financial Services Authority regarding the Approval Request for the Recognition of Deposit Funds for LPO VII Capital as Core Capital (Tier 1), and on December 20, 2022, OJK approved the Bank application for Deposit Funds for LPO VII Capital as Core Capital (Tier 1).

The total Capital Deposit Fund approved by OJK for Core Capital (Tier 1) is Rp3,000,000 which will be recorded in the Bank Core Capital (Tier 1). The Capital Deposit Fund of Rp3,000,000 was paid on December 19, 2022 and has been recorded as an advance for future shares subscription. On 2023 the capital advance had been realized into issued and paid-up capital.

Limited Public Offering (LPO) VII

Based on OJK's letter No. S-113/D.04/2023 dated May 5, 2023, the Bank has received an Effective Statement of LPO VII Implementation from OJK.

The Bank issued 119,999,999,692 (full amount) class B shares with nominal value of Rp100 (full amount) per share with Exercise Price of Rp100 (full amount) per share for a total of Rp11,999,999,969,200 (full amount).

Total fund that has been gathered from LPO VII amounting to Rp11,999,999,969,200 (full amount) is recognized as Additional paid-in capital in the Bank's Equity which has been included in the realized capital advance into issued and paid-up capital amounting to Rp3,000,000 at May 5, 2023.

Based on the decisions of the Board of Directors and Board of Commissioners meetings which were covered by notarial deed No. 33 dated June 9, 2023 of Notary Aulia Taufani, SH, the number of fully paid capital consists of 21,337,978 common A shares with a total value of Rp213,379,780,000 (full amount) and 187,866,201,892 common B shares with a total value of Rp18,786,620,189,200 (full amount). These changes have been accepted by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia with Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0075748 dated June 12, 2023.

27. Ekuitas (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII (lanjutan)

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

	Jumlah Saham (Nilai Penuh)/ *Number of Shares (Full Amount)*	Persentase Kepemilikan 31 Des 2024/ *Percentage of Ownership Dec 31, 2024*	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Capital*	
I. Saham Biasa Kelas A (Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				**I. Common A Shares** (Rp10,000 (full amount) per share)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	0,00 %	47.363	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	16.601.723	0,01 %	166.017	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,01 %**	**213.380**	Total common A shares
II. Saham Biasa Kelas B (Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				**II. Common B Shares** (Rp100 (full amount) per share)
Kookmin Bank Co., Ltd	125.655.736.951	66,87 %	12.565.574	Kookmin Bank Co., Ltd
STIC Eugene Star Holdings Inc	31.900.000.000	16,98 %	3.190.000	STIC Eugene Star Holdings Inc
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	0,55 %	103.423	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Jung Ho Han (Direktur)	11.983.400	0,00 %	1.198	Jung Ho Han (Director)
Woo Yeul Lee (Direktur Utama)	11.801.000	0,00 %	1.180	Woo Yeul Lee (President Director)
Robby Mondong (Wakil Direktur Utama)	5.107.000	0,00 %	511	Robby Mondong (Deputy President Director)
Helmi Fahrudin (Direktur)	2.483.951	0,00 %	248	Helmi Fahrudin (Director)
Seng Hyup Shin (Wakil Komisaris Utama)	2.300.000	0,00 %	230	Seng Hyup Shin (Deputy President Commisioner)
Dodi Widjajanto (Direktur)	2.000.088	0,00 %	200	Dodi Widjajanto (Director)
Henry Sawali (Direktur)	1.600.000	0,00 %	160	Henry Sawali (Director)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	29.238.957.126	15,59 %	2.923.896	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas B	187.866.201.892	99,99 %	18.786.620	Total common B shares
Total saham biasa	**187.887.539.870**	**100,00 %**	**19.000.000**	**Total common shares**

Susunan pemegang saham Bank pada tanggal 31 Desember 2023 sebagai berikut:

	Jumlah Saham (Nilai Penuh)/ *Number of Shares (Full Amount)*	Persentase Kepemilikan 31 Des 2023/ *Percentage of Ownership Dec 31, 2023*	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Capital*	
I. Saham Biasa Kelas A (Rp10.000 (nilai penuh) per lembar saham)				**I. Common A Shares** (Rp10,000 (full amount) per share)
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	4.736.255	0,00 %	47.363	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	16.601.723	0,01 %	166.017	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas A	**21.337.978**	**0,01 %**	**213.380**	Total common A shares

27. Equity (continued)

a. Share capital (continued)

Limited Public Offering (LPO) VII (continued)

The Bank's shareholders as at December 31, 2024 are as follows:

The Bank's shareholders as at December 31, 2023 are as follows:

27. Ekuitas (lanjutan)

a. Modal saham (lanjutan)

Penawaran Umum Terbatas (PUT) VII (lanjutan)

	Jumlah Saham (Nilai Penuh)/ *Number of Shares (Full Amount)*	Persentase Kepemilikan 31 Des 2023/ *Percentage of Ownership Dec 31, 2023*	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Capital*	
II. Saham Biasa Kelas B (Rp100 (nilai penuh) per lembar saham)				**II. Common B Shares** Rp100 (full amount) per share)
Kookmin Bank Co., Ltd	125.655.736.951	66,87 %	12.565.574	Kookmin Bank Co., Ltd
STIC Eugene Star Holdings Inc	31.900.000.000	16,98 %	3.190.000	STIC Eugene Star Holdings Inc
PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	1.034.232.376	0,55 %	103.423	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
Woo Yeul Lee (Direktur Utama)	8.500.000	0,01 %	850	Woo Yeul Lee (President Director)
Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia	5.382.249	0,00 %	538	Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia
Seng Hyup Shin (Direktur)	2.300.000	0,00 %	230	Seng Hyup Shin (Director)
Robby Mondong (Wakil Direktur Utama)	1.107.000	0,00 %	111	Robby Mondong (Deputy President Director)
Dodi Widjajanto (Direktur)	1.000.088	0,00 %	100	Dodi Widjajanto (Director)
Yohanes Suhardi (Direktur)	574.800	0,00 %	57	Yohanes Suhardi (Director)
Helmi Fahrudin (Direktur)	482.951	0,00 %	48	Helmi Fahrudin (Director)
Henry Sawali (Direktur)	200.000	0,00 %	20	Henry Sawali (Director)
Masyarakat (masing-masing kepemilikan kurang dari 5%)	29.256.685.477	15,58 %	2.925.669	Public (Individual ownership of less than 5%)
Total saham biasa kelas B	187.866.201.892	99,99 %	18.786.620	Total common B shares
Total saham biasa	**187.887.539.870**	**100,00 %**	**19.000.000**	**Total common shares**

Semua saham yang dikeluarkan oleh Bank adalah saham atas nama dan setiap saham mempunyai 1 (satu) hak suara.

All shares issued by the Bank entitle the holder to have 1 (one) vote per share.

b. Tambahan modal disetor - neto

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut:

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran saham perdana - neto	184.694	Additional paid-in-capital from IPO - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2006	**184.694**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2006**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	33.138	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2007	**217.832**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2007**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	578	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2008	**218.410**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2008**

27. Equity (continued)

a. Share capital (continued)

Limited Public Offering (LPO) VII (continued)

b. Additional paid-in capital - net

The movements in additional paid in capital are as follow:

27. Ekuitas (lanjutan)

b. Tambahan modal disetor - neto (lanjutan)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas I - neto	82.647	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering I - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.133	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2009	**304.190**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2009**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	55.439	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2010	**359.629**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2010**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas II - neto	727.852	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering II - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	6.838	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2011	**1.094.319**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2011**
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	5.686	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2012	**1.100.005**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2012**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	281.522	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari eksekusi opsi saham - neto	3.915	Additional paid-in-capital arising from the exercise of share options - net
Pembalikan cadangan opsi saham yang telah gugur	8.599	Reversal of share option reverse which has been forfeited
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2013	**1.394.041**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2013**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas III - neto	330.028	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering III - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2014	**1.724.069**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2014**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas IV - neto	1.199.869	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering IV - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2018	**2.923.938**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2018**

27. Equity (continued)

b. Additional paid-in capital - net (continued)

The movements in additional paid in capital are as follow: (continued)

27. Ekuitas (lanjutan) / 27. Equity (continued)

b. Tambahan modal disetor - neto (lanjutan) / b. Additional paid-in capital - net (continued)

Perubahan tambahan modal disetor adalah sebagai berikut: (lanjutan)

The movements in additional paid in capital are as follow: (continued)

Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas V - neto	372.861	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering V - net
Tambahan modal disetor yang berasal dari PMTHMETD - neto	1.472.452	Additional paid-in-capital from Private Placement - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2020	**4.769.251**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2020**
Tambahan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umun Terbatas VI - neto	3.517.177	Additional paid-in-capital from Limited Public Offering VI - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021	**8.286.428**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2022 and December 31, 2021**
Penggunaan tambahan modal disetor yang digunakan untuk biaya Penawaran Umum Terbatas VII - neto	(60.661)	Use of additional paid-in capital used for Limited Public Offering costs VII - net
Saldo tambahan modal disetor - neto pada tanggal 31 Desember 2024 and 2023	**8.225.767**	**Balance of additional paid-in-capital - net as at December 31, 2024 and 2023**

Tambahan modal disetor berupa agio saham berasal dari penerbitan saham pada saat IPO, PUT I, PUT II, PUT III, PUT IV, PUT V, PMTHMETD, PUT VI dan PUT VII sebagai berikut:

Additional paid-in capital arise from issuance of shares in IPO, LPO I, LPO II, LPO III, LPO IV, LPO V, PP, LPO VI and LPO VII are as follow:

	Harga Penawaran (Nilai Penuh) per Saham/ *Offering Price (Full Amount)* per Share	**Jumlah Lembar Saham/ *Number of Shares***	
IPO	350	843.765.500	IPO
PUT I	415	286.050.768	LPO I
PUT II	520	1.787.960.495	LPO II
PUT III	660	1.106.252.141	LPO IIII
PUT IV	570	2.565.288.316	LPO IV
PUT V	180	4.660.763.499	LPO V
PMTHMETD	190	16.360.578.947	PP
PUT VI	200	35.214.288.984	LPO VI
PUT VII	100	119.999.999.692	LPO VII

28. Kepentingan Non-Pengendali / 28. Non-Controlling Interest

Perubahan kepentingan non-pengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

Movements in the non-controlling interest's share in the net assets of the subsidiaries are as follows:

	2024	**2023**	
Saldo awal	(26.146)	(4.828)	Beginning balance
Bagian kepentingan non-pengendali atas rugi bersih entitas anak	531	(21.318)	Net loss of subsidiaries attributable to non-controlling interest
Saldo akhir	**(25.615)**	**(26.146)**	**Ending balance**

29. Pendapatan Bunga Dan Syariah

Pendapatan bunga diperoleh dari:

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Kredit yang diberikan	3.091.011	2.867.896	Loans
Surat-surat berharga	1.065.926	897.932	Marketable securities
Penempatan pada Bank Bank Indonesia dan bank lain	136.528	114.055	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	42.742	123.417	Purchased with agreements to resell Bank
Giro pada Bank Indonesia	25.270	28.107	Current account with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	722	1.230	Current account with other banks
Tagihan lainnya	420	135	Other receivables
Sub-total	4.362.619	4.032.772	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Kredit yang diberikan	484.633	252.183	Loans
Surat-surat berharga	58.329	31.270	Marketable securities
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	25.402	58.135	Placements with Bank Indonesia and other banks
Giro pada bank lain	-	3	Current account with other banks
Tagihan lainnya	290	331	Other receivables
Sub-total	568.654	341.922	Sub-total
Total pendapatan bunga	4.931.273	4.374.694	Total interest income
Pendapatan syariah	522.826	486.942	Sharia income
Total	**5.454.099**	**4.861.636**	**Total**

Pendapatan bunga dan syariah berdasarkan klasifikasi aset keuangan adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	5.023.311	4.575.624	Measured at amortized cost
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	354.770	230.219	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	76.018	55.793	Fair value through other comprehensive income
Total	**5.454.099**	**4.861.636**	**Total**

Termasuk dalam pendapatan bunga dari kredit yang diberikan adalah provisi dan komisi yang berkaitan dengan kegiatan pemberian kredit yang diamortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif masing-masing sebesar Rp45.787 dan Rp61.738 untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

Termasuk dalam pendapatan syariah adalah pendapatan atas pembiayaan syariah dan surat-surat berharga.

29. Interest And Sharia Income

Interest income is derived from the following:

Interest and sharia income based on the classification of financial assets are as follows:

Interest income from loan include fees and commission related to lending activities amortized using an effective interest rate method amounting to Rp45,787 and Rp61,738 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively.

Sharia income includes income from sharia financing and marketable securities.

30. Beban Bunga dan Syariah / 30. Interest Expense and Sharia Charges

Beban bunga dan syariah berasal dari:

Interest expense and sharia charges are derived from:

	2024	2023	
Rupiah:			**Rupiah:**
Deposito berjangka	1.664.056	1.747.716	Time deposits
Pinjaman yang diterima	844.219	852.041	Borrowings
Tabungan	260.606	191.786	Savings deposits
Surat berharga yang diterbitkan	156.498	308.086	Marketable securities issued
Giro	64.226	36.462	Demand deposits
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	51.428	4.525	Marketable securities sold with agreement to repurchase
Simpanan dari bank lain	16.025	13.949	Deposits from other banks
Sub-total	3.057.058	3.154.565	Sub-total
Mata uang asing:			**Foreign currencies:**
Simpanan dari bank lain	392.830	427.869	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	259.672	39.216	Borrowings
Deposito berjangka	190.200	123.030	Time deposits
Surat berharga yang diterbitkan	53.713	-	Marketable securities issued
Giro	11.621	1.034	Demand deposits
Tabungan	114	996	Savings deposits
Sub-total	908.150	592.145	Sub-total
Total beban bunga	3.965.208	3.746.710	Total interest expense
Beban syariah	336.166	306.044	Sharia charges
Total	**4.301.374**	**4.052.754**	**Total**

Sehubungan dengan liabilitas bank umum yang dijamin oleh Program Penjaminan Pemerintah, Pemerintah Republik Indonesia telah mendirikan sebuah lembaga independen berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 24 tahun 2004 tanggal 22 September 2004. Berdasarkan peraturan ini, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjamin dana masyarakat termasuk dana dari bank lain dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

In connection with the commercial bank obligations guaranteed by Government Guarantee Program, the Indonesian Government has established an independent institution in accordance with the Republic of Indonesia Law No. 24 year 2004 dated September 22, 2004. Under this Law, The Deposit Guarantee Institution (*Lembaga Penjamin Simpanan*/LPS) guarantees third parties deposits including deposits from other banks in the form of demand deposits, time deposits, certificates of deposit, saving deposits and/or other equivalent forms.

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin LPS. Berdasarkan peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100.000.000 (nilai penuh) diubah menjadi maksimum Rp2.000.000.000 (nilai penuh). Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Bank adalah peserta dari program penjaminan tersebut.

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by LPS. Based on such regulation, the customers' guaranteed deposit in a Bank which was previously regulated under Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100,000,000 (full amount) was amended to a maximum of Rp2,000,000,000 (full amount). As at December 31, 2024 and 2023, the Bank was a participant of above guarantee program.

Bank telah melakukan pembayaran premi Program Penjaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum masing-masing sebesar Rp82.152 dan Rp98.812 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, yang dicatat sebagai beban pembiayaan lainnya.

The Bank has paid the premium on the Government Guarantee Program for Obligation of Commercial Banks amounting to Rp82,152 and Rp98,812 for the years ended December 31, 2024 and 2023, respectively, which was recorded as other financing charges.

31. Provisi dan Komisi Lainnya / 31. Other Fees and Commissions

	2024	2023	
Imbalan jasa	125.764	152.278	Fees
Jasa administrasi	46.603	94.318	Administrative service charges
Komisi merchant	4.515	5.702	Merchant commission
Lain-lain	53.066	81.434	Others
Total	**229.948**	**333.732**	**Total**

Imbalan jasa merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan imbalan atas pembayaran listrik, air, telepon, pajak, transaksi perdagangan dan lain-lain melalui Bank dan pendapatan imbalan atas transaksi ATM dengan bank lain.

Fees represent fees for electricity, water, telephone, tax, trade financing and other payments made through the Bank and fees from ATM transaction with other banks.

Lain-lain merupakan pendapatan dari jasa-jasa yang diberikan oleh Bank yang antara lain meliputi pendapatan jasa pelayanan nasabah dan transaksi kartu kredit.

Others consist of fees from services provided by the Bank, which include among others income from customer service and credit card transactions.

32. Pemulihan Cadangan (Penyisihan) Kerugian Penurunan Nilai Atas Aset Keuangan / 32. Reversal of Allowance (Provision) For Impairment Losses On Financial Assets

	2024	2023	
Surat-surat berharga (Catatan 7i)	(171)	(33)	Marketable securities (Note 7i)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	(3.372.975)	(5.466.917)	Loans and Sharia financing/ receivables
Tagihan akseptasi	413	(1.402)	Acceptance receivable
Tagihan lainnya	(80.167)	(69.440)	Other receivable
Total	**(3.452.900)**	**(5.537.792)**	**Total**

33. Beban Umum Dan Administrasi / 33. General And Administrative Expenses

Beban umum dan administrasi terdiri dari:

General and administrative expenses consist of:

	2024	2023	
Perbaikan dan pemeliharaan	226.638	198.995	Repairs and maintenance
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	151.356	193.415	Depreciation of fixed assets (Note 13)
Alih daya	122.887	151.973	Outsourcing
Jasa profesional	110.075	108.739	Professional fees
Komunikasi	52.258	62.006	Communications
Transportasi	36.401	35.290	Transportation
Pendidikan dan pelatihan	28.722	26.192	Education and training
Iklan dan promosi	25.225	23.015	Advertising and promotion
Listrik dan air	24.276	27.162	Electricity and water
Transaksi ATM	20.520	11.750	ATM transactions
Interchange dan keanggotaan kartu	18.458	28.426	Card interchange and membership
Amortisasi piranti lunak (Catatan 14)	15.082	67.175	Amortization of software (Note 14)
Sewa	14.123	130.118	Rent
Perlengkapan kantor	13.713	10.982	Office supplies
Beban Bunga - Aset Sewa	10.588	15.795	Interest Expense - Lease
Representasi	5.901	4.499	Representation
Asuransi	3.607	5.835	Insurance
Pengiriman uang	1.373	2.008	Cash delivery
Lain-lain	238.455	268.219	Others
Total	**1.119.658**	**1.371.594**	**Total**

33. Beban Umum Dan Administrasi (lanjutan)

Interchange kartu merupakan biaya yang timbul dari transaksi kartu kredit dan debit dengan *Visa Electron* dan *MasterCard.*

Lain-lain meliputi biaya kegiatan karyawan, biaya proses warkat kliring, biaya transaksi *payment point*, sumbangan dan hadiah dan lain-lain.

33. General And Administrative Expenses (continued)

Card interchange is cost from the transaction of credit and debit cards with Visa Electron and MasterCard.

Others consist of employees' activities expense, clearing process expenses, payment point transaction expenses, social contribution and gifts, and others.

34. Beban Gaji dan Tunjangan Karyawan

Beban gaji dan tunjangan karyawan terdiri dari:

	2024	2023	
Gaji, insentif, dan lembur	445.641	426.276	Salaries, incentives, and overtime payments
Tunjangan karyawan	258.532	240.938	Employee benefits
Asuransi karyawan	76.378	50.254	Employee insurance
Dana pensiun	40.332	43.921	Pension benefits
Beban (penghasilan) imbalan pasca-kerja dan jangka panjang lainnya (Catatan 37)	3.343	48.587	Provision for post employement and other long-term benefits expense (Note 37)
Total	**824.226**	**809.976**	**Total**

Berikut ini adalah beban gaji dan tunjangan-tunjangan untuk pengurus dan pejabat eksekutif (Catatan 38):

	2024	2023	
Dewan Komisaris	4.405	5.757	Board of Commissioners
Direksi	12.009	16.625	Board of Directors
Lain-lain *)	34.665	34.310	Others *)
	51.079	56.692	
Pajak	7.661	10.768	Tax
Total	**58.740**	**67.460**	**Total**

*) Termasuk pejabat eksekutif, komite audit dan lain-lain.

34. Salaries and Employee Benefits Expenses

Salaries and employee benefits expenses consist of:

Outlined below are salaries other benefits for the management and executive officers (Note 38):

*) Including executive officers, audit committee and others.

35. Pendapatan (Beban) Non-operasional - Neto

	2024	2023	
Kerugian dari penjualan aset tetap (Catatan 13)	(8.380)	(5.700)	Loss on sale of fixed assets (Note 13)
Keuntungan (kerugian) dari penjualan agunan yang diambil alih	(43.618)	(5.674)	Gain (loss) on sale of foreclosed assets
Lain-lain - neto	(66.035)	(116.811)	Others - net
Total	**(118.033)**	**(128.185)**	**Total**

Lain-lain terdiri dari denda yang timbul dari transaksi perpajakan, komitmen kredit dan lain-lain.

35. Non-operating Income (Expense) - Net

Others consist of tax penalty, loan commitment penalty and others.

36. Informasi Segmen

a. Bidang usaha

Nama Perusahaan/Company	Bidang Usaha/Business Activities
PT Bank KB Bukopin Tbk	Perbankan konvensional/Conventional banking
PT Bank KB Bukopin Syariah	Perbankan syariah/Sharia banking
PT KB Bukopin Finance	Pembiayaan/Financing

b. Segmen operasi

Segmen operasi

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, tidak terdapat pendapatan bunga dari salah satu konsumen eksternal yang mencapai 10% atau lebih dari total pendapatan bunga dan syariah Bank.

Berikut adalah informasi segmen usaha Grup berdasarkan segmen operasi:

(i) Pendapatan bunga dan syariah konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,80	4.902.013	89,70	4.355.568	Conventional banking
Pembiayaan	0,62	34.260	0,27	12.935	Financing
Syariah	9,58	522.826	10,03	486.942	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	5.459.099	100,00	4.855.445	Total before elimination
Eliminasi		(5.000)		6.191	Elimination
Pendapatan bunga konsolidasian		**5.454.099**		**4.861.636**	**Consolidated interest income**

(ii) Rugi operasional konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	100,62	(4.816.462)	91,41	(6.088.071)	Conventional banking
Pembiayaan	(0,30)	14.439	0,26	(17.443)	Financing
Syariah	(0,32)	15.182	8,33	(554.401)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(4.786.841)	100,00	(6.659.915)	Total before elimination
Eliminasi		654		713	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(4.786.187)**		**(6.659.202)**	**Consolidated operating loss**

36. Segment Information

a. Business activities

Nama Perusahaan/Company	Bidang Usaha/Business Activities
PT Bank KB Bukopin Tbk	Perbankan konvensional/Conventional banking
PT Bank KB Bukopin Syariah	Perbankan syariah/Sharia banking
PT KB Bukopin Finance	Pembiayaan/Financing

b. Business segment

Operating segment

For the years ended December 31, 2024 and 2023, there are no interest incomes from transactions with a single external customer amounted to 10% or more of the Bank's total interest and sharia.

Following is the Group business segment information by operating segment:

(i) Consolidated interest income and sharia

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,80	4.902.013	89,70	4.355.568	Conventional banking
Pembiayaan	0,62	34.260	0,27	12.935	Financing
Syariah	9,58	522.826	10,03	486.942	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	5.459.099	100,00	4.855.445	Total before elimination
Eliminasi		(5.000)		6.191	Elimination
Pendapatan bunga konsolidasian		**5.454.099**		**4.861.636**	**Consolidated interest income**

(ii) Consolidated operating loss

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	100,62	(4.816.462)	91,41	(6.088.071)	Conventional banking
Pembiayaan	(0,30)	14.439	0,26	(17.443)	Financing
Syariah	(0,32)	15.182	8,33	(554.401)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(4.786.841)	100,00	(6.659.915)	Total before elimination
Eliminasi		654		713	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(4.786.187)**		**(6.659.202)**	**Consolidated operating loss**

36. Informasi Segmen (lanjutan)

b. Segmen operasi (lanjutan)

Segmen operasi (lanjutan)

(iii) Rugi bersih konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	100,28	(7.378.803)	90,99	(5.510.780)	Conventional banking
Pembiayaan	(0,13)	9.478	0,31	(18.571)	Financing
Syariah	(0,15)	11.242	8,70	(527.065)	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	(7.358.083)	100,00	(6.056.416)	Total before elimination
Eliminasi		1.029.463		713	Elimination
Rugi bersih konsolidasian		**(6.328.620)**		**(6.055.703)**	**Consolidated net loss**

(iv) Total aset konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,01	75.458.349	90,39	78.842.594	Conventional banking
Pembiayaan	10,20	8.644.907	0,53	459.661	Financing
Syariah	0,79	667.749	9,08	7.920.474	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	84.771.005	100,00	87.222.729	Total before elimination
Eliminasi		(1.695.707)		(2.915.429)	Elimination
Total aset konsolidasian		**83.075.298**		**84.307.300**	**Total consolidated assets**

(v) Total liabilitas konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Perbankan konvensional	89,37	67.894.901	89,95	64.080.008	Conventional banking
Pembiayaan	10,35	7.864.525	0,01	10.277	Financing
Syariah	0,28	208.927	10,04	7.151.658	Sharia
Total sebelum eliminasi	100,00	75.968.353	100,00	71.241.943	Total before elimination
Eliminasi		(854.841)		(1.044.806)	Elimination
Total liabilitas konsolidasian		**75.113.512**		**70.197.137**	**Total consolidated liabilities**

36. Segment Information (continued)

b. Business segment (continued)

Operating segment (continued)

(iii) Consolidated net loss

(iv) Total consolidated assets

(v) Total consolidated liabilities

36. Informasi Segmen (lanjutan)

c. Segmen geografis

Berikut ini adalah informasi segmen usaha Grup berdasarkan daerah geografis:

(i) Pendapatan bunga konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	77,47	4.229.067	69,65	3.381.976	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	9,10	497.017	13,48	654.485	Java other than Jabodetabek
Sumatera	5,34	291.576	6,67	324.025	Sumatera
Kalimantan	1,40	76.354	1,87	90.653	Kalimantan
Lain-lain	6,69	365.085	8,33	404.306	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	5,459.099	100,00	4.855.445	Total before elimination
Eliminasi		(5.000)		6.191	Elimination
Pendapatan bunga konsolidasian		**5.454.099**		**4.861.636**	**Consolidated interest income**

(ii) Rugi operasional konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	55,49	(2.656.256)	66,82	(4.450.328)	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	22,35	(1.070.081)	22,73	(1.513.717)	Java other than Jabodetabek
Sumatera	7,11	(340.145)	3,99	(265.686)	Sumatera
Kalimantan	4,41	(211.334)	1,33	(88.722)	Kalimantan
Lain-lain	10,64	(509.025)	5,13	(341.462)	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	(4.786.841)	100,00	(6.659.915)	Total before elimination
Eliminasi		654		713	Elimination
Rugi operasional konsolidasian		**(4.786.187)**		**(6.659.202)**	**Consolidated interest income**

(iii) Rugi bersih konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	73,84	(5.433.505)	67,17	(4.067.817)	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	12,68	(932.965)	22,29	(1.349.764)	Java other than Jabodetabek
Sumatera	4,59	(337.443)	4,45	(269.318)	Sumatera
Kalimantan	2,87	(211.083)	1,47	(88.786)	Kalimantan
Lain-lain	6,02	(443.088)	4,62	(280.731)	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	(7.358.084)	100,00	(6.056.416)	Total before elimination
Eliminasi		1.029.464		713	Elimination
Rugi bersih konsolidasian		**(6.328.620)**		**(6.055.703)**	**Consolidated net loss**

36. Segment Information (continued)

c. Geographic segment

Following is the Group business segment information by geographical area:

(i) Consolidated interest income

(ii) Consolidated operating loss

(iii) Consolidated net loss

36. Informasi Segmen (lanjutan)

c. Segmen geografis (lanjutan)

(iv) Total aset konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	73,50	62.304.706	70,52	61.507.271	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	11,19	9.488.028	12,95	11.298.679	Java other than Jabodetabek
Sumatera	6,34	5.371.607	6,66	5.807.490	Sumatera
Kalimantan	1,38	1.171.399	1,71	1.492.026	Kalimantan
Lain-lain	7,59	6.435.265	8,16	7.117.263	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	84.771.005	100,00	87.222.729	Total before elimination
Eliminasi		(1.695.707)		(2.915.429)	Elimination
Total aset konsolidasian		**83.075.298**		**84.307.300**	**Total consolidated assets**

(v) Total liabilitas konsolidasian

	2024		2023		
	%	Rp	%	Rp	
Jabodetabek	59,21	44.983.807	55,61	39.617.023	Jabodetabek
Jawa selain Jabodetabek	15,88	12.065.299	19,89	14.171.176	Java other than Jabodetabek
Sumatera	8,30	6.302.577	8,78	6.251.866	Sumatera
Kalimantan	6,11	4.643.401	4,26	3.033.770	Kalimantan
Lain-lain	10,50	7.973.269	11,46	8.168.108	Others
Total sebelum eliminasi	100,00	75.968.353	100,00	71.241.943	Total before elimination
Eliminasi		(854.841)		(1.044.806)	Elimination
Total liabilitas konsolidasian		**75.113.512**		**70.197.137**	**Total consolidated liabilities**

37. Kesejahteraan Karyawan

Imbalan Pensiun

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk karyawan yang diangkat menjadi karyawan tetap sejak 1 April 2010. Keputusan tersebut telah disetujui oleh Dewan Direksi sesuai dengan Surat Keputusan terbaru No. 1218 Tahun 2013. Keputusan penyempurnaan program iuran pasti disempurnakan kembali dengan Surat Keputusan Direksi Adendum II SK No. 0961 Tahun 2016 bahwa pembayaran iuran program pensiun dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) PT Bank KB Bukopin Tbk yang telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-32/NB.1/2016. Program ini berlaku untuk karyawan yang diangkat sebagai karyawan tetap sejak tanggal efektif perubahan program pensiun Manfaat Pasti oleh Otoritas Jasa Keuangan. Program ini juga berlaku untuk karyawan yang sebelumnya merupakan peserta program manfaat pasti yang telah dihentikan programnya seperti yang disebutkan di atas.

36. Segment Information (lanjutan)

c. Geographic segment (continued)

(iv) Total consolidated assets

(v) Total consolidated liabilities

37. Employee Service Entitlements

Pension Benefits

The Bank provides a defined contribution pension plan for employees who become permanent employees since April 1, 2010. The decision had been approved by the Board of Directors in accordance with the latest Decree No. 1218 of 2013. The decision to improve the defined contribution program was further refined with a Decree of Directors Addendum II SK No. 0961 of 2016 that contribution payments managed by Financial Institution Pension Fund PT Bank KB Bukopin Tbk which has been approved by the Financial Services Authority Number KEP-32/NB.1/2016. This program applies to employee who is appointed as permanent employees from the effective date of the change to the defined benefit pension plan by the Financial Services Authority. The program also applied for employee who previously was a member of the defined benefit pension plan that has been terminated as mentioned above.

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Imbalan Pensiun (lanjutan)

Beban pensiun iuran pasti yang telah dibebankan pada laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp3.343 dan Rp48.587.

Kesejahteraan Karyawan

Kesejahteraan karyawan meliputi uang jasa, uang pisah, pesangon, tunjangan cuti besar dan kompensasi lainnya, dikompensasikan dengan imbalan pensiun.

Sejak tanggal 20 Desember 2013, Bank memberikan asuransi kesehatan pensiun kepada karyawan yang telah memasuki usia pensiun dan pasangannya selama 2 (dua) tahun setelah tanggal karyawan pensiun. Manfaat-manfaat asuransi diberikan melalui sistem penggantian kepada karyawan.

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Penyisihan untuk imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 11/2020 tanggal 2 November 2020. Penyisihan telah dibuat sesuai dengan PSAK 24 (revisi 2013) tentang Imbalan Kerja. Asumsi aktuarial dan metode yang digunakan untuk mengukur liabilitas pasca kerja, beban dan liabilitas kerja karyawan telah memadai dan disajikan menurut estimasi terbaik kami atas kondisi masa depan.

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan Bank saja pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan, tertanggal 7 Maret 2025 dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit.*

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan KBBS pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan tertanggal 12 Maret 2025 dengan metode *Projected Unit Credit.*

Perhitungan aktuaria atas liabilitas estimasi untuk kesejahteraan karyawan untuk KBBF pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan atas laporan dari KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI dan Rekan tertanggal 10 Maret 2025 dengan metode *Projected Unit Credit.*

Beban yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

37. Employee Service Entitlements (continued)

Pension Benefits (continued)

Defined contribution pension expense that was charge to profit or loss as for the years ended December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp3,343 and Rp48,587, respectively.

Employees' Service Entitlements

Employees' service entitlements consist of service payments, severance payments, termination benefits, long leave benefits and other compensation, compensated with retirement benefits.

Starting December 20, 2013, the Bank provides pension health insurance for employees and their spouses during 2 (two) years after the employee's pension date. Insurance benefits are granted by reimbursement system to the employees.

Post-Employment Benefits Liability

Provision for employee benefits in accordance with the Job Creation Law No. 11/2020 dated November 2, 2020. Provision has been made in accordance with PSAK 24 (Revised 2013) regarding employee benefits. The actuarial assumptions and methods used to measure post-employment liabilities, expenses, and employees' employment liabilities are adequate and are presented according to our best estimate of future conditions.

The actuarial calculation of the estimated liability for the welfare of the Bank's employees only as at December 31, 2024 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co, dated March 7, 2025 using the Projected Unit Credit method.

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of KBBS as at December 31, 2024 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co dated March 12, 2025 using the Projected Unit Credit method.

The actuarial calculation for estimated employee service entitlement liabilities of KBBF as at December 31, 2023 was based on reports from KKA I Gde Eka Sarmaja, FSAI and Co dated March 10, 2024 using the Projected Unit Credit method.

The expenses recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income were as follows:

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

37. Employee Service Entitlements (continued)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

Post-Employment Benefits Liability (continued)

	2024	2023	
Beban jasa kini	11.901	13.861	Current service cost
Beban masa lalu	-	(13.122)	Past service cost
Beban bunga	6.592	8.684	Interest expense
Kerugian atas penyelesaian	676	59.697	Losses on settlement
Pengakuan keuntungan aktuaria	(15.826)	(20.533)	Actuarial gains
Total	**3.343**	**48.587**	**Total**

Rekonsiliasi perubahan liabilitas selama tahun berjalan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movements of estimated post-employment benefits liability in the consolidated statements of financial position were as follows:

	2024	2023	
Liabilitas pada awal tahun	100.344	127.787	Liability at beginning of the year
Penyisihan (Pembalikan) tahun berjalan (Catatan 34)	3.343	48.587	Provision (reversal) during the year (Note 34)
Pembayaran selama tahun berjalan	(14.375)	(67.390)	Payment during the year
Jumlah yang diakui di penghasilan komprehensif lainnya	14.252	(8.640)	Total amount recognized in comprehensive income
Liabilitas pada akhir tahun	**103.564**	**100.344**	**Liability at the end of year**

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

The movements in the present value of liabilites for employee benefits were follows:

	2024	2023	
Saldo pada awal periode/tahun	100.344	127.787	Liability at beginning of the year
Beban jasa kini	11.901	13.861	Current service cost
Beban masa lalu	-	(13.122)	Past service cost
Beban bunga	6.592	8.684	Interest cost
Kerugian atas penyelesaian	676	59.697	Losses on settlement
Manfaat yang dibayarkan	(14.375)	(67.390)	Benefit paid
(Kerugian)/keuntungan pada kewajiban aktuari:			Actarial (gains)/losses on obligation:
Asumsi demografi	(7.778)	-	Demographic assumption
Asumsi keuangan	3.495	7.421	Financial assumption
Penyesuaian pengalaman	2.709	(36.594)	Experience adjustment
Liabilitas pada akhir tahun	**103.564**	**100.344**	**Liability at the end of year**

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas atas kemungkinan perubahan tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji sebesar 1%, dengan variabel lain dianggap tetap, terhadap nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan:

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in discount rates and salary increment rate amounting to 1%, with all other variables held constant, of the present value of employee benefits liability:

	2024	2023	
Tingkat diskonto			**Discount rate**
Tingkat diskonto +1%	(8.635)	(9.989)	Discount rate +1%
Tingkat diskonto -1%	9.940	11.720	Discount rate -1%
Tingkat kenaikan gaji			**Salary increment rate**
Tingkat kenaikan gaji +1%	11.038	14.622	Salary increment rate +1%
Tingkat kenaikan gaji -1%	(9.588)	(11.911)	Salary increment rate -1%

37. Kesejahteraan Karyawan (lanjutan)

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja (lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan pasca-kerja yang tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

37. Employee Service Entitlements (continued)

Post-Employment Benefits Liability (continued)

Expected maturity analysis of undiscounted post-employment benefit as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	2024	2023	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya	5.854	3.756	Within the next 12 months
Antara 1 dan 5 tahun	24.200	15.603	Between 1 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	81.209	56.052	Between 5 and 10 years
Di atas 10 tahun	464.222	501.731	Beyond 10 years
Total	**575.485**	**577.142**	**Total**

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

The assumptions used in actuarial calculation for the years ended December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	2024		2023		
	Bank	**Entitas Anak/ *Subsidiaries***	***Bank***	**Entitas Anak/ *Subsidiaries***	
Asumsi ekonomi:					Economic assumptions:
Tingkat diskonto	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	6,50% per tahun/ *6.50% per annum*	6,50% per tahun/ *6.50% per annum*	Discount rate
Tingkat rata-rata kenaikan penghasilan	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	5,00% per tahun/ *5.00% per annum*	Average salary increase rate
Tingkat kenaikan harga emas	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	- -	7,00% per tahun/ *7.00% per annum*	- -	Gold price increase rate
Asumsi lainnya:					Other assumptions:
Usia pensiun normal	56 tahun/*56 years*	56 tahun/*56 years*	56 tahun/*56 years*	56 tahun/*56 years*	Normal retirement age
Tingkat kematian	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Tabel TM IV- 2019/ *TM IV - 2019 Table*	Mortality rate
Tingkat kecacatan	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	10% dari TM IV-2019/ *10% from TM IV-2019*	Disability rate
Tingkat pengunduran diri	10% pada usia 25 tahun yang menurun secara linear 0% sampai pada usia 56 tahun/ *10% for age 25 years old and below, then decreasing linearly to 0% at age 56 years old*	15% pada usia 25 tahun yang menurun secara linear 0% sampai pada usia 56 tahun/ 15% for age 25 years *old and below, then decreasing linearly to 0% at age 56 years old .*	4% pertahun sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1%up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	4% pertahun sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear menjadi 0,1% pertahun di usia 49 tahun dan 1% pertahun untuk usia 50 sampai usia 54/ *4% up to age 30 and decreasing linearly 0.1%up to age 49 decreasing linearly 1% ages 50 to 54*	Resignation rate

38. Transaksi dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi.

38. Transactions and Balances With Related Parties

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties.

	2024	2023	
Aset			**Assets**
Giro pada Bank lain			Current account in other Bank
KB Kookmin Bank (Catatan 5)	10.585	6.377	KB Kookmin Bank (Note 5)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang Syariah - bruto (Catatan 9l) :			Loans and Sharia financing/ receivables - gross (Note 9l):
PT KB Finansia Multi Finance	249.989	499.791	PT KB Finansia Multi Finance
PT Sunindo KB Finance	59.850	119.988	PT Sunindo KB Finance
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	30.144	21.226	Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers
Total aset untuk pihak berelasi	**350.568**	**647.382**	**Total related parties assets**
Persentase terhadap total aset	**0,42%**	**0,77%**	**Percentage to total assets**
Liabilitas			**Liabilities**
Pinjaman yang diterima (Catatan 23)	6.557.175	6.544.886	Borrowing (Note 23)
Simpanan dari bank lain (Catatan 20)	2.710.649	7.699.413	Deposit from other banks (Note 20)
Dana pensiun Bank KB Bukopin	-	61.700	KB Bukopin Bank pension fund
Tabungan (Catatan 18)	45.260	18.491	Savings deposits (Note 18)
Deposito berjangka (Catatan 19)	42.412	40.311	Time deposits (Note 19)
Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif	28.211	-	Directors, Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers
Giro (Catatan 17)	3.203	9.094	Demand deposits (Note 17)
Total liabilitas untuk pihak berelasi	**9.386.910**	**14.373.895**	**Total related parties liabilities**
Persentase terhadap total liabilitas	**12,50%**	**20,48%**	**Percentage to total liabilities**
Pendapatan dan Beban Operasional			**Income and Expenses From Operations**
Pendapatan bunga dan syariah dari pihak berelasi	24.469	22.592	Interest and sharia income from related parties
Persentase terhadap pendapatan bunga dan syariah	0,45%	0,46%	Percentage to total interest and sharia income
Beban bunga dan syariah dari pihak berelasi	664	899	Interest expense and sharia charges from related parties
Persentase terhadap beban bunga dan Syariah	0,02%	0,02%	Percentage to total interest and Sharia income
Beban operasional lainnya			Other operating expenses
Gaji dan tunjangan karyawan, pengurus, dan pejabat eksekutif (Catatan 34)	58.740	67.460	Salaries and benefits for employees, management and executive officer (Note 34)
Persentase terhadap Beban operasional lainnya	2,90%	2,96%	Percentage to other operating expenses

38. Transaksi Dan Saldo Dengan Pihak-Pihak Berelasi (lanjutan)

Hubungan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Sifat dari hubungan/*Nature of Relationship*	Pihak berelasi/*Related parties*
Pemegang saham pengendali/*Controlling Shareholder*	KB Kookmin Bank Co., Ltd
Dikendalikan/dibawah pengaruh signifikan salah satu pemegang saham utama Bank/ *Controlled by/under significant influence of one of major shareholder*	PT Haka Sarana Investama Kopelindo Infrastruktur Indonesia PT Bosowa Berlian Motor PT Bosowa Amal Taksi PT Mallomo PT Bosowa Utama PT Makassar Capital PT Bosowa Tambang Indonesia PT KB Finansial Multi Finance PT Sunindo KB Finance PT Kurnia Oryza Abadi PT Dalle Mineral Papua PT KB Valbury Sekuritas
Dikendalikan oleh keluarga terdekat dari manajemen/*Controlled by a close member of the management's family*	
Manajemen kunci yang sama/*Same key management*	Dinasti Batubara Indonesia PT Gerin Surya Gemilang
Dana pensiun Bank/*The Bank's pension fund*	Dana Pensiun Bank KB Bukopin
Manajemen dan karyawan kunci/ *Management and key employees*	Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif/*Board of Directors, Board of Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Executive Officers*

38. Transactions And Balances With Related Parties (continued)

The relationships with related parties are as follows:

39. Komitmen Dan Kontinjensi

Bank memiliki komitmen dan kontinjensi sebagai berikut:

	2024	2023	
Komitmen			**Commitments**
Tagihan Komitmen			**Commitments Receivables**
Pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan	808.182	595.903	Outstanding spot and derivative purchased
Liabilitas Komitmen			**Commitments Liabilities**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah yang belum digunakan	(4.282.285)	(4.822.935)	Unused loans and Sharia financing/receivable facilities
L/C yang tidak dapat dibatalkan yang masih berjalan Pihak ketiga	(90.095)	(88.205)	Outstanding irrevocable L/C Third parties
Penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan	(1.621.857)	(971.552)	Outstanding spot and derivative sold
Total Liabilitas Komitmen	(5.994.237)	(5.882.692)	Total Commitments Liabilities
Total Komitmen - Neto	**(5.186.055)**	**(5.286.789)**	**Total Commitments - Net**

39. Commitments And Contingencies

The Bank has commitments and contingencies as follows:

39. Komitmen Dan Kontinjensi (lanjutan)

39. Commitments And Contingencies (continued)

	2024	2023	
Kontinjensi			**Contingencies**
Tagihan Kontinjensi			**Contigent Receivables**
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	5.123.131	4.038.667	Interest Income on non-performing loans
Liabilitas Kontinjensi			**Contingent Liablities**
Bank garansi Pihak ketiga	(582.778)	(1.337.709)	Bank Guarantees Third Parties
Total Liabilitas Kontinjensi	(582.778)	(1.337.709)	Total Contingent Liabilities
Total Kontinjensi - Neto	**4.540.353**	**2.700.958**	**Total Contingencies - Net**
Liabilitas Komitmen dan Kontinjensi - Neto	**(645.702)**	**(2.585.831)**	**Commitments and Contingent Liabilities - Net**

40. Manajemen Risiko

Bank senantiasa memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* dan memperkuat budaya risiko *(risk culture)* bagi seluruh jenjang karyawan Bank, agar dapat menerapkan pengelolaan risiko dengan baik dan secara menyeluruh dalam aktivitas perbankan sehari-hari. Oleh karena itu, Bank berupaya menerapkan manajemen risiko yang efektif dan komprehensif sebagai aspek penting bagi Bank dalam pengelolaan berbagai risiko yang dihadapi Bank.

Pengelolaan risiko yang baik dan efektif menjadi salah satu faktor penting atas keberhasilan Bank dalam menjalankan strategi dan upaya meningkatkan kinerja. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk melindungi Bank dari kerugian yang mungkin timbul diakibatkan dari berbagai aktivitasnya, serta menjaga tingkat risiko agar sesuai dengan strategi bisnis dan arahan yang telah dicanangkan. Karena itu, Bank menjaga keseimbangan antara risiko dan manfaat agar menghasilkan pertumbuhan nilai jangka bagi pemegang saham.

Manajemen risiko mempunyai peranan penting dalam pengelolaan risiko Bank dan bersifat proaktif serta *forward looking* dalam mendukung pertumbuhan dan kegiatan bisnis Bank secara berkelanjutan. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu potensi kejadian, baik yang diperkirakan *(expected)* maupun yang tidak diperkirakan *(unexpected)* yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Organisasi manajemen risiko Bank melibatkan pengawasan dari Dewan Komisaris dan Direksi.

40. Risk Management

Bank continuously make some efforts to improve risk awareness and strengthen risk culture at all levels of employees, in order to implement risk management properly and thoroughly in daily banking activities. Therefore, Bank seeks to implement an effective and comprehensive risk management as an important aspect of the Bank in managing the various risks faced by the Bank.

An effective and good risk management is one of the important factors for the success of the Bank in carrying out strategies and efforts to improve performance. The management aims to protect the Bank from losses that may arise as a result of its various activities, as well as to maintain the level of risk in accordance with the business strategy and directives that have been announced. Therefore, the Bank maintains a balance between risks and benefits in order to generate long-term value growth for shareholders.

Risk management has an important role in managing the Bank's risk and is proactive and forward looking in supporting the Bank's growth and business activities in a sustainable manner. Risk in the banking context is a potential event, both expected and unexpected, which has a negative impact on the bank's income and capital.

The Organization of the risk management of the Bank involves oversight from the Board of Commissioners and Directors.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Bank telah membangun struktur tata kelola risiko yang kuat, dengan mengimplementasikan fungsi pengawasan melibatkan Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko dan Direksi melalui Komite Manajemen Risiko.

Bank memiliki Komite Pemantau Risiko sebagai komite risiko tertinggi di tingkat Dewan Komisaris yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan atas pelaksanaan strategi dan kebijakan manajemen risiko serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko Bank.

Dewan Komisaris mendelegasikan wewenang kepada Direksi untuk mengimplementasikan strategi manajemen risiko. Komite Manajemen Risiko dibentuk pada tingkat Direksi dan bertanggungjawab untuk memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dalam mengembangkan strategi dan kebijakan manajemen risiko, mengelola risiko secara keseluruhan di Bank, serta perbaikan atas pelaksanaan strategi, kebijakan dan evaluasi atas permasalahan risiko yang signifikan. Komite Manajemen Risiko diketuai oleh Direktur Utama.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direksi dan Dewan Komisaris didukung oleh satuan kerja manajemen risiko yang independen dan secara jelas terlepas dari semua bisnis dan tidak memiliki tanggung jawab terhadap bisnis.

Proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian terhadap risiko yang melekat pada seluruh produk dan aktivitas Bank.

Penilaian dan pengukuran eksposur risiko (dampak potensial dari suatu kejadian risiko) harus objektif, konsisten dan mengacu pada hal yang spesifik. Kualitas dari informasi risiko memegang peranan penting dalam menentukan kualitas bisnis.

Bank menjalankan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko melalui fungsi kerja risiko sebagai Lini Pertahanan Kedua, dimana bertanggung jawab untuk menyusun dan melakukan kaji ulang secara berkala atas berbagai kebijakan limit, dan perangkat manajemen risiko. Fungsi kerja Risiko juga berperan dalam melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi kepada Lini Pertahanan Pertama atas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Hal ini termasuk dalam hal melakukan pelaporan atas risiko Bank secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dan Direksi secara berkala.

40. Risk Management (continued)

The Bank has built a strong risk governance structure, by implementing a supervisory function involving the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee and the Board of Directors through the Risk Management Committee.

The Risk Oversight Committee is a highest risk committee at the Board of Commissioners' level that responsible to oversight the implementation of risk management strategies and policies and evaluate the implementation of duties of the Risk Management Committee and risk management working unit in the Bank.

The Board of Commissioners delegate authority to the Directors to implement the risk management strategy. The Risk Management Committee is established at the Directors' level and is responsible in providing recommendation to the President Director to develop the risk management strategy and policy, manage overall risk in the Bank, and improve the implementation of strategies, policies and evaluate significant risk issues. The Risk Management Committee is chaired by the President Director.

In carrying out these tasks, Directors and Board of Commissioners are supported by an independent risk management work unit, which clearly separated with no reporting line or responsibility to business.

The risk management process includes identifying, measuring, monitoring and controlling risks in all products and activities of the Bank.

Assessment and measurement of risk exposures (the potential impact of risk events) must be objective, consistent and referring to a specific thing. The quality of risk information holds an important role in determining the quality of business.

Bank runs a risk identification, measurement, monitoring and control process as well as a Risk Management Information System through the Risk Group as the Second Line of Defense, that responsible for establishing and conducting periodic reviews of various risk management policies, limit, and tools. Risk Group also plays a role in monitoring and providing recommendation to the First Line of Defense on the implementation of risk management carried out by each working unit. This includes reporting on the overall risk of the Bank to the Board of Commissioners and the Directors on a regular basis.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Untuk menyesuaikan dengan perkembangan usaha yang sejalan dengan rencana bisnis Bank, maka Bank secara terus menerus melakukan pemantauan risiko secara berkala serta pengendalian internal yang komprehensif dari sisi kebijakan, prosedur, maupun penetapan limit. Hal ini diperkuat dengan adanya internalisasi atas ketentuan eksternal yang berlaku, antara lain terkait dengan penetapan kebijakan dasar manajemen risiko dan *risk appetite*.

Risk appetite Bank diartikan sebagai tingkat dan jenis risiko yang bersedia diambil oleh Bank dalam rangka mencapai sasaran Bank. Dimana tingkat risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis.

Risk Appetite mencerminkan sejauh mana Bank bersedia mengambil, menahan, atau menghindari risiko untuk mencapai tujuan bisnis, strategi, dan perencanaan modal. Untuk saat ini pengelolaan Risk Appetite sejalan dengan pengelolaan *Internal Capital Adequacy Assessment Process* (*ICAAP*). Dimana Internal Capital merupakan target CAR yang sesuai dengan Rencana Bisnis Bank dalam hal ini Risk Management terlibat dalam pengelolaan ATMR yang termasuk risiko kredit, pasar, dan operasional dan Assessment Process merupakan penilaian terhadap ATMR untuk dialokasikan ke unit bisnis, dengan memberikan ambang batas kepada unit bisnis yang dimonitoring secara berkala.

Bank membentuk limit untuk memperhatikan kemampuan Bank dalam pengelolaannya, dimulai dari dasar penetapan, monitoring, penanggungjawab, serta action plan ketika kondisi pelampauan. Dasar pertimbangan pembentukan limit, antara lain (namun tidak terbatas pada):

1. Kondisi Bank,
2. Rencana Bisnis Bank,
3. Kecukupan sistem informasi,
4. Kecukupan dan kemampuan SDM,
5. Kepatuhan terhadap ketentuan eksternal.

Dalam rangka memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kondisi terkini Bank dan peraturan regulator, Bank telah melakukan kaji ulang atas beberapa kebijakan di antaranya, Kebijakan Tingkat Tinggi Tentang Manajemen Risiko Bank, dan Kebijakan Risk Appetite Bank termasuk kaji ulang atas penetapan limit internalnya. Bank saat ini sedang melakukan kaji ulang atas Kebijakan Pengelolaan Permodalan Bank. Kaji ulang atas kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direksi melalui Komite Manajemen Risiko pada September 2024 serta rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko pada Oktober 2024. Selain itu, Bank telah melakukan kaji ulang atas Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Stress Test Manajemen Risiko Bank.

40. Risk Management (continued)

To adapt with business developments that are in line with the Bank's business plan, Bank continuously conducts periodic risk monitoring and comprehensive internal controls to the policies, procedures, and limit setting. This is reinforced by the internalization of applicable external regulations, among others related to the establishment of basic risk management policies and risk appetite.

Bank's risk appetite is the level and type of risk that Bank is willing to take in order to achieve the Bank's objectives. The level of risk to be taken is reflected in the strategy and objectives of the business.

Risk Appetite reflects the extent to which the Bank is willing to take, hold, or avoid risk to achieve its business, strategic, and capital planning objectives. For now, the management of Risk Appetite is in line with the management of the Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Where Internal Capital is the CAR target in accordance with the Bank's Business Plan in this case Risk Management is involved in managing RWA which includes credit, market, and operational risks and the Assessment Process is an assessment of RWA to be allocated to business units, by providing thresholds to business units that are monitored regularly.

The Bank establishes limits to pay attention to the Bank's ability to manage them, starting from the basis for setting, monitoring, responsibility, and action plans when conditions are exceeded. The basis of consideration for the establishment of limits, among others (but not limited to):

1. The condition of the Bank,
2. Bank's business plan,
3. Adequacy of information system,
4. Adequacy and capability of human resources,
5. Compliance with external regulations.

In order to ensure that the implementation of risk management is in accordance with the Bank's current conditions and regulatory regulations, the Bank has conducted a review of several policies including, High Level Policy regarding Risk Management of Bank, and Risk Appetite Policy of Bank including a review of its internal limit setting. Bank is currently reviewing the Capital Management Policy of Bank. The review of the policy has been approved by the Board of Directors through the Risk Management Committee in September 2024 and recommendations from the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee in October 2024. In addition, the Bank has reviewed the Technical Guidelines on the Implementation of Risk Management Stress Test of Bank.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Dalam rangka memastikan bahwa penerapan manajemen risiko telah sesuai dengan kondisi terkini Bank dan peraturan regulator, Bank telah melakukan kaji ulang atas beberapa kebijakan di antaranya, Kebijakan Tingkat Tinggi Tentang Manajemen Risiko Bank, dan Kebijakan Risk Appetite Bank termasuk kaji ulang atas penetapan limit internalnya. Bank saat ini sedang melakukan kaji ulang atas Kebijakan Pengelolaan Permodalan Bank. Kaji ulang atas kebijakan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direksi melalui Komite Manajemen Risiko pada September 2024 serta rekomendasi dari Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko pada Oktober 2024. Selain itu, Bank telah melakukan kaji ulang atas Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Stress Test Manajemen Risiko Bank.

Terkait dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Bank saat ini telah menyusun Rencana Aksi Pemulihan (*Recovery Plan*) dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada 28 November 2024. Rencana Aksi Pemulihan adalah rencana strategis yang disusun oleh Bank sebagai bagian dari upaya preventif dan responsif untuk menghadapi potensi krisis keuangan, yang mencakup krisis permodalan, likuiditas, rentabilitas, dan kualitas aset. Rencana ini dirancang untuk memastikan bahwa Bank memiliki langkah-langkah yang terstruktur dan terukur dalam menjaga stabilitas serta melindungi kepentingan nasabah, pemegang saham pengendali, dan pemangku kepentingan lainnya. Rencana ini juga berfungsi sebagai panduan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat guna meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan keuangan Bank, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Recovery Plan disusun meliputi analisa terhadap kondisi seluruh lini usaha Bank dan Entitas Anak, termasuk analisis *scenario* atas kondisi *stress* yang terjadi pada Bank secara *idiosyncratic* maupun *market-wide shock.*

Bank menetapkan *trigger level* dalam rangka menerapkan rencana aksi pemulihan dengan tujuan untuk:

a. Pencegahan, sehingga Bank tetap dapat menjaga ukuran atau rasio yang sama atau lebih baik dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pemulihan, sehingga Bank tidak lagi melanggar ukuran atau rasio dari indikator sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. Perbaikan, dari kondisi yang membahayakan kelangsungan usaha Bank

40. Risk Management (continued)

In order to ensure that the implementation of risk management is in accordance with the Bank's current conditions and regulatory regulations, the Bank has conducted a review of several policies including, High Level Policy regarding Risk Management of Bank, and Risk Appetite Policy of Bank including a review of its internal limit setting. Bank is currently reviewing the Capital Management Policy of Bank. The review of the policy has been approved by the Board of Directors through the Risk Management Committee in September 2024 and recommendations from the Board of Commissioners through the Risk Monitoring Committee in October 2024. In addition, the Bank has reviewed the Technical Guidelines on the Implementation of Risk Management Stress Test of Bank.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 5 Year 2024 on Determination of Supervisory Status and Handling of Commercial Bank Problems, the Bank has currently prepared a Recovery Action Plan and has submitted to the Financial Services Authority on November 28th, 2024. The Recovery Action Plan is a strategic plan prepared by the Bank as part of preventive and responsive efforts to deal with potential financial crises, which include capital, liquidity, profitability, and asset quality crises. This plan is designed to ensure that the Bank has structured and measurable steps in maintaining stability and protecting the interests of customers, controlling shareholders, and other stakeholders. This plan also serves as a guide for quick and appropriate decision making in emergency conditions to minimize negative impacts on the Bank's financial health, in accordance with prudential principles and applicable laws and regulations.

The Recovery Plan includes an analysis of all business lines of the Bank and its Subsidiaries, including scenario analysis of stress conditions experienced by the Bank, both idiosyncratic and market-wide shocks.

The Bank establishes trigger levels to implement the recovery action plan with the following objectives:

a. Prevention, ensuring the Bank maintains the same or better ratios or measures as required by laws and regulations;

b. Recovery, ensuring the Bank no longer violates measures or ratios of the indicators as stipulated by laws and regulations; and

c. Improvement, to recover from conditions that threaten the Bank's business continuity

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil Risiko

Laporan profil risiko merupakan salah satu faktor dalam penilaian tingkat kesehatan Bank. Bank wajib menyampaikan laporan tersebut secara individual dan konsolidasi disampaikan kepada OJK secara triwulanan (posisi Maret, Juni, September dan Desember). Laporan profil risiko disusun secara *self-assessment* sebagaimana diatur dalam Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum diungkapkan pada Catatan 55k.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya.

Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis Bank. Pada sebagian besar Bank, pemberian kredit merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain kredit, Bank menghadapi risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar Bank, transaksi pembiayaan perdagangan, transaksi nilai tukar dan derivatif serta kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Eksposur risiko kredit juga dapat meningkat karena adanya konsentrasi kredit pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Tujuan dari pengelolaan risiko kredit adalah mengendalikan dan mengelola eksposur risiko kredit dalam tingkatan yang dapat diterima.

Dalam peningkatan aspek kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit, Bank telah menetapkan struktur organisasi yang telah menggambarkan secara jelas pemisahan antara fungsi lini pertahanan pertama, lini pertahanan kedua dan lini pertahanan ketiga.

Bank memiliki kebijakan dan prosedur dalam pemberian kredit kepada nasabah *Wholesale*, *SME* dan *Retail*, serta kebijakan dan prosedur dalam rangka penempatan antar bank maupun kegiatan *trade finance*. Kebijakan dan pedoman terkait perkreditan tersebut dikaji dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan ketentuan Regulator, Peraturan Eksternal lainnya, serta perubahan bisnis.

40. Risk Management (continued)

Risk Profile

The risk profile report is one of the factors in the assessment of the Bank's soundness level. Bank is required to submit these reports individually and the consolidated reports to the OJK on a quarterly basis (positions in March, June, September, and December). The risk profile report is prepared by self-assessment as stipulated in the OJK Circular Letter No. 14/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Assessment of Commercial Bank Soundness Level is disclosed in Note 55k.

Credit Risk

Credit risk is the risk of loss due to the failure of other parties to fulfill their obligations.

Credit risk can be sourced from various business activities of the Bank. In most banks, lending is the biggest source of credit risk. In addition to credit, the Bank faces credit risk from various financial instruments such as securities, acceptances, inter-bank transactions, trade finance transactions, exchange rate transactions and derivatives as well as commitments and contingencies liabilities.

Credit risk exposure may also increase due to the concentration of credit on debtors, geographic areas, products, types of financing or certain business sector. The purpose of credit risk management is to control and manage credit risk exposure at an acceptable level.

In increasing the prudential aspect in managing credit risk, the Bank has organizational structure that has clearly described the separation between the functions of the first line of defense, second line of defense and third line of defense.

The Bank has policies and procedures in providing loans to Wholesale, SME and Retail customers, as well as policies and procedures for interbank placements and trade finance activities. The policies and guidelines related to credit are reviewed and improved periodically in accordance with the provisions of the Regulator, other External Regulations, and business changes.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Bank melakukan evaluasi atas tingkat risiko kredit terkait pemberian fasilitas kepada debitur atau proyek, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain:

i. Historis dan proyeksi kondisi keuangan, termasuk laporan posisi keuangan, laba rugi dan arus kas nasabah;
ii. Riwayat hubungan kredit;
iii. Kualitas, kinerja dan pengalaman dari pengelolaan nasabah;
iv. Posisi nasabah dalam persaingan di industri sejenis; dan
v. Kondisi ekonomi secara umum.

Proses persetujuan fasilitas kredit dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap fasilitas harus diproses melalui Komite Kredit. Pengambilan keputusan dalam Komite Kredit telah mengedepankan prinsip kehati-hatian dimana untuk segmen *Wholesale* dan *SME*, fungsi Bisnis dan fungsi Kredit memiliki memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan kredit. Sedangkan untuk segmen Retail pengambilan keputusan kredit dilakukan oleh fungsi kredit.

Dalam pengelolaan mitigasi risiko kredit, Bank telah menggunakan *credit rating* baik untuk segmen *SME* dan *Wholesale* yang dibangun pada sistem khusus, dimana Bank terus melakukan upaya yang diperlukan untuk penyempurnaan sistem tersebut.

Selanjutnya dalam hal mendukung proses kredit Retail, Bank menggunakan aplikasi teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Kredit Mikro (SIKM) yang didalamnya terdapat *credit scoring* untuk memperkuat proses analisa pemberian kredit retail.

Berdasarkan Pedoman Komite Kredit dan Ketentuan Limit Kewenangan Komite Kredit, tugas lembaga Komite Kredit paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:

i. Memberikan persetujuan atau penolakan kredit atau pembiayaan sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit atau pembiayaan yang ditetapkan oleh direksi;

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

The Bank evaluates the credit risk level related to financing to customers or projects by considering various factors, among others:

i. Historical and projected financial condition, including statement of financial position, income statements, and cash flows of customers;
ii. Credit history;
iii. Quality, performance, and experience of the customers' management;
iv. Customers' competitive position in the similar industries; and
v. General economic condition.

The credit facility approval process is carried out based on the principle that each facility must be processed through the Credit Committee. Decision making in the Credit Committee has prioritized the principle of prudence where for the Wholesale and SME segments, the Business function and the Credit function have the same voting rights in making credit decisions. Meanwhile, for the Retail segment, credit decisions are made by the credit function.

In managing credit risk mitigation, the Bank has used credit ratings for the SME and Wholesale segments which are built on a spesific system, where the Bank continues to make the necessary efforts to improve the system.

Furthermore, in terms of supporting the Retail credit process, the Bank also uses information technology applications, namely the Micro Credit Information System (SIKM), which includes credit scoring to strengthen the retail credit analysis process.

Based on the Credit Committee Guideline and Credit Limit Authority Provision, the duties of the Credit Committee at least include the following:

i. Approve or reject credit of financing in accordance with the limits of authority or type of credit or financing set by the directors;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

ii. Melakukan koordinasi dengan *Assets and Liabilities Committee* (ALCO) dalam aspek pendanaan Kredit atau Pembiayaan. Dalam hal ALCO belum ada, Komite Kredit harus melakukan evaluasi atas aspek pendanaan kredit atau pembiayaan tersebut dan secara berkala melaporkan secara tertulis kepada direksi;
iii. Memahami aspek legal/hukum, aspek bisnis/usaha, aspek keuangan dan aspek kewajaran dari kredit yang dikomitekan; dan
iv. Bila diperlukan dapat melakukan koordinasi dengan unit/fungsi didalam Bank terkait dengan kompetensinya.

Bank mengimplementasikan berbagai model sesuai dengan standar regulasi Bank Indonesia maupun *best practice* internasional. Bank mengembangkan model secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga.

Untuk menjaga agar kualitas kredit tetap terjaga, Bank telah melakukan pemantauan rutin dan konsisten baik untuk setiap jenis kredit (Komersial, *SME*, Konsumer) maupun portofolio kredit secara keseluruhan melalui *Portfolio Quality Review* (PQR) yang diselenggarakan tiap bulan bersama dengan direktur terkait. Selain itu, Bank juga melakukan monitoring debitur baru khususnya melalui Analisa *vintage* yang berbasis pada pergerakan kolektabilitas dan *day past due*.

Dalam rangka mengurangi eksposur risiko kredit yang bermasalah dilakukan langkah penyehatan kredit antara lain melalui restruktur, atau penyelesaian kredit melalui pengambil alihan jaminan hingga pelaksanaan hapus buku. Proses pengelolaan kredit bermasalah diatur dalam kebijakan yang bersifat khusus. Selain itu Bank telah memperkuat fungsi khusus untuk pengelolaan atas penyehatan dan penyelesaian kredit bermasalah yaitu melalui *Special Asset Management* yang dipimpin oleh SEVP yang membawahkan beberapa Divisi dan Departemen.

Untuk mengetahui ketahanan Bank dalam menghadapi suatu skenario kejadian ekstrim tetapi mungkin terjadi, Bank melakukan *stress test* secara berkala sehingga dapat melakukan antisipasi lebih awal.

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

ii. Coordinating with the Assets and Liabilities Committee (ALCO) in the aspect of Credit or Financing funding. In the event that ALCO does not yet exist, the Credit Committee must evaluate the aspects of credit or financing funding and periodically report in writing to the board of directors;
iii. Understand legal aspects, business aspects, financial aspects and fairness aspects of the credit that are discussed in the committee; and
iv. If necessary, it can coordinate with units/functions within the Bank regarding their competence.

The Bank has implemented various models to fulfill the Bank Indonesia regulation standard or international best practices. The Bank has developed the models independently or by entering into an agreement with third parties.

To maintain credit quality, the Bank has carried out regular and consistent monitoring for each type of credit (Commercial, SME, Consumer) and the overall loan portfolio through the Portfolio Quality Review (PQR) which is held monthly together with the relevant Board of Directors. In addition, the Bank also monitors new debtors, particularly through vintage analysis based on collectability movements and day past due.

To reduce non-performing credit risk exposure, credit restructuring measures are taken, including among others through restructuring, or credit settlement through taking over guarantees to carrying out write-offs. The process of managing non-performing loans is regulated in special policies. Moreover the Bank has strengthened its special function in order to managing the credit restructuring and settlement through Special Asset Management led by SEVP which oversees several Division and Department.

To understand the Bank's resilience in facing a scenario of extreme events that may occur, the Bank conducts stress tests regularly as part of early anticipation effort.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

Untuk memperkuat pengendalian risiko kredit, Bank menerapkan manajemen risiko tidak hanya pada *risk taking unit* namun juga pada unit kerja pendukung seperti fungsi Analis Kredit dan fungsi *Quality Assurance*. Fungsi analis kredit yaitu melakukan analisis terhadap proposal pengajuan kredit sementara fungsi *Quality Assurance* dan *Credit Examination* yaitu memastikan pelaksanaan manajemen risiko di *risk taking unit* terutama yang berkaitan dengan kredit telah berjalan sebagaimana mestinya.

Bank juga telah mengembangkan fungsi *Credit Examination* yang berperan sebagai lini pertahanan kedua di risiko kredit yang melakukan pemeriksaan kredit *(post-fact)* secara independen terhadap seluruh portofolio kredit Bank baik pada *Wholesale*, *SME*, dan *Retail*. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan portofolio kredit Bank dijalankan sesuai prinsip manajemen risiko dan telah memenuhi seluruh ketentuan perkreditan baik internal maupun eksternal.

Penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan secara efektif pada setiap jenis penyediaan dana dan sejak awal proses kredit. Terkait dengan hal tersebut, Bank melakukan pemisahan fungsi analis kredit dalam proses pengambilan keputusan kredit dengan adanya pemisahan *Account Officer Sales* dan *Account Officer Analyst*. Sejalan dengan hal tersebut, telah dilakukan perubahan atas Pedoman Manajemen Risiko Kredit sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan risiko bagi semua pihak yang terlibat dalam proses kredit. Ketentuan dan prosedur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan manajemen risiko Bank.

Selain itu, Bank terus berupaya meningkatkan kesadaran risiko *(risk awareness)* pada seluruh karyawan Bank.

a. Risiko kredit maksimum

Dalam aset keuangan yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian, eksposur maksimum terhadap risiko kredit sama dengan nilai tercatatnya. Untuk bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas *Letter of Credit* (L/C) atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan, eksposur maksimum terhadap risiko kredit adalah nilai yang harus dibayarkan oleh Bank jika kewajiban atas bank garansi yang diterbitkan dan fasilitas L/C atau SKBDN yang tidak dapat dibatalkan terjadi atau terealisasi. Untuk komitmen kredit, eksposur maksimum atas risiko kredit adalah sebesar jumlah fasilitas yang belum ditarik dari nilai penuh fasilitas kredit yang telah disepakati *(committed)* kepada nasabah.

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

To strengthen credit risk control, the Bank applies risk management not only to risk taking units but also to supporting work units such as Credit Analyst functions and Quality Assurance functions. The function of the credit analyst is to analyze the loan application proposals, while the function of Quality Assurance and Credit Examination is to ensure that the implementation of risk management in the risk taking unit, especially those related to credit, has been running properly.

The Bank also developed a Credit Examination function, which acts as a second line of defense in credit risk, which conducts independent credit examination (post-fact) on the entire Bank's loan portfolio on Wholesale, SME and Retail segments. The examination aims to ensure that the Bank's credit portfolio is carried out in accordance with risk management principles and has complied with all credit provisions, both internal and external.

The application of precautionary principle must be carried out effectively in every type of fund provision and from the beginning of the loan process. In this regard, the Bank separates the functions of credit analysts in the credit decision making process with the separation of Account Officer Sales and Account Officers Analysts. In line with this, changes have been made to the Credit Risk Management Guidelines as an effort to increase understanding and awareness of risks for all parties involved in the credit process. These provisions and procedures are an integral part of the Bank's risk management policy.

In addition, the Bank continues to increase risk awareness among all Bank employees.

a. Maximum credit risk

For financial assets recognized in the consolidated statements of financial position, the maximum exposure to credit risk generally equals their carrying amount. For bank guarantees and irrevocable Letters of Credit (L/C) issued or SKBDN, the maximum exposure to credit risk is the maximum amount that the Bank would have to pay if the obligations of the bank guarantees and irrevocable Letters of Credit (L/C) issued or SKBDN are called upon. For credit commitments, the maximum exposure to credit risk is the full amount of the unused committed loan facilities granted to customers.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

a. Risiko kredit maksimum (lanjutan)

Tabel berikut menyajikan eksposur maksimum terhadap risiko kredit untuk instrumen keuangan pada laporan posisi keuangan *(on-balance sheet)* dan rekening administratif *(off-balance sheet)*, tanpa memperhitungkan agunan yang dimiliki atau perlindungan kredit lainnya:

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

a. Maximum credit risk (continued)

The following table presents the maximum exposure to credit risk of on-balance sheet financial instruments and off-balance sheet accounts, without taking into account any collateral held or other credit enhancement:

	2024	2023	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian			Consolidated Statement of Financial Position
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	396.837	342.581	Current accounts with other banks- net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.798.303	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga:			Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui melalui laba rugi	7.467.153	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.345.452	3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi - neto	9.954.226	9.145.823	Measured at amortized cost - net
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	2.572.152	Marketable securities purchased with agreement to resell
Tagihan derivatif	12.054	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan /piutang syariah - neto	44.535.289	45.835.782	Loans and sharia financing /receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	83.079	130.964	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham	15	15	Investments in shares
Aset lain-lain	1.560.105	1.272.119	Other assets
Rekening Administratif			Administrative Accounts
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	4.282.285	4.822.935	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	90.095	88.205	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	582.778	1.337.709	Bank guarantees issued
Total	**78.780.149**	**79.280.828**	**Total**

b. Risiko konsentrasi kredit

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

Risiko konsentrasi kredit timbul ketika sejumlah nasabah bergerak dalam aktivitas usaha yang sejenis atau memiliki kegiatan usaha dalam wilayah geografis yang sama, atau memiliki karakteristik sejenis.

b. Credit concentration risk

Concentration of credit risk by geography

Concentrations of credit risk arise when a number of customers are engaged in similar business activities or activities within the same geographic region, or when they have similar characteristics.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kredit (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

Bank mendorong adanya diversifikasi dari portofolio kreditnya pada berbagai geografis dan sektor industri, mencerminkan profil risiko yang seimbang dan sehat dan untuk fokus pada upaya pemasaran terhadap industri dan nasabah yang potensial untuk meminimalisir risiko kredit. Bank telah menetapkan limit konsentrasi industri yang menentukan berdasarkan tingkat risiko sektor industri, proyeksi pertumbuhan kredit dan juga ketersediaan modal.

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan geografis

Diversifikasi portofolio kredit didasarkan rencana strategi bank, sektor target, kondisi ekonomi saat ini, kebijakan pemerintah, sumber pendanaan dan proyeksi pertumbuhan.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pengungkapan risiko kredit maksimum berdasarkan konsentrasi sebelum memperhitungkan agunan yang dimiliki dan perjanjian *master netting* adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

Credit Risk (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

The bank encourages the diversifications of its credit portfolio among a variety of geographic areas and industries, reflecting a well-balanced and healthy risk profile, and to focus marketing efforts toward potential industries and customers in order to minimize the credit risk. The Bank has sets its industry concentration limit based on industry risk level, projection of loan growth and availability of capital.

Concentration of credit risk by geography

The extent of diversification is based on the Bank's strategic plan, target sectors, current economic conditions, government policy, funding sources and growth projections.

As at December 31, 2024 and 2023, the disclosure on the maximum credit risk by concentration without taking into account any collateral held and master netting agreement is as follow:

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Jabotabek	**Jawa Selain Jabotabek/ *Java Other than Jabotabek***	**Sumatera**	**Kalimantan**	**Lain-Lain/ *Others***	**Total**	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	-	-	-	-	2.672.478	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain – neto	396.824	6	7	-	-	396.837	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.798.303	-	-	-	-	2.798.303	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga:							Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.467.153	-	-	-	-	7.467.153	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.345.452	-	-	-	-	4.345.452	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan							Measured at
Amortisasi – neto	9.954.226	-	-	-	-	9.954.226	amortized cost -net
Tagihan derivatif	12.054	-	-	-	-	12.054	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	29.611.196	7.599.014	2.792.134	705.801	3.827.144	44.535.289	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	83.079	-	-	-	-	83.079	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	Investments in shares
Aset lain-lain	1.507.046	23.681	10.113	2.774	16.491	1.560.105	Other assets
Rekening Administratif							**Administrative Accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	4.138.224	54.324	50.893	25.541	13.303	4.282.285	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	90.095	-	-	-	-	90.095	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	517.621	47.636	14.212	2.828	481	582.778	Bank guarantees issued
Total	**63.593.766**	**7.724.661**	**2.867.359**	**736.944**	**3.857.419**	**78.780.149**	**Total**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

Risiko Kredit (lanjutan)

Credit Risk (continued)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

b. Credit concentration risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Jabotabek	Jawa Selain Jabotabek/ *Java Other than Jabotabek*	Sumatera	Kalimantan	Lain-Lain/ *Others*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian							**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	-	-	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain -neto	342.567	6	8	-	-	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	-	-	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga:							Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	-	-	-	-	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.067.387	-	-	-	-	3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan							
Amortisasi - neto	9.145.823	-	-	-	-	9.145.823	Measured at amortized cost - net
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	2.572.152	-	-	-	-	2.572.152	Marketable securities sold with agreement to ressell receivable
Tagihan derivatif	3.040	-	-	-	-	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	28.781.905	8.418.724	3.263.034	1.087.484	4.284.635	45.835.782	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	130.964	-	-	-	-	130.964	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	15	Investments in shares
Aset lain-lain	1.223.039	23.767	9.342	1.901	14.070	1.272.119	Other assets
Rekening Administratif							**Administrative Accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah yang belum digunakan	4.558.701	111.418	114.932	25.336	12.548	4.822.935	Unused loans and sharia financing/ receivables facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	85.649	2.556	-	-	-	88.205	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	1.023.828	233.912	20.989	16.169	42.811	1.337.709	Bank guarantees issued
Total	**61.597.186**	**8.790.383**	**3.408.305**	**1.130.890**	**4.354.064**	**79.280.828**	**Total**

Konsentrasi risiko kredit berdasarkan industri

Concentration of credit risk by industry

	31 Desember/*December 31,* 2024								
	Keuangan/ *Financial*	Pemerintah/ *Government*	Konsumsi/ *Consumers*	Perdagangan/ *Trade*	Konstruksi/ *Construction*	Manufaktur/ *Manufacturing*	Lain-Lain/ *Other*	Total	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	-	-	-	-	-	-	2.672.478	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	396.837	-	-	-	-	-	-	396.837	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.798.303	-	-	-	-	-	-	2.798.303	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga									Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.192.497	274.656	-	-	-	-	-	7.467.153	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	4.345.452	-	-	-	-	-	4.345.452	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi - neto	1.669.725	8.284.501	-	-	-	-	-	9.954.226	Measured at amortized cost - net
Tagihan derivatif	12.054	-	-	-	-	-	-	12.054	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	54.738	-	13.454.097	10.974.326	3.446.991	6.878.004	9.727.133	44.535.289	Loans and sharia financing/ receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	-	-	-	83.079	-	83.079	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	Investment in shares
Aset lain-lain	163.235	-	81.090	608.150	234.605	465.144	7.881	1.560.105	Other assets
Rekening Administratif									**Administrative accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	6.000	-	2.810.756	371.895	214.384	429.540	449.710	4.282.285	Unused loans and Sharia financing/ receivable facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	90.095	-	-	90.095	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	582.778	-	-	582.778	Bank guarantees issued
Total	**14.965.882**	**12.904.609**	**16.345.943**	**11.954.371**	**4.568.853**	**7.855.767**	**10.184.724**	**78.780.149**	**Total**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

b. Risiko konsentrasi kredit (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

b. Credit concentration risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023								
	Keuangan/ *Financial*	**Pemerintah/ *Government***	**Konsumsi/ *Consumers***	**Perdagangan/ *Trade***	**Konstruksi/ *Construction***	**Manufaktur/ *Manufacturing***	**Lain-Lain/ *Other***	**Total**	
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian									**Consolidated Statement of Financial Position**
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	-	-	-	-	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	342.581	-	-	-	-	-	-	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	-	-	-	-	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga									Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.917	13	-	-	-	-	-	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	-	3.067.387	-	-	-	-	-	3.067.387	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi -neto	1.573.646	7.572.177	-	-	-	-	-	9.145.823	Measured at amortized cost - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	2.572.152	-	-	-	-	-	2.572.152	Marketable securities purchased with agreement to resell
Tagihan derivatif	3.040	-	-	-	-	-	-	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	15.863	-	11.520.707	14.451.355	4.563.046	5.494.925	9.789.886	45.835.782	Loans and sharia financing/ receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	-	-	-	130.964	-	130.964	Acceptances receivable -net
Penyertaan saham	15	-	-	-	-	-	-	15	Investment in shares
Aset lain-lain	289.254	-	68.963	523.095	179.578	203.345	7.884	1.272.119	Other assets
Rekening Administratif									**Administrative accounts**
Fasilitas kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah yang belum digunakan	11	-	2.807.181	792.861	244.359	247.389	731.134	4.822.935	Unused loans and Sharia financing/ receivable facilities
L/C dan SKBDN yang masih berjalan dan tidak dapat dibatalkan	-	-	-	-	88.205	-	-	88.205	Outstanding irrevocable L/C and domestic L/C
Bank garansi yang diterbitkan	-	-	-	-	1.337.709	-	-	1.337.709	Bank guarantees issued
Total	**12.886.513**	**13.211.729**	**14.396.851**	**15.767.311**	**6.412.897**	**6.076.623**	**10.528.904**	**79.280.828**	**Total**

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya

Bank menerapkan kebijakan untuk memitigasi risiko kredit, antara lain dengan meminta agunan sebagai jaminan pelunasan kredit jika jaminan berupa sumber pembayaran utama debitur berdasarkan arus kas tidak terpenuhi. Bank dapat menerima beragam jenis agunan yang diatur oleh kebijakan mitigasi risiko. Nilai agunan ditentukan berdasarkan hasil penilaian pada saat kredit diberikan dan ditinjau ulang secara berkala dan konsisten.

Untuk kredit yang diberikan, Bank menggunakan agunan untuk meminimalkan risiko kredit. Berdasarkan klasifikasi, kredit Bank dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. *Secured loans*
2. *Unsecured loans*

c. Collateral and other credit enhancements

The Bank implements policies to mitigate credit risk, among others, by asking for collateral as guarantee for repayment of credit if the collateral is the main source of payment of the debtor based on cash flow is not fulfilled. The Bank can accept various types of collateral that are regulated by risk mitigation policies. The collateral value is determined based on the results of the appraisal at the time the credit is given and is regularly and consistently reviewed.

For the loans, Bank uses the collateral to minimize the credit risk. Loans in Bank are classified into two major categories as follows:

1. Secured loans
2. Unsecured loans

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

c. Agunan dan perlindungan kredit lainnya (lanjutan)

Untuk s*ecured loans*, Bank menetapkan jenis dan nilai agunan yang dijaminkan sesuai skema kredit. Jenis dari agunan terdiri dari:

a. *Physical collateral*, antara lain tanah, bangunan dan BPKB kendaraan bermotor;
b. *Cash collateral*, antara lain simpanan (tabungan, giro dan deposito berjangka), emas, *financial collateral* (surat berharga); dan
c. Lainnya, antara lain garansi, jaminan pemerintah, dan jaminan dari Lembaga penjamin.

Agunan merupakan sumber terakhir pelunasan kredit *(secondary source of credit repayment)* dan sebagai salah satu bentuk mitigasi risiko kredit. Sumber utama pelunasan kredit berasal dari hasil usaha dan hasil analisa kemampuan debitur.

d. Kualitas aset keuangan

Kualitas aset keuangan dikelola oleh Bank dengan menggunakan panduan dari Otoritas Jasa Keuangan dan diungkapkan pada Catatan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 atas laporan keuangan konsolidasian.

Bank memiliki kebijakan terkait tingkat risiko yang akan diambil *(risk appetite)* dan toleransi risiko *(risk tolerance)* untuk mempertahankan peringkat risiko di seluruh portofolio aset keuangan secara akurat dan konsisten, sehingga Bank fokus atas risiko dengan peringkat tertentu dan perbandingan eksposur kredit di seluruh lini bisnis, daerah geografis dan produk. Sistem peringkat ini didukung oleh berbagai analisis keuangan, dikombinasikan dengan informasi pasar sebagai masukan utama untuk pengukuran risiko pihak lawan *(counterparty)*. Peringkat risiko disesuaikan dengan berbagai kategori dan ditentukan sesuai dengan panduan peringkat Bank Indonesia yang dinilai dan diperbaharui secara berkala.

40. Risk Management (continued)

c. Collateral and other credit enhancements (continued)

For secured loans, Bank determined the type and value of collateral according to the loan scheme. Types of collateral are as follows:

a. Physical collateral, such as land, buildings and proof of vehicle ownership;
b. Cash collateral, such as deposits (savings, current accounts, time deposit), gold, financial collateral (securities); and
c. Others, such as guarantees, government guarantees, and guarantees from guarantee/insurance institution.

Collateral is a second source of credit repayment and also as a form of credit risk mitigation. The primary source of credit repayment is the funds generated from business operations and capability analysis the borrowers.

d. Quality of financial assets

The financial assets quality is managed by the Bank using the guidance from Financial Services Authority and disclosed in Notes 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12 to the consolidated financial statements.

The Bank has policy related to risk appetite and risk tolerance to maintain risk rating over all financial asset portfolios accurately and consistently, therefore the Bank will focused on the risks with certain rating and the comparison of credit exposures across all business lines, geographic regions, and products. The rating system is supported by a various financial analytics, combined with processed market information to provide the main inputs of counterparty risk measurement. The risk rating is adjusted to various categories and is determined in accordance with the Bank Indonesia rating guidelines which are assessed and updated regularly.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai

Di samping itu, Bank telah menerapkan PSAK 71 dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terutama dalam perhitungan *Probability of Default* (PD) dan *Loss Given Default* (LGD).

Metodologi perhitungan CKPN dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kolektif dan individual. Metode penurunan nilai ini digunakan untuk menghitung CKPN fasilitas kredit yang terkait dengan *significant loan* dan *non-significant loan*. Minimum kriteria yang termasuk dalam kategori *significant loan* dan *non-significant loan* mengacu kepada Pedoman Penurunan Nilai Aset Keuangan Bank.

Tabel berikut ini menyajikan aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *staging* dan peringkat kredit pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment

Moreover, Bank has implemented PSAK 71 in calculating Allowance for Impairment Losses (CKPN) especially in the calculation of Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD).

CKPN Calculation methodology grouped into 2 categories, those are collective and individual. This method used to calculate CKPN for significant and non-significant loan. Minimum criteria that describe significant and non-significant loan refers to Bank's Financial Asset Impairment Policy.

The following table presents the financial assets (not include due from other branches), based on stage and credit grading as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

	31 Desember/*December 31*, 2024									
	Giro pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ *Investments in Shares*	Aset keuangan lainnya/ *Other financial assets*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi										**Financial assets at amortized cost**
Stage 1	2.672.478	397.137	2.798.303	9.954.506	84.279	37.244.210	15	1.575.128	54.726.056	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	6.276.660	-	-	6.276.660	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	4.006.616	-	-	4.006.616	Stage 3
	2.672.478	397.137	2.798.303	9.954.506	84.279	47.527.486	15	1.575.128	65.009.332	
Aset keuangan - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain										**Financial assets - fair value through other comprehensive income**
Stage 1	-	-	-	4.345.452	-	-	-	-	4.345.452	Stage 1
Aset keuangan - nilai wajar melalui laba rugi										**Financial assets - fair value through profit or loss**
Stage 1	-	-	-	7.467.153	-	-	-	-	7.467.153	Stage 1
Jumlah aset keuangan	**2.672.478**	**397.137**	**2.798.303**	**21.767.111**	**84.279**	**47.527.486**	**15**	**1.575.128**	**76.821.937**	**Total financial assets**
Cadangan kerugian penurunan nilai										**Allowance for impairment losses**
Stage 1	-	300	-	280	1.200	497.013	-	15.023	513.816	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	509.077	-	-	509.077	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	1.986.107	-	-	1.986.107	Stage 3
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**300**	**-**	**280**	**1.200**	**2.992.197**	**-**	**15.023**	**3.009.000**	**Total allowance for impairment losses**
Jumlah – bersih	**2.672.478**	**396.837**	**2.798.303**	**21.766.831**	**83.079**	**44.535.289**	**15**	**1.560.105**	**73.812.937**	**Total - net**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

e. Impairment assessment (continued)

	31 Desember/*December 31*, 2023									
	Giro pada Bank Indonesia/ *Current Accounts with Bank Indonesia*	Giro pada bank lain/ *Current accounts with other banks*	Penempatan pada Bank Indonesia dan bank-bank lain/ *Placements with Bank Indonesia and other banks*	Efek-efek/ *Securities*	Tagihan akseptasi/ *Acceptance receivables*	Kredit yang diberikan/ *Loans*	Penyertaan Saham/ *Investments in Shares*	Aset keuangan lainnya/ *Other financial assets*	Jumlah/ *Total*	
Aset keuangan dengan biaya perolehan diamortisasi										**Financial assets at amortized cost**
Stage 1	3.205.619	342.881	2.133.567	9.145.932	132.577	40.416.916	15	1.531.016	56.908.523	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	4.348.331	-	-	4.348.331	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	4.653.369	-	-	4.653.369	Stage 3
	3.205.619	342.881	2.133.567	9.145.932	132.577	49.418.616	15	1.531.016	65.910.223	
Aset keuangan - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain										**Financial assets - fair value through other comprehensive income**
Stage 1	-	-	-	3.067.387	-	-	-	-	3.067.387	Stage 1
Aset keuangan - nilai wajar melalui laba rugi										**Financial assets - fair value through profit or loss**
Stage 1	-	-	-	5.322.930	-	-	-	-	5.322.930	Stage 1
Jumlah aset keuangan	**3.205.619**	**342.881**	**2.133.567**	**17.536.249**	**132.577**	**49.418.616**	**15**	**1.531.016**	**74.300.540**	**Total financial assets**
Cadangan kerugian penurunan nilai										**Allowance for impairment losses**
Stage 1	-	300	-	109	1.613	858.219	-	51.597	911.838	Stage 1
Stage 2	-	-	-	-	-	459.100	-	-	459.100	Stage 2
Stage 3	-	-	-	-	-	2.265.515	-	-	2.265.515	Stage 3
Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai	**-**	**300**	**-**	**109**	**1.613**	**3.582.834**	**-**	**51.597**	**3.636.453**	**Total allowance for impairment losses**
Jumlah – bersih	**3.205.619**	**342.581**	**2.133.567**	**17.536.140**	**130.964**	**45.835.782**	**15**	**1.479.419**	**70.664.087**	**Total - net**

Dalam menentukan kualitas kredit berdasarkan segmen nasabah, untuk portofolio Komersial, UMKM dan Konsumer, eksposur dianalisis berdasarkan peringkat risiko kredit yang memainkan peranan utama dalam penilaian kualitas dan pengawasan risiko. Semua kredit diberikan peringkat risiko kredit yang ditelaah ulang secara sistematis dan diubah berdasarkan perubahan keadaan atau perilaku debitur. Risiko kredit diklasifikasi berdasarkan kolektibilitas dan lama tunggakan (DPD). Adapun kredit dengan kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2 dengan DPD kurang dari sama dengan 30 hari diklasifikasikan pada *stage* 1. Kredit dengan kolektibilitas 2 dengan DPD lebih dari sama dengan 31 hari sampai dengan kurang dari sama dengan 90 hari diklasifikasikan pada *stage* 2. Sementara kredit dengan kolektibilitas 3, 4 dan 5 diklasifikasikan pada *stage* 3.

In determining credit quality by client segment for Commercial, SME and Consumer banking portfolios. Exposures are analyzed by credit grade which plays a central role in the quality assessment and monitoring of risk. All loans are assigned a credit grade which is reviewed periodically and amended in light of changes in the borrower's circumstances or behavior. Credit grading is classified based on collectibility and Day Past Due (DPD). In case of loans with collectibility 1 and collectibility 2 with DPD less than 30 days are classified on stage 1. Loans with collectibility 2 with DPD more than 31 days up to less than 90 days days are classified on stage 2. While loans with collectibility 3, 4 and 5 are classified on stage 3.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

Tabel berikut adalah instrumen aset keuangan (tidak termasuk tagihan dari cabang-cabang lain) berdasarkan *stage* dengan jumlah cadangan kerugian penurunan nilai untuk setiap instrumen dengan klasifikasi biaya perolehan diamortisasi dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment (continued)

This table shows financial assets instruments (not include due from other branches) by stage with the allowance for impairment losses against each financial instruments under classification of amortized cost and fair value through other comprehensive income as at December 31, 2024 and 2023, are as follow:

31 Desember/*December 31*, 2024

	***Stage* 1**			***Stage* 2**			***Stage* 3**			**Jumlah/*Total***			
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Amount***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Amount***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount***	**Nilai Tercatat/ *Carrying Amount***	**Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses***	**Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount***	
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	-	2.672.478	-	-	-	-	-	-	2.672.478	-	2.672.478	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	397.137	(300)	396.837	-	-	-	-	-	-	397.137	(300)	396.837	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.798.303	-	2.798.303	-	-	-	-	-	-	2.798.303	-	2.798.303	Placements with Bank Indonesia and other bank - net
Surat - surat berharga	21.767.111	(280)	21.766.831	-	-	-	-	-	-	21.767.111	(280)	21.766.831	Marketable securities
Tagihan akseptasi	84.279	(1.200)	83.079	-	-	-	-	-	-	84.279	(1.200)	83.079	Acceptance receivables
Kredit yang diberikan	37.244.210	(497.013)	36.747.197	6.276.660	(509.077)	5.767.583	4.006.616	(1.986.107)	2.020.509	47.527.486	(2.992.197)	44.535.289	Loans
Penyertaan Saham	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15	Investment in shares
Aset keuangan lainnya	1.575.128	(15.023)	1.560.105	-	-	-	-	-	-	1.575.128	(15.023)	1.560.105	Other financial assets
	66.538.661	**(513.816)**	**66.024.845**	**6.276.660**	**(509.077)**	**5.767.583**	**4.006.616**	**(1.986.107)**	**2.020.509**	**76.821.937**	**(3.009.000)**	**73.812.937**	

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

e. Evaluasi penurunan nilai (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

e. Impairment assessment (continued)

31 Desember/*December 31*, 2023

	Stage 1			*Stage* 2			*Stage* 3			Jumlah/*Total*			
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ *Allowance for Impairment Losses*	Nilai Tercatat Bersih/ *Net Carrying Amount*	
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	-	3.205.619	-	-	-	-	-	-	3.205.619	-	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	342.881	(300)	342.581	-	-	-	-	-	-	342.881	(300)	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	2.133.567	-	2.133.567	-	-	-	-	-	-	2.133.567	-	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other bank - net
Surat - surat Berharga	17.536.249	(109)	17.536.140	-	-	-	-	-	-	17.536.249	(109)	17.536.140	Marketable Securities
Tagihan akseptasi	132.577	(1.613)	130.964	-	-	-	-	-	-	132.577	(1.613)	130.964	Acceptance receivables
Kredit yang diberikan	40.416.916	(858.219)	39.558.697	4.348.331	(459.100)	3.889.231	4.653.369	(2.265.515)	2.387.854	49.418.616	(3.582.834)	45.835.782	Loans
Penyertaan Saham	15	-	15	-	-	-	-	-	-	15	-	15	Investment in shares
Aset keuangan lainnya	1.531.016	(51.597)	1.479.419	-	-	-	-	-	-	1.531.016	(51.597)	1.479.419	Other financial assets
	65.298.840	**(911.838)**	**64.387.002**	**4.348.331**	**(459.100)**	**3.889.231**	**4.653.369**	**(2.265.515)**	**2.387.854**	**74.300.540**	**(3.636.453)**	**70.664.087**	

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan kredit dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah.

Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the loans might be renegotiated based on mutual agreement between the Bank and the borrowers.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang timbul akibat perubahan faktor pasar yang tidak sesuai dengan posisi yang diambil oleh Bank baik pada posisi aset dan liabilitas keuangan dan rekening administratif, termasuk risiko perubahan harga opsi. Aktivitas Bank secara kesuluruhan akan dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar seperti suku bunga, nilai tukar, harga ekuitas dan harga komoditas. Dalam rangka meminimalisasi potensi kerugian yang dapat terjadi dari volatilitas pergerakan variabel pasar tersebut, maka diperlukan adanya pemantauan yang ketat terhadap posisi Bank yang terekspos.

Pengelolaan risiko pasar dijalankan berdasarkan kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan produk, jasa dan aktivitas *treasury* serta bisnis yang terpapar risiko tersebut. Pengendalian risiko nilai tukar mata uang asing dan risiko suku bunga Bank pada *trading book* antara lain melalui analisis risiko dan limit untuk aktivitas *trading* seperti transaksi *money market, foreign exchange* dan *fixed income securities* (surat-surat berharga). Selain itu, dilakukan proses *marked-to-market* untuk posisi *trading book, monitoring* posisi devisa neto dan *Value at Risk* (VaR) atas posisi tersebut.

Risiko suku bunga

Dalam rangka mengidentifikasi risiko secara lebih akurat pada produk dan aktivitas Bank yang sensitif terhadap suku bunga pasar yang dapat memengaruhi tingkat risiko Bank dan untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat maka Bank perlu mengelola risiko suku bunga yang tidak hanya terbatas pada komponen *trading book* namun juga pada komponen *banking book* sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Pengelolaan risiko suku bunga dalam *Interest Rate Risk in the Banking Book* (IRRBB) dilakukan dengan memperhatikan pergerakan suku bunga di pasar yang berlawanan dengan Posisi *Banking Book*, yang berpotensi memberikan dampak terhadap permodalan dan rentabilitas (*earnings*) Bank, baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang.

IRRBB bersumber dari 3 (tiga) aspek dasar yang terkait dengan tingkat dan karakteristik struktur suku bunga, serta dampak dari tingkat dan karakteristik tersebut terhadap perubahan atas kurva imbal hasil *(yield curve)*. Ketiga aspek dasar dimaksud adalah *gap risk, basis risk* dan *option risk*.

40. Risk Management (continued)

Market Risk

Market risk is the risk of losses that arise due to changes in market factors that are not in accordance with position taken by Bank both in the position of financial assets and liabilities and administrative accounts, including the risk of changes in option prices. The overall activity of the Bank will be influenced by movements in market variables such as interest rates, exchange rates, equity prices and commodity prices. In order to minimize the potential losses that may occur due to the volatility of such market variable movements, it is necessary to perform strict monitoring of the Bank's exposure.

The overall market risk management is performed based on the policies and procedures related to the products, services and activities in the treasury and business exposed to that risk. The management of foreign exchange rate and interest rate risks in the trading book is performed through risk and limit analysis for trading activities such as money market, foreign exchange, and fixed income securities transactions (marketable securities). Furthermore, the trading book position has been marked-to-market and the net open position and Value at Risk (VaR) on that position are monitored.

Interest rate risk

In order to identify the risk more accurately towards the Bank's products and activity that are sensitive to market's interest rate which may affect risk level of the Bank and to make a good sound practice, the Bank needs to manage interest rate risk for both components either in the trading book or Banking book component according to the conservatism principles.

The Interest Rate Risk in the Banking Book (IRRBB) management is performed by monitoring the movement of interest rate in market not in same direction with Banking Book Position that may impact the Bank's capital and earning, in current condition and the future.

IRRBB originates from 3 (three) fundamental aspects related to the level and characteristics of the interest rate structure, as well as the impact of these levels and characteristics on changes in the yield curve. The basic aspects are gap risk, basis risk and option risk.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Dalam melakukan pengukuran risiko, Bank melakukan *stress test* dengan beberapa skenario, termasuk skenario terburuk (*worst case scenario*) untuk mengetahui tingkat kemampuan Bank dalam menghadapi berbagai tingkat pergerakan hingga kondisi pasar yang tidak normal. Hasil *stress test* tersebut digunakan sebagai pertimbangan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit risiko pasar. *Stress testing* dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau periode yang lebih pendek jika terjadi kondisi abnormal. Bank melakukan *back testing* untuk validasi pada metodologi, formula, model dan penggunaan asumsi pada setiap skenario dalam model pengukuran risiko.

Tabel berikut mengikhtisarkan eksposur risiko suku bunga Bank atas aset keuangan dan liabilitas keuangan yang tidak untuk diperdagangkan pada 31 Desember 2024 dan 2023, (Bank saja).

40. Risk Management (continued)

Market Risk (continued)

In measuring risks, the Bank has performed stress tests based on several scenarios, including the worst case scenario. This is intended to assess the Bank's ability during various levels of market movements to abnormal market conditions. The stress test results was used as a consideration in determining changes in policies and limit related to market risk. Stress testing is done every 3 (three) months or whichever is earlier in case there is an abnormal condition. The Bank periodically performs back testing to validate methodology, formula, model and assumptions used on each scenario of risk measurement model.

The table below summarizes the Bank's interest rate risk exposure on non-trading financial assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023 (Bank only).

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Total	**Kurang Dari 3 Bulan/ *Less Than 3 Months***	**3 - 12 Bulan/ *Months***	**1 - 5 Tahun/ *Years***	**Lebih dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years***	
Aset						**Assets**
Giro pada Bank Indonesia	2.301.999	2.301.999	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada Bank lain	428.273	428.273	-	-	-	Current accounts with other Bank
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.594.828	1.594.828	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.417.653	-	-	6.078.310	1.339.343	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.506.470	-	202.902	3.692.775	610.793	Fair value through other comprehensive
Diukur pada biaya perolehan						Measured at
Amortisasi - neto	9.182.948	1.244.628	413.460	7.524.860	-	amortized cost - net
Tagihan derivatif	12.054	12.054	-	-	-	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	41.456.215	3.470.998	7.214.252	14.996.741	15.774.224	Loans and sharia/ financing/ receivables - gross
Tagihan akseptasi	84.279	83.677	602	-	-	Acceptance receivables
	66.984.719	**9.136.457**	**7.831.216**	**32.292.686**	**17.724.360**	
Liabilitas						**Liabilities**
Simpanan nasabah	40.147.845	34.944.441	4.610.489	592.915	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.826.678	2.823.678	3.000	-	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	13.775.967	1.500.000	4.446.061	7.829.906	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	-	-	5.790.158	-	Securities issued
	62.540.648	**39.268.119**	**9.059.550**	**14.212.979**	**-**	
Neto	**4.444.071**	**(30.131.662)**	**(1.228.334)**	**18.079.707**	**17.724.360**	**Net**

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

Risiko Pasar (lanjutan)

Market Risk (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Total	**Kurang Dari 3 Bulan/ *Less Than 3 Months***	**3 - 12 Bulan/ *Months***	**1 - 5 Tahun/ *Years***	**Lebih dari 5 Tahun/ *More Than 5 Years***	
Aset						**Assets**
Giro pada Bank Indonesia	2.655.765	2.655.765	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	367.341	367.341	-	-	-	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	738.617	738.617	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga						Marketable securities
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	5.322.930	-	-	4.434.321	888.609	Fair value through profit or loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	3.477.939	-	76.255	2.897.332	504.352	Fair value through other comprehensive
Diukur pada biaya perolehan amortisasi - neto	8.807.987	1.277.192	193.121	7.337.674	-	Measured at amortized cost - net
Tagihan derivatif	3.040	3.040	-	-	-	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	44.183.228	3.513.641	7.869.650	15.523.202	17.276.735	Loans and sharia/ financing/ receivables - gross
Tagihan akseptasi	132.577	96.953	35.624	-	-	Acceptance receivables
	65.689.424	**8.652.549**	**8.174.650**	**30.192.529**	**18.669.696**	
Liabilitas						**Liabilities**
Simpanan nasabah	39.036.634	31.493.700	7.349.532	193.402	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.761.176	7.758.176	3.000	-	-	Deposits from other banks
Pinjaman yang diterima	11.654.712	1.231.760	2.247.547	8.175.405	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	3.397.588	-	Securities issued
	61.850.110	**40.483.636**	**9.600.079**	**11.766.395**	**-**	
Neto	**3.839.314**	**(31.831.087)**	**(1.425.429)**	**18.426.134**	**18.669.696**	**Net**

Manajemen risiko suku bunga atas limit *repricing gap* dilakukan dengan memonitor sensitivitas aset dan liabilitas keuangan Bank atas berbagai skenario tingkat bunga baik standar dan non-standar. Analisis sensitivitas Bank atas kenaikan atau penurunan tingkat bunga pasar, dengan asumsi bahwa tidak ada pergerakan asimetris di kurva imbal hasil dan posisi laporan posisi keuangan yang tetap, adalah sebagai berikut (tidak diaudit):

The management of interest rate risk against repricing gap limits is supplemented by monitoring the sensitivity of the Bank's financial assets and liabilities to various standard and non-standard interest rate scenarios. An analysis of the Bank's sensitivity to an increase or decrease in market interest rates, assuming no asymmetrical movement in curves and a constant position of statement of financial position, is as follows (unaudited):

	31 Desember/*December 31*, 2024		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(63.470)	63.470	Sensitivity of projected interest income - net

	31 Desember/*December 31*, 2023		
	Kenaikan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel increase*	**Penurunan paralel 100 basis poin/ *100 basis point-parallel decrease***	
Sensitivitas atas proyeksi pendapatan bunga - neto	(224.021)	224.021	Sensitivity of projected interest income - net

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Pasar (lanjutan)

Risiko nilai tukar

Penilaian risiko nilai tukar mata uang asing dilakukan dengan memperhatikan Posisi Devisa Neto (PDN) dan volatilitas mata uang asing yang dikelola Bank. Pengendalian risiko dilakukan melalui monitoring mutasi transaksi valuta asing di seluruh kantor cabang dan unit bisnis. Informasi mengenai PDN diungkapkan pada Catatan 55m.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank.

Risiko likuiditas juga berkaitan dengan optimalisasi struktur neraca dan risiko struktural terhadap ketergantungan pada sumber pendanaan tertentu. Pengelolaan risiko likuiditas Bank berupaya agar dapat mengelola risiko likuiditas dalam perspektif jangka pendek maupun struktural.

Besar kecilnya risiko likuiditas ditentukan antara lain:

a. Kecermatan dalam perencanaan arus kas atau arus dana berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana;
b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana termasuk kecukupan dana;
c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas;
d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort*.

Rasio Kecukupan Likuiditas diungkapkan pada Catatan 55k

Sisa jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan ekspektasi arus kas yang tidak didiskontokan dari liabilitas keuangan Bank berdasarkan jatuh tempo kontraktual yang terdekat pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

40. Risk Management (continued)

Market Risk (continued)

Foreign exchange risk

The foreign exchange risk valuation is performed by monitoring the Net Open Position (NOP) and foreign exchange volatility maintained by the Bank. Risk control is performed through monitoring the foreign exchange transaction movement in all branches and business units. The information related with NOP is disclosed in Note 55m.

Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk due to the inability of the Bank to meet obligations due from cash flow funding sources and/or from high quality liquid assets that can be pledged, without disrupting the activities and financial condition of the Bank.

Liquidity risk is the also related to the optimization of the balance sheet structure and structural risk of dependence on certain funding sources. The Bank's liquidity risk management strives to be able to manage liquidity risk form both a short-term and structural perspective.

The size of the liquidity risk is determined, among others:

a. Accuracy in cash flow or flow of fund planning based on financing and fund growth prediction, which includes observing the fund rate volatility;
b. The precision in managing the fund structure, including the adequacy of funding;
c. The availability of asset that is ready to be converted into cash;
d. Ability to create access to the interbank market or other funding sources, including the lender of last resort facilities.

Liquidity Adequacy Ratio are disclosed in Note 55k.

Residual contractual maturities of financial liabilities

The table below shows the expected undiscounted cash flows on the Bank's financial liabilities on the basis of their earliest possible contractual maturity as at the consolidated statement of financial position date.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

40. Risk Management (continued)

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

31 Desember/*December 31,* 2024

	Total	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 - 12 bulan/ *months*	1 - 5 tahun/ *years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Liabilitas segera	401.263	401.263	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	46.593.158	36.288.633	9.711.609	592.916	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.881.186	2.878.186	3.000	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.739.878	3.739.878	-	-	-	Marketable securities sell with agreement to repurchase - net
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	-	-	-	5.790.158	Securities issued
Liabilitas derivatif	3.641	3.641	-	-	-	Derivative payable
Liabilitas akseptasi	84.279	83.677	602	-	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	13.920.644	1.500.000	4.590.738	7.829.906	-	Borrowings
Liabilitas Lain-lain	1.638.402	1.344.206	190.519	-	103.677	Other liabilities
Neto	**75.052.609**	**46.239.484**	**14.496.468**	**8.422.822**	**5.893.835**	**Net**
Komitmen dan Kontinjensi						**Commitment and Contigencies**
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.282.285	2.507.586	937.009	827.255	10.435	Unused Loan Facilities
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	90.095	40.609	49.486	-	-	Outstanding Irrevocable Letters of Credit
Garansi yang diterbitkan	582.778	488.955	41.342	52.481	-	Guarantee Issued
Total	**4.955.158**	**3.037.150**	**1.027.837**	**879.736**	**10.435**	**Total**

31 Desember/*December 31,* 2023

	Total	Kurang dari 3 bulan/ *Less than 3 months*	3 - 12 bulan/ *months*	1 - 5 tahun/ *years*	Lebih dari 5 tahun/ *More than 5 years*	
Liabilitas segera	431.402	431.402	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	44.789.143	32.415.350	12.180.392	193.401	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.886.721	7.883.721	3.000	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	219.631	219.631	-	-	-	Marketable securities sell with agreement to repurchase - net
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	-	3.397.588	Securities issued
Liabilitas derivatif	808	808	-	-	-	Derivative payable
Liabilitas akseptasi	132.577	96.953	35.624	-	-	Acceptance payable
Pinjaman yang diterima	11.704.492	1.231.760	2.297.327	8.175.405	-	Borrowings
Liabilitas Lain-lain	1.570.140	1.263.423	206.372	-	100.345	Other liabilities
Neto	**70.132.502**	**43.543.048**	**14.722.715**	**8.368.806**	**3.497.933**	**Net**
Komitmen dan Kontinjensi						**Commitment and Contigencies**
Fasilitas kredit kepada debitur yang belum digunakan	4.822.935	2.934.857	1.195.554	676.892	15.632	Unused Loan Facilities
Irrevocable letter of credit yang masih harus berjalan	88.205	78.074	10.131	-	-	Outstanding Irrevocable Letters of Credit
Garansi yang diterbitkan	1.337.709	775.909	480.463	81.337	-	Guarantee Issued
Total	**6.248.849**	**3.788.840**	**1.686.148**	**758.229**	**15.632**	**Total**

Secara berkala Bank melakukan kaji ulang terhadap kebijakan dan limit risiko likuiditas. Selain itu, Bank memiliki kebijakan *contingency funding plan* sebagai pedoman bagi Bank untuk mengantisipasi situasi krisis likuiditas. Untuk mengetahui dampak perubahan pasar maupun faktor internal pada kondisi ekstrem (krisis) terhadap kondisi likuiditas yang dapat berdampak pada kecukupan modal Bank, Bank melakukan *stress test* terhadap posisi likuiditas Bank secara regular, sehingga Bank dapat mengantisipasi lebih awal dan mengambil langkah-langkah pengendalian dan solusi yang paling optimal sebagai strategi jangka pendek maupun jangka panjang pemulihan likuiditas. Informasi mengenai jatuh tempo aset dan liabilitas sesuai kontrak diungkapkan pada Catatan 41.

The Bank on a regular basis reviews the liquidity risk management policy and its limit. Futhermore, the Bank has contigency funding plan policy as a guidance for the Bank to overcome the situiation of liquidity crisis. In determining impact of changes in market and internal factors in extreme conditions (crisis) to the liquidity conditions that could impact the Bank's capital adequacy, the Bank performs stress test on Bank's funding liquidity position on a regular basis. By applying stress test, the Bank can anticipate early and take control measures as well as calculate the most optimal solution per short-term strategy and long-term recovery of liquidity. The information related to the maturity profile of assets and liabilities is disclosed in Note 41.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun non finansial bagi Bank. Kebijakan manajemen risiko operasional secara Bank *wide* digunakan sebagai acuan utama bagi semua lini bisnis, fungsi pendukung dan entitas anak dalam mengelola risiko operasional. Pendekatan Bank terhadap manajemen risiko operasional adalah dengan menentukan strategi mitigasi guna memperoleh keseimbangan yang optimal antara paparan risiko operasional, efektivitas mekanisme kontrol dan pembuatan *risk appetite* sebagai salah satu strategi bank dengan melakukan implementasi konsisten atas Manajemen Risiko Operasional.

Pengelolaan terhadap eksposur risiko operasional di Bank mencakup pengelolaan terhadap eksposur risiko hukum, reputasi, kepatuhan dan stratejik yang terdapat pada setiap proses bisnis dan aktivitas operasional.

Penerapan Manajemen Risiko Operasional dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa keuangan No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, yang mensyaratkan penerapan manajemen risiko mencakup 4 pilar yakni pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit Risiko, kecukupan proses manajemen risiko, dan sistem pengendalian internal.

Hal ini juga termasuk pengkajian atas produk dan/atau aktivitas baru atau pengembangan yang meningkatkan profil risiko produk dan/atau aktivitas Bank.

Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi potensi kerugian risiko operasional.

Manajemen risiko serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Pengelolaan risiko operasional yang dilakukan secara efektif dapat mengurangi potensi kerugian risiko operasional.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk

Operational risk is a risk due to insufficiency and/or non-functioning of internal processes, human error, system failure, and/or the existence of external factors that have the potential to cause financial and non-financial losses to the Bank. Bank wide Operational Risk Management Policy is used as a main reference for all line of businesses, support functions and subsidiaries in managing their operational risk. The Bank's approach to Operational Risk management is to define the best mitigation strategy to get optimum balance between operational risk exposure, effectiveness of control mechanism, and creating risk appetite as a Bank strategy by a consistent implementation of a comprehensive Operational Risk Management.

Management of operational risk exposures at Bank includes legal risk exposures, reputation, compliance and strategic risk exposure that occur in every business process and operational activity.

The Implementation of Operational Risk Management is carried out by referring to the Regulation of Financial Services Authority No. 18/POJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, which requires the implementation of risk management toward 4 pillars, that cover active supervision of the Board of Directors and the Board of Commissioners, adequacy of risk management policy, procedure, and establishment of risk limit, adequacy of risk management process, and internal control system.

In addition, it includes the assessment of new or development products and/or activities that increase the risk profile of the products and/or activities of the Bank.

Effective operational risk management can reduces the potential of operational risk losses.

Risk management policies and procedures, set of the risk limits, adequacy of risk identification, risk measurement, risk monitoring and risk control processes, and a comprehensive risk management information system and an internal control system as well. Effective operational risk management can reduces the potential of operational risk loss.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Bank telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Operasional, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance* dan penetapan limit Risiko Operasional. Di dalam mengelola risiko operasional, *risk taking unit* bertanggung jawab atas risiko yang terjadi pada unitnya masing-masing. Tata cara atas pengendalian risiko operasional diatur dalam suatu kebijakan Bank secara menyeluruh yang mencakup ketentuan dan prosedur operasional untuk setiap unit dan dilakukan reviu secara berkala.

Bank telah melakukan beberapa hal dalam rangka pengelolaan risiko operasional, yaitu:

i. Menetapkan *risk governance* pengelolaan risiko operasional;
ii. Menetapkan kebijakan dan prosedur serta melakukan reviu secara berkala sebagai landasan penerapan manajemen risiko;
iii. Menetapkan operational *risk appetite* dan *risk tolerance;*
iv. Menyusun metodologi dan perangkat pengelolaan risiko operasional;
v. Membangun *Risk Awareness* di seluruh lini organisasi termasuk mewujudkan *Risk Culture* dalam aktivitas bisnis Bank;
vi. Menjalankan implementasi pengelolaan risiko operasional ke seluruh unit kerja Kantor Pusat dan *Branch* termasuk implementasi *Operational Risk Management* (ORM) *Tools* yang meliputi aplikasi *Loss Event Database* (LED) dan Aplikasi *Risk Control Self-Assesment* (RCSA);
vii. Menyusun *Disaster Recovery Plan* sebagai langkah antisipasi atas kejadian internal maupun eksternal yang berpotensi menimbulkan kerugian termasuk kejadian bencana;
viii. Melakukan penilaian risiko sendiri terhadap penerapan ketahanan dan keamanan siber;
ix. Melakukan penilaian tingkat maturitas untuk keamanan siber dan perbankan digital;
x. Melakukan penilaian kerentanan dan pengujian penetrasi;
xi. Melakukan penilaian risiko (*risk-assessment*) kecukupan pengelolaan risiko atas rencana pengembangan Produk dan/atau layanan Bank;
xii. Melakukan perhitungan atas Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Operasional;
xiii. Menyediakan kajian risiko terkait dengan proses bisnis, aktivitas operasional dan transaksional;
xiv. Melaksanakan peningkatan atas kapabilitas Sumber Daya Manusia secara berkelanjutan, menyusun *Blue Print* Sumber Daya Manusia (SDM), menyusun *Man Power Planning*, dan Peningkatan komposisi SDM di Unit Bisnis;

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

The Bank has an Operational Risk Management Policy, setting of risk appetite and risk tolerance, and Operational Risk Limits. ln managing operational risk, the risk owner is responsible for the risk that occurs in their respective units. The operational risk management procedures are regulated in a comprehensive Bank's policy for each unit that includes provisions and procedures and reviewed periodically.

The Bank has done several things in order to manage operational risk, as follows:

i. Stipulate risk governance for operational risk management;
ii. Stipulate policies and procedures and conduct periodic reviews as a basis for implementing risk management;
iii. Stipulate operational risk appetite and risk tolerance;
iv. Develop operational risk management methodologies and tools;
v. Building Risk Awareness in all lines of organization including realizing Risk Culture in Bank's business activities;
vi. Carry out the implementation of operational risk management to all Headquarters and Branch work units including the implementation of Operational Risk Management Tools (ORM Tools) which include the Loss Event Database (LED) application and the Risk Control Self-Assessment (RCSA) application;
vii. Develop a Disaster Recovery Plan as an anticipatory measure for internal and external events that have the potential to cause losses; including events of disasters;
viii. Self Risk Assessment for Cyber Security Implementation;
ix. Maturity Level Assessment for Cyber Security and Digital Banking;
x. Vulnerability Assessment and Penetration Test;
xi. Conduct a risk assessment of management adequacy of the Bank's products and/or services development plan;
xii. Calculate the Risk Weighted Assets (RWA) for Operational Risk;
xiii. Provide the risk studies related to business process, operational, and transactional activities;
xiv. Improves the ability of Human Resources regularly, preparation of the Human Resources Blue Print, development of Man Power Planning and Improve HR composition in Business Units;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

xv. Pelaksanaan Komite Pengendalian Internal secara rutin untuk membahas suatu permasalahan yang dapat meningkatkan eksposur risiko Bank;
xvi. Melaksanakan monitoring secara berkala atas keamanan sistem teknologi informasi yang digunakan;
xvii. Melaksanakan *monitoring limit* risiko dan pelaporan internal maupun eksternal (Regulator);
xviii. Penyempurnaan dan penguatan program strategi *anti-fraud*, antara lain melalui sosialisasi *anti-fraud* kepada seluruh karyawan, pemantauan penerapan sanksi terhadap pelaku, dan pengembangan unit *anti-fraud* menjadi departemen;
xix. Perbaikan kelemahan dalam kegiatan operasional dan TI;
xx. Pelaksanaan *monitoring* atas penanganan pengaduan nasabah, peningkatan, kompetensi petugas Bank dalam penaganan pengaduan nasabah;

Bank telah menerapkan *operational risk governance*, melalui:

i. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
ii. Pelaksanaan pengelolaan atas risiko operasional melalui model *three line of defense*, yaitu:
   - *Risk taking* unit sebagai *risk owner* merupakan *first line of defense* yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan langsung dari masing- masing unit kerja;
   - *Second line of defense* yang menjalankan fungsi *oversight*; dan
   - Internal Audit sebagai *third line of defense* yang menjalankan fungsi *independent assurance*.
iii. Melakukan peninjauan ulang dan pembenahan terhadap kebijakan dan pedoman internal Bank yang ada guna menunjang kegiatan usaha Bank.
iv. Melakukan sosialisasi kebijakan/pedoman internal untuk meningkatkan pemahaman kepada karyawan.

Dalam rangka pengelolaan risiko operasional, Bank telah mengembangkan:

i. Aplikasi *Risk Control Self Assessment* (RCSA) berbasis web yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memonitor risiko operasional pada setiap unit kerja secara berkala;

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

xv. Conduct Internal Control Committee to discuss issues that have the potential to increase the risk of Bank exposure;
xvi. Carry out periodic monitoring of the security of information technology systems used;
xvii. Monitor the risk limit and provide the internal and external report (Regulator);
xviii. Improvement and strengthening of the anti-fraud strategy program, including through anti-fraud socialization to all employees, monitoring the implementation of sanctions against perpetrators, and developing anti-fraud units into departments;
xix. Improvement of weaknesses in operational and IT activities;
xx. Implementation of handling customer complaints monitoring, increasing the competence of Bank officers in handling custumer complaints;

The Bank has implemented operational risk governance, through:

i. Active supervision by the Board of Commissioners and Directors;
ii. Implementation of the operational risk management through models named as three line of defense that consist of:
   - Risk taking unit as a risk owner is the first line of defense that is responsible for direct management of each work unit;
   - The second line of defense that runs the oversight function; and
   - Internal Audit as the third line of defense that carries out the independent assurance function.
iii. Conduct review and revamp the internal policies and guidelines of the Bank to support the Bank's business activities.
iv. Conduct socialization of internal policies/guidelines to increase understanding to employees.

In order to manage operational risk, the Bank has developed:

i. The web based of Risk Control Self Assessment (RCSA) application, that is used to identify, measure, and monitor the operational risk in each unit on a regular basis;

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

ii. Aplikasi *Loss Event Data* (LED) berbasis web yang digunakan untuk pencatatan data kerugian Bank yang sudah terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, baik atas kerugian finansial maupun non finansial;
iii. *Action Plan* sebagai langkah-langkah mitigasi risiko operasional;
iv. *Dashboard* Manajemen Risiko Operasional yang digunakan sebagai indikator tingkat risiko operasional dalam suatu aktivitas perbankan.

Setiap kejadian atau indikasi dari terjadinya risiko operasional atau kelemahan yang teridentifikasi oleh alat-alat risiko operasional akan ditindaklanjuti melalui perbaikan-perbaikan. Proses pelaporan dan eskalasi akan dilakukan mulai dari setiap unit bisnis dan unit pendukung sampai dengan Komite Manajemen Risiko. Departemen *Operational Risk* dan *IT Management* secara proaktif telah melakukan sosialisasi atau kampanye yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran tentang Risiko Operasional ke seluruh unit di Bank, melalui berbagai informasi atas kejadian berisiko dan rekomendasi atas perbaikan proses.

Sebagai bagian dari pemantauan Risiko Operasional, Bank juga mengelola Risiko Teknologi Informasi dengan memiliki tata kelola terkait dengan Manajemen Risiko Teknologi Informasi. Fokus pemantauan risiko operasional terkait risiko teknologi informasi antara lain adalah *Risk Register Information Technology* yang mana saat ini Bank fokus pada pembangunan NGBS (*New Generation Banking System*), kemudian *Risk Register e-channel* serta digital yang merupakan transformasi yang dicanangkan oleh pemerintah.

Bank telah melakukan penyusunan dan pemantauan pelaksanaan penyelesaian isu risiko yang berpontensi tinggi dalam dampak kerusakan terutama pada daftar utama RCSA (*Risk Control Self-Assessment*) dari RTU (*Risk Taking Unit*) serta melakukan umpan balik berupa opini terhadap kewajaran dan ketepatan dari penilaian yang telah dilakukan oleh RTU. Selain itu terkait kontrol internal, Bank melakukan pengkinian *Risk Issue* secara rutin dan juga menjaga limit risiko di aktivitas operasional agar dapat mendukung pertumbuhan bisnis tetapi tetap aman dari risiko.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

ii. The web based of Loss Event Data (LED), that is used to record and collect Bank's losses data that have occurred or have the potential to cause losses for the Bank, both in financial and non-financial losses;
iii. The Action Plan as an operational risk mitigation step;
iv. The Operational Risk Management Dashboard that is used as an indicator of operational risk level of banking activities.

Any events or indication of operational risk or weaknesses identified by operational risk tools will be followed up through improvements. The reporting and escalation process will start from each business unit and supporting unit up to the Risk Management Committee. Operational Risk and IT Management Department has proactively carried out ongoing campaigns or socialization to raise awareness concerning Operational Risk to all units within the Bank, through information sharing on risk events and recommendations for process improvement.

As part of Operational Risk monitoring, the Bank also manage Information Technology Risk by developing governance related to Information Technology Risk Management. Focus of operational risk monitoring related to information technology risk among others are Risk Register Information Technology, where the Bank is currently focusing on the development of the NGBS (New Generation Banking System), then the e-channel and digital Risk Registers, which are transformations launched by the government.

The Bank has prepared and monitored the implementation of the resolution of risk issues that have a high potential for damage, especially on the main list of RCSA (Risk Control Self-Assessment) from the RTU (Risk Taking Unit) as well as providing feedback in the form of opinions on the fairness and accuracy of the assessments that have been carried out by RTU. Related with internal control Bank did updating Risk Issues on a regular basis and also maintaining risk limits in operational activities in order to support business growth while remaining safe from risk.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Operasional (lanjutan)

Selain itu Bank juga telah melakukan pemantauan atas pencatatan data kerugian Bank yang sudah terjadi atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Bank, baik atas kerugian finansial maupun non finansial yang dicatatkan kedalam aplikasi *Loss Event Database* (LED). Sebagai bentuk peningkatan atas penggunaan aplikasi LED (*Loss Event Database*) Bank telah melakukan pembaharuan terhadap pedoman aplikasi LED melalui Surat Edaran Direksi No.SE/048/DIR/2023 tentang Pedoman *Loss Event Database* PT Bank KB Bukopin Tbk.

Kejadian-kejadian berisiko selama tahun 2024 baik yang disebabkan karena faktor kelalaian karyawan, sistem, proses ataupun kejadian eksternal dinilai mengalami kerugian yang relatif tidak signifikan terhadap Bank. Bank menggunakan pendekatan indikator dasar untuk mengalokasi modal dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk risiko operasional dengan menggunakan data rata-rata 3 tahun terakhir dari pendapatan bruto Bank.

Bank telah melakukan perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel Committee on Banking Supervision* dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank dalam melakukan perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Indikator Dasar.

Bank telah melakukan uji coba perhitungan beban modal risiko operasional berdasarkan *Basel III: Finalizing Post-Crisis Reforms* dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2020 tanggal 29 April 2020 tentang perhitungan ATMR risiko operasional menggunakan Pendekatan Standar bagi Bank Umum (*Standard Measurement Approach*) yang berlaku pada tanggal 1 Januari 2023.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, yang antara lain disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Bank maupun Bank terhadap pihak ketiga.

40. Risk Management (continued)

Operational Risk (continued)

In addition, the Bank has also monitored the recording of data on Bank losses that have occurred or have the potential to cause losses to the Bank, both financial and non-financial losses that are recorded in the Loss Event Database (LED) application. As a form of increasing the use of the LED application (Loss Event Database) the Bank has updated the LED application guidelines through Directors Circular Letter No.SE/048/DIR/2023 concerning Loss Event Database Guideline PT KB Bank Bukopin Tbk.

Risk events in 2024 either due to negligence of employees, system, processes, or external events are considered as having incurred relatively insignificant losses to the Bank. The Bank adopts basic indicator approach to allocate capital and Risk Weighted Assets (RWA) for operational risk using average data of the last 3 years of the Bank's gross income.

The Bank has calculated the operational risk capital charge under the Basel Committee on Banking Supervision and the Financial Services Authority Regulation Number 11/POJK.03/2016 dated January 29, 2016 regarding the Minimum Capital Requirement for Commercial Banks. Based on these provisions, the Bank performs operational risk calculations using the Basic Indicator Approach.

The Bank has conducted a trial test on the calculation of operational risk capital costs based on Basel III: Finalizing of Post-Crisis Reforms and Financial Services Authority Circular Letter Number 6/SEOJK.03/2020 dated April 29, 2020, concerning Calculation of Operational RWA Using Standard Approaches for Commercial Banks which have been apply effective January 1, 2023.

Legal Risk

Legal risk is the risk due to legal claims and/or weaknesses in legal aspects which among others derived from the weaknesses in the Bank's engagements, the absence and/or changes in laws which result in the transaction executed by the Bank is not aligned with the current regulations, and litigation process both from third parties to the Bank and from the Bank to third parties.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Hukum (lanjutan)

Proses identifikasi risiko hukum dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko hukum yang sekurang-kurangnya dilakukan terhadap rencana penyelenggaraan produk dan/atau layanan Bank, seluruh aktivitas Bank yang tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, *treasury*, *trade finance services*, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk/aktifitas baru, serta pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis lainnya melalui proses pengendalian manajemen risiko hukum yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

Melalui Departemen Hukum Perusahaan dan Litigasi, Bank telah melakukan identifikasi risiko hukum yang memadai dengan memberikan *legal advisory*/*legal opinion* dan analisis yuridis kepada unit terkait untuk meningkatkan kualitas perjanjian kredit/Kerjasama agar tidak merugikan Bank, serta memperkuat standar perjanjian Kerjasama dan kebijakan manajemen risiko hukum sebagai bentuk mitigasi atas risiko yang akan muncul.

Selain itu Identifikasi serta pengukuran risiko hukum juga dilakukan melalui pemantauan penanganan kasus hukum, *potential loss* yang dihadapi Bank dari tuntutan hukum, serta pemantauan biaya legal. Pengelolaan risiko hukum Bank dilakukan oleh Departemen Hukum Perusahaan dan Litigasi dengan fokus kepada penyelesaian tuntutan hukum. Departemen tersebut bertanggung jawab untuk memastikan penguatan posisi Bank dalam kasus yang di hadapi oleh Bank.

Identifikasi risiko hukum juga dilakukan pada seluruh aktivitas Bank yang tidak terbatas pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana, *treasury, trade finance services*, pengelolaan sumber daya manusia, pengembangan produk/aktifitas baru, serta pelaksanaan kegiatan operasional dan bisnis lainnya.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank, yang antara lain disebabkan adanya kejadian yang telah merugikan reputasi Bank, misalnya pemberitaan negatif di media massa, pelanggaran etika bisnis, keluhan nasabah, serta hal lain yang dapat menyebabkan risiko reputasi, misalnya kelemahan pada tata kelola, budaya perusahaan dan praktik bisnis Bank.

40. Risk Management (continued)

Legal Risk (continued)

The process of identifying legal risks is carried out by analyzing all sources of legal risks which at least are carried out on plans for implementing Bank products and/or services, all Bank activities that are not limited to fundraising activities, fund distribution, treasury, trade finance services, human resource management, development of new products/ activities, as well as implementation of operational and other business activities through appropriate legal risk management control processes prior to their introduction or implementation.

Through the Corporate Legal and Litigation Department, the Bank has identified adequate legal risks by providing legal advisory, legal opinion, and juridical analysis to related units to improve the quality of credit and cooperation agreements so as not to harm the Bank, as well as strengthening Cooperation agreement standards and legal risk management policies as a form of mitigation of the risks that will arise.

In addition, the identification and measurement of legal risk is also carried out through monitoring the handling of legal cases, potential loss faced by the Bank from lawsuits, and monitoring legal costs. The Bank's legal risk management is carried out by the Corporate Legal and Litigation Department with a focus on resolving legal claims. This department is responsible for ensuring the strengthening of the Bank's position in cases faced by the Bank.

Legal risk identification is also carried out in all Bank activities which are not limited to fund raising, fund distribution, treasury, trade finance services, human resource management, new product/activity development, as well as the implementation of other operational and business activities.

Reputation Risk

Reputation risk is the risk due to decrease in stakeholders' trust that comes from negative perception on the Bank, among others derived from events that resulting loss to the Bank, such as negative news in mass media, transgression of business ethics, customers complaints, and other matters resulting reputation risk, such as the weaknesses in corporate governance, corporate culture, and the Bank's business practices.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Karena risiko reputasi melekat pada berbagai kegiatan dan aspek, Bank bergantung pada perangkat dan mekanisme pengelolaan risiko operasional dalam mengelola risiko ini. Dengan demikian, Bank melakukan analisis atas setiap pengaduan nasabah ataupun persepsi negatif Bank yang disampaikan melalui media pemberitaan (media massa, media *online*, media TV dan media sosial) untuk memastikan penyebab dan penyelesaiannya.

Bank memiliki Departemen khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan risiko reputasi terkait dengan pengaduan nasabah, serta Departemen khusus yang bertanggung jawab terkait pengelolaan risiko reputasi atas komunikasi internal dan eksternal serta pemantauan dan pengelolaan media.

Pengelolaan risiko reputasi atas pengaduan/ keluhan nasabah atau pemberitaan negatif yang disampaikan secara langsung kepada Bank ataupun melalui media *online* serta media lainnya terus dilakukan secara berkelanjutan melalui:

i. Penggunaan *Complaint Tracking System* sebagai aplikasi untuk *monitoring* dan pengelolaan atas penanganan serta penyelesaian pengaduan nasabah;
ii. Pelaksanaan pemantauan atas pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik menggunakan sistem *dashboard* secara harian;
iii. Pelaksanaan fungsi pemantauan dan pengelolaan atas pemberitaan Bank di Media Massa oleh *Corporate Relation Department*;
iv. Pelaksanaan fungsi pemantauan atas penyelesaian penanganan pengaduan nasabah oleh *Customer Experience and Development Department*;
v. Pelaksaan program pertemuan rutin tahunan dengan awak media sebagai bentuk menjaga relasi Perusahaan;
vi. Pengelolaan Perlindungan Konsumen yang dilakukan oleh *Compliance Development and Customer Protection Unit.*

Sebagai bagian dari proses manajemen risiko reputasi, Bank menyediakan media komunikasi bagi nasabah apabila mengalami ketidaknyamanan dalam bertransaksi baik melalui media sosial, email maupun layanan telepon Halo Bukopin yang beroperasi selama 24 Jam.

Rating Bank berdasarkan Fitch dipertahankan pada tingkat AAA(idn) dan Pefindo pada idAAA.

40. Risk Management (continued)

Reputation Risk (continued)

Since reputational risk is inherent in various activities and aspects, the Bank relies on tools and mechanisms in operational risk management in managing such risk. Therefore, the Bank analyzes each customer complain or negative perception that is published through the news media (mass media, online media, TV program and social media) to ascertain the cause and its resolution.

The Bank has a special Department that is responsible for managing reputation risk related to customer complaints, as well as a special Department that is responsible for managing reputation risk for internal and external communications as well as media monitoring and management.

Reputation risk management of customer complaints or negative news that submitted directly to the Bank or through online media and other media is carried out continuously through:

i. Use of the Complaint Tracking System as an application to monitor and manage the handling and resolution of customer complaints;
ii. Implementation of monitoring of reporting in mass media, both print mass media and electronic, using a dashboard system on a daily basis;
iii. Implementation of the monitoring and management function of Bank reporting in the Mass Media by the Corporate Relations Department;
iv. Implementation of the monitoring function for the resolution of handling customer complaints by the Customer Experience and Development Department;
v. Implementation of a regular annual meeting program with media crew as a form of maintaining relationships as well as managing the Company's reputation;
vi. Consumer Protection Management carried out by the Compliance Development and Customer Protection Unit.

As part of the reputation risk management process, the Bank provides communication media for customers if they experience inconvenience in transactions either via the Bank's official social media, email or the Halo Bukopin telephone service which operates 24 hours.

Bank's rating based on Fitch is maintained at AAA(idn) and Pefindo's rating at idAAA.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Reputasi (lanjutan)

Untuk memastikan pengendalian risiko reputasi, Bank telah melakukan langkah-langkah antara lain:

- Penetapan alur proses secara jelas atas penyelesaian penanganan pengaduan nasabah;
- Penerapan *Service Level Agreement* (SLA) di tiap unit kerja untuk memastikan aktivitas layanan kepada nasabah telah sesuai dengan standar waktu;
- Melaksanakan pelatihan kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Bank kepada nasabah.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi karena Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan ketentuan internal, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara umum. Dalam menjalankan kegiatan usaha pada industri perbankan, Bank diwajibkan untuk selalu tunduk terhadap peraturan perbankan yang diterbitkan baik oleh Pemerintah maupun Bank Indonesia. Selain itu, Bank juga wajib tunduk kepada beberapa ketentuan lainnya, seperti peraturan yang mengatur penjaminan simpanan, perseroan terbatas, perpajakan dan peraturan di bidang pasar modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Bank senantiasa menjaga kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memelihara reputasi bank, sehingga sesuai dengan harapan dari seluruh pemangku kepentingan dan juga industri perbankan pada umumnya.

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank juga merupakan salah satu cerminan dari penerapan Tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Apabila Bank lalai dalam menjalankan fungsi kepatuhan maka Bank akan berhadapan langsung dengan risiko kepatuhan (*compliance risk*).

Pada praktiknya risiko kepatuhan melekat pada risiko Bank yang terkait pada peraturan perundang-undangan, ketentuan kehati-hatian dan ketentuan lain yang berlaku, seperti:

- Kepatuhan terhadap ketentuan dan/atau standar yang berlaku, seperti diantaranya pemenuhan ketentuan atas Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Penilaian Kualitas Aset Bank, Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), Giro Wajib Minimum, *Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio* (NSFR).

40. Risk Management (continued)

Reputation Risk (continued)

To ensure reputation risk control, the Bank has taken steps including:

- Establishing a clear process flow for resolving customer complaints;
- Implementation of Service Level Agreement in all business units to ensure that the service activities meets the maximum service time standards;
- Conduct training for employees to improve the quality of Bank's services for customers.

Compliance Risk

Compliance risk is the risk incurred due to the Bank has not complied and/or not implemented the applicable internal policies, laws, and regulations. In engaging in the banking industry services, the Bank is required to always comply with the banking regulations issued by the Goverment and Bank Indonesia. In addition, the Bank is also required to comply with several other rules, such as regulation on deposit guarantee program, limited liability company, taxation and capital market Financial Services Authority (OJK).

In the conduct of its business activities, the Bank at all times maintains compliance with Financial Services Authority (OJK) regulations and applicable laws and regulations to maintain the Bank's reputation, so as to align with the expectations of all stakeholders and also the banking industry in general.

The implementation of the Bank's Compliance Function also reflects the implementation of Good Corporate Governance. In the event the Bank is negligent in carrying out its compliance function, the Bank will directly encounter with compliance risk.

In practice, compliance risk is inherent to the Bank's activities that are related to regulations, prudential provisions, and other provisions, such as:

- Compliance with the prevailing regulations and/or standards, among others are Minimum Capital Adequacy Ratio (CAR), Assessment of Bank Asset Quality, Formation of Allowance for Impairment Losses, Calculation of Risk Weighted Assets (RWA) and Legal Lending Limit (LLL) regulations, Net Open Position (NOP), Minimum Statutory Reserves (GWM), Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR).

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Kepatuhan (lanjutan)

- Pemenuhan komitmen Rencana Bisnis Bank (RBB);
- Risiko operasional terkait pemenuhan ketentuan terkait prinsip-prinsip *Know Your Customer* (KYC) dan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT);
- Ketentuan terkait internal proses bisnis;
- Ketentuan pelaporan kepada regulator.

Kesalahan dalam melakukan interpretasi terhadap ketentuan perundang-undangan, juga berpotensi menimbulkan terjadinya risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan yang terjadi pada Bank dapat memengaruhi reputasi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bank, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja dan perkembangan usaha Bank.

Identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan secara berkala yang antara lain didasarkan pada pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko kepatuhan melalui perhitungan risiko berdasarkan *accounting loss* data dan pengukuran lain melalui parameter profil risiko kepatuhan.

Pelaksanaan fungsi kepatuhan merupakan tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Bank memiliki *Divisi Compliance and Quality Assurance* yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir penerapan tata kelola Perusahaan, terwujudnya budaya kepatuhan, tersedianya kebijakan internal yang sesuai dengan regulasi eksternal dan memantau pemenuhan komitmen Bank ke regulator, serta memastikan terselenggaranya penerapan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme Bank.

Risiko Stratejik

Risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis yang antara lain disebabkan kelemahan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi, sistem informasi yang kurang memadai, ketidaktepatan dalam implementasi strategi dan penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif.

Bank merumuskan dan menetapkan target dan strategi bisnis yang akan dicapai di dalam rencana bisnis (*business plan*) dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal sesuai dengan visi dan misi Bank.

40. Risk Management (continued)

Compliance Risk (continued)

- Fulfillment the commitments of Bank's Business Plan regulation;
- Operational risks due to The Know Your Customer Principles (KYCP) and Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism (APU-PPT);
- Regulation related to internal business process;
- Regulation related to regulatory report.

Misinterpretation in the statutory provisions also potentially create compliance risks. Compliance risk in the Bank can affect the reputation and public trust to the Bank, which in turn can affect the performance and business development of the Bank.

The identification and measurement of compliance risk is carried out on a regular basis which is based on, among other things, the experience of past losses caused by compliance risk through risk calculations based on accounting loss data and other measurements through compliance risk profile parameters.

The implementation of the compliance function is a preventive (ex-ante) action to ensure that the Bank's business activities are conducted in accordance with applicable laws.

The Bank has a Compliance and Quality Assurance Division which is responsible for coordinating the implementation of corporate governance, creating a culture of compliance, providing internal policies that are in accordance with external regulations and monitoring the fulfillment of the Bank's commitments to regulators, as well as ensuring the implementation of the Bank's anti-money laundering strategy and preventing the financing of terrorism.

Strategic Risk

Strategic risk is the risk due to inaccuracy in making and/or implementing a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment, among others derived from the weaknesses in the strategy formulation process, inaccuracies in the formulation of strategy, inadequate information system, inaccuracies in strategy implementation, and setting the strategic goals that are too aggressive.

Bank formulates and defines the business targets and strategies to be achieved in the business plan by considering internal and external factors in accordance with Bank's vision and mission.

40. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Stratejik (lanjutan)

Bank mengelola risiko stratejik melalui proses pertimbangan dan pengambilan keputusan setiap kebijakan strategis secara kolektif dan komprehensif oleh direksi dan komite-komite yang telah dibentuk.

Tujuan utama Bank dalam mengelola risiko stratejik adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Pengelolaan risiko stratejik dilaksanakan melalui monitoring, analisis dan evaluasi atas pencapaian target dan sasaran Bank secara detail dan rutin.

Bank secara rutin melakukan pengendalian risiko stratejik antara lain dengan memantau posisi Bank baik antar industri perbankan maupun antar *peer group*, pemantauan realisasi anggaran (rencana bisnis) dan pengukuran lainnya melalui parameter profil risiko stratejik dan dilanjutkan dengan mitigasi faktor penyebab kegagalan dan pelaksanaan pemantauan perkembangan kondisi makro ekonomi yang dapat berdampak pada bisnis Bank.

Bank telah memiliki Divisi Strategi Perusahaan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan dan pengembangan strategi perusahaan serta keuangan berkelanjutan dan *Environmental Social Governance*.

40. Risk Management (continued)

Strategic Risk (continued)

The Bank manages strategic risks through a consideration, and decision-making process regarding every strategic policy in a collective and comprehensive manner performed by the established Directors and Committees.

The main objective of the Bank in managing strategic risk is to ensure that the risk management process can minimize the possibility of negative impacts from inaccurate strategic decision making and failure to anticipate changes in the business environment. Strategic risk management is carried out through monitoring, analysis and evaluation of the achievement of the Bank's goals and targets in detail and routinely.

The Bank routinely carries out strategic risk control including by monitoring the Bank's position both among the banking industry and among peer groups, monitoring the realization of the realization of the budget (business plan) and other measurements through strategic risk profile parameters and continued by mitigating the factors causing failure and implementing monitoring on developments in macroeconomic conditions that may have an impact to the Bank's business.

The Bank has a Corporate Strategy Division which is responsible for planning, managing and developing corporate strategy as well as sustainable finance and Environmental Social Governance.

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Berdasarkan Periode yang Tersisa

41. Maturity Profile Based on Remaining Period To Maturity

	31 December/*December 31,* 2024							
	Total	**≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Months***	**> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months***	**> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year***	**> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years***	**> 5 Tahun/ *> 5 Years***	**Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity***	
Kas	369.083	369.083	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	2.672.478	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bruto	397.137	397.137	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks - gross
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	2.798.303	2.798.303	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks - gross
Surat-surat berharga - bruto	21.767.111	1.071.441	737.564	600.944	14.762.259	4.594.903	-	Marketable securities - gross
Tagihan derivatif	12.054	12.054	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	47.527.486	1.165.113	2.541.676	7.873.580	17.563.277	18.383.840	-	Loans and sharia financing/receivables - gross
Tagihan akseptasi - bruto	84.279	38.296	45.381	602	-	-	-	Acceptances receivable - - gross
Penyertaan saham bruto	15	-	-	-	-	-	15	Investment in shares - gross

41. Analisis Jatuh Tempo Aset dan Liabilitas Berdasarkan Periode Yang Tersisa (lanjutan)

41. Maturity Profile Based on Remaining Period To Maturity (continued)

31 December/*December 31*, 2024

	Total	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month*	> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months*	> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year*	> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years*	> 5 Tahun/ *> 5 Years*	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity*	
Aset tetap - bersih	3.320.304	-	-	-	-	-	3.320.304	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan neto	1.258.561	-	-	-	-	-	1.258.561	Deferred tax assets net
Aset tak berwujud – neto	270.807	-	-	-	-	-	270.807	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	5.591.657	1.483.988	-	-	-	-	4.107.669	Other assets - net
Total	86.069.275	10.007.893	3.324.621	8.475.126	32.325.536	22.978.743	8.957.356	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.993.977)							Allowance for impairment losses
	83.075.298							
Liabilitas								**Liabilities**
Liabilitas segera	401.263	401.263	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	46.593.158	26.472.029	14.917.724	4.610.489	592.916	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.881.186	2.870.086	8.100	3.000	-	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	3.739.878	3.739.878	-	-	-	-	-	Marketable securities sold with agreement to repurchases - net
Liabilitas derivatif	3.641	3.641	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	84.279	38.296	45.381	602	-	-	-	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	13.920.644	1.500.000	-	4.590.738	7.829.906	-	-	Borrowings
Hutang pajak	60.903	-	-	-	-	-	60.903	Taxes Payable
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	-	-	-	5.790.158	-	-	Marketable securities
Liabilitas lain-lain	1.638.402	276.120	-	190.519	-	103.677	1.068.086	Other liabilities
Total	75.113.512	35.301.313	14.971.205	9.395.348	14.212.980	103.677	1.128.989	Total
Perbedaan jatuh tempo	10.955.763	(25.293.420)	(11.646.584)	(920.222)	18.112.556	22.875.066	7.828.367	Maturity gap
Aset neto	**7.961.786**							**Net assets**

31 December/*December 31*, 2023

	Total	≤ 1 Bulan/ *≤ 1 Month*	> 1 - 3 Bulan/ *> 1 - 3 Months*	> 3 Bulan - 1 Tahun/ *> 3 Months - 1 Year*	> 1- 5 Tahun/ *> 1 - 5 Years*	> 5 Tahun/ *> 5 Years*	Tidak Memiliki Jatuh Tempo/ *without Maturity*	
Kas	289.184	289.184	-	-	-	-	-	Cash
Giro pada Bank Indonesia	3.205.619	3.205.619	-	-	-	-	-	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - bruto	342.881	342.881	-	-	-	-	-	Current accounts with other banks - gross
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - bruto	2.133.567	2.133.567	-	-	-	-	-	Placements with Bank Indonesia and other banks - gross
Surat-surat berharga - bruto	17.536.249	661.413	336.640	353.954	6.089.466	10.094.776	-	Marketable securities - gross
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - net	2.572.152	2.388.117	48.404	135.631	-	-	-	Marketable securities receivable purchased with agreement to resell - net
Tagihan derivative	3.040	3.040	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - bruto	49.418.616	1.455.712	2.346.527	9.755.809	15.165.632	20.694.936	-	Loans and sharia financing/receivables - gross
Tagihan akseptasi - bruto	132.577	29.648	71.000	31.929	-	-	-	Acceptances receivable - - gross
Penyertaan saham bruto	15	-	-	-	-	-	15	Investment in shares - gross
Aset tetap - bersih	3.233.675	-	-	-	-	-	3.233.675	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan neto	2.670.543	-	-	-	-	-	2.670.543	Deferred tax assets net
Aset tak berwujud - neto	285.585	-	-	-	-	-	285.585	intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	6.068.453	1.064.632	-	-	-	-	5.003.821	Other assets -net
Total	87.892.156	11.573.813	2.802.571	10.277.323	21.255.098	30.789.712	11.193.639	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(3.584.856)							Allowance for impairment losses
	84.307.300							
Liabilitas								**Liabilities**
Liabilitas segera	431.402	431.402	-	-	-	-	-	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	44.789.143	22.728.772	9.686.577	12.180.392	193.402	-	-	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	7.886.721	4.644.351	3.241.370	1.000	-	-	-	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	219.631	219.631	-	-	-	-	-	Marketable securities sold with agreement to repurchases - net
Liabilitas derivatif	808	808	-	-	-	-	-	Derivatives payable
Liabilitas akseptasi	132.577	29.648	71.000	31.929	-	-	-	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	11.704.492	1.231.760	-	2.297.327	8.175.405	-	-	Borrowings
Hutang pajak	64.635	-	-	-	-	-	64.635	Taxes Payable
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	-	-	3.397.588	-	-	Marketable securities
Liabilitas lain-lain	1.570.140	177.588	-	206.373	-	100.344	1.085.835	Other liabilities
Total	70.197.137	29.463.960	12.998.947	14.717.021	11.766.395	100.344	1.150.470	Total
Perbedaan jatuh tempo	17.695.019	(17.890.147)	(10.196.376)	(4.439.698)	9.488.703	30.689.368	10.043.169	Maturity gap
Aset neto	**14.110.163**							**Net assets**

42. Pengelolaan Permodalan

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Bank mengelola struktur modal dan melakukan penyesuaian atas struktur tersebut terhadap perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aktivitasnya. Untuk mempertahankan atau menyesuaikan struktur modal tersebut, Bank dapat menyesuaikan jumlah pembayaran dividen kepada pemegang saham, mengembalikan modal kepada pemegang saham atau mengeluarkan saham baru.

Rasio Permodalan diungkapkan pada Catatan 55l.

42. Capital Management

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Bank manages its capital structure and makes adjustments to that structure to changes in economic conditions and the risk characteristics of its activities. In order to maintain or adjust the capital structure, the Bank may adjust the amount of dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue capital securities.

Capital Ratio are disclosed in Note 55l.

43. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank diuangkapkan pada Catatan 55m

43. Net Open Position

The Net Open Position calculations for the Bank only are disclosed in Note 55m.

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan

Bank menandatangani beberapa perjanjian penting seperti yang tersebut di bawah ini:

a. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi pada tanggal 29 Juni 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp35.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

   Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

b. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) pada tanggal 7 Juni 2018 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp2.000.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

   Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT BTPN sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

44. Significant Agreements

The Bank entered into several significant agreements as follows:

a. Joint Agreement with PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dated June 29, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp35,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

   The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Pembangunan Daerah Jambi at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

b. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) dated June 7, 2018 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Transfer of Pension Loans Receivables. The maximum limit of financing is Rp2,000,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

   The portion of joint financing that has been agreed upon is PT BTPN at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

c. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk pada tanggal 21 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pengalihan Piutang dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan Bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

d. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi pada tanggal 26 September 2019 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi sebesar 95% dan Bank sebesar 5% dari total pembiayaan bersama.

e. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) pada tanggal 8 Juli 2020 mengenai Jual Beli Piutang dan Pembiayaan Bersama dengan jenis kredit pensiunan. Jumlah maksimal plafond pembiayaan adalah sebesar Rp500.000.000.000 (nilai penuh) dengan jangka waktu maksimal 15 tahun dan umur debitur maksimal 75 tahun pada saat perjanjian kredit berakhir.

Porsi pembiayaan bersama yang telah disepakati adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebesar 90% dan Bank sebesar 10% dari total pembiayaan bersama.

f. Perjanjian Kerja Sama dengan PT Bank KB Bukopin Syariah pada tanggal 29 Desember 2020 mengenai perjanjian tentang Investasi Mudharabah Subordinasi. PT Bank KB Bukopin Tbk memberikan investasi sebesar Rp275.000.000.000 (nilai penuh) kepada PT Bank KB Bukopin Syariah.

Kedua pihak sepakat dan mengikatkan diri atas penyediaan dana dengan Mudharabah (bagi hasil) dengan nisbah bagi hasil dengan porsi masing-masing pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk sebesar 70% dan PT Bank KB Bukopin Syariah sebesar 30%.

44. Significant Agreements (continued)

c. Joint Agreement with PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk dated July 21, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

d. Joint Agreement with PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi dated September 26, 2019 regarding the Sale and Purchase of Receivables and pension loans Joint Financing. The maximum limit of financing is Rp5,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Perkreditan Rakyat Dhaha Ekonomi at 95% and Bank at 5% of the total joint financing.

e. Joint Agreement with PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dated July 8, 2020 regarding the Sale and Purchase of Receivables and Joint Financing with pension loans. The maximum limit of financing is Rp500,000,000,000 (full amount) with a maximum term of 15 years and the maximum age of the debtor is 75 years at the end of the credit agreement.

The portion of joint financing that has been agreed upon is PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) at 90% and Bank at 10% of the total joint financing.

f. Joint Agreement with PT Bank KB Bukopin Syariah on December 29, 2020 regarding the agreement regarding Subordinated Mudharabah Investment. PT Bank KB Bukopin Tbk provides an investment of Rp275,000,000,000 (full amount) to PT Bank KB Bukopin Syariah.

Both parties agreed and committed themselves to providing funds with Mudharabah (profit sharing) with a profit sharing ratio with each party's portion, namely PT Bank KB Bukopin Tbk at 70% and PT Bank KB Bukopin Syariah at 30%.

44. Perjanjian-Perjanjian Signifikan (lanjutan)

g. Transaksi penjualan kredit portofolio LAR *(Loan at Risk)* ke SPC IDMB United Pte Ltd di Singapura. Kredit nominal Rp4.135.377.534.505 (nilai penuh) dan Bank ditunjuk sebagai *collecting agent* dengan imbalan mendapat *Collection Fee* sebesar 1% dari nominal penagihan dan *Management Fee* sebesar 0,25% dari *outstanding principal*.

h. Transaksi penjualan kredit portofolio LAR *(Loan at Risk)* ke SMMK Pte Ltd di Singapura. Kredit nominal Rp3.813.072.530.214 (nilai penuh) dan KB Bukopin ditunjuk sebagai collecting agent dengan imbalan mendapat *Collection Fee* sebesar 1% dari nominal penagihan dan *Management Fee* sebesar 0,25% dari *outstanding principal*.

i. Pada tanggal 28 September 2022 Bank membeli surat berharga syariah yaitu Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar yang diterbitkan oleh PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp2.432.000 dengan jangka waktu 15 tahun (28 September 2022 - 28 September 2037) dan imbal hasil senilai 0,75% per tahun.

j. Transaksi penjualan kredit portofolio LAR (*Loan at Risk*) ke TLDC Pte Ltd di Singapura. Kredit nominal Rp2.868.631.934.002 (nilai penuh) dan KB Bukopin ditunjuk sebagai *collecting agent* dengan imbalan mendapat *Collection Fee* sebesar 1% dari nominal penagihan dan *Management Fee* sebesar 0,25% dari *outstanding principal.*

45. Jaminan Pemerintah terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Pada tanggal 13 Oktober 2008, Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2008 tentang besaran nilai simpanan yang dijamin Lembaga Penjaminan Simpanan. Berdasarkan Peraturan tersebut, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu Bank yang semula berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 ditetapkan maksimum Rp100 diubah menjadi maksimum Rp2.000.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang tentang Lembaga Penjaminan Simpanan telah ditetapkan menjadi undang-undang sejak tanggal 13 Januari 2009.

44. Significant Agreements (continued)

g. LAR (Loan at Risk) portofolio credit sales transaction to SPC IDMB United Pte Ltd in Singapore. Credit nominal Rp4,135,377,534,505 (full amount) and Bank appointed as collecting agent in exchange for a Collection Fee of 1% of nominal collection and Management Fee of 0.25% of outstanding principal.

h. LAR (Loan at Risk) portofolio credit sales transaction to SMMK Pte Ltd in Singapore. Credit nominal Rp3,813,072,530,214 (full amount) and KB Bukopin appointed as collecting agent in exchange for a Collection Fee of 1% of nominal collection and Management Fee of 0.25% of outstanding principal.

i. On September 28, 2022 Bank acquired sharia marketable securities Sukuk Wakalah BI Al-Istitsmar issued by PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) amounting to Rp2,432,000 with maturity date to 15 years (September 28, 2022 - September 28, 2037) and yield of 0.75% per annum.

j. LAR (Loan at Risk) portofolio credit sales transaction to TLDC Pte Ltd in Singapore. Credit nominal Rp2,868,631,934,002 (full amount) and KB Bukopin appointed as collecting agent in exchange for a Collection Fee of 1% of nominal collection and Management Fee of 0.25% of outstanding principal.

45. Government Guarantee for The Payment of Obligations of Commercial Banks

On October 13, 2008, the President of the Republic of Indonesia approved Government Regulation No. 66 Year 2008 regarding the amount of deposits guaranteed by Lembaga Penjaminan Simpanan. Based on such Regulation, the guaranteed deposit amount in a Bank which previously according to Law No. 24 Year 2004 amounted to a maximum of Rp100 was amended to a maximum amount of Rp2,000.

Based on the Law of the Republic of Indonesia No. 7 Year 2009, Government Regulation in lieu of law on Lembaga Penjaminan Simpanan has been set into law since January 13, 2009.

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian:

46. Fair Value of Financial Instruments

The table presents the comparison, of the carrying amounts and fair value of the Group financial instruments that are recognized in the consolidated financial statements:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	**Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income***	**Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost***	**Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset						**Assets**
Kas	-	-	369.083	369.083	369.083	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	2.672.478	2.672.478	2.672.478	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	-	-	396.837	396.837	396.837	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	2.798.303	2.798.303	2.798.303	Placement with Bank Indonesia and other banks - net
Surat-surat berharga - neto	7.467.153	4.345.452	9.954.226	21.766.831	21.766.831	Marketable securities - net
Tagihan derivatif	-	-	12.054	12.054	12.054	Derivative receivable
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	44.535.289	44.535.289	44.535.289	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	83.079	83.079	83.079	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham - neto	-	-	15	15	15	Investments in shares - net
Aset lain-lain	-	-	1.659.860	1.659.860	1.659.860	Other asset
Total	**7.467.153**	**4.345.452**	**62.481.224**	**74.293.829**	**74.293.829**	**Total**
Liabilitas						**Liabilities**
Liabilitas segera	-	-	401.263	401.263	401.263	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	-	-	46.593.158	46.593.158	46.593.158	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	2.881.186	2.881.186	2.881.186	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	-	-	3.641	3.641	3.641	Derivatives payable
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	3.739.878	3.739.878	3.739.878	Marketable securities sold with agreement to ressel receivable - net
Liabilitas akseptasi	-	-	84.279	84.279	84.279	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	-	-	13.920.644	13.920.644	13.920.644	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	5.790.158	5.790.158	5.790.158	Marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	-	-	1.638.402	1.638.402	1.638.402	Other Liabilities
Total	-	**-**	**75.052.609**	**75.052.609**	**75.052.609**	**Total**

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi/ *Fair Value through Profit or Loss*	**Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ *Fair Value through Other Comprehensive Income***	**Biaya Perolehan Diamortisasi/ *Amortized Cost***	**Total Nilai Tercatat/ *Total Carrying Amount***	**Nilai Wajar/ *Fair Value***	
Aset						**Assets**
Kas	-	-	289.184	289.184	289.184	Cash
Giro pada Bank Indonesia	-	-	3.205.619	3.205.619	3.205.619	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain - neto	-	-	342.581	342.581	342.581	Current accounts with other banks - net
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	-	-	2.133.567	2.133.567	2.133.567	Placements with Bank Indonesia and other banks - net
Surat-surat berharga - neto	5.322.930	3.067.387	9.145.823	17.536.140	17.536.140	Marketable securities - net
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	-	2.572.152	2.572.152	2.572.152	Marketable securities sold with agreement to ressel receivable - net
Tagihan derivatif	-	-	3.040	3.040	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah - neto	-	-	45.835.782	45.835.782	45.835.782	Loans and sharia financing/receivables - net
Tagihan akseptasi - neto	-	-	130.964	130.964	130.964	Acceptances receivable - net
Penyertaan saham - neto	-	-	15	15	15	Investments in shares - net
Aset lain-lain	-	-	1.272.119	1.272.119	1.272.119	Other asset
Total	**5.322.930**	**3.067.387**	**64.930.846**	**73.321.163**	**73.321.163**	**Total**
					Liabilitas	**Liabilities**
Liabilitas segera	-	-	431.402	431.402	431.402	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	-	-	44.789.143	44.789.143	44.789.143	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	-	-	7.886.721	7.886.721	7.886.721	Deposits from other banks
Liabilitas derivatif	808	-	-	808	808	Derivatives payable
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	-	-	219.631	219.631	219.631	Marketable securities sold with agreement to ressel receivable - net
Liabilitas akseptasi	-	-	132.577	132.577	132.577	Acceptances payable
Pinjaman yang diterima	-	-	11.704.492	11.704.492	11.704.492	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	3.397.588	3.397.588	3.397.588	Marketable securities issued
Liabilitas lain-lain	-	-	1.570.140	1.570.140	1.570.140	Other Liabilities
Total	808	**-**	**70.131.694**	**70.132.502**	**70.132.502**	**Total**

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk perkiraan nilai wajar:

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan tertentu selain surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan, pinjaman yang diterima, dan surat berharga yang diterbitkan mendekati nilai tercatat, karena instrumen keuangan tersebut memiliki jangka waktu jatuh tempo yang singkat dan memiliki tingkat bunga sesuai pasar.

Nilai wajar dari surat berharga yang diukur melalui harga perolehan yang diamortisasi dan biaya perolehan ditentukan berdasarkan harga kuotasi pasar yang berlaku pada 31 Desember 2024 dan 2023.

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value:

Fair values of certain financial assets and liabilities other than securities measured at amortized cost and acquisition cost marketable securities, borrowings, and securities issued approximate their carrying amounts due to short-term maturities of these financial instruments, due to the interest rate is at market rate and carried at fair value.

The fair value of marketable securities amortized cost and acquisition cost marketable securities is determined on the basis of quoted market price as at December 31, 2024 and 2023.

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Nilai wajar dari pinjaman yang diterima dan surat berharga yang diterbitkan dihitung menggunakan arus kas yang didiskonto berdasarkan suku bunga pasar.

Tabel di bawah ini menyajikan nilai wajar instrumen keuangan berdasarkan hierarki yang digunakan Bank untuk menentukan dan mengungkapkan nilai wajar dari instrumen keuangan:

a. Tingkat 1: Dikutip dari harga di pasar aktif untuk aset atau liabilitas keuangan yang identik;
b. Tingkat 2: Yang melibatkan input selain dari harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung (seperti harga) atau tidak langsung (berasal dari harga);
c. Tingkat 3: Input untuk aset dan liabilitas yang tidak berdasarkan pada data yang dapat di observasi di pasar (input yang tidak dapat diobservasi).

46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

The fair value of borrowings and securities issued is calculated using discounted cash flows using market rate.

The table below shows the fair value of financial instruments based on the hierarchy used by the Bank in determining and disclosing the fair value of financial instruments:

a. Level 1: Quoted prices in active markets for identical financial assets or liabilities;
b. Level 2: Those involving inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (as prices) or indirectly (derived from prices);
c. Level 3: Those with inputs for the asset or liability that are not based on observable market data (unobservable inputs).

	31 Desember/*December 31*, 2024				
	Pengukuran Nilai Wajar pada Tanggal Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement as at Reporting Date Using:*				
	Nilai Tercatat/ ***Carrying Amount***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset measured at fair value**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					Fair value through profit or loss:
Tagihan derivatif	12.054	12.054	-	-	Derivative receivables
Surat-surat berharga	7.467.153	274.656	7.192.497	-	Marketable securities
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Fair value through other comprehensive income:
Surat-surat berharga	4.345.452	4.345.452	-	-	Marketable securities
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial asset of which the fair value is disclosed**
Dimiliki hingga jatuh tempo:					Owned until maturity:
Surat-surat berharga	9.954.226	8.540.315	-	1.413.911	Marketable securities
Kredit yang diberikan dan piutang:					**Loans and receivables:**
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	44.535.289	-	44.535.289	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial liabilities which the fair value is disclosed**
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	-	5.790.158	-	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	13.920.644	-	13.920.644	-	Borrowings

	31 Desember/*December 31*, 2023				
	Pengukuran Nilai Wajar pada Tanggal Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement as at Reporting Date Using:*				
	Nilai Tercatat/ ***Carrying Amount***	**Tingkat/** ***Level 1***	**Tingkat/** ***Level 2***	**Tingkat/** ***Level 3***	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar					**Financial asset measured at fair value**
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi:					Fair value through profit or loss:
Tagihan derivatif	3.040	3.040	-	-	Derivative receivables
Surat-surat berharga	5.322.930	13	5.322.917	-	Marketable securities
Nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:					Fair value through other comprehensive income:
Surat-surat berharga	3.067.387	3.067.387	-	-	Marketable securities
Aset keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial asset of which the Fair value is disclosed**
Biaya perolehan di amortisasi:					Amortized cost:
Surat-surat berharga	9.145.823	7.811.762	-	1.334.061	Marketable securities

46. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

46. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023				
	Pengukuran Nilai Wajar pada Tanggal Pelaporan Menggunakan/ *Fair Value Measurement as at Reporting Date Using:*				
	Nilai Tercatat/ *Carrying Amount*	Tingkat/ *Level 1*	Tingkat/ *Level 2*	Tingkat/ *Level 3*	
Kredit yang diberikan dan piutang:					**Loans and receivables:**
Pinjaman yang diberikan dan pembiayaan/piutang Syariah	45.835.782	-	45.835.782	-	Loans and sharia financing/receivables
Liabilitas keuangan yang nilai wajarnya diungkapkan					**Financial liabilities of which the fair value is disclosed**
Biaya perolehan diamortisasi:					Amortized cost:
Surat berharga yang diterbitkan	3.397.588	-	3.397.588	-	Marketable securities issued
Pinjaman yang diterima	11.704.492	-	11.704.492	-	Borrowings

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 tidak terdapat aset keuangan atau liabilitas keuangan yang ditransfer dari/ke tingkat 2 dan/atau tingkat 3.

As at December 31, 2024 and 2023, there is no financial assets and financial liabilities transfer out of or into level 2 and/or level 3.

47. Analisa Kualitas Kredit

Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Ketika menentukan apakah risiko gagal bayar pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan terdukung, serta relevan yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Hal tersebut mencakup informasi dan analisa kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pada pengalaman historis dan penilaian pakar kredit dan termasuk perkiraan masa depan *(forward-looking)*.

Tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi dengan membandingkan:

- *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa pada tanggal pelaporan; dengan
- *Probability of Default* (PD) atas umur tersisa yang di estimasi pada saat pengakuan awal eksposur (jika relevan, disesuaikan dengan perubahan ekspektasi pembayaran dimuka).

Grup menggunakan kriteria berikut dalam menentukan apakah peningkatan risiko kredit secara signifikan atas eksposur telah terjadi:

- pengujian kuantitatif berdasarkan perubahan *Probability of Default* (PD);
- indikator kualitatif.

47. Credit Quality Analysis

Significant Increase in Credit Risk

When determining whether the risk of default on financial instruments has increased significantly since initial recognition, the Group considers reasonable and supported relevant information that is available without excessive costs or efforts. This includes quantitative and qualitative information and analysis, based on historical experience and credit expert assessments and including forward-looking estimates.

The purpose of this assessment is to identify whether a significant increase in credit risk of exposure has occurred by comparing:

- Probability of Default (PD) for the remaining age at the reporting date; with
- Probability of Default (PD) for the estimated remaining age at initial recognition of the exposure (if relevant, adjusted for change in expectations of prepayment).

The Group use these criteria for determining whether there has been a significant increase in credit:

- quantitative test based on movement in Probability of Default (PD);
- qualitative indicators.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Credit Risk Grades

Grup mengalokasikan setiap eksposur ke *credit risk grades* berdasarkan variasi data yang ditentukan dapat memprediksi risiko gagal bayar dan menerapkan pengalaman atas kredit. *Credit risk grades* ditetapkan menggunakan faktor kualitatif dan kuantitatif yang dapat mengindikasikan risiko gagal bayar. Faktor-faktor ini bervariasi tergantung pada sifat eksposur dan jenis peminjam.

Credit risk grades ditetapkan dan dikalibrasi sedemikian rupa sehingga risiko terjadinya gagal bayar meningkat secara eksponensial seiring dengan penurunan *rating* risiko kredit, sebagai contoh, selisih antara *credit risk rating grades* 1 dan 2 lebih kecil dari pada selisih antara *credit risk rating grades* 2 dan 3.

Setiap eksposur dialokasikan ke *credit risk grades* pada pengakuan awal berdasarkan informasi yang tersedia tentang peminjam. Eksposur ini dipantau secara berkelanjutan, dan dapat mengakibatkan eksposur dipindahkan ke *credit risk grades* yang berbeda. Pemantauan biasanya menggunakan data berikut: laporan keuangan, penggunaan fasilitas kredit, estimasi kondisi ekonomi.

Penentuan Struktur *Probability of Default*

Credit risk grades adalah input utama dalam penentuan struktur PD *term structure* atas eksposur. Bank mengumpulkan informasi kinerja dan gagal bayar tentang eksposur risiko kredit yang dianalisa berdasarkan yurisdiksi atau wilayah dan menurut jenis produk dan peminjam serta penilaian risiko kredit. Untuk beberapa portofolio, informasi yang dibeli dari penilai kredit eksternal juga digunakan.

Bank menggunakan model statistik untuk menganalisa data yang dikumpulkan dan menghasilkan perkiraan *probability of default* (PD) atas umur tersisa dan bagaimana hal ini diperkirakan akan berubah sebagai akibat dari berlalunya waktu.

Analisa ini mencakup identifikasi dan kalibrasi hubungan antara perubahan tingkat gagal bayar dan perubahan dalam faktor-faktor makro ekonomi utama serta analisa mendalam tentang dampak faktor-faktor lain tertentu (misalkan restrukturisasi) pada risiko gagal bayar. Untuk sebagian besar eksposur, indikator makro ekonomi utama meliputi: pertumbuhan PDB, suku bunga acuan, dan tingkat pengangguran. Untuk eksposur pada industri dan/atau wilayah tertentu, analisa dapat mencakup harga komoditas dan/atau harga properti yang relevan.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Credit Risk Grades

The Group allocated each exposure to credit risk grades based on a variety of data that is determined to predict the risk of default and apply credit experience judgement. Credit risk grades are determined using qualitative and quantitative factors that can indicate the risk of default. These factors vary depending on the nature of the exposure and the type of borrower.

Credit risk grades are determined and calibrated in such a way that the risk of default is increasing exponentially as credit risk rating decreases, for example, the difference between credit risk rating grades 1 and 2 is smaller than the difference between credit risk rating grades 2 and 3.

Each exposure is allocated to credit risk grades at initial recognition based on available information about the borrower. This exposure is monitored on an ongoing basis, and can result in the exposure being transferred to different credit risk grades. Monitoring usually uses the following data: financial statements, use of credit facilities, estimates of economic conditions.

Determination of the Probability of Default Structure

Credit risk grades are the main input in determining the PD term structure of the exposure. The Bank collects performance and default information about credit risk exposures, which are analyzed by jurisdiction or region and by product and borrower type as well as credit risk assessment. For some portfolios, information purchased from external credit assessors is also used.

The Bank uses a statistical model to analyze the collected data and produce an estimate of the probability of default (PD) for the remaining life and how this is expected to change as a result of the passage of time.

This analysis includes the identification and calibration of the relationship between changes in default rates and changes in key macroeconomic factors as well as an in-depth analysis of the impact of other certain factors (e.g. restructuring) on the risk of default. For most exposures, the main macroeconomic indicators include: GDP growth, benchmark interest rates, and the unemployment rate. For exposures in certain industries and/or regions, the analysis can include commodity prices and/or, relevant property prices.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

***Credit Risk Grades* (lanjutan)**

Penentuan Terjadinya Peningkatan Risiko Kredit Secara Signifikan

Grup mempergunakan sejumlah kriteria untuk menentukan telah terjadi peningkatan risiko kredit secara signifikan.

Kriteria tersebut ditetapkan menggunakan faktor kuantitatif dan kualitatif termasuk penentuan berdasarkan status hari tunggakan yang dapat mengindikasikan telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan terhadap saat awal diberikan.

Grup dimungkinkan menggunakan penilaian dari analis kredit dan pengalaman historis yang relevan, dalam menentukan bahwa eksposur mungkin saja telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan berdasarkan indikator kualitatif tertentu yang dianggap dapat mengindikasikan hal tersebut dimana pengaruhnya mungkin belum sepenuhnya tercermin pada saat dilakukan analisis kuantitatif.

Grup menentukan bahwa peningkatan risiko kredit secara signifikan belum terjadi apabila masih kurang dari 30 hari tunggakan. Hari tunggakan ditentukan dengan menghitung jumlah hari sejak tanggal jatuh tempo awal dimana pembayaran penuh belum diterima. Tanggal jatuh tempo ditentukan tanpa mempertimbangkan masa tenggang yang mungkin tersedia bagi peminjam.

Grup memantau efektivitas kriteria yang digunakan dalam mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan dengan cara reviu berkala.

Modifikasi Aset Keuangan

Ketentuan kontraktual pinjaman dapat dimodifikasi untuk beberapa alasan, termasuk perubahan kondisi pasar, retensi pelanggan dan faktor-faktor lain yang tidak terkait dengan penurunan kredit saat ini. Pinjaman yang ketentuan kontraktualnya dimodifikasi dapat menyebabkan pinjaman awal dihentikan pengakuannya dan pinjaman hasil modifikasi diakui sebagai pinjaman baru pada nilai wajar.

Ketika ketentuan kontraktual pinjaman dimodifikasi dan tidak mengakibatkan penghentian pengakuan, penentuan terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dilakukan dengan cara membandingkan:

- sisa PD sepanjang umur pada tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan yang dimodifikasi; dengan
- sisa PD sepanjang umur yang diestimasi berdasarkan data pada saat pengakuan awal dan ketentuan kontraktual awal.

47. Credit Quality Analysis (continued)

Credit Risk Grades (continued)

Determination of Significant Increase in Credit Risk

The Group uses several criteria for determining that credit risk has increased significantly.

The criteria are determined using quantitative and qualitative factors including determination based on arrear day status that can indicate significant increase in credit risk since initial recognition.

The Group can also use the judgement of credit analysts and, if possible, relevant historical experience, in determining that the exposure may have experienced a significant increase in credit risk based on certain qualitative indicators that are considered to indicate this and their effects may not be fully reflected in quantitative analysis in comprehensive manner on a timely manner.

The Group determines that a significant increase in credit risk has not occurred if it is still less than 30 days in arrears. Arrear days are determined by counting the number of days from the initial due date where full payment has not been received. The due date is determined without considering the grace period that might be available to the borrower.

The Group monitors the effectiveness of the criteria used in identifying significant increases in credit risk by periodic review.

Modification of Financial Assets

Loan contractual terms can be modified for a number of reasons, including changes in market conditions, customer retention and other factors not related to the current credit decline. Loans with modified contractual terms can cause the initial loan to be derecognized and recognized the modified loan as a new loan at fair value.

When the contractual terms of the loan are modified and do not result in termination of recognition, determining the occurrence of a significant increase in credit risk is done by comparing:

- PD remainder life at reporting date based on modified provision; with
- residual PD throughout the estimated age based on data at initial recognition and initial contractual provisions.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Bank menganggap aset keuangan dalam keadaan *default*/gagal bayar ketika:
- Debitur tidak mungkin membayar kewajiban kreditnya secara penuh, tanpa bantuan (*recourse*) dari Bank; atau
- Debitur telah melewati jatuh tempo lebih dari 90 hari atas kewajiban kredit material apa pun kepada Bank.

Dalam menilai apakah debitur dalam keadaan *default*/gagal bayar, Bank mempertimbangkan indikator berikut:
- Kualitatif seperti pelanggaran persyaratan penjanjian (*covenants*);
- Kuantitatif seperti status tunggakan; dan
- Berdasarkan data yang dikembangkan secara internal dan diperoleh dari sumber eksternal.

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)*

Bank menggunakan informasi *forward-looking* dalam menilai apakah telah terjadinya peningkatan risiko kredit secara signifikan dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian. Berdasarkan saran dari Komite Manajemen Risiko, pakar ekonomi dan pertimbangan berbagai informasi aktual dan perkiraan eksternal, Bank merumuskan pandangan dasar *(base case)* tentang pergerakan variabel ekonomi yang relevan dimasa depan serta perkiraan skenario lain yang mungkin terjadi. Proses ini meliputi pengembangan dua atau lebih skenario.

Ekonomi tambahan dan mempertimbangkan probabilitas relatif dari keluaran *(output)* yang mungkin. Informasi eksternal mencakup data ekonomi dan perkiraan yang diterbitkan oleh, seperti badan pemerintah dan analis sektor swasta dan akademisi terpilih.

Pandangan dasar *(base case)* mencerminkan keluaran dengan probabilitas yang paling tinggi dan digunakan dalam perencanaan strategis dan anggaran. Skenario yang lain, mencerminkan keluaran yang lebih optimis dan keluaran yang lebih pesimis.

Skenario ekonomi yang dirumuskan menggunakan kisaran indikator utama pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

47. Credit Quality Analysis (continued)

Modification of Financial Assets (continued)

The Bank considers financial assets as default when:
- The debtor is unlikely to pay its credit obligation in full, without assistance (recourse) from the Bank; or
- The debtors have past due more than 90 days for any material credit obligations to the Bank.

In assessing whether a debtor is in default, the Bank considers the following indicators:

- Qualitative such as violations of the terms of the agreement (covenants);
- Quantitative such as arrears status; and
- Based on data developed internally and obtained from external sources.

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment

Use of forward-looking information

The Bank uses forward-looking information in assessing whether there has been a significant increase in credit risk and measurement of expected credit losses. Based on advice from the Risk Management Committee, economists and consideration of various actual information and external forecast, the Bank formulated a base case for the movement of relevant economic variables in future as well as forecasts of other possible scenarios. This process involves developing two or more additional economic scenarios and considerations

The relative probabilities of the possible outputs. External information includes economic data and estimates published by, such as government agencies and selected private sector analysts and academics.

The base case reflects the output with the highest probability and is used in strategic planning and budgeting. Another scenario, reflects more optimistic outputs and more pessimistic outputs.

The economic scenarios formulated using the range of key indicators as at December 31, 2024 and 2023, are as follows:

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

Penggunaan informasi perkiraan masa depan *(forward-looking)* (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Modification of Financial Assets (continued)

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment (continued)

Use of forward-looking information (continued)

	Indikator utama/ *Key indicators*	
Tingkat pengangguran	dasar 8%/*base 8%* Kisaran antara 7 hingga 10%/ *Range between 7 and 10%*	Unemployment rate
Suku bunga	dasar 1%/*base 1%* Kisaran antara 0,5 hingga 2%/ *Range between 0.5 and 2%*	Interest rates
Pertumbuhan PDB	dasar 1,5%/*base 1.5%* Kisaran antara 0 hingga 2,5%/ *Range between 0 and 2.5%*	GDP growth

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian

Input utama dalam pengukuran kerugian kredit ekspektasian adalah variabel berikut :
- *Probability of Default (PD)*
- *Loss of Given Default (LGD)*
- *Exposure at Default (EAD)*

Parameter ini umumnya berasal dari model statistik yang dikembangkan secara internal dan data historis lainnya. Parameter ini disesuaikan untuk mencerminkan informasi *forward-looking*.

Estimasi PD adalah estimasi pada tanggal tertentu, yang dihitung berdasarkan model peringkat statistik, dan dinilai menggunakan rating yang disesuaikan dengan berbagai kategori dari debitur dan eksposur. Model statistik ini didasarkan pada data yang disusun secara internal yang terdiri dari faktor kuantitatif dan kualitatif.

LGD adalah besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar. Parameter LGD diestimasi secara historis berdasarkan tingkat pemulihan atas klaim terhadap debitur yang gagal bayar. Model LGD mempertimbangkan struktur, jaminan, senioritas klaim, industri debitur, dan biaya pemulihan setiap jaminan yang merupakan bagian integral dari aset keuangan.

EAD merepresentasikan estimasi eksposur jika terjadi gagal bayar. EAD suatu aset keuangan adalah jumlah tercatat bruto. Untuk komitmen pinjaman dan jaminan keuangan, EAD mencakup jumlah yang telah ditarik, serta jumlah potensial di masa depan yang akan ditarik, yang diestimasi berdasarkan pengamatan historis dan perkiraan berwawasan ke depan (*forward-looking*).

Measurement of Expected Credit Loss

The main inputs in measuring expected credit loss are the following variables:
- Probability of Default (PD)
- Loss of Given Default (LGD)
- Exposure at Default (EAD)

These parameters generally come from statistical models that are developed internally and other historical data. This parameter is adjusted to reflect forward-looking information.

PD estimation is an estimate on a certain date, which is calculated based on a statistical ranking model, and is assessed using a rating that is adjusted to various categories of debtors and exposures. This statistical model is based on data compiled internally consisting of quantitative and qualitative factors.

LGD is the amount of loss if there is a default. LGD parameters are historically estimated based on the level of recovery of claims against debtors who default. The LGD model considers the structure, collateral, claim seniority, the debtor industry, and the cost of recovering any collateral that is an integral part of a financial asset.

EAD represents the estimated exposure in case of default. EAD of a financial asset is the gross carrying amount. For loan commitments and financial guarantees, EAD includes the amount that has been withdrawn, as well as potential future amounts to be withdrawn, which are estimated based on historical observations and forward-looking estimates.

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

Ketika pemodelan parameter dilakukan secara kolektif, instrumen keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko yang meliputi:

- jenis instrumen;
- peringkat risiko kredit;
- jenis agunan;
- tanggal pengakuan awal;
- sisa waktu jatuh tempo;
- industri; dan
- lokasi geografis debitur.

a. Analisis risiko kredit berdasarkan internal *rating grades*:

47. Credit Quality Analysis (continued)

Modification of Financial Assets (continued)

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment (continued)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

When parameter modeling is done collectively, financial instruments are grouped according to the similarity of risk characteristics which include:

- type of instrument;
- credit risk rating;
- type of collateral;
- date of initial recognition;
- remaining due date;
- industry; and
- debtor's geographical location.

a. Credit risk analysis based on internal rating grades:

	31 Desember/*December 31,* 2024					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets***	**Total**	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
Grade 1	37.083.192	3.821.847	5.191	-	40.910.230	Grade 1
Grade 2	161.018	2.320.709	26	-	2.481.753	Grade 2
Grade 3	-	86.535	96.444	-	182.979	Grade 3
Grade 4	-	-	306.321	-	306.321	Grade 4
Grade 5	-	47.569	3.598.634	-	3.646.203	Grade 5
Total	37.244.210	6.276.660	4.006.616	-	47.527.486	Total
Cadangan kerugian kredit	(497.013)	(509.077)	(1.986.107)	-	(2.992.197)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**36.747.197**	**5.767.583**	**2.020.509**	**-**	**44.535.289**	**Carrying Amount**

	31 Desember/*December 31,* 2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets***	**Total**	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
Grade 1	39.904.538	614.341	160.916	-	40.679.795	Grade 1
Grade 2	1.056.648	3.326.041	2.009	-	4.384.698	Grade 2
Grade 3	-	-	410.030	-	410.030	Grade 3
Grade 4	-	-	348.669	-	348.669	Grade 4
Grade 5	-	-	3.595.424	-	3.595.424	Grade 5
Total	40.961.186	3.940.382	4.517.048	-	49.418.616	Total
Cadangan kerugian kredit	(908.096)	(498.218)	(2.176.520)	-	(3.582.834)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**40.053.090**	**3.442.164**	**2.340.528**	**-**	**45.835.782**	**Carrying Amount**

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Modifikasi Aset Keuangan (lanjutan)

Input, Asumsi, dan Teknik yang digunakan dalam mengestimasi penurunan nilai (lanjutan)

Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian (lanjutan)

a. Analisis risiko kredit berdasarkan internal *rating grades*: (lanjutan)

Cadangan kerugian kredit untuk aset keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tidak diakui pada laporan posisi keuangan karena nilai tercatat aset keuangan tersebut adalah nilai wajar.

b. Analisis risiko kredit berdasarkan *probability of default:*

47. Credit Quality Analysis (continued)

Modification of Financial Assets (continued)

Inputs, Assumptions, and Techniques used in estimating impairment (continued)

Measurement of Expected Credit Loss (continued)

a. Credit risk analysis based on internal rating grades: (continued)

Allowance for credit losses for financial assets classified as fair value through other comprehensive income is not recognized in the statement of financial position because the carrying value of the financial assets is the fair value.

b. Credit risk analysis based on probability of default:

	31 Desember/ *December 31*, 2024					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets***	**Total**	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
0,00-0,10	37.132.865	4.592.465	-	-	41.725.330	0.00-0.10
0,11-0,40	111.058	1.597.367	1.375.913	-	3.084.338	0.11-0.40
0,41-1,00	287	86.828	2.630.703	-	2.717.818	0.41-1.00
Total	37.244.210	6.276.660	4.006.616	-	47.527.486	Total
Cadangan kerugian kredit	(497.013)	(509.077)	(1.986.107)	-	(2.992.197)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**36.747.197**	**5.767.583**	**2.020.509**	**-**	**44.535.289**	**Carrying Amount**

	31 Desember/ *December 31*, 2023					
	Kerugian Kredit Ekspektasian 12 Bulan/ *12 Months ECL*	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Tidak Memburuk/ *Lifetime ECL - No Credit Impaired***	**Kerugian Kredit Sepanjang Umurnya - Kredit Memburuk/ *Lifetime ECL - Credit Impaired***	**Kerugian Kredit atas Aset Keuangan yang Dibeli atau Berasal dari Aset Keuangan yang Memburuk/ *Purchased or Credit Impaired Financial Assets***	**Total**	
Kredit yang diberikan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi						Loans at amortized cost
0,00-0,10	40.961.186	-	72.497	-	41.033.683	0.00-0.10
0,11-0,40	-	3.940.382	11.447	-	3.951.829	0.11-0.40
0,41-1,00	-	-	4.433.104	-	4.433.104	0.41-1.00
Total	40.961.186	3.940.382	4.517.048	-	49.418.616	Total
Cadangan kerugian kredit	(908.096)	(498.218)	(2.176.520)	-	(3.582.834)	Loss allowance
Nilai Tercatat	**40.053.090**	**3.442.164**	**2.340.528**	**-**	**45.835.782**	**Carrying Amount**

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan

47. Credit Quality Analysis (continued)

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions

Rasio Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Aset Keuangan Pada 31 Desember 2024/ ***ECL Ratio to Financial Assets at December 31, 2024***	**Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/** ***Financial asset Measured at Amortized Cost***	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/** ***Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income***	**Total**	
Kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan	2.992.197	-	2.992.197	Reported ECL
Nilai tercatat bruto	47.527.486	-	47.527.486	Gross carrying amount
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto	6,30%	-	6,30%	ECL ratio to gross carrying amount

Rasio Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Aset Keuangan Pada 31 Desember 2023/ ***ECL Ratio to Financial Assets at December 31, 2023***	**Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi/** ***Financial asset Measured at Amortized Cost***	**Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/** ***Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income***	**Total**	
Kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan	3.582.834	-	3.582.834	Reported ECL
Nilai tercatat bruto	49.418.616	-	49.418.616	Gross carrying amount
Rasio kerugian kredit ekspektasian yang dilaporkan terhadap nilai tercatat bruto	7,25%	-	7,25%	ECL ratio to gross carrying amount

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	
Skenario Moderat						Moderate Scenario
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	6,72%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	4,08%	4,75%	5,32%	5,80%	6,22%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	9,61%	8,22%	7,08%	6,13%	5,35%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	2,88%	2,17%	1,66%	1,29%	1,02%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	1,71%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,19%	31,23%	31,24%	31,24%	31,24%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	5,67%	4,83%	4,12%	3,52%	3,02%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	138,85	138,85	138,85	138,85	138,85	Consumer Price Index
Produksi Industri	3,25%	3,03%	2,83%	2,65%	2,47%	Industrial Production
Harga Minyak	56,67	55,38	54,12	52,89	51,69	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	17,06%	17,06%	17,06%	17,06%	17,06%	Household Debt
Skenario Optimis						Upside Scenario
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	175,21%	195,09%	213,07%	6,72%	6,72%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	-8,59%	-9,49%	-10,31%	-9,12%	-9,12%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	64,31%	65,27%	65,68%	6,13%	5,35%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	40,25%	40,22%	40,05%	-1,29%	-1,02%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	14,40%	14,40%	14,40%	1,71%	1,71%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	118,48%	118,52%	118,53%	31,24%	31,24%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	17,41%	17,13%	16,80%	3,52%	3,02%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	-7,39	-24,66	-40,26	138,85	138,85	Consumer Price Index
Produksi Industri	10,35%	10,73%	11,01%	2,65%	2,47%	Industrial Production
Harga Minyak	150,17	158,76	166,13	52,89	51,69	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	16,09%	15,98%	15,87%	17,06%	17,06%	Household Debt
Skenario Pesimis						Downside Scenario

47. Analisa Kualitas Kredit (lanjutan)

Analisa Sensitivitas Kerugian Kredit Ekspektasian Terhadap Kondisi Ekonomi Masa Depan (lanjutan)

47. Credit Quality Analysis (continued)

Sensitivity Analysis of Expected Credit Loss for Future Economic Conditions (continued)

	2024	2025	2026	2027	2028	
Neraca Transaksi Berjalan (% PDB Tahunan)	-161,77%	-181,65%	-199,63%	6,72%	6,72%	Current Account (% GDP Yearly)
Tingkat Inflasi	6,76%	7,67%	8,49%	-9,12%	-9,12%	Inflation Rate
Anggaran Pemerintah (% PDB)	-45,10%	-48,83%	-51,53%	6,13%	5,35%	Fiscal Balance (% GDP)
BI Rate	-34,49%	-35,88%	-36,74%	-1,29%	-1,02%	BI Rate
Index Keyakinan Konsumer	-10,97%	-10,97%	-10,97%	1,71%	1,71%	Consumer Confidence Index
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-56,10%	-56,05%	-56,05%	31,24%	31,24%	Gross Fixed Capital Formation
Belanja Pemerintah	-6,06%	-7,47%	-8,56%	3,52%	3,02%	Government Expenditure
Index Harga Konsumen	285,09	302,36	317,96	138,85	138,85	Consumer Price Index
Produksi Industri	-3,85%	-4,66%	-5,35%	2,65%	2,47%	Industrial Production
Harga Minyak	-36,83	-48,00	-57,88	52,89	51,69	Oil Price
Hutang Rumah Tangga	18,03%	18,14%	18,24%	17,06%	17,06%	Household Debt

48. Rugi Per Saham

Berikut adalah perhitungan rugi bersih per saham dasar dan dilusian:

48. Loss Per Share

The following presents the computations of basic and diluted loss per share:

	31 Desember/*December 31,* 2024			
	Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Loss for the year Attributable to Equity Holders The Parent Entity*	**Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Dasar/ *Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding***	**Rugi per Saham (Nilai Penuh)/ *Loss per Share (Full Amount)***	
Rugi per saham dasar/ dilusian	(6.328.359)	187.887.539.870	(34)	Basic/diluted loss per share

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Rugi Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk/ *Loss for the year Attributable to Equity Holders The Parent Entity*	**Rata-rata Tertimbang Jumlah Saham Dasar/ *Weighted Average Number of Ordinary Shares Outstanding***	**Rugi per Saham (Nilai Penuh)/ *Loss per Share (Full Amount)***	
Rugi per saham dasar/ dilusian	(6.034.077)	98.277.584.070	(61)	Basic/ diluted loss per share

49. Transaksi Non-Kas

49. Non-Cash Transaction

	2024	2023	
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain setelah pajak tangguhan	(22.222)	4.938	Unrealized gain from fair value through other comprehensive income marketable securities - net
Perubahan surplus (defisit) revaluasi aset	213.072	(1.756)	Revaluation surplus (deficit)
Reklasifikasi aset tetap ke aset terbengkalai	(715)	22.395	Reclassification of fixed assets to abandoned assets

50. Informasi Tambahan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, informasi tambahan untuk Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan diungkapkan pada Catatan 55n.

50. Additional Information

As at December 31, 2024 and 2023, additional information regarding the Bank in accordance with Financial Services Authority Regulation are disclosed in Note 55n.

51. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing

Saldo aset moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

51. Assets and Liabililities in Foreign Currencies

The balances of monetary assets in foreign currencies are as follows :

	2024		2023		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent***	**Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)***	**Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent***	
ASET					**ASSETS**
Kas:					**Cash:**
Dolar Amerika Serikat	1.443	21.845	560	8.627	United States Dollar
Dolar Singapura	107	1.260	46	540	Singapore Dollar
Euro Eropa	17	280	112	1.901	European Euro
Dolar Australia	2	20	19	201	Australian Dollar
Lain-lain (ekuivalen USD)	1.443	1.056	102	1.575	Others (USD equivalent)
Sub-total		24.461		12.844	Sub-total
Giro pada Bank Indonesia:					**Current accounts with Bank Indonesia:**
Dolar Amerika Serikat	9.296	140.746	7.563	116.440	United States Dollar
Giro pada bank lain:					**Current accounts with other banks:**
Dolar Amerika Serikat	14.984	226.852	9.952	153.231	United States Dollar
Dolar Singapura	5.132	60.655	3.837	44.801	Singapore Dollar
Yen Jepang	387.127	41.171	16.550	1.804	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	772	15.667	358	7.018	Great Britain Poundsterling
Dolar Australia	873	9.164	731	7.689	Australian Dollar
Yuan Cina	3.778	8.157	2.624	5.694	Chinese Yuan
Euro Eropa	459	7.760	481	8.193	European Euro
Won Korea	124.437	1.436	186	2.211	Korean Won
Dolar Hong Kong	417	812	4.959	9.774	Hong Kong Dollar
Sub-total		371.674		240.415	Sub-total
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain:					**Placements with Bank Indonesia and other banks:**
Dolar Amerika Serikat	24.451	370.185	22.000	338.734	United States Dollar
Surat-surat berharga:					**Marketable securities:**
Dolar Amerika Serikat	475.066	7.192.497	388.446	5.980.901	United States Dollar
Yuan China	1.007	2.176	1.292	2.803	Chinese Yuan
Sub-total		7.194.673		5.983.704	Sub-total
Tagihan akseptasi:					**Acceptance receivables:**
Yuan Cina	34.759	75.041	4.090	8.875	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	293	4.434	6.644	102.298	United States Dollar
Sub-total		79.475		111.173	Sub-total
Tagihan derivatif:					**Derivative receivables:**
Dolar Amerika Serikat	796	12.054	197	3.040	United States Dollar

51. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

51. Assets and Liabililities in Foreign Currencies (continued)

	2024		2023		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/ piutang syariah:					**Loans and sharia financing/ receivables:**
Dolar Amerika Serikat	477.215	7.225.040	326.533	5.027.636	United States Dollar
Euro Eropa	127	2.149	128	2.185	European Euro
Sub-total		7.227.189		5.029.821	Sub-total
Aset lain-lain:					**Other assets:**
Dolar Amerika Serikat	3.470	52.543	1.282	19.719	United States Dollar
Total aset		**15.473.000**		**11.855.890**	**Total assets**

Saldo liabilitas moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

The balances of monetary liabilities in foreign currencies are as follows:

	2024		2023		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Liabilitas segera:					**Liabilities immediately payable:**
Yen Jepang	144.307	15.347	2.560	279	Japanese Yen
China Yuan	724	7.015	183	398	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	594	6.340	96	1.471	United States Dollar
Dolar Singapura	724	1.563	0	3	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	-	-	8	149	Great Britain Poundsterling
Dolar Hongkong	-	-	197	388	Hong Kong Dollar
Euro Eropa	-	-	20	341	European Euro
Sub-total		30.265		3.029	Sub-total
Liabilitas akseptasi:					**Acceptance liabilities:**
Yuan Cina	34.759	75.041	4.090	8.875	Chinese Yuan
Dolar Amerika Serikat	293	4.434	6.644	102.298	United States Dollar
Sub-total		79.475		111.173	Sub-total
Giro:					**Demand deposits:**
Dolar Amerika Serikat	52.837	795.206	27.138	417.845	United States Dollar
Yen Jepang	295.837	30.434	295.789	32.241	Japanese Yen
Dolar Australia	41	405	41	432	Australian Dollar
Euro Eropa	17	246	15	262	European Euro
Dolar Singapura	13	216	62	722	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	2	31	2	35	Great Britain Poundsterling
Sub-total		826.538		451.537	Sub-total
Tabungan:					**Saving deposits:**
Dolar Amerika Serikat	5.350	80.993	3.369	51.876	United States Dollar
Euro Eropa	14	237	64	1.087	European Euro
Dolar Australia	31	322	27	319	Australian Dollar
Dolar Singapura	20	234	18	210	Singapore Dollar
Yen Jepang	931	99	1.963	214	Japanese Yen
Poundsterling Inggris	-	7	1	7	Great Britain Poundsterling
Sub-total		81.892		53.713	Sub-total

51. Aset dan Liabilitas Dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

51. Assets and Liabililities in Foreign Currencies (continued)

	2024		2023		
	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	Mata Uang Asing (dalam ribuan)/ *Foreign Currency (in thousand)*	Ekuivalen Rupiah/ *Rupiah Equivalent*	
Deposito berjangka:					**Time deposits:**
Dolar Amerika Serikat	191.558	2.900.193	226.658	3.489.847	United States Dollar
Euro Eropa	138	2.337	139	2.376	European Euro
Dolar Australia	76	801	80	842	Australian Dollar
Dolar Singapura	59	693	54	635	Singapore Dollar
Sub-total		2.904.024		3.493.700	Sub-total
Simpanan dari bank lain:					**Deposit from other banks:**
Dolar Amerika Serikat	179.113	2.671.770	500.000	7.698.500	United States Dollar
Pinjaman yang diterima:					**Borrowings:**
Dolar Amerika Serikat	317.776	4.811.138	81.249	1.251.005	United States Dollar
Liabilitas derivatif:					**Derivative payables:**
Dolar Amerika Serikat	240	3.641	53	808	United States Dollar
Surat berharga yang diterbitkan:					**Marketable Securities issued:**
Dolar Amerika Serikat	300.000	4.828.500	-	-	United States Dollar
Liabilitas lain-lain:					**Other liabilities:**
Dolar Amerika Serikat	9.863	149.323	2.034	31.320	United States Dollar
Euro Eropa	-	-	0	1	European Euro
Yuan Cina	44	94	0	7	Chinese Yuan
		149.417		31.328	
Total liabilitas		**16.386.660**		**13.094.793**	**Total liabilities**

52. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dikeluarkan dan direvisi

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Diterapkan pada tahun 2025

Pada tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, amendemen terhadap PSAK yang relevan dengan Grup telah diterbitkan, namun belum berlaku secara efektif:

- Amendemen PSAK No. 117, "Kontrak Asuransi"
- Amendemen PSAK No. 221, "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing"

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan konsolidasian, Grup masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan dampaknya terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

52. Issued and revised Statements of Financial Accounting Standards (SFAS) and Interpretation Of Financial Accounting Standards (SFAS)

Changes to the Statements of Financial Accounting Standards (SFAS)

Adopted in 2025

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following amendments to SFAS relevant to the Group were issued but not effective :

- Amendment to SFAS No. 117, "Insurance Contracts"
- Amendment to SFAS No. 221, "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates"

As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Group is still evaluating the potential impact from the implementation of these new standards and the effect on the Group's consolidated financial statements.

53. Informasi Tambahan Arus Kas

Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

53. Additional Information on Cash Flow

Reconciliation of liabilities that arising from financing activities is as follows:

	1 Januari/ *January 1* 2024	Arus Kas/ *Cash flows*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate Movement*	31 Desember/ *Desember 31,* 2024	
Obligasi subordinasi	2.403.404	2.389.662	1.596		4.794.662	Subordinated bonds
Pinjaman yang diterima	11.704.492	2.200.277	15.875	-	13.920.644	Borrowings
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	219.631	3.520.247	-	-	3.739.878	Marketable securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	994.184	-	1.312		995.496	Marketable securities issued
Total	**15.321.711**	**8.110.186**	**18.783**	**-**	**23.450.680**	**Total**

	1 Januari/ *January 1* 2023	Arus Kas/ *Cash flows*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Amortisasi Biaya Emisi/ *Amortization of Issuance Cost*	Perubahan Non Kas/ *Non Cash Changes*: Pergerakan Kurs Mata Uang Asing/ *Foreign Exchange Rate Movement*	31 Desember/ *Desember 31,* 2023	
Obligasi subordinasi	2.400.329	-	3.075	-	2.403.404	Subordinated bonds
Pinjaman yang diterima	11.200.131	504.361	-	-	11.704.492	Borrowings
Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	219.631	-	-	219.631	Marketable securities sold with agreements to repurchase
Surat berharga yang diterbitkan	992.389	-	1.795	-	994.184	Marketable securities issued
Total	**14.592.849**	**723.992**	**4.870**	**-**	**15.321.711**	**Total**

54. Informasi Keuangan Tersendiri Bank

Bank menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama, informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk menganalisa hasil usaha entitas induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Bank KB Bukopin Tbk (Entitas Induk) berikut ini (Lampiran I - Lampiran V) harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Bank KB Bukopin Tbk dan Entitas Anak.

54. Financial Information of The Bank

The Bank published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk (Parent Entity) which account for investment in Subsidiaries using the cost method, and have been prepared in order that the parent entity's result of operations can be analyzed. The supplementary financial information of PT Bank KB Bukopin Tbk (Parent Entity) (Attachment I - Attachment V) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Bank KB Bukopin Tbk and Subsidiaries.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia

Informasi tambahan berikut yang disajikan dibawah ini merupakan informasi yang disyaratkan oleh regulasi yang berlaku dan bukan/tidak merupakan informasi yang dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Indonesia:

a. Giro Pada Bank Indonesia

Bank dipersyaratkan untuk memiliki Giro Wajib Minimum dalam mata uang Rupiah dan mata uang asing.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards

The following additional information presented below is information required by applicable regulations and not mandated by Indonesian Accounting Standards:

a. Current Accounts With Bank Indonesia

The Bank is required to maintain Minimum Statutory Reserves in Rupiah and in foreign currency.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

a. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

Rasio Giro Wajib Minimum Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Bank Umum Konvensional			Conventional Banking
Rupiah			Rupiah
Giro Wajib Minimum Harian	5,85%	7,05%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-Rata	8,74%	7,37%	Average Minimum Statutory Reserves
Mata Uang Asing			Foreign currency
Giro Wajib Minimum Harian	3,99%	4,02%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-rata	4,02%	4,02%	Average Minimum Statutory Reserves
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	28,82%	35,08%	Macroprudential Liquidity Reserve
Bank Umum Syariah			Sharia Commercial Banking
Giro Wajib Minimum Harian	0%	0%	Penyangga Likuiditas Reserves
Giro Wajib Minimum Rata-rata	8,51%	8,21%	Average Minimum Statutory Reserves

Pada 31 Desember 2024, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditetapkan sebesar 9%. GWM rata-rata Bank pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar 8,74%. Bank memperoleh insentif rata-rata GWM dari Bank Indonesia sebesar 0,30% periode 1 Desember 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pada 31 Desember 2023, Giro Wajib Minimum (GWM) Bank telah sesuai dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 12 Tahun 2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditetapkan sebesar 9%. GWM rata-rata Bank pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar 7,37%. Bank memperoleh insentif rata-rata GWM dari Bank Indonesia sebesar 1,70% periode 1 Desember 2023 sampai dengan 29 Februari 2024.

Pemenuhan rasio-rasio tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:

	2024	2023	
Bank Umum Konvensional			Conventional Banking
Rupiah:			Rupiah:
Giro wajib minimum secara harian	0,00%	0,00%	Daily Minimum Statutory Reserves
Giro wajib minimum secara rata-rata	9,00%	9,00%	Average Minimum Statutory Reserves
Valuta Asing:			Foreign currency:
Giro wajib minimum secara harian	2,00%	2,00%	Daily Minimum Statutory Reserves

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

a. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, the Minimum Statutory Reserves ratios of Bank are as follows:

As at December 31, 2024, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) complies Board of Governors Member Regulation No. 12 of 2023 dated October 1, 2023 concerning the Second Amendment to the Regulation on Members of the Board of Governors No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 which was set at 9%. The Bank's average Minimum Statutory Reserves on December 31, 2024 was 8.74%. The Bank obtains an average GWM incentive from Bank Indonesia of 0.30% for the period December 1, 2024 to December 31, 2024.

As at December 31, 2023, the Bank's Minimum Statutory Reserve (GWM) complies Board of Governors Member Regulation No. 12 of 2023 dated October 1, 2023 concerning the Second Amendment to the Regulation on Members of the Board of Governors No. 24/8/PADG/2022 dated June 30, 2022 which was set at 9%. The Bank's average Minimum Statutory Reserves on December 31, 2023 was 7.37%. The Bank obtains an average GWM incentive from Bank Indonesia of 1.70% for the period December 1, 2023 to February 29, 2024.

Fulfillment of the above ratios is determined as follows:

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

a. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

	2024	2023	
Giro wajib minimum secara rata-rata	2,00%	2,00%	Average Minimum Statutory Reserves
Penyangga Likuiditas Makroprudensial	5,00%	5,00%	Macroprudential Liquidity Reserve
Bank Umum Syariah			Sharia Commercial Banking
Rupiah:			Rupiah:
Giro wajib minimum	7,50%	7,50%	Daily Minimum Statutory Reserves
Valuta Asing:			Foreign currency:
Giro wajib minimum	0,00%	0,00%	Daily Minimum Statutory Reserves

PADG No. 21/22/PADG/2019 telah diamendemen dengan PADG No. 23/7/PADG/ 2021 tanggal 26 April 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PADG No.21/22/PADG/2019 tentang Rasio RIM dan PLM bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Berdasarkan amendemen tersebut terdapat penyesuaian Parameter Disinsentif Bawah dan Parameter Disinsentif Atas yang digunakan dalam pemenuhan rasio GWM RIM.

Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) adalah cadangan likuiditas minimum yang wajib dipelihara oleh Bank berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito Bank Indonesia (SDBI), Surat Berharga Negara (SBN) yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank. Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) adalah simpanan minimum yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara RIM yang dimiliki oleh Bank dan RIM Target. Berdasarkan PADG No. 24/14/PADG/2022 tanggal 31 Oktober 2022, Parameter Disinsentif Bawah dari batas bawah Target RIM sebesar 84% dan Parameter Disinsentif Atas dari batas atas Target RIM sebesar 94% dalam pemenuhan Giro RIM adalah sebesar 0 (nol).

RIM adalah rasio hasil perbandingan antara:
a. Kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam Rupiah dan valuta asing.
b. Surat berharga korporasi dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang dimiliki Bank.
c. DPK Bank dalam bentuk giro, tabungan dan simpanan berjangka/deposito dalam Rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank; dan
d. Surat berharga dalam Rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

a. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

PADG No. 21/22/PADG/2019 is amended with PADG No. 23/7/PADG/2021 on April 26, 2021 concerning The Third Amendment of PADG No. 21/22/PADG/2019 concerning RIM and PLM Ratio for Commercial Conventional Banks, Sharia Banks and Business Units Sharia. Based on the amendments, there are adjustments to the Lower Disincentive Parameters and the Upper Disincentive Parameters used in the fulfillment of GWM RIM ratio.

Macroprudential Liquidity Reserve (PLM) is the minimum liquidity reserves that should be maintained by the Bank, in form of Certificates of Bank Indonesia (SBI), Certificate of Bank Indonesia Deposit (SDBI), Treasury Bills (SBN), which is determined by Bank Indonesia percentage of Third Party Funds (DPK). Macroprudential Intermediation Ratio (RIM) is the minimum statutory reserve that should be maintained by the Bank in the form of Current Account with Bank Indonesia at a certain percentage of third party fund calculated based on the difference between the Bank's RIM and the targeted RIM. Based on PADG No. 24/14/PADG/ 2022 dated October 31, 2022, the Lower Disincentive Parameter of the lower limit of RIM targeted is 84% and the Upper Disincentive Parameter of the upper limit of RIM targeted is 94% in the fulfillment of RIM Current Account, which is 0 (zero).

RIM is the ratio of comparison between:
a. Loans to third parties in Rupiah and foreign currencies.
b. Corporate securities in Rupiah and foreign currencies owned by the Bank that meet certain requirement.
c. The Bank's TPF in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits/deposits in Rupiah and foreign currencies, excluding interbank funds; and
d. Marketable securities in Rupiah and foreign currencies that meet certain requirements, issued by the Bank for funding sources.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

a. Giro Pada Bank Indonesia (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, persentase GWM untuk Bank Umum Syariah dalam Rupiah masing-masing sebesar 8,51% dan 8,21%.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup telah memenuhi ketentuan BI mengenai GWM.

Pengungkapan lebih lanjut giro pada Bank Indonesia diungkapkan pada Catatan 4.

b. Giro Pada Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, semua giro pada Bank lain diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut giro pada Bank lain diungkapkan pada Catatan 5.

c. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, semua penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diungkapkan pada Catatan 6.

d. Surat-Surat Berharga

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, semua surat berharga yang dimiliki oleh Bank diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut penempatan pada Surat-surat berharga diungkapkan pada Catatan 7.

e. Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali

Pada tanggal 31 Desember 2023, semua Surat Berharga yang Dibeli dengan Janji Dijual Kembali yang dimiliki oleh Bank diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut penempatan pada Surat-surat berharga diungkapkan pada Catatan 8.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

a. Current Accounts With Bank Indonesia (continued)

As at December 31, 2024 and 2023, Minimum Statutory Reserves percentage for Sharia Commercial Banking in Rupiah currency are 8.51% and 8.21%, respectively.

As at December 31, 2024 and 2023, the Group has complied with BI regulation on the Minimum Statutory Reserves.

The further disclosures on current accounts with Bank Indonesia are presented in Note 4.

b. Current Accounts With Other Bank

All current accounts with other banks are classified as current as at December 31, 2024 and 2023.

The further disclosures on current accounts with other Bank are presented in Note 5.

c. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

As at December 31, 2024 dan 2023, all placements with Bank Indonesia and other banks are classified as current.

The further disclosures on placements with Bank Indonesia and other banks are presented in Note 6.

d. Marketable Securities

As at December 31, 2024 and 2023, all marketable securities held by the Bank are classified as current.

The further disclosures on Marketable Securities are presented in Note 7.

e. Marketable Securities Purchased with Agreement to Resell

As at December 31, 2023, all Marketable Securities Purchased with Agreement to Resell held by the Bank are classified as current.

The further disclosures on Marketable Securities are presented in Note 8.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

f. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah

f. Loans and Sharia Financing/Receivables

Berdasarkan mata uang, jenis, dan kolektibilitas sesuai peraturan OJK

By Financial Service Authority Regulation currency, type, and collectability

	31 Desember/*December 31,* 2024						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Modal kerja	8.586.568	1.342.083	24.387	123.647	1.261.388	11.338.073	Working capital
Investasi	8.951.563	649.760	107.337	95.849	790.115	10.594.624	Investment
Konsumsi	12.644.879	358.749	51.219	85.861	1.575.387	14.716.095	Consumer
Sindikasi	3.534.954	-	-	-	-	3.534.954	Syndicated
Program Pemerintah	79.900	577	-	964	4.802	86.243	Government program
Direksi dan karyawan	30.272	-	36	-	-	30.308	Directors and employees
Total Rupiah	33.828.136	2.351.169	182.979	306.321	3.631.692	40.300.297	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(519.858)	(291.896)	(121.716)	(103.485)	(1.854.587)	(2.891.542)	Allowance for impairment losses
Neto	33.308.278	2.059.273	61.263	202.836	1.777.105	37.408.755	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Sindikasi	3.899.983	-	-	-	-	3.899.983	Syndicated
Modal kerja	2.491.788	-	-	-	14.514	2.506.302	Working capital
Investasi	688.171	130.584	-	-	-	818.755	Investment
Konsumsi	2.149	-	-	-	-	2.149	Consumer
Total mata uang asing	7.082.091	130.584	-	-	14.514	7.227.189	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.040)	(32.873)	-	-	(3.742)	(100.655)	Allowance for impairment losses
Neto	7.018.051	97.711	-	-	10.772	7.126.534	Net
Total	**40.326.329**	**2.156.984**	**61.263**	**202.836**	**1.787.877**	**44.535.289**	**Total**

	31 Desember/*December 31,* 2023						
	Lancar/ *Current*	Dalam Perhatian Khusus/ *Special Mention*	Kurang Lancar/ *Substandard*	Diragukan/ *Doubtful*	Macet/ *Loss*	Total	
Rupiah:							**Rupiah:**
Modal kerja	11.782.320	2.779.708	86.297	27.551	1.385.015	16.060.891	Working capital
Investasi	10.870.969	955.853	45.904	15.666	1.036.580	12.924.972	Investment
Konsumsi	10.463.188	444.933	76.048	117.965	1.702.127	12.804.261	Consumer
Sindikasi	2.472.304	-	-	-	-	2.472.304	Syndicated
Program Pemerintah	98.757	1.035	-	1.306	4.044	105.142	Government program
Direksi dan karyawan	21.183	42	-	-	-	21.225	Directors and employees
Total Rupiah	35.708.721	4.181.571	208.249	162.488	4.127.766	44.388.795	Total Rupiah
Cadangan kerugian penurunan nilai	(540.160)	(770.505)	(68.858)	(60.255)	(2.074.884)	(3.514.662)	Allowance for impairment losses
Neto	35.168.561	3.411.066	139.391	102.233	2.052.882	40.874.133	Net
Mata uang asing:							**Foreign currencies:**
Sindikasi	2.693.586	-	-	-	-	2.693.586	Syndicated
Modal kerja	2.085.311	-	-	-	13.821	2.099.132	Working capital
Investasi	234.918	-	-	-	-	234.918	Investment
Konsumsi	2.185	-	-	-	-	2.185	Consumer
Total mata uang asing	5.016.000	-	-	-	13.821	5.029.821	Total foreign currencies
Cadangan kerugian penurunan nilai	(64.311)	-	-	-	(3.861)	(68.172)	Allowance for impairment losses
Neto	4.951.689	-	-	-	9.960	4.961.649	Net
Total	**40.120.250**	**3.411.066**	**139.391**	**102.233**	**2.062.842**	**45.835.782**	**Total**

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

f. Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/ Piutang Syariah (lanjutan)

Kredit yang bermasalah

Pada tanggal 31 Desember 2024, rasio kredit bermasalah - kotor dan neto konsolidasian berdasarkan peraturan Bank Indonesia masing-masing adalah 8,70% dan 4,32% (31 Desember 2023: 9,13% dan 4,73%).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, pinjaman direksi dan karyawan Bank tersebut digolongkan lancar.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

f. Loans and Sharia Financing/Receivables (continued)

Non-performing loans

As at December 31, 2024, the ratios of consolidated non-performing loans - gross and net based on Bank Indonesia regulation are 8.70% and 4.32%, respectively (December 31, 2023: 9.13% and 4.73%).

As of December 31, 2024 and 2023, loans to the Bank's director and employees are classified as current

	2024	2023	
Perdagangan	641.356	766.889	Trading
Jasa	570.542	375.049	Business service
Konstruksi	253.613	217.404	Construction
Pertanian	191.550	24.543	Agriculture
Manufaktur	164.403	73.779	Manufacturing
Transportasi	222.158	309.927	Transportation
Tenaga listrik	116.682	13.801	Power supply
Pertambangan	15.894	857.866	Mining
Lain-lain	1.959.308	1.873.067	Others
Total	4.135.506	4.512.325	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.083.530)	(2.207.858)	Allowance for impairment losses
Neto	**2.051.976**	**2.304.467**	**Net**

Kredit yang direstrukturisasi

Kredit yang telah direstrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, masing-masing sebesar Rp8.739.055 dan Rp16.719.394. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara perpanjangan masa pelunasan kredit dan perubahan persentase tingkat bunga. Cadangan kerugian penurunan nilai untuk kredit yang direstrukturisasi masing-masing sebesar Rp1.255.342 dan Rp2.128.504, pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Rincian kredit yang telah direstrukturisasi per 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Restructured loans

Restructured loans as at December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp8,739,056 and Rp16,719,394, respectively. The terms of restructuring consist of extension of payment maturity dates and modification of interest rate. The allowance for impairment losses for restructured loans amounted to Rp1,255,342 and Rp2,128,504, December 31, 2024 and 2023, respectively.

Detail of restructured loans as at December 31, 2024 and 2023, are as follow:

	2024	2023	
Lancar	4.455.620	10.349.584	Current
Dalam perhatian khusus	1.972.466	3.637.518	Special mention
Kurang lancar	123.852	62.612	Substandard
Diragukan	198.909	40.314	Doubtful
Macet	1.988.209	2.629.366	Loss
Total	**8.739.056**	**16.719.394**	**Total**

Pengungkapan lebih lanjut pada Kredit yang Diberikan dan Pembiayaan/Piutang Syariah diungkapkan pada Catatan 9.

The further disclosures on Loans and Sharia Financing/Receivables are presented in Note 9.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

g. Tagihan Dan Liabilitas Akseptasi

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, semua Tagihan dan Liabilitas Akseptasi diklasifikasikan lancar.

Pengungkapan lebih lanjut pada Tagihan dan Liabilitas Akseptasi diungkapkan pada Catatan 10.

h. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Seluruh tagihan dan liabilitas derivatif pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diklasifikasikan lancar.

Kontrak-kontrak untuk posisi 31 Desember 2024 dan 2023, jatuh tempo masing-masing pada tanggal 2 Januari - 23 Januari 2025 dan 2 Januari - 2 Februari 2024.

Pengungkapan lebih lanjut pada Tagihan Dan Liabilitas Derivatif diungkapkan pada Catatan 11.

i. Aset Lain-lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, agunan yang diambil alih berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

	2024	2023	
Lancar	349.034	2.156	Current
Kurang lancar	81.848	910.081	Substandard
Diragukan	1.517.085	1.317.548	Doubtful
Macet	753.463	505.343	Loss
Saldo akhir tahun	2.701.430	2.735.128	Ending balance
Cadangan kerugian penurunan nilai	(901.535)	(231.669)	Allowance for impaiment losses
Neto	**1.799.895**	**2.503.459**	**Net**

Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat agunan yang diambil alih merupakan nilai neto yang dapat direalisasi.

Pengungkapan lebih lanjut pada Aset lain-lain diungkapkan pada Catatan 15.

j. Surat Berharga yang Diterbitkan

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-56/PB.31/2015 tanggal 7 Juli 2015 dan dari Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 tanggal 14 Maret 2012.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

g. Acceptances Receivable And Payable

All Acceptances Receivable and Payable are classified as current as at December 31, 2024 and 2023.

The further disclosures on Acceptances Receivable and Payable are presented in Note 10.

h. Derivative Receivable and Payable

All Derivative Receivable and Payable as of December 31, 2024 and 2023 are classified as current.

The contracts as at December 31, 2024 and 2023, are due on January 2 - January 23, 2025 and January 2 - February 2, 2024, respectively.

The further disclosures on Derivative Receivable And Payable are presented in Note 11.

i. Other Assets

As of December 31, 2024 and 2023, foreclosed assets based on collectibility are as follows:

Management believes that the carrying value of foreclosed assets represents their net realizable values.

The further disclosures on Other assets are presented in Note 15.

j. Marketable Securities Issued

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the Subordinated Bond II is included as supplementary capital after the Bank received approval letter from Financial Services Authority No. S-56/PB.31/2015 dated July 7, 2015 and from Bank Indonesia No. 14/24/DPB1/TPB1-4 dated March 14, 2012.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

j. Surat Berharga yang Diterbitkan (lanjutan)

Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM), Obligasi Subordinasi Berkelanjutan III diperhitungkan sebagai modal pelengkap setelah Bank menerima surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan No. S-212/PB.31/2021 tanggal 4 Oktober 2021.

Pengungkapan lebih lanjut pada Surat Berharga yang Diterbitkan diungkapkan pada Catatan 24.

k. Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, Bank berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2016 dan Surat Edaran No. 34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Peraturan OJK No. 38/POJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap entitas anak.

Profil Risiko

Penilaian profil risiko terdiri dari menjadi penilaian risiko inheren dan penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian Risiko Inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak, yang berpotensi memengaruhi posisi keuangan Bank.

Karakteristik risiko inheren Bank ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, antara lain strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri di mana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makroekonomi.

Penilaian atas Risiko Inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter/indikator yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis Risiko mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan ke dalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*) dan peringkat 5 (*high*).

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

j. Marketable Securities Issued (continued)

For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR), the Subordinated Bond III is included as supplementary capital after the Bank received approval letter from Financial Services Authority No. S-212/PB.31/2021 dated October 4, 2021.

The further disclosures on Marketable Securities Issued are presented in Note 24.

k. Risk Management

In the implementation of risk management, Bank refers to Financial Services Authority Regulation No.18/POJK.03/2016 and Circular Letter No. 34/ SEOJK.03/2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks and OJK Regulation No.38/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Consolidated Risk Management for Banks that control subsidiaries.

Risk Profile

The risk profile assessment consists of assessment of inherent risk assessment and assessment of the Quality of Risk Management Implementation (QRMI).

Inherent Risk Assessment is an assessment of the risks inherent in the Bank's business activities, both quantifiable and non-quantifiable, that have the potential to affect the Bank's financial position.

The Bank's inherent risk characteristics are determined by internal and external factors, including business strategy, business characteristics, complexity of the Bank's products and activities, the industry in which the Bank conducts business, as well as macroeconomic conditions.

Assessment of Inherent Risk is carried out by taking into account quantitative and qualitative parameters/indicators. The determination of the level of inherent risk for each type of risk refers to the general principles of assessing the Soundness of Commercial Banks. The determination of the level of inherent risk for each type of risk is categorized into rank 1 (low), rank 2 (low to moderate), rank 3 (moderate), rank 4 (moderate to high), and rank 5 (high).

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

k. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil Risiko (lanjutan)

Penilaian kualitas Penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling berkaitan, yaitu:

1. Tata Kelola Risiko;
2. Kerangka Manajemen Risiko;
3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen; dan
4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Dari hasil penilaian laporan profil risiko (*self assessment*) yang disampaikan kepada OJK, untuk posisi Desember 2024, peringkat risiko komposit Bank yaitu Peringkat 2 (*low to moderate*).

Selain menyampaikan laporan profil risiko, Bank juga menyampaikan laporan keuangan grup dengan entitas anak yang dilaporkan secara semesteran sebagai bentuk pemantauan rutin entitas utama terhadap entitas anak.

Risiko Likuiditas

Dalam rangka meningkatkan ketahanan likuiditas, Bank melakukan perhitungan rasio kecukupan likuiditas yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR) dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) dan mengelola Rasio Kecukupan Likuiditas tersebut sesuai ketentuan regulator, baik secara individu (bank saja) maupun konsolidasi dengan perusahaan anak.

Selain itu, Bank juga menghitung rasio Giro Wajib Minimum (GWM) pada Bank Indonesia dan Kas, Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) dan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM).

Terkait dengan POJK No. 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (*Net Stable Funding Ratio*) Bagi Bank Umum, Bank menyampaikan laporan NSFR secara triwulanan (individual) ke Otoritas Jasa Keuangan dan mempublikasikan laporan NSFR triwulanan (individual) pada situs web Bank.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

k. Risk Management (continued)

Risk Profile (continued)

Assessment of the quality of Risk Management Implementation reflects an assessment of the adequacy of the risk control system covering all pillars of Risk Management implementation as stipulated in the provisions of the Financial Services Authority (OJK). Assessment of the quality of Risk Management Implementation is an assessment of 4 (four) interrelated aspects, namely:

1. Risk Governance;
2. Risk Management Framework;
3. Risk Management Process, Adequacy of Human Resources and Adequacy of Management Information Systems; and
4. Adequacy of the Risk Control System, taking into account the characteristics and complexity of the Bank's business.

Based on quarterly risk profile report (self assessment) submitted to OJK for June 2024 position, the Bank's composite risk is rated at 2 (low to moderate).

In addition to submitting risk profile reports, the Bank also submits financial group reports with subsidiaries which are reported on a semi-annual basis as a form of routine monitoring of the main entity to subsidiaries.

Liquidity Risk

In order to improve liquidity resilience, Bank calculates liquidity adequacy ratios namely Liquidity Coverage Ratio (LCR) and Net Stable Funding Ratio (NSFR) and manages the Liquidity Adequacy Ratio according to regulatory provisions, both individually (bank only) and consolidated with subsidiary companies.

In addition, the Bank also calculates the Bank's minimum Statutory Reserves (GWM) at Bank Indonesia and Cash, Macroprudential Liquidity Buffer (PLM), and Macroprudential Intermediation Ratio (RIM).

In regard to the regulation of the Financial Services Authority No. 50/POJK.03/2017 concerning the Obligation of Net Stable Funding Ratio for Commercial Banks, the Bank has submitted NSFR report on quarterly (individual) to Financial Services Authority and published NSFR report to Bank's website.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

k. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko Likuiditas (lanjutan)

Berdasarkan perhitungan, NSFR Bank 31 Desember 2024 adalah sebesar 102,25% (secara individual) dan 101,21% (secara konsolidasi). Atas hal tersebut, Bank telah memenuhi rasio NSFR sesuai ketentuan (> 100%).

Dalam hal ini Bank akan terus melakukan upaya-upaya strategis untuk dapat mempertahankan rasio likuiditas. Beberapa strategi yang telah dan akan terus dilakukan Bank antara lain:

- Meningkatkan DPK terutama DPK yang mempunyai kategori stabil dan mempunyai tenor menengah - jangka panjang.
- Menjaga Kecukupan Aset Likuid Bank.
- Memelihara dan meningkatkan Pendanaan Antar Bank terutama jangka panjang.
- Dukungan sumber pendanaan dari Kookmin sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP).
- Program pemasaran pendanaan yang berfokus pada jangka waktu menengah 6-12 bulan.

l. Pengelolaan Permodalan

Manajemen menggunakan rasio permodalan yang diwajibkan regulator untuk memantau permodalan Bank. Pendekatan OJK untuk pengukuran tersebut terutama berdasarkan pengawasan atas hubungan antara kecukupan modal dengan ketersediaan modal.

Bank telah melakukan perhitungan kecukupan modal berdasarkan Peraturan OJK yang berlaku, dimana modal yang dimiliki diklasifikasikan dalam 2 (dua) Tier yaitu Modal Tier 1 dan Modal Tier 2.

Bank tidak memiliki modal tambahan yang memenuhi kriteria Modal Tier 3 sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank pada 31 Desember 2024 dan 2023, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

k. Risk Management (continued)

Liquidity Risk (continued)

Based on the calculation, NSFR for December 31, 2024 is 102.25% (individual) and 101.21% (consolidated). For this reason, the Bank has already fulfilled the NSFR ratio in accordance with the provisions (> 100%).

In this regard, the Bank will continue to make strategic efforts to be able to maintain the liquidity ratio. Some of the strategies that have been and will continue to be carried out by the Bank include:

- Increasing TPF, especially TPF which has a stable category and has a medium - long term tenor.
- Maintaining the adequacy of Liquid Assets.
- Maintaining and enhancing Interbank Funding especially long-term maturity.
- Supporting funding sources from Kookmin as Controlling Shareholder (PSP).
- Funding marketing programs focused on a medium term of 6-12 months.

l. Capital Management

Management use regulatory capital ratios in order to monitor its capital. OJK`s approach to such measurement is primarily based on monitoring the relationship of the capital adequacy to availability of capital resources.

The Bank has calculated its capital adequacy requirements using the prevailing OJK regulation, where the regulatory capital is classified into 2 (two) tiers, Tier 1 Capital and Tier 2 Capital.

The Bank does not have any other supplementary capital which meets the criteria of Tier 3 Capital under prevailing OJK regulation.

The Capital Adequacy Ratio (CAR) calculations for the Bank only as at December 31, 2024 and 2023, in accordance with the prevailing Financial Services Authority Regulations are as follow:

	2024		2023		
	Entitas Induk/ *Parent Only*	**Konsolidasi/ *Consolidated***	**Entitas Induk/ *Parent Only***	**Konsolidasi *Consolidated***	
Modal					**Capital**
Tier I	3.410.320	5.401.052	7.847.606	9.813.056	Tier I
Tier II	3.410.320	4.099.247	4.317.559	4.392.073	Tier II
Jumlah Modal	6.820.640	9.500.299	12.165.165	14.205.129	Total Capital

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

l. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

l. Capital Management (continued)

	2024		2023		
	Entitas Induk/ *Parent Only*	Konsolidasi/ *Consolidated*	Entitas Induk/ *Parent Only*	Konsolidasi *Consolidated*	
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Kredit	39.598.647	45.189.096	42.683.771	48.289.880	Risk Weighted Assets for Credit Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional	1.771.508	1.987.358	2.098.314	2.344.395	Risk Weighted Assets for Operational Risk
Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Pasar	268.195	268.195	197.195	197.195	Risk Weighted Assets for Market Risk
Rasio Tier 1	8,19%	11,38%	17,45%	19,31%	Tier 1 Ratio
Rasio Tier 2	8,19%	8,64%	9,60%	8,64%	Tier 2 Ratio
Total KPMM	16,38%	20,02%	27,05%	27,95%	Total CAR
Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang diwajibkan	9 - <10%	9 - <10%	9 - <10%	9 - <10%	Minimum Capital Adequacy Ratio required
Capital conservation buffer	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	Capital conservation buffer
Countercyclical buffer	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Countercyclical buffer
Capital surcharge untuk bank sistemik	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	Capital surcharge for systemic bank

Bank mematuhi semua persyaratan modal yang ditetapkan oleh pihak eksternal sepanjang periode pelaporan, khususnya berkenaan dengan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) dan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR).

Berdasarkan POJK No.34/POJK.03/2016 tanggal 22 September 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, Bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*), sebagai berikut:

a. *Capital Conservation Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga *(buffer)* apabila terjadi kerugian pada periode krisis;
b. *Countercyclical Buffer* adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengantisipasi kerugian apabila terjadi pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan sehingga berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan;
c. *Capital Surcharge* untuk *Domestic Systemically Important Bank* (D-SIB) adalah tambahan modal yang berfungsi untuk mengurangi dampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian apabila terjadi kegagalan Bank yang berdampak sistemik melalui peningkatan kemampuan Bank dalam menyerap kerugian.

The Bank has complied with all externally imposed capital requirements throughout the reporting period, particularly regarding Capital Adequacy Ratio (CAR) and calculation of Risk Weighted Assets (RWA).

Based on POJK No.34/POJK.03/2016 dated September 22, 2016 concerning Capital Adequacy Ratio, the Bank is required to establish additional capital as a buffer, as follows:

a. Capital Conservation Buffer is an additional capital which serves as a buffer in the event of a loss in the period of crisis;
b. Countercyclical Buffer is an additional capital which serves to anticipated losses in the event of excessive credit growth and thus potentially disrupt the stability of the financial system;
c. Capital Surcharge for Domestic Systemically Important Banks (D-SIB) is an additional capital which serves to reduce the negative impact on the stability of the financial system and economy in the event of Bank failure which has systemic effect through an increase in the Bank's ability to absorb losses.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

I. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Tambahan modal sebagai penyangga (*buffer*) yang wajib dibentuk oleh Bank adalah:

a. *Capital Conservation Buffer* sebesar 2,5% dari ATMR untuk Bank yang tergolong dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti KBMI 2 atau KBMI 3 yang pemenuhannya secara bertahap:
   - 0,625% dari ATMR mulai 1 Januari 2016;
   - 1,25% dari ATMR mulai 1 Januari 2017;
   - 1,875% dari ATMR mulai 1 Januari 2018;
   - 2,5% dari ATMR mulai 1 Januari 2019.

b. *Countercyclical Buffer* sebesar 0% (nol persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR bagi seluruh Bank.

c. *Capital Surcharge* untuk D-SIB sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 2,5% (dua koma lima persen) dari ATMR Bank yang berdampak sistemik.

Pemenuhan modal sebagai penyangga (*buffer*) harus dipenuhi dengan menggunakan komponen modal inti utama (*Common Equity Tier* 1).

Berdasarkan PBI No. 17/22/PBI/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Kewajiban Pembentukan *Countercyclical Buffer* (CCB) ditetapkan bahwa besaran CCB yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk pertama kali, yaitu mulai 1 Januari 2016 adalah sebesar 0% dan berlaku untuk seluruh bank, baik bank umum konvensional dan bank umum syariah, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

Sasaran utama atas kebijakan pengelolaan permodalan yang dilakukan oleh Bank adalah untuk mematuhi ketentuan permodalan eksternal yang berlaku dan untuk mempertahankan rasio permodalan yang sehat agar dapat mendukung usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

Evaluasi terhadap besaran CCB akan dilakukan secara berkala, yaitu paling kurang 1 kali dalam 6 bulan. Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi ditetapkan bahwa besaran CCB tidak berubah maka Bank Indonesia akan mengeluarkan pengumuman di website Bank Indonesia dan apabila ditetapkan ada perubahan, maka Bank Indonesia akan menerbitkan Surat Edaran mengenai perubahan tersebut.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

I. Capital Management (continued)

Additional capital as a buffer that shall be established by the Bank are:

a. Capital Conservation Buffer amounting to 2.5% of RWA to the Bank classified to KBMI 2 or KBMI 3 whose fulfillment gradually:
   - 0.625% from RWA since January 1, 2016;
   - 1.25% from RWA since January 1, 2017;
   - 1.875% from RWA since January 1, 2018;
   - 2.5% from RWA since January 1, 2019.

b. Countercyclical Buffer in the amount of 0% (zero percent) up to 2.5% (two point five percent) from RWA for the whole Bank.

c. Capital Surcharge for D-SIB in the amount of 1% (one percent) to 2.5% (two point five percent) from RWA of Banks with systemic impact.

Fulfillment of capital as a buffer should be met by using components of common equity Tier 1.

Based on PBI No. 17/22/PBI/2015 dated December 23, 2015 concerning the Establishment of Countercyclical Buffer Obligation stipulated that the amount of CCB set by Bank Indonesia for the first time, starting January 1, 2016 amounted to 0% and applying to all banks, both conventional commercial bank and islamic banks, including branches of banks domiciled abroad.

The primary objectives of the Bank's capital management policy are to ensure that the Bank complies with externally imposed capital requirements and that the Bank maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The evaluation of the amount of CCB would be done regularly, i.e at least 1 time within 6 months. In the case that based on the evaluation determined where the magnitude of the CCB does not change, then Bank Indonesia will issue an announcement on the website of Bank Indonesia and, if specified changes, then Bank Indonesia will issue a Circular Letter regarding such change.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

I. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

Berdasarkan POJK No. 46/POJK.03/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Penetapan *Systemically Important Bank* dan *Capital Surcharge*, ditetapkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia akan menetapkan SIB dan *Capital Surcharge* untuk SIB. Bank yang ditetapkan sebagai SIB wajib membentuk *Capital Surcharge* untuk SIB.

Penetapan SIB dan *Capital Surcharge* untuk SIB dilakukan secara semesteran setiap tahun pada:

a. Bulan Maret dengan menggunakan data pada bulan Desember tahun sebelumnya; dan
b. Bulan September dengan menggunakan data posisi bulan Juni tahun sebelumnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan *Capital Surcharge* untuk SIB dalam 5 kelompok bucket:

a. 1% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 1;
b. 1,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 2;
c. 2% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 3;
d. 2,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 4;
e. 3,5% dari ATMR bagi SIB yang digolongkan dalam kelompok *bucket* 5.

Untuk pertama kali, OJK akan menetapkan SIB dalam 4 kelompok dimana pemenuhannya dilakukan secara bertahap:

1. SIB bagi kelompok *(bucket)* 1 sebesar:
   a. 0,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

2. SIB bagi kelompok *(bucket)* 2 sebesar:
   a. 0,375% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 0,75% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,125% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

I. Capital Management (continued)

According to POJK No. 46/POJK.03/2015 dated December 23, 2015 concerning the Stipulation of Systemically Important Banks and Capital Surcharge, the Financial Services Authority in coordination with Bank Indonesia will set SIB and Capital Surcharge for SIB. A Bank defined as SIB is required to establish Capital Surcharge.

The determination of SIB and Capital Surcharge for SIB is conducted biannually on:

a. March using data in December of the previous year; and

b. September using data in June of the previous year.

Financial Services Authority (OJK) establishes Capital Surcharge for SIB in 5 Banks of bucket:

a. 1% from RWA for SIB, which classified as bucket 1;
b. 1.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 2;
c. 2% from RWA for SIB, which classified as bucket 3;
d. 2.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 4;
e. 3.5% from RWA for SIB, which classified as bucket 5.

For the first time, the FSA will set the SIB into 4 buckets in which fulfillment is done gradually:

1. SIB for bucket 1 amounted to:
   a. 0.25% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.5% from RWA since January 1, 2017;
   c. 0.75% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1% from RWA since January 1, 2019.

2. SIB for bucket 2 amounted to:
   a. 0.375% from RWA since January 1, 2016;
   b. 0.75% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.125% from RWA since January 1, 2018;
   d. 1.5% from RWA since January 1, 2019.

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

l. Pengelolaan Permodalan (lanjutan)

3. SIB bagi kelompok *(bucket)* 3 sebesar:
   a. 0,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

4. SIB bagi kelompok *(bucket)* 4 sebesar:
   a. 0,625% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2016;
   b. 1,25% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2017;
   c. 1,875% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2018;
   d. 2,5% dari ATMR sejak tanggal 1 Januari 2019.

m. Posisi Devisa Neto

Perhitungan Posisi Devisa Neto Bank berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 17/5/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015. Berdasarkan peraturan tersebut, Bank hanya diwajibkan untuk menjaga posisi devisa neto secara keseluruhan maksimum 20% dari total modal.

Tabel berikut mengindikasikan posisi aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing yang tidak untuk diperdagangkan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, dimana Bank memiliki eksposur signifikan terhadap arus kas masa depan. Analisa tersebut menghitung dampak pergerakan nilai tukar wajar yang mungkin terjadi terhadap Rupiah, dengan seluruh variabel dianggap konstan, terhadap laba rugi (akibat perubahan nilai wajar aset dan liabilitas moneter yang tidak untuk diperdagangkan yang sensitif terhadap nilai tukar) (tidak diaudit).

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

l. Capital Management (continued)

3. SIB for bucket 3 amounted to:
   a. 0.5% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.5% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2% from RWA since January 1, 2019.

4. SIB for bucket 4 amounted to:
   a. 0.625% from RWA since January 1, 2016;
   b. 1.25% from RWA since January 1, 2017;
   c. 1.875% from RWA since January 1, 2018;
   d. 2.5% from RWA since January 1, 2019.

m. Net Open Position

The calculation for the Net Open Position is based on Bank Indonesia Regulation No. 17/5/PBI/2015 dated May 29, 2015. According to the regulation, Bank only required to maintain the overall net open position at a maximum of 20% from total capital.

The table below indicates the foreign currencies position of non-trading monetary in assets and liabilities as at December 31, 2024 and 2023, where the Bank has significant exposure against its forecast cash flows. The analysis calculates the effect of a reasonably possible movement of the currency rate against the Indonesian Rupiah, with all variables held constant, on the profit or loss (due to change in the fair value of currency sensitive non-trading monetary assets and liabilities) (unaudited).

	31 Desember/*December 31*, 2024			
	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	**Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss***	**Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity***	
Mata uang				**Currency**
Dolar Amerika Serikat	10/10	(3,29)/3.29	-	United States Dollar
Euro Eropa	10/10	0,15/(0.15)	-	European Euro
Dolar Australia	10/10	7,65/(7.65)	-	Australian Dollar
Yen Jepang	10/10	(3,67)/3.67	-	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	10/10	0,82/(0.82)	-	Hong Kong Dollar
Dolar Singapura	10/10	53,14/(53.14)	-	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	10/10	15,64/(15.64)	-	Great Britain Poundsterling
Won Korea	10/10	1,44/(1.44)	-	Korean Won
Yuan China	10/10	1,38/(1.38)	-	Chinese Yuan

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

m. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

m. Net Open Position (continued)

31 Desember/*December 31*, 2023

	Kenaikan (penurunan) dalam nilai tukar/ *Increase (decrease) in exchange rate*	Sensitivitas terhadap laporan laba rugi/ *Sensitivity in profit or loss*	Sensitivitas terhadap ekuitas/ *Sensitivity in equity*	
Mata uang				**Currency**
Dolar Amerika Serikat	10/(10)	(89,69)/89.69	-	United States Dollar
Euro Eropa	10/(10)	(1,65)/1.65	-	European Euro
Dolar Australia	10/(10)	6,30/(6.30)	-	Australian Dollar
Yen Jepang	10/(10)	(29,37)/29.34	-	Japanese Yen
Dolar Hong Kong	10/(10)	9,77/(9.77)	-	Hong Kong Dollar
Dolar Singapura	10/(10)	47,01/(47.01)	-	Singapore Dollar
Poundsterling Inggris	10/(10)	6,83/(6.83)	-	Great Britain Poundsterling
Won Korea	10/(10)	2,22/(2.22)	-	Korean Won
Yuan China	10/(10)	4,31/(4.31)	-	Chinese Yuan

Rasio Posisi Devisa Neto secara keseluruhan adalah penjumlahan nilai absolut dari selisih bersih antara aset dan liabilitas dalam mata uang asing dan selisih bersih dari tagihan dan liabilitas komitmen dan kontinjensi, yang dicatat dalam akun administratif yang didenominasi dalam setiap mata uang asing, yang dinyatakan dalam Rupiah.

The overall Net Open Position ratio is the sum of absolute values of the net difference between assets and liabilities denominated in each foreign currency and the net difference of receivables and payables of both commitments and contingencies recorded in the administrative accounts denominated in each foreign currency, which are stated in Rupiah.

Posisi Devisa Neto Bank pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, adalah sebagai berikut:

Net Open Positions for the Bank as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

31 Desember/*December 31,* 2024

	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Nilai Neto/ *Net Value*	
Mata uang				**Currency**
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				**Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)**
Dolar Amerika Serikat	28.272.517	28.182.732	89.785	United States Dollar
Yen Jepang	88.091	91.761	3.670	Japanese Yen
Euro Eropa	10.687	10.540	147	European Euro
Dolar Australia	10.713	3.059	7.654	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	15.701	61	15.640	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	69.441	16.303	53.138	Singapore Dollar
Lain-lain*)	85.972	82.340	3.632	Others*)
	28.553.122	28.386.796	173.666	
Total Modal			7.058.534	**Total Capital**
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**2,46**	**Net Open Position Ratio (Overall)**

55. Informasi Tambahan yang Tidak Dipersyaratkan Oleh Standar Akuntansi Indonesia (lanjutan)

55. Additional Information that is Not Required by Indonesian Accounting Standards (continued)

m. Posisi Devisa Neto (lanjutan)

m. Net Open Position (continued)

	31 Desember/*December 31,* 2023			
	Aset/ *Assets*	Liabilitas/ *Liabilities*	Nilai Neto/ *Net Value*	
Mata uang				**Currency**
Keseluruhan (Laporan Posisi Keuangan dan Rekening Administratif)				**Overall (Statement of Financial Position and Off-Balance Sheet)**
Dolar Amerika Serikat	15.069.997	15.159.688	89.691	United States Dollar
Yen Jepang	3.851	33.225	29.374	Japanese Yen
Euro Eropa	13.960	15.610	1.650	European Euro
Dolar Australia	9.475	3.179	6.296	Australian Dollar
Poundsterling Inggris	7.177	349	6.828	Great Britain Poundsterling
Dolar Singapura	49.788	2.781	47.007	Singapore Dollar
Lain-lain	28.966	12.661	16.305	Others
	15.183.214	15.227.493	197.151	
Total Modal			14.205.129	**Total Capital**
Rasio Posisi Devisa Neto (Keseluruhan)			**1,39**	**Net Open Position Ratio (Overall)**

n. Informasi Tambahan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, informasi tambahan untuk Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

n. Additional Information

As at December 31, 2024 and 2023, additional information regarding the Bank in accordance with Financial Services Authority Regulation.

	2024	2023	
Rasio aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	3,00%	6,37%	Non-performing assets to total earning assets ratio
Rasio kredit terhadap dana pihak ketiga	103,26%	113,18%	Loans to third party fund ratio
Rasio total beban operasional terhadap total pendapatan operasional	192,58%	223,28%	Total operating expenses to total operating income ratio
Rasio kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit yang diberikan	36,34%	46,92%	Small micro business loans to total loans ratio

Sesuai dengan peraturan POJK No. 38/ POJK.03/2019 tentang Perubahan atas POJK No. 32/POJK.03/2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum, batas maksimum penyediaan dana kepada pihak terkait, satu peminjam yang bukan pihak terkait dan satu kelompok peminjam yang bukan pihak terkait masing-masing tidak melebihi 10%, 20%, dan 25% dari modal Bank.

According to OJK regulation No. 38/POJK.03/ 2019 related to the Changes of POJK No. 32/ POJK.03/2018 related to Legal Lending Limit and Provision of Large Funds for Commercial Banks, the maximum lending limit to related parties, one non-related party debtor, and one non-related party group of debtors shall not exceed 10%, 20%, and 25% of the Bank's capital, respectively.

Pada tanggal 31 Desember 2024 terdapat pelampauan BMPK akibat dari penurunan Modal Inti yang dialami oleh Bank. Pelampauan BMPK ini telah dibuatkan rencana penyelesaian yang jatuh tempo 30 Juni 2025.

As at December 31, 2024 there is an excess of the LLL due to an impact of the declining Core Capital experienced by the Bank. The action plan has been made for this excess or the LLL which will due on June 30, 2025.

56. Tanggung Jawab dan Otorisasi Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Bank bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk terbit pada tanggal 12 Maret 2025.

56. Responsibilities and Authorized Issuance of Consolidated Financial Statements

Management of the Bank is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements that are authorized by Directors for issuance on March 12, 2025.

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Posisi Keuangan
Tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Financial Position
As at December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2024	2023	
ASET			**ASSETS**
Kas	330.502	254.501	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.301.999	2.655.765	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	428.273	367.341	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	1.594.828	738.617	Placements with Bank Indonesia and other banks
Surat-surat berharga:			Marketable securities:
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.417.653	5.322.930	Fair value through profit and loss
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.506.470	3.477.939	Fair value through other comprehensive income
Diukur pada biaya perolehan amortisasi	9.183.228	8.808.097	Measured at amortized cost
	21.107.351	17.608.966	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)	Less: Allowance for impairment losses
Surat-surat berharga - neto	21.107.071	17.608.857	Marketable securities - net
Tagihan Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	-	2.572.152	Marketable securities receivable purchased with agreements to resell - net
Tagihan derivatif	12.054	3.040	Derivative receivables
Kredit yang diberikan	41.456.215	44.183.228	Loans
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.746.625)	(3.353.299)	Less: Allowance for impairment losses
Kredit yang diberikan - neto	38.709.590	40.829.929	Loans - net
Tagihan akseptasi	84.279	132.577	Acceptances receivables
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)	(1.613)	Less: Allowance for impairment losses
Tagihan akseptasi - neto	83.079	130.964	Acceptances receivables - net
Penyertaan saham	1.284.371	2.313.180	Investments in shares
Dikurangi:			Less:
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai goodwill	(106.229)	(106.229)	Accumulated amortization and impairment losses of goodwill
Penyertaan saham - neto	1.178.142	2.206.951	Investments in shares - net
Aset tetap	4.457.237	4.322.260	Fixed assets
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.340.634)	(1.300.473)	Less: Accumulated depreciation
Aset tetap - neto	3.116.603	3.021.787	Fixed assets - net
Aset pajak tangguhan - neto	1.150.806	2.558.816	Deferred tax assets - net
Aset tak berwujud	338.304	338.304	Intangible assets
Dikurangi: Akumulasi amortisasi	(257.651)	(243.063)	Less: Accumulated amortization
Aset tak berwujud - neto	80.653	95.241	Intangible assets - net
Aset lain-lain - neto	5.364.749	5.798.633	Other assets - net
TOTAL ASET	**75.458.349**	**78.842.594**	**TOTAL ASSETS**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Posisi Keuangan (lanjutan)
Tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Financial Position (continued)
As at December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2024	2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS			**LIABILITIES AND EQUITY**
LIABILITAS			**LIABILITIES**
Liabilitas segera	394.431	430.154	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah	40.147.845	39.036.634	Deposits from customers
Simpanan dari bank lain	2.826.678	7.761.176	Deposits from other banks
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.229.437	-	Marketable securities sold with agreements to repurchase - net
Liabilitas derivatif	3.641	808	Derivative payables
Liabilitas akseptasi	84.279	132.577	Acceptances payables
Pinjaman yang diterima	13.775.967	11.654.712	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	3.397.588	Subordinated bond
Utang pajak	55.232	59.039	Taxes payables
Liabilitas lain-lain	1.586.802	1.607.185	Other liabilities
TOTAL LIABILITAS	**67.894.470**	**64.079.873**	**TOTAL LIABILITIES**
EKUITAS			**EQUITY**
Modal saham			Share capital
Saham biasa kelas A - nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)			Common A shares - Rp10,000 (full amount) par value
Saham biasa kelas B - nilai nominal Rp100 (nilai penuh)			Common B shares - Rp100 (full amount) par value
Modal dasar			Authorized capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 207.866.202.200 saham			Common B shares - 207,866,202,200 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh			Issued and fully paid capital
Saham biasa kelas A - 21.337.978 saham			Common A shares - 21,337,978 shares
Saham biasa kelas B - 187.866.201.892 saham per 31 Desember 2024 dan 2023	19.000.000	19.000.000	Common B shares - 187,866,201,892 shares as at December 31, 2024 and 2023
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767	Additional paid-in capital
Surplus revaluasi aset	1.769.377	1.557.366	Asset revaluation surplus
Keuntungan (kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(14.149)	7.563	Unrealized gain (loss) on fair value through other comprehensive income marketable securities
Akumulasi rugi	(21.417.116)	(14.027.975)	Accumulated deficit
TOTAL EKUITAS	**7.563.879**	**14.762.721**	**TOTAL EQUITY**
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	**75.458.349**	**78.842.594**	**TOTAL LIABILITIES AND EQUITY**

Lampiran 2 **Attachment 2**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Profit Or Loss Comprehensive Income
For the Year Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL			**INCOME AND EXPENSES FROM OPERATIONS**
Pendapatan bunga	4.877.943	4.347.708	Interest income
Beban bunga	(3.969.035)	(3.738.512)	Interest expense
Pendapatan bunga - neto	908.908	609.196	Interest income - net
Pendapatan operasional lainnya			Other operating income
Provisi dan komisi lainnya	201.432	310.805	Other fees and commissions
Keuntungan (kerugian) atas penjualan surat-surat berharga - neto	1.603	(8.899)	Gain (loss) on sale of marketable securities - net
Keuntungan selisih kurs - neto	40.476	29.265	Gain on foreign exchange - net
Lain-lain	92.519	98.562	Others
Total pendapatan operasional lainnya	336.030	429.733	Total other operating income
Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(3.459.589)	(4.979.817)	Provision allowance for impairment losses on financial assets - net
Pemulihan cadangan kerugian atas komitmen dan kontinjensi – bersih	5.385	1.999	Recovery of allowance for Commitments and Contingencies -net
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan - neto	(793.671)	(268.218)	Provision for allowance for impairment losses non-financial assets - net
Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23.246)	155.384	Gain (loss) from in fair value of financial assets
Keuntungan transaksi mata uang asing - neto	6.180	5.235	Gain from foreign exchange transactions - net
Umum dan administrasi	(1.017.559)	(1.248.594)	General and administrative
Gaji dan tunjangan karyawan	(708.339)	(706.147)	Salaries and employee benefits
Premi program penjaminan pemerintah	(70.560)	(86.843)	Premium on government guarantee program
Total beban operasional lainnya	(1.796.458)	(2.041.584)	Total operational expenses
RUGI OPERASIONAL	**(4.816.461)**	**(6.088.072)**	**LOSS FROM OPERATIONS**
BEBAN NON-OPERASIONAL - NETO	**(1.145.291)**	**(125.498)**	**NON-OPERATING LOSS - NET**
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	**(5.961.752)**	**(6.213.570)**	**LOSS BEFORE INCOME TAX EXPENSE**
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			**INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)**
Tangguhan	(1.417.050)	702.789	Deferred
RUGI TAHUN BERJALAN	**(7.378.802)**	**(5.510.781)**	**LOSS FOR THE YEAR**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan (Angka-angka disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Profit Or Loss Comprehensive Income (continued)
For the Years Ended December 31, 2024 and 2023 (Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	2024	2023	
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:			**OTHER COMPREHENSIVE INCOME:**
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			Items that will not be reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	(13.255)	6.432	Remeasurement loss on defined benefit
Perubahan surplus revaluasi aset	212.011	(1.756)	Changes in asset revaluation surplus
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	2.916	(1.415)	Income tax related to items that not be reclasified to profit or loss
Pos-pos yang akan direklasifikasi: ke laba rugi:			Items that may be reclassified subsequently to profit or loss:
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(27.836)	6.330	Changes in fair value of fair value through other comprehensive income marketable securities
Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.124	(1.392)	Income tax related to items that will be reclasified to profit or loss
Total penghasilan komprehensif lain - neto	179.960	8.199	Total other comprehensive income - net
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(7.198.842)	(5.502.582)	Total comprehensive loss for the year
RUGI PER SAHAM			**LOSS PER SHARE**
Dasar/dilusian (nilai penuh)	(39)	(56)	Basic/diluted (full amount)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Tahun yang Berakhir yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (PARENT ONLY)
Statements Of Changes In Equity
For the Year Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	**Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital***	**Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription***	**Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus***	**Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value Through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax***	**Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit***	**Total**
Saldo per 1 Januari 2023/ *Balance as at January 1, 2023*	7.000.000	8.286.428	3.000.000	1.559.122	2.625	(8.522.211)	11.325.964
Uang muka setoran modal/ *Advance for future shares subscription*	3.000.000	-	(3.000.000)	-	-	-	-
Penerimaan dana PUT VII dan penempatan pribadi/ *Receipt of LPO VII funds and private placement*	9.000.000	(60.661)	-	-	-	-	8.939.339
Penghentian revaluasi aset/ *Dececognation assets revaluation*	-	-	-	(1.756)	-	-	(1.756)
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized loss on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*	-	-	-	-	4.938	-	4.938
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan *Remeasurement on defined benefit plans – net of deferred tax*	-	-	-	-	-	5.017	5.017
Rugi tahun berjalan/*Loss for the year*	-	-	-	-	-	(5.510.781)	(5.510.781)
Saldo per 31 Desember 2023/ *Balance as at December 31, 2023*	**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.557.366**	**7.563**	**(14.027.975)**	**14.762.721**

PT BANK KB BUKOPIN TBK (ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Perubahan Ekuitas (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir yang Berakhir pada Tanggal
31 Desember 2024
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah, Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK (PARENT ONLY)
Statements Of Changes In Equity (continued)
For the Year Ended December 31, 2024
(Figures are presented in million Rupiah unless otherwise stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital*	Tambahan Modal Disetor/ *Additional Paid-in Capital*	Uang Muka Setoran Modal/ *Advance for Future Shares Subscription*	Surplus Revaluasi Aset/ *Asset Revaluation Surplus*	Keuntungan yang Belum Direalisasi atas Surat-Surat Berharga Dalam Kelompok Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain - Setelah Pajak Tangguhan/ *Unrealized Gains on Fair Value Through Other Comprehensive Income Marketable Securities - Net of Deferred Tax*	Akumulasi Rugi/ *Accumulated Deficit*	Total
Saldo per 1 Januari 2024/ *Balance as at January 1, 2024*	19.000.000	8.225.767	-	1.557.366	7.563	(14.027.975)	14.762.721
Penghentian revaluasi aset/ *Dececognation assets revaluation*	-	-	-	212.011	-	-	212.011
Kerugian yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain - setelah pajak tangguhan/ *Unrealized loss on fair value through other comprehensive income marketable securities - net of deferred tax*	-	-	-	-	(21.712)	-	(21.712)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti - setelah pajak tangguhan *Remeasurement on defined benefit plans – net of deferred tax*	-	-	-	-	-	(10.339)	(10.339)
Rugi tahun berjalan/*Loss for the year*	-	-	-	-	-	(7.378.802)	(7.378.802)
Saldo per 31 Desember 2024/ *Balance as at December 31, 2024*	**19.000.000**	**8.225.767**	**-**	**1.769.377**	**(14.149)**	**(21.417.116)**	**7.563.879**

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun yang Berakhir yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Cash Flow
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are presented in million Rupiah
unless otherwise stated)

	2024	2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			**CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES**
Penerimaan bunga	4.564.504	4.417.801	Receipts from interest
Pembayaran bunga	(3.524.685)	(3.948.183)	Payments of interest expense
Pendapatan operasional lainnya	312.784	325.797	Other operating income
Penerimaan kembali kredit yang telah dihapusbukukan	111.243	179.698	Recoveries from written-off loans
Pembayaran gaji dan tunjangan karyawan	(705.739)	(727.681)	Payments of salaries and employee benefits
Beban operasional lainnya	(1.936.699)	(1.112.903)	Other operating expenses
Beban non operasional	(1.136.659)	(119.192)	Non operating expenses
Pengeluaran kas sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi	(2.315.251)	(984.663)	Cash out before changes before in operating assets and liabilities
Perubahan dalam aset dan liabilitas operasi:			Changes in operating assets and liabilities:
Penurunan (kenaikan) aset operasi:			Decrease (increase) in operating assets:
Penempatan pada bank lain yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan sejak tanggal perolehan	-	(2.011.721)	Placements with other banks with maturities of more than 3 months from acquisition date
Surat-surat berharga - diperdagangkan	1.367.969	2.929.462	Marketable securities - trading
Surat-surat berharga - kredit yang diberikan dan piutang	187.066	495.880	Marketable securities - loans and receivables
Kredit yang diberikan	(1.450.492)	(1.423.577)	Loans
Tagihan akseptasi	(47.885)	113.828	Acceptances receivable
Aset lain-lain	(2.117.081)	(158.276)	Other assets
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi:			Increase (decrease) in operating liabilities:
Liabilitas segera	(35.723)	40.770	Liabilities immediately payable
Simpanan nasabah:			Deposits from customers:
Giro	2.793.222	(464.823)	Demand deposits
Tabungan	(61.848)	(88.679)	Savings deposits
Deposito berjangka	(1.620.163)	(7.105.913)	Time deposits
Simpanan dari bank lain	(4.934.498)	(2.612.829)	Deposits from other banks
Liabilitas akseptasi	(48.298)	115.231	Acceptances payable
Utang pajak	(44.898)	13.160	Taxes payable
Liabilitas lain-lain	(119.339)	527.169	Other liabilities
Kas neto digunakan untuk aktivitas operasi	(8.447.219)	(10.614.981)	Net cash used in operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			**CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES**
Penerimaan dari penjualan surat-surat berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	2.422.243	260.000	Receipts from sale of marketable Securities - fair value through other comprehensive income
Penerimaan dari surat-surat berharga yang jatuh tempo	63.346.749	11.665.372	Receipts from matured marketable securities
Pembelian surat-surat berharga - nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan pada biaya perolehan diamortisasi	(65.265.930)	(21.294.342)	Purchase of marketable securities - fair value through other comprehensive income and at amortized cost
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali yang jatuh tempo	27.260.447	57.780.679	Receipts from matured marketable securities purchased with agreement to resell
Pembayaran atas surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali	(24.688.295)	(60.352.831)	Payments of marketable securities purchased with agreement to resell

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(ENTITAS INDUK SAJA)
Laporan Arus Kas (lanjutan)
Untuk Tahun yang Berakhir yang Berakhir pada
Tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Angka-angka Disajikan dalam jutaan Rupiah,
Kecuali dinyatakan lain)

PT BANK KB BUKOPIN TBK
(PARENT ONLY)
Statements Of Cash Flow
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(Figures are presented in million Rupiah
unless otherwise stated)

	2024	2023	
Pembelian aset tetap	(49.305)	(45.775)	Purchase of fixed assets
Hasil penjualan aset tetap	23.817	22.395	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian piranti lunak		(150.766)	Purchase of software
Penurunan penyertaan saham	(1.028.809)	1.280.565	Decrease in investment in shares
Kas neto diperoleh dari (digunakan) untuk aktivitas investasi	2.020.917	(10.834.703)	Net cash provided by (used in) investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			**CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES**
Penerimaan dari surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	64.282.780	8.907.903	Receipts from marketable securities sold with agreement to repurchase
Pembayaran atas jatuh tempo surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali	(61.385.463)	(8.907.903)	Payments of matured marketable securities sold with agreement to repurchase
Penerimaan dari pinjaman yang diterima	6.311.135	1.246.361	Proceeds from borrowings
Pembayaran pinjaman yang diterima	(4.205.755)	(724.234)	Payment of borrowings
Penerimaan modal dari Penawaran Umum Terbatas VII	-	8.939.339	Receipts from Limited Public Offering VII
Penerimaan atas global obligasi senior	4.794.662	-	Receipts from senior global bonds issuance
Pembayaran atas penerbitan surat berharga yang diterbitkan	(2.405.000)	-	Payment of subordinated bonds issuance
Kas neto diperoleh dari aktivitas pendanaan	7.392.359	9.461.466	Net cash provided by financing activities
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	**966.057**	**(11.988.218)**	**NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS**
Pengaruh perubahan kurs mata uang asing	(326.679)	(48.240)	Effect of foreign currency exchange rate changes
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**4.016.224**	**16.052.682**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR**
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**4.655.602**	**4.016.224**	**CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR**
Kas dan setara kas terdiri dari:			Cash and cash equivalents consist of:
Kas	330.502	254.501	Cash
Giro pada Bank Indonesia	2.301.999	2.655.765	Current accounts with Bank Indonesia
Giro pada bank lain	428.273	367.341	Current accounts with other banks
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain yang jatuh tempo dalam 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan	1.594.828	738.617	Placements with Bank Indonesia and other banks with original maturities of 3 months or less from acquisition date
Total	**4.655.602**	**4.016.224**	**Total**

1. Laporan Keuangan Tersendiri

Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas Entitas Induk adalah laporan keuangan tersendiri yang merupakan informasi tambahan atas laporan keuangan konsolidasian.

1. Separate Financial Statements

Statements of financial position, statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Parent are separate financial statements which represents additional information to the consolidated financial statements.

2. Daftar Investasi Pada Entitas Anak

2. Schedule Of Investment In Subsidiaries

Nama Entitas/ *Entity Name*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya perolehan 1 Jan. 2024/ *Acquisition Cost Jan. 1, 2024*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Biaya Perolehan 31 Des. 2024/ *Carrying Value Dec. 31, 2024*
		31 Desember/*December 31,* 2024			
PT KB Bukopin Finance	99,24%	791.165	-	(291.098)	500.067
PT Bank KB Bukopin Syariah	95,92%	1.522.000	-	(737.696)	784.304
Total		2.313.165	-	(1.028.794)	1.284.371
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					(106.229)
					1.178.142

Nama Entitas/ *Entity Name*	Persentase Kepemilikan/ *Percentage of Ownership*	Biaya perolehan 1 Jan. 2023/ *Acquisition Cost Jan. 1, 2023*	Penambahan/ *Additions*	Pengurangan/ *Deductions*	Biaya Perolehan 31 Des. 2023/ *Carrying Value Dec. 31, 2023*
		31 Desember/*December 31,* 2023			
PT KB Bukopin Finance	99,24%	190.600	600.565	-	791.165
PT Bank KB Bukopin Syariah	95,92%	842.000	680.000	-	1.522.000
Total		1.032.600	1.280.565	-	2.313.165
Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai *goodwill/ Accumulated amortization and impairment losses of goodwill*					(106.229)
					2.206.936

Annual Report
2024

Strategic Transformation for **Sustainable and Inclusive Growth**

KB Bank

PT Bank KB Bukopin Tbk

Kantor Pusat
Gedung KB Bank
Jl. M.T. Haryono Kav. 50-51 Jakarta Selatan 12770
+6221-7988266, 7989837
corsec@kbbukopin.com

www.kbbukopin.com

kbbukopin